

Sifat Kepribadian dan *Locus of Control* Sebagai Pemoderasi Hubungan Stres Kerja dan Perilaku Disfungsional Audit

NI WAYAN RUSTIARINI*

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract: Auditor personality is an interesting topic in accounting field because this research is still rarely. Several previous researchs about job stress and dysfunctional audit behaviour also have inconsistence results. The purpose of this research is to investigate the influence of job stress on dysfunctional audit behavior. The important purposes in this study are to investigate trait personality, which use The Big Five Personality and locus of control on the relation between job stress and dysfunctional audit behavior. The respondents for this study are auditors who work on public account firms in Bali. Moderated regressions analysis with absolute difference test used to examine the hypotheses. The results showed that job stress have positive effects on dysfunctional audit behavior. Moreover it was determined two traits personality are openness to experience, conscientiousness, external and internal locus of control have significant effect on the relation between job stress and dysfunctional audit behavior, but other traits personality are extraversion, agreeableness, and neuroticism do not have significant effect on the relation between job stress and dysfunctional audit behavior. This indicates that auditor personality is important to reduce the likelihood of dysfunctional audit behavior.

Keywords: Agreeableness, Conscientiousness, Job Stress, Personality.

* Author can be contacted at: rusti_arini@yahoo.co.id

I. Pendahuluan

Sebagai profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, akuntan publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas jasa yang diberikan. Adanya tuntutan kualitas yang tinggi menyebabkan terjadinya stres pada auditor, baik yang bersifat positif maupun negatif. Stres yang positif akan memotivasi auditor untuk meningkatkan kinerja bahkan memberikan kepuasan kerja, sedangkan stres yang negatif justru menyebabkan auditor melakukan perilaku disfungsional yang dapat mengurangi kualitas audit (Fevre *et al.*, 2005). Perilaku ini terjadi ketika auditor merasa tidak mampu beradaptasi dengan situasi dan lingkungan di tempat kerja.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh stres kerja pada perilaku auditor menunjukkan ketidakkonsistenan hasil. Stres kerja menyebabkan terjadinya ketidakpuasan kerja dan menurunkan kinerja (Hayes dan Weathington, 2007; Chen dan Silverthorne, 2008) hingga perilaku yang menyimpang (Lawrence dan Robinson, 2007). Meskipun demikian, stres kerja terkadang sengaja diciptakan untuk memberikan tantangan bagi seseorang agar dapat meningkatkan kinerjanya (Moore, 2000). Chen *et al.* (2006) menyatakan bahwa auditor yang mengalami stres pada tingkat tertentu justru dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Penelitian ini mencoba memberikan titik pandang baru pada hubungan stres kerja dan perilaku auditor dengan memasukkan sifat kepribadian dan *locus of control* sebagai variabel pemoderasi. Perbedaan sifat kepribadian menyebabkan auditor memiliki persepsi yang berbeda atas stres kerja yang dialami. Suatu tugas dapat dirasa sulit bagi seorang auditor, namun tidak bagi auditor yang lain, tergantung karakteristik kepribadian auditor tersebut. Perilaku disfungsional merupakan refleksi dari kepribadian individu atas terjadinya stres kerja yang dikarenakan kompleksitas, tekanan, konflik serta ambiguitas peran. Meskipun demikian, tidak semua hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat kepribadian memiliki pengaruh yang sama

pada perilaku auditor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi temuan penelitian-penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil yang beragam.

Penelitian mengenai sifat kepribadian dan pengaruhnya dalam bidang akuntansi masih jarang dilakukan. Berdasarkan penelusuran pada sejumlah publikasi ilmiah, penelitian yang membahas pengaruh kepribadian menggunakan *The Big Five Personality* dan pengaruhnya terhadap perilaku disfungsional pada kantor akuntan publik di Indonesia tampaknya belum pernah dilakukan, padahal seseorang yang berada dalam profesi akuntansi kemungkinan memberikan respon yang berbeda dibandingkan individu lain yang tidak berkaitan dengan suatu profesi. Peneliti sebelumnya hanya meneliti pengaruh sifat kepribadian pada skeptisme profesional (Noviyanti, 2008) dan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan (Nasution dan Fitriany, 2012). Fenomena ini menjadikan topik ini penting dan menarik untuk diteliti dengan mengambil sampel auditor sebagai bagian dari keanggotaan profesi.

Beberapa peneliti sebelumnya telah mempertimbangkan faktor psikologi seperti sifat kepribadian dan *locus of control* sebagai prediktor pada kinerja dan perilaku auditor. Sifat kepribadian merupakan prediktor atas prestasi kerja (Barrick dan Mount, 2005; Griffin dan Hesketh, 2004), serta perilaku disfungsional di tempat kerja (Donnelly *et al.*, 2003; Farhadi *et al.*, 2011). Hasil penelitian Harini *et al.* (2010) menunjukkan bahwa *locus of control* eksternal berpengaruh pada perilaku disfungsional audit. Namun penelitian Maryanti (2005) menunjukkan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh pada kinerja auditor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui (1) pengaruh stres kerja pada perilaku disfungsional audit; (2) pengaruh sifat kepribadian, yaitu *openness to experience*, *conscientiousness*, *extraversion*, *agreeableness*, dan *neuroticism* pada hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit; serta (3) pengaruh *locus of control* pada hubungan stres kerja dengan perilaku disfungsional audit. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman mengenai hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit, serta

pengaruh sifat kepribadian dan *locus of control* pada hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit, khususnya untuk kantor akuntan publik di Bali.

II. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Setiap perilaku seseorang tentunya didasari berbagai penyebab atau motif yang melandasi terjadinya perilaku tersebut. Berbagai penjelasan mengenai penyebab atau motif ini dijelaskan menggunakan Teori Atribusi (Gibson *et al.*, 1996). Teori ini mendeskripsikan cara-cara penilaian perilaku seseorang baik yang berasal dari internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Teori ini juga menunjukkan bahwa kinerja yang diharapkan di masa mendatang disebabkan oleh penyebab kesuksesan maupun kegagalan pada pelaksanaan tugas sebelumnya. Teori ini digunakan untuk menilai atribusi perilaku eksternal auditor dalam kaitannya dengan stres kerja, sifat kepribadian, dan *locus of control* seorang auditor.

Teori Kepribadian (*Personality Theory*)

Teori kepribadian merupakan suatu cabang dari ilmu psikologi yang menitikberatkan adanya hubungan sifat individu seseorang dan proses perkembangan psikologisnya, menginvestigasi berbagai perbedaan antara individu yang satu dengan individu lainnya, serta dan menginvestigasi sifat manusia dalam berperilaku (Boeree, 1997 dalam Lindrianasari *et al.*, 2012). Teori kepribadian digunakan untuk menjelaskan pengaruh sifat kepribadian pada hubungan stres kerja dengan perilaku disfungsional audit.

Pengaruh Stres Kerja pada Perilaku Disfungsional Audit

Stres kerja (*job stress*) diartikan sebagai berbagai faktor di tempat kerja yang dianggap dapat menimbulkan ancaman bagi individu (Bridger *et al.*, 2007). Stres kerja yang berlebihan menyebabkan terjadinya gangguan stabilitas emosional individu sehingga mengarah pada tidak

terkontrolnya perilaku individu (Lawrence dan Robinson, 2007). Stres juga terjadi ketika individu secara fisik dan emosional tidak dapat menangani tuntutan di tempat kerja yang melampaui kemampuan mereka dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, serta tidak mampu beradaptasi dengan situasi dan lingkungannya (Ugoji dan Isele, 2009).

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa stres kerja berhubungan dengan perilaku disfungsional audit di tempat kerja. Donnelly *et al.* (2003) menyatakan bahwa sikap auditor yang menerima perilaku disfungsional merupakan indikator adanya perilaku disfungsional aktual. Perilaku ini bisa mempengaruhi kualitas audit baik secara langsung atau tidak langsung. Perilaku yang mempunyai pengaruh langsung adalah *premature sign off* dan *replacing audit procedures*, sementara perilaku yang tidak langsung mempengaruhi adalah *underreporting of time*. Meskipun demikian, pengaruh stres kerja pada perilaku auditor menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil. Stres kerja terkadang sengaja diciptakan untuk memberikan suatu tantangan bagi seseorang agar dapat meningkatkan kinerjanya (Moore, 2000). Chen *et al.* (2006) menyatakan bahwa auditor yang mengalami stres pada tingkat tertentu justru dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Stres kerja berpengaruh positif pada perilaku disfungsional audit.*

Pengaruh Sifat Kepribadian pada Hubungan Stres Kerja dan Perilaku Disfungsional Audit

Penilaian atas sifat kepribadian sering digunakan sebagai prediktor kinerja dan perilaku seseorang. Sifat merupakan pondasi dasar kepribadian individu yang melandasi pemikiran, perasaan, dan perilaku seseorang (Barrick dan Mount, 2005). Konsep sifat kepribadian yang sering digunakan adalah *The Big Five Personality* atau *The Big Five Inventory* (McCrae dan Costa, 1987). Model ini menggambarkan karakteristik individu yang menonjolkan ciri-ciri

suatu kepribadian (Barrick dan Mount, 2005), diterapkan pada budaya yang berbeda serta dari waktu ke waktu (Hampson dan Goldberg, 2006). Konsep ini membagi kepribadian menjadi lima dimensi yaitu *openness to experience*, *conscientiousness*, *extraversion*, *agreeableness*, dan *neuroticism*.

Sifat kepribadian *openness to experience* atau kepribadian “O” memiliki sifat ingin tahu, berwawasan luas, imajinatif, terbuka dengan berbagai cara-cara baru (Goldberg, 1990). Kepribadian ini mampu mengatasi masalah dalam waktu singkat, informasi terbatas, dan ketidakpastian yang tinggi (McAdams dan Pals, 2006; Denissen dan Penke, 2008), yang disebabkan memiliki banyak ide cemerlang (Ashton dan Lee, 2007). Meskipun demikian, Griffin dan Hesketh (2004) menyatakan bahwa kepribadian ini berpengaruh pada prestasi kerja hanya dalam kondisi tertentu. Jaffar *et al.* (2011) menemukan bahwa kepribadian ini tidak berpengaruh pada kemampuan untuk mendeteksi kecurangan, serta berpengaruh negatif pada kinerja (Kraus, 2002). Peneliti menduga bahwa auditor dengan kepribadian “O” yang tinggi akan mampu mengatasi stres kerja dikarenakan auditor memiliki inovasi, kecerdasan, dan teknik-teknik baru dalam memecahkan sehingga mengurangi peluang terjadinya perilaku disfungsional. Dengan demikian hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2a: *Openness to experience memperlemah hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit.*

Sifat kepribadian *conscientiousness* atau kepribadian “C” ditandai oleh sifat-sifat seperti dapat diandalkan, rajin, disiplin, memiliki kompetensi dan tanggung jawab (Goldberg, 1990). Auditor dengan kepribadian “C” yang tinggi memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja (Zimmerman, 2008), berorientasi pada tugas (Ashton and Lee, 2007), dan berorientasi pada karir jangka panjang (Nettle, 2006). Studi menunjukkan *conscientiousness* berhubungan negatif dengan perilaku menyimpang dalam organisasi (Farhadi *et al.*, 2011). Hasil berbeda

ditunjukkan Robertson *et al.* (2000) yang menemukan bahwa kepribadian “C” tidak berpengaruh pada kinerja dan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan (Jaffar *et al.*, 2011). Atas karakteristik yang melekat pada kepribadian “C” tersebut, peneliti menduga bahwa auditor memiliki tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas meskipun mengalami stres pekerjaan, serta mempertimbangkan untuk tidak melakukan perilaku menyimpang karena berorientasi pada keberhasilan karir untuk jangka panjang. Dengan demikian dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2b: *Conscientiousness memperlemah hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit.*

Seseorang auditor yang memiliki sifat kepribadian *extraversion* atau kepribadian “E” yang tinggi akan cenderung memiliki sifat banyak bicara, energik, semangat, memiliki emosi yang positif, menyukai tantangan, mudah bergaul, serta cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Judge *et al.*, 2002). Sifat kepribadian ini sangat mendukung profesi akuntan publik karena dewasa ini profesi auditor dituntut untuk mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara personal dengan tim kerja selama melakukan penugasan audit (Briggs *et al.*, 2007). Studi literatur menunjukkan bahwa *extraversion* tidak berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Jaffar *et al.*, 2011) dan tidak berpengaruh pada prestasi kerja (Kraus, 2002). Penelitian ini menduga bahwa auditor yang memiliki kepribadian “E” yang tinggi akan menganggap stres kerja yang timbul merupakan suatu tantangan baru yang dapat mengeksplorasi kemampuan mereka. Adanya suatu energi dan emosi yang positif ini tentunya dapat mengurangi peluang terjadinya perilaku disfungsional dalam audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2c: *Extraversion memperlemah hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit.*

Sifat kepribadian *agreeableness* atau kepribadian “A” digambarkan sebagai pribadi yang menyenangkan, memiliki rasa toleransi dan memaafkan yang tinggi, perhatian, serta kooperatif (Goldberg, 1990). *Agreeableness* identik dengan penciptaan hubungan baik dengan meminimalkan konflik interpersonal, memelihara kerjasama, dan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan konflik (Graziano dan Tobin, 2002). Hasil penelitian Skyrme *et al.* (2005) menunjukkan bahwa kepribadian ini berpengaruh positif pada kinerja dan berpengaruh negatif pada perilaku kontraproduktif dalam organisasi (Farhadi *et al.*, 2012). Meskipun demikian, Barrick dan Mount (1991) menunjukkan bahwa *agreeableness* berpengaruh negatif pada kinerja auditor. Dalam penelitian ini, peneliti menduga bahwa auditor yang berkepribadian “A” lebih kooperatif dalam melaksanakan penugasan meskipun mengalami stres kerja yang tinggi. Selain itu, kemungkinan auditor untuk melakukan penyimpangan perilaku sangat kecil mengingat auditor tidak menginginkan terjadinya konflik baik dengan rekan kerja, atasan, maupun klien. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2d: *Agreeableness* memperlemah hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit.

Seseorang yang memiliki sifat kepribadian *neuroticism* atau kepribadian “N” sering merasa tertekan, ketegangan, kekhawatiran, murung, sedih, mudah gelisah dan depresi. Dapat dikatakan bahwa *neuroticism* memiliki nilai tertinggi untuk sifat yang tidak dikehendaki (Lindrianasari *et al.*, 2012). Seseorang yang memiliki kepribadian ini cenderung kaku atas tanggung jawab terhadap partner kerja ketika ingin mencapai satu tujuan (Holmes, 2002) serta keinginan untuk mendominasi (Lieshout, 2000). Adanya memiliki emosi tidak stabil menyebabkan kepribadian ini kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hasil penelitian yang tidak konsisten menunjukkan bahwa sifat *neuroticism* berhubungan negatif dengan kepuasan kerja (Judge *et al.*, 2002), namun Skyrme *et al.* (2005) menemukan bahwa *neuroticism* berhubungan positif pada prestasi kerja. Hasil penelitian ini didukung oleh Jaffar

et al. (2011) yang menemukan bahwa sifat *neuroticism* yang tinggi berpengaruh positif pada kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini menduga bahwa auditor yang memiliki kepribadian *neoriticism* yang tinggi lebih cepat merasa ketegangan, kecemasan dan depresi apabila mengalami stres kerja yang tinggi sehingga menimbulkan pemikiran negatif yang mengarah pada penyimpangan perilaku audit. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2e: *Neoriticism memperkuat hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit.*

Pengaruh *Locus of Control* pada Hubungan Stres Kerja dengan Perilaku Disfungsional Audit

Konsep awal *locus of control* (pusat kendali) diperkenalkan oleh Rotter (1966) yang menguraikan bahwa setiap orang memiliki kendali atas berbagai faktor yang terjadi dalam kehidupan. *Locus of control* dibedakan menjadi internal *locus of control* dan eksternal *locus of control*. Seseorang yang memiliki internal *locus of control* memandang bahwa segala sesuatu yang dialami disebabkan kendali atau tindakan dirinya sendiri, sedangkan individu yang memiliki eksternal *locus of control* menganggap bahwa segala sesuatu yang dialami disebabkan oleh kendali faktor eksternal seperti nasib dan keberuntungan (Aube *et al.*, 2007).

Individu dengan internal *locus of control* lebih menyukai pekerjaan yang menantang, menuntut kreativitas, kompleksitas, inisiatif, dan motivasi yang tinggi. Individu dengan eksternal *locus of control* menyukai pekerjaan yang stabil, rutin, sederhana, dan penuh kontrol dari atasan. Patten (2005) menyatakan bahwa individu dengan internal *locus of control* memiliki kinerja lebih baik daripada eksternal *locus of control*. Dapat dikatakan bahwa auditor dengan eksternal *locus of control* dapat mengatasi stres kerja sehingga mengurangi perilaku disfungsional audit. Kartika dan Wijayanti (2007) menyatakan bahwa *locus of control* eksternal

memiliki pengaruh negatif pada hubungan kinerja, namun berpengaruh positif pada perilaku disfungsional audit (Donnelly *et al.*, 2003; Harini *et al.*, 2010).

Penelitian ini menduga bahwa auditor yang mempunyai *locus of control* internal yang tinggi menganggap stres kerja sebagai suatu tantangan untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu auditor memiliki kendali yang tinggi atas kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku audit di tempat kerja. Namun tidak demikian halnya dengan auditor yang memiliki kepribadian *locus of control* eksternal yang tinggi. Auditor yang memiliki kepribadian ini menganggap bahwa stres kerja merupakan faktor diluar kendali auditor tersebut sehingga berpengaruh memperkuat kemungkinan terjadinya perilaku disfungsional audit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3a: *Locus of control internal memperlemah hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit.*

H3b: *Locus of control eksternal memperkuat hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit.*

III. Metode Riset

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada sepuluh kantor akuntan publik (KAP) di Bali sesuai Direktori Kantor Akuntan Publik yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu antara lain merupakan staf audit baik staf audit junior maupun staf audit senior, serta telah bekerja di KAP minimal 1 tahun.

Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu setiap KAP didatangi secara langsung dan diberikan kuisisioner sesuai dengan jumlah auditor yang ada pada masing-masing KAP. Jumlah kuisisioner yang disebarkan sebanyak 69 kuisisioner dan sebanyak 52 kuisisioner yang kembali atau tingkat pengembalian responden (*response rate*) sebesar 75,36% dari total

kuisisioner yang disebarkan. Dari 52 kuisisioner yang kembali, terdapat 1 orang responden yang tidak mengisi secara lengkap sehingga jumlah kuisisioner yang dapat diolah lebih lanjut dalam penelitian ini adalah 51 kuisisioner atau sebesar 98,08%. Adapun rincian jumlah sampel dan tingkat pengembaliannya disajikan pada Tabel 1.

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah perilaku disfungsional audit sebagai variabel dependen, stres kerja sebagai variabel independen, dan sifat kepribadian yaitu *openness*, *conscientiousness*, *extraversion*, *agreeableness*, dan *neuroticism*, serta *locus of control* sebagai variabel pemoderasi. Adapun definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

a. Perilaku Disfungsional Audit (*Dysfunctional Audit Behaviour*)

Perilaku disfungsional audit merupakan reaksi auditor terhadap lingkungan (Donnelly *et al.*, 2003). Beberapa perilaku yang termasuk dalam perilaku disfungsional audit yaitu penghentian prematur atas prosedur audit (*premature sign-off*), penyelesaian pekerjaan tanpa melaporkan waktu sesungguhnya yang digunakan (*under reporting time*), dan penggantian prosedur audit yang telah ditetapkan (*altering or replacement of audit procedure*). Variabel ini diukur menggunakan 12 item pertanyaan atas penerimaan auditor terhadap berbagai bentuk perilaku disfungsional yang diadopsi dari Donnelly *et al.* (2003).

b. Stres Kerja (*Job Stress*)

Stres kerja diartikan sebagai berbagai faktor di tempat kerja yang dianggap menimbulkan ancaman bagi individu (Bridger *et al.*, 2007). Variabel ini diukur menggunakan 4 item pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Beehr *et al.* (1976).

c. Sifat Kepribadian (*Traits Personality*)

Variabel sifat kepribadian auditor diukur menggunakan *The Big Five Personality Personality* yang terdiri dari 5 dimensi yaitu *openness*, *conscientiousness*, *extraversion*, *agreeableness*, dan *neuroticism*. Pengukuran dimensi kepribadian menggunakan 44 item

pernyataan yang diadaptasi dari penelitian McCrae dan Costa (1987). Jumlah pernyataan yang diberikan adalah 10 item untuk *openness*, 9 item untuk variabel *conscientiousness*, 8 item untuk *extraversion*, 9 item untuk *agreeableness*, dan 8 item untuk *neuroticism*.

d. Locus of Control

Locus of control adalah suatu keyakinan individu atas berbagai faktor yang terjadi dalam kehidupan (Rotter, 1966). *Locus of control* internal dan eksternal diukur menggunakan skala yang dikembangkan oleh Spector (1988). Kuisisioner terdiri dari 16 pertanyaan untuk *locus of control*. Butir pertanyaan yang memiliki skor tinggi mengindikasikan *locus of control* internal sedangkan skor yang rendah mengindikasikan *locus of control* eksternal.

Sebelum dilakukan analisis atas data yang dikumpulkan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas atas instrumen yang digunakan. Uji validitas menggunakan *Pearson Correlation* mengkorelasikan skor tiap butir pertanyaan dengan skor total yang merupakan jumlah korelasi. Variabel dikatakan valid apabila memiliki koefisien korelasi positif lebih besar dari 0,3 (Sugiyono, 2010) atau signifikansi lebih kecil dari 0,05, sedangkan variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011).

Teknik analisis data menggunakan *Moderated Regression Analysis*, yang sebelumnya telah dilakukan pengujian normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dengan koefisien *Asymp. Sig* lebih besar dari 0,05. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas digunakan nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 . Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual dengan variabel bebas yang digunakan. Jika memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan variabel pemoderasi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Model regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel

pemoderasi adalah uji nilai selisih mutlak. Menurut Frucot dan Shearon (1991) dalam Jogyanto (2007), model interaksi seperti ini lebih disukai karena dapat mengurangi masalah multikolinearitas tanpa mengurangi pengaruh terhadap variabel terikat. Pada pengujian ini, nilai variabel bebas dan pemoderasi merupakan *standardized score*. Interaksi variabel bebas dan variabel pemoderasi diukur dengan nilai absolut perbedaan antara kedua variabel tersebut atau menggunakan nilai selisih mutlak (Ghozali, 2011). Berikut merupakan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 Z_{JobStr} + \beta_2 AbsJob_O + \beta_3 AbsJob_C + \beta_4 AbsJob_E + \beta_5 AbsJob_A + \beta_6 AbsJob_N + \beta_7 AbsJob_Int + \beta_8 AbsJob_Eks.....(1)$$

Keterangan:

- Y = Perilaku disfungsional audit
- α = konstanta
- $\beta_1 - \beta_8$ = koefisien regresi
- ZJobStr = *standardize* stres kerja
- AbsJob_O = |ZJobStr - ZO|
- AbsJob_C = |ZJobStr - ZC|
- AbsJob_E = |ZJobStr - ZE|
- AbsJob_A = |ZJobStr - ZA|
- AbsJob_N = |ZJobStr - ZN|
- AbsJob_Int = |ZJobStr - ZInt|
- AbsJob_Eks = |ZJobStr - ZEks|
- e = *error term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

IV. Hasil Penelitian

Profil responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan usia, pendidikan, dan masa kerja auditor. Karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan sebesar 27,45%



responden berada pada usia ≤ 25 tahun, sebesar 52,94% responden berada pada usia 26-35 tahun, dan sebesar 19,61% responden berada pada usia > 35 tahun. Sebagian besar responden berlatarbelakang pendidikan S1 yaitu sebesar 76,47%, berpendidikan S2-S3 sebesar 15,69%, dan diploma sebesar 7,84%. Berdasarkan masa kerja responden, sebesar 78,43% responden memiliki masa kerja 1-10 tahun dan sebesar 21,57% memiliki masa kerja > 10 tahun..

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi item-total variabel lebih besar dari 0,3 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,70. Hasil analisis deskriptif atas variabel stres kerja, *openness to experience*, *conscientiousness*, *extraversion*, *agreeableness*, *neuroticism*, serta eksternal dan internal *locus of control* menunjukkan nilai tertinggi adalah *openness to experience* dan nilai terendah adalah internal *locus of control*. Data ini menunjukkan bahwa auditor yang menjadi responden dalam penelitian ini cenderung memiliki sifat ingin tahu, berwawasan luas, imajinatif, terbuka dengan berbagai cara-cara baru.

Pengujian normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0.879 yang berarti bahwa data yang digunakan telah berdistribusi normal. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi. Hasil uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi semua variabel diatas 0,05 sehingga dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai koefisien korelasi pada Tabel 3 sebesar 0.969 menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 96,9%. Hal ini berarti bahwa variabel perilaku disfungsional audit memiliki hubungan yang kuat dengan variabel stres kerja, variabel interaksi stres kerja dengan *openness to experience*, *conscientiousness*, *extraversion*, *agreeableness*, *neuroticism*, serta variabel

interaksi stres kerja dengan eksternal dan internal *locus of control*. Nilai *Adjusted R Square* menunjukkan nilai 0.927 yang berarti bahwa sebesar 92,71% variabel perilaku disfungsi audit dapat dijelaskan oleh variabel stres kerja, variabel interaksi stres kerja dengan *openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism*, serta variabel interaksi stres kerja dengan eksternal dan internal *locus of control*, sedangkan sisanya sebesar 7,29% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hasil uji F yang ditampilkan pada Tabel 3 menunjukkan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti variabel stres kerja, variabel interaksi stres kerja dengan *openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism*, serta variabel interaksi stres kerja dengan eksternal dan internal *locus of control* secara bersama-sama berpengaruh pada perilaku disfungsi audit. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel stres kerja, variabel interaksi stres kerja dan *openness to experience, conscientiousness*, serta variabel interaksi stres kerja dengan eksternal dan internal *locus of control* berpengaruh pada perilaku disfungsi audit. Sisanya yaitu variabel interaksi stress kerja dan *extraversion, agreeableness, neuroticism* tidak berpengaruh pada perilaku disfungsi audit.

Hasil uji statistik pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel stres kerja berpengaruh positif pada perilaku disfungsi audit dengan signifikansi sebesar 0,046, yang berarti bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketatnya persaingan usaha jasa audit serta semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas pemberian jasa audit yang berkualitas menyebabkan terjadinya stres di tempat kerja. Kondisi ini terjadi ketika individu secara fisik dan emosional tidak dapat menangani tuntutan di tempat kerja yang melampaui kemampuan mereka dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, serta tidak mampu beradaptasi dengan situasi dan lingkungannya. Adanya gangguan stabilitas emosional tersebut mengarah pada tidak terkontrolnya perilaku individu yang berakibat pada terjadinya perilaku disfungsi audit yang berpengaruh pada penurunan kualitas audit baik secara

langsung atau tidak langsung. Hasil ini mendukung penelitian Donnelly *et al.* (2003) dan Lawrence dan Robinson (2007) yang menyatakan bahwa stres kerja berhubungan positif dengan perilaku disfungsional audit di tempat kerja.

Hasil interaksi variabel stres kerja dan *openness to experience* menunjukkan arah negatif dengan signifikansi sebesar 0,001, yang berarti bahwa *openness to experience* memperlemah hubungan antara stres kerja dan perilaku disfungsional audit. Auditor yang memiliki sifat kepribadian “O” yang tinggi memiliki sifat ingin tahu, berwawasan luas, imajinatif, terbuka dengan berbagai cara-cara baru. Kepribadian seperti ini mampu mengatasi masalah dalam waktu singkat, informasi terbatas, dan ketidakpastian yang tinggi. Auditor mampu mengatasi stres kerja dikarenakan auditor memiliki inovasi, kecerdasan, dan teknik-teknik baru dalam memecahkan sehingga mengurangi peluang terjadinya perilaku disfungsional audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh McAdams dan Pals (2006) dan Denissen dan Penke (2008). Dapat disimpulkan bahwa sifat kepribadian *openness to experience* memperlemah hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit.

Pengujian atas interaksi variabel stres kerja dan *conscientiousness* menunjukkan pengaruh negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,039. Kepribadian “C” ditandai dengan sifat dapat diandalkan, rajin, disiplin, memiliki kompetensi dan tanggung jawab. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Zimmerman (2008) yang menyatakan bahwa seseorang dengan kepribadian ini memiliki motivasi kuat untuk mencapai kesuksesan. Auditor biasanya lebih terorganisasi, sistematis, serta memiliki perencanaan kerja yang baik, bahkan cenderung semakin terlibat dalam pekerjaan. Meskipun mengalami stres kerja, auditor tetap berorientasi pada tugas dan tidak melakukan perilaku disfungsional mengingat auditor dengan kepribadian ini ingin meraih kesuksesan karir dalam jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa sifat kepribadian *conscientiousness* memperlemah hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional.

Interaksi antara variabel stres kerja dan *extraversion* memiliki arah positif dengan signifikansi sebesar 0,106, yang berarti variabel interaksi ini tidak mempengaruhi hubungan stres kerja dan perilaku disfungsi audit. Sifat kepribadian *extraversion* cenderung memiliki sifat banyak bicara dan mudah bergaul. Hal menarik pada orang-orang “E” adalah sering menemukan kebahagiaan di tempat kerja yang disebabkan keberhasilan dalam membangun hubungan baik dan kemudahan beradaptasi dengan orang-orang disekitarnya (Lindrianasari *et al.* 2012). Namun individu tipe “E” tidak selalu merasa bahagia pada semua pekerjaan, terutama pekerjaan yang memiliki intensitas kerja tinggi, yang akhirnya merampas waktu yang digunakan untuk berinteraksi sosial. Tekanan kerja yang tinggi menyebabkan auditor dengan kepribadian ini merasa lebih banyak menghabiskan waktu bersama pekerjaan dibandingkan berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kraus (2002) dan Jaffar *et al.* (2011) yang menemukan bahwa *extraversion* tidak berpengaruh pada prestasi kerja dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa *extraversion* memperlemah hubungan stres kerja dan perilaku disfungsi audit tidak dapat diterima.

Hasil pengujian interaksi variabel stres kerja dan *agreeableness* memiliki arah positif dan signifikan dengan nilai 0,023. Hasil ini menolak hipotesis karena memperkuat hubungan stres kerja dan perilaku disfungsi audit. Setiap individu yang mengalami stres kerja memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku disfungsi, begitu pula akuntan publik. Auditor yang memiliki sifat *agreeableness* cenderung memberikan toleransi yang tinggi pada rekan seprofesi yang memiliki perilaku menyimpang atau kontraproduktif dalam organisasi. Auditor dengan sifat *agreeableness* identik dengan keinginan untuk memelihara kerjasama dan meminimalkan konflik interpersonal sehingga kondisi ini justru memperkuat hubungan stres kerja dan perilaku disfungsi. Hasil penelitian ini mendukung Barrick dan Mount (1991) yang menemukan bahwa *agreeableness* berpengaruh negatif pada kinerja auditor.

Hasil pengujian interaksi variabel stres kerja dan *neoriticism* berpengaruh positif dengan signifikansi sebesar 0,194 yang berarti bahwa kepribadian *neoriticism* tidak mempengaruhi hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit. Seseorang yang memiliki sifat kepribadian *neoriticism* sering merasa tertekan dan ketegangan yang mengarah pada perilaku disfungsional audit. Meskipun demikian, sifat *neoriticism* tidak sepenuhnya menyebabkan terjadinya perilaku audit yang menyimpang. Dalam kondisi stres kerja, individu dengan kepribadian ini justru dapat mendominasi penyelesaian suatu pekerjaan serta cenderung kaku atas tanggung jawab audit terhadap partner kerja. Adanya perilaku positif tersebut disebabkan karena auditor ingin mencapai satu tujuan dan kinerja yang lebih baik.

Interaksi antara variabel stres kerja dan internal *locus of control* menunjukkan arah negatif dan nilai signifikansi sebesar 0,002, yang berarti bahwa *locus of control* internal memperlemah hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit. Individu dengan internal *locus of control* yang tinggi menyukai pekerjaan yang menantang dan kompleks. Jadi auditor dengan *locus of control* internal yang tinggi menganggap stres kerja sebagai suatu tantangan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mengarahkan auditor untuk berperilaku yang positif.

Interaksi antara variabel stres kerja dan eksternal *locus of control* menunjukkan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Individu yang memiliki eksternal *locus of control* yang tinggi menganggap bahwa segala sesuatu yang dialami disebabkan oleh nasib dan keberuntungan. Auditor dengan eksternal *locus of control* yang tinggi menyukai pekerjaan yang stabil, rutin, sederhana, dan penuh kontrol dari atasan. Oleh karena itu auditor dengan kepribadian ini menganggap bahwa stres kerja merupakan faktor diluar kendali auditor sehingga memperbesar peluang terjadinya perilaku disfungsional audit.

V. Simpulan, Implikasi, dan Keterbatasan

Dewasa ini sifat kepribadian auditor semakin sering menjadi fokus perhatian praktisi maupun akademisi dalam bidang akuntansi. Namun demikian, perhatian tersebut tidak selalu diimbangi dengan peningkatan jumlah penelitian yang membahas topik tersebut sehingga topik kepribadian ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti secara lebih mendalam.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, secara umum sifat kepribadian dan *locus of control* yang diposisikan sebagai variabel pemoderasi mendukung teori yang ada. Sifat kepribadian *openness to experience* dan *conscientiousness*, serta eksternal dan internal *locus of control* memiliki kemampuan untuk memperlemah hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit yang terjadi dalam penugasan audit. Meskipun demikian, sifat kepribadian *extraversion*, *agreeableness*, dan *neuroticism* tidak memiliki peran pada hubungan stres kerja dan perilaku disfungsional audit. Pengujian atas pengaruh variabel stres kerja dan perilaku disfungsional juga sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan. Kondisi ini telah sesuai dengan hasil yang diharapkan sekaligus memberikan bukti empiris untuk mengkonfirmasi temuan penelitian-penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil yang beragam.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti IAI dalam merumuskan kebijakan dan standar untuk menyempurnakan pedoman pelaksanaan kerja bagi auditor. Selain itu agar selalu mempertimbangkan karakteristik individual seperti sifat kepribadian dan *locus of control* dalam pemberian penugasan sehingga tidak mengarah pada terjadinya perilaku menyimpang dalam organisasi.

Penelitian yang dilakukan ini tidak dapat terlepas dari beberapa keterbatasan. Berikut merupakan beberapa keterbatasan dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang melekat dikarenakan penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuisioner, yaitu kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dan responden karena responden dan peneliti tidak dapat saling

- mengklarifikasi pertanyaan atau pernyataan. Oleh karena itu penelitian tentunya menjadi lebih representatif apabila mengkombinasikan dengan metode wawancara sehingga persepsi responden atas pertanyaan atau pernyataan dapat diketahui secara mendalam.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di wilayah Bali yang terdiri dari 10 kantor akuntan publik. Dengan demikian, hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh eksternal auditor di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan sampel yang sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
 3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel stres kerja, sifat kepribadian dan *locus of control* untuk mengetahui pengaruhnya pada perilaku disfungsional audit. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan variabel lain komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, keyakinan diri, kepuasan kerja, dan lain sebagainya.
 4. Penelitian ini menggunakan variabel sifat kepribadian auditor yang diukur menggunakan *The Big Five Personality* yang dikembangkan oleh McCrae dan Costa (1987). Penelitian selanjutnya dapat menggunakan tipe kepribadian lain seperti *Myers-Briggs Type Indicator* (MBTI) sehingga dapat memperkaya hasil penelitian mengenai sifat kepribadian auditor.

Daftar Referensi

- Ashton, M. C., dan Lee, K. 2007. Empirical, Theoretical, and Practical Advantages of the HEXACO Model of Personality Structure. *Personality and Social Psychology Review* 11: 150-166.
- Aube, C., Rousseau, V., dan Morin, E.M. 2007. Perceived Organizational Support and Organizational Commitment-The Moderating Effect of Locus of Control and Work Autonomy. *Journal of Managerial Psychology* 22(5): 479-495.
- Barrick, Murray R. dan Michael K. Mount. 1991. The Big-Five Personality Dimensions and Job Performance: A Meta-Analysis. *Personnel Psychology* 44 (1): 1-26.
- Barrick, M.B. dan Mount, M.K. 2005. Yes, Personality Matters: Moving on to More Important Matters. *Human Performance* 18 (4): 359-72.
- Beehr, T. A, J. T. Walsh, dan T. D. Taber. 1976. Relationship of Stress to Individually and Organizationally Values States: Higher Order Needs as a Moderator. *Journal of Applied Psychology* 61: 41-47

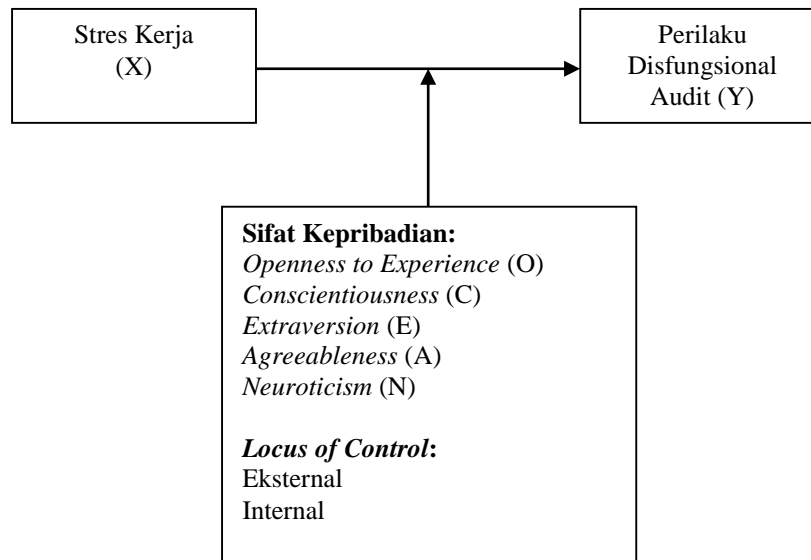
- Bridger, R. S., Kilminster, S., dan Slaven, G. 2007. Occupational Stress and Strain in the Naval Service: *Occupational Medicine* 57: 92-97
- Briggs, S.P., Copeland, S., dan Haynes, D. 2007. Accountants for the 21st Century, Where Are You? A Five-Year Study of Accounting Students Personality Preferences. *Critical Perspectives on Accounting* 18: 511-537.
- Chen, Jui-Chen., Colin Silverthorne, dan Jung-Yao Hung. 2006. Organization Communication, Job Stress, Organizational Commitment, and Job Performance of Accounting Professionals in Taiwan and America. *Leadership and Organization Development Journal* 27 (4): 242-249.
- Chen, Jui-Chen., dan Colin Silverthorne. 2008. The Impact of Locus of Control on Job Stress, Job Performance and Job Satisfaction in Taiwan. *Leadership and Organization Development Journal* 29 (7): 572-582.
- Denissen, J. J. A. dan Penke, L. 2008. Motivational Individual Reaction Norms Underlying the Five-Factor Model of Personality: First Steps toward A Theory-Based Conceptual Framework. *Journal of Research in Personality* 42: 1285-1302.
- Donnelly, David P., Jeffrey J. Quirin, dan David O'Bryan. 2003. Auditor Acceptance of Dysfunctional Audit Behavior: An Explanatory Model Using Auditor's Personal Characteristics. *Journal of Behavioral Research in Accounting* 15 (4): 87-110.
- Farhadi H, Fatimah O, Nasir R dan Wan Shahrazad. 2011. Agreeableness and Conscientiousness as Antecedents of Deviant Behaviour in Workplace. *Asian Social Science* 8 (9): 2-7.
- Fevre, M.L., Matheny, J., dan Kolt, G. S. 2003. Eustress, Distress and Interpretation in Occupational Stress. *Journal of Managerial Psychology* 18 (7): 726-744.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly, Jr. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur, dan Proses*. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga. Jilid 1
- Goldberg, L. R. 1990. An Alternative Description of Personality: The Big Five Factor Structure. *Journal of Personality and Social Psychology* 59 (6): 1216-1229.
- Graziano, W. G., dan Tobin, R. M. 2002. Agreeableness: Dimension of Personality or Social Desirability Artifact? *Journal of Personality* 70: 696-727.
- Griffin, B. dan Hesketh, B. 2004. Why Openness to Experience is Not a Good Predictor of Job Performance. *International Journal of Selection and Assessment* 12 (3): 243-51.
- Hampson, S.E. dan Goldberg, L.R. 2006. A First Large Cohort Study of Personality Trait Stability over the 40 Years between Elementary School and Midlife. *Journal of Personality and Social Psychology* 91 (4): 763-79.
- Harini, Dwi, Agus Wahyudin, dan Indah Anisykurhillah. 2010. Analisis Penerimaan Auditor atas Dysfunctional Audit Behaviour: Sebuah Pendekatan Karakteristik Personal Auditor. *Proceeding. SNA XV Purwokerto*.
- Hayes, C.T., dan Weathington, B.L. 2007. Optimism, Stress, Life Satisfaction, and Job Burnout in Restaurant Managers. *The Journal of Psychology*, 141 (6): 565-579.
- Holmes, J. G. 2002. Interpersonal Expectations as the Building Blocks of Social Cognition: an Interdependence Theory Perspective. *Personal Relationships* 9: 1-26.
- Jaffar, Nahariah, Arfah Salleh dan Takiah Mohd Iskandar. 2011. Fraud Risk Assessment and Detection Fraud: The Moderating Effect of Personality. *International Journal of Business and Management* 6 (7): 40-50.
- Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. FE-UGM: BPFE Yogyakarta.

- Judge, T.A., Heller, D. dan Mount, M.K. 2002. Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: A Meta-Analysis. *Journal of Applied Psychology* 87: 530-541.
- Kartika, Indri dan Provita Wijayanti. 2007. Locus of Control sebagai Antecedent Hubungan Kinerja Pegawai dan Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit. *Proceeding. SNA X Makassar*.
- Kraus, E. 2002. Personality and Job Performance: The Mediating Roles of Leader-Member Exchange Quality and Action Control. *Doctoral Dissertation*. Florida International University.
- Lawrence, T. B., dan Robinson, S. L. 2007. Ain't Misbehaving: Workplace Deviance as Organizational Resistance. *Journal of Management* 33 (3): 378-394.
- Lieshout, Van C. F. M. 2000. Lifespan Personality Development: Self-Organising Goal-Oriented Agents and Developmental Outcome. *International Journal of Behavioral Development* 24: 276-288.
- Lindrianasari, Jogiyanto, Supriyadi, dan Setiyono Miharjo. 2012. Kepribadian sebagai Pemoderasi Hubungan Persepsi CEO atas Kompensasi yang Diterima pada Keinginan CEO untuk Keluar Perusahaan Secara Sukarela. *Proceeding. SNA XV Banjarmasin*.
- Maryanti, P. 2005. Analisis Penerimaan Auditor atas Disfungsional Audit Behavior: Pendekatan Karakteristik Personal Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jawa). *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi* 5 (2).
- McAdams, D. P., dan Pals, J. L. 2006. A New Big Five: Fundamental Principles for an Integrative Science of Personality. *American Psychologist* 61: 204-217.
- Moore, J. 2000. One Road to Turnover: an Examination of Work Exhaustion in Technology Professionals. *MIS Quarterly* 24: 141-157.
- Nasution, Hafifah dan Fitriany. 2012. Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit dan Tipe Kepribadian terhadap Skeptisme Profesional dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Proceeding. SNA XV Banjarmasin*.
- Nettle, D. 2006. The Evolution of Personality Variation in Humans and Other Animals. *American Psychologist* 61:622-631.
- Noviyanti, Suzy. 2008. Skeptisme Profesional Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 5 (1): 102-125.
- Patten, D.M. 2005. An Analysis of the Impact of Locus of Control on Internal Auditor Job Performance and Satisfaction. *Managerial Auditing Journal* 20 (8/9): 1016-29.
- Robertson, T., Baron, H., Gibbons, P., MacIver, R., dan G. Nyfield. 2000. Conscientiousness and Managerial Performance. *Journal of Occupational and Organizational Psychology* 73: 171-180.
- Robbins, Stephen P dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi: Organizational Behaviour*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Rotter, J.B. 1966. Generalized Expectancies for Internal Versus External Control Reinforcement. *Psychological Monographs* 80 (1): 169-214.
- Skyrme, P., Wilkinson, L., Abraham, J.D. dan Morrison, J.D. 2005. Using Personality to Predict Outbound Call Center Job Performance. *Applied Human Resource Management Research* 10 (2): 89-98.
- Spector, P.E. 1988. Development of the Work Locus of Control Scale. *Journal of Occupational Psychology* 11 (2): 118-25.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta
- Ugoji, E.I., dan Isele, G. 2009. Stress Management and Corporate Governance in Nigerian Organizations. *European Journal of Scientific Research* 27(3): 472-478.

Zimmerman, Ryan D. 2008. Understanding the Impact of Personality Traits on Individuals' Turnover Decisions: A Meta-Analytic Path Model. *Personnel Psychology* 61 (2): 309-348.

Lampiran

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Sumber: Hasil pemikiran peneliti (2013)

Tabel 1
Rincian Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian

Aktivitas	Jumlah
Jumlah kuisisioner yang disebar	69
Kuisisioner yang tidak kembali	17
Kuisisioner yang dikembalikan	52
Tingkat pengembalian $(52/69) \times 100\%$	75,36%
Kuisisioner yang tidak lengkap	1
Jumlah kuisisioner yang dapat diolah	51

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Stres Kerja	7.00	19.00	15.6275	2.95270
<i>Openness to Experience</i>	24.00	49.00	36.4118	6.60659
<i>Conscientiousness</i>	23.00	44.00	35.8627	3.95484
<i>Extraversion</i>	20.00	40.00	32.4314	3.70543
<i>Agreeableness</i>	21.00	36.00	28.2157	3.28216
<i>Neuroticism</i>	19.00	32.00	26.0980	3.52848
<i>Eksternal Locus of Control</i>	8.00	33.00	23.5294	5.48946
<i>Internal Locus of Control</i>	8.00	26.00	16.2353	4.39813
Perilaku Disfungsional Audit	13.00	40.00	28.3922	5.59313

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 3
Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients (B)</i>	t	Sig	Kesimpulan
Zscore (JobStr)	.772	2.059	.046	Diterima
AbsJob_O	-1.258	-3.623	.001	Diterima
AbsJob_C	-1.410	-2.135	.039	Diterima
AbsJob_E	.636	1.653	.106	Ditolak
AbsJob_A	.599	2.357	.023	Ditolak
AbsJob_N	.576	1.321	.194	Ditolak
AbsJob_Int	-2.372	-3.286	.002	Diterima
AbsJob_Eks	2.141	4.003	.000	Diterima
R	.969			
R Square	.939			
Adjusted R2	.927			
F	80.457			
Signifikansi	.000			

Sumber: data primer (diolah)

Pengaruh Kepuasan Kerja dan Pengetahuan tentang Manajemen Biaya Terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Kinerja Manajerial

ARIA FARAHMITA*

Universitas Indonesia

Abstract: *This research aims to investigate the influence of the manager's level of cost management knowledge and job satisfaction on the relationship between budget participation and managerial performance. This research uses theoretical framework of individual performance who claims that individual performance is affected by three dimensions of performance which interact each other, i.e. dimensions of opportunity (participatory budget), dimensions of capacity (cost management knowledge) and the dimensions of willingness (job satisfaction). Hypotheses were tested using multivariate regression models that included interaction of three variables (3 way interaction) between budgetary participation, cost management knowledge and job satisfaction to test their effects on managerial performance. Research shows that budget participation which is given to managers with higher cost management knowledge and higher job satisfaction, had no impact to their managerial performance. Managerial performance variation can be explained by two dimensions. Based on our tests, the findings is consistent that budget participation has positive effect to managerial performance. Further test shows that managerial performance will increase when budget participation combined with high level of cost management knowledge or when budget participation combined with high job satisfaction (2 way interaction). The research also found that the combination of cost management knowledge with high job satisfaction without the opportunity to participate in the budgeting process will actually degrade the managerial performance.*

Keywords: *Budget Participation, Cost Management Knowledge, Job Satisfaction, Managerial Performance.*

* Author can be contacted at: farah_mj@yahoo.com

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Participative budgeting merupakan istilah dalam akuntansi yang didefinisikan sebagai suatu proses dimana manajer terlibat didalamnya dan memiliki pengaruh dalam menetapkan anggaran (Shields dan Shields, 1998). *Participative budgeting* telah menjadi salah satu area topik riset dalam bidang akuntansi manajemen selama lebih dari 50 tahun. Riset pertama yang dipublikasikan yaitu dari Argyris (1952) dalam Covaleski et, al. (2003) yang menginvestigasi dampak *participative budgeting* terhadap perilaku bawahan. Argyris (1952) menyatakan perlunya bawahan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Setelah itu topik riset ini meluas dengan ditandai banyaknya riset empiris mengenai partisipasi anggaran yang dimotivasi oleh teori ekonomi, psikologi dan juga sosiologi (Covaleski et, al., 2003). Riset mengenai pengaruh langsung partisipasi anggaran terhadap kinerja menunjukkan hasil yang tidak konsisten (Shields dan Young, 1993; Agbejule dan Saarikoski, 2006). Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja bersifat kontekstual. Beberapa penelitian juga sudah mencoba meneliti variabel kontekstual yang memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja, misalnya ketidakpastian lingkungan (Govindarajan, 1986), standarisasi produk dan otomatisasi proses (Brownell dan Merchant, 1990), ukuran organisasi (Merchant, 1984), serta hirarki dan sistem kontrol organisasi (Jermias dan Setiawan, 2008). Sedangkan di Indonesia, misalnya faktor motivasi (Setiawaty, 2002), *locus of control* (Setyadi, 2002), serta ketidakpastian lingkungan dan relevansi pekerjaan (Meiliana, 2003).

Diantara banyaknya riset tentang partisipasi anggaran, masih sedikit riset yang mengeksplorasi variabel yang terkait dengan “individu” dalam hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial (Agbejule dan Saarikoski, 2006). Menurut riset dari Patterson et, al. (1997) menyatakan bahwa faktor yang paling mempengaruhi kinerja

perusahaan adalah kinerja individual karyawannya. Perilaku dan kepuasan kerja karyawan serta perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan akan berkontribusi terhadap kenaikan kinerja perusahaan. Kinerja individual tersebut tentunya tidak akan dapat mencapai tujuan perusahaan, jika kinerja individu tidak dikaitkan dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Peran anggaran disini menjadi penting sebagai sarana perencanaan, koordinasi dan pengendalian terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, riset yang menginvestigasi kaitan antara faktor individual dalam hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja individual dalam organisasi penting untuk dilakukan.

Riset tentang pengaruh faktor individual manajer terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial pernah dilakukan oleh Agbejule dan Saarikoski (2006) yang meneliti pengaruh moderasi dari pengetahuan manajer tentang manajemen biaya terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Hasil risetnya menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial akan semakin positif ketika pengetahuan manajer tentang manajemen biaya meningkat. Riset lainnya mengenai variabel individual juga pernah dilakukan oleh Lopez et, al. (2009) di Korea Selatan, yang meneliti faktor kepuasan kerja dan informasi yang relevan tentang pekerjaan (*job relevant information*) menjadi variabel penghubung dalam pengaruh positif antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Di Indonesia, variabel individual yang pernah diteliti yaitu motivasi. Dalam riset Setiawaty (2002), pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial diteliti menggunakan pendekatan kontinjensi, yaitu menggunakan motivasi kerja sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

Sementara itu, Blumberg dan Pringle (1982) dalam artikelnya tentang teori kinerja, menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi yang saling berinteraksi yang menentukan kinerja individual. Blumberg dan Pringle (1982) mengkritik bahwa banyak riset tentang kinerja individual yang tidak mempertimbangkan tiga dimensi ini, yaitu *capacity*, *willingness*, dan

opportunity. Dengan menggunakan kerangka teori Blumberg dan Pringle (1982), kepuasan kerja yang diteliti dalam riset Lopez et, al (2009) merupakan hal yang memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja, yaitu tepatnya dapat dikelompokkan sebagai dimensi *willingness*. Sedangkan partisipasi anggaran merupakan dimensi *opportunity*. Dengan menggunakan kerangka teori Blumberg dan Pringle (1982), variabel kepuasan kerja lebih tepat berperan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Riset tentang partisipasi anggaran (dimensi *opportunity*) yang dilakukan oleh Setiawaty (2002) memasukkan variabel motivasi sebagai dimensi *willingness* sesuai kerangka Blumberg dan Pringle (1982). Riset Agbejule dan Saarikoski (2006) hanya menggunakan dimensi *capacity* (pengetahuan manajer tentang manajemen biaya) dan dimensi *opportunity* (partisipasi anggaran) dalam menentukan kinerja manajerial.

Riset ini berusaha mengisi *research gap* dalam riset Agbejule dan Saariskoski (2006) dengan melengkapi dimensi ketiga yaitu *willingness*. Seperti yang dipaparkan oleh Blumberg dan Pringle (1982), bahwa salah satu aspek *willingness* yang menentukan kinerja individual adalah kepuasan kerja. Kapasitas dan tersedianya peluang saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja manajerial, harus ada keinginan atau motivasi kuat dari manajer untuk dapat menggunakan kesempatan dan kapasitasnya dalam meningkatkan kinerja manajerial. Kepuasan kerja dapat menjadi indikator adanya keinginan dan motivasi dalam meningkatkan kinerja manajerial.

1.2. Tujuan Riset

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum riset ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengetahuan manajer tentang manajemen biaya dan kepuasan kerja terhadap pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Pertanyaan

penelitian dalam riset ini yaitu apakah partisipasi anggaran yang diikuti dengan pengetahuan yang tinggi tentang manajemen biaya dan kepuasan kerja yang tinggi akan memberikan dampak kinerja manajerial yang tinggi?

Riset ini merupakan riset empiris yang akan dilakukan terhadap manajer level menengah di beberapa perusahaan di Indonesia. Pengukuran variabel pengetahuan manajemen biaya, kepuasan kerja, tingkat partisipasi anggaran dan kinerja manajerial akan dilakukan dengan menggunakan kuesioner.

1.3. Kontribusi Riset

Riset ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan literatur dan dunia praktik yaitu: (1) menambah literatur mengenai partisipasi anggaran sebagai area riset yang cukup penting dalam akuntansi manajemen. Riset ini berusaha meneliti variabel terkait individual yang sepanjang pengetahuan penulis, belum banyak diteliti. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah kinerja individual yang terlibat dalam organisasi. Kinerja manajer level menengah merupakan unsur individual yang penting dalam organisasi. Manajer level menengah berperan sebagai lini tengah yang merupakan lini penghubung antara kebijakan dan strategi di level manajemen puncak dengan karyawan level terendah dalam organisasi, (2) menambah literatur dalam riset tentang kinerja individual dengan menyediakan bukti empiris terhadap kerangka teori yang disediakan oleh Blumberg dan Pringle (1982), bahwa kinerja individual dipengaruhi oleh tiga dimensi yang saling berinteraksi, yaitu *capacity*, *willingness* dan *opportunity*. Riset ini melengkapi riset sebelumnya (Agbejule dan Saarikoski, 2006 dan Lopez et, al. 2009) yang belum meneliti interaksi tiga variabel dalam riset tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja individual, (3) dengan meneliti variabel pengetahuan manajer akan

manajemen biaya, riset ini diharapkan bermanfaat kepada para praktisi mengenai pentingnya peran pemahaman manajer dalam menggunakan informasi anggaran untuk penilaian kinerja dan (4) dengan meneliti variabel kepuasan kerja, riset ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi mengenai pentingnya kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerja individual, sehingga perusahaan dapat lebih meningkatkan peran manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi.

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Partisipasi Anggaran dan Kinerja

Peran dari partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial telah banyak didiskusikan secara ekstensif dalam beberapa literatur akuntansi. Terdapat keyakinan bahwa partisipasi anggaran akan memberi manfaat bagi organisasi dengan cara memfasilitasi komunikasi yang lebih baik, memberi motivasi dan meningkatkan komitmen, sehingga akan meningkatkan kinerja. Namun demikian, hasil riset menunjukkan bukti yang tidak konsisten. Shields dan Young (1993) yang melakukan review riset tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja, mendapati bahwa terdapat 24 uji hipotesis yang menunjukkan pengaruh yang signifikan dan 35 hipotesis menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan atau hasil yang tidak sesuai dengan prediksi.

Riset yang menemukan pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja diantaranya yaitu Brownell dan Dunk (1991), Kren (1990) dan Dunk (1993). Studi lain menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja. Variabel kinerja yang diteliti menggunakan ukuran yang berbeda, seperti *role ambiguity* (Chenhall dan Brownell, 1988), *job related tension* (Kenis, 1979), dan kinerja manajerial (Mia, 1988). Riset Mia (1988) melakukan survey terhadap manajer level menengah dari perusahaan di Australia.

Hasil riset menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja manajer yang memiliki sikap yang kurang baik dan motivasi yang rendah. Sebaliknya, risetnya menunjukkan terdapat pengaruh positif dari partisipasi anggaran terhadap kinerja manajer yang memiliki sikap yang baik dan motivasi yang tinggi. Berdasarkan hasil riset tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa riset tentang partisipasi anggaran terhadap kinerja seharusnya menggunakan pendekatan kontinjensi. Riset perlu mempertimbangkan variabel moderasi ketika menginvestigasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja, karena pengaruhnya mungkin akan berbeda tergantung situasinya.

2.2. Teori Kinerja

Riset ini menggunakan kerangka teori dari Blumberg dan Pringle (1982) untuk menjelaskan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Blumberg dan Pringle (1982) mengkritik riset-riset mengenai kinerja individual yang hanya mengaitkan kinerja dengan satu atau dua variabel saja. Riset terdahulu dipandang gagal menunjukkan prediksi yang kuat dan konsisten terhadap kinerja. Menurut Blumberg dan Pringle (1982), kinerja individual dipengaruhi tiga dimensi, yaitu kapasitas (*capacity*), kemauan (*willingness*) dan kesempatan (*opportunity*). Kerangka teoritis yang diajukan oleh Blumberg dan Pringle (1982) adalah sebagai berikut:

$$\text{Performance} = f(\text{capacity} \times \text{willingness} \times \text{opportunity})$$

Jika salah satu dimensi berada pada tingkat yang rendah, maka akan berpengaruh terhadap menurunnya kinerja. *Capacity* merupakan kemampuan kognitif dan psikologis yang memungkinkan individu untuk bekerja secara efektif. Dimensi ini mencerminkan pengaruh dari kemampuan individu, pengetahuan, keterampilan, intelegensia, umur, kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, ketahanan, stamina, keterampilan motorik dan lainnya yang serupa.

Dimensi *willingness* mengacu kepada karakteristik psikologis dan emosional yang mempengaruhi sampai tingkat mana seorang individu akan melakukan tugasnya. *Willingness* mencerminkan efek perilaku dari adanya motivasi, kepuasan kerja, kepribadian, sikap, norma, nilai, status pekerjaan, karakteristik tugas, persepsi atas peran, *self image* dan konsep terkait lainnya.

Sedangkan dimensi ketiga, yaitu *opportunity*. *Opportunity* berinteraksi dengan *capacity* dan *willingness* untuk meningkatkan kinerja, namun sama seperti *willingness* dan *capacity*, *opportunity* saja tidak cukup dalam meningkatkan kinerja. Walaupun individu memiliki kemauan dan kemampuan untuk terlibat dalam perilaku yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, namun hal ini tidak dapat tercapai jika individu tidak memiliki kesempatan untuk mewujudkannya. Kesempatan (*opportunity*) mengacu kepada unsur *technical system*, seperti peralatan, perlengkapan, material, perilaku pimpinan, kebijakan organisasi, serta aturan dan prosedur. Partisipasi anggaran menunjukkan dimensi *opportunity* yang memberikan kesempatan kepada individu manajer untuk berpartisipasi terlibat dalam menentukan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja manajerial.

2.3. Cost Management Knowledge, Partisipasi Anggaran dan Kinerja

Dearman dan Shields (2001) menunjukkan pentingnya peran *knowledge* sebagai komponen penting dalam menentukan kinerja. Shields dan Young (1994) menyatakan bahwa pengetahuan manajer akan manajemen biaya akan membantu manajer memahami proses bisnis dan aktivitas organisasi secara komprehensif. Dengan memahami bagaimana suatu aktivitas dapat dicapai dan alasan terjadinya biaya, akan membuat manajer mampu untuk meningkatkan perbaikan proses yang bersifat *cost-beneficial*. Unsur ini penting dalam pencapaian anggaran.

Riset dari Agbejule dan Saarikoski (2006) meneliti pengaruh moderasi dari pengetahuan manajemen biaya sebagai dimensi “capacity” dalam mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial. Hasil riset menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial akan semakin positif dengan semakin meningkatnya pengetahuan manajer akan manajemen biaya. Agbejule dan Saarikoski (2006) hanya berfokus pada karakteristik individu, *knowledge* (dimensi “capacity”) dan “opportunity.” Riset tersebut tidak mempertimbangkan dimensi “willingness”.

2.4. Kepuasan kerja, Partisipasi Anggaran dan Kinerja

Merujuk kepada kerangka teoritis dari Blumberg dan Pringle (1972) bahwa kepuasan kerja merupakan dimensi “willingness” yang turut mempengaruhi kinerja individual. Sebagian besar riset tentang partisipasi anggaran menempatkan kepuasan kerja sebagai variabel dependen, seperti Brownell (1982, 1983), Chenhall (1986), dan Dunk (1992) dalam Shields dan Shields (1998).

Riset Lopez et, al. (2009) melakukan riset terhadap manajer level menengah di Korea Selatan dan menemukan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung atas partisipasi anggaran terhadap kinerja melalui faktor kepuasan kerja. Riset Lopez et, al. (2009) menggunakan analisis *path model* dalam menemukan hubungan tersebut.

2.5. *Cost management knowledge*, kepuasan kerja dan partisipasi anggaran: interaksi 3 variabel

Interaksi antara tiga variabel terkait kinerja individual dapat dijelaskan menggunakan model teoritis Blumberg dan Pringle (1982) yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam riset akuntansi manajemen mengenai anggaran, partisipasi anggaran merupakan dimensi *opportunity*, pengetahuan manajer tentang manajemen biaya merupakan dimensi *capacity* dan

kepuasan kerja merupakan dimensi *willingness*. Ketiga dimensi ini berinteraksi dalam menjelaskan variasi dari kinerja manajerial.

Hal ini konsisten dengan pendapat dari Shields dan Shields (1998) yang melakukan review tentang partisipasi anggaran dengan mengelompokkannya ke dalam teori ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Interaksi tiga variabel dalam riset tentang partisipasi anggaran yang sesuai dengan kerangka teori Blumberg dan Pringle (1982) dapat dijelaskan melalui teori psikologi. Shields dan Shields (1998) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga mekanisme dalam partisipasi anggaran, yaitu pencapaian nilai, kognitif, dan motivasi. Pencapaian nilai secara teoritis dapat mempengaruhi kepuasan dan mental individu karena proses partisipasi (sesuai dimensi “opportunity”) memungkinkan manajer menengah dapat merasakan *self respect* dan perasaan kesetaraan yang timbul dari kesempatan untuk mengekspresikan nilainya (*value*). Mekanisme motivasional (sesuai dimensi “willingness”) merujuk kepada dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya *trust* dan *sense of control* yang akan menyebabkan meningkatnya komitmen, sikap menerima terhadap keputusan anggaran sehingga meningkatkan kinerja. Sedangkan mekanisme kognitif (sesuai dengan dimensi “capacity”) menunjukkan dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya kualitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer level menengah sehingga dapat meningkatkan kinerja.

2.6. Pengembangan Hipotesis

Sesuai dengan kerangka teoritis dan Blumberg dan Pringle (1982) dan Shields dan Shields (1998) bahwa partisipasi anggaran akan memberikan manfaat yang paling tinggi dalam meningkatkan kinerja manajerial ketika dikombinasikan dengan pengetahuan manajer akan manajemen biaya dan kepuasan kerja yang tinggi. Dengan kata lain, pengetahuan manajemen biaya dan kepuasan kerja akan memperkuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja

manajerial. Dengan demikian, dapat diprediksi partisipasi anggaran (dimensi *opportunity*), pengetahuan akan manajemen biaya (dimensi *capacity*) dan kepuasan kerja (dimensi *willingness*) saling berinteraksi satu sama lain dalam mempengaruhi kinerja manajerial. Partisipasi anggaran yang disertai dengan pengetahuan yang memadai akan manajemen biaya dan kepuasan kerja yang semakin tinggi akan memberikan dampak kinerja manajerial yang semakin tinggi dibandingkan kondisi yang lain.

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam penganggaran tidak akan membawa manfaat bagi peningkatan kinerja manajerial jika manajer memiliki pengetahuan manajemen biaya dan kepuasan kerja yang rendah. Hal ini akan berdampak menurunnya kualitas pengambilan keputusan dan penyelesaian tugas yang berdampak terhadap menurunnya kinerja manajerial.

Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan dalam riset ini adalah:

H1: *Partisipasi anggaran yang dikombinasikan dengan pengetahuan manajemen biaya yang semakin tinggi dan kepuasan kerja yang semakin tinggi akan memberikan dampak kinerja manajerial yang semakin tinggi (three-way interaction).*

Hipotesis kedua bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil riset Agbejule dan Saarikoski (2006) yang berfokus pada dua dimensi kinerja, yaitu *opportunity* dan *capacity*. Dalam riset ini, pengaruhnya dilihat setelah mempertimbangkan keberadaan dimensi lain yaitu faktor kepuasan kerja (*willingness*). Pengetahuan manajemen biaya yang semakin tinggi akan memperkuat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Hipotesis sebagai berikut:

H2: *Semakin tinggi pengetahuan manajer tentang manajemen biaya, maka pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial akan semakin kuat.*

Hipotesis berikutnya dilandasi hasil riset Setiawaty (2002) yang juga berfokus pada dua dimensi kinerja, yaitu dimensi *opportunity* dan dimensi *willingness* menggunakan faktor motivasi kerja sebagai faktor yang dapat memperkuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Motivasi merupakan dimensi *willingness* yang dalam riset ini diwakili oleh faktor kepuasan kerja. Diprediksi bahwa ketika partisipasi dalam penganggaran diberikan kepada manajer yang memiliki kepuasan kerja yang semakin tinggi, maka pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial akan semakin tinggi.

H3: *Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, maka pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial akan semakin kuat.*

3. Metode Penelitian

3.1. Data dan Sampel

Pengambilan data menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan riset terdahulu. Sampel atau responden dipilih secara *convenience dan purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

- Manajer level menengah, yaitu dengan nama jabatan setara dengan supervisor, asisten manajer, manajer junior, manajer atau manajer senior.
- Bekerja pada organisasi yang menggunakan mekanisme anggaran sebagai perangkat perencanaan dan pengendalian.
- Memiliki masa kerja di tempat bekerja saat ini minimal 1 tahun, agar individu sudah memahami mengenai mekanisme anggaran yang berlaku di tempat kerja dan sudah mampu mengukur kinerjanya.

- Untuk memperoleh gambaran atau variasi tingkat partisipasi anggaran yang berbeda-beda untuk masing-masing individu dalam organisasi, responden tidak harus berasal dari divisi akuntansi, keuangan atau anggaran.

3.2. Pengukuran Variabel

Pada bagian Lampiran disajikan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini.

- Kinerja Manajerial

Diukur menggunakan butir pertanyaan dari Mahoney et, al. (1965) yang juga banyak digunakan dalam riset partisipasi anggaran dan kinerja, seperti yang digunakan oleh Agbejule dan Saarikoski (2006) dan Jermias & Setiawan (2008). Pengukuran kinerja manajerial menggunakan persepsi diri masing-masing individu manajer terhadap kinerjanya (*self rating performance*). Unsur yang diukur adalah *planning, investigating, coordinating, evaluating, supervising, staffing, negotiating, dan representing*. Skala pengukuran digunakan sesuai dengan Mahoney et. al (1965) yaitu bernilai = 1 (signifikan di bawah rata-rata) sampai 7 (signifikan di atas rata-rata). Kinerja manajerial setiap responden akan diukur menggunakan rata-rata skor seluruh pertanyaan.

- Partisipasi Anggaran

Diukur menggunakan 6 butir pertanyaan seperti yang digunakan dalam riset Agbejule dan Saarikoski (2006). Skala yang digunakan yaitu skala likert dengan nilai 1 yang paling rendah partisipasinya sampai dengan 7 yang partisipasinya paling tinggi. Tingkat partisipasi anggaran setiap responden akan diperoleh dari rata-rata skor seluruh pertanyaan.

- Pengetahuan Manajemen Biaya

Mengacu ke Shields dan Young (1994) seperti yang digunakan oleh Agbejule dan Saarikoski (2006) yaitu terdiri dari 7 butir pertanyaan. Pertanyaan mencakup pengetahuan tentang manajemen/pengelolaan biaya secara umum, bukan tentang penyusunan anggaran. Diharapkan dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang manajemen biaya, maka manajer memiliki kemampuan yang baik tentang bagaimana dan berapa yang seharusnya ditetapkan pada saat menyusun anggaran. Skala yang digunakan adalah skala likert, bernilai 1 (sangat tidak setuju) sampai 7 (sangat setuju). Tingkat pengetahuan manajemen biaya masing-masing responden akan diperoleh dari rata-rata skor seluruh pertanyaan.

- Kepuasan Kerja

Diukur menggunakan *Minnesota satisfaction questionnaire* (Weiss et, al., 1967), yang berisi 20 pertanyaan tentang kepuasan kerja individual. Ukuran menggunakan skala 1 (sangat tidak puas) sampai 5 (sangat puas). Dalam pengolahan data, skor ini akan disesuaikan agar menjadi skala 1 – 7 untuk kemudahan pemahaman dan interpretasi. Kepuasan kerja masing-masing responden akan diperoleh dari rata-rata skor seluruh pertanyaan.

3.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan model regresi multivariabel sebagai berikut:

$$Perf = \alpha_0 + \alpha_1 BP_i + \alpha_2 CM_i + \alpha_3 Sat_i + \alpha_4 CM_i * BP_i + \alpha_5 Sat_i * BP_i + \alpha_6 CM_i * Sat_i + \alpha_7 CM_i * Sat_i * BP_i + e_i \dots \dots \dots (model 1)$$

Dimana: Perf = Kinerja manajerial; BP= Partisipasi anggaran; CM = Pengetahuan manajemen biaya; CM*BP = Interaksi antara partisipasi anggaran dengan pengetahuan manajemen biaya; Sat*BP = Interaksi antara partisipasi anggaran dengan kepuasan kerja; CM*Sat = Interaksi

antara pengetahuan manajemen biaya dengan kepuasan kerja; $CM*Sat*BP$ = Interaksi antara pengetahuan manajemen biaya, kepuasan kerja dan partisipasi anggaran (*3 way interaction*); e = error.

Hipotesis 1 akan didukung jika koefisien $\alpha_7 > 0$. Hipotesis 2 akan didukung jika $\alpha_4 > 0$, dan hipotesis 3 akan didukung jika $\alpha_5 > 0$.

Penggunaan variabel interaksi dalam model pengujian akan sangat rentan terjadinya multikolinieritas dalam regresi. Untuk mengatasi masalah multikolinieritas, mengikuti apa yang dilakukan oleh Jermias dan Setiawan (2008), maka dilakukan *centering* untuk variabel independen. Nilai *centering* adalah nilai asal yang sudah dikurangi dengan nilai rata-rata.

3.4. Pengujian reliabilitas dan validitas

Dalam menggunakan instrumen pengukuran melalui kuesioner, perlu dilakukan uji reliabilitas dan validitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian akan dilakukan menggunakan uji statistic *cronbach alpha* (α). Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,6$ (Ghozali, 2001).

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika keseluruhan butir pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan dimensi yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2001). Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariat antara masing-masing skor indikator (pertanyaan) dengan total skor variabel. Jika seluruh korelasi signifikan secara statistik, artinya indikator pertanyaan adalah valid untuk mengukur variabel.

4. Hasil

Hasil penyebaran kuesioner menghasilkan 116 data responden yang bisa dijadikan sampel untuk diolah. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui email dan secara langsung. Berikut rincian perolehan data kuesioner:

Tabel 1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah Sampel
Kuesioner tersebar	150
Kuesioner kembali	125
-/- Kuesioner dengan jawaban tidak lengkap	(9)
Jumlah Kuesioner yang bisa diolah	116
<i>Response rate</i>	77.33%

Dapat dilihat pada tabel, *response rate* cukup tinggi sekitar 77% karena banyak kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden untuk memastikan agar kuesioner diisi dan dikembalikan.

Profil responden adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Profil Responden

Keterangan	Rata-Rata/ Komposisi
Usia	34 tahun
Lama Bekerja	6,9 tahun
Latar Belakang Pendidikan:	
- Ekonomi/Bisnis	62%
- Non-Ekonomi/Bisnis	38%

Pada tabel 2, ditunjukkan bahwa rata-rata usia responden menunjukkan rata-rata usia yang masuk akal sebagai manajer level menengah yaitu 34 tahun. Rata-rata lama bekerja pada

instansi/organisasi saat ini adalah 6,9 tahun merupakan durasi lama bekerja yang cukup bagi para responden untuk dapat memahami atau terlibat dalam proses penganggaran di tempat bekerjanya saat ini. Selanjutnya, responden berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi/bisnis sebesar 62% dan yang bukan dari ekonomi/bisnis sebesar 38% menunjukkan komposisi yang cukup untuk memperoleh variasi pengetahuan manajemen biaya yang berbeda pada masing-masing individu yang terlibat pada proses penganggaran.

4.1. Statistik Deskriptif dan Korelasi

Statistik deskriptif seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Statistik Deskriptif, Uji Reliabilitas dan Validitas

	Perf (Kinerja Manajerial)	BP (Partisipasi Anggaran)	CM (Pengetahuan Manajemen Biaya)	Sat (Kepuasan Kerja)
Mean	4.95	4.49	4.46	5.21
Median	5.00	4.50	4.60	5.30
Maximum	7.00	7.00	7.00	7.00
Minimum	2.60	1.00	1.00	2.80
Std. Dev.	0.97	1.39	1.29	0.66
Uji Reliabilitas (Cronbach Alpha)	0,868	0,931	0,884	0,891
	(Reliabel)	(Reliabel)	(Reliabel)	(Reliabel)
Uji Validitas	Valid	Valid	Valid	Valid
Observasi	116	116	116	116

Skor untuk variabel kepuasan kerja adalah nilai setelah disesuaikan menjadi skala 1 – 7. Rata-rata semua variabel lebih dari 4, yaitu nilai tengah skala likert (1 – 7). Artinya rata-rata kinerja cenderung diatas rata-rata, rata-rata partisipasi anggaran cenderung tinggi, pengetahuan manajemen biaya cenderung tinggi dan rata-rata kepuasan kerja berada pada tingkat “puas.”

Hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel reliabel dengan nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,6, artinya jawaban responden konsisten dan stabil sebagai ukuran yang tepat untuk variabel penelitian. Uji validitas menunjukkan semua butir pertanyaan memiliki korelasi yang signifikan dengan masing-masing rata-rata variabel yang diukur (kinerja manajerial, partisipasi anggaran, pengetahuan manajemen biaya, dan kepuasan kerja). Artinya semua variabel valid, keseluruhan butir pertanyaan masing-masing variabel dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan dimensi yang akan diukur.

Korelasi antar variabel seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Korelasi Pearson

Variabel	Perf	BP	CM	Sat	CM*BP	Sat*BP	CM*Sat	CM*Sat *BP
Perf	1.000							

BP	0.465	1.000						
	<i>0.000***</i>	-----						
CM	0.472	0.563	1.000					
	<i>0.000***</i>	<i>0.000***</i>	-----					
Sat	0.375	0.189	0.085	1.000				
	<i>0.000***</i>	<i>0.0412**</i>	<i>0.364</i>	-----				
CM*BP	-0.069	-0.314	-0.406	0.028	1.000			
	<i>0.458</i>	<i>0.000***</i>	<i>0.000***</i>	<i>0.761</i>	-----			
Sat*BP	0.103	0.084	0.029	-0.179	-0.013	1.000		
	<i>0.269</i>	<i>0.364</i>	<i>0.753</i>	<i>0.053*</i>	<i>0.888</i>	-----		
CM*Sat	-0.079	0.031	0.105	-0.191	0.021	0.522	1.000	
	<i>0.398</i>	<i>0.734</i>	<i>0.261</i>	<i>0.039**</i>	<i>0.821</i>	<i>0.000***</i>	-----	
CM*Sat*BP	0.194	0.056	0.047	0.424	0.145	-0.479	-0.692	1.000
	<i>0.036**</i>	<i>0.550</i>	<i>0.611</i>	<i>0.000***</i>	<i>0.118</i>	<i>0.000***</i>	<i>0.000***</i>	-----
Pearson's correlation; probabilita t-stat dicetak miring								
*** signifikan pada 1%								
** signifikan pada 5%								

Uji korelasi menunjukkan variabel partisipasi anggaran (BP), pengetahuan manajemen biaya (CM), kepuasan kerja (Sat) masing-masing berkorelasi positif signifikan dengan kinerja manajerial (Perf). Artinya semakin tinggi partisipasi anggaran, semakin tinggi pengetahuan manajemen biaya dan semakin tinggi kepuasan kerja berhubungan dengan kinerja manajerial yang semakin tinggi. Sebelum mempertimbangkan variabel lain yang turut mempengaruhi,

variabel interaksi antara pengetahuan manajemen biaya, kepuasan kerja dan partisipasi anggaran (CM*Sat*BP) berkorelasi positif signifikan dengan kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan arah yang konsisten dengan hipotesis 1 yang akan diuji. Sedangkan variabel CM*BP dan Sat*BP tidak berkorelasi dengan kinerja manajerial, tidak sesuai dengan arah hipotesis 2 dan 3. Hal ini sangat dimungkinkan karena dalam uji korelasi belum mempertimbangkan pengaruh variabel lain yang turut mempengaruhi kinerja manajerial.

4.2. Pengujian Multikolinieritas

Model pengujian hipotesis yang mengandung beberapa variabel interaksi sangat rentan terjadi masalah multikolinieritas. Untuk itu dalam riset ini, untuk mengatasi masalah multikolinieritas, variabel yang digunakan adalah nilai setelah dilakukan *centering*, yaitu nilai variabel masing-masing dikurangi dengan nilai rata-rata. Prosedur ini dilakukan juga oleh Jermias dan Setiawan (2008) dalam menggunakan model yang melibatkan interaksi 3 variabel. Setelah dilakukan *centering*, maka sudah tidak terdapat masalah multikolinieritas, karena nilai VIF kurang dari 10 (tidak ditampilkan)[†].

4.3. Pengujian Hipotesis

Hasil uji regresi untuk pengujian hipotesis adalah seperti pada tabel berikut ini (setelah disesuaikan dari output regresi *views* untuk pengujian 1 arah):

[†] (Gujarati, 2003)

Tabel 5. Pengujian Hipotesis

Variabel	Ekspektasi Koefisien	(1 way)	(CM*BP)	(Sat*BP)	(2 way)	(3 way)
		1	2	3	4	5
Variabel Dependen: Perf						
Observasi: 116						
C		0.848 (0.083)	4.873 (0.000)	4.934 (0.000)	4.859 (0.000)	4.859 (0.000)
BP	+	0.160 (0.007)**	0.220 (0.001)***	0.275 (0.000)***	0.153 (0.008)**	0.153 (0.008)**
CM	+	0.239 (0.000)***	0.277 (0.000)***		0.303 (0.000)***	0.307 (0.000)***
Sat	+	0.445 (0.000)***		0.473 (0.000)***	0.436 (0.000)***	0.449 (0.000)***
CM*BP	H2: +		0.008 (0.021)**		0.073 (0.023)**	0.076 (0.024)**
Sat*BP	H3: +			0.115 (0.055)*	0.208 (0.004)***	0.204 (0.005)**
CM*Sat	?				-0.204 (0.026)**	-0.224 (0.060)*
CM*Sat*BP	H1: +					-0.016 (0.345)
Adj R ²		0.354	0.289	0.299	0.401	0.396
F-stat		21.994	16.574	17.389	13.831	11.764
Prob		0.000***	0.000***	0.000***	0.000***	0.000***

*** signifikan pada $\alpha = 1\%$; ** signifikan pada $\alpha = 5\%$; * signifikan pada $\alpha = 10\%$.

Dimana: Perf = Kinerja manajerial; BP= Partisipasi anggaran; CM = Pengetahuan manajemen biaya; CM*BP = Interaksi antara partisipasi anggaran dengan pengetahuan manajemen biaya; Sat*BP = Interaksi antara partisipasi anggaran dengan kepuasan kerja; CM*Sat = Interaksi

antara pengetahuan manajemen biaya dengan kepuasan kerja; $CM*Sat*BP$ = Interaksi antara pengetahuan manajemen biaya, kepuasan kerja dan partisipasi anggaran (*3 way interaction*); $e=error$.

Kolom 1 pada tabel menunjukkan hasil regresi untuk model tanpa memasukkan variabel interaksi. Kolom 2 menunjukkan hasil regresi dengan variabel interaksi $CM*BP$ sesuai riset terdahulu dari Agbejule dan Saarikoski (2006). Kolom 3 menunjukkan hasil regresi dengan variabel interaksi $Sat*BP$ sesuai dengan riset terdahulu dari Setiawaty (2002). Kolom 4 menunjukkan hasil regresi dengan memasukkan semua variabel interaksi 2 variabel (*2 way*) yaitu $CM*BP$, $Sat*BP$ dan $CM*Sat$. Kolom 5 merupakan model pengujian hipotesis yang sudah memasukkan semua variabel, termasuk interaksi 3 variabel (*3 way*) yaitu variabel $CM*Sat*BP$.

Semua model regresi menunjukkan model yang signifikan secara statistik, ditunjukkan dengan nilai F_{stat} yang signifikan pada nilai probabilita < 0.0001 . Dibanding model lainnya, nilai Adjusted R^2 tertinggi adalah model *2 way interaction* dan pada *model 3 way interaction*. Namun, nilai adjusted R^2 untuk model *3 way interaction* sedikit lebih rendah daripada model *2 way interaction*. Hal ini menunjukkan dengan dimasukkannya interaksi 3 variabel tidak menambah *explanatory power* terhadap variabel kinerja manajerial.

Kolom 1 menunjukkan semua variabel **BP**, **CM** dan **Sat** masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil ini tetap konsisten sampai kolom kelima ketika sudah memasukkan variabel interaksi baik *2 way* maupun *3 way interaction*.

Hasil pengujian hipotesis 1 ditunjukkan pada kolom 5, bahwa interaksi 3 variabel $CM*Sat*BP$ tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial (Perf). Artinya partisipasi anggaran yang dikombinasikan dengan pengetahuan manajemen dan kepuasan kerja yang semakin tinggi

tidak berdampak peningkatan kinerja manajerial. Hasil ini tidak sesuai dengan ekspektasi, dan dengan demikian Hipotesis H1 tidak didukung oleh data.

Variabel interaksi CM*BP secara konsisten mulai dari kolom 2, 4 dan 5 berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. Mengacu kepada regresi di kolom 5, hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa pengetahuan manajemen biaya yang semakin tinggi akan memperkuat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial, setelah mempertimbangkan dimensi lain yang mempengaruhi kinerja manajerial. Dengan demikian, hipotesis 2 didukung oleh data. Hasil ini sesuai dengan hasil riset terdahulu dari Agbejule dan Saarikoski (2006).

Variabel interaksi Sat*BP secara konsisten mulai dari kolom 3, 4 dan 5 berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Mengacu kepada hasil regresi di kolom 5, pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa kepuasan kerja manajer yang semakin tinggi akan memperkuat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial, setelah mempertimbangkan dimensi lain yang mempengaruhi kinerja manajerial. Dengan demikian, hipotesis 3 didukung oleh data. Hasil ini juga konsisten dengan riset terdahulu dari Setiawaty (2002) yang menggunakan motivasi sebagai ukuran dimensi *willingness*.

Terdapat temuan yang menarik pada hasil regresi 2 way (kolom 4) dan 3 way (kolom 5) yang menunjukkan bahwa interaksi variabel CM*Sat berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja manajerial. Artinya pengetahuan manajemen biaya yang semakin tinggi dan kepuasan kerja yang semakin tinggi berdampak pada kinerja manajerial yang semakin rendah. Analisis akan dijelaskan pada bagian berikut.

4.4. Analisis Hasil

Nilai Adjusted R^2 yang tidak bertambah ketika dimasukkannya interaksi 3 variabel menunjukkan hasil yang konsisten dengan variabel interaksi CM*Sat*BP yang tidak signifikan

dalam pada pengujian model *3 way interaction*. Keberadaan variabel interaksi CM*Sat*BP tidak menambah *explanatory power* dalam menjelaskan variasi kinerja manajerial.

Variabel interaksi antara pengetahuan manajemen biaya dan kepuasan kerja (CM*Sat di kolom 4 dan 5), yang berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial menunjukkan bahwa pengetahuan manajemen biaya (dimensi *capacity*) yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi (dimensi *willingness*) tanpa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran (dimensi *opportunity*), akan berdampak pada menurunnya kinerja manajerial. Dapat diartikan bahwa, seorang manajer level menengah yang mempunyai kapasitas dan kemauan yang tinggi dalam bekerja namun tidak diberikan kesempatan berpartisipasi dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian organisasi, maka kinerjanya akan menurun. Mengingat kinerja organisasi dibentuk dari kinerja individu yang bekerja di dalamnya, maka hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi dari manajer level menengah dalam mengoptimalkan kemampuan dan kemauan atau motivasinya untuk meningkatkan kinerja masing-masing individu. Jika kinerja manajerial meningkat maka diharapkan akan meningkat pula kinerja organisasi.

Uraian diatas dapat dikaitkan sebagai penjelasan mengapa interaksi 3 variabel antara pengetahuan manajemen biaya, kepuasan kerja dan partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Mengacu kepada landasan teori tentang faktor yang mempengaruhi kinerja dari Blumberg dan Pringle (1982), bahwa kinerja dipengaruhi oleh tiga dimensi kesempatan (*opportunity*), kapasitas (*capacity*) dan kemauan (*willingness*). Berdasarkan hasil regresi, kita memperoleh dua temuan penting bahwa kombinasi kemampuan dan kemauan yang semakin tinggi yang tidak disertai dengan kesempatan berpartisipasi dalam anggaran (variabel CM*sat) akan berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial, sementara kombinasi partisipasi anggaran, pengetahuan manajemen biaya dan kepuasan kerja (CM*Sat*BP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Temuan ini

menunjukkan bahwa kesempatan untuk berpartisipasi dalam penganggaran saja tidak cukup untuk dapat meningkatkan kinerja individu manajer yang memiliki pengetahuan yang baik tentang manajemen biaya (dimensi “capacity”) dan juga memiliki kepuasan kerja yang tinggi (dimensi “willingness”). Manajer dengan kapasitas dan kepuasan kerja yang tinggi mungkin seharusnya dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian yang lain dalam perusahaan, misalnya dalam penetapan indikator kinerja dan dalam pengendalian biaya. Hal ini menegaskan pentingnya memberikan kesempatan berpartisipasi dari manajemen lini atas kepada manajemen level menengah agar kinerja manajerial level menengah meningkat.

4.5. Uji Sensitivitas

Uji sensitivitas dilakukan dengan mengganti variabel moderasi pengetahuan manajemen biaya (CM) dan kepuasan kerja (Sat) menjadi variabel kategorik. Penggunaan variabel moderasi dengan variabel kategorik dikotomus mengikuti saran dari Hartman dan Moers (1999) dalam Jermias dan Setiawan (2008). Walaupun penggunaan variabel dikotomus mengurangi *explanatory power*, namun akan memberi makna pada analisis yang menggunakan lebih dari 2 interaksi variabel, yaitu dengan melihat efek selisih perbedaan dampak terhadap variabel dependen antara kelompok kategori yang berbeda.

Variabel CM akan bernilai 1 jika nilai skor diatas median yang artinya pengetahuan manajemen biaya yang tinggi, dan nilai 0 untuk nilai di bawah median yang berarti pengetahuan manajemen biaya yang rendah. Variabel Sat akan bernilai 1 untuk nilai diatas median yang artinya kepuasan kerja tinggi dan nilai 0 untuk nilai di bawah median yang artinya kepuasan kerja rendah.

Secara umum, hasil regresi menunjukkan hasil yang konsisten dengan pengujian utama, seperti pada tabel 6 (setelah disesuaikan uji 1 arah menggunakan e-views), bahwa variabel

interaksi CM*BP*Sat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Untuk interaksi 2 variabel, yang signifikan mempengaruhi kinerja manajerial hanya pada variabel DSat*B sedangkan variabel DCM*BP tidak signifikan. Dengan menggunakan variabel kategorik ini, walaupun model signifikan secara statistik, namun *explanatory power* jauh berkurang dibanding pengujian utama.

Tabel 6. Uji sensitivitas dengan variabel kategorik

Variabel	Ekspektasi Koefisien	Model (1 way)	Model (2 way)	Model (3 way)
Variabel dependen: Perf				
C		3.414 (0.000)	4.434 (0.000)	4.467 (0.000)
BP	+	0.250 (0.000)***	0.095 (0.311)	0.137 (0.089)*
DCM	+	0.338 (0.023)**	0.521 (0.011)**	0.561 (0.002)***
DSat	+	0.535 (0.000)***	0.647 (0.004)***	0.606 (0.003)***
DCM*BP	H3: +		0.017 (0.909)	-0.126 (0.247)
DSat*BP	H2: +		0.267 (0.022)**	0.194 (0.058)*
DCM*DSat	?		-0.245 (0.449)	-0.326 (0.175)
DCM*DSat*BP	H1: +			0.255 (0.189)
Adj R ²		0.300	0.311	0.310
F-stat		17.452	9.674	8.411
Prob		0.000***	0.000***	0.000***

5. Kesimpulan

Riset ini bertujuan melanjutkan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi variabel yang terkait dengan faktor individu menggunakan kerangka teori dari Blumberg dan Pringle (1982)

bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh tiga dimensi yang saling berinteraksi, yaitu dimensi *opportunity* (partisipasi anggaran), dimensi *capacity* (pengetahuan manajemen biaya) dan dimensi *willingness* (kepuasan kerja). Riset sebelumnya hanya berfokus pada dua dimensi (interaksi 2 variabel). Riset ini mengisi *research gap* dari Agbejule dan Saarikoski (2006) tentang pengaruh pengetahuan manajemen biaya terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial, dengan menambahkan dimensi *willingness*, yaitu kepuasan kerja sesuai kerangka teori Blumberg dan Pringle (1982).

Hasil riset menunjukkan bahwa interaksi tiga variabel yang mewakili interaksi dimensi dalam teori dari Blumberg dan Pringle (1982) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil riset mengkonfirmasi riset sebelumnya yang menggunakan 2 dimensi, bahwa pengetahuan manajemen biaya memperkuat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja, begitu juga dengan kepuasan kerja yang memperkuat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan pengetahuan manajemen biaya yang semakin tinggi tanpa partisipasi anggaran akan menurunkan kinerja manajerial. Temuan ini konsisten dengan hasil pengujian hipotesis bahwa partisipasi anggaran saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja manajer yang memiliki pengetahuan manajemen dan kepuasan kerja yang tinggi. Dengan demikian riset ini mengimplikasikan pentingnya memberikan kesempatan berpartisipasi kepada manajer level menengah yang memiliki kapasitas dan kemauan yang baik untuk lebih terlibat dalam aktivitas perencanaan dan pengendalian perusahaan.

Riset ini memiliki keterbatasan dalam beberapa hal, yaitu (1) responden terbatas pada manajer yang bekerja pada daerah Jakarta dan sekitarnya, sehingga sulit untuk digeneralisir; (2) pengukuran kinerja menggunakan butir pertanyaan yang bersifat *self assessment*, akan terjadi kemungkinan bias; (3) Metode regresi yang digunakan terbatas hanya menguji hubungan linear untuk arah yang telah ditentukan, sehingga tidak dapat mengidentifikasi arah

hubungan berbeda yang mungkin terjadi; (4) dimensi *willingness* dan *capacity* hanya diwakili oleh satu ukuran. Saran untuk riset selanjutnya yaitu (1) memperluas responden agar hasil riset dapat digeneralisir; (2) menggunakan pengukuran kinerja manajerial yang lebih obyektif, misal penilaian kinerja dari atasan (3) dapat menggunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel, dan (4) menggunakan ukuran lain untuk mewakili dimensi *willingness*, misalnya motivasi dan pengalaman serta pengetahuan tentang penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran untuk dimensi *capacity*.

Daftar Referensi

- A. Agbejule, L. Saarikoski. 2006. "The effect of cost management knowledge on the relationship between budgetary participation and managerial performance." *The British Accounting Review* 38 (2006) 427–440.
- Blumberg, M., Pringle, C., 1982. "The Missing Opportunity in Organizational Research: Some Implications for a Theory of Work Performance." *Academy of Management Review*, 1982. Vol. 7, No. 4, 560 – 569.
- Brownell, P., & Merchant, K. 1990." The budgetary and performance influences of product standardization and manufacturing process automation." *Journal of Accounting Research*, 28, 388-397.
- Brownell, P., & Dunk, A. 1991." Task uncertainty and its interaction with budgetary participation and budget emphasis: some methodological issues and empirical investigation." *Accounting, Organizations and Society*, 16,693-703.
- Chenhall, R., & Brownell, P. 1988." The effect of participative budgeting on job satisfaction and performance: role ambiguity as an intervening variable." *Accounting, Organizations and Society*, I. 225-234.
- Covaleski, M., Evans, Luft, Shields. 2003. "Budgeting Research: Three Theoretical Perspectives and Criteria for Selective Integration." *Journal Of Management Accounting Research*. Volume Fifteen. pp. 3–49
- Dunk, A. 1993." The effect of budget emphasis and information asymmetry on the relation between budgetary participation and slack." *The Accounting Review*, 68, 400-410.
- Ghozali, Imam. 2001. "Analisis Multivariate dengan Program SPSS." Edisi 3. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Govindarajan, V., 1986. "Impact of participation in the budgetary process on managerial attitudes and performance: universalistic and contingency perspectives." *Decision Sciences* 17, 496–516.
- J. Jermias, T. Setiawan. 2008." The moderating effects of hierarchy and control systems on the relationship between budgetary participation and performance." *The International Journal of Accounting*, 43 (2008) 268–292
- Kenis, I. 1979. "Effects of budgetary goal characteristics on managerial attitudes and performance." *The Accounting Review*, 54, 707-72 1.
- Kren, L. 1990." Performance in a budget-based control system: an extended expectancy theory model approach." *Journal of Management Accounting Research*, 2, 100-112.

- Lopez, M., Stammerjohan, W., Lee, Kyoo Sang. 2009. "Budget participation and job performance of South Korean managers mediated by job satisfaction and job relevant information," *Management Research News*, Vol. 32 No. 3. pp. 220-238
- Mahoney, T., Jerdee, T., Carroll, S., 1965. "The Jobs of Management." *Industrial Relations* 4, 97-110.
- Meiliana. 2003. "Ketidakpastian Lingkungan dan Informasi Job relevant sebagai Variabel yang Memoderasi pengaruh Karakteristik Sistem Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial," Tesis. Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tidak dipublikasikan.
- Merchant, K. 1984. Influences on departmental budgeting: an empirical examination of a contingency model. *Accounting, Organizations and Society*, 9, 291-310.
- Mia, L. 1988. "Managerial attitude, motivation and the effectiveness of budget participation." *Accounting, Organizations and Society*, 13, 465-476.
- Patterson, M., West, M. A., Lawthom, R., Nickell, S. 1997. "Impact of People Management Practises on Business Performance." *Issues in People Management*. Institute of Work Psychology, University of Sheffield. Institute of Personnel and Development, London, UK.
- Setiawaty, Anita Endang. 2002. "Pengaruh Motivasi terhadap Keefektifan Penganggaran Partisipatif dalam Peningkatan Kinerja Manajerial," Tesis. Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tidak dipublikasikan.
- Setyadi, Heru. 2002. "Pengaruh Locus of Control terhadap keefektifan Penganggaran Partisipatif dalam Peningkatan Kinerja Manajerial." Tesis. Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tidak dipublikasikan.
- Shields, M. D., and S. M. Young. 1993. "Antecedents and consequences of participative budgeting: Evidence on the effects of asymmetrical information." *Journal of Management Accounting Research* 5: 265-280.
- Shields, M., Young, M., 1994." Managing innovation costs: a study of cost conscious behavior by R&D professionals." *Journal of Management Accounting Research* 6, 175-196.
- Shields, M., Shields, D. 1998. "Antecedents of participative budgeting." *Accounting Organizations and Society* 23, 49-76.
- Weiss, D.J., Davis, R.V., England, G.W. and Lofquist, L.H. 1967. "Manual for the Minnesota satisfaction questionnaire," *Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation* XXII, October, Bulletin 45.

LAMPIRAN

1. Kuesioner

KUESIONER

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya adalah mahasiswa Doktoral ilmu Akuntansi Universitas Indonesia, saat ini sedang melakukan riset tentang *Budget Participation*.

Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu **sekitar 10 menit** untuk mengisi kuesioner terlampir.

Bapak/Ibu diminta memberikan jawaban yang jujur dan benar sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu. Kami akan menjaga kerahasiaan identitas dan data-data terkait Bapak/Ibu.

Terima kasih dan salam sukses selalu.

Salam,

Aria Farahmita

A. DEMOGRAFI

- Jabatan saat ini setara dengan:
 - Staf
 - Staf Senior/Supervisor
 - Manager/Junior
 - Senior Manager

- Usia: _____ tahun

- Klasifikasi Industri Perusahaan/unit kerja: _____

- Divisi/Bagian: _____

- Lama bekerja di perusahaan/unit kerja ini: _____ Tahun

- Latar Belakang Pendidikan:
 - Ekonomi
 - Non- Ekonomi

A. BUDGET PARTICIPATION

Pertanyaan di bawah ini akan mengukur sejauh mana partisipasi anda dalam proses penganggaran di perusahaan atau unit kerja anda.

1. Mana dari berikut ini yang mendeskripsikan aktivitas anda dalam penyusunan anggaran?

Saya terlibat dalam menyiapkan:

Tidak Satu pun dari Anggaran							Terkait Semua Anggaran	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Mana dari berikut ini yang mendeskripsikan alasan yang diberikan atasan anda ketika melakukan revisi anggaran? Alasannya adalah

Sangat Arbitrer dan/atau Tidak Logis							Sangat Logis	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Seberapa sering anda menyatakan usulan, pendapat dan atau saran kepada atasan anda terkait anggaran yang sedang disusun, tanpa diminta?

Tidak Pernah	Sangat Sering
--------------	---------------



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

4. Menurut anda, seberapa besar pengaruh anda terhadap anggaran versi final yang ditetapkan? Kontribusi saya:

Sangat Tidak Penting			Sangat Penting			
1	2	3	4	5	6	7

5. Bagaimana anda memandang kontribusi anda terhadap anggaran final yang ditetapkan? Kontribusi saya:

Sangat Tidak penting			Sangat penting			
1	2	3	4	5	6	7

6. Seberapa sering atasan anda meminta opini dan atau saran dari anda ketika penyusunan anggaran?

Tidak pernah			Sangat Sering			
1	2	3	4	5	6	7

B. COST MANAGEMENT KNOWLEDGE

Pertanyaan berikut ini terkait tugas anda terkait fungsi anggaran. Pilih tingkatan yang paling sesuai dengan kondisi anda

1. Pengalaman kerja saya sampai saat ini mencakup tugas-tugas yang terkait dengan tanggung jawab formal dalam pencapaian laba perusahaan/unit kerja

Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju			
1	2	3	4	5	6	7

2. Saya selalu bekerja pada unit kerja dimana ukuran kinerja utamanya adalah laba

Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju			
1	2	3	4	5	6	7

3. Saya memiliki banyak pengalaman dalam pengelolaan biaya



Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju			
1	2	3	4	5	6	7

4. Saya mengelola biaya dengan cara membandingkan jumlah yang dibelanjakan untuk berbagai item dibandingkan dengan jumlah pos anggaran masing-masing item biaya tersebut

Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju			
1	2	3	4	5	6	7

5. Saya mengelola biaya dengan memeriksa apakah jumlah total yang dibelanjakan untuk beberapa item telah memberikan hasil (outcome) yang baik

Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju			
1	2	3	4	5	6	7

6. Cara saya dalam mengelola biaya adalah dengan memperhatikan/mengamati setiap baris pos anggaran dengan sangat seksama

Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju			
1	2	3	4	5	6	7

7. Saya mengevaluasi outcome (hasil) dari pekerjaan saya dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan tersebut

Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju			
1	2	3	4	5	6	7

C. SELF-RATING OF MANAGERIAL PERFORMANCE

Pernyataan berikut ini terkait penilaian anda terhadap **kinerja anda sendiri** dalam beberapa aspek. Anda diharapkan agar memberikan penilaian yang jujur dan benar.

1. *Planning*: menentukan tujuan, kebijakan, dan rangkaian tindakan; menjadwalkan pekerjaan, penganggaran, menetapkan prosedur, memprogram.

Di Bawah Rata-rata	Di Atas Rata-rata
--------------------	-------------------



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2. *Investigating*: Mengumpulkan dan menyiapkan informasi untuk pencatatan/dokumentasi, laporan atas suatu item, mengukur output, dan analisa tugas

Di Bawah Rata-rata						Di Atas Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7

3. *Coordinating*: Bertukar informasi dengan personil lain dalam perusahaan/unit kerja untuk menghubungkan dan mengimplementasikan program; mengarahkan dan menjadi penghubung (liaison) dengan personil lain.

Di Bawah Rata-rata						Di Atas Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7

4. *Evaluating*: Menilai laporan kinerja yang diajukan, menilai kinerja karyawan, menilai catatan output, menilai laporan keuangan atau melakukan inspeksi produk

Di Bawah Rata-rata						Di Atas Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7

5. *Supervising*: Mengarahkan, memimpin tim, melatih dan menjelaskan aturan pekerjaan kepada bawahan, memberi tugas kepada bawahan serta mengatasi keluhan bawahan

Di Bawah Rata-rata						Di Atas Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7

6. *Staffing*: Merekrut, mewawancara dan memilih karyawan baru, menempatkan, mempromosikan dan melakukan rotasi karyawan.

Di Bawah Rata-rata						Di Atas Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7

7. *Negotiating*: Melakukan pembelian, penjualan atau mengadakan kontrak barang dan jasa, menghubungi pemasok atau melakukan negosiasi dengan pemasok

Di Bawah Rata-rata						Di Atas Rata-rata
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. *Representing* : Menghadiri pertemuan dengan perusahaan/unit kerja lain, konsultasi dengan pihak luar, menghadiri *business club meeting*, *public speech*, kegiatan dalam komunitas terkait, dan aktivitas lain yang merupakan perhatian penting dalam perusahaan/unit kerja.

Di Bawah Rata-rata						Di Atas Rata-rata
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Kinerja anda secara keseluruhan

Di Bawah Rata-rata						Di Atas Rata-rata
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. JOB SATISFACTION

Pernyataan berikut ini bertujuan mengukur tingkat kepuasan kerja Bapak/Ibu. Pilih ekspresi yang paling mewakili kondisi Bapak/Ibu terkait pekerjaan saat ini, sesuai arti berikut ini:

Sangat puas (SP)	saya sangat puas dengan aspek pekerjaan ini
Puas (P)	saya puas dengan aspek pekerjaan ini
Netral (N)	saya tidak dapat memutuskan apakah saya puas atau tidak dengan aspek pekerjaan ini
Tidak puas (TP)	saya tidak puas dengan aspek pekerjaan ini
Sangat tidak puas (STP)	saya sangat tidak puas dengan aspek pekerjaan ini

	STP	TP	N	P	SP
1. Menjadikan saya selalu sibuk sepanjang waktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Kesempatan mengerjakan sendiri tugas saya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kesempatan untuk mengerjakan hal yang berbeda dari waktu ke waktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kesempatan untuk menjadi "seseorang" dalam komunitas saya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Cara atasan saya menghadapi bawahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Kompetensi atasan saya dalam mengambil keputusan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



7. Dapat mengerjakan sesuatu yang tidak melawan hati nurani saya
8. Bagaimana pekerjaan ini dapat memberikan keamanan
9. Kesempatan melakukan sesuatu untuk orang lain
10. Kesempatan memberi tahu orang lain mengenai apa yang harus dikerjakan.
11. Kesempatan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan saya
12. Cara perusahaan/unit kerja dalam menerapkan kebijakan
13. Kompensasi yang saya terima dan jumlah pekerjaan yang harus saya lakukan
14. Kesempatan peningkatan karir
15. Kebebasan menggunakan *judgement* individu
16. Kesempatan untuk mencoba metode saya sendiri dalam mengerjakan tugas.
17. Suasana dan kondisi dalam bekerja.
18. Cara para karyawan bersosialisasi satu sama lain.
19. Penghargaan yang diterima untuk hasil kerja yang baik.
20. Prestasi yang saya capai dari pekerjaan saya

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Peran Keadilan Organisasional dan Motivasi dalam Hubungan antara Penganggaran Partisipatif dan Kinerja

SANDRA DWIPUTRI WARDHONO

*MAHFUD SHOLIHIN**

Universitas Gadjah Mada

Abstract: *This study examines whether budgetary participation affects managerial performance and whether such effects is mediated by organizational justice and motivation. Using samples of employees with managerial responsibilities in various functions of a single mining company this study finds that budgetary participation affects managerial performance and the effect is mediated by organizational justice and motivation*

Keywords: *Keadilan Organizational; Kinerja Manajerial, Motivasi, Penganggaran Partisipatif.*

* Corresponding author : mahfud@gadjahmada.edu

Pendahuluan

Keadilan dalam lingkungan kerja merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh karyawan. Menurut Kreitner dan Kinicki (2010), keadilan organisasional terdiri dari tiga komponen yang berbeda, yaitu: distributif, prosedural, dan interaksional. Keadilan distributif merefleksikan bentuk keadilan bagaimana sumber daya dan penghargaan dialokasikan atau didistribusikan. Keadilan prosedural didefinisikan sebagai bentuk keadilan dari prosedur dan proses yang digunakan untuk membuat suatu alokasi keputusan. Sedangkan keadilan interaksional berhubungan dengan perasaan yang dirasakan seseorang apakah sudah diperlakukan adil disaat implementasi prosedur. Perlakuan adil antarpribadi yang dimaksud adalah para manajer berkata dengan jujur dan memperlakukan orang lain dengan sopan dan hormat. Persepsi positif atas keadilan distributif dan prosedural dapat dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam suatu keputusan yang dapat mempengaruhi mereka.

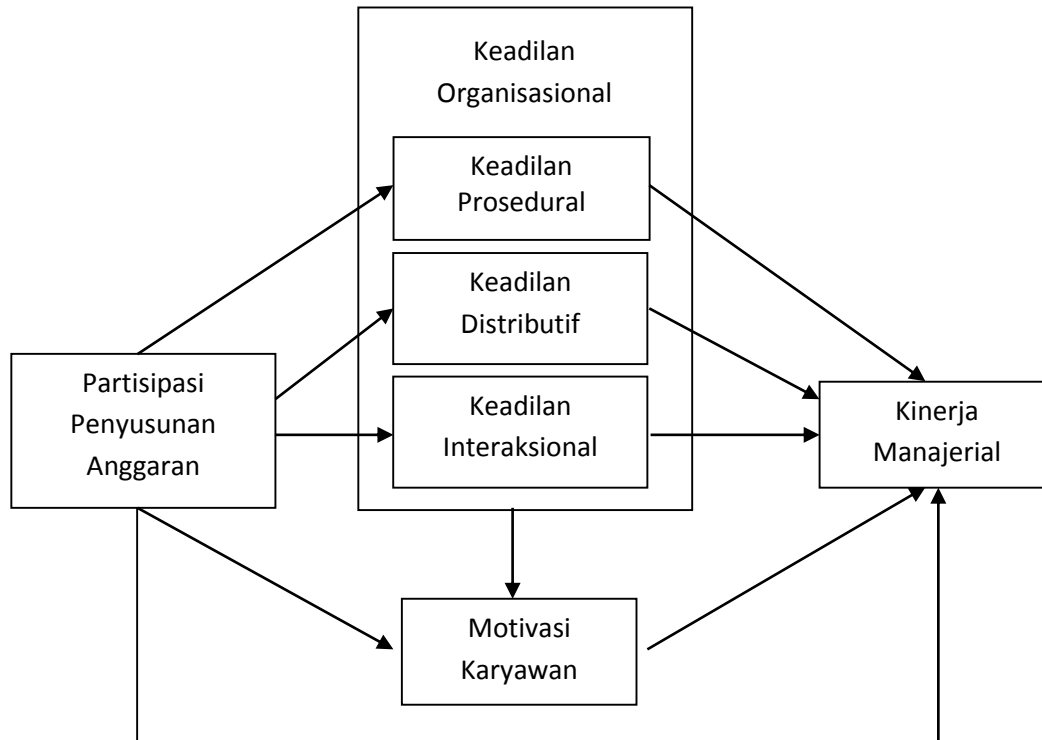
Sholihin dan Pike (2009) melakukan penelitian mengenai model hubungan antara keadilan prosedural dalam evaluasi kinerja dan kepuasan kinerja dengan keadilan distributif, komitmen organisasional dan kepercayaan atasan sebagai variabel intervening. Hasil dari penelitian tersebut menguatkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Lau et. al (2008) dengan sampel yang berbeda. Penelitian tersebut menemukan bahwa hubungan antara keadilan dalam prosedur evaluasi kinerja dan kepuasan kerja secara keseluruhan dimediasi oleh keadilan distributif, kepercayaan, dan komitmen organisasional. Sholihin dan Pike (2009) juga menemukan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara keadilan distributif dengan kinerja melalui komitmen organisasional.

Penelitian lain mengenai pengaruh persepsi keadilan dan komitmen pencapaian tujuan terhadap kinerja manajer dilakukan oleh Wentzel (2002). Wentzel (2002) mendapatkan hasil

bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara persepsi keadilan dan kinerja manajer dengan dimediasi oleh komitmen pencapaian tujuan. Zainuddin dan Isa (2011) juga melakukan penelitian terkait dengan persepsi keadilan yang menguji pengaruh keadilan organisasional dan motivasi dalam hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki hubungan positif dengan kinerja manajerial. Dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran maka kinerja manajerial semakin meningkat jika dibandingkan dengan tanpa adanya partisipasi. Nurcahyani (2010) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasional dan persepsi inovasi sebagai variable intervening pada organisasi sektor publik. Dalam penelitian tersebut didapat hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh langsung terhadap kinerja manajerial. Artinya komitmen organisasional tidak memiliki hubungan dengan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.

Hasil penelitian yang beragam mengenai hubungan antara keadilan prosedural dan kinerja manajerial mendorong peneliti untuk melakukan pengembangan atas penelitian yang sudah dilakukan. Peneliti melakukan modifikasi pengujian terhadap model atau kerangka yang telah dibuat oleh Zainuddin dan Isa (2011) (Gambar 1). Perbedaan kerangka penelitian yang dilakukan sekarang dengan Zainuddin dan Isa (2011) adalah peneliti memodifikasi dengan menjabarkan keadilan organisasional kedalam tiga komponen, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional.

Bagian selanjutnya dari artikel ini adalah telaah literatur dan pengembangan hipotesis yang dilanjutkan dengan metoda penelitian. Bagian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Artikel ini ditutup dengan kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian berikutnya.



Gambar 1. Model Penelitian

Telaah Literatur Dan Pengembangan Hipotesis

1. Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Persepsi Keadilan Organisasional

Persepsi keadilan terdiri dari tiga dimensi, yaitu keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan interaksional. Keadilan distribusi dalam konsep penganggaran berhubungan dengan keadilan dalam mempersiapkan anggaran. Jika karyawan ikut serta dalam penyusunan anggaran, persepsi distribusi dapat berkembang. Untuk meningkatkan kesukaan terhadap anggaran yang ditetapkan, persepsi keadilan distributif juga harus ditingkatkan (Zainuddin dan Isa, 2011).

Jika keadilan distributif adalah untuk memastikan pencapaian atas anggaran yang ditetapkan, keadilan prosedural berkaitan dengan keadilan atas proses atau prosedur yang dijalankan untuk menentukan anggaran final. Partisipasi dapat menciptakan pertukaran informasi yang mana para manajer dapat menunjukkan tujuan dan harapan organisasi kepada

para karyawan, dan karyawan dapat memperoleh informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka (Tang dan Sarsfield-Baldwin, 1996 dalam Zainuddin dan Isa, 2011). Pada saat partisipasi terjadi, meningkat pula pengendalian terhadap proses yang dijalankan, sehingga dapat memperluas persepsi karyawan terhadap keadilan prosedural (Wentzel, 2002).

Keadilan interaksional berhubungan dengan perasaan yang dirasakan seseorang apakah sudah diperlakukan adil dalam implementasi prosedur. Dalam penyusunan anggaran manajer harus mendelegasikan masing-masing pekerjaan kepada pelaksana/ bawahan secara adil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing karyawan. Partisipasi karyawan dalam penyusunan anggaran jika dikaitkan dengan keadilan interaksional sangat dibutuhkan agar manajer dapat mengetahui benar tanggung jawab dari masing-masing pelaksana/ bawahan, sehingga tidak terjadi overlapping dalam pekerjaan dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Ha1: *Terdapat hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan keadilan prosedural*

Ha2: *Terdapat hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan keadilan distributif.*

Ha3: *Terdapat hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan keadilan interaksional.*

2. Keadilan Prosedural dan Motivasi

Setiap manajer yang kompeten harus memperhatikan beberapa prinsip dalam memotivasi karyawan. Salah satu prinsip yang paling penting adalah keadilan. Menurut Smith, Jones, dan Blair, 2000 (dalam Stecher dan Rosse, 2007), meskipun hubungan antara keadilan prosedural dan expectancy theories ambigu, hasil dari studi lapangan atas penyelarasan wilayah tenaga penjualan menunjukkan bahwa persepsi keadilan adalah faktor penentu motivasi yang lebih penting dibandingkan dengan harapan yang mengakibatkan hilangnya wilayah. Mereka

menyarankan bahwa pada situasi hilangnya potensi, keadilan dapat mendorong motivasi bahkan ketika tingkat pengharapan rendah.

Hasil menarik ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Erez dan Isen, 2002 (dalam Stecher dan Boulder, 2007), bahwa perilaku positif secara signifikan dapat meningkatkan motivasi. Hubungan antara pengaruh positif dan motivasi yang ditemukan dalam studi tersebut sangat menunjukkan bahwa sikap positif terhadap organisasi dengan persepsi keadilan prosedural dapat menjelaskan sebagian pengaruh prosedur keadilan terhadap faktor harapan.

Ha2: *Terdapat hubungan positif antara keadilan prosedural dan motivasi karyawan.*

3. Keadilan Distributif dan Motivasi

Teori keadilan distributif dapat juga dikatakan teori ekuitas. Teori ekuitas yang dikembangkan oleh J. Stacey Adams didasarkan pada anggapan bahwa karyawan merasakan hubungan yang seimbang antara hasil dan input. Hasil adalah apa yang karyawan dapatkan dari pekerjaan dan organisasi, dan input adalah apa yang dikontribusikan karyawan untuk pekerjaan dan organisasi. Dalam iInvestigasi yang dilakukan oleh Chorry-Assad (2005) tentang hubungan antara keadilan dan motivasi, ditemukan bahwa baik keadilan prosedural maupun distributif berhubungan secara signifikan dengan motivasi pelajar.

Ha3: *Terdapat hubungan positif antara keadilan distributif dan motivasi karyawan.*

4. Keadilan Interaksional dan Motivasi

Komunikasi yang baik dan lancar antara atasan dan bawahan sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik. Komunikasi yang baik dan lancar akan meningkatkan kemungkinan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan benar dan jelas.

Selain komunikasi yang baik, perilaku saling menghormati satu sama lain antara atasan dan bawahan juga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif.

Dalam kasus di lingkungan profesional, tidak jarang anak buah mengajukan pengunduran diri hanya karena tidak cocok dengan atasannya, atau ada juga yang berusaha untuk bertahan namun hal tersebut tidak berdampak baik, bahkan dapat menurunkan semangat kerja dari karyawan. Motivasi jadi menurun dan karyawan bekerja hanya sebatas untuk memperoleh gaji tanpa mempertimbangkan kinerja mereka. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara atasan dan bawahan dapat mempengaruhi motivasi dalam bekerja.

Ha4: *Terdapat hubungan positif antara keadilan interaksional dengan motivasi karyawan.*

5. Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Motivasi

Partisipasi dalam membuat suatu keputusan sangatlah penting, dengan adanya partisipasi dari seluruh pihak terkait dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan perusahaan yang diharapkan. Dengan adanya partisipasi, seluruh bawahan atau anak buah dapat memberikan informasi penting yang dibutuhkan manajemen dalam mengambil keputusan. Sering kali tidak tercapainya tujuan perusahaan karena kurangnya informasi yang didapat, tidak jarang informasi yang dibutuhkan itu berasal dari bawahan. Peran sekecil apapun dalam suatu perusahaan tetap memiliki kontribusi bagi perusahaan.

Dalam proses penyusunan anggaran perusahaan, tujuan yang jelas dan tegas perlu ditetapkan guna mencapai tujuannya yang diharapkan. Partisipasi manajer dan bawahan dalam menyusun anggaran dapat meningkatkan komitmen mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena manajer dan bawahan nya juga merasa memiliki tanggung jawab yang sama atas keputusan anggaran yang berasal dari hasil pemikiran dan pengalaman mereka selama bekerja di perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin dan Isa (2011)

telah membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan motivasi.

Ha5: *Terdapat hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan motivasi karyawan.*

6. Keadilan Prosedural dan Kinerja Manajerial

Secara umum menyatakan bahwa evaluasi atas keadilan distributif ataupun prosedural berhubungan positif terhadap kebanggaan dan harga diri (Elovainio et al, 2001) dan secara negatif berhubungan dengan perasaan marah, agresi, dan perilaku sosial yang negatif (Skaricki, Folger, & Tesluk, 1999). Dengan demikian jika dikaitkan dengan kinerja manajerial maka ketidakadilan yang dirasakan oleh karyawan dalam suatu lingkup kerja akan berakibat turunnya kinerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zainuddin dan Isa (2011).

Ha6: *Terdapat hubungan positif antara keadilan prosedural dan kinerja manajerial*

7. Keadilan Distributif dan Kinerja Manajerial

Pada penelitian terdahulu telah memberikan bukti empiris atas hubungan langsung antara keadilan distributif dan keadilan prosedural, dan kinerja. Seperti penelitian yang dilakukan Libby (2001) dan Byrne dan Damon (2008), mereka menemukan adanya dampak utama yang signifikan dalam hubungan antara persepsi keadilan dan kinerja. Namun kebalikan dari hasil penelitian yang tersebut, Lidquist (1995) dan Libby (1999) tidak mampu membuktikan pengaruh signifikan persepsi keadilan dan kinerja.

Meskipun terdapat konflik dalam penemuan, tidak jarang literatur lain memberikan bukti empiris atas dampak positif dari persepsi keadilan terhadap kinerja organisasi. Misalnya

meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan keterlibatan kerja karyawan (Tang dan Sarsfield-Baldwin, 1996), meningkatkan kinerja manajerial (Zainuddin dan Isa, 2011).

Ha7: *Terdapat hubungan positif antara keadilan distributif dan kinerja manajerial*

8. Keadilan Interaksional dan Kinerja Manajerial

Keadilan interaksional mencerminkan sejauh mana pengambil keputusan atau supervisor memperlakukan karyawan dengan hormat dan kepekaan dan menjelaskan alasan atas keputusan secara menyeluruh. Seperti penelitian yang dilakukan Mikula, Petrick, dan Tanzer (1990) membuktikan bahwa laporan yang mereka terima dalam penelitiannya atas ketidakadilan bukanlah bersifat distributif atau prosedural, namun bagaimana para responden diperlakukan oleh rekan kerja maupun atasan mereka.

Penelitian oleh Li dan Butler (2004) membuktikan bahwa keadilan interaksional sepenuhnya memediasi pengaruh dari dasar pemikiran tujuan terhadap komitmen dalam mencapai tujuan. Dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya keadilan interaksional seharusnya juga dapat meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan perusahaan.

Ha8: *Terdapat hubungan positif antara keadilan interaksional dan kinerja manajerial*

9. Motivasi dan Kinerja Manajerial

Anggaran merupakan tujuan yang harus dicapai dalam tingkat organisasi. Tujuan yang spesifik dan menantang akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tujuan yang lebih umum dan mudah (Bryan and Locke, 1967 dalam Zainuddin dan Isa, 2011). Hal ini menjadi motivasi bagi para manajer untuk memberikan kinerja terbaiknya yang akan berdampak pada tercapainya anggaran yang diharapkan. Motivasi yang ditimbulkan dari

penetapan anggaran yang sesuai menjadi bukti bahwa dengan meningkatkan motivasi karyawan mampu meningkatkan kinerja manajerial.

Ha9: *Terdapat hubungan positif antara motivasi karyawan dan kinerja manajerial*

10. Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial

Partisipasi penyusunan anggaran mampu membuat keikutsertaan para manajer dalam mengambil keputusan anggaran dan kemungkinan memberikan pengaruh terhadap anggaran final (Kenis, 1979). Hal ini mendorong terjadinya penyampaian dan pertukaran pengetahuan dan informasi yang relevan dari dan untuk atasan maupun bawahan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Tidak hanya itu, partisipasi penyusunan anggaran juga meyakinkan keakuratan dari anggaran yang ditetapkan, meningkatkan kepercayaan anak buah, meningkatkan komitmen organisasi dan menciptakan transparansi (Nouri dan Parker, 1998; Lau dan Tan, 2006; Lau dan Lim, 2002).

Ha10: *Terdapat hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial*

11. Keadilan Prosedural dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial

Dalam penelitian Wentzel (2002) ditemukan pengaruh positif keadilan prosedural dan komitmen pencapaian tujuan yang memediasi hubungan antara partisipasi dan kinerja. Atas dasar hasil penelitian tersebut, Zainuddin dan Isa (2011) melakukan penelitian baru yang menguatkan temuan yang telah ada yaitu bahwa keadilan prosedural memediasi hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial. Penelitian kali ini akan menguji kembali hipotesis yang sudah ada untuk menguatkan hasil yang diberikan.

Ha11: *Terdapat hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial melalui keadilan prosedural.*

12. Keadilan Distributif dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial

Dalam penelitian Wentzel (2002) ditemukan pengaruh positif keadilan distributif dan komitmen pencapaian tujuan yang memediasi hubungan antara partisipasi dan kinerja. Atas dasar hasil penelitian tersebut, Zainuddin dan Isa (2011) melakukan penelitian baru yang menguatkan temuan yang telah ada yaitu bahwa keadilan distributif memediasi hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial. Penelitian kali ini akan menguji kembali hipotesis yang sudah ada untuk menguatkan hasil yang diberikan.

Ha12: *Terdapat hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial melalui keadilan distributif.*

13. Keadilan Interaksional dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial

Partisipasi penganggaran jika dikaitkan dengan keadilan interaksional sangat dibutuhkan agar manajer dapat mengetahui benar tanggung jawab dari masing-masing pelaksana/ bawahan, sehingga karyawan tidak merasa terbebani atas pekerjaan yang mereka emban. Dengan itu, karyawan dapat bekerja dengan optimal dan memberikan hasil yang memuaskan bagi perusahaan. Dukungan yang akan diberikan karyawan kepada pihak manajemen pun akan maksimal. Bagian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berhubungan positif dengan keadilan interaksional dan keadilan interaksional berhubungan positif dengan kinerja maka hipotesis berikut diruuskan.

Ha13: *Terdapat hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial melalui keadilan interaksional.*

14. Motivasi Karyawan dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial

Para ahli sebelumnya berpendapat bahwa dalam beberapa temuan yang sudah ada mengenai hubungan partisipasi dan kinerja, sangat mungkin bahwa hubungan yang ada menjadi hubungan tidak langsung daripada langsung (Brownell 1982, Shields dan Shields, 1998 dalam Zainuddin dan Isa, 2011). Satu variabel yang mungkin dapat memediasi hubungan tersebut adalah motivasi. Beberapa studi lainnya juga menemukan hubungan positif antara partisipasi dan motivasi (Kenis, 1979; Merchant, 1981 dalam Zainuddin dan Isa, 2011) dan hubungan positif antara motivasi dan kinerja (Brownell dan McInnes, 1986 dalam Zainuddin dan Isa, 2011). Atas dasar hasil penelitian tersebut Zainuddin dan Isa (2011) menemukan bahwa motivasi merupakan variable yang memediasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Pada penelitian kali ini, peneliti menguji kembali penelitian dari Zainuddin dan Isa untuk menguatkan hasil penelitian tersebut.

Ha14: *Terdapat hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial melalui motivasi*

Metoda Penelitian

Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan PT DH Tbk. dari seluruh departemen dan unit kerja yang ada yang menduduki posisi senior officer hingga manajer. Pengambilan sampel dilakukan dengan didasarkan pada dua kriteria, yaitu: (1) bekerja lebih dari 1 tahun di PT DH Tbk, dan (2) setidaknya telah mengikuti satu kali proses penyusunan anggaran di perusahaan.

Variabel dan pengukurannya

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi penyusunan anggaran. Adapun definisi dari partisipasi penyusunan anggaran adalah proses yang mana kinerja para individu dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian anggaran, terlibat, dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan target anggaran (Brownell 1982 dalam Yunita). Variabel ini diukur menggunakan 5 (lima) komponen pernyataan yang diukur dengan skala likert 1-7.

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial yang dapat didefinisikan sebagai usaha yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan tempat bekerja guna mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan. Variabel terikat ini diukur berdasarkan kinerja karyawan dari sisi penetapan target atau tujuan, persiapan dan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, pelaporan, dan kepemimpinan. Variabel ini diukur menggunakan 5 (lima) komponen pernyataan yang diukur dengan skala likert 1-7.

Variabel perantara yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan organisasional (keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan interaksional) dan motivasi. Pada penelitian ini, peneliti menjabarkan keadilan organisasional kedalam tiga variabel, yaitu keadilan prosedural yang merupakan norma-norma sosial yang berhubungan dengan ‘bagaimana keputusan dibuat’ dan ‘bagaimana orang diperlakukan oleh otorisasi dan pihak lain’ (Lind dan Tyler, dalam Lau *et al*, 2008). Keadilan yang kedua adalah keadilan distributif yang dinilai berdasarkan hasil yang diterima oleh individu dari apa yang telah dilakukan. Keadilan yang ketiga adalah keadilan interaksional yang dinilai dari perlakuan yang diterima seseorang baik dari atasan, bawahan, maupun rekan kerja ditingkat yang sama. Peneliti juga menggunakan motivasi sebagai variabel perantara.

Motivasi didefinisikan sebagai faktor yang dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik guna mencapai tujuan perusahaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrument pernyataan yang telah diuji oleh Wentzel (2002), Luo (2006), dan Harpen et al (2005) yang diukur dengan skala likert 1-7.

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan informatif maka penulis menggunakan dua jenis metode analisis data, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif menampilkan demografik responden sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan PLS dengan software Smart PLS.

Sebelum uji hipotesis dilakukan dulu uji validitas dan reliabilitas. uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua pernyataan atau pertanyaan penelitian yang diajukan untuk meneliti variabel penelitian adalah valid. Valid disini maksudnya adalah dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara setiap butir pernyataan terhadap nilai totalnya. Sedangkan uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Setelah uji validitas dilakukan evaluasi model struktural yang bertujuan untuk memprediksi hubungan antarvariabel laten. Inner model dievaluasi dengan melihat besarnya presentase variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat R-Square untuk konstruk laten endogen, Stone-Geisser test untuk menguji predictive relevance, dan average variance extracted untuk predictiveness dengan menggunakan prosedur resampling untuk memperoleh stabilitas dari estimasi. Nilai R-Squares 0.75, 0.50, dan 0.25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate, dan lemah (Ghozali, 2012).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini telah ditentukan subjek penelitian yang memiliki keterkaitan dengan variable yang telah ditentukan pada bab sebelumnya. Dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang didasarkan kriteria tertentu maka subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah para karyawan PT DH Tbk. yang telah bekerja minimal satu tahun di PT DH Tbk dan telah melewati atau mengikuti proses penyusunan anggaran perusahaan. Karyawan yang menjadi subjek penelitian ini berasal dari beberapa departemen dari tingkat *senior officer* hingga *manager* yang tersebar di empat site (Asamasam, Bengalon, Binungan Timur, dan Malinau).

Adapun subjek penelitian yang dianggap telah memenuhi kriteria yang dimaksud dapat ditunjukkan dalam tabel 1 dan 2 berikut ini:

Tabel 1

Daftar Departemen Yang menjadi Responden

No.	Nama Departemen
1	Finance & Accounting
2	Human Resource
3	Maintenance & Information System
4	Quality, Health, Safety, and Environment
5	Internal Audit
6	Procurement

Tabel 2

Daftar Site yang menjadi Responden

No.	Site/ Lokasi Kerja
1.	Bengalon, Kalimantan Timur
2.	Asamasam, Kalimantan Selatan
3.	Binungan Timur, Kalimantan Timur
4.	Malinau, Kalimantan Tengah
5.	Jakarta, Head Office

Selanjutnya selain kriteria yang telah disebutkan diatas, terdapat pula kriteria terhadap kuesioner yang akan dijadikan sebagai dasar analisis. Adapun kriteria terhadap kuesioner tersebut adalah kuesioner yang telah diisi secara lengkap oleh para responden sesuai petunjuk pengisian, dimana lengkap disini memiliki arti bahwa seluruh pertanyaan dijawab, tidak ada satu pertanyaan yang terlewatkan (*missing*) dan kuesioner tersebut telah dikembalikan kepada penulis.

Berkaitan dengan pengembalian kuesioner sebagai dasar analisis, maka perlu diuraikan seberapa besar tingkat partisipasi responden dalam mengisi kuesioner yang dibagikan dan dikembalikan kepada penulis. Adapun ikhtisar jumlah distribusi kuesioner dan tingkat pengembalian kuesioner yang dilakukan selama penelitian berlangsung disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Distribusi Kuesioner dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah (lembar)
1.	Jumlah kuesioner yang dibagikan (a)	75
2.	Jumlah kuesioner yang dikembalikan	68
2.	Jumlah kuesioner yang tidak dapat dianalisis	4
3.	Jumlah kuesioner yang dapat dianalisis (b)	64
Tingkat Pengembalian Kuesioner yang dapat dianalisis ($b/a \times 100\%$)		85,33%

Dari tabel 3 diatas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat 75 lembar kuesioner yang telah didistribusikan kepada para responden, yang mana kuesioner tersebut didistribusikan dengan proporsi 25 lembar kuesioner untuk *Head Office*, 15 lembar kuesioner untuk Bengalon, 15 lembar kuesioner untuk Asamasam, 12 lembar kuesioner untuk Binungan Timur dan 8 lembar kuesioner untuk Malinau. Sejumlah dari kuesioner tersebut diisi dan dikembalikan kepada penulis sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Adapun jumlah kuesioner yang telah dikembalikan kepada penulis adalah sebanyak 68 kuesioner, dimana 4 diantaranya tidak dapat dianalisis, sehingga jumlah kuesioner yang dapat dianalisis oleh penulis adalah sebanyak 64 kuesioner. Tidak dapat dianalisisnya kuesioner yang telah dikembalikan tersebut pada umumnya dikarenakan adanya kesalahan yang tidak disengaja dalam pengisian kuesioner tersebut, sehingga ada beberapa pertanyaan yang terlewatkan. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat keterbatasan waktu responden dalam mengisi kuesioner dan adanya pekerjaan lain selain mengisi kuesioner ini, dan mungkin terdapat alasan lainnya yang tidak dapat dijelaskan. Dengan membagi antara jumlah kuesioner yang dapat dianalisis (b) dengan jumlah kuesioner yang dibagikan (a), maka dapat diperoleh tingkat pengembalian kuesioner yang dapat dianalisis sebesar 85,33% (64 lembar dari 75

lembar yang dibagikan). Hasil tingkat pengembalian kuesioner ini sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisa statistik.

Dalam penyebaran kuesioner kepada para karyawan PT DH Tbk penulis mengalami beberapa kendala disebabkan oleh dua faktor, terutama karena lokasi responden yang tersebar di 5 lokasi kerja, dan kesibukan dari masing-masing responden karena pekerjaan. Kedua faktor tersebut kiranya cukup menjadi alasan mengapa jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat dianalisis dinilai masih jauh dari nilai yang sempurna.

2. Statistik Deskriptif

Di bagian ini, akan disajikan tabel ikhtisar jawaban responden atas hasil kuesioner yang telah dikembalikan kepada penulis dan yang telah disortir sehingga hasil kuesioner tersebut dapat dianalisis. Adapun karakteristik data diri responden dibagi menjadi 6 jenis karakteristik yang meliputi jenis kelamin, pengalaman kerja di PT DH Tbk., jabatan, usia, status pernikahan, dan pendidikan terakhir. Dengan menggunakan jenis karakteristik tersebut, maka karakteristik responden yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4

Distribusi Karakteristik Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Pria	28	43,75
2.	Wanita	36	56,25
Jumlah		64	100,00
No.	Pengalaman Kerja	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	≤ 2 tahun	15	23,44
2.	3 – 5 tahun	28	43,75
3.	6 – 9 tahun	15	23,44

4.	≥ 10 tahun	6	9,37
Jumlah		64	100,00
No. Jabatan Jumlah Responden (orang) Persentase (%)			
1.	Officer	7	10,94
2.	Supervisor	17	26,56
3.	Superintendent	23	35,94
4.	Manager/ Head of Project	17	26,56
Jumlah		64	100,00
No. Usia Jumlah Responden (orang) Persentase (%)			
1.	< 31 Tahun	26	40,62
2.	31 - 40 Tahun	20	31,25
3.	41 - 50 Tahun	11	17,19
3.	> 50 Tahun	7	10,94
Jumlah		64	100,00
No. Status Nikah Jumlah Responden (orang) Persentase (%)			
1.	Belum Menikah	20	31,25
2.	Sudah Menikah	44	68,75
Jumlah		64	100,00
No. Pendidikan Terakhir Jumlah Responden (orang) Persentase (%)			
1.	D3	0	0,00
2.	Strata – 1 (S – 1)	39	61,94
3.	Strata – 2 (S – 2)	25	38,06
4.	Strata – 3 (S – 3)	0	0,00
Jumlah		64	100,00

Dalam melakukan pengujian kualitas data yang dilakukan terhadap seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini maka yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Adapun pengujian dan hasil pengujian atas ketiga macam pengujian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.) Uji Validitas

Suatu kuesioner dapat dikatakan valid (sah) jika dalam kuesioner tersebut terdapat pernyataan yang mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun hasil dari uji validitas terhadap pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5

Hasil Uji Validitas Pernyataan Dalam Kuesioner

	KD	KI	KM	KP	MO	PP
KD1	0.889006					
KD2	0.564040					
KD3	0.696106					
KD4	0.889006					
KD5	0.696264					
KI1		0.885003				
KI2		0.484065				
KI3		0.617280				
KI4		0.787810				
KI5		0.887347				

KI6		0.843720			
KM1			0.905583		
KM2			0.455953		
KM3			0.618730		
KM4			0.828655		
KM5			0.546686		
KM6			0.807925		
KM7			0.905583		
KM8			0.828655		
KP1				0.633393	
KP2				0.794840	
KP3				0.768555	
KP4				0.451209	
KP5				0.806731	
KP6				0.794840	
KP7				0.781192	
KP8				0.712148	
ME1					0.918913
ME2					0.484165
ME3					0.918913
ME4					0.918680
ME5					0.484165
ME6					0.616958

MI1					0.871375	
MI2					0.829292	
MI3					0.710150	
MI4					0.707176	
MI5					0.913099	
MI6					0.745076	
MI7					0.801500	
PP1						0.832713
PP2						0.884282
PP3						0.824458
PP4						0.818837
PP5						0.853230

Dari tabel 5 dapat dilihat dan disimpulkan bahwa hampir seluruh pernyataan memiliki koefisien korelasi Pearson yang bernilai lebih besar dari atau sama dengan (\geq) 0,500, kecuali untuk komponen pernyataan KI2, KM2, KP4, ME2, dan ME5. Atas dasar tersebut, peneliti menghilangkan komponen pernyataan tersebut dari pengujian data, dan didapat hasil kedua seperti pada table 6:

Tabel 6

Hasil Uji Validitas 2 Pernyataan Dalam Kuesioner

	KD	KI	KM	KP	MO	PP
KD1	0.907584					
KD2	0.523352					

KD3	0.701613					
KD4	0.907584					
KD5	0.660389					
KI1		0.916891				
KI3		0.598489				
KI4		0.796269				
KI5		0.862025				
KI6		0.873827				
KM1			0.916751			
KM3			0.658468			
KM4			0.827672			
KM5			0.660280			
KM6			0.826074			
KM7			0.916751			
KM8			0.827672			
KP1				0.662166		
KP2				0.759136		
KP3				0.795243		
KP5				0.780863		
KP6				0.759136		
KP7				0.807894		
KP8				0.677581		
ME1					0.951695	

ME3					0.951695	
ME4					0.948512	
ME6					0.597983	
MI1					0.847574	
MI2					0.857370	
MI3					0.715824	
MI4					0.658043	
MI5					0.942982	
MI6					0.709584	
MI7					0.797770	
PP1						0.830318
PP2						0.883363
PP3						0.828697
PP4						0.820599
PP5						0.850515

Dari tabel 6 dapat dilihat dan disimpulkan bahwa setelah mengurangi komponen pernyataan KI2, KM2, KP4, ME2, dan ME5, seluruh pernyataan memiliki koefisien korelasi Pearson yang bernilai lebih besar dari atau sama dengan (\geq) 0,500. Besarnya nilai angka tersebut pada setiap pernyataan memiliki arti bahwa komponen-komponen pernyataan yang menyusun variable induk pengukur baik partisipasi penganggaran, keadilan prosedural, keadilan distributif, keadilan interaksional, motivasi, dan kinerja manajerial adalah valid.

2.) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kekonsistenan pernyataan yang berhubungan dengan kelompok komponen masing-masing pernyataan. Konsistensi tersebut digunakan untuk mengetahui kehandalan masing–masing pernyataan terhadap variable. Adapun hasil uji reliabilitas terhadap kelompok komponen pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas Pernyataan Dalam Kuesioner

	Cronbachs Alpha
KD	0.814747
KI	0.870098
KM	0.910640
KP	0.881434
MO	0.950402
PP	0.898432

Dari Tabel diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa setiap kelompok pernyataan yang dianalisis memiliki nilai koefisien Cronbach's alpha yang lebih besar dari atau sama dengan (\geq) 0,600, sehingga nilai yang telah dihasilkan dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen–komponen pernyataan yang menyusun variable induk pengukur adalah konsisten dan dapat dipercaya (handal). Namun demikian nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan hasil *composite reliability* yang memiliki fungsi yang sama, sama-sama untuk menguji realibilitas kelompok pertanyaan. Sehingga peneliti menggunakan *composite reliability* dengan hasil seperti yang ditunjukkan pada table 8:

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas Pernyataan Dalam Kuesioner

	Composite Reliability
KD	0.864284
KI	0.907973
KM	0.929776
KP	0.899947
MO	0.958357
PP	0.924650

Dari table 8 nilai *composite reliability* yang dihasilkan seluruh konstruk reflektif sangat baik yaitu diatas > 0.70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan atau konstruk reflektif adalah memenuhi uji reliabilitas.

3. Pengujian Hipotesis

Dalam program Smart PLS, pengujian hipotesis dapat juga dikatakan uji signifikansi dan pengaruh antarvariabel. Dengan menggunakan evaluasi *inner model* untuk menjawab hipotesis yang telah dirumuskan digunakan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada table 9 berikut ini:

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
KD ->KM	0.392222	0.378615	0.135956	0.135956	2.884914
KI -> KM	1.526519	1.523466	0.130220	0.130220	11.722611
KP ->KM	-0.11946	-0.116126	0.053357	0.053357	2.239003
MO->KM	-0.53322	-0.516775	0.181977	0.181977	2.930152
PP -> KD	0.851209	0.852217	0.019446	0.019446	43.772681
PP -> KI	0.947185	0.948159	0.007220	0.007220	131.194190
PP -> KM	-0.30883	-0.313611	0.063580	0.063580	4.857311
PP -> KP	0.745518	0.749136	0.019719	0.019719	37.806699
PP -> MO	0.912424	0.914091	0.011545	0.011545	79.033247

Dari hasil *path coefficient* diatas dapat dilihat bahwa semua variabel ternyata berpengaruh signifikan dengan nilai T-statistics yang dihasilkan untuk semua variabel >1,96. Hal ini berarti bahwa semua hipotesis alternatif diterima. Variabel keadilan distribusional, keadilan interaksional, keadilan prosedural, dan motivasi keempatnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial dengan nilai T-statistik yang dihasilkan masing-masing 2.884, 11.723, 2.239, dan 2.930 > 1.96. Selanjutnya untuk variabel penganggaran partisipatif berpengaruh signifikan terhadap keadilan distribusional, keadilan prosedural, keadilan

interaksional, kinerja manajerial, dan motivasi dengan nilai T-statistik masing-masing 43.773, 37.807, 131.194, 4.857, dan 79.033 > 1.96.

Dari hasil pada table 9 dapat dilihat bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh signifikan terhadap keadilan organisasional dan motivasi, dan keadilan organisasional dan motivasi juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil tersebut peneliti menyimpulkan bahwa keadilan organisasional dan motivasi memiliki efek mediasi terhadap hubungan antara penganggaran partisipatif dan kinerja manajerial.

Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran Untuk Penelitian Berikutnya

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah keadilan organisasional yang terdiri dari keadilan prosedural, distributif, dan interaksional serta motivasi memediasi hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Dengan menggunakan sampel karyawan sebuah perusahaan pertabagan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dimensi keadilan organisasional dan motivasi memediasi hubungan antara penyusunan anggaran dan kinerja manajerial.

Meskipun hasil penelitian ini mendukung semua hipotesis yang diajukan, hasil ini harus ditafsirkan secara hati-hati karena beberapa keterbatasan yang ada di penelitian ini. Pertama, sampel penelitian ini hanya menggunakan karyawan dari satu organisasi. Oleh karena itu penelitian selanjutnya bisa menggunakan sampel dari berbagai organisasi untuk menguji generalisasi hasil studi ini. Kedua, pengukuran dalam penelitian ini menggunakan persepsi. Penelitian berikutnya bisa menggunakan pengukuran yang sifatnya aktual. Ketiga, karena penelitian ini menggunakan survey, maka keterbatasan yang melekat pada metoda survey juga

ada di penelitian ini. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan pendekatan yang berbeda, misal menggunakan metode eksperimen.

Daftar Pustaka

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). *Management Control System* (11th ed.). New York: McGraw-Hill. Terjemahan Salemba Empat.
- Bento, A., & White, L. F., (2006). Budgeting, Performance Evaluation, and Compensation: A performance Management Model. *Advances in Management Accounting*. 15. 51-79.
- Chong, V. K. & Johnson, D. M. (2007). "Testing a Model of the Antecedents and Consequences of Budgetary Participation on Job Performance". *Accounting and Business Research*, 37(1): 3-19.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S., (2011). *Business Research Methods* (11th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greenberg, J. (1986). "Determinants of Perceived Fairness of Performance Evaluations". *Journal of Applied Psychology*, 71(2): 340-342.
- Greenberg, J. (Juni 1990). "Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow". *Journal of Management*, 16(2): 399-432.
- Hansen, D. R. & Mowen, M. M. (2004). *Akuntansi Manajemen*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasmarini, D. P. & Yuniawan, A., (2008). "Pengaruh Keadilan Prosedural dan Distributif Terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Afektif". *Jurnal Bisnis Strategi* 17(1), Juli 2008.
- Ikramullah, M., Shah, B., Hassan, F. S, Zaman, T., & Khan, H. (November 2011). "Fairness Perceptions of Performance Appraisal System: An Empirical Study of Civil Servants in District Dera Ismail Khan, Pakistan". *International Journal of Business an Social Science*, 2(21): 92-100.
- Khalil, N. (2009). "Task Uncertainty, Participative Budget, and Performance: The Case of KIC Group of Companies". *Universiti of Malaya*. Malaysia.
- Kreitner, R. & Kinicki, A. (2010). *Organizational Behavior*. New York, United State: McGraw-Hill 9th edition Page: 221-222.
- Kren, L., (2003). The Effects of Uncertainty, Participation, and Control System Monitoring on the Propensity to Create Budget and Actual Budget Slack Created. *Advances in Management Accounting*. 11. 143-167.
- Latan, H & Ghozali, I. (2011). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lau, C. M., Wong, K. M. & Eggleton, I. R. C. (2008). "Fairness of Performance Evaluation Procedures and Job Satisfaction: The Role of Outcome-Based and Non-Outcome Based Effects". *Accounting and Business Research*, 38(2): 121-135.
- Nugraheni, F. & Wijayanti, R. Y. (2009). "Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja: Studi Kasus pada Akademisi Universitas Muria Kudus". *Summary Hasil Penelitian Dosen Muda yang Dibiayai Dikti*.

- Nurcahyani, K. (2010). "Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui Komitmen Organisasional dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel *Intervening*". *Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Shah, A. (2007). *Participatory Budgeting*. *The World Bank*: Washington D.C
- Sholihin, M. & Pike, R. (2009). "Fairness in Performance Evaluation and Its Behavioural Consequences". *Accounting and Business Research*, 39(4): 397-413.
- Sholihin, M., Pike, R., Mangena, M., & Li, J. (2011). "Goal-setting Participation and Goal Commitment: Examining the Mediating Roles of Procedural Fairness and Interpersonal Trust in a UK Financial Services Organisation". *The British Accounting Review*, 43: 135-146.
- Wentzel, K. (2002). "The Influence of Fairness Perceptions and Goal Commitment on Managers' Performance in a Budget Setting". *Behavioral Research in Accounting*, 14: 247.
- Yunita, L. D., (2001). Analisis Pengaruh Sistem Anggaran Partisipatif, Struktur Organisasi Desentralisasi dan Perilaku Manajer pada Kinerja Manajerial: Studi pada PT Pos Indonesia (Persero) Wilayah VIII-Denpasar. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang: UPT-PUSTAK-UNDIP.
- Zainuddin, S. & Isa, C. R., (2011). "The Role of Organizational Fairness and Motivation in the Relationship Between Budget Participation and Managerial Performance: A Conceptual Paper". *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(12): 641-648.

Dampak Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rumah Sakit (Analisis Pengukuran Kinerja Non Keuangan)

DIAN PURNAMA SARI

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

ERWIN SARASWATI*

Universitas Brawijaya

Abstract: *Performance measurement in hospitals is difficult to do because the human resources did much in the operational activities. This study tried to analyze patient satisfaction as one of the non-financial measurement process quality of services performed by doctors, nurses and pharmacy staff. Results of this study showed that the quality of the service process by doctors, nurses and successfully treatment significantly influence patient satisfaction. This indicates that the quality of the service process by doctors, nurses and successfully treatment can be measured through patient satisfaction. Quality of the service process by pharmacy staff and ease administratif no significant effect on patient satisfaction. That is, there is the quality of the service process by pharmacy staff and ease administratif should be measured through the measurement of non-financial sharing.*

Keywords: *Patient Satisfaction, Non-Financial Measurement, Hospital, Quality of Service.*

* Corresponding author: dianpurnama1985@yahoo.com

Latar Belakang

Pendidikan, kesehatan dan kestabilan ekonomi merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu negara (*European Central Bank*, 2003; Afonso, Schuknecht dan Tanzi, 2006; Therkildsen, 2001), sedangkan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus melaksanakan usaha pelayanan kesehatan yang baik bagi seluruh masyarakat melalui rumah sakit. Pelayanan rumah sakit merupakan salah satu faktor kunci yang dapat menentukan kinerja rumah sakit (Chakraborty dan Majumdar, 2011). Harus diakui bahwa pengukuran kinerja rumah sakit tidaklah mudah, seperti pada umumnya pengukuran kinerja di sektor publik. Dalam hal ini diperlukan indikator kinerja yang memudahkan untuk mengukur kinerja (Mahmudi, 2007), sehingga pengukuran kinerja rumah sakit memerlukan indikator yang tepat (Peurseem, Pratt dan Lawrence, 1995) agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Hal ini berarti penting untuk menentukan indikator kualitas pelayanan rumah sakit.

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah rumah sakit dari 585 (2010) menjadi 615 (2011). Namun, tidak semua kinerja rumah sakit pemerintah efektif, terbukti hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2010 menyimpulkan bahwa manajemen rumah sakit belum efektif dalam mengelola pelayanan rawat inap, rawat jalan dan farmasi, sehingga belum optimal dalam menunjang pelayanan kesehatan yang prima (BPK-RI, 2011, p. 77). Kemungkinan disebabkan pengukuran kinerja yang kurang tepat, terutama dalam hal kualitas pelayanan.

Proses pelayanan merupakan hal yang pokok dalam kegiatan operasional sebuah rumah sakit dan dokter adalah sentral layanan kesehatan, bukan rumah sakit ataupun klinik (Jacobs, Marcon & Witt, 2004). Disamping itu, perawat dan farmasi memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas layanan kesehatan dalam sebuah rumah sakit. Ketiga

jenis staf inilah yang menjadi inti pokok dalam proses pelayanan di rumah sakit, karena melayani pasien secara langsung dalam hubungannya dengan kesembuhan sang pasien. Fokus proses pelayanan pada kepuasan pasien dan interaksi medis, sosial dan psikologis antara pasien dan praktisi rumah sakit. Beberapa peneliti menyatakan bahwa kepuasan pasien tidak hanya pada kualitas pelayanan, tetapi juga niat dari pasien untuk menggunakan jasa rumah sakit (Padman, Rajendran dan Lokachari, 2010). Hal ini merupakan konsep keterkaitan antara komunikasi dan kegiatan yang berlangsung antara manusia, dan tidak dapat dinyatakan dalam istilah mekanistik. Oleh karena itu, mengukur kinerja rumah sakit dibutuhkan pengukuran *non-financial* yang berkaitan dengan kepuasan pasien. Ittner & Larcker (1998) menemukan bahwa sebenarnya dalam uji tingkat individu konsumen, kepuasan pelanggan merupakan indikator utama untuk mengukur kinerja akuntansi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh kepuasan pelanggan (Badri, Attia, & Ustadi, 2008; Chakraborty & Majumdar, 2011; Larsson & Wilde-Larsson, 2010; Newman, Maylor, & Chansarkar, 2011; Padma et al., 2011; dan Zineldir, 2006), sedangkan hasil penelitian yang dilakukan di berbagai rumah sakit yang berbeda, baik jenis (rumah sakit pemerintah atau rumah sakit privat), pengukuran dari sudut pandang yang berbeda, ataupun negara yang berbeda, memiliki hasil yang kurang lebih sama, yaitu terdapat hubungan antara kualitas pelayanan industri layanan kesehatan terhadap kepuasan pelanggan. Di Indonesia, penelitian mengenai pengukuran kinerja untuk industri kesehatan lebih banyak menggunakan *balanced scorecard* (Gowon, 2004), sepengetahuan peneliti belum banyak yang mencoba memfokuskan diri pengukuran kualitas proses pelayanan yang merupakan kegiatan sentral dalam sebuah rumah sakit. Penelitian ini menguji kualitas proses pelayanan di rumah sakit yang lebih banyak didasarkan pada perilaku manusia sebagai sumber dayanya yang diukur menggunakan pengukuran kinerja *non-finansial*, yaitu kepuasan pasien.

Kontribusi penelitian diharapkan dapat mengembangkan akuntansi manajemen dalam hal pengukuran kinerja non-keuangan di rumah sakit.

Tinjauan Teori dan Pengembangan Hipotesa

Padma, et al. (2010) berupaya untuk mengkonseptualkan kualitas pelayanan rumah sakit dengan komponen perspektif pasien dan penjaganya dan menganalisis hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan diukur menggunakan 8 konstruk, yaitu infrastruktur, kualitas personal, proses perawatan klinis, prosedur administrative, langkah-langkah keselamatan, citra rumah sakit, tanggung jawab sosial dan kepercayaan terhadap rumah sakit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek pelayanan interpersonal adalah yang paling penting dalam memberikan kepuasan bagi pasien dan penjaganya.

Zineldir (2006) mengembangkan model 5Qs dengan 48 instrumen untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu kualitas objek, kualitas proses, kualitas infrastruktur, kualitas hubungan tindakan dan kualitas atmosfer. Penelitian ini dilakukan di tiga rumah sakit di Mesir dan Yordania. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara untuk meningkatkan kepuasan pasien di rumah sakit pertama adalah untuk mempengaruhi pada dua dimensi kualitas total: kualitas infrastruktur dan kualitas atmosfer, pada rumah sakit kedua implementasi dalam infrastruktur dan suasana di rumah sakit dapat meningkatkan kepuasan pasien. Di sisi lain, di rumah sakit ketiga, pasien sebagian besar puas dengan kualitas proses, kualitas infrastruktur dan kualitas interaksi.

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi, serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita pasien (BPK-RI, 2011, p. 77). Rumah sakit merupakan organisasi

yang mempunyai misi ganda, yaitu misi sosial yang lebih menekankan pada unsur sosial dan nilai pelayanan kesehatan. Di sisi lain, rumah sakit harus efisien untuk dapat tetap beroperasi dan meningkatkan pelayanan. Oleh karenanya, pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan menjadi hal yang penting.

Peurseem et al. (1995) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja dalam manajemen di bidang kesehatan merupakan tugas yang menantang. Kemungkinan hal ini berkaitan dengan misi ganda rumah sakit, sehingga pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Pengukuran kinerja di bidang kesehatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Metode Pengukuran Kinerja di Bidang Kesehatan

Gambar 1 dapat dilihat dalam Lampiran 1

Prespektif akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial, sedangkan prespektif pengukuran merupakan hal yang sulit, karena harus dibedakan mengukur (*measure*) dan pengukuran (*measurement*). Dalam sektor publik pengukuran kinerja lebih ditekankan pada *value for money* (ekonomis, efisiensi dan efektivitas). Ketiganya berkaitan dengan *input*, *output* dan *outcome*.

Pengukuran ekonomis dan efisiensi relatif lebih mudah, karena menghubungkan *input* dan *output* yang secara relatif lebih mudah diukur dari pada *outcome*, dalam hal ini berkaitan dengan efektivitas. Pada layanan rumah sakit *outcome* lebih dekat dengan kualitas pelayanan rumah sakit (Peurseem, et al.,1995), sehingga prespektif pengukuran adalah pengukuran non-keuangan. Kepuasan pelanggan, dalam hal ini pasien merupakan indikator pengukuran non-keuangan.

Kepuasan merupakan hasil kesimpulan seseorang tentang perbandingan antara pelayanan yang diharapkan dengan hasil yang nyata-nyata diperolehnya. Oliver (1989)

dalam Padma, et al. (2010) mendefinisikan kepuasan sebagai respon evaluatif, afektif, atau emosional. Pelanggan dapat mengevaluasi objek hanya setelah mereka memahami objek. Oleh karena itu, kepuasan adalah evaluasi pasca-pembelian produk atau jasa yang sesuai harapan sebelum pembelian. Kepuasan tergantung pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi hukum pelanggan dan harapan dan tidak peduli seberapa baik layanan, pelanggan akan terus mengharapkan layanan yang lebih baik (Padma, et al., 2010).

Tujuan penelitian ini adalah untuk ingin memberikan bukti empiris hubungan pengukuran non-finansial dengan indikator kualitas proses pelayanan, dengan kepuasan pasien dalam sebuah rumah sakit. Kualitas proses pelayanan dibagi menjadi dua divisi yang langsung bersentuhan dengan pasien, yaitu divisi jasa (meliputi dokter dan perawat), serta divisi dagang (yaitu staf farmasi). Secara lebih jelas, model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Model Penelitian

Gambar 2 dapat dilihat dalam Lampiran 1

Sesuai dengan model penelitian dalam Gambar 2, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1:** *Kualitas proses pelayanan dokter berpengaruh signifikan kepada kepuasan pasien*
- H2:** *Kualitas proses pelayanan perawat berpengaruh signifikan kepada kepuasan pasien*
- H3:** *Kualitas proses pelayanan staf farmasi berpengaruh signifikan kepada kepuasan pasien*
- H4:** *Kemudahan administratif proses pelayanan berpengaruh signifikan kepada kepuasan pasien*
- H5:** *Keberhasilan pengobatan berpengaruh signifikan kepada kepuasan pasien*

Model Penelitian

Sample

Penelitian ini dilakukan di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah di Jawa Timur. Rumah sakit “SA” merupakan rumah sakit pendidikan utama dengan akreditasi A. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan survei. Kuisisioner dibagikan kepada pasien ataupun keluarga pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan untuk mengukur tingkat kepuasan pasien. Divisi yang diamati adalah divisi jasa dan divisi dagang, untuk mengukur kualitas pelayanan. Divisi jasa meliputi dokter dan perawat, sedangkan divisi dagang meliputi apoteker dan staf farmasi yang secara langsung berinteraksi dengan pasien. Skala instrumen penelitian dari angka 1 hingga 5, yang menunjukkan sangat tidak puas (1) hingga sangat puas (5). Kuesioner yang kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 44.

Instrumen Penelitian

Sesuai dengan topik penelitian ini, maka instrumen penelitian ini disesuaikan dengan variabel penelitian. Kualitas proses pelayanan, sebagai variabel independen, dibagi menjadi dua divisi utama yaitu, divisi jasa, oleh dokter dan perawat, serta divisi dagang, oleh staf farmasi. Kepuasan pelanggan, sebagai variabel dependen, diukur melalui kepuasan pasien. Instrumen penelitian ini diadaptasi dari penelitian Padma, et al. (2010) dan Zineldir (2006). Variabel kualitas proses pelayanan untuk menilai kepuasan pasien meliputi: (1) Kualitas proses pelayanan oleh dokter dengan indikator (a) profesionalisme, kompetensi, dan keahlian dokter; (b) kualitas personal dokter (ramah dan peduli terhadap kebutuhan pasien); (c) mampu menghadapi keluhan pasien; (d) interaksi dengan dokter spesialis bila dibutuhkan; (e) kepercayaan pasien kepada dokter. Variabel kualitas proses pelayanan oleh perawat meliputi (a) kompetensi dan keahlian perawat; (b) kualitas personal perawat (sopan dan perhatian); (c)

ketrampilan dengan tanggap terhadap kebutuhan pasien; (d) mampu menghadapi keluhan pasien. Variabel kualitas proses pelayanan oleh staf farmasi meliputi (a) kesopanan saat menghadapi pasien; (b) kualitas personal staf farmasi (peduli dan perhatian); (c) cekatan, baik dan ramah dalam menyediakan obat bagi pasien; (d) proses pengambilan obat di apotik atau tempat pengambilan obat.

Variabel kemudahan administratif proses pelayanan meliputi (a) jadwal pelayanan yang sesuai kebutuhan pasien; (b) kecepatan dan ketepatan proses pelayanan; (c) waktu tunggu giliran diperiksa; (d) kemudahan dalam berkonsultasi dengan dokter; (e) bantuan untuk perawatan tambahan bila diperlukan. Variabel keberhasilan pengobatan meliputi (a) keberhasilan pengobatan; (b) kualitas saran dan petunjuk medis saat selesai pengobatan; (c) kebenaran diagnosis dan kondisi pasien; (d) penjelasan mengenai prosedur pengobatan dan hasilnya; (e) informasi yang jelas mengenai tes medis dan kondisi kesehatan pasien; (f) ketepatan penanganan komplikasi yang tak terduga

Hasil Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Analisis PLS adalah teknik statistika multivariate yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda (Jogiyanto & Abdillah, 2009). Analisis PLS digunakan dalam penelitian ini karena dinilai merupakan alat analisis yang paling sesuai dengan penelitian ini dibandingkan alat statistik lainnya. PLS mampu menjadi metode analisis yang *powerfull*, karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak banyak membutuhkan asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar (Wiyono, 2011).

Statistik Deskriptif

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan pengisian kuisioner oleh pasien rumah sakit “SA” dan kuisioner kembali yang dapat diolah adalah sebanyak 44 kuisioner. Deskripsi responden disajikan dalam Tabel 1:

Tabel 1
Deskripsi Responden

Tabel 1 dapat dilihat dalam lampiran 2

Berdasarkan deskripsi Tabel 1, maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 68%. Usia responden didominasi usia 51-70 tahun, yaitu 52.3%, usia 31-50 tahun berada di urutan kedua dengan persentase 31.8%. Sisanya ada di usia di atas 70 tahun dengan 9.08%, serta usia di bawah 30 tahun sebanyak 6,82%. Untuk jenis perawatan didominasi oleh pasien rawat jalan dengan persentase 65.1% dan pasien rawat inap hanya sebesar 34.9%. Hal ini berarti sebagian besar responden merupakan pasien dengan layanan rawat jalan.

Uji Indikator

Sebelum data dianalisis, indikator yang digunakan dalam penelitian ini harus diuji terlebih dahulu. Uji indikator digunakan, agar mengetahui validitas dan reabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan bantuan SmartPLS 2.0, maka hasil uji indikator disajikan dalam Tabel 2:

Tabel 2
Hasil Uji Indikator

Tabel 2 dapat dilihat dalam Lampiran 3

Tabel 2 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan valid dan realibel. Uji *convergent validity* menunjukkan bahwa masing-masing instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini bernilai di atas 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan adalah valid. Demikian pula untuk setiap variabel, *Average Variance Extracted* (AVE), setiap variabel bernilai di atas 0,50, maka dapat dikatakan seluruh variabel adalah valid. *Composite Reliability* digunakan untuk mengetahui reabilitas variabel penelitian ini. Dengan nilai *Composite Reliability* di atas 0,70 maka seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan realibel.

Uji Struktural

Uji Struktural dapat dilihat da;am hasil algoritma PLS yang disajikan dalam gambar 3 berikut ini:

Gambar 3
Hasil Algoritma PLS

Gambar 3 dapat dilihat dalam Lampiran 3

Gambar 3 menunjukkan koefisien parameter antar variabel. Variabel kualitas proses pelayanan oleh dokter (KPD) memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan pasien dengan besar koefisien 0,319. Variabel kualitas proses pelayanan oleh perawat (KPP) memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan pasien dengan koefisien 0,576. Variabel kualitas proses pelayanan oleh staf farmasi (KPF) memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepuasan pasien dengan koefisien 0,018. Variabel kemudahan administratif (KA) memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepuasan pasien dengan koefisien 0,016. Variabel keberhasilan pengobatan (KPO) memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan pasien dengan koefisien 0,166. Hasil tingkat signifikansi disajikan dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Inner Model T-Statistic

Tabel 3 dapat dilihat dalam Lampiran 3

Berdasarkan nilai T-Statistic dari Tabel 3, hubungan signifikan bila nilai T-Statistic di atas nilai 1,96 (Jogiyanto & Abdillah, 2009). Variabel kualitas proses pelayanan oleh dokter memiliki pengaruh yang signifikan dengan kepuasan pasien dengan nilai 3.735511. Variabel kualitas proses pelayanan oleh perawat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien dengan nilai 8.381293. Variabel keberhasilan pengobatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien dengan nilai 2.16899. Variabel kualitas proses pelayanan oleh staf farmasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien (dengan nilai 0.342556) dan variabel kemudahan administratif juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien (dengan nilai 0,204306). Hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1, Hipotesis 2 dan Hipotesis 5 didukung, sedangkan Hipotesis 3 dan Hipotesis 4 ditolak. Secara keseluruhan model dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh variabel-variabel dependen sebesar 86,7% (dengan nilai R Square 0.866983) sisanya sebesar 13,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model.

Pembahasan

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis 1 didukung, artinya kualitas proses pelayanan oleh dokter berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien secara positif. Semakin dokter yang melayani pasien berkualitas, maka kepuasan pasien akan meningkat. Hasil ini sesuai dengan penelitian Jacobs, et al. (2004) yang mengungkapkan dokter adalah tokoh sentral dalam pelayanan di rumah sakit. Hipotesis 2 ditemukan kualitas proses pelayanan oleh perawat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien secara positif. Artinya, semakin perawat yang melayani pasien berkualitas, maka kepuasan pasien juga akan meningkat. Hal ini mungkin sejalan dengan proses pelayanan oleh dokter yang selalu didampingi oleh perawat dan tentu saja berhubungan langsung dengan pasien, konsisten

dengan penelitian Newman, et al. (2001) yang menyimpulkan bahwa perawat yang puas dengan pekerjaannya berdampak pada kepuasan pasien. Hasil ini menunjukkan bahwa proses pelayanan oleh perawat dapat diukur melalui kepuasan pasien. Hipotesis 5 didukung, keberhasilan pengobatan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien secara positif. Artinya, apabila pasien merasa pengobatan yang diperolehnya di rumah sakit berhasil, maka pasien akan merasa puas. Keberhasilan pengobatan memang relatif, di mana pasien hanya mengungkapkan apa yang dirasakannya saat itu. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pasien dapat menjadi salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pengobatan di rumah sakit.

Hipotesis 3 ditolak, artinya kualitas proses pelayanan oleh staf farmasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pasien. Kondisi ini mungkin dipengaruhi bahwa pasien seringkali tidak berhubungan langsung dengan staf farmasi. Saat pasien menjalani rawat inap, obat-obatan seringkali langsung diberikan oleh perawat di ruangan. Pasien rawat inap tidak langsung berhubungan staf farmasi. Pasien rawat jalan pun mungkin mengalami hal yang sama. Biasanya, yang berhubungan dengan pengambilan obat untuk sang pasien adalah keluarga atau teman yang menemani si pasien. Oleh karena itu, untuk mengukur kepuasan Padma, et al. (2010) tidak hanya menggunakan responden si pasien, tetapi juga teman yang menemani si pasien. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas proses pelayanan staf farmasi tidak dapat diukur menggunakan kepuasan pasien. Mungkin dapat dipertimbangkan untuk mengukur kualitas proses pelayanan staf farmasi dengan menggunakan responden teman yang menemani si pasien (seperti yang dilakukan oleh Padma, et al., 2010).

Hipotesis 4 juga ditolak, artinya kemudahan administratif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. Kemudahan administratif, yang meliputi waktu tunggu, kecepatan dan jadwal pelayanan, ternyata tidak berpengaruh kepada kepuasan pasien. Hal ini

mungkin disebabkan rumah sakit yang menjadi objek penelitian adalah rumah sakit umum daerah milik pemerintah yang banyak menerima pasien rujukan dari berbagai daerah, serta banyak menerima pasien jaminan kesehatan masyarakat (baik jamkesmas maupun jamkesda) yang mau menerima kondisi tersebut. Pasien tidak terlalu banyak menuntut kemudahan secara administratif, tetapi lebih kepada proses pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kemudahan administratif tidak dapat diukur melalui kepuasan pasien. Mungkin ada pengukuran-pengukuran lain yang dapat dilakukan misalnya menggunakan jumlah pasien yang mampu ditangani oleh dokter setiap hari, ketepatan waktu pelayanan dan sebagainya.

Namun, variabel dependen mampu menjelaskan variabel independen sebesar 86.7%. Artinya, model penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk mengukur kualitas proses pelayanan rumah sakit dengan menggunakan kepuasan pelanggan sebagai pengukuran non-finansial. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebuah rumah sakit harus memperhatikan kualitas proses pelayanan yang dilaksanakan oleh dokter serta perawat, karena merekalah tokoh sentral dari kepuasan pasien sebagai pelanggan rumah sakit.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas proses pelayanan dalam rumah sakit yang dapat diukur melalui kepuasan pasien meliputi kualitas proses pelayanan oleh dokter, kualitas proses pelayanan oleh perawat dan keberhasilan pengobatan. Kualitas proses pelayanan oleh staf farmasi dan kemudahan administratif tidak dapat diukur melalui kepuasan pasien. Kualitas proses pelayanan oleh staf farmasi disarankan untuk diukur melalui kepuasan orang yang menemani pasien berobat (seperti Padma, et al., 2010). Kemudahan administratif mungkin dapat diukur melalui jumlah pasien yang mampu ditangani dokter setiap harinya, ketepatan waktu layanan dan sebagainya.

Keterbatasan penelitian ini adalah waktu penyebaran kuisioner yang sangat pendek (5 hari), sehingga jumlah kuisioner yang kembali tidak banyak. Penyebaran kuisioner hanya dapat dilakukan secara acak, sehingga komposisi pasien rawat jalan dan pasien rawat inap tidaklah seimbang. Karena itu, pengembangan selanjutnya dapat dikembangkan metode survei dengan waktu yang lebih lama serta dapat dilakukan dengan *purposive sampling* agar kombinasi pasien rawat jalan dan rawat inap dapat lebih seimbang.

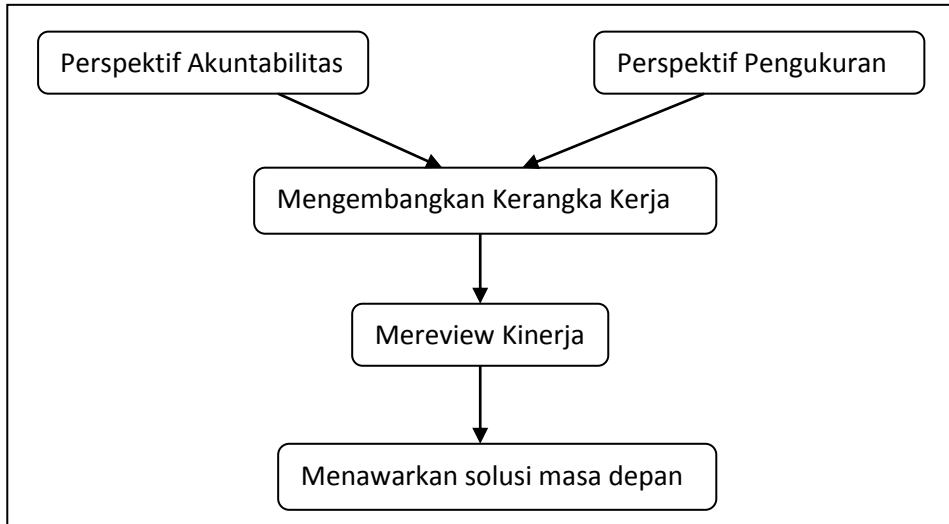
Daftar Pustaka

- Afonso, Antonio, Ludger Schuknecht dan Vito Tanzi. (2006). Public Sector Efficiency: Evidence from New EU Member States and Emerging Markets, (January). *European Central Bank. Working Paper Series, No. 581*.
- Badri, M. A., Attia, S., & Ustadi, A. M. (2008). Healthcare Quality and Moderators of Patient Satisfaction: Testing for Causality. *International Journal of Health Care Quality Assurance, 22*(4).
- BPK-RI. (2011). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010*.
- BPK-RI. (2012). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011*.
- Chakraborty, R., & Majumdar, A. (2011). Measuring Consumer Satisfaction in Healthcare Sector: The Applicability of Servqual. *International Refereed Research Journal, 2*(4).
- European Central Bank. (2003). Public Sector Performances and Efficiency Indicators. *Working Paper Series. No. 242*.
- Gowon, M. (2004). *Analisis Pengukuran Kinerja Rumah Sakit DKT Jogja, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja dan RSUD Sleman*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ittner, C. D., & Larcker, D. F. (1998). Are Nonfinancial Measures Leading Indicators of Financial Performance? An Analysis of Customer Satisfaction. *Journal of Accounting Research, 36*.
- Jacobs, K., Marcon, G., & Witt, D. (2004). Cost and performance information for doctors: an international comparison. *Management Accounting Research, 15*(3), 337-354.
- Larsson, G., & Wilde-Larsson, B. (2010). Quality of Care and Patient Satisfaction: A New Theoretical and Methodological Approach. *International Journal of Health Care Quality Assurance, 23*(2), 228-247.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Newman, K., Maylor, U., & Chansarkar, B. (2001). The Nurse Retention, Quality of Care and Patient Satisfaction Chain. *International Journal of Health Care Quality Assurance, 14*(2), 57-68.
- Padma, P., Rajendran, C., & Lokachari, P. S. (2010). Service Quality and It's Impact on Customer Satisfaction in Indian Hospitals: Perspectives of Patients and Their Attendants. *Benchmarking: An International Journal, 17*(6), 807-841.
- Peursem, K. A. V., Pratt, M. J., & Lawrence, S. R. (1995). Health Management Performance: A Review of Measures and Indicators. *Accounting, Auditing and Accountability Journal, 8*(5), 34-70.

- Therkildsen, Ole. (2001). Efficiency, Accountability and Implementation Public Sector Reform in East and Southern Africa. *United Nations Research Institute for Social Development. Programme Paper No. 3. (February)*
- Wiyono, G. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Zineldir, M. (2006). The Quality of Health Care and Patient Saisfaction: An Exploratory Investigation of the 5Qs model at some Egyptian and Jordanian Medical Clinics. *International Journal of Health Care Quality Assurance, 19(1)*.

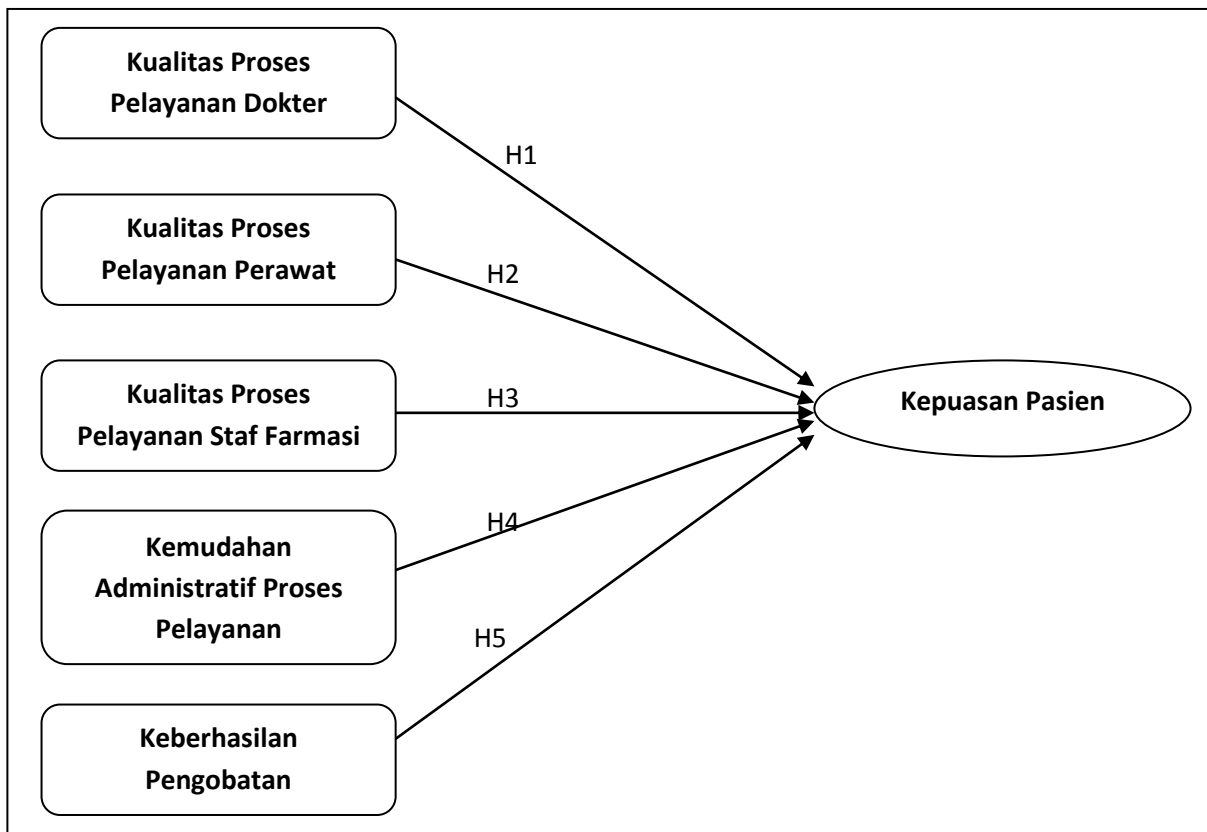
Lampiran 1

Gambar 1
Metode Pengukuran Kinerja di Bidang Kesehatan



Sumber: Peurseem, et al. (1995)

Gambar 2
Model Penelitian



Lampiran 2

Tabel 1
Deskripsi Responden

Deskripsi	Persentase				Total
	Laki-Laki		Perempuan		
Jenis Kelamin	30	68,2%	14	31,8%	44 (100%)
Usia	> 30 tahun	31 – 50 thn	51-70 thn	> 70	Total
	3 (6,82%)	14 (31,8%)	23 (52,3%)	4 (9,08%)	44 (100%)
Jenis Perawatan	Rawat Inap		Rawat Jalan		Total
	29	65,1%	15	34,9%	44 (100%)

Sumber: data primer diolah

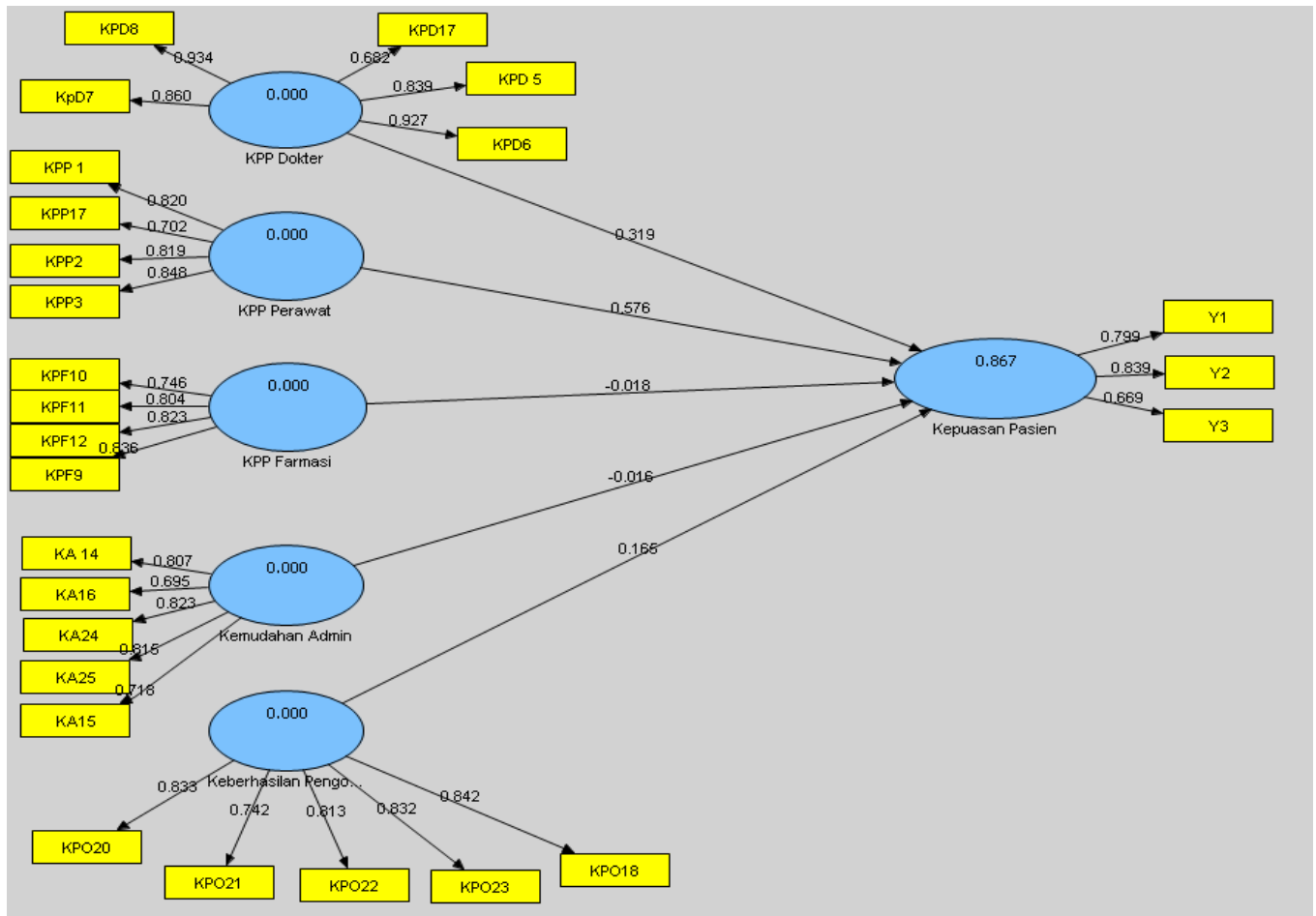
Lampiran 3

Tabel 2
Hasil Uji Indikator

Validitas & Reliabilitas	Indikator	Hasil Uji	Status
<i>Outer Loadings (Convergent Validity)</i>	KA 14 <- Kemudahan Admin	0.807036	Valid
	KA15 <- Kemudahan Admin	0.717789	Valid
	KA16 <- Kemudahan Admin	0.695404	Valid
	KA24 <- Kemudahan Admin	0.823075	Valid
	KA25 <- Kemudahan Admin	0.814707	Valid
	KPD 5 <- KPP Dokter	0.838617	Valid
	KPD17 <- KPP Dokter	0.681997	Valid
	KPD6 <- KPP Dokter	0.927033	Valid
	KPD8 <- KPP Dokter	0.933883	Valid
	KPF10 <- KPP Farmasi	0.745715	Valid
	KPF11 <- KPP Farmasi	0.804207	Valid
	KPF12 <- KPP Farmasi	0.822831	Valid
	KPF9 <- KPP Farmasi	0.835906	Valid
	KPO18 <- Keberhasilan Pengobatan	0.841922	Valid
	KPO20 <- Keberhasilan Pengobatan	0.832525	Valid
	KPO21 <- Keberhasilan Pengobatan	0.741871	Valid
	KPO22 <- Keberhasilan Pengobatan	0.813341	Valid
	KPO23 <- Keberhasilan Pengobatan	0.83206	Valid
	KPP 1 <- KPP Perawat	0.820395	Valid
	KPP17 <- KPP Perawat	0.702361	Valid
	KPP2 <- KPP Perawat	0.81901	Valid
	KPP3 <- KPP Perawat	0.84814	Valid
	KpD7 <- KPP Dokter	0.860226	Valid
Y1 <- Kepuasan Pasien	0.798654	Valid	
Y2 <- Kepuasan Pasien	0.839209	Valid	
Y3 <- Kepuasan Pasien	0.66856	Valid	
<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	KPP Dokter	0.727983	Valid
	KPP Farmasi	0.644657	Valid
	KPP Perawat	0.639119	Valid
	Keberhasilan Pengobatan	0.66123	Valid
	Kemudahan Admin	0.598263	Valid
	Kepuasan Pasien	0.596364	Valid
<i>Composite Reliability</i>	KPP Dokter	0.929721	Reliabel
	KPP Farmasi	0.87869	Reliabel
	KPP Perawat	0.875762	Reliabel
	Keberhasilan Pengobatan	0.906888	Reliabel
	Kemudahan Admin	0.881093	Reliabel
	Kepuasan Pasien	0.814577	Reliabel

Sumber: Hasil Output SmartPLS

Gambar 3
Hasil Algoritma PLS



Sumber: Hasil Output SmartPLS

Tabel 3
Hasil Inner Model T-Statistic

Variabel Dependen	Tingkat Signifikasi	Hasil
KPP Dokter	3.735511	Signifikan
KPP Farmasi	0.342556	Tidak Signifikan
KPP Perawat	8.381293	Signifikan
Keberhasilan Pengobatan	2.16899	Signifikan
Kemudahan Admin	0.204306	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Output SmartPLS

Pemberian Opini Audit *Going Concern*: Konservatif Atau Mempertahankan Akurasi

DODY HAPSORO*
NIMHAS AYANG AGHASTA
STIE YKPN Yogyakarta

Abstract: *This research examine the effect of two aspects of auditor reputation, auditor type and auditor industry specialization for Type 1 Error in the context of issuing going concern audit opinion. Type 1 Error occurs when the auditor issues going concern audit opinion to a company which survives. The purposes of this research are to provide empirical evidence whether the subsequent bankrupt rate after receiving going concern audit opinion will be higher for big four and specialist audit firms than non-big four and non-specialist audit firms. Bankruptcy is proxied by Altman Z Score. This research uses three controlling variables, which are debt default, company size, and audit lag.*

This research uses 65 non-financial companies samples listed on Indonesian Stock Exchange (IDX) between 2008 to 2010. Samples were obtained by purposive sampling method. Data were analyzed by bootstrapped binary logistic regression. The results of this research shows that after controlling for other going concern reporting factor, the subsequent bankrupt rate after receiving going concern audit opinion will be higher for big four and specialist audit firms than non-big four and non-specialist audit firms. It indicates that big four and specialist audit firms have lower Type 1 Error compared to non-big four and non- specialist audit firms. Lower Type 1 Error shows that big four and specialist audit firms maintaining accuracy in the context of issuing going concern audit opinion.

Keywords: *Going Concern Audit Opinion, Type 1 Error, Auditor Type, Auditor Industry Specialization.*

* Corresponding author: dodyhapsoro@gmail.com

I. Pendahuluan

Auditor independen berperan untuk menjembatani kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Selain menilai kewajaran laporan keuangan, auditor independen juga harus memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya (*going concern*). Auditor bertanggungjawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit (SPAP Seksi 341, 2001).

Auditor dapat memberikan opini audit *going concern* jika terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Terdapat dua tipe kesalahan dalam pemberian opini audit *going concern*, Kesalahan Tipe 1 dan Kesalahan Tipe 2. Kesalahan Tipe 1 terjadi jika auditor memberikan opini audit *going concern* kepada perusahaan yang kemudian berhasil *survive*. Kesalahan Tipe 2 terjadi jika auditor tidak memberikan opini audit *going concern* kepada perusahaan yang kemudian bangkrut. Baik Kesalahan Tipe 1 maupun Kesalahan Tipe 2 dapat merugikan auditor, klien dan pengguna laporan keuangan lainnya. Auditor yang melakukan Kesalahan Tipe 1 berisiko untuk kehilangan klien. Klien dapat kehilangan kepercayaan untuk mendapat sumber pendanaan. Kemudian, klien dapat mengekspresikan ketidakpuasannya dengan cara melakukan *auditor switching* dengan harapan dapat memperoleh opini sesuai dengan kondisi perusahaan (Carcello dan Neal, 2003). Jika Kesalahan Tipe 2 terjadi, auditor akan menghadapi risiko kehilangan reputasi, mendapat tuntutan hukum, dan regulasi yang lebih ketat (Carcello dan Palmrose, 1994; Chaney dan Philipich, 2002).

Kebangkrutan perusahaan besar seperti kasus Enron yang juga menyeret nama Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen melemahkan kepercayaan publik terhadap auditor. Kebangkrutan yang tiba-tiba terjadi tanpa adanya *early warning* dari auditor melalui laporan

audit satu tahun sebelum kebangkrutan merupakan contoh Kesalahan Tipe 2. Weiss (2002) menemukan bahwa dari 228 perusahaan publik yang mengalami kebangkrutan, Enron dan 95 perusahaan lainnya menerima *clean opinion* pada tahun sebelum terjadinya kebangkrutan. Kasus ini menantang auditor di seluruh dunia untuk lebih menumbuhkan kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Bawono dan Singgih (2010), peristiwa tersebut membuat auditor merasa dibatasi oleh peraturan baru yang lebih ketat serta merasa profesinya terancam oleh konsekuensi-konsekuensi berat seperti hilangnya kepercayaan publik dan sanksi hukum.

Kehati-hatian auditor diekspresikan dengan meningkatnya jumlah opini audit *going concern* setelah tahun 2001 (Carey, Kortum and Moroney, 2008). Auditor menjadi lebih konservatif dengan meningkatkan jumlah opini audit *going concern* untuk menghindari Kesalahan Tipe 2 (Geiger dan Rama, 2006). Menurut Myers, Schmidt, and Wilkins (2011), jika auditor memberikan opini audit *going concern* dalam jumlah yang lebih sedikit, risiko terjadinya Kesalahan Tipe 2 bertambah, sedangkan Kesalahan Tipe 1 berkurang. Sebaliknya, jika auditor memberikan opini audit *going concern* dalam jumlah yang lebih banyak, risiko terjadinya Kesalahan Tipe 2 berkurang, sedangkan risiko terjadinya Kesalahan Tipe 1 bertambah.

Auditor bereputasi tinggi memiliki motivasi untuk menyediakan kualitas audit yang tinggi secara berkelanjutan untuk mencegah hal-hal yang membahayakan atau merusak reputasi (Kanagaretnam, Lim, and Lobo, 2010). Aspek-aspek reputasi auditor dapat dilihat dari jenis auditor (*big four* dan *non-big four*) dan spesialisasi industri auditor (auditor spesialisasi industri dan auditor *non-spesialisasi* industri). KAP *big four* dinilai memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, kemampuan, fasilitas, sistem, prosedur pengauditan yang digunakan, dan lain-lain) dibandingkan dengan KAP *non-big four* sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih efektif dan efisien (Prabandari dan

Rustiana, 2012). Dengan kelebihan yang dimiliki KAP *big four*, opini audit *going concern* yang dihasilkan memiliki tingkat prediksi yang lebih akurat untuk mendeteksi kebangkrutan suatu perusahaan (Geiger dan Rama, 2006).

Kanagaretnam, Lim, and Lobo (2010) berpendapat bahwa KAP yang fokus dalam industri tertentu akan lebih banyak berinvestasi pada teknologi, fasilitas fisik, anggota, dan sistem pengendalian internal yang akan meningkatkan kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor yang memiliki spesialisasi industri memiliki mutu pelaporan yang lebih baik, dalam hal ini pelaporan *going concern*. Spesialisasi industri auditor dapat diukur dengan menggunakan metode pendekatan *market share*. Menurut Gul, Fung, dan Jaggi (2009), metode ini mengasumsikan bahwa spesialisasi pada auditor merupakan hasil dari pengalaman melakukan audit atas volume bisnis yang besar dalam suatu industri.

Penelitian yang dilakukan oleh Geiger dan Rama (2006) menunjukkan bahwa KAP *big four* memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 dan Tipe 2 yang lebih rendah dibandingkan dengan KAP *non-big four*. Dengan kata lain, KAP *big four* mempertahankan akurasi dalam pemberian opini audit *going concern*. Penelitian yang dilakukan Myers, Schmidt, and Wilkins (2011) menunjukkan bahwa setelah tahun 2001 KAP *big four* mempertahankan akurasi dalam pemberian opini audit *going concern*, sedangkan KAP *non-big four* cenderung konservatif. KAP *non-big four* menerbitkan opini audit *going concern* lebih banyak dibandingkan KAP *big four* dengan harapan dapat mengurangi Kesalahan Tipe 2. Akan tetapi, hal ini berdampak pada meningkatnya Kesalahan Tipe 1. Di sisi lain, KAP *big four* mampu secara sekaligus mengurangi Kesalahan Tipe 1 dan Tipe 2.

Penelitian mengenai Kesalahan Tipe 1 dan Tipe 2 dalam pemberian opini audit *going concern* di Indonesia dapat dikatakan jarang sekali dilakukan. Dalam kaitannya dengan opini audit *going concern*, penelitian yang banyak dilakukan di Indonesia adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit *going concern* dengan berbagai macam

variasi pada variabel independen yang digunakan. Herusetya (2008) menggunakan sampel 31 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk meneliti Kesalahan Tipe 1. Akan tetapi, Herusetya (2008) belum dapat membuktikan bahwa KAP *big four* memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 yang lebih rendah dibandingkan KAP *non-big four*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur, akan tetapi juga perusahaan sektor non-keuangan lainnya dengan harapan hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi.

Penelitian ini ingin menguji apakah reputasi auditor yang terdiri atas dua aspek, yaitu jenis auditor dan spesialisasi industri auditor mempengaruhi tingkat Kesalahan Tipe 1 dalam pemberian opini audit *going concern*. Penelitian yang dilakukan oleh Geiger dan Rama (2006), Herusetya (2008), serta Myers, Schmidt, and Wilkins (2011) membandingkan kesalahan dalam pemberian opini audit *going concern* yang dilakukan oleh KAP *big four* dan KAP *non-big four*. Penelitian ini tidak hanya membandingkan kesalahan dalam pemberian opini audit *going concern* yang dilakukan KAP *big four* dan KAP *non-big four*, akan tetapi juga membandingkan KAP spesialis dan KAP non-spesialis.

Menurut Geiger dan Rama (2006), tingkat kesalahan yang lebih rendah dalam pemberian opini audit *going concern* dapat digunakan sebagai indikator tingginya kualitas keputusan yang dihasilkan suatu KAP. Dengan kata lain, KAP yang mempertahankan akurasi adalah KAP yang memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 yang lebih rendah. Kesalahan Tipe 1 yang lebih rendah direfleksikan dengan tingginya tingkat kebangkrutan perusahaan setelah menerima opini audit *going concern*.

Untuk menentukan suatu perusahaan dalam kondisi bangkrut atau tidak bangkrut digunakan perhitungan Altman *Z Score*. Tingkat Kesalahan Tipe 2 tidak diamati dalam penelitian ini karena data perusahaan yang telah bangkrut di Indonesia tidak tersedia dalam bentuk *database* untuk publik sebagaimana yang tersedia di negara lain seperti *Bankruptcy*

Almanac di Amerika Serikat dan *Connect4 and FinAnalysis Databases* di Australia. Walaupun kebangkrutan dapat diprosikan dengan Altman *Z Score*, akan tetapi waktu penelitian yang diperlukan akan cukup lama.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor *non-keuangan* yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 sampai 2010 yang mendapatkan opini audit *going concern* pertama kali pada periode pengamatan. Selanjutnya akan diamati apakah pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2009, 2010, dan 2011 perusahaan akan mengalami kebangkrutan berdasarkan perhitungan *Z Score*. Oleh karena itu, judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Pemberian Opini Audit *Going Concern*: Konservatif atau Mempertahankan Akurasi”.

II. Tinjauan Teori, Kerangka Pemikiran, Pengembangan Hipotesis

2.1 Tinjauan Teori

Hubungan keagenan merupakan hubungan kontrak yang terjadi antara prinsipal dan agen, dalam hal ini prinsipal (pemegang saham) memberi pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen (manajemen) sesuai kontrak kerja yang disepakati. Menurut Meisser *et al.* (2006), hubungan keagenan mengakibatkan dua permasalahan, yaitu: (1) Terjadinya asimetri informasi karena manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan operasi entitas daripada pemilik dan (2) Terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat perbedaan tujuan, manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Oleh karena itu, dibutuhkan kontribusi dari pihak ketiga yang bersifat independen sebagai mediator di antara dua kepentingan. Pihak ketiga tersebut adalah auditor independen yang bertugas untuk menilai apakah terdapat asimetri informasi maupun manipulasi. Auditor akan menilai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh agen dan harus mengungkapkan

permasalahan *going concern* yang dihadapi perusahaan apabila auditor memiliki kesangsian yang besar terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

SA Seksi 341 paragraf 01 menyatakan bahwa kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Informasi tersebut misalnya berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aset kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa lainnya.

Apabila keadaan-keadaan tentang kemampuan satuan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, auditor harus menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menambahkan paragraf penjelasan yang dicantumkan setelah paragraf pendapat dengan mengacu pada catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan.

Apabila auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan tidak memadai, berarti laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Oleh karena itu, auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pernyataan tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Opini audit *going concern* merupakan opini audit modifikasi yang dikeluarkan oleh auditor jika terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Opini audit *going concern* dapat diterbitkan dengan tambahan paragraf penjas di bawah paragraf pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Opini audit *going concern* dapat berupa opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan mengenai kelangsungan hidup, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan pernyataan tidak memberikan pendapat.

Terdapat dua tipe kesalahan dalam pemberian opini audit *going concern* (Geiger dan Rama, 2006):

1. Kesalahan Tipe 1

Kesalahan Tipe 1 terjadi ketika auditor memberikan opini audit *going concern* kepada perusahaan yang kemudian berhasil *survive*. Dalam hal ini, perusahaan yang mendapatkan opini audit *going concern* tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup pada tahun berikutnya. Auditor yang melakukan Kesalahan Tipe 1 berisiko untuk kehilangan klien. Klien dapat kehilangan kepercayaan untuk mendapat sumber pendanaan. Kemudian, klien dapat mengekspresikan ketidakpuasannya dengan cara melakukan *auditor switching* dengan harapan dapat memperoleh opini sesuai dengan kondisi perusahaan (Carcello dan Neal, 2003).

2. Kesalahan Tipe 2

Kesalahan Tipe 2 terjadi ketika auditor tidak memberikan opini audit *going concern* kepada perusahaan yang kemudian bangkrut. Auditor yang melakukan Kesalahan Tipe 2 akan menghadapi risiko kehilangan reputasi, mendapat tuntutan hukum, dan regulasi yang lebih ketat (Carcello dan Palmrose, 1994; Chaney dan Philipich, 2002).

FASB *Statement of Concept* No. 2 mendefinisikan konservatisme sebagai reaksi hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Dalam kaitannya dengan pemberian opini audit *going concern*, Carey *et al.* (2008) menyatakan bahwa meningkatnya jumlah opini audit *going concern* setelah tahun 2001 dikatakan konservatif jika Kesalahan Tipe 1 meningkat. Setelah tahun 2001, kemungkinan perusahaan yang mengalami *financial distress* untuk mendapatkan opini audit *going concern* meningkat. Auditor lebih berani memberikan opini audit *going concern* kepada perusahaan yang mengalami *financial distress* dengan tujuan untuk mengurangi Kesalahan Tipe 2. Sebagai dampaknya, Kesalahan Tipe 1

meningkat. Dengan kata lain, jumlah perusahaan yang berhasil *survive* setelah menerima opini audit *going concern* meningkat.

Opini audit *going concern* yang diterbitkan oleh suatu KAP tidak selalu dapat memprediksi kebangkrutan. Menurut Geiger dan Rama (2006), tingkat kesalahan yang lebih rendah dalam pemberian opini audit *going concern* dapat digunakan sebagai indikator tingginya kualitas keputusan yang dihasilkan oleh suatu KAP. Dengan kata lain, KAP yang mempertahankan akurasi adalah KAP yang memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 yang lebih rendah. Dengan demikian, KAP yang memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 yang lebih tinggi dapat dikatakan cenderung konservatif karena menerbitkan opini audit *going concern* sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari Kesalahan Tipe 2 yang akan mengakibatkan risiko litigasi bagi KAP yang bersangkutan (Tucker *et al.* 2003).

Menurut Myers, Schmidt, and Wilkins (2011), pemberian opini audit *going concern* dikatakan konservatif jika Kesalahan Tipe 2 berkurang disertai dengan bertambahnya Kesalahan Tipe 1. Setelah tahun 2001, KAP *non-big four* menerbitkan opini audit *going concern* lebih banyak dibandingkan KAP *big four* dengan harapan dapat mengurangi Kesalahan Tipe 2. Akan tetapi, hal ini berdampak meningkatkan Kesalahan Tipe 1.

Pemberian opini audit *going concern* dikatakan akurat jika perusahaan yang menerima opini audit *going concern* mengalami kebangkrutan dalam waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun dari tanggal neraca. Kesalahan Tipe 1 terjadi jika auditor memberikan opini audit *going concern* kepada perusahaan yang kemudian berhasil *survive*. Opini audit *going concern* yang diterbitkan suatu KAP tidak selalu dapat memprediksi kebangkrutan perusahaan. Perusahaan yang diberi opini audit *going concern* belum tentu bangkrut, bahkan dapat *survive* bertahun-tahun. Akan tetapi, belum tentu KAP *big four* ataupun KAP *non-big four* sama-sama tidak mempertahankan akurasi dalam pemberian opini audit *going concern*. Menurut Geiger dan Rama (2006), tingkat kesalahan yang lebih rendah dalam pemberian

opini audit *going concern* dapat digunakan sebagai indikator tingginya kualitas keputusan yang dihasilkan suatu KAP. Dengan kata lain, KAP yang mempertahankan akurasi adalah KAP yang memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 yang lebih rendah.

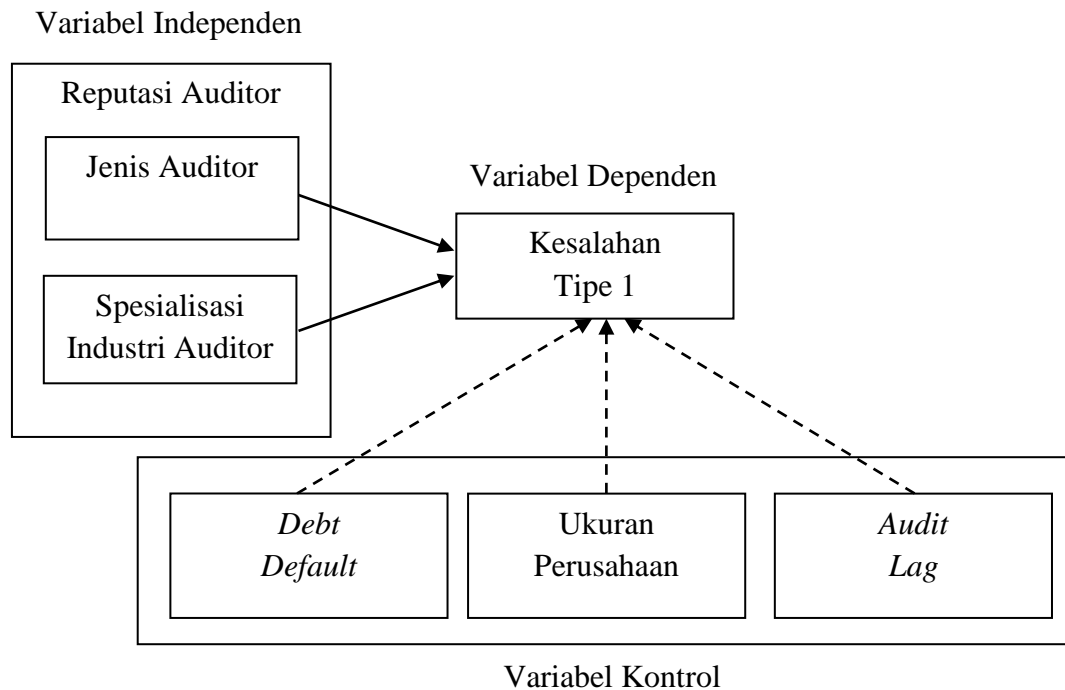
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Geiger dan Rama (2006) serta Myers, Schmidt, and Wilkins (2011), KAP *big four* secara sekaligus memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 dan Kesalahan Tipe 2 yang lebih rendah dibandingkan KAP *non-big four*. Dapat dikatakan bahwa KAP *big four* mempertahankan akurasi dalam pemberian opini audit *going concern*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh jenis auditor dan spesialisasi industri terhadap Kesalahan Tipe 1 dalam pemberian opini audit *going concern*. Pengukuran Kesalahan Tipe 1 dilakukan dengan menggunakan kondisi kebangkrutan. Kebangkrutan diprosikan dengan menggunakan Altman *Z Score*. Variabel kontrol yang akan digunakan, yaitu ukuran perusahaan, *debt default*, dan *audit lag*. Dari tinjauan teori yang telah diuraikan, disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran, kemudian digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Jenis Auditor dan Kesalahan Tipe 1

KAP *big four* dinilai memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, kemampuan, fasilitas, sistem, prosedur pengauditan yang digunakan, dan lain-lain) dibandingkan dengan KAP *non-big four* sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih efektif dan efisien (Prabandari dan Rustiana, 2012). Dengan kelebihan yang dimiliki KAP *big four*, opini audit *going concern* yang dihasilkan memiliki tingkat prediksi yang lebih akurat untuk mendeteksi kebangkrutan suatu perusahaan (Geiger dan Rama, 2006).

Menurut Geiger dan Rama (2006), tingkat Kesalahan Tipe 1 dan Tipe 2 bagi KAP *big four* lebih rendah dibandingkan dengan KAP *non-big four*. Dapat dikatakan bahwa KAP *big*

four memiliki mutu pelaporan *going concern* yang lebih baik dibandingkan KAP *non-big four*. Hasil penelitian Geiger dan Rama (2006) diperkuat oleh Myers, Schmidt, and Wilkins (2011) yang menyatakan bahwa setelah tahun 2001 KAP *big four* mempertahankan akurasi dalam pemberian opini audit *going concern*, sedangkan KAP *non-big four* cenderung konservatif. KAP *non-big four* menerbitkan opini audit *going concern* lebih banyak dibandingkan KAP *big four* dengan harapan dapat mengurangi Kesalahan Tipe 2. Akan tetapi, hal ini berdampak pada meningkatnya Kesalahan Tipe 1. Di sisi lain, KAP *big four* mampu secara sekaligus mengurangi Kesalahan Tipe 1 dan Tipe 2.

Menurut Geiger dan Rama (2006), tingkat kesalahan yang lebih rendah dalam pemberian opini audit *going concern* dapat digunakan sebagai indikator tingginya kualitas keputusan yang dihasilkan oleh suatu KAP. Dengan kata lain, KAP yang mempertahankan akurasi adalah KAP yang memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 lebih rendah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: *Tingkat kebangkrutan setelah menerima opini audit going concern lebih tinggi pada perusahaan yang diaudit oleh KAP big four daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP non-big four.*

2.3.2 Spesialisasi Industri Auditor dan Kesalahan Tipe 1

Penelitian yang dilakukan oleh Geiger dan Rama (2006), Herusetya (2008), dan Myers, Schmidt, and Wilkins (2011) membandingkan kesalahan dalam pemberian opini audit *going concern* yang dilakukan oleh KAP *big four* dan KAP *non-big four*. Penelitian ini tidak hanya membandingkan kesalahan dalam pemberian opini audit *going concern* yang dilakukan oleh KAP *big four* dan KAP *non-big four*, akan tetapi juga membandingkan KAP spesialis dan KAP non-spesialis.

Pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien serta pengetahuan mengenai operasi perusahaan sangat penting untuk melaksanakan audit yang memadai. Setiap industri memiliki isu akuntansi yang berbeda, sehingga kebutuhan audit juga berbeda. Keahlian spesifik industri dan pangsa pasar yang terkonsentrasi pada suatu industri menyebabkan auditor spesialis industri memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor non-spesialis (Carcello *et al.* 1992).

Kanagaretnam, Lim, and Lobo (2010) berpendapat bahwa perusahaan audit atau KAP yang fokus dalam industri tertentu akan lebih banyak berinvestasi pada teknologi, fasilitas fisik, anggota, dan sistem pengendalian internal yang akan meningkatkan kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor yang memiliki spesialisasi industri memiliki mutu pelaporan yang lebih baik, dalam hal ini pelaporan *going concern*.

Menurut Geiger dan Rama (2006), tingkat kesalahan yang lebih rendah dalam pemberian opini audit *going concern* dapat digunakan sebagai indikator tingginya kualitas keputusan yang dihasilkan suatu KAP. Dengan kata lain, KAP yang mempertahankan akurasi adalah KAP yang memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 lebih rendah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: *Tingkat kebangkrutan setelah menerima opini audit going concern lebih tinggi pada perusahaan yang diaudit oleh KAP spesialis daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP non-spesialis.*

III. Metodologi Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2010. Sektor keuangan dikecualikan untuk meminimalkan *industrial effect* yang dapat menyebabkan perbedaan perhitungan tingkat

kesehatan perusahaan. Seperti pada sub sektor perbankan, perhitungan tingkat kesehatan bank (CAMEL) berbeda dengan perhitungan tingkat kesehatan perusahaan non-bank yang dapat menggunakan *Z Score*. Perusahaan sektor keuangan memiliki karakteristik dan regulasi yang berbeda dengan perusahaan sektor non-keuangan. Selain itu, dengan hanya mengecualikan sektor keuangan, diharapkan hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi. Periode pengamatan dipilih dari tahun 2008 sampai 2010 karena merupakan kondisi selama empat tahun terakhir sehingga sangat relevan untuk diteliti.

Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, suatu metode pemilihan sampel non-probabilitas yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari target khusus atau spesifik dengan dasar atau kriteria yang rasional (Sekaran dan Bougie, 2010: 276). Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan selain sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan auditor independen dan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember dalam mata uang rupiah.
3. Perusahaan menerima opini audit *going concern* yang pertama kali untuk laporan keuangan konsolidasian tahun 2008-2010.
4. Perusahaan memiliki data lengkap sesuai yang dibutuhkan.
5. Perusahaan tidak termasuk ke dalam kategori *outlier*.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa laporan keuangan konsolidasian perusahaan selain sektor keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008-2010. Data kualitatif berupa laporan auditor independen. Sumber

data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* BEI, *fact book IDX* 2009-2011, dan ICMD 2009-2011 yang tersedia di Pojok BEI.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal, maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dokumenter seperti laporan keuangan dan laporan auditor independen.

3.4 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kesalahan Tipe 1 dalam pemberian opini audit *going concern*. Kesalahan Tipe 1 terjadi jika auditor memberikan opini audit *going concern* kepada perusahaan yang kemudian berhasil *survive*. Untuk menentukan perusahaan mengalami kebangkrutan atau tidak setelah menerima opini audit *going concern* digunakan perhitungan Altman *Z Score*. Kebangkrutan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Jika *Z Score* berada dalam area bangkrut setelah menerima opini audit *going concern*, diberi kode 1. Jika *Z Score* berada dalam area tidak bangkrut setelah menerima opini audit *going concern*, diberi kode 0. Model revisi Altman (1993) adalah sebagai berikut:

$$Z = 0,717 Z_1 + 0,847 Z_2 + 3,107 Z_3 + 0,42 Z_4 + 0,998 Z_5$$

$$Z_1 = \text{Working capital/total asset}$$

$$Z_2 = \text{Retained earnings/total asset}$$

$$Z_3 = \text{Earnings before interest and taxes/total asset}$$

$$Z_4 = \text{Book value of equity/book value of debt}$$

$$Z_5 = \text{Sales/total asset}$$

Jika $Z \text{ Score} > 2,9$ maka perusahaan berada dalam area tidak bangkrut. Jika $Z \text{ Score} < 1,2$, maka perusahaan berada dalam area bangkrut. Jika $1,2 \leq Z \text{ Score} \leq 2,9$, maka perusahaan berada dalam *grey area*. Dari $Z \text{ Score}$ tersebut, diambil *cut off* pertengahan pada *grey area*, sehingga $Z \text{ Score}$ yang didapat adalah 2,05. Perusahaan yang memiliki $Z \text{ Score} \leq 2,05$ berada dalam area bangkrut. Alasan mengambil *cut off* pada *grey area* karena dalam penelitian ini kondisi perusahaan setelah menerima opini audit *going concern* hanya dikategorikan ke dalam dua kemungkinan, yaitu bangkrut dan tidak bangkrut. Ramadhani (2004) juga mengambil *cut off* pertengahan pada *grey area* untuk menentukan apakah perusahaan berada dalam kondisi *financial distress* atau tidak.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reputasi auditor yang akan dibagi ke dalam dua aspek:

1. Jenis Auditor (AUD)

Jenis auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Jika auditor tergabung dalam KAP *big four*, diberi kode 1. Jika auditor tidak tergabung dalam KAP *big four*, diberi kode 0.

2. Spesialisasi Industri Auditor (SPES)

Spesialisasi auditor diukur dengan menggunakan metode pendekatan *market share*. Menurut Gul, Fung, dan Jaggi (2009), metode ini mengasumsikan bahwa spesialisasi pada auditor merupakan hasil dari pengalaman melakukan audit atas volume bisnis yang

besar dalam suatu industri. Perhitungan spesialisasi industri auditor adalah sebagai berikut:

$$SPES = \frac{\text{Jumlah klien KAP dalam industry}}{\text{Jumlah emiten dalam industry}} \times \frac{\text{Rerata aset klien KAP dalam industri}}{\text{Rerata aset semua emiten dalam industri}}$$

Spesialisasi industri auditor diukur menggunakan variabel *dummy*. Jika KAP menguasai 15% *market share* atau lebih (spesialis), diberi kode 1. Jika KAP menguasai kurang dari 15% *market share* (non-spesialis), diberi kode 0. Batas *market share* minimal 15% tersebut juga digunakan dalam penelitian Junius dan Fitriany (2012). Pengelompokan industri menurut ICMD terdiri atas 34 sub sektor industri. Sub sektor industri yang digunakan dalam penelitian ini mengecualikan sektor keuangan (*banking, credit agencies other than bank, securities, dan insurance*).

3.4.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Debt Default (DEF)*

Debt default atau kegagalan membayar utang merupakan kelalaian atau kegagalan debitur untuk membayar utang pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo (Chen dan Church, 1992). Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami *debt default* jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. Tidak dapat atau lalai membayar utang pokok atau bunga.
- b. Melanggar persetujuan perjanjian utang. Pelanggaran tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditur untuk masa kurang dari satu tahun.

c. Sedang dalam proses negoisasi restrukturisasi utang yang telah jatuh tempo.

Debt default diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Jika perusahaan mengalami *debt default* diberi kode 1. Jika perusahaan tidak mengalami *debt default* diberi kode 0. Perusahaan dalam kondisi *debt default* memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kebangkrutan (Geiger dan Rama, 2006; Chen dan Church, 1992). Dengan demikian, *debt default* diharapkan memiliki tanda positif.

2. Ukuran Perusahaan (*SIZE*)

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Perusahaan yang berukuran besar memiliki kemungkinan lebih kecil untuk memperoleh opini audit *going concern* karena dianggap lebih mampu mengatasi masalah *going concern* dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Oleh karena itu, perusahaan berukuran besar yang menerima opini audit *going concern* dianggap berada dalam kondisi *great stress* dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk bangkrut (Carey *et al.* 2008; Geiger dan Rama, 2006). Dengan demikian, ukuran perusahaan diharapkan memiliki tanda positif.

3. *Audit Lag (LAG)*

Audit lag merupakan jumlah hari antara tanggal tutup buku laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor independen. *Audit lag* akan lebih lama ketika auditor menangani perusahaan yang diragukan kelangsungan hidupnya karena proses pemberian opini melibatkan negoisasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya, dan perluasan lingkup audit (Halim, 1999; Praptitorini dan Januarti, 2007). Dengan demikian *audit lag* diharapkan memiliki tanda positif.

3.5 Model Penelitian

Model penelitian yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\ln \frac{\text{BKRT}}{1 - \text{BKRT}} = \alpha + \beta_1 \text{AUD} + \beta_2 \text{SPES} + \beta_3 \text{DEF} + \beta_4 \text{SIZE} + \beta_5 \text{LAG} + e$$

BKRT = Kondisi kebangkrutan (1 jika *Z Score* berada dalam area bangkrut yaitu $\leq 2,05$ setelah menerima opini audit *going concern* dan 0 jika tidak).

AUD = Jenis auditor (1 jika auditor tergabung dalam KAP *big four* dan 0 jika tidak).

SPES = Spesialisasi industri auditor (1 jika spesialis dan 0 jika tidak).

DEF = *Debt default* (1 jika *debt default* dan 0 jika tidak).

SIZE = Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural dari total aset.

LAG = *Audit lag* (jumlah hari antara tanggal tutup buku laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor independen).

Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dua aspek reputasi auditor, yaitu jenis auditor dan spesialisasi industri auditor. Reputasi auditor yang semakin baik dinilai memiliki tingkat prediksi yang lebih akurat dalam mendeteksi kebangkrutan. Dengan kata lain, tingkat kebangkrutan perusahaan setelah menerima opini audit *going concern* akan lebih tinggi untuk perusahaan yang diaudit oleh auditor yang memiliki reputasi lebih baik (KAP *big four* dan auditor spesialis industri). Dengan demikian, diharapkan koefisien jenis auditor dan spesialisasi industri auditor bertanda positif. Data variabel, notasi, dan prediksi tanda disajikan dalam Tabel 1:

Tabel 1

Data Variabel, Notasi, dan Prediksi Tanda

Variabel	Notasi	Prediksi Tanda
Variabel Dependen:		
Kesalahan Tipe 1	BKRT	
Variabel Independen:		
Jenis Auditor	AUD	(+)
Spesialisasi Industri Auditor	SPES	(+)
Variabel Kontrol:		
<i>Debt Default</i>	DEF	(+)
Ukuran Perusahaan	SIZE	(+)
<i>Audit Lag</i>	LAG	(+)

3.6 Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis digunakan regresi logistik biner karena variabel dependen dalam model penelitian ini menggunakan bilangan biner (kode 1 atau 0). Hal yang membedakan antara regresi logistik biner dengan regresi linier adalah variabel dependen pada regresi logistik biner bersifat *dichotomous* atau biner (Hosmer dan Lemeshow, 2000). Selain itu, variabel independen dan variabel kontrol pada penelitian ini merupakan campuran dari variabel metrik dan non-metrik. Regresi logistik tidak membutuhkan asumsi normalitas data pada variabel independennya. Analisis regresi logistik biner dalam penelitian ini menggunakan SPSS 20.0.

Jika terdapat suatu keadaan di mana dibutuhkan data akan tetapi data yang tersedia hanya sedikit, maka dapat digunakan *bootstrapping* (Sastradihardja, 2006). *Bootstrapping* adalah suatu bentuk *resampling* di mana *original sample* dijadikan sampel secara berulang kali dengan teknik *replacement random sampling* untuk estimasi model (Hair *et al.* 1998: 579). Sampel yang didapatkan dari populasi (*original sample*) akan bertindak sebagai

populasi pada *bootstrapping*. *Replacement random sampling* adalah teknik yang mengambil sampel satu per satu dari *original sample*, setelah satu sampel terambil, sampel tersebut kemudian dikembalikan sebelum mengambil sampel yang lain. Oleh karena itu, dapat terjadi kasus di mana suatu sampel dapat muncul lebih dari satu kali maupun tidak muncul sama sekali. Pada penelitian ini, *resampling* dilakukan sebanyak 1.000 kali. Menurut Hair *et al.* (1998: 695), Hesterberg *et al.* (2005), Sastradihardja (2006), dan Carey *et al.* (2008), jumlah *resampling bootstrap* sebaiknya dilakukan minimal sebanyak 1.000 kali.

IV. Analisis Data Dan Pembahasan

4.1 Hasil Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor non-keuangan yang mendapatkan opini audit *going concern* pertama kali pada periode pengamatan. Untuk perusahaan yang mendapatkan opini audit *going concern* lebih dari satu kali selama periode pengamatan, yang dijadikan sampel adalah saat tahun pertama perusahaan tersebut mendapatkan opini audit *going concern*. Oleh karena itu, jumlah sampel pada tahun 2008 jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2010. Menurut Carey *et al.* (2008), untuk meneliti Kesalahan Tipe 1 lebih baik menggunakan *first time going concern modified opinion* dibandingkan *continuing going concern modified opinion* karena tingkat konservatisme maupun keakuratan lebih terefleksi pada saat opini audit *going concern* pertama kali diberikan.

Laporan keuangan yang diamati adalah laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2008, 2009, dan 2010. Dengan demikian, laporan audit yang diamati adalah laporan audit yang ditandatangani pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Perusahaan yang mendapat opini audit *going concern* kemudian *delisting* pada tahun berikutnya dikategorikan bangkrut. Berdasarkan Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*)

dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, bursa menghapus pencatatan saham perusahaan tercatat jika perusahaan mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Oleh karena itu, perusahaan yang kemudian *delisting* setelah menerima opini audit *going concern* diasumsikan mengalami kebangkrutan. Proses pemilihan sampel disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Proses Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Tahun			Total
		2008	2009	2010	
1	Perusahaan yang terdaftar di BEI	397	402	415	1214
2	Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI	(71)	(69)	(72)	(212)
3	Perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di BEI	326	333	343	1002
4	Perusahaan yang datanya tidak dapat diakses	(21)	(5)	(12)	(38)
	Jumlah perusahaan sampel	305	328	331	964
5	Perusahaan yang mendapatkan opini audit <i>going concern</i>	48	14	10	72
6	Perusahaan yang laporan keuangannya tidak disajikan dalam mata uang rupiah	(1)	-	-	(1)
7	Perusahaan yang laporan keuangannya tidak berakhir pada 31 Desember	(1)	-	-	(1)
8	Perusahaan yang diidentifikasi sebagai <i>outlier</i>	(2)	(1)	(2)	(5)
	Jumlah perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian	45	13	8	65

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3 menggambarkan karakteristik perusahaan yang diberi opini audit *going concern* oleh KAP *big four*, KAP *non-big four*, KAP spesialis, dan KAP non-spesialis.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Variabel	Full Sampel (n = 65)	Jenis Auditor		Spesialisasi Industri Auditor	
		Big Four (n = 14)	Non-Big Four (n = 51)	Spesialis (n = 18)	Non-Spesialis (n = 47)
BKRT (%)	90,77	100	88,24	100	87,23
DEF (%)	90,77	100	88,24	100	87,23
SIZE (milyar Rp)					
Mean	1.567,86	3.394,62	1.066,39	3.509,75	824,16
Max	17.243,72	17.243,72	8.702,06	17.243,72	8.334,99
Min	1,46	53,56	1,46	1,46	4,98
Std Dev	2.870,19	4.489,51	2.028,13	4.246,09	1.660,68
LAG (hari)					
Mean	81,50	86,20	80,20	81,40	81,50
Max	125	125	104	90	125
Min	49	69	49	68	49
Std Dev	11,53	14,25	10,45	5,69	13,15
Keterangan:					
BKRT	Kondisi kebangkrutan (1 jika <i>Z Score</i> berada dalam area bangkrut yaitu $\leq 2,05$ setelah menerima opini audit <i>going concern</i> dan 0 jika tidak)				
DEF	<i>Debt default</i> (1 jika <i>debt default</i> dan 0 jika tidak)				
SIZE	Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural dari total asset				
LAG	<i>Audit lag</i> (jumlah hari antara tanggal tutup buku laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor independen)				

Perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang kelangsungan hidupnya diragukan, sehingga diberi opini audit *going concern* oleh auditornya. Dibandingkan dengan KAP *big four*, KAP *non-big four* lebih banyak mengaudit perusahaan yang kelangsungan hidupnya diragukan. Tabel 3 menunjukkan bahwa

perbandingan jumlah sampel perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dan KAP *non-big four* dapat dikatakan timpang, yaitu masing-masing sebanyak 14 dan 51 perusahaan. Hal yang sama juga terjadi pada KAP spesialis dan KAP non-spesialis. Dibandingkan dengan KAP spesialis, KAP non-spesialis lebih banyak mengaudit perusahaan yang kelangsungan hidupnya diragukan. Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah sampel perusahaan yang diaudit KAP spesialis dan KAP non-spesialis masing-masing sebanyak 18 dan 47 perusahaan.

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa tingkat kebangkrutan tertinggi (100%) setelah menerima opini audit *going concern* dialami oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dan spesialis. Semua perusahaan yang diberi opini audit *going concern* oleh KAP *big four* (14 perusahaan) mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya (*Z Score* berada di area bangkrut, yaitu $\leq 2,05$). Semua perusahaan yang diberi opini audit *going concern* oleh KAP spesialis (18 perusahaan) mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya. Di sisi lain, perusahaan yang diberi opini audit *going concern* oleh KAP *non-big four* (51 perusahaan), hanya 88,24% yang mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya. Perusahaan yang diberi opini audit *going concern* oleh KAP non-spesialis (47 perusahaan), hanya 87,23% yang mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya.

Tabel 3 menunjukkan bahwa semua perusahaan yang diberi opini audit *going concern* oleh KAP *big four* dan spesialis mengalami *debt default*, sedangkan perusahaan yang diberi opini audit *going concern* oleh KAP *non-big four* dan non-spesialis yang mengalami *debt default* sebanyak 88,24% dan 87,23%. Secara keseluruhan (*full sample*), total aset rata-rata adalah sebesar Rp1.567,86 milyar dengan nilai maksimum Rp17.243,72 milyar, nilai minimum sebesar Rp1,46 milyar, dan standar deviasi sebesar Rp2.870,19 milyar. Standar deviasi yang cukup tinggi dan berada cukup jauh di atas rata-rata mengindikasikan bahwa perusahaan yang kelangsungan hidupnya diragukan memiliki ukuran yang sangat bervariasi. Perusahaan yang memiliki total aset terbesar diaudit oleh KAP *big four* dan spesialis.

Perusahaan yang memiliki total aset terkecil diaudit oleh KAP *non-big four* dan spesialis. Total aset minimum perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* (Rp53,56 milyar) masih jauh lebih besar dibandingkan nilai minimum total aset perusahaan yang diaudit oleh KAP lain.

Secara keseluruhan, nilai rata-rata *audit lag* adalah 82 hari dengan nilai minimum 49 hari, dan nilai maksimum 125 hari. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* memiliki nilai rata-rata di atas rata-rata *full sample* dan KAP lainnya, yaitu 86 hari. Nilai maksimum 125 hari dimiliki oleh KAP *big four* dan non-spesialis. Hal ini menunjukkan bahwa KAP *big four* membutuhkan waktu penyelesaian audit yang lebih lama dibandingkan KAP lainnya.

4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan *asymptotic significance* (Sig) dengan tingkat signifikansi 5% (α). Hasil pengujian regresi logistik biner sebelum dan sesudah *bootstrapping* ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4

Hasil Pengujian Regresi Logistik Biner Sebelum & Sesudah *Bootstrapping*

$$\text{Ln} \frac{\text{BKRT}}{1-\text{BKRT}} = 5,432 + 18,209\text{AUD} + 18,641\text{SPES} + 2,562\text{DEF} - 0,259\text{SIZ} + 0,01 \text{LAG} + e$$

Variabel	Prediksi Tanda	Koefisien	Sig	
			Sebelum <i>Bootstrapping</i>	Sesudah <i>Bootstrapping</i>
AUD	+	18,209	0,998	0,017*
SPES	+	18,641	0,998	0,016*
DEF	+	2,562	0,013*	0,006*
SIZE	+	-0,259	0,370	0,267
LAG	+	0,014	0,751	0,728
Konstanta		5,432	0,479	0,357
Keterangan:				
BKRT	Kondisi kebangkrutan (1 jika <i>Z Score</i> berada dalam area bangkrut yaitu $\leq 2,05$ setelah menerima opini audit <i>going concern</i> dan 0 jika tidak)			
AUD	Jenis auditor (1 jika auditor tergabung dalam KAP <i>big four</i> dan 0 jika tidak)			
SPES	Spesialisasi industri auditor (1 jika auditor spesialis dan 0 jika tidak)			
DEF	<i>Debt default</i> (1 jika <i>debt default</i> dan 0 jika tidak)			
SIZE	Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural dari total aset			
LAG	<i>Audit lag</i> (jumlah hari antara tanggal tutup buku laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor independen)			
*Signifikan pada tingkat kepercayaan 95%				

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 20.0

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik biner, kedua variabel independen yaitu jenis auditor dan spesialisasi industri auditor memiliki tingkat signifikansi kurang dari 5% dan bertanda positif. Selain itu, hanya satu dari tiga variabel kontrol yang memiliki tingkat signifikansi kurang dari 5% dan bertanda positif, yaitu *debt default*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami *debt default* memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kebangkrutan. Di sisi lain, variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikansi di atas 5% dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa belum tentu perusahaan yang berukuran lebih besar memiliki kemungkinan kebangkrutan yang lebih besar. Variabel kontrol *audit lag* bertanda positif sesuai prediksi, tetapi memiliki tingkat signifikansi di atas 5%. Hal ini menunjukkan bahwa belum tentu perusahaan yang mengalami kebangkrutan memiliki *audit lag* yang panjang. Berikut ini adalah pembahasan hipotesis berdasarkan pengujian yang telah dilakukan.

1. Jenis Auditor dan Kesalahan Tipe 1

Dari hasil pengujian regresi logistik biner, variabel independen jenis auditor menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 18,209 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,017 (lebih kecil dari 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat kebangkrutan setelah menerima opini audit *going concern* lebih tinggi pada perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP *non-big four*, berhasil didukung.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Geiger dan Rama (2006), Carey *et al.* (2008), dan Myers, Schmidt, and Wilkins (2011) yang menemukan bukti empiris bahwa tingkat kebangkrutan setelah menerima opini audit *going concern* lebih tinggi pada perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four*. Hal ini menunjukkan bahwa KAP *big four* memiliki mutu pelaporan *going concern* yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP *non-big*

four melalui tingkat Kesalahan Tipe 1 dan Tipe 2 yang lebih rendah dibandingkan dengan KAP *non-big four*.

KAP *big four* dinilai memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, kemampuan, fasilitas, sistem, prosedur pengauditan yang digunakan, dan lain-lain) dibandingkan dengan KAP *non-big four*, sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih efektif dan efisien (Prabandari dan Rustiana, 2012). Dengan kelebihan yang dimiliki KAP *big four*, opini audit *going concern* yang dihasilkan memiliki tingkat prediksi yang lebih akurat untuk mendeteksi kebangkrutan suatu perusahaan (Geiger dan Rama, 2006).

Menurut Geiger dan Rama (2006), tingkat kesalahan yang lebih rendah dalam pemberian opini audit *going concern* dapat digunakan sebagai indikator tingginya kualitas keputusan yang dihasilkan suatu KAP. Dengan kata lain, KAP yang mempertahankan akurasi adalah KAP yang memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 yang lebih rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KAP *big four* mempertahankan akurasi dalam pemberian opini audit *going concern*. Di sisi lain, KAP *non-big four* cenderung konservatif. KAP yang memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 lebih tinggi dapat dikatakan cenderung konservatif karena menerbitkan opini audit *going concern* sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari Kesalahan Tipe 2 yang akan mengakibatkan risiko litigasi bagi KAP yang bersangkutan (Myers, Schmidt, and Wilkins, 2011).

Kasus Enron dan KAP Andersen meningkatkan kesadaran auditor mengenai risiko litigasi potensial yang harus dihadapi jika auditor tidak memberi opini audit *going concern* kepada perusahaan yang kemudian bangkrut. Simunic dan Stein (1996), Menon dan William (1994) dan Basu *et al.* (2001) berargumentasi bahwa risiko litigasi memainkan peran penting dalam keputusan pemberian opini oleh suatu KAP. Menurut Myers, Schmidt, and Wilkins (2011), setelah kasus yang terjadi pada Enron dan KAP Andersen, KAP *non-big four*

cenderung menerapkan prinsip *better safe than sorry*, sehingga kemungkinan untuk menerbitkan opini audit *going concern* akan lebih tinggi dengan harapan mampu menghindari Kesalahan Tipe 2.

2. Spesialisasi Industri Auditor dan Kesalahan Tipe 1

Penelitian yang dilakukan oleh Geiger dan Rama (2006), Herusetya (2008), dan Myers, Schmidt, and Wilkins (2011) membandingkan kesalahan dalam pemberian opini audit *going concern* yang dilakukan oleh KAP *big four* dan KAP *non-big four*. Penelitian ini tidak hanya membandingkan kesalahan dalam pemberian opini audit *going concern* yang dilakukan KAP *big four* dan KAP *non-big four*, akan tetapi juga membandingkan KAP spesialis dan KAP non-spesialis.

Dari hasil pengujian regresi logistik biner, variabel independen spesialisasi industri auditor menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 18,641 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 (lebih kecil dari 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tingkat kebangkrutan setelah menerima opini audit *going concern* lebih tinggi pada perusahaan yang diaudit oleh KAP spesialis daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP non-spesialis, berhasil didukung.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien serta pengetahuan mengenai operasi perusahaan sangat penting untuk melaksanakan audit yang memadai. Setiap industri memiliki isu akuntansi yang berbeda sehingga kebutuhan audit juga berbeda. Keahlian spesifik industri dan pangsa pasar yang terkonsentrasi pada suatu industri menyebabkan auditor spesialis industri memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor non spesialis (Carcello *et al.* 1992).

Spesialisasi industri auditor dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan metode pendekatan *market share*. Menurut Gul, Fung, dan Jaggi (2009), metode ini mengasumsikan

bahwa spesialisasi auditor merupakan hasil dari pengalaman melakukan audit atas volume bisnis yang besar dalam suatu industri. Jika KAP menguasai 15% *market share* atau lebih, maka KAP tersebut dikategorikan sebagai KAP spesialis (Fitriany, 2012). KAP spesialis pada penelitian ini didominasi oleh KAP *big four* dan KAP *second tier*, sedangkan KAP lokal atau KAP kecil tidak mendominasi.

Menurut Geiger dan Rama (2006), tingkat kesalahan yang lebih rendah dalam pemberian opini audit *going concern* dapat digunakan sebagai indikator tingginya kualitas keputusan yang dihasilkan suatu KAP. Dengan kata lain, KAP yang mempertahankan akurasi adalah KAP yang memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 yang lebih rendah. Dengan demikian, KAP spesialis dapat dikatakan mempertahankan akurasi dalam pemberian opini audit *going concern*. Di sisi lain, KAP non-spesialis dapat dikatakan cenderung konservatif. KAP yang memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 lebih tinggi dapat dikatakan cenderung konservatif karena menerbitkan opini audit *going concern* sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari Kesalahan Tipe 2 yang akan mengakibatkan risiko litigasi bagi KAP yang bersangkutan (Tucker *et al.* 2003).

V. Penutup

5.1 Simpulan

Dari pengujian empiris yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat kebangkrutan setelah menerima opini audit *going concern* lebih tinggi pada perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP *non-big four*. Hal ini mengindikasikan bahwa KAP *big four* mempertahankan akurasi karena memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 yang lebih rendah. Di sisi lain, KAP *non-big four* yang memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 lebih tinggi dapat dikatakan konservatif

karena menerbitkan opini audit *going concern* sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari Kesalahan Tipe 2. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Geiger dan Rama (2006) dan Myers, Schmidt, and Wilkins (2011).

- b. Tingkat kebangkrutan setelah menerima opini audit *going concern* lebih tinggi pada perusahaan yang diaudit oleh KAP spesialis daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP non-spesialis. Hal ini mengindikasikan bahwa KAP spesialis mempertahankan akurasi karena memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 yang lebih rendah. Di sisi lain, KAP non-spesialis yang memiliki tingkat Kesalahan Tipe 1 lebih tinggi dapat dikatakan konservatif karena menerbitkan opini audit *going concern* sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari Kesalahan Tipe 2.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Software* SPSS 20.0 yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat menampilkan tingkat signifikansi setelah *bootstrapping*, akan tetapi tidak dapat menampilkan koefisien regresi, hasil uji akurasi model dan komposisi sampel yang digunakan untuk membentuk tingkat signifikansi setelah *bootstrapping*.
- b. Sebagian besar opini audit *going concern* yang diterima oleh perusahaan yang menjadi sampel bukan opini audit *going concern* yang diterima pertama kali sejak perusahaan *go public*, melainkan opini audit *going concern* yang diterima pertama kali sebatas pada periode pengamatan. Hal ini disebabkan karena sulitnya menelusur jenis opini audit perusahaan sejak mulai *go public* hingga perusahaan dijadikan sampel.
- c. Dari kedua metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi industri auditor, penelitian ini hanya menggunakan metode pendekatan *market share*. Metode

pendekatan *portfolio share* tidak digunakan karena memerlukan data pendapatan auditor spesialis industri dari suatu industri tertentu yang tidak tersedia bagi pihak luar.

- d. Jumlah sampel perusahaan yang diberi opini audit *going concern* oleh KAP *big four* dan KAP *non-big four* dapat dikatakan timpang karena KAP *big four* ternyata tidak banyak mengaudit perusahaan yang kelangsungan hidupnya diragukan. Hal yang sama juga terjadi pada KAP spesialis dan KAP non-spesialis, KAP spesialis ternyata tidak banyak mengaudit perusahaan yang kelangsungan hidupnya diragukan.
- e. Penelitian ini tidak melakukan *sensitivity analysis* seperti pada penelitian Geiger dan Rama (2006) untuk menguji apakah bangkrutnya perusahaan setelah menerima opini audit *going concern* karena keakuratan prediksi auditor atau karena adanya *self fulfilling prophecy* (kecenderungan untuk lebih cepat bangkrut setelah menerima opini audit *going concern*). Hal ini disebabkan karena sulitnya mengamati perkembangan perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan.

5.3 Implikasi Penelitian

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Geiger dan Rama (2006), Herusetya (2008), dan Myers, Schmidt, and Wilkins (2011) membandingkan kesalahan dalam pemberian opini audit *going concern* yang dilakukan oleh KAP *big four* dan KAP *non-big four*. Selain membandingkan KAP *big four* dan KAP *non-big four*, penelitian ini juga membandingkan KAP spesialis dan KAP non-spesialis. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa KAP yang menguasai *market share* minimal sebesar 15% (KAP spesialis) terbukti mampu mempertahankan akurasi dalam pemberian opini audit *going concern* dibandingkan dengan KAP non-spesialis. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang menyeluruh atas bisnis dan industri klien serta pengetahuan mengenai operasi perusahaan sangat penting untuk melaksanakan audit yang memadai.

5.4 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melakukan pengujian regresi logistik biner dengan *bootstrapping* diperlukan *software* yang dapat mengakomodasi kepentingan yang tidak dapat dipenuhi dengan penggunaan SPSS 20.0, misalnya R Language dan S-Plus. Jika dilakukan 1.000 kali *resampling* dengan menggunakan R Language, maka akan dapat ditampilkan 1.000 macam persamaan regresi.
- b. Menggunakan opini audit *going concern* yang pertama kali diterima sejak perusahaan *go public*. Untuk mendapatkan jumlah sampel yang cukup besar, dibutuhkan periode pengamatan yang panjang karena jumlah perusahaan yang mendapat opini *going concern* yang pertama sejak *go public* setiap tahunnya hanya sedikit.
- c. Jika ingin menggunakan metode pendekatan *portfolio share*, pendapatan auditor spesialis industri pada suatu industri tertentu dapat diprosikan dengan menggunakan pendapatan klien.
- d. Agar jumlah sampel tidak timpang, proses pemilihan sampel perusahaan yang diberi opini audit *going concern* oleh KAP *non-big four* harus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
- e. Melakukan *sensitivity analysis* dengan menggunakan *test of proportion* untuk mendeteksi adanya *self fulfilling prophecy* dengan memeriksa apakah perusahaan yang menerima opini audit *going concern* dari KAP *big four* dan *non-big four* memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh sumber pendanaan. Jika keduanya memiliki kesempatan yang sama, maka *test of proportion* akan memberi hasil yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa *self fulfilling prophecy* tidak mempengaruhi hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Altman, E and McGough. 1974. Evaluation of A Company as A Going Concern. *Journal of Accountancy*: 50-57.
- Bawono, Icuk Rangga dan Elisha Muliani Singgih. 2010. Faktor-faktor dalam Diri Auditor dan Kualitas Audit: Studi Pada KAP *Big four* di Indonesia. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto: 8-13 Juli.
- Carcello, J. V., R. H. Hermanson, and N. T. McGrath. 1992. Audit Quality Attributes: The Perceptions of Audit Partners, Preparers, and Financial Statement Users. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 11(1): 1-15.
- Carcello, J and Z V Palmrose. 1994. Auditor Litigation and Modified Reporting on Bankrupt Clients. *Journal of Accounting Research (Supplement)*: 1-30.
- Carcello, J and T. Neal. 2003. Audit Committee Characteristics and Auditor Dismissals Following "New" Going Concern Reports. *The Accounting Review (January)*: 95-117.
- Carey, J Peter, Stuart Kortum and Robyn A Moroney. 2008. Auditor's *Going Concern* Modified Opinions Post 2001: Increased Conservatism or Improved Accuracy. *Social Science Research Network Electronic Paper Collection* (<http://papers.ssrn.com>, diakses 3 Oktober 2012).
- Chaney, P K and K L Philipich. 1992. Shredded Reputation: The Cost of Audit Failure. *Journal of Accounting and Business Research*: 291-303.
- Chen, K C W and B K Church. 1992. Default on Debt Obligations and The Issuance of Going Concern Opinions. *Auditing: A Journal of Practice & Theory (Fall)*: 30-49.
- Geiger, A Marshall and Dasaratha V Rama. 2006. Audit Firm Size and *Going concern* Reporting Accuracy. *Accounting Horizons*: Vol. 20, No. 1: 1-17
- Gul, F., S. Fung, and B. Jaggi. 2009. Earnings Quality: Some Evidence on the Role of Auditor Tenure and Auditors' Industry Expertise. *Journal of Accounting and Economics*, 47.
- Hair, Joseph F, Rolph E Anderson, Ronald L Tatham, and William C Black. 1998. *Multivariate data Analysis*. Fifth Edition. New Jersey: Prentice-Hall.
- Herusetya, Antonius. 2008. Kaitan *Firm Size* Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Mutu Laporan Audit *Going Concern*: Studi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2, No. 1: 353-365.
- Hesterberg, T. C, Moore, D. S, Monaghan, S, Clipson, A, and Epstein, R. 2005. Bootstrap Methods and Permutation Tests (Electronic Version). http://bcs.whfreeman.com/ips5e/content/cat_080/pdf/moore14.pdf.
- Hosmer, David W and Stanley Lemeshow. 2000. *Applied Logistic Regression. Second Edition*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Indonesian Capital Market Directory (ICMD) Tahun 2009, Indonesian Stock Exchange (IDX).
- Indonesian Capital Market Directory (ICMD) Tahun 2010, Indonesian Stock Exchange (IDX).
- Indonesian Capital Market Directory (ICMD) Tahun 2011, Indonesian Stock Exchange (IDX).
- Kanagaretnam, Kiridaran, Chee Yeouw Lim, and Gerald J Lobo. 2010. Auditor Reputation and Earnings Management: International Evidence from the Banking Industry. *Social Science Research Network Electronic Paper Collection*, (<http://papers.ssrn.com>, diakses 15 November 2012).



- Myers, A Linda, Jaime Schmidt, and Mike Wilkins. 2011. An Investigation of Recent Changes in *Going concern* Reporting Decisions Among Big N and Non-Big N Auditors. *Social Science Research Network Electronic Paper Collection*, (<http://papers.ssrn.com>), diakses 2 Oktober 2012).
- Praptitorini, Mirna Dyah dan Indira Januarti. 2007. Analisis Pengaruh Kualitas Audit, *Debt Default*, dan *Opinion Shopping* terhadap Penerimaan Opini *Going concern*. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar: 26-28 Juli.
- Ramadhani, Alexander. 2004. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Opini *Going Concern* pada Perusahaan Manufaktur yang Mengalami *Financial Distress* di Bursa Efek Jakarta. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sastradiharja, Petrus Ryan. 2006. Analisis Perbandingan Antara Regresi Logistik Biasa dan Regresi Logistik Dengan Metode *Bootstrap* Menggunakan R-Language. Tesis. Jakarta: Universitas Bina Nusantara..
- Sekaran, Uma and Roger Bougie. 2010. *Research Methods for Business*. Fifth Edition. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Weiss, Lawrence. 2013. The Fletcher School of Law and Diplomacy. Tufts University.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik *Upgrade, Downgrade* dan *Samegrade* pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Y. DADI HERMAWAN

FITRIANY*

Universitas Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah financial distress, pergantian manajemen, profitabilitas perusahaan, prior audit opinion dan ukuran perusahaan mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian KAP. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2004-2011 kecuali sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Data didapatkan dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan regresi logistik multinomial. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang mengalami financial distress akan berganti KAP baik ke KAP yang lebih besar ataupun yang lebih kecil, perusahaan yang berganti manajemen juga akan berganti ke KAP yang lebih besar atau berkualitas sama. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan membuat perusahaan berganti ke KAP yang lebih besar, sedangkan perusahaan yang menerima prior audit opinion selain WTP akan berganti ke KAP yang lebih kecil.

Kata Kunci: Pergantian KAP, Financial Distress, Pergantian Manajemen, Profitabilitas, Prior Audit Opinion.

Abstract: This study aimed to determine whether financial distress, the change of management, company profitability, prior audit opinion and firm size affecting CPA Firm switching. The sample used represents listed companies in Indonesian Stock Exchange (BEI) in the period 2004-2011 period except banks and non-bank financial institutions. Data obtained from the financial statements and corporate annual report. Furthermore, the data were analyzed by using multinomial logistic regression. This research fund that the distress company will change upgrade or downgrade CPA Firm, the companies change management will also change to the bigger CPA Firm or to the same quality. High level of profitability will make the company switch to the bigger CPA Firm, while the company that received the prior audit opinion than unqualified switch to the smaller CPA Firm.

Keywords: CPA Firm Switching, Financial Distress, the Change of Management, Profitability, Prior Audit Opinion.

* Corresponding author: fitri_any@yahoo.com

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi yang akan membantu semua pengguna untuk mengetahui kondisi keuangan suatu entitas serta membantu dalam membuat keputusan ekonomi (Haron *et al.*, 2006). Laporan keuangan juga merupakan gambaran atas prestasi kerja dari manajemen sehingga rentan untuk dipengaruhi oleh kepentingan pribadi manajemen, sedangkan pihak eksternal selaku pengguna laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan informasi laporan keuangan yang handal. Akuntan publik sebagai pihak yang independen mempunyai peran untuk menengahi perbedaan kepentingan yang terjadi tersebut. Auditor harus mampu menghasilkan opini yang berkualitas, sehingga opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut dapat menjamin kehandalan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.

Independensi merupakan kunci utama dari profesi audit dalam menilai kewajaran laporan keuangan. IFAC (The International Federation of Accountant) secara global mendefinisikan independensi menjadi dua : *independence of mind* dan *independence in appearance*. *Independence of mind* merupakan suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan tanpa terkena pengaruh apapun selain penilaian profesional, sehingga memungkinkan seorang individu bertindak berdasarkan integritas, serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional. *Independence in appearance* merupakan penghindaran fakta dan kondisi yang sedemikian signifikan sehingga pihak ketiga yang paham dan berfikir rasional - dengan memiliki pengetahuan akan semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan - akan tetap dapat menarik kesimpulan bahwa skeptisme profesional, objektivitas, dan integritas akuntan publik telah dikompromikan (IFAC Handbook 2012)

Dalam menjaga independensi auditor, Pemerintah Indonesia mengatur adanya kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik” (dimana telah diubah pada KMK Nomor 359/KMK.06/2003). Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Pasal 3 ayat 1 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Dalam perkembangannya, praktik pergantian KAP di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah *financial distress*. Menurut Damayanti dan Made (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang akan bangkrut akan lebih sering berpindah KAP dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bangkrut.

Selain itu faktor lainnya adalah pergantian manajemen. Menurut Nagy (2005) dijelaskan bahwa pergantian manajemen perusahaan dapat diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya. Faktor ketiga adalah *prior audit opinion*. Chow & Rice (1982), Craswell (1988), dan Dye (1991) telah membuktikan bahwa opini audit selain *unqualified* cenderung kurang disukai dan dihindari oleh klien. Faktor keempat dalam praktik pergantian KAP adalah profitabilitas perusahaan. Pariding (2009) mengungkapkan, perusahaan yang sedang profit atau laba, akan mengganti KAP, karena mampu membayar KAP yang lebih besar.

Penelitian ini melanjutkan dari penelitian Rahman (2010) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah kantor akuntan publik. Penelitian Rahman yang dilakukan pada tahun 2010 dengan menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009. Penelitian tersebut menggunakan pergantian manajemen, kesulitan keuangan, profitabilitas perusahaan, kepemilikan publik, *prior audit opinion*, dan ukuran KAP sebagai faktor pergantian KAP. Hasil penelitian Rahman (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan publik dan ukuran KAP mempengaruhi keputusan perusahaan untuk berganti KAP.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *financial distress*, perubahan manajemen, profitabilitas, *prior audit opinion* sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk bergantian KAP. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, variabel *independent* dalam penelitian ini menggunakan data n-1. Selain itu sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2011 kecuali sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya, peneliti juga menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian KAP pada pergantian KAP *upgrade*, *downgrade* dan *samegrade* yang terjadi di Indonesia. Pergantian KAP *upgrade* adalah pergantian dari KAP Menengah ke KAP Besar, dari KAP Kecil ke KAP Menengah, dari KAP Kecil ke KAP Besar. Pergantian KAP *downgrade* adalah pergantian dari KAP Besar ke KAP Menengah, dari KAP Besar ke KAP Kecil, dari KAP Menengah ke KAP Kecil. Pergantian KAP *samegrade* adalah pergantian dari KAP Besar ke KAP Besar, dari KAP Menengah ke KAP Menengah, dari KAP Kecil ke KAP Kecil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah apakah *financial distress*, perubahan manajemen, profitabilitas, *prior audit opinion* berpengaruh terhadap pergantian KAP baik pergantian KAP *samegrade*, *upgrade*, maupun *downgrade*.

Penelitian ini diharapkan dapat manfaat dalam memberikan bukti empiris tentang pengaruh *financial distress*, perubahan manajemen, profitabilitas, *prior audit opinion* terhadap pergantian KAP.

2. Teori Dan Tinjauan Pustaka

2.1 Kantor Akuntan Publik

Menurut Agung Nugroho, KAP dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok sesuai dengan jumlah staf professional yang dimiliki, yaitu :

- Kelompok Besar (*Big 4*) dengan jumlah staf profesional >400 orang
- Kelompok Menengah dengan jumlah staf profesional 100 – 400 orang
- Kelompok Kecil dengan jumlah staf profesional <100 orang

2.2 Peraturan Rotasi Audit

Dalam menanggapi isu mengenai idependensi auditor, Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Februari 2008 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 yang dianggap sudah tidak memadai.

Berikut ini isi dari Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tersebut :

- 1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (1) huruf a harus dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- 2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

- 3) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.
- 4) Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya yang mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.3 Pergantian Kantor Akuntan Publik

Menurut Febrianto (2009), pergantian auditor bisa terjadi secara voluntary (sukarela) atau secara mandatory (wajib). Pergantian secara sukarela terjadi jika auditor mengundurkan diri dari penugasan atau auditor diberhentikan klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib dikarenakan adanya peraturan yang mengatur mengenai rotasi audit, di Indonesia tercetus pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008.

Menurut Fitriany (2011), terdapat dua bentuk pergantian KAP di Indonesia yaitu pergantian KAP yang secara riil dan secara semu. Pergantian KAP yang secara riil adalah ketika KAP yang mengaudit suatu perusahaan benar-benar berubah, sedangkan pergantian KAP secara semu adalah kondisi ketika KAP yang mengaudit suatu perusahaan sebenarnya tidak berubah, tetapi berubah hanya komposisi partner audit, hanya berubah nama KAP.

2.4 Faktor-Faktor Perusahaan Berganti KAP

2.1 *Financial Distress*

Financial distress merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangannya sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya (Prihadi, 2008). Palepu (2004) juga menyatakan bahwa salah satu keadaan yang mengindikasikan kesulitan keuangan perusahaan adalah adanya *debt fault*, yaitu kegagalan dalam memenuhi pokok dan pinjaman.

Schwartz dan Menon (1985) mengungkapkan, ada dorongan yang kuat untuk berpindah KAP pada perusahaan yang terancam bangkrut. Selain itu, Schwartz dan Soo (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dibandingkan perusahaan yang tidak terancam bangkrut.

2.2 *Pergantian Manajemen*

Ismail et al. (2008) menyatakan bahwa berubahnya struktur manajemen merupakan hal yang biasa terjadi, terutama untuk perusahaan-perusahaan *go public*. Perusahaan melakukan pergantian manajemen dengan harapan akan memperoleh kinerja yang lebih baik di tahun mendatang. Pergantian manajemen merupakan perubahan jajaran dewan komisaris dan dewan direksi.

Menurut Damayanti & Made (2008), jika perusahaan mengganti dewan direksi dan dewan komisaris maka akan terjadi perubahan dalam kebijakan perusahaan. Perubahan tersebut meliputi perubahan teknologi yang dipakai perusahaan, visi dan misi perusahaan, restrukturisasi tenaga kerja, perubahan kerjasama dengan perusahaan lain, atau membuat suatu kebijakan baru.

2.3 Profitabilitas

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima.

Profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan analisa rasio, yaitu rasio *Return on Equity*. Ross, Westerfield dan Jordan (2003) dalam Tutun (2009) mengatakan bahwa ROE merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan tingkat pengembalian yang akan diterima pemegang saham dan karena salah satu tujuan perusahaan adalah memberikan keuntungan bagi pemegang saham maka ROE merupakan pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang mendasar.

2.4 Prior Audit Opinion

Setelah melakukan proses audit, auditor mengeluarkan laporan audit yang berisi pendapat atau opini atas hasil audit yang telah dilakukan. Laporan audit merupakan hal yang penting karena menjadi sarana komunikasi bagi para auditor atas temuan mereka. Pengguna laporan keuangan bergantung pada laporan auditor untuk mendapatkan keyakinan atas laporan keuangan perusahaan.

Menurut Carcello dan Neal (2003) dalam Aziz (2008), manajemen akan memberhentikan auditornya sebagai suatu bentuk balasan atas opini yang tidak diharapkan manajemen atas laporan keuangannya dan berharap untuk mendapatkan auditor yang lebih mudah diatur.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 *Pengaruh Financial Distress terhadap Pergantian KAP*

Kondisi keuangan perusahaan memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan mengenai KAP yang dipilih perusahaan. Schwartz dan Menon (1985) menyatakan bahwa perusahaan yang akan bangkrut akan lebih sering berpindah KAP dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bangkrut. Kondisi klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan kehati-hatian auditor. Hal ini membuat perusahaan tersebut membutuhkan auditor yang berkualitas dengan tingkat independensi yang tinggi (Nasser et. al, 2006). Perusahaan berharap dengan menyewa auditor yang berkualitas maka dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang sedang bangkrut (Hudaib dan Cooke, 2005).

Wijayanti (2010) mengatakan perusahaan akan memilih berganti ke KAP yang lebih kecil untuk menekan biaya audit karena perusahaan sudah tidak mampu membayar biaya audit akibat penurunan kemampuan keuangan perusahaan.

Berdasarkan alasan di atas, peneliti memprediksi bahwa perusahaan yang sedang dalam kondisi *distress* akan cenderung berganti KAP baik ke KAP yang lebih besar ataupun ke KAP yang lebih kecil karena perusahaan ingin meningkatkan kepercayaan investor dan ingin mengurangi biaya audit yang tinggi, sehingga hipotesis yang diajukan adalah :

H1a : *Perusahaan yang mengalami financial distress memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan pergantian KAP jenis upgrade daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.*

H1b : *Perusahaan yang mengalami financial distress memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan pergantian KAP jenis downgrade daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.*

H1c : *Perusahaan yang mengalami financial distress memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan pergantian KAP jenis samegrade daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.*

2.5.2 Pengaruh Pergantian Manajemen terhadap Pergantian KAP

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah komposisi dewan komisaris dan dewan direksi yang memiliki peran vital dalam setiap pengambilan keputusan, tak terkecuali dalam pemilihan KAP. Sinarwati (2010) berpendapat bahwa pergantian manajemen dalam perusahaan sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan, termasuk pemilihan KAP. Schwartz dan Menon (1985) menyatakan perusahaan yang berganti manajemen akan berganti KAP, karena manajemen mencari KAP yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Nagy (2005) berpendapat bahwa perusahaan akan mencari KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan akuntansinya. Manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Jika hal ini tidak terpenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan mengganti auditornya (Joher et al., 2000).

Berdasarkan alasan di atas, peneliti memprediksi bahwa perusahaan yang berganti manajemen akan cenderung melakukan pergantian KAP jenis *upgrade* atau *samegrade* karena manajemen baru akan mencari KAP yang dapat membantu untuk mengontrol perusahaan, sehingga hipotesis yang diajukan adalah :

H2a : *Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan pergantian KAP jenis upgrade daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.*

H2b : *Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk melakukan pergantian KAP jenis downgrade daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.*

H2c : *Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan pergantian KAP jenis samegrade daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.*

2.5.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pergantian KAP

Kartika (2006) menyatakan ada pengaruh antara profitabilitas perusahaan terhadap keputusan perusahaan berganti KAP. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang memperoleh laba dianggap dalam kondisi profitabilitas yang baik sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi atau meningkatkan bisnisnya.

Menurut Pariding (2009), profitabilitas yang baik juga dapat digambarkan dengan kondisi keuangan perusahaan yang baik, sehingga perusahaan mampu menyewa KAP yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan perusahaan untuk menarik investor dalam rangka ekspansi perusahaan.

Berdasarkan alasan di atas, peneliti memprediksi bahwa dengan profitabilitas yang baik maka perusahaan akan cenderung melakukan pergantian KAP jenis *upgrade* karena dengan kondisi keuangan yang baik, perusahaan mampu menyewa KAP yang lebih besar, sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H3a : *Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan pergantian KAP jenis upgrade daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.*

H3b : *Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk melakukan pergantian KAP jenis downgrade daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.*

H3c : *Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk melakukan pergantian KAP jenis samegrade daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.*

2.5.4 Pengaruh Prior Audit Opinion terhadap Pergantian KAP

Menurut Tandirerung (2006), jika auditor tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau tidak sesuai dengan harapan perusahaan, maka perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini yang sesuai dengan harapannya. Dalam penelitian Schwartz dan Menon (1985) menyatakan, opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualin (*Unqualified*) akan membuat perusahaan kecewa sehingga meninggalkan KAP tersebut. Manajemen akan memberhentikan auditor dan berharap untuk mendapatkan auditor yang lebih lunak (Hudaib dan Coke, 2005).

Chow dan Rice (1982) menemukan bahwa perusahaan cenderung untuk beganti KAP setelah menerima *qualified opinion*, namun perusahaan cenderung tidak berganti ke KAP dengan kualitas lebih rendah dibandingkan dengan KAP sebelumnya. Hal ini menyebabkan perusahaan yang berganti KAP setelah menerima *qualified opinion* tidak akan menerima opini audit yang lebih baik setelah berganti KAP.

Berdasarkan alasan di atas, peneliti memprediksi bahwa perusahaan yang menerima opini selain WTP (*unqualified opinion*) akan cenderung melakukan pergantian KAP jenis *downgrade* karena perusahaan merasa kecewa dan tidak puas dengan opini yang diberikan auditor, sehingga hipotesis yang diajukan adalah :

H3a : *Perusahaan yang menerima prior audit opinion selain WTP memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk melakukan pergantian KAP jenis upgrade daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.*

H3b : *Perusahaan yang menerima prior audit opinion selain WTP memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan pergantian KAP jenis downgrade daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.*

H3c : *Perusahaan yang menerima prior audit opinion selain WTP memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk melakukan pergantian KAP jenis samegrade daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP.*

3. Metodologi Penelitian

3.1 Metode Seleksi dan Pengumpulan Data

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2004 – 2011 selain sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan tertentu (*purposive sampling*). Kriteria perusahaan yang menjadi sampel adalah : telah melakukan pergantian KAP dalam periode 2004-2011, pergantian KAP yang dilakukan merupakan pergantian secara nyata, memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tidak diaudit oleh KAP yang sama selama lima atau enam tahun berturut-turut, tersedianya informasi lengkap untuk pengukuran variabel-variabel yang terkait

Setelah memperoleh perusahaan dengan kriteria sampel seperti di atas, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel berpasangan (*matched-pairs sample*) antara perusahaan yang berganti KAP dengan perusahaan yang tidak berganti KAP. Menurut Suparlan dan Wuryan (2010), kriteria pengambilan sampel pasangan adalah : bergerak pada industri yang sama

dengan perusahaan yang berganti KAP, mempunyai ukuran perusahaan yang sama dengan perusahaan yang melakukan pergantian KAP, mempunyai periode waktu yang sama dengan periode perusahaan yang berganti KAP.

3.2 Model Penelitian

$$PERG_AUD_t = \alpha + \beta_1 FIN_DIST_t + \beta_2 PERG_MANJ_t + \beta_3 PROF_t + \beta_4 PRIOR_t + \beta_5 SIZE_t + e$$

Keterangan:

PERG_AUD	: Pergantian KAP	PROF	: Profitabilitas
FIN_DIST	: <i>Financial distress</i>	PRIOR	: <i>Prior audit opinion</i>
PERG_MANJ	: Pergantian manajemen	SIZE	: Ukuran perusahaan

3.3 Variabel dan Pengukuran

Pergantian KAP : *Dummy*, 1 jika perusahaan berganti KAP *upgrade*, 2 jika perusahaan berganti KAP *downgrade*, 3 jika perusahaan berganti KAP *samegrade*

Financial Distress : *Dummy*, 1 jika perusahaan dalam kondisi *distress* (penentuan *financial distress* menggunakan model Altman Modifikasi)

Perubahan Manajemen : *Dummy*, 1 jika terdapat perubahan manajemen (berganti Dewan Komisaris atau Dewan Direksi)

Profitabilitas Perusahaan : *Return on Equity* (ROE)

Prior Audit Opinion: *Dummy*, 1 jika Perusahaan mendapatkan *prior audit opinion* selain WTP, 0 jika dapat WTP.

Ukuran Perusahaan: $\ln Asset$

3.4 Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan maksimum-minimum. **Uji Asumsi Klasik** digunakan untuk melihat apakah hasil estimasi model bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) sesuai teori yang dikemukakan oleh Gauss-Markov. **Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)** digunakan untuk menguji apakah model mampu menjelaskan dan memprediksi data empiris. **Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)** digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. **Uji Akurasi Model (*Classification Plot*)** digunakan untuk mengetahui seberapa besar model yang digunakan mampu memprediksi dengan benar kondisi yang terjadi. **Uji Koefisien Regresi** digunakan untuk melihat nilai dari model dan pengujian hipotesis untuk melihat signifikansi dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Analisa dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Dari table 4.2. dapat dilihat bahwa Nilai rata-rata pada variabel *financial distress* yang merupakan salah satu variabel independen dalam penelitian ini adalah 0,44 pada periode 2004-2011, hal tersebut berarti sekitar 44% perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan pada periode 2004-2011. Nilai rata-rata pada variabel pergantian manajemen yang merupakan salah satu variabel independen dalam penelitian ini adalah 0,31 pada periode 2004-2011, hal tersebut berarti sekitar 31% perusahaan melakukan pergantian manajemen selama periode 2004-2011.

Pada variabel profitabilitas perusahaan, nilai rata-rata yang dimiliki perusahaan pada periode 2004-2011 adalah 0,0472 dengan nilai tertinggi yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 1,59, sedangkan nilai terendah adalah -2,08. Variabel *prior audit opinion* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,49 atau 49% perusahaan pada periode 2004-2011 mendapatkan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4.2 Pengujian Hipotesis Penelitian

Pada **Uji Multikolinearitas** di tabel 4.3 dapat dilihat jika *Pearson Correlation* tidak melebihi 0,8 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas yang serius antar variabel. Pada **Uji Kelayakan Regresi** di tabel 4.4 dapat dilihat bahwa model memiliki nilai dari *Chi-square* sebesar 1758,082 dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0,357. Berdasarkan hasil tersebut, maka model dikatakan mampu memprediksi dan menjelaskan data empiris karena nilai signifikan lebih dari 0,05. Pada **Uji Koefisien Determinasi** di tabel 4.5. nilai koefisien determinasi dari model regresi adalah sebesar 0,088. Hal menjelaskan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model ini mampu menjelaskan 8,8% variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 91,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang di luar model penelitian. Pada **Uji Akurasi Model** di tabel 4.6. dapat ditunjukkan bahwa model regresi mampu memprediksi dengan benar 51,7% kondisi yang terjadi.

4.2.1 Pembahasan Hasil Pengujian

4.2.5.1 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Pergantian KAP

a) Pada Pergantian KAP *Upgrade*

Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa variabel FIN_DIST menunjukkan koefisien positif sebesar 0,804 dengan tingkat signifikansi 0,008. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel FIN_DIST berpengaruh signifikan positif terhadap pergantian KAP *upgrade*. Hal tersebut

berarti, dalam kondisi *distress* perusahaan perusahaan akan berganti ke KAP yang lebih besar dari sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan membutuhkan KAP yang independen untuk menjaga kepercayaan investor. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Nasser *et. al* (2006)

b) Pada Pergantian KAP *Downgrade*

Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa variabel FIN_DIST menunjukkan koefisien positif sebesar 0,780 dengan tingkat signifikansi 0,003. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel FIN_DIST berpengaruh signifikan positif terhadap pergantian KAP *downgrade*. Hal tersebut berarti, dalam kondisi *distress* perusahaan perusahaan akan berganti ke KAP yang lebih kecil dari sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan karena apabila perusahaan melakukan pergantian audit maka perusahaan harus menanggung biaya audit yang lebih mahal untuk KAP baru sehingga perusahaan memerlukan tambahan *cost*. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Petty *et. al* (1996)

c) Pada Pergantian KAP *Samegrade*

Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa variabel FIN_DIST menunjukkan koefisien positif sebesar 0,646 dengan tingkat signifikansi 0,003. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel FIN_DIST berpengaruh signifikan positif terhadap pergantian KAP *samegrade*. Hal tersebut berarti, dalam kondisi *distress* perusahaan perusahaan akan berganti ke KAP dengan kualitas yang sama dari sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan membutuhkan KAP yang independen untuk menjaga kepercayaan investor. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Nasser *et. al* (2006)

4.2.5.2 Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap Pergantian KAP

a) Pada Pergantian KAP *Upgrade*

Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa variabel PERG_MANJ menunjukkan koefisien positif sebesar 0,735 dengan tingkat signifikansi 0,016. Nilai tersebut menunjukkan bahwa

variabel PERG_MANJ berpengaruh signifikan positif terhadap pergantian KAP *upgrade*. Hal tersebut berarti, perusahaan yang berganti manajemen akan berganti ke KAP yang lebih besar dari sebelumnya. Hal tersebut mungkin karena manajemen baru menginginkan auditor yang berkualitas untuk membantu manajemen mengontrol perusahaan. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Schwartz dan Menon (1985 dan Hudaib & Coke (2005).

b) Pada Pergantian KAP *Downgrade*

Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa variabel PERG_MANJ menunjukkan koefisien positif sebesar 0,447 dengan tingkat signifikansi 0,102. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel PERG_MANJ tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP *downgrade*. Hal tersebut berarti, tidak ada hubungan antara pergantian manajemen dengan pergantian KAP yang lebih kecil dari sebelumnya. Hal tersebut mungkin dikarenakan manajemen baru lebih fokus untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan memaksimalkan profit perusahaan. Selain itu manajemen baru juga akan lebih menyukai KAP yang lebih besar karena lebih berkualitas untuk membantu manajemen dalam mengontrol perusahaan. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Damayanti dan Made (2008).

c) Pada Pergantian KAP *Samegrade*

Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa variabel PERG_MANJ menunjukkan koefisien positif sebesar 0,618 dengan tingkat signifikansi 0,006. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel PERG_MANJ berpengaruh signifikan positif terhadap pergantian KAP *samegrade*. Hal tersebut berarti, perusahaan yang berganti manajemen akan berganti ke KAP dengan kualitas yang sama dari sebelumnya. Hal tersebut mungkin dikarenakan manajemen baru tidak cocok dengan KAP yang lama, sehingga memutuskan untuk berganti KAP. Manajemen berharap dengan berganti ke KAP yang berkualitas sama maka manajemen akan menemukan KAP yang cocok tanpa mengurangi kualitas audit sebelumnya.

4.2.5.3 Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Pergantian KAP

a) Pada Pergantian KAP *Upgrade*

Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa variabel PROF menunjukkan koefisien positif sebesar 1,114 dengan tingkat signifikansi 0,010. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel PROF berpengaruh signifikan positif terhadap pergantian KAP *upgrade*. Hal tersebut berarti, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan berganti ke KAP yang lebih besar dari sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan tingkat profitabilitas yang tinggi perusahaan akan mampu menyewa KAP yang lebih besar dari sebelumnya. Pergantian ke KAP yang lebih besar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan sehingga dapat menarik investor dalam rangka ekspansi perusahaan.

b) Pada Pergantian KAP *Downgrade*

Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa variabel PROF menunjukkan koefisien negatif sebesar 0,099 dengan tingkat signifikansi 0,754. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel PROF tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP *downgrade*. Hal tersebut berarti, tidak ada hubungan antara profitabilitas perusahaan yang tinggi dengan pergantian KAP yang lebih kecil dari sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan bukan merupakan faktor utama perusahaan berganti KAP. KAP yang lama telah mendukung kebijakan perusahaan dalam memaksimalkan profitabilitas, sehingga dengan tidak melakukan pergantian KAP, perusahaan semakin efektif memaksimalkan profitabilitas. Selain itu perusahaan tidak perlu menanggung biaya baru yang dapat mempengaruhi profitabilitas akibat pergantian KAP.

c) Pada Pergantian KAP *Samegrade*

Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa variabel PROF menunjukkan koefisien positif sebesar 0,578 dengan tingkat signifikansi 0,165. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel PROF tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP *samegrade*. Hal tersebut

berarti, tidak ada hubungan antara profitabilitas perusahaan yang tinggi dengan pergantian KAP yang berkualitas sama dari sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan bukan merupakan faktor utama perusahaan berganti KAP. KAP yang lama telah mendukung kebijakan perusahaan dalam memaksimalkan profitabilitas, sehingga dengan tidak melakukan pergantian KAP, perusahaan semakin efektif memaksimalkan profitabilitas. Selain itu perusahaan tidak perlu menanggung biaya baru yang dapat mempengaruhi profitabilitas akibat pergantian KAP.

4.2.5.4 Pengaruh *Prior Audit Opinion* Terhadap Pergantian KAP

a) Pada Pergantian KAP *Upgrade*

Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa variabel PRIOR menunjukkan koefisien positif sebesar 0,344 dengan tingkat signifikansi 0,247. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel PRIOR tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP *upgrade*. Hal tersebut berarti, tidak ada hubungan antara *prior audit opinion* selain WTP dengan pergantian KAP yang lebih besar dari sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan apabila perusahaan berganti ke KAP yang lebih besar disaat menerima *prior audit opinion* selain WTP dikhawatirkan dapat menyebabkan tidak adanya kemungkinan untuk mendapatkan opini *unqualified* karena pertimbangan kualitas audit yang lebih baik. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Hudaib dan Cooke (2005).

d) Pada Pergantian KAP *Downgrade*

Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa variabel PRIOR menunjukkan koefisien positif sebesar 0,523 dengan tingkat signifikansi 0,042. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel PRIOR berpengaruh signifikan positif terhadap pergantian KAP *downgrade*. Hal tersebut berarti, perusahaan yang menerima *prior audit opinion* selain WTP akan berganti ke yang lebih kecil dari sebelumnya. Perusahaan berharap dengan berganti ke KAP yang lebih kecil

maka perusahaan mungkin dapat menerima opini yang sesuai dengan harapan yaitu wajar tanpa pengecualian. KAP yang lebih kecil lebih lunak dibandingkan dengan KAP yang lebih besar. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Hudaib dan Cooke (2005).

c) Pada Pergantian KAP *Samegrade*

Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa variabel PRIOR menunjukkan koefisien positif sebesar 0,257 dengan tingkat signifikansi 0,221. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel PRIOR tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP *samegrade*. Hal tersebut berarti, tidak ada hubungan antara *prior audit opinion* selain WTP dengan pergantian KAP yang berkualitas sama dari sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan apabila perusahaan berganti ke KAP disaat menerima *prior audit opinion* selain WTP, perusahaan akan mendapatkan tanggapan negatif dari pelaku pasar, karena perusahaan dianggap melakukan *opinion shopping*.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress*, pergantian manajemen, profitabilitas perusahaan, dan *prior audit opinion* terhadap pergantian KAP dengan menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2004-2009 kecuali sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* akan berganti KAP. Perusahaan akan berganti ke KAP yang lebih besar atau minimal berkualitas sama karena perusahaan ingin memilih KAP yang lebih independen untuk menjaga kepercayaan investor. Selain itu perusahaan juga akan berganti ke KAP yang lebih kecil untuk menekan biaya audit.

Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen akan berganti ke KAP yang lebih besar atau minimal berkualitas sama. Hal tersebut dikarenakan manajemen baru lebih fokus pada peningkatan profit perusahaan sehingga mencari KAP yang lebih berkualitas dan independen, yang dapat membantu dalam mengontrol keuangan perusahaan.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan berganti ke KAP yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan perusahaan memiliki kemampuan finansial untuk menyewa KAP yang lebih berkualitas.

Perusahaan yang mendapatkan *prior audit opinion* selain WTP akan berganti ke KAP yang lebih kecil. Hal tersebut dikarenakan KAP yang lebih kecil bersifat lebih lunak sehingga perusahaan berharap mendapat opini WTP dengan menyewa KAP yang lebih kecil.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

- Penelitian ini hanya menguji 5 (lima) faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan berganti KAP, sedangkan kemungkinan masih ada faktor lain yang belum dimasukkan dalam pengujian misalnya *audit fee*, tingkat pertumbuhan klien, perubahan ROA dan kualitas audit
- Penelitian ini tidak memasukkan perusahaan sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank sebagai sampel, karena perusahaan keuangan memiliki akun-akun laporan keuangan yang berbeda dibandingkan perusahaan lainnya.

5.3. Saran

Dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh dan keterbatasan penelitian, maka peneliti menyarankan hal-hal seperti berikut di bawah ini:

- Untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sebaiknya memperbanyak variabel penelitian yang digunakan, khususnya untuk faktor yang mempengaruhi pergantian KAP *upgrade*.
- Untuk penelitian-penelitian selanjutnya dapat secara khusus meneliti pergantian KAP pada sektor perbankan dan lembaga keuangan non bank

Daftar Referensi

- Altman, E, J. Hartzell, and M. Peck, (1995). *Emerging Markets Corporate Bonds: A Scoring System*. New York: Salomon Brothers Inc.
- Anindito, R. S., 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S., Jusuf, A.A. 2009. *Auditing and Assurance Service: An Indonesian Adaptation*. Singapore: Pearson Prentice Hall.
- Arezo et.al. (2011). The Determinant Factors of Auditor Switch Among Companies Listed on Tehran Stock Exchange. *International Research Journal of Finance and Economics*. Issue 80.
- Chow, C.W., Rice, S.J. 1982, Qualified Audit Opinions and Auditor Switching. *The Accounting Review*. Vol. LVII No. 2 April 1982, 326-335.
- Damayanti, S., Made, S. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Bepindah Kantor Akuntan Publik*. Seminar Akuntansi XI, Pontianak.
- Febrianto, R. 2009. Pergantian Auditor dan Kantor Akuntan Publik. <http://rfebrianto.blogspot.com/2009/05/pergantian-auditor-dan-kantor-akuntan.html>, diakses 25 November 2009.
- Gujarati, D. N. (2006) . *Essential of econometrics 4th edition*. New York: McGraw Hill.
- Hudaib, M & Cooke, T.E. (2005). “*Qualified Audit Opinions and Auditor Switching*”. University of Exeter.
- IFAC. (2012). *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants*.
- Ismail, Shahnaz et. al. 2008. Why Malaysian Second Board Companies Switch Auditors: Evidence of Bursa Malaysia. *International Research Journal of Finance and Economics*. Issue 13.
- Knechel, W. R., Niemi, L., and Sundgren, S. 2008. Determinants of Auditor Choice: Evidence from a Small Client Market. *International Journal of Auditing*. Vol. 12. pp. 65-88.
- Mautz, R.K. (1974), Rotation of auditors, *Financial Executive*, July, pp. 48-56.
- Menteri Keuangan. (2002). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2002 Tentang “Jasa Akuntan Publik”*, Jakarta.
- Menteri Keuangan. (2003). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 359/KMK.06/2003 Tentang “Jasa Akuntan Publik” dan Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06.2002*, Jakarta.
- Menteri Keuangan. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang “Jasa Akuntan Publik”*, Jakarta.

- Nachrowi, D. N., Hardius, U. 2002. *Penggunaan Tehnik Ekonometri: Pendekatan Populer dan Praktis Dilengkapi Tehnik Analisis dan Pengolahan Data Dengan Menggunakan Paket Program SPSS*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nagy, A.L., 2005, Mandatory Audit Firm Turnover, Financial Reporting Quality, and Client Bargaining Power. *Accounting Horizons*, Vol. 19 No. 2, June 2005, 51-68.
- Nasser *et. al.* (2006). Auditor-client relationship: the case of audit tenure and auditor switching in Malaysia. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 21 No. 7
- Palepu, Krishna G., Victor L. Bernard, dan Paul M. healy. 2004. *Business Analysis and Valuation, edition 3rd*. Ohio: South Western.
- Ramadhani, A.S. & Lukviarman, N. (2009). Perbandingan Analisis Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Model Altman Pertama, Altman Revisi, dan Altman Modifikasi dengan Ukuran dan Umur Perusahaan sebagai Variabel Penjelas (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Siasat Bisnis*. Vol. 13 No. 1 Hal. 15-28.
- Swartz, K.B., K. Menon.1985. Auditor Switches by Failing Firm. *The Accounting Review*.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods For Business, edition 4th*. Jakarta: Salemba Empat
- Soedibyo, A. N. 2010. *Peran Nutrient Information dan Information Conciuousness Dalam Memoderasi Hubungan Antara Job Satisfaction Dan Turnover Intention di Kantor Akuntan Publik*. Tesis. FEUI

Lampiran

Tabel 2.1
Kategori KAP Besar (*Big 4*)

No	Nama KAP	Kerjasama Internasional
1	Haryanto Sahari & Rekan	PricewaterhouseCoopers
2	Osman, Bing, Satrio & Rekan	Deloitte Touche Tohmatsu
3	Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	Ernst & Young Global
4	Siddharta, Siddharta & Widjaja	KPMG International

Sumber : Agung Nugroho (2010)

Tabel 2.2
Kategori KAP Menengah

No	Nama KAP	Kerjasama Internasional
1	Aryanto, Amir Jusuf & Mawar	RSM International
2	Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang	BKR International
3	Hadori & Rekan	HLB International
4	Hendrawinata, Gani & Rekan	Grant Thornton International
5	Jimmy Budhi & Rekan	Praxity AISBL
6	Johan, Malonda, Astika & Rekan	Baker Tilly International
7	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Nexia International
8	Kosasih & Nurdjaman	Geneva Group International
9	Mulyamin, Sensi, Suryanto	Moore Stephens International
10	Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono & Rekan	PKF International
11	Rama Wendra	Parker Randall International
12	Tanubrata, Sutanto & Rekan	BDO Global Coordination

Sumber : Agung Nugroho (2010)

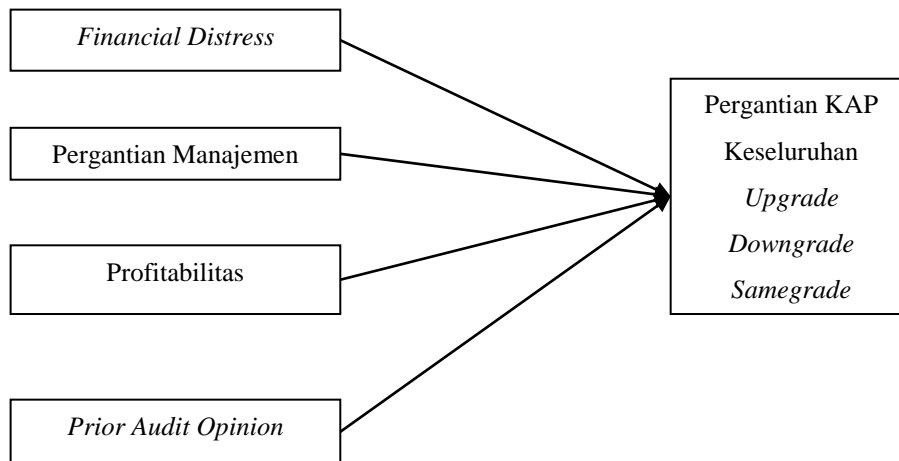
Tabel 2.5.
Penelitian Sebelumnya

Peneliti (tahun)	Sampel Penelitian	Variabel signifikan yang mempengaruhi auditor changes	Variabel lain
Chow dan Rice (1982)	SEC registrant	<i>Qualified Opinion</i>	-
Schwartz dan Menon (1985)	SEC registrant	<i>Audit fee</i> Pergantian Manajemen <i>Qualified Opinion</i> Kesulitan Keuangan	<i>Audit Qualification</i> <i>Insurance Needs</i>
Kluger (1989)	USA	Pergantian Manajemen <i>Bankruptcy Prediction</i>	-
Kadir (1994)	Indonesia	Pergantian Manajemen Jasa-jasa Selain Jasa Audit Opini Akuntan Preferensi Kreditur	Kesulitan Keuangan <i>Audit Fee</i>
Joher (2000)	Malaysia	Perubahan Manajemen <i>Turnover Growth</i>	<i>Wealth Effect</i>
Hudaib and Coke (2005)	UK	Pergantian Manajemen <i>Financial Distress</i> <i>Qualified Audit Opinion</i>	-
Nasser <i>et. al</i> (2006)	Malaysia	Ukuran Perusahaan (+) <i>Financial Distress</i> (+) Perubahan Total Asset (+) <i>Audit Tenure</i> (-)	-
Damayanti dan Made (2008)	Indonesia	Ukuran KAP (-) <i>Audit Fee</i> (+)	Pergantian Manajemen Opini Kesulitan Keuangan Perubahan ROA
Ismail <i>et. al</i> (2008)	Malaysia	<i>Leverage</i> <i>Sales Growth</i> <i>Financing</i> <i>Audit Tenure</i> <i>Audit Fee</i>	<i>Qualified Audit Report</i>
Rahman (2010)	Indonesia	Kepemilikan Publik (-) Ukuran KAP (-) <i>Prior Audit Opinion</i> (-)	Pergantian Manajemen Kesulitan Keuangan Profitabilitas
Arezoo <i>et. al</i> (2011)	Iran	<i>Audit quality</i> (-)	Ukuran perusahaan Pergantian Manajemen

			<i>Qualified Opinion</i> <i>Financial Distress</i>
Eko (2013)	Indonesia	<i>Financial Distress (+)</i> <i>Level Competition among Audit Firms (+)</i> <i>Audit Tenure (+)</i>	<i>Audit Fee</i> Ukuran KAP

Sumber : Damayanti dan Made (2008), Rahman (2010), Penulis

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Penelitian



Tabel 4.1.
Ringkasan Pemilihan Sampel

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Perusahaan terdaftar	319	333	340	393	400	411	422	444	3062
Perusahaan yang berganti KAP	65	89	148	34	53	96	143	64	692
Perusahaan berganti KAP (<i>mandatory</i>)	0	(7)	(14)	0	0	0	(32)	0	(53)
Perusahaan berganti KAP (<i>semu</i>)	(31)	(29)	(54)	0	(2)	(8)	(52)	(4)	(180)
Data yang tidak dapat diperoleh	(28)	(6)	(33)	(3)	(15)	(20)	(17)	(10)	(132)
<i>Outliers</i>	0	0	(10)	0	(5)	0	(5)	0	(20)
Perusahaan berganti KAP	6	47	37	31	31	68	37	37	294
Perusahaan tidak berganti KAP	6	47	37	31	31	68	37	37	294
Jumlah Sampel	12	94	74	62	62	136	74	74	588

Sumber: Hasil Olah Data

Tabel 4.2.

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PERG_AUD	588	0	1	.50	.500
FIN_DIST	588	0	1	.44	.496
PERG_MANJ	588	0	1	.31	.462
PROF	588	-2.08	1.59	.0472	.28093
PRIOR	588	0	1	.49	.500
SIZE	588	5	18	13.16	1.677
Valid N (listwise)	588				

Sumber: Hasil Olah Data

Keterangan:

FIN_DIST : *Financial Distress*

PRIOR

: *Prior audit opinion*

PERG_MANJ : Pergantian manajemen

SIZE

: Ukuran Perusahaan

PROF : Profitabilitas (ROE)

Tabel 4.3.

Correlations

		FIN_DIST	PERG_MANJ	PROF	PRIOR	SIZE
FIN_DIST	Pearson Correlation	1	-,010	-,230**	,198**	,012
	Sig. (2-tailed)		,800	,000	,000	,777
	N	588	588	588	588	588
PERG_MANJ	Pearson Correlation	-,010	1	-,017	,068	,142**
	Sig. (2-tailed)	,800		,685	,101	,001
	N	588	588	588	588	588
PROF	Pearson Correlation	-,230**	-,017	1	-,116**	,045
	Sig. (2-tailed)	,000	,685		,005	,280
	N	588	588	588	588	588
PRIOR	Pearson Correlation	,198**	,068	-,116**	1	,000
	Sig. (2-tailed)	,000	,101	,005		,994
	N	588	588	588	588	588
SIZE	Pearson Correlation	,012	,142**	,045	,000	1
	Sig. (2-tailed)	,777	,001	,280	,994	
	N	588	588	588	588	588

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Keterangan:

FIN_DIST : *Financial Distress*

PRIOR

: *Prior audit opinion*

PERG_MANJ : Pergantian manajemen

SIZE

: Ukuran Perusahaan

PROF : Profitabilitas (ROE)

Tabel 4.4.

Goodness-of-Fit

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	1758,082	1737	,357
Deviance	1366,354	1737	1,000

Sumber: Hasil Olah Data

Tabel 4.5.

Pseudo R-Square

Cox and Snell	,080
Nagelkerke	,088
McFadden	,034

Sumber: Hasil Olah Data

Table 4.6.

Classification

Observed	Predicted				Percent Correct
	Tidak Berganti	Upgrade	Downgrade	Samegrade	
Tidak Berganti	283	0	1	10	96,3%
Upgrade	50	0	0	9	0,0%
Downgrade	75	0	2	11	2,3%
Samegrade	127	0	1	19	12,9%
Overall Percentage	91,0%	0,0%	0,7%	8,3%	51,7%

Sumber: Hasil Olah Data

Tabel 4.7.
Hasil Pengujian Regresi Logistik Multinomial

Kode	Keterangan	<i>Upgrade</i>		<i>Downgrade</i>		<i>Samegrade</i>	
		β	Sig.	β	Sig.	β	Sig.
FIN_DIST	<i>Financial Distress</i>	0,804	0,008***	0,780	0,003***	0,646	0,003***
PERG_MANJ	Pergantian manajemen	0,735	0,016**	0,447	0,102	0,618	0,006***
PROF	Profitabilitas (ROE)	1,114	0,010***	-0,099	0,754	0,578	0,165
PRIOR	<i>Prior Audit Opinion</i>	0,344	0,247	0,523	0,042**	0,257	0,221
SIZE	Ukuran Perusahaan	-0,032	0,710	-0,152	0,382	-0,104	0,269

***signifikan di $\alpha=1\%$; **signifikan di $\alpha=5\%$

Sumber: Hasil Olah Data

Pengaruh Komitmen Profesional Auditor terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing: Locus of Control sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta)

FITRI YANI JALIL*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak: Penelitian ini menguji pengaruh komitmen profesional auditor terhadap intensi melakukan whistleblowing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel auditor yang sesungguhnya, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan mahasiswa auditing. Peneliti juga memasukkan locus of control internal sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan komitmen profesional dan intensi melakukan whistleblowing. Penelitian ini memfokuskan untuk menguji kembali dan meng-extend pengaruh komitmen profesional auditor terhadap intensi melakukan whistleblowing dengan locus of control internal sebagai variabel pemoderasi. Data yang digunakan adalah 105 orang auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing, dan locus of control internal tidak memoderasi hubungan komitmen profesional dan intensi melakukan whistleblowing. Ini berarti bahwa komitmen profesional dan locus of control internal tidak dapat meningkatkan intensi auditor untuk melakukan whistleblowing. Dimungkinkan ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan whistleblowing, misalnya faktor pembalasan yang akan diterima oleh whistleblower.

Kata Kunci: Whistleblowing, Locus of Control Internal, Komitmen Profesional, Auditor Eksternal, Kantor Akuntan Publik, Auditor Junior dan Senior.

* Author can be contacted at: fitriyanijalil@yahoo.co.id

1. Pendahuluan

Mencuatnya kasus Enron dan WorldCom mengindikasikan bahwa *whistleblowing* juga terjadi dalam bidang akuntansi. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir tahun 2001 dengan terungkapnya laporan keuangan yang didukung oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Akibatnya, disahkanlah Sarbanes Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 sebagai tanggapan atas berbagai skandal korporasi termasuk Enron dan WorldCom.

Hampir mirip dengan kasus Enron, *whistleblowing* juga banyak terjadi di Indonesia. Misalnya, skandal manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. Akhir tahun 2009, kasus yang terkait dengan *whistleblowing* juga terjadi di bidang perpajakan (kasus Gayus Tambunan). Selain di bidang akuntansi, *whistleblowing* juga terjadi di bidang kesehatan (kasus Prita Mulyasari). Hingga tahun 2011, *whistleblowing* juga terjadi di dunia politik yang melibatkan petinggi-petinggi negara Indonesia (kasus M. Nazaruddin). Banyaknya kasus *whistleblowing* tersebut, mengindikasikan banyak terjadi perilaku tidak etis dan perilaku menyimpang dalam organisasi di Indonesia.

Akuntan yang profesional diharapkan memiliki komitmen profesional yang tinggi sehingga lebih mengutamakan profesionalisme dan etika profesi yang mereka miliki. Komitmen profesional merupakan salah satu faktor penentu dalam keputusan seseorang untuk melaporkan perilaku tidak etis yang mereka temukan (Taylor dan Curtis, 2010). Burke (1997) dalam Kaplan dan Whitecotton (2001) menyatakan bahwa komitmen profesional merupakan hal penting dalam menjaga dan meningkatkan independensi auditor. Ia mencatat sebagai anggota dalam profesi pengauditan, auditor (dengan jelas) mempunyai rasa komitmen dan kewajiban untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk “melakukan sesuatu yang benar” untuk kepentingan profesinya.

Terkait dengan kasus *whistleblowing* yang marak terjadi, Kaplan dan Whitecotton (2001) menemukan hubungan positif antara komitmen profesional dan niat (auditor senior) untuk melakukan *whistleblowing*. Akuntan yang mempunyai komitmen profesional tinggi lebih mungkin untuk melakukan *whistleblowing*. Sementara, Elias (2008) menemukan hubungan yang signifikan pada tingkat komitmen profesional (mahasiswa auditing) dengan *whistleblowing*. Selanjutnya, Taylor dan Curtis (2010) juga menemukan pengaruh signifikan antara komitmen profesional (auditor senior) dengan kemungkinan untuk melaporkan *whistleblowing*. Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komitmen profesional mempengaruhi intensi untuk melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini mengkritik dan mengembangkan penelitian Elias (2008). Penelitian tersebut menguji komitmen profesional dan antisipatif sosialisasi mahasiswa auditing terhadap tindakan *whistleblowing*. Hal terpenting yang menjadi sorotan peneliti adalah ketidaksesuaian antara variabel dengan sampel penelitian yang digunakan. Menurut peneliti, variabel komitmen profesional yang digunakan Elias (2008) akan lebih sesuai jika langsung menggunakan auditor daripada mahasiswa auditing sebagai sampel penelitian. Hal ini dikarenakan komitmen profesional merupakan komitmen individu terhadap profesi yang sedang digelutinya (Mowday *et al.*, 1982), sehingga variabel ini lebih tepat digunakan untuk seseorang yang telah bekerja dan aktif dalam dunia kerjanya.

Penelitian ini tidak menggunakan variabel sosialisasi antisipatif seperti yang digunakan dalam penelitian Elias (2008), karena variabel tersebut kurang tepat digunakan pada sampel penelitian ini, yaitu auditor. Elias (2008) menggunakan definisi sosialisasi antisipatif sebagai proses seseorang mulai mengadopsi sikap dan keyakinan kelompok tertentu sebelum masuk menjadi anggota dari kelompok tersebut (Merton dan Rossi,

1968). Dengan kata lain, sosialisasi antisipatif merupakan proses yang dialami seseorang sebelum memasuki dunia kerja.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengacu pada penelitian Tsui dan Gul (1996) dan Chiu (2003). Tsui dan Gul (1996) melakukan penelitian mengenai *locus of control*, independensi auditor, dan *moral reasoning*. Pengukuran independensi auditor yang mereka gunakan adalah apakah auditor dapat dibujuk oleh klien untuk kepentingan mereka. Dengan kata lain, apakah auditor akan menyetujui permintaan klien ketika mereka sedang melakukan audit. Menggunakan sampel auditor senior, Tsui dan Gul (1996) menemukan bahwa auditor dengan *locus of control* internal pada tingkat *moral reasoning* yang rendah atau tinggi akan bersikap secara independen dan etis. Sementara itu, berlandaskan Trevino (1986), Chiu (2003) menggunakan *locus of control* sebagai pemoderasi antara hubungan *ethical judgment* dengan kecenderungan melakukan *whistleblowing*. Hasil analisis regresi menyatakan bahwa *locus of control* setiap responden memoderasi hubungan antara *ethical judgment* dengan kecenderungan melakukan *whistleblowing*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti beranggapan ada faktor lain yang mungkin dapat memperkuat hubungan komitmen profesional dengan intensi untuk melakukan *whistleblowing*, yaitu karakteristik individu—*locus of control* internal. Beberapa penelitian menyatakan seseorang dengan karakteristik yang terkait dengan *locus of control* internal dianggap memiliki perilaku etis yang umumnya tidak dapat diterima dalam organisasi tempat ia bekerja dibandingkan dengan *locus of control* eksternal (Glausser, 1982 dalam Near dan Miceli, 1985; Near dan Miceli, 1985; Spector, 1988; Reiss dan Mitra, 1998). Hal ini merujuk kepada seseorang dengan *locus of control* internal melihat *whistleblowing* sebagai langkah yang harus mereka ambil untuk mengontrol kegiatan mereka agar tidak mendapat sanksi. Oleh karenanya, pada penelitian

ini peneliti berfokus menggunakan *locus of control* internal sebagai variabel pemoderasi hubungan komitmen profesional dengan intensi untuk melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai *whistleblowing* di bidang akuntansi dalam konteks Indonesia. Penelitian ini lebih menekankan *whistleblowing* dalam tataran profesional. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan pentingnya komitmen profesional yang seharusnya dimiliki oleh seorang auditor. Bagi regulator, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan intensi auditor melakukan *whistleblowing*.

2. Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1. *Whistleblowing*

Jensen (1987) mengatakan bahwa fenomena *whistleblowing* banyak terjadi di sekitar kita. *Whistleblowing* merupakan usaha yang dilakukan seorang pekerja atau mantan pekerja suatu organisasi untuk mengungkap sesuatu yang dia yakini merupakan kesalahan yang terjadi dalam organisasinya (James, 1995). Dworkin dan Near (1997) beranggapan bahwa *whistleblowing* sebagai suatu bentuk tindakan warga negara yang baik, yang harus didorong bahkan diberi penghargaan. Sebaliknya, dalam beberapa organisasi, *whistleblowing* dipandang sebagai perilaku menyimpang (Near dan Miceli, 1985).

Tindakan *whistleblowing* dapat dilakukan oleh setiap individu dengan cara yang berbeda (Chiu, 2003). Terjadinya *whistleblowing* dapat disebabkan dari adanya penanaman nilai yang kuat terhadap suatu organisasi. Meskipun demikian, *whistleblowing* dianggap sebagai tindakan yang dilematis karena *whistleblower* dihadapkan pada dua pilihan, yaitu loyal kepada perusahaan atau mengungkapkan fakta yang terjadi dalam perusahaan mereka (Near dan Miceli; 1995, Rocha dan Kleiner; 2005).

Isu mengenai *whistleblowing* telah ada sejak akhir tahun 1960-an dan berkembang hingga saat ini. Perkembangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal (Rothschild dan Miethe, 1999). Pertama, adanya pergerakan dalam perekonomian yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan, keahlian, dan kepedulian sosial dari para pekerja. Kedua, keadaan ekonomi sekarang telah memberi informasi yang intensif dan menjadi penggerak informasi. Ketiga, akses informasi dan kemudahan berpublikasi menuntun *whistleblowing* sebagai fenomena yang tidak bisa dicegah atas pergeseran perekonomian yang ada.

Whistleblowing merupakan fenomena yang sangat kompleks. Fenomena ini merupakan hasil interaksi antara individu, organisasi, dan situasi. Meskipun demikian, perilaku *whistleblowing* dapat memberikan efek yang mengganggu hubungan interpersonal antara *whistleblower* dan *co-workers* mereka (Davis, 1989). Perilaku *whistleblowing* dapat menyebabkan individu menjadi bermusuhan satu sama lain (Ponnu *et al.*, 2008).

Whistleblowing juga memberikan dampak lain yang tidak menyenangkan bagi *whistleblower*, seperti hilangnya pekerjaan, ancaman balas dendam, dan dikucilkan dalam lingkungan pekerjaan. Penelitian Lennane (1996) menyebutkan sebanyak 90% *whistleblower* kehilangan pekerjaan mereka. Beberapa kasus menyebutkan *whistleblower* akan kesulitan memperoleh kembali pekerjaannya (Qusqas dan Kleiner, 2001). Meskipun demikian, tidak semua kasus *whistleblowing* berakhir dengan menyedihkan. Ada *whistleblower* yang mendapat hadiah sebesar \$52 juta karena mengungkap kecurangan yang terjadi pada perusahaan asuransi “Medicare” yang dilakukan oleh Smith Kline Beecham (Ferrel *et al.*, 2002).

Munculnya isu penelitian mengenai *whistleblowing* banyak mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Near dan Miceli (1985). Mereka mengajukan beberapa

preposisi yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *whistleblowing* dan akibat yang ditimbulkannya. Faktor-faktor yang mereka kemukakan adalah motivasi, keadaan yang meliputi aktivitas yang dipertanyakan, karakteristik individu, dan kekuatan retaliasi yang mungkin ditimbulkan sebagai penyebab perilaku *whistleblowing*. Selain itu, tingkat keseriusan masalah dan tanggung jawab personal juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan *whistleblowing* (Ayers dan Kaplan, 2005; Dozier dan Miceli, 1985; Gundlach, *et al.*, 2003).

Penelitian mengenai *whistleblowing* telah banyak dilakukan diberbagai bidang. Misalnya, di bidang kedokteran, Masser dan Browen (1996) menguji keseriusan malpraktik dan tingkat retaliasi terkait dengan perilaku *whistleblowing* baik secara internal ataupun eksternal. Mereka menemukan bahwa malpraktik yang fatal dengan rendahnya retaliasi yang diberikan akan mendorong individu untuk melakukan *whistleblowing*, dan individu akan lebih cenderung untuk melakukan *whistleblowing* secara internal dibandingkan secara eksternal. Selain di bidang kedokteran, penelitian mengenai *whistleblowing* juga dilakukan di bidang politik (Uys, 2000), dan bidang pelayanan publik (Brewer dan Selden, 1998; Davis dan Konishi, 2007).

Beberapa hasil penelitian menyebutkan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Faktor-faktor tersebut diantaranya etika (Liyanarachchi dan Newdick, 2009; Arnold dan Ponemon, 1991; Near dan Miceli 1985), lingkungan (Brody, *et al.*, 1999), dan budaya (Chiu, 2003). Selain itu, *personal reward* dan *complaint success* (Brewer dan Selden, 1998), kekuatan *whistleblower* (Dozier dan Miceli, 1985), proteksi hukum perundang-undangan (Near dan Miceli, 1985; 1989), iklim organisasi (Near dan Miceli, 1995), masa kerja karyawan (Dworkin dan Baucus, 1998), serta komitmen terhadap profesi (Kaplan dan Whitecotton, 2001) juga menjadi faktor penentu seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

Elias (2008) melakukan pengujian komitmen profesional mahasiswa auditing dengan perilaku *whistleblowing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa auditing di Amerika memiliki pendapat berbeda mengenai *whistleblowing*. Mahasiswa merasa *whistleblowing* diperlukan namun mereka tidak dapat melakukannya dikarenakan besarnya risiko atau pembalasan yang akan ditanggung serta sulitnya mencari pekerjaan di masa depan untuk profesi yang sama. Hal ini mungkin disebabkan karena mahasiswa tersebut kurang mengenali isu-isu mengenai tanggung jawab sosial yang lebih luas terkait dengan profesionalisme (McPhail dan Walters, 2009).

2.2. Komitmen Profesional dan *Whistleblowing*

Komitmen didefinisikan sebagai kemampuan atau kekuatan identifikasi seseorang dan keterlibatannya dalam organisasi (Porter *et al.*, 1974) atau profesi (Aranya *et al.*, 1981). Mowday *et al.* (1982) mengemukakan bahwa komitmen organisasi adalah “*an iterative process that primarily takes place after a person enters an organization*”. Smith dan Hall (2008) mendefinisikan komitmen profesional sebagai suatu kecintaan yang dibentuk oleh seorang individu pada profesinya. Komitmen profesional merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penelitian maupun praktik akuntansi yang ada saat ini.

Komitmen profesional pada dasarnya merupakan persepsi yang berintikan loyalitas, tekad, dan harapan seseorang yang dituntun oleh sistem, nilai atau norma yang akan mengarahkan orang tersebut untuk bertindak sesuai dengan prosedur-prosedur tertentu dalam upaya menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi (Larkin, 1990). Komitmen profesional dapat dikatakan sebagai kecintaan dan keteguhan hati seseorang dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan berdasarkan aturan dan norma yang ada dalam profesinya. Karakteristik komitmen profesional meliputi (1)

keyakinan dan penerimaan nilai dan tujuan profesi, (2) kemauan untuk mengupayakan dengan sungguh-sungguh kepentingan profesi, (3) keinginan untuk menjaga keanggotaan dalam profesi (Aranya dan Ferris, 1984).

Komitmen profesional berhubungan dengan peningkatan kinerja (Lee *et al.*, 2000), pengurangan niat untuk berpindah, dan kepuasan yang lebih pada tingkat organisasi dan profesi (Meixner dan Bline, 1989). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku pengambilan keputusan etis auditor. Aranya *et al.* (1981) menyatakan bahwa tingkat komitmen profesional yang tinggi mencerminkan tingkat sensitivitas yang tinggi terkait dengan etika profesi. Sejalan dengan hal tersebut, ditemukan bahwa komitmen profesional akuntan berhubungan positif dengan perilaku etis (Aranya *et al.*, 1982; dan Lachman dan Aranya, 1986).

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini terkait komitmen profesional dengan *whistleblowing* didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu. Kaplan dan Whitecotton (2001) menemukan hubungan positif antara komitmen profesional dan niat auditor terhadap *whistleblowing*, yaitu akuntan yang mempunyai komitmen profesional tinggi lebih mungkin untuk melakukan *whistleblowing*. Selanjutnya, Elias (2008) menunjukkan bukti adanya hubungan antara komitmen profesional dengan *whistleblowing*, serta menjelaskan adanya perbedaan persepsi di antara mahasiswa audit mengenai *whistleblowing*. Taylor dan Curtis (2010) juga menemukan pengaruh signifikan antara komitmen profesional auditor dengan kemungkinan untuk melaporkan *whistleblowing*.

Berdasarkan temuan empiris penelitian-penelitian sebelumnya, tindakan *whistleblowing* dapat dipengaruhi oleh komitmen profesional yang dimiliki oleh setiap individu. Sehingga hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: *Komitmen profesional auditor berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing.*

2.3. Peran *Locus of Control* dalam Hubungan antara Komitmen Profesional dan *Whistleblowing*

Locus of control merupakan istilah dalam psikologi yang didefinisikan sebagai harapan umum atas *reward* atau hasil dalam kehidupan yang dikendalikan oleh tindakan sendiri (internal) atau oleh kekuatan orang lain (eksternal) (Spector, 1988). *Locus of control* menggambarkan sejauh mana individu percaya bahwa penguatan bergantung pada perilakunya (Joe, 1971). *Locus of control* sebagai suatu ciri watak kepribadian memberikan pengaruh pada pembuatan keputusan dan tingkah laku (Chiu, 2003).

Locus of control terbagi menjadi dua, yaitu *locus of control* internal dan *locus of control* eksternal. Individu dengan *locus of control* internal percaya bahwa peristiwa yang terjadi merupakan akibat dari perilaku atau tindakan mereka sendiri. Mereka juga percaya bahwa pengalaman mereka dikendalikan oleh kemampuan atau upaya mereka sendiri. Sebaliknya, individu dengan *locus of control* eksternal cenderung percaya bahwa peristiwa yang mereka alami merupakan takdir, nasib, kesempatan, atau keberuntungan semata.

Near dan Miceli (1985) menyatakan bahwa karakteristik individu dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi keputusan *whistleblower* untuk melakukan *whistleblowing*. Individu dengan *locus of control* internal mungkin melihat *whistleblowing* sebagai langkah yang harus mereka ambil untuk mengontrol kegiatan mereka agar tidak mendapat sanksi, sedangkan mereka dengan *locus of control* eksternal mungkin melihat aktivitas yang diragukan dikendalikan oleh orang lain yang kuat, yang tidak bisa mereka hentikan. Dengan demikian, individu dengan *locus of control* internal

memiliki harapan bahwa mereka akan lebih berguna daripada eksternal. Mereka juga dapat mengurangi kemungkinan retaliasi manajerial, karena mereka tidak cenderung untuk menggunakan nasib mereka untuk orang lain yang lebih kuat.

Spector (1988) mengatakan bahwa individu dengan *locus of control* internal cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada individu dengan *locus of control* eksternal. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa individu dengan *locus of control* eksternal mungkin lebih tunduk pada otoritas. Hal ini mungkin menyebabkan mereka tidak akan melakukan tindakan *whistleblowing*.

Sejalan dengan penelitian Spector, Glausser (1982) dalam Near dan Miceli (1985) berargumen bahwa *locus of control* internal akan lebih terlibat dalam komunikasi daripada *locus of control* eksternal, sehingga menyebabkan individu dengan *locus of control* internal lebih cenderung untuk melakukan *whistleblowing* secara langsung dalam organisasi daripada individu dengan *locus of control* eksternal. Individu dengan karakteristik yang terkait dengan *locus of control* internal dianggap memiliki perilaku etis yang umumnya tidak dapat diterima dalam organisasi tempat ia bekerja dibandingkan dengan *locus of control* eksternal (Reiss dan Mitra, 1998).

Beberapa penelitian menyatakan seseorang dengan karakteristik yang terkait dengan *locus of control* internal dianggap memiliki perilaku etis yang umumnya tidak dapat diterima dalam organisasi tempat ia bekerja dibandingkan dengan *locus of control* eksternal (Glausser, 1982 dalam Near dan Miceli, 1985; Near dan Miceli, 1985; Spector, 1988; Reiss dan Mitra, 1998). Tsui dan Gul (1996) menyatakan bahwa seorang auditor dengan *locus of control* internal akan bersikap independen dan etis dibandingkan auditor dengan *locus of control* eksternal. Ini mengindikasikan seseorang yang berkomitmen terhadap profesinya dengan *locus of control* internal mungkin memiliki intensi untuk melakukan *whistleblowing* daripada mereka dengan *locus of control* eksternal.

Menurut Trevino (1986) terkait pengambilan keputusan etis, *locus of control* termasuk sebagai salah satu variabel yang memoderasi hubungan antara pertimbangan moral dan perilaku etis. *Locus of control* ditemukan secara langsung mempengaruhi pembuatan keputusan etis, dan tidak langsung mempengaruhi hasil yang diharapkan. Sementara itu, dengan berlandaskan pada penelitian Trevino (1986), Chiu (2003) menyatakan penggunaan *locus of control* sebagai pemoderasi juga berlaku pada hubungan antara penilaian etika dan perilaku *whistleblowing*.

Berdasarkan hal tersebut, efek moderasi *locus of control* pada hubungan antara *ethical judgment* dengan kecenderungan melakukan *whistleblowing* (Chiu, 2003) mungkin juga berdampak pada hubungan antara komitmen profesional dan intensi seseorang untuk melakukan *whistleblowing* dalam penelitian ini. Hal ini merujuk kepada seseorang dengan *locus of control* internal melihat *whistleblowing* sebagai langkah yang harus mereka ambil untuk mengontrol kegiatan mereka agar tidak mendapat sanksi. Oleh karenanya, pada penelitian ini peneliti berfokus menggunakan *locus of control* internal sebagai variabel pemoderasi hubungan komitmen profesional dengan intensi untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini mengarah pada hipotesis berikut:

H₂: *Locus of control internal memperkuat hubungan antara komitmen profesional auditor dan intensi melakukan whistleblowing.*

3. Metoda Penelitian

3.1. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden potensial agar dapat diperoleh data-data yang valid dan hasil yang signifikan. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada auditor eksternal yang bekerja di KAP di Jakarta. Metode survei dipilih karena studi tentang komitmen profesional, *locus of*

control, dan *whistleblowing* merupakan studi yang berkaitan erat dengan perilaku seorang individu yang sifatnya rahasia (pribadi) sehingga mengharuskan pengumpulan data menjadi anonim agar terjaga kerahasiaannya. Kuesioner yang dikirimkan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikembalikan lagi dalam keadaan amplop tertutup. Ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan jawaban responden.

Kuesioner dikirimkan secara langsung oleh peneliti ke beberapa KAP di tiga wilayah di Jakarta, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Pemilihan Jakarta sebagai daerah penyampelan dikarenakan jumlah auditor eksternal terbanyak berada di Jakarta, yaitu 543 orang atau sebesar 57,3% dari persebaran seluruh auditor eksternal di Indonesia (PPAJP, 2011). Penyampelan dilakukan pada KAP yang berada di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Hal ini dirasa dapat merepresentasikan karena jumlah KAP di ketiga daerah tersebut cukup mewakili, yaitu sekitar 80% dari jumlah KAP yang ada di Jakarta (PPAJP, 2011).

Peneliti mengirimkan kuesioner kepada KAP yang bersedia untuk menerimanya. Terkumpul sebanyak 21 KAP yang bersedia menerima kuesioner dengan total kuesioner yang dikirimkan sebanyak 150 kuesioner. Pengiriman kuesioner dilakukan selama dua minggu, mulai dari tanggal 1 November 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011. Masa pengembalian kuesioner berkisar antara satu minggu sampai tiga minggu dari tanggal pengiriman. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Pertama, jumlah kuesioner yang diterima masing-masing KAP tidak sama, sehingga membutuhkan waktu yang berbeda dalam pengembaliannya. Kedua, tingkat kesibukan auditor yang berbeda antara masing-masing KAP karena pada bulan November sebagian besar auditor sedang berada di klien (tidak ada di kantor), sehingga beberapa KAP membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan kuesioner.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah komitmen profesional, *locus of control*, dan intensi *whistleblowing*. Berikut adalah definisi operasional serta pengukuran variabel yang digunakan untuk masing-masing variabel:

- a. Komitmen profesional merupakan komitmen yang dibentuk individu saat mulai memasuki suatu profesi (Mowday *et al.*, 1982). Komitmen profesional merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Dwyer *et al.* (2000). Mereka menganalisis skala komitmen profesional yang sering digunakan dan telah dikembangkan oleh Aranya *et al.* (1981). Instrumen Dwyer *et al.* (2000) ini terdiri dari 5 item pertanyaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan 7 point skala Likert, skala 1 berarti sangat tidak setuju dan skala 7 adalah sangat setuju.
- b. *Locus of control* merupakan istilah dalam psikologi yang didefinisikan sebagai harapan umum atas *reward* atau hasil dalam kehidupan yang dikendalikan oleh tindakan sendiri atau oleh kekuatan orang lain (Spector, 1988). *Locus of control* dibedakan menjadi dua yaitu *locus of control* internal dan *locus of control* eksternal. Sebagai variabel pemoderasi, *locus of control* diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Spector (1988), yaitu *Work Locus of Control Scale* (WLCS). WLCS terdiri dari 16 item pernyataan, dengan delapan item pernyataan menggunakan nilai yang dibalik. Pada WLCS, nilai rendah mewakili *locus of control* internal dan nilai tinggi mewakili *locus of control* eksternal. Variabel ini diukur dengan menggunakan 7 point skala Likert, skala 1 berarti sangat tidak setuju dan skala 7 adalah sangat setuju.
- c. Intensi *whistleblowing* adalah tindakan yang mungkin dilakukan individu untuk melaporkan kesalahan baik secara internal maupun secara eksternal (Near dan Miceli,

1985). Intensi *whistleblowing* merupakan variabel terikat yang diukur dengan menggunakan kasus yang dikembangkan oleh Schultz *et al.* (1993). Hanya tiga dari enam kasus yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kasus yang terkait dengan kasus akuntansi untuk mengukur *whistleblowing*. Kasus pertama berkaitan dengan penemuan *fraud* yang dilakukan oleh manajemen. Kasus kedua, akuntan mengetahui akibat buruk bagi perusahaan jika dilakukan penyesuaian data laporan keuangan, dan di kasus ketiga akuntan dituntut untuk melakukan kecurangan dengan menggelembungkan laba perusahaan. Dari setiap kasus yang ada, responden diminta untuk menilai tingkat keseriusan kasus, tanggung jawab responden terhadap kasus, biaya yang mungkin dikeluarkan oleh responden dalam mengungkap kasus, dan intensi responden untuk melakukan *whistleblowing*. Variabel ini diukur dengan menggunakan 7 point skala Likert terkait intensi melakukan tindakan *whistleblowing*, skala 1 berarti tidak akan melakukan *whistleblowing* dan skala 7 adalah selalu melakukan *whistleblowing*.

3.3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Pada penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor dengan nilai *factor loading* $> 0,50$, sedangkan reliabilitas diukur dengan menggunakan uji statistik *cronbach alpha* dengan nilai $\alpha > 0,60$ (Hair *et al.*, 2010). Berikut adalah hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk setiap variabel:

a. Komitmen Profesional

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang dilakukan, nilai *factor loading* menunjukkan angka di atas 0,50 untuk seluruh indikator, yaitu 0,563-0,782. Nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,671, sehingga variabel komitmen profesional dikatakan valid dan reliabel.

b. Intensi *Whistleblowing*

Hasil pengujian analisis faktor untuk variabel intensi *whistleblowing* menunjukkan angka di atas 0,50 untuk setiap indikator, 0,747 untuk indikator pertama, 0,730 untuk indikator kedua, dan 0,805 untuk indikator ketiga. Untuk hasil uji reliabilitas mempunyai nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,632.

c. *Locus of Control*

Variabel *locus of control* terdiri dari dua kelompok faktor, yaitu internal dan eksternal. Untuk mendapatkan kedua kelompok faktor tersebut, dilakukan pengujian analisis faktor (Reiss dan Mitra, 1998). Pengujian analisis faktor dilakukan beberapa kali sehingga mendapatkan dua faktor tersebut. Terdapat beberapa indikator yang dikeluarkan dari pengujian karena tidak termasuk dalam kedua kelompok faktor. Hasil akhir pengujian ini menyisakan 11 dari 16 indikator yang termasuk dalam faktor *locus of control* internal dan *locus of control* eksternal. Hasil akhir pengujian analisis faktor untuk *locus of control* disajikan dalam tabel 1 (terlampir). Berdasarkan hasil akhir pengujian analisis faktor untuk *locus of control* pada tabel 1 terlihat bahwa variabel *locus of control* terbentuk menjadi dua kelompok faktor dengan nilai *factor loading* $> 0,50$. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,871.

3.4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dimasukkan dalam model regresi dilakukan dengan menggunakan uji F (Cooper dan Schindler, 2011). Hipotesis diuji melalui sebuah pengujian dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Jika diperoleh nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima.

Selanjutnya, digunakan pendekatan interaksi dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa variasi intensi *whistleblowing* dipengaruhi dari interaksi dari dua variabel independen. Jika koefisien interaksi signifikan, maka interaksi antara komitmen profesional dan *locus of control* internal mempengaruhi intensi *whistleblowing*.

4. Analisis Hasil Penelitian

4.1. Responden Penelitian

Kuesioner yang dikirimkan berjumlah 150 kuesioner dengan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 141 kuesioner. Maka tingkat responnya adalah 94%. Kuesioner yang kembali tidak semuanya dapat dimasukkan dalam analisis. Dari 141 kuesioner yang kembali, hanya 105 kuesioner yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian ini. Enam kuesioner tidak dapat dipakai karena diisi oleh bukan auditor. Enam belas kuesioner tidak lengkap. Dua belas kuesioner diisi dengan jawaban yang sama antara satu responden dengan responden lainnya. Satu kuesioner diisi dengan angka yang sama, dan satu kuesioner diisi dengan jawaban yang *double* dikeluarkan karena diragukan tingkat keseriusannya dan dapat menimbulkan bias.

4.2. Analisis Pendahuluan (*Preliminary Analysis*)

Analisis pendahuluan dilakukan untuk melihat karakteristik sampel. Analisis ini terdiri dari beberapa, yaitu analisis demografis responden, *nonresponse bias test*, uji beda, analisis deskriptif, dan pengujian korelasi. Hasil dari analisis tersebut dibahas secara rinci pada bagian berikut:

4.2.1. Karakteristik Demografis Responden

Responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki yaitu 64 orang (60,95%) dan sisanya adalah perempuan. Mayoritas responden berumur 25 tahun

sampai kurang dari 30 tahun, yaitu sebanyak 43 orang (40,95%). Pengalaman kerja responden mayoritas kurang dari 5 tahun sebanyak 79 orang (75,24%). Responden didominasi oleh auditor junior yaitu 55 orang (53,38%). Umur minimal responden adalah 21 tahun dan maksimal adalah 63 tahun dengan rata-rata umur responden adalah 28,33 tahun. Responden memiliki pengalaman kerja minimal selama 0 tahun dan paling lama adalah 40 tahun, dengan rata-rata pengalaman kerja responden 4,49 tahun.

4.2.2. *Nonresponse Bias Test*

Nonresponse bias test (pengujian bias tidak merespon) dilakukan untuk melihat apakah waktu pengembalian kuesioner oleh responden mempengaruhi hasil penelitian. Bias tidak merespon perlu diuji untuk melihat apakah respon yang terlambat ini memberikan hasil yang bias dibandingkan respon yang tepat waktu, atau dapat juga respon yang terlambat bias karena responden mengisi kuesioner sekenanya karena sudah terlambat (Hartono, 2008).

Pengujian bias tidak merespon dilakukan berdasarkan waktu diterimanya kuesioner oleh peneliti, yaitu 30% kuesioner yang diterima pada awal waktu pengembalian, dan 30% kuesioner yang diterima pada akhir waktu pengembalian. Hasil pengujian bias tidak merespon menunjukkan nilai *mean* yang tidak berbeda untuk kedua waktu respon pengembalian kuesioner tersebut (Lihat Lampiran pada Tabel 2). Dengan kata lain waktu respon tidak mempengaruhi respon terhadap kuesioner yang dikirimkan. Hal ini menunjukkan tidak terjadi bias tidak merespon dalam penelitian ini.

4.2.3. Komparasi Demografi Responden

Peneliti juga mengomparasikan kelompok sampel berdasarkan karakteristik demografi responden (jenis kelamin, umur, pengalaman kerja, dan posisi dalam

KAP). Setiap karakteristik demografi responden tersebut dibedakan menjadi dua kelompok untuk masing-masing karakteristik. Jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Umur dibedakan menjadi kurang dari 30 tahun dan 30 tahun atau lebih. Pengalaman kerja dibedakan menjadi kurang dari 5 tahun dan 5 tahun atau lebih, serta posisi dalam KAP dibedakan menjadi auditor junior dan auditor senior. Hasil komparasi untuk masing-masing karakteristik demografi responden tersebut memiliki nilai *mean* yang tidak berbeda (Lihat Lampiran pada Tabel 3). Artinya, secara keseluruhan masing-masing kategorisasi kelompok tersebut (jenis kelamin, umur, pengalaman kerja, dan posisi dalam KAP) tidak mempengaruhi respon sampel terhadap kuesioner.

4.2.4. Analisis Deskriptif

Tabel 4 (terlampir) menyajikan respon dari responden untuk masing-masing item pernyataan. Responden memandang bahwa tingkat keseriusan, tanggung jawab, dan biaya pelaporan pada setiap kasus adalah tinggi, kecuali untuk kasus nomor 2 pada bagian biaya pelaporan menunjukkan angka yang lebih rendah dari yang lainnya. Begitu juga dengan intensi responden untuk melakukan *whistleblowing*, baik untuk *whistleblowing* internal ataupun eksternal, mempunyai nilai *mean* yang tinggi, masing-masing 5,99, 5,85, dan 5,94. Sama seperti intensi *whistleblowing*, komitmen profesional responden juga mempunyai nilai *mean* yang tinggi, yaitu 5,39. Namun lain halnya dengan *locus of control* yang mempunyai nilai *mean* rendah, yaitu 3,58.

4.2.5. Pengujian Korelasi

Pengujian korelasi dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengujian korelasi antar karakteristik demografi responden terhadap intensi *whistleblowing*, dan pengujian korelasi untuk seluruh variabel.

Masing-masing kategorisasi karakteristik demografi responden menunjukkan korelasi yang tidak signifikan pada hubungan komitmen profesional dan intensi *whistleblowing* untuk setiap kasus (Lihat Lampiran pada Tabel 5 Panel A). Hasil pengujian korelasi untuk setiap variabel menunjukkan bahwa komitmen profesional berkorelasi positif dan signifikan hanya pada tingkat tanggung jawab untuk melaporkan untuk kasus I (0,247*) dan II (0,211*), sedangkan *locus of control* hanya berkorelasi signifikan pada tingkat biaya untuk melaporkan pada kasus II (0,207*) (Lihat Lampiran pada Tabel 5 Panel B).

4.3. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menguji dua hipotesis. Pertama, menguji pengaruh komitmen profesional terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Kedua, menguji peran variabel pemoderasi, *locus of control* internal, dalam hubungan antara komitmen profesional dan intensi melakukan *whistleblowing*. Hasil analisis regresi untuk masing-masing hipotesis disajikan dalam tabel 6 (terlampir).

Tabel 6 menyajikan tingkat signifikansi untuk masing-masing hipotesis. Hasil untuk hipotesis pertama tidak menunjukkan pengaruh antara komitmen profesional terhadap intensi melakukan *whistleblowing*, sehingga secara empiris H_1 gagal didukung ($p=0,294$). Hipotesis kedua juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan untuk interaksi antara komitmen profesional dengan *locus of control* internal ($p=0,449$). Secara empiris hasil analisis gagal mendukung H_2 . Dengan kata lain, *locus of control* internal tidak memperkuat hubungan antara komitmen profesional dengan intensi *whistleblowing*.

Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya (Kaplan dan Whitecotton, 2001; Taylor dan Curtis, 2010) yang menemukan hubungan positif dan pengaruh yang signifikan antara komitmen profesional auditor dengan kemungkinan

untuk melakukan *whistleblowing*. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh berbedanya sampel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan sampel yang lebih terfokus pada salah satu tingkatan auditor dalam KAP, yaitu auditor senior (Kaplan dan Whitecotton, 2001; Taylor dan Curtis, 2010). Sementara penelitian saat ini menggunakan sampel dari semua tingkatan auditor, mulai dari auditor junior sampai dengan partner.

4.4. Analisis Lanjutan

Terdapat beberapa analisis lanjutan yang dilakukan oleh peneliti terkait hasil yang diperoleh. Pertama, peneliti memisahkan dua kelompok sampel untuk menjawab perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya. Kedua, pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga kasus *whistleblowing* yang terdiri dari dua kasus untuk internal *whistleblowing* dan satu kasus untuk eksternal *whistleblowing*. Untuk itu peneliti juga melakukan analisis lanjutan untuk kasus yang terkait dengan eksternal *whistleblowing*. Hal ini dilakukan karena penelitian ini menggunakan sampel auditor eksternal yang lebih dapat melakukan *whistleblowing* eksternal. Peneliti melakukan analisis regresi terkait intensi auditor untuk melakukan *whistleblowing* eksternal. Hasil kedua analisis lanjutan tersebut disajikan pada tabel 7 (terlampir).

Hasil analisis lanjutan I pada tabel 7 menunjukkan bahwa kedua kelompok sampel tidak menunjukkan perbedaan pengaruh komitmen profesional terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Artinya, komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing* untuk kelompok junior dan auditor senior. Hasil ini pun berbeda dengan hasil yang diperoleh Kaplan dan Whitecotton (2001) dan Taylor dan Curtis (2010). Sementara hasil analisis lanjutan II juga menunjukkan angka yang tidak signifikan pada intensi auditor untuk melakukan *whistleblowing* eksternal.

Hal ini mungkin disebabkan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi intensi seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Misalnya faktor pembalasan yang akan diterima oleh *whistleblower* (Liyandarachchi dan Newdick, 2009) dan proteksi hukum perundang-undangan (Near dan Miceli, 1985; 1989). Seperti kita ketahui, pembalasan yang akan diterima oleh *whistleblower* menjadi penyebab seseorang enggan untuk melakukan *whistleblowing*. Terlebih jika jaminan hukum untuk *whistleblower* belum tegas. Mungkin hal ini yang menjadi alasan mengapa auditor di Jakarta kurang memiliki intensi untuk melakukan *whistleblowing*.

5. Simpulan, Implikasi, Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini menguji pengaruh komitmen profesional auditor terhadap intensi melakukan *whistleblowing*, dengan *locus of control* internal sebagai variabel pemoderasi. Secara empiris, hasil penelitian tidak memberikan bukti bahwa komitmen profesional berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Penelitian ini juga tidak dapat menemukan peran *locus of control* internal sebagai variabel yang memoderasi hubungan komitmen profesional berpengaruh dan intensi melakukan *whistleblowing*. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Kaplan dan Whitecotton, (2001), Elias (2008), dan Taylor dan Curtis (2010) menemukan hubungan positif dan pengaruh yang signifikan antara komitmen profesional dengan kemungkinan seseorang untuk melakukan *whistleblowing*, dan Chiu (2003) menyatakan *locus of control* memoderasi hubungan antara penilaian etika dengan niat melakukan *whistleblowing*.

Hasil analisis lanjutan menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengaruh komitmen profesional terhadap intensi melakukan *whistleblowing* untuk kelompok auditor junior maupun auditor senior. Artinya, komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing* untuk kelompok junior dan

auditor senior. Serta tidak ada pengaruh yang signifikan pada intensi auditor untuk melakukan *whistleblowing* eksternal.

Tidak didukungnya hipotesis dalam penelitian ini mungkin disebabkan ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi intensi seseorang melakukan *whistleblowing*. Misalnya faktor pembalasan yang akan diterima oleh *whistleblower* (Liyanarachchi dan Newdick, 2009) dan proteksi hukum perundang-undangan (Near dan Miceli, 1985; 1989). Mungkin hal ini yang menjadi alasan mengapa auditor di Jakarta tidak memiliki intensi untuk melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa tanggung jawab untuk melaporkan kesalahan berkorelasi dengan komitmen profesional. Namun, hasil penelitian ini tidak mampu membuktikan komitmen profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap intensi untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini mungkin dapat dijelaskan dengan risiko yang akan diterima oleh auditor jika ia mengungkapkan kesalahan yang terjadi.

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, pengiriman kuesioner dilakukan pada saat auditor berada di masa-masa sibuk mereka, yaitu bulan November. Dikhawatirkan responden kurang serius dalam memberikan jawaban terhadap kuesioner yang diberikan. Kedua, penelitian ini menggunakan tiga wilayah di Jakarta sebagai tempat penyebaran kuesioner. Namun, penyebaran kuesioner tidak merata untuk setiap wilayah penelitian dikarenakan pengiriman kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti.

Beberapa keterbatasan tersebut dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya. Pertama, ketika responden yang digunakan adalah auditor eksternal, sebaiknya pengiriman kuesioner dilakukan pada saat auditor berada di masa senggang

mereka, yaitu antara bulan Mei sampai Oktober. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat memperluas wilayah penelitian. Penyebaran kuesioner dapat dilakukan di seluruh wilayah di Jakarta, atau di pulau Jawa. Ketiga, penelitian mendatang dapat melakukan pengujian topik ini dengan menggunakan metode lain selain survei, yaitu studi eksperimen. Terakhir, secara khusus, peneliti menyarankan penelitian berikutnya untuk dapat meneliti pengaruh tingkat pembalasan atau risiko yang akan diterima oleh *whistleblower*.

Daftar Pustaka

- Aranya, N., and Ferris, K.R. 1984. "A Reexamination of Accountants' Organizational Professional Conflict", *The Accounting Review*, Vol. 59, pp. 1-15.
- Aranya, N., J. Pollock, and J. Amernic. 1981. "An Examination of Professional Commitment in Public Accounting", *Accounting Organizations and Society*, Vol. 6, No. 4, pp. 271-280.
- Aranya, N., R. Lachman and J. Amernic. 1982. "Accountants' Job Satisfaction: A Path Analysis", *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 7, No. 3, pp. 201-215.
- Arnold, D.F., Sr. and L.A. Ponemon. 1991. "Internal Auditors' Perceptions of Whistle-Blowing and the Influence of Moral Reasoning: An Experiment", *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 10, pp. 1-15.
- Ayers, Susan and Steven E. Kaplan. 2005. "Wrongdoing by Consultants: An Examination of Employees' Reporting Intentions", *Journal of Business Ethics*, Vol. 57, No. 2, pp. 121-137.
- Brewer, Gene A., and Sally Coleman Selden. 1998. "Whistle Blowers in the Federal Civil Service: New Evidence of the Public Service Ethic", *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, Vol. 8, No. 3, pp. 413-439.
- Brody, R.G., J.M. Coulter, and S. Lin. 1999. "The Effect of National Culture on Whistle-Blowing Perceptions", *Teaching Business Ethics*, Vol. 3, No. 4, pp. 385-400.
- Chan, Samuel Y.S., and P. Leung. 2006. "The Effects of Accounting Students' Ethical Reasoning and Personal Factors on Their Ethical Sensitivity", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21, No. 4, pp. 436-457.
- Chiu, Randy K., 2003. "Ethical Judgment and Whistleblowing Intention: Examining the Moderating Role of Locus of Control", *Journal of Business Ethics*, 43, pp. 65-74.
- Cooper, Donald R., and Pamela S. Schindler. 2011. *Business Research Methods*, Eleventh Edition, McGraw Hill, New York, NY.
- Davis, Anne J, and Emiko Konishi. 2007. "Whistleblowing in Japan", *Nursing Ethics*, Vo. 14, No. 2, pp. 194-202.
- Davis, M. 1989. "Avoiding the Tragedy of Whistle-blowing", *Business and Professional Ethics Journal*, Vol. 8, No. 4, pp.3-20.

- Dozier, Janelle Brinker and Marcia P. Miceli. 1985. "Potential Predictors of Whistle-Blowing: A Prosocial Behavior Perspective", *The Academy of Management Review*, Vol. 10, No. 4, pp. 823-836.
- Dworkin, Terry Morehead, and Janet P. Near. 1997. "A Better Statutory Approach to Whistle-Blowing", *Business Ethics Quarterly*, Vol. 7, Issue 1, pp. 1-16.
- Dworkin, Terry Morehead, and Melissa S. Baucus. 1998. "Internal vs. External Whistleblowers: A Comparison of Whistleblowing Processes", *Journal of Business Ethics*, Vol.17, pp. 1281-1298.
- Dwyer, Peggy D., Robert B. Welker, and Alan H. Friedberg. 2000. "A Research Note Concerning the Dimensionality of the Professional Commitment Scale", *Journal of Behavioral Research in Accounting*, Vol. 12, pp. 279-296.
- Elias, Rafik, Z. 2008. "Auditing Students' Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship to Whistleblowing", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 23, No. 3, pp. 283-294.
- Ferrell, O., J. Fraedrich and L. Ferrell. 2002. *Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases*, Houghton Mifflin, Boston.
- Gani, R. M. M. 2010. "Analisis Perbedaan Komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif Mahasiswa PPA dan Non-PPA pada Hubungannya Dengan Whistleblowing". Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Gundlach, Michael J., S.C. Douglas, Mark J. 2003. "The Decision to Blow the Whistle: A Social Information Processing Framework", *The Academy of Management Review*, Vol. 28, No. 1, pp. 107-123.
- Hair, JR, Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson. 2010. *Multivariate Data Analysis*, Seventh Edition, Pearson Prentice Hall.
- Hartono, Jogyanto HM. 2008. *Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. BPFE-Yogya.
- James, G. 1995. "In Defense of Whistle Blowing", in William H. Shaw and Vicent Barry (eds.), *Moral Issues in Business*, sixth edition (Wadsworth, Belmont, CA).
- Jeffrey, C., and N. Weatherolt. 1996. "Ethical Development, Profesional Commitment, and Rule Observance Attitudes: A Study of CPAs and Corporate Accountants", *Behavioral Research in Accounting*, Vol. 8, pp. 8-31.
- Jeffrey, C., N. Weatherholt, and S. Lo. 1996. "Ethical Development, Profesional Commitment, and Rule Observance Attitudes: A Study of Auditors in Taiwan", *The International Journal of Accounting*, Vol. 31, No. 3, pp. 365-79.
- Jensen, J. Vemon. 1987. "Ethical Tension Points in Whistleblowing", *Journal of Business Ethics*, Vol. 6, pp. 321-328.
- Joe, Victor Clark. 1971. "Review of the Internalization Control Construct as a Personality Variable", *Psychological Reports*, 28, pp. 619-640
- Jubb, P. B. 1999. "Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation", *Journal of Business Ethics*, Vol. 21, No.1, pp. 77-94.
- Kaplan, S.E. and S.M. Whitecotton. 2001. "An Examination of Auditor's Reporting Intentions when Another Auditor is offered Client Employment", *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 20, No. 1, pp. 45-63.
- Kasilingam, R., and S. Sudha. 2010. "Influence of Locus of Control on Investment Behaviour of Individual Investor", *The Indian Journal of Management*, Vol. 3, No. 1, pp. 17-25.

- Keenan, John P. 1990. "Upper-Level Managers and Whistleblowing: Determinants of Perceptions of Company Encouragement and Information about Where to Blow the Whistle", *Journal of Business and Psychology*, Vol. 5, No. 2, pp. 223-235.
- Lachman, R. and N. Aranya. 1986. "Evaluation of Alternative Models of Commitments and Job Attitudes of Professionals", *Journal of Occupational Behavior*, Vol. 7, pp. 227-243.
- Larkin, Joseph M. 1990. "Does gender affect auditor CPAs' Performance?. *The Women CPA*. pp.20-21.
- Lee, K., J.J. Carswell and N.J. Allen. 2000. "A Meta-Analytic Review of Occupational Commitment: Relations with Person and Work-Related Variables", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 85, No. 5, pp. 799-811.
- Lennane, J. 1996. "What Happens to Whistle-Blowers and Why", in Klaas Woldring (ed.). *Business Ethics* (Nelson, Melbourne).
- Liyanarachchi, Gregory, and Chris Newdick. 2009. "The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New Zealand Evidence", *Journal of Business Ethics*, 89, 37-57.
- Masser, Barbara, and Rupert Brown. 1996. "When Would You Do It? An Investigation into the Effects of Retaliation, Seriousness of Malpractice and Occupation on Willingness to Blow the Wistle", *Journal of Community and Applied Social Psychology*, Vol. 6, pp. 127-130.
- McPhail, Ken, and Diane Walters. 2009. *Accounting & Business Ethics: An Introduction*, Routledge.
- Meixner, W. F. and D. M. Bline. 1989. "Profesional and Job-Related Attitudes and the Behavior they Influence among Government Accountants", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 2, No. 1, pp. 8-20.
- Mesmer-Magnus, Jessica R. and Chockalingam Viswesvaran. 2005. "Whistleblowing in Organizations: An Examination of Correlates of Whistleblowing Intentions, Actions, and Retaliation", *Journal of Business Ethics*, Vol. 62, No. 3, pp. 277-297.
- Miceli, M.P., and J.P. Near. 1985. "Characteristics of Organizational Climate and Perceived Wrongdoing Associated with Whistle-blowing Decisions", *Personnel Psych*, 38, pp. 525-544.
- 1989. "The Incidence of Wrongdoing, Whistle-Blowing, and Retaliation: Results of a Naturally Occurring Field Experiment", *Employee Responsibilities and Rights Journal*, Vol. 2, No. 2, pp. 91-108.
- Mowday, R., L. Porter, and R. Steers. 1982. "Employee-Organization Linkages", New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publisher.
- Mudrack, Peter E. 1993. "An Investigation into the Acceptability of Workplace Behaviors of a Dubious Ethical Nature", *Journal of Business Ethics*, Vol. 12, pp. 517-524.
- Near, J.P., and M.P. Miceli. 1985. "Organizational Dissidence: The Case of Whistle-Blowing", *Journal of Business Ethics*, Vol. 4, No. 1, pp. 1-16.
- 1987. "Whistle-blowers in Organizations: Dissidents or Reformers?", *Research in Organizational Behavior*, Vol. 9, pp. 321-368.
- 1995. "Effective Whistle-Blowing", *The Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 3, pp. 679-708.
- Ponnu, C.H., K. Naidu, and W. Zamri. 2008. "Determinants of Whistle Blowing", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 4, No.1, pp.276-298.

- Porter, L.R. Steers, R. Mowday, and P. Boulian. 1974. "Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover among Psychiatric Technicians", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 59, No. 5, pp. 603-609.
- Powell, D. E. 1990. "Blowing It", *The Miami Herald*, 29 July, pp. 5-11.
- Qusqas, Firas and Brian H. Kleiner. 2001. "The Difficulties of Whistleblowers Finding Employment", *Management Research News*, Vol. 24, No. 3/4, pp. 97-100.
- Reiss, Michelle C., and Kaushik Mitra. 1998. "The Effects of Individual Difference Factors on the Acceptability of Ethical and Unethical Workplace Behaviors", *Journal of Business Ethics*, Vol. 17, pp. 1581-1593, 1998,
- Rothschild, Joyce and Terance D. Miethe. 1999. "Whistle-Blower Disclosures and Management Retaliation", *Work & Occupations*; Vol. 26, Issue 1, pp. 107-128.
- Schultz, J.J., D.A. Johnson, D. Morris, and S. Dyrnes. 1993, "An Investigation the Reporting of Questionable Acts in an International Setting", *Journal of Accounting Research*, Vol. 31, No. 1, pp. 75-103.
- Shaub, M.K., D.W. Finn, and P. Munter. 1993. "The Effects of Auditors' Ethical Orientation on Commitment and Ethical Sensitivity", *Behavioral Research in Accounting*, 5, pp. 145-169.
- Sims, Randi L, J.P. Keenan. 1998. "Predictors of External Whistleblowing: Organizational and Intrapersonal Variables", *Journal of Business Ethics*, 17, pp. 411-421.
- Smith, Adam, and M. Hall. 2008. "An Empirical Examination of a Three-Component Model of Professional Commitment among Public Accountants", *Behavioral Research in Accounting*, Vol. 20, No. 1, pp. 75-92.
- Spector, Paul E. 1988. "Development of the Work Locus of Control Scale", *Psychological of Occupational Psychology*, Vol. 61, pp. 335-340.
- Sugianto, Abdul Hamid Habbe dan Tawakkal. 2011. "Hubungan Orientasi Etika, Komitmen Profesional, Sensitivitas Etis dengan *Whistleblowing* Perspektif Mahasiswa Akuntansi". Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Taylor, Eileen Z, and Mary B. Curtis. 2010. "An Examination of the Layers of Workplace Influence in Ethical Judgment: Whistleblowing Likelihood and Perseverance in Public Accounting", *Journal of Business Ethics*, 93, pp. 21-37.
- Trevino, L.K. 1986. "Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model", *Academy of Management Review*, Vol. 11, No. 3, pp. 601-617.
- Tsui, Judy S.L., Ferdinand A. Gul. 1996. "Auditors' Behaviour in an Audit Conflict Situation: A Research Note on the Role of Locus of Control and Ethical Reasoning", *Accounting, Organizational and Society*, Vol. 21, No. 1, pp. 41-51.
- Uys, T. 2000. "The Politicisation of Whistle-blowers: A Case Study." *Business Ethics: A European Review*, Vol. 9, No. 4, pp. 259-267.
- Weiss, W. Joseph. 2006. *Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach*, 4th Edition, Thomson South-Western.

www.ppajp.depkeu.go.id. Diakses pada 21 Oktober 2011.



Lampiran

Tabel 1
Hasil Akhir Pengujian Analisis Faktor untuk *Locus of Control*

Indikator	<i>Factor Loading</i> <i>Locus of Control</i> Eksternal	<i>Factor Loading</i> <i>Locus of Control</i> Internal	<i>Cronbach's</i> <i>Alpha</i>
LoC 22	0,801		0,871
LoC 23	0,873		
LoC 25	0,713		
LoC 26	0,820		
LoC 27	0,678		
LoC 30	0,730		
LoC 32	-0,517		
LoC 33	0,850		
LoC 20		0,827	
LoC 29		-0,573	
LoC 31		0,697	

Sumber data: Data primer yang diolah, 2011

Tabel 2
Hasil Pengujian Bias Tidak Merespon

Variabel	Mean	
	30% awal	30% akhir
Keseriusan	33,10	34,65
Tanggung Jawab	32,70	34,59
Biaya	28,40	30,41
Intensi <i>Whistleblowing</i>	32,90	35,55
Komitmen Profesional	51,00	50,47
<i>Locus of Control</i>	76,90	74,86

Sumber data: Data primer yang diolah, 2011

Tabel 3
Hasil Komparasi Karakteristik Demografi Responden
Panel A: Jenis Kelamin

Variabel	Mean	
	Laki-Laki	Perempuan
Keseriusan	17,89	17,59
Tanggung Jawab	17,52	17,46
Biaya	15,43	15,93
Intensi <i>Whistleblowing</i>	18,09	17,32
Komitmen Profesional	27,48	26,15
<i>Locus of Control</i>	40,32	37,88

Panel B: Umur

Variabel	Mean	
	< 30 tahun	≥ 30 tahun
Keseriusan	17,46	18,83
Tanggung Jawab	17,25	18,34
Biaya	15,45	16,17
Intensi <i>Whistleblowing</i>	17,48	18,83
Komitmen Profesional	26,67	27,96
<i>Locus of Control</i>	39,40	39,19

Tabel 3 (Lanjutan)
Panel C: Pengalaman Kerja

Variabel	Mean	
	< 5 tahun	≥ 5 tahun
Keseriusan	17,58	18,35
Tanggung Jawab	17,41	17,77
Biaya	15,38	16,34
Intensi <i>Whistleblowing</i>	17,53	18,58
Komitmen Profesional	27,00	26,82
<i>Locus of Control</i>	39,51	38,96

Hasil Komparasi Karakteristik Demografi Responden
Panel D: Posisi dalam KAP

Variabel	Mean	
	Junior Auditor	Senior Auditor
Keseriusan	17,67	17,88
Tanggung Jawab	17,82	17,14
Biaya	15,62	15,62
Intensi <i>Whistleblowing</i>	17,45	18,16
Komitmen Profesional	27,29	26,58
<i>Locus of Control</i>	40,73	37,84

Sumber data: Data primer yang diolah, 2011

Tabel 4
Analisis Deskriptif

	Mean	SD
Kasus I		
Keseriusan	5,96	1,22
Tanggung Jawab	5,99	1,22
Biaya	5,49	1,58
Intensi <i>Whistleblowing</i>	5,99	1,22
Kasus II		
Keseriusan	5,85	1,12
Tanggung Jawab	5,60	1,29
Biaya	4,91	1,59
Intensi <i>Whistleblowing</i>	5,85	1,18
Kasus III		
Keseriusan	5,95	1,02
Tanggung Jawab	5,90	1,09
Biaya	5,22	1,54
Intensi <i>Whistleblowing</i>	5,94	1,06
Komitmen Profesional	5,39	1,18
<i>Locus of Control</i>	3,58	1,49
Kasus I: penemuan fraud oleh manajemen. Internal <i>whistleblowing</i>		
Kasus II: akuntan melaporkan fraud yang ada. Eksternal <i>whistleblowing</i>		
Kasus III: akuntan meng- <i>overstate</i> penjualan. Internal <i>whistleblowing</i>		
Keseriusan, tanggung jawab, dan biaya	1 = rendah, 7 = tinggi	
Intensi <i>Whistleblowing</i>	1 = tidak pernah, 7 = selalu	
Komitmen Profesional	1 = sangat tidak setuju, 7 = sangat setuju	
<i>Locus of Control</i>	1 = sangat tidak setuju, 7 = sangat setuju	
n = 105		

Sumber data: Data primer yang diolah, 2011

Tabel 5
Pengujian Korelasi

Panel A: Korelasi Komitmen Profesional dan Intensi *Whistleblowing* antar Karakteristik Demografi Responden

	Jenis Kelamin		Umur		Pengalaman Kerja		Posisi dalam KAP	
	Laki-Laki	Perempuan	< 30 tahun	≥ 30 tahun	< 5 tahun	≥ 5 tahun	Junior Auditor	Senior Auditor
Kasus I WB4	0,185	0,178	0,162	0,206	0,186	0,228	0,143	0,246
Kasus II WB4	-0,018	0,031	0,024	-0,063	-0,021	0,203	0,067	0,011
Kasus III WB4	0,086	-0,182	-0,042	0,126	-0,012	0,121	0,070	-0,022

* adalah signifikansi korelasi pada tingkat 0,05 (2-tailed).

Panel B: Korelasi untuk Seluruh Variabel

		KP	LoC
Kasus I	WB1	0,177	-0,156
	WB2	0,247*	-0,050
	WB3	0,137	0,040
	WB4	0,189	-0,182
Kasus II	WB1	0,087	0,007
	WB2	0,211*	0,147
	WB3	0,036	0,207*
	WB4	0,021	-0,020
Kasus III	WB1	0,148	-0,052
	WB2	0,170	0,008
	WB3	0,159	0,111
	WB4	0,015	0,037

* adalah signifikansi korelasi pada tingkat 0,05 (2-tailed).

Keterangan:

WB1: Tingkat keseriusan kasus

WB2: Tingkat tanggung jawab untuk melaporkan

WB3: Tingkat biaya individu dalam melaporkan

WB4: Intensi melakukan *whistleblowing*

KP: Komitmen profesional

LoC: *Locus of Control*

Kasus I: Penemuan *fraud* yang dilakukan oleh manajemen

Kasus II: Akuntan melaporkan *fraud* yang ada

Kasus III: Akuntan meng-*overstate* penjualan

Sumber data: Data primer yang diolah, 2011

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi

Variabel	Hipotesis 1 Intensi Whistleblowing		Hipotesis 2 Intensi Whistleblowing	
	F	p	T	p
Komitmen Profesional	1,111	0,294	-0,656	0,515
Locus of Control Internal			-0,746	0,449
Interaksi			0,682	0,449
R²	0,011		0,018	
Adj R²	0,001		-0,049	
A	5%		5%	

Sumber data: Data primer yang diolah, 2011

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Lanjutan

Variabel	Analisis Lanjutan I				Analisis Lanjutan II	
	Intensi Whistleblowing Auditor Junior		Intensi Whistleblowing Auditor Senior		Intensi Whistleblowing Eksternal	
	F	p	F	p	F	p
Komitmen Profesional	0,803	0,374	0,614	0,437	0,045	0,832
R²	0,015		0,013		0,000	
Adj R²	-0,004		-0,008		-0,009	
α	5%		5%		5%	

Sumber data: Data primer yang diolah, 2011

Pengaruh Karakteristik Komite Audit pada Hubungan Opini Audit *Going Concern* dengan Pergantian Auditor

LUH KOMANG MERAWATI*
I DEWA NYOMAN BADERA
I MADE SADHA SUARDIKHA
Universitas Udayana Bali

Abstract: *Modified going-concern audit opinion is expressed when the auditor found doubts about the entity's sustainability. Issuance of going-concern audit opinion is not expected by the entity which can lead to auditor changes. Audit committee as corporate governance mechanisms are believed able to minimize the tendency of auditor change after the issuance of going-concern audit opinion. This study was conducted to: 1) re-examine whether going concern audit opinion has a positive effect on auditor changes. 2) test the influence of going concern audit opinion moderates by audit committee's characteristics such independence, financial and accounting expertise, governance expertise and activity on auditor changes.*

This study used purposive sampling and obtained a sample of 36 companies listed in Indonesia Stock Exchange within four years observation. The research results: 1) going concern audit opinion affects significantly on the possibility of auditor changes with the negative direction. 2) the influence of moderating audit committee's characteristics such independence as well as accounting and financial expertise is significant and reinforces the negative effects of going concern audit opinion on auditor changes, while governance expertise and activity hold insignificant influence. This proves that going concern audit opinion should be accepted without any implications for auditor replacement as to protect the interests of investors. Audit committees with greater independence and greater accounting and financial expertise will be more effective in reducing the implications for the change of auditors after the issuance of going-concern audit opinion.

Keywords: *Going Concern Audit Opinion, Audit Committees, Corporate Governance, Change of Auditors*

* Corresponding author: mettamera@gmail.com

Pendahuluan

Audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan oleh manajemen. Tugas auditor adalah memberikan opini audit yang berkualitas dan selalu dituntut untuk mampu menjaga independensinya. Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh maupun tekanan pihak lain, jujur serta mempertimbangkan fakta sesuai kenyataannya. Sikap ini merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik dan sangatlah penting untuk kualitas audit.

Independensi auditor kembali dipertanyakan sejak keruntuhan Enron dan Worldcom dimana banyak Negara kemudian memperbaiki struktur pengawasan terhadap auditor dengan menerapkan rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) secara wajib untuk mencegah auditor terlalu dekat dalam berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensinya (Giri, 2010). Rotasi KAP secara wajib (*mandatory*) di Indonesia telah diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang pembatasan praktik akuntan publik.

Pada lingkungan rotasi yang bersifat wajib, perusahaan masih dimungkinkan merotasi KAP secara sukarela (*voluntary*) dengan pertimbangan beberapa faktor baik internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu faktor pemicu terjadinya pergantian auditor adalah opini audit. Opini audit modifikasi mengenai *going concern* dapat dinyatakan oleh auditor ketika menemukan adanya keraguan terhadap kemampuan klien untuk melanjutkan usahanya. Penerbitan opini audit *going concern* adalah hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan karena dapat berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan dan karyawan terhadap manajemen perusahaan (Wahyuningsih dan Suryanawa, 2010).

Studi yang dilakukan Hudaib dan Cooke (2005) menemukan bahwa klien yang diaudit (*auditee*) memiliki kecenderungan untuk mengganti auditornya karena tidak memperoleh opini yang sesuai dengan harapan perusahaan yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*). Temuan ini konsisten dengan hasil studi Suryandari (2012), namun bertentangan dengan hasil temuan Kawijaya dan Juniarti (2002), Mardiyah (2002), Damayanti dan Sudarma (2008) dan Sinarwati (2009) yang menyatakan bahwa opini audit *going concern* tidak berpengaruh pada pergantian auditor. Adanya inkonsistensi hasil dari penggunaan proksi yang sama pada penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan topik ini masih menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan melakukan pendekatan kontingensi, dimana variabel moderasi atau variabel kontingensi mungkin dapat mempengaruhi hubungan langsung variabel opini audit *going concern* dengan pergantian auditor.

Studi mengenai penerbitan opini audit *going concern* dan pergantian auditor oleh Carcello dan Neal (2000,2003) menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Mereka menemukan bahwa pergantian auditor setelah penerbitan opini audit *going concern* diakibatkan oleh adanya keyakinan manajemen untuk mencari auditor yang lebih fleksibel dengan kepentingan manajemen sehingga mengganti auditor sebelumnya. Peran dan karakteristik komite audit dalam situasi tersebut dipercaya dapat menghalangi usaha manajemen dalam melakukan pergantian auditor. Keberhasilan komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dipengaruhi oleh berbagai keragaman sumber daya anggota komite audit yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta aktivitas yang dilakukan oleh anggota komite audit itu sendiri (Rustiarini, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah opini audit *going concern* berpengaruh positif pada pergantian auditor dan apakah karakteristik komite audit yakni karakteristik independensi, keahlian akuntansi dan keuangan,

keahlian dan pengalaman tata kelola serta aktivitas komite audit berpengaruh pada hubungan opini audit *going concern* dengan pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. Karakteristik komite audit yang terdiri atas anggota yang independen, memiliki keahlian akuntansi dan keuangan, keahlian dan pengalaman tata kelola (*governance*) serta mengadakan pertemuan secara rutin akan lebih cenderung menghalangi upaya manajerial untuk mengganti auditor yang memberikan opini audit *going concern*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris pengaruh opini audit *going concern* pada pergantian auditor dan pengaruh karakteristik komite audit pada hubungan opini audit *going concern* dengan pergantian auditor serta menjadi salah satu sumber pertimbangan bagi pembuat regulasi untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang ada khususnya mengenai independensi auditor dan pengawasan oleh komite audit.

2. Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan adanya konflik keagenan dan asimetri informasi antara pihak prinsipal dan agen, dimana baik pihak prinsipal dan agen berusaha memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Konflik yang timbul diharapkan dapat diatasi dengan adanya auditor eksternal sebagai pihak ketiga independen yang dianggap mampu menjembatani kepentingan prinsipal dengan pihak agen dalam mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 2006). Keberadaan komite audit sebagai salah satu aspek implementasi *good corporate governance* juga memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan atas kinerja auditor eksternal. Komite audit diharapkan dapat menjaga independensi auditor dan mengurangi konflik yang menjurus pada terjadinya pergantian auditor terutama yang disebabkan oleh penerbitan opini audit *going concern*. Pembentukan komite audit yang aktif dan independen

diyakini akan menuntut kualitas audit yang tinggi untuk menghindarkan perusahaan dari timbulnya kerugian.

2.2 Pengaruh Opini Audit *Going Concern* Pada Pergantian Auditor

Opini audit adalah pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk menilai apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas. Pada saat auditor menemukan adanya keraguan terhadap kemampuan klien untuk melanjutkan usahanya, auditor harus memberikan opini audit dengan modifikasi mengenai *going concern*. Opini audit dengan modifikasi mengenai *going concern* mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis (Komalasari, 2007). Ketika auditor mempunyai jangka waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini akan mendorong pemahaman yang lebih atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu akan cenderung untuk mendeteksi masalah *going concern* (Junaidi dan Hartono, 2010). Pemberian opini audit *going concern* dianggap akan memberikan respon negatif terhadap harga saham, sehingga memungkinkan terjadinya pergantian auditor (Rahmawati, 2011). Dalam hal ini bisa saja manajemen perusahaan memberhentikan auditornya karena memberikan opini audit yang tidak diharapkan dan akan mencari auditor yang lebih mudah diatur (Carcello dan Neal, 2003). Oleh karena itu Hipotesis (H_1) dinyatakan sebagai berikut:

H_1 : *Opini audit going concern berpengaruh positif pada pergantian auditor.*

2.3 Pengaruh Karakteristik Komite Audit Pada Hubungan Opini Audit *Going Concern* Dengan Pergantian Auditor

Pembentukan komite audit memegang peranan yang sangat penting dalam implementasi *corporate governance*. Tugas utama komite audit yaitu pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal, diharapkan dapat menjawab kekhawatiran akan pengawasan dan tata kelola yang baik bagi perusahaan di Indonesia. Efektivitas kinerja komite audit berhubungan dengan karakteristik anggota komite audit, dalam penelitian ini diasosiasikan dengan karakteristik independensi, keahlian akuntansi dan keuangan, keahlian dan pengalaman tata kelola (*governance*) serta aktivitas komite audit.

Independensi merupakan landasan dari efektivitas kinerja komite audit dan dinilai berdasarkan tidak adanya keterkaitan komite audit dengan posisi atau jabatan operasional di perusahaan tempat komite audit tersebut berada (Rustiarini, 2012). Seorang anggota komite audit independen adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan pribadi atau keuangan dengan perusahaan dan eksekutif puncaknya. Studi sebelumnya (Carcello dan Neal, 2000, 2003; Klein, 2002; Abbott et al., 2004) telah mengukur independensi komite audit dengan menggunakan rasio direktur independen yang berasal dari luar manajemen dengan jumlah anggota komite audit. Carcello dan Neal (2003) membuktikan bahwa komite audit yang independen akan cenderung tidak memihak manajemen dalam perselisihan dengan auditor sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pergantian auditor. Hipotesis (H₂) dinyatakan sebagai berikut:

H₂: *Independensi komite audit berpengaruh pada hubungan opini audit going concern dengan pergantian auditor.*

Komite audit memiliki paling tidak satu orang anggota dengan latar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca

dan memahami laporan keuangan (Peraturan IX.1.5; BRC,1999). Keahlian ini sangat diperlukan dalam perusahaan karena fungsi utama komite audit adalah mengawasi proses pelaporan keuangan suatu perusahaan. Ahli akuntansi atau ahli manajemen keuangan adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan bidang akuntansi dan keuangan ataupun pernah memegang jabatan penting di bidang akuntansi atau keuangan (Wardhani dan Joseph, 2010). Defond et al.(2005) menemukan reaksi pasar yang positif atas penunjukan komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan. Anggota komite audit yang ahli akuntansi dan keuangan akan lebih efektif mengawasi pelaporan keuangan perusahaan dan proses audit sehingga terjadinya pergantian auditor akibat opini audit *going concern* juga dapat dicegah. Hipotesis (H₃) dinyatakan sebagai berikut:

H₃: *Keahlian akuntansi dan keuangan komite audit berpengaruh pada hubungan opini audit going concern dengan pergantian auditor.*

Carcello dan Neal (2003) menemukan bahwa pergantian auditor umumnya akan berkurang ketika anggota komite audit memiliki lebih banyak keahlian dan pengalaman tata kelola (*governance*). Pengalaman di bidang *governance* adalah pernah bekerja di posisi *corporate governance* yaitu pernah memegang posisi sebagai pihak independen yang mengawasi laporan keuangan seperti dewan komisaris, auditor eksternal, auditor internal dan komite audit (Robinson dan Jackson, 2009) cenderung lebih memahami dan bersimpati dengan risiko yang diambil auditor eksternal ketika perselisihan terjadi dengan manajemen. Sehingga dengan meningkatnya pengalaman sebagai komisaris independen, anggota komite audit tidak akan bergantung kepada manajemen (DeZoort dan Salterio, 2001) dan pergantian auditor dapat dicegah. Oleh karena itu Hipotesis (H₄) dinyatakan sebagai berikut:

H₄: *Keahlian dan pengalaman tata kelola komite audit berpengaruh pada hubungan opini audit going concern dengan pergantian auditor.*

Tingkat aktivitas komite audit bisa dilihat dari frekuensi pertemuan yang dilakukan per tahun dan merupakan sinyal ketekunan serta kepedulian terhadap kewajiban perusahaan. Rapat dan pertemuan komite audit harus direncanakan dengan baik dan diadakan minimal setiap tiga bulan sekali (TFKA, 2002). Perusahaan dengan komite audit independen yang bertemu setidaknya empat kali setiap tahunnya memiliki rasio biaya non-audit yang signifikan lebih kecil dari biaya audit dan memiliki kemungkinan *restatements* yang lebih rendah (Abbott et al., 2003; 2004). Penelitian yang dilakukan Rustiarini (2012) berhasil membuktikan bahwa pertemuan teratur yang dilakukan komite audit menjadi fungsi pengawasan dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat mengurangi tingkat akrual. Selain itu, pertemuan yang dilakukan antar komite audit, maupun dengan dewan komisaris, direksi, dan auditor eksternal merupakan kesempatan bagi komite audit melakukan penilaian kinerja, memberikan pandangan dalam hal akuntansi dan keuangan, serta memberikan masukan dan solusi atas permasalahan yang ada. Hipotesis (H₅) dinyatakan sebagai berikut :

H₅: *Aktivitas komite audit berpengaruh pada hubungan opini audit going concern dengan pergantian auditor.*

3. Metode Riset

3.1 Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari ICMD dan mengakses website *www.idx.co.id*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengambilan basis data dengan tahun pengamatan 2008-2011. Tahun 2008 digunakan sebagai dasar karena perubahan regulasi yaitu dikeluarkannya PMK RI No. 17/PMK.01/2008. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur (143 perusahaan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan *purposive sampling* diperoleh sebanyak 36

perusahaan manufaktur yang masuk kriteria yaitu memiliki data lengkap (laporan keuangan auditan, profil komite audit) dan melakukan pergantian KAP secara *voluntary* selama periode 2008-2011) yang akan ditunjukkan pada Tabel 3.1.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Variabel independen: opini audit *going concern* (GC) menggunakan variabel *dummy*, jika perusahaan klien menerima opini audit *going concern* pada ($t-1$) maka diberikan nilai 1 dan jika menerima opini *unqualified* maka diberikan nilai 0.
- 2) Variabel dependen: pergantian auditor (PKAP) menggunakan variabel *dummy*, jika perusahaan melakukan pergantian KAP pada (t_0) diberikan nilai 1 dan jika tidak diberikan nilai 0.
- 3) Variabel moderasi karakteristik komite audit yang terdiri atas:

Independensi (IND) yang diukur menggunakan persentase jumlah anggota komite audit yang independen. Keahlian akuntansi dan keuangan (FINEXPERT) yang diukur berdasarkan persentase jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan. Keahlian dan pengalaman *governance* (GOVEXPERT) yang diukur berdasarkan rata-rata jumlah posisi *governance* yang sedang atau yang pernah dipegang anggota komite audit. Aktivitas komite audit (ACT) yang diukur menggunakan variabel *dummy* dengan jumlah pertemuan yang dilakukan minimal empat kali atau lebih tiap tahun diberikan nilai 1 dan jika tidak diberikan nilai 0. Pengamatan keempat karakteristik dilakukan pada tahun saat terjadinya pergantian auditor (t_0).

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya dan uji interaksi moderasi (MRA) untuk menguji hipotesis interaksi. Teknik analisis dengan regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas pada variabel bebasnya karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinyu/ metrik dan kategorial/ non metrik (Ghozali, 2006: 225) dan mengabaikan heteroskedastisitas. Penelitian ini memiliki dua model regresi logistik, model (1) menguji hubungan langsung antara opini audit *going concern* dengan pergantian auditor, model (2) menguji hubungan antara opini audit *going concern* dengan pergantian auditor yang dimoderasi oleh karakteristik komite audit.

$$Ln \frac{P(PKAP)}{1-P(PKAP)} = \alpha + \beta_1 GC + \epsilon \dots\dots\dots (1)$$

$$Ln \frac{P(PKAP)}{1-P(PKAP)} = \alpha + \beta_1 GC + \beta_2 IND + \beta_3 FINEXPERT + \beta_4 GOVEXPERT + \beta_5 ACT + \beta_6 GC * IND + \beta_7 GC * FINEXPERT + \beta_8 GC * GOVEXPERT + \beta_9 GC * ACT + \epsilon \dots (2)$$

Keterangan:

P (PKAP)	pergantian auditor (1=pergantian KAP, 0=tidak ada pergantian KAP)
A	konstanta
Bi	koefisien Regresi, dimana i=1,2,3,4,5,6,7,8,9
GC	opini <i>Going Concern</i>
IND	persentase jumlah anggota komite audit yang independen
FINEXPERT	persentase anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan
GOVEXPERT	rata-rata jumlah posisi <i>governance</i> yang sedang atau yang pernah dipegang anggota komite audit
ACT	aktivitas yang diprosikan pertemuan komite audit (1= minimal empat kali atau lebih, 0= tidak)
GC*IND	interaksi <i>going concern</i> dengan independensi
GC*FINEXPERT	interaksi <i>going concern</i> dengan keahlian akuntansi dan keuangan
GC*GOVEXPERT	interaksi <i>going concern</i> dengan keahlian <i>governance</i>
GC*ACT	interaksi <i>going concern</i> dengan aktivitas komite audit
E	error



4. Hasil

4.1 Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai rata-rata untuk perusahaan yang melakukan pergantian auditor sebesar 0,3681 lebih kecil dari 0,50 menunjukkan bahwa pergantian auditor dengan kode 1, yakni melakukan pergantian KAP lebih sedikit muncul dari 144 amatan, dimana 53 amatan melakukan pergantian KAP dan 91 amatan tidak. Variabel opini audit *going concern* (GC) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,2847 lebih kecil dari 0,50 menunjukkan bahwa opini audit *going concern* dengan kode 1 lebih sedikit muncul dari 144 amatan, dimana 41 amatan mendapatkan opini audit *going concern* dan 103 amatan tidak.

Nilai rata-rata independensi (IND) sebesar 0,8217 atau 82,17% yang berarti anggota komite audit independen telah terdiri lebih dari satu orang. Nilai rata-rata keahlian akuntansi dan keuangan (FINEXPERT) sebesar 0,6982 yang berarti anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan lebih dari satu orang. Nilai rata-rata keahlian dan pengalaman *governance* (GOVEXPERT) sebesar 1,9613 yang berarti tingkat pengalaman *governance* anggota komite audit dalam satu perusahaan sudah cukup banyak, yakni satu orang anggota dapat diasumsikan pernah atau sedang memegang sekitar dua posisi *governance*. Nilai rata-rata aktivitas (ACT) sebesar 0,8750 yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan bahwa aktivitas komite audit dengan kode 1, yakni melakukan rapat minimal empat kali atau lebih, lebih banyak muncul dari 144 amatan, dimana 126 amatan yang melakukan rapat minimal empat kali atau lebih dan 18 amatan yang tidak.

4.2 Analisis Regresi Logistik

Uji analisis regresi logistik dimulai dengan menilai kelayakan model regresi dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Hasil pengujian pada tabel 4.2 untuk model (2) menunjukkan nilai *chi-square* sebesar 3,856 dengan signifikansi sebesar 0,870 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya dan model layak untuk diinterpretasikan.

Penilaian keseluruhan model (*overall model fit*) dilakukan dengan membandingkan nilai antara *-2 Log Likelihood (-2LL)* pada awal (*Block Number=0*), dimana model hanya memasukkan konstanta, dengan nilai *-2 Log Likelihood (-2LL)* pada akhir (*Block Number=1*), dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Nilai *-2LL* awal untuk model (1) adalah sebesar 189,479 dan nilai *-2LL* akhir mengalami penurunan menjadi sebesar 184,460. Sedangkan nilai *-2LL* awal untuk model (2) adalah sebesar 189,479 dan nilai *-2LL* akhir mengalami penurunan menjadi sebesar 171,785. Adanya penurunan nilai *-2LL* pada kedua model menunjukkan model regresi yang baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. Hasil penilaian keseluruhan model disajikan pada tabel 4.3.

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan dengan nilai *nagelkerke's R square*. Pada tabel 4.4 untuk model (1) adalah sebesar 0,047 yang berarti variabilitas variabel pergantian auditor yang dapat dijelaskan oleh variabel opini audit *going concern* adalah sebesar 4,7 persen, sedangkan sisanya sebesar 95,3 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Nilai *nagelkerke's R square* untuk model (2) adalah sebesar 0,158 yang berarti variabilitas variabel pergantian auditor yang dapat dijelaskan oleh variabel opini *going concern* dan variabel moderasi karakteristik komite audit adalah sebesar 15,8 persen, sedangkan sisanya sebesar 84,2 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi probabilitas pergantian auditor oleh perusahaan. Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya variabel terikat dinyatakan dalam persen. Secara keseluruhan ketepatan klasifikasi pada tabel 4.5 untuk model (1) adalah sebesar 63,9 persen dan model (2) sebesar 68,8 persen. Hal ini berarti ada peningkatan kekuatan prediksi dari model (1) ke model (2), yakni dari 63,9 persen menjadi 68,8 persen dengan dimasukkannya variabel pemoderasi.

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat diantara variabel bebasnya. Pengujian multikolinearitas dalam regresi logistik menggunakan matriks korelasi antarvariabel bebas pada tabel 4.6 untuk melihat besarnya korelasi antarvariabel bebas. Untuk analisis MRA (*Moderated Regression Analysis*) dengan menggunakan uji interaksi, adanya unsur interaksi antar variabel independen akan memungkinkan terjadi multikolinearitas. Namun seperti yang dijelaskan oleh Hartmann dan Moers dalam Hartono (2004: 160) bahwa multikolinearitas tidak terjadi karena koefisien dari interaksi (VI*VMO) tidak sensitif terhadap perubahan dari titik awal skala dari variabel independen dan variabel moderasi, sehingga multikolinearitas tidak menjadi masalah dan analisis regresi moderasian tetap bisa dilanjutkan.

Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 4.7 menghasilkan persamaan regresi logistik untuk model (1) sebagai berikut:

$$\ln \frac{P(\text{PKAP})}{1-P(\text{PKAP})} = 0,049 - 0,846 \text{ GC} + \varepsilon$$

Sedangkan untuk persamaan regresi logistik model (2) adalah sebagai berikut:

$$\ln \frac{P(\text{PKAP})}{1-P(\text{PKAP})} = 9,959 - 11,543 \text{ GC} + 0,083 \text{ IND} + 0,080 \text{ FINEXPERT} + 0,098 \text{ GOVEXPERT} + 0,842 \text{ ACT} - 7,076 \text{ GC} * \text{ IND} - 4,554 \text{ GC} * \text{ FINEXPERT} - 0,649 \text{ GC} * \text{ GOVEXPERT} + 0,402 \text{ GC} * \text{ ACT} + \varepsilon$$

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,025 < \alpha$ (0,05). Koefisien regresi negatif sebesar -0,846 berlawanan dengan hipotesis yang dibangun dan tidak mendukung hipotesis pertama (H_1). Hal ini berarti opini audit *going concern* berpengaruh negatif signifikan pada kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor. Perusahaan di Indonesia cenderung menerima pemberian opini audit *going concern* dengan tanpa mengganti auditor. Hal ini membuktikan bahwa opini audit *going concern* seharusnya dapat diterima tanpa berimplikasi pada digantinya auditor karena untuk melindungi kepentingan investor. Investor memerlukan informasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa terhadap kondisi perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik terhadap perusahaan tersebut. *Signalling theory* dalam studi Bewley et al.(2008) menjelaskan bahwa manajemen mengganti auditornya saat manajemen ingin memberikan sinyal atas kualitas atau reliabilitas laporan keuangannya. Informasi terjadinya pergantian auditor ini akan direaksi terutama oleh investor yang menilai kualitas laporan keuangan berdasarkan kualitas audit yang direpresentasikan melalui kualitas ataupun reputasi auditor. Maka ketika kondisi perusahaan sedang memburuk, mengganti auditor justru akan memberikan sinyal negatif karena pasar akan mempertanyakan reliabilitas laporan keuangan (Esfandari, 2011).

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil yang signifikan dimana nilai signifikansi variabel interaksi opini GC dengan independensi (GC*IND) adalah $(0,040) < \alpha$ (0,05) maka berarti variabel karakteristik independensi merupakan variabel moderasi dan mendukung hipotesis kedua (H_2). Variabel karakteristik independensi adalah variabel murni moderasi karena pengaruh langsung menunjukkan tingkat signifikansi $0,942 > \alpha$ (0,05). Koefisien variabel interaksi negatif sebesar -7,076 dan koefisien *going concern* (GC) juga bertanda negatif sebesar -0,0846, berarti independensi komite audit meningkatkan (memperkuat) pengaruh negatif opini audit *going concern* pada kemungkinan perusahaan

melakukan pergantian auditor. Komite audit yang independen akan memberikan suatu ketegasan bahwa opini audit *going concern* yang diterbitkan oleh auditor akan mengurangi implikasi terhadap pergantian auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi Carcello dan Neal (2003).

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hasil yang signifikan dimana nilai signifikansi variabel interaksi opini audit *going concern* dengan keahlian akuntansi dan keuangan (GC*FINEXPERT) sebesar $0,048 < \alpha (0,05)$ maka berarti karakteristik keahlian akuntansi dan keuangan komite audit merupakan variabel moderasi dan mendukung hipotesis ketiga (H₃). Variabel karakteristik keahlian akuntansi dan keuangan adalah variabel murni moderasi karena pengaruh langsung menunjukkan tingkat signifikansi $0,942 > \alpha (0,05)$. Koefisien variabel interaksi negatif sebesar -4,554 dan koefisien *going concern* (GC) juga bertanda negatif sebesar -0,0846, berarti keahlian akuntansi dan keuangan komite audit meningkatkan (memperkuat) pengaruh negatif opini audit *going concern* pada kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor. Hasil ini sesuai dengan hasil studi DeZoort dan Salterio (2001), Robinson dan Jackson (2009) yang menemukan bahwa keahlian akuntansi dan keuangan berpengaruh pada kecenderungan berkurangnya pergantian auditor.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan tingkat signifikansi variabel interaksi opini audit *going concern* dengan keahlian dan pengalaman *governance* (GC*GOVEXPERT) sebesar $0,396 > \alpha (0,05)$, berarti karakteristik keahlian dan pengalaman *governance* (tata kelola) komite audit bukanlah variabel moderasi dan tidak mendukung hipotesis keempat (H₄). Hasil penelitian ini tidak berhasil menemukan pengaruh moderasi karakteristik keahlian dan pengalaman *governance* (tata kelola) dengan opini audit *going concern* pada kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor karena perusahaan di Indonesia masih banyak yang belum mengungkapkan pengalaman *governance* yang dimiliki anggota komite audit secara rinci, ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0,99567 yang

berarti penyimpangan penyebaran data perusahaan yang berpengalaman banyak dan berpengalaman sedikit jaraknya cukup besar. Temuan ini sesuai dengan hasil studi Robinson dan Jackson (2009) yang menemukan keahlian *governance* tidak memiliki pengaruh dalam mengurangi terjadinya pergantian auditor.

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan tingkat signifikansi variabel interaksi opini audit *going concern* dengan aktivitas komite audit (GC*ACT) sebesar $0,752 > \alpha (0,05)$, berarti karakteristik aktivitas komite audit bukanlah variabel moderasi dan tidak mendukung hipotesis kelima (H_5). Temuan ini sesuai dengan hasil studi Robinson dan Jackson (2009) yang menemukan variabel ketekunan yang diprosikan dengan frekuensi pertemuan yang dilakukan komite audit tidak memiliki pengaruh dalam mengurangi terjadinya pergantian auditor. Tidak adanya pengaruh moderasi aktivitas komite dengan opini audit *going concern* pada kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor dapat disebabkan oleh nilai standar deviasi yang cukup besar yakni 0,33187. Berdasarkan hasil amatan bisa dilihat bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia yaitu 126 amatan melakukan rapat minimal empat kali atau lebih dan hanya 18 amatan yang tidak. Pertemuan rutin yang dilakukan adalah untuk memenuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Bapepam dan hanya bersifat formalitas. Dalam hal ini aktivitas rapat yang dilakukan komite audit belum berjalan optimal dan efektif sehingga aktivitas rapat yang dilakukan komite audit tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Penelitian ini berhasil menemukan bahwa opini audit *going concern* berpengaruh negatif dan signifikan pada kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor. Opini audit *going concern* tidak berpengaruh positif pada pergantian auditor karena opini diperoleh dari

auditor yang cukup kompatibel menurut perusahaan. Perusahaan di Indonesia cenderung menerima pemberian opini audit *going concern* dengan tanpa mengganti auditor. Hal ini membuktikan bahwa opini audit *going concern* seharusnya dapat diterima tanpa berimplikasi pada digantinya auditor karena untuk melindungi kepentingan investor. Pengaruh karakteristik independensi dan keahlian akuntansi dan keuangan komite audit adalah signifikan dan merupakan variabel pemoderasi yang berpengaruh pada hubungan opini audit *going concern* dengan pergantian auditor, sedangkan karakteristik keahlian dan pengalaman *governance* serta aktivitas komite audit ditemukan tidak berpengaruh signifikan pada hubungan opini audit *going concern* dengan pergantian auditor.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti perusahaan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IAI dalam merumuskan kebijakan, peraturan, dan standar dalam upaya untuk menyempurnakan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Saran kepada dewan komisaris dalam melakukan pemilihan dan penunjukan anggota komite audit supaya lebih mempertimbangkan pengalaman *governance* yang dimiliki oleh calon anggota komite audit. Untuk Otoritas Jasa Keuangan supaya semakin mempertegas regulasi mengenai kriteria khusus bagi calon anggota komite audit dan jika diperlukan dapat melalui *fit and proper test*. Komite audit supaya lebih mengefektifkan frekuensi pelaksanaan rapat dan melakukan lebih banyak pengungkapan aktivitas melalui risalah atau hasil rapat kepada publik untuk meningkatkan transparansi pengungkapan praktik *good corporate governance*.

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan, pertama penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur dengan empat tahun pengamatan. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah tahun pengamatan untuk mendapatkan jumlah amatan yang lebih banyak sehingga mampu memberikan hasil generalisasi yang lebih baik. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan data profil komite audit pada laporan tahunan yang tentunya informasi

ini belum mencerminkan kondisi sebenarnya dari komite audit itu sendiri. Di samping itu, masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan profil komite auditnya secara lengkap. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat menggunakan sumber-sumber informasi lain untuk memperoleh informasi profil anggota komite audit yang lengkap seperti misalnya data dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) maupun data yang diperoleh langsung dari perusahaan. Ketiga, pengukuran atas karakteristik komite audit ini belum sepenuhnya dapat mencerminkan kualitas komite audit. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain seperti proses kerja komite audit, penilaian dan pengungkapan kinerja komite audit sehingga dapat diketahui apakah fungsinya sebagai mekanisme *corporate governance* telah berjalan dengan baik dan efektif.

Referensi

- Abbott, L.J., dan Parker, S. 2000. Auditor Selection and Audit Committee Characteristics. *Auditing A Journal of Practice & Theory*. Vol. 19. No. 2, p. 47-67
- Abbott, L.J., Susan Parker, Gary F. Peters, K. Raghunandan. 2003. The Association Between Audit Committee Characteristic and Audit Fees. *Auditing A Journal of Practice & Theory*. Vol. 22. No. 2, p. 17-32
- Abbott, Lawrence J., Susan Parker, Gary F. Peters. 2004 . Audit Committee Characteristics and Restatements. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. Vol. 23, Issue 1, p. 69-87.
- Bewley, Kathryn, Janne Chung dan Susan McCracken. 2008. An Examination of Auditor Choice using Evidence from Andersen's Demise. *International Journal of Auditing*. Vol.12, p. 89-110.
- Blue Ribbon Committee. 1999. *Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees*. New York Stock Exchange, New York
- Carcello, Joseph V. dan Terry L. Neal. 2000. Audit Committee Composition and Auditor Reporting. *The Accounting Review*. Vol. 75, Issue 4, p. 453-467.
- _____. 2003. Audit Committee Characteristics and Auditor Dismissals Following New Going Concern Reports. *The Accounting Review*. Vol 78. No 1. Januari 2003.
- Damayanti, Shulamite dan Sudarma. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah Kantor Akuntan Publik. *Symposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Defond, M. L., Hann R. N. dan Hu, X. 2005. Does The Market Value Financial Expertise on Audit Committees of Boards of Directors? *Journal of Accounting Research* 43 (2), p. 153 – 193.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2004. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Lampiran Kep-29/PM/2004 Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.



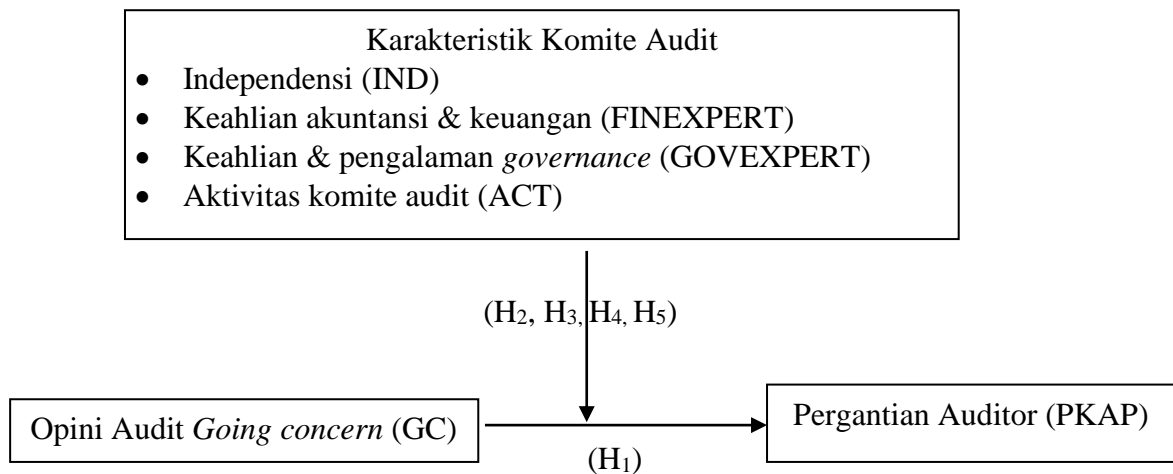
- DeZoort, F. Toed dan Steven E. Salterio. 2001. The Effects of Corporate Governance Experience and Financial-Reporting and Audit Knowledge on Audit Committee Members' Judgment. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. Vol. 20, Issue 2, p. 31 - 47.
- Esfandari, 2011. Kompetensi Komite Audit Sebagai Pemoderasi Hubungan Antara Penerbitan Opini Going Concern dengan Pergantian Auditor. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Giri, Efraim Ferdinan. 2010. Pengaruh Tenur Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit: Kasus Rotasi Wajib Auditor di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hartono, Jogyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Hudaib dan Cooke. 2005. Qualified Audit Opinion and Auditor Switching. *Department of Accounting and Finance School of Business and Economics University of Exeter Streatham Court, UK*. Diperoleh dari <http://www.google.co.id>, diakses 29 Januari 2013.
- Junaidi dan Hartono. 2010. Faktor Non Keuangan pada Opini Going Concern. *Symposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Kawijaya dan Juniarti. 2002. Faktor-faktor yang Mendorong Perpindahan Auditor pada Perusahaan-perusahaan di Surabaya dan Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 4 No 2*.
- Klein, A. 2002. Audit Committee, Board of Director Characteristics and Earnings Management. *Journal of Accounting & Economics* 33 :375 – 400
- Komalasari, Agrianti. 2007. Analisis Pengaruh Kualitas Auditor dan Proxi Going Concern terhadap Opini Auditor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol IX. No.2, Juli. p. 1-16
- Mardiyah, Aida Ainul. 2002. Pengaruh Perubahan Kontrak, Keefektifan Auditor, Reputasi Klien, Biaya Audit, Faktor Klien, dan Faktor Auditor Terhadap Auditor Changes: Sebuah Pendekatan Dengan Model Kontinjensi RPA. *Symposium Nasional Akuntansi ke V*. Semarang.
- PT. Bursa Efek Indonesia. 2003-2010. *Indonesian Capital Market Directory 2003-2010*. Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia.
- Republik Indonesia. 2003. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003* Tentang Jasa Akuntan Publik.
- _____. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008* Tentang Jasa Akuntan Publik.
- Rahmawati, Filka. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan yang Terdaftar di BEI Melakukan Pergantian Kantor Akuntan Publik, *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Robinson Diana R. dan Lisa A. Owens-Jackson. 2009. Audit Committee Characteristics and Auditor Changes. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. Supplement, Vol. 13, p. 17-132.
- Rustiarini, Ni Wayan. 2012. Komite Audit dan Kualitas Audit: Kajian Berdasarkan Karakteristik, Kompetensi dan Efektivitas Komite Audit. *SNA XV*. Banjarmasin
- Setiawan, Santy. 2006. Opini Going Concern dan Prediksi Kebangkrutan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol V No. 1 Mei
- Sinarwati. 2009. Pengaruh Opini Going Concern, Pergantian Manajemen, Reputasi Auditor dan Kesulitan Keuangan Terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Tesis*, Denpasar: Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana.



- Suryandari, Ayu. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergantian KAP Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI, *Tesis*, Denpasar: Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana.
- Task Force Komite Audit. 2002. *Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif* – Disusun untuk Komite Nasional Good Corporate Governance
- Wardhani, Ratna dan Herunata Joseph. 2010. Karakteristik Pribadi Komite Audit dan Praktik Manajemen Laba. *Symposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Wahyuningsih dan Suryanawa. 2012. Analisis Pengaruh Opini Audit Going Concern dan Pergantian Manajemen Pada Auditor Switching. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 1 Januari 2012.

Lampiran 1

Gambar 2.1
Model Penelitian



Tabel 3.1
Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Metode *Purposive*

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2011.	143
2	Data yang diperlukan tidak tersedia dengan lengkap	(21)
3	Perusahaan tidak melakukan pergantian KAP selama periode 2008-2011	(68)
4	Perusahaan melakukan pergantian KAP yang bersifat mandatori selama tahun 2008-2011	(18)
	Jumlah perusahaan yang masuk kriteria	36
	Total amatan selama periode penelitian (4 tahun)	144

Sumber: data diolah (2013)

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
PKAP	144	0,00	1,00	0,3681	0,48396
GC	144	0,00	1,00	0,2847	0,45286
IND	144	0,33	1,00	0,8217	0,20004
FINEXPERT	144	0,33	1,00	0,6982	0,20652
GOVEXPERT	144	1,25	6,00	1,9613	0,99567
ACT	144	0,00	1,00	0,8750	0,33187
GC*IND	144	0,00	1,00	0,2433	0,40272
GC*FINEXPERT	144	0,00	1,00	0,2017	0,34253
GC*GOVEXPERT	144	0,00	4,33	0,4649	0,79897
GC*ACT	144	0,00	1,00	0,2014	0,40244

Sumber: data diolah (2013)

Tabel 4.2
Hosmer and Lemeshow Test

	Chi-square	df	Sig.
Model (2)	3,856	8	0,870

Sumber : data diolah (2013)

Tabel 4.3
Perbedaan Nilai -2 Log Likelihood

		-2LL		-2LL
Model (1)	Step 0	189,479	Step 1	184,460
Model (2)	Step 0	189,479	Step 1	171,785

Sumber : data diolah (2013)

Tabel 4.4
Nagelkerke's R Square

	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
Model (1)	184,460	0,034	0,047
Model (2)	171,785	0,116	0,158

Sumber: data diolah (2013)

Tabel 4.5
Tabel Klasifikasi

<i>Observed</i>	<i>Predicted</i>		
	PKAP		<i>Percentage Correct</i>
	0	1	
Model (1)			
<i>Step 1 PKAP</i> 0	71	20	78,0
1	32	21	39,6
<i>Overall Percentage</i>			63,9
Model (2)			
<i>Step 1 PKAP</i> 0	84	7	92,3
1	38	15	28,3
<i>Overall Percentage</i>			68,8

Sumber: data diolah (2013)

Tabel 4.6
Matriks Korelasi

	<i>Constant</i>	GC	IND	FINEX	GOVE X	ACT	GC* IND	GC* FINEX	GC* GOVEX	GC* ACT
<i>Step 1 Constant</i>	1,000	-0,934	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,890	-0,624	-0,540	0,314
GC	-0,934	1,000	-0,227	-0,150	-0,104	0,174	0,914	0,652	0,546	-0,521
IND	0,000	-0,227	1,000	0,087	0,196	-0,115	-0,332	-0,041	-0,050	0,077
FINEXPERT	0,000	-0,150	0,087	1,000	-0,124	0,029	-0,029	-0,477	0,032	-0,020
GOVEXPERT	0,000	-0,104	0,196	-0,124	1,000	-0,035	-0,065	0,059	-0,257	0,023
ACT	0,000	0,174	-0,115	0,029	-0,035	1,000	0,038	-0,014	0,009	-0,672
GC*IND	-0,890	0,914	-0,332	-0,029	-0,065	0,038	1,000	0,476	0,411	-0,336
GC*FINEX	-0,624	0,652	-0,041	-0,477	0,059	-0,014	0,476	1,000	0,038	-0,176
GC*GOVEX	-0,540	0,546	-0,050	0,032	-0,257	0,009	0,411	0,038	1,000	-0,237
GC*ACT	0,314	-0,521	0,077	-0,020	0,023	-0,672	-0,336	-0,176	-0,237	1,000

Sumber: data diolah (2013)

Tabel 4.7
Variabel dalam persamaan

	B	S.E	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Model (1)						
Step 1 GC	-0,846	0,378	5,003	1	0,025	0,429
Constant	0,049	0,312	0,024	1	0,876	1,050
Model (2)						
Step 1 GC	-11,543	5,125	5,073	1	0,024	0,000
IND	0,083	1,141	0,005	1	0,942	1,086
FINEXPERT	0,080	1,100	0,005	1	0,942	1,083
GOVEXPERT	0,098	0,196	0,249	1	0,618	1,103
ACT	0,842	0,853	0,974	1	0,324	2,321
GC*IND	-7,076	3,437	4,239	1	0,040	0,001
GC*FINEX	-4,554	2,306	3,901	1	0,048	0,011
GC*GOVEX	-0,649	0,765	0,720	1	0,396	0,523
GC*ACT	0,402	1,269	0,100	1	0,752	1,495
Constant	9,959	4,387	5,154	1	0,023	2,115

Sumber: data diolah (2013)

Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap Perataan Laba

KHOIRINA FARINA*

Universitas TRILOGI

ANCELLA HERMAWAN

Universitas Indonesia

Abstract: *The purpose of this study is to investigate the effect of the effectiveness of the board commissioners and audit committee, ownership structure, and audit quality on income smoothing. Companies conducted income smoothing are identified by using Eckel Index (Eckel, 1981). The effectiveness of the board commissioners and audit committee are measured using a score based on their characteristics such as independence, activity, size and competence (Hermawan 2009). The research hypothesis is was tested using logistics regression with sample consisted of 125 companies listed on Indonesian Stock Exchange in 2011. The result shows that companies owned and controlled by family have higher probability to have income smoothing practices, and foreign ownership have lower the probability to have income smoothing practice. In contrast the effectiveness of the board commissioners and audit committee do not have any influence on income smoothing practice.*

Keywords: *Income Smoothing, Effectiveness of the Board Commisioners, Effectiveness Audit Committee, Family Ownership, Foreign Ownership, Quality Audit.*

* Corresponding author: khoirina@stekpi.ac.id

1. Pendahuluan

Informasi laba merupakan informasi potensial yang terkandung dalam laporan keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, membantu estimasi laba yang representative dalam jangka panjang dan menaksir risiko investasi dan kredit. Hal ini menyebabkan para investor lebih cenderung untuk memperhatikan laba dalam laporan laba rugi untuk keperluan pengambilan keputusan. Perilaku investor inilah yang disadari oleh para manajemen yang akhirnya mendorong untuk melakukan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behaviour*), yaitu dengan melakukan manipulasi laba atau manajemen laba. Salah satu pola manajemen laba yang umum digunakan untuk tujuan tertentu adalah perataan laba (Cahan, 2008). Tindakan manajemen untuk melakukan perataan laba umumnya didasarkan atas berbagai alasan di antaranya untuk memuaskan kepentingan pemilik perusahaan seperti menaikkan nilai perusahaan sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki risiko ketidakpastian yang rendah (Juniarti dan Carolina, 2005), menaikkan harga saham perusahaan (Kirschenheiter dan Melumad, 2002), dan untuk memuaskan kepentingannya sendiri, seperti mendapatkan kompensasi dan mempertahankan posisi jabatan (Juniarti dan Carolina, 2005).

Agency theory menekankan bahwa angka-angka akuntansi memainkan peranan penting dalam menekan konflik antara pemilik perusahaan dan pengelolanya atau manajer. Untuk meminimalisasi konflik keagenan dalam perusahaan dibutuhkan mekanisme *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan. Adanya mekanisme *corporate governance* di perusahaan diyakini akan membatasi pengelolaan laba yang oportunistik oleh manajemen (Siregar dan Utama, 2005). Di Indonesia, Pemerintah telah menekankan pentingnya peranan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dalam mewujudkan *good corporate governance*. Independensi dari dewan komisaris menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mampu mengurangi kecenderungan manajemen untuk

melakukan kecurangan di dalam laporan keuangan perusahaan (Beasley, 1996). Penelitian Beasley (1996) dan Xie *et al.* (2003) menyatakan bahwa kompetensi dari anggota dewan komisaaris independen merupakan faktor penting untuk efektivitas peran dari dewan komisaris. Kompetensi *monitoring* dari anggota dewan yang independen akan dipengaruhi oleh pengalaman pengetahuan, latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan. Perangkat lain untuk mendukung terlaksananya *corporate governance* adalah komite audit yang merupakan bagian pendukung pelaksanaan tugas dewan komisaris. Anderson *et al.* (2003) menemukan bahwa komite audit dengan jumlah anggota yang kecil memiliki kandungan informasi laba yang lebih tinggi. Penelitian Dhaliwal *et al.* (2007) menyimpulkan bahwa adanya ahli akuntansi (*accounting expert*) di komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Di Indonesia, mayoritas perusahaan publik dikendalikan dan dimiliki oleh keluarga yang cenderung memiliki manajemen yang merupakan anggota dari keluarga, sehingga akan mengurangi adanya masalah agensi antara pemegang saham dan manajemen. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi cenderung kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada suatu golongan (*block*). Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa dewan komisaris pada perusahaan keluarga cenderung tidak independen dan didominasi oleh anggota keluarga.

Perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung memiliki teknologi yang cukup, sehingga mendukung terciptanya sistem informasi manajemen yang lebih efisien sehingga lebih mudah memberi akses dalam sistem pengendalian intern dan kebutuhan informasi bagi perusahaan induknya. Leuz *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan asing berhubungan negatif dengan manajemen laba. Kualitas audit yang lebih tinggi dari suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) memperbesar risiko terungkapnya kecurangan akuntansi. Dahlan (2009) menemukan bukti empiris bahwa kualitas audit berhubungan negatif dengan praktik

manajemen laba. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang melakukan manipulasi laba akan menghindari penggunaan jasa audit dari KAP yang memiliki reputasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengaitkan *corporate governance* dengan manajemen laba, sedangkan pada penelitian ini mengaitkan *corporate governance*, perusahaan yang dikendalikan dan dimiliki oleh keluarga, kepemilikan asing dan kualitas audit dengan praktik perataan laba. Perbedaan lainnya dengan penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan pengukuran untuk dewan komisaris dan komite audit diukur menggunakan skor efektivitas (Hermawan, 2009) yang menggunakan karakteristik independensi, aktivitas, jumlah anggota dan kompetensi. Berdasarkan latar belakang di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas dewan komisaris dan komite audit, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing dan kualitas audit terhadap praktik perataan laba.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi berupa tambahan referensi terutama kajian akuntansi keuangan mengenai *agency theory* dan mengenai *corporate governance* yang baik dengan menilai efektivitas dari karakteristik dewan komisaris dan komite audit dalam sebuah perusahaan sehingga dapat menghambat adanya manipulasi laba, memberi pertimbangan tambahan bagi investor dalam menilai keandalan laporan keuangan dengan terlebih dahulu menilai informasi karakteristik struktur *corporate governance* dan kemungkinan adanya kecurangan di dalam perusahaan, sehingga kualitas keputusan investor yang diambil dapat menjadi lebih baik dan dapat memberikan informasi bagi regulator sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan atau regulasi di masa yang akan datang yang berkaitan dengan praktik *corporate governance*, demi melindungi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Tinjauan Teoritis

2.1 Perataan Laba

Cahan *et al.* (2008) menyatakan perataan laba merupakan salah satu jenis dari tindakan manajemen laba. Tujuannya adalah untuk mengurangi variasi periodik laba dari waktu ke waktu. Schroeder (2009) menyatakan bahwa praktik perataan laba merupakan praktik umum yang dilakukan manajer untuk mengurangi perubahan naik turunnya (fluktuasi) laba, yang diharapkan mempunyai pengaruh yang bermanfaat bagi evaluasi kinerja manajemen. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa perataan laba lebih disebabkan karena manajemen memilih untuk menjaga nilai laba yang stabil dibandingkan nilai laba yang cenderung bergejolak (*volatile*), sehingga manajemen akan menaikkan laba yang dilaporkan jika jumlah laba yang sebenarnya menurun dari laba tahun sebelumnya dan sebaliknya manajemen akan memilih untuk menurunkan laba yang dilaporkan jika laba yang sebenarnya meningkat dibandingkan laba tahun sebelumnya (Novita, 2009).

Beberapa studi terdahulu telah ditemukan bukti adanya berbagai macam tujuan yang melatarbelakangi perusahaan-perusahaan melakukan perataan laba. Moses (1987) telah menemukan bukti bahwa perencanaan bonus digunakan sebagai tujuan dari perataan laba. Alasan praktik perataan laba oleh manajemen menurut Hepworth (1953) dalam Budiasih (2009) adalah (1) sebagai rekayasa untuk mengurangi laba dan menaikkan biaya pada periode berjalan yang dapat mengurangi utang pajak, (2) sebagai bentuk peningkatan citra perusahaan dimata investor, (3) sebagai jembatan penghubung antara manajemen perusahaan dengan karyawannya. (4) memiliki dampak psikologis pada perekonomian.

2.2 Agency Theory

Masalah *corporate governance* berakar dari pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Jensen dan Meckling (1976) dalam teori keagenan (*agency theory*), yang

disebut dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik dan *agent* adalah manajemen atau manajer yang mengelola perusahaan. Secara umum tujuan manajemen dan pemegang saham biasanya tidak berbeda. Keduanya bertujuan memaksimalkan keuntungan dan menaikkan pertumbuhan pendapatan serta harga saham perusahaan. Masalah muncul ketika terdapat informasi yang bersifat asimetri, baik yang berupa kegiatan tersembunyi (*hidden action*) maupun informasi tersembunyi (*hidden information*). Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasi dengan wajar dan bernilai tinggi.

2.3 Corporate Governance

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) melihat *corporate governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris, direksi, manajer, pemegang saham serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, struktur dari *corporate governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

2.3.1 Hubungan Dewan Komisaris dan Perataan Laba

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat vital. Dalam proses pelaporan keuangan, dewan komisaris membutuhkan informasi yang akurat agar dapat memonitor kinerja manajer secara efektif dan efisien. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

merupakan salah satu informasi yang dapat diandalkan dalam memonitor dan mengevaluasi manajer dan dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan strategi (Watts dan Zimmerman, 1986; Bushman dan Smith, 2001 dalam Ahmed dan Duellman, 2007).

2.3.1.1 Independensi Dewan Komisaris

Definisi independensi dewan komisaris adalah anggota dari dewan komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan. Dewan komisaris independen tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hasil penelitian Cornett *et al.* (2009) menyatakan bahwa *independent board* efektif dalam mengurangi manajemen laba ketika komisaris independen merupakan minoritas dalam dewan komisaris. Dimitropoulos dan Asteriou (2010) menyatakan bahwa perusahaan dengan proporsi anggota *board* independen yang tinggi akan melaporkan laba yang berkualitas tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai proporsi anggota independen rendah. Bukti empiris lain yang menunjukkan bahwa dewan komisaris yang independen akan mengurangi adanya manajemen laba juga terdapat pada penelitian Xie *et al.* (2003). Ini berarti bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris yang independen akan semakin kecil kemungkinan untuk melakukan manajemen laba yang oportunistik. sehingga lebih efektif dan lebih independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap manajemen.

2.3.1.2 Aktivitas Dewan Komisaris

Dewan komisaris yang aktif mengadakan pertemuan secara rutin, sehingga mengetahui permasalahan lebih dini dan melakukan pengawasan lebih sistematis. Penelitian Xie *et al.* (2003) dan Zhou dan Chen (2004) menemukan dewan *board* yang sering mengadakan rapat akan mengurangi terjadinya manajemen laba. Penelitian Anderson *et al.*

(2003) menguji pengaruh dari aktivitas dewan yang diukur dengan jumlah rapat dengan *earnings response coefficient*, dan hasil temuannya, yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan antara dewan komisaris independen dan frekuensi rapat dewan yang berpengaruh terhadap kandungan informasi laba.

2.3.1.3 Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006), jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Jumlah anggota dewan merupakan faktor penting dalam efektifitas peran dewan. Zhou dan Chen (2004) menemukan bahwa jumlah anggota dari dewan memiliki peranan penting untuk membatasi adanya manajemen laba pada bank-bank yang termasuk sebagai manajemen laba tinggi. Uadiale (2010) menunjukkan hasil yang sama bahwa perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan lebih efektif melakukan pengawasan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai jumlah anggota dewan komisaris yang lebih sedikit. Sehingga disimpulkan bahwa jumlah anggota dewan memiliki pengaruh pada efektivitas peran *monitoring* dari dewan.

2.3.1.4 Kompetensi Dewan Komisaris

Penelitian Beasley (1996) dan Xie *et al.* (2003) menyatakan bahwa kompetensi dari anggota dewan independen merupakan faktor penting untuk efektivitas peran dewan. Di mana kompetensi *monitoring* dari anggota *board* yang independen akan dipengaruhi oleh pengalaman pengetahuan, latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris. Kompetensi tersebut akan berpengaruh pada kemampuan dewan komisaris untuk memahami bisnis perusahaan dan melaksanakan fungsi pengawasan dengan optimal. Penelitian Xie *et al.* (2003) menemukan adanya pengaruh yang negatif dari latar belakang

pengetahuan yang dimiliki dewan *board* mengenai perusahaan dan keuangan terhadap manajemen laba.

2.3.2 Hubungan Komite Audit Dengan Perataan Laba

Komite audit memiliki peranan penting dalam penerapan *good corporate governance* di perusahaan. Komite audit akan mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh manajer sehingga akan mempersempit ruang gerak manajer dalam melakukan manipulasi laba. Beberapa penelitian mengenai keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996; Petra, 2007).

2.3.2.1 Independensi Komite Audit

Faktor penting yang memungkinkan komite audit menjalankan fungsi pengawasan atas laporan keuangan dengan efektif adalah apabila komite audit bersifat independen. Peraturan Bapepam mewajibkan perusahaan publik untuk membentuk suatu komite audit yang beranggotakan paling sedikit tiga orang dan diketuai oleh komisaris independen, dengan pihak lain yang berasal dari luar perusahaan (eksternal). Zhou dan Chen (2004) menemukan bahwa independensi komite audit memiliki peran penting untuk membatasi tindakan manajemen laba pada bank-bank yang termasuk manajemen laba tinggi. Xie *et al.* (2003) menemukan bahwa independensi komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan adanya manajemen laba di perusahaan. Anderson *et al.* (2003) juga menemukan bahwa independensi dari komite audit berpengaruh positif dan signifikan pada keandalan laporan keuangan yang diukur dengan *earnings response coefficient*.

2.3.2.2 Aktivitas Komite Audit

Penelitian Anderson *et al.* (2003), Xie *et al.* (2003), dan Zhou dan Chen (2004) menemukan bahwa komite audit yang mengadakan rapat minimal empat kali dalam setahun memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya *restatement* laporan keuangan.

2.3.2.3 Jumlah Anggota (*Size*) Komite Audit

Menurut KNKG (2006) jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan pengambilan keputusan. Ukuran komite audit harus ditentukan oleh perusahaan. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Anderson *et al.* (2003) menemukan bahwa komite audit dengan jumlah anggota yang lebih kecil memiliki kandungan informasi laba yang lebih tinggi. Zhou dan Chen (2004) menemukan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki peran penting untuk mencegah manajemen laba pada bank yang *high manajemen laba*.

2.3.2.4 Kompetensi Komite Audit

Tugas komite audit pada umumnya lebih banyak berhubungan dengan proses penyusunan laporan keuangan dan audit. Oleh karena itu sangat dibutuhkan orang yang memiliki pengalaman ataupun latar belakang akuntansi dan keuangan. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh latar belakang akuntansi dan keuangan dari anggota komite audit ini dengan praktik manajemen laba. Xie *et al.* (2003) menemukan latar belakang keuangan komite audit dapat menurunkan manajemen laba di perusahaan. Zhou dan Chen (2004) menguji pengaruh karakteristik dewan direktur dan komite audit terhadap manajemen laba di bank komersial yang diukur berdasarkan *loan loss provision*. Mereka menemukan bahwa *expertise* anggota komite audit dalam *government* memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.3 Kepemilikan Keluarga dan Perataan laba

Arifin (2003) dalam Siregar (2005) menunjukkan bahwa perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan oleh keluarga atau negara atau institusi keuangan masalah agensinya lebih baik jika dibandingkan perusahaan yang dikontrol oleh publik atau tanpa pengendali utama. Menurutnya dalam perusahaan yang dikendalikan keluarga, masalah agensinya lebih kecil karena

berkurangnya konflik antara pemilik dan manajer. Jika kepemilikan keluarga lebih efisien, maka pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi pengelolaan laba yang oportunistik dapat dibatasi.

Dengan demikian, perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga memiliki mekanisme kontrol yang efektif, sehingga dapat menurunkan keinginan manajer untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan (Ali *et al.*, 2007). Setia *et al.* (2008) mengungkapkan pula bahwa perusahaan keluarga di Australia memiliki kualitas laba yang lebih rendah dibandingkan perusahaan bukan keluarga. Kualitas laba yang rendah diakibatkan oleh perilaku keluarga yang berusaha mendapatkan manfaat privat melalui kemampuan kontrol yang lebih tinggi pada perusahaan keluarga. Selanjutnya penelitian Jaggi dan Leung (2007) di Hong Kong menemukan bukti bahwa komite audit yang dibentuk di negara-negara dengan konsentrasi kepemilikan keluarga, memainkan peranan yang sangat penting dalam membatasi sikap manajerial untuk melakukan manajemen laba. Namun efektivitas *monitoring* komite audit menjadi berkurang secara signifikan apabila ada anggota keluarga yang duduk di dewan komite audit, khususnya apabila anggota-anggota keluarga mendominasi dewan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh loyalitas dari anggota komite audit terhadap anggota keluarga yang telah menunjuk mereka untuk duduk di dewan. Hermawan (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa perusahaan yang dikendalikan dan dimiliki oleh keluarga mempunyai *earnings response coefficient* (ERC) yang lebih rendah dibandingkan perusahaan lain. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan keluarga dipandang oleh investor memiliki *corporate governance* yang lebih buruk dibandingkan perusahaan lainnya.

2.3.4 Kepemilikan Asing dan Perataan Laba

Foreign Ownership atau proporsi kepemilikan saham oleh pihak asing adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing. Penelitian Leuz *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan asing berhubungan negatif dengan manajemen laba. Torres *et al.* (2010)

penelitiannya di Brazil menemukan bahwa pemodal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Penelitian di Indonesia Yusuf dan Soraya (2004) menemukan bahwa perusahaan *non* asing lebih banyak melakukan praktik perataan laba dibandingkan dengan perusahaan asing.

2.3.5 Kualitas Audit dan Perataan Laba

Tujuan dari audit laporan keuangan adalah memberikan kepastian mengenai integritas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Kepastian mengenai relevansi dan keandalan dari laporan keuangan perusahaan sangat diperlukan untuk membantu pihak eksternal dalam mengambil keputusan bisnis. Dahlan (2009) juga menemukan bukti empiris bahwa kualitas audit berhubungan negatif dengan praktik manajemen laba perusahaan, tetapi hubungannya tergolong lemah. Penelitian Francis dan Wang (2008) meneliti pengaruh audit oleh auditor *big 4* dan perlindungan investor pada kualitas laba dengan sampel internasional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang menggunakan auditor *big 4* lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan auditor *non big 4* ketika perlindungan investor di negara tersebut lebih kuat. Debosky dan Jiang (2012) menyatakan bahwa keahlian audit mempunyai peran *monitoring* dalam menghambat manajemen laba. Ahmad dan Mansur (2009) penelitiannya di Malaysia menyatakan bahwa perataan laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dipengaruhi oleh nama dari auditor independen-nya, semakin bagus nama auditor yang mengaudit suatu perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya perataan laba di perusahaan tersebut. Gusnadi dan Budiharta (2008) hasil penelitiannya bahwa auditor dengan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihatnya. Efektivitas pelaksanaan tugas dewan komisaris terbukti dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, yaitu independensi, aktivitas, *size* dan kompetensi dewan komisaris (Dhaliwal., 2007; Xie *et al.*, 2003; Hermawan, 2009). Apabila perusahaan memiliki skor efektivitas dewan komisaris yang tinggi berarti peran pengawasan dewan komisaris diharapkan efektif untuk mencegah dilakukannya praktik perataan laba. Maka hipotesis penelitian yang pertama adalah:

H1a: Efektivitas dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap probabilitas melakukan praktik perataan laba.

Komite audit merupakan organ dari dewan komisaris yang bertugas membantu dewan komisaris dalam pengawasan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu apabila peran komite audit benar-benar efektif, seharusnya akan mencegah terjadinya praktik perataan laba yang tidak terkontrol. Efektivitas komite audit dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yang telah dibuktikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, (Xie *et al.*, 2003; Dhaliwal *et al.*, 2007), yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, kompetensi komite audit. Hipotesis penelitian yang kedua adalah:

H2a: Efektivitas komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap probabilitas melakukan praktik perataan laba.

Perusahaan yang dikendalikan dan dimiliki oleh keluarga memiliki mekanisme yang efektif, sehingga dapat menurunkan keinginan manager untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan (Ali *et al.* 2007). Namun efektivitas *monitoring* komite audit menjadi

berkurang secara signifikan apabila ada anggota keluarga yang duduk di dewan komite audit.

Hipotesis penelitian ketiga adalah:

H3a: *Perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga memiliki probabilitas perataan laba lebih tinggi dari perusahaan lainnya.*

Perusahaan dengan kepemilikan asing akan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan non asing, karena perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung memiliki teknologi yang cukup, sehingga mendukung terciptanya sistem informasi manajemen yang lebih efisien. Yusuf dan Soraya (2004) di Indonesia menemukan bahwa perusahaan non asing lebih banyak melakukan praktik perataan laba dibandingkan dengan perusahaan asing. Hipotesis penelitian yang keempat adalah:

H4a: *Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki probabilitas lebih kecil untuk melakukan praktik perataan laba dibanding perusahaan lainnya*

Ahmad dan Mansur (2009) penelitiannya di Malaysia menyatakan bahwa perataan laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dipengaruhi oleh nama dari auditor independennya, semakin bagus nama auditor yang mengaudit suatu perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya perataan laba di perusahaan tersebut. Maka hipotesis penelitian yang kelima adalah:

H5a: *Perusahaan yang diaudit oleh KAP big four memiliki probabilitas lebih kecil untuk melakukan praktik perataan laba dibanding perusahaan lainnya.*

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Pemilihan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini difokuskan pada seluruh perusahaan-perusahaan yang *listing* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2011, kecuali perusahaan dari sektor keuangan. Teknik penarikan sampel pada menggunakan *purposive sampling method*. Perusahaan-perusahaan dari sektor keuangan dikeluarkan dari sampel karena perusahaan keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sektor lainnya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian juga dikeluarkan dari sampel, karena dimungkinkan adanya perilaku yang berbeda dari perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah (1) tidak melibatkan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, (2) tidak melibatkan perusahaan yang selama periode penelitian tahun 2006 - 2011 yang mengalami kerugian. (3) perusahaan memiliki laporan keuangan tahunan yang berakhir setiap tanggal 31 Desember, (4) perusahaan terdaftar pada BEI selama periode penelitian, yaitu tahun 2006 - 2011 (tidak pernah *delisting*, *suspense* saham atau *go private*, *merger*) selama periode penelitian, dan (5) perusahaan memiliki laporan keuangan tahunan dengan informasi lengkap yang dibutuhkan sebagai data penelitian.

3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perataan laba (*income smoothing*). Untuk menentukan status perataan laba digunakan indeks Eckel (1981). Kriteria perusahaan melakukan atau tidak melakukan perataan laba adalah (1) perusahaan dianggap melakukan praktik perataan laba apabila indeks perataan laba lebih kecil daripada 1 ($CV\Delta S > CV\Delta I$), (2) perusahaan dianggap tidak melakukan praktik perataan laba apabila indeks perataan laba

lebih besar daripada 1 ($CV\Delta S > CV\Delta I$). Berikut ini *income smoothing ratio* menurut Eckel (1981):

$$ISratio = \frac{CV \Delta net income}{CV \Delta net Sales}$$

Keterangan:

ISratio = Rasio perataan laba (*income smoothing ratio*)

CV = *coefficient of variation*

Untuk menghitung *CV* (*coefficient of variation*) untuk $\Delta net income$ dan $\Delta Sales$ adalah sebagai berikut:

$$CV \Delta net income \text{ dan } CV \Delta sales = \sqrt{\frac{\sum(\Delta X - \Delta \bar{X})^2}{n - 1}} : \Delta \bar{X}$$

Keterangan:

ΔX : Perubahan *net income* atau *sales* antara tahun n dengan n-1

$\Delta \bar{X}$: Rata-rata perubahan *net income* atau *sales* antara tahun n dengan n-1

n : tahun yang diteliti

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Skor Efektivitas Dewan Komisaris (SCOREBD)**, dihitung berdasarkan nilai yang diperoleh dari daftar pertanyaan (*Checklist*), berdasarkan karakteristik independensi, aktivitas, jumlah anggota (*size*), serta kompetensi (*expertise*).
2. **Skor Efektivitas Komite Audit (SCOREAC)**, dihitung berdasarkan nilai yang diperoleh dari daftar pertanyaan (*Checklist*), berdasarkan karakteristik aktivitas, jumlah anggota (*size*), serta kompetensi (*expertise*).

3. **Perusahaan yang Dikendalikan dan Dimiliki Oleh Keluarga (FAMOWN)**, variabel FAMOWN menggunakan pengukuran yang pernah dilakukan oleh Hermawan (2009) dimana kepemilikan perusahaan yang dikendalikan dan dimiliki oleh keluarga didefinisikan sebagai perusahaan yang kepemilikan sahamnya >5%. Variabel FAMOWN menggunakan variabel dummy. Diberi nilai 1 apabila proporsi kepemilikan > 50% dan nilai 0 apabila proporsi ≤50%.
4. **Kepemilikan Asing (FOREIGN)**, merupakan variabel *dummy*, bila kepemilikan modal asing >50% maka diberi nilai 1, dan 0 apabila kepemilikan modal asing < 50%.
5. **Kualitas Audit (KAP)**, diukur dengan *proxy* apakah auditor merupakan KAP *big four* atau tidak. KAP merupakan variabel *dummy*, nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *big four* dan bernilai 0 jika perusahaan diaudit oleh KAP *non big four*.
6. **Variabel Kontrol penelitian terdiri dari *Size, Financial Leverage, Profitabilitas***. Ukuran (*size*) perusahaan di *proxy* dengan *logaritma natural* dari nilai total aset. *Financial leverage* diproksikan dengan *debt to total asset* yang diperoleh melalui total utang dibagi dengan total aset. Profitabilitas diproksikan dengan *return on asset (ROA)*. ROA diperoleh dari rasio laba bersih setelah pajak dengan total aset.

3.3 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model logit karena variabel dependen yang digunakan merupakan variabel binary atau *dummy*. Berikut ini adalah model penelitian dengan menggunakan regresi logistik:

$$\ln \frac{P}{1-P} = IS_{it} = \beta + \beta_1 SCOREBD_{it} + \beta_2 SCOREAC_{it} + \beta_3 FAMOWN_{it} + FOREIGN_{it} + \beta_5 KAP_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 LVRG_{it} + \beta_8 PROFIT_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- IS : *Income Smoothing*/perataan laba menggunakan variabel *dummy* (1,0), diberi nilai 1 apabila perusahaan melakukan praktik perataan laba dan 0 apabila perusahaan tidak melakukan praktik perataan laba.
- SCOREBD : Skor efektivitas dari dewan komisaris (terdiri dari karakteristik independensi, aktivitas, *size* dan kompetensi)
- SCOREAC : Skor efektivitas dari dewan komite audit (terdiri dari karakteristik aktivitas, *size* dan kompetensi)
- FAMOWN : Perusahaan yang dikendalikan dan dimiliki oleh keluarga, menggunakan variabel *dummy* (1,0) adalah 1 apabila perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga dengan proporsi kepemilikan > 50% dan 0 apabila proporsi kepemilikan < 50%.
- FOREIGN : Perusahaan yang dimiliki oleh asing. Menggunakan variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika proporsi kepemilikan modal asing >50% dan 0 jika proporsi kepemilikan modal asing < 50%.
- KAP : Kualitas audit menggunakan variabel *dummy* (1,0), nilai 1 apabila perusahaan menggunakan jasa KAP *big 4* dan 0 apabila perusahaan tidak menggunakan jasa KAP *big 4*.
- SIZE : Ukuran (*size*) perusahaan diukur dengan total aset perusahaan
- LVRG : *Leverage* yang diukur dengan *debt to total asset* yang diperoleh melalui total utang dibagi dengan total asset.
- PROFIT : *Profitabilitas* diukur dengan *return on asset* (ROA).

4. Hasil Penelitian

4.1 Analisis Statistik Deskriptif Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit

Prosedur seleksi sampel berdasarkan kriteria sebelumnya menghasilkan sampel sebanyak 125 perusahaan, terdiri dari 61 perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dan 64 perusahaan tidak melakukan perataan laba. Skor efektivitas dewan komisaris berisikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan karakteristik dewan komisaris disajikan pada tabel 1 pada lampiran. Karakteristik tersebut terdiri atas independensi, aktivitas, *size* dan kompetensi dengan jumlah 17 pertanyaan, masing-masing pertanyaan dapat diberi nilai 1 sampai 3. Untuk kategori karakteristik independensi terdiri dari enam pertanyaan, aktivitas terdiri enam pertanyaan, jumlah anggota (*size*) terdiri satu pertanyaan dan kompetensi terdiri empat pertanyaan. Pada setiap pertanyaan yang mengukur karakteristik memperoleh nilai minimum dan maksimum. Nilai rata-rata (*mean*) kategori independensi adalah 10.67, berarti berada dibawah nilai *Fair*, yaitu 12. Artinya rata-rata dewan komisaris memiliki karakteristik independensi yang kurang baik. Nilai rata-rata (*mean*) untuk kategori aktivitas adalah 13.9, berarti nilai tersebut berada sedikit di atas nilai *Fair*, yaitu 12. Artinya secara rata-rata dewan komisaris memiliki karakteristik aktivitas yang cukup baik. Nilai rata-rata kategori *size* dewan komisaris adalah 2, nilai ini berarti sama dengan nilai *Fair*, yaitu 2. Artinya, secara rata-rata *size* dewan komisaris memiliki karakteristik *size* yang cukup baik. Untuk kategori kompetensi memperoleh nilai rata-rata adalah 10.34 berarti nilai tersebut berada di atas nilai *Fair*, yaitu 8. Nilai tersebut mencerminkan bahwa dewan komisaris memiliki kompetensi yang relatif cukup baik. Secara total, skor rata-rata dewan komisaris adalah 36.87, sedikit diatas nilai *Fair*, yaitu 34 (17 pertanyaan dikalikan dengan nilai 2). Sehingga disimpulkan bahwa dewan komisaris pada observasi penelitian secara rata-rata memiliki efektifitas pada tingkatan sedang.

Untuk perhitungan skor efektivitas komite audit, digunakan 11 pertanyaan dalam daftar pertanyaan yang berkaitan dengan karakteristik komite audit, yaitu aktivitas, *size* dan kompetensi yang masing-masing diberi nilai 1 sampai 3. Skor efektivitas komite audit

disajikan dalam tabel 2 pada lampiran. Untuk kategori karakteristik aktivitas terdiri dari delapan pertanyaan, jumlah anggota terdiri satu pertanyaan, kompetensi terdiri dua pertanyaan. Pada setiap pertanyaan yang mengukur karakteristik tersebut memperoleh nilai minimum dan maksimum.

Nilai rata-rata karakteristik aktivitas komite audit adalah sebesar 18.89, yaitu di atas sedikit dari nilai *Fair*, yaitu 16. Berarti secara rata-rata komite audit memiliki aktivitas yang baik. Perusahaan yang melakukan praktik perataan laba memiliki nilai rata-rata skor aktivitas yang sama dengan perusahaan tidak melakukan perataan laba. Nilai rata-rata untuk kategori *size* komite audit adalah 2.14, yaitu di atas sedikit dari nilai *Fair*. Artinya bahwa jumlah anggota komite audit sudah sesuai dengan peraturan BEI dan Bapepam dan LK, yaitu tiga orang. Untuk kategori kompetensi nilai rata-rata adalah 4.79, berarti di atas nilai *Fair*, yaitu 4. Artinya sebagian besar observasi penelitian memiliki anggota komite audit yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Selain itu, nilai ini mengindikasikan juga bahwa usia anggota komite audit dalam observasi penelitian relative cukup muda. Secara keseluruhan komite audit memiliki skor rata-rata 26 berarti sedikit diatas nilai *Fair*, yaitu 22 (11 pertanyaan dikalikan dengan nilai 2). Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas peran komite audit pada observasi penelitian secara rata-rata berada pada tingkatan sedang. Berdasarkan tabel 2 (lampiran) perusahaan yang melakukan praktik perataan laba maupun perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba memiliki rata-rata skor yang sama. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas peran komite audit pada perusahaan.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif Perusahaan Yang Dikendalikan dan Dimiliki Oleh Keluarga, Kepemilikan Modal Asing Dan Kualitas Audit

Tabel 3 pada lampiran menunjukkan bahwa sebagian besar struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia dikendalikan dan dimiliki oleh keluarga, yaitu sebesar 85 perusahaan

atau 68% dari total keseluruhan sampel. Perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan memiliki persentase lebih besar dari perusahaan yang melakukan praktik perataan laba baik itu kepemilikan keluarga dibawah 50% ataupun diatas 50%.

Berdasarkan tabel 4 pada lampiran menunjukkan distribusi perusahaan sampel berdasarkan kepemilikan modal asing. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan modal asing <50% dan melakukan praktik perataan laba memiliki proporsi lebih besar dari perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan modal asing >50%, melakukan praktik perataan laba memiliki proporsi lebih kecil dari perusahaan tidak melakukan praktik perataan laba.

Tabel 5 pada lampiran menunjukkan bahwa perusahaan dengan jasa KAP *big4* dan melakukan praktik perataan laba memiliki persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan KAP *big4* tapi tidak melakukan praktik perataan laba. Akan tetapi perusahaan dengan KAP non *big4* dan melakukan praktik perataan laba memiliki persentasi yang lebih besar dari perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba.

4.3 Analisis Uji Beda Skor Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite audit

Tabel 6 pada lampiran bertujuan untuk mengetahui sebaran data normal atau tidak normal, dilakukan melalui uji *One Sample Kolmogorov Smirnov test*. Berdasarkan tabel 6 yang merupakan uji normalitas data untuk dewan komisaris. Untuk kategori independensi, *size* dan kompetensi merupakan data tidak normal (*p value* lebih kecil dari 0,05), sedangkan kategori aktivitas merupakan data normal.

Berdasarkan tabel 7 pada lampiran, menunjukkan bahwa kategori independensi, *size* dan kompetensi memiliki *P value* lebih besar dari 0.05, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang melakukan perataan laba dengan perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba. Tabel 8 pada lampiran yang merupakan uji normalitas

untuk komite audit. Untuk kategori aktivitas, *size* dan kompetensi, merupakan data tidak normal ($P\text{ value} < \alpha 0.05$). Berdasarkan tabel 9 pada lampiran yang merupakan uji beda untuk komite audit. Untuk kategori aktivitas, *size* dan kompetensi memiliki $p\text{ value}$ lebih besar 0.05, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dengan perusahaan yang tidak praktik melakukan perataan laba.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan *Hosmer Lemeshow* (tabel 10 pada lampiran) dan 2 Log likelihood model (tabel 11 dan tabel 12 pada lampiran) menunjukkan sudah layak dan cukup baik, namun menurut *Omnibus Test* (tabel 13 pada lampiran) model ini memiliki variabel independen yang tidak dapat menjelaskan variabel dependennya. Menurut Gujarati (2009) menyatakan bahwa di dalam persamaan regresi logistik biner, yang lebih diperhatikan dan diutamakan adalah tanda koefisien yang diharapkan dan signifikansi dari koefisien tersebut, *Goodness of fit* berada pada urutan kedua setelah signifikansi dan tanda koefisien yang diharapkan. Dengan adanya pernyataan tersebut maka nilai *Omnibus Test* yang tidak signifikan dapat diabaikan. Tabel 14 pada lampiran bahwa nilai *Nagelkerke's R square* adalah sebesar 0,079 yang berarti variabilitas perataan laba yang dijelaskan oleh variabel independen (efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, KAP, leverage dan profitabilitas) adalah sebesar 7,9%, sedangkan sisanya sebesar 92,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Pengujian statistik dengan analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik (*logistic regression*). Berdasarkan tabel 15 pada lampiran maka model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$\ln \left(\frac{p}{1-p} \right) = IS_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{SCOREBD}_{i,t} + \beta_2 \text{SCOREAC}_{i,t} + \beta_3 \text{FAMOWN}_{i,t} \\ + \beta_4 \text{FOREIGN}_{i,t} + \beta_5 \text{KAP}_{i,t} + \beta_6 \text{SIZE}_{i,t} + \beta_7 \text{LVRG}_{i,t} + \beta_8 \text{PROFIT}_{i,t} + e_{i,t}$$

$$\begin{aligned} \ln(p/1-p) = IS_{i,t} = & -1,766 + 1.569 \text{ SCOREBD}_{i,t} + 0,186 \text{ SCOREAC}_{i,t} + 0.668 \text{ FAMOWN}_{i,t} - \\ & 0.587 \text{ FOREIGN}_{i,t} + 0.257 \text{ KAP}_{i,t} + 0.011 \text{ SIZE}_{i,t} - 0.199 \text{ LVRG}_{i,t} - 0.792 \text{ PROFIT}_{i,t} + e \\ & i,t \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 15 pada lampiran menunjukkan bahwa variabel SCOREBD memiliki koefisien positif dan tidak berpengaruh terhadap probabilita terjadinya praktik perataan laba. Hal ini berarti dewan komisaris yang efektif tidak mengurangi kemungkinan adanya praktik perataan laba atas laporan keuangan. Menurut Siregar dan Utama (2005) karena pengangkatan komisaris independen mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* dan ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30% mungkin belum cukup tinggi untuk menyebabkan para komisaris independen tersebut mendominasi kebijakan perusahaan. Hasil ini tidak mendukung hipotesis 1a. Penelitian ini konsisten dengan Gusnadi dan Budiharta (2008).

Namun penelitian ini tidak konsisten dengan Marra *et al.* (2011), Xie *et al.* (2003), Jaggi *et al.* (2009). Tabel 15 pada lampiran menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap probabilita terjadinya praktik perataan laba, terbukti pada nilai *p-value* dari SCOREAC yang lebih besar dari alpha 10%. Hal ini berarti adanya komite audit yang efektif di perusahaan tidak mengurangi kemungkinan terjadinya praktik perataan laba atas laporan keuangan. Dan ini tidak mendukung hipotesis penelitian 2a. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Gusnadi dan Budiharta (2008), dan Mehrazeen *et al.* (2012). Berbeda dengan hasil penelitian Marra *et al.* (2011) dan Xie *et al.* (2003). Variabel SCOREAC tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hal ini kemungkinan disebabkan pembentukan komite audit hanya sebagai pemenuhan regulasi saja bukan berdasarkan kebutuhan. Ini terbukti dari hasil observasi dengan daftar *checklist* yang dilakukan penulis berdasarkan karakteristik aktivitas, *size* dan kompetensi.

Variabel FAMOWN pada tabel 15 pada lampiran memiliki koefisien positif dan berpengaruh signifikan, dengan *p-value* lebih kecil dari (α) $\alpha = 10\%$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan saham oleh keluarga berpengaruh terhadap probabilita terjadinya praktik perataan laba. Berarti semakin besar proporsi kepemilikan keluarga dapat meningkatkan probabilita kemungkinan terjadinya praktik perataan laba atas laporan keuangan, karena disebabkan banyaknya campur tangan. Ini mendukung hipotesis penelitian 3a. Hasil penelitian ini mendukung Setia *et al.* (2008), dan Hermawan (2009).

Untuk variabel FOREIGN memiliki koefisien negatif dan berpengaruh signifikan, dengan *p-value* 0,069 lebih kecil dari alpha 10%. Hal ini berarti perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan oleh asing dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik perataan laba. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian 4a. Pengaruh pengendalian oleh modal asing disebabkan oleh pemodal asing cenderung memiliki teknologi yang cukup, sehingga mendukung terciptanya sistem informasi manajemen yang lebih efisien. Hasil penelitian ini mendukung penelitiannya Yusuf dan Soraya (2004), Berbeda dengan Torres *et al.* (2010).

Kualitas audit menggunakan *proxy* KAP *big 4* tidak berpengaruh terhadap probabilita adanya praktik perataan laba. Hal ini terlihat pada nilai *p-valuenya* lebih besar dari alphanya 10%, ini berarti perusahaan publik di Indonesia yang menggunakan jasa KAP *big4* dan KAP *non big4* tidak ada kaitannya dengan terjadinya praktik perataan laba. Hasil penelitian tidak mendukung hipotesis penelitian 5a. Penelitian ini konsisten Gusnadi dan Budiharta (2008) dan tidak konsisten dengan penelitiannya Ahmad dan Mansur (2009).

Variabel SIZE tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba, konsisten dengan Gusnadi dan Budiharta (2008). SIZE tidak berpengaruh, karena untuk negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah akan mendorong perkembangan perusahaan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Variabel LVRG (*leverage*) tidak berpengaruh, terhadap praktik perataan laba, karena *p-value* dari LVRG lebih besar dari alphanya 10%. Hal ini dikarenakan kebijakan utang yang ketat sehingga perusahaan sulit untuk memperoleh kredit sehingga manajer cenderung untuk tidak melakukan praktik perataan laba. Hasil penelitian tidak konsisten dengan Gusnadi dan Budiharta (2008). Variabel PROFIT menunjukkan koefisien negatif dan tidak berpengaruh. Terbukti dengan *p-valuenya* lebih besar dari alphanya (10%). Artinya semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan cenderung untuk tidak melakukan praktik perataan laba karena perusahaan tersebut akan semakin menjadi sorotan publik, sehingga kemungkinan berusaha untuk tidak melakukan tindakan yang membahayakan kredibilitas perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Juniarti dan Corolina (2005).

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian empiris variabel efektivitas dewan komisaris dan komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik perataan laba. Sedangkan perusahaan yang dikendalikan dan dimiliki oleh keluarga keluarga dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap adanya praktik perataan laba. Untuk variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, *leverage* dan *profitabilitas*, tidak berpengaruh terhadap probabilita adanya praktik perataan laba.

Keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini antara lain: (1) rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini relatif singkat, (2) sampel digunakan dalam penelitian ini relatif sedikit, (3) kemungkinan adanya *overlap* data antara variabel kepemilikan keluarga dengan kepemilikan asing, (4) kualitas audit diproxy dengan ukuran KAP (*big4* atau *non*

big4), mungkin bukan merupakan proxy yang baik untuk kualitas audit di Indonesia. Hasil penelitian ini berimplikasi untuk mendorong arah riset akuntansi keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai variabel lain yang berpengaruh terhadap perataan laba, sehingga akan dapat mengatasi masalah *agency* dan terwujudnya *good corporate governance*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa dewan komisaris dan komite audit yang ada di perusahaan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya lebih baik lagi dan meningkatkan pengawasannya terhadap praktik perataan laba, perusahaan dapat melakukan seleksi ketat dalam pengangkatan anggota dewan komisaris dan komite audit, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan perusahaan.

Beberapa saran untuk pengembangan penelitian ini adalah: (1) penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah periode penelitian, (2) mampu menambah sampel agar efek dari mekanisme *corporate governance* dapat lebih dirasakan dalam mengurangi adanya praktik perataan laba di perusahaan, (3) lebih memperjelas definisi dari kepemilikan keluarga dan asing, agar tidak terjadi *overlap* data, dan (4) diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan pengukuran yang lain untuk mengukur kualitas auditor seperti spesialisasi industri auditor.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A.C., & Mansor, N, (2009). Board Independenece, Ownership Structure, Audit Quality and Income Smoothing Activities: A Study on Malaysian Market *Journal of Modern Accounting and Auditing*.
- Ahmed, A.S., Duellman, S., (2007). Accounting conservatism and board of director characteristics: An empirical analysis, *Journal of Accounting and Economics*
- Ali, A., T. Chen, & S. Radhakrisnan. (2007). Corporate Disclosure by Family Firms. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 44: 238-286.
- Anderson, Ronald C., Sattar A. Mansi, & David M. Reeb. (2003). Founding Family Ownership and The Agency Cost of Debt. *Journal of Financial Economics*, Vol. 68, pp. 263-285.
- Beasley, M. (1996). An Empirical Analysis of Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, Vol 71, No. 4, pp.443-465.



- Budiasih, Igan. (2009). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol 4.No.1.
- Cahan, Steven F, Guoping Liu, & Jerry Sun. (2008). Investor Protection, Income Smoothing, and Earnings Informativeness. *Journal of International Accounting Research*, 7 (1).
- Cornett, Marcia M., McNutt, Jamie & Tehranian, Hassan. (2009). Corporate Governance and Earning Management at Large U.S. Bank Holding Companies. *Journal of Corporate Finance*, 412-430.
- Dahlan (2009). Analisis Hubungan Antara Kualitas Audit Dengan Diskresionary AkruaL Dan Kebebasan Auditor. *Work Paper Accounting and Finance*.
- Debosky. David Gregory & Jiang, Wei. (2012). Earning Management and Auditor Specialization in The Post Sox Era: An Examination of The Banking Industry. *Journal of Banking and Finance*, 36, 613-623.
- Dhaliwal, Dan., Vic Naiker., Farshid Navissi., (2007). Audit Committee Financial Expertise, Corporate Governance and Accruals Quality: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting Research*.
- Dimitropoulos, P.A., & Asteriou, D. (2010). The Effect of Board Composition on The Informativeness and Quality of Annual Earning: Empirical Evidence from Greece. *Research in International Business and Finance*. Vol 24, 110-205
- Eckel, N. (1981). The income smoothing hypothesis revisited. *Abacus*, 17(1), 28-40. Francis, J., Wang D. (2008). The Joint Effect of Investor Protection and Big 4 Audit on Earning Quality Around The World. *Contemporary Accounting Research* (Spring), 157-191.
- Francis, J., Wang D. (2008). The Joint Effect of Investor Protection and Big 4 Audit on Earning Quality Around The World. *Contemporary Accounting Research* (Spring), 157-191.
- Gusnadi dan Budiharta, Pratiwi (2008). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Modus* Vol. 20(2):126-138.
- Gujarati, D. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill Higher Education.
- Hermawan, Ancella A. (2009). Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan Oleh Keluarga dan Peran Monitoring Bank Terhadap Kandungan Informasi Laba. *Disertasi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*,
- Jaggi, B., Leung, S & Gul, F. (2009). Family Control, Board Independence and Earnings Management: Evidence Based on Hongkong Firms. *Journal of International Accounting Public Policy*, 28, 281-300.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.
- Juniarti, & Carolina (2005). Analisa Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Perataan Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*,7(2), 148-162.
- Kirschenheither, M. & N. Melumad. (2002). "Can Big Bath" and Earnings smoothing Co Exist ad Equilibrium Financial Reporting Strategies'. *Journal of Accounting Research*. 40(3). June.
- Leuz, Christian., Nanda, Dhananjay & P.D. Wysocki (2010). Investor Protection and Earnings Management: An International Comparison. *Journal of Financial Economic* 69;505-527.
- Marra, A. Mazolla, P & Prencipe, A. (2011). Board Monitoring and Earnings Management Pre and Post IFRS. *The International Journal Accounting*, 46; 205-230.
- Mehrazeen, Aki Reza & Mehrtash, Mazuyeh. (2012). Corporate Governance and Income Smoothing in Iran. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*. 2(4).3188-3194.



- Moses, O.D. (1987). "Income Smoothing and Incentive: Empirical Test Using Accounting Changes". *The Accounting Review*. Vol 62(2), 358-377.
- Setia Atmaja, L., J. Haman, & G. Tanewski. (2008). Earnings Management, Board Independence and Family Ownership. *Working Papers: Social Science Research Network*.
- Schroeder, Richard G., Myrtle W. Clarck, dan Jack M. Cathey. (2009). *Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases*. John Wiley and Sons, NJ.
- Siregar, S.V & S. Utama. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktik Corporate Governance Terhadap Pengelolaan laba (Earnings management). *Simposium Nasional akuntansi VIII*. Solo. September. Hal 475-490.
- Torres, damiana., Bruni, L. Adriano., Martinez, Antonio Lopo., Rivera-Castro, Anguel Miguel. (2010). Ownership and Control Structure, Corporate Governance and Income Smoothing in Brazil. Working Paper.<http://www.ssrn.com>.
- Uadiale, O.M.(2010). The Impact of Board Structure on Corporate Financial Performance in Nigeria. *International Journal of Business and Management*. Vol 5, No.10.
- Xie, B., W. N. Davidson II & P. J. Dadalt. (2003). "Earnings Management and Corporate Governance: The Role of The Board and The Audit Committee", *Journal of Corporate Finance*, 9; 295-316
- Yusuf, M dan Soraya. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Asing dan Non asing di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Volume 8. No.1.
- Zhou, Jian & Ken Y. Chen.(2004). Audit Committee, Board Characteristics and Earning Management by Commercial Banks. Working Paper.

Lampiran

Tabel 1 Statistik Deskriptif Skor Efektivitas Dewan Komisaris

Kategori	Jumlah Pertanyaan *	Keterangan	Min	Max	Mean	Median	Standar Deviasi
Independensi	6	<i>Income smoothing</i>	6	16	10.67	10.6	2.32
		<i>No income smoothing</i>	7	15	10.67	10.5	2.33
		Total	7	15.5	10.67	10.5	2.33
Aktivitas	6	<i>Income smoothing</i>	6	18	13.9	14	2.86
		<i>No income smoothing</i>	8	18	13.8	14	2.77
		Total	7	18	13.9	14	2.82
Jumlah Anggota	1	<i>Income smoothing</i>	1	3	1.92	2	0.87
		<i>No income smoothing</i>	1	3	2,09	2.5	0.95
		Total	1	3	2.00	2.25	0.91
Kompetensi	4	<i>Income smoothing</i>	6	12	10.34	10	1.56
		<i>No income smoothing</i>	6	12	10.34	10	1.57
		Total	6	12	10.34	10	1.57
Skor Total	17	<i>Income smoothing</i>	27	48	36.87	36	4.60
		<i>No income smoothing</i>	28	50	36.87	36	4.96
		Total	28	49	36.87	36	46.43

* Setiap pertanyaan dapat memperoleh nilai 1 untuk nilai yang terendah dan 3 untuk nilai yang tertinggi

Tabel 2 Statistik Deskriptif Skor Efektivitas Komite Audit

Kategori	*Jumlah Pertanyaan	Keterangan	Min	Max	Mean	Median	Standar Deviasi
Aktivitas	8	<i>Income smoothing</i>	8	24	18.84	20	3.6
		<i>No income smoothing</i>	9	24	18.94	20	2.40
		total	8.5	24	18.89	20	3
Jumlah Anggota	1	<i>Income smoothing</i>	1	3	2.11	2	0.41
		<i>Income smoothing</i>	1	3	2.17	2	0.42
		total	1	3	2.14	2	0.42
Kompetensi	2	<i>Income smoothing</i>	2	6	4.75	5	1.26
		<i>No Income smoothing</i>	2	6	4.84	5	2.37
		total	2	6	4.79	5	1.82
Skor Total	11	<i>Income smoothing</i>	16	32	26	26	3.73
		<i>No Income smoothing</i>	14	33	26	27	3,97
		total	15	33	26	27	3.85

* Setiap pertanyaan dapat memperoleh nilai 1 untuk nilai yang terendah dan 3 untuk nilai yang tertinggi

Tabel 3 Distribusi Perusahaan Sampel Berdasarkan Perusahaan Yang Dikendalikan Dan Dimiliki Oleh Keluarga

Deskripsi	Jumlah Observasi					
	IS	% IS	No-IS	% No IS	Total	% Total
Observasi perusahaan dengan kepemilikan keluarga dibawah 50%	17	27.9 %	23	35.9%	40	32%
Observasi perusahaan dengan kepemilikan keluarga diatas 50% dan keluarga merupakan pengendali	44	72.1 %	41	64.1%	85	68%
Jumlah total observasi	61	100%	64	100%	125	100%

Tabel 4 Distribusi Perusahaan Sampel Berdasarkan Perusahaan Dengan Kepemilikan Modal Asing

Deskripsi	Jumlah Observasi					
	IS	% IS	No-IS	% No-IS	Total	% Total
Kepemilikan modal asing < 50%	38	62.3%	32	50%	70	56%
Kepemilikan modal asing >50%	23	37.7%	32	50%	55	44%
Jumlah total observasi	61	100%	64	100%	125	100%

Tabel 5 Distribusi Perusahaan Sampel Berdasarkan Kualitas Audit

Deskripsi	Jumlah Observasi					
	IS	% IS	No-IS	% No-IS	Total	% Total
KAP <i>Big4</i>	28	45.9%	30	46.9%	58	46.4%
KAP <i>non Big4</i>	33	54.1%	34	53.1%	67	53.6%
Jumlah total observasi	61	100%	64	100%	125	100%

Tabel 6 Uji Normalitas Data (*One Sample Kolmogorov Smirnov Test*) Dewan Komisaris

Kategori Pertanyaan	Signifikansi	Keterangan
Independensi	0.017	Tidak Normal
Aktivitas	0.065	Normal
<i>Size</i>	0.000	Tidak Normal
Kompetensi	0.000	Tidak Normal

Tabel 7 Uji Beda Dewan Komisaris

Kategori	Signifikansi
Independensi	0.861
Aktivitas	0.327
<i>Size</i>	0.836
Kompetensi	0.765

Tabel 8 Uji Normalitas Data (*One Sample Kolmogorov Smirnov Test*) Komite Audit

Kategori Pertanyaan	Signifikansi	Keterangan
Aktivitas	0.005	Tidak Normal
<i>Size</i>	0.000	Tidak Normal
Kompetensi	0.000	Tidak Normal

Tabel 9 Uji Beda Komite Audit

Kategori Pertanyaan	Signifikansi
Aktivitas	0.530
<i>Size</i>	0.394
Kompetensi	0.885

Tabel 10 Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Chi-square	df	Sig.
4.253	8	.834

Tabel 11 Likelihood Overall Fit Block Number 0

Iteration	-2 Log likelihood
Step 0 1	173.215

Tabel 12 Likelihood Overall Fit Block Number 1

Iteration	-2 Log likelihood
Step 1 1	168.205
2	168.198
3	168.198

Tabel 13 Omnibus Test of Model Coefficient

	Chi-square	df	Sig.
Step	5.017	8	0.756
Block	5.017	8	0.756
Model	5.017	8	0.756

Tabel 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square	McFadden R-squared
0.039	0.079	0.052

Tabel 15 Hasil Uji Model Regresi

$$\ln(p/1-p) = IS_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{SCOREBD}_{i,t} + \beta_2 \text{SCOREAC}_{i,t} + \beta_3 \text{FAMOWN}_{i,t} + \beta_4 \text{FOREIGN}_{i,t} + \beta_5 \text{KAP}_{i,t} + \beta_6 \text{SIZE}_{i,t} + \beta_7 \text{LVRG}_{i,t} + \beta_8 \text{PROFIT}_{i,t} + e_{i,t}$$

Variable	exp.sign	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob
C		-1.765761	3.962651	-0.445601	0.32795
SCOREBD	-	1.56983	2.188823	0.717203	0.2366
SCOREAC	-	0.185737	1.708272	0.108728	0.4567
FAMOWN	+	0.667736	0.430267	1.55191	0.06035*
FOREIGN	-	-0.587302	0.397781	-1.476448	0.0699*
KAP	-	0.257453	0.425173	0.605525	0.2724
LOG(SIZE)	+	0.010692	0.139483	0.076654	0.46945
LVRG	-	-0.199453	1.105708	-0.180384	0.42845
PROFIT	-	-0.792968	2.383564	-0.332682	0.3697
McFadden R-squared	0.028997		Mean dependent var		0.488
S.D. dependent var	0.501867		S.E. of regression		0.508735
Akaike info criterion	1.489537		Sum squared resid		30.02208
Schwarz criterion	1.693175		Log likelihood		-84.09606
Hannan-Quinn criter.	1.572265		Restr. log likelihood		-86.60739
LR statistic	5.022676		Avg. log likelihood		-0.672768
Prob(LR statistic)	0.75515		Count R ²		0.4416

Jumlah observasi penelitian 125, IS = perataan laba, menggunakan variabel *dummy* (1,0), 1 adalah perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dan 0 adalah perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba. SCOREBD = skor efektivitas dewan komisaris, SCOREAC = skor efektivitas komite audit, FAMOWN = kepemilikan keluarga, variabel *dummy* (1,0) dengan nilai 1 apabila proporsi kepemilikan keluarga > 50% dan 0 apabila proporsi kepemilikan keluarga ≤ 50. FOREIGN = proporsi saham yang dimiliki oleh pihak asing dari seluruh modal saham yang beredar. KAP = kualitas audit, menggunakan variabel *dummy* (1,0), 1 apabila perusahaan menggunakan jasa KAP *big4* dan nilai 0 apabila tidak menggunakan jasa KAP *big4*, SIZE = logaritma natural total aset perusahaan. LVRG = diukur dengan total utang dibagi dengan total aset. PROFIT diukur dengan rasio laba bersih setelah pajak dengan total aset

* Signifikan pada level $\alpha = 10\%$ (*one-tailed*)

Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Keluarga

KARINA UTARI ARDHANTY
ANCELLA ANITAWATI HERMAWAN*
Universitas Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana kepemilikan keluarga yang berbeda dalam tingkat pengendalian berpengaruh pada kebijakan dividen perusahaan. Kepemilikan keluarga dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan pasif (di bawah 20%), kepemilikan significant influence (antara 20%-50%), dan kepemilikan pengendali (di atas 50%). Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah pengaruh tersebut akan berkurang apabila perusahaan memiliki dewan komisaris yang efektif. Efektivitas dewan komisaris diukur dengan menggunakan skor yang dikembangkan Hermawan (2009) berdasarkan empat karakteristik, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda dengan observasi sebanyak 291 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dan tahun 2011. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan keluarga (dengan kepemilikan di atas 50%) memberikan dividen yang lebih kecil daripada perusahaan lainnya. Namun, untuk kepemilikan significant influence ternyata tidak berpengaruh pada besarnya dividen, begitu pula pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga pasif. Efektivitas dewan komisaris terbukti tidak berpengaruh pada kebijakan dividen pada perusahaan keluarga, baik pada tingkat kepemilikan pasif, significant influence, maupun pengendali.

Kata kunci: Efektivitas Dewan Komisaris, Kebijakan Dividen, Kepemilikan Keluarga.

The Influence of Board of Commissioners' Effectiveness on Dividend Policy in Family Firms

Abstract: This research aims to analyze how family-ownership affects dividend policy. Family ownership is divided into three categories, passive (below 20%), significant influence (between 20% - 50%), and controlling (over 50%). This research also examines whether the family-ownership impact will be diminished if the entity owns an effective board of commissioner. Board of commissioner's effectiveness is assessed by a scoring method developed by Hermawan (2009), according to its independency, activity, size, and competence, while dividend policy is measured by dividend payout ratio. Multiple regression method is being used to test this research's hypothesis with 291 non-financial entities listed in Indonesia Stock Exchange for the period of 2010-2011 as observations. Empirical test demonstrates that firms with family ownership greater more than 50% appear to have lower level of dividend payout ratio whilst significant influence and passive family ownership do not affect dividend policy. Furthermore, board of commissioners' effectiveness does not seem to have impact over dividend policy in family-owned entities.

Keywords: Board of Commissioners' Effectiveness, Dividend Policy, Family Ownership.

* Corresponding author: ancella.hermawan@hotmail.com

1. Pendahuluan

Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga merupakan salah satu bentuk perusahaan yang banyak ditemukan di hampir semua negara di dunia. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan fakta bahwa perusahaan keluarga mendominasi perekonomian di dunia (La Porta *et al.*, 1999; Claessens *et al.*, 2000; Faccio dan Lang, 2002;). Perusahaan yang dikontrol keluarga memiliki pengaruh terhadap beberapa hal terkait dengan performa perusahaan (Villalonga dan Amit, 2006; Martin-Reyna dan Duran Encalada, 2012; Andres, 2008), diversifikasi (Anderson dan Reeb, 2003a), *cost of debt* (Anderson *et al.*, 2003), efektivitas *board of director* (Anderson dan Reeb, 2004) dan pengungkapan informasi perusahaan (Ali *et al.*, 2007; Anderson *et al.*, 2009).

Secara kepemilikan, pemilik perusahaan keluarga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu pemegang saham mayoritas atau keluarga tersebut dan pemegang saham minoritas. Faccio *et al.* (2001) menjelaskan bahwa dalam perusahaan keluarga, pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah melakukan ekspropriasi atas pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, perusahaan keluarga sering dikaitkan dengan *agency problem*. Pada dasarnya, *agency problem* adalah permasalahan yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Manajer perusahaan selaku *agent* terkadang bertindak tidak sejalan dengan tujuan para pemegang saham atau *principal*. Menurut Agrawal dan Knoeber (1996), *agency problem* muncul ketika para manajer memiliki insentif untuk mengejar kepentingan mereka dengan mengatasnamakan kepentingan para pemegang saham. Namun, *agency problem* tidak hanya sebatas permasalahan antara manajer dan pemegang saham. *Agency problem* juga mencakup perlakuan yang tidak adil antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, yang biasanya muncul pada perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi, dimana

terdapat satu kelompok besar pemegang saham atau beberapa kelompok besar pemegang saham (Lim dan Yen, 2011).

Pemegang saham mayoritas mungkin saja mempengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan salah satunya kebijakan dividen untuk melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Penelitian yang dilakukan Mary & Pajuste (2002) mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga cenderung menghindari pembagian dividen karena mereka lebih memilih untuk menginvestasikan laba tersebut ke proyek-proyek yang masih berafiliasi dengan mereka. Dengan kata lain, pemegang saham mayoritas pada perusahaan keluarga tidak ingin berbagi laba dengan pemegang saham minoritas. Namun, Faccio *et al.* (2001) membuktikan bahwa pemegang saham mayoritas pada perusahaan keluarga justru memilih untuk membagikan dividen untuk menutupi ekspropriasi yang sebenarnya mereka lakukan terhadap pemegang saham minoritas. Dan mekanisme pembagian dividen dalam jumlah besar tersebut bertujuan untuk menjaga reputasi mereka di hadapan para pemegang saham minoritas.

Utama (2012) mengutip Morck *et al.* (1988) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada perusahaan yang dimiliki keluarga pada persentase di bawah 25%, terjadi konvergensi kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas enggan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak meningkatkan nilai perusahaan karena dapat berdampak pada kekayaan pribadi mereka. Dan pemegang saham mayoritas pada tingkat kepemilikan di atas 25% cenderung mengutamakan keuntungan pribadi mereka sehingga dapat membahayakan pemegang saham minoritas. Lebih lanjut lagi, Utama (2012) juga membuktikan bahwa terdapat hubungan non-linear antara struktur kepemilikan dan tingkat pengungkapan perusahaan, dimana perusahaan dengan kepemilikan *significant influence* (diantara 20% hingga 50%) memiliki tingkat pengungkapan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan kepemilikan pasif (di bawah atau sama dengan 20%) dan

perusahaan dengan kepemilikan tinggi (di atas 50% atau tingkat pengendali) memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi.

Lalu sebenarnya apakah hanya pemegang saham mayoritas pada tingkat kepemilikan di atas 25% saja yang memiliki keinginan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas sehingga mempengaruhi jumlah dividen yang dibagikan? Dan bagaimanakah pada perusahaan yang dimiliki keluarga pada tingkat kepemilikan di bawah 25%? Apakah terdapat perbedaan pengaruh pada kebijakan dividen perusahaan apabila tingkat kepemilikan keluarga berada pada tingkat pengendali (di atas 50%), *significant influence* (diantara 20% hingga 50%)?

Penerapan *corporate governance* perusahaan yang baik merupakan salah satu cara untuk mengatasi *agency problem* tersebut. *OECD Principles of Corporate Governance* yang dicetuskan oleh *OECD Minister* pada tahun 1999 telah menjadi patokan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan di banyak negara di dunia. Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang bertujuan mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan, telah didirikan berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/11/TAHUN 2004.

Peraturan tersebut tentunya tidaklah cukup untuk menerapkan *corporate governance* perusahaan yang baik, diperlukan mekanisme lain seperti yang diungkapkan Setia-Atmaja (2010) bahwa mekanisme *corporate governance* internal perusahaan memainkan peran yang signifikan dalam mengendalikan permasalahan keagenan pada perusahaan keluarga. *Corporate governance* perusahaan internal tersebut mencakup kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan *board of director*. *Board of director* independen dapat mencegah perilaku oportunistik para pemegang saham mayoritas dan melindungi hak-hak seluruh pemegang saham sehingga konflik antar pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas seharusnya

menurun seiring dengan meningkatnya proporsi *board of director* independen (Anderson dan Reeb, 2004).

Dewan komisaris[†] sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* juga memiliki pengaruh dalam meminimalisir permasalahan keagenan dengan memonitor kinerja manajemen agar sejalan dengan kepentingan para *stakeholder*. Dalam penelitian Anderson dan Reeb (2004) menerangkan bahwa *board of director* independen meminimalisir konflik antara pemegang saham keluarga dan non keluarga. Setia-Atmaja (2010) telah meneliti pengaruh independensi *board of director* terhadap kebijakan dividen dan tingkat hutang pada perusahaan keluarga di Australia. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari independensi *board of director* terhadap kebijakan dividen pada perusahaan keluarga dan non keluarga.

Di Indonesia, sebanyak dua pertiga (68,6%) dari jumlah total perusahaan yang terdaftar dalam BEI merupakan perusahaan keluarga (Claessens *et al.*, 1999). Sejauh ini, penelitian terkait kepemilikan keluarga di Indonesia hanya membagi tingkat kepemilikan tersebut menjadi dua kelompok utama, yaitu tingkat pengendali (di atas 50%) dan tingkat non-pengendali (di bawah 50%). Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimanakah kebijakan dividen perusahaan apabila kepemilikan keluarga pada perusahaan tersebut berada pada tingkat pengendali (di atas 50%) dan *significant influence* (diantara 20% hingga 50%) Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah dewan komisaris dapat meminimalisir pengaruh kepemilikan keluarga tersebut pada kebijakan dividen. Penilaian terhadap dewan komisaris tidak hanya dilihat dari independensi dewan komisaris, tetapi juga

[†] Indonesia menganut *two-tier system* dalam struktur dewan dalam perusahaan, yaitu dewan komisaris dan dewan direksi, dimana dewan komisaris merupakan organ terpisah dari dewan direksi. Dewan komisaris berperan dalam menjalankan supervise dan mengawasi dewan direksi dalam mengelola perusahaan. Pada penelitian-penelitian yang dilakukan di negara lain yang kebanyakan menganut *one-tier system*, istilah *board of directors* tidak memiliki arti yang sama dengan yang ada di Indonesia, namun, perannya dapat dikatakan sama dengan peran dewan komisaris pada perusahaan di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini, istilah *board* akan digunakan untuk *board of directors* pada *one-tier system*, sedangkan istilah dewan komisaris untuk perusahaan yang menganut *two-tier system*

dari efektivitas dewan komisaris. Dengan menggunakan metode *scoring* yang dikembangkan Hermawan (2009), pengukuran efektivitas dewan komisaris didasarkan pada independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi dewan komisaris.

2. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Rozeff (1982), Gugler & Yurtoglu (2003), Maury & Pajuste (2002), Wei *et al.* (2011), Michaely & Roberts (2006), dan Faccio *et al.* (2001), perusahaan keluarga ternyata mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, baik secara positif maupun secara negatif. Perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan keluarga tidak memiliki *agency problem* antara manajer dan pemegang saham, namun, masalah yang mungkin mengancam perusahaan yang dimiliki keluarga adalah ekspropriasi yang dilakukan pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas. Utama (2012) mengutip Morck *et al.* (1988) menyebutkan bahwa pemegang saham mayoritas pada perusahaan yang dimiliki grup tertentu pada persentase di atas 25% cenderung melakukan tindakan yang dapat membahayakan pemegang saham minoritas. Salah satu bentuk ekspropriasi yang dapat dilakukan terhadap pemegang saham minoritas adalah *tunneling* laba. Mereka menginvestasikan laba perusahaan ke dalam proyek-proyek yang masih berafiliasi dengan keluarga mereka sehingga pemegang saham mayoritas mendapatkan laba yang tidak didapatkan pemegang saham lain. Oleh karena itu, pemegang saham mayoritas pada perusahaan tersebut lebih memilih untuk tidak membagikan dividen (Maury & Pajuste, 2002). Ekspropriasi seperti itu mungkin saja dilakukan oleh pemegang saham dengan tingkat kepemilikan sedang dan pengendali, dan mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Terlebih lagi apabila posisi pemegang saham berada pada posisi pengendali. Dengan persentase kepemilikan yang lebih tinggi, *power* mereka untuk melakukan ekspropriasi juga akan lebih tinggi.

Di Indonesia berdasarkan PSAK 15 (2009) mengenai Investasi Pada Entitas Asosiasi, tingkat kepemilikan pada suatu entitas dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat kepemilikan pasif (dibawah 20%), tingkat kepemilikan *significant influence* (antara 20%-50%), dan tingkat kepemilikan pengendali (diatas 50%).

Berawal dari pemikiran tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1a.1 : *Perusahaan yang dimiliki keluarga dengan proporsi di atas 50% akan memiliki dividend payout ratio yang lebih rendah dibandingkan perusahaan lain.*

H1a.2 : *Perusahaan yang dimiliki keluarga dengan proporsi 20% sampai 50% akan memiliki dividend payout ratio yang lebih rendah dibandingkan perusahaan lain.*

Keberadaan dewan komisaris dianggap sebagai pemicu pelaksanaan *good corporate governance* di suatu perusahaan. Sharma (2011) menyebutkan bahwa independensi dan *tenure* dari *board of director* meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam membagikan dividen. *Independent board* dapat membatasi perilaku oportunistis manajemen yang menggunakan kebijakan dividen sebagai alat untuk memenuhi kepentingan mereka (Anderson & Reeb, 2004). Semakin banyak jumlah *independent director* dan semakin lama masa jabatan *board of director* maka pengawasan internal akan semakin baik dalam mendisiplinkan manajemen, sehingga *propensity* perusahaan dalam membagikan dividen akan semakin besar. Lalu, Setia-Atmaja (2010) dalam penelitiannya yang menggunakan sampel perusahaan di Australia menjelaskan bahwa perusahaan keluarga yang memiliki *independent directors* dalam susunan *board of directors* memiliki *payout ratio* yang lebih tinggi dari perusahaan non-keluarga karena *independent director* tersebut menggunakan kebijakan dividen sebagai mekanisme mengurangi *agency problem*.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2a.1 : *Skor efektivitas dewan komisaris yang tinggi akan memperlemah pengaruh kepemilikan keluarga dengan proporsi di atas 50% terhadap kebijakan dividen.*

H2a.2 : *Skor efektivitas dewan komisaris yang tinggi akan memperlemah pengaruh kepemilikan keluarga dengan proporsi antara 20% sampai 50% terhadap kebijakan dividen.*

3. Metode Penelitian

Pemilihan model penelitian didasarkan pada penelitian Setia-Atmaja (2010) dengan beberapa modifikasi. Model penelitian yang akan digunakan untuk menguji hipotesis pertama adalah:

$$\text{DIV}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{SIGINFL}_{it} + \beta_2 \text{MAJOR}_{it} + \beta_3 \text{LEV}_{it} + \beta_4 \text{SIZE}_{it} + \beta_5 \text{ROA}_{it} \\ + \beta_6 \text{CAPEX}_{it} + \beta_7 \text{GROWTHOPP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis kedua:

$$\text{DIV}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{SIGINFL}_{it} + \beta_2 \text{MAJOR}_{it} + \beta_3 \text{BOCSCORE}_{it} \\ + \beta_4 \text{SIGINFL} * \text{BOCSCORE}_{it} + \beta_5 \text{MAJOR} * \text{BOCSCORE}_{it} + \beta_6 \text{LEV}_{it} \\ + \beta_7 \text{SIZE}_{it} + \beta_8 \text{ROA}_{it} + \beta_9 \text{CAPEX}_{it} + \beta_{10} \text{GROWTHOPP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

DIV_{it} : *Dividend payout ratio* perusahaan i pada tahun t

- $SIGINFL_{it}$: Variabel *dummy* yang menunjukkan kepemilikan keluarga pada tingkat *significant influence*. Nilai 1 untuk kepemilikan di atas 20% hingga 50%, nilai 0 untuk persentase kepemilikan lainnya.
- $MAJOR_{it}$: Variabel *dummy* yang menunjukkan kepemilikan keluarga pada tingkat pengendali. Nilai 1 untuk kepemilikan di atas 50%, nilai 0 untuk persentase kepemilikan lainnya.
- $BOCSCORE_{it}$: Variabel *dummy* yang menunjukkan efektivitas dewan komisaris, nilai 1 apabila skor efektivitas dewan komisaris i pada akhir tahun t lebih besar atau sama dengan 0,667, dan nilai 0 apabila sebaliknya
- LEV_{it} : Nilai buku total *debt* dibandingkan dengan total aset perusahaan i pada akhir tahun t
- $SIZE_{it}$: Logaritma natural dari total aset perusahaan i pada akhir tahun t
- ROA_{it} : ROA perusahaan i pada akhir tahun t
- $CAPEX_{it}$: Total *capital expenditure* dibandingkan dengan total aset perusahaan i pada akhir tahun t
- $GROWTHOPP_{it}$: Nilai *price-to-book value* perusahaan i pada akhir tahun t

3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen perusahaan yang diukur dengan *dividend payout ratio (DPR)*.

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Variabel Utama

Variabel independen utama dalam penelitian ini adalah kepemilikan keluarga. Dalam mendefinisikan perusahaan keluarga, penelitian ini menggunakan definisi yang digunakan Arifin (2003) yakni sebagai keseluruhan individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas wajib dicatat), kecuali perusahaan publik, negara, institusi keuangan (seperti lembaga investasi, reksa dana, asuransi, dana pensiun, bank, dan koperasi) dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib tercatat). Kemudian, perusahaan keluarga dikelompokkan kedalam tiga kelompok berdasarkan PSAK 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi, yaitu kepemilikan rendah ($\leq 20\%$), kepemilikan berpengaruh signifikan ($20\% - 50\%$), dan kepemilikan pengendali ($> 50\%$).

3.1.2.2 Variabel Kontrol

1. *Leverage*

Sesuai dengan Wei *et al.* (2011), rasio *leverage* diukur dengan membagi total utang perusahaan dengan total aset perusahaan *i* pada akhir tahun *t*.

2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaan *i* pada akhir tahun *t*

3. Profitabilitas

Pada penelitian ini yang dijadikan proksi dalam pengukuran profitabilitas adalah ROA, mengacu pada Setia-Atmaja (2011) dan Wei *et al.* (2011).

4. Investasi

Investasi perusahaan dilihat dari total nilai yang dibelanjakan untuk pembelian *capital*. Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan jumlah aset yang perusahaan *i* pada akhir tahun *t*.

5. Kesempatan Pertumbuhan

Pengukuran yang digunakan untuk melihat peluang pertumbuhan perusahaan adalah berdasarkan nilai *price-to-book-value* perusahaan i pada akhir tahun t .

3.1.2.3 Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel moderasi adalah efektivitas dewan komisaris. Efektivitas dewan komisaris diukur dengan menggunakan metode *scoring* yang dikembangkan Hermawan (2009). Metode *scoring* tersebut mengacu pada karakteristik dewan komisaris yang didasarkan pada independensi, ukuran, kompetensi, dan aktivitas dewan komisaris.

3.2 Seleksi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012 dengan pengecualian pada perusahaan yang bergerak pada sektor industri perbankan dan jasa keuangan karena terdapat perbedaan regulasi antara sektor industri keuangan dan sektor industri non-keuangan. Tabel 3.1 menjelaskan proses pemilihan dan deskripsi observasi pada penelitian ini.

Tabel 3.1 Deskripsi Observasi Penelitian

Deskripsi Observasi Penelitian	2010*	2011*
Perusahaan yang tercatat pada BEI	420	442
Perusahaan yang bergerak di sektor keuangan	70	71
Jumlah perusahaan yang bergerak di sektor non-keuangan	350	371
Laporan tahunan dan laporan keuangan yang tidak berhasil diperoleh	104	221
Perusahaan dengan data tidak lengkap atau tidak memenuhi kriteria	80	25
Jumlah observasi dalam penelitian	166	125

*Data tahun 2010 dan 2011 diambil dari Pradikta (2012)

Kemudian, tabel 3.2 menyajikan deskripsi sampel yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 3.2 Deskripsi Sampel Penelitian

Deskripsi Sampel Penelitian	Jumlah
Jumlah perusahaan yang ada pada tahun 2010 dan 2011*	80
Jumlah perusahaan yang ada pada tahun 2010 saja*	86
Jumlah perusahaan yang ada pada tahun 2011 saja*	45
Total Jumlah Sampel	211

*Data tahun 2010 dan 2011 diambil dari Pradikta (2012)

4. Analisis Hasil Penelitian

4.1 Statistik Deskriptif

Variabel DIV memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1965 yang menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan observasi membagikan 19,65% dari laba yang diperolehnya sebagai dividen. Variabel SIGINFL merupakan variabel *dummy*. Nilai 1 diberikan untuk perusahaan observasi yang dimiliki keluarga tertentu dengan kepemilikan diatas 20% hingga 50% dan 0 untuk lainnya. Persentase perusahaan observasi yang mendapatkan nilai 1 untuk variabel SIGINFL adalah sebesar 12,7% yang berarti 12,7% dari keseluruhan perusahaan observasi dimiliki oleh keluarga tertentu dengan besar kepemilikan diatas 20% hingga 50%. Variabel MAJOR juga merupakan variabel *dummy* dimana nilai 1 diberikan untuk perusahaan observasi yang dimiliki oleh keluarga tertentu dengan kepemilikan diatas 50% dan 0 untuk lainnya. Sebesar 69,4% dari total observasi merupakan perusahaan yang dimiliki keluarga tertentu dengan persentase kepemilikan diatas 50%.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Min	Maks	Mean	Std. Dev
DIV	0	1	0.1957	0.2340
BOCSCORE	0.3818	0.8727	0.6429	0.0835
LEV	0.0003	0.9011	0.2699	0.1833
SIZE (dalam jutaan rupiah)	17,119	154,319	7,209,048	15,595,881
ROA	-0.2543	0.3879	0.0639	0.0937
CAPEX	0.0000	0.2867	0.0551	0.0618
GROWTHOPP	-1.1500	26.9051	2.8065	4.0639
Variabel <i>Dummy</i>	Proporsi			
	<i>Dummy</i> = 1		<i>Dummy</i> = 0	
SIGINFL	12.7%		87.3%	
MAJOR	69.4%		30.6%	

Jumlah observasi adalah 291 perusahaan dengan melakukan *winsorized* untuk menghilangkan *outlier* berdasarkan batas 3 standar deviasi dari *mean*. *Winsorized* dilakukan pada variabel ROA dan GROWTHOPP.

DIV = Rasio dividen yang dibayarkan terhadap laba perusahaan i pada akhir tahun t, MAJOR = variabel *dummy* untuk tingkat kepemilikan pengendali pada perusahaan i pada akhir tahun t, nilai 1 diberikan untuk perusahaan dengan persentase kepemilikan keluarga di atas 50%, SIGINFL = variabel *dummy* untuk tingkat kepemilikan *significant influence* pada perusahaan i pada akhir tahun t, nilai 1 diberikan untuk perusahaan dengan persentase kepemilikan keluarga di atas 20% - 50%, BOCSCORE = Skor efektivitas dewan komisaris perusahaan i pada akhir tahun t, LEV = Tingkat *leverage* yang diukur dengan nilai *total debt* dibandingkan dengan total aset perusahaan i pada akhir tahun t, SIZE = Ukuran perusahaan berdasarkan total aset perusahaan i pada akhir tahun t, ROA = Profitabilitas perusahaan yang dihitung dari laba bersih dibagi dengan total aset perusahaan i pada akhir tahun t, CAPEX = Investasi perusahaan dengan menghitung total *capital expenditure* dibagi dengan total aset perusahaan i pada akhir tahun t, GROWTHOPP = Peluang pertumbuhan perusahaan yang dihitung dari *PBV ratio* perusahaan i pada akhir tahun t.

Variabel BOCSCORE akan dijelaskan pada tabel berikutnya. Variabel selanjutnya adalah LEV. Nilai minimumnya adalah 0,0003 sementara nilai maksimumnya adalah 0,9010. Rentang yang jauh tersebut menjelaskan bahwa terdapat perusahaan observasi yang tidak bergantung pada hutang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan juga terdapat perusahaan yang sangat bergantung pada hutang. Dilihat dari nilai rata-ratanya, perusahaan observasi memiliki tingkat *leverage* sebesar 26,99%. Kemudian, variabel berikutnya adalah SIZE dengan nilai minimum Rp 17.119.214.000 dan maksimum Rp 154.319.000.000.000. Kesimpulan dari kedua nilai tersebut adalah keberagaman ukuran perusahaan yang dijadikan observasi penelitian dan memiliki *gap* yang besar.

Nilai rata-rata ROA perusahaan observasi cukup rendah, yakni sebesar 0,0639. Rendahnya nilai tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan observasi belum efisien dalam

mengelola asetnya. Variabel CAPEX memiliki nilai minimum 0 yang berarti terdapat perusahaan observasi yang tidak melakukan investasi atau pembelian aset baru sama sekali. Sementara itu, nilai maksimumnya adalah sebesar 0,2867 yang berarti sebesar 28,67% dari total laba yang diperoleh perusahaan digunakan untuk melakukan investasi, seperti pembelian aset baru. Variabel terakhir, yaitu GROWTHOPP memiliki nilai minimum -1,15 dan nilai maksimum 26,9051. Rentang yang cukup jauh antara nilai minimum dan maksimum menunjukkan bahwa terdapat observasi penelitian yang dirasa tidak memiliki peluang pertumbuhan dan terdapat pula observasi penelitian yang memiliki peluang pertumbuhan di masa depan hingga 26 kali lipat.

Untuk menilai efektivitas dewan komisaris, terdapat 6 pertanyaan untuk kategori independensi, 6 pertanyaan untuk kategori aktivitas, 1 pertanyaan untuk kategori jumlah anggota, dan 4 pertanyaan untuk kategori kompetensi.

Kategori pertama, yaitu kategori independensi, berdasarkan tabel 4.2, terjadi peningkatan nilai rata-rata untuk kategori independensi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah menaati peraturan Bapepam-LK terkait independensi, dan menyadari bahwa dewan komisaris yang independen akan menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih baik.

Kategori kedua, yaitu kategori aktivitas, Dari nilai rerata, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan yang tidak signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Nilai rerata tersebut tidak jauh dari angka maksimum yang berarti aktivitas dewan komisaris pada perusahaan sampel sudah sangat baik.

Kategori berikutnya adalah jumlah anggota. Pada kategori ini tidak tampak adanya perbaikan dari tahun ke tahun. Sebagian besar perusahaan sampel memiliki dewan komisaris dengan jumlah anggota 3 sampai 4 orang, dan hanya perusahaan besar yang memiliki dewan komisaris diantara 5 sampai 10 orang.

Tabel 4.2 Tren Efektivitas Dewan Komisaris Periode 2010-2012

Kategori		Independensi	Aktivitas	Jumlah Anggota	Kompetensi	Total
Jumlah pertanyaan		6	6	1	4	17
Rentang Nilai		6-18	6-18	1-3	4-12	17-51
Minimum	2010*	7	8	1	5	23
	2011*	7	10	1	4	29
Maksimum	2010*	16	18	3	12	48
	2011*	17	18	3	12	46
Mean	2010*	10.3500	13.9625	2.1250	9.1625	35.6000
	2011*	10.8250	13.8500	2.2000	9.6625	36.5375
Std.Dev	2010*	2.0752	2.5079	0.9984	1.5997	4.9723
	2011*	2.2433	1.9298	0.9859	1.8519	4.1060

*Data tahun 2010 dan 2011 diambil dari Pradikta (2012)

Kategori terakhir, yaitu kompetensi dewan komisaris. Untuk kategori ini, secara keseluruhan telah terjadi peningkatan nilai rata-rata. Peningkatan yang minim ini menunjukkan bahwa perusahaan setidaknya sudah memperhatikan kompetensi dewan komisarisnya. Dewan komisaris yang kompeten akan lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Secara keseluruhan, tren efektivitas dewan komisaris menunjukkan volatilitas. Pada tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi peningkatan, walaupun peningkatan tersebut tidak signifikan.

Tabel 4.22 Hasil Estimasi Regresi

$$\text{Model 1 : } \text{DIV}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{SIGINFL}_{it} + \beta_2 \text{MAJOR}_{it} + \beta_3 \text{LEV}_{it} + \beta_4 \text{SIZE}_{it} + \beta_5 \text{ROA}_{it} + \beta_6 \text{CAPEX}_{it} + \beta_7 \text{GROWTHOPP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Model 2 : } \text{DIV}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{SIGINFL}_{it} + \beta_2 \text{MAJOR}_{it} + \beta_3 \text{BOCSCORE}_{it} + \beta_4 \text{SIGINFL} * \text{BOCSCORE}_{it} + \beta_5 \text{MAJOR} * \text{BOCSCORE}_{it} + \beta_6 \text{LEV}_{it} + \beta_7 \text{SIZE}_{it} + \beta_8 \text{ROA}_{it} + \beta_9 \text{CAPEX}_{it} + \beta_{10} \text{GROWTHOPP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Variabel	Expected Sign	Model 1			Model 2		
		Koef.	t-stat	Sig.	Koef.	t-stat	Sig.
Constant		-1.0040	-5.03	0.000	-0.9718	-4.8	0.000
MAJOR	-	-0.0547	-1.47	0.0715*	-0.0279	-0.47	0.3185
SIGINFL	-	0.0291	0.84	0.2	0.0055	0.1	0.4605
BOCSCORE	-				-0.0082	-0.13	0.4495
MAJOR*BOC	-				-0.0711	-0.99	0.1625
SIGINFL*BOC	-				0.0612	-0.85	0.197
LEV	-	-0.1192	-1.74	0.0415**	-0.1028	-1.48	0.0695*
SIZE	+	0.0404	5.73	0.00***	0.0394	5.44	0.000***
ROA	+	0.8059	4.88	0.00***	0.8326	4.98	0.000***
CAPEX	-	0.0215	0.13	0.449	-0.0142	-0.08	0.4665
GROWTHOPP	-	0.0060	1.89	0.03**	0.0060	1.84	0.0335**
Jumlah Observasi		291			291		
R-Squared		0.3057			0.317		
Durbin-Watson Stat		2.039			2.069		
Prob (F-statistics)		0.0000			0.0000		

*** Signifikan pada $\alpha = 1\%$ (one-tailed)

** Signifikan pada $\alpha = 5\%$ (one-tailed)

* Signifikan pada $\alpha = 10\%$ (one-tailed)

Jumlah observasi adalah 291 perusahaan dengan melakukan *winsorized* untuk menghilangkan *outlier* berdasarkan batas 3 standar deviasi dari *mean*. *Winsorized* dilakukan pada variabel ROA dan GROWTHOPP.

DIV = Rasio dividen yang dibayarkan terhadap laba perusahaan i pada akhir tahun t, MAJOR = variabel *dummy* untuk tingkat kepemilikan pengendali pada perusahaan i pada akhir tahun t, nilai 1 diberikan untuk perusahaan dengan persentase kepemilikan keluarga di atas 50%, SIGINFL = variabel *dummy* untuk tingkat kepemilikan *significant influence* pada perusahaan i pada akhir tahun t, nilai 1 diberikan untuk perusahaan dengan persentase kepemilikan keluarga di atas 20% - 50%, BOCSCORE = Variabel *dummy*, nilai 1 diberikan kepada perusahaan i pada tahun t yang memiliki skor efektivitas dewan komisaris di atas nilai median, LEV = Tingkat *leverage* yang diukur dengan nilai *total debt* dibandingkan dengan total aset perusahaan i pada akhir tahun t, SIZE = Ukuran perusahaan berdasarkan logaritma natural total aset perusahaan i pada akhir tahun t, ROA = Profitabilitas perusahaan yang dihitung dari laba bersih dibagi dengan total aset perusahaan i pada akhir tahun t CAPEX = Investasi perusahaan dengan menghitung total *capital expenditure* dibagi dengan total aset perusahaan i pada akhir tahun t, GROWTHOPP = Peluang pertumbuhan perusahaan yang dihitung dari *PBV ratio* perusahaan i pada akhir tahun t.

4.2 Analisis Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Keluarga pada Tingkat Pengendali dan *Significant Influence* terhadap Kebijakan Dividen

Hasil regresi pada Tabel 4.11 membuktikan bahwa kepemilikan keluarga pada tingkat pengendali (di atas 50%) memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen pada $\alpha = 1\%$, yang berarti perusahaan yang dimiliki keluarga pada tingkat pengendali memiliki *dividend payout ratio* yang lebih rendah dibandingkan perusahaan lain sehingga hipotesis 1a.1 penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maury & Pajuste (2002) dan Wei *et al.* (2011) yang juga membuktikan bahwa perusahaan dengan pemegang saham tingkat pengendali akan memiliki *dividend payout ratio* yang rendah. Pemegang saham keluarga akan memanfaatkan posisi mereka sebagai pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas demi mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satunya adalah dengan melakukan *tunneling* laba. Laba perusahaan diinvestasikan ke dalam proyek-proyek yang masih berafiliasi dengan grup keluarga mereka sehingga sisa dana yang dapat didistribusikan sebagai dividen menjadi sedikit. Melalui *tunneling* tersebut, pemegang saham pengendali akan mendapatkan keuntungan yang tidak didapatkan oleh pemegang saham minoritas, dengan kata lain pemegang saham pengendali tidak ingin berbagi keuntungan dengan pemegang saham minoritas.

Sementara itu, kepemilikan keluarga pada tingkat non-pengendali, baik pada tingkat *significant influence* ataupun pasif, tidak terbukti mempengaruhi *dividend payout ratio* perusahaan. Perusahaan yang dimiliki keluarga pada tingkat tersebut tidak memiliki *dividend payout ratio* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya, sehingga hipotesis 1a.2 penelitian ini ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa pemegang saham pada tingkat *significant*

influence tidak bisa melakukan ekspropriasi melalui kebijakan dividen. Hanya pemegang saham pada tingkat pengendali saja yang dapat melakukan ekspropriasi dan mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan.

4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan dengan Dewan Komisaris yang Efektif

Efektivitas dewan komisaris pada penelitian ini dilambangkan oleh variabel BOCSCORE. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris yang efektif tidak dapat memperlemah pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kebijakan dividen, baik pada tingkat pengendali maupun *significant influence*. Pemegang saham pada perusahaan yang dimiliki keluarga pada tingkat pengendali dapat menggunakan kebijakan dividen yang tinggi untuk menutupi ekspropriasi yang mereka lakukan terhadap pemegang saham minoritas. Namun pada kasus di Indonesia, keberadaan dewan komisaris belum terbukti dapat melemahkan pengaruh tersebut. Anderson & Reeb (2004) menjelaskan bahwa keberadaan *independent director* dapat mencegah perilaku oportunistik para pemegang saham keluarga pengendali. Hal ini mungkin disebabkan oleh efek kepemilikan keluarga yang memiliki *power* lebih kuat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kebijakan dividen. Terlebih lagi, ada kemungkinan bahwa salah satu anggota dewan komisaris merupakan bagian dari keluarga pemegang saham. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Chen *et al.* (2011) di Hong Kong, yang membuktikan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang lemah terhadap kebijakan dividen. Lemahnya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance* baik di Hong Kong maupun di Indonesia belum diterapkan dengan baik. Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis 2a.1 dan 2a.2 penelitian ini tidak dapat diterima.

5. Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tren efektivitas dewan komisaris secara keseluruhan mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Untuk kategori independensi, jumlah anggota, dan kompetensi dewan komisaris terjadi peningkatan yang tidak signifikan, sedangkan untuk kategori aktivitas dewan komisaris justru mengalami penurunan.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan keluarga pada tingkat *significant influence*, yaitu antara 20%-50%, tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Sementara itu, kepemilikan keluarga pada tingkat pengendali, yaitu di atas 50%, terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas dewan komisaris tidak terbukti memperlemah hubungan antara pengaruh kepemilikan tersebut terhadap kebijakan dividen. Hal ini juga terjadi pada perusahaan yang dimiliki keluarga pada tingkat *significant influence*, yaitu antara 20%-50%, dan pada perusahaan yang dimiliki keluarga pada tingkat pengendali, yaitu di atas 50%.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat membantu akademisi berikutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Sampel data pada penelitian ini bersifat *cross-sectional*. Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahun observasi saja. Selain itu, terdapat kesulitan dalam mengumpulkan laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan karena terdapat beberapa perusahaan yang laporan tahunannya tidak ditemukan. Karena keterbatasan ini, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 291 perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada BEI selama periode 2010-2011. Saran untuk penelitian

berikutnya adalah dengan menambah jumlah sampel dengan menambah jumlah perusahaan yang diobservasi atau menambah jumlah tahun observasi.

2. Banyak sampel penelitian ini yang tidak mengungkapkan informasi secara lengkap mengenai dewan komisaris, terutama profil dewan komisaris. Keterbatasan ini menyebabkan beberapa perusahaan memperoleh skor efektivitas dewan komisaris yang rendah. Dalam penelitian ini, nilai *poor* diberikan apabila informasi yang tersedia dalam laporan tahunan tidak memadai, padahal sangat mungkin perusahaan tersebut memiliki dewan komisaris yang efektif apabila terdapat informasi yang lengkap. Untuk penelitian berikutnya diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan tahunan perusahaan untuk menilai efektivitas dewan komisaris, tetapi juga dengan menambahkan pengukuran melalui penyebaran kuesioner atau wawancara langsung
3. Penelitian ini mendefinisikan perusahaan keluarga mengacu pada defisini yang diungkapkan Arifin (2003). Definisi ini belum bisa menunjukkan pemilik sebenarnya dari perusahaan keluarga tersebut. Untuk ke depannya diharapkan untuk melakukan penelusuran untuk dapat mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari perusahaan keluarga tersebut.
4. Penelitian ini menggunakan hasil perhitungan skor efektivitas dewan komisaris untuk mengukur efektivitas dewan komisaris sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hermawan (2009). Skor tersebut diukur berdasarkan karakteristik-karakteristik dewan komisaris, antara lain independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi dewan komisaris yang diadopsi dari *checklist* yang dikembangkan IICD. Meskipun reliabilitas dan validitasnya telah diuji menggunakan *Cronbach's Alpha*, metode *scoring* tersebut cenderung subjektif dan untuk kedepannya diharapkan melakukan penyesuaian untuk memperoleh hasil yang lebih objektif.

Daftar Pustaka

- Agrawal, Anup. & Knoeber, C.R. (1996). *Firm Performance and Mechanisms to Control Agency Problems between Managers and Shareholders*. Journal of Financial and Quantitative, Vol.31 No.3, pp. 377-397
- Agrawal, A. & Chadha, S. (2005). *Corporate Governance and Accounting Scandals*. Journal of Law and Economics, Vol. 48, No.2, pp. 371-406
- Ali, A., Chen, T. & Radhakrishnan, S. (2007). *Corporate disclosures by family firms*. Journal of Accounting and Economics, Vol. 44 Issues 1-2, pp. 238-286
- Alijoyo, A. & S, Zaini. (2004). *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Indonesia*. Jakarta: Indeks (AZ)
- Anderson, R.C. & Reeb, D.M. (2003a). *Founding-family ownership, Corporate diversification, and Firm Leverage*. Journal of Law and Economics, Vol. 46 No.2 pp 653-684
- Anderson, R.C. & Reeb, D.M. (2003b). *Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500*. The Journal of Finance, Vol. 58 No.3, pp. 1301-1328
- Anderson, R.C. & Reeb, D.M. (2004). *Board composition: balancing family influence in S&P 500 firms*. Administrative Science Quarterly, Vol. 49 No.2, pp. 209-237
- Anderson, R.C., Mansi, S.A., & Reeb, D.M. (2003). *Founding family ownership and the agency cost of debt*. Journal of Financial Economics, Vol. 68 Issues 2, pp. 263-285
- Anderson, R.C., Duru, A., & Reeb, D.M. (2009). *Founders, heirs, and corporate opacity in the United States*. Journal of Financial Economics, Vol. 92 Issues 2, pp. 205-222
- Andres, Christian. (2008). *Large shareholders and firm performance – An empirical examination of founding-family ownership*. Journal of Corporate Finance, Vol.14 Issues 4, pp. 431-445
- Arvitricia, Rietsi. (2010). Analisis Pengaruh Arus Kas Bebas, Leverage, Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Kepemilikan terhadap Besaran Dividen: Studi Kasus Perusahaan Non Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2003-2007. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Asian Corporate Governance Association (ACGA). (2012). *CG Watch 2012: Market Rankings*.
- Bagwell, L.S. & Shoven, J.B. (1988). *Cash Distribution to Shareholders*. The Journal of Economics Perspectives, Vol. 3 No.3, pp. 129-140
- Baker, K.H & Smith, D.M. (2006). *In search of residual dividend policy*. Review of Financial Economics, Vol. 15 Issues 1, pp. 1-18
- Barclay, M.J., Smith, C.W., & Watts, R.L. (1995). *The determinants of corporate leverage and dividend policies*. Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 7, pp. 4-19s
- Barth, E., Gulbrandsen, T., & Schønea, P. (2005). *Family ownership and productivity: the role of owner-management*. Journal of Corporate Finance, Vol. 11 Issues 1-2, pp. 105-127
- Block, S.B. & Hirt, G.A. (2002). *Foundations of Financial Management 10th edition*. USA: McGraw-Hill
- Brigham, E.F. & Ehrhardt, M.C. 2005. *Financial Management 11th edition*. USA: South-Western
- Brown, J.R., Liang, N., & Weisbenner, S. (2007). *Executive Financial Incentives and Payout Policy: Firm Responses to the 2003 Dividend Tax Cut*. The Journal of Finance, Vol.62 No.4, pp. 1935-1965
- Claessens, Styn, Djankov, S., Fan, J., & Lang, Larry H. P. (1999). *Expropriation of Minority Shareholders: Evidence from East Asian Corporations*. Working paper, World Bank
- Claessens, Styn, Djankov, S., Fan, J., & Lang, Larry H. P. (2000). *The separation of ownership and control in East Asian Corporations*. Journal of Financial Economics, Vol. 58 Issues 1-2, pp. 81-112
- Damodaran, Aswath. (2001). *Corporate Finance: Theory & Practice 2nd edition*. USA: Wiley
- Denis, D.J. & Osobov, I. (2008). *Why do firms pay dividends? International Evidence on the determinants of dividend policy*. Journal of Financial Economics, Vol. 89 Issue 1, pp. 68-82
- Faccio, M., Lang, Larry H.P. & Young, L. (2001). *Dividends and expropriation*. American Economic Review, Vol. 91 No.1, pp. 54-78
- Faccio, M. & Lang, Larry H.P. (2002). *The ultimate ownership of Western Europeans corporations*. Journal of Financial Economics, Vol. 65 Issues 3, pp. 365-395
- Fama, E.F. (1980). *Agency Problems and Theory of the Firm*. Journal of Political Economy, Vol. 88 No.2, pp. 288-307
- Foo, YB. & Zain, M.M. (2010). *Board independence, board diligence and liquidity in Malaysia: A research note*. Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol. 6 Issues 2, pp. 92-100
- Frankfurter, G.M. & Wood Jr, B.G. (2002). *Dividend policy theories and their empirical tests*. International Review of Financial Analysis, Vol 11 Issues 2, pp. 111-138
- Gilson, R.J. & Gordon, J.N. (2003). *Controlling controlling shareholders*. Working Paper #228, Columbia Law School, The Center for Law and Economic Studies, New York
- Guedhami, O. & Pittman, J.A. (2011). *The Choice between Private and Public Capital Markets: The Importance of Disclosure Standards and Auditor Discipline to Countries Divesting State-owned Enterprises*. Journal Account Public Policy, Vol. 30, pp. 395-430

- Gugler, Klaus. (2003). *Corporate governance, dividend payout policy, and the interrelation between dividends, R&D, and capital investment*. Journal of Banking & Finance, Vol. 27 Issues 7, pp. 1297-1321
- Gugler, K. & Yurtoglu, B.B. (2003). *Corporate governance and dividend pay-ouy policy in Germany*. European Economic Review, Vol. 47 Issues 4, pp. 731-758
- Gujarati, D.N. 2003. *Basic Econometrics*. Singapore: McGraw-Hill
- Hardin, W. & Hill, M.D. (2008). *REIT dividend determinants: Excess dividends and capital markets*. Real Estate Economics, Vol. 36 Issue 2, pp. 349-369
- He, Tina T., Li, Wilson X. B., & Tang, Gordon Y. N. (2012). *Dividends behavior in State- Versus Family-Controlled Firms: Evidence from Hong Kong*. Journals of Business Ethics, Vol. 110 No.1, pp. 97-112
- Hermawan, Ancella Anitawati (2009). *Pengaruh efektivitas dewan komisaris dan komite audit, kepemilikan oleh keluarga, dan peran monitoring bank terhadap kandungan informasi laba*. Unpublished Dissertation, FEUI Graduate Program in Accounting
- Jain, Ravi. (2007). *Institutional and individual investor preferences for dividends and share repurchases*. Journal of Economic and Business, Vol. 59 Issue 5, pp. 406-429
- Jensen, M.C. (1986). *Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers*. American Economic Review, Vol. 76 No.2, pp. 323-329
- Jensen, G.R., Solberg, D.P., & Zorn, T.S. (1992). *Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt, and Dividend Policies*. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 27 No.2, pp. 247-263
- Keown, A.J., Martin, J.D., & Scott, D.F. (2003). *Financial Management 10th edition*. USA: Prentice Hall
- King, M. R. & Santor, E. (2008). *Family values: Ownership structure, performance and capital structure of Canadian firms*. Journal of Banking and Finance, Vol. 32 Issues 11, pp. 2423-2432
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. <http://www.knkg-indonesia.com>
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). *Corporate ownership around the world*. The Journal of Finance, Vol. 54 No. 2, pp. 471-517
- Lee, Jim (2004). *The Effects of Family Ownership and Management on Firm Performance*. S.A.M. Advanced Management Journal, Vol.64 No.9, pp.46-53
- Lim, Boon Leong & Yen, Siew Hwa (2011). *Agency Problem and Expropriation of Minority Shareholders*. Malaysian Journal of Economic Studies, Vol. 48 No.1, pp. 37-59
- Martin-Reyna J.M. & San, Duran-Encalada, J.A. (2012). *The relationship among family business, corporate governance and firm performance: Evidence from the Mexican stock exchange*. Journal of Family Business Strategy, Vol.3 Issues 2, pp. 106-117
- Maury, Benjamin. (2006). *Family ownership and firm performance: Empirical evidence from Western European corporations*. Journal of Corporate Finance, Vol.12 Issues 2, pp. 321-341
- Maury, B.C. & Pajuste, A. (2002). *Controlling Shareholders, Agency Problems, and Dividend Policy in Finland*. The Finnish Journal of Business Economics, Vol. 1 Issues 1, pp. 15-45
- Nachrowi, N.D. & Usman, Hardius. 2008. *Penggunaan teknik ekonometri (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Pradikta, Lucky. (2012). *Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Likuiditas Saham Perusahaan Dengan Tingkat Pengungkapan Sukarela Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Ross, S.A., Westerfield, R.W., & Jordan, B.D. (2008). *Corporate Finance Fundamentals*. New York: McGraw-Hill Irwin
- Rozeff, M.S. (1982). *Growth, Beta, and Agency Costs as Determinants of Dividend Payout Ratios*. The Journal of Financial Research, Vol. 5 No.3, pp. 249-259
- Sekaran, Uma & Bougie, Roger. (2009). *Research Methodology for Business 5th edition*. UK: Wiley
- Setia-Atmaja, Lukas. (2010). *Dividend and debt policies of family controlled firms: the impact of board independence*. International Journal of Managerial Finance, Vol.6 No.2, pp. 128-142
- Setia-Atmaja, L. & Hanto, J., Tanewski, G. (2011). *The role of board independence in mitigating agency problem II in Australian family firms*. The British Accounting Review, Vol. 43 Issues 3, pp. 230-246
- Sharma, Vineeta. (2011). *Independent directors and the propensity to pay dividends*. Journal of Corporate Finance, Vol. 17 Issues 4, pp. 1001-1015
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”
- Utama, C.A. (2012). *Company disclosure in Indonesia: Corporate governance practice, ownership structure, competition and total assets*. Asian Journal of Business and Accounting, Vol. 5 No.1, pp. 75-108
- Villalonga, B. & Amit, R. (2006). *How do family ownership, control and management affect firm value?*. Journal of Financial Economics, Vol. 80 Issues 2, pp. 385-417
- Wei, Z., Wu, S., Li C., & Chen, W. (2011). *Family control, institutional environment and cash dividend policy: Evidence from China*. China Journal of Accounting Research, Vol. 4 Issues 1-2, pp. 29-46



- Weisskopf, JP. (2012). *Do not wake sleeping dogs: Pay-out policies in founding family firms*. Working Paper. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1834342>
- World Bank. (2010). *Annex: Corporate Governance Detailed Country Assessment (DCA) Indonesia. Report on the Observance of Standard and Codes (ROSC)*
- Xie, B., Davidson-III, W.N., & DaDalt, P.J. (2003). *Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee*. Journal of Corporate Finance, Vol.9 Issues 3, pp. 295-316
- Yamin, S.L.A., Rachmah, & Kurniawan, Heri. 2011. *Regresi dan korelasi dalam genggaman anda*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

**Pengaruh *Institutional Ownership* dan *Managerial Ownership* terhadap
Pengungkapan CSR pada Laporan Tahunan Perusahaan
Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 2010-2011**

RIZKY ERIANDANI*

Universitas Surabaya

Abstract: *Corporate social responsibility or CSR is the issue which gets great attention, especially in Indonesia. CSR is responsibility of corporation widely. The research on CSR finds different results. This study aims to investigate the effect of ownership structure on CSR disclosure. We use two variables to measure ownership structure : managerial ownership and institutional ownership. CSR measurement instrument used in this study adopted a previous research. The instrument comes from research Hackston and Milne, which was adjusted with Bapepam regulation in Indonesia. The samples used in this research were 158 listed manufacturing companies in Indonesian Stock Exchange which studied during the years of 2010-2011. Using SPSS 20, The analysis methods of this research used multiple regression analysis.*

The research findings show that managerial ownership structure has a significant positive impact on the level of corporate social responsibility disclosures. However, this paper fail to find any significant impact of institutional ownership. Thus, our study implies that managerial ownership can reduce agency cost through CSR disclosure. In contrast, institutional investors have not focused on social activities in investing, so less attention to CSR disclosure. This findings should be of interest to policy makers in company and regulators in countries.

Keywords: *Corporate Social Responsibilities, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Agency Theory.*

* Author can be contacted at: rizky.eriandani@ubaya.ac.id

1. Pendahuluan

Saat ini Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi perhatian banyak pihak, baik praktisi bisnis maupun akademisi. Salah satu pemicunya adalah globalisasi dan perdagangan internasional, yang akan meningkatkan kompleksitas, menuntut transparansi dan *corporate citizenship* (Jamali et al., 2008). Sejak adanya konsep *triple bottom line*, banyak investor meminta agar perusahaan tempat mereka berinvestasi melakukan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa CSR menjadi element penting bagi kesuksesan perusahaan dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Perusahaan akan berusaha untuk melakukan aktivitas CSR yang akan memberikan kontribusi pada stakeholder internal maupun eksternal.

Banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR, seperti leverage; size; dan profitabilitas yang telah banyak dibuktikan. Namun faktor struktur kepemilikan belum banyak diteliti dan hasil penelitian yang dihasilkan belum konsisten. Beberapa peneliti mencoba menjelaskan hubungan antara struktur kepemilikan dengan aktivitas sosial perusahaan (Barnea and Rubin, 2010; Johnson and Greening, 1999). Masing-masing pemilik perusahaan (owner) yang berbeda akan memiliki tujuan yang berbeda, dan pola pengambilan keputusan yang berbeda, hal inilah yang mendasari untuk meneliti hubungan struktur kepemilikan perusahaan dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan (Hoskisson et al., 2002). Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan ada dipisahkan menjadi dua, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Dipisahkan menjadi dua karena, (1) investor institusional biasanya menguasai sejumlah besar saham sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan; dan (2) kepemilikan manajerial karena manajer memiliki pengetahuan yang sangat memadai atas aktivitas perusahaan dan memiliki pengaruh yang besar pada strategy perusahaan.

Manajer dan pemegang saham (equity owner) memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda dalam perusahaan. Dalam literatur *corporate governance* menekankan

kepemilikan manajerial sebagai insentive bagi manajer agar bertindak untuk kepentingan *equity owner*. Manajer owner merupakan manajer sekaligus sebagai pemilik, sehingga dapat bertindak sebagai manajer atau pemegang saham, tergantung besarnya kepemilikan sahamnya. Artinya, semakin besar kepemilikan manajer atas saham perusahaan, maka tindakan yang diambil akan cenderung dari perspektif *owner*. Corporate governance muncul dan berkembang dari teori agensi, yang menghendaki adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Menurut Anderson et al. (2003) untuk mengurangi *agency cost* dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Dengan keterlibatan kepemilikan saham, manager akan bertindak secara hati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Mengingat pemegang saham memiliki kepentingan terhadap sustainability jangka panjang perusahaan, maka mereka akan berusaha memaksimalkan tidak hanya kondisi ekonomi perusahaan, tetapi juga sosial dan lingkungan untuk meningkatkan reputasi perusahaan di pasar. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial akan dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga manajer akan melakukan CSR. Terlebih lagi, di Indonesia telah diwajibkan pelaksanaannya dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maka dapat dikatakan jika kepemilikan manajer semakin besar, maka aktivitas dan pengungkapan CSR juga akan semakin meningkat. Di Indonesia penelitian mengenai kepemilikan manajerial dengan pengungkapan CSR pernah dilakukan Anggraini (2006) dan Rosmasita (2007), yang menyatakan adanya hubungan positif. Sebaliknya penelitian Said et al. (2009) dalam Waryanto (2010) tidak menemukan adanya hubungan antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR.

Selain melalui kepemilikan manajerial, *Agency cost* juga dapat dikurangi dengan kepemilikan institusional. investor institusional biasanya memiliki saham perusahaan dalam jumlah besar dan jangka. Maka, investor ini memiliki kepentingan tidak hanya pada kinerja

keuangan perusahaan, tetapi juga pada strategi dan aktivitas sosial, karena akan berdampak pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Fauzi et al, 2007; Mahoney & Robert, 2007). Sejumlah penelitian membuktikan kepemilikan institusional memberikan pengaruh pada keputusan investasi dan kebijakan perusahaan (Crisostomo, 2011; Schiantarelli & Sembenelli, 2000). Penelitian lain menemukan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh pada kinerja dan nilai perusahaan (Villalonga & Amit, 2006). Hal ini mencerminkan bahwa kepemilikan institusional akan dapat mempengaruhi kebijakan CSR perusahaan, mengingat aktivitas CSR akan dapat meningkatkan reputasi dan kinerja perusahaan. Penelitian mengenai kepemilikan institusional dan CSR masi sedikit dan hasilnya juga belum konsisten. Saleh et al. (2010) membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan Institusional dengan CSR. Sedangkan penelitian lainnya tidak membuktikan hal tersebut (coffey & Fryxell, 1991; Fauzi et al., 2007).

Penelitian ini dimotivasi karena adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian CSR di Indonesia sebelumnya lebih fokus pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi CSR seperti ukuran perusahaan, jenis industri, rasio utang, dan profitabilitas. Masih sedikit yang membahas mengenai dampak struktur kepemilikan pada CSR. Dengan menggunakan teori *corporate governance*, *agency theory*, dan CSR, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh sruktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan institusional) pada aktivitas CSR yang diproksi dengan luas pengungkapan CSR. Sampel penelitian mengambil sektor manufaktur, karena termasuk sektor yang berpengaruh pada penggunaan sumber daya alam, dan sesuai dengan UU PT, diwajibkan melakukan CSR.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
2. Apakah Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?

Manfaat penelitian

1. Bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan sehubungan dengan pengungkapan CSR yang telah mereka lakukan selama ini. Hasil penelitian ini dapat menjadikan perusahaan lebih memberikan perhatian terhadap pengungkapan CSR di masa mendatang, seperti halnya pengungkapan CSR yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan *United States* sebagai salah satu informasi yang penting.
2. Bagi pengguna laporan keuangan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain memberikan informasi bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam melihat luas pengungkapan CSR perusahaan dikarenakan kebutuhan akan legitimasi perusahaan di dalam masyarakat.
3. Bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran kepada pemerintah sampai sejauh mana pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan. Sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan suatu standar pelaporan CSR yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Corporate Social Responsibility

World Bank mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui

kerjasama dengan para karyawan, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara-cara yang bermanfaat baik bagi bisnis itu sendiri, maupun untuk pembangunan (ICSD, 2004 : 73). Sehingga dapat dikatakan bahwa CSR bukan hanya kegiatan yang sifatnya jangka pendek (seperti donasi), tetapi termasuk juga isu-isu mengenai tenaga kerja, lingkungan hidup, produk untuk *customer*, dan sosial masyarakat. Waddock dan Graves (1994) menggunakan dua teori untuk menjelaskan hubungan CSR kinerja keuangan. Pertama, *slack resource theory*, peningkatan kinerja keuangan perusahaan menyebabkan tersedianya dana yang dapat digunakan untuk aktivitas CSR. Kedua, *good management theory*, menyatakan perusahaan yang memiliki kinerja CSR baik akan memiliki reputasi yang baik, sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan.

Perusahaan melakukan aktivitas CSR dengan alasan tertentu. Beberapa manfaat yang didapatkan perusahaan ketika melakukan CSR adalah (*corporate watch report*, 2006) reputasi manajemen, *employee satisfaction*, *investor relations and access to capital*, dan efisiensi operasional. Dalam hubungannya dengan investor, kebanyakan investor akan menilai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial lebih aman dalam melakukan investasi. Delapan puluh enam persen (86%) investor institusional meyakini bahwa CSR akan memiliki dampak yang positif pada bisnis. Kemudian, CSR juga dapat mendorong tercapainya efisiensi operasi. Khususnya pada aspek lingkungan, perusahaan akan dapat meminimalkan barang sisa (*waste*) atau menghemat energi sehingga biaya operasional menurun (Budimanta, Prasetijo, dan Rudito, 2004).

Pengukuran variabel pengungkapan informasi CSR atau CSR disclosure index (CSRDI) dilakukan dengan cara *content analysis* yang mengukur variasi dari CSRI (Sayekti dan Wondabio, 2007). Kompleksnya pengukuran CSR, membuat peneliti memilih pengungkapan social dan lingkungan dalam annual report sebagai cerminan kinerja CSR.

Kuantitas pengungkapan informasi lingkungan dan sosial dalam banyak hal menunjukkan pentingnya suatu informasi tersebut diungkapkan, artinya semakin banyak suatu item informasi diungkapkan berarti semakin penting informasi tersebut (Neu et al., 1998; Stagliano dan Walden, 1998 dalam Sudarno, 2004).

Agency theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency problem* timbul karena seseorang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri dan munculnya konflik ketika kepentingan tersebut bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Konflik akan menciptakan masalah (*agency cost*), sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk mengurangi timbulnya *agency cost* ini. Selain terdapat konflik eksternal, adapula konflik internal didalam diri agent maupun principal sendiri karena pada dasarnya orang cenderung tidak konsisten. *Agency costs* ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal.

Munculnya konflik akan mempersulit pemilik perusahaan atau pemegang saham untuk memonitor manajer perusahaan. Asset perusahaan mungkin saja digunakan untuk kepentingan manajer daripada untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Menurut Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011), munculnya konflik ini akan meningkatkan biaya keagenan, namun biaya keagenan ini dapat diminimumkan melalui kepemilikan institusi sebagai pihak yang memonitor manajer atau agen.

Struktur Kepemilikan dalam perusahaan

Struktur kepemilikan merupakan berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan suatu perusahaan atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Wahyudi dan Pawestri

(2006), struktur kepemilikan dikelompokkan atas proporsi saham yang dimiliki yaitu:

a. Kepemilikan manajerial (Managerial Ownership)

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2008). Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Soliman et al., 2012).

b. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Soliman et al., 2012). Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problems*), yaitu ketidaksejajaran antara principal (pemilik atau pemegang saham) dan agent (manajer). Adanya beberapa penyatuan kepentingan pemegang saham, *debtholders*, dan manajemen yang notabene merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tujuan perusahaan, seringkali menimbulkan masalah-masalah. Untuk itu diperlukan sebuah kontrol dari pihak luar dimana peran monitoring dan pengawasan yang baik akan mengarahkan tujuan sebagaimana mestinya.

Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Manajerial

Agency theory (Jensen dan Meckling, 1976) mengatakan bahwa top manajer memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk seluruh

stakeholder. Teori tersebut juga menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk memperkecil adanya konflik agensi dalam perusahaan adalah dengan memaksimalkan jumlah kepemilikan manajerial. Dengan menambah jumlah kepemilikan manajerial, maka manajemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan. Jika manajer memiliki saham dalam jumlah besar, maka mereka akan cenderung mengambil keputusan dengan tujuan memaksimalkan *shareholder value*. Jika tanggung jawab sosial dapat meningkatkan nilai perusahaan, kepemilikan terhadap saham akan memberikan insentif pada manajer untuk melakukan aktivitas CSR. Sudah banyak literatur yang menyatakan bahwa investasi pada CSR membantu perusahaan untuk menciptakan *intangible assets* dengan penggunaan *resource* yang efektif, dan akan memberikan dampak positif pada kinerja keuangan (Hillman dan Keim, 2001)

Return yang dihasilkan aktivitas CSR tidak akan terlihat dalam jangka pendek, mengingat CSR berkaitan dengan reputasi dan image perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini sangat penting bagi *blockholder* (pemilik saham internal – board of director, manager, dan dewan yang lain), yang biasanya menguasai saham perusahaan dalam jumlah besar. Sehingga motif legitimasi dan reputasi lebih penting, dibanding menghasilkan profit jangka pendek (Crisostomo, 2011). Aktivitas CSR memang dapat mempengaruhi negatif profitabilitas jangka pendek perusahaan, karena harus mengeluarkan biaya-biaya, tetapi manajer akan tetap melakukan CSR karena akan meningkatkan image perusahaan dan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Gray et al., 1998). Griner dan Gordon (1995) mengatakan hal yang sama, manajer yang memiliki sedikit *ownership* cenderung menggunakan *resource* yang lebih besar daripada yang seharusnya. Sebaliknya, manajer yang memiliki kepemilikan saham lebih banyak, akan menggunakan *resource*-nya sepanjang dapat memaksimalkan nilai *shareholder*, sehingga konsisten dengan *agency theory*. Selain itu manajer memiliki alasan yang kuat untuk menjaga reputasinya, karena dengan reputasi yang baik manajer dapat

memiliki *negotiating power* (misalnya, gaji yang tinggi, dan jabatan yang bagus). Reputasi berkaitan dengan *social norms*, bukan *market norms*, yang mengindikasikan bahwa reputasi berdasarkan legitimasi dari stakeholder internal maupun eksternal (Ferris et al, 2007).

Beberapa penelitian telah membuktikan hubungan CSR dan kepemilikan manajemen, tetapi dengan hasil yang berbeda-beda. Uwalomwa (2011) menemukan adanya pengaruh positif *managerial ownership* pada *CSR disclosure* di Nigeria. Sebaliknya, Soliman et al. (2012), Khan (2012) membuktikan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh negatif pada tingkat kinerja CSR. Di Indonesia, Nasir dan Abdullah (2004) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. Hal yang sama dibuktikan oleh Rosmasita (2007) yang menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia. Namun ketidakkonsistenan hasil ditunjukkan oleh penelitian Said et al. (2009), Susanti dan Raharjo (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Dari penjelasan teori dan pembuktian empiris mengatakan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan institusional dengan CSR. Sehingga dalam penelitian ini memprediksi adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.

H₁ : kepemilikan Manajerial berpengaruh positif pada pengungkapan CSR.

Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Institusional

Investor institusional dapat mendorong besarnya aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan, dengan dua cara; pertama, melalui keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan; kedua, dengan hanya berinvestasi pada perusahaan yang menjalankan CSR (Li et al., 2006). Meskipun beberapa investor institusional, seperti mutual funds, mencari keuntungan jangka pendek, sebagian besar mencari keuntungan yang stabil dalam

jangka panjang (Aguilera et al., 2006). Sehingga pada umumnya investor institusional lebih memilih untuk terlibat dalam menentukan rencana strategis perusahaan tempatnya berinvestasi daripada memindahkan investasinya ke perusahaan lain. Aguilera et al. (2006) juga menyatakan bahwa investor institusional cenderung menekankan pada aktivitas CSR dengan dua alasan. Pertama, instrumental motives – yang memandang *good social corporate reputation* sebagai indikator perilaku manajerial. Kedua, moral motives yang muncul karena aturan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusional akan mendorong kinerja CSR perusahaan dengan maksud meningkatkan kinerja financial jangka panjang, menjaga reputasi, serta mendapatkan legitimasi sosial.

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan hubungan positif antara kepemilikan institusi dengan CSR. Teoh dan Shiu (1990) membuktikan secara empiris investor institusional lebih tertarik pada perusahaan yang secara aktif melakukan CSR. Graves dan Waddock (1994) juga menyatakan bahwa investor institusional lebih banyak berinvestasi pada perusahaan yang kinerja CSRnya baik, dan menemukan hubungan positif antara jumlah saham perusahaan yang dimiliki investor institusional dengan *CSR rating* dari perusahaan tersebut. Mahoney dan Robert (2007) berpendapat bahwa investor institusional menilai investasi pada perusahaan yang kinerja CSR buruk akan memiliki resiko yang lebih besar. Cox et al. (2004) meneliti pola *institutional share holding* di UK and hubungannya dengan perilaku tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian mengatakan bahwa *social performance* berhubungan positif dengan kepemilikan institusi dalam jangka panjang.

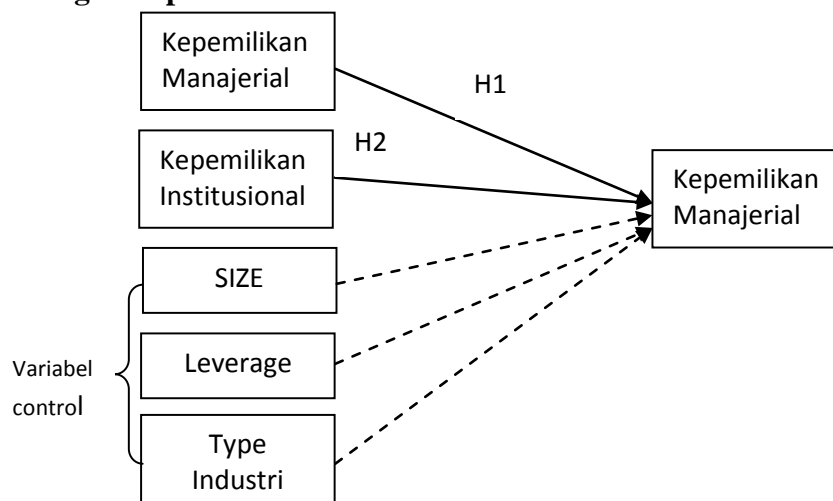
Di Indonesia masih jarang yang meneliti hubungan kepemilikan institusi dengan CSR. Menurut Arif (2006) dalam Novita Djakman (2008) hubungan antara kepemilikan institusional dan CSR adalah kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga

dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer . Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan menurut Machmud & Djaman (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari penjelasan teori dan pembuktian empiris mengatakan bahwa terdapat hubungan antara kepemilikan institusional dengan CSR. Sehingga dalam penelitian ini mempresiksi adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.

H₂ : kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan CSR.

Kerangka Hipotesis



3. Metode Penelitian

Sampel dan Data Penelitian

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan yang di download dari website BEI (www.idx.co.id). Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan *non probability sampling* kategori *purposive judgment sampling*. Hal ini dikarenakan tidak semua perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI antara 1 Januari 2010- 31 Desember 2011, dapat terpilih sebagai sampel. Sampel yang terpilih merupakan anggota populasi yang telah memenuhi kriteria

dimana kriteria tersebut didasarkan pada *judgment* (penilaian) penulis. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

- a. Seluruh perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di BEI antara 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2011.
- b. Telah menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 sampai 31 Desember 2011 dengan satuan mata uang Rupiah.
- c. Telah menerbitkan *annual report* masing-masing perusahaan untuk periode 2010-2011.

Dari pemilihan sampel berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel penelitian yang digunakan pada perusahaan manufaktur adalah 79 data untuk masing-masing periode 2010 dan 2011. Oleh karena itu, total sampel pada perusahaan manufaktur yang dipakai selama periode penelitian 2010-2011 adalah 79 data dikali 2 periode menjadi 158 data (lihat Lampiran 3.1)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility*. Luas pengungkapan CSR atau Corporate Social Disclosure Index (CSDI) merupakan komponen atau item-item apa saja yang diungkapkan perusahaan mengenai aktivitas CSRnya dalam *annual report*. Instrumen pengukuran CSDI yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi penelitian Sembiring (2005). Instrumen tersebut berasal dari penelitian Hackston dan Milne (1996), yang telah disesuaikan dengan Peraturan Bapepam, dan menghapuskan 12 item (dari total 90 item) karena kurang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga total 78 item, dapat dilihat pada lampiran 3.1.

Rumus perhitungan CSRDIj adalah sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum x_{ij}}{78}$$

Keterangan:

$CSRDI_j$ = *CSR Disclosure Index* perusahaan j

X_{ij} = *dummy variable*: 1= jika item i diungkapkan; 0= jika item i tidak diungkapkan.

n_j = jumlah item untuk perusahaan j, $n_j=78$

Variabel Independen

Variabel *independen* adalah variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

1. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Dalam penelitian ini variabel struktur kepemilikan akan diprosikan menggunakan persentase kepemilikan oleh institusi (soliman et al., 2012):

$$\text{StrukturKepemilikan} = \sum \% \text{KepemilikanInstitusi}$$

2. Kepemilikan manajerial

Merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (soliman et al., 2012):

$$\text{Struktur Kepemilikan} = \sum \% \text{Kepemilikan Manajerial}$$

Variabel control

1. *Leverage* merupakan persentase perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas.

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976).

$$\text{Debt to Total Assets Ratio} = \left(\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}} \right)$$

2. Ukuran perusahaan merupakan jumlah total asset kemudian di log natural. Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan akan semakin disorot oleh para *stakeholder*. Maka, perusahaan harus berusaha untuk memperoleh legitimasi *stakeholder* dengan tujuan menyelaraskan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan Norma perilaku yang ada dalam masyarakat.

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$

3. Tipe Industri :

Perusahaan yang termasuk dalam industri yang *high-profile* akan memberikan informasi sosial lebih banyak dibandingkan perusahaan yang *low-profile*. Roberts (1992) dalam Hackston & Milne (1996) mendefinisikan industri yang *high-profile* adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi. *Dummy* variabel akan digunakan untuk mengklasifikasikan *high-profile* dan *low-profile* pada perusahaan manufaktur di BEI yang dilihat berdasarkan *Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA) Index*. Menurut Hasibuan (2001); Henny dan Murtanto (2001); Utomo (2000); Hackston dan

Milne (1996) dalam Sembiring (2005), *High-profile* akan diberi nilai 1 yaitu untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang: kimia, hutan, kertas, otomotif, tembakau dan rokok, makanan dan minuman dan kesehatan. Nilai 0 diberikan untuk perusahaan yang *low profile*, yang meliputi *supplier* peralatan medis, tekstil dan produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga.

Teknik analisis data

Model regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel terikat dan variabel bebas. Pengujian masing-masing hipotesis dilakukan dengan menguji masing masing koefisien regresi dengan uji t. Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut ini.

$$CSR DI = \alpha + \beta_1 MO + \beta_2 INST + \beta_3 SIZE + \beta_4 LEV + \beta_5 IND + \epsilon \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

CSRDI = Pengungkapan Tanggung Sosial Perusahaan

α = konstanta

MO = Kepemilikan Manajerial

INST = Kepemilikan Institusi

SIZE = Ukuran Perusahaan

LEV = Rasio utang

IND = Type Industry (high or low)

ϵ = error

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4,$ dan β_5 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel terikat yang didasarkan pada variabel bebas. Arah hubungan dari koefisien regresi tersebut menandakan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.



4. Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

===== **Tabel 4.1** =====

Berdasarkan tabel 4.1, rata-rata pengungkapan CSR (CSRDI) perusahaan sampel adalah 27,07%. Lebih lanjut, dapat dilihat bahwa nilai simpangan baku CSRDI perusahaan sampel cukup bervariasi dengan nilai minimum 6,41% dan nilai maksimum yang mencapai 53,85%. Hal ini memberikan gambaran bahwa rata-rata perusahaan manufaktur di Indonesia belum menunjukkan komitmen tinggi terhadap aktivitas CSR. Nilai standar deviasi untuk variabel *CSRDI* cukup bervariasi.

Variabel independen pertama adalah kepemilikan manajemen. Variabel ini memiliki nilai rata-rata 3,44%. Hasil ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perusahaan sampel rata-rata dimiliki oleh manajemen. Nilai tertinggi, yaitu 70% yang berarti bahwa pemegang saham mayoritas dalam perusahaan tersebut adalah manajemen, dan nilai terendah, yaitu 0% yang berarti tidak ada kepemilikan manajemen dalam perusahaan.

Rata-rata untuk variabel kepemilikan institusional adalah 72,4%. Angka ini relatif lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan manajemen. Dengan kata lain, perusahaan sampel secara rata-rata memiliki pengaruh yang signifikan di miliki oleh suatu institusi. Namun nilai simpangan baku untuk variabel ini sangat bervariasi dengan nilai tertinggi, yaitu 70% dan nilai terendah 0%.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

===== **Tabel 4.2** =====

Pada tabel 4.2 menjelaskan Besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov Test* adalah 0,765 dan signifikan pada $0,601 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal.

Uji Multikolieritas

===== **Tabel 4.3** =====

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan TOL. Dari tabel 4.3, hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* $< 0,10$. Hasil hitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10 . Hasil menunjukkan nilai VIF berkisar 1,015 sampai dengan 1,423, sehingga tidak ditemukan adanya multikolinearitas. Dan nilai *Tolerance*(TOL) yang diperoleh berkisar 0,703 sampai dengan 0,985 juga menunjukkan tidak adanya multikolinearitas dimana nilai TOL semua variabel lebih besar dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

===== **Tabel 4.4** =====

Dari tabel 4.4 dapat dilihat jumlah sampel 158, dan jumlah variabel independen 5 ($k=5$), maka mendapatkan nilai (dl) sebesar 1.6751 dan nilai (du) sebesar 1.8055, oleh karena Durbin Watson (DW) 1,814 lebih besar dari batas atas (du) 1,7366, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif , dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heteroskedasitas (uji glesjer)

===== Tabel 4.5 =====

Dari hasil output yang terdapat pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji determinasi

===== Tabel 4.6 =====

Hasil *ouput* SPSS 20.0 pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa *Adjusted R Square* sebesar 0,224 atau 22,4% yang berarti bahwa dua variabel independen (kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi), variabel kontrol (ukuran perusahaan, *leverage*, dan tipe industri) dapat menjelaskan variabel dependen (pengungkapan CSR) sebesar 22,4 %, dan sisanya 77,6 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diajukan oleh penelitian ini.

Uji F

===== Tabel 4.7 =====

Pada tabel 4.7 dari uji ANOVA atau uji F didapat nilai F hitung sebesar 10,040 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengungkapan CSR atau dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi (variabel independent), ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan tipe industri secara bersama-sama

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Penelitian

H₁ : Pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap Pengungkapan CSR.

Tabel 4.8 pada Lampiran menunjukkan nilai signifikansi dari variabel kepemilikan institusi sebesar $0,015 < 0,05$, maka hipotesis 1 diterima. Hal ini berarti persentase kepemilikan manajerial pada perusahaan di Indonesia mempengaruhi luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2010-2011. Arah positif disini diartikan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan dalam melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibilities*. Hasil penelitian ini mendukung teori yang diungkapkan oleh Gray et. al., yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepemilikan manajemen dan pengungkapan CSR, yaitu semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan meskipun ia harus mengeluarkan sumber daya untuk aktivitas tersebut. Artinya, manajemen perusahaan sekaligus pemilik saham sudah memahami pentingnya CSR, dan fokus pada aktivitas dan pengungkapan CSR dengan tujuan meningkatkan reputasi dan mendapatkan legitimasi dari *stakeholder*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Jia dan Zang (2012) yang melakukan pengujian hubungan kepemilikan manajerial dan CSR pada perusahaan tertutup di china. Selain itu penelitian uwalomwa (2012), dengan menggunakan sampel perusahaan publik di nigeria, membuktikan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka perusahaan akan lebih *environmentally friendly*, dimana aktivitas tersebut akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian Agustia (2011) yang menggunakan

kepemilikan manajerial sebagai proksi corporate governance, membuktikan secara empiris pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR. Crisostomo et al. (2010) menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap CSR di Brazil, dengan menggunakan 354 sampel, dan membuktikan hasil positif signifikan. Semua penelitian tersebut mengatakan bahwa manajemen sebagai pemilik tertarik melakukan CSR dengan tujuan meningkatkan image dan reputasi perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Lucyanda dan Siagian (2012) yang tidak menemukan hubungan antara kepemilikan manajemen dan pengungkapan CSR. Hal ini bisa terjadi karena dimungkinkan karena manajemen sekaligus sebagai pemilik akan cenderung lebih mementingkan *economic performance* atau keuntungan jangka pendek dibanding *social performance*. Penelitian Febrina dan Suaryana (2011) juga menemukan Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan *corporate social responsibility*, artinya ada atau tidaknya kepemilikan manajerial tidak akan mempengaruhi kebijakan pengungkapan *corporate social responsibility*.

H₂ : Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR.

Tabel 4.8 pada Lampiran menunjukkan nilai signifikansi dari variabel kepemilikan institusi sebesar $0,298 > 0,05$, maka hipotesis 2 ditolak. Hal ini berarti persentase kepemilikan institusi pada perusahaan di Indonesia tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2010-2011. Jika dilihat dari arahnya, maka sesuai dengan teori bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan. Hasil ini mencerminkan bahwa investor institusi di Indonesia belum terlalu mempertimbangkan aktivitas CSR atau tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria untuk melakukan investasi, sehingga para investor institusi ini juga cenderung kurang mendorong perusahaan untuk melakukan CSR dan

mengungkapkannya secara detail (menggunakan indikator GRI) dalam laporan tahunan perusahaan. Investor institusi di Indonesia mungkin masih lebih tertarik pada *financial performance* dibanding *sustainable performance* atau aktivitas CSR. Dapat dikatakan investor institusi Indonesia lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, dan belum fokus pada keuntungan jangka panjang.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Jabbarzadeh et al. (2011) yang melakukan pengujian mekanisme good governance dan CSR dalam laporan tahunan perusahaan publik di Iran, juga menemukan tidak ada hubungan yang secara signifikan antara struktur kepemilikan institusi terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya, penelitian Machmud dan Djakman (2008) dalam melihat pengungkapan CSR sebagai usaha untuk memperoleh legitimasi juga menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusi pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR. Fauzi et al. (2007) juga menguji institutional ownership dan CSR, dengan menggunakan sampel 324 perusahaan manufaktur dan nonmanufaktur di Indonesia tahun 2005, mendapatkan hasil yang sama, dengan alasan aktivitas CSR di Indonesia masih bersifat filantropi.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Soliman et al. (2012) yang mengatakan bahwa investor institusi lebih memilih berinvestasi pada perusahaan yang melakukan CSR, sehingga mereka juga akan mendorong untuk mengungkapkan CSR. Penelitian Susanti dan Riharjo (2013), dengan mengambil sampel perusahaan kosmetik dan household tahun 2009-2011, menemukan hal yang sama dimana kepemilikan institusional mempengaruhi aktivitas CSR. Penelitian tersebut menunjukkan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi. Penelitian Hanggarwati (2013), dengan sampel industri *high profile* membuktikan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Variabel Kontrol

Ukuran Perusahaan (*Size*)

Uji t dengan melihat nilai signifikansi dari variabel kontrol ukuran perusahaan dengan menggunakan proksi Log *asset* memiliki nilai *sig* sebesar $0,000 < 0,05$ (Tabel 4.8). Artinya, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (*CSR Disclosure*) dalam laporan tahunan. Nilai ini membuktikan bahwa tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, dimana perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas, sebagai upaya mengurangi biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan-perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini membuktikan hipotesis ukuran perusahaan dalam teori akuntansi positif serta teori *stakeholders* dan legitimasi.

Leverage

Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa *Leverage* perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan *p-value* sebesar $0,736 > 0,05$ dengan arah positif. Artinya tingkat *Leverage* perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial suatu perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kokobu et al (2001, dalam Anggraini, 2006), yang menemukan bahwa *Leverage ratio* tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap luas ungkapan sukarela.

Tipe Industri

Uji t dengan melihat nilai signifikansi dari variabel kontrol tipe industri sebesar

0,177 < 0,05 (Tabel 4.5 di Lampiran 3), menunjukkan bahwa variabel tipe industri tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini sesuai dengan penelitian Retno dan Priantinah (2012) , tetapi tidak sesuai dengan penelitian–penelitian sebelumnya yaitu Hackstone dan Milne (1996).

5. Simpulan, Keterbatasan Dan Implikasi

Simpulan

Hasil penelitian ini mendukung teori yang diungkapkan oleh Gray et. al., yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepemilikan manajemen dan pengungkapan CSR, yaitu semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan meskipun ia harus mengeluarkan sumber daya untuk aktivitas tersebut. Artinya, manajemen perusahaan sekaligus pemilik saham sudah memahami pentingnya CSR, dan fokus pada aktivitas dan pengungkapan CSR dengan tujuan meningkatkan reputasi dan mendapatkan legitimasi dari *stakeholder*.

Sebaliknya, untuk hasil penelitian menunjukkan ternyata investor institusi di Indonesia belum terlalu mempertimbangkan aktivitas CSR atau tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria untuk melakukan investasi, sehingga para investor institusi ini juga cenderung kurang mendorong perusahaan untuk melakukan CSR dan mengungkapkannya secara detail dalam laporan tahunan perusahaan. Investor institusi di Indonesia mungkin masih lebih tertarik pada *financial performance* dibanding *sustainable performance* atau aktivitas CSR. Dapat dikatakan investor institusi indonesia lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, dan belum fokus pada keuntungan jangka panjang.

Keterbatasan dan implikasi berikutnya

Beberapa keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini antara lain :

- Terdapatnya unsur subjektifitas dalam menentukan indeks pengungkapan, dimana tidak adanya suatu ketentuan baku dalam penentuan standar, sehingga nilai pengungkapan yang diperoleh dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.
- Sampel penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk setiap perusahaan di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan semua sektor dan menambah tahun pengamatan.
- Struktur kepemilikan hanya menggunakan proksi kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusi. Sebaiknya penelitian selanjutnya menambah proksi struktur kepemilikan, seperti kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Aguilera, R., Williams, C., Conley, J., and Rupp, D., 2007. Corporate governance and social responsibility a comparative analysis of the UK and the US corporate governance: an international review 14 (3), 147-158.
- Agustia, Dian. 2011. Effect of Good Corporate Governance to Social Responsibility at Finance, Trade, Services and Investment Registered at at Stock Exchange in Indonesia. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, 1(9)1250-1254.
- Anderson, R.C., Mansi, S.A., Reeb, D.M., 2003. Founding family ownership and the agency cost of debt. *Journal of Financial Economics*, 68, 263-285.
- Angraini. 2006. *Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)*. Paper presented at the Seminar Nasional Akuntansi 9.
- Barnea, A., and Rubin, A. (2010). Corporate social responsibility as a conflict between shareholders. *Journal of Business Ethics*, 97, 71-86.
- Budimanta et al., 2004. “*Corporate social responsibility : Jawaban bagi model pembangunan indonesia masa kini*”. Indonesia Center for Sustainable Development. Hal 67-85.
- Coffey, B. S., & Fryxell, G. E. 1991. Institutional ownership of stock and dimensions of corporate social performance: an empirical examination. *Journal of business ethics*, vol.10, no.6, 437-447.
- Corporate Watch Report. 2006. “*Whats wrong with corporate social responsibility?*”. www.corporatewatch.org.
- Dian Agustia. 2011. Effect of Good Corporate Governance to Social Responsibility at Finance, Trade, Services

- and Investment Registered at at Stock Exchange in Indonesia. *J. Basic. Appl. Sci. Res.*, 1(9)1250-1254, 2011
- Crisostomo et al. 2010. Corporate Social Responsibility, Firm Value and Financial Performance in Brazil *Social Responsibility Journal*, Vol. 7, No. 2, pp. 295-309.
- Fauzi, H., Mahoney, L., and Rahman. 2007. Institutional Ownership and Corporate Social Performance: Empirical Evidence from Indonesian Companies. *Issues in Social and Environmental Accounting* Vol. 1, No. 2 December 2007 Pp 334-347.
- Febrina, dan Suaryana. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan manufaktur di BEI. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh.
- Ferris, G.R., Perrewe, P.L., Ranft, A.L., Zinko, R., Stroner, J.S., Brouer, R.L., Laird, M.D., 2007. Human resource reputation and effectiveness. *Human resource management review* 17, 117-130.
- Gamerschlag, R., Moller, K., & Verbeeten, F. 2011. Determinants of Voluntary CSR Disclosure: Empirical Evidence from Germany. *Journal of Management Science* 5, 233-262.
- Griner, E.H., Gordon, L.A., 1995. Internal cash flow, insider ownership, and capital expenditures : a test of the pecking order and managerial hypothesis. *Journal of business finance & Accounting* 22 (2), 306-686.
- Hackston, D., and Milne, D.M. 1996. Some determinant of social and environmental disclosures in the new zealand companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol.9 No.1, 77-108.
- Hanggarwati, konny. 2013. Analisis pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap institutional ownership : studi empiris pada perusahaan high profile yang listing di BEI tahun 2010-2011. Skripsi universitas diponegoro semarang.
- Hilman J., dan Keim, D. 2001. Shareholder value, stakeholder management, and social issues: whats the bottom line?. *Strategic Management Journal*, 22: 125-139.
- Hirshleifer, D. 1993. Managerial reputation and corporate investment decisions. *Financial Management* 22(2), 146-150.
- Hoskisson, R. E., Hitt, M. A., Johnson, R. A., and Grossman, W., 2002. Conflicting voices: the effects of institutional ownership heterogeneity and internal governance on corporate innovation strategies. *Academy of management journal*. 45, 697-716.
- Jabbarzadeh, K., Rahimi, R., dan Shavalizadeh, A. 2012. Corporate Governance Mechanisms and Corporate Social Responsibility (CSR): Evidence from Tehran Stock Exchange. *Middle-East Journal of Scientific Research* 11 (5): 575-582.
- Jamali, D.,Asem M.S., and Myriam. 2008. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Synergies and interrelationships. *Corporate Governance*. 16(5),443-459.
- Jensen, M. C., and Meckling, W. H., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. 3,305-360.
- Jia, M., Zang Z. 2012. Managerial Ownership and Corporate Social Performance: Evidence from Privately Owned Chinese Firms' Response to the Sichuan Earthquake. Article first published online: 23 APR 2012, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. John Wiley & Sons.
- Johnson, R. A., and Greening, D. W., 1999. The effect of corporate governance and institutional ownership on corporate social performance. *Academy of Management Journal*. 42, 564-576.
- Khan, A., Muttakin, M., Siddiqui, J. 2012. Corpororate governance and corporate social responsibility : evidence from emerging economy. Draft. University of Manchester, UK.
- Li, D., Moshirian, F., Kien pham, P., dan Zein, J., 2006. When financial institutions are large shareholders : the role of macro corporate governance environments. *Journal of finance*, 61(6), 2975-3007.
- Lucyanda J., dan Siagian. 2012, The Influence of Company Characteristics Toward Corporate Social Responsibility Disclosure. *The 2012 International Conference on Business and Management*. 6 – 7 September 2012, Phuket – Thailand.
- Mahoney L., and Roberts, R. 2007. Corporate social and environmental performance and their relation to financial performance and institutional ownership: empirical evidence on canadian firms, with robin roberts. *Accounting Forum*, Vol.31, no.3, 233-253.

- Machmud, N., & Djakman, C. D. (2008). *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006*. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Retno, R., & Priantinah, D. 2012. Pengaruh good corporate governance dan pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan: studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2007-2010. *Jurnal Nominal / Volume I Nomor I / Tahun 2012*.
- Rosmasita, H . 2007 . “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) . Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta.
- Rustiarini, N. W. 2011. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 104-119.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial : studi empiris pada perusahaan yang tercatat di bursa efek jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. 15-16 September 2005, Solo.
- Saleh, M., Zulkifli, N., Muhamad, R., 2010. Corporate social responsibility disclosure and its relation in institutional ownership : evidence from public listed companies in Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, Vol.25, No. 6, 591-613.
- Sofyaningsih, S., dan Hardiningsih, P. 2011. Struktur kepemilikan, kebijakan deviden, kebijakan utang, dan nilai perusahaan. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Mei 2011, Hal: 68 – 87.
- Soliman, M. M., El Din, M., and Sakr, A. 2012. Ownership structure and corporate social responsibility (CSR): an empirical study of the listed companies in egypt 2012. *The international journal of social science*. Vol 5 no.1.
- Sudarno, 2005. “*Hubungan size dan profitabilitas perusahaan dengan pengungkapam informasi lingkungan dan perbedaan pengungkapan berdasarkan tipe industri*”. Thesis, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Susanti dan Riharjo. 2013. Pengaruh good corporate governance terhadap corporate social responsibility pada perusahaan cosmetics and household. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi vol.1 no.1, Januari 2013*.
- Teoh, H.Y., and Shiu, G.Y.1990. Attitudes towards corporate social responsibility and perceived importance of social responsibility information characteristics in a decision context. *Journal of business ethics*, Vol.9 No.1, 71-77.
- Uwuigbe, Uwalomwa.2011. An Examination of the Relationship between Management Ownership and Corporate Social Responsibility Disclosure: A Study of Selected Firms in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting* www.iiste.org ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol 2, No 6, 2011.
- Villalonga, B. R.Amit. 2006. How do family Ownership, control and management effect firm value?. *Journal of Financial Economics* 80(2), 385-417.
- Waddock, S. A., and Graves, S. B., 1997. The corporate social performance- financial performance link. *Strategic management journal*. 18, 303-319.

Lampiran

Tabel 3.1
Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 atau 2011	133
Perusahaan yang laporan keuangan 2010 atau 2011 tidak tersedia lengkap	54
Perusahaan yang tidak laporan tahunan atau laporan CSR tidak tersedia lengkap	0
Total sampel yang dipakai tahun 2010 atau 2011	79

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSRDI	158	,064103	,538462	,27069133	,095084694
MANJ	158	,000000	,700000	,03437342	,098451466
INST	158	,000000	,991400	,72397658	,192915407
SIZE	158	23,188590	32,664858	27,71675359	1,594378315
LEV	158	-10,340681	27,977062	1,09645336	2,737210187
IND	158	0	1	,52	,501
Valid N (listwise)	158				

Sumber : spss 20

Tabel 4.2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		158
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,08244055
Most Extreme Differences	Absolute	,061
	Positive	,061
	Negative	-,038
Kolmogorov-Smirnov Z		,765
Asymp. Sig. (2-tailed)		,601

a. Test distribution is Normal.

Tabel 4.3
Uji Multicolinearity
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,583	,125		-4,651	,000		
INST	,042	,041	,086	1,045	,298	,730	1,369
MANJ	,199	,081	,206	2,455	,015	,703	1,423
SIZE	,029	,004	,487	6,744	,000	,948	1,055
LEV	,001	,002	,024	,337	,736	,984	1,016
IND	,018	,013	,096	1,358	,177	,985	1,015

a. Dependent Variable: CSRDI

Tabel 4.4
Uji Heterodaksitas
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,498 ^a	,248	,224	,083785510	1,814

a. Predictors: (Constant), IND, INST, SIZE, LEV, MANJ

b. Dependent Variable: CSRDI

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,012	,074		,156	,876
INST	,010	,024	,040	,430	,668
MANJ	-,032	,048	-,064	-,673	,502
SIZE	,001	,003	,046	,568	,571
LEV	,000	,001	,024	,300	,765
IND	,014	,008	,137	1,710	,089

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Tabel 4.6
Determinasi R square
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,498 ^a	,248	,224	,083785510

a. Predictors: (Constant), IND, INST, SIZE, LEV, MANJ

Tabel 4.7
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,352	5	,070	10,040	,000 ^b
Residual	1,067	152	,007		
Total	1,419	157			

a. Dependent Variable: CSRDI

b. Predictors: (Constant), IND, INST, SIZE, LEV, MANJ

Tabel 4.8
Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,583	,125		-4,651	,000
MANJ	,199	,081	,206	2,455	,015
INST	,042	,041	,086	1,045	,298
SIZE	,029	,004	,487	6,744	,000
LEV	,001	,002	,024	,337	,736
IND	,018	,013	,096	1,358	,177

a. Dependent Variable: CSRDI

Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Revisian Keyakinan Pengguna Untuk Penilaian Prospek Sekuritas Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

MF. ARROZI ADHIKARA*
Universitas Esa Unggul Jakarta

MASLICHAH
NUR DIANA
Universitas Islam Malang

Abstract: *The issue of this research examines of decision-making is not purely speculative and mass behavior but focuses evaluating financial statements information that is useful in gaining the knowledge and beliefs to make revisions in the decision-making stock prospects.*

The research objective is to obtain empirical evidence about the usefull of accounting information qualitative able to belief revision stock selection for the company's prospects in Indonesia Stock Exchange. The implication is maximization utility.

The study design was explanatory causality that describe the behavior of a complex reaction as statements of opinion, attitudes, experiences, or characteristics of individu. Retrieval of data using the survey method. The data source is primary. Time dimension is one shot study. Respondents are investment managers with the number 150. The unit of analysis is the individual. Sampling technique is simple random sampling. Data analysis using Structural Equation Modeling with AMOS program.

The results showed a positive influence between the usefull of accounting information to revise of beliefs and preferences of return; there is positive between the usefull of price information to the revise of beliefs and preferences of return; there is positive systematis risk to the usefull of pricing information, and positive influence between belief revision and preference return. These results also indicate a negative effect of the usefull of accounting information to the unsystematic risk; negative influence between systematic risk on belief revision, as well as the negative effect of unsystematic risk on belief revision. Unsystematic risk variables and revision of beliefs are intervening or mediating variable because it is increasing the influence and relationships between variables. While the usefull of pricing information rather than as a mediating, because it lowers the influence between variables.

The findings of the study is accounting information useful and have value in decision making. Investment manager be sophisticate, rational, prudent, and have risk preferences that can make a positive contribution in the advisory to investors.

Keywords: *Usefulnes Accounting Information, Perception of Unsystematic Risk, Perception of Systematic Risk, Beliefs Revision, Usefulness of Price, Return Preference.*

* Corresponding author: arrozi@esaunggul.ac.id

1. Pendahuluan

Penilaian sekuritas di bursa efek mencerminkan perhatian terhadap seluruh informasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan untuk pengambilan keputusan investasi. Pelaku pasar menangkap informasi, melakukan telaah, analisis, interpretasi serta melakukan pengambilan keputusan rasional untuk memaksimalkan utilitas (Scott, 2009; Arrozi, 2011, 2011a, 2012). Disamping itu, informasi digunakan untuk revisi saham dalam rangka menaikkan *price volatility* dalam proses transaksi perdagangan. Revisi saham dilakukan karena saham mewakili nilai dan prospek perusahaan, berada pada lingkungan yang *uncertainty*, dan merupakan instrumen keuangan yang bersifat *risky assets*. Oleh karenanya, pelaku pasar meminta perlindungan dari risiko dan pasar modal mewujudkannya melalui *efisiensi pasar* (Fama, 1970; Zamahsari, 1990; Hartono, 2005).

Bagi manajer investasi, informasi merupakan *signals* yang berfungsi sebagai *stimulus* bagi keyakinan karena mempengaruhi proses *cognitive* (Bruns, 1968). Melalui pusat pemahaman pemrosesan informasi dari *cognitive* terjadi proses revisi keyakinan. Sehingga, *signal* informasi dapat dianggap sebagai *good news* atau *bad news*. Manifestasi *good news* dan *bad news* adalah wujud dari persepsi *expected values* dan *risk* serta menunjukkan *attention* pada penentuan perubahan keyakinan dan pengambilan keputusan investasi (Hogarth dan Einhorn's, 1992). Proses ini ditunjukkan melalui prospek penilaian saham, revisi keyakinan, perilaku rasional, sikap terhadap preferensi *risk* saham, dan maksimalisasi utilitas (Scot, 2009; Arrozi, 2011a, 2012).

Revisi keyakinan menunjukkan penilaian terhadap *value of the firm* yang tercermin di dalam harga saham. Manajer investasi memproses seluruh informasi secara *prudent*, *professional*, *high control*, dan rasional dengan mendasarkan pada aspek fundamental dan teknikal, serta perhatian pada resiko. Jika harga saham meningkat, saham perusahaan dianggap mempunyai prospek. Implikasinya, investor akan mendapatkan keuntungan dalam

bentuk *capital gain* jika saham tersebut dijual, atau dipegang untuk mendapatkan deviden, atau mendapatkan keuntungan keduanya.

Human information processing pada manajer investasi bersifat relatif karena tergantung pada pengelolaan saham, serta kecenderungan pelaku bersikap fanatik pada suatu saham yang berbeda preferensi dengan pelaku lain. Disisi lain, pandangan analisa saham dan intuisi pelaku dapat mempengaruhi pandangan pelaku lain yang berimplikasi pada pemilihan saham. Proses ini menunjukkan pelaku lain menganalisa informasi tetapi mempunyai kemampuan kognitif terbatas dalam interpretasi informasi yang mereka terima (Bruns, 1968; Arrozi, 2011). Sehingga pelaku bertindak *naive*, *irrasional*, dan *unsophisticated*. Pelaku kehilangan rasionalitas kolektif karena penentuan harga dalam komoditas perdagangan saham merupakan manifestasi dari faktor psikologis dan emosi pelaku. Akibatnya, pelaku mengalami penyesatan dalam revisi keyakinan awal tentang *expected values*, pengambilan keputusan rasional, serta kesalahan prediksi pada lingkungan keuangan.

Motivasi penelitian adalah, *pertama*, masih sedikitnya isu riset ini dalam akuntansi keperilakuan di pasar modal. BEI sebagai *emerging market*, pengambilan keputusan bersifat spekulatif dan *mass behaviour*. Sedangkan, pengambilan keputusan di bidang akuntansi dan keuangan memfokuskan pengevaluasian informasi laporan keuangan melalui analisis fundamental. *Kedua*, revisi keyakinan pada pengambilan keputusan prospek saham adalah pertimbangan obyektif dari ukuran pelaku pasar melalui fundamental perusahaan dan aspek teknikal. *Ketiga*, pertimbangan aspek akuntansi dengan mempertimbangkan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang berguna dalam memperoleh pengetahuan. Pengetahuan akan memberi keyakinan untuk melakukan revisi dan mempersepsikan risiko. *Keempat*, ketidakkonsistenan hasil hubungan simultan antara manfaat informasi akuntansi, manfaat informasi harga, persepsi risiko, revisi keyakinan, dan preferensi return.

Tujuan penelitian adalah mengkaji dan memperoleh bukti empiris tentang manfaat kualitatif informasi akuntansi mampu melakukan revisi keyakinan pemilihan saham (*beliefs revision*) untuk prospek perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Implikasinya adalah maskimalisasi utilitas.

2. Rerangka Teoretis Dan Pengembangan Hipotesis

2.1. *Decision Usefulness Approach*

Decision usefulness memegang peranan penting dalam pengidentifikasian laporan keuangan dan pemilihan informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi terbaik. Konsekuensinya adalah informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan nilai manfaat kepada penggunanya. Akuntan sebagai penyaji informasi menjadikan laporan keuangan bermanfaat dengan mengetahui makna manfaat dari informasi yang disajikan, dan memahami kebutuhan informasi pengguna dengan mengetahui masalah keputusan yang dihadapi pengguna laporan keuangan. Akuntan akan menyesuaikan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan kebutuhan pengguna sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dengan cara ini, *decision usefulness* membuat informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi lebih bermanfaat (Scott, 2009; Henderson *et al.*, 2004:11-12).

Asumsi *decision usefulness* adalah individu rasional dalam mengambil suatu keputusan untuk memaksimalkan ekpektasi dan kepuasan. Ketika individu berfikir rasional, maka tercipta pasar yang efisien. Pada kondisi pasar yang efisien, keberadaan informasi akuntansi dengan pengungkapan penuh (*full disclosure*) dibutuhkan sekali. Karena pasar memerlukan informasi akuntansi yang lengkap, maka informasi akuntansi dipandang sebagai perspektif informasi, serta laporan keuangan berguna untuk keputusan ekonomi (IAI, 2012). Peranan akuntansi keuangan adalah menyediakan "*level playing field*" melalui pengungkapan

penuh tentang informasi yang relevan, *reliable*, dan *cost effective information* untuk investor dan pengguna informasi lainnya (Scott, 2009). Akuntansi keuangan harus bisa membantu investor untuk membuat keputusan ekonomi.

2.2. *Beliefs Revision*

Beliefs adalah *the critical component in the decision making process*. Artinya, komponen yang mengupas secara kritis dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat keyakinan menentukan perilaku pengambilan keputusan (Beaver, 1989). Peran informasi adalah merubah keyakinan. Perilaku pengambilan keputusan berubah ketika informasi yang baru merubah keyakinan. Keyakinan investor tidak tampak. Harga saham dipandang sebagai penampakan kesetimbangan keyakinan investor.

Revisi keyakinan memberikan pertimbangan prediksi perilaku investor dalam merespon informasi laporan keuangan (Scott, 2009), yaitu, **pertama**, Investor mempunyai keyakinan awal tentang *return* dan *risk* saham perusahaan yang diharapkan. Keyakinan ini didasarkan pada informasi yang tersedia di pasar, yang meliputi harga pasar sebelum *current net income* perusahaan diterbitkan. Meskipun mendasarkan pada informasi yang tersedia di pasar, tetapi keyakinan tidak sama karena perbedaan penempatan informasi dan kemampuan interpretasi. **Kedua**, setelah penerbitan *net income* tahun berjalan, investor lebih tahu dengan menganalisa angka *income*. Misalnya, jika *net income* lebih tinggi dari yang diharapkan, maka menjadi *good news*. **Ketiga**, Investor yang telah merevisi kepercayaan mengenai profitabilitas *return* di masa datang lebih tinggi, cenderung membeli saham perusahaan dengan harga pasar saat ini.

2.3. Persepsi Risiko

Persepsi merupakan pandangan individu dalam memahami obyek atau peristiwa melalui pancaindera yang diperoleh dari pengalaman tentang obyek atau peristiwa dengan menyimpulkan informasi serta menafsirkan pesan. Persepsi bersifat subyektif dan situasional

karena obyek tergantung pada kerangka ruang dan waktu. Sehingga persepsi individu terhadap obyek memiliki perbedaan dengan persepsi individu lain terhadap obyek yang sama (Matlin, 1998:57; Robbins, 1996:45). Syarat untuk memenuhi persepsi adalah, adanya obyek yang dipersepsikan (fisik), alat untuk menerima stimulus berupa alat indra (fisiologis), serta perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi (Walgito, 1997:36)

Risiko investasi mempunyai pengertian, yaitu penyimpangan dari keuntungan yang diharapkan. Risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan dari *outcome* yang diterima dengan yang diekspektasi (Hartono, 2008:214). Bentuk risiko yang akan diterima investor adalah kerugian penurunan kurs saham dan obligasi, gagal menerima deviden tunai, gagal menerima pokok obligasi karena emiten dinyatakan pailit, dan saham tidak laku dijual karena emiten dikeluarkan dari bursa efek. Jenis resiko investasi dikelompokkan dalam dua kelompok (Jones, 2006:142), yaitu:

1. Risiko sistematis/*systematic risk/undiversifiable risk*

Merupakan risiko pasar yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi oleh portfolio. Nilai suatu portfolio yang terdiversifikasi dengan baik akan berfluktuasi terhadap perubahan dalam hasil pengembalian pasar. Misal, kenaikan inflasi yang tajam, resesi, kenaikan tingkat bunga, dan siklus ekonomi. Untuk mengurangi risiko, pelaku pasar melakukan lindung nilai (*hedging*) di *futures market* atau *option market*.

2. Risiko tidak sistematis/*unsystematic risk/diversifiable risk*

Merupakan risiko spesifik bagi masing-masing perusahaan. Hal ini mencakup kebijakan dan keputusan strategik, operasi, dan keuangan perusahaan. Risiko ini berbeda di antara berbagai perusahaan sehingga memfokuskan pada dampak spesifik terhadap saham atau sektor tertentu. Contoh, peraturan pemerintah melarang ekspor atau impor semen yang mempengaruhi harga saham emiten yang menghasilkan produk semen, properti, atau produk lain yang menggunakan bahan semen. Untuk mengurangi kerugian, pelaku pasar

berinvestasi pada berbagai jenis saham dari bermacam sektor. Jika salah satu jenis saham merugi masih ada saham lain yang untung.

Riset akuntansi menyatakan bahwa informasi akuntansi penting digunakan oleh investor individu untuk menilai resiko dan membuat keputusan investasi. Informasi akuntansi menyediakan fundamental risiko keuangan yang diukur dengan *dividen payout ratio*, *current ratio*, *asset size*, *asset growth*, *leverage*, *variability in earnings*, *covariability in earnings*, dan *capital structure* (Beaver, 1989:125; Selva, 2004) untuk menunjukkan kinerja buruk, kesulitan keuangan, dan perusahaan tidak berprospek sehingga mempengaruhi penurunan nilai perusahaan. Sehingga, persepsi risiko dinyatakan sebagai pandangan individu mengenai fundamental risiko keuangan yang mempengaruhi harga saham perusahaan.

Koonce *et al.* (2004) mendefinisikan persepsi risiko sebagai pandangan individu mengenai seberapa besar kemungkinan dirinya mengalami paparan risiko keuangan atas penggunaan laporan keuangan. Persepsi risiko ini merupakan model terintegrasi yang menggabungkan karakteristik risiko keperilakuan dengan risiko dalam teori *standar deviasi* (probabilitas dan nilai harapan) yang berhubungan dengan *losses* dan *gains*. Premis penelitian adalah persepsi pengguna laporan keuangan lebih baik dipahami dan dijelaskan dengan memasukkan karakteristik risiko keperilakuan. Indikator model terintegrasi untuk risiko keperilakuan adalah kekhawatiran (*worry*), tidak dapat dikendalikan (*loss control*), mengetahui (*known*), potensi terjadi (*catastrophic potential*). Sedangkan, indikator resiko keuangan adalah *loss outcome*, *probability loss*, dan *gain outcome*. Penggabungan model ini mendapatkan dukungan empiris dari ke dua karakteristik risiko (Ricciardi, 2004:56).

2.4. Preferensi

Preferensi diartikan sebagai pilihan dan pengambilan keputusan yang mempunyai esensi rasional dengan perilaku maksud tertentu (Slovic, 1995). Hirshleifer dan Glazer (1992)

menyajikan gambaran yang ideal dari preferensi individu atas alternatif barang-barang konsumsi dalam dua hukum atau *revealed preference*, yaitu:

- a. **Aksioma Perbandingan**, yaitu setiap dua barang yang berbeda antara A dan B dapat dibandingkan semacam preferensi oleh individu. Setiap perbandingan pasti mengarah pada salah satu diantara ketiga hal berikut ini yaitu barang A lebih disukai dari barang B atau barang B lebih disukai dari barang A atau barang A dan B sama-sama disukai.
- b. **Aksioma Transitivitas**, yaitu apabila ada 3 barang A, B, dan C. Barang A lebih disukai daripada barang B dan barang B lebih disukai daripada barang C, maka tentu barang A lebih disukai daripada barang C.

Model asumsi mengenai preferensi investor (Markowitz, 1952) hanya didasarkan pada *expected return* dan *risk* dari portofolio yang secara implisit menganggap investor mempunyai fungsi utilitas yang sama. Tetapi pada kenyataannya tiap-tiap investor mempunyai fungsi utilitas yang berbeda. Jika preferensi investor terhadap portofolio berbeda karena investor mempunyai fungsi utilitas yang berbeda, portofolio optimal untuk masing-masing investor akan dapat berbeda. Model Markowitz tidak mempertimbangkan hal ini, karena fokusnya terletak pada nilai portofolio dengan resiko terkecil untuk *expected return* tertentu. Tetapi preferensi investor berbeda-beda. Investor yang *risk averse* akan memilih sesuai tanggapan model Markowitz, sedangkan investor yang *risk seeker* akan memilih resiko yang tinggi dengan implikasi akan mendapatkan *return* yang tinggi pula. Pemilihan portofolio sesuai dengan preferensi investor merupakan portofolio yang efisien yang masih berada di *efficient set*. Portofolio mana yang akan dipilih oleh investor tergantung dari fungsi utilitasnya masing-masing. Portofolio optimal untuk tiap-tiap investor terletak pada titik persinggungan antara fungsi utilitas investor dengan *efficient set*.

Berdasarkan preferensi, investor menggunakan aksioma dalam proses pengambilan keputusan investasi berdasarkan model utilitas yang diharapkan dan mendasari pemilihan

investasi pada portofolio dalam konteks *mean-variance model* (Husnan, 1999). Tujuannya untuk memaksimalkan indeks utilitas yang diharapkan pada income (*discounted interest rate*). Penyusunan fungsi utilitas digunakan untuk memilih investasi yang mempunyai unsur ketidakpastian. Investor akan memilih investasi berdasarkan *return* yang diharapkan pada tingkat yang maksimal atau tinggi. Investor yang satu dengan investor yang lain mungkin mempunyai fungsi utilitas yang berbeda, dan karenanya bisa memilih kesempatan investasi yang berbeda atautkah sama. Fungsi utilitas tersebut bersifat individual, artinya bisa berbeda antara pemodal yang satu dengan pemodal lainnya. Utilitas investor berbeda satu sama lain pada tingkat resiko yang sama, tetapi investor lebih menyukai untuk memilih tingkat utilitas pada *return* yang lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan preferensi risiko bagi investor.

2.5. Hasil Penelitian Terdahulu

Revisi keyakinan merupakan persepsi pengguna terhadap informasi akuntansi yang memotivasinya untuk merubah keyakinan awal (Scott, 2009; Hogart *and* Einhorn's, 1992; Arrozi, 2011a). Penelitian ini menggunakan indikator kandungan informasi kinerja, prospek, dan deviden, serta memprediksikan revisi keyakinan berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan pengambilan keputusan.

Pengguna menyikapi ketidakpastian lingkungan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk mempredikasi lingkungan secara akurat. Karena saham terpengaruh risiko pasar maka informasi eksternal harus dikuasai penuh untuk meminimalisasi keadaan yang dapat membuat saham perusahaan menjadi *loss*. Pengendalian dan perencanaan pengguna dilakukan untuk reposisi saham sehingga terdapat saham yang dilepas dan saham yang tetap dipilih. Akibatnya niat untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan saham menjadi tinggi. Hasil ini merupakan studi Tim BEJ (1997), Luo (1999), Kim *and* Lim (1988), dan Arrozi (2011).

Manfaat informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap preferensi return ditunjukkan oleh hasil studi Banker *et al.* (1993), Stainbank *and* Peebles (2006), Eipsten (1975), serta Chen *and* Hsu (2005). Pengguna tidak mempunyai keyakinan tentang manfaat informasi akuntansi menghasilkan preferensi return. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan interpretasi informasi akuntansi secara *sophisticated* sehingga informasi tidak bernilai ekonomis dan pengambilan keputusan terhadap saham perusahaan menjadi salah. Implikasinya harapan *return* yang diinginkan tidak tercapai.

Hasil studi Eipsten (1975) serta Chen *and* Hsu (2005) membuktikan bahwa manfaat informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap revisi keyakinan. Informasi *company news* dan *advice* memberikan sumbangan lebih tinggi daripada informasi laporan keuangan dalam mengubah keyakinan dan tindakan investor. Hal ini mengindikasikan pengguna bertindak *naive* karena tidak dapat memanfaatkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi akuntansi sehingga tidak berguna dalam proses pengambilan keputusan.

Studi Lambert *and* Verrechia (2005) dan Ferris *et al.* (1990) tidak memberikan sikap positif atau negatif terhadap saham perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna mengurangi ketergantungan pada kinerja perusahaan karena kurang pentingnya ukuran risiko akuntansi dan cenderung melakukan perdagangan spekulatif. Sedangkan hasil studi Beaver *et al.* (1970), Lee (1999), Koonce *et al.* (2004), Capstaff (1992), Arrozi (2011,2012) menunjukkan pengguna mengendalikan risiko *unsystematis* dengan diversifikasi saham dari variasi jenis perusahaan, industri, dan komposisi. Sehingga pengguna mengambil sikap terhadap resiko berdasarkan preferensi risikonya, yaitu: *risk averter*, *risk seeker*, atau *risk neutral*.

2.6. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan teori dan hasil studi empiris yang telah dibahas sebelumnya, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

- H₁** : *Manfaat informasi akuntansi berpengaruh terhadap revisi keyakinan.*
- H₂** : *Manfaat informasi harga berpengaruh terhadap revisi keyakinan.*
- H₃** : *Manfaat informasi akuntansi berpengaruh terhadap risiko unsystematic.*
- H₄** : *Resiko sistematis berpengaruh terhadap revisi keyakinan.*
- H₅** : *Resiko systematis berpengaruh terhadap manfaat informasi harga.*
- H₆** : *Resiko unsystematis berpengaruh terhadap revisi keyakinan.*
- H₇** : *Manfaat informasi harga berpengaruh terhadap preferensi return.*
- H₈** : *Manfaat informasi akuntansi berpengaruh terhadap preferensi return.*
- H₉** : *Revisi keyakinan berpengaruh terhadap preferensi return.*

3. Metode Penelitian

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatoris-kausalitas dan menjelaskan fenomena revisi keyakinan dalam pengambilan keputusan. Jenis data adalah primer. Metode pengumpulan data adalah survei. Data penelitian berupa data subyek manajer investasi yang menyatakan opini, sikap, justifikasi, pengalaman, atau karakteristik subyek dalam pengambilan keputusan. Responden penelitian adalah manajer investasi. Unit analisis adalah individu.

3.2. Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Penarikan Sampel

Populasi penelitian ini adalah manajer investasi perusahaan sekuritas dan merupakan anggota Asosiasi Manajer Investasi. Besar jumlah sampel dalam estimasi yang menggunakan *maximum likelihood* (ML) adalah berjumlah 100 – 200 (Augusty, 2002). Unit analisis adalah individu Manajer Investasi. Penarikan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan teknik *simple random sampling*.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Variabel eksogen atau independen yaitu variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu: manfaat informasi akuntansi (X1) dan persepsi risiko *systematic* (X2).
- b. Variabel endogen adalah faktor yang dipengaruhi oleh satu atau beberapa eksogen dan endogen lainnya. Variabel ini terdiri dari variabel dependen dan intervening. Variabel intervening adalah persepsi risiko *unsystematic* (Y1), manfaat informasi harga (Y2), serta revisi keyakinan (Y3). Sedangkan variabel dependen adalah preferensi return (Y4).

3.4. Definisi Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan identifikasi variabel, maka definisi operasional variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1. Manfaat Informasi Akuntansi (X1)

Manfaat informasi akuntansi adalah derajat afek positif atau negatif yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan manajer investasi terhadap kualitas informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Instrumen untuk mengukur manfaat informasi akuntansi dikembangkan oleh peneliti dari SAK (IAI, 2012), serta Ho and Wong (2005). Manfaat informasi akuntansi diidentifikasi melalui 5 variabel laten dan 15 variabel terukur, yaitu:

1. *Relevance* (IA1) terdiri dari tiga indikator, yakni prediktif, umpan balik, dan tepat waktu.
2. *Reliability* (IA2) terdiri dari tiga indikator, yakni dapat diperiksa/keterujian, Ketepatan penyimbolan, dan netral.
3. Kualitas Sekunder (IA3) terdiri dari tiga indikator, yakni Komparatif, Konsistensi, dan Mudah dipahami.
4. Keterbatasan (IA4) terdiri dari dua indikator, yakni Biaya dan manfaat, Materialitas.
5. Kinerja (IA5) terdiri dari dua indikator, yakni kinerja jangka pendek, dan prospek perusahaan.

Instrumen manfaat informasi akuntansi dikembangkan dengan menggunakan skala Likert. Skala ini untuk mengukur manfaat informasi dengan angka 1 menunjukkan informasi akuntansi sangat tidak bermanfaat, serta angka 5 menunjukkan informasi akuntansi sangat bermanfaat.

3.4.2. Persepsi Resiko *Systematic* (X2)

Resiko *systematic* dioperasionalkan sebagai persepsi manajer investasi tentang tidak dapat diprediksinya berbagai macam aspek lingkungan eksternal mereka secara akurat. Instrumen pengukur resiko *systematic* terdiri dari 5 pertanyaan yang diperoleh dengan memodifikasi instrumen yang disusun oleh Gordon *and* Narayanan (1984), serta Farid dan Siswanto (1998). Resiko *systematic* diidentifikasi melalui 5 indikator, yaitu: Ekonomi (RS1), Pemerintah (RS2), Politik (RS3), Pasar Keuangan(RS4), dan Tingkat bunga (RS5). Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Responden diminta menyatakan persepsinya dengan memilih satu nilai dalam skala 1 (sangat tidak dapat diprediksi) sampai skala 5 (sangat dapat diprediksi).

3.4.3. Persepsi Risiko *Unsystematic* (Y1)

Persepsi risiko merupakan pandangan manajer investasi tentang pos laporan keuangan yang dipertimbangkan terjadi potensi negatif atau *loss* dari hasil. Instrumen pengukur persepsi *Unsystematic risk* terdiri dari 7 indikator dikembangkan dari Koonce *et al.* (2004), yaitu:

- a. Laporan keuangan menunjukkan kesulitan keuangan (RU1).
- b. Kekhawatiran kondisi keuangan perusahaan (RU2).
- c. Kondisi keuangan tidak dapat dikendalikan (RU3).
- d. Hubungan risiko keuangan dengan waktu terjadinya (RU4).
- e. Probabilitas kerugian ekonomi laporan keuangan (RU5).
- f. Rugi yang saya prediksi akan terjadi pada perusahaan (RU6).

g. Risiko keuangan terjadi pada perusahaan (RU7).

Instrumen persepsi risiko dikembangkan dengan menggunakan skala Likert mulai dari skala 1 sampai dengan 5. Responden diminta memberi tanggapan dengan jawaban yang disediakan mulai sangat tidak berisiko (1) sampai dengan sangat berisiko (5).

3.4.4. Manfaat Informasi Harga (Y2)

Manfaat Informasi Harga adalah derajat afek positif atau negatif yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan manajer investasi terhadap kinerja harga saham yang bermanfaat dalam pemilihan saham. Instrumen pengukur informasi harga saham dikembangkan oleh peneliti dari Brunnermeier (2001) yang diidentifikasi melalui 4 variabel laten dan 11 indikator sebagai berikut:

- a. *Useful*: Harga saham bermanfaat memberi kandungan informasi, informasi pasar, dan informasi asimetri (IH1)
- b. *Relevan*: Harga saham bermanfaat memberi umpan balik, ketepatan harga, dan informasi estimasi harga (IH2)
- c. *Prediksi*: Harga saham bermanfaat memberi estimasi nilai, dan prediksi harga masa depan (IH3)
- d. *Penilaian*: Harga saham bermanfaat memberi informasi waktu jual, informasi waktu beli, dan informasi reposisi saham. (IH4)

Instrumen manfaat informasi harga dikembangkan dengan menggunakan skala Likert dengan angka 1 yang menunjukkan informasi harga saham sangat tidak bermanfaat, serta angka 5 menunjukkan informasi harga saham sangat bermanfaat.

3.4.5. Revisi Keyakinan (Y3)

Revisi keyakinan adalah keyakinan manajer investasi atas informasi yang memotivasi diri untuk merubah keyakinan awal. Instrumen pengukur revisi keyakinan dikembangkan dari Scott (2009) yang terdiri dari 6 indikator, yaitu:

- a. *Earnings* membawa berita (RK1)
- b. *Return* membawa kandungan informasi (RK2)
- c. *Deviden* membawa berita (RK3)
- d. *Deviden* membawa kandungan informasi (RK4)
- e. Kinerja *Price Earning Ratio* mengandung informasi positif (RK5)
- f. Kinerja mendorong perubahan kandidat (RK6)

Instrumen pengukuran revisi keyakinan dikembangkan dengan menggunakan skala Likert mulai dari angka 1 sampai dengan 5. Masing-masing pernyataan meminta responden memberi tanggapan mulai sangat tidak yakin (1) sampai dengan sangat yakin (5).

3.4.6. Preferensi *Return* (Y4)

Preferensi *return* adalah pilihan dan harapan manajer investasi untuk memperoleh keuntungan dalam pengambilan keputusan. Instrumen preferensi *return* dikembangkan dari Snelbecker *et al.* (1990) dan Arrozi (2012) melalui 5 indikator, yaitu:

- a. Pilihan memperoleh *return* yang tinggi dalam pemilihan saham (PR1).
- b. Pilihan memperoleh *return* saham melebihi *return* pasar (PR2).
- c. Pilihan memperoleh *return* saham melebihi tingkat bunga deposito (PR3).
- d. Pilihan memperoleh *return* saham optimal melalui revisi kinerja saham (PR4).
- e. Pilihan memperoleh *return* optimal sesuai keinginan investor (PR5).

Instrumen preferensi *return* dikembangkan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Responden diminta memberi tanggapan dengan alternatif jawaban mulai sangat tidak ingin dicapai dari angka 1 sampai dengan sangat ingin dicapai dari angka 5.

3.5. Analisis Data

Analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling*. Analisis ini merupakan pendekatan terintegrasi antara analisis faktor, model struktural, dan analisis jalur. Model *fit* harus memenuhi kriteria, yaitu: *Degree of Freedom* (DF) nilainya harus positif; Non signifikan *Chi-Square* harus diatas nilai yang disyaratkan ($p=0,05$) dan diatas batas konservatif yang diterima ($p=0,10$); Nilai *incremental fit* diatas 0,90 yaitu untuk GFI, TLI, dan NFI; Nilai RMR dan RMSEA yang terendah. Ringkasan indeks yang digunakan untuk kelayakan model penelitian pada Tabel 1.

TABEL 1.

3.6 Penentuan Model Revisi Keyakinan Penilaian Prospek Saham

Melakukan langkah-langkah penentuan revisi keyakinan dalam pengambilan keputusan yang rasional sebagai tujuan untuk memaksimalkan utilitasnya. Model penelitian terdapat pada gambar 1.

GAMBAR 1. MODEL PENELITIAN

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Data

4.1.1. Pengembalian Kuesioner

Data penelitian dikumpulkan melalui survei. Jumlah kuesioner yang dikirim sebanyak 200 lembar dan kembali sebanyak 182. Kuesioner yang bisa dipakai sejumlah 180. Tingkat tanggapan responden (*respon rate*) sebesar 91 %. Gambaran kuesioner terdapat pada Tabel 2.

TABEL 2

4.1.2. Demografi Responden

Demografi manajer investasi terdapat pada Tabel 3 yang menunjukkan karakteristik terbesar pada: usia 41-45; jenis kelamin pria; pendidikan S2; pendidikan pasar modal pada CFA; lama bekerja 11-15 tahun; dan sertifikasi pada manajer investasi (MI). Demografi responden terdapat pada Tabel 3.

TABEL 3

4.1.3. Uji Reliabilitas dan Validitas

Pengujian reliabilitas menggunakan *cronbach alpha* dengan hasil nilai antara 0,718 – 0,847 yang mempunyai nilai diatas 0,60 sehingga disimpulkan variabel penelitian adalah reliabel (Nunnally, 1978). Sedangkan pengujian validitas menggunakan faktor analisis

dengan nilai MSA antara 0,778 – 0,882 yang mempunyai nilai diatas 0,50 sehingga disimpulkan variabel penelitian valid (Kaiser dan Rice, 1974). Hasil pengujian reliabilitas dan validitas dalam variabel penelitian terdapat pada Tabel 4.

TABEL 4

4.1.4. Uji Kesesuaian Model (*Goodness-of-fit Test*)

Goodness-of-fit Test yang dihasilkan dalam penelitian ini terdapat pada Tabel 5 dan disimpulkan model dalam penelitian diterima. Hasil pengujian model tersebut terdapat pada tabel 5.

TABEL 5

4.1.5. Pengujian Hipotesis

Hasil analisa SEM menunjukkan pengujian H_1 sampai dengan 9 H_9 . Hipotesis 1 sampai dengan 9 diterima bila mempunyai signifikansi dibawah 0.05. Hasil pengujian menunjukkan penerimaan hipotesis 1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9. Penerimaan hipotesis terdapat pada tabel 6.

TABEL 6

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengujian Hipotesis 1: *Manfaat informasi akuntansi berpengaruh terhadap revisi keyakinan.*

Hasil pengujian dalam riset ini menunjukkan manfaat informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap revisi keyakinan dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa manajer investasi mempunyai derajat afek positif yang tinggi terhadap informasi akuntansi sehingga sikap untuk melakukan revisi keyakinan dari keyakinan sebelumnya juga tinggi. Sinyal informasi dalam laporan keuangan mampu membuat manajer investasi

melakukan perubahan atas keyakinan yang telah dipegang sebelumnya. Keyakinan sebelumnya tersebut berdasarkan informasi keuangan tentang suatu saham emiten bersangkutan yang tersedia di pasar. Pada saat laporan keuangan dipublikasikan, investor membaca, menelaah, menganalisa, dan menginterpretasikan laporan keuangan mempunyai sinyal *good news* ataukah *bad news*. Manajer investasi memanfaatkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan untuk melakukan penilaian kinerja dan prospek emiten sebagai informasi yang mempunyai kandungan informasi *good news* atau *bad news* dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa informasi akuntansi mempunyai kualitas informasi, dan mempunyai nilai bagi manajer investasi karena menambah keyakinan sehingga informasi dapat dimengerti, relevan, dan *reliable* bagi pengambilan keputusan. Implikasinya, laporan keuangan memberikan informasi yang mudah dipahami dalam analisis serta menghasilkan perubahan keyakinan manajer investasi. Sehingga, laporan keuangan memberikan *information usefulness* bagi manajer investasi dalam pengambilan keputusan (*decision usefulness*). Hasil ini mendukung studi Beaver (1989), Barberis dan Thaler (2003), Scott (2009), Easton dan Zmijewski (1989), Hogart dan Einhorn (1992), Stuerke (2005), dan Arrozi (2010).

4.2.2. Pengujian Hipotesis 2: *Manfaat informasi harga berpengaruh terhadap revisi keyakinan.*

Hipotesis 2 menunjukkan manfaat informasi harga berpengaruh positif terhadap revisi keyakinan. Informasi harga saham dianggap sebagai *signal* yang harus ditelaah sehingga merevisi keyakinan awal karena adanya kandungan informasi, nilai ekonomis, dan mencerminkan *value of the firm* bagi emiten bersangkutan. Implikasinya adalah harga saham emiten mengalami kenaikan atau penurunan dalam transaksi perdagangan. Hal ini menyebabkan manajer investasi melakukan pengambilan keputusan melalui revisi keyakinan dalam rangka memenuhi independen, integritas, *prudent*, dan menggunakan keahliannya

untuk menilai saham (Bapepam, 1996). Untuk memenuhi hal tersebut, maka manajer investasi mempunyai keyakinan awal mengenai kinerja saham tentang *return* dan *risk*. Revisi saham ini tergantung pada interpretasi secara *sophisticated* ataukah *naif* oleh manajer investasi yang mengakibatkan kinerja masing-masing saham emiten berubah, yang pada akhirnya merubah kandidat saham. Sehingga, akan terdapat saham yang tinggal karena kinerja bagus, dan terdapat saham yang keluar karena kinerjanya buruk. Implikasinya adalah menunjukkan derajat afek positif melalui penerimaan kandidat saham atau derajat afek negatif melalui penolakan saham kandidat. Hal ini merupakan keyakinan manajer investasi terhadap estimasi *return* serta estimasi kinerja saham. Tingkat keyakinan menentukan perilaku pengambilan keputusan. Peran informasi adalah merubah keyakinan. Perilaku pengambilan keputusan berubah ketika informasi yang baru merubah keyakinan. Keyakinan investor tidak tampak. Harga saham dipandang sebagai penampakan proses kesetimbangan keyakinan investor. Hasil ini mendukung penelitian dari Beaver (1989), Barberis dan Thaler (2003), Scott (2009), Easton dan Zmijewski (1989), Hogart dan Einhorn (1992), Stuerke (2005), dan Arrozi (2010).

4.2.3. Pengujian Hipotesis 3: *Manfaat informasi akuntansi berpengaruh terhadap risiko unsystematic.*

Temuan riset ini menunjukkan manfaat informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap persepsi risiko dengan arah negatif. Laporan keuangan memberikan kandungan informasi tentang risiko keuangan emiten sehingga memberi keyakinan saham perusahaan berisiko karena persepsi mengenai kondisi keuangan perusahaan menunjukkan probabilitas risiko dan prediksi keuangan yang mengkhawatirkan serta potensi terjadi bahaya pada saham yang bersangkutan. Dengan interpretasi risiko tersebut, maka ada pemahaman dalam *cognitive* manajer investasi untuk masing-masing saham emiten di bursa efek yang mengalami indikasi berisiko. Informasi akuntansi bermanfaat memberikan sinyal *bad news*

atau *good news* mengenai kondisi keuangan perusahaan berisiko ataukah tidak. Sehingga analisis dan interpretasi laporan keuangan menghasilkan potensi negatif atau positif dalam perkembangan bisnis perusahaan. Untuk mengurangi potensi risiko dan kerugian tersebut, manajer investasi akan menerbitkan analisis laporan emiten dan *advisory* sebagai bahan rekomendasi mengenai saham emiten yang berisiko dengan pandangan preferensi *risk seeker*, *risk averter*, dan *risk neutral*. Hasil penelitian memperkuat temuan sebelumnya oleh Beaver *et al.* (1970), McDonald dan Stehle (1975), Farelly *et al.* (1985), Capstaff (1992), Koonce *et al.* (2004), serta Arrozi (2010).

4.2.4. Pengujian Hipotesis 4: *Resiko sistematis berpengaruh terhadap revisi keyakinan.*

Hipotesis 4 menunjukkan risiko sistematis berpengaruh terhadap revisi keyakinan dengan arah negatif. Risiko sistematis dari pesaing, ekonomi, politik, pasar keuangan, dan tingkat bunga mampu melakukan perubahan pengurangan pada keyakinan manajer investasi dalam menilai prospek saham. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas dan prediksi kerugian akan terjadi pada perusahaan karena saham perusahaan berada dalam suatu industri atau sektor tertentu dalam suatu negara dan rentan terhadap konjungtur dan turbulensi perubahan dinamis. Sehingga, saham tersebut akan terkena dampak risiko pasar yang tidak dapat dihindari karena faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan menurunkan kinerja perusahaan-perusahaan di bidang industri yang terkait dengan keuangan, jasa, dan manufaktur. Hal ini dikarenakan lingkungan perusahaan dalam suatu industri akan menentukan stabilitas perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya, karena ditentukan oleh konjungtur ekonomi dalam suatu negara, kompetitor dalam pasar bursa, perhatian pelaku pasar terhadap saham perusahaan, dan regulasi pemerintah terhadap industri-industri tertentu. Dinamika pengaruh global dan *volatility* terhadap saham merupakan manifestasi *risk systematic* yang tidak mungkin dapat dihindari. Namun, manajer investasi dihindari ketidakpastian karena

kurangnya informasi yang baik dari eksternal sehingga kurang mampu merevisi keyakinan secara relevan atas prospek saham dengan situasi tersebut. Hasil riset ini mendukung studi Tim BEJ (1997), Luo (1999), McGhee dan Rubach (1996), Yeoh dan Jeong (1995), Gordon dan Narayanan (1984), serta Arrozi (2010).

4.2.5. Pengujian Hipotesis 5: *Risiko Systematic berpengaruh terhadap manfaat informasi harga.*

Hipotesis 5 menunjukkan bahwa risiko sistematis berpengaruh positif terhadap manfaat informasi harga. Persepsi manajer investasi yang positif terhadap persepsi informasi harga karena kandungan informasi harga saham yang membantu manajer investasi dalam kondisi *uncertainty* untuk melakukan penilaian, relevansi dalam pengambilan keputusan, dan mampu melakukan prediksi. Kemampuan manajer investasi tersebut untuk melakukan interpretasi harga karena informasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan. Pengetahuan *volatility*, *momentum*, dan dinamika perubahan harga yang dikuasai manajer investasi untuk meminimalisasi resiko pasar walaupun hal ini tidak dapat meniadakan dalam kondisi ketidakpastian lingkungan. Implikasinya manajer investasi cenderung melakukan bersikap *prudent* dan rasional dalam memutuskan tindakan risiko pengambilan keputusan pemilihan saham. Advisory pada manajer investasi adalah menghubungkan pengambilan keputusan dengan sikap preferensi *risk* dari investor. Hasil penelitian ini didukung studi Tim BEJ (1997), Luo (1999), serta Kim and Lim (1988).

4.2.6. Pengujian Hipotesis 6: *Risiko Unsystematic berpengaruh terhadap revisi keyakinan.*

Hipotesis 6 menunjukkan bahwa persepsi risiko *unsystematic* berpengaruh secara negatif terhadap revisi keyakinan. Persepsi risiko mencerminkan pandangan pengguna tentang potensi *loss* pada pos-pos laporan keuangan yang menunjukkan kondisi

mengkhawatirkan dari kinerja, prospek, dan nilai perusahaan. Sehingga manajer investasi akan melakukan evaluasi dan revisi kinerja dari saham emiten. Implikasinya, manajer investasi akan melakukan *adverse selection return*, yaitu penilaian dan pemilihan saham yang memiliki penyimpangan *return* yang merugikan lebih rendah daripada rata-rata *return* ukuran perusahaan yang sama. Manajer investasi meminimalisasi resiko pemilihan saham melalui perbandingan prospek perusahaan dalam industri atau sektor yang sama. Proses ini menunjukkan cara yang profesional, rasional, hati-hati (*prudent*), tidak menuruti kata hati, dan sabar dalam *volatility* harga saham perusahaan. Hasil studi memperkuat temuan Chen and Steiner (1990), Fletcher (2000), Daniel *et al.* (2001), serta Arrozi (2010).

4.2.7. Pengujian Hipotesis 7: Manfaat informasi harga berpengaruh terhadap preferensi *return*.

Hipotesis 7 menunjukkan manfaat informasi harga berpengaruh positif terhadap preferensi *return*. Hal ini menunjukkan manajer investasi memiliki sikap prediktif terhadap informasi harga saham di pasar modal untuk memperoleh preferensi *return* secara optimal dan mempunyai konsekuensi pada nilai perusahaan. Implikasinya, investor dapat mengharapkan dan merealisasikan harapan tersebut dalam bentuk *return capital gain* agar dapat tercapai secara optimal berdasarkan maksimalisasi utilitas dan preferensi preferensi *return*. Preferensi berubah karena berbagai macam pertimbangan (Scott, 2009:10; Wahlund and Gunnarsson, 1996). Salah satu pertimbangan adalah informasi harga saham yang menunjukkan harga terhadap kinerja jangka pendek pada *return capital gain*. Pelaku yang mempunyai preferensi preferensi *return* pada *capital gain* mengharapkan dapat menerima *return* tersebut atas hasil kinerja emiten selama jangka waktu yang pendek. Informasi harga saham memberi sinyal dan kandungan informasi, serta informasi harga saham bersifat *usefull* untuk memperoleh *capital gain* berdasarkan subyektifitas investor. Hasil mendukung studi

Beaver (1989), Ball dan Brown (1968), Beaver *et al.* (1979), Wahlund dan Gunnarsson (1996), serta Arrozi (2010).

4.2.8. Pengujian Hipotesis 8: *Manfaat informasi akuntansi berpengaruh terhadap preferensi return.*

Hipotesis 8 menunjukkan manfaat informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap revisi keyakinan. Manajer investasi melakukan telaah, analisis, dan interpretasi laporan keuangan sebagai sinyal *good news* atau *bad news*. Sehingga manajer investasi harus *sophisticated* dalam melakukan analisis secara sah untuk memperoleh preferensi return yang diinginkannya. Salah satu pertimbangan adalah informasi akuntansi yang menunjukkan manfaat informasi laporan keuangan terhadap kinerja jangka pendek pada deviden sebagai *return* yang dijanjikan, serta prospek emiten di masa datang. Pelaku yang mempunyai preferensi preferensi return pada deviden mengharapkan dapat menerima hasil kinerja emiten selama satu periode. Proses ini terjadi untuk mengetahui kinerja keuangan emiten bersangkutan sehingga informasi dapat dimengerti, relevan, dan *reliable* bagi pengambilan keputusan. Informasi ini mempunyai nilai bagi manajer investasi karena menambah keyakinan tentang harapan profitabilitas deviden. Manajer investasi menentukan harapan kinerja dari keuntungan deviden karena tipe fundamental bagi investor mensyaratkan kinerja emiten bagus sehingga menghasilkan deviden yang berprospek. Informasi akuntansi memberikan kandungan informasi dan memiliki manfaat untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan subyektifitasnya. Hasil ini mendukung studi studi Beaver (1989), Barberis dan Thaler (2003), Scott (2009), Easton dan Zmijewski (1989), Hogart dan Einhorn (1992), Stuerke (2005), dan Arrozi (2010).

4.2.9. Pengujian Hipotesis 9: *Revisi keyakinan berpengaruh terhadap preferensi return.*

Hipotesis 9 menunjukkan revisi keyakinan berpengaruh positif terhadap preferensi return. Manajer investasi memiliki keyakinan awal tentang saham memiliki prospek dan nilai ekonomis. Berdasarkan adanya informasi baru maka keyakinan awal direvisi yang tergantung pada interpretasi informasi yang diyakini sehingga kinerja saham emiten berubah. Keyakinan akan menentukan apakah informasi merupakan sinyal yang sah dan dapat dipercaya. Disamping itu, investasi sekuritas dipengaruhi oleh strategi investasi yang menunjukkan preferensi *return* yang diinginkan dan bervariasi antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain karena preferensi yang berbeda berdasarkan preferensi return. Terdapat pelaku menyukai deviden, atau *capital gain*, atau menekankan pada keduanya yaitu deviden dan *capital gain*. Preferensi tersebut bisa berubah karena keyakinan, pandangan orang, sikap pribadi, dan pertimbangan. Salah satu pertimbangan adalah informasi yang berasal dari informasi akuntansi dan informasi harga saham. Kedua informasi tersebut memberikan implikasi untuk memperoleh deviden, *capital gain*, ataukah keduanya. Hasil ini mendukung studi Wahlund and Gunnarsson (1996), Bruns (1968), Hunton and McEwen (1997), Arrozi (2010).

Berdasarkan Tabel 6 tentang pengaruh tidak langsung revisi keyakinan terhadap hubungan manfaat informasi akuntansi dengan preferensi *return* menunjukkan pengaruh tidak langsung sebesar 1,9501 lebih besar dari pengaruh langsung sebesar 1,7530. Pengaruh tidak langsung persepsi risiko *unsystematic* terhadap hubungan manfaat informasi akuntansi dengan revisi keyakinan menunjukkan pengaruh tidak langsung sebesar 1,4560 lebih besar dari pengaruh langsung sebesar 0,8746. Hal ini berarti bahwa revisi keyakinan dan risiko *unsystematic* meningkatkan pengaruh manfaat informasi akuntansi terhadap revisi keyakinan dan preferensi *return*. Hasil analisis membuktikan bahwa persepsi risiko *unsystematic* dan revisi keyakinan dapat memberikan peningkatan harapan *return* berupa deviden sebagai prospek keuntungan di masa datang dengan melakukan proses diversifikasi melalui *adverse*

selection return sehingga memberikan manfaat, prospek, dan nilai atas kandungan informasi akuntansi. Hal ini selaras dengan hasil studi Goodwin *et al.* (1986), Barth *et al.* (2001), Ball and Brown (1968), Snelbecker *et al.* (1990), Gordon (1962), Beaver (1989), Beaver *et al.* (1979), East (1993), serta arrozi (2010, 2011, 2012).

Sedangkan, pengaruh tidak langsung manfaat informasi harga terhadap hubungan persepsi resiko *systematic* dengan revisi keyakinan menunjukkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,1080 lebih kecil dari pengaruh langsung -0,8847. Hal ini berarti revisi keyakinan sebagai *intervening* menurunkan hubungan antara persepsi risiko *systematic* dengan revisi keyakinan dan terbukti terdapat pengaruh yang lemah dalam hubungan tersebut. Pengaruh tidak langsung terdapat pada Tabel 7.

TABEL 7

5. Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi

5.1. Simpulan

Hasil penelitian memberikan bukti penerimaan hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Variabel yang memberikan pengaruh paling besar adalah manfaat informasi akuntansi dalam melakukan revisi keyakinan karena adanya kandungan informasi tentang nilai, prospek, dan manfaat dalam pengambilan keputusan. Karakteristik informasi yang berguna adalah *relevant*, *reliable*, *comparative*, dan memberi prospek ke masa depan.

Konsep *decision usefulness* dalam laporan keuangan terbukti memberi nilai dan manfaat kepada *user* dalam pengambilan keputusan. *User* mengetahui kebermanfaatan laporan keuangan dengan mengetahui makna manfaat dari informasi yang disajikan, memahami kebutuhan informasi, serta mengetahui masalah keputusan yang diambil. Akuntan menyesuaikan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan

memahami kebutuhan pengguna sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dengan demikian, *decision usefulness* membuat informasi akuntansi menjadi lebih bermanfaat.

Manajer investasi mempunyai sikap *sophisticate, rasional, prudent*, serta mempunyai preferensi *risk* yang dapat memberikan kontribusi positif dalam *advisory* kepada investor. Preferensi *return* investor diwujudkan oleh manajer investasi dengan diversifikasi melalui *adverse selection return* sehingga memberikan manfaat, prospek, dan nilai dari emiten.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah:

1. Proses riset akuntansi di bidang keperilakuan dengan sifat *explanatory perceptional research* mengakibatkan pandangan yang sangat variatif dengan *limitation cognitive*. Hal ini disebabkan karena responden menjawab kuesioner pada situasi dan waktu yang sederhana atau kompleks.
2. Penentuan persepsi informasi harga bersifat teknis. Sehingga akan mengganggu *mapping* penelitian karena problem momentum, *volatility, cyclical*, kondisi pasar bubbles, terjadi *crashes*, serta pasar dalam keadaan *bearish*. Proses ini perlu dikelompokkan untuk menghasilkan *timing* yang tepat dalam keputusan investasi.

5.3. Rekomendasi

Rekomendasi yang disarankan untuk penelitian masa datang adalah:

1. Sampel penelitian dilakukan perluasan dengan jenis responden yang berbeda. Hal ini untuk memperoleh variasi sikap, perilaku, dan tindakan dalam pengambilan keputusan. Kemungkinan responden yang bisa dipilih adalah, pialang/*broker*, analis efek, investor, *underwriter*, serta penasehat investasi.

2. Penelitian keperilakuan di pasar modal memerlukan *market timing*, *momentum*, serta dekomposisi kondisi pasar dalam keadaan *bullish* dan *bearish*. Hal ini diperlukan dalam rangka memperoleh informasi dan penjelasan yang lebih baik mengenai perilaku *user*.
3. Untuk pengembangan konsep, maka diperlukan tambahan variabel seperti motif investasi, tipe keputusan, minat dalam investasi, perencanaan dan pengendalian investasi, pengendalian risiko, sikap dalam *fear*, sikap dalam *greedy*,
4. baru untuk pengembangan konsep dengan memasukkan variabel subyektifitas *risk*, preferensi return, motif investasi, manfaat informasi harga, *mental accounting*, tipe keputusan, dan faktor-faktor lain. Variabel ini dapat dikembangkan sebagai variabel *moderating* atau *intervening*.

Daftar Pustaka

- Arrozi, MF., 2011, Preferensi Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Sekuritas Di Bursa Efek Indonesia, *Simposim Riset Ekonomi V*, ISEI, Oktober, Surabaya.
- , 2011a, Revisi Keyakinan Atas Sinyal Informasi Akuntansi, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 10, No. 2, Desember, pp 25-51.
- , 2012b, Model Perilaku *Mental Investment* dan *Mapping Risk Preference* pada Investor Individu di Bursa Efek Indonesia, *Hasil Penelitian Fundamental Dengan Dana DIKTI Tahun Anggaran 2012*, Universitas Esa Unggul Jakarta.
- Augusty, Ferdinand, 2002. *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen : Aplikasi Model-Model Rumit Dalam Penelitian Untuk Tesis Magister & Disertasi Doktor*, Edisi 2, Semarang:BP-UNDIP.
- Ball, R. and P. Brown, 1968. An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, *Journal of Accounting Research*, pp 159-178.
- Banker, R. S. Das, and S. Datar, 1993. Complementarily of Prior Accounting Information: The Case of Stock Dividend Announcement, *The Accounting Review*, 68 (January), pp 28-47.
- Barth, M.E., W.H. Beaver, and W.R. Landsman, 2001, The relevance of the Value Relevance for Accounting Policy Makers: Another View, *Journal of Accounting and Economics*, pp 1-38.
- Barberis, Nicholas, and Richard Thaler, 2003, *Handbook of the Economics of Finance*, Elsevier Science.
- Beaver, W.H., 1989. *Financial Reporting: An Accounting Revolution*, Second Edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Beaver, W.H., R. Clarke, and W.F., Wright, 1979. The Association Between Unsystematic Security Return and The Magnitude of Earnings Forecast Errors, *Journal of Accounting Research*, pp. 316-340.
- Beaver, W.H., Kettler, P., and Scholes, M., 1970. The Association between market determined and accounting determined risk measures, *The Accounting Review*, Vol. 6, pp. 654 – 682.



Brunneirmeir, Markus K., 2001, *Asset Pricing Under Asymmetric Information: Bubbles, Crashes, Technical Analysis, and Herding*, Oxford : University Press, New York.

Bruns, William J. Jr., 1968. Accounting Information and Decision Making: Some Behavioral Hypotheses, *The Accounting Review*, July, pp. 469-480.

Capstaff, John, 1992. The Usefulness of UK accounting and market data for predicting the perceived risk class of securities, *Accounting and Business Research*, Vol.22, No.87, pp 219-228

Chen, S., and Hsu, K. 2005. Perceived usefulness of annual reports and other information, *Paper presented in the Research Forum Session at the annual meeting of the American Accounting Association*, San Francisco.

Daniel, K.D., D. Hirshleifer, and A. Subrahmanyam, 2001. Covariance Risk, Mispricing, and The Cross Section of Security Returns, *Journal of Finance*, Forthcoming.

East, Robert, 1993. Investment Decision and The Theory of Planned Behaviour, *Journal of Economic Psychologi*, Vol 14, pp. 337-375.

Easton, P.D., and M.E. Zmijewski, 1989. Cross Sectional Variation In The Stock-Market Response to Accounting Earnings Announcement, *Journal of Accounting and Economics*, July, pp 117-141.

Epstein, M.J. 1975. The usefulness of annual reports to corporate shareholders. *Los Angeles Bureau of Business and Economic Research*, California State University.

Easterbrook, F.H., 2001. Two Agency-Cost Explanation of Dividends. *The American Economic Review*, Vol. 74, No. 4, pp. 650-659.

Fama, 1970. Efficient Capital Markets : A Review of Theory and Empirical Work, *Journal of Finance* 25, halaman 383 – 417.

Farrelly, G., Ferris, K., and Reichenstein, W., 1985. Perceived Risk, Market Risk, and Accounting Determined Risk Measures, *The Accounting Review*, 60, 278 – 288.

Farid Harianto dan Siswanto Sudomo, 1998. *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi*, Jakarta, Penerbit: PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Ferris, K. R., Hiramatsu, K., and Kimoto, K., 1990. Accounting Information and Investment Risk Perception in Japan, *Journal of International Financial Management and Accounting*, 1 (3), pp. 232 – 243.

Fletcher, J., 2000. On The Conditional Relationship between Beta and Return in International Stock Return, *International Review of Financial Analysis*, 9 (3), pp. 235 – 245.

Goodwin, J., K.R. Sawyer, and K. Ahmed, 1986. The Relevance of Value, *The Social Science Research Network Electronic Paper Collection*, <http://papers.ssrn.com/abstract=244261>, pp. 1-31.

Gordon, L.A. and V.K. Narayanan, 1984. Management Accounting system: Perceived Environmental Uncertainty and Organization Structure: An Empirical Investigation, *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 9, pp. 33-47.

Hair, J.,F., Jr., R.E. Anderson, R.L. Tatham, and W.C. Black, 2007. *Multivariate Data Analysis With Readings*, Indiana: Macmilan Publishing Company.

Hartono, Jogoyanto, 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*, Edisi 1, Jogjakarta: Penerbit Andi.

Hartono, Jogiyanto, 2008. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Lima, Yogyakarta: BPF.

-----, 2004. *How, Why, When Investors Revise Their Beliefs to Company Information*, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- , 2005. *Pasar Efisien Secara Keputusan*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- , 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*, Edisi 1, Jogjakarta: Penerbit Andi.
- Henderson, Scott., Graham, Peirson, and Harris, Kate, 2004. *Financial Accounting Theory*, Pearson Education Australia, pp. 463 – 480.
- Hirshleifer G., and J. Glazer, 1992. Time preference: The expectation and evaluation of decision consequences as a function of time, In S. Maital (Ed.), *Applied Behavioral Economics*, Brighton:Wheatsheaf Books, pp. 579-592.
- Ho, Simon S. M, and Wong, K. S., 2004. 'Investment Analysts' Usage and Perceived Usefulness of Corporate Annual Reports', *Corporate Ownership and Control*, 1, pp. 61-71.
- Hogart, R., and H., Einhorn, 1992. Order Effect in Belief Updating: The Belief-adjustment model, *Cognitive Psychology*, 24(1), pp 1-55.
- Husnan, Suad, 1996, *Dasar-Dasar Teori Portfolio*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, Oktober.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, per 1 September 2009, Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Jones, C.P, 2006. *Investments Analysis and Managements*, New York: John Wiley & Sons, Inc., 10th Edition.
- Kaiser, H.F, and J. Rice, 1974. *Educational and Psychological Measurement*, 34, (I), P. 111-117.
- Kim, Linsu, and Lim, Y., 1988, Environment, Generic Strategies, and Performance in a Rapidly Developing Country, *Academy of Management Journal*, Vol. 31, pp. 802-827.
- Koonce, Lisa, Mary Lea McAnally, and Molly Mercer, 2004, How Do Investors Judge the Risk of Financial Items?, *Working paper*, University of University of Texas.
- Lee, C.M.C., 1999, Accounting Based Valuation: Impact on Business Practices and Research, *Accounting Horizons* 13: 413-425.
- Luo, Yadong, 1999. Environment-Strategy-Performance Relation in Small Business in China: A Case of Township and Village Enterprises in Southern China, *Journal of Small Business Management*, January, pp. 37-52.
- Markowitz, H.M., 1952. Portofolio Selection, *Journal of Finance*, March, pp. 77-91.
- Matlin, Margaret W., 1998, *Cognition*, Fourth Edition, Ganeseo, New York: Hancourt Brace College Publisher.
- McDonald, J.G., and Stehle, R.E., 1975. How Do Institutional Investors Perceive Risk ? *Journal of Portfolio Management* 2, 1:pp. 11 – 16.
- McGhee, J.E. and Rubach, M.J., 1996. Responding to Increased Environmental Hostily: A Study of The Competitive Behavior of Small Retailers, *Journal of Applied Business Research*, Vol. 13, No. 1, pp. 83-94.
- Nunnally, J. C., 1978, *Psychometric Theory*, Hightstown, NJ : McGrow Hill, I.
- Ricciardi, V. 2004, A Behavioral Finance Study: An investigation of The Perceived Risk for Common Stocks by Investment Professionals (Financial Analyst vs Financial Planners). *Dissertation*. Golden Gate University.
- Robbins, Stephen P., 1996. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta:Penerbit PT. Prenhalindo.
- Scott, William R., 2009. *Financial Accounting Theory*, 5th ed, Toronto:Pearson Education Canada Inc.

- Selva, Mohan, 1995, Earnings and Stock Selection, *The SSRN*, <http://www.ssrn.com>" : GEL Classification:M41.
- Snelbecker, E. Glenn., Roszkowski J. Michael, and Cutler, E. Neal, 1990, Investors' Risk Tolerance and Return Aspiration, and Financial Advisors' Interpretations : A Conceptual Model and Exploratory Data, *The Journal of Behavioral Economics*, Vo. 19, No. 4, pp. 377 – 393.
- Stainbank, L, and C. Peebles, 2006, The usefulness of corporate annual reports in South Africa: perceptions of preparers and us, *Meditari Accountancy Research*, Vol. 14 No.1 : 69-80
- Stuerke, Pamela S., 2005, Financial analysts as users of accounting information: Evidence about forecast revision activity after earnings announcements, *International Journal of Managerial Finance*, Vol. 1 (1), pp. 8-24.
- Tim BEJ, 1997. Tingkat Pengenalan Terhadap Pasar Modal Pada 7 (tujuh) Ibukota Propinsi, Jakarta : BEJ. *Resource Productivity Center Marketing & Social Research*.
- Wahlund, Richard, and Jonas Gunnarsson, 1996, Mental Discounting and Financial Strategies, *Journal of Economic Psychology* 17, pp 709-730.
- Walgito, Bimo, 1997, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Zamahsari, Moezamil, 1990, Kebutuhan Informasi Pemodal Dalam Membeli Saham di Pasar Modal, *Info Pasar Modal*, No. 3, Tahun I, April, Jakarta, hlm 9.

Lampiran 1 : Tabel Hasil Analisis Data

TABEL 1.
KRITERIA KELAYAKAN PEMODELAN PERSAMAAN STRUKTURAL

No	Goodness of Fit Index	Nilai Cut Off
1	<i>Degree of freedom</i>	
2	Probabilitas signifikansi	≥ 0.05
Absolute Fit Measures		
3	<i>Chi-Square</i>	Diharapkan kecil
4	RMSEA	≤ 0.08
5	GFI	≥ 0.90
Incremental Fit Measures		
6	TLI	≥ 0.95
7	CFI	≥ 0.95
Parsimonious Fit Measures		
8	AGFI	≥ 0.90
9	CMIN/DF	≤ 2.00

Sumber: Ferdinand (2002) dan Hair (2007)

TABEL 2
Gambaran Penyebaran dan Penerimaan Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	200 eksemplar
Kembali karena alamat tidak dikenal	-
Jumlah Pengiriman	200 eksemplar
Kuesioner yang kembali	182 eksemplar
Presentase yang kembali	91 %
Kuesioner yang bisa dipakai	180 eksemplar
Presentase yang bisa dipakai	99 %

Sumber: Hasil Olahan Data

TABEL 3
Demografi Responden

Keterangan	Jumlah
Usia Responden	
20 – 25 tahun	8,6 %
26 – 30 tahun	10,6 %
31 – 35 tahun	10,7 %
36 – 40 tahun	14,9 %
41 – 45 tahun	40,5 %
46 – 50 tahun	14,9 %
Jenis Kelamin	
Pria	82 %
Perempuan	18 %
Pendidikan Formal	
S1	31 %
S2	66 %
S3	3 %
Pendidikan Pasar Modal	
CFA	44,7 %
Forecasting and Valuation	42 %
Finacial Modelling	3,3 %
Risk Management	10 %
Lama Bekerja di Pasar Modal	
1 – 5 tahun	2,1 %
6 – 10 tahun	19 %
11 – 15 tahun	65,8 %
16 – 20 tahun	13,1 %
21 – 25 tahun	-
Sertifikasi	
CFA	23,4 %
MI	42,7 %
WMI	14,9 %

Sumber: Hasil Olahan Data

TABEL 4
Hasil Pengujian Reliabilitas dan Validitas Variabel

Variabel	Reliabilitas	Validitas
Manfaat Informasi Akuntansi	0,847	0,832
Manfaat Informasi Harga	0,718	0,851
Revisi Keyakinan	0,828	0,882
Risiko <i>Unsystematic</i>	0,796	0,849
Risiko <i>Systematic</i>	0,788	0,816
Preferensi <i>Return</i>	0,826	0,778

Sumber: Hasil Olahan Data

TABEL 5
Indeks Kesesuaian *Structural Equation Model* (SEM)

Kriteria	Cut of Value	Hasil Perhitungan	Keterangan
<i>Chi-Square</i> (χ^2)	Diharapkan Kecil	278,3	χ^2 dengan df = 264 adalah 278, Diterima
Sig. of Probability	$\geq 0,05$	0,4241	Diterima
RMSEA	$\leq 0,08$	0,0070	Diterima
GFI	$\geq 0,90$	0,9570	Diterima
AGFI	$\geq 0,90$	0,9351	Diterima
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,0481	Diterima
TLI	$\geq 0,95$	0,9831	Diterima
CFI	$\geq 0,95$	0,9725	Diterima

Sumber: Hasil Olahan Data

TABEL 6
Estimasi Parameter Model Struktural

Variabel	Estimate	S.E.	C.R.	Prob.	Hipotesis
Manfaat informasi akuntansi → revisi keyakinan	2,160	0,228	6,423	0,000	H1 *(diterima)
Manfaat informasi harga → revisi keyakinan	0,471	0,264	2,658	0,045	H2 *(diterima)
Manfaat informasi akuntansi → risiko <i>unsystematic</i>	-0,903	0,113	-2,936	0,035	H3 *(diterima)
Resiko sistematis → revisi keyakinan	-2,025	0,169	-3,142	0,033	H4 *(diterima)
Resiko <i>systematis</i> → manfaat informasi harga	0,289	0,075	3,791	0,000	H5 *(diterima)
Resiko <i>unsystematis</i> → revisi keyakinan	-0,472	0,583	-2,853	0,047	H6 *(diterima)
Manfaat informasi harga → preferensi return	0,323	0,099	3,352	0,013	H7 *(diterima)
Manfaat informasi akuntansi → preferensi return	2,323	0,081	4,526	0,001	H8 *(diterima)
Revisi keyakinan → preferensi return	0,628	0,137	3,538	0,003	H9 *(diterima)

* Signifikan pada $\alpha = 5\%$

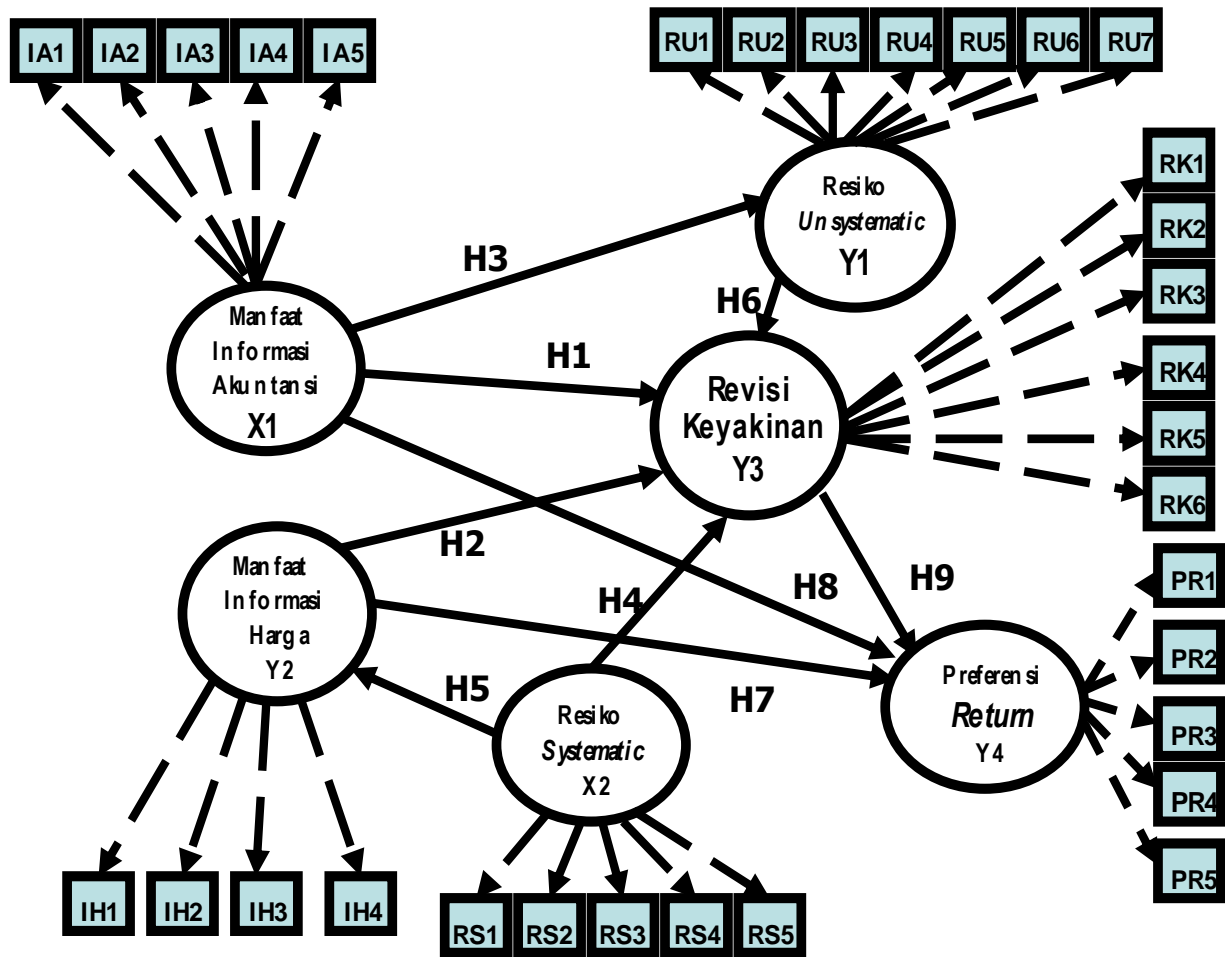
TABEL 7
Hubungan Tidak Langsung

Hubungan Variabel	Total Hubungan	Hubungan Langsung	Hubungan Tidak Langsung
Manfaat informasi akuntansi → Preferensi <i>Return</i>	3,6031	1,7530	1,9501
Manfaat informasi akuntansi → Revisi keyakinan	2,3306	0,8746	1,4560
Resiko <i>Systematic</i> → Revisi Keyakinan	- 0,7767	- 0,8847	0,1080

Sumber : Hasil Olahan Data



Lampiran 2 : Model Penelitian



Gambar 3.1. Model Penelitian

Lampiran 3 : Instrumen Penelitian

Identitas Responden

- 1. Nama :(Boleh Tidak Diisi)
- 2. Usia : tahun
- 3. Jenis kelamin : Laki-Laki Perempuan
- 4. Pendidikan formal terakhir : SMA Diploma Sarjana Pascasarjana
- 5. Latar belakang pendidikan formal : Akuntansi Manajemen Lain-lain, sebutkan.....
- 6. Pendidikan formal di bidang pasar modal (kursus, pelatihan, seminar, atau workshop),
Sebutkan.....
.....
.....
- 7. Lama bekerja sebagai Manajer Investasi :tahun, bulan
- 8. Lama bekerja di perusahaan sekuritas :tahun, bulan
- 9. Sertifikasi Yang dimiliki, sebutkan:
.....
.....
.....



MANFAAT INFORMASI AKUNTANSI

Pertanyaan berikut tentang manfaat laporan keuangan yang saudara rasakan setelah membaca laporan keuangan. Mohon diberi tanda (X) untuk jawaban yang dipilih.

No	Pernyataan	Sangat tidak bermanfaat	Tidak bermanfaat	Netral	Bermanfaat	Sangat bermanfaat
1	Laporan keuangan bermanfaat dalam memprediksi harapan pengguna	1	2	3	4	5
2	Laporan keuangan bermanfaat dalam merealisasikan harapan pengguna	1	2	3	4	5
3	Laporan keuangan bermanfaat dalam membantu pengguna melakukan umpan balik	1	2	3	4	5
4	Laporan keuangan bermanfaat membantu pengguna melakukan koreksi tentang harapan di masa lalu	1	2	3	4	5
5	Laporan keuangan bermanfaat dalam memberikan informasi pada saat dibutuhkan	1	2	3	4	5
6	Laporan keuangan bermanfaat dalam memberikan ketepatan informasi	1	2	3	4	5
7	Laporan keuangan menyajikan kesesuaian kejadian dengan informasi yang disajikan pada laporan keuangan	1	2	3	4	5
8	Laporan keuangan bermanfaat dalam menyajikan informasi yang tidak memihak kepada pengguna lain	1	2	3	4	5
9	Laporan keuangan bermanfaat dalam menyajikan perbandingan antar perusahaan dalam suatu industri.	1	2	3	4	5
10	Laporan keuangan bermanfaat menyajikan konsistensi metode akuntansi oleh perusahaan/emiten.	1	2	3	4	5
11	Laporan keuangan bermanfaat dalam membandingkan biaya dengan keuntungan suatu kepemilikan.	1	2	3	4	5
12	Laporan keuangan bermanfaat dalam membantu pengguna untuk pengambilan keputusan.	1	2	3	4	5
13	Laporan keuangan bermanfaat dalam memberi informasi kinerja laba jangka pendek.	1	2	3	4	5
14	Laporan keuangan bermanfaat dalam memberi informasi yang mencerminkan prospek jangka panjang.	1	2	3	4	5
15	Laporan keuangan bermanfaat dalam memberi informasi yang mudah dipahami.	1	2	3	4	5

MANFAAT INFORMASI HARGA

Pertanyaan berikut mengenai keyakinan manfaat informasi harga saham dalam pengambilan keputusan investasi. Mohon diberi tanda (X) untuk jawaban yang dipilih.

No	Pernyataan	Sangat tidak bermanfaat	Tidak bermanfaat	Netral	Bermanfaat	Sangat bermanfaat
1	Harga saham bermanfaat dalam memberi kandungan informasi	1	2	3	4	5
2	Informasi harga saham bermanfaat dalam memberi informasi pasar	1	2	3	4	5
3	Informasi harga saham bermanfaat dalam memberi informasi asimetri	1	2	3	4	5
4	Harga saham bermanfaat memberi umpan balik	1	2	3	4	5
5	Harga saham bermanfaat dalam memberi ketepatan harga	1	2	3	4	5
6	Harga saham bermanfaat dalam memberi prediksi	1	2	3	4	5
7	Harga saham bermanfaat dalam memberi nilai	1	2	3	4	5
8	Harga saham bermanfaat memberi informasi waktu jual	1	2	3	4	5
9	Harga saham bermanfaat memberi informasi waktu beli	1	2	3	4	5
10	Harga saham bermanfaat memberi informasi reposisi saham	1	2	3	4	5



REVISI KEYAKINAN

Pertanyaan berikut tentang keyakinan atas interpretasi laporan keuangan yang akan menambah pengetahuan anda. Mohon diberi tanda silang (X) untuk jawaban yang dipilih.

No	Pernyataan	Sangat Tidak Yakin	Tidak Yakin	Netral	Yakin	Sangat Yakin
1	Laba bersih perusahaan membawa berita positif.	1	2	3	4	5
2	Return perusahaan mengandung informasi.	1	2	3	4	5
3	Pembagian deviden membawa berita positif.	1	2	3	4	5
4	Pembagian deviden perusahaan mengandung informasi.	1	2	3	4	5
5	Kinerja Price Earning Ratio (PER) mengandung informasi positif dalam jangka waktu pengembalian investasi saham.	1	2	3	4	5
6	Kinerja laporan keuangan mendorong saya untuk mengubah kandidat saham.	1	2	3	4	5

PERSEPSI RESIKO SYSTEMATIC

Pertanyaan berikut tentang resiko *systematic* pada lingkungan eksternal di negara Indonesia yang dirasakan oleh anda. Mohon diberi tanda silang (X) untuk jawaban yang dipilih.

No	Pernyataan	Sangat tidak dapat diprediksi	Tidak Dapat diprediksi	Cukup Dapat diprediksi	Dapat diprediksi	Sangat dapat diprediksi
1	Seberapa besar dapat diprediksinya perubahan gejala ekonomi.	1	2	3	4	5
2	Seberapa besar dapat diprediksinya perubahan kebijakan pemerintah Indonesia.	1	2	3	4	5
3	Seberapa besar dapat diprediksinya perubahan kondisi politik negara.	1	2	3	4	5
4	Seberapa besar dapat diprediksinya kondisi pasar keuangan Indonesia.	1	2	3	4	5
5	Seberapa besar dapat diprediksinya perubahan tingkat bunga.	1	2	3	4	5

PERSEPSI RISIKO UNSYSTEMATIC

Pertanyaan berikut tentang persepsi risiko yang dirasakan oleh anda pada waktu melakukan analisa laporan keuangan. Mohon diberi tanda silang (X) untuk jawaban yang dipilih.

No	Pernyataan	Sangat Tidak Berisiko	Tidak Berisiko	Cukup	Berisiko	Sangat Berisiko
1	Saya mengetahui laporan keuangan perusahaan menunjukkan kesulitan keuangan yang mengkhawatirkan.	1	2	3	4	5
2	Saya mengkhawatirkan kondisi keuangan yang dihadapi perusahaan.	1	2	3	4	5
3	Saya mengkhawatirkan akibat negatif dari kondisi keuangan perusahaan tidak dapat dikendalikan.	1	2	3	4	5
4	Saya mengetahui risiko keuangan akan segera terjadi di perusahaan.	1	2	3	4	5
5	Saya mengetahui kemungkinan kerugian ekonomi pada perusahaan dari pos-pos laporan keuangan	1	2	3	4	5
6	Saya mengetahui rugi yang saya prediksi pada laporan keuangan perusahaan tahun terakhir akan terjadi pada perusahaan yang bersangkutan	1	2	3	4	5
7	Saya mengetahui kondisi risiko keuangan yang mengkhawatirkan akan terjadi pada perusahaan yang bersangkutan	1	2	3	4	5



PREFERENSI RETURN

Pertanyaan berikut tentang pilihan dan harapan tentang *return* yang dirasakan oleh anda pada waktu melakukan keputusan investasi sekuritas. Mohon diberi tanda silang (X) untuk jawaban yang dipilih.

No	Pernyataan	Sangat Tidak Ingin Dicapai	Tidak Ingin Dicapai	Netral	Ingin Dicapai	Sangat Ingin Dicapai
1	Seberapa besar harapan anda untuk mendapatkan <i>return</i> yang tinggi dalam pemilihan saham.	1	2	3	4	5
2	Seberapa besar harapan anda untuk memperoleh <i>return</i> saham melebihi <i>return</i> pasar.	1	2	3	4	5
3	Seberapa besar harapan anda untuk memperoleh <i>return</i> saham melebihi tingkat bunga deposito.	1	2	3	4	5
4	Seberapa besar harapan anda untuk memperoleh <i>return</i> saham optimal melalui revisi kinerja saham.	1	2	3	4	5
5	Seberapa besar harapan anda untuk memperoleh <i>return</i> saham optimal sesuai keinginan investor	1	2	3	4	5

Apakah Bapak /Ibu menghendaki ringkasan dari hasil penelitian ini ?

Ya,

Dialamatkan kepada

.....

.....

.....

Tidak.

T e r i m a K a s i h



**Hubungan Pengukuran Kinerja Keuangan dan Non Keuangan dengan
Kejelasan Peran, Konflik Peran, Keadilan Prosedural
dan Kinerja Manajerial
(Studi pada Bank di Pekanbaru-Riau)**

AMRIS RUSLI TANJUNG

YESI MUTIA BASRI*

NUR AZLINA

Universitas Riau

Abstract: *This study examines relationship financial and nonfinancial performance on manager behavioral (role conflict, role clarity, procedural fairness and managerial performance), and examines mediated role conflict, role clarity, procedural fairness on relationship financial and nonfinancial measure on managerial performance. This study provides insights into prior studies' findings by distinguishing those effects arising from nonfinancial measures from those arising from financial measures. Based on a sample of 67 managers in Bank, the results indicate that nonfinancial measures, by themselves, significantly influence on role conflict, role clarity, procedural fairness and managerial performance but financial performance significant on procedural fairness. In this research role conflict, role clarity and procedural fairness not mediated relation financial and non financial performance on managerial performance.*

Keywords: *Financial Performance, Nonfinancial Performance, Role Conflict, Role Clarity, Procedural Fairness, Managerial Performance.*

* Corresponding author: i.yesimutia@yahoo.com

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penggunaan ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja merupakan hal yang penting bagi karyawan. Mereka akan peduli dengan apa kinerja mereka diukur dan bagaimana cara mengukur kinerja tersebut. Penilaian kinerja tidak hanya berhubungan dengan kompensasi, penghargaan, dan promosi, penilaian tersebut juga merupakan cerminan dari keberhasilan atau kegagalan (Kaplan dan Atkinson, 1998; Horngren et al, 2002).

Banker et al. (2004) menyatakan bahwa manajer senior dapat membuat apa yang mereka inginkan dalam jangka panjang dibandingkan jangka pendek dengan berorientasi pada keuntungan. Pilihan bijaksana untuk menetapkan pengukuran kinerja adalah dengan menentukan kriteria keuangan. Oleh karena itu, proses evaluasi terutama kriteria evaluasi yang digunakan, cenderung memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap karyawan, terhadap organisasi mereka dan pekerjaan mereka. Organisasi pada umumnya mengakui bahwa keberhasilan jangka panjang organisasi tergantung pada tindakan individu (Otley 1978; Schiemann dan Lingle 1999),

Penelitian mengenai pengaruh sistem pengukuran kinerja terhadap perilaku individu telah diteliti oleh beberapa peneliti pada dekade terakhir (misalnya, Burney dan Widener, 2007; Hall, 2008, 2012, Hartman dan Sclapnpar, 2009, 2012; Lau dan Sholihin, 2005, 2008, 2011). Namun beberapa literatur menunjukkan ketidak konsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem pengukuran kinerja terhadap perilaku individu (Burney dan Widener 2007). Para peneliti telah menyarankan bahwa efek sistem pengukuran terhadap kinerja manajerial cenderung tidak langsung melalui variabel intervening. Hartman dan Sclapnpar (2009) meneliti bagaimana sistem pengukuran kinerja formal mempengaruhi kepercayaan individu dimediasi oleh keadilan procedural. Hasil penelitian Hartman dan Sclapnpar (2012) juga menunjukkan bahwa karakteristik evaluasi kinerja yang berkaitan dengan persepsi keadilan

efeknya tergantung pada tingkat ketidakpastian tugas dan toleransi untuk ambiguitas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengukuran kinerja non keuangan dan keuangan berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui keadilan prosedural dan kepercayaan (Lau dan Solihin, 2005). Pengukuran kinerja non keuangan juga mempengaruhi komitmen organisasi. (Solihin dan Pike, 2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kinerja karyawan dinilai secara wajar (fair) dengan adanya kepercayaan pada atasan dan komitmen organisasi maka akan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Selanjutnya komitmen organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja (Lau dan Solihin, 2005; Lau et al, 2008; Solihin dan Pike, 2009).

Burney dan Widener (2007) menemukan bahwa sistem pengukuran kinerja strategis berhubungan dengan ketidakjelasan peran (*role ambiguity*) dan konflik peran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin jelas informasi yang relevan diterima oleh karyawan maka menurunkan ketidakjelasan peran dan konflik peran. Kinerja karyawan akan meningkat jika ambiguitas peran rendah. Hall (2008) juga menemukan bahwa sistem pengukuran kinerja komprehensif secara signifikan berhubungan dengan kejelasan sasaran yang merupakan dimensi kejelasan peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial adalah tidak langsung melalui kejelasan peran.

Lau (2011) menggunakan pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan terhadap kinerja manajerial dengan menggunakan kejelasan peran sebagai variabel intervening. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan peran berpengaruh terhadap hubungan pengukuran kinerja Keuangan dan non Keuangan. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa efek pengukuran kinerja non keuangan lebih kuat dibandingkan dengan keuangan.

Penelitian ini menguji pengaruh pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan terhadap perilaku individu yang didasarkan pada penelitian Lau (2011). Namun dalam

penelitian Lau (2011) hanya menjelaskan efek kejelasan peran sebagai variabel mediasi. Penelitian ini juga menguji bagaimana pengaruh pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan terhadap ketidakjelasan peran dimediasi oleh dan konflik peran, kejelasan peran dan keadilan prosedural. Burney dan Widener (2007) menggunakan ketidakjelasan peran dan konflik peran dalam hubungan pengukuran kinerja strategis dengan kinerja manajerial. Tetapi penelitian Burney dan Widener (2007) tidak membedakan pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin menguji bagaimana hubungan pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan dengan konflik peran, kejelasan peran, keadilan prosedural dan kinerja manajerial.

II. Kerangka Teori dan Hipotesis

2.1. Hubungan Pengukuran Kinerja keuangan dan Nonkeuangan dengan Konflik Peran

Konflik peran timbul ketika manajer tidak mampu memenuhi harapan dari tuntutan pekerjaan mereka yang tidak kompatibel (Rizzo et al, 1970). Misalnya manajer dapat menerima permintaan untuk meningkatkan kualitas tetapi mengakibatkan biaya produk yang lebih tinggi, sementara departemen keuangan mengatakan kepada manajer untuk menggunakan cara apapun yang untuk mengurangi biaya. Dalam situasi tersebut akan menyebabkan terjadinya konflik peran.

Kaplan dan Norton (1996, 2001) menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja terkait dengan strategi menciptakan pemahaman bersama, dan eksekutif kemudian dapat menyelaraskan tindakan individu dengan pemahaman bersama. Oleh karena itu alat ukur kinerja yang digunakan harus dapat mengurangi tuntutan yang bertentangan dari atasan, dengan kata lain manajer tidak harus dihadapkan pada pilihan yang bertentangan. Pengaruh konflik peran dalam pengukuran kinerja telah diteliti oleh Burney dan Widener (2007) yang menggunakan sistem pengukuran kinerja strategis. Hasil penelitiannya menunjukkan jika

komunikasi atasan dan bawahan jelas dalam pengukuran kinerja, maka konflik peran akan menurun.

Ittner et al. (2003) menyatakan sistem pengukuran kinerja diharapkan dapat meningkatkan komunikasi yang diperlukan untuk mencapai strategi yang dipilih, memotivasi kinerja untuk mencapai tujuan dan memberikan umpan balik. Dengan demikian sistem pengukuran kinerja dapat mengurangi konflik peran karyawan (Robbins, 2003). Rizzo et al. (1970) memberikan empiris bukti bahwa formalisasi tujuan dikaitkan dengan penurunan konflik peran. Dengan demikian maka dihipotesiskan :

H1a: *Penggunaan ukuran kinerja keuangan dalam evaluasi kinerja berhubungan negatif dengan konflik peran.*

H1b: *Penggunaan ukuran kinerja nonkeuangan dalam evaluasi kinerja berhubungan negatif dengan konflik peran.*

2.2 Hubungan Pengukuran Kinerja Keuangan dan Nonkeuangan dengan Kejelasan Peran

Ukuran kinerja dapat mempengaruhi kejelasan peran melalui dua proses yang berbeda. Proses pertama adalah tergantung pada kepentingan senior manajer pada ukuran kinerja (terlepas dari apakah tindakan tersebut finansial atau nonfinansial) untuk mengevaluasi kinerja bawahan. Kedua proses tergantung pada tipe ukuran yang digunakan apakah Keuangan atau non Keuangan. Ukuran kinerja memperjelas proses evaluasi kinerja dan membiarkan karyawan tahu bagaimana mereka akan dievaluasi (Lau, 2011)

Alat ukur kinerja yang digunakan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan rencana dan strategi kepada karyawan (Kaplan & Norton, 1996). Melalui ukuran kinerja, karyawan akan menyadari apa peran mereka dan tanggung jawab yang diharapkan atasan dari karyawan. Karyawan mengetahui apa yang harus dicapai dari rencana dan strategi yang telah

diadopsi. Karyawan harus mengarahkan perhatian mereka, waktu dan usaha (Lau, 2011). Rizzo et al (1970) menyatakan bahwa ketidakjelasan peran ditentukan karena keterbatasan dari keberadaan atau kejelasan persyaratan perilaku, seringkali dalam hal masukan dari lingkungan yang akan berfungsi untuk memandu perilaku, dan memberikan pengetahuan bahwa perilaku yang tepat. Kahn et al (1964) juga menunjukkan bahwa tidak mengetahui atau tidak memahami bagaimana individu dievaluasi dan ketidakpastian tentang cara atasan mengevaluasi kinerja bawahan merupakan sumber dari ambiguitas peran (ketidakjelasan) untuk bawahan. Oleh karena itu, jika bawahan menyadari kinerja mereka diukur oleh atasannya maka kejelasan peran akan meningkat.

Lau (2011) meneliti pengaruh pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan terhadap kejelasan peran. Efek tingkat kepentingan atasan melampirkan ukuran kinerja pada kejelasan peran yaitu kejelasan peran cenderung lebih tinggi jika atasan melampirkan tinggi pentingnya tindakan nonfinansial dibandingkan dalam situasi ketika atasan mementingkan rendah untuk ukuran nonfinansial. Oleh karena itu, kejelasan peran kemungkinan akan berhubungan positif dengan tingkat kepentingan yang melekat pada tindakan nonfinansial dalam evaluasi kinerja karyawan. Kejelasan peran akan lebih tinggi bila kepentingan tinggi dan kejelasan peran cenderung lebih tinggi jika atasan melampirkan kepentingan yang tinggi dalam pengukuran kinerja.

Locke dan Latham (1991) menyatakan bahwa pengaturan tujuan diasumsikan untuk meningkatkan kejelasan peran dan harmoni. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian Lau (2011) yang menemukan bahwa ukuran nonkeuangan berhubungan positif dengan kejelasan peran. Berdasarkan hal diatas maka dihipotesiskan:

H2a: *Penggunaan ukuran kinerja keuangan dalam evaluasi kinerja berhubungan positif dengan kejelasan peran.*

H2b: *Penggunaan ukuran kinerja nonkeuangan dalam evaluasi kinerja berhubungan positif dengan kejelasan peran.*

2.3. Hubungan Pengukuran Kinerja Keuangan dan Nonkeuangan dengan Keadilan prosedural

Keadilan prosedural menurut Thibaut dan Walker (1975) merujuk pada konsekuensi psychological sosial variasi prosedural, dengan penekanan khusus pada efek prosedural pada keadilan dalam penilaian. Studi Thibaut dan Walker (1975) berfokus pada pengendalian proses dan hasil sebagai variabel kunci yang mempengaruhi keadilan prosedural.

Mereka menemukan bahwa: (1) persepsi terhadap keadilan prosedural menghasilkan peningkatan kepuasan, (2) prosedur yang adil adalah penentu terpenting preferensi, dan (3) kontrol proses yang tinggi menyebabkan tingginya penilaian keadilan prosedural. Berdasarkan temuan ini, Thibaut dan Walker (1978) mengembangkan teori menganjurkan bahwa untuk sengketa yang melibatkan konflik kepentingan yang kuat, prosedur yang adil sesuai dengan masyarakat harus digunakan, bukan kriteria obyektif dari keadilan.

Persepsi keadilan dari proses evaluasi kinerja yaitu keadilan yang dirasakan dari semua aspek proses organisasi dan prosedur yang digunakan oleh atasan untuk mengevaluasi kinerja bawahan mereka, berkomunikasi, umpan balik kinerja dan menentukan penghargaan mereka seperti promosi dan kenaikan gaji (Lind dan Tyler, 1988; McFarlin dan Sweeney, 1992).

Penerapan ukuran kinerja dapat dirasakan oleh bawahan sebagai sesuatu yang adil. Ukuran kinerja lebih luas dan bervariasi. Berbagai ukuran tersedia sesuai dengan lingkungan operasi bawahan. Bawahan akan melihat langkah-langkah dalam evaluasi lebih bermakna dan relevan. Tindakan evaluasi kinerja dengan ukuran non finansial dan finansial memandang lingkup kinerja bawahan lebih luas yang memungkinkan dimensi yang berbeda dari prestasi

bawahan. Hasil penelitian Lau dan Sholihin (2005) dan Sholihin dan Pike (2010) menunjukkan pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan berhubungan dengan keadilan dalam evaluasi kinerja. Berdasarkan hal diatas maka dihipotesiskan:

H3a : *Penggunaan ukuran kinerja keuangan dalam evaluasi kinerja berhubungan positif dengan keadilan procedural.*

H3a : *Penggunaan ukuran kinerja non keuangan dalam evaluasi kinerja berhubungan positif dengan keadilan procedural.*

2.4. Hubungan Konflik Peran dengan Kinerja Manajerial

Konflik peran adalah suatu konflik yang timbul karena mekanisme pengendalian birokratis organisasi tidak sesuai dengan norma, aturan, etika dan kemandirian profesional. Kondisi tersebut biasanya terjadi karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan salah satu perintah saja akan mengakibatkan terabainya perintah yang lain.

Penelitian mengenai pengaruh konflik peran telah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Fischer (2001) dan Robbins (2002) yang meneliti konflik peran yang terjadi pada auditor. Konflik peran dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan bisa menurunkan motivasi kerja karena mempunyai dampak negatif terhadap perilaku individu, seperti timbulnya ketegangan kerja, banyaknya terjadi perpindahan pekerja, penurunan kepuasan kerja sehingga bisa menurunkan kinerja.

Dalam pengukuran kinerja, peran harus didefinisikan secara tepat agar karyawan dapat mempertanggungjawabkan tugas mereka. Dengan informasi ini, atasan bisa mendelegasikan tugas, memberi petunjuk dan bimbingan, dan mengatur, memantau, dan mengukur kinerja terhadap ekspektasi (Rizzo et al, 1970). Jika peran tidak didefinisikan

secara tegas dan manajer dihadapkan dengan konflik peran, penurunan kinerja akan menghasilkan ketidakefisienan, salah arah, atau tidak cukup (Jackson dan Schuler 1985, 43).

Secara konseptual, hubungan antara hasil dan konflik peran berdasarkan kesatuan komando, yang menyatakan bahwa individu harus memiliki hanya satu individu kepada siapa mereka bertanggung jawab (Rizzo et al. 1970). Rantai komando salah satu prinsip-prinsip dasar teori organisasi, mengikuti dari kesatuan komando (Rizzo et al. 1970). Sebuah rantai komando mengurangi ketidakpastian mengenai harapan, mengurangi *game* pada bagian dari individu, dan memastikan pelaporan yang konsisten dan evaluasi (Rizzo et al. 1970). Dengan penurunan konflik peran, manajer tidak dihadapkan dengan situasi di mana mereka dihadapkan pada tujuan yang berbeda (Jackson dan Schuler 1985), sehingga manajer dapat fokus pada tugas yang jelas. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan:

H4 : *Konflik peran berhubungan negatif dengan kinerja manajerial.*

2.5. Hubungan Kejelasan Peran dengan Kinerja Manajerial

Klarifikasi peran karyawan dalam organisasi melalui penggunaan ukuran kinerja dapat menyebabkan peningkatan kinerja manajerial. Literatur menunjukkan kejelasan peran bernilai karena efeknya dalam meningkatkan harmoni dan mengurangi konflik, kecemasan dan stres di tempat kerja (misalnya, Bedeian dan Armenakis, 1981; Jackson dan Schuler, 1985). Locke dan Latham (1991) menyatakan bahwa kejelasan peran identik dengan harmoni. Sebaliknya, ketidakjelasan peran cenderung menciptakan konflik dan kelelahan emosional ketika ambiguitas peran yang sangat kronis ada di lingkungan kerja. Efek potensial dari ambiguitas peran secara individu dapat meningkatkan stres emosional, kecemasan, ketidakpuasan, dan akhirnya berpengaruh terhadap prestasi kerja (Senatra, 1980). Ambiguitas peran juga berdampak terhadap organisasi. Lingkungan kerja yang sangat menegangkan dapat menyebabkan kepercayaan menjadi rendah dan emosi negatif terhadap

seluruh organisasi. Hal ini dapat meningkatkan absensi karyawan dan omset, dan menurunkan komitmen karyawan dan menurunkan kinerja (Jackson & Schuler, 1985). Ambiguitas peran dapat menghalangi kinerja karena karyawan tidak mampu melanjutkan tugas mereka untuk pencapaian strategi secara efektif karena kurangnya jelasnya tujuan dan kebingungan atas apa yang diharapkan (Jackson & Schuler, 1985). Meningkatnya kejelasan peran karyawan akan meminimalkan disfungsi konsekuensi sehingga akan meningkatkan kinerja.

Hall (2008) menemukan hubungan positif antara kejelasan tujuan dan kinerja manajerial-ukuran yang termasuk pengawasan, evaluasi, dan perencanaan. Hasil penelitian Lau (2011) juga menunjukkan bahwa kejelasan peran berhubungan langsung dengan kinerja manajerial. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan:

H5 : *Kejelasan peran berhubungan positif dengan kinerja manajerial.*

2.6 Hubungan Keadilan Prosedural dengan Kinerja Manajerial

Penelitian mengenai keadilan prosedural berada dalam konteks akuntansi, hukum, politik, organisasi dan manajemen menunjukkan bahwa keadilan prosedural kemungkinan akan mempengaruhi sikap dan perilaku orang (misalnya Alexander dan Ruderman, 1987). Tang dan Sarfield-Baldwin (1996) menyatakan bahwa jika manajer dapat menerapkan aturan secara adil dan konsisten kepada seluruh karyawan dan memberi upah pada mereka berdasarkan kinerja dan prestasi tanpa prasangka pribadi, maka karyawan akan memiliki persepsi positif terhadap keadilan prosedural, sehingga kepuasan, komitmen dan keterlibatan lebih tinggi. Hopwood (1972) juga menyarankan bahwa proses evaluasi kinerja yang dilihat tidak adil oleh bawahan akan menjadi sumber konflik, ketegangan dan kecemasan. Kaplan dan Atkinson (1998) mencatat bahwa ada pertimbangan perilaku penting dimana sistem pengukuran kinerja harus mencerminkan aspek utama yaitu sistem yang adil. Dengan

demikian apabila karyawan merasa proses evaluasi kinerja mereka dirasakan adil maka mereka akan termotivasi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Sebaliknya jika karyawan merasa proses evaluasi kinerja mereka tidak adil maka akan menurunkan kinerja mereka.

Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan:

H6 : *Keadilan prosedural dalam evaluasi kinerja berhubungan positif dengan kinerja.*

2.7 Mediasi Konflik Peran

Konflik peran dalam pengukuran kinerja dapat terjadi apa ukuran kinerja yang digunakan tidak jelas. Konflik peran dapat menimbulkan situasi yang tidak nyaman dalam bekerja dan menurunkan motivasi serta dapat menurunkan kinerja. Fried (2008) menyatakan pengaruh konflik peran sering terjadi pada level kinerja yang lebih rendah. Walaupun dalam penelitian Burney dan Widener (2007) tidak menguji efek mediasi konflik peran terhadap hubungan pengukuran kinerja dengan kinerja manajerial, dalam penelitian ini diusulkan mediasi konflik peran dalam hubungan pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan dengan kinerja manajerial. Pengujian ini didasarkan pada hipotesis 1a dan 1b dan hipotesis 4. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan:

H7a : *Pengukuran kinerja keuangan berhubungan tidak langsung dengan kinerja manajerial melalui konflik peran.*

H7b : *Pengukuran kinerja non keuangan berhubungan tidak langsung dengan kinerja manajerial melalui konflik peran.*

2.8 Mediasi Kejelasan Peran

Baron and Kenny (1986) menyatakan bahwa mediasi ditunjukkan apabila variabel independen signifikan mempengaruhi variabel mediasi dan variabel mediasi mempengaruhi variabel dependen. Hubungan antara pengukuran kinerja nonkeuangan secara tidak langsung

melalui konflik peran dan kejelasan peran (Baron & Kenny, 1986). Lau (2011) menemukan bahwa hubungan pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial secara tidak langsung melalui kejelasan peran. Kriteria alat ukur kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja meningkatkan kejelasan sasaran yang akan dicapai sehingga dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut dihipotesiskan:.

H8a : *Pengukuran kinerja keuangan berhubungan tidak langsung dengan kinerja manajerial melalui kejelasan peran.*

H8b : *Pengukuran kinerja non keuangan berhubungan tidak langsung dengan kinerja manajerial melalui kejelasan peran.*

2.9 Mediasi Keadilan Prosedural

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa persepsi keadilan dari proses evaluasi kinerja yaitu keadilan yang dirasakan dari semua aspek proses organisasi dan prosedur yang digunakan oleh atasan untuk mengevaluasi kinerja bawahan mereka, berkomunikasi, umpan balik kinerja dan menentukan penghargaan mereka seperti promosi dan kenaikan gaji (Lind dan Tyler, 1988; McFarlin dan Sweeney, 1992).

Apabila individu dalam organisasi memiliki persepsi yang baik terhadap keadilan dalam penentuan kriteria ukuran kinerja maka dapat meningkatkan motivasi mereka untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Sebaliknya jika persepsi mereka jelek terhadap ukuran kinerja dan merasa tidak adil maka akan mempengaruhi perilaku mereka. Magner et al. (1995) menyatakan bahwa salah satu penyebab sikap kebencian disebabkan sikap negatif terhadap pengambil keputusan yang dapat diidentifikasi dengan hasil yang buruk dan prosedur yang tidak adil. Hasil penelitian Lau dan Sholihin (2005), Lau dan Wong (2008)

menunjukkan bahwa adanya keadilan dalam prosedur evaluasi kinerja dapat meningkatkan kepuasan kerja bawahan. Karena itu, baik pembenaran teoritis dan bukti empiris yang menunjukkan bahwa seperti tindakan nonfinansial dapat mempengaruhi keadilan prosedural dan meningkatkan kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka dihipotesiskan

H9a : *Pengukuran kinerja keuangan berhubungan tidak langsung dengan kinerja manajerial melalui keadilan procedural.*

H9b : *Pengukuran kinerja non keuangan berhubungan tidak langsung dengan kinerja manajerial melalui keadilan procedural.*

2.10 Model Penelitian

Model penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1

III. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Data mengenai jumlah Bank diperoleh dari UPT media center Provinsi Riau. Dari sumber yang diperoleh terdapat 46 Bank yang berada di pekanbaru. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan Bank yang tergolong pada lower dan middle manajer. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling method*) dengan adanya kriteria sampel yang harus dipenuhi. Penentuan kriteria tersebut dengan pertimbangan bahwa manajer atau kepala bagian setingkat manajer yang bekerja pada perusahaan perbankan yang berada di pekanbaru.

3.2. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengantarkan langsung kuisisioner ke Bank yang menjadi obyek penelitian dengan menunjukan kuisisioner ke responden yang menjadi sasaran penelitian. Jika dimungkinkan peneliti melakukan wawancara dengan pihak perusahaan sehingga meyakinkan pihak perusahaan tentang keseriusan penelitian ini. Setiap Bank disebarakan sebanyak 3-5 eksemplar kuisisioner. Total kuisisioner yang disebarakan adalah sebanyak 160 eksemplar kuisisioner.

3.3 Pengukuran Variabel

Pengukuran kinerja Keuangan dan Non Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan menggunakan ukuran terdiri dari 3 item mengukur kinerja keuangan dan 13 item pertanyaan yang berasal dari pengukuran non keuangan yang diadopsi dari Kaplan dan Norton (1992). Setiap pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang menunjukkan seberapa sering pengukuran kinerja yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja yang terdiri 4 perspektif kinerja dari *Balancedscorecard* yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Poin 1= Tidak Pernah sampai dengan 5= Sangat Sering.

Konflik Peran

Merupakan gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi yang menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja. Untuk mengukur konflik peran digunakan kuisisioner yang dikembangkan oleh Rizzo et al (1970) yang menggunakan 10 item pertanyaan yang diukur dengan skala likert 5 poin dengan rangking 1= sangat salah sampai dengan 5= sangat benar.

Kejelasan peran

Kejelasan peran diukur dengan instrument yang dikembangkan oleh Rizzo et al (1970) yang terdiri dari 4 item pertanyaan. Variabel diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang dengan rangking 1= sangat salah sampai dengan 5= sangat benar. Responden diminta menilai tentang kejelasan cara melakukan pekerjaan, kejelasan informasi, kebijakan yang jelas, kejelasan bagaimana melaksanakan pekerjaan.

Keadilan Prosedural

Variabel ini digunakan untuk menaksir respon keadilan prosedural yang meliputi konsisten, akurasi, koreksi, bias, dan informasi dengan menggunakan skala 5 poin dimana skala 1 menunjukkan sangat tidak adil dan 5 menunjukkan sangat adil. Variabel ini terdiri dari 6 pertanyaan yang diadopsi dari Tang, Li Ping (1996).

Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja menggunakan 5 item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yaitu poin 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju. Indikator kepuasan kerja yang digunakan adalah tingkat kesukaan terhadap pekerjaan, antusiasme dan kenyamanan dan kepuasan terhadap pekerjaan. Kuisisioner dikembangkan oleh Campbel (1998)

Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial menurut Mahoney *et al* (1963) dalam Hall (2004) adalah suatu kecakapan manajer dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial antara perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi dan representasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuisisioner, manajer diminta menilai sendiri kinerjanya yang dikembangkan oleh Mahoney (1963). Instrumen ini menggunakan delapan pertanyaan dengan cara memilih salah

satu nilai pada skala Likert, dimana skala 1-2 rendah, skala 3 menunjukkan rata-rata, dan skala 4-5 tinggi.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Model (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghazali (2006), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan metode analisis yang powerful (Ghozali, 2006), karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya, data harus terdistribusi normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori.

PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator (variable manifest/ variable observed) sebagai proksi. Dalam PLS variabel independen sering disebut juga variabel eksogen, sedangkan variable dependen dapat disebut juga variabel endogen. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif. Dalam penelitian ini menggunakan indikator reflektif karena variabel laten mempengaruhi indikatornya (Ghozali, 2006).

Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variable laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstraknya) dispesifikasi Ghazali (2006).

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan indikatornya (*loading*). Ketiga, berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstantaregresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama, menghasilkan *weight estimate*, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi (Ghozali, 2006).

IV. Analisis Data dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Responden

Jumlah kuisioner yang disebar adalah sebanyak 160 eksemplar. Jumlah kuisioner yang terkumpul sampai dengan batas waktu yang ditentukan adalah sebanyak 73 kuisioner. Namun kuisioner yang dapat digunakan dan diolah hanya sebanyak 67 kuisioner, Sebanyak 6 kuisioner tidak dapat digunakan berhubung karena tidak lengkap. Demografi responden dapat dilihat pada tabel 4.1

4.2 Hasil Pengujian *outer model*

Convergent validity

Hasil pengujian *Convergent validity* dapat dilihat dengan cara evaluasi *measurement (outer) model* yaitu melihat besarnya *loading factor* untuk masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan valid jika memiliki nilai *cross loading* $\geq 0,5$. Tetapi jika nilai *cross loading* $< 0,5$ maka harus dieksekusi. Hasil pengolahan menunjukkan beberapa item tidak valid yaitu item

NFM5, NFM7, NFM10, sehingga harus dikeluarkan. Hasil analisis cross loading setelah item yang tidak valid dikeluarkan adalah sebagai berikut (tabel 4.2)

Hasil pengujian convergent validity menunjukkan nilai cross loading pada tabel diatas berada pada nilai $\geq 0,5$ yang berarti seluruh item yang digunakan telah memenuhi *convergent validity*.

Discriminant Validity

Discriminant validity dapat diketahui dengan melihat nilai *avearge variance extrated* (AVE) untuk setiap konstruk. Validitas diskriminan terpenuhi jika akar AVE memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan korelasi antara konstruk. AVE dan akar AVE dapat dilihat pada tabel Tabel 4. 3. Hasil analisis menunjukkan nilai AVE berada diatas 0.5 dan akar AVE memiliki nilai yang tinggi yaitu berada diatas 0.8. Perbandingan antara akar *avearge variance extrated* (AVE) dengan *latent variable correlations* disajikan pada tabel 4.4. Hasil pengujian menunjukkan akar AVE memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk, yang berarti validitas diskriminan terpenuhi.

Composite reliability

Pengujian reliabilitas yaitu dengan melihat nilai *composite reliability*. Hasil pengujian menunjukkan variabel memiliki nilai *composite realibility* berada diatas 0.9 yang berarti *reliability* baik. Hasil pengujian *composite reliability* dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut .

4.3 Hasil Pengujian Inner Model

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel dependen, *Stone-Geisser Q-square*

test untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. R square dapat dilihat pada Tabel 4.6

Hasil pengujian menunjukkan nilai *R-square* konstruk Konflik peran (RC) sebesar 0.594, Kejelasan Peran (RCL) sebesar 0,221. Keadilan prosedural (PF) sebesar 0.846 , konstruk kinerja manajerial (MP) sebesar 0.727. Semakin tinggi nilai R-square, maka semakin besar kemampuan variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan struktural.

Structural Equation Model (SEM)

Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan *Structural Equation Model (SEM)*. Pengujian dilakukan dengan bantuan program *SmartPLS*. Hasil pengujian diperoleh dilihat pada gambar 4.1.

4.4. Hasil Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari besarnya nilai t-statistik. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah $\pm 1,645$ (1-tailed) dan $\pm 1,960$ signifikan pada $p < 0.05$ (2-tailed). Hasil estimasi *t-statistik* dapat dilihat pada tabel 4. 7

Hasil Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis 1a yaitu penggunaan ukuran kinerja keuangan dalam evaluasi kinerja berhubungan negatif dengan konflik peran menunjukkan nilai dengan t statistic sebesar 0.131 dibandingkan dengan titik kritis $< \pm 1,645$ (1-tailed) pada $\alpha 5\%$ yang berarti hipotesis ditolak. Sedangkan hasil pengujian hipotesis 1b yaitu penggunaan ukuran kinerja nonkeuangan dalam evaluasi kinerja berhubungan negatif dengan konflik peran

menunjukkan nilai dengan t statistik 1.99 dibandingkan dengan titik kritis $>\pm 1,645$ (1-tailed) pada α 5% yang berarti hipotesis diterima. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengukuran kinerja yang menggunakan ukuran nonkeuangan lebih memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan penggunaan ukuran kinerja non keuangan. Penelitian ini konsisten dengan Lau (2011)

Hasil Pengujian Hipotesis 2.

Hasil pengujian hipotesis 2a yaitu penggunaan ukuran kinerja keuangan dalam evaluasi kinerja berhubungan positif dengan kejelasan peran menunjukkan nilai t statistik sebesar 0.943 dibandingkan dengan titik kritis $< \pm 1,645$ (1-tailed) pada α 5% yang berarti hipotesis ditolak. Sedangkan hasil pengujian hipotesis 2b yaitu penggunaan ukuran kinerja nonkeuangan dalam evaluasi kinerja berhubungan positif dengan kejelasan peran menunjukkan nilai t statistik sebesar 5.047 dibandingkan dengan titik kritis $> \pm 1,645$ (1-tailed) pada α 5% yang berarti hipotesis dapat dibuktikan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lau (2011).

Hasil Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian hipotesis 3a yaitu penggunaan ukuran kinerja keuangan dalam evaluasi kinerja berhubungan positif dengan keadilan prosedural menunjukkan nilai t statistik sebesar 1.8 dibandingkan dengan titik kritis $> \pm 1,645$ (1-tailed) pada α 5% yang berarti hipotesis diterima. Sedangkan hasil pengujian hipotesis 3b yaitu penggunaan ukuran kinerja Nonkeuangan dalam evaluasi kinerja berhubungan positif terhadap keadilan prosedural menunjukkan nilai t statistik sebesar 5.258 dibandingkan dengan titik kritis $> \pm 1,645$ (1-tailed) pada α 5% yang berarti hipotesis diterima. Hasil penelitian mendukung penelitian Lau

dan Sholihin (2005) dan Sholihin dan Pike (2010) yang menunjukkan pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan berhubungan dengan keadilan dalam evaluasi kinerja.

Hasil Pengujian hipotesis 4

Hasil pengujian hipotesis 4 yaitu konflik peran berhubungan negatif dengan kinerja manajerial menunjukkan nilai t statistik sebesar 1.721 dibandingkan dengan titik kritis $> \pm 1,645$ (1-tailed) pada α 5% yang berarti hipotesis diterima. Hasil penelitian mendukung penelitian Burney dan Widener (2007).

Hasil Pengujian Hipotesis 5

Hasil pengujian hipotesis 5 yaitu kejelasan peran berhubungan positif dengan kinerja manajerial menunjukkan nilai t statistic sebesar 3.462 dibandingkan dengan titik kritis $> \pm 1,645$ (1-tailed) pada α 5% yang berarti hipotesis diterima. Hasil penelitian mendukung penelitian Lau (2007) dan Hall (2008).

Hasil Pengujian Hipotesis 6

Hasil pengujian hipotesis 6 yaitu keadilan prosedural dalam evaluasi kinerja berhubungan positif dengan kinerja menunjukkan nilai t statistic sebesar 0.763 dibandingkan dengan titik kritis $< \pm 1,645$ (1-tailed) pada α 5% yang berarti hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan teori yang dinyatakan bahwa keadilan prosedural dapat mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Kemungkinan pengaruh keadilan yang dirasakan tidak berdampak langsung terhadap kinerja akan tetapi lebih dahulu mempengaruhi kepuasan kerja sebagaimana yang diteliti oleh Sholihin (2005) bahwa keadilan yang dirasakan individu dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja.

Hasil Pengujian Hipotesis 7

Hasil pengujian hipotesis 7a yaitu mediasi konflik peran terhadap hubungan pengukuran kinerja keuangan tidak signifikan dikarenakan pengukuran kinerja keuangan terhadap konflik peran tidak signifikan (H1a) Sedangkan hipotesis 7a mediasi konflik peran terhadap hubungan pengukuran kinerja non keuangan dengan kinerja manajerial menunjukkan hubungan pengukuran kinerja nonkeuangan dengan konflik peran signifikan (H1b) dan hubungan konflik peran dengan kinerja manajerial juga signifikan (H4). Total hubungan tidak langsung adalah $-0.637 \times -0.159 = 0.10$. Sedangkan hubungan langsung pengukuran kinerja non keuangan dengan kinerja manajerial signifikan dengan t statistik $1.781 > \pm 1,645$ (1-tailed) dengan koefisien hubungan 0.619. Nilai koefisien hubungan tidak langsung lebih kecil dari hubungan langsung yang berarti hipotesis mediasi kejelasan peran tidak dapat dibuktikan.

Hasil Pengujian Hipotesis 8

Hasil pengujian hipotesis 8a yaitu mediasi kejelasan peran terhadap hubungan pengukuran kinerja keuangan dengan kinerja manajerial tidak signifikan dikarenakan hubungan pengukuran kinerja keuangan terhadap konflik peran tidak signifikan (H2a). Sedangkan hipotesis 8b mediasi kejelasan peran terhadap hubungan pengukuran kinerja non keuangan dengan kinerja manajerial menunjukkan hubungan pengukuran kinerja nonkeuangan dengan kejelasan peran signifikan (H2b) dan hubungan kejelasan peran dengan kinerja manajerial juga signifikan (H5). Total hubungan tidak langsung adalah $1.018 \times 0.501 = 0.510$ sedangkan hubungan langsung pengukuran kinerja non keuangan dengan kinerja manajerial signifikan dengan t statistic $1.781 > \pm 1,645$ (1-tailed) dengan koefisien

hubungan 0.619. Koefisien hubungan tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan hubungan langsung berarti hipotesis mediasi kejelasan peran tidak dapat dibuktikan.

Hasil Pengujian Hipotesis 9

Hasil pengujian hipotesis 9a yaitu mediasi keadilan prosedural terhadap hubungan pengukuran kinerja keuangan dengan kinerja manajerial tidak signifikan dikarenakan hubungan pengukuran kinerja keuangan dengan kinerja manajerial tidak signifikan yaitu t statistic $1.083 < \text{titik kritis } \pm 1,645$ (1-tailed) . Sedangkan hipotesis 9b mediasi keadilan prosedural terhadap hubungan pengukuran kinerja non keuangan dengan kinerja manajerial menunjukkan hubungan pengukuran kinerja nonkeuangan dengan keadilan procedural signifikan (H3b) dan hubungan keadilan prosedural dengan kinerja manajerial tidak signifikan (H6). Dengan demikian hipotesis ini juga tidak dapat dibuktikan.

V. Simpulan, Keterbatasan dan Implikasi

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan dengan konflik peran, kejelasan peran, keadilan prosedural dan kinerja manajerial. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan ukuran kinerja nonkeuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konflik peran, kejelasan peran dan keadilan prosedural. Sedangkan penggunaan ukuran kinerja keuangan dalam evaluasi kinerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap konflik peran dan kejelasan peran. Penggunaan ukuran kinerja keuangan memiliki hubungan yang signifikan dengan keadilan prosedural. Penelitian ini mendukung penelitian Lau (2011) yang menyatakan bahwa pengaruh ukuran kinerja nonkeuangan lebih kuat dibandingkan dengan ukuran kinerja

keuangan terhadap kejelasan peran. Namun hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan mediasi variabel konflik peran, kejelasan peran dan keadilan prosedural.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Lau dan Sholihin (2005) dan Sholihin dan Pike (2010) menunjukkan bahwa pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan berhubungan dengan keadilan dalam evaluasi kinerja. Namun dalam penelitian ini keadilan prosedural tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja manajerial.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu kemampuan peneliti untuk mengumpulkan data yang cukup. Sampel dalam penelitian ini masih tergolong sedikit dan obyek penelitian yang digunakan hanya mencakup lokasi yang sempit.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu bersifat prediktif. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik analisis untuk statistic parametric dengan AMOS atau LISREL.

5.3 Implikasi

Penelitian ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan mengingat masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan obyek dan lokasi penelitian dan memperbanyak jumlah sampel penelitian sehingga penelitian selanjutnya lebih dapat digeneralisasi.

Penelitian mengenai pengukuran kinerja banyak dikembangkan oleh peneliti untuk menguji bagaimana pengaruh pengukuran kinerja yang digunakan terhadap perilaku individu dalam organisasi. Selain itu pengaruh pengukuran kinerja juga diteliti bagaimana dampaknya terhadap kinerja organisasi.

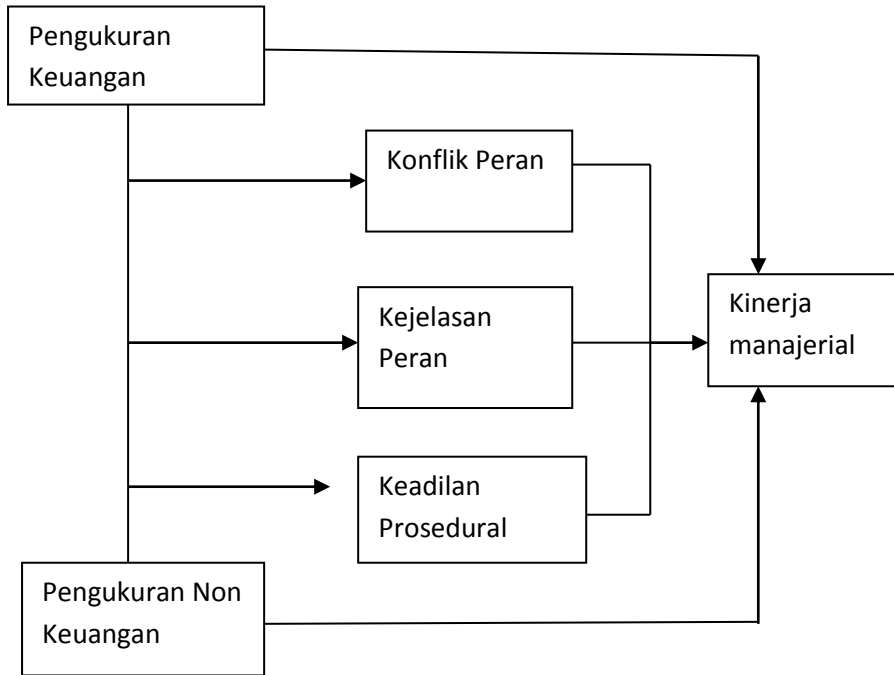
Daftar Pustaka

- Banker, R.D., H. Chang and M. Pizzini, 2002. The Balanced Scorecard: Judgmental Effects of Performance Measures Linked to Strategy. *British Accounting Review* 79: pp. 1-23.
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. 1986. The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182.
- Bedeian, A. G., & Armenakis, A. A. 1981. A path-analytic study of the consequences of role conflict and ambiguity. *The Academy of Management Journal*, 24(2), 417–424.
- Burney, L. L., & Widener, S. (2007). Strategic performance measurement systems, job relevant information and managerial behavioral responses — Role stress and performance. *Behavioral Research in Accounting*, 19, 43–69.
- Brockner, J., Siegel, P., 1996. Understanding the interaction between procedural and distributive justice: role of trust. In: Kramer, R.M., Tyler, T.R. (Eds.), *Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research*. Sage Publications, London.
- Fisher, Richard T, 2001, Role Stress, The Type A Behavior Pattern, And External Auditor, Job Satisfaction and Performance, *Jornal of Behavioral Research in Accounting*
- Ghozali, Imam .2006. *Struktural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Universitas Diponegoro
- Hasmarini, Dwi Penny. 2008. Pengaruh Keadilan Prosedural dan Distributif terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Afektif. *Jurnal Bisnis Strategi, Vol. 17, No. 1, Juli 2008*.
- Hall, M. 2008. The effect of Comprehensive Performance Measurement Systems on Role Clarity, Psychological Empowerment and Managerial Performance. *Accounting, Organizations and Society* ,141–163
- Hartmann, F., & Slapnicar, S. 2009. How formal performance evaluation affects trust between superior and subordinate managers. *Accounting Organizations and Society*. 34 (6,7), 695-886.
- Hartmann, F., & Slapnicar, S. 2009, The perceived fairness of performance evaluation: The role of Uncertainty, *Management Accounting Research* 23; 17– 33
- Ittner, C, and D. Larcker. 1998. Are nonfinancial measures leading indicators of financial performance? An analysis of customer satisfaction. *Journal of Accounting Research* 36 (3): 1-46.
- Jackson, S., & Schuler, R. 1985. A meta-analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 36, 16–78.
- Kahn, R., Wolfe, D., Quinn, R., Snoek, J., & Rosenthal, R. 1964. *Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Kaplan, R. S., & Atkinson, A. A. 1998. *Advanced management accounting*. (3rd ed.). New Jersey, USA: Prentice Hall Inc.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. 1996. *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Boston: Harvard Business School Press.
- Kline, R. B. 2005. *Principles and practice of structural equation modeling*. New York: Guilford Press.
- Lau, C. M., Low, L. C., & Eggleton, I. R. 1995. The impact of reliance on accounting performance measures on job-related tension and managerial performance: Additional evidence. *Accounting, Organizations and Society*, 20(5), 359–381.

- Lau, C. M., & Moser, A. 2008. Behavioral effects of nonfinancial performance measures: The role of procedural fairness. *Behavioral Research in Accounting*, 20 (2), 55–71.
- Lau, C. M., & Sholihin, M. 2005. Financial and nonfinancial measures: How do they affect job satisfaction? *The British Accounting Review*, 37, 389–413.
- Lau, C. M. 2011. Nonfinancial and financial performance measures: How do they affect employee role clarity and performance? *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*
- Lind, E.A., Tyler, T.R., 1988. *The Social Psychology Of Procedural Justice*. Plenum Press, New York.
- Lynch, R.L., Cross, K.F., 1991. *Measure Up*. Blackwell Publisers, Cambridge, MA.
- Magner, N. and Welker, R.B. (1994). ‘Responsibility center manager’s reactions to justice in budgetary resource allocation’. *Advances in Management Accounting*, 3: 237–253.
- Mahoney, T.A., T.H. Jerdee and S.J. Carroll. 1963. *Development of Managerial Performance: A Research Approach*. Cincinnati. OH: Soutwestern Publishing Co.
- McFarlin, D.B. and Sweeney, P.D. 1992. “Distributive and Procedural Justice as Predictors of Satisfaction with Personal and Organisational Outcomes”, *Academy of Management Journal*, 35(3), pp. 626–637.
- Otley, D.T., 1978. Budget use and managerial performance. *Journal of Accounting Research* 16, 12–148.
- Rizzo, J. R., House, R. J., & Lirtzman, S. I. 1970. Role conflict and ambiguity in complex organizations. *Administrative Science Quarterly*, 15, 150–163.
- Robbins, S. P. 2003. *Organizational Behavior*. 10th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Publishers.
- Sholihin Dan Pike, 2010 Organisational Commitment In The Police Service: Exploring The Effects Of Performance Measures, Procedural Justice And Interpersonal Trust, *Financial Accountability & Management*, 26(4), November 2010, 0267-4424
- Sholihin, et al ,2011, Goal-setting participation and goal commitment: Examining the mediating roles of procedural fairness and interpersonal trust in a UK financial services organization, *The British Accounting Review* 43 hal 135–146
- Tang, T.L., Sarfield-Baldwin, L.J., 1996. Distributive and procedural justice as related to satisfaction and commitment. *SAM Advanced Management Journal* 61, 25–31.
- Thibaut, J., Friedland, N. and Walker, L. (1974). “Compliance with Rule: Some Social Determinants”, *Journal of Personality and Social Psychology*, 30, pp. 782–801.
- Whitener, E.M., Brodt, S.E., Kosgaard, M.A., Werner, J.M., 1998. Managers as initiators of trust: an exchange relationship framework for understanding managerial trustworthy behavior. *Academy of Management Review* 23, 513–530

LAMPIRAN

Gambar 2.1 : Model Penelitian



Tabel 4.1 : Data Demografi Responden

No	Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
1	Jenis Kelamin:		
	- Laki –laki	47	70,14%
	- Perempuan	20	29,86%
2	Umur:		
	- 20 – 25	-	
	- 26 – 30	11	16,42%
	- 31 – 35	10	14,93%
	- 36 – 40	17	25,37%
	- 41 – 45	15	22,38%
	- 46 – 50	11	16,42%
- > 50	3	4,48%	
3	Pendidikan:		
	- SLTA	-	
	- D3	-	
	- S1	32	47,76%
	- S2	21	31,34%
- S3	8	11,9%	
4	Pengalaman manajer:		
	- 2 – 5 Tahun	38	56,71%
	- 6 – 10 Tahun	23	34,33%
	- 11 – 15 Tahun	6	8,96%
	- 16 – 20 Tahun	-	
- > 20 Tahun	-		

Sumber : Pengolahan data oleh Peneliti tahun 2013

Tabel 4.2 : Cross Loading

	FM	NFM	RC	RCL	PF	MP
FM1	0.913	0.92	-0.692	0.726	0.895	0.708
FM2	0.904	0.766	-0.508	0.628	0.707	0.68
FM3	0.884	0.832	-0.553	0.664	0.814	0.67
MP1	0.569	0.697	-0.591	0.738	0.648	0.843
MP2	0.666	0.771	-0.657	0.73	0.721	0.848
MP3	0.657	0.75	-0.632	0.8	0.718	0.844
MP4	0.688	0.879	-0.606	0.785	0.766	0.864
MP5	0.609	0.75	-0.635	0.776	0.72	0.833
MP6	0.583	0.671	-0.55	0.708	0.594	0.804
MP7	0.576	0.768	-0.591	0.794	0.651	0.875
MP8	0.554	0.744	-0.54	0.795	0.628	0.865
NFM1	0.675	0.888	-0.712	0.956	0.835	0.853
NFM11	0.719	0.885	-0.542	0.639	0.739	0.653
NFM12	0.785	0.926	-0.687	0.823	0.927	0.781
NFM13	0.846	0.894	-0.634	0.77	0.97	0.776
NFM14	0.804	0.881	-0.527	0.702	0.856	0.708
NFM2	0.719	0.882	-0.712	0.946	0.822	0.815
NFM3	0.617	0.782	-0.572	0.776	0.672	0.726
NFM4	0.755	0.847	-0.639	0.868	0.84	0.815
NFM8	0.734	0.811	-0.529	0.643	0.763	0.656
NFM9	0.887	0.897	-0.648	0.861	0.996	0.779
PF1	0.712	0.802	-0.497	0.636	0.9	0.644
PF2	0.719	0.915	-0.586	0.693	0.86	0.734
PF3	0.78	0.878	-0.661	0.765	0.908	0.76
PF4	0.772	0.901	-0.654	0.813	0.922	0.732
PF5	0.645	0.672	-0.514	0.582	0.713	0.496
PF6	0.707	0.88	-0.649	0.761	0.885	0.729
RC1	-0.518	-0.648	0.794	-0.827	-0.615	-0.661
RC10	-0.396	-0.488	0.647	-0.48	-0.503	-0.435
RC2	-0.443	-0.48	0.781	-0.6	-0.466	-0.514
RC3	-0.531	-0.61	0.844	-0.663	-0.59	-0.619
RC4	-0.533	-0.638	0.775	-0.757	-0.567	-0.628
RC5	-0.423	-0.526	0.74	-0.596	-0.531	-0.476
RC6	-0.536	-0.708	0.723	-0.781	-0.723	-0.626
RC7	-0.529	-0.636	0.824	-0.643	-0.604	-0.55
RC8	-0.503	-0.573	0.826	-0.637	-0.535	-0.566
RC9	-0.582	-0.646	0.819	-0.699	-0.542	-0.687
RC11	0.559	0.743	-0.704	0.884	0.702	0.706
RC12	0.522	0.733	-0.679	0.872	0.638	0.768
RC13	0.678	0.883	-0.707	0.875	0.763	0.842
RC14	0.719	0.938	-0.789	0.916	0.817	0.861

Sumber : Hasil Output PLS tahun 2013

Tabel 4.3 : Average variance extracted (AVE) dan Akar AVE

	Average variance extracted (AVE)
FM	0.81
NFM	0.757
RC	0.607
RCL	0.787
PF	0.753
MP	0.718

Sumber : Hasil Output PLS tahun 2013

Tabel 4.4 : Korelasi antar konstruk

	FM	NFM	RC	RCL	PF	MP
FM	1					
NFM	0.879	1				
RC	-0.603	-0.675	1			
RCL	0.691	0.838	-0.724	1		
PF	0.859	0.916	-0.653	0.756	1	
MP	0.772	0.867	-0.737	0.864	0.798	1

Sumber : Hasil Output PLS tahun 2013

Tabel 4.5 : Composite Reliability

	Composite Reliability
FM	0.928
NFM	0.969
RC	0.928
RCL	0.937
PF	0.948
MP	0.953

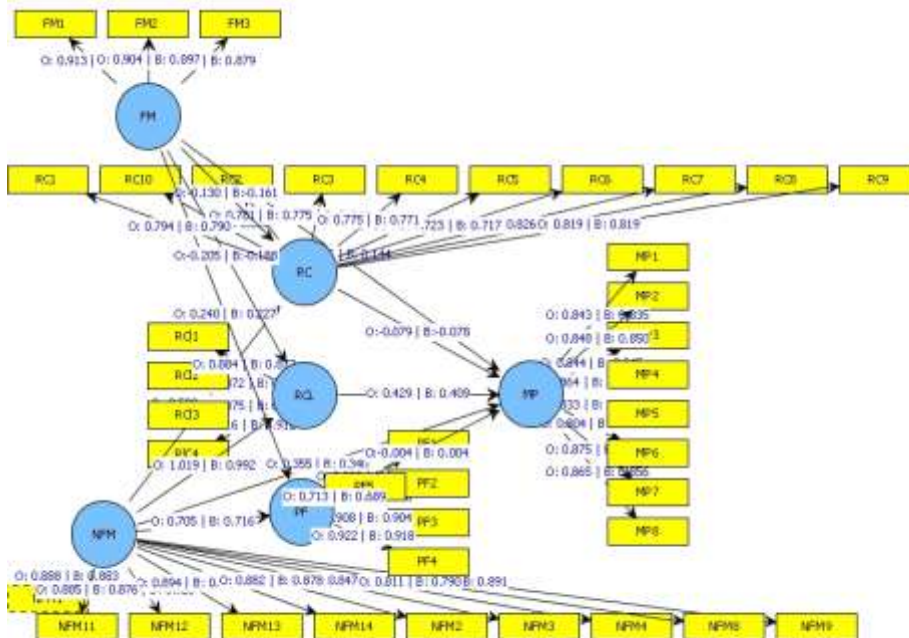
Sumber : Hasil Output PLS tahun 2013

Tabel 4.6 : R Square

	R-square
RC	0.594
RCL	0.221
PF	0.846
MP	0.727

Sumber : Hasil Output PLS tahun 2013

Gambar 4.1. Full Struktural Equation Model



Tabel 4.7 : Result for inner weight

Hipotesis		original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	Kesimpulan
H1a	FM -> RC	-0.042	-0.071	0.324	0.131	Ditolak
H1b	NFM -> RC	-0.637	-0.603	0.32	1.99	Diterima
H2a	FM -> RCL	-0.204	-0.171	0.216	0.943	Ditolak
H2b	NFM -> RCL	1.018	0.981	0.202	5.047	Diterima
H3a	FM -> PF	0.235	0.228	0.131	1.8	Diterima
H3b	NFM -> PF	0.709	0.717	0.135	5.258	Diterima
H4	RC -> MP	-0.159	-0.159	0.092	1.721	Diterima
H5	RCL -> MP	0.501	0.476	0.145	3.462	Diterima
H6	PF -> MP	0.124	0.131	0.163	0.763	Ditolak
	FM -> MP	-0.336	-0.297	0.31	1.083	
	NFM -> MP	0.619	0.659	0.347	1.781	

Sumber : Hasil Output PL

**The Effect of Budgetary Participation on Job Performance with
Psychological Capital and Organizational Commitment as
an Intervening Variable
(Empirical Study on Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Districts of Lebak)**

NURHAYATI SOLEHA*

GALIH

LUSI TAMSIL

University of Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract: *This study aimed to examine the effect of budgetary participation on job performance, both directly and indirectly through psychological capital and organizational commitment.*

The study population was all employees of Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Districts of Lebak. The total sample of 76 employees, who were selected using purposive sampling method. This study uses data collected from the results of the questionnaire were sent to Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Districts of Lebak.

PLS software used as a tool to test this hypothesis. The findings of this study are: budgetary participation affects either directly or indirectly to job performance, psychological capital and organizational commitment mediates the relationship between budgetary participation and performance of employees in the Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah District of Lebak.

Keywords: *Budget Participation, Psychological Capital, Organizational Commitment, Job Performance.*

* Corresponding author: nurhayatisoleha@yahoo.com

I. Pendahuluan

Mardiasmo (2009:61) mengemukakan bahwa salah satu alat penilaian kinerja organisasi sektor publik adalah anggaran. Pengelolaan anggaran yang buruk akan berdampak luas pada pembangunan daerah termasuk tingginya angka kemiskinan dan buruknya sumber daya manusia. Menurut data BPS tahun 2010, Jumlah rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Lebak mencapai 52% dari 148 Desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Lebak (www.banten.bps.go.id). Selain itu, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lebak dinilai masih lemah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten menemukan adanya permasalahan kelemahan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak serta adanya pengelolaan PAD yang belum memadai sehingga mengakibatkan kurangnya penerimaan. Pengelolaan PAD yang belum memadai menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak masih buruk (www.kabarbanten.com).

Buruknya pengelolaan keuangan daerah dapat disebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran (Salahudin, 2013). Proses pengelolaan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan berbagai pihak. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran pimpinan satuan kerja dalam melaksanakan satuan program atau bagian dari program. Penganggaran memerlukan kerjasama para pimpinan satuan kerja serta para pegawai dalam organisasi pemerintahan. Partisipasi dalam proses penganggaran dinilai dapat meningkatkan kinerja pegawai satuan kerja yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan (Herimingsih, 2009). Para bawahan merasa aspirasinya dihargai dan mempunyai pengaruh pada anggaran yang disusun akan lebih mempunyai tanggungjawab dan konsekuensi moral untuk meningkatkan kinerja sesuai yang ditargetkan dalam anggaran (Luthan, 2009).

Dalam pengelolaan kebijakan anggaran dibutuhkan SDM yang berkualitas, professional dan bervisi jangka panjang (Salahudin, 2013). Banyak pemerintah daerah tidak memiliki SDM pendukung implementasi kebijakan APBD sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan dengan baik. Sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting dalam sebuah organisasi. Baik-buruknya organisasi sangat ditentukan oleh baik-buruknya kinerja manusia yang ada didalamnya (Salahudin, 2013).

Peterson *et al.*, (2011) menyatakan bahwa *psychological capital* merupakan bentuk dari sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Setiap individu memiliki karakteristik tertentu yang akan mempengaruhi perilaku mereka di tempat kerja. Salah satu karakteristik yang juga sangat mempengaruhi perilaku tersebut adalah ciri pribadi mereka atau ciri psikologis yang bersifat positif yang dapat membantu individu tersebut untuk dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan kinerjanya (Luthans *et al.*, 2007).

Komitmen terhadap organisasi juga merupakan salah satu pemicu kinerja (Nouri dan Parker, 1998). Salah satu pencapaian hasil yang maksimal dari seorang pegawai dalam suatu bidang pekerjaan sering ditentukan oleh komitmen, baik komitmen professional maupun komitmen organisasi (Nouri dan Parker, 1998). Komitmen organisasi diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja pegawai/ aparat Pemerintah dalam Pemerintahan. Dengan adanya komitmen organisasi dalam pelayanan publik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah sebagai instansi sektor publik. Karyawan yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja yang lebih tinggi (Mowday *et al.*, 1979).

Masalah yang berkaitan dengan hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan prestasi kerja merupakan masalah yang banyak diperdebatkan, bukti-bukti empiris memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten (Venkatesh dan Blaskovich, 2012).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Brownell dan McInnes (1986), Nouri dan Parker (1998), Riyadi (2000) serta Venkatesh dan Blaskovich (2012) menemukan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja. Sementara hasil penelitian Milani (1975) dan Kenis (1979) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara partisipasi anggaran dengan kinerja. Hal ini terjadi karena hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja tergantung pada faktor-faktor situasional (Milani, 1975). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung partisipasi anggaran, *psychological capital* dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap *psychological capital*?
2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap komitmen organisasi?
3. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pegawai?
4. Apakah *psychological capital* berpengaruh terhadap kinerja pegawai?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai?
6. Apakah *Psychological capital* dan komitmen organisasi memediasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja pegawai?

II. Telaah Teori

Partisipasi Anggaran

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka (Brownell, 1982).

Menurut Chong dan Chong (2002) partisipasi anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran adalah proses di mana bawahan atau pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran menunjukkan luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran. Partisipasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta bekerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan. Dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja aparat pemerintah akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka pegawai akan menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan pegawai juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunannya (Milani, 1975).

Psychological Capital

Psychological capital (PsyCap) adalah keadaan perkembangan psikologi individu yang positif, yang dicirikan oleh: (1) adanya kepercayaan diri (*self-efficacy*) melakukan tindakan yang perlu untuk mencapai sukses dalam tugas-tugas yang menantang; (2) atribusi

yang positif (*optimism*) tentang sukses masa sekarang dan yang akan datang; (3) persistensi dalam mencapai tujuan, dengan kemampuan mendefinisikan kembali jalur untuk mencapai tujuan jika diperlukan (*hope*) untuk mencapai kesuksesan; dan (4) ketika menghadapi masalah dan kesulitan, mampu bertahan dan terus maju (*resiliency*) untuk mencapai sukses (Luthans *et al.*, 2007).

Self-Efficacy

Stajkovic dan Luthans (1998) mendefinisikan kepercayaan (*self-efficacy*) sebagai keyakinan individu tentang kemampuannya untuk menggerakkan motivasi, sumber daya kognitif, dan program tindakan yang diperlukan untuk berhasil dalam melaksanakan tugas tertentu dan dalam konteks tertentu.

Orang yang memiliki *self-efficacy* cenderung percaya pada kemampuan yang ada pada dirinya sehingga dapat menggerakkan motivasi, sumber daya kognitif yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dari tugas yang dibebankan (Rego *et al.*, 2010). Orang yang memiliki *self-efficacy* yang tinggi akan memilih suatu tugas yang menantang untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi kesulitan atau hambatan pada pekerjaan atau tugas tersebut.

Hope

Hope (harapan) didefinisikan oleh Snyder *et al.*, (1991) sebagai kondisi motivasi yang positif berdasarkan perasaan sukses (energi yang didorong oleh tujuan) dan adanya jalan (perencanaan untuk mencapai tujuan). Orang yang memiliki harapan yang tinggi sangat termotivasi untuk mencapai tujuannya, memiliki energi dan keinginan yang kuat serta determinasi yang tinggi untuk memenuhi harapannya (Rego *et al.*, 2010).

Luthans *et al.*, (2007) menyatakan bahwa *hope* merupakan suatu kognitif atau proses berpikir dimana individu mampu menyusun kenyataan dengan tujuan dan harapan yang

menarik atau menantang dan pada akhirnya mendapatkannya dengan cara determinasi *selfdirected*, energi, dan persepsi kontrol internal.

Optimism

Menurut Rego *et al.*, (2010) optimis adalah individu yang berharap bahwa hal-hal baik akan terjadi padanya, tidak mudah menyerah dan biasanya cenderung memiliki rencana tindakan dalam kondisi sesulit apapun. Luthans *et al.*, (2007) mendefinisikan optimisme sebagai model pemikiran dimana individu mengatribusikan kejadian positif ke dalam diri sendiri, bersifat permanent, dan penyebabnya bersifat *pervasive*, dan dilain hal menginterpretasikan kejadian negatif kepada aspek eksternal, bersifat sementara atau temporer, dan merupakan faktor yang disebabkan oleh situasi tertentu.

Resilient

Resilient didefinisikan sebagai kapasitas psikologis seseorang yang bersifat positif, dengan menghindarkan diri dari ketidakbaikan, ketidakpastian, konflik, kegagalan, sehingga dapat menciptakan perubahan positif, kemajuan dan peningkatan tanggung jawab (Luthans dan Jensen, 2002). Berbeda dengan *self-efficacy*, *hope*, dan *optimism* yang lebih bersifat proaktif, *resiliency* dari seseorang lebih bersifat reaktif, yang terjadi ketika seseorang berhadapan dengan perubahan, ketidakbaikan, atau ketidakpastian (Block & Kremen, 1996).

Orang yang memiliki *Resilient* atau ketahanan adalah orang yang mampu mengatasi ketidakpastian serta kegagalan dari tugas yang diberikan (Rego *et al.*, 2010). Ketahanan adalah kapasitas psikologis yang positif yang mendorong seseorang akan bangkit kembali dari ketidakpastian atau kegagalan maupun tambahan tugas yang dibebankan (Luthans dan Jensen 2002).

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sebuah dimensi sikap positif karyawan yang dapat dihubungkan dengan kinerja. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai tingkat keterikatan

perasaan dan kepercayaan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Komitmen organisasi adalah ikatan keterkaitan individu dengan organisasi sehingga individu tersebut merasa memiliki organisasi tempatnya bekerja (Supriyono, 2004).

Menurut *Porter et al.*, (1974) komitmen organisasi adalah kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Hal ini dapat ditandai dengan tiga hal, yaitu penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh- sungguh atas nama organisasi, keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi.

Komitmen organisasi bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada serta tekad dari dalam diri untuk mengabdikan pada organisasi. Bagi individu dengan komitmen organisasi tinggi, pencapaian tujuan organisasi merupakan hal penting. Sebaliknya, bagi individu atau karyawan dengan komitmen organisasi yang rendah akan mempunyai perhatian yang rendah pada pencapaian tujuan organisasi, dan lebih condong berusaha memenuhi kebutuhan pribadi. Komitmen organisasi yang kuat pada individu akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasi (Porter *et al.*, 1974).

Kinerja Pegawai

Mahoney *et al.*, (1963) menyatakan kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Gomes (1995) dalam Nugroho (2006) kinerja dipengaruhi oleh usaha, motivasi, kemampuan pegawai, dan juga kesempatan dan kejelasan tujuan-tujuan kinerja yang diberikan oleh organisasi kepada seorang pegawai. Penciptaan pekerjaan yang menantang akan menarik keinginan intrinsik yang dimiliki orang untuk menangani pekerjaannya dan

menghindari rasa bosan, kegiatan-kegiatan yang melelahkan yang menghasilkan sedikit hasil positif. Kinerja pegawai (*job performance*) dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang melaksanakan tanggung jawab dan tugas kerjanya. Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Singh *et al.*, 1996).

Kinerja pegawai mengacu pada prestasi kerja yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan organisasi. Pengelolaan untuk mencapai kinerja pegawai yang sangat tinggi terutama untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai meliputi strategi organisasi dan atribut individual antara lain kemampuan dan ketrampilan. Kinerja dapat meningkatkan kepuasan para pegawai dalam organisasi dengan kinerja tinggi daripada organisasi dengan kinerja rendah (Ostroff, 1992).

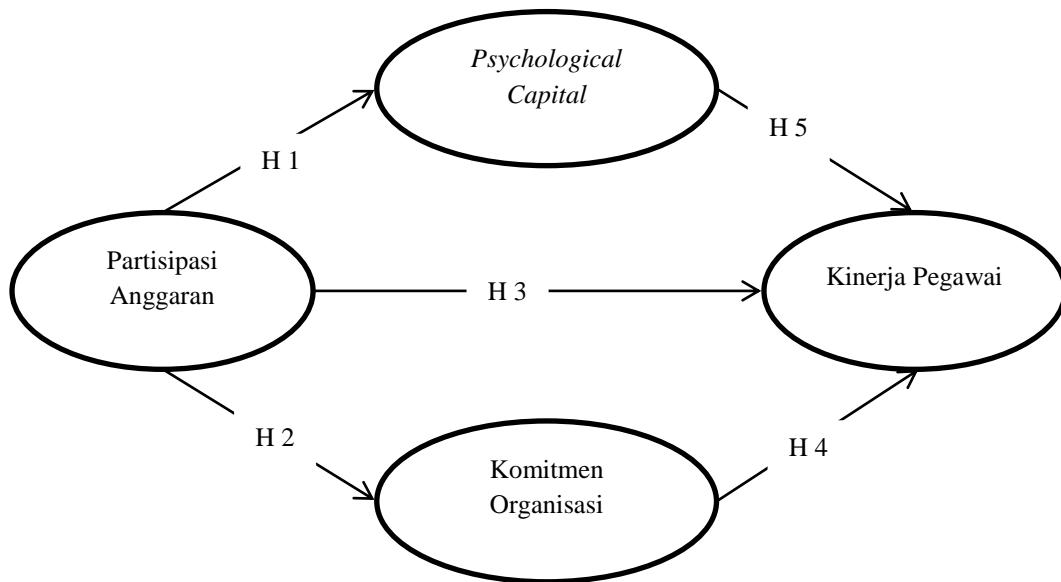
Pengembangan Hipotesis

Partisipasi anggaran dianggap dapat meningkatkan kinerja pegawai melalui *psychological capital* dan komitmen organisasi. Ketika setiap pegawai diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, maka pegawai tersebut dapat menuangkan ide-ide, gagasan, dan saran demi kesuksesan organisasi. Serta akan timbul pula tanggung jawab dalam dirinya untuk melaksanakan keputusan yang telah dibuat. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan diri (*self-efficacy*), mengembangkan tingkat harapan (*hope*), menyediakan lingkungan kerja yang optimis (*optimism*) dan membangun ketahanan (*resilient*) dengan menyediakan mekanisme bagi pegawai untuk membuat keputusan (Venkatesh dan Blashcovic, 2012). Hal inilah yang disebut *Psychological capital*. *Psychological capital* akan memiliki pengaruh terhadap perilaku positif karyawan berupa kinerja pegawai (Peterson *et al.*, 2011). Dengan demikian partisipasi anggaran dapat

berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara tidak langsung melalui *psychological capital* (Venkatesh dan Blaskovich, 2012).

Partisipasi anggaran juga akan meningkatkan komitmen terhadap organisasi (Nouri dan Parker, 1998). Karyawan yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran akan lebih memahami tujuan anggaran dan memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi (Nouri dan Parker, 1998). Komitmen yang tinggi terhadap organisasi secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja pegawai pada organisasi tersebut (Nouri dan Parker, 1998).

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Partisipasi Anggaran dan *Psychological Capital*

Partisipasi memberikan kesempatan pada individu untuk menerima dorongan dari atasan saat mereka bekerja dalam menetapkan anggaran, sehingga dapat membangun kepercayaan diri untuk berhasil dalam pencapaian anggaran. Dengan demikian, diharapkan bahwa tingkat yang lebih tinggi dalam partisipasi anggaran akan berhubungan dengan peningkatan pada *self-efficacy* (Venkatesh dan Blaskovich, 2012).

Lingkungan kerja partisipatif memungkinkan karyawan untuk mengatur tujuan dan menciptakan target ke arah mana mereka dapat mengarahkan kemauan yang efektif dalam

memelihara dan mengembangkan tingkat harapan karyawan (Luthans dan Youssef, 2004). Oleh karena itu, karyawan yang secara aktif berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran harus memiliki tingkat harapan (*hope*) yang lebih tinggi, yang memungkinkan mereka untuk tetap berkomitmen dalam mencapai tujuan mereka (Venkatesh dan Blaskovich, 2012).

Organisasi menggunakan partisipasi anggaran untuk menyediakan lingkungan kerja yang optimis dan memberikan dorongan bagi karyawan (Covaleski *et al.*, 2003). Oleh karena itu, proses partisipasi anggaran dianggap kondusif untuk mengembangkan optimisme (*optimism*) karyawan di tempat kerja dan diharapkan bahwa tingkat partisipasi anggaran yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat optimisme yang lebih tinggi (Venkatesh dan Blaskovich, 2012).

Peterson *et al.*, (2011) dalam Venkatesh dan Blaskovich (2012) menunjukkan bahwa atasan dapat membangun ketahanan (*resilient*) dengan menyediakan mekanisme bagi bawahan untuk membuat keputusan mengenai kinerja mereka. Partisipasi anggaran adalah contoh dari mekanisme tersebut, dengan demikian diharapkan bahwa hal tersebut memfasilitasi pengembangan tingkat ketahanan kerja karyawan (Venkatesh dan Blaskovich, 2012). Dari literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa:

H1 : *Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap psychological capital.*

Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi

Nouri dan Parker (1998) menyatakan komitmen organisasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran meningkatkan identifikasi para karyawan tidak hanya dengan sasaran anggaran tapi juga dengan tujuan organisasi karena komitmen organisasi mencakup penerimaan dan kepercayaan akan nilai dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi yang ada juga diharapkan

dapat meningkatkan kinerja para karyawan, karena komitmen organisasi dapat meningkatkan kesadaran karyawan untuk menjalankan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh.

Beberapa penelitian menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel *intervening* untuk memprediksi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja. Penelitian yang dilakukan Nouri dan Parker (1998) mengemukakan bahwa partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja melalui komitmen organisasi. Karyawan yang terlibat dan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran akan lebih memahami tujuan anggaran yang mencerminkan tujuan organisasi. Dengan karyawan memahami tujuan anggaran dan tujuan organisasi maka karyawan akan memiliki keselarasan antara tujuan karyawan dan tujuan organisasi (Nouri dan Parker, 1998). Hal ini memberi dampak karyawan akan memiliki komitmen (*affective*) organisasi yang lebih tinggi (Nouri dan Parker, 1998). Dari literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa:

H2 : *Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap komitmen organisasi.*

Partisipasi Anggaran dan Kinerja Pegawai

Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja (Schiff dan Lewin, 1970 dalam Sardjito dan Muthaheer, 2007). Untuk mencegah dampak fungsional atau disfungsionalnya, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah (Sardjito dan Muthaheer, 2007) sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Partisipasi pegawai dalam proses penyusunan anggaran dapat mengakibatkan naiknya motivasi untuk mencapai target yang ditetapkan dalam anggaran sehingga dapat

meningkatkan kinerja (Brownell dan McInnes, 1986). Berdasarkan literatur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

H3 : *Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pegawai.*

Psychological Capital dan Kinerja Pegawai

PsyCap *self-efficacy* dan *hope* memiliki harapan positif tentang masa depan yang berhubungan dengan tujuan tertentu yang diinternalisasikan dan dikaitkan dengan upaya dan motivasi seseorang (Venkatesh dan Blaskovich, 2012). *Hope, optimisme, dan resilient* memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat *self-efficacy* seseorang untuk sukses dalam tugas tertentu. Komponen kunci dari PsyCap, telah banyak diteliti oleh para peneliti di bidang psikologi dan perilaku organisasi (Venkatesh dan Blaskovich, 2012).

Beberapa penelitian dalam literatur perilaku organisasi (Luthans *et al.*, (2007); Luthans *et al.*, (2008): dan Venkatesh dan Blaskovich (2012)) telah menemukan PsyCap berhubungan secara positif dan signifikan terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan Luthans *et al.*, (2008) juga menemukan bahwa PsyCap merupakan variabel *intervening* untuk memprediksi hubungan antara dukungan organisasi dan kinerja. Berdasarkan literatur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

H4 : *Psychological capital berpengaruh terhadap kinerja pegawai.*

Komitmen Organisasi dan Kinerja Pegawai

Sardjito dan Muthaher (2007) menyatakan bahwa komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya (Sardjito dan Muthaher, 2007). Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam

menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1998). Komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula (Randall, 1990) dalam Nouri dan Parker (1998).

Nouri dan Parker (1998) menganalisis komitmen organisasi dalam pengaruhnya pada hubungan partisipasi anggaran dan kinerja. Hasilnya menyatakan bahwa komitmen organisasi dan kinerja memiliki hubungan positif dan signifikan. Semakin tinggi komitmen terhadap organisasi, pegawai merasa memiliki organisasi tempatnya bekerja sehingga membuat pegawai akan memberikan hasil upaya dan kinerja yang lebih baik. Dari literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa:

H5 : *Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai.*

III. Metode Penelitian

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak. DPPKD Kabupaten Lebak merupakan salah satu dari 21 satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak berfungsi sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta yang menangani urusan pemerintahan umum bidang pengelolaan keuangan daerah atau satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD). DPPKD ini yang memiliki posisi penting dalam mengatur uang rakyat untuk merencanakan pembangunan.

Sampel ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria sampel yang diajukan sebagai berikut : (1) Pejabat eselon III dan IV, (2) Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja lebih dari 2 tahun. Penyebaran kuesioner sebanyak 76 kuesioner. Dari jumlah tersebut kuesioner yang kembali berjumlah 62 kuesioner atau hanya 82% responden yang mengembalikan. Kuesioner yang disebar kepada Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pegawai di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak. Pengolahan data yang dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *software Partial Least Square* (PLS).

Table 1
Operasionalisasi variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber	Skala
Partisipasi Anggaran	Partisipasi anggaran adalah keterlibatan karyawan dan luasnya pengaruh dalam proses penyusunan anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran • Alasan logis dalam revisi anggaran • Mendiskusikan anggaran yang diusulkan • Pengaruh usulan bawahan • Menilai kontribusi bawahan • Frekuensi bawahan dimintai usulan 	Nouri & Parker (1998)	Ordinal
<i>Psychological Capital</i>	<i>Psychological capital</i> mencerminkan kondisi psikologis seseorang yang positif yang dicirikan menjadi 4 sumber daya psikologis, yaitu <i>Efficacy</i> (Kemampuan dan kepercayaan diri), <i>Hope</i> (harapan), <i>Optimism</i> (Optimis) dan <i>Resilience</i> (Ketahanan).	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menyelesaikan pekerjaan yang sulit • Mampu memberikan ide untuk memperbaiki organisasi • Mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik • Memiliki semangat tinggi untuk meraih target • Sukses dalam melaksanakan tugas • Menemukan berbagai jalan untuk mencapai target pekerjaan • Tetap mengharapkan hasil kerja yang terbaik ketika menghadapi ketidakpastian dalam pekerjaan • Selalu berfikir positif • Optimis tentang kejadian di masa yang akan datang • Dapat mengatasi kesulitan dalam pekerjaan melalui berbagai macam inovasi • Tidak pernah menghindarkan diri dari pekerjaan 	Venkatesh & Blaskovich (2012)	Ordinal

		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengalaman yang cukup 		
Komitmen Organisasi	Komitmen organisasi adalah kepercayaan yang kuat dan keterterimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi serta keinginan untuk berusaha mencapai tujuan organisasi tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha keras untuk mensukseskan organisasi • Kebanggaan bekerja pada organisasi • Kesediaan menerima tugas • Kesamaan nilai individu dengan nilai organisasi • Kebanggaan menjadi bagian dari organisasi • Organisasi merupakan inspirasi untuk melaksanakan tugas • Senang atas pilihan bekerja di organisasi • Anggapan bahwa organisasinya adalah organisasi yang terbaik • Perhatian terhadap nasib organisasi 	Nouri & Parker (1998)	Ordinal
Kinerja Pegawai	Kinerja pegawai (<i>job performance</i>) menunjukkan sejauh mana seseorang melaksanakan tanggung jawab dan tugas kerjanya.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik • Berusaha lebih keras daripada yang seharusnya • Melaksanakan pekerjaan dengan baik • Ketepatan dalam melaksanakan pekerjaan • Pengetahuan berkaitan dengan pekerjaan • Melaksanakan pekerjaan tepat waktu • Kualitas hasil pekerjaan • Kemampuan mencapai tujuan dan sasaran 	Bono & Judge (2003)	Ordinal

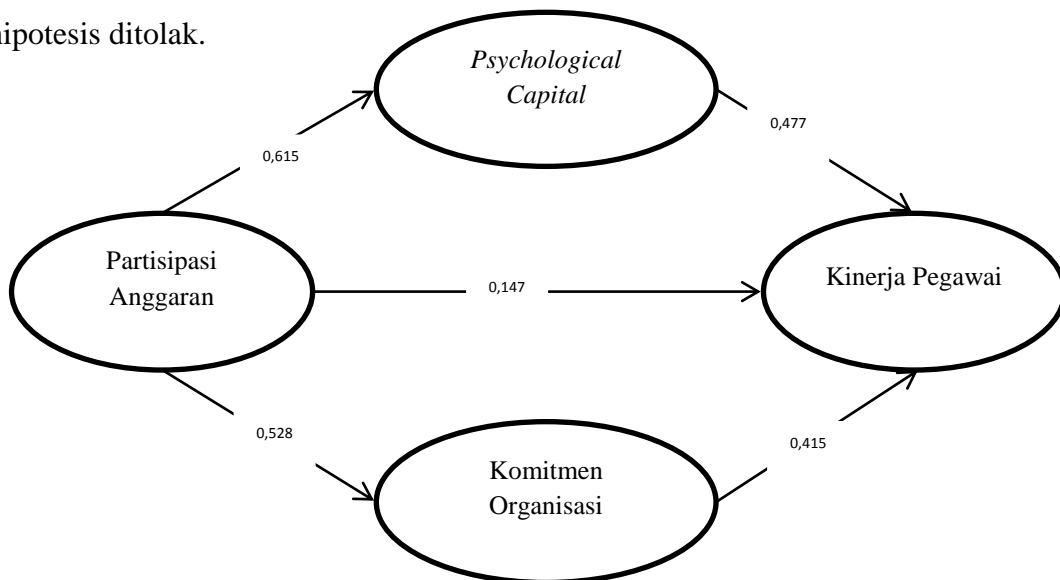
IV. Hasil Dan Pembahasan

Tabel 2
Result Of Inner Weights

	<i>Original sample estimate</i>	<i>Mean of subsamples</i>	<i>Standard deviation</i>	<i>T-Statistic</i>	<i>Hipotesis</i>
PA -> PSYCAP	0,615	0,655	0,072	8,559	Diterima
PA -> KO	0,528	0,576	0,095	5,568	Diterima
PA -> KP	0,147	0,149	0,053	2,753	Diterima
PSYCAP -> KP	0,477	0,440	0,176	2,708	Diterima
KO -> KP	0,415	0,443	0,152	2,723	Diterima

Sumber : *Output Smart PLS (2013)*

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah $\pm 1,96$, dimana apabila nilai T statistik lebih besar dari T tabel (1,96) maka hipotesis diterima, sebaliknya jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel (1,96) maka hipotesis ditolak.



Dalam menilai struktural model PLS dapat dilihat berdasarkan nilai *R-Square* untuk setiap variable latennya. Adapun nilai *R-Square* pada pengolahan data penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Tabel 3
R-Square

	<i>R-square</i>
Partisipasi Anggaran	
<i>Psychological Capital</i>	0,378
Komitmen Organisasi	0,279
Kinerja Pegawai	0,957

Sumber : *Output Smart PLS* (2013)

Partisipasi Anggaran Berpengaruh terhadap *Psychological Capital* (Hipotesis 1)

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, yang disajikan dalam tabel 2 Partisipasi Anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Psychological Capital* yang ditunjukkan dengan nilai *original sampel estimate* sebesar 0,615 dan T-statistik sebesar 8,559 (lebih besar dari t-hitung, 1,96). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H1 yaitu Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap variabel *Psychological Capital* dapat diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Venkatesh dan Blaskhovic (2012) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran merupakan salah satu mekanisme yang dapat memfasilitasi pengembangan tingkat psikologis seorang karyawan. Partisipasi memberikan kesempatan pada individu untuk menerima dorongan dari atasan saat mereka bekerja dalam menetapkan anggaran, sehingga dapat membangun kepercayaan diri untuk berhasil dalam pencapaian anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran akan merasa dihargai sehingga dapat mempengaruhi perilaku psikologisnya secara positif seperti meningkatnya kepercayaan diri,

ada harapan, merasa optimis di tempat bekerja serta meningkatkan ketahanan diri dalam tantangan bekerja.

Partisipasi Anggaran Berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi (Hipotesis 2)

Berdasarkan tabel 2 Partisipasi Anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Komitmen Organisasi yang ditunjukkan dengan nilai original sampel estimate sebesar 0,528 dan T-statistik sebesar 5,568 (lebih besar dari t-hitung, 1,96). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H2 yaitu Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap variabel Komitmen Organisasi dapat diterima.

Penelitian ini, konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nouri dan Parker (1998) yang menyatakan bahwa karyawan yang berpartisipasi dalam proses anggaran akan menunjukkan komitmen organisasi yang lebih tinggi. Nouri dan Parker (1998) mengemukakan bahwa partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja melalui komitmen organisasi. Hal ini disebabkan pegawai yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam proses anggaran, komitmen organisasinya akan lebih tinggi dan pada gilirannya akan menyebabkan perbaikan pada kinerjanya. Ketika para karyawan terlibat dalam proses anggaran, itu akan mengarahkan mereka untuk menjadi lebih mampu menerima tujuan anggaran dan tujuan organisasi, dengan demikian komitmen mereka terhadap organisasi akan meningkat.

Partisipasi Anggaran Berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Hipotesis 3)

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, yang disajikan dalam tabel 2 Partisipasi Anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pegawai yang ditunjukkan dengan nilai original sampel estimate sebesar 0,147 dan T-statistik sebesar 2,753 (lebih besar dari t-hitung, 1,96). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H3 yaitu Partisipasi Anggaran memiliki pengaruh terhadap variabel Kinerja Pegawai dapat diterima.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh dan Blaskovich (2012) serta Nouri dan Parker (1998) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pegawai. Partisipasi pegawai dalam proses penyusunan anggaran dapat mengakibatkan naiknya motivasi untuk mencapai target yang ditetapkan dalam anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja.

***Psychological Capital* Berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Hipotesis 4)**

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, yang disajikan dalam tabel 2 *Psychological Capital* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pegawai yang ditunjukkan dengan nilai *original sampel estimate* sebesar 0,477 dan T-statistik sebesar 2,708 (lebih besar dari t-hitung, 1,96). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H4 yaitu *Psychological Capital* berpengaruh terhadap variabel Kinerja Pegawai dapat diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh dan Blaskovich (2012) serta Luthans *et al.*, (2008) yang menyatakan bahwa *Psychological capital* memiliki pengaruh terhadap perilaku positif karyawan berupa kinerja pegawai. *Psychological capital* memiliki harapan positif tentang masa depan yang berhubungan dengan tujuan tertentu yang dikaitkan dengan upaya dan motivasi seseorang (Venkatesh dan Blaskovich, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku positif yang dimiliki pegawai di tempat kerja akan berpengaruh terhadap kinerjanya.

Komitmen Organisasi Berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Hipotesis 5)

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, yang disajikan dalam tabel 2 Komitmen Organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pegawai yang ditunjukkan dengan nilai *original sampel estimate* sebesar 0,451 dan T-statistik sebesar 2,723 (lebih besar

dari t-hitung, 1,96). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H5 yaitu Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap variabel Kinerja Pegawai dapat diterima.

Dalam penelitian ini, konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nouri dan Parker (1998) menyatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang lebih tinggi akan memperbaiki kinerjanya. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong para karyawan berusaha keras mencapai tujuan organisasi (Sardjito dan Muthaher, 2007). Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik yang berarti meningkatnya kinerja individu. Sedangkan komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya.

Partisipasi Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Yang Dimediasi Oleh *Psychological Capital* dan Komitmen Organisasi

Pada penelitian ini dikembangkan model yang menghubungkan (1) pengaruh tidak langsung konstruk Partisipasi Anggaran (PA) melalui variabel *Psychological Capital* (PSYCAP) terhadap konstruk Kinerja Pegawai (KP). (2) pengaruh tidak langsung konstruk Partisipasi Anggaran (PA) melalui variabel Komitmen Organisasi (KO) terhadap konstruk Kinerja Pegawai (KP). Pengaruh tidak langsung dihitung dengan (1) hasil koefisien Partisipasi Anggaran terhadap Psychological Capital (PA--->PSYCAP) dikali dengan hasil koefisien Psychological Capital terhadap Kinerja Pegawai (PSYCAP--->KP). Pengaruh tidak langsung dihitung dengan (2) hasil koefisien Partisipasi Anggaran terhadap Komitmen Organisasi (PA--->KO) dikali dengan hasil koefisien Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai (KO--->KP).

Tabel 4.
Pengaruh Partisipasi Anggaran (PA) Terhadap Kinerja Pegawai (KP) Melalui
Psychological Capital (PSYCAP)

Jalur	Keterangan	Pengaruh Langsung PA-KP (A)	Pengaruh Langsung PA-PSYCAP (B)	Pengaruh Langsung PSYCAP-KP (C)	Pengaruh Tidak Langsung (BXC)	Total Pengaruh A+(BXC)
1	PA-PSYCAP-KP	0,147	0,615	0,477	0,293	0,44

Sumber: *Output Smart PLS (2013)*

Berdasarkan perhitungan diatas maka terbukti bahwa konstuk *Psychological Capital* merupakan variabel *intervening* yang memediasi hubungan antara Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pegawai. Hal ini dikarenakan pengaruh tidak langsung lebih besar (0,293) dibandingkan pengaruh langsung (0,147). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh dan Blashkovic (2012) yang menyatakan bahwa *Psychological Capital* memediasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja pegawai. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran maka pegawai tersebut akan memiliki kepercayaan diri (*self-efficacy*), mengembangkan tingkat harapan (*hope*), menyediakan lingkungan kerja yang optimis (*optimism*) dan membangun ketahanan (*resilient*). Perilaku psikologis positif ini pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut (Venkatesh dan Blashcovic, 2012).

Tabel 5
Pengaruh Partisipasi Anggaran (PA) Terhadap Kinerja Pegawai (KP) Melalui Komitmen
Organisasi (KO)

Jalur	Keterangan	Pengaruh Langsung PA-KP (A)	Pengaruh Langsung PA-KO (B)	Pengaruh Langsung KO-KP (C)	Pengaruh Tidak Langsung (BXC)	Total Pengaruh A+(BXC)
2	PA-KO-KP	0,147	0,528	0,415	0,219	0,366

Sumber: *Output Smart PLS (2013)*

Berdasarkan perhitungan diatas maka terbukti bahwa konstuk Komitmen Organisasi merupakan variabel *intervening* yang memediasi hubungan antara Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pegawai. Hal ini dikarenakan pengaruh tidak langsung lebih besar (0,219) dibandingkan pengaruh langsung (0,147). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nouri dan Parker (1998) yang menyatakan bahwa pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja dimediasi oleh komitmen organisasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi pegawai maka pegawai tersebut akan lebih memahami tujuan anggaran yang mencerminkan tujuan organisasi sehingga dapat meningkatkan komitmennya terhadap organisasi, semakin tinggi komitmen terhadap organisasi pegawai tersebut akan lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya, dengan demikian kinerja pegawai tersebut akan meningkat.

V. Kesimpulan

1. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap *psychological capital*. Pegawai yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran akan merasa dihargai sehingga dapat mempengaruhi perilaku psikologisnya secara positif.
2. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Pegawai yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran akan lebih memahami tujuan anggaran yang mencerminkan tujuan organisasi. Dengan demikian akan terjadi keselarasan antara tujuan pegawai dan tujuan organisasi, sehingga komitmen pegawai terhadap organisasi akan meningkat.
3. Partisipasi anggaran berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pegawai. Partisipasi pegawai dalam proses penyusunan anggaran dapat mengakibatkan naiknya motivasi untuk mencapai target yang ditetapkan dalam anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja.

4. *Psychological capital* berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Apabila pegawai memiliki perilaku psikologis yang positif maka kinerjanya pun akan meningkat.
5. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasinya maka pegawai tersebut akan lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.
6. *Psychological capital* dan komitmen organisasi memediasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja pegawai. Semakin tinggi tingkat keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran maka pegawai tersebut akan memiliki perilaku psikologis yang positif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat partisipasi pegawai maka pegawai tersebut akan lebih memahami tujuan anggaran yang mencerminkan tujuan organisasi sehingga dapat meningkatkan komitmennya terhadap organisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya.

Daftar Pustaka

- Bono, J.E. & T.A. Judge (2003). "Self-concordance at work: Toward understanding the motivational effects of transformational leaders", *Academy of Management Journal*, Vol. 46, No. 5, pp. 554-571
- Brownell, Peter. 1982. *A Field Study Examination of Budgetary Participation and Locus of Control*. The Accounting Review, October, 766-777.
- Brownell, P., and M. McInnes. 1986. Budgetary participation, motivation and managerial performance. *The Accounting Review* (October): 587-600.
- Chong, V.K. dan K.M. Chong. 2002. Budget Goal Commitment and Informational Effects of Budget Participation on Performance: A Structure Equation Modeling Approach. *Behavioral Research in Accounting*, Vol 14.
- Covaleski, M. A., J. H. Evans, J. H. Luft, and M. D. Shields. 2003. Budgeting research: Three theoretical perspectives and criteria for selective integration. *Journal of Management Accounting Research* 15: 3-49.
- Damayanti, Retno. (2005). *Pengaruh Motivasi Kerja Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan CV. Bening Natural Furniture di Semarang*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Darwinto. 2008. Analisis pengaruh gaya kepemimpinan Terhadap kepuasan kerja dan komitmen Organisasi untuk meningkatkan Kinerja karyawan. Tesis Universitas Diponegoro.



- Ghozali, I. 2006. “*Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square.*” Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Herminingsih. 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Tesis Universitas Diponegoro.
- Kenis, I., 1979, “Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance”, *The Accounting Review*, Vol. LIV (4). p.707721.
- Luthans, F., and S. M. Jensen. 2002. Hope: A new positive strength for human resource development. *Human Resource Development Review* 1: 304–322. 172
- Luthans, Fred; Avolio, Bruce J.; Avey, James B.; Norman, Steven M. 2007. “Positive psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction”. *Gallup Leadership Institute-Department of Management, University of Nebraska-Lincoln; Department of Management, Central Washington University; Department of Management, Mesa State College.*
- Luthans, F., Norman, S.M., Avolio, B.J., & Avey, J.B. 2008 The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate-employee performance relationship. *Journal of Organizational Behavior*, in press.
- Mahoney, T. A., T. H. Jerdee, and S. J. Carroll. 1965. The jobs of management. *Industrial Relations* 4 (February): 97–110.
- Milani, K. (1975), “The relationship of participation in budget-setting to industrial supervisor performance and attitudes-a field study”, *The Accounting Review*, Vol. 50 No. 2, pp. 274-85.
- Mowday, R., Steers, R. & Porter, L. (1979). The measurement of organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 224-247.
- Nouri, Hossein and Parker, Robert J. 1998. The Relationship Between Budget Participation and Job Performance : The Roles of Budget Adequacy and Organizational Commitment, *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 23, No. 5/6, pp. 467 – 483.
- Nugroho, Rakhmat. 2006. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Tesis Universitas Diponegoro.
- Peterson, S., F. Luthans, B. J. Avolio, F. Walumbwa, and Z. Zhang. 2011. Psychological capital and employee performance: A latent growth modeling approach. *Personnel Psychology* 64 (2): 427–450.
- Rego, A., Carla, M., Leal, S., Filipa, S., Miguel P, C. (2010). Psychological Capital and Performance of Portuguese Civil Servants : Exploring Neutralizers in the Context of an Appraisal System. *The International Journal of Human Resource Management*. 21(9):1531-1552.
- Snyder, C.R., Irving, L., Anderson, J., 1991. Hope and health: Measuring the will and the ways. In Snyder CR, Forsyth DR (Eds.), *Handbook of Social and Clinical Psychology* (pp. 285–305). Elmsford, NY: Pergamon.
- Stajkovic, Alexander D & Fred Luthans. 1998. Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis. *Psychological Bulletin* 124/2 (September): 240-261.
- Supriyono, R.A. 2004. “Pengaruh Variabel *intervening* Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajer di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.19, No. 3
- Venkathes, Ropha and Blaskovich, Jennifer. 2012. The Mediating Effect of Psychological Capital on the Budget Participation-Job Performance Relationship. *Journal of Management Accounting Research* Vol 24 pp 159-175.



Tipe Kepribadian, Keterlibatan Pemakai dan Keadilan Prosedural dalam Perancangan Sistem Informasi Akuntansi (Penelitian pada Manajer Keuangan Perusahaan Manufaktur di Kota Bandung)

ARVIAN TRIANTORO

Universitas Pendidikan Indonesia

LILI SUGENG WIYANTORO*

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract: *This study examined the relationship among personality, user involvement, and procedural justice in the design of accounting information system (AIS). Accounting and finance manager were surveyed to determine their perception of actual and desired involvement and procedural justice with AIS implementation project of their choice.*

A proposed research model was presented based on Personality Type Theory, Doll and Torkzadeh Discrepancy Model of User computing Involvement and Hunton and Price model integrating Procedural Justice with user participation concept. This model was used to classify each respondent into 16 Myers-Briggs personality types and into an involvement state based on measures of perceived involvement and desired involvement.

Personality type were compared to determine if there were differences in perceived involvement, desired involvement, involvement state and perceptions of procedural justice. Relationships among perceived involvement, desired involvement, involvement state and procedural justice were also examined.

The result suggested that personality type was not an influence on involvement or procedural justice perceptions. However, the result also suggested : (1) that desired involvement influence perceived involvement,(2) desired involvement influence procedural justice perceptions,(3) perceived involvement influence procedural justice perceptions.

Keywords: *Desired Involvement, Perceived Involvement, Procedural Justice, Myers-Briggs Personality Type.*

* Corresponding author: li2k_feuntirta@ymail.com

1. Pendahuluan

Perkembangan riset perilaku berkaitan dengan organisasi dan individu dalam organisasi selalu menarik untuk diteliti. Pada tahun 1970an, menurut Cook (2006) penelitian seputar sistem informasi sangat dipengaruhi oleh *Theory of Planned Organizational Change* dan konsep partisipasi dalam pengambilan keputusan (Alutto dan Belasco, 1972 dalam Cook, 2006). Secara umum dinyatakan bahwa pengembangan sistem informasi berkaitan erat dengan hubungan positif yang terbangun antara partisipasi dalam hal pengambilan keputusan dan keberhasilan dalam implementasi dari sistem informasi tersebut. Fokus penelitian berhubungan dengan *end-user* dari sistem tersebut dengan keberadaan informasi yang dihasilkan oleh sistem apakah berguna dan dipahami oleh pemakai informasi.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Doll dan Torkzadeh (1989, 1991) dengan membangun model pertentangan (*discrepancy*) dari keterlibatan *end-user computing*. Model ini mencoba membandingkan antara harapan pemakai (*should be, expectation, needs*) dengan kondisi yang diperoleh atau diterima pemakai, dimana hasil penelitian menyatakan bahwa keinginan *user* untuk terlibat (*desired involvement*) memoderasi hubungan antara keterlibatan sesungguhnya (*actual involvement*) dengan kepuasan (*satisfaction*). Efektifitas dari setiap aplikasi komputer termasuk aplikasi sistem informasi akuntansi dipengaruhi oleh keterlibatan *user* dalam proses perancangan dan pengembangan sistem informasi dan oleh kualitas dukungan yang diberikan kepada sumber.

Pada saat yang sama berkembang pula teori seputar keadilan prosedural (*procedural justice*) yang merupakan bagian dari keadilan organisasi dengan didasarkan oleh *Equity Theory*. Teori ini menggambarkan tentang rasa kejujuran dalam pengambilan keputusan (Laventhal). Penelitian terbaru dilakukan oleh Cook (2006) dengan menggabungkan antara keterlibatan *user* yang dibangun oleh Doll dan Torlzadeh (1991) dengan persepsi atas keadilan prosedural ditinjau dari sisi personal *user*. Kajian terbaru dari penelitian ini adalah

dengan memasukkan tipe kepribadian yang dimiliki oleh *user* dan hubungannya dengan keterlibatan pemakai dan keadilan prosedural dalam perancangan SIA. Digunakannya Myers Briggs *Personality Type Indicator* (MBTI® *Type Indicator*) sebagai instrumen untuk pengukuran tipe atau karakteristik kepribadian dari *user*, diharapkan oleh Cook (2006) sebagai solusi untuk mengetahui karakteristik user yang terlibat dalam perancangan, sehingga hasilnya menjadi masukan bagi organisasi untuk proses seleksi pemilihan orang-orang yang cocok untuk perancangan dan pengembangan SIA.

Penelitian oleh Cook (2006) menunjukkan bahwa terdapat hubungan berkebalikan antara variabel *perceived involvement* dengan variabel *desired involvement*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Doll dan Torkzadeh (1991) dimana *desired involvement* mempengaruhi *perceived involvement*. Selanjutnya dinyatakan oleh Cook, baik *desired involvement* maupun *perceived involvement* berpengaruh terhadap persepsi pemakai atas keadilan prosedural dalam perancangan SIA. Sedangkan tipe *kepribadian* dari pemakai yang menggunakan MBTI® *Type Indicator*, penelitian Cook (2006) menunjukkan ternyata tidak memiliki perbedaan dan tidak berpengaruh terhadap variabel keterlibatan pemakai (*desired involvement*, *perceived involvement* dan *involvement state*) dan keadilan prosedural dalam perancangan SIA.

Penelitian ini pada dasarnya mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Cook (2006) dengan menguji kembali pengaruh keterlibatan pemakai (*desired involvement*, *perceived involvement* dan *involvement state*) terhadap keadilan prosedural. Modifikasi penelitian dilakukan terhadap instrumen untuk variabel tipe kepribadian dengan harapan dapat memberikan hasil yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Setting penelitian manajer keuangan pada perusahaan manufaktur di Kota Bandung dan sekitarnya (Kota Bandung, Cimahi dan Kab. Bandung) yang turut/ pernah terlibat dalam perancangan sistem informasi akuntansi.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Keterlibatan Pemakai

Menurut Barki dan Hartwick (1994) keterlibatan pemakai (*user involvement*) diartikan sebagai “*a subjective psychological state reflecting the (level of) importance and personal relevance that the user attaches to a given sistem*” atau “keadaan psikologis subjektif yang merefleksikan tingkat kepentingan dan keterkaitan individu sebagai pemakai atas keikutsertaan mereka terhadap sistem yang telah ditentukan”. Berbeda dengan partisipasi pemakai (*user participation*) yang diartikan oleh Barki dan Hartwick (1994) sebagai “*assignments, activities, and behaviours that users or their representatives perform during the systems development process*” atau “penugasan, aktivitas dan perilaku dari pemakai atau keterwakilan pelaksanaan mereka selama proses pengembangan sistem”.

Pengambilan keputusan dalam perancangan sistem informasi akuntansi selalu melibatkan faktor individu maupun kelompok yang terlibat didalamnya (Hunton dan Gibson, 1999). Setidaknya terdapat tiga tipe kelompok keterlibatan pemakai dalam perancangan, ketiga kelompok tersebut meliputi : *consultative*, *representative* dan *consensus* (Mumford, 1981, 1983; Mumford dan Henshall, 1979 dalam Cook, 2006).

2.4.1. Keterlibatan Pemakai, Keadilan Prosedural dalam Perancangan Sistem Informasi Akuntansi

Desired Involvement adalah hasrat atau keinginan dari *user* untuk terlibat dalam perancangan SIA (Cook, 2006), jika *desired involvement* dari *user* tinggi maka kecenderungan tingkat kepuasan yang tinggi semakin besar dikarenakan *user* sangat antusias untuk terlibat dalam perancangan sistem. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Doll dan Torkzadeh (1991); Cook, 2006 dimana *desired involvement* berpengaruh terhadap *perceived involvement* dalam perancangan SIA. *Desired involvement*

yang tinggi meningkatkan motivasi *user* untuk terlibat dalam perancangan SIA. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cook (2006) menunjukkan bahwa *user* yang memiliki level *perceived involvement* yang tinggi (*saturation*) atau seimbang (*equilibrium*) dengan *desired involvement* akan beranggapan bahwa keadilan prosedural yang diterapkan selama proses perancangan berlangsung tinggi, hal ini berarti *user* beranggapan bahwa proses keadilan telah berlangsung baik. Berdasarkan paparan di atas maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah :

H₁ : *Desired Involvement* berpengaruh terhadap *Perceived Involvement user* dalam perancangan SIA.

H₂ : *Desired Involvement* berpengaruh terhadap Keadilan Prosedural dalam perancangan SIA.

H₃ : *Perceived Involvement* berpengaruh terhadap Keadilan Prosedural dalam perancangan SIA.

H₄ : *Involvement State* berpengaruh terhadap Keadilan Prosedural dalam perancangan sistem.

2.4.2. Tipe Kepribadian dan Keterlibatan Pemakai dalam Perancangan Sistem

Penelitian yang dilakukan oleh Kovar, et., al (2003) dan Nikolai (1997) dalam Cook (2006) menemukan bahwa sebagian besar individu yang bergerak di bidang pendidikan akuntansi dan profesi akuntansi lainnya memiliki tipe kepribadian STJ yang dominan (baik ISTJ maupun ESTJ). Sebaliknya hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa individu yang memiliki kemampuan tentang sistem informasi dan teknologi dominan memiliki tipe kepribadian non – STJ (Landry, et., al, 1996; Ott et., al, 1990 dalam Cook, 2006).

Dalam penelitian berbeda (perancangan anggaran) yang dilakukan oleh James Jay Mackie (1986) menguji pengaruh dari tipe kepribadian kaitannya dengan proses penyusunan/

perancangan anggaran (*budgetary setting*). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tipe yang dominan (STJ) yang dimiliki oleh sebagian besar karyawan di departemen produksi, dan tipe kepribadian ini berpengaruh terhadap persepsi karyawan atas level penyusunan anggaran yang berlangsung di perusahaan serta berpengaruh juga terhadap cara mereka dalam melakukan komunikasi atau berinteraksi selama proses penyusunan/ perancangan anggaran berlangsung.

Selanjutnya, Steffani A Burd (1998) mengkaji keterkaitan diantara karakteristik kepribadian diantara *partners* dihubungkan dengan keterlibatan dan kepuasan pelanggan dalam setting perancangan *branding* dari produk perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik kepribadian yang melekat dalam *partners* mempengaruhi keterlibatan mereka dalam organisasi dalam hal ini perancangan *branding* atau produk. Hal ini berguna bagi organisasi pada saat pengambilan keputusan berkaitan dengan sistem dan teknologi yang akan diterapkan.

Atas dasar kajian di atas maka hipotesis yang dimunculkan dalam penelitian ini diantaranya :

- H₅** : *Terdapat perbedaan dalam level perceived involvement di antara user yang diklasifikasikan ke dalam MBTI® Tipe personality dalam perancangan SIA.*
- H₆** : *Terdapat perbedaan dalam level desired involvement di antara user yang diklasifikasikan ke dalam MBTI® Tipe personality dalam perancangan SIA.*
- H₇** : *Terdapat perbedaan dalam level involvement State di antara user yang diklasifikasikan ke dalam MBTI® Tipe personality dalam perancangan SIA.*

2.4.3. Tipe Kepribadian dan Keadilan Prosedural dalam Perancangan Sistem Informasi Akuntansi

Penelitian yang dilakukan oleh Cook (2006) menyimpulkan bahwa penggunaan MBTI® type indicator sebagai alat untuk mengukur tipe kepribadian dari individu dapat

berfungsi untuk membuat kerjasama tim bekerja lebih baik, sehingga perubahan yang berlangsung di organisasi dapat berjalan lebih baik. Penelitian Cook (2006) yang meyakini bahwa terdapat perbedaan diantara *users* yang memiliki tipe kepribadian yang khas berdasarkan MBTI® type indicator, kaitannya dengan persepsi mereka atas keadilan prosedural dalam perancangan sistem informasi akuntansi.

Tipe kepribadian yang dimiliki oleh individu (introvert vs ekstrovert, sensing vs intuitif, thinking vs feeling, judging vs perceiving), memberikan dampak perbedaan persepsi atas kejadian yang dirasakan dan dikerjakan. Hal tersebut akan berdampak pula pada keputusan yang mereka ambil, termasuk persepsi mereka atas kondisi keadilan prosedural selama perancangan sistem informasi akuntansi berlangsung.

Atas dasar kajian di atas maka hipotesis kaitan antara tipe kepribadian dan keadilan prosedural adalah :

H_s : *Terdapat perbedaan persepsi mengenai keadilan prosedural di antara user yang diklasifikasikan ke dalam MBTI® Tipe personal dalam perancangan SIA.*

3. Metode Riset

3.1. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Sedangkan periode waktu yang digunakan adalah *cross sectional* yaitu fakta sesaat berupa data yang hanya dapat digunakan sekali dalam suatu periode pengamatan.

3.2. Unit Analisis, Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian

Berdasarkan pengertian tersebut, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah manajer keuangan pada perusahaan manufaktur di Kota Bandung dan sekitarnya (Kota Bandung, Cimahi dan Kab. Bandung). Responden dalam penelitian ini adalah manajer di bagian keuangan yang terdapat di perusahaan tersebut dan turut/ pernah terlibat dalam perancangan sistem informasi akuntansi. Populasi target pada penelitian ini adalah seluruh

perusahaan manufaktur di Kota Bandung. Ukuran sampel yang diharapkan untuk penelitian adalah di atas 100 responden. Hal ini konsisten dengan penelitian serupa sebelumnya yang dilakukan oleh Mc Queen ($n = 67$) dan Cook pada tahun 2006 ($n = 93$). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *random sampling*.

3.3. Variabel Penelitian dan Instrumen Penelitian

1. Keterlibatan Pemakai (*User Involvement*) adalah keadaan psikologis subjektif yang merefleksikan tingkat kepentingan dan keterkaitan individu sebagai pemakai atas keikutsertaan mereka terhadap sistem yang telah ditentukan (Barki dan Hartwick, 1994). Selanjutnya diperjelas oleh Doll dan Torkzadeh (1989, 1991) dengan membaginya kedalam dua kondisi psikologis (*desired involvement* dan *perceived involvement*). *Desired Involvement* (DINV) yaitu kondisi hasrat atau keinginan *user* untuk terlibat dalam perancangan, sedangkan *Perceived involvement* (PINV) diartikan sebagai keterlibatan *user* sesungguhnya dalam perancangan. Pengukuran keterlibatan (*involvement*) dalam penelitian ini menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Doll dan Torkzadeh (1989). Terdiri dari 8 (delapan) item pertanyaan menggunakan lima skala likert untuk mengukur *Perceived Involvement* (PINV) dan *Desired Involvement* (DINV) dalam aktivitas pengembangan sistem. *Perceived Involvement* (PINV) diartikan sebagai seberapa banyak individu yang bersangkutan terlibat langsung dalam kedelapan aktivitas pengembangan sistem. Sedangkan *Desired Involvement* (DINV) diartikan sebagai seberapa banyak keinginan atau hasrat individu yang bersangkutan untuk terlibat langsung dalam kedelapan aktivitas pengembangan sistem. Tiga kondisi keadaan keterlibatan atau *Involvement State* meliputi : (a) **Saturation** (Jenuh). Responden berada dalam klasifikasi saturation jika nilai skor dari $PINV > DINV$, (b) **Equilibrium** (seimbang) dan (c) **High Deprivation**.

2. Tipe Kepribadian diartikan sebagai tipe atau karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh individu (Jung, 1921 dalam Cook, 2006). Tipe Kepribadian diukur dengan memberikan kepada responden empat pasang pernyataan, dan setiap responden diwajibkan memilih setiap pasangannya, sehingga terpilih empat pasang yang merefleksikan tipe kepribadian yang dimiliki oleh responden. Keempat pasangan bipolar tersebut meliputi : (1) ***Introvert : Ekstrovert***, (2) ***Sensing : Intuitive***, (3) ***Thingking : Feeling*** dan (4) ***Judging : Perceiving***. Pengukuran tipe kepribadian dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Myers, et al. (1998), dikenal juga dengan Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®). Terdiri dari empat pasang pernyataan. Terdapat 16 karakteristik personal yang dapat dimunculkan dalam instrumen. Instrumen Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) yang digunakan adalah instrumen yang dikembangkan oleh situs www.PersonalityPathways.com.
3. Keadilan prosedural, diartikan sebagai persepsi atas keadilan dalam proses pengambilan keputusan (Laventhal, 1980). Diukur dengan menanyakan kepada responden seputar kondisi keadilan prosedural yang terjadi dalam proses perancangan/ pengembangan dan atau pemilihan SIA. Menggunakan 5 (lima) skala likert, angka 1 (satu) menunjukkan kondisi responden sangat tidak setuju dengan pertanyaan/ pernyataan yang diberikan dan angka 5 (lima) menunjukkan kondisi responden sangat setuju dengan pernyataan seputar keadilan prosedural. Instrumen Keadilan Prosedural yang dikembangkan oleh Colquitt (2001) terdiri dari tujuh item pertanyaan menggunakan lima skala likert. Terdiri dari 7 (tujuh) item pertanyaan. Modifikasi dilakukan hanya dengan mengganti kata “outcome” menjadi “sistem”.

3.4 Teknik Analisa

Data penelitian yang akan dianalisis menggunakan alat analisis dengan menggunakan SPSS yang terdiri dari: statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi (*regression analysis*) sebagai model untuk memprediksi dan mempelajari hubungan kausal antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Peneliti menggunakan uji *independent t-test* (uji beda) untuk menganalisis perbedaan diantara tipe kepribadian pemakai dengan dengan keterlibatan pemakai (PINV, DINV, STATE dan Keadilan Prosedural).

a. hipotesis 1 sampai hipotesis (3)

Hipotesis (1) hingga hipotesis (3) menganalisis pengaruh diantara keterlibatan pemakai (*desired involvement, perceived involvement*) dengan keadilan prosedural.

b. Hipotesis (4) sampai dengan hipotesis (8)

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan Independent Sample t-tes.

$t =$	$\frac{\text{Rata-rata sampel pertama} - \text{rata-rata sampel kedua}}{\text{Standar error perbedaan rata-rata kedua sampel}}$
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Responden dan Variabel

Pengiriman kuesioner sebanyak 527 kuesioner yang dilakukan secara acak lewat pos dan diantar langsung kepada perusahaan manufaktur (*Garment and Textile Industry, Plastic Industry, Electronic dan Chemical Product*) yang terdapat di Kota Bandung. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 110 kuesioner, kuesioner yang telah diisi oleh responden akan tetapi tidak layak karena tidak lengkap berjumlah 5 kuesioner. Total kuesioner yang digunakan untuk pengolahan data adalah sebanyak 105 kuesioner. Tingkat pengembalian kuesioner (*respon rate*) adalah sebesar 20,87% dan tingkat pengembalian kuesioner yang dapat digunakan (*usable respon rate*) secara keseluruhan adalah sebesar 19,92%.



Profil responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan dan lamanya bekerja. Jenis kelamin perempuan dari keseluruhan responden berjumlah 58 orang (55,47%) dan sisanya sebanyak 47 orang (44,76%) berjenis kelamin laki-laki. Usia responden 20 sampai dengan 30 tahun berjumlah 35 orang (33,3%). Usia responden 31 hingga 40 tahun berjumlah 40 orang (38,2%) dan usia responden di atas 41 tahun berjumlah 30 orang (28,57%). Dilihat dari data tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sampel dalam penelitian ini rata-rata berada pada posisi produktif kerja. Tingkat pendidikan responden pada tingkat diploma (D1-D3) berjumlah 3 orang (2,86%), untuk tingkat sarjana (S-1) berjumlah 96 orang (91,43%) dan responden yang bergelar master (S2) berjumlah 5 orang (4,76%). Dari data tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sampel dalam penelitian ini rata-rata berada pada tingkat S1 yang berarti sampel dalam penelitian ini memiliki pengetahuan yang cukup untuk memberikan persepsinya.

Apabila dilihat dari lamanya bekerja, untuk responden yang bekerja dari 1 hingga 5 tahun berjumlah 73 orang (69,52%), lamanya bekerja 6 hingga 10 tahun berjumlah 19 orang (18,10%) dan responden yang telah bekerja di atas 10 tahun berjumlah 13 orang (12,38%). Dari data tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sampel dalam penelitian ini rata-rata berada pada tingkat pengalaman kerja 3 tahun keatas yang berarti sampel dalam penelitian ini memiliki pengalaman kerja yang cukup untuk memberikan persepsinya. Mengenai statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat tabel 1 pada lampiran.

Tabel 1

4.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data meliputi uji realibilitas dan uji validitas, uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha* dengan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Nunanly, 1967) dalam Ghozali (2005) dan uji validitas dengan melihat *Correlated item-Total Correlation* > r tabel

product moment dengan signifikansi 5%. Dari hasil uji reliabilitas diperoleh kisaran nilai *cronbach alpha* antara 0,77-0,82 yang berarti semua variabel reliabel. Sedangkan dari hasil uji validitas menilai kevalidan masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai *Corrected item-Total Correlation* masing-masing butir pertanyaan. Apabila *Corrected item-Total Correlation* memiliki nilai kritis $>$ dari 0,3 atau 30%, maka faktor tersebut dikategorikan valid. Dari hasil uji validitas diperoleh kisaran nilai *Corrected item-Total Correlation* antara 0,308 – 0,748 yang berarti semua variabel valid.

4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai *K-S-Z* dengan $P > 0,05$, Dan uji normalitas dengan uji *kolmogorov-smirnov* variabel dependen seluruhnya normal yang dapat dilihat tabel 2 pada lampiran.

Tabel 2

4.4 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis

4.4.1 Pengujian Pengaruh *Desired Involvement* terhadap *Perceived Involvement*

Data statistik pada tabel 3, menunjukkan hasil pengujian pengaruh variabel *Desired Involvement* terhadap *Perceived Involvement*. Uji statistik yang digunakan adalah uji regresi sederhana.

Tabel 3

Hasil analisis (tabel 4.3) menunjukkan angka Adjusted R Square sebesar 0,324, hal ini berarti 32,4% dari *Perceived Involvement* dapat dijelaskan oleh variabel *Desired Involvement*. Sedangkan sisanya 66,9 % (100% - 33,1%) dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. Dari uji statistik diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7,133. Karena nilai t_{hitung} lebih besar

dari t_{tabel} , berdasar pada nilai regresi tersebut dapat dikatakan bahwa *Desired Involvement* berpengaruh terhadap *Perceived Involvement* dalam hal perancangan SIA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *desired involvement* mempengaruhi keadilan prosedural dalam perancangan sistem informasi akuntansi diterima.

4.4.2 Pengujian Pengaruh *Perceived Involvement* terhadap Keadilan Prosedural

Data statistik pada tabel 4, menunjukkan hasil pengujian pengaruh variabel *Perceived Involvement* terhadap keadilan prosedural. Uji statistik yang digunakan adalah regresi sederhana.

Tabel 4

Hasil analisis (tabel 4) menunjukkan angka R Square sebesar 0,306, hal ini berarti 30,6 % dari keadilan prosedural yang dirasakan oleh responden dapat dijelaskan oleh variabel *Perceived Involvement*, sedangkan sisanya sebesar 69,4 % dijelaskan oleh faktor-faktor di luar *Perceived Involvement*. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,744. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka atas dasar nilai regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Perceived Involvement* berpengaruh terhadap keadilan prosedural dalam perancangan SIA. Dengan kata lain hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *Perceived Involvement* mempengaruhi persepsi atas keadilan prosedural dalam perancangan sistem informasi akuntansi dengan ini diterima.

4.4.3 Pengujian Pengaruh *Desired Involvement* terhadap Keadilan Prosedural

Data statistik pada tabel 5, menunjukkan hasil pengujian pengaruh variabel *Desired Involvement* terhadap variabel keadilan prosedural. Uji statistik yang digunakan adalah uji regresi sederhana.

Tabel 5

Data dalam tabel 5, menunjukkan nilai R Square sebesar 0,392. Hal ini berarti 39,2% dari keadilan prosedural dapat dijelaskan oleh variabel *Desired Involvement*, dan sisanya sebesar 61,8 % dijelaskan oleh variabel lain di luar *desired involvement*. Berdasarkan uji statistik diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8,146, dikarenakan nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} nya, maka atas dasar nilai regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Desired Involvement* berpengaruh terhadap keadilan prosedural dalam perancangan SIA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *Perceived Involvement* berpengaruh terhadap keadilan prosedural dalam perancangan sistem informasi akuntansi diterima.

4.4.3 Pengujian Pengaruh Involvement State terhadap Keadilan Prosedural

Data statistik dalam tabel 6, menunjukkan hasil pengujian pengaruh variabel *Involvement State* terhadap variabel Keadilan Prosedural. Uji statistik yang digunakan adalah uji ANOVA.

Tabel 6

Hasil analisis uji levene test (tabel 6) menunjukkan bahwa nilai F test sebesar dapat disimpulkan bahwa kedua varians sama. Hasil output SPSS lainnya (tabel 6) memberikan nilai F hitung sebesar 809,985 untuk intercept dan signifikan pada 0,05. Sebaliknya untuk variabel *Involvement State* memberikan nilai F sebesar 2,699 dan tidak signifikan pada 0,05. Nilai Adjusted R Squared sebesar 0,032 memberikan arti bahwa variabilitas keadilan prosedural yang dapat dijelaskan oleh variabilitas *Involvement State* hanya sebesar 3,2%. Oleh karena variabel *Involvement State* tidak signifikan pada 0,05 dimana nilai probabilitasnya adalah 0,307 untuk *Equilibrium*, 0,069 untuk *saturation* dan 0,307 untuk *high deprivation*, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keterlibatan (*Involvement State*) dari responden tidak mempengaruhi keadilan prosedural dalam perancangan SIA. Dengan demikian dapat ditarik

kesimpulan bahwa *Involvement State* tidak mempengaruhi persepsi atas keadilan prosedural dalam perancangan sistem informasi akuntansi, maka dengan ini hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.

Tabel 7

Pada tabel 7, hasil statistik turkey test memberikan informasi tambahan, tabel subset untuk kategori variabel independent dalam hal ini adalah *Involvement State* (Saturation, Equilibrium dan High Deprivation) dan nilai rata-ratanya (means). Pada subset satu berisi nilai keadilan prosedural untuk kategori *involvement state High deprivation* dan *equilibrium*. Sedangkan pada subset dua berisi nilai keadilan prosedural untuk kategori *saturation*. Nilai signifikansi 0,179 (pada subset pertama) dan 0,651 (subset kedua) menyatakan bahwa persepsi keadilan prosedural diantara pegawai dengan kondisi keterlibatan *saturation*, *equilibrium* dan *high deprivation* tidak berbeda secara statistik.

4.4.4 Pengujian Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan Perceived Involvement

Output SPSS dalam tabel 8, dihitung untuk menguji hubungan antara *perceived involvement* dengan tipe kepribadian berdasarkan MBTI® tipe kepribadian. Hasil uji levene test menunjukkan bahwa nilai F sebesar 0,920 dan tidak signifikan pada 0,05 ($p > 0,05$) yang berarti variance sama. Output SPSS lainnya menampilkan nilai F untuk variabel tipe kepribadian sebesar 1,038 dan tidak signifikan pada 0,05. Selanjutnya berdasarkan hasil statistik pada tabel 8, diperoleh nilai propabilitasnya adalah 0,536, karena nilainya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan diantara tipe kepribadian yang dimiliki responden berkaitan dengan *perceived involvement*, atau dengan kata lain tipe kepribadian tidak mempengaruhi *perceived involvement* dalam hal perancangan SIA. Sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak.

Tabel 8

4.4.5 Pengujian Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan Desired Involvement

Data statistik pada tabel 9, menunjukkan hasil analisa hubungan antara tipe kepribadian dengan *desired Involvement*. Uji statistik yang digunakan adalah uji ANOVA.

Tabel 9

Data statistik yang disajikan pada tabel 9, menguji keterkaitan antara tipe kepribadian dengan *desired involvement*. Hasil uji levene test menunjukkan nilai F sebesar 1,831 dengan probabilitas sebesar 0,583 dan tidak signifikan pada 0,05 ($p > 0,05$). Data statistik pada output SPSS test of between-Subject effects menunjukkan besaran nilai F untuk variabel tipe kepribadian 0,874 dan tidak signifikan pada 0,05.

Nilai probabilitas sebesar 0,583 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan diantara tipe kepribadian yang dimiliki responden berkaitan dengan *desired involvement*, atau dengan kata lain tipe kepribadian tidak mempengaruhi *desired involvement* dalam hal perancangan SIA. Dengan kata lain hipotesis keenam dalam penelitian ini ditolak.

4.4.6 Pengujian Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan Involvement State

Data statistik yang disajikan pada tabel 10, menguji keterkaitan antara tipe kepribadian dengan *involvement state*. Hasil uji levene test menunjukkan nilai sebesar 1,906 dan signifikan pada 0,05 ($p < 0,05$) yang berarti variance berbeda sehingga menyalahi asumsi ANOVA. Walaupun asumsi variance sama dilanggar, ANOVA masih tetap robust sehingga pengujian statistik dapat diteruskan. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tipe kepribadian dengan *involvement state*. Data statistik menampilkan nilai F sebesar 1,248 dan tidak signifikan pada 0,05 ($p > 0,05$).

Selanjutnya nilai probabilitas sebesar 0,039 dan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata level *Involvement State* antara responden dengan karakteristik kepribadiannya yang khas tidak berbeda secara statistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan diantara 16 tipe kepribadian berdasarkan MBTI® Tipe Kepribadian berkaitan dengan level *Involvement State*. Dengan demikian hipotesis ketujuh dalam penelitian ini ditolak

Tabel 10

4.4.7 Pengujian Hubungan Antara Tipe Kepribadian dengan Keadilan Prosedural

Data statistik yang disajikan pada tabel 11, menguji keterkaitan antara tipe kepribadian dengan keadilan prosedural. Hasil uji levene test menunjukkan nilai F sebesar 0,869 dan signifikan pada 0,05 ($p > 005$) yang berarti variance sama. Test of between subject effect menguji pengaruh ANOVA untuk variabel tipe kepribadian terhadap keadilan prosedural. Nilai F test menunjukkan angka 1,076 dan tidak signifikan pada 0,05 ($p > 0,05$).

Tabel 11

Selanjutnya nilai probabilitas yang diperoleh berdasarkan perhitungan statistik adalah sebesar 0,588 (lebih besar dari 0,05), yang berarti tidak terdapat perbedaan diantara tipe kepribadian berdasarkan MBTI® Tipe Personality berkaitan dengan keadilan prosedural. Dengan demikian hipotesis kedelapan dalam penelitian ini ditolak.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keterlibatan pemakai (*user involvement*) baik *Desired involvement* maupun *Perceived Involvement* mempengaruhi responden berkaitan dengan keadilan prosedural dalam perancangan sistem yang mereka alami. Hal lainnya adalah *desired*

Involvement dari para responden mempengaruhi *Perceived Involvement* berkenaan dengan perancangan sistem informasi akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3, yang menyatakan bahwa baik *Desired Involvement* maupun *Perceived Involvement* berpengaruh terhadap Keadilan Prosedural dan *Desired Involvement* mempengaruhi *Perceived Involvement*.

1) *Desired Involvement* terhadap *Perceived Involvement user* dalam perancangan SIA

Hasil statistik menunjukkan bahwa *desired involvement* mempengaruhi *perceived involvement* dari responden berkaitan dengan perancangan SIA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi hasrat (*desired*) untuk terlibat dalam perancangan sistem, maka pada kenyataannya keterlibatan responden dalam perancangan sistem pun semakin tinggi. Hasil penelitian ini mendukung dan konsisten dengan penelitian sebelumnya (Doll dan Torkzadeh, 1989, 1991; Alexandra Cook, 2006) yang menyatakan bahwa hasrat atau keinginan untuk terlibat yang tinggi dari *user* akan mendorong keterlibatan mereka secara nyata dalam perancangan sistem.

2) *Desired Involvement* terhadap Keadilan Prosedural dalam perancangan SIA

Hasil statistik menunjukkan bahwa *desired involvement* berpengaruh terhadap persepsi atas keadilan prosedural dalam perancangan sistem, dengan kata lain bahwa jika tingkat keinginan dari *user* untuk terlibat dalam perancangan tinggi maka mereka meyakini bahwa tingkat keadilan proseduralpun menjadi tinggi begitupun sebaliknya jika hasrat atau keinginan dari *user* untuk terlibat rendah maka tingkat keadilan prosedural kaitannya dengan perancangan sistem diyakini rendah pula.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alexander Cook (2006). Cook meyakini bahwa tinggi rendahnya hasrat dari *user* untuk terlibat dalam perancangan SIA akan mempengaruhi persepsi *user* akan tingkat keadilan prosedural dari perancangan sistem itu sendiri.

3) *Perceived Involvement* terhadap Keadilan Prosedural dalam perancangan SIA

Hasil statistik menunjukkan bahwa *perceived involvement* berpengaruh terhadap persepsi atas keadilan prosedural dalam perancangan sistem, dengan kata lain bahwa jika keterlibatan *user* dalam perancangan SIA tinggi maka mereka meyakini bahwa tingkat keadilan proseduralpun menjadi tinggi begitupun sebaliknya keterlibatan dari *user* dalam perancangan SIA rendah maka tingkat keadilan prosedural kaitannya dengan perancangan sistem diyakini rendah pula.

Hasil penelitian konsisten dengan penelitian sebelumnya (alexander Cook, 2006) yang menyatakan bahwa keterlibatan *user* yang tinggi dalam proses perancangan sistem akan memberikan kesan keadilan yang tinggi dalam proses perancangan sistemnya. Hasil inipun sesuai dengan riset-riset sebelumnya berkaitan dengan *procedural justice theory* dan *user participation theory* (Barki & Hartwick, 1989, 1994; hunton 1996; Hunton & Price, 1994, 1997; Alexander Cook, 2006) yang menyatakan bahwa keadilan prosedural adalah faktor penting dalam proses perancangan SIA dan tingkat keterlibatan dari *user* yang tinggi baik dalam hal hasrat/ keinginan (*desired*) maupun kenyataannya (*perceived*) akan meningkatkan persepsi keadilan yang tinggi atas proses perancangan tersebut (Doll & Torkzadeh, 1989) sehingga akan berdampak pada tingkat penerimaan dan kepuasan dari *user* atas sistem tersebut.

4) *Involvement State* terhadap Keadilan Prosedural dalam perancangan SIA

Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan sama sekali diantara level dalam *involvement state* (saturation, equilibrium dan high deprivation) dengan keadilan posedural, dan ini jelas tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya (Cook, 2006). Kondisi ini menjadi menarik karena dalam hipotesis sebelumnya disimpulkan bahwa kondisi *perceived involvement* berpengaruh terhadap keadilan`prosedural dalam perancangan sistem, dan ketika dikaji lebih dalam dengan mengklasifikasikan keterlibatan dari *user* kedalam tiga

kondisi keterlibatan *state* (saturation, equilibrium dan high deprivation) justru tidak terdapat hubungan sama sekali. Dengan kata lain dapat disimpulkan walaupun keterlibatan *user* secara nyata dalam perancangan sistem (*perceived involvement*) dapat mempengaruhi persepsi keadilan dalam proses perancangan sistem akan tetapi tingkat kejenuhan *user* baik itu antusiasme ataupun biasa-biasa saja serta kejenuhan yang tinggi tidak berpengaruh secara signifikan pada persepsi keadilan prosedural selama proses perancangan berlangsung.

5) Perbedaan dalam level *Desired Involvement*, *perceived involvement* dan *involvement state* diantara user yang diklasifikasikan dalam MBTI® tipe personal

Berdasarkan statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan berkenaan dengan *desired involvement*, *perceived involvement* dan *involvement state* diantara *user* yang terklasifikasikan dalam MBTI® *personality type*. Hasil penelitian ini sama dengan temuan penelitian dari Alexander Cook (2006). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tipe *personality* dari *user* tidak mempengaruhi hasrat atau keinginan untuk terlibat dalam perancangan ataupun keterlibatan aktual dari *user* selama proses perancangan sistem berlangsung. Hal lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagian besar dari responden memiliki karakteristik tipe *personality* STJ (baik ISTJ maupun ESTJ), hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kovar et al (2003) dan Nikolai (1997) dimana sebagian besar individu yang bergerak di bidang pendidikan akuntansi dan profesi akuntansi lainnya cenderung karakteristik kepribadiannya dominan STJ.

6) Perbedaan mengenai persepsi keadilan prosedural diantara user yang diklasifikasikan dalam MBTI® tipe personal

Data statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan diantara *user* yang terklasifikasikan dalam MBTI® *type indicator* berkaitan dengan persepsi keadilan prosedural dalam perancangan SIA. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Cook (2006) padahal beberapa peneliti terdahulu (James Jay Mackie ,1986 wheeler, et al., 2001,2004) meyakini bahwa karakteristik individu yang khas yang diwakili oleh kepribadiannya masing-masing dapat menjadi faktor dominan dalam perilaku berorganisasi

termasuk dalam prinsip manajemen dalam hal ini perencanaan (penyusunan/ perancangan dll).

Faktor sebaran karakteristik personality (16 tipe kepribadian) dan sebaran jumlah responden beserta karakteristik personality yang dimilikinya yang sangat berbeda diyakini menjadi salah satu alasan tipe kepribadian dari *users* tidak mempengaruhi variabel lainnya. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa walaupun memiliki tipe kepribadian yang khas dan setiap tipe kepribadian tersebut memiliki ciri-ciri dominannya masing-masing, tetapi ketika dikaitkan dengan pengambilan keputusan dari *user* (keterlibatan dan keadilan prosedural) faktor tipe personality ini tidaklah mempengaruhi.

5. Simpulan dan Saran

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan diantara *desired involvement* dan *perceived involvement* dengan keadilan prosedural. Untuk variabel *Involvement state* dapat disimpulkan tidak berpengaruh terhadap persepsi *user* atas keadilan prosedural dalam perancangan sistem.

Diperoleh bukti empirik bahwa *desired involvement* atau hasrat/ keinginan *user* untuk terlibat dalam perancangan SIA berpengaruh terhadap keterlibatan aktual dari *user* (*perceived involvement*) pada proses perancangan SIA. Hasil uji hipotesis ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Doll dan torkzadeh (1989, 1991) dan Cook (2006). Menurut mereka peningkatan level *desired involvement* dapat meningkatkan level keterlibatan aktual/ sesungguhnya (*perceived involvement*) dari *user* pada proses perancangan SIA.

Selanjutnya, kaitannya dengan keadilan prosedural, diperoleh bukti empiris bahwa *desired involvement* atau hasrat/ keinginan *user* untuk terlibat dalam perancangan SIA berpengaruh terhadap persepsi atas keadilan prosedural. Semakin tinggi hasrat/ keinginan

users untuk terlibat semakin besar pula keyakinan atas keadilan prosedural dalam proses perancangan sistem begitupun sebaliknya. Hasil uji hipotesis ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alexander Cook (2006), yang menyatakan bahwa *desired involvement* berhubungan positif dengan persepsi pemakai atas keadilan prosedural dalam perancangan SIA.

Diperoleh bukti empirik bahwa keterlibatan aktual (*perceived involvement*) dari *user* selama proses perancangan berlangsung berpengaruh terhadap persepsi keadilan prosedural. Jika keterlibatan aktualnya tinggi maka persepsi *user* atas keadilan proseduralnya pun tinggi. Responden percaya bahwa keadilan akan tercipta dalam proses perancangan SIA jika keterlibatan mereka tinggi pula.

Diperoleh bukti empirik bahwa karakteristik kepribadian dari responden yang diwakili dalam 16 tipe kepribadian berdasarkan MBTI® *personality type* tidak memiliki pengaruh terhadap keseluruhan variabel penelitian lainnya (*desired involvement, perceived involvement, involvement state* dan keadilan prosedural). Dapat disimpulkan bahwa walaupun karakteristik khas yang dimiliki oleh *user* berbeda-beda dan karakteristik kognitif yang menempel didalamnya pun berbeda akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kondisi keterlibatan dan persepsi atas keadilan prosedural dalam perancangan sistem.

5.2. Saran

Atas dasar kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan keakuratan pengisian kuesioner, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan metode selain metode *mail survey*. Metode tersebut seperti metode eksperimen atau metode wawancara atau survey secara langsung..

- b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa variabel tipe kepribadian tidak memiliki pengaruh atas variabel lainnya. Untuk penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan indikator kepribadian lainnya seperti DISC, dll.
- c. Selain itu, penelitian ini perlu diuji lagi dengan menggunakan model statistik lainnya seperti analisis jalur terutama untuk memperkuat keterkaitan diantara keterlibatan pemakai (*desired involvement*, *perceived involvement* dan *involvement state*) serta hubungannya dengan keadilan prosedural.

Daftar Referensi

- Barki, H., & Hartwick, J. (1989). *Rethinking The Concept of User involvement*. MIS Quarterly, 53-56
- Barki, H., & Hartwick, J. (1994). *Measuring user participation, user involvement and user attitudes*. MIS Quarterly, 59-82
- Cook, Alexandra (2006). *The Relationship Among Personality Type, User Involvement, and Procedural Justice in Accounting Information System*. Dissertation on H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship. Nova Southeastern University
- Colquitt, J.A. (2001). *On the Dimensionality of Organizational Justice : A construct validation of measure*. Journal of Applied Psychology, 86 (3), 127-141
- Doll, W., Torkzadeh, G. (1991) A Congruence construct of User Involvement. Decision Sciences, 22. 443-453
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hunton, J.E. (1996). "Procedural justice and user involvement in developing accounting software: the effect of instrumental voice, choice, noninstrumental voice and involvement expectation", *The Journal of Information System*, 10(1), hlm. 27-47.
- Hunton, J., & Price K (1994). *A Frame Work for Investigating Strategies in Accounting Information Systems Development*. Behavioural research in Accounting, 6.
- _____, (1997). *Effect of the User Participation Process and Task Meaningfulness on Key Information Systems Outcomes*. Management Science, 43, 797-812
- James Jay Mackie (1986). *An empirical Investigation of The Impact of Personality Type on Supervisor-Subordinat Relations in a Budgetary Setting*. Dissertation. University Microfilms International. Texas.
- Kovar, S., Ott, R., & Fisher (2003). *Personality Preferences of Accounting Students : A Longitudinal case Study*. Journal of Accounting Education, 21. 75-94
- Laventhal, G (1980). *What Should be Done with Equity Theory ? New approach to the Study of fairness in Social Relationship*. Plenum Press. New York

Myers, PB & Myers, K.D (1998). *The Myers-Briggs Type Indicator Form M*. Consulting Psychologist Press. Mountain View.

Steffani A Burd (1998). *Examining Leadership effectiveness in Profesional Firm : The Impact of Personality Preference, Leadership Disposition and Involvement Practices on Client Satisfaction*. Dissertation. University Microfilms International. Texas

Wheeler (2001). *The Myers-Briggs Type Indicator and Application to Accounting Education and Research*. Issues in Accounting Education, 16, 125-150

Wheeler, P.R, Hnton, J.E., Bryant, S.M (2004). *Accounting Information System Research Opportunities Using Personality Type Theory and the Myers-Briggs Type Indicator*. Journal of Information Systems, 18 (1), 1-19

www.PersonalityParthways.com

Lampiran

Tabel 1.
Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	Teoritis		Aktual	
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean
PINV	9 - 81	45	12 - 42	26,69
DINV	9 - 81	45	10 - 43	24,41
PJUS	7 - 49	28	7 - 34	23,76

Tabel 2.
Uji Normalitas

Variabel	Nilai K-S	Sig. (2tailed)	Kriteria	Kesimpulan
DINV	0,806	0,535	0,05	Normal
PINV	0,790	0,560	0,05	Normal
PJUS	1,240	0,090	0,05	Normal

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi terhadap Variabel Dependen PINV

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,575 ^a	,331	,324	5,34649

a. Predictors: (Constant), DINV

ANOVA(b)						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1454,379	1	1454,379	50,879	,000(a)
	Residual	2944,249	103	28,585		
	Total	4398,629	104			

a Predictors: (Constant), DINV
b Dependent Variable: PINV

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,195	1,962		6,725	,000
	DINV	,553	,077	,575	7,133	,000

a. Dependent Variable: PINV

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Pengaruh *Perceived Involvement* terhadap Variabel Dependen Keadilan Prosedural

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,553(a)	,306	,300	5,41337	

a. Predictors: (Constant), PINV

Coefficients(a)						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	9,073	2,241		4,048	,000
	PINV	,550	,082	,553	6,744	,000

a. Dependent Variable: PJUS

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Pengaruh *Desired Involvement* terhadap Variabel Dependen Keadilan Prosedural

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,626 ^a	,392	,386	5,07436

a. Predictors: (Constant), DINV

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,206	1,862		4,944	,000
	DINV	,599	,074	,626	8,146	,000

a. Dependent Variable: PJUS

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Pengaruh *Involvement State* terhadap Variabel Dependen Keadilan Prosedural

Levene's Test of Equality of Error Variance^s

Dependent Variable: PJUS

F	df1	df2	Sig.
,729	2	102	,485

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.
 a. Design: Intercept+State

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: PJUS

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	219,186 ^a	2	109,593	2,699	,072
Intercept	32889,605	1	32889,605	809,985	,000
State	219,186	2	109,593	2,699	,072
Error	4141,728	102	40,605		
Total	63980,000	105			
Corrected Total	4360,914	104			

a. R Squared = ,050 (Adjusted R Squared = ,032)

Multiple Comparisons

Dependent Variable: PJUS

	(I) State	(J) State	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Tukey HSD	High Deprivation	Equilibrium	-3,2082	2,17398	,307	-8,3788	1,9624
		Saturation	-5,1412	2,29233	,069	-10,5933	,3109
	Equilibrium	High Deprivation	3,2082	2,17398	,307	-1,9624	8,3788
		Saturation	-1,9330	1,36379	,336	-5,1766	1,3107
	Saturation	High Deprivation	5,1412	2,29233	,069	-,3109	10,5933
		Equilibrium	1,9330	1,36379	,336	-1,3107	5,1766
Bonferroni	High Deprivation	Equilibrium	-3,2082	2,17398	,429	-8,4999	2,0835
		Saturation	-5,1412	2,29233	,081	-10,7210	,4386
	Equilibrium	High Deprivation	3,2082	2,17398	,429	-2,0835	8,4999
		Saturation	-1,9330	1,36379	,478	-5,2526	1,3866
	Saturation	High Deprivation	5,1412	2,29233	,081	-,4386	10,7210
		Equilibrium	1,9330	1,36379	,478	-1,3866	5,2526

Based on observed means.

Tabel 7
Hasil analisis Statistik *Involvement State* dan Keadilan Prosedural

PJUS				
	STATE	N	Subset	
			1	2
Tukey HSD ^{a,b,c}	HD	10	16.30	
	E	61	19.54	19.54
	S	34		21.15
	Sig.		.179	.651

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
 Based on observed means.
 The error term is Mean Square(Error) = 33,858.
 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 20,575.
 b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
 c. Alpha = ,05.

Tabel 8.
Hasil Analisis Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan *Perceived Involvement*

Levene's Test of Equality of Error Variance^s

Dependent Variable: PINV

F	df1	df2	Sig.
,920	13	91	,536

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept+Type

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: PINV

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	567,938 ^a	13	43,688	1,038	,423
Intercept	47939,749	1	47939,749	1138,833	,000
Type	567,938	13	43,688	1,038	,423
Error	3830,691	91	42,096		
Total	79172,000	105			
Corrected Total	4398,629	104			

a. R Squared = ,129 (Adjusted R Squared = ,005)

PINV

		N	Subset
Type			1
Tukey HSD ^{a,b,c}	ENFJ	3	23,3333
	INFJ	5	24,0000
	ESTJ	15	24,3333
	ISTP	15	24,7333
	ENTP	3	25,6667
	ESFP	4	26,2500
	INTJ	8	26,6250
	ISTJ	25	26,9600
	ISFP	4	28,0000
	ENTJ	3	29,0000
	ISFJ	9	29,2222
	ESFJ	5	29,6000
	ESTP	2	32,0000
	ENFP	4	33,2500
	Sig.		,551

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 42.096.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,576.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

c. Alpha = ,05.

Tabel 9.
Hasil Analisis Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan *Desired Involvement*

Levene's Test of Equality of Error Variance^s

Dependent Variable: DINV

F	df1	df2	Sig.
1,831	13	91	,050

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.
a. Design: Intercept+Type

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: DINV

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	528,402 ^a	13	40,646	,874	,583
Intercept	39153,859	1	39153,859	841,722	,000
Type	528,402	13	40,646	,874	,583
Error	4232,989	91	46,516		
Total	67323,000	105			
Corrected Total	4761,390	104			

a. R Squared = ,111 (Adjusted R Squared = -,016)

DINV

		N	Subset
Type			1
Tukey HSD ^{a,b,c}	ENFJ	3	18,6667
	ESTJ	15	22,2667
	ESFP	4	22,7500
	INTJ	8	23,2500
	ISTP	15	23,5333
	INFJ	5	23,8000
	ISFJ	9	24,5556
	ISTJ	25	25,0000
	ESTP	2	25,5000
	ENTJ	3	25,6667
	ENTP	3	25,6667
	ENFP	4	25,7500
	ISFP	4	28,5000
	ESFJ	5	31,2000
	Sig.		

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 46,516.

- a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,576.
- b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
- c. Alpha = ,05.

Tabel 10.
Hasil Analisis Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan *Involvement State*

Test of Homogeneity of Variances			
State			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1,906	13	91	,039

ANOVA					
State					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5,827	13	,448	1,248	,260
Within Groups	32,687	91	,359		
Total	38,514	104			

Tabel 11.
Hasil Analisis Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan Keadilan Prosedural

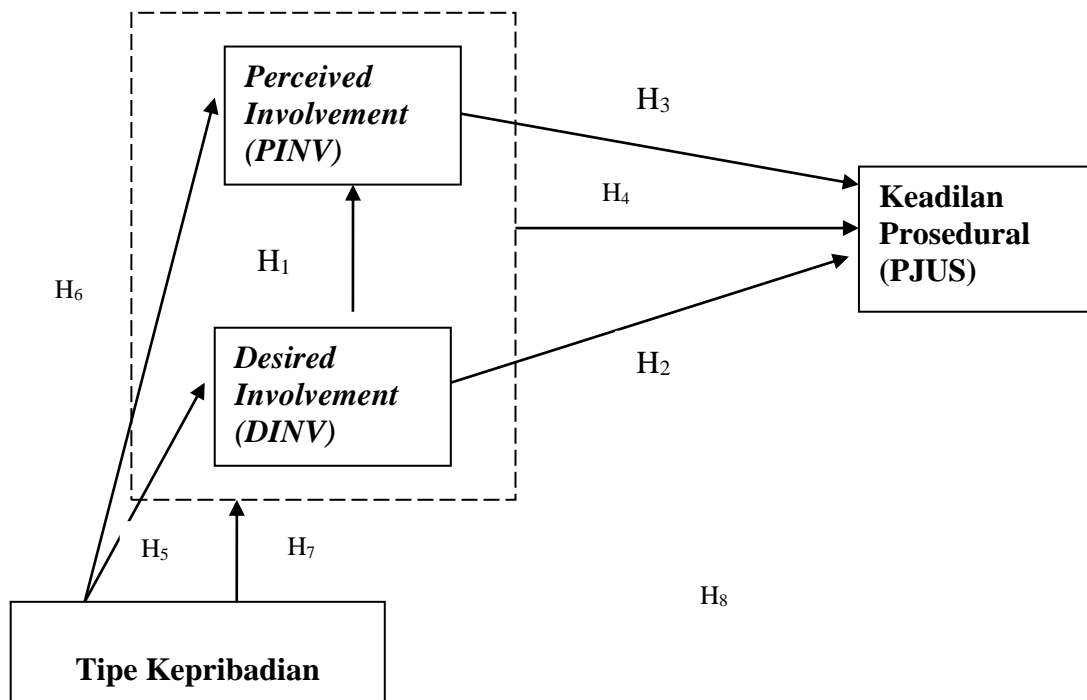
Levene's Test of Equality of Error Variance ^s			
Dependent Variable: PJUS			
F	df1	df2	Sig.
,869	13	91	,588

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.
a. Design: Intercept+Type

Tests of Between-Subjects Effects					
Dependent Variable: PJUS					
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	579,566 ^a	13	44,582	1,076	,390
Intercept	34640,128	1	34640,128	835,813	,000
Type	579,566	13	44,582	1,076	,390
Error	3771,482	91	41,445		
Total	63637,000	105			
Corrected Total	4351,048	104			

a. R Squared = ,133 (Adjusted R Squared = ,009)

Model Penelitian



Pengaruh Gender Auditor dan Gender Klien terhadap *Audit Judgement* (Sebuah Kajian Kuasi Eksperimen)

QIMYATUSSA'ADAH*

STKIP Bima

BAMBANG SUBROTO

GUGUS IRIANTO

Universitas Brawijaya

Abstract: *This study aims to obtain an empirical evidence of auditor and client gender's influence towards the audit judgement. The method use was Quasi Experiment which involved 26 auditors (11 females and 15 males) who work at three different public accounting firms in Malang and one auditing board office in Surabaya with averagely 7.8 years experience of working as auditor. They are 31.3 years old on average. The research findings show that auditor gender has influence towards audit judgement. However, client gender does not have influence towards audit judgement. Next point of the findings show that there is no difference of response between female and male auditors towards female and male clients. The research findings support the theory of risk aversion and selectivity hypothesis. The findings showed female auditors are more conservative than male auditors. Therefore, it is suggested for the practitioners to improve the recruitment process by opening more chance for future female auditors.*

Keywords: *Audit Judgement, Auditor Gender, Client Gender, Gender, Stereotype, Risk Aversion, Selectivity Hypothesis.*

* Corresponding author: qsaadahafidz@gmail.com

I. Pendahuluan

Tujuan dilaksanakannya audit adalah untuk memverifikasi bahwa subyek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi dan praktek yang berterima umum. Jasa yang diberikan auditor antara lain: jasa audit laporan keuangan, jasa audit khusus, jasa review laporan keuangan, jasa kompilasi laporan keuangan dan jasa attestasi. Dalam proses audit, seorang auditor akan memberikan *judgement* berupa opini yang didasarkan pada kejadian-kejadian di masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. *Audit judgement* atas kemampuan entitas harus berdasarkan pada ada tidaknya kesangsian dalam diri auditor terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya pada periode satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan.

Audit judgement sebagai bagian dari proses audit ditentukan oleh auditor berdasarkan dalil individual dan kombinasi dari permasalahan yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Mautz dan Sharaf (1985:27) "*formulation of judgements are based on the individual proposition and the composite problems*". Dapat dikatakan bahwa dalam menentukan *audit judgement*, auditor tidak akan lepas dari aspek individualnya.

Aspek-aspek individual auditor diantaranya pengalaman, pengetahuan, dan gender. Hackenbrack (1992) menemukan bahwa auditor yang lebih berpengalaman mengalami tingkat kesalahan yang relatif lebih kecil daripada auditor yang kurang berpengalaman. Anandarajan *et al.* (2008) menemukan bahwa pengalaman auditor dapat mengurangi terjadinya bias heuristik ketika menentukan *audit judgement* keberlangsungan hidup sebuah entitas. Johari dan Sanusi (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan responden dengan *audit judgement*. Iskandar *et al.* (2010) menemukan bahwa *self-efficacy* yaitu keyakinan diri atas kapabilitas untuk mengorganisir dan mencapai level kinerja yang diharapkan, memiliki hubungan positif dengan kinerja auditor dalam menentukan *audit judgement*.

Riset tentang pengaruh gender terhadap *audit judgement* dilakukan oleh Gold *et al.* (2009) yang menguji pengaruh gender auditor dan gender klien terhadap *audit judgement* dengan menggunakan sampel 81 auditor di Amerika Serikat. Temuan Gold *et al.* (2009) menunjukkan bahwa auditor (perempuan dan laki-laki) lebih mudah dipengaruhi oleh klien laki-laki dalam menentukan *audit judgement*. Nateberg *et al.* (2006) menguji pengaruh keahlian klien, gender klien dan gender auditor terhadap *audit judgement*. Nateberg *et al.* (2006) menemukan bahwa klien dengan keahlian tinggi dan bergender laki-laki lebih mempengaruhi auditor dalam menentukan *audit judgement*, serta auditor perempuan lebih bias gender daripada auditor laki-laki. Riset-riset berkenaan dengan pengaruh gender menemukan bahwa gender dapat mempengaruhi *audit judgement*, pada umumnya riset-riset tersebut mengangkat fenomena stereotipe dan bias gender.

Bidang akuntansi publik merupakan salah satu bidang yang tidak terlepas dari diskriminasi gender, stereotipe dan bias gender. Riset-riset di Indonesia menunjukkan adanya stereotipe dan bias gender di bidang akuntansi publik. Hal ini nampak dari berbedanya upah auditor laki-laki dengan auditor perempuan dimana auditor laki-laki dibayar lebih tinggi daripada auditor perempuan (Trisnawati, 2007). Selain itu, data di Indonesia menunjukkan bahwa sejak tahun 2005 lebih dari 50% lulusan sarjana akuntansi adalah perempuan (www.dikti.go.id), namun pada dunia kerja akuntansi dan auditing masih didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2010 sekitar 882 akuntan publik yang menempati posisi rekan, hanya sekitar 16% diantaranya adalah perempuan (IAPI, 2010). Hal inilah yang mendasari peningkatan riset yang mengkaji gender dan akuntansi pada satu dasawarsa terakhir (Anderson *et al.*, 1994; Trisnaningsih, 2004; Jamilah *et al.*, 2007; Gold *et al.*, 2009; Hardies *et al.*, 2009). Isu ini juga mengemuka karena gender merupakan salah satu aspek perilaku individu, yang turut mempengaruhi auditor dalam menentukan *audit judgement*.

Pengaruh gender terhadap *audit judgement* dapat dijelaskan berdasarkan teori psikologi keperilakuan. Teori psikologi keperilakuan menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan *risk aversion* dan *selectivity hypothesis*. Dimana, perempuan dikatakan lebih menghindari risiko (*risk averse*) dan memproses informasi secara lebih komprehensif (*selectivity hypothesis*) dibandingkan dengan laki-laki. *Risk aversion* dan *selectivity hypothesis* seringkali digunakan untuk menjadi landasan teori riset-riset di bidang akuntansi yang menguji gender sebagai variabel independen (Byrnes, 1999; Watson dan McNaughton, 2007; Gold *et al.*, 2009).

Pengaruh perbedaan gender masih menunjukkan hasil yang inkonsisten, meskipun penelitian-penelitian di atas membuktikan adanya pengaruh gender terhadap *audit judgement*. Penelitian Hardies *et al.* (2009) yang menguji pengaruh gender terhadap kualitas audit dengan reputasi auditor sebagai proksi dari kualitas audit menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas audit antara auditor perempuan dengan auditor laki-laki. Namun kredibilitas informasi dari auditor laki-laki dianggap lebih baik daripada informasi yang diberikan oleh auditor perempuan. Hardies *et al.* (2010) menguji pengaruh gender terhadap kualitas audit, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kualitas audit antara kelompok auditor perempuan dengan kelompok auditor laki-laki. Namun demikian, Hardies *et al.* (2010) juga menemukan bahwa kelompok auditor dengan komposisi gender yang seimbang antara perempuan dan laki-laki menunjukkan tingkat kualitas audit yang lebih baik daripada kelompok auditor perempuan dan kelompok auditor laki-laki.

Riset tentang pengaruh gender di bidang akuntansi di Indonesia menunjukkan hasil yang inkonsisten dengan teori yang ada, dimana tidak terbukti adanya pengaruh gender. Zulaikha (2006) menguji pengaruh interaksi gender, kompleksitas tugas dan pengalaman auditor terhadap *audit judgement*. Temuan riset ini menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*. Trisnaningsih (2004) menguji kinerja auditor berdasarkan

perbedaan gender, dengan menggunakan komitmen organisasi, komitmen profesi, motivasi, kesempatan karir dan kepuasan kerja sebagai indikator dari kinerja auditor. Hasil riset ini menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja antara auditor perempuan dengan auditor laki-laki. Jamilah *et al.* (2007) menguji pengaruh gender, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas terhadap *audit judgement*. Hasil riset Jamilah *et al.* (2007) menunjukkan bahwa gender dan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*, tetapi tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgement*.

Berdasarkan adanya stereotipe gender dan inkonsistensi pengaruh gender sebagai variabel independen, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dan menguji pengaruh gender terhadap *audit judgement*. Untuk kemudian mengetahui apakah *audit judgement* yang ditetapkan oleh auditor perempuan akan berbeda dengan auditor laki-laki ketika mendapatkan informasi yang belum diverifikasi dari klien laki-laki atau klien perempuan.

1.1 Motivasi Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Gold *et al.* (2009) yang menguji pengaruh gender auditor dan gender klien terhadap *audit judgement*. Penelitian mengenai *audit judgement* ini menarik untuk dilakukan karena dimotivasi oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, *audit judgement* merupakan fokus utama riset auditing karena memiliki implikasi potensial terhadap kebijakan guna meningkatkan praktek profesional pada berbagai area, seperti pengembangan dan modifikasi metode auditing; standar dan prosedur; pendekatan pelatihan dan pengawasan; dan pengembangan program komputer untuk membantu pengambilan keputusan (Boritz, 1986:335). Pernyataan Boritz (1986:335) menunjukkan *audit judgement* sebagai tema riset yang menarik, karena implikasinya terhadap berbagai area di bidang auditing. Selain itu, perkembangan dunia bisnis dan

perubahan standar audit dari waktu ke waktu akan terus diikuti dengan kebutuhan akan riset tentang *audit judgement*.

Kedua, replikasi perlu dilakukan karena gender dan stereotipe yang menyertainya, adalah nyata keberadaannya. Namun sifat stereotipe dan bias gender yang tidak universal, menyebabkan temuan akan berbeda pada waktu dan ruang yang berbeda. Oleh karenanya, untuk dapat membuktikan secara empiris dampak potensial gender terhadap *audit judgement* perlu dilakukan pengujian berkali-kali pada waktu dan ruang yang berbeda. Hal inilah yang menjadi motivasi peneliti untuk memilih pengaruh gender terhadap *audit judgement* sebagai topik penelitian dengan mereplikasi penelitian Gold *et al.* (2009).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada tempat, waktu, metode dan subyek penelitian. Penelitian Gold *et al.* (2009) dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2009 dengan metode eksperimen laboratorium dan subyek penelitian sebanyak 81 auditor asal Amerika Serikat dengan rata-rata pengalaman kerja di bidang akuntansi selama 2,36 tahun. Penelitian ini dilakukan di Indonesia, pada tahun 2011 dengan metode kuasi eksperimen dan subyek penelitian sebanyak 26 auditor dengan rata-rata pengalaman kerja di bidang akuntansi selama 7,8 tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah auditor perempuan atau auditor laki-laki yang akan lebih mudah dipengaruhi oleh informasi yang belum diverifikasi dari klien dalam menentukan *audit judgement*?
2. Apakah klien perempuan atau klien laki-laki yang akan lebih mempengaruhi auditor dalam menentukan *audit judgement*?
3. Apakah auditor akan memberi respon yang berbeda terhadap klien perempuan atau klien laki-laki?

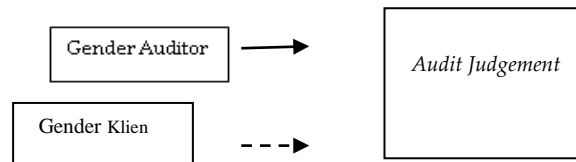
II. Rerangka Konseptual Penelitian dan Perumusan Hipotesis

2.1 Rerangka Konsep

Penelitian ini menguji dampak potensial gender terhadap *audit judgement*. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Mautz dan Sharaf (1985) dimana auditor menggunakan dalil individualnya dalam menentukan *audit judgement*, oleh karenanya aspek-aspek individual auditor dapat mempengaruhi penentuan *audit judgement*. Maka gender sebagai salah satu aspek individual dari seorang auditor dapat pula mempengaruhi *audit judgement*. Berdasarkan kajian teori dan penelitian empiris sebelumnya, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1

Model Rerangka Konsep



Penelitian ini menguji *audit judgement* sebagai variabel dependen dan gender auditor sebagai variabel independen. Selain itu, gender klien adalah variabel yang dimanipulasi untuk dapat melihat pengaruh potensial gender klien dalam interaksinya dengan auditor dan penentuan *audit judgement*.

2.2 Perumusan Hipotesis

2.2.1 Gender Auditor

Teori psikologi berperilaku menyatakan bahwa terdapat dua sumber utama yang dapat menjelaskan pengaruh gender terhadap *audit judgement*, yaitu: *risk aversion* dan *selectivity hypothesis*. Perempuan cenderung lebih menghindari risiko jika dibandingkan dengan laki-

laki, hal ini kemudian mempengaruhi cara pengambilan keputusan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Riset di bidang akuntansi menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan, perempuan cenderung lebih berhati-hati apabila dibandingkan dengan laki-laki. Francis *et al.* (2010) menemukan bahwa *chief financial officer* (CFO) perempuan lebih menghindari risiko daripada CFO laki-laki dalam hal kebijakan pelaporan keuangannya, serta CFO perempuan lebih sering menggunakan kebijakan pelaporan keuangan konservatif apabila dibandingkan dengan CFO laki-laki. Demikian pula Dwyer *et al.* (2002), dalam riset ini diketahui bahwa perempuan cenderung lebih menghindari risiko apabila dibandingkan dengan laki-laki ketika membuat keputusan investasi. Niskanen *et al.* (2009) menemukan bahwa auditor perempuan cenderung lebih konservatif apabila dibandingkan dengan auditor laki-laki. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa, berdasarkan *risk aversion*, auditor perempuan cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan *audit judgement*nya dibandingkan dengan auditor laki-laki.

Selectivity hypothesis adalah perbedaan proses pengolahan informasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan cenderung untuk memadukan lebih banyak informasi yang tersedia untuk kemudian menentukan sebuah keputusan, sementara laki-laki cenderung untuk mengeliminir informasi yang mereka anggap tidak perlu untuk kemudian menentukan sebuah keputusan. Auditor perempuan cenderung untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang tersedia sebagai petunjuk untuk membuat *judgement*. Sebaliknya, auditor laki-laki cenderung untuk meminimalisir bukti yang mereka anggap tidak perlu dan fokus kepada lebih sedikit informasi yang mereka anggap perlu.

Chung dan Monroe (2001) menemukan bahwa dalam tugas evaluasi persediaan, auditor perempuan memproses informasi dengan lebih komprehensif jika dibandingkan dengan auditor laki-laki. O'Donnell dan Johnson (2001) juga menemukan bahwa dalam mengerjakan tugas perencanaan prosedur analitis, auditor perempuan menggunakan proses informasi yang

lebih komprehensif dibandingkan dengan auditor laki-laki dalam konteks klien dengan risiko rendah. Lebih jauh, dokumentasi eksperimen keperilakuan yang dilakukan oleh BBC (2006) menunjukkan bahwa ada pola kerja yang berbeda antara otak laki-laki dengan otak perempuan. Kemudian disimpulkan bahwa perilaku individu adalah kombinasi unik yang merupakan mozaik antara pola kerja otak laki-laki dan otak perempuan. Dengan demikian, *selectivity hypothesis* merupakan dasar argumentasi bahwa auditor perempuan akan cenderung untuk mengumpulkan informasi secara lebih komprehensif dibandingkan auditor laki-laki dalam menentukan *audit judgement*nya.

Berdasarkan perbedaan penghindaran risiko dan *selectivity hypothesis* dapat dikatakan bahwa auditor perempuan cenderung lebih berhati-hati dan mengumpulkan lebih banyak informasi dalam membuat *audit judgement*. Oleh karenanya, dapat diasumsikan bahwa auditor perempuan mestinya relatif tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang belum diverifikasi yang diberikan oleh klien. Sehingga, dapat diturunkan hipotesis, sebagai berikut:

H1: Auditor perempuan relatif lebih tidak mudah dipengaruhi oleh informasi klien yang belum diverifikasi dibandingkan dengan auditor laki-laki.

2.2.2 Gender Klien

Nyberg-Stuart (2006) dalam Gold *et al.* (2009) menyatakan bahwa terjadi ketimpangan antara jumlah CFO perempuan dengan CFO laki-laki, dimana jumlah CFO perempuan hanya mencapai kurang dari 10 % dari seluruh CFO yang ada pada 500 perusahaan terkemuka. Sehingga, dapat dikatakan bahwa probabilitas auditor bertemu dengan klien CFO perempuan adalah kecil, dengan demikian terdapat kesenjangan antara pengalaman auditor dalam menghadapi klien perempuan dibandingkan dengan klien laki-laki.

Selain itu, riset psikologi menunjukkan bahwa gender merefleksikan kategori sosial tertentu yang seringkali tanpa sadar mempengaruhi aktivitas proses pengumpulan informasi

dan perumusan keputusan (Norton *et al.*, 2004). Individu seringkali mengasosiasikan laki-laki memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan perempuan (William dan Best, 1990). Lebih jauh, riset eksperimen yang dilakukan oleh BBC (2006) menunjukkan bahwa laki-laki cenderung akan lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh sesama laki-laki dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh perempuan.

Berdasarkan asumsi bahwa auditor lebih sedikit berhadapan dengan klien perempuan, sehingga terdapat kesenjangan pengalaman auditor dalam menghadapi klien perempuan dibandingkan dengan klien laki-laki. Serta adanya anggapan bahwa laki-laki memiliki kemampuan yang lebih baik dari laki-laki dan kemungkinan kecenderungan auditor laki-laki untuk lebih memperhatikan informasi yang diberikan oleh klien laki-laki, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Auditor akan relatif lebih dipengaruhi oleh penjelasan yang diberikan oleh klien laki-laki dibandingkan dengan klien perempuan.

2.2.3 Interaksi antara Gender Auditor dengan Gender Klien

Auditor perempuan dan laki-laki dapat memberikan respon yang berbeda ketika menghadapi klien perempuan atau laki-laki. Konstruksi sosial seringkali mengunggulkan laki-laki daripada perempuan dalam berbagai bidang, bias gender ini disebut dengan *male favorability*. Oleh karenanya, auditor dalam menentukan *audit judgement* dapat dipengaruhi secara potensial oleh gender klien.

Literatur psikologi dan riset-riset terdahulu menunjukkan inkonsistensi mengenai bias gender *male favorability*, beberapa riset menunjukkan bahwa laki-laki lebih bias gender dibandingkan dengan perempuan, beberapa yang lain menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama bias gendernya, dan lainnya menunjukkan bahwa perempuan lebih bias gender dibandingkan dengan laki-laki.

Eagly *et al.* (1992) melakukan riset tentang evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan hasil bahwa, perempuan akan menghadapi penolakan lebih besar daripada laki-laki ketika berhadapan dengan pimpinan laki-laki. Studi bidang manajemen menunjukkan bahwa persepsi laki-laki mengenai manajer yang sukses selalu diasosiasikan dengan karakteristik laki-laki (Schein, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih bias gender dengan *male-favorability* dibandingkan dengan perempuan. Di bidang auditing, Trapp *et al.* (1989) menemukan bahwa auditor laki-laki lebih bias gender daripada auditor perempuan. Heilman *et al.* (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan metode eksperimen untuk mengetahui perilaku komunitas pada sebuah seting kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kecenderungan *male favorability*. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya bahwa terdapat stereotipe gender di dunia kerja dan menunjukkan bukti adanya stereotipe gender tentang bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berperilaku.

Pada penelitian lain, seperti Anderson, *et al.* (1994) menemukan bahwa tidak ada pengaruh dari gender partisipan terhadap bias gender. Harding *et al.* (2002) yang menyelidiki apakah gender dari para pelamar akan mempengaruhi rekrutmen pada kantor akuntan publik dan besarnya gaji yang akan diterima, menemukan bahwa perekrut perempuan cenderung untuk menawarkan gaji yang lebih besar kepada pelamar laki-laki dibandingkan dengan pelamar perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih bias gender daripada laki-laki.

Bias gender yang cenderung *male favorability* tidak bersifat universal dan sangat tergantung pada waktu dan tempat dimana konstruksi sosial terbentuk. Sehingga, riset-riset bias gender menemukan hasil yang berbeda-beda. Oleh karenanya, penelitian ini menurunkan tiga alternatif hipotesis berkaitan dengan respon auditor terhadap gender klien, sebagai berikut:

H3a: Respon auditor laki-laki terhadap klien akan relatif lebih *male-favorability* dibandingkan dengan auditor perempuan.

H3b: Respon auditor terhadap klien akan tidak berbeda.

H3c: Respon auditor perempuan terhadap klien akan relatif lebih *male-favorability* dibandingkan dengan auditor laki-laki.

III. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen. Peneliti menganggap kuasi eksperimen paling sesuai dengan tujuan penelitian ini, hal ini didasarkan pada beberapa alasan yaitu: pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh gender auditor dan gender klien terhadap *audit judgement*. Sebagaimana penjelasan Borden dan Abbot (2008: 326) dimana gender sebagai variabel penelitian yang diangkat adalah termasuk dalam variabel kuasi. Kedua, subyek penelitian dikelompokkan berdasarkan gender tanpa melalui tahapan randomisasi. Ketiga, tidak ada pengontrolan atas variabel yang diuji. Keempat, gender adalah variabel yang sudah lebih dahulu terjadi sebelum *audit judgement* dapat diukur, hal ini sesuai dengan pernyataan Shadish *et al.* (2002:12).

3.2 Subyek Penelitian

Subyek eksperimen dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada tiga kantor akuntan publik (KAP) di Kota Malang dan satu kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Surabaya yang telah memiliki pengalaman minimal tiga tahun. Pemilihan subyek didasarkan pada pertimbangan bahwa auditor adalah praktisi akuntansi yang sudah memiliki pengalaman audit, sehingga mampu memahami materi eksperimen dengan baik.

Pemilihan subyek juga didasarkan pada usaha untuk memenuhi validitas internal penelitian. Pemilihan auditor sebagai subyek eksperimen akan meningkatkan tingkat kesesuaian pengukuran sebagaimana keadaan sesungguhnya di dunia nyata.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 *Audit Judgement*

Variabel dependen dalam kuasi eksperimen ini adalah *audit judgement*, yaitu penilaian auditor atas subyek audit yang dihadapinya. Dalam penelitian ini, subyek audit yang dihadapi oleh auditor adalah ilustrasi akun persediaan sebuah perusahaan komputer fiktif. Ilustrasi ini dikembangkan oleh Noteberg dan Hunton (2005), dalam ilustrasi tersebut auditor diminta untuk memberikan *judgement* atas akun persediaan yang seolah-olah overvaluasi, *judgement* auditor diisi dalam sebuah kolom jurnal penyesuaian (*adjusting journal entry-AJE*).

Pengukuran *audit judgement* dilakukan dengan membandingkan *adjusting journal entry* (AJE) yang diajukan oleh subyek eksperimen ketika mengisi material eksperimen yang berisikan ilustrasi evaluasi persediaan sebuah perusahaan komputer fiktif. Ukuran dari *audit judgement* adalah selisih antara AJE yang diajukan oleh subyek eksperimen sebelum mendapatkan penjelasan yang belum diverifikasi dari klien dengan AJE yang diajukan oleh subyek eksperimen setelah mendapatkan penjelasan yang belum diverifikasi dari klien.

Semakin besar selisih AJE yang diajukan oleh subyek eksperimen, merupakan indikasi semakin besar pengaruh gender auditor ketika berinteraksi dengan gender klien dalam menentukan *audit judgement*. Formulasi dari pengukuran *audit judgement* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$AJ = AJE_{bt} - AJE_{at}$$

Keterangan:

AJ = *Audit Judgement*

AJE_{bt} = *Adjusting Journal Entry* sebelum adanya manipulasi

AJE_{at} = *Adjusting Journal Entry* setelah adanya manipulasi

3.3.2 Gender Auditor

Variabel independen dalam penelitian ini adalah gender auditor. Secara sempit gender diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin (Nugroho, 2005:3). Definisi operasional gender auditor dalam penelitian ini merujuk pada pengertian gender secara sempit yaitu perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Pengukuran dilakukan dengan mengelompokkan subyek eksperimen ke dalam kelompok subyek eksperimen laki-laki dengan kelompok subyek eksperimen perempuan berdasarkan ciri-ciri fisiknya.

3.4 Manipulasi

Manipulasi dalam penelitian ini adalah pada gender klien. Gender klien dimanipulasi dengan mengarahkan pemikiran subyek eksperimen bahwa klien yang dihadapi adalah seorang perempuan atau laki-laki berdasarkan deskripsi yang diberikan. Bentuk manipulasi gender ini diadaptasi dari paradigma eksperimen Goldberg (1968), dimana manipulasi atas gender dilakukan dengan memberikan deskripsi atas gender berdasarkan nama yang identik dengan jenis kelamin tertentu.

Deskripsi atas klien dengan gender perempuan adalah dengan menggunakan nama Mona untuk mengarahkan pemikiran subyek eksperimen bahwa gender klien adalah perempuan. Sementara nama Tomi digunakan untuk mengarahkan pemikiran subyek eksperimen bahwa gender klien adalah laki-laki.

Untuk menguatkan persepsi subyek eksperimen akan kompetensi klien yang dihadapinya, klien dideskripsikan sebagai CFO yang telah berpengalaman selama 15

tahundan juga memiliki gelar akuntan publik. Deskripsi tambahan atas klien diadaptasi dari Gold *et al.* (2009) berdasarkan diskusi panel dengan auditor berpengalaman di A.S. Dalam diskusi panel tersebut, para auditor sepakat bahwa klien yang menjabat sebagai CFO akan dianggap sangat kompeten jika telah berpengalaman selama 15 tahun dan juga memiliki gelar akuntan publik.

3.5 Desain Eksperimen dan Metode Analisis Data

Desain kuasi eksperimen ini adalah *cohorts designs with pretest and posttest cohorts*. *Cohorts* merupakan istilah yang mengacu pada situasi dimana kelompok subyek eksperimen satu sama lainnya mengikuti institusi formal atau institusi non formal seperti keluarga (Cook dan Campbell, 1979:127). Eksperimen ini melibatkan subyek yang semuanya menempuh pendidikan akuntansi di institusi formal yaitu universitas yang menyelenggarakan program akuntansi.

Desain eksperimen *pretest and posttest cohorts* tidak menggunakan kelompok kontrol. Pengamatan dilakukan dengan membandingkan hasil eksperimen sebelum manipulasi (*pretest*) dengan setelah adanya manipulasi (*posttest*) antar kelompok.

3.6 Prosedur Eksperimen dan Materi Eksperimen

Subyek kuasi eksperimen dalam penelitian ini tidak dikumpulkan dalam satu waktu dan tempat. Subyek kuasi eksperimen dikelompokkan ke dalam kelompok KAP A, kelompok KAP B, kelompok KAP C dan Kelompok BPK. Prosedur dan materi eksperimen antar kelompok adalah sama, namun dilakukan secara terpisah berdasarkan kelompok subyek kuasi eksperimen. Selain itu, kuasi eksperimen dilakukan dibawah pengawasan langsung peneliti.

Subyek eksperimen diminta untuk mengisi materi eksperimen yang berisikan ilustrasi kasus sebuah perusahaan komputer fiktif, materi eksperimen ini merupakan alih bahasa dari materi eksperimen yang digunakan oleh Gold *et al.* (2009). Ilustrasi yang digunakan adalah kasus sebuah perusahaan yang berkenaan dengan persediaan yang merupakan adaptasi dari

ilustrasi yang dikembangkan oleh Noteberg dan William (2005), subyek eksperimen diminta untuk mengisi AJE menyangkut persediaan perusahaan yang dalam materi eksperimen dibuat seolah-olah *overvalue*.

Manipulasi dalam materi eksperimen ini adalah gender klien. Dalam eksperimen, auditor tidak secara langsung bertemu dengan klien, melainkan membaca email yang seolah-olah dikirimkan oleh klien yang digambarkan sebagai seorang CFO yang telah berpengalaman selama 15 tahun. Gender klien dimanipulasi dengan memberikan nama klien yang identik dengan jenis kelamin tertentu seperti Mona (nama yang identik untuk perempuan) dan Tom (nama yang identik untuk laki-laki). Untuk memastikan bahwa auditor mengetahui gender klien, cek manipulasi dilakukan dengan meminta subyek eksperimen menjawab pertanyaan diakhir materi eksperimen tentang gender klien. Selanjutnya, subyek eksperimen diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang data demografi subyek eksperimen,

Materi eksperimen dirancang dalam empat tahapan yang harus dikerjakan oleh subyek eksperimen. Yaitu:

Tahap 1. Subyek eksperimen diminta untuk mengisi materi eksperimen sebelum adanya manipulasi gender klien.

Tahap 2. Subyek eksperimen diminta untuk mengisi materi eksperimen dengan manipulasi gender klien laki-laki

Tahap 3 dan 4. Subyek eksperimen diminta untuk mengisi materi eksperimen sebelum adanya manipulasi atas gender klien perempuan dan setelah adanya manipulasi.

Tahap 5. Subyek eksperimen diminta untuk mengisi kuesioner yang bukan bagian dari materi eksperimen.

3.7 Pilot Test

Pilot test dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesempurnaan eksperimen dan kemungkinan perbaikan yang diperlukan, sehingga eksperimen yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan baik. *Pilot test* dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan.

Tahap pertama, *pilot test* dilakukan dengan menguji penerjemahan materi eksperimen dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Pengujian dilakukan oleh dua orang mahasiswa yang sedang menempuh kuliah Pasca Sarjana Bahasa Inggris dan seorang mahasiswa Pascasarjana yang sedang menempuh kuliah di Negara yang berbahasa Inggris.

Tahap dua, *pilot test* dilakukan dengan penerjemahan kembali dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris oleh lembaga bahasa independen. Selanjutnya pada tahap ketiga, prosedur eksperimen diujicobakan pada mahasiswa PPAk dan Pasca Sarjana Program Akuntansi Universitas Brawijaya.

3.8 Uji Asumsi ANOVA

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji asumsi *one way analysis of variance* (ANOVA). Rutherford (2001:1) menyatakan bahwa ANOVA dapat digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih, selain itu ANOVA sangat sesuai untuk mengetahui adanya pengaruh dengan menguji perbedaan antar rerata.

ANOVA digunakan dalam penelitian ini karena terdapat dua kelompok subyek yang diperbandingkan, yaitu: *audit judgement* kelompok subyek eksperimen perempuan dengan *audit judgement* kelompok subyek eksperimen laki-laki. Serta, akan diperbandingkan pula *audit judgement* subyek eksperimen ketika menghadapi klien laki-laki dengan *audit judgement* subyek eksperimen ketika menghadapi klien perempuan.

3.9 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS 17.0, untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan uji asumsi ANOVA. Uji asumsi ANOVA dilakukan untuk membandingkan antara dua grup atau lebih yang tidak berhubungan.

Hipotesis 1 diterima jika terdapat perbedaan yang signifikan antara subyek eksperimen perempuan dengan subyek eksperimen laki-laki dalam menentukan *audit judgement*, atau nilai signifikansi p kurang dari 0,05. Hipotesis 2 diterima jika terdapat perbedaan yang signifikan antara *audit judgement* yang diberikan auditor untuk klien perempuan dengan *audit judgement* yang diberikan auditor untuk klien laki-laki, atau nilai signifikansi p kurang dari 0,05.

Selanjutnya, Hipotesis 3a diterima jika terdapat perbedaan yang signifikan antara *audit judgement* auditor perempuan untuk klien perempuan dan klien laki-laki dengan *audit judgement* auditor laki-laki untuk klien perempuan dan klien laki-laki. Dimana *audit judgement* yang diberikan oleh auditor laki-laki untuk klien laki-laki lebih besar dari *audit judgement* yang diberikan oleh auditor perempuan, atau nilai signifikansi p kurang dari 0,05.

Hipotesis 3b diterima jika tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *audit judgement* auditor perempuan untuk klien perempuan dan klien laki-laki dengan *audit judgement* auditor laki-laki untuk klien perempuan dan klien laki-laki. Hipotesis 3b diterima dengan ditunjukkan oleh nilai signifikansi p lebih besar dari 0,05.

Hipotesis 3c diterima jika terdapat perbedaan yang signifikan antara *audit judgement* auditor perempuan untuk klien perempuan dan klien laki-laki dengan *audit judgement* auditor laki-laki untuk klien perempuan dan klien laki-laki. Dimana *audit judgement* yang diberikan oleh auditor perempuan untuk klien laki-laki lebih besar dari *audit judgement* yang diberikan oleh auditor laki-laki. Hipotesis 3c diterima dengan ditunjukkan oleh nilai signifikansi p kurang dari 0,05.

IV. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Hasil *Pilot Test*

Pilot test dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesempurnaan desain eksperimen dan kemungkinan perbaikan yang diperlukan, sehingga eksperimen yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan baik. *Pilot test* dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: pertama, penerjemahan materi eksperimen dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Kedua, penerjemahan kembali dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Ketiga, *pilot test* dilakukan dengan melibatkan tiga belas mahasiswa PPAk Universitas Brawijaya dan tujuh mahasiswa Pascasarjana Akuntansi Universitas Brawijaya.

Tahap penerjemahan materi eksperimen dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan penerjemahan kembali dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris menunjukkan bahwa materi eksperimen dalam Bahasa Indonesia tidak mengalami perubahan makna dari materi eksperimen asli (lihat lampiran 1). Sehingga, materi eksperimen dalam Bahasa Indonesia dapat digunakan pada eksperimen yang sebenarnya.

Untuk memastikan bahwa materi eksperimen tidak memerlukan perbaikan, maka simulasi dilakukan dengan melibatkan dua puluh subyek *pilot test* (empat subyek laki-laki dan enam belas subyek perempuan). Simulasi dilakukan dalam lima tahapan, sebagaimana prosedur kuasi eksperimen dalam penelitian ini. Namun, dalam tahap akhir subyek *pilot test* diminta untuk mengisi data demografi dan pernyataan tingkat kejelasan materi dalam skala Likert 1-9 (1 untuk sangat tidak jelas dan 9 untuk sangat jelas).

Hasil *pilot test* menunjukkan rata-rata tingkat kejelasan materi adalah 8,2. Nilai ini di atas nilai rata-rata 5, yang artinya bahwa subyek *pilot test* berpendapat bahwa materi eksperimen jelas dan mudah dipahami. Selain itu, hasil cek manipulasi menunjukkan bahwa

seluruh subyek *pilot test* menjawab gender klien dengan benar. Hal ini menunjukkan keberhasilan manipulasi atas gender klien pada materi eksperimen.

4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas materi eksperimen dalam penelitian ini dilakukan dengan konsultasi ahli. Validitas instrumen dilakukan dalam dua tahap. Pertama, proses penerjemahan dari materi eksperimen asli ke dalam bahasa Indonesia dilakukan dengan melalui tiga tahapan. Yaitu, proses penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kemudian *back translate* dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Serta pengeditan pada masing-masing tahap penerjemahan untuk memastikan tidak adanya perubahan makna dari materi eksperimen asli. Proses ini melibatkan tiga pihak penerjemahan yang berbeda.

Tahap pengujian validitas selanjutnya dilakukan dengan diskusi panel yang melibatkan empat auditor (dua auditor perempuan dan dua auditor laki-laki) yang telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan isi materi eksperimen dalam Bahasa Indonesia benar-benar dapat mengukur pengaruh gender auditor dan gender klien terhadap *audit judgement*.

Diskusi panel ini bersepakat bahwa deskripsi klien yang digambarkan dalam materi eksperimen menunjukkan kapabilitas dari klien, sehingga informasi yang diberikan oleh klien adalah informasi yang kredibel. Meskipun informasi yang diberikan oleh klien belum diverifikasi namun berdasarkan kapabilitas klien, diskusi panel memutuskan bahwa hal tersebut dapat menjadi dasar perubahan *audit judgement*. Diskusi panel berpendapat bahwa overvaluasi Micro Clone Inc, sebelum adanya informasi dari CFO adalah \$ 400.000, namun setelah mendapatkan informasi dari klien nilai overvaluasi Micro Clone menjadi \$ 200.000.

Hasil uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,940 jauh di atas nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti reliabilitas instrumen secara keseluruhan adalah reliabel.

4.3 Statistik Deskriptif

Subyek yang terlibat dalam quasi eksperimen ini berjumlah 26 auditor, yang bekerja pada tiga Kantor Akuntan Publik (KAP) berbeda di Malang dan satu kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkedudukan di Surabaya. Subyek quasi eksperimen ini terdiri atas 11 auditor perempuan dan 15 auditor laki-laki. Rentang usia subyek quasi eksperimen ini yaitu 26 tahun hingga 44 tahun dengan rata-rata usia 31,46 tahun. Rentang pengalaman subyek antara 3 tahun hingga 16 tahun dengan rata-rata pengalaman kerja subyek adalah 7,8 tahun.

Rata-rata perubahan AJE yang diberikan oleh auditor perempuan adalah \$103.410 dan auditor laki-laki adalah \$ 198.170, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif – Rata-rata Perubahan AJE

Gender Klien	Gender Auditor		<i>Overall</i>
	Perempuan	Laki-laki	
Perempuan	90.910	206.670	157.690
	(94.388)	(108.342)	(116.355)
Laki-laki	115.910	189.670	158.460
	(85.347)	(97.440)	(98.038)
<i>Overall</i>	103.410	198.170	158.080
	(88.740)	(198.170)	(106.528)

Sumber: Data di Olah

4.4 Cek Manipulasi

Upaya untuk mengetahui bahwa manipulasi atas gender klien pada materi eksperimen berjalan dengan baik, maka dilakukan cek manipulasi. Hasil cek manipulasi menunjukkan bahwa seluruh subyek kuasi eksperimen menjawab gender klien dengan benar.

Rata-rata persepsi subyek kuasi eksperimen akan kemampuan klien perempuan berkenaan dengan kombinasi pendidikan dan pengalaman klien adalah 7,26. Hal ini berarti bahwa subyek kuasi eksperimen meyakini bahwa klien perempuan memiliki kualifikasi di atas rata-rata. Sementara, rata-rata persepsi subyek kuasi eksperimen akan kemampuan klien laki-laki adalah 6,4. Hal ini berarti bahwa subyek kuasi eksperimen meyakini bahwa klien laki-laki memiliki kualifikasi di atas rata-rata, namun rata-rata persepsi subyek kuasi eksperimen atas klien laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata persepsi subyek terhadap klien perempuan.

4.5 Hasil Uji Asumsi ANOVA

Asumsi penggunaan ANOVA meliputi: *independent observation*, *normality* dan *homogeneity of variance*. Walaupun menurut Hair *et al.* (2006) ANOVA masih tetap *robust* terhadap penyimpangan tiga asumsi ANOVA yang meliputi: independensi selama observasi, normalitas dan homogenitas varian. Namun prosedur teknis eksperimen tetap memperhatikan dan mengantisipasi kemungkinan yang dapat mengganggu validitas internal sehingga memenuhi independensi observasi, uji normalitas dan uji homogenitas varian.

Pemenuhan asumsi ANOVA dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: upaya untuk memenuhi independensi selama observasi, maka pada saat pelaksanaan eksperimen, subyek tidak diperkenankan untuk bertanya, berdiskusi atau melihat hasil pekerjaan subyek lain. Selain itu, eksperimen dilakukan pada waktu yang berbeda. Hasil uji homogenitas varians berdasarkan pengujian *leven's test of homogeneity of variance* menunjukkan bahwa nilai signifikansi *levene statistic* $p = 0,878$ lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian ini mengungkapkan bahwa variabel dependen dalam dalam setiap sel yang terbentuk oleh variabel independen menghasilkan varian yang sama. Oleh karenanya, asumsi homogenitas varians terpenuhi.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian dengan menggunakan *Two Way ANOVA* yang disajikan pada tabel 2, menunjukkan pengaruh gender auditor dengan nilai $p = 0,001$ adalah lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa rata-rata perubahan AJE antara auditor perempuan dengan auditor laki-laki ketika menerima informasi yang belum diverifikasi dari klien adalah berbeda secara signifikan.

Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis

Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Gender Auditor	113964,207	1	113964,207	11,913	0,001
Gender Klien	203,077	1	203,077	0,021	0,885
GA * GK	5597,308	1	5597,308	0,585	0,448
Error	459188,485	48	9566,427		
Total	1878150,000	52			

Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis 2 untuk melihat klien perempuan atau klien laki-laki yang lebih mempengaruhi auditor dalam menentukan *audit judgement*. Hasil pengujian menunjukkan nilai $p = 0,885$. Nilai p yang lebih besar dari nilai $\alpha (0,05)$, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata perubahan AJE yang diberikan oleh auditor kepada klien perempuan dengan klien laki-laki. Dengan demikian, hasil pengujian ini menolak hipotesis 2 yang menyatakan bahwa auditor relatif akan lebih dipengaruhi oleh klien laki-laki dibandingkan dengan klien perempuan.

Hasil pengujian hipotesis 3 untuk mengetahui interaksi gender auditor dengan gender klien dan pengaruhnya terhadap penentuan *audit judgement*, menunjukkan hasil nilai $p = 0,448$. Nilai p yang lebih besar dari nilai $\alpha (0,05)$ menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata perubahan *audit judgement* yang diberikan oleh auditor perempuan dan auditor laki-laki ketika mendapatkan informasi yang belum diverifikasi dari

klien perempuan dan klien laki-laki. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis 3b yaitu respon auditor terhadap klien akan tidak berbeda.

4.7 Pembahasan Hasil Kuasi Eksperimen

Kuasi eksperimen dalam penelitian dilakukan secara terpisah disesuaikan dengan kelompok subyek kuasi eksperimen. Kelompok kuasi eksperimen ini terbagi dalam kelompok subyek kuasi eksperimen KAP A Malang, kelompok subyek kuasi eksperimen BPK, kelompok subyek kuasi eksperimen KAP B Malang dan kelompok subyek kuasi eksperimen KAP C Malang. Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan pembahasan dari kuasi eksperimen dalam penelitian ini.

4.7.1 Pengaruh Gender Auditor Terhadap *Audit Judgement*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata perubahan AJE yang diberikan oleh auditor perempuan dengan auditor laki-laki ketika menerima informasi yang belum diverifikasi dari klien. Rata-rata perubahan AJE auditor perempuan setelah mendapatkan informasi yang belum diverifikasi dari klien adalah sebesar \$103.410 berbeda secara signifikan dengan rata-rata perubahan AJE yang diberikan oleh auditor laki-laki yaitu sebesar \$198.170. Perubahan AJE yang diberikan oleh auditor perempuan relatif lebih kecil dibandingkan dengan perubahan AJE yang diberikan oleh auditor laki-laki.

Apabila rata-rata perubahan AJE yang diberikan oleh auditor dibandingkan dengan hasil diskusi panel, yaitu sebesar \$ 200.000 maka tampak bahwa rata-rata perubahan AJE yang diberikan oleh auditor perempuan adalah setengah dari kesepakatan yang dicapai dalam diskusi panel. Sementara, perubahan AJE yang diberikan oleh auditor laki-laki hampir mendekati hasil diskusi panel. Hal ini menunjukkan bahwa auditor perempuan cenderung lebih berhati-hati untuk menentukan *audit judgement* ketika mendapatkan informasi yang

belum diverifikasi dari klien dibandingkan dengan auditor laki-laki. Sehingga, hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Watson dan McNaughton (2007) dan Patey dan Chau (2010). Watson dan McNaughton (2007) menemukan bahwa perempuan cenderung untuk lebih menghindari resiko dalam melakukan pilihan investasi pensiun. Sementara Patey dan Chau menemukan bahwa perempuan cenderung lebih konservatif dalam memilih hipotek. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Meyers-Levy (1989) dan Chung dan Monroe (1998) bahwa perempuan cenderung untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dibandingkan dengan laki-laki dalam mengambil sebuah keputusan.

Penelitian ini mendukung teori *risk aversion* dan teori *selectivity hypothesis*. Auditor perempuan cenderung untuk lebih menghindari resiko bila dibandingkan dengan laki-laki, sehingga lebih berhati-hati dalam menentukan *audit judgement* meskipun telah mendapatkan informasi dari klien, auditor perempuan melakukan perubahan AJE dengan rata-rata yang lebih kecil daripada auditor laki-laki. Selain itu, auditor perempuan membutuhkan informasi yang lebih komprehensif. Sehingga, auditor perempuan tidak melakukan perubahan AJE.

4.7.2 Pengaruh Gender Klien Terhadap *Audit Judgement*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 ditunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata perubahan AJE yang diberikan oleh auditor ketika berhadapan klien perempuan ataupun klien laki-laki. Sehingga, hipotesis 2 yang menyatakan auditor akan relatif lebih dipengaruhi oleh penjelasan yang belum diverifikasi dari klien laki-laki dibandingkan dengan klien perempuan ditolak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Norton *et al.* (2004) dan William dan Best (1990) yang menemukan bahwa laki-laki diasosiasikan memiliki kelebihanmampuan dibandingkan dengan perempuan, sehingga auditor akan lebih dipengaruhi oleh informasi yang berasal dari klien laki-laki daripada klien perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa auditor tidak melakukan perubahan AJE yang berbeda secara signifikan ketika berhadapan dengan klien laki-laki maupun klien perempuan. Dengan kata lain, gender klien tidak mempengaruhi auditor dalam menentukan *audit judgement*.

Tidak adanya pengaruh gender klien terhadap auditor dalam menentukan *audit judgement* dalam penelitian ini disebabkan oleh tingkat pengalaman subyek quasi eksperimen yang mencapai rata-rata 7,8 tahun. Dengan rata-rata pengalaman subyek diatas 3 tahun, dapat dikatakan bahwa subyek penelitian adalah auditor yang telah berpengalaman. Sehingga dalam menentukan *audit judgement* auditor hanya mempertimbangkan informasi yang tersedia, bukan pada gender klien.

4.7.3 Pengaruh Interaksi Gender Auditor dan Gender Klien Terhadap *Audit Judgement*

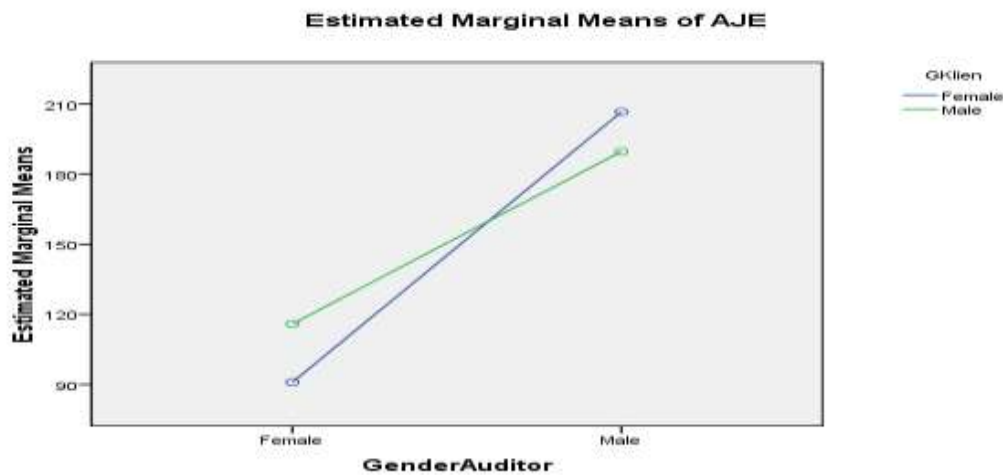
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 ditunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara *audit judgement* yang diberikan oleh auditor laki-laki dengan auditor perempuan ketika berhadapan dengan klien laki-laki atau klien perempuan. Dengan kata lain, hipotesis 3b diterima.

Rata-rata perubahan AJE auditor perempuan terhadap klien perempuan adalah sebesar \$ 90.910, dan rata-rata perubahan AJE yang diberikan oleh auditor perempuan ketika berhadapan dengan klien laki-laki adalah sebesar \$ 115.910. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara respon yang diberikan oleh auditor perempuan ketika berhadapan dengan klien perempuan dan klien laki-laki. Namun demikian, perubahan AJE auditor ketika berhadapan dengan klien laki-laki adalah relatif lebih besar daripada ketika berhadapan dengan klien perempuan.

Rata-rata perubahan AJE auditor laki-laki ketika berhadapan dengan klien perempuan adalah \$ 206.670, dan rata-rata perubahan AJE yang diberikan oleh auditor laki-laki ketika berhadapan dengan klien laki-laki adalah sebesar \$ 189.670. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara respon yang diberikan oleh auditor laki-laki ketika berhadapan dengan klien

perempuan dan klien laki-laki. Tetapi, auditor laki-laki memberikan rata-rata perubahan AJE yang lebih besar ketika berhadapan dengan klien perempuan daripada ketika berhadapan dengan klien laki-laki.

Gambar 2. Grafik Perubahan AJE Berdasarkan Gender Klien



Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis 3 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan respon auditor ketika berhadapan dengan klien perempuan dan klien laki-laki. Namun dalam penelitian ini terlihat bahwa auditor perempuan cenderung untuk memberikan perubahan AJE yang relatif lebih besar kepada klien laki-laki dibandingkan dengan klien perempuan. Sementara, auditor laki-laki cenderung untuk memberikan perubahan AJE yang relatif lebih besar kepada klien perempuan dibandingkan dengan klien laki-laki, sebagaimana yang tampak pada gambar 2.

Hasil penelitian ini mendukung Anderson *et al.* (1994) yang menyatakan tidak ada pengaruh gender klien terhadap bias gender partisipan. Sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa auditor perempuan dan auditor laki-laki tidak dipengaruhi oleh klien perempuan ataupun klien laki-laki dalam menentukan *audit judgement*.

4.8 Hasil dan Pembahasan Stereotype Gender Eksplisit

Hasil pengujian hipotesis telah menunjukkan bahwa dalam menentukan *audit judgement* auditor tidak terpengaruh oleh gender klien. Selain itu, auditor tidak memberikan respon yang berbeda terhadap klien perempuan dan klien laki-laki. Namun demikian, dalam penelitian ini dilakukan pula pengamatan tambahan untuk mengetahui stereotype gender subyek kuasi eksperimen secara eksplisit. Stereotype gender secara eksplisit adalah stereotype gender yang disadari oleh subyek dan dapat diketahui dengan menggunakan skala perempuan sebagai *manajer-women as manager scale* (WAMS) yang dikembangkan oleh Peters *et al.* (1974).

Materi eksperimen pada tahap 5 meminta subyek untuk mengisi kuesioner yang berisikan pertanyaan akan pandangan subyek tentang siapakah di antara perempuan dan laki-laki yang lebih memiliki ambisi, kemampuan untuk belajar, lebih kompetitif, lebih tegas, lebih agresif dan lebih percaya diri. Dengan menggunakan skala 1-9 (1 jika laki-laki sangat lebih ambisius, mampu untuk belajar, kompetitif, tegas, agresif dan lebih percaya diri; 5 jika tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki; 9 jika perempuan sangat lebih ambisius, mampu untuk belajar, kompetitif, tegas, agresif dan lebih percaya diri).

Rata-rata indeks WAMS yang diberikan oleh auditor perempuan adalah 4,25 dan rata-rata indeks WAMS auditor laki-laki adalah 3,57. Indeks WAMS auditor menunjukkan kecenderungan *male favorability*. Hal ini berarti, baik auditor perempuan maupun auditor laki-laki dalam penelitian ini secara sadar lebih mengunggulkan pria. Meskipun demikian, stereotype gender ini tidak mempengaruhi auditor dalam menentukan *audit judgement*.

Rata-rata indeks WAMS auditor laki-laki adalah 3,57 dengan kecenderungan *male favorability*. Namun dalam menentukan *audit judgement*, rata-rata perubahan AJE yang diberikan oleh auditor laki-laki kepada klien perempuan adalah \$ 206.670, sementara ketika menghadapi klien laki-laki adalah \$ 189.670. Meskipun tidak ada perbedaan respon yang signifikan ketika auditor laki-laki berhadapan dengan klien perempuan dan klien laki-laki,

terlihat bahwa auditor melakukan perubahan AJE yang lebih besar ketika menghadapi klien perempuan daripada klien laki-laki. Hal ini tidak konsisten dengan rata-rata indeks WAMS yang menunjukkan bahwa stereotipe gender auditor laki-laki secara eksplisit adalah *male favorability*.

Peneliti meyakini terjadinya inkonsistensi antara indeks WAMS auditor laki-laki yang *male favorability* dengan penentuan *audit judgement* yang lebih besar untuk klien perempuan dikarenakan oleh deskripsi klien perempuan. Klien perempuan yang dideskripsikan sebagai CFO yang memiliki gelar master dan CPA serta telah berpengalaman 15 tahun mampu meyakinkan auditor laki-laki atas kapabilitas klien perempuan di dunia kerja yang didominasi oleh laki-laki.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh gender auditor dan gender klien terhadap *audit judgement*. Studi ini merupakan kuasi eksperimen dengan melibatkan 26 auditor yang terdiri atas 11 auditor perempuan dan 15 auditor laki-laki. Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa gender auditor berpengaruh terhadap *audit judgement*, dimana auditor perempuan cenderung lebih konservatif dibandingkan dengan auditor laki-laki dalam menentukan *audit judgement* ketika menerima informasi yang belum diverifikasi dari klien. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Gold *et al.* (2009), Watson dan McNaughton (2007) dan Patey dan Chau (2010).

Hasil lain dari penelitian ini mengungkapkan bahwa gender klien tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara *audit judgement* yang diberikan oleh auditor ketika berhadapan dengan klien perempuan maupun ketika berhadapan

dengan klien laki-laki. Hal ini disebabkan oleh pengalaman yang dimiliki oleh auditor yang menjadi subyek penelitian ini adalah rata-rata 7,8 tahun.

Interaksi antara gender klien dengan gender auditor menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara *audit judgement* yang diberikan oleh auditor laki-laki dengan auditor perempuan ketika berhadapan dengan klien laki-laki atau klien perempuan. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Anderson *et al.* (1994) menemukan bahwa tidak ada pengaruh dari gender partisipan terhadap bias gender.

Hasil indeks WAMS dalam penelitian ini menunjukkan auditor memiliki kecenderungan *male favorability*, namun tidak mempengaruhi klien ketika berhadapan dengan klien perempuan dan klien laki-laki. Temuan lain menunjukkan bahwa meskipun tidak ada perbedaan respon yang signifikan, auditor laki-laki melakukan perubahan AJE yang lebih besar untuk klien perempuan. Hal ini inkonsisten dengan stereotipe gender eksplisit yang ditunjukkan oleh indeks WAMS auditor laki-laki. Peneliti meyakini hal ini disebabkan oleh deskripsi klien perempuan yang mampu meyakinkan auditor laki-laki atas kapabilitas klien perempuan. Klien perempuan yang dideskripsikan sebagai CFO, memiliki gelar master dan CPA serta telah berpengalaman selama 15 tahun mampu membentuk pandangan auditor laki-laki atas kapabilitas klien perempuan di dunia kerja yang didominasi oleh laki-laki.

5.2 Implikasi Penelitian

Implikasi teori dari penelitian ini adalah membuktikan teori *risk aversion* dan *selectivity hypothesis*, dimana gender auditor berpengaruh terhadap penentuan *audit judgement*. Sementara secara praktik, penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh gender auditor terhadap penentuan *audit judgement*. Auditor perempuan terbukti lebih konservatif daripada auditor laki-laki dalam penentuan *audit judgement*. Oleh karenanya, perlu perbaikan dalam proses rekrutmen auditor sehingga memberi peluang seluas-luasnya bagi calon auditor perempuan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: kuasi eksperimen memiliki validitas internal yang tidak lebih baik dari eksperimen lab serta validitas eksternal yang tidak lebih baik dari metode penelitian non-eksperimen. Selain itu, keterbatasan dalam menyelenggarakan eksperimen, yaitu manipulasi atas gender klien hanya dalam bentuk narasi.

5.4 Saran Untuk Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk meningkatkan validitas internal penelitian dengan menggunakan eksperimen lab atau meningkatkan validitas eksternal penelitian dengan menggunakan metode penelitian non-eksperimen.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan materi eksperimen dengan perlakuan atas gender klien secara lebih nyata, seperti memperkuat deskripsi gender klien dengan menambahkan suara laki-laki dan perempuan untuk manipulasi gender klien.

Daftar Pustaka

- Anandarajan, A., G. Kleinman dan D. Palmon. 2008 . Novice and expert judgment in the presence of going concern uncertainty. *Managerial Auditing Journal*, 23(4), 345-366.
- Anderson, J. C., E. N. Johnson dan P. M. J. Reckers. 1994. Perceived effects of gender, family structure and physical appearance on career progression in public accounting: A research note. *Accounting, Organizations and Society* 19 (6): 483–491.
- BBC. 2006. *Secrets of The Sexes: Sex Brain*. London, Film Dokumenter.
- Breesch, Diane dan Joel Branson. 2009. The Effects of Auditor Gender on Audit Quality. *The IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices*. Vol. 8, Nos. 3/4, pp. 78-107, July/October.
- Bordens, S. Kenneth dan Bruce B. Abbott. 2008. *Research Design and Methods A Process Approach- Seventh Edition*. Boston: McGraw Hill
- Boritz, J.E. 1986. The Effect of Research on Audit Planning and Review Judgements. *Journal of Accounting Research* (Autumn)
- Byrnes, J. P., D. C. Miller dan W. D. Schafer. 1999. Gender differences in risk taking: A meta-analysis. *Psychological Bulletin* 125 (3): 367–383.
- Chung, J., dan G. S. Monroe. 2001. A research note on the effects of gender and task complexity on an audit judgment. *Behavioral Research in Accounting* 13: 111–125.

_____. 1989. Gender Differences in Information Processing: An Empirical Test of the Hypothesis-confirming Strategy in an Audit Context. *Accounting and Finance*. 38 (2): 265 – 279.

Cook, T.D. dan Donald T. Campbell. 1979. *Quasi-Experimentation Design & Analysis Issues for Field Settings*. Boston: Houghton Mifflin Company.

Dwyer, P., J. Gilkeson, dan J. A. List. 2002. Gender differences in revealed risk taking: Evidence from mutual fund investors. *Economics Letters* 76 (2): 151–158.

Eagly, A.H., M. G Makhijani, dan B.G Klonsky. 1992. Gender and the Evaluation of Leaders: A Meta-analysis. *Psychological Bulletin* 111: 3-22.

Francis, Bill, Iftekhar Hasan, Jong Chool Park, dan Qiang Wu. 2010. Gender Differences in Financial Reporting Decision Making: Evidence From Accounting Conservatism. www.ssrn.com diakses pada tanggal 3 Maret 2011.

Goldberg, J. 1968. Are Women Prejudiced Against Women ?. *Trans Action* 5:28–30

Gold, Anna, James E. Hunton, dan Mohamed I Gomaa. 2009. The Impact of Client and Auditor Gender on Auditors Judgement. *Accounting Horizons*. Vol. 23 No 1.

Hackenbrack, K. 1992. Implication of Seemingly Irrelevant Evidence in Audit Judgement. *Journal of Accounting Research* 30 (1): 126 – 136

Hair, Jr., Joseph, F. W. C Black, B. J Babin, R. E Anderson, R.L Tatham. 2006. *Multivariate Data Analysis, 6th Edition*. Amerika Serikat: Pearson Prentice Hall.

Hardies, Kris, Diane Breesch, dan Joel Branson. 2009. Male and Female Auditors: Who in this Land is the Fairest of All?. *Accountancy & Bedrijfskunde*. Vol. 29, No. 7, pp. 22–30.

Hardies, Kris, Diane Breesch, dan Joel Branson. 2010. Audit Groups: Does Gender Matter?. www.ssrn.com diakses pada tanggal 3 Maret 2011.

Harding, J. R., K. F. Reding, dan M. H. Stocks. 2002. The effect of gender on the recruitment of entry-level accountants. *Journal of Managerial Issues* 14 (2): 251–266.

Heilman, M.E dan J.J. Chen. 2005. Same behavior, different consequences: Reactions to men's and women's altruistic citizenship behavior. *The Journal of Applied Psychology* 90 (3): 431–441.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 2010. *IAPI – Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Directory*. IAPI: Jakarta.

Iskandar, Takiah Mohd; Ria Nelly Sari; Zuraidah Mohd Sanusi dan Rita Anugerah. Enhancing Auditor Judgement Through Motivational Factors. www.google.com diakses pada 7 Maret 2011.

Jamilah, Siti, Zaenal Fanani dan Grahita Chandrarin. 2007. Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan dan Kompleksitas Tugas terhadap *Audit Judgement*. *Symposium Nasional Akuntansi X*.

Johari, Razan Juhaidan dan Zuraidah Mohd Sanusi. 2010. The Effect of Knowledge, Effort and Ethical Orientation on Audit Judgement Performance. www.google.com, diakses pada tanggal 7 Maret 2011.

Mautz, R.K dan Hussein A. Sharaf. 1985. *The Philosophy of Auditing*. Amerika Serikat: AAA.

Meyers-Levy, J dan D. Maheswaran. 1991. Exploring differences in males' and females' processing strategy. *The Journal of Consumer Research* 18 (1): 63–70.

_____. 1989. Gender Differences in Information Processing: A Selectivity Interpretation-In Cognitive and Affective Response to Advertising. www.google.com diakses pada 11 Maret 2011

Niskanen, Jyrki, Jukka Karjalainen, Mervi Niskanen dan Jussi Karjalainen. 2009. Auditor gender and corporate earnings management behavior in private Finnish firms. www.google.com diakses pada tanggal 7 Maret 2011.

- Norton, M. I., J. A. Vandello, dan J. M. Darley. 2004. Casuistry and social category bias. *Journal of Personality and Social Psychology* 87 (6): 817–831.
- Noteberg, A. dan J.E Hunton. 2005. Client Inquiry Via Electronic Communication Media: Does the Medium Matter ?. *Advances in Accounting Behavioral Research* 8: 87 – 112
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- O'Donnell, E., dan E. N. Johnson. 2001. The effects of auditor gender and task complexity on information processing efficiency. *International Journal of Auditing* 5 (2): 91–105.
- Patey, Irina dan Chau Do. 2010. Gender and Mortgage Choice: More Evidence on Gender Based Risk Aversion. www.ssrn.com diakses pada tanggal 11 Maret 2011.
- Peters, L. H., J. R. Terborg dan J. Taynor. 1974. Women as Managers Scale (WAMS): A measure of attitude toward women in management positions. *JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology* 4 (27).
- Rutherford, A. 2001. *Introducing ANOVA and ANCOVA a GLM Approach*. London; California; New Delhi : SAGE Publication Ltd
- Schein, V.E. 2001. A Global Look at Phsycological Barriers to Womens Progress in Management. *The Journal of Social Issues* 57 (4): 675-688.
- Shadish, W.R., Thomas D.C., dan Donald T.C. 2002. *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. New York: Houghton Mifflin Company Boston.
- Trapp, M., R. Hermanson dan D. Turner. 1989. Current perceptions of issues related to women employed in public accounting. *Accounting Horizons* 3 (1): 71–85.
- Trisnaningsih, Sri. 2004. Perbedaan Kinerja Auditor Dilihat dari Segi Gender. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 7, No. 1 .
- Trisnawati, Rina. 2007. Analisis Perbedaan Upah Auditor dari Perspektif Gender: Studi Empirirs Auditor di Jawa Tengah dan Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vo. 6 No. 2.
- Williams, J. E., dan D. L. Best. 1990. *Measuring Sex Stereotypes: A Multination Study*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Wilson, H.T. 1989. *Sex and Gender-Making Cultural Sense of Civilization*. Leiden; New York; Kobenhavn; Koln: E. J Brill.
- Zulaikha. 2006. Pengaruh Interaksi Gender, Kompleksitas Tugas dan Pengalaman Auditor terhadap *Audit Judgement* (Sebuah Kajian Eksperimenta Dalam Audit Saldo Akun Persediaan). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. 23-26 Agustus 2006

Lampiran 1

TAHAP I

Asumsikanlah bahwa Anda berperan sebagai seorang manajer audit yang menghadapi Micro Clone Inc. sebagai klien. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi komputer pribadi dengan brand IBM-compatible.

Auditor senior yang melaporkan langsung kepada Anda, telah secara intensif menganalisis persediaan barang jadi perusahaan. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa persediaan barang jadi Micro Clone Inc. terdiri atas 25% (2000 unit) komputer generasi IV dan 75% lainnya (6.000 unit) adalah komputer generasi V yang merupakan model pengembangan dengan mikroprosesor chip terbaru di pasar. MicroClone's memberlakukan nilai dari 2000 unit komputer generasi IV dengan nilai saat ini yaitu sebesar \$ 1000 per unit dengan nilai keseluruhan sebesar \$ 2.000.000.

Auditor senior yang melaporkan langsung kepada Anda, telah mengidentifikasi apa yang mungkin menjadi masalah mengenai persediaan computer generasi IV. Pada kuartal ke-4, Micro Clone mulai melakukan pengiriman komputer dengan menggunakan chip generasi V. Auditor senior tersebut menkhawatirkan adanya kemungkinan bahwa nilai dari komputer generasi IV yang tersisa dalam persediaan telah *overstated*.

Setelah mendengarkan permasalahan ini, Anda juga khawatir tentang masalah *overvaluasi* yang mungkin terjadi, karena komputer generasi IV akhirnya akan menjadi usang oleh standar industri. Berdasarkan analisis yang ada saat ini, menunjukkan bahwa setiap komputer generasi IV di persediaan semestinya bernilai \$ 800, bukan \$ 1000. Oleh karenanya, Anda meyakini bahwa perkiraan Micro Clone tentang komputer generasi IV telah *overstated* sebesar \$ 200 per unit, mengakibatkan kemungkinan overvaluasi hingga paling banyak sebesar \$ 400.000.

Anda telah memutuskan untuk membahas masalah ini secara langsung dengan Tom, (CFO) dari MicroClone. Tom memiliki gelar CPA dan Master, dan ia telah memiliki pengalaman selama 15 tahun di bidang akuntansi.

Tujuan Anda adalah untuk mendiskusikan dengan Tom estimasi atas penilaian yang sesuai, yang bisa berkisar dari \$ 0 sampai \$ 400.000.

Anda telah meminta Tom untuk menjelaskan pandangannya tentang masalah persediaan komputer generasi IV dengan mengirim sebuah pesan email kepadanya dengan isi sebagai berikut:

Dear Tom,

Saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai persediaan barang jadi. khususnya, saya ingin bertanya tentang penilaian sebesar \$ 2 juta atas komputer generasi IV. Dengan standar industri yang ada saat ini, komputer generasi IV kemungkinan akan menjadi usang dengan hadirnya model komputer generasi V yang lebih baru dan lebih cepat, sehingga akan diadopsi secara luas.

Menurut catatan Anda, sekitar 25% (2000 unit) persediaan barang jadi perusahaan Anda adalah komputer generasi IV, yang bernilai \$ 1000 per unit, dengan nilai keseluruhan \$ 2.000.000.

Berdasarkan analisis awal saya, komputer generasi IV mungkin over-valuasi sekitar \$ 200 per unit. Oleh karena itu, persediaan barang jadi tampaknya dinilai terlalu tinggi hingga paling banyak \$ 400.000, hal ini berarti profit pra-pajak Anda juga overstated sebanyak jumlah tersebut.

Meskipun \$ 400.000 tidak material untuk laporan keuangan Anda secara keseluruhan, namun saya sangat khawatir dengan adanya kemungkinan overvaluasi yang dapat terjadi.

Hormat saya,

Ringkasan

Berdasarkan analisis awal Anda, MicroClone menilai komputer generasi IV sebesar \$ 1000 per unit. Namun auditor senior dan Anda yakin 2000 unit komputer generasi IV telah dinyatakan *overstated* hingga paling banyak \$ 200 per unit. Berdasarkan hal tersebut, silakan beri tanggapan atas pernyataan berikut.

Mengingat informasi yang tersedia dan menyadari bahwa Anda belum menerima respon dari Tom, jika Anda harus membuat rekomendasi pada tahap ini, berapa besar yang akan Anda rekomendasikan kepada MicroClone atas pencadangan persediaan komputer generasi IV mereka (antara \$ 400.000 dan \$ 0)

\$

TAHAP II

Pada tahap sebelumnya, Anda meyakini telah terjadi overvaluasi atas akun persediaan Micro Clone, Inc. , berdasarkan isu tersebut Anda telah menghubungi CFO Micro Clone melalui email. Berikut ini respon dari CFO

Respon dari CFO

Anda baru saja menerima tanggapan Tom mengenai masalah-masalah yang diangkat dalam komunikasi awal Anda. halaman berikut ini akan menampilkan respon email dari Tom, di mana ia memberikan bukti yang mendukung penilaian cadangan persediaan yang lebih rendah daripada yang Anda hanya disarankan. Silakan baca email ini dengan seksama dan kemudian jawablah pertanyaan yang tersedia.

Silahkan baca pesan email berikut dengan seksama. Anda dapat membaca pesan email sebanyak yang Anda suka.

Dari: Tom

Komputer-komputer generasi V masih belum stabil. Dalam memo internalnya, Manajer pemasaran kami telah memberikan konfirmasi bahwa komputer generasi V tampaknya mengalami masalah overheating, dan menyarankan para pelanggan untuk terus membeli komputer generasi IV. Oleh sebab itu, saya tidak yakin volume penjualan untuk komputer generasi IV akan terpengaruh oleh hadirnya komputer generasi V, sehingga penjualan generasi IV akan tetap stabil selama tahun depan.

Dari: Tom

Tersedia pasar ekspor untuk komputer generasi IV dimana kami bisa menjualnya dengan harga jual yang ada saat ini. Dalam memo internalnya, manajer customer service telah memberi konfirmasi permintaan atas komputer generasi IV di pasar sekunder yang diperkirakan akan tumbuh di tahun mendatang.

Dari: Tom

kemampuan komputer generasi IV kami segera dapat ditingkatkan dengan chip yang ada pada komputer generasi V. Sehingga dapat meningkatkan kinerja computer generasi IV untuk setara dengan komputer generasi V. Dalam memo internal yang terakhir, manajer teknis kami telah memberi konfirmasi bahwa secara teknis model yang dikembangkan untuk meng-upgrade mesin generasi IV menjadi komputer generasi V dapat dilakukan dengan biaya minimal. Dengan meng-upgrade computer generasi IV, kami akan mampu menjual komputer generasi IV dengan harga yang sama dengan komputer generasi V.

Dari: Tom

kami memperkirakan bahwa 65% dari pelanggan menggunakan Microsoft Office Suite. Namun dalam memo internalnya, manajer penjualan kami menyatakan bahwa Microsoft Office Suite belum sepenuhnya diupgrade pada komputer generasi V. Maka, kemampuan prosesor baru yang dimiliki komputer generasi V belum sepenuhnya teruji. Sehingga, para pengguna Microsoft Office Suite kemungkinan akan terus membeli komputer generasi IV yang lebih murah.

Dari: Tom

salah satu perusahaan pesaing kami – MilleniCom – saat ini mengalami kekosongan persediaan computer generasi IV. MilleniCom sedang mempertimbangkan membeli sejumlah besar komputer generasi IV yang kami miliki dengan harga jual saat ini. Manajer penjualan saya mengatakan bahwa ia telah menerima memo yang menyatakan bahwa manajer pembelian MilleniCom baru saja tiba untuk menanyakan berapa banyak komputer yang kami miliki di persediaan.

Anda sekarang telah menerima informasi tambahan dari Tom

Mohon untuk diingat bahwa persediaan Mikro Clone terdiri atas 2.000 unit komputer generasi IV yang saat ini bernilai \$ 1000 per unit , dengan penilaian total \$ 2.000.000.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Tom, adalah tugas Anda untuk memberikan *audit judgement* mengenai jumlah persediaan yang seharusnya ditulis oleh MicroClone (antara \$ 0 dan \$ 400.000).

Silahkan menjawab pertanyaan berikut.

Setelah membaca posisi Tom tentang masalah ini, berapa banyak yang akan anda rekomendasikan kepada MicroClone untuk menilai computer generasi IV yang ada pada persediaan mereka (antara \$ 0 dan \$ 400.000)?

\$

(Ingat, CFO Tom memiliki CPA dan gelar Master, dan ia memiliki 15 tahun pengalaman akuntansi. estimasi sebelumnya Anda adalah \$ 300.000)

TAHAP III

Asumsikanlah bahwa Anda berperan sebagai seorang manajer audit yang menghadapi Micro Clone Inc. sebagai klien. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi computer pribadi dengan brand IBM-compatible.

Auditor senior yang melaporkan langsung kepada Anda, telah secara intensif menganalisis persediaan barang jadi perusahaan. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa persediaan barang jadi Micro Clone Inc. terdiri atas 25% (2000 unit) komputer generasi IV dan 75% lainnya (6.000 unit) adalah komputer generasi V yang merupakan model pengembangan dengan mikroprosesor chip terbaru di pasar. MicroClone's memberlakukan nilai dari 2000 unit komputer generasi IV dengan nilai saat ini yaitu sebesar \$ 1000 per unit dengan nilai keseluruhan sebesar \$ 2.000.000.

Auditor senior yang melaporkan langsung kepada Anda, telah mengidentifikasi apa yang mungkin menjadi masalah mengenai persediaan computer generasi IV. Pada kuartal ke-4, Micro Clone mulai melakukan pengiriman komputer dengan menggunakan chip generasi V. Auditor senior tersebut menkhawatirkan adanya kemungkinan bahwa nilai dari komputer generasi IV yang tersisa dalam persediaan telah *overstated*.

Setelah mendengarkan permasalahan ini, Anda juga khawatir tentang masalah *over valuasi* yang mungkin terjadi, karena komputer generasi IV akhirnya akan menjadi usang oleh standar industri. Berdasarkan analisis yang ada saat ini, menunjukkan bahwa setiap komputer generasi IV di persediaan semestinya bernilai \$ 800, bukan \$ 1000. Oleh karenanya, Anda meyakini bahwa perkiraan Micro Clone tentang komputer generasi IV telah *overstated* sebesar \$ 200 per unit, mengakibatkan kemungkinan overvaluasi hingga paling banyak sebesar \$ 400.000.

Anda telah memutuskan untuk membahas masalah ini secara langsung dengan Mona, (CFO) dari MicroClone. Mona memiliki gelar CPA dan Master, dan ia telah memiliki pengalaman selama 15 tahun di bidang akuntansi.

Tujuan Anda adalah untuk mendiskusikan dengan Mona estimasi atas penilaian yang sesuai, yang bisa berkisar dari \$ 0 sampai \$ 400.000.

Anda telah meminta Mona untuk menjelaskan pandangannya tentang masalah persediaan komputer generasi IV dengan mengirim sebuah pesan email kepadanya dengan isi sebagai berikut:

Dear Mona,

Saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai persediaan barang jadi. khususnya, saya ingin bertanya tentang penilaian sebesar \$ 2 juta atas komputer generasi IV. Dengan standar industri yang ada saat ini, komputer generasi IV kemungkinan akan menjadi usang dengan hadirnya model komputer generasi V yang lebih baru dan lebih cepat, sehingga akan diadopsi secara luas.

Menurut catatan Anda, sekitar 25% (2000 unit) persediaan barang jadi perusahaan Anda adalah komputer generasi IV, yang bernilai \$ 1000 per unit, dengan nilai keseluruhan \$ 2.000.000.

Berdasarkan analisis awal saya, komputer generasi IV mungkin over-valuasi sekitar \$ 200 per unit. Oleh karena itu, persediaan barang jadi tampaknya dinilai terlalu tinggi hingga paling banyak \$ 400.000, hal ini berarti profit pra-pajak Anda juga overstated sebanyak jumlah tersebut.

Meskipun \$ 400.000 tidak material untuk laporan keuangan Anda secara keseluruhan, namun saya sangat khawatir dengan adanya kemungkinan overvaluasi yang dapat terjadi.

Hormat saya,

Ringkasan

berdasarkan analisis awal Anda, MicroClone menilai komputer generasi IV sebesar \$ 1000 per unit. namun auditor senior dan Anda yakin 2000 unit komputer generasi IV telah dinyatakan *overstated* hingga paling banyak \$ 200 per unit. Berdasarkan hal tersebut, silakan beri tanggapan atas pernyataan berikut.

Mengingat informasi yang tersedia dan menyadari bahwa Anda belum menerima respon dari Mona, jika Anda harus membuat rekomendasi pada tahap ini, berapa besar yang akan anda rekomendasikan kepada MicroClone atas pencadangan persediaan computer generasi IV mereka (antara \$ 400.000 dan \$ 0)

TAHAP IV

Pada tahap sebelumnya, Anda meyakini telah terjadi overvaluasi atas akun persediaan Micro Clone, Inc. , berdasarkan isu tersebut Anda telah menghubungi CFO Micro Clone melalui email. Berikut ini respon dari CFO

Respon dari CFO:

Anda baru saja menerima tanggapan Mona mengenai masalah-masalah yang diangkat dalam komunikasi awal Anda. halaman berikut ini akan menampilkan respon email dari Mona, di mana ia memberikan bukti yang mendukung penilaian cadangan persediaan yang lebih rendah daripada yang Anda hanya disarankan. Silakan baca email ini dengan seksama dan kemudian jawablah pertanyaan yang tersedia.

Silahkan baca pesan email berikut dengan seksama. Anda dapat membaca pesan email sebanyak yang Anda suka.

dari: Mona

salah satu perusahaan pesaing kami – MilleniCom – saat ini mengalami kekosongan persediaan computer generasi IV. MilleniCom sedang mempertimbangkan membeli sejumlah besar komputer generasi IV yang kami miliki dengan harga jual saat ini. Manajer penjualan saya mengatakan bahwa ia telah menerima memo yang menyatakan bahwa manajer pembelian MilleniCom baru saja tiba untuk menanyakan berapa banyak komputer yang kami miliki di persediaan.

dari: Mona

kami memperkirakan bahwa 65% dari pelanggan menggunakan Microsoft Office Suite. Namun dalam memo internalnya, manajer penjualan kami menyatakan bahwa Microsoft Office Suite belum sepenuhnya diupgrade pada komputer generasi V. Maka, kemampuan prosesor baru yang dimiliki komputer generasi V belum sepenuhnya teruji. Sehingga, para pengguna Microsoft Office Suite kemungkinan akan terus membeli komputer generasi IV yang lebih murah.

Dari: Mona

Komputer-komputer generasi V masih belum stabil. Dalam memo internalnya, Manajer pemasaran kami telah memberikan konfirmasi bahwa komputer generasi V tampaknya mengalami masalah overheating, dan menyarankan para pelanggan untuk terus membeli komputer generasi IV. Oleh sebab itu, saya tidak yakin volume penjualan untuk komputer generasi IV akan terpengaruh oleh hadirnya komputer generasi V, sehingga penjualan generasi IV akan tetap stabil selama tahun depan.

dari: Mona

kemampuan komputer generasi IV kami segera dapat ditingkatkan dengan chip yang ada pada computer generasi V. Sehingga dapat meningkatkan kinerja computer generasi IV untuk setara dengan komputer generasi V. Dalam memo internal yang terakhir, manajer teknis kami telah memberi konfirmasi bahwa secara teknis model yang dikembangkan untuk meng-upgrade mesin generasi IV menjadi komputer generasi V dapat dilakukan dengan biaya minimal. Dengan meng-upgrade computer generasi IV, kami akan mampu menjual komputer generasi IV dengan harga yang sama dengan komputer generasi V.

Dari: Mona

Tersedia pasar ekspor untuk komputer generasi IV dimana kami bisa menjualnya dengan harga jual yang ada saat ini. Dalam memo internalnya, manajer costumer service telah memberi konfirmasi permintaan atas komputer generasi IV di pasar sekunder yang diperkirakan akan tumbuh di tahun mendatang.

Anda sekarang telah menerima informasi tambahan dariMona

Mohon untuk diingat bahwa persediaan Mikro Clone terdiri atas 2.000 unit komputer generasi IV yang saat ini bernilai \$ 1000 per unit , dengan penilaian total \$ 2.000.000.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Mona, adalah tugas Anda untuk memberikan *audit judgement* mengenai jumlah persediaan yang seharusnya ditulis oleh MicroClone (antara \$ 0 dan \$ 400.000).

Silahkan menjawab pertanyaan berikut.

Setelah membaca posisi Mona tentang masalah ini, berapa banyak yang akan anda rekomendasikan kepada MicroClone untuk menilai computer generasi IV yang ada pada persediaan mereka (antara \$ 0 dan \$ 400.000)?

\$

(ingat, CFO, Mona memiliki CPA dan gelar Master, dan ia memiliki 15 tahun pengalaman akuntansi. estimasi sebelumnya Anda adalah \$ 300.000)

TAHAP V

KUESIONER-CEK MANIPULASI

Silahkan jawab pertanyaan berikut

1. Beri tanda pada dua item berikut:

- o CFO adalah pria
- o CFO adalah perempuan

2. Dengan mempertimbangkan kombinasi antara pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh CFO, saya yakin bahwa kualifikasi CFO adalah:

1 Di bawah rata-rata	2	3	4	5 Rata- rata	6	7	8	9 Di atas rata-rata
-------------------------------	---	---	---	--------------------	---	---	---	---------------------------

3. Secara umum, argumentasi yang diberikan oleh CFO adalah persuasif

1 Sangat tidak persuasif	2	3	4	5 Rata- rata	6	7	8	9 Sangat persuasif
-----------------------------------	---	---	---	--------------------	---	---	---	--------------------------

4. Secara umum, kredibilitas argumentasi yang diberikan oleh CFO adalah kredibel

1 Sangat tidak kredibel	2	3	4	5 Rata- rata	6	7	8	9 Sangat kredibel
----------------------------------	---	---	---	--------------------	---	---	---	-------------------------

5. Secara umum, argumentasi yang diberikan oleh CFO adalah kuat

1 Sangat tidak kuat	2	3	4	5 Rata- rata	6	7	8	9 Sangat kuat
------------------------------	---	---	---	--------------------	---	---	---	---------------------

6. Secara umum, argumentasi yang diberikan oleh CFO adalah meyakinkan

1 Sangat tidak meyakinkan	2	3	4	5 Rata- rata	6	7	8	9 Sangat meyakinkan
------------------------------------	---	---	---	--------------------	---	---	---	---------------------------

KUESIONER-WAMS

Silahkan jawab pertanyaan berikut

Berilah tanda pada pernyataan yang menurut anda paling mendekati pendapat pribadi anda

1. Menurut pendapat anda, siapakah yang lebih ambisius untuk meraih kesuksesan di dunia bisnis ?

1 Pria sangat lebih ambisius	2	3	4	5 Pria dan perempuan	6	7	8	9 Perempuan sangat lebih ambisius
------------------------------------------	---	---	---	----------------------------	---	---	---	-----------------------------------------------

2. Menurut pendapat anda, siapakah yang lebih memiliki kapabilitas dalam mempelajari matematika dan ketrampilan mekanik?

1 Pria sangat lebih kapabel	2	3	4	5 Pria dan perempuan	6	7	8	9 Perempuan sangat lebih kapabel
-----------------------------------------	---	---	---	----------------------------	---	---	---	----------------------------------------------

3. Menurut pendapat anda, siapakah yang lebih kompetitif untuk meraih kesuksesan di dunia bisnis?

1 Pria sangat lebih kompetitif	2	3	4	5 Pria dan perempuan	6	7	8	9 Perempuan sangat lebih kompetitif
--------------------------------------------	---	---	---	----------------------------	---	---	---	-------------------------------------------------

4. Menurut pendapat anda, siapakah yang lebih tegas dalam menghadapi dunia bisnis yang penuh dengan tuntutan?

1 Pria sangat lebih tegas	2	3	4	5 Pria dan perempuan	6	7	8	9 Perempuan sangat lebih tegas
---------------------------------------	---	---	---	----------------------------	---	---	---	--------------------------------------------

5. Menurut pendapat anda, siapakah yang lebih agresif dalam menghadapi dunia bisnis yang penuh dengan tuntutan?

1 Pria sangat lebih agresif	2	3	4	5 Pria dan perempuan	6	7	8	9 Perempuan sangat lebih agresif
-----------------------------------------	---	---	---	----------------------------	---	---	---	----------------------------------------------

6. Menurut pendapat anda, siapakah yang lebih memiliki kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin?

1 Pria sangat lebih percaya diri	2	3	4	5 Pria dan perempuan	6	7	8	9 Perempuan sangat lebih percaya diri
-------------------------------------------	---	---	---	----------------------------	---	---	---	------------------------------------------------

Silahkan bayangkanlah seorang teman dekat yang bergender sama dengan anda di kampung halaman anda-misalnya tempat dimana anda tinggal ketika berusia 7-11 tahun. Menurut pendapat anda, jika teman anda saat ini ditanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut, bagaimana jawaban yang ia berikan menurut anda?

Berilah tanda atas apa yang anda yakini sebagai pendapat pribadi teman anda mengenai pernyataan-pernyataan berikut:

1. Menurut pendapat teman anda, siapakah yang lebih memiliki kapabilitas dalam mempelajari matematika dan ketrampilan mekanik?

1 Pria sangat lebih kapabel	2	3	4	5 Pria dan perempuan	6	7	8	9 Perempuan sangat lebih kapabel
--------------------------------	---	---	---	-------------------------	---	---	---	-------------------------------------

2. Menurut pendapat teman anda, siapakah yang lebih kompetitif untuk menjadi sukses di dunia bisnis?

1 Pria sangat lebih kompetitif	2	3	4	5 Pria dan perempuan	6	7	8	9 Perempuan sangat lebih kompetitif
-----------------------------------	---	---	---	-------------------------	---	---	---	----------------------------------------

3. Menurut pendapat teman anda, siapakah yang lebih tegas dalam situasi bisnis yang menuntut hal tersebut?

1 Pria sangat lebih tegas	2	3	4	5 Pria dan perempuan	6	7	8	9 Perempuan sangat lebih tegas
------------------------------	---	---	---	-------------------------	---	---	---	-----------------------------------

4. Menurut pendapat teman anda, siapakah yang lebih memiliki kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin?

1 Pria sangat lebih percaya diri	2	3	4	5 Pria dan perempuan	6	7	8	9 Perempuan sangat lebih percaya diri
-------------------------------------	---	---	---	-------------------------	---	---	---	------------------------------------------

5. Menurut pendapat teman anda, siapakah yang lebih memiliki ambisi untuk menjadi sukses di dunia bisnis?

1 Pria sangat lebih ambisi	2	3	4	5 Pria dan perempuan	6	7	8	9 Perempuan sangat lebih ambisi
-------------------------------	---	---	---	-------------------------	---	---	---	------------------------------------

6. Menurut pendapat teman anda, siapakah yang lebih agresif di dalam situasi bisnis yang menuntut hal tersebut?

1 Pria sangat lebih agresif	2	3	4	5 Pria dan perempuan	6	7	8	9 Perempuan sangat lebih agresif
--------------------------------	---	---	---	-------------------------	---	---	---	-------------------------------------

KUESIONER-DEMOGRAFI

Silahkan jawab pertanyaan berikut:

1. Bayangkanlah kepala keluarga yang tinggal bersama anda ketika masa pertumbuhan (7-11 tahun). Silahkan pilih kategori berikut yang paling dapat menggambarkan tingkat pendidikannya pada waktu itu:
 - Kurang dari SMA
 - Diploma atau setara diploma
 - Sarjana
 - Magister
 - Doctoral
 - Profesional
2. Berapa usia anda?
3. Sekali lagi, silahkan bayangkan kepala keluarga yang tinggal bersama anda ketika masa pertumbuhan (7-11 tahun). Silahkan pilih kategori berikut yang paling dapat menggambarkan pekerjaannya pada waktu itu:
 - Manajer atau pejabat sipil senior
 - Pekerjaan professional
 - Asosiasi professional atau teknisi
 - Tenaga administrative dan secretariat
 - Pedagang
 - Tenaga layanan pribadi
 - Tenaga penjualan dan layanan pelanggan
 - Operator pabrik, proses dan mesin
 - Peneliti atau pengajar
4. Berapa lama pengalaman anda di bidang akuntansi?
5. Apa gender anda?
 - Pria
 - Perempuan

6. Ketika anda mengingat kembali tingkat pendapatan seluruh keluarga di wilayah tempat anda tinggal saat usia pertumbuhan (7-11 tahun), tingkat pendapatan keluarga anda adalah:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sangat kurang dari rata-rata				Rata-rata				Sangat lebih dari rata-rata

7. Posisi anda saat ini di KAP adalah:
 - Junior
 - Senior
 - Manajer
 - Rekan

Lampiran 2

Deskripsi Pilot Test

Subyek	Gender	Klien Laki-laki			Klien Perempuan			Waktu (menit)
		AJEbt	AJEat	AJ	AJEbt	AJEat	AJ	
1	Male	400	400	0	400	400	0	32
2	Female	400	200	200	400	200	200	37
3	Male	400	400	0	400	400	0	28
4	Female	400	300	100	400	300	100	30
5	Female	400	300	100	400	300	100	32
6	Female	400	400	0	400	250	150	33
7	Female	400	350	50	400	280	120	35
8	Female	400	400	0	400	360	40	36
9	Female	400	330	70	400	330	70	35
10	Female	400	300	100	400	300	100	30
11	Female	400	300	100	400	280	120	30
12	Female	400	350	50	400	350	50	35
13	Female	400	350	50	400	350	50	34
14	Female	400	370	30	400	370	30	33
15	Female	400	280	120	400	280	120	38
16	Female	400	270	130	400	200	200	37
17	Female	400	300	100	400	300	100	37
18	Female	400	350	50	400	350	50	30
19	Male	400	400	0	400	200	200	33
20	Male	400	250	150	400	200	200	31
	Rata-rata	400	330	70	400	300	100	33,3
	Rata-rata waktu perempuan							33,875
	Rata-rata waktu laki-laki							31

Lampiran 3

Uji Reliabilitas Data

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.828	.832	12

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.212	3.400	4.850	1.450	1.426	.195	12

Lampiran 4

Deskripsi Subyek Kuasi Eksperimen

Subyek	Gender		Usia (Tahun)	Pengalaman Kerja
1	Perempuan	KAP A Malang	32	8
2	Perempuan		34	10
3	Laki-laki		27	3
4	Laki-laki		29	6
5	Laki-laki		26	4
6	Laki-laki		27	3
7	Perempuan	BPK	23	3
8	Perempuan		38	13
9	Perempuan		33	9
10	Perempuan		26	3
11	Perempuan		32	9
12	Perempuan		26	3
13	Perempuan		23	3
14	Perempuan	36	16	
15	Laki-laki	KAP B Malang	33	11
16	Laki-laki		26	3
17	Perempuan		40	12
18	Perempuan		40	15
19	Laki-laki	27	3	
20	Laki-laki	KAP C Malang	40	15
21	Laki-laki		30	7
22	Laki-laki		31	6
23	Laki-laki		33	9
24	Laki-laki		38	10
25	Laki-laki		37	12
26	Perempuan	32	8	
Rata-rata			31,46	7,8

Lampiran 5

Rekapitulasi Kuasi Eksperimen

Subyek	Gender	Klien Perempuan		AJ	Male Client		AJ
		Ajbt	AJEat		Ajbt	AJEat	
1	Female	400	400	0	400	400	0
2	Female	400	300	100	400	200	200
3	Male	400	0	400	400	200	200
4	Male	150	50	100	200	25	175
5	Male	400	0	400	400	200	200
6	Male	200	100	100	200	80	120
7	Female	400	200	200	400	350	50
8	Female	200	200	0	400	250	150
9	Male	400	200	200	400	250	150
10	Male	400	200	200	400	0	400
11	Female	400	300	100	400	200	200
12	Male	400	200	200	400	200	200
13	Female	400	400	0	400	400	0
14	Female	400	200	200	400	200	200
15	Male	400	250	150	400	300	100
16	Male	400	0	400	400	0	400
17	Female	200	200	0	200	25	175
18	Female	400	400	0	400	400	0
19	Male	200	100	100	200	50	150
20	Male	400	200	200	400	300	100
21	Male	400	200	200	400	200	200
22	Male	350	200	150	350	300	50
23	Male	400	200	200	400	200	200
24	Female	400	200	200	400	250	150
25	Male	400	300	100	400	200	200
26	Female	400	200	200	400	250	150

Dependent Variable:AJE

GenderAuditor	GKlien	Mean	Std. Deviation	N
Female	Female	90.91	94.388	11
	Male	115.91	85.347	11
	Total	103.41	88.740	22
Male	Female	206.67	108.342	15
	Male	189.67	97.440	15
	Total	198.17	101.612	30
Total	Female	157.69	116.355	26
	Male	158.46	98.038	26
	Total	158.08	106.528	52



Lampiran 6

Deskripsi Cek Manipulasi

Subyek	Gender	Indeks Cek Manipulasi Klien Perempuan	Indeks Cek Manipulasi Klien Laki-laki
1	Female	8	8
2	Female	6.8	7.4
3	Male	8	7
4	Male	7.2	6.4
5	Male	7.6	7.6
6	Male	7.8	6.8
7	Female	6.6	7.2
8	Female	4.2	7.2
9	Male	8	5.6
10	Male	8	6
11	Female	7.2	4.4
12	Male	7	6.2
13	Female	6.2	5
14	Female	8	7.4
15	Male	7.2	5.4
16	Male	8	7.2
17	Female	8	8
18	Female	6.2	5.4
19	Male	8	6.4
20	Male	7.2	6.6
21	Male	7.2	3.8
22	Male	7.2	6
23	Male	7.2	7.6
24	Female	7.6	5.2
25	Male	7.6	6.6
26	Female	6.8	6

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Femaleclient	26	4.20	8.00	7.2615	.83861
Maleclient	26	3.80	8.00	6.4000	1.09252
Valid N (listwise)	26				

Lampiran 7

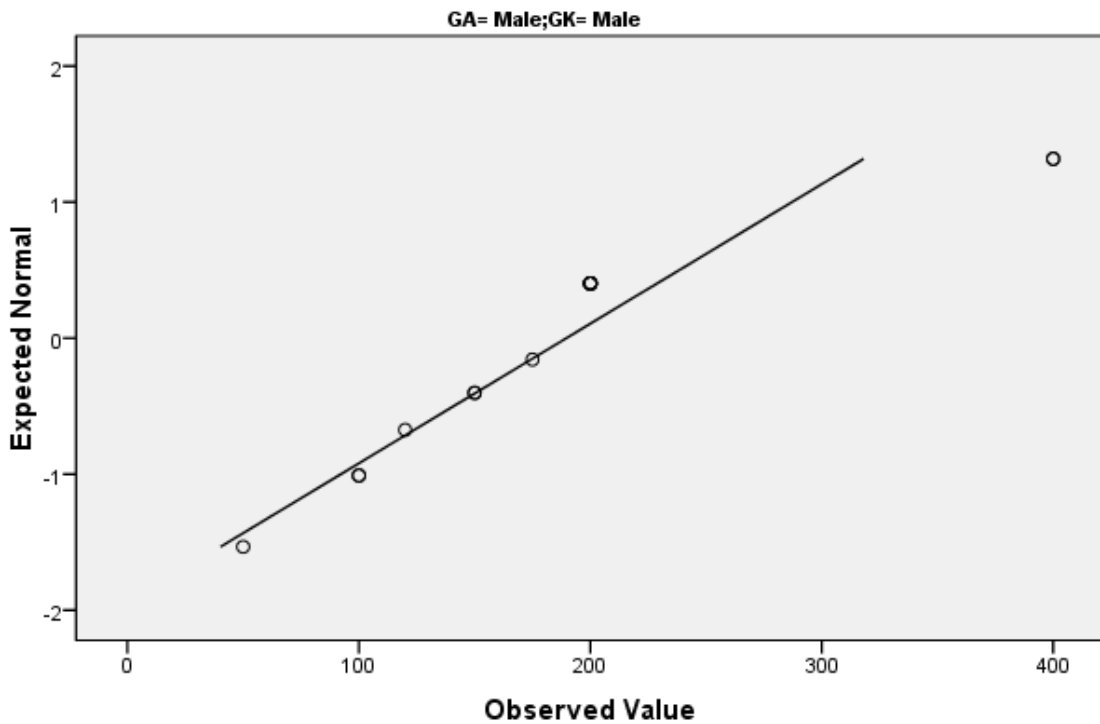
Hasil Uji Normalitas

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		GenderAuditor	GKlien	AJE
N		52	52	52
Normal Parameters ^a	Mean	1.58	1.50	158.08
	Std. Deviation	.499	.505	106.528
Most Extreme Differences	Absolute	.379	.339	.251
	Positive	.299	.339	.251
	Negative	-.379	-.339	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		2.731	2.445	1.809
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.003
a. Test distribution is Normal.				

Normal Q-Q Plot of AJE



Lampiran 8 dan 9

Hasil Pengujian Hipotesis dan Homogenitas Varian

Univariate Analysis of Variance

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
GenderAuditor	1	Female	22
	2	Male	30
GKlien	1	Female	26
	2	Male	26

Descriptive Statistics

Dependent Variable:AJ

GenderAuditor	GKlien	Mean	Std. Deviation	N
Female	Female	90.91	94.388	11
	Male	115.91	85.347	11
	Total	103.41	88.740	22
Male	Female	206.67	108.342	15
	Male	189.67	97.440	15
	Total	198.17	101.612	30
Total	Female	157.69	116.355	26
	Male	158.46	98.038	26
	Total	158.08	106.528	52

Lampiran 8

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

Dependent Variable:AJ

F	df1	df2	Sig.
.226	3	48	.878

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + GenderAuditor + GKlien + GenderAuditor * GKlien

Lampiran 9

Tests of Between-Subjects Effects

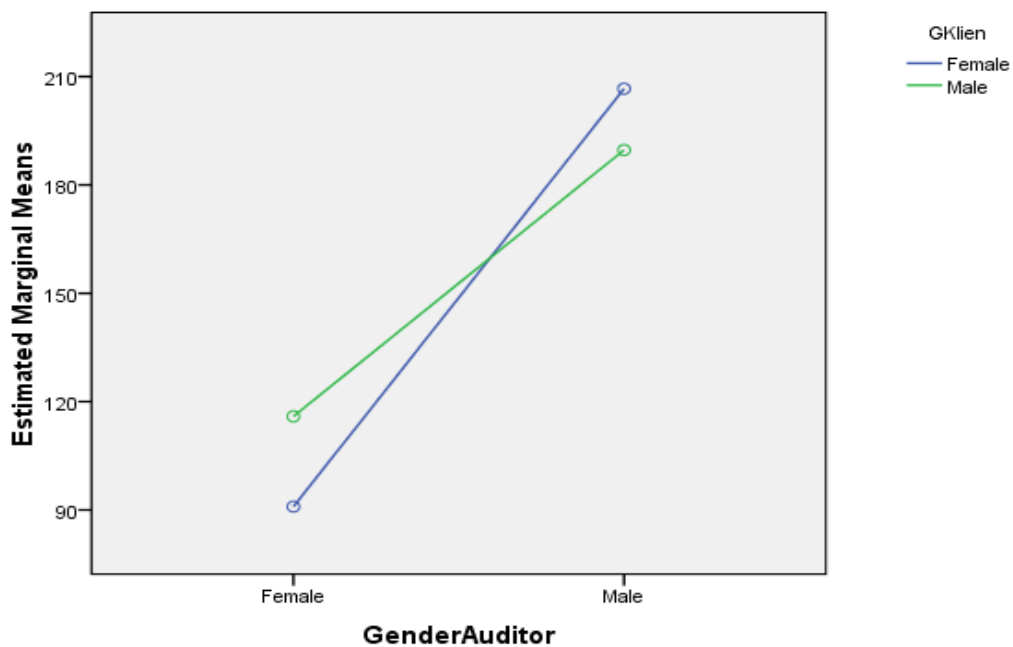
Dependent Variable:AJ

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	119569.207 ^a	3	39856.402	4.166	.011
Intercept	1154339.207	1	1154339.207	120.666	.000
GenderAuditor	113964.207	1	113964.207	11.913	.001
GKlien	203.077	1	203.077	.021	.885
GenderAuditor * GKlien	5597.308	1	5597.308	.585	.448
Error	459188.485	48	9566.427		
Total	1878150.000	52			
Corrected Total	578757.692	51			

a. R Squared = .207 (Adjusted R Squared = .157)

Profile Plots

Estimated Marginal Means of AJ



Estimated Marginal Means

Grand Mean

Dependent Variable:AJ

Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
		Lower Bound	Upper Bound
150.788	13.727	123.188	178.388



Lampiran 10

REKAPITULASI INDEKS WAMS

Subyek	Gender	Indeks WAMS
1	1	4,25
2	1	5,42
3	2	1,92
4	2	4,17
5	2	1,67
6	2	4,75
7	1	4,67
8	1	5,00
9	2	3,08
10	2	6,00
11	1	2,33
12	2	3,67
13	1	4,58
14	1	3,67
15	2	4,08
16	2	4,67
17	1	4,75
18	1	4,42
19	2	5,50
20	2	2,00
21	2	1,83
22	2	3,67
23	2	2,00
24	1	4,00
25	2	4,50
26	1	3,67

Keterangan:

1 = perempuan

2 = laki-laki

Karakteristik Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

HOTMAN TINAMBUNAN*

RUDI ZULFIKAR

EWING YUVISA IBRANI

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract: *The role of audit committee is to ensure the quality of financial reporting process. The purpose of this study is to examine the influence of audit committee characteristic on timeliness of financial reporting over banking companies in Indonesia. Audit committee characteristic represented by size, independence, expertise, and audit committee meeting. The timeliness of financial reporting was measured by number of days from fiscal year end to the date of audit report.*

The Data of this study are taken from 100 banking companies listed in Bursa Efek Indonesia in 2009-2012. Data about the audit committee information are taken from the company's annual report. Then, the data are analyzed using multiple regression linear analysis. The result of this research shows that audit committee size and audit committee meeting has negative significant influence on timeliness of financial reporting, while the others audit committee characteristic and firm size as control variables not haven't effect on timeliness of financial reporting.

Keywords : *Audit Committee, Timeliness of Financial Reporting Corporate Governance.*

* Corresponding author: tinambunan.hotman@yahoo.com

I. Pendahuluan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan publik sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian dilakukan melalui proksi komite audit yang terdiri dari ukuran, independensi, kompetensi, dan frekuensi rapat komite audit. Adapun ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur dari interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani (Dyer dan Hugh, 1975).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan atribut kualitatif penting atas suatu laporan keuangan, yang menghendaki suatu informasi harus tersedia bagi para pengguna laporan keuangan sesegera mungkin (Ahmad dan Kamarudin, 2003) sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan bisnis (Shukeri dan Nelson, 2011). Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya dalam hal pengambilan suatu keputusan (PSAK No. 1 Revisi 2009).

Bagi investor penundaan dalam menerbitkan laporan keuangan dapat meningkatkan ketidakpastian yang berkaitan dengan keputusan investasi (Ashton, Willingham dan Elliott, 1987). Oleh karena itu, pelaporan yang tepat waktu akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mengurangi penyebaran asimetri informasi di pasar modal (Owusu-Ansah dan Leventis, 2006). Dengan demikian ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat membantu mengurangi terjadinya kebocoran, rumor dan *insider trading* pada pasar modal (Owusu-Ansah, 2000).

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-36/PM/2003 yang telah direvisi dengan KEP-346/BL/2011, menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang harus disertai dengan pendapat lazim dari auditor independen dan disampaikan kepada Bapepam selambat-

lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan (Bapepam, 2003). Meskipun regulator telah mengatur tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan, namun pada kenyataannya, masih terdapat emiten yang terdaftar di BEI tidak mampu menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu.

Kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan di perusahaan perbankan Indonesia, pernah terjadi pada PT. Bank Mutiara Tbk yang dahulu bernama Bank Century untuk periode tahun 2009-2012. Keterlambatan pelaporan tersebut disebabkan oleh beberapa kejadian yang menyebabkan lamanya waktu yang digunakan auditor eksternal untuk menelaah bahan/bukti yang mendukung pelaporan keuangan. Keterlambatan ini juga mengindikasikan kurangnya peran komite audit dalam melakukan pengawasan secara intensif (Surat Bank Mutiara kepada BEI No.27.01/S-Dir-CSD/Mutiara/IX/2012).

Keinginan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu sering dihadapkan dengan berbagai kendala, salah satunya adalah adanya keharusan laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik dengan tujuan untuk memverifikasi apakah laporan keuangan telah sesuai dengan standar pelaporan yang berterima umum (Savitri, 2012). Lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya akan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Menurut Owusu-Ansah (2000) dan Leventis *et al.* (2005) ketepatan waktu audit merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dalam melakukan tugas auditnya, auditor berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pada standar ketiga tertulis bahwa audit harus dijalankan dengan penuh kecermatan dan ketelitian untuk mengevaluasi bukti yang memadai. Dengan demikian auditor harus melaksanakan audit dengan menggunakan kompetensi dan integritas yang dimiliki secara profesional. Hal ini membuat proses audit membutuhkan waktu yang tidak singkat namun akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil audit.

Industri perbankan adalah industri yang berbasis kepercayaan. Untuk meningkatkan kepercayaan investor dan *stakeholder* lainnya bank harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya, salah satunya melalui penerapan *corporate governance* (Lulian dan Mihaela, 2012). Asas transparansi adalah asas yang paling berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan informasi oleh perusahaan. Dalam asas transparansi disebutkan bahwa perusahaan harus menyampaikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.

Komite audit umumnya dipandang sebagai komponen penting dari struktur *corporate governance* dalam suatu perusahaan secara keseluruhan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas audit dan pengawasan pelaporan keuangan (Ika dan Ghozali, 2011). Keberadaan komite audit diharapkan dapat mendukung pelaksanaan *review* terhadap pengendalian internal perusahaan dan menciptakan laporan keuangan perusahaan lebih obyektif (Khomsiyah, 2005). Forker (1992) menyatakan bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan.

Hubungan antara komite audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan didasarkan pada pemikiran bahwa jika komite audit efektif dalam melakukan tugas pengawasan proses pelaporan keuangan, hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang dapat menyebabkan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu (Ika dan Ghazali, 2011). Cohen dan Hanno (2000) mengemukakan bahwa *corporate governance* yang kuat (termasuk komite audit independen) memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit dengan mengurangi persepsi auditor terhadap risiko bisnis klien, penilaian risiko kontrol auditor untuk pernyataan audit tertentu, dan jumlah pengujian substantif yang direncanakan.

Penelitian Sharma *et al.* (2007) menguji dampak *corporate governance* pada risiko audit, perencanaan audit, dan pengujian audit. Penelitian tersebut terkait dengan dewan

komisaris, dewan direksi, dan karakteristik komite audit (ukuran, independensi, dan kompetensi), frekuensi pertemuan dan interaksi dengan auditor eksternal. Studi ini menemukan bahwa struktur *corporate governance* klien mempengaruhi penilaian auditor terhadap pengendalian risiko dan risiko audit, jam audit yang direncanakan, dan tingkat pengujian substantif (Stewart dan Munro, 2007). Dengan demikian keberadaan komite audit akan berhubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan berdasarkan lamanya waktu yang dihabiskan oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya (Afify, 2009).

Berdasarkan penelitian terdahulu dan pengembangan dari penelitian Ika dan Ghazali (2011) penelitian ini mencoba mengkonfirmasi kembali pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Motivasi penelitian ini adalah karena penelitian yang mengaitkan karakteristik komite audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan belum banyak dilakukan di Indonesia khususnya pada perusahaan perbankan. Selain itu motivasi penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan perbankan terhadap kewajiban penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu.

II. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara agen (pihak manajemen suatu perusahaan) dengan prinsipal (pemilik). Pemegang saham atau prinsipal merupakan pihak yang memberikan amanat kepada agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal, sementara agen adalah pihak yang diberi mandat. (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Scott (1997) dalam Arifin (2005), inti dari *agency theory* adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan.

Dalam teori agensi, agen diharuskan memberikan informasi yang rinci dan relevan kepada prinsipal. Namun, pada kenyataannya hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Kepentingan prinsipal sebagai pemegang saham adalah untuk memperoleh pengungkapan informasi oleh agen mengenai keadaan perusahaan secara relevan, tepat waktu, dan akurat sebagai dasar pembentukan keputusan. Namun di sisi lain, agen sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan tidak bergantung terhadap pengungkapan informasi tersebut dalam pembuatan keputusan (Mahendra, 2013). Perbedaan kepentingan ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Untuk mengurangi masalah asimetri informasi ini, ketepatan waktu pelaporan informasi adalah salah satu cara untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi (Ukago, 2004).

B. Komite Audit

Blue Ribbon Committee (BRC, 1999), dalam laporannya menyatakan komite audit adalah “pengawas utama” dari sistem pelaporan akuntansi keuangan. Komite audit akan mengawasi para manajer, auditor internal dan auditor eksternal untuk memastikan apakah mereka bertindak atas kepentingan yang lebih besar dalam perusahaan. Komite audit merupakan komite yang dibentuk dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager *et al.*, 2003). Tujuan utama pembentukan komite audit dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, transparansi, dan objektifitas dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan (Khomsiyah, 2005).

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi Bursa Efek

Jakarta No: KEP-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan *corporate governance* yang baik, perusahaan yang terdaftar di BEJ wajib memiliki komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan. Keberadaan komite audit pada perusahaan perbankan di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* termasuk pembentukan komite audit.

Peraturan Bapepam No. KEP-29/PM/2004 menyatakan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris, antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Berdasarkan rumusan tugas tersebut terlihat peran sentral komite audit sebagai pengawas sistem keuangan dan transparansi pelaporan perusahaan, dengan demikian transparansi informasi yang diungkap manajemen sangat ditentukan oleh keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya.

C. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Ketepatan waktu pelaporan keuangan menghendaki suatu informasi harus tersedia bagi pembuat keputusan sesegera mungkin (Ahmad dan Kamarudin, 2003) sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan bisnis (Shukeri dan Nelson, 2011). Ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan yang cermat dan tepat berdasarkan informasi keuangan yang didapatkan (Khomsiyah, 2005).

Chamber dan Penman (1984), mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara, yaitu (i) ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal melaporkan; dan (ii) ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) menyatakan jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Ketepatan waktu menunjukkan laporan keuangan disajikan dalam kurun waktu teratur, untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang mungkin akan mempengaruhi pemikiran jangka panjang investor dan keputusan pemakainya (Wijaya, 2012).

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 disebutkan bahwa setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan pendapat lazim dari auditor independen dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Adanya keharusan

laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik menjadi sebuah kendala bagi perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Menurut Owusu-Ansah (2000) dan Leventis *et al.* (2005) ketepatan waktu audit merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dalam melakukan tugas auditnya, auditor berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dengan demikian auditor harus melaksanakan audit dengan menggunakan kompetensi dan integritas yang dimiliki secara profesional. Hal ini membuat proses audit membutuhkan waktu yang tidak singkat namun akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil audit.

Dyer dan Hugh (1975) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya: (i) *preliminary lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preleminary* oleh bursa, (ii) *auditor's report lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani, dan (iii) *total lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

D. Pengembangan Hipotesis

1. Ukuran Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Peraturan Bapepam No. IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, mewajibkan perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk menunjuk komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota yang meliputi satu orang komisaris independen dan dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten. Jumlah anggota komite audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini memunculkan pemikiran bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dapat meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan dan ketepatan waktu. Dengan semakin

banyaknya jumlah anggota komite audit maka cenderung untuk memiliki kekuatan yang lebih besar (Kalbers dan Fogarty, 1993 dalam Abawayya 2010), menerima lebih banyak sumber daya (Pincus *et al.* 1989 dalam Hoitash dan Hoitash, 2007), serta berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan (Felo *et al.*, 2003 dalam Abawayya 2010). Kualitas pelaporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian Nor *et al.* (2010), Islam *et al.* (2012), dan Wijaya (2012) berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun Purwati (2006) tidak menemukan adanya pengaruh ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

H1: *Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.*

2. Independensi Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Peraturan Bapepam No. IX.I.5 menetapkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar harus memiliki komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Anggota yang independen tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen dalam mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif (FCGI, 2003)

Anggota komite audit yang independen akan memelihara integritas serta pandangan yang obyektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. Pomeroy dan Thornton (2008) menyimpulkan bahwa independensi komite audit memiliki dampak yang lebih dalam meningkatkan kualitas laporan

audit. Independensi komite audit juga memberikan kontribusi positif terhadap kualitas proses pelaporan keuangan (Bédard dan Gendron, 2010) Kualitas pelaporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Afifiy (2009) dan Savitri (2010) menemukan bahwa proksi independensi memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sementara itu Purwati (2006), Nor *et al.* (2010), Islam *et al.* (2012), dan Wijaya (2012) menemukan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

H2: *Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.*

3. Kompetensi Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Peraturan Bapepam No. IX.I.5 mensyaratkan bahwa salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan/atau keuangan, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sebagai ahli keuangan yang memiliki pengetahuan dan kompetensi pada bidangnya, mereka diharapkan dapat memimpin komite audit dalam mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan, baik kepada manajemen maupun auditor eksternal yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Ika dan Ghazali, 2011). Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari ketepatan waktu.

Purwati (2006) dan Wijaya (2012) menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun Nor *et al.* (2010) dan Islam *et al.* (2012) menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

H3: *Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.*

4. Frekuensi Rapat Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Pertemuan atau rapat komite audit adalah wahana bagi dewan untuk membahas proses pelaporan keuangan, dalam pertemuan ini terjadi proses pengawasan pelaporan keuangan (Nor *et al.*, 2010). Sebuah komite audit yang independen tidak mungkin efektif kecuali komite audit juga aktif (Menon dan Williams, 1994). Komite Nasional Penipuan Pelaporan Keuangan, yang juga dikenal sebagai *Treadway Commission* (1987), menyatakan bahwa komite audit yang memainkan peran utama dalam pengawasan perlu mempertahankan tingkat aktivitas yang tinggi.

Komite audit harus bertemu secara teratur, dengan pemberitahuan atas isu yang menjadi pembahasan, dan mencatat kesimpulannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Nor *et al.*, 2010). Peraturan Bapepam No. IX.I.5 mensyaratkan komite audit untuk melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002).

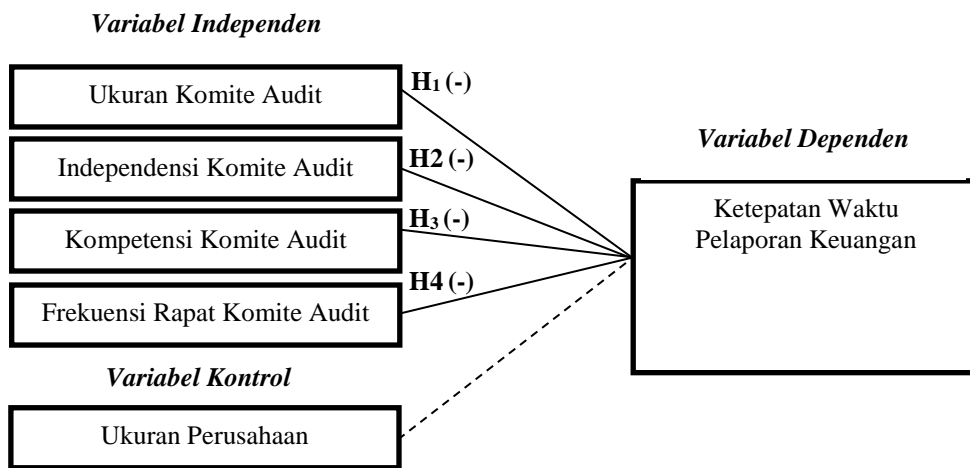
Raghuandan, Rama dan Scarbrough (1998) dan Abbott, Parker, Peters dan Raghuandan, (2003a dan 2003b) berpendapat bahwa dengan pertemuan yang sering, komite audit akan tetap memperoleh informasi dan pengetahuan tentang isu akuntansi atau audit dan dapat mengarahkan sumber daya audit internal dan eksternal untuk mengatasi masalah ketepatan waktu.

Nor *et al.* (2010) dan Islam *et al.* (2012) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Sementara itu Wijaya (2012) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

H4: *Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.*

Kerangka Konsep Penelitian



III. Metode Penelitian

A. Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi penelitian ini meliputi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun penelitian 2009, 2010, 2011, dan 2012. Pengambilan waktu tersebut dilakukan karena periode tersebut merupakan waktu terjadinya kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan di sektor perbankan.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu tipe pemilihan sampel tidak secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dan umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah

penelitian (Indirantoro dan Supomo). Kriteria yang digunakan dalam penarikan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut untuk periode 2009-2012 dan tidak mengalami *delisting*;
- b. Perusahaan dengan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh KAP; dan
- c. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data keuangan dan pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan metode *purposive sampling* diperoleh 25 sampel perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan, sehingga untuk periode 4 tahun pengamatan (2009-2012) diperoleh 100 sampel perusahaan perbankan (4 tahun x 25 perusahaan). Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari *annual report* perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Data sekunder diperoleh dari situs www.idx.co.id.

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen (Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan)

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah atribut kualitatif penting atas suatu laporan keuangan yang menghendaki suatu informasi harus tersedia bagi pembuat keputusan sesegera mungkin (Ahmad dan Kamarudin, 2003) sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan bisnis (Shukeri dan Nelson, 2011). Ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam penelitian ini diukur berdasarkan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor ditandatangani (Dyer dan Hugh, 1975).

2. Variabel Independen (Karakteristik Komite Audit)

a. Ukuran Komite Audit (ACSIZE)

Semakin banyak jumlah anggota komite audit maka cenderung untuk memiliki kekuatan yang lebih besar (Kalbers dan Fogarty, 1993 dalam Abawayya 2010), menerima lebih banyak sumber daya (Pincus *et al.* 1989 dalam Hoitash dan Hoitash, 2007), serta berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan (Felo *et al.*, 2003 dalam Abawayya 2010). Ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dari jumlah anggota komite audit aktif dalam satu tahun (Nor *et al.*, 2010 dan Islam *et al.*, 2012).

b. Independensi Komite Audit (ACINDP)

Independensi komite audit adalah anggota komite audit atau individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif (FCGI, 2003). Independensi komite audit dalam penelitian ini diukur dari proporsi (perbandingan) jumlah anggota komite audit yang berasal dari luar emiten (pihak independen) dengan jumlah anggota komite audit keseluruhan (Nor *et al.*, 2010 dan Islam *et al.*, 2012).

c. Kompetensi Komite Audit (ACEXP)

Kompetensi komite audit adalah kemampuan atau pengetahuan memadai tentang keuangan dan akuntansi yang dimiliki oleh anggota komite audit dan diharapkan dapat digunakan dalam melaksanakan tugas komite audit untuk meningkatkan kualitas pengawasan (FCGI, 2003). Kompetensi komite audit dalam penelitian ini diukur dari proporsi (perbandingan) jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan/atau keuangan dengan jumlah anggota komite audit keseluruhan (Nor *et al.*, 2010 dan Islam *et al.*, 2012).

d. Frekuensi Rapat Komite Audit (ACMEET)

Perusahaan yang memiliki jumlah pertemuan komite audit yang lebih tinggi diharapkan akan memiliki kualitas pelaporan yang tinggi terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan keuangan (Ika dan Ghazali, 2011). Frekuensi rapat komite audit dalam penelitian ini diukur dari jumlah seluruh rapat yang diadakan komite audit dalam satu tahun (Nor *et al.*, 2010 dan Islam *et al.*, 2012).

3. Variabel Kontrol (Ukuran Perusahaan)

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan (Andiany, 2011). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dari jumlah total aset perusahaan (*natural logarithma* dari total aset) (Nor *et al.*, 2010).

C. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS *Release* 20. Sebagai persyaratan pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2010). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{TIMELINESS} = \beta_0 + \beta_1 \text{ACSIZE} + \beta_2 \text{ACINDP} + \beta_3 \text{ACEXP} + \beta_4 \text{ACMEET} + \beta_5 \text{FIRMSIZE} + \varepsilon$$

Keterangan:

- TIMELINESS = Ketepatan waktu pelaporan keuangan
- ACSIZE = Ukuran komite audit
- ACINDP = Independensi komite audit
- ACEXP = Keahlian keuangan/kompetensi komite audit
- ACMEET = Frekuensi rapat komite audit
- FIRMSIZE = Ukuran perusahaan



β = Koefisien X
 ε = Error

IV. Analisis dan Pembahasan

A. Statistik Deskriptif

Tabel 1 menyajikan hasil pengujian statistik deskriptif karakteristik komite audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

(Insert tabel 1 disini)

Statistik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan (TIMELINESS) pada perusahaan perbankan di Indonesia menunjukkan lama pelaporan keuangan kepada publik terhitung sejak tanggal 31 Desember, menunjukkan rata-rata sebesar 69,83 yang berarti bahwa secara rata-rata diperoleh adanya pelaporan keuangan selama 69,83 hari atau masih di bawah 90 hari sebagaimana yang ditentukan Bapepam. *Timeliness* tercepat adalah selama 23 hari dan *timeliness* terlama adalah selama 136 hari.

Ukuran komite audit (ACSIZE) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,79 yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan mengangkat anggota komite audit hanya sejumlah aturan Bapepam yaitu 3 orang. Jumlah anggota komite audit terendah yaitu hanya 2 orang, hal ini bertentangan dengan ketentuan Bapepam yang mensyaratkan keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu jumlah anggota komite audit tertinggi adalah sebanyak 8 orang. Meskipun secara umum keanggotaan komite audit telah sesuai dengan aturan Bapepam No. IX.I.5 mengenai pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit, namun data ini dapat mengindikasikan bahwa dalam menetapkan jumlah anggota

komite audit perusahaan hanya mempertimbangkan untuk memenuhi syarat dalam peraturan Bapepam tersebut.

Nilai rata-rata independensi anggota komite audit (ACINDP) menunjukkan nilai persentase sebesar 93,28% dari seluruh anggota komite audit. Tingginya persentase independensi anggota komite audit menunjukkan bahwa perusahaan sampel telah menerapkan aturan Bapepam No. IX.I.5 mengenai pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit dengan baik. Berdasarkan tabel 1 nampak bahwa persentase independensi anggota komite audit terendah adalah 60%, sedangkan nilai tertinggi persentase independensi komite audit adalah 100%, yang berarti seluruh anggota komite audit dikategorikan independen. Jumlah perusahaan yang 100% anggota komite auditnya dikategorikan independen cukup besar, yaitu sebanyak 19 perusahaan pada periode pengamatan tahun 2009 dan 2012, dan sebanyak 18 perusahaan pada tahun 2010 dan 2011.

Tingginya rata-rata independensi dan banyaknya jumlah perusahaan yang 100% anggota komite auditnya dikategorikan independen ini menunjukkan bahwa dewan komisaris yang memilih dan menetapkan anggota komite audit bersungguh-sungguh memastikan bahwa anggota komite audit perusahaan adalah individu yang layak dipercaya, sehingga akan mampu melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukannya dengan penuh integritas.

Keahlian keuangan/kompetensi anggota komite audit (ACEXP) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 96,24%. Ini berarti bahwa 96,24% anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan maupun pengalaman di bidang akuntansi/keuangan yang memadai. Persentase terendah anggota komite audit yang berpengalaman akuntansi/keuangan adalah 50%. Sedangkan persentase tertinggi jumlah anggota komite auditnya berlatar belakang akuntansi/keuangan adalah 100%. Jumlah perusahaan yang 100% anggota komite auditnya memiliki kompetensi di bidang akuntansi/keuangan cukup besar, yaitu pada tahun 2009

mencapai 20 perusahaan, di tahun 2010 dan 2011 masing-masing 22 perusahaan, sedangkan di tahun 2012 sebanyak 21 perusahaan.

Tingginya rata-rata anggota komite audit berlatar belakang akuntansi/keuangan ini menunjukkan upaya serius dewan komisaris untuk; i) memilih dan menetapkan anggota komite audit yang memiliki kualifikasi pendidikan yang bermanfaat dalam membantu dewan komisaris memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tugas pengawasan; ii) mengikis kesenjangan informasi dan meningkatkan transparansi antara manajemen dan pemegang saham melalui peran anggota komite audit yang ahli.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa komite audit pada perusahaan sampel melakukan rapat komite audit (ACMEET) rata-rata sebanyak 11,97 kali pertemuan, yang artinya rata-rata komite audit bertemu hampir satu kali tiap bulan. Jumlah rapat terendah adalah 2 kali rapat dalam setahun dan jumlah rapat komite audit terbanyak dalam setahun adalah 38 kali. Tingginya rata-rata rapat yang dilakukan oleh komite audit ini menunjukkan tingginya aktivitas komite audit dalam menjalankan tugasnya.

Variabel kontrol ukuran perusahaan (FIRMSIZE) yang diukur dengan menggunakan total aset (dalam bentuk transformasi *natural logarithma*) dari seluruh sampel penelitian selama tahun penelitian menunjukkan rata-rata sebesar 30,884377. Penggunaan transformasi *natural logarithma* ini disebabkan karena data awal memiliki rentang nilai minimum dan maksimum yang besar. Nilai ukuran perusahaan terendah adalah senilai 27,985596, sedangkan nilai ukuran perusahaan terbesar adalah senilai 33,943366.

B. Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 menunjukkan hasil uji asumsi klasik

(Insert tabel 2 disini)

Menurut Gujarati (2006) dalam analisis regresi berganda (*multiple regression*) pengujian validitas data dilakukan sebagai syarat analisa regresi berganda agar penaksiran parameter dan koefisien regresi valid, tidak bias dan konsisten. Maka berdasarkan pengujian asumsi klasik dengan menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov, uji DW, dan *Tolerance* atau VIF pada tabel 2 diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan valid.

Berdasarkan tabel 2, uji normalitas data menggunakan *One Sample* Kolmogorov-Smirnov menurut Gujarati (2006) dilakukan dengan melihat hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-S). Kriteria pengujiannya, apabila $\rho\text{-value} = 0,100 > 5\%$ berarti data berdistribusi secara normal.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai dw sebesar 2,163 dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 100 (n) dan jumlah variabel independen 5 (k = 5), maka nilai du diperoleh sebesar 1,780 dan dl sebesar 1,571. Karena nilai dw (2,163) lebih besar dari batas atas (du) 1,780 dan kurang dari $4 - du$ ($4 - 1,780 = 2,220$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *Tolerance Value* maupun *Variance Inflation Factor* (Ghozali, 2006). Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa seluruh variabel menunjukkan nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* $< 10,00$. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolonieritas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan memplotkan grafik antara SRESID dengan ZPRED dimana gangguan heteroskedastisitas akan tampak dengan adanya pola tertentu pada grafik. Hasil uji heteroskedastisitas pada model dalam penelitian nampak pada gambar 1.

(Insert gambar 1 disini)

Berdasarkan grafik *scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

C. Pengujian Hipotesis

Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 3 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,305. Nilai tersebut menunjukkan variasi ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu ukuran komite audit (ACSIZE), independensi komite audit (ACINDP), keahlian keuangan/kompetensi komite audit (ACEXP), dan frekuensi rapat komite audit (ACMEET), serta variabel kontrol ukuran perusahaan (FIRMSIZE) sebesar 30,5%, sedangkan 69,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

(Insert tabel 3 disini)

Tabel 3 juga menginformasikan nilai F hitung penelitian ini sebesar 9,697 dengan tingkat signifikansi 0.000 ($p\text{-value} < 5\%$), nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian berarti proksi komite audit yang terdiri dari ukuran komite audit (ACSIZE), independensi komite audit (ACINDP), keahlian keuangan/kompetensi komite audit (ACEXP), dan frekuensi rapat komite audit (ACMEET), serta variabel kontrol ukuran perusahaan (FIRMSIZE) secara serempak terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan (TIMELINESS).

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan alat bantu SPSS 20 menjelaskan koefisien regresi masing-masing variabel dan tingkat signifikansinya disajikan dalam tabel 4.

(Insert tabel 4 disini)

Penelitian ini menemukan bukti bahwa bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada table 4, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar -2,126 dengan signifikansi $0,036 < 5\%$. Hasil tersebut menunjukkan Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nor *et al.* (2010), Islam *et al.* (2012), dan Wijaya (2012), namun hasil ini bertentangan dengan Purwati (2006). Hasil penelitian yang menunjukkan koefisien negatif ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit akan mengurangi atau mempersingkat lamanya waktu auditor eksternal dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, sehingga ketepatan waktu dalam menyampaikan pelaporan keuangan menjadi semakin cepat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran komite audit dalam mengawasi proses dan pelaporan keuangan perusahaan terbukti ditentukan oleh ukuran komite audit yang dimilikinya. Dengan semakin banyaknya jumlah anggota komite audit maka cenderung untuk memiliki kekuatan yang lebih besar (Kalbers dan Fogarty, 1993 dalam Abawayya 2010), menerima lebih banyak sumber daya (Pincus *et al.* 1989 dalam Hoitash dan Hoitash, 2007), serta berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan (Felo *et al.*, 2003 dalam Abawayya 2010).

Independensi komite audit ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dari hasil regresi yang disajikan pada table 4, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 0,778 dengan $\rho\text{-value} = 0,439 > 5\%$. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Afify (2009) dan Savitri (2010) yang menyatakan bahwa proksi independensi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini mengkategorikan anggota komite audit sebagai independen apabila ia berasal dari luar perusahaan dan dalam riwayat hidup di laporan tahunan perusahaan terlihat bahwa yang bersangkutan tidak pernah bekerja untuk perusahaan atau afiliasinya. Hasil penelitian yang menunjukkan arah positif tidak signifikan ini berarti bahwa dengan semakin banyaknya

jumlah anggota komite audit independen searah dengan meningkatkan lamanya waktu auditor eksternal dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, sehingga ketepatan waktu dalam menyampaikan pelaporan keuangan menjadi semakin lama. Hasil penelitian yang tidak signifikan ini didukung oleh penelitian Purwati (2006), Nor *et al.* (2010), Islam *et al.* (2012), dan Wijaya (2012) yang menemukan bahwa variabel independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dalam penelitian ini kompetensi/keahlian keuangan komite audit ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dari hasil regresi yang disajikan pada table 4, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 0,572 dengan ρ -value 0,569 > 5%. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Purwati (2006) dan Wijaya (2012) yang menemukan bahwa kompetensi akuntansi dan/atau keuangan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian yang menunjukkan arah positif tidak signifikan ini berarti bahwa dengan penambahan jumlah anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi/keuangan searah dengan meningkatkan lamanya waktu auditor eksternal dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, sehingga ketepatan waktu dalam menyampaikan pelaporan keuangan menjadi semakin lama. Hasil penelitian yang tidak signifikan ini didukung oleh penelitian Nor *et al.* (2010) dan Islam *et al.* (2012) yang juga menemukan bahwa variabel kompetensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada tabel 4, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar -2,543 dengan ρ -value 0,013 < 5%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nor *et al.* (2010), dan Islam *et al.* (2012) yang menemukan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, namun demikian hasil ini

bertentangan dengan penelitian Wijaya (2012). Hasil penelitian yang menunjukkan koefisien negatif ini berarti bahwa semakin sering komite audit mengadakan rapat atau pertemuan dalam setahun maka akan meningkatkan peran pengawasan komite audit terhadap proses pelaporan keuangan yang akan mengurangi/mempersingkat lamanya waktu auditor eksternal dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, sehingga ketepatan waktu dalam menyampaikan pelaporan keuangan menjadi semakin cepat.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran komite audit dalam mengawasi proses dan pelaporan keuangan perusahaan terbukti ditentukan oleh tingginya aktivitas yang dilakukan oleh komite audit melalui rapat/pertemuan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya rata-rata rapat/pertemuan yang dilakukan oleh komite audit perusahaan sampel, yaitu 12 kali pertemuan dalam satu tahun. Jumlah pertemuan tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

V. Penutup

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan di Indonesia, melalui proksi komite audit yang terdiri dari ukuran, independensi, kompetensi, dan frekuensi rapat komite audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Pengujian atas 100 perusahaan perbankan menunjukkan bahwa ukuran dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dan semakin sering komite audit mengadakan rapat atau pertemuan dalam setahun maka akan meningkatkan peran pengawasan komite audit terhadap proses pelaporan keuangan yang akan mempersingkat lamanya waktu auditor eksternal dalam menyelesaikan

pekerjaan auditnya, sehingga ketepatan waktu dalam menyampaikan pelaporan keuangan menjadi semakin cepat. Sementara itu independensi dan kompetensi komite audit tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan perbankan di Indonesia.

B. Keterbatasan dan Saran

Mengacu pada hasil penelitian, beberapa keterbatasan dan alternatif perbaikan untuk penelitian yang akan datang dapat diajukan.

1. Jumlah sample penelitian hanya terdiri dari 25 perusahaan perbankan yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2009-2012. Hal ini diakibatkan terdapat 3 perusahaan perbankan yang tidak lengkap mencantumkan data riwayat hidup dan aktivitas komite audit. Di masa yang akan datang diharapkan perusahaan dapat meningkatkan ketersediaan informasi tersebut agar peran komite audit dapat terus ditingkatkan dan diteliti.
2. Periode penelitian ini hanya selama empat tahun yaitu tahun 2009-2012. Penelitian serupa di masa yang akan datang diharapkan dapat memperluas periode pengamatan. Ini diperlukan agar hasil penelitian dapat diuji konsistensi dan generalisasinya.
3. Penambahan dan perubahan proksi masih dapat dimungkinkan dalam pengembangan penelitian ini, misalnya dengan menggunakan proksi tenure anggota komite audit untuk menggantikan proksi kompetensi komite audit yang tidak terbukti signifikan. Disamping itu dapat pula diuji apakah proksi kualifikasi individu lainnya seperti gender dan usia anggota komite audit dapat menjadi proksi yang relevan guna menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

4. Perusahaan di Indonesia diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam menyampaikan pelaporan keuangan secara tepat waktu. Peningkatan pelaporan keuangan secara tepat waktu diperlukan dikaitkan dengan transparansi pengelolaan dan pelaporan keuangan. Sehingga pada akhirnya pemegang saham dan calon investor akan memperoleh informasi yang cukup luas dan tepat waktu untuk mengambil keputusan investasi dengan tepat sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan bisnis.

Daftar Pustaka

- Afify, H.A.E. 2009. **Determinants Of Audit Report Lag. Does Implementing Corporate Governance Have Any Impact? Empirical Evidence From Egypt.** *Journal of Applied Accounting Research*. Vol. 10 No. 1, pp. 56-86.
- Bank Indonesia. 2006. **Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.** No. 8/4/PBI/2006.
- Bapepam. 2003. **Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.** KEP-36/PM/2003 No. X.K.2.
- Bapepam. 2003. **Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.** KEP-346/BL/2011 No. X.K.2.
- Bapepam, 2004. **Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.** KEP-29/PM/2004 No. IX.I.5.
- Blue Ribbon Committee (BRC) (1999). **Report And Recommendation Of The Blue Ribbon Commission On Improving The Effectiveness Of Corporate Audit Committees.** NY: New York Stock Exchange and National Association of Securities Dealers.
- DeZoort, F. T., & Salterio, S. E. (2001). **The Effects Of Corporate Governance Experience And Financial Reporting And Audit Knowledge On Audit Committee Members' Judgments.** *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 20(2), 31-47.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. **Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan).** Seri Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) Jilid II
- Ika, Siti Rochmah dan Ghazali, Nazli. 2012. **Audit Committee Effectiveness And Timeliness Of Reporting: Indonesian Evidence.** *Managerial Auditing Journal*. Vol. 27 No. 4, pp. 403-424.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (2010). **Kajian Tentang Pedoman Good Corporate Governance Di Negara-Negara Anggota ACMF.**
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (2011). **Penyampaian Laporan Keuangan Berkala**

- Emiten Atau Perusahaan Publik. Salinan KEputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, No. KEP-346/BI/2011.**
- Khomsiyah. 2005. **Analisis Hubungan Struktur Dan Indeks Corporate Governance Dengan Kualitas Pengungkapan.** Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Lestari, Dewi. 2010. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay: Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.** Semarang: Universitas Diponegoro.
- Leventis, S., Weetman, P., & Caramanis, C. (2005). **Determinants of audit report lag: Some evidence from the Athens Stock Exchange.** *International Journal of Auditing*, 9(1), 45–58.
- Nor, Mohamad *et al.* 2010. **Corporate Governance And Audit Report Lag In Malaysia.** *Asian Academy Of Management Journal Of Accounting, And Finance*. Vol. 6, No. 2, 57–84.
- Owusu-Ansah, S. (2000), **“Timeliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: empirical evidence from the Zimbabwe Stock Exchange”**, *Accounting & Business Research*, Vol. 30 No. 3, pp. 241-54.
- Owusu-Ansah, S. and Leventis, S. (2006), **“Timeliness of corporate annual financial reporting in Greece”**, *European Accounting Review*, Vol. 15, pp. 273-87.
- Purwati, Atiek Sri. 2006. **Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di BEJ.** Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ragunadhan, K. R., Rama, D. V., & Scarbrough, D. P. (1998), **Accounting and Auditing Knowledge Level Of Canadian Audit Committee: Some Empirical Evidence.** *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 7(2), 181–194.
- Saputri, Dewi. 2012. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay: Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.** Semarang: Universitas Diponegoro.
- Savitri, Roswita. 2010. **Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI.** Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sekaredi, Sawitri. 2011. **Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Tahun 2005-2009).** Semarang: Universitas Diponegoro.
- Shukeri, Siti Norwahida dan Islam, Md. Aminul. 2012. **The Determinants of Audit Timeliness: Evidence From Malaysia.** *Journal of Applied Sciences Research*. 8(7): 3314-3322.
- Siregar, Dora Shinta dan Darsono. 2010. **Pengaruh Corporate Governance Dan Kinerja Perusahaan Terhadap Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Yang Mempublik.**
- Sutanto. 2012. **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**. Makassar: Universitas Hasanuddin.



Surat Bank Mutiara Kepada PT. Bursa Efek Indonesia Tbk No.27.01/S-Dir-CSD/Mutiara/IX/2012).

Wijaya, Aditya Taruna. 2012. **Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Audit Report Lag** (kajian Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010). Semarang: Universitas Diponegoro.

Lampiran

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean
TIMELINESS	100	23	136	69,83
ACSIZE	100	2	8	3,79
ACINDP	100	,6000	1,0000	,932810
ACEXP	100	,5000	1,0000	,962488
ACMEET	100	2	38	11,97
FIRMSIZE	100	27,98559693	33,94336697	30,8843774737
Valid N (listwise)	100			

Tabel 2
Uji Asumsi Klasik

	Tolerance	VIF	Pengujian Asumsi
ACSIZE	,318	3,140	Multikolonieritas
ACINDP	,524	1,910	Multikolonieritas
ACEXP	,840	1,190	Multikolonieritas
ACMEET	,635	1,575	Multikolonieritas
FIRMSIZE	,397	2,521	Multikolonieritas
<i>One Sample K-S_Asym. Sig.</i>	0,100 > 0,05 (sig)		Normalitas
<i>Durbin Watson (dw)</i>	du < dw < 4 - du 1,780 < 2,163 < 2,220		Autokorelasi

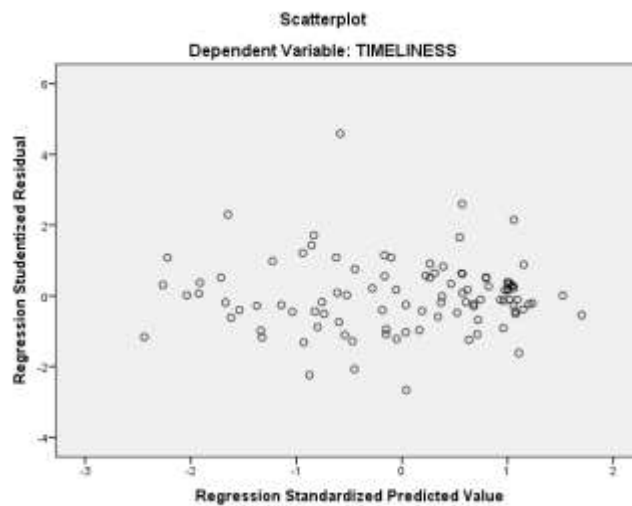
Tabel 3
Hasil Regresi Linear Berganda

R Square	Adjusted R Square	F	Sig.
,340	,305	9,697	,000

Tabel 4
Koefisien Regresi

Variabel	Koefisien	Coefficients	t hitung	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	99,583		1,968	,052	
ACSIZE	-5,572	-,316	-2,126	,036	Signifikan
ACINDP	14,720	,090	,778	,439	Tidak Signifikan
ACEXP	10,878	,052	,572	,569	Tidak Signifikan
ACMEET	-,693	-,267	-2,543	,013	Signifikan
FIRMSIZE	-,794	-,063	-,474	,637	Tidak Signifikan

Gambar 1
Uji Heteroskedastisitas



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Internet Corporate Reporting*

YANE DEVI ANNA*

Institut Manajemen Telkom

Abstract : *Web-based business reporting technology is moving very quickly, especially in developed countries and countries with advanced information and communication technology infrastructure. This paper to determinants of the extent of financial reporting on the internet described below have been identified from the voluntary disclosure literature, choose to focus on determinants that are more likely to influence the broaden access of corporate disclosure on web sites. This study uses data secondary data source obtained from corporate websites and a annual corporate reports of Kompas 100 companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2012. The result finds that's significant determinants of Corporate Internet Reporting (CIR) index are firms size and leverage and the results shows that on average the level CIR is medium.*

Keywords : *Corporate Internet Reporting, Disclosure, Financial and Nonfinancial Information.*

* Author can be contacted at: yanedevianna@yahoo.co.id

1. Pendahuluan

Populasi pengguna internet terus bertambah setiap tahunnya, Indonesia pada posisi urutan yang paling tinggi di negara Asia, yaitu mencapai 5,1% dari populasi pengguna internet di negara-negara Asia, jika dibandingkan pengguna internet dengan negara Malaysia, Philippines, Singapore dan Thailand yang belum mencapai 2% (Internet World Statistics, 2013). Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang tinggi dibandingkan negara-negara Asia, namun banyak perusahaan yang mengungkapkan informasi melalui internet masih pada tingkat pengungkapannya masih rendah (Siregar et.al, 2010).

Perkembangan teknologi *web-based reporting* sangat cepat terutama di negara berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi (Khadaroo, 2005). Pilihan pertama para pengguna menggunakan internet untuk memperoleh informasi adalah waktu dan memudahkan langsung untuk mendapatkan dokumen yang diinginkan. Media utama yang digunakan oleh investor maupun analis keuangan adalah internet untuk memperoleh informasi keuangan dan non keuangan (Chaundry dan Alansari, 2012).

Perkembangan teknologi *web-based reporting* sangat berkembang cepat terutama di negara berkembang karena diiringi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (Khadaroo, 2005). *Web-based disclosure* merupakan pengungkapan yang sifatnya sukarela karena perusahaan hanya melakukan transfer informasi melalui internet dan belum ada aturan mengenai pengungkapan informasi dalam website (Prabowo dan Angkoso, 2006). Namun dengan berkembangnya lingkungan di era teknologi informasi, internet merupakan solusi dalam mendapatkan informasi karena dengan tersedianya teknologi seperti: *hypertext technology*, *search engine* dan *intelligent agents* yang memungkinkan akan mengurangi informasi yang berlebihan (Baldwin & Williams, 1999).

Penelitian mengenai pengungkapan informasi perusahaan dengan menggunakan internet sudah dilakukan di negara asia (Dutta dan Bose, 2008; Khadaroo, 2005, Davey dan Homkajohn, 2004; Marston dan Wu, 2000). Di Indonesia penelitian yang sejenis sudah dilakukan oleh Almilia dan Budisusetyo (2008) mengenai kualitas *Internet Financial Reporting (IFR)* pada 19 bank pada perusahaan yang termasuk LQ 45. Penelitian Prabowo dan Angkoso (2006) dilakukan pada perusahaan manufaktur untuk mengetahui *web-based reporting*, keterbatasan dalam penelitian ini masih mengukur *index web-based reporting* dengan 34 item yang masih terbatas, seperti pengungkapan yang berkaitan dengan *plant volume* dan *suppliers* yang kurang relevan jika digunakan untuk perusahaan jasa. Penelitian Siregar et.al (2010) meneliti CIR di perusahaan yang listing pada Indonesia Stock Exchange (ISX), dengan keterbatasan CIR index yang mungkin belum komperhensif dan belum membahas variabel seperti struktur kepemilikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan CIR index, item menggunakan CIR index yang melengkapi item dari peneliti sebelumnya, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi CIR seperti ukuran perusahaan, *foreign listing*, profitabilitas, leverage dan struktur kepemilikan . Penelitian ini dilakukan perusahaan yang listing Indonesia Stock Exchange (ISX) yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 tahun 2012.

2. Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Dua teori utama yang mendasari peneltian ini adalah *agency theory* dan *signaling theory*. *Agency theory* dikaitkan dengan *corporate disclosure* menjadi penting terutama mengenai *agency cost*, dalam pengungkapan yang sifatnya sukarela, manajemen dapat mengungkapkan kegiatannya seperti informasi profitabilitas, leverage, ukuran perusaan maupun struktur kepemilikan (Jansen dan Meckling, 1976). Dalam *signaling theory* dikaitkan dengan

pengungkapan sukarela, perusahaan dan manajer dapat memberikan informasi mengenai kualitas dan kinerja perusahaan (Healy dan Palepu, 2001).

2.1 Ukuran Perusahaan dan *Corporate Internet Reporting*

Perusahaan yang besar kegiatannya lebih kompleks, sehingga harus memberikan informasi yang lebih dibandingkan perusahaan yang tidak besar kepada stakeholders dengan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Perusahaan yang besar memiliki *political cost* yang tinggi, sehingga perusahaan yang besar untuk dapat menarik perhatian para *regulatory agencies*, dengan mengungkapkan informasi secara sukarela untuk mengurangi *regulatory agencies* (Watt dan Zimmermann, 1978).

Dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Internet Reporting* (Uyar, 2012; Alali dan Romero, 2012, Marston dan Polei, 2004; Brennar dan Hourihan, 2000; Prabowo dan Angkoso, 2006).

H1: *Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Internet Reporting.*

2.2 Profitabilitas dan *Corporate Internet Reporting*

Dalam *signaling theory*, perusahaan yang menunjukkan kinerja keuangannya dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan *gain capital* dengan biaya yang lebih murah melalui pengungkapan sukarela melalui internet (Marston dan Polei, 2004). Jika perusahaan memiliki informasi *bad news*, perusahaan kecenderungan untuk tidak mengungkapkan kepada publik, sedangkan kebalikannya jika perusahaan memiliki *good news* maka perusahaan akan mengungkapkan informasi secara sukarela (Lev dan Penman, 1990). Perusahaan dengan memiliki profitabilitas yang tinggi merupakan *good news* sehingga perusahaan akan mengungkapkan informasinya kepada publik.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Internet Reporting* (Homayoun dan Rahman, 2010; Prabowo dan Angkoso, 2006; Siregar et.al, 2010)

H2: *Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Internet Reporting.*

2.3 Leverage dan *Corporate Internet Reporting*

Hasil observasi menunjukkan dengan debt-equity ratio dapat menciptakan *agency cost*. Manajemen akan mengungkapkan laporan secara sukarela melalui internet untuk menunjukkan kepada kreditor sehingga dapat melihat kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Debreceny et al, 2002). *Agency cost* yang tinggi secara proposional menunjukkan debt yang tinggi dalam struktur modalnya. Dengan leverage yang tinggi, lenders dan shareholders akan memerlukan informasi bagaimana aset perusahaan dapat memenuhi kewajibannya (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan tinggi level pengungkapan akan mengurangi ketidakpastian dari perusahaan dan mengurangi risiko perusahaan dari sorotan para investor.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan dalam *Corporate Internet Reporting* (Ettedge et al, 2002; Aly et al, 2010; Prabowo dan Angkoso, 2008)

H3: *Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Internet Reporting.*

2.4 Growth dan *Corporate Internet Reporting*

Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi akan mengurangi informasi asimetri dengan pengungkapan sukarela sebagai sarana pengungkapan, termasuk dengan menggunakan media internet. Laporan keuangan yang masih tradisional tidak efektif dan efisien, tidak dapat mengungkapkan intangible asset, karena pengungkapannya terbatas

(Debreceny et.al, 2002). Pertumbuhan yang tinggi dapat direfleksikan dengan intangible aset seperti teknologi, strategi perusahaan dan sumber daya manusia (Lev dan Sougiannis, 1999)

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh antara pertumbuhan terhadap pengungkapan dalam *Corporate Internet Reporting* (Alali dan Romero, 2012, Siregat et.al, 2010, Debreceny et al, 2002)

H4: *Growth berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Internet Reporting.*

2.5 *Foreign Listing dan Corporate Internet Reporting*

Perusahaan yang melakukan *foreign listing* akan mengungkapkan informasi yang lebih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan *foreign listing* karena untuk mengurangi asimetri informasi bagi investor lokal dan investor luar negeri (Debreceny et.al, 2002). Perusahaan yang listing di luar negeri diharuskan melakukan pengungkapan tambahan dan akan menyediakan informasi yang lebih dalam *annual report* dibandingkan perusahaan yang tidak diatur oleh aturan internasional (Cooke, 1992). Hal tersebut searah dengan teori bahwa perusahaan akan berusaha memperoleh modal dengan cost yang murah, dengan perusahaan listing akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan modal dengan biaya yang rendah.

Penelitian menunjukkan bahwa *Foreign Listing* berpengaruh terhadap pengungkapan dalam *Corporate Internet Reporting* (Aly, 2004; Marston dan Polei, 2004; Xiao et.al, 2004; Debreby et al, 2002; Siregar et al, 2010)

H5: *Foreign Listing berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Internet Reporting.*

2.6 Struktur Kepemilikan dan *Corporate Internet Reporting*

Investor yang memiliki presentase kepemilikan yang kecil akan memiliki akses informasi perusahaan yang terbatas. Dengan asumsi investor akan mendapatkan informasi melalui internet, konsekuensinya perusahaan seharusnya memberikan informasi yang lebih melalui internet (Martson dan Polei, 2004). Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang minoritas biasanya akan meningkatkan pengungkapan informasi sehingga tidak akan menimbulkan *monitoring cost* dan asimetri informasi yang sudah diidentifikasi dalam masalah agency (Chen et al,2006).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap *Corporate Internet Reporting* (Alali dan Romero,2012; Bubaker et.al,2012)

H5: *Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Internet Reporting.*

3. Metode Penelitian

3.1 Sampel dan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang listing pada Indonesia Stock Exchange yang tergabung dalam kompas 100 pada tahun 2012. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan kriteria : (1) Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah, (2) Website perusahaan tidak dalam perbaikan. Sampel perusahaan berjumlah 66 perusahaan.

Data penelitian menggunakan menggunakan informasi yang disajikan website perusahaan untuk mengetahui ICR index termasuk *annual report* yang terdapat dalam Indonesian Capital Market Directory.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel dependent adalah CIR, dengan melakukan ceklis pada kategori atas konten, ketepatan waktu dan presentasi. Item CIR berjumlah 128 item, merupakan pengembangan dari CIR index yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya (Xiao et al, 2004; Marston and Poley, 2004; Debreceeny et al, 2002; Siregar et al, 2010).

Variabel independent yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, growth, foreign listing dan struktur kepemilikan, pengukuran masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan menggunakan natural log aset
2. Profitabilitas menggunakan Return On Equity
3. Leverage menggunakan total debt to total asset
4. Growth diukur dengan menggunakan PBV (price-to-book value)
5. Foreign listing menggunakan variabel dummy, jika perusahaan listing selain di ISE diberi nilai 1 dan perusahaan yang hanya listing di ISE diberi nilai 0.
6. Struktur kepemilikan menggunakan presentase kepemilikan manajerial dan presentase kepemilikan institusi.

3.3 Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier, model regresi dari penelitian ini sebagai berikut :

$$CIR = a_0 + a_1SIZE + a_2PROF + a_3LEV + a_4GROWTH + a_5FRN_LIST + a_5STR_KPL + e$$

Uji asumsi klasik dan normalitas digunakan untuk dapat melakukan uji regresi yaitu uji multikolinearitas, autokolasi, heterokedastisitas dan normalitas.

4. Hasil Penelitian

Dari tabel 4.1 menunjukkan statistik deskriptif untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Rata-rata hasil CIR index dari 128 item menunjukkan nilai sebesar

76,8%. Jika dilihat dari jenis perusahaan, perbankan menunjukkan nilai rata-rata pengungkapan CIR yang cukup tinggi. Perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang secara operasional menggunakan teknologi sehingga dalam pengungkapan informasi keuangan maupun non keuangan rata-rata lebih lengkap dibanding jenis perusahaan lainnya dalam pengungkapan CIR. Selain perusahaan perbankan, perusahaan real estate menunjukkan tingkat pengungkapan yang cukup tinggi.

Berdasarkan ukuran perusahaan, standar deviasi dengan nilai maksimum dan minimum yang tidak terlalu bervariasi dalam sampel penelitian. Ukuran perusahaan menunjukkan nilai rata-rata yang hampir sama sehingga sampel dalam penelitian ini ukuran perusahaan dengan pengukuran total aset dapat digeneralisasi.

Dalam sampel penelitian rata-rata profitabilitas menunjukkan sekitar 7,7% menunjukkan tingkat yang masih rendah. Rata-rata untuk growth dari sampel penelitian menunjukkan nilai PVB positif sebesar 3,110. Perusahaan yang *foreign listing* sebesar 12,1%, nilai tersebut menunjukkan hanya sedikit perusahaan yang melakukan *foreign listing*.

Berdasarkan tingkat leverage sebesar 49%, sedangkan kepemilikan institusional dengan pengukuran menggunakan kepemilikan institusional menunjukkan nilai sebesar 60,8%, sedangkan kepemilikan manajemen menunjukkan nilai yang sangat rendah yaitu sebesar 1,3%.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	66	25,635	34,086	30,37716	1,533177
LEVERAGE	66	,0006	,9210	,491881	,2408719
PROFITABILITAS	66	-,3468	,4038	,077721	,0917806
INSTIUSIONAL	66	,1700	,9898	,608786	,2016516
MANAJERIAL	66	,0000	,2754	,013675	,0489272
FOREIGN	66	,0000	1,0000	,121212	,3288746
GROWTH	66	,2200	40,0900	3,110303	4,9040749
INDEX	66	,5300	,9300	,768333	,0918960
Valid N (listwise)	66				

Tabel 4.2
Hasil Uji Regresi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,626 ^a	,392	,319	,0758442	1,504

a. Predictors: (Constant), GROWTH, SIZE, FOREIGN, MANAJERIAL, INSTITUSIONAL, LEVERAGE, PROFITABILITAS

b. Dependent Variable: INDEX

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,215	7	,031	5,346	,000 ^b
	Residual	,334	58	,006		
	Total	,549	65			

a. Dependent Variable: INDEX

b. Predictors: (Constant), GROWTH, SIZE, FOREIGN, MANAJERIAL, INSTITUSIONAL, LEVERAGE, PROFITABILITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.487	,244		-1,995	,051
SIZE	,043	,009	,716	4,914	,000
LEVERAGE	-.125	,058	-.326	-2,150	,036
PROFITABILITAS	-.052	,159	-.052	-.326	,746
INSTITUSIONAL	,007	,053	,014	,124	,902
MANAJERIAL	,066	,221	,035	,297	,768
FOREIGN	,001	,031	,004	,033	,974
GROWTH	,004	,003	,214	1,505	,138

a. Dependent Variable: INDEX

Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji regresi, untuk hipotesis 1 yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Internet Reporting*. Perusahaan yang besar akan mengungkapkan informasi yang lebih untuk menjaga reputasi dan image perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1978). Perusahaan yang besar membutuhkan pengungkapan yang lebih banyak karena cakupan perdagangannya yang luas (Brennan dan Hourigan, 1999). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Uyar, 2012; Alali dan Romero, 2012, Marston dan Polei, 2004; Brennar dan Hourihan, 2000; Prabowo dan Angkoso, 2006; Siregar et.al, 2010) bahwa ukuran perusahaan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Internet Reporting*.

Hasil uji hipotesis 2 tidak menunjukkan adanya pengaruh antara profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Internet Reporting*. Perusahaan publik mungkin tidak memerlukan informasi profitabilitas yang harus dipublikasikan dalam web site perusahaan (Siregar et.al, 2010). Penelitian ini konsisten dengan penelitian (Uyar, 2012; Marston dan Polei, 2004; Alali dan Romero, 2012; Brennar dan Hourigan, 2000) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Internet Reporting*.

Untuk hipotesis 3 menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Internet Reporting*. Hasil penelitian ini memperkuat teori mengenai *agency*

conflict antara shareholders dengan debtholders. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan debt hanya berkontribusi sebesar 49% dari total capital dapat membuat debtholders lebih mudah menghadapi masalah agency. Penelitian ini konsisten dengan penelitian (Ettedge et al, 2002; Aly et al, 2010; Prabowo dan Angkoso, 2008) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Internet Reporting*.

Hasil uji hipotesis untuk hipotesis 4, menunjukkan growth tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Internet Reporting*. Dalam penelitian ini bahwa perusahaan dengan growth yang tinggi tidak memerlukan pengungkapan dalam web perusahaan. Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh antara growth dengan *Corporate Internet Reporting*.

Hipotesis 5 hasil menunjukkan bahwa foreign listing tidak berpengaruh terhadap *Corporate Internet Reporting*. Perusahaan yang melakukan multilisting tidak menunjukkan pengungkapan CIR yang tinggi, dalam penelitian ini perusahaan yang multilisting menunjukkan pengungkapan yang lebih rendah dibanding perusahaan yang hanya listing di ISE. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Boubeker et al (2012) *foreign listing* tidak berpengaruh terhadap *Corporate Internet Reporting*.

Hasil penelitian untuk struktur kepemilikan, menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Internet Reporting*. Perusahaan lebih banyak dimiliki oleh institusi sehingga pengungkapan CIR menunjukkan pengungkapan yang tinggi, hal ini diindikasikan kepemilikan yang dimiliki oleh institusi memiliki akses informasi yang mudah ke perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian (Marston dan Polei, 2004).

5. Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan Penelitian

Pengungkapan CIR pada perusahaan Kompas 100 pada tahun 2012 menunjukkan tingkat pengungkapan yang cukup, seharusnya perusahaan Kompas 100 dapat menunjukkan level CIR yang tinggi karena sudah terpilih perusahaan yang baik sehingga digolongkan ke dalam indeks tersebut. Dari hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *corporate internet reporting* yang memiliki pengaruh signifikan adalah ukuran perusahaan dan leverage.

Saran dari hasil penelitian ini sebaiknya ada peraturan yang mengatur informasi yang seharusnya diungkapkan dalam website perusahaan, karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi dimana semakin meningkat pengguna internet dimana pengguna akan mencari informasi melalui internet.

Keterbatasan penelitian ini sebaiknya meneliti seluruh perusahaan yang listing di ISE, pada penelitian ini terbatas pada perusahaan yang tergabung dalam index Kompas 100. Selain itu untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan karakteristik perusahaan menjadi variabel kontrol sehingga akan menghasilkan model penelitian yang berbeda dan menambahkan variabel seperti klasifikasi industri, systematic risk.

6. Referensi

- Alali, Fatima., Romero, Silviana. 2012. The use of The Internet for Corporate Reporting in The Mercosur (Southern Common Market : The Argentina Case. *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*.pp 157-167
- Almilia, L.S. dan Budisusetyo, S. 2008. Corporate Internet Reporting: An Indonesia Example. *The 1st Parahyangan International Accounting & Business Conference*.
- Aly, Doaa., Simon Jon., Hussihey Khaled. 2010. Determinants of Corporate Reporting : Evidence from Egypt. *Managerial Auditing Journal*.pp 182-202.
- Boubaker, Sabri., Lakhal, Faten., Nekhili, Mehdi. 2012. The Determinants of Web-based Corporate Reporting in France. *Managerial Auditing Journal*. Pp 126-155.
- Brennan, Niamh., Hourigan, Denis. 1999. Corporate Reporting on The Internet by Irish Companies. *Irish Accounting Review*. Pp 37-68.
- Chen, Sh, Chen, X., & Cheng,Q. 2006. Do family firms provide more or less voluntary disclosure? http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=999785/16.09.2008

- Cooke, TE. 1992. The impact of size, stock market listing and industry type on disclosure in the annual report of Japanese listed corporation. *Account Bus Res.* Pp 229-237
- Davey, H. dan Homkajohn, K. 2004. Corporate Internet Reporting: An Asian Example, *Problems and Perspectives in Management*, 2, 211-227.
- Debreceeny, R., Gray, G.L., & Rahman, A. 2002. The Determinants of Internet Financial Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 21, 371-394.
- Dutta, P., & Bose, S. 2008. Web-based corporate reporting in Bangladesh: An exploratory study. Working paper www.ssrn.com
- Ettredge, M., Richardson, V.J., & Scholz, S. 2002. Dissemination of Information for Investors at Corporate Web Sites. *Journal of Accounting and Public Policy*, 21, 357-369.
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Healy, Paul M., and Krishna G. Palepu., 2001, Information Assymetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature. *Journal of Accounting and Economics*. 2: page 373- 381.
- Homagoun, Saeid., Rahman, Rashidah Abdul. 2010. Determinants of Web Based Disclosure Reporting Among Top Public Listed Companies in Malaysia. *International Journal of Arts and Sciences*. Pp 187-212.
- Internet World Statistics. 2013. Asia population statistics. Available at: <http://www.internetworldstats.com> [Accessed March 13, 2013]
- Khadaroo, M.I. 2005. Business Reporting on the Internet in Malaysia and Singapore: A Comparative Study. *Corporate Communications*, 10 (1), 58-68.
- Lev B, Penman, SH. 1990. Voluntary forecast disclosure, nondisclosure and stock price. *Account Res.* Pp.49-76
- Lev, B., Souginnis, T. 1999. Penetrating the Book-to Market Box: The R and D Effect. *Journal of Business Finance and Accounting*. Pp.419-449.
- Marston, C. & Polei, A. 2004. Corporate Reporting on the Internet by German Companies. *International Journal of Accounting Information Systems*, 5, 285-311.
- Marston, C., & Wu, W. 2000. Financial Reporting on the Internet by leading Japanese Companies. *The Scottish Regional Conference of the British Accounting Association Aberdeen*.
- Prabowo, R., & Angkoso, K. S. 2006. Factors influencing the extent of web-based disclosure: An empirical analysis of Indonesian manufacturing firms. *Journal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 92-98.
- Siregar, Silvia Veronica., Prasetya, Machmudin Eka., Harahap, Siti Nurwahyuningsih. 2010. Determinants of Internet Financial Reporting on Listed Companies in Indonesia. *The 3rd Accounting and 2nd Doctoral Colloquium University of Indonesia*.
- Uyar, Ali. 2011. Determinants of Corporate Reporting on The Internet : An Analisisi od Companies Listed Istanbul Stock Exchange. *Managerial Auditing Journal*.pp 87-104.
- Waats, RL., Zimmermann, JL. 1978. Towards a positive of the determination of accounting standards. *Accounting Review*. Pp 112-34
- Xiao, J.Z., Yang, H., & Chow, C.W. 2004. The Determinants and Characteristics of Voluntary Internet-Based Disclosures by Chinese Listed Companies. *Journal of Accounting and Public Policy*, 23, 191 - 225.



Lampiran 1 (item pengungkapan CIR)

Accounting and Finance Information

1. posisi keuangan di periode terakhir
2. laba rugi di periode terakhir
3. laporan arus kas di periode terakhir
4. laporan perubahan ekuitas di periode terakhir
5. annual report di periode terakhir
6. laporan auditor di periode terakhir
7. laporan auditor yang ditandatangani pada periode terakhir
8. catatan atas laporan keuangan di periode terakhir
9. posisi keuangan di periode sebelumnya
10. laba rugi di periode sebelumnya
11. laporan arus kas di periode sebelumnya
12. laporan perubahan ekuitas di periode sebelumnya
13. annual report di periode sebelumnya
14. laporan auditor di periode sebelumnya
15. laporan auditor yang ditandatangani pada periode sebelumnya
16. catatan atas laporan keuangan di periode sebelumnya
17. laporan posisi keuangan interim di periode terakhir
18. laporan laba rugi interim di periode terakhir
19. laporan arus kas interim di periode terakhir
20. laporan perubahan ekuitas interim di periode terakhir
21. catatan atas laporan keuangan interim di periode terakhir
22. laporan posisi keuangan interim di periode sebelumnya
23. laporan laba rugi interim di periode sebelumnya
24. laporan arus kas interim di periode sebelumnya
25. laporan perubahan ekuitas interim di periode sebelumnya
26. catatan atas laporan keuangan interim di periode sebelumnya
27. harga saham saat ini
28. harga saham untuk periode sebelumnya
29. dividen yg dibagikan untuk periode terakhir
30. dividen yang dibagikan untuk periode sebelumnya
31. kinerja perusahaan highlight
32. GAAP yang menjadi laporan keuangan di periode terakhir
33. Laporan segmentasi berdasarkan bisnis usaha pada periode terakhir
34. Laporan berdasarkan daerah di periode terakhir

Corporate Governance information

35. struktur kepemilikan
36. bagan organisasi
37. Informasi mengenai direksi
38. Informasi mengenai dewan komisaris
39. Informasi mengenai komite audit

40. Renumerasi untuk direksi dan dewan komisaris
41. Resolusi dari hasil rapat pemegang saham
42. Misi dan visi perusahaan
43. Pengungkapan atas risiko perusahaan
44. Kode etik
45. Artikel mengenai perusahaan
46. Analist forecast
47. CV dari Direksi dan dewan komisaris
48. Laporan rating atas corporate governance

Informasi CSR dan SDM

49. Halaman khusus untuk CSR
50. Laporan CSR
51. Kebijakan mengenai lingkungan
52. Informasi mengenai daur ulang dan hemat energy
53. Profil karyawan
54. Informasi mengenai Pelatihan karyawan
55. Informasi mengenai donator dan sponsorship
56. Informasi mengenai kualitas produk dan keamanan
57. Mudah dalam mengakses atau adanya fasilitas hyperlink untuk mendapatkan informasi CSR
58. Nama officer CSR
59. Email untuk CSR officer
60. No telepon CSR officer
61. Alamat CSR officer
62. Link dari CSR ke home page

Contact ke Investor relation officer (IRO) dan Customer relation officer (CRO)

63. Nama IRO
64. Email IRO
65. No telepon IRO
66. Alamat IRO
67. Informasi mengenai pelayanan investor secara on line
68. Nama CRO
69. Email CRO
70. No telepon CRO
71. Alamat CRO
72. Website dalam versi bahasa inggris
73. Annual report dalam bahasa inggris
74. Kalender keuangan
75. Company profile
76. Pelayanan penjualan barang dan jasa secara on line (e-commerce)
77. List produk yang terakhir
78. Link kepada homepage IRO
79. Link kepada homepage CRO

80. Homepage memiliki alamat intuitive
81. Pembahasan mengenai kualitas produk dan keamanan

Timeliness

82. Press releases
83. Ketersediaan fasilitas untuk mengupload di web site untuk informasi laporan keuangan tahunan
84. Ketersediaan fasilitas untuk mengupload di web site untuk informasi laporan keuangan interim
85. Ketersediaan fasilitas untuk mengupload di web site untuk annual report
86. Tanggal di website terupdate
87. Memiliki frekuensi update
88. Untuk pertanyaan dan mengirimkan secara online atau email akan terkirim langsung (sent out)
89. Charts untuk forecast

Presentation

90. Laporan posisi keuangan tahunan disajikan dalam format PDF dan HTML
91. Laporan laba rugi tahunan disajikan dalam format PDF dan HTML
92. Laporan arus kas tahunan disajikan dalam format PDF dan HTML
93. Laporan perubahan ekuitas disajikan dalam format PDF dan HTML
94. Catatan atas laporan keuangan tahunan disajikan dalam format PDF dan HTML
95. Laporan posisi keuangan interim disajikan dalam format PDF dan HTML
96. Laporan laba rugi interim disajikan dalam format PDF dan HTML
97. Laporan arus kas interim disajikan dalam format PDF dan HTML
98. Laporan perubahan interim disajikan dalam format PDF dan HTML
99. Catatan atas laporan keuangan interim disajikan dalam format PDF dan HTML
100. Annual report disajikan dalam format PDF
101. Data keuangan disajikan dalam processable format (contoh excel)
102. Site map

Technology

103. Notifikasi minimum permintaan dalam melakukan browser
104. Pelayanan bahasa
105. Tampilan dalam bentuk grafik
106. Animasi grafik atau flash
107. Sound files
108. Ketersediaan webcast
109. Tersedianya XBRL
110. Bukti waktu tanggal terakhir updates
111. Video
112. Search box
113. Chat room
114. Pull down menu
115. Klik over menu

116. Print in friendly format
117. Link to stock exchange web sites
118. Link to kantor pusat atau anak perusahaan
119. Home page bisa diakses dalam waktu kurang dari sepuluh detik

User Support

120. help & FAQs
121. internal search engine/search box
122. ketersediaan untuk download dalam bentuk word, ppt dan word
123. satu kali klik ke halaman investor link
124. satu kali klik untuk mendapatkan press release
125. satu kali klik untuk mendapatkan laporan keuangan
126. contact us
127. mailing list
128. link untuk ke site lain

Lampiran 2 (CIR index)

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	INDEX
1	AALI	ASTRA AGRO LESTARI	0.66
2	AISA	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	0.58
3	AKRA	AKR CORPORINDO	0.75
4	ANTM	ANEKA TAMBANG	0.83
5	APLN	AGUNG PODOMORO LAND	0.67
6	ASII	ASTRA INTERNATIONAL	0.85
7	AUTO	ASTRA OTOPARTS	0.78
8	BBCA	BANK CETRAL ASIA	0.81
9	BBKP	BANK BUKOPIN	0.73
10	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA	0.85
11	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA	0.9
12	BBTN	BANK TABUNGAN NEGARA	0.75
13	BDMN	BANK DANAMON	0.88
14	BHIT	BHAKTI INVESTAMA	0.84
15	BIPI	BENAKAT PETROLEUM ENERGY	0.74
16	BISI	BISI INTERNATIONAL	0.75
17	BJBR	BANK BJB	0.81
18	BKSL	SENTUL CITY	0.64
19	BMRI	BANK MANDIRI	0.93
20	BMTR	GLOBAL MEDIACORN	0.8
21	BNBR	BAKRI & BROTHERS	0.77
22	BTEL	BAKRIE TELECOM	0.8
23	CMNP	CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA	0.83
24	CPIN	CHAROEN POKPHAND INDONESIA	0.77
25	CTRA	CIPUTRA DEVELOPMENT	0.81
26	DILD	INTILAND DEVELOPMENT	0.8
27	ELSA	ELNUSA	0.83
28	ELTY	BAKRIELAND DEVELOPMENT	0.66
29	EXCL	XL AXIATA	0.74
30	GGRM	GUDANG GARAM	0.64
31	ICBP	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	0.81
32	IMAS	INDOMOBIL SUKSES INTERNATIONAL	0.76
33	INDF	INDOFOOD SUKSES MAKMUR	0.87
34	INTA	INTRACO PENTA	0.67
35	INTP	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	0.84
36	ISAT	INDOSAT	0.78
37	JPFA	JAPFA COMFEED INDONESIA	0.53
38	JPRS	JAYA PARI STEEL	0.58
39	JSMR	JASA MARGA	0.82
40	KIJA	KAWASAN INDUSTRI JABABEKA	0.78



41	KLBF	KALBE FARMA	0.85
42	LPCK	LIPPO CIKARANG	0.72
43	LPKR	LIPPO KARAWACI	0.84
44	LSIP	PP LONDON SUMATERA INDONESIA	0.81
45	MAIN	MALINDO FEEDMILL	0.66
46	MAPI	MITRA ADI PERKASA	0.68
47	MLPL	MULTIPOLAR	0.69
48	MNCN	MEDIA NUSANTARA CITRA	0.84
49	MPPA	MATAHARI PUTRA PRIMA	0.79
50	MYOR	MAYORA INDAH	0.6
51	PNBN	BANK PANIN	0.8
52	PTBA	BUKIT ASAM	0.82
53	PTPP	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	0.77
54	PWON	PAKUWON JATI	0.63
55	PYFA	PYRIDAM FARMA	0.59
56	SGRO	SAMPURNA AGRO	0.79
57	SIMP	SALIM IVOMAS PRATAMA	0.86
58	SMCB	HOLCIM INDONESIA	0.84
59	SMGR	SEMEN GRESIK	0.84
60	SMRA	SUMARECON AGUNG	0.73
61	SSIA	SURYA SEMESTA INTERNUSA	0.73
62	TBIG	TOWER BERSAMA INFRASTRUKTUR	0.74
63	TINS	TIMAH	0.88
64	TLKM	TELKOM INDONESIA	0.88
65	UNTR	UNITED TRACTORS	0.88
66	UNVR	UNILEVER INDONESIA	0.9

Faktor-Faktor Determinan Pemilihan Auditor Eksternal Berkualitas

ITA TRISNAWATI

STIE Trisakti

ANCELLA ANITAWATI HERMAWAN*

Universitas Indonesia

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh corporate governance, kompleksitas perusahaan, kebutuhan terhadap pendanaan eksternal, serta tingkat leverage terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode logistic regression dengan menggunakan sampel 203 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan good corporate governance memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menggunakan auditor eksternal dengan kualitas audit yang tinggi. Selain itu, perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang meningkat memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk memilih auditor eksternal berkualitas. Sedangkan kebutuhan pendanaan eksternal dan tingkat leverage tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas.

Kata Kunci: Corporate Governance Index, Kompleksitas Perusahaan, Kebutuhan Pendanaan Eksternal, Leverage, Kualitas Auditor Eksternal.

* Corresponding author: ancella.hermawan@hotmail.com

1. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 menyebabkan hilangnya kepercayaan publik dan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Krisis ini bermula dari Thailand di bulan Juli 1997 dan berdampak pada melemahnya perekonomian di Asia Tenggara. Dampak dari krisis tersebut adalah banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Krisis ekonomi tidak hanya terjadi di Asia, melainkan juga di negara maju yaitu seperti di Amerika Serikat, melalui kasus Enron dan Worldcom di tahun 2001 dan 2002, dan masih banyak skandal keuangan lainnya.

Krisis ekonomi menjadi momentum bagi pelaku pasar, khususnya di Indonesia, untuk menyadari pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik. Pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep GCG melalui Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara. Kebutuhan GCG timbul berkaitan dengan *agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara manajer dan pemegang saham atau investor. Keberadaan suatu entitas dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tersebut haruslah dilindungi melalui penerapan GCG. Oleh karena itu penerapan GCG di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Penerapan GCG di Indonesia mengacu pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1999 dan terus disempurnakan mengikuti perkembangan, terakhir dikeluarkan pada tahun 2006. Pedoman ini meletakkan fokus yang kuat pada fungsi dan organ perusahaan yang didasarkan atas asas GCG dalam pelaksanaannya.

Organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya. Salah satu komite yang wajib dibentuk Dewan Komisaris adalah Komite Audit (KNKG, 2006).

Salah satu tanggung jawab Komite Audit di bidang *corporate governance* seperti yang diatur dalam peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 (2004) adalah memastikan bahwa pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku sehingga dihasilkan laporan keuangan yang kredibel bagi para penggunanya. Laporan Komite Audit mengenai kinerja auditor eksternal dan rekomendasi mengenai pengangkatan dan pergantian auditor eksternal akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris yang bertugas mengambil keputusan dalam menentukan pemilihan auditor eksternal yang berkualitas. Fungsi audit yang dijalankan oleh auditor eksternal memiliki peran penting dalam mewujudkan *corporate governance* yang efektif dan mampu memberikan nilai tambah saat mereka dapat mempertahankan kredibilitas laporan keuangan perusahaan publik (Rezaee, 2009).

Pentingnya penerapan GCG melalui pemilihan auditor yang berkualitas dibuktikan melalui penelitian Klein (2002), Carcello dan Neal (2000), serta Dechow *et al.* (1996) yang menyatakan bahwa lemahnya penerapan GCG berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan yang buruk, manipulasi *earnings*, *fraud* atas laporan keuangan dan pengendalian internal yang lemah. Hal ini diungkapkan juga melalui penelitian DeAngelo (1981) yang menyatakan bahwa audit yang berkualitas terkait dengan skala auditor. Semakin besar skala suatu perusahaan, dibutuhkan kualitas audit yang tinggi melalui auditor eksternal yang

berkualitas. Jika mengacu pada *agency theory*, auditor diharapkan dapat menjadi mediator yang menjamin pengungkapan sehingga mampu mengurangi informasi asimetri (Williams, 1988). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu mekanisme GCG yang efektif, dibutuhkan auditor eksternal yang berkualitas dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan, reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan auditor eksternal yang berkualitas juga merupakan salah satu pengukuran yang digunakan manajer perusahaan untuk mengurangi *agency problem* yang muncul dalam perusahaan. *Agency problem* meningkat sehubungan dengan ukuran dan tingkat kompleksitas perusahaan yang semakin besar sehingga memiliki kebutuhan audit yang besar pula. Hal ini dibuktikan melalui penelitian Abdel-Khalik (1989) yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan akan sulit melakukan fungsi pengawasan jika ukuran perusahaan bertambah besar. Semakin besar ukuran dan tingkat kompleksitas perusahaan dapat menyebabkan meningkatnya risiko terjadinya *moral hazard* dalam perusahaan. Knechel *et al.* (2005) mengemukakan bahwa suatu proses audit dapat menyediakan keuntungan bagi perusahaan, seperti peningkatan efektivitas dan efisiensi, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan penurunan informasi asimetri. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan fungsi monitoring melalui auditor eksternal yang berkualitas, baik untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) maupun dalam hal penyajian laporan keuangan.

Faktor lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas adalah kebutuhan pendanaan eksternal. Hampir seluruh perusahaan membutuhkan pendanaan tambahan dari pihak eksternal berkaitan dengan pembiayaan dan pengembangan kegiatan operasionalnya. Untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan eksternal tersebut, perusahaan membutuhkan laporan keuangan yang kredibel untuk meyakinkan para investor yang akan dan telah menginvestasikan modalnya ke perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang kredibel dipercaya harus diaudit oleh auditor yang

berkualitas untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, terutama perusahaan yang memiliki transaksi yang kompleks (Knechel *et al.*, 2005). Penelitian Revier dan Schroe (2009) memberikan dukungan yang menyatakan bahwa perusahaan yang bergantung kepada pendanaan eksternal cenderung memilih auditor *Big Four* dalam mengaudit laporan keuangannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada suatu jaminan keandalan laporan keuangan yang diberikan oleh auditor eksternal yang berkualitas bagi para investor yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan.

Perusahaan yang sulit memperoleh tambahan dana dari investor biasanya akan mengajukan pinjaman kepada bank dan lembaga keuangan lainnya. Pinjaman (*leverage*) ini dapat menghasilkan *agency problem* antara pemegang saham dan kreditur dalam hal pelanggaran perjanjian hutang (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya pelanggaran perjanjian tersebut meningkat seiring dengan tingkat *leverage* yang tinggi sehingga dibutuhkan suatu proses audit yang memfasilitasi adanya jaminan hutang yang membatasi tindakan perusahaan, seperti tindakan perubahan *leverage*, keputusan berinvestasi dan pembayaran dividen (Smith dan Warner, 1979). Oleh sebab itu, perusahaan dalam hal ini debitur, lebih memilih auditor eksternal yang berkualitas seiring dengan peningkatan *leverage*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris di Indonesia mengenai: (1) pengaruh *corporate governance* terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas, (2) pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas, (3) pengaruh kebutuhan pendanaan eksternal terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas, dan (4) pengaruh tingkat *leverage* terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas.

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1. *Corporate Governance* dan Pemilihan Auditor Berkualitas

Salah satu penyebab *agency problem* adalah adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pihak prinsipal dan agen yang sering disebut sebagai adanya *asymmetric information*. Salah satu penyebab konflik kepentingan seperti yang dikemukakan oleh Gavius (2007) juga bisa terjadi dalam hubungan antara auditor dan manajemen. Di satu pihak, auditor ditunjuk oleh manajemen untuk melakukan audit bagi kepentingan pemegang saham, namun di lain pihak, jasa audit dibayar dan ditanggung oleh manajemen. Hal inilah yang menimbulkan benturan konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari oleh auditor. Mekanisme ini menimbulkan ketergantungan auditor kepada kliennya sehingga auditor merasa kehilangan independensinya dan harus mengakomodasi berbagai keinginan klien, terutama klien jangka panjang dengan harapan agar perikatan auditnya di masa yang akan datang tidak terputus. Dalam perspektif kepentingan ekonomi, perikatan audit jangka panjang akan membuat kedekatan dan loyalitas antara auditor dan klien. Hal ini akan menurunkan obyektifitas audit dan independensi auditor.

Kejatuhan perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom di Amerika Serikat serta krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 menjadi momentum bagi pelaku pasar untuk menyadari pentingnya implementasi *good corporate governance*. Penerapan *corporate governance* yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya manipulasi atas laporan keuangan serta dapat meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan perusahaan (Daniri, 2006). Mekanisme *corporate governance* dalam meminimumkan manajemen laba, atau dalam hal ini meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan dapat dilakukan melalui peran monitoring oleh Dewan Komisaris (Dechow, *et al.*, 1996). Hasil penelitian Dechow, *et al.* (1996) menekankan bahwa ukuran

dan independensi Dewan Komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan.

Fungsi pengawasan dan pengendalian ini dilakukan oleh Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah merekomendasikan auditor eksternal yang disampaikan kepada Dewan Komisaris demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam rangka melindungi kepentingan *stakeholders*. Adapun fungsi Komite Audit yang secara langsung berdampak terhadap auditor adalah (Mulyadi, 2002):

1. Menunjuk auditor yang melaksanakan audit tahunan terhadap laporan keuangan perusahaan.
2. Membicarakan lingkup audit dengan auditor.
3. Meminta auditor untuk melakukan komunikasi langsung mengenai masalah-masalah besar yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya.
4. Melakukan *review* laporan keuangan dan laporan audit pada saat audit selesai dilakukan.

Hal ini diperkuat dengan penelitian Balafif (2010) yang menggunakan *checklist score* yang dikembangkan oleh Hermawan (2009) untuk mengukur efektifitas komite audit terhadap pemilihan auditor eksternal berkualitas. Penelitian ini dilakukan terhadap 357 observasi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selain perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti perusahaan asuransi, sekuritas dan pemberi kredit pada tahun 2006 dan 2007 melalui model regresi logit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektifitas Komite Audit berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas (*Big Four*). Hal ini berarti mekanisme *corporate governance* yang dijalankan melalui peran dan tanggung jawab Komite Audit yang efektif berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal. Karakteristik pada perusahaan *Big Four* memungkinkan

mereka untuk memberikan hasil laporan yang berkualitas daripada non-*Big Four* dan efektifitas komite audit dapat meningkatkan kualitas laporan audit.

Fan dan Wong (2005) menyatakan bahwa adanya *conflict of interest* antara pemilik dan pemegang saham minoritas memiliki kontribusi dalam memicu tingginya biaya pendanaan dan *agency problem* yang semakin besar. Hal ini dapat diakibatkan oleh mekanisme *corporate governance* melalui *board of director* dan pengambilalihan yang lemah. Oleh sebab itu, Fan dan Wong menguji apakah auditor eksternal dapat melakukan proses monitoring dan *bonding mechanism* untuk mengatasi *agency problem* yang muncul. Sampel pengujiannya diambil dari perekonomian 8 negara Asia Timur, termasuk Indonesia menggunakan model regresi logit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki *agency problem* dilihat dari struktur kepemilikan di Asia Timur lebih cenderung menggunakan jasa auditor *Big Five*, namun tidak demikian dengan perusahaan di Amerika atau Kanada yang memiliki struktur kepemilikan yang lebih tersebar dan mekanisme *governance* yang lebih beragam. Secara garis besar, auditor *Big Five* memiliki peran penting dalam mekanisme *corporate governance*.

Kebutuhan jasa auditor timbul dari keadaan pihak eksternal perusahaan yang memerlukan jasa pihak ketiga yang independen untuk menilai keandalan pertanggungjawaban informasi keuangan yang disajikan manajemen dalam laporan keuangannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Audit merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengurangi informasi asimetri yang terdapat antara manajer dan pemegang saham melalui pengesahan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yakni auditor. Pengguna laporan keuangan, terutama pemegang saham sangat bergantung kepada keandalan laporan yang dibuat auditor atas laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam proses pengauditan, auditor perlu mempertahankan kualitas audit yang dilakukannya. Berkaitan dengan kualitas audit, DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan

bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran dalam sistem akuntansi berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan auditor, sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung terhadap dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan bergantung kepada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. Jika auditor dianggap tidak memiliki independensi oleh para pengguna laporan keuangan, maka pendapat auditor dalam laporan audit tidak akan memberikan nilai kepada para pengguna laporan keuangan (Meutia, 2004).

Audit yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Wibowo dan Rossieta (2009) mencoba melakukan pengujian mengenai faktor determinasi kualitas audit yang diukur menggunakan *earnings surprise benchmark* yang dikembangkan dari pengukuran kualitas audit model Carey dan Simnett yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia. Faktor yang diuji terdiri dari masa penugasan audit, ukuran kantor akuntan publik serta regulasi audit. Variabel kontrol yang digunakan adalah masa transisi penerapan regulasi rotasi auditor. Model penelitian yang dikembangkan menggunakan teknik regresi *binary logistic*, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dari perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2000 sampai 2007. Hasil pengujian empirisnya menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik dan regulasi audit merupakan faktor determinasi penting yang secara konsisten berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang untuk memberikan kualitas audit tinggi akan meningkat seiring dengan ukuran kantor akuntan publik yang semakin besar. Demikian pula dengan adanya regulasi audit akan memicu peningkatan audit yang lebih berkualitas dibandingkan tidak adanya regulasi audit.

Salah satu cara untuk mengukur kualitas hasil pekerjaan auditor adalah melalui kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Menurut Bedard dan Michelene (1993) ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah keputusan secara umum, yaitu:

1. *Outcome oriented*

Bagi pendekatan yang berorientasi hasil, diukur melalui hasil audit, yaitu melalui laporan audit dan laporan keuangan. Ukuran yang dapat diobservasi dalam laporan audit adalah kecenderungan auditor untuk mengeluarkan opini *going concern* ketika perusahaan bangkrut. Sedangkan ukuran yang dapat diobservasi dalam laporan keuangan adalah kualitas laba.

2. *Process oriented.*

Untuk pendekatan yang berorientasi proses, kualitas keputusan diukur dengan tingkat kepatuhan auditor terhadap *General Acceptance on Auditing Standards (GAAS)* dan tingkat spesialisasi auditor dalam industri tertentu.

Jiraporn (2007) melakukan penelitian yang menguji hubungan antara *agency cost* yang diukur melalui besarnya hak pemegang saham terhadap pemilihan auditor *Big Six*. Perusahaan yang terdiri dari pemegang saham yang dibatasi haknya cenderung memiliki *agency cost* yang besar karena para manajer dapat menekan hak minoritas dan mengutamakan kepentingan pribadi mereka dibandingkan kepentingan pemegang saham. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hak pemegang saham yang rendah cenderung memiliki *agency cost* yang besar dan lebih memilih Arthur Andersen yang cenderung lebih *permissive* di antara auditor *Big Six*. Dengan kata lain, auditor yang dianggap memiliki kualitas audit yang lebih baik mampu mengatasi *agency problem* yang timbul.

Salah satu penelitian mengenai auditor yang berkualitas dilakukan oleh Meutia (2004). Penelitiannya menguji hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba serta mengidentifikasi independensi auditor yang diukur dengan indikator *non-audit service* dan masa jabatan auditor terhadap hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan penyebaran kuisioner

kepada kantor akuntan publik serta data sekunder melalui perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selain industri keuangan pada tahun 1998 sampai dengan 2001. Dengan menggunakan pemilihan sampel berstrata berdasarkan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *Big Five* dan non-*Big Five*, diperoleh 131 perusahaan sebagai sampel. Untuk variabel manajemen laba, diukur dengan perhitungan *absolute discretionary accruals* melalui model Jones yang dimodifikasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *Big Five* memiliki *absolute discretionary accruals* yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik non-*Big Five*. Hal ini berarti auditor dari kantor akuntan publik *Big Five* lebih berkualitas dalam mendeteksi manajemen laba dalam suatu perusahaan karena lebih berpengalaman sehingga kualitas audit yang dilakukan juga lebih baik dalam menemukan kesalahan dan pelanggaran.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Herusetya (2009) yang menguji pengaruh ukuran auditor dan spesialisasi auditor terhadap kualitas laba. Penelitian ini dilakukan untuk melihat auditor *Big Four* yang memiliki spesialisasi industri memiliki kualitas laba yang lebih tinggi dibandingkan auditor non-*Big Four*. Kualitas laba diukur dengan *earnings response coefficient*, sedangkan spesialisasi auditor diukur menggunakan *auditor industry share*, dominasi auditor dalam suatu industri tertentu dan jumlah klien terbanyak dalam satu industri. Variabel kontrol yang digunakan mencakup tahun, industri dan ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aset. Sampel yang digunakan diambil dari 139 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005 dan 2006. Industri yang digunakan hanya meliputi industri dasar dan kimia, *consumer goods* dan aneka industri, hal ini dipilih untuk memperoleh homogenitas dalam sampel. Hasil pengujiannya belum dapat memberikan bukti yang konsisten dalam hal perbedaan kualitas laba bagi perusahaan yang diaudit oleh auditor *Big Four* maupun auditor dengan spesialisasi industri. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya

independensi auditor sehingga informasi laba tidak mempengaruhi reaksi pasar serta lemahnya *informativeness* dari laba perusahaan publik di Indonesia. Hasil pengujiannya terhadap variabel kontrol membuktikan bahwa pasar memberi reaksi positif terhadap perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi bagi perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan *Big Four*.

Hipotesis penelitian yang pertama dalam penelitian ini adalah:

H1a: *Perusahaan dengan Corporate Governance Index yang lebih tinggi akan memiliki probabilita yang lebih besar untuk memilih auditor eksternal yang berkualitas dibandingkan dengan perusahaan lainnya.*

2.2. Kompleksitas Perusahaan dan Pemilihan Auditor Eksternal yang Berkualitas

Agency problem meningkat sehubungan dengan ukuran dan tingkat kompleksitas perusahaan yang semakin besar sehingga memiliki kebutuhan audit yang besar pula. Perusahaan besar juga cenderung memiliki sumber daya yang besar dalam menangani teknologi canggih yang dimilikinya, dan hal ini menyebabkan mereka harus menghadapi pekerjaan audit yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini dibuktikan melalui penelitian Abdel-Khalik (1989) yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan akan sulit melakukan fungsi pengawasan jika ukuran perusahaan bertambah besar. Semakin besar ukuran dan tingkat kompleksitas perusahaan dapat menyebabkan meningkatnya risiko terjadinya *moral hazard* dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan fungsi monitoring melalui auditor eksternal yang berkualitas, baik untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) maupun dalam hal penyajian laporan keuangan.

Knechel *et al.* (2005) melakukan penelitian mengenai faktor pemilihan auditor berkualitas terhadap 2.615 perusahaan menengah ke bawah di Finlandia. Knechel

mengembangkan dua hipotesis mengenai keuntungan proses audit, dua hipotesis berhubungan dengan *agency problem* eksternal dan satu hipotesis berkaitan dengan biaya pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas terhadap kompetitor yang potensial. Salah satu faktor yang diuji terhadap pemilihan auditor yang berkualitas adalah tingkat kompleksitas perusahaan. Kebutuhan akan hasil audit yang berkualitas akan meningkat seiring dengan kompleksitas perusahaan karena semakin besar suatu perusahaan, pengawasan langsung akan semakin sulit dilakukan. Untuk merefleksikan kompleksitas perusahaan, Knechel menggunakan pengukuran yang terdiri dari tingkat gaji, rasio persediaan dan piutang terhadap total aset, ukuran perusahaan serta variabel *dummy* dengan diberi nilai 1 untuk kategori induk perusahaan, anak perusahaan maupun *jointly controlled company* dan nilai 0 untuk kategori lainnya. Melalui model regresi multi nominal, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam perusahaan kecil, tingkat kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan auditor yang diukur dengan ukuran perusahaan dan tingkat gaji. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah karyawan yang besar akan memerlukan keahlian yang lebih tinggi dalam mengatur *agency problem* internal mereka, mematuhi peraturan yang berlaku dan memperoleh *feedback* atas sistem pengendalian yang ada melalui auditor eksternal yang berkualitas.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Revier dan Schroe (2009) terhadap perusahaan di 12 negara Eropa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 35.559 perusahaan dari 12 negara Eropa ditambah dengan 13.239 perusahaan di Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Polandia dan Slovakia. Hipotesis pertama yang dikembangkan adalah untuk melihat pengaruh kompleksitas internal perusahaan terhadap auditor eksternal yang ditunjuk oleh *manager*. Tingkat kompleksitas perusahaan diukur dengan tiga *proxy*, yaitu ukuran perusahaan, rasio persediaan dan piutang terhadap total aset, serta perusahaan yang memiliki *subsidiary*. Data diuji menggunakan model regresi logit dan OLS untuk

melihat apakah prosedur statistik yang digunakan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat signifikansi dan lambang koefisien yang dihasilkan. Hasil pengolahan datanya menunjukkan bahwa secara garis besar semakin besar suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat kompleksitas perusahaan dan kecenderungan untuk memilih auditor *Big Four* semakin tinggi, dilihat dari ukuran perusahaan dan rasio persediaan dan piutang terhadap total aset. Namun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki anak perusahaan cenderung untuk memilih auditor non-*Big Four*.

Hipotesis penelitian kedua dalam penelitian ini adalah:

H2a: *Perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi akan memiliki probabilitas yang lebih besar untuk memilih auditor eksternal yang berkualitas dibandingkan dengan perusahaan lainnya.*

2.3. Kebutuhan Pendanaan Eksternal dan Pemilihan Auditor Eksternal yang Berkualitas

Faktor lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap pemilihan auditor yang berkualitas adalah kebutuhan pendanaan eksternal. Hampir seluruh perusahaan membutuhkan pendanaan tambahan dari pihak eksternal berkaitan dengan pembiayaan dan pengembangan kegiatan operasionalnya. Untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan eksternal tersebut, perusahaan membutuhkan laporan keuangan yang kredibel untuk meyakinkan para investor yang akan menginvestasikan modalnya ke perusahaan tersebut, terutama perusahaan yang memiliki transaksi yang cukup kompleks. Laporan keuangan yang kredibel dipercaya harus diaudit oleh auditor yang berkualitas untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, terutama perusahaan yang memiliki transaksi yang kompleks (Knechel *et al.*, 2005).

Knechel *et al* (2005) melakukan pengujian faktor determinan pemilihan auditor yang berkualitas. Salah satu variabel yang digunakan adalah kebutuhan terhadap pendanaan

eksternal yang diukur dengan *free cash flow* dan pertumbuhan penjualan. Hasil yang diharapkan adalah terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan penjualan dengan kualitas auditor serta hubungan yang negatif antara tingkat *free cash flow* dengan kualitas auditor. Data yang digunakan dalam penelitiannya adalah sebanyak 2.615 perusahaan Finlandia menengah ke bawah yang diperoleh dari database Voitto+. Model penelitian yang digunakan adalah model regresi logit dalam menentukan pemilihan auditor yang *certified* atau *noncertified*, HTM atau KHT, dan Big Six atau non-Big Six. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa melalui variabel *free cash flow* tidak ada yang dapat mendukung perusahaan yang memiliki kebutuhan pendanaan eksternal yang tinggi akan memilih untuk diaudit oleh auditor yang berkualitas tinggi. Variabel pertumbuhan penjualan juga tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor Big Six. Hal ini dapat diakibatkan dari penawaran modal berupa saham terhadap pihak eksternal sangat jarang terjadi di perusahaan menengah ke bawah.

Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Revier dan Schroe (2009) dalam hipotesisnya yang kedua mengenai pengaruh kebutuhan pendanaan eksternal terhadap pemilihan auditor yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan di 12 negara Eropa diuji menggunakan model regresi logit. Variabel kebutuhan terhadap pendanaan eksternal ini diukur menggunakan rasio hutang terhadap total aset (*debt to total asset*) serta perusahaan publik yang terdaftar di bursa (*listed*) dan *return on assets* (ROA) sebagai variabel kontrol. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kebutuhan terhadap pendanaan eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor yang berkualitas. Hal ini berarti perusahaan yang bergantung terhadap pendanaan eksternal cenderung memilih auditor *Big Four* dalam mengaudit laporan keuangannya karena terdapat suatu jaminan keandalan laporan keuangan yang diberikan oleh auditor yang berkualitas bagi para investor yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan.

Hipotesis penelitian ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3a: *Perusahaan dengan kebutuhan pendanaan dari pihak eksternal yang lebih tinggi akan memiliki probabilita yang lebih besar untuk memilih auditor eksternal yang berkualitas dibandingkan dengan perusahaan lainnya.*

2.4. Tingkat *Leverage* dan Pemilihan Auditor Eksternal yang Berkualitas

Pinjaman yang diajukan perusahaan kepada bank dan lembaga keuangan lainnya dapat menghasilkan *agency problem* antara pemegang saham dan kreditur dalam hal pelanggaran perjanjian hutang (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya pelanggaran perjanjian tersebut meningkat seiring dengan tingkat *leverage* yang tinggi sehingga dibutuhkan suatu proses audit yang memfasilitasi adanya jaminan hutang yang membatasi tindakan perusahaan, seperti tindakan perubahan *leverage*, keputusan berinvestasi dan pembayaran dividen (Smith dan Warner, 1979).

Besarnya tingkat *leverage* perusahaan akan menyebabkan perusahaan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik di mata investor dan kreditor. Fanani *et al.* (2009) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penentu kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan investor. Faktor penentu yang diuji terdiri dari 13 variabel dan salah satu variabelnya adalah *leverage* perusahaan dan kualitas auditor. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan dan kualitas auditornya diharapkan akan semakin tinggi kualitas pelaporannya. Sampel yang digunakan terdiri dari 141 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui *purposive sampling* dari tahun 2001 sampai 2006. Model penelitian yang diuji menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat *leverage* perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan pelaporan keuangan yang berkualitas karena tingkat *leverage* yang tinggi memberikan insentif yang lebih kuat bagi

manajer untuk mengelola laba pada prosedur yang bisa diterima. Kualitas auditor juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan hal ini akan meningkatkan pula kepercayaan investor.

Broye dan Weill (2008) melakukan pengujian dampak lingkungan hukum terhadap hubungan antara tingkat *leverage* dan pemilihan auditor di 10 negara Eropa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi perlindungan terhadap hak kreditur dan persyaratan pengungkapan, semakin tinggi kebutuhan akan auditor yang berkualitas oleh perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Knechel *et al.*, (2005) menunjukkan pemilihan auditor yang berkualitas dipengaruhi oleh perusahaan besar yang memiliki *leverage* dan tingkat persaingan yang tinggi, terutama perusahaan yang publik yang terdaftar di pasar bursa. Penelitian ini dilakukan terhadap 2.615 perusahaan kecil dan menengah di Finlandia dari tahun 1996 sampai tahun 1999 yang diperoleh dari *database* Voitto+ yang dikelola oleh perusahaan pemberi kredit di Finlandia yaitu Asiakastieto Oy. Tingkat *leverage* perusahaan diukur dengan menggunakan proksi rasio total hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap total aset serta pinjaman perusahaan yang tidak dijamin. Model regresi yang digunakan adalah model regresi logit. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah secara umum, tingkat *leverage* akan semakin tinggi seiring dengan ukuran perusahaan. Hal ini mengindikasikan bank dan pemberi pinjaman lainnya akan semakin bergantung terhadap laporan keuangan perusahaan dan peran dari auditor yang berkualitas karena sulitnya mendapatkan jaminan atas *personal guarantees* dan kolateral dari pemilik perusahaan yang semakin besar.

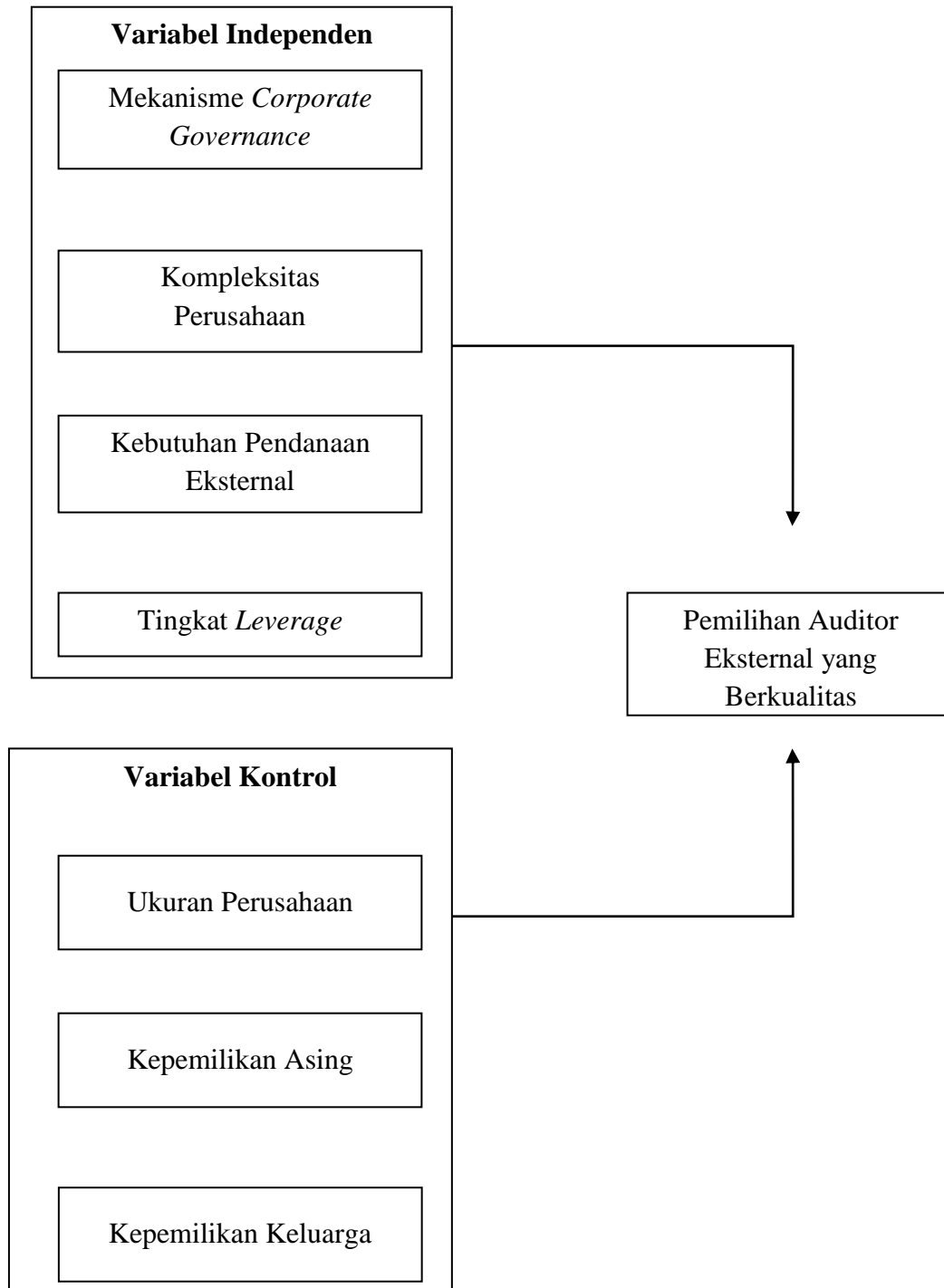
Hipotesis yang keempat dalam penelitian ini adalah:

H4a: *Perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi akan memiliki probabilitas yang lebih besar untuk memilih auditor eksternal yang berkualitas dibandingkan dengan perusahaan lainnya.*

3. Metode Penelitian

3.1. Model Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan indeks yang diperoleh dari IICD (*The Indonesia Institute for Corporate Directorship*), tingkat kompleksitas perusahaan, kebutuhan pendanaan eksternal, serta tingkat *leverage* terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas. Pengaruh faktor-faktor tersebut akan diuji dengan telah mengontrol ukuran perusahaan, serta struktur kepemilikan perusahaan.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi *logit* sebagai berikut:

$$CHOICE_i = \beta_0 + \beta_1 CGI_i + \beta_2 GROUP_i + \beta_3 EXFIN_i + \beta_4 LIAB_i + \beta_5 SIZE_i + \beta_6 FOREIGN_i + \beta_7 FAMOWN_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

CHOICE_i : Variabel *dummy* (1,0) dari auditor berkualitas. Nilai 1 diberikan apabila perusahaan diaudit oleh auditor eksternal *Big Four*, dan nilai 0 apabila yang lainnya.

CGI_i : *Corporate Governance Index* perusahaan.

GROUP_i : Variabel *dummy* (1,0) dari tingkat kompleksitas perusahaan. Nilai 1 diberikan apabila perusahaan merupakan perusahaan induk, dan nilai 0 apabila yang lainnya.

EXFIN_i : Kebutuhan pendanaan eksternal yang diukur dengan *free cash flow* perusahaan melalui arus kas dari kegiatan operasi dikurangi dengan pengeluaran investasi untuk barang modal dan dibagi dengan aset lancar.

LIAB_i : Tingkat *leverage* perusahaan yang diukur dengan perbandingan total hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap total aset.

- SIZE_i* : Ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan.
- FOREIGN_i* : Kepemilikan asing dalam suatu perusahaan yang dihitung dengan membagi jumlah lembar saham yang dimiliki oleh penanam modal asing dibagi dengan jumlah saham yang beredar.
- FAMOWN_i* : Variabel *dummy* (1,0) dari kepemilikan keluarga. Nilai 1 diberikan apabila perusahaan dengan proporsi kepemilikan keluarga $> 50\%$, dan nilai 0 apabila proporsi kepemilikan keluarga $\leq 50\%$.

3.2. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam model penelitian ini adalah pemilihan auditor eksternal yang berkualitas. Variabel ini merupakan variabel *dummy* (1,0), yaitu akan diberikan nilai 1 apabila auditor dari kantor akuntan publik *Big Four* dan nilai 0 apabila auditor dari kantor akuntan publik selain *Big Four*. Auditor dari kantor akuntan publik *Big Four* merupakan auditor yang kantornya berafiliasi dengan PriceWaterhouseCoopers (PWC), Ernst & Young (EY), KPMG, dan Deloitte & Touche (Deloitte).

Variabel independen utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu mekanisme *corporate governance*, kompleksitas perusahaan, kebutuhan pendanaan eksternal serta tingkat *leverage* perusahaan. Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

- *Good Corporate Governance*

Untuk mengukur tingkat penerapan *corporate governance*, digunakan *Corporate Governance Index* yang diperoleh dari lembaga IICD untuk tahun 2007 seperti yang digunakan oleh Napitu (2011). Pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-

prinsip *Good Corporate Governance* yang diadopsi dari OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) antara lain:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham.
3. Peranan *stakeholders* dalam *corporate governance*.
4. Keterbukaan dan transparansi.
5. Akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi.

Hasil penilaian dari IICD berupa *Corporate Governance Index* (CGI) ini dinyatakan dalam persentase dengan skala antara 0 sampai 100% yang berarti semakin tinggi nilai CGI suatu perusahaan, maka semakin baik perusahaan tersebut menerapkan *corporate governance*. Interpretasi penilaian dari lembaga IICD disajikan pada Tabel 1.

- Kompleksitas Perusahaan

Untuk merefleksikan tingkat kompleksitas perusahaan, digunakan variabel *dummy* (1,0). Nilai 1 diberikan apabila suatu perusahaan memiliki penyertaan pada perusahaan lain di atas 50%, sehingga diperlukan proses konsolidasi dalam pelaporan keuangan tahunannya, dan nilai 0 apabila yang lainnya (Knechel *et al.*, 2005).

- Kebutuhan Pendanaan Eksternal

Kebutuhan pendanaan eksternal diukur dengan pengukuran yang pernah digunakan oleh Knechel *et al.* (2005) berupa nilai *free cash flow* perusahaan, yang dihitung dari arus kas operasi dikurangi dengan pengeluaran investasi untuk barang modal dan dibagi dengan aset lancar.

- Tingkat *Leverage*

Tingkat *leverage* perusahaan diukur dengan rasio perbandingan total hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap total asset, seperti yang pernah digunakan pula dalam penelitian Knechel *et al.* (2005).

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan asing serta kepemilikan keluarga. Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

- Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh Balafif (2010), yaitu dalam bentuk logaritma natural dari total aset perusahaan.

- Kepemilikan Asing

Variabel ukuran kepemilikan asing dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh Balafif (2010) yang diukur berdasarkan proporsi kepemilikan asing pada perusahaan yang dihitung dengan membagi jumlah lembar saham yang dimiliki oleh penanam modal asing dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

- Kepemilikan Keluarga

Definisi keluarga dalam suatu perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat) (Arifin, 2003). Untuk mencerminkan bahwa pemegang saham yang merupakan keluarga menjadi saham pengendali, maka seperti yang dilakukan Siregar dan Utama (2006) serta Balafif (2010), seluruh perusahaan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan persentase kepemilikan keluarga di atas atau di bawah 50% (Kieso, *et al.* 2011). Perusahaan yang memiliki investasi lebih dari 50% berarti memiliki kendali yang sangat signifikan, terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan variabel *dummy* (1,0) dengan nilai 1 apabila perusahaan dengan proporsi

kepemilikan keluarga $> 50\%$ dan nilai 0 apabila proporsi kepemilikan keluarga $\leq 50\%$ atau perusahaan tersebut sama sekali tidak dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga.

3.3.Data dan Sampel

Populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian yang diteliti adalah tahun 2007. Adapun kriteria penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan bukan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan lembaga keuangan, termasuk di dalamnya jasa keuangan dan asuransi. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang bergerak di bidang ini *highly regulated* dan memiliki format standar pelaporan keuangan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan hasil yang *bias* jika dimasukkan dalam penelitian.
2. Perusahaan yang memiliki *Corporate Governance Index* yang diperoleh dari lembaga IICD (*The Indonesia Institute for Corporate Directorship*) untuk tahun 2007. Penilaian CGI dari lembaga IICD dilakukan setiap dua tahun sekali dan data terbaru yang diperoleh adalah tahun 2007.
3. Perusahaan memiliki data maupun informasi yang lengkap dalam laporan keuangannya sebagai data penelitian.

Sebelum diolah lebih lanjut, data yang diperoleh diperiksa apakah memiliki data *outliers*. Penelitian ini mengikuti pendekatan Hermawan (2009) dalam menetapkan data *outliers*, yaitu data yang terletak di luar batas angka 3 standar deviasi di atas dan di bawah nilai rata-rata (*mean*) dari variabel tersebut. Kemudian data *outliers* akan diganti dengan angka tertinggi atau terendah yang terdapat dalam data observasi yang masih berada di dalam

batas-batas 3 standar deviasi (*winsorized approach*). Dengan demikian tidak terdapat observasi yang dikeluarkan dari data yang akan diolah.

4. Analisis Hasil Penelitian

4.1. Deskripsi Sampel Penelitian

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 203 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia untuk periode 2007. Prosedur penetapan sampel ini disajikan pada Tabel 2. Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif dari data sampel untuk setiap variabel penelitian. Dari hasil yang disajikan pada tabel 3 terlihat bahwa CHOICE memiliki nilai rata-rata sebesar 0,45. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 45% observasi penelitian diaudit oleh auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four*. Dari hasil ini berarti proporsi sampel yang diaudit oleh auditor dari KAP *Big Four* dengan yang tidak termasuk *Big Four* boleh dikatakan hampir sama.

Variabel CGI memiliki nilai minimum dan nilai maksimum sebesar 0,5009 dan 0,8885. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang masuk dalam kategori *poor* atau belum menunjukkan adanya komitmen dalam menerapkan *corporate governance*. Meskipun demikian, terdapat pula perusahaan yang memiliki komitmen positif untuk menerapkan *corporate governance* yang baik, yang tercermin dari nilai CGI sebesar 88,85% yang tergolong baik (*good*). Secara keseluruhan, rata-rata variabel CGI adalah sebesar 0,648625 atau 64,86%. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan yang termasuk dalam sampel berada dalam kategori *fair* atau cukup menyadari pentingnya implementasi *corporate governance* yang baik sehingga terdapat usaha untuk mematuhi peraturan tata kelola yang berlaku.

Variabel GROUP menggambarkan tingkat kompleksitas perusahaan memiliki nilai rata-rata 0,7700, yang berarti 77% dari total sampel merupakan perusahaan yang memiliki

penyertaan pada perusahaan lain lebih dari 50%, sehingga memerlukan proses konsolidasi untuk pelaporan keuangan tahunannya. Hal ini menunjukkan sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian merupakan perusahaan induk yang memiliki laporan konsolidasi dengan anak perusahaannya, sehingga memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi.

Variabel EXFIN merupakan rasio tingkat *free cash flow* perusahaan terhadap aset lancar dengan nilai rata-rata sebesar 0,0669. Rata-rata rasio *free cash flow* tersebut menunjukkan angka yang cukup rendah (6.69%), sehingga mengindikasikan bahwa kebutuhan pendanaan eksternal perusahaan yang menjadi sampel penelitian relatif cukup tinggi.

Variabel LIAB memiliki nilai minimum sebesar 0,0000, dengan kata lain terdapat perusahaan yang tidak melakukan pinjaman sama sekali terhadap pihak bank atau lembaga keuangan lainnya, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,7967 atau terdapat perusahaan sebanyak 79,67% komponen pembiayaannya didasarkan oleh hutang. Nilai rata-rata adalah sebesar 0,2358 atau 23,58%. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat *leverage* perusahaan yang menjadi sampel penelitian relatif rendah.

Variabel SIZE menggambarkan ukuran perusahaan yang diukur dari total aset perusahaan. Perusahaan yang merupakan sampel dalam penelitian ini memiliki nilai total aset minimum sebesar Rp 567 juta dan maksimum sebesar Rp 26.556.109 juta, serta nilai rata-rata sebesar Rp 3.068.726 juta. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel penelitian merupakan perusahaan yang relatif berukuran besar. Variabel FOREIGN memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4086 atau sebanyak 40,86%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menjadi sampel penelitian dimiliki oleh perusahaan asing dengan penyertaan rata-rata 40.86%. Sedangkan variabel FAMOWN memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7300. Dengan kata lain, sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel, yaitu sebanyak 73% masih dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga.

4.2. Analisis Korelasi Pearson

Untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antar variabel yang digunakan dalam model penelitian, dilakukan analisis korelasi dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson yang disajikan pada Tabel 4. Dari tabel 4 terlihat bahwa variabel CGI berkorelasi positif dan signifikan $\alpha = 1\%$ dengan CHOICE. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki *corporate governance index* semakin tinggi merupakan perusahaan yang menggunakan jasa audit dari kantor akuntan publik *Big Four*.

Variabel CGI memiliki koefisien yang positif dan signifikan pada $\alpha = 1\%$ dengan variabel GROUP dan SIZE. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki *corporate governance* semakin baik adalah perusahaan besar dan memiliki anak perusahaan. Hubungan ini dapat disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk memiliki *corporate governance* yang semakin baik apabila perusahaan sudah berukuran besar dan semakin kompleks agar dapat memastikan pengendalian yang efektif dalam mencapai kinerja perusahaan yang optimal.

Variabel FOREIGN berkorelasi positif dan signifikan pada $\alpha = 1\%$ dengan SIZE, CGI dan CHOICE. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar cenderung dimiliki investor modal asing. Adanya kepemilikan asing cenderung menggunakan KAP *Big Four* karena KAP *Big Four* bersifat internasional sehingga lebih dikenal oleh investor asing dan biasanya juga digunakan oleh perusahaan induknya. Penerapan *corporate governance* pada perusahaan yang dimiliki investor asing cenderung lebih baik karena mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan pada perusahaan induk sesuai dengan standar *corporate governance* di negara perusahaan induk.

Variabel FAMOWN berkorelasi positif dengan CHOICE namun berkorelasi negatif dengan CGI pada tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga menggunakan jasa auditor KAP *Big Four*. Namun, perusahaan

keluarga memiliki *corporate governance* yang kurang baik. Hal ini dapat disebabkan dalam perusahaan keluarga tidak terlalu dirasakan adanya *agency problem* antara pemilik perusahaan dengan manajemen, sehingga mekanisme *corporate governance* tidak terlalu efektif. Selain itu, perusahaan keluarga kurang memperhatikan kepentingan *corporate governance* untuk *stakeholders* lainnya. Perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan keluarga diyakini kurang independen dalam hal pengelolaan manajemen dan lemahnya mekanisme *corporate governance* yang diterapkan sehingga dapat menimbulkan terjadinya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas.

4.3. Analisis Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian pertama (H1a) diterima, yang berarti bahwa mekanisme *corporate governance* yang semakin baik akan meningkatkan kemungkinan pemilihan auditor eksternal yang berkualitas. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Balafif (2010) yang menemukan bahwa tingkat efektifitas Komite Audit yang semakin tinggi akan meningkatkan probabilita pemilihan auditor eksternal berkualitas. Hal ini berarti mekanisme *corporate governance* yang dijalankan melalui pengawasan Dewan Komisaris yang didukung oleh Komite Audit yang efektif meningkatkan probabilita pemilihan auditor eksternal berkualitas. Dengan menggunakan auditor eksternal yang berkualitas, perusahaan diharapkan dapat lebih memberikan akuntabilitas pada *stakeholders* dengan memberikan kualitas laporan keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas, sehingga hipotesis penelitian kedua (H2a) ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi akan memiliki probabilita yang lebih kecil untuk

memilih auditor eksternal yang berkualitas. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (Knechel, 2005; Revier dan Schroe, 2009). Seiring dengan meningkatnya tingkat kompleksitas dalam suatu perusahaan, terdapat indikasi bahwa pihak manajemen lalai dalam memaksimalkan utilitas pemegang saham sebagai pihak prinsipal. Oleh karena itu, pihak manajemen cenderung lebih memilih auditor dari kantor akuntan publik yang kurang berkualitas dengan harapan kelalaian yang dilakukan tidak terungkap oleh auditor.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa kebutuhan pendanaan eksternal tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal yang berkualitas. Dengan demikian hipotesis penelitian ketiga (H3a) ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Knechel *et al* (2005), namun bertentangan dengan Revier dan Schroe (2009). Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang membutuhkan pendanaan eksternal, dapat memperoleh dana dari kreditur maupun investor saham. Pihak investor pada umumnya tidak mensyaratkan penggunaan auditor tertentu, dan auditor yang menjadi rekanan pada Bursa Efek Indonesia juga beragam. Oleh sebab itu, dalam mencari sumber dana eksternal perusahaan mungkin tidak memiliki preferensi untuk menggunakan auditor tertentu karena investor tidak mempermasalahkan. Selain itu, pemilihan auditor berkualitas mungkin lebih dipengaruhi oleh adanya *corporate governance* yang baik di perusahaan.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat *leverage* perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor yang berkualitas. Dengan demikian hipotesis penelitian keempat (H4a) juga ditolak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang pernah dilakukan Broye dan Weill (2008), serta Knechel *et al.*, (2005). Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme *corporate governance* yang baik di perusahaan akan lebih menentukan kemungkinan memilih auditor yang berkualitas, meskipun perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi atau rendah.

Dalam penelitian ini juga digunakan tiga variabel kontrol yang pernah diujikan dalam penelitian sebelumnya yang meliputi ukuran perusahaan, kepemilikan asing serta kepemilikan keluarga. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar, proporsi kepemilikan asing yang semakin besar, dan perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga memiliki probabilitas yang lebih besar untuk memilih auditor eksternal yang berkualitas.

5. Implikasi Hasil Penelitian dan Saran

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran bahwa terdapat beberapa faktor determinan yang menentukan pemilihan auditor eksternal yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance*, kompleksitas perusahaan, kebutuhan pendanaan eksternal dan tingkat *leverage* terhadap pemilihan auditor eksternal yang dapat memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan auditor eksternal lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan *good corporate governance* yang semakin baik akan makin memilih auditor eksternal yang berkualitas. Namun, semakin tinggi kompleksitas perusahaan dengan memiliki penyertaan di perusahaan lain di atas 50% akan menurunkan kemungkinan untuk memilih auditor yang berkualitas. Selain itu, pemilihan auditor berkualitas tidak dipengaruhi oleh adanya kebutuhan pendanaan eksternal maupun tingkat *leverage* perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian hanya menggunakan sampel selama satu tahun dan hanya berjumlah 203 perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum sepenuhnya mampu mengukur kondisi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

2. Tingkat *good corporate governance* menggunakan indeks yang diperoleh dari IICD, sehingga sangat tergantung pada metode dan penilaian yang dilakukan oleh IICD. Penelitian ini tidak mengobservasi langsung bagaimana penerapan *corporate governance* di perusahaan, khususnya berkaitan dengan proses pemilihan auditor eksternal.
3. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan sebagai proksi untuk mengukur tingkat kompleksitas perusahaan, sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat digunakan untuk mencerminkan tingkat kompleksitas suatu perusahaan.

Implikasi hasil penelitian ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- Bagi Regulator Pasar Modal

Penelitian ini juga diharapkan akan memberikan masukan bagi pengawas pasar modal, khususnya BAPEPAM dan LK untuk memastikan adanya *good corporate governance* perusahaan, sehingga dapat mendukung laporan keuangan yang berkualitas karena telah diaudit oleh auditor eksternal yang berkualitas. Mekanisme GCG didukung oleh kerjasama yang baik antara organ perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya membentuk Komite Audit untuk membantu memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, memastikan pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh pihak manajemen serta memproses calon auditor eksternal. Sedangkan Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal, mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh

auditor eksternal. Satuan kerja pengawasan internal ini memiliki hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dengan adanya pengawasan yang efektif terhadap mekanisme ini, diharapkan perusahaan publik di Indonesia dapat meningkatkan kinerja operasionalnya yang tercermin dalam laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan penanaman modal di Indonesia.

- Bagi Investor

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri dalam memutuskan investasi yang akan dilakukan terhadap perusahaan publik di Indonesia. Para investor dapat mengetahui bahwa perusahaan yang menerapkan mekanisme GCG secara efektif akan memberikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor berkualitas sehingga lebih dapat diandalkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran atau masukan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran tingkat kompleksitas perusahaan selain perusahaan yang memiliki anak perusahaan karena masih terdapat faktor yang dapat mengukur tingkat kompleksitas perusahaan seperti diversifikasi lini produknya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas obyek atau sampel penelitian sehingga dapat meningkatkan generalisasi hasil.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi pemilihan auditor eksternal, misalnya seperti *audit fee*, besarnya *agency costs* atau tingkat persaingan industri sebagai variabel penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan mampu meningkatkan kemampuan dalam menjelaskan model penelitian.

Daftar Referensi

- Abdel-Khalik, A. Rhasad. (1989). Why Do Private Companies Demand Auditing? A Case for Organizational Loss of Control. *Journal of Accounting, Auditing, and Finance*. Vol 8, No.1, pp 31-52.
- Ahmad, A. Che, K.A. Houghton, dan N.Z.Mohamad Yusof. (2006). The Malaysian Market for Audit Services: Ethnicity, Multinational Companies, and Auditor Choice. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 21, No.7, pp 702-723.
- Anderson, R.C dan David M.Reeb. (2003). Who Monitors the Family. March. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=369620
- Ardiati, Aloysia Yanti. (2005). Pengaruh Manajemen Laba terhadap Return Saham pada Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Five* dan KAP *Non-Big Five*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 8, No. 3, September, pp 235-249.
- Badan Pengawas Pasar Modal. (2004). Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5, tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2011). <http://www.bpkp.go.id/?idunit=21&idpage=326>
- Balafif, Shirin. (2010). Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Ukuran Perusahaan, kepemilikan oleh Keluarga dan Kepemilikan Asing terhadap Pemilihan Auditor Eksternal Berkualitas. *Thesis*. Universitas Indonesia.
- Bedard, J. & Michelene, T.H. (1993). Expertise in Auditing. *Journal of Accounting Practice & Theory*. Vol 12, pp 21-45.
- Broye, Geraldine dan Laurent Weill. (2008). Does Leverage Influence Auditor Choice? A Cross-country Analysis. *Applied Financial Economics*. Vol 18, Issue 9, pp 715-731.
- Carcello, J. dan Neal, T.L. (2000). *Audit Committee Composition and Auditor Reporting*. *Accounting Review*, pp 453 – 468.
- Carey P. dan Roger Simnett. (2006). *Audit Partner Tenure and Audit Quality*. *The Accounting Review*, Vol.81, No.3, pp 653 – 676.
- Daniri, Mas Achmad. (2006). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Edisi 2, PT Ray Indonesia.
- DeAngelo, Elizabeth L. (1981). Auditor Size and Auditor Quality. *Journal of Accounting and Economics* 3. July, pp 183-199.
- Dechow, P., Sloan R dan Sweeney S. (1996). *Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC*. *Contemporary Accounting Research* 1, pp 1 – 36.
- Elder, Randal J., Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens. (2010). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Global Edition. Pearson Prentice Hall. New Jersey.
- Fan, Joseph P.H. dan T.J. Wong. (2005). Do External Auditors Perform a Corporate Governance Role in Emerging Markets? Evidence from East Asia. *Journal of Accounting Research*. Vol. 43, Issue 1, pp 35-72.

- Fanani, Z., Sri N., dan Hamidah. (2009). Faktor-faktor Penentu Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kepercayaan Investor. *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang. 4-6 November 2009.
- Gavious, I. (2007). Alternative Perspectives to Deal with Auditors' Agency Problem. *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 18, pp 451-467.
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. Mc Graw-Hill. International Edition, Fourth Edition.
- Hermawan, Ancella Anitawati. (2009). Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan oleh Keluarga, dan Peran Monitoring Bank terhadap Kandungan Informasi Laba. *Dissertation*. Universitas Indonesia.
- Herusetya, Antonius. (2009). Pengaruh Ukuran Auditor dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 6, No. 1, Juni, pp 46-70.
- IICD. (2007). *The Indonesia Institute for Corporate Directorship*. Research Report on Indonesian Corporate Governance Scorecard.
- Ikatan Komite Audit Indonesia. 2010. <http://www.komiteaudit.org/komite.htm>
- Jensen, C.M. dan H.W. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol 3, pp 305-360.
- Jiraporn, Pornshit. (2007). Shareholder Rights, Corporate Governance, and Auditor Selection: Evidence from Arthur Andersen. www.ssrn.com.
- Kieso, Donald E., J.J. Weygandt, dan P.D. Kimmel. (2011). *Financial Accounting*. John Wiley & Sons, Inc. IFRS Edition.
- Klein, April. (2002). *Audit Committees, Board of Director Characteristics and Earnings Management*. *Journal of Accounting and Economics*. Vol 33, pp 375 – 400.
- Knechel, W.R., Niemi, Lasse dan Sundgren Stefan. (2005). Determinants of Auditor Choice: Evidence from a Small Client Market. November. www.ssrn.com.
- KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
- Meutia, Inten. (2004). Pengaruh Independensi Auditor terhadap Manajemen Laba untuk KAP *Big Five* dan *Non Big Five*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 7, No. 3. September, pp 333-350.
- Mulyadi. (2002). *Auditing*. Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Edisi 6.
- Napitu, Tatap Maria Any. (2011). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. *Thesis*. Universitas Indonesia.
- Revier, Elke dan Ralph Schroe. (2009). Determinants of Auditor Choice. *Published Thesis*. Universiteit Gent.
- Rezaee, Zabihollah. (2009). *Corporate Governance and Ethics*. John Wiley & Sons, Inc.
- Scott, William R. (2000). *Financial Accounting Theory*. Prentice Hall. Second Edition. Canada.

- Siregar, S.V.N.P dan Siddharta Utama. (2006). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 9, No. 3, September, pp 307-326.
- Smith, C. dan J. Warner. (1979). On Financial Contracting: An Analysis of Bond Covenants. *Journal of Financial Economics*. Vol 7, pp 117-161.
- _____. (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Penerbit Salemba Empat. Per 1 Januari 2001.
- Tjager, I.N, A. Alijoyo H.R Djemat, dan B. Sembodo. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. PT Prenhallindo. Jakarta.
- Wibowo, Arie dan Hilda Rossieta. (2009). Faktor-faktor Determinasi Kualitas Audit – Suatu Studi dengan Pendekatan Earnings Surprise Benchmark. *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang. 4-6 November 2009.
- Williams, D.D. (1988). The Potential Determinants of Auditor Change. *Journal of Business Finance and Accounting*. 13, Summer, pp 243-261.

Lampiran 1

Tabel 1. Interpretasi Penilaian CGI

Total Indeks	Kinerja	Interpretasi
90 – 100%	<i>Excellent</i>	Perusahaan memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh OECD
80 – 89%	<i>Good</i>	Perusahaan memenuhi di atas standar minimum yang diwajibkan oleh peraturan dan di bawah standar internasional dan menunjukkan komitmen yang positif dalam menerapkan GCG
60 – 79%	<i>Fair</i>	Perusahaan memenuhi kewajiban di bawah standar yang ditetapkan perusahaan
< 60%	<i>Poor</i>	Perusahaan tidak memenuhi peraturan dan tidak menunjukkan adanya komitmen untuk menerapkan GCG

Sumber: IICD, 2007.

Tabel 2. Deskripsi Sampel

Deskripsi	Jumlah Perusahaan
Jumlah total perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007	394
Jumlah perusahaan yang bergerak di industri perbankan dan lembaga keuangan	(78)
Jumlah perusahaan yang tidak memiliki <i>Corporate Governance Index</i> dari IICD	(63)
Perusahaan yang tidak dapat diperoleh laporan tahunan tahun 2007	(38)
Sampel dengan data tahun 2007 tidak lengkap	(12)
Jumlah total sampel	203

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
CHOICE	0	1	0,4500	0,4990
CGI	0,5009	0,8885	0,6486	0,0690
GROUP	0	1	0,7700	0,4200
EXFIN	-2,9219	2,8486	0,0669	0,7772
LIAB	0,0000	0,7967	0,2358	0,2073
SIZE (Rp juta)	567	26.556.109	3.107.750	5.613.614
FOREIGN	0,0000	0,9927	0,4085	0,3018
FAMOWN	0	1	0,7300	0,4430

Sumber: Hasil Olah Data SPSS.

Jumlah observasi 203, dengan melakukan statistik deskriptif berdasarkan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

CHOICE = 1 apabila perusahaan diaudit oleh auditor eksternal *Big Four* dan 0 apabila yang lainnya; CGI = total nilai *Corporate Governance Index*; GROUP = 1 apabila perusahaan merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan 0 apabila yang lainnya; EXFIN = nilai *free cash flow* perusahaan; LIAB = rasio total hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan terhadap total aset; SIZE = total aset perusahaan; FOREIGN = proporsi kepemilikan asing dalam perusahaan; FAMOWN = 1 apabila kepemilikan keluarga dalam perusahaan > 50% dan 0 apabila proporsi kepemilikan keluarga ≤ 50% atau perusahaan tersebut sama sekali tidak dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga.

Lampiran 1

Tabel 4. Analisis Korelasi Pearson

	CHOICE	CGI	GROUP	EXFIN	LIAB	SIZE	FOREIGN	FAMOWN
CHOICE	1 .							
CGI	.427** (.000)	1 .						
GROUP	.015 (.418)	.185** (.004)	1 .					
EXFIN	.047 (.251)	.020 (.388)	-.040 (.286)	1 .				
LIAB	-.008 (.452)	-.118* (.046)	-.030 (.335)	-.081 (.125)	1 .			
SIZE	.425** (.000)	.635** (.000)	.298** (.000)	.026 (.358)	.004 (.477)	1 .		
FOREIGN	.398** (.000)	.213** (.001)	.061 (.195)	.097 (.085)	-.072 (.153)	.322** (.000)	1 .	
FAMOWN	.139* (.024)	-.148* (.017)	-.086 (.111)	.172* (.007)	.130* (.033)	-.074 (.096)	-.031 (.331)	1 .

** Signifikan pada level $\alpha = 1\%$ (2- tailed).

* Signifikan pada level $\alpha = 5\%$ (2-tailed).

Angka di dalam kurung menunjukkan nilai *p-value*.

Tabel 4 Hasil Pengujian Regresi Logistik

	Expected Sign	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
CGI	+	15,120	3,894	15,073	1	0,000 ***	3.685.360
GROUP	+	-0,819	0,473	2,996	1	0,042 **	0,441
EXFIN	-	-0,153	0,258	0,353	1	0,276	0,858
LIAB	+	0,437	0,916	0,228	1	0,317	1,548
SIZE	+	0,371	0,151	6,022	1	0,007 ***	1,450
FOREIGN	+	2,933	0,651	20,280	1	0,000 ***	18,791
FAMOWN	+	1,582	0,474	11,120	1	0,001 ***	4,866
Constant		-17,055	2,757	38,263	1	0,000 ***	0,000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS.

*** signifikan pada *confidence level* 1% (one-tailed)

** signifikan pada *confidence level* 5% (one-tailed)

Jumlah observasi 203, dengan melakukan statistik deskriptif berdasarkan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

CHOICE = 1 apabila perusahaan diaudit oleh auditor eksternal *Big Four* dan 0 apabila yang lainnya; CGI = total nilai *Corporate Governance Index*; GROUP = 1 apabila perusahaan merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan 0 apabila yang lainnya; EXFIN = nilai *free cash flow* perusahaan; LIAB = rasio total hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan terhadap total aset; SIZE = logaritma natural total aset perusahaan; FOREIGN = proporsi kepemilikan asing dalam perusahaan; FAMOWN = 1 apabila kepemilikan keluarga dalam perusahaan > 50% dan 0 apabila proporsi kepemilikan keluarga ≤ 50% atau perusahaan tersebut sama sekali tidak dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga.

Lampiran 2

Uji Asumsi Model Regresi Logit

- **Goodness of Fit Test (Hosmer and Lemeshow Test)**

Chi-square	df	Sig.
6,630	8	0,577

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dapat disimpulkan bahwa pada model regresi logistik yang digunakan fit dengan data.

- **Pengujian Simultan (Omnibus Tests of Model Coefficients)**

	Chi-square	df	Sig.
Step	88,310	7	0,000
Block	88,310	7	0,000
Model	88,310	7	0,000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS.

Dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikan 5%, variabel CGI, GROUP, EXFIN, LIAB, SIZE, FOREIGN dan FAMOWN berpengaruh terhadap CHOICE.

- **Koefisien Determinasi (Model Summary)**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	190,932	0,353	0,472

Sumber: Hasil Olah Data SPSS.

Model Summary dalam regresi logistik sama dengan pengujian R^2 pada persamaan regresi linier. R^2 menunjukkan estimasi variasi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data dengan metode regresi logistik, diketahui bahwa koefisien determinasi yang dilihat dari nilai Nagelkerke R^2 adalah 0,472. Hal ini berarti kombinasi

variabel independen yaitu CGI, GROUP, EXFIN, LIAB, SIZE, FOREIGN dan FAMOWN mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu CHOICE sebesar 47,2% sedangkan sisanya 52,8% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Lampiran 3

Analisis Ketepatan Model Prediksi Persamaan Regresi Logistik

	Keterangan	2007
CHOICE EXTERNAL (BIG 4)	TRUE	155
	FALSE	48
		203
	Ketepatan (%)	0.763546
		≈ 76,36%

Dari hasil pengujian penelitian, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln \left[\frac{P}{1-P} \right] = -17,055 + 15,120 \text{ CGI} - 0,819 \text{ GROUP} - 0,153 \text{ EXFIN} + 0,437 \text{ LIAB} + 0,371 \text{ SIZE} + 2,933 \text{ FOREIGN} + 1,582 \text{ FAMOWN}$$

Dari persamaan regresi logistik di atas, dapat dibuktikan kebenarannya dengan memasukkan nilai CGI, GROUP, EXFIN, LIAB, SIZE, FOREIGN dan FAMOWN untuk setiap perusahaan. Hasil persamaan regresi logistik kemudian dieksponekan untuk mengetahui kecocokan dengan nilai CHOICE yaitu 1 atau 0. Nilai potong untuk persamaan regresi logistik tersebut adalah 0,5. Jika nilai eksponen di atas 0,5 atau mendekati 1, berarti auditor eksternal *Big Four*, sedangkan jika nilai eksponen di bawah 0,5 atau jauh dari 1 berarti auditor eksternal non-*Big Four*. Berikut adalah contoh cara memasukkan nilai pada persamaan regresi logistik di atas untuk emiten AALI tahun 2007.

Lampiran 3

$$\begin{aligned}
 \ln \left[\frac{P}{1-P} \right] &= -17,055 + 15,120 \text{ CGI} - 0,819 \text{ GROUP} - 0,153 \text{ EXFIN} + 0,437 \text{ LIAB} + 0,371 \\
 &\quad \text{SIZE} + 2,933 \text{ FOREIGN} + 1,582 \text{ FAMOWN} \\
 &= -17,055 + 15,120 (0,7327) - 0,819 (1) - 0,153 (1,4476) + 0,437 (0,0009) + \\
 &\quad 0,371 (15,4932) + 2,933 (0,6726) + 1,582 (1) \\
 &= -17,055 + 11,0784 - 0,819 - 0,2215 + 0,0004 + 5,7479 + 1,9727 + 1,582 \\
 \ln \left[\frac{P}{1-P} \right] &= 2,2859 \\
 \left[\frac{P}{1-P} \right] &= e^{2,2859} \\
 P &= 9,8345 : (9,8345 + 1) \\
 P &= 0,90770
 \end{aligned}$$

Berdasarkan contoh hasil persamaan regresi logit untuk perusahaan AALI tahun 2007 diperoleh nilai probabilitas sebesar 90,77%. Hal tersebut menunjukkan bahwa AALI memiliki kemungkinan yang besar untuk memilih auditor yang berkualitas dan kenyataannya AALI telah memilih auditor *Big Four* sehingga dapat disimpulkan bahwa prediksi dari persamaan regresi di atas dapat diambil kebenarannya. Hasil dari keseluruhan sampel perusahaan yang telah dihitung dan sesuai dengan pembuktian persamaan regresi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 76,36% sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan prediksi yang dapat diambil kebenarannya.

Manajemen Laba melalui Aktivitas Riil dan Pengaruhnya terhadap Relevansi Nilai Laba

ENDANG TRIYANI GULTOM

VERA DIYANTY*

Universitas Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana dampak Praktek manajemen laba riil terhadap arus kas kegiatan operasi, biaya diskresioner, dan biaya produksi serta relevansi nilai laba. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2002 sampai 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba riil berpengaruh negatif terhadap arus kas kegiatan operasi dan biaya diskresioner dan berpengaruh positif terhadap biaya produksi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa manajemen laba riil melalui biaya produksi berpengaruh negatif terhadap relevansi nilai laba. Sementara, manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan dan biaya diskresioner tidak berpengaruh terhadap relevansi nilai laba.

Kata Kunci: Manajemen Laba Riil, Arus Kas Kegiatan Operasi, Biaya Diskresioner, Biaya Produksi, Relevansi Nilai Laba.

* Corresponding author: veradi@yahoo.com

1. Pendahuluan

Keberadaan kualitas laba menjadi perhatian khusus bagi pengguna laporan keuangan, terutama investor. Laba yang berkualitas mencerminkan kinerja manajemen perusahaan yang sebenarnya selama periode tertentu. Oleh karena itu, kualitas laba yang baik dapat digunakan sebagai penentu pengambilan keputusan, baik untuk tujuan kontraktual maupun investasi.

Pemisahan pihak manajemen (agen) dengan pemilik perusahaan atau investor (prinsipal) dapat menimbulkan perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik yang disebut konflik keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik ini dapat disebabkan oleh asimetri informasi. Asimetri informasi ini akan memberi keleluasan dan kesempatan kepada pihak manajemen (agen) untuk melakukan tindakan-tindakan yang memaksimalkan kesejahteraannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan manajemen dalam memaksimalkan kesejahteraannya adalah menyamarkan kondisi ekonomi perusahaan dalam proses penyajian laba sehingga akan mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Tindakan manajemen yang menyamarkan kondisi ekonomi salah satunya melalui praktek manajemen laba

Gunny (2009) menyatakan bahwa manajemen laba dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Manajemen akrual menunjukkan tindakan manajemen yang menyembunyikan kinerja ekonomis yang sebenarnya dengan memilih kebijakan metode akuntansi yang digunakan tetapi fleksibilitas pilihan metode akuntansi tersebut masih berada di dalam ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Dechow dan Skinner, 2000). Sementara, manajemen laba riil atau dikenal juga dengan manipulasi aktivitas riil terjadi ketika pihak manajemen perusahaan mengubah waktu dan struktur suatu aktivitas operasi, investasi, dan/atau pendanaan untuk mempengaruhi hasil dari sistem akuntansi (Gunny, 2009).

Survei yang dilakukan oleh Graham *et al.* (2005) menunjukkan bahwa walaupun manajemen laba riil ini menimbulkan biaya yang lebih besar bagi perusahaan, pihak manajemen lebih memilih melakukan manajemen laba riil daripada manajemen laba akrual karena sulit dideteksi oleh auditor dan regulator dan dapat dilakukan di sepanjang periode akuntansi. Roychowdhury (2006), manajemen laba riil dapat dilakukan melalui manipulasi penjualan, seperti pemberian potongan harga dan kredit yang lebih ringan, yang akan menurunkan arus kas kegiatan operasi, pengurangan biaya-biaya diskresioner, dan *overproduction* yang akan meningkatkan biaya produksi.

Ketika pihak manajemen memiliki motivasi untuk memanipulasi laba, kualitas laba akan dipertanyakan sehingga diragukan untuk digunakan sebagai dasar penilaian perusahaan (Brown, 1999; Healy and Wahlen, 1999; Dechow and Skinner, 2000; Whelan and McNamara, 2004). Hal ini tentu mempengaruhi keputusan investasi yang dilakukan oleh investor yang akan berdampak pada harga saham perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba mempengaruhi relevansi nilai laba.

Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan penelitian ini adalah menemukan bukti empiris di Indonesia mengenai pengaruh manajemen laba melalui aktivitas riil terhadap arus kas kegiatan operasi, biaya diskresioner, dan biaya produksi dan pengaruh manajemen laba tersebut terhadap relevansi nilai laba.

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak yang terjadi ketika satu atau lebih individu (prinsipal) mengikat perjanjian dengan individu lainnya (agen) yang melibatkan pendelegasian wewenang kepada agen dalam pembuatan keputusan. Teori keagenan dimulai ketika pemilik perusahaan tidak mampu mengelola

perusahaan sendiri, sehingga harus melakukan kontrak dengan para eksekutif untuk menjalankan perusahaan.

Manajemen sebagai agen seharusnya melakukan tindakan yang selaras dengan kepentingan prinsipal. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (prinsipal), tetapi di sisi lain manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang disebut dengan masalah keagenan yang salah satunya disebabkan oleh asimetri informasi.

Masalah keagenan yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) dimana keduanya sama-sama bersifat *utility maximizers* dan adanya asimetri informasi akan mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Masalah keagenan ini mendorong dan memberi keleluasaan bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Dengan demikian, laba yang dilaporkan tidak sesuai dengan realita.

2.2 Kualitas Laba

Salah satu informasi penting yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Bagi pemilik saham dan atau investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis (*wealth*) yang akan diterima melalui pembagian dividen. Laba juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu dan dapat digunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa mendatang. Oleh karena itu, kualitas laba menjadi perhatian para pemangku kepentingan dalam perusahaan. Laba dapat dikatakan berkualitas baik apabila laba yang dilaporkan dapat digunakan oleh para penggunanya untuk membuat keputusan yang terbaik dan untuk menjelaskan atau memprediksi harga dan *return* saham (Bernard dan Stober, 1989). Sementara menurut

Penman dan Zhang (2002), laba yang berkualitas baik merupakan laba yang dapat menjadi indikator untuk memprediksi pendapatan atau arus kas operasional di periode mendatang.

Bernstein dan Wild (2001) mengemukakan bahwa kualitas laba ditentukan oleh tiga faktor, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang dianut oleh perusahaan, cara perusahaan yang bersangkutan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi tersebut, dan situasi/kondisi lingkungan bisnis tempat perusahaan beroperasi. Selain itu, kualitas laba juga ditentukan oleh arus kas, volatilitas usaha, keberadaan *one-time-event*, status keuangan, kebijakan pajak, dan kualitas aset-aset produktif (Hawkins, 1998).

Keberadaan kualitas laba yang baik memegang peranan penting bagi penggunaannya, terutama bagi investor. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Schipper dan Vincent (2003) yang menyimpulkan bahwa kualitas laba yang baik digunakan sebagai penentu pengambilan keputusan. Adanya masalah keagenan dalam perusahaan memungkinkan adanya tindakan manipulasi atau manajemen laba dalam proses penyajian laba sehingga kualitas laba juga akan lebih rendah. Rendahnya kualitas laba dapat membuat kesalahan pengambilan keputusan kepada para pemakainya sehingga mengurangi tingkat kegunaan laporan keuangan.

2.3 Manajemen Laba

Manajemen laba terjadi pada saat manajer menggunakan pertimbangannya dalam menyusun laporan keuangan, baik untuk tujuan menyesatkan beberapa pemangku kepentingan atas kinerja ekonomis perusahaan maupun untuk mempengaruhi pendapatan kontraktual yang nilainya bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 1999).

Terdapat dua tujuan yang memotivasi manajer melakukan manajemen laba, yaitu tujuan oportunistik dan tujuan informasi (*signaling*) kepada investor (Jiraporn *et al.*, 2006).

Tujuan oportunistis mungkin dapat merugikan pemakai laporan keuangan karena informasi yang disampaikan manajemen menjadi tidak akurat dan juga tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Sikap oportunistis ini dinilai sebagai sikap curang manajemen perusahaan yang diimplikasikan dalam laporan keuangannya pada saat menghadapi *intertemporal choice* (kondisi yang memaksa eksekutif tersebut menggunakan keputusan tertentu dalam melaporkan kinerja yang menguntungkan bagi dirinya sendiri ketika menghadapi situasi tertentu).

Manajemen laba tidak selalu berdampak buruk bagi pengguna laporan keuangan, manajemen laba yang dilakukan untuk tujuan informatif (*signaling*) kemungkinan besar membawa dampak yang baik bagi pemakai laporan keuangan. Manajer akan berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat diraih oleh perusahaan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, karena manajer sangat erat kaitannya dengan keputusan yang berhubungan dengan aktivitas investasi maupun operasi perusahaan, otomatis para manajer memiliki informasi yang lebih baik mengenai prospek perusahaan masa mendatang. Oleh karena itu, manajer dapat mengestimasi secara baik laba di masa mendatang dan diinformasikan kepada investor atau pengguna laporan keuangan lainnya.

Gunny (2009) menyatakan bahwa manajemen laba dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Manajemen akrual menunjukkan tindakan manajemen yang menyembunyikan kinerja ekonomis yang sebenarnya dengan memilih kebijakan metode akuntansi yang digunakan tetapi fleksibilitas pilihan metode akuntansi tersebut masih berada di dalam ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Dechow dan Skinner, 2000). Manajemen laba akrual tidak dilakukan dengan mengubah aktivitas ekonomi perusahaan yang mendasarinya melainkan melalui pilihan metode akuntansi yang digunakan untuk merepresentasikan aktivitas yang mendasarinya tersebut.

Sementara, manajemen laba riil atau dikenal juga dengan manipulasi aktivitas riil terjadi ketika pihak manajemen perusahaan mengubah waktu dan struktur suatu aktivitas operasi, investasi, dan/atau pendanaan untuk mempengaruhi hasil dari sistem akuntansi (Gunny, 2009). Manajemen laba riil ini dilakukan dengan memanipulasi aktivitas riil dalam upaya untuk meningkatkan laba saat ini. Manipulasi ini terjadi sepanjang periode akuntansi dengan tujuan untuk memenuhi target laba tertentu, menghindari kerugian, dan mencapai target perkiraan analis.

Menurut Roychowdhury (2006), manajemen laba riil melalui aktivitas operasi dapat dilakukan melalui:

a. Manipulasi penjualan

Roychowdhury (2006) mendefinisikan manipulasi penjualan sebagai usaha manajemen untuk meningkatkan penjualan dengan menawarkan potongan harga dan memperlunak kredit yang diberikan. Jackson dan Wilcox (2000) dalam Xu, Taylor, dan Dugan (2007) menemukan bahwa manajer memberikan pengurangan harga jual pada kuartar keempat untuk menghindari kerugian dan penurunan dalam laba dan penjualan. Peningkatan volume penjualan akibat penawaran potongan harga pada waktu tertentu akan menyebabkan arus kas masuk menjadi lebih besar. Namun, arus kas masuk per penjualan lebih rendah dari arus kas per penjualan normal karena potongan bersih yang berasal dari tambahan penjualan. Dengan kata lain, sebenarnya terjadi penurunan margin. Penurunan margin akibat potongan harga menyebabkan biaya produksi relatif terhadap penjualan menjadi tinggi secara abnormal. Cara lain yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan volume penjualan adalah dengan menawarkan kredit yang lebih ringan, seperti menawarkan tingkat bunga kredit yang lebih rendah (*zero-percent financing*) pada akhir tahun fiskal.

b. Pengurangan biaya diskresioner

Biaya diskresioner adalah beban bagi perusahaan saat periode terjadinya pengeluaran tersebut atau yang disebut dengan *period costs* dimana pihak manajemen memiliki kendali dalam menentukan besar beban tersebut. Biaya ini tidak berkaitan langsung dengan produksi *output*, seperti biaya promosi atau iklan, biaya penelitian dan pengembangan (R&D), serta biaya penjualan, umum, dan administrasi (SG&A). Dengan kendali yang dimilikinya, pihak manajemen dapat mengurangi biaya-biaya diskresioner ini untuk mengurangi beban yang dilaporkan dan meningkatkan laba. Hal ini kemungkinan besar terjadi apabila biaya-biaya tersebut tidak menghasilkan pendapatan dan laba dengan segera.

c. Produksi yang berlebihan (*overproduction*)

Overproduction adalah usaha meningkatkan produksi dengan tujuan melaporkan harga pokok penjualan yang lebih rendah. Tingkat produksi yang tinggi akan membuat biaya tetap tersebar pada jumlah unit yang lebih besar sehingga menghasilkan biaya tetap per unit yang lebih rendah. Selama penurunan biaya tetap per unit tidak diimbangi dengan peningkatan biaya marjinal per unit, biaya total per unit akan menurun. Hal ini akan menyebabkan harga pokok penjualan yang dilaporkan lebih rendah dan perusahaan dapat melaporkan margin operasi yang lebih tinggi. Akan tetapi, perusahaan akan menanggung *production* dan *holding cost* yang lebih besar atas kelebihan produksi yang tidak dapat ditutupi pada periode yang sama dengan besarnya penjualan produk. Akibatnya, arus kas kegiatan operasi pada periode tersebut akan lebih rendah dari arus kas kegiatan operasi yang normal pada level penjualan yang sama.

2.4 Relevansi Nilai Laba

Beaver (1998) menerangkan bahwa suatu angka akuntansi dikatakan memiliki relevansi nilai jika mempunyai hubungan dengan nilai pasar ekuitas. Menurut penelitian ini,

jika suatu informasi memang berguna, investor akan menyesuaikan perilaku mereka sehingga pasar akan menanggapi melalui perubahan harga saham. Dengan demikian, informasi dianggap memiliki relevansi nilai jika pergerakan harga saham dapat diasosiasikan dengan adanya publikasi informasi tersebut. Konsisten dengan pendapat Beaver (1998), Barth *et al.* (1998) menyatakan bahwa tujuan melakukan pengujian relevansi nilai adalah memperluas pengetahuan tentang relevansi dan reliabilitas angka-angka akuntansi yang tercermin dalam nilai saham.

Pengujian relevansi nilai data akuntansi biasanya dilakukan dengan menganalisis hubungan antara data akuntansi. Salah satunya adalah laba akuntansi dengan harga pasar saham. Banyak penelitian membuktikan adanya hubungan yang sangat erat antara laba dengan tingkat *return* saham perusahaan (Ball dan Brown, 1968; Beaver, 1968). Ball dan Brown (1968) menyimpulkan bahwa ada informasi berharga dalam pelaporan akuntansi perusahaan yang tercermin pada perubahan nilai harga saham sesaat setelah dikeluarkannya informasi tersebut. Pengujian hubungan antara laba dan *return* saham ini dapat dijadikan sebagai ukuran dalam melihat penyajian laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara jujur atau *representational faithfulness* (Fitriany, 2011).

Hubungan antara laba dan return saham dapat ditunjukkan oleh Koefisien Respon Laba (*Earnings Response Coefficient-ERC*). Nayar dan Rozeff (1992) dalam Murwaningsari (2011) menyatakan bahwa ERC adalah suatu koefisien yang menyatakan seberapa besar respon yang terkandung dalam harga saham (*return* atau *unexpected return*) terhadap perubahan laba (*earnings* atau *unexpected earnings*). Kemudian Scott (2012) mendefinisikan ERC sebagai ukuran seberapa besar harga saham merespon angka laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Semakin besar koefisien respon laba (ERC) yang dilaporkan mengindikasikan semakin baik kualitas laba yang dilaporkan.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Hubungan Manajemen Laba Riil dan Arus Kas Kegiatan Operasi

Manipulasi penjualan digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan penjualan secara temporer pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk mencapai target laba. Tindakan yang dilakukan dalam manipulasi penjualan adalah pemberian potongan harga dan kredit yang lebih ringan. Peningkatan jumlah penjualan memang menyebabkan laba tahun berjalan tinggi tetapi arus kas menurun akibat adanya penjualan kredit dan potongan harga. Oleh karena itu, aktivitas manipulasi penjualan menyebabkan arus kas masuk per penjualan lebih rendah daripada arus kas per penjualan normal. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah

H_{1a}: Perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba riil memiliki arus kas masuk yang lebih rendah daripada perusahaan lainnya.

Hubungan Manajemen Laba Riil dan Biaya Diskresioner

Roychowdhury (2006) menyebutkan bahwa biaya diskresioner merupakan penjumlahan dari biaya iklan, biaya penelitian dan pengembangan, serta biaya penjualan, umum, dan administrasi. Pihak manajemen memiliki kendali yang besar atas biaya ini sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya diskresioner dalam melakukan manipulasi aktivitas riil. Pengurangan biaya diskresioner ini dimaksudkan untuk meningkatkan laba sehingga target laba yang telah ditetapkan tercapai.

Dengan demikian, diperoleh hipotesis sebagai berikut.

H_{1b}: Perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba riil memiliki biaya diskresioner yang lebih rendah daripada perusahaan lainnya.

Hubungan Manajemen Laba Riil dan Biaya Produksi

Tingkat produksi yang tinggi akan membuat biaya tetap tersebar pada jumlah unit yang lebih besar sehingga menghasilkan biaya tetap per unit yang lebih rendah. Selama penurunan biaya tetap per unit tidak diimbangi dengan peningkatan biaya marjinal per unit, biaya total per unit akan menurun. Hal ini akan menyebabkan harga pokok penjualan yang dilaporkan lebih rendah dan perusahaan dapat melaporkan margin operasi yang lebih tinggi. Akan tetapi, perusahaan akan menanggung *production* dan *holding cost* yang lebih besar atas kelebihan produksi yang tidak dapat ditutupi pada periode yang sama dengan besarnya penjualan produk. Akibatnya, arus kas kegiatan operasi pada periode tersebut akan lebih rendah dari arus kas kegiatan operasi yang normal pada level penjualan yang sama. Dengan demikian, diperoleh hipotesis sebagai berikut.

H_{1c}: Perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba riil memiliki biaya produksi yang lebih tinggi daripada perusahaan lainnya.

2.5.2 Hubungan Manajemen Laba Riil dan Relevansi Nilai Laba

Laba merupakan salah satu informasi dalam laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, terutama oleh investor. Akan tetapi, ketika perusahaan memiliki motivasi untuk melakukan manajemen laba dalam pelaporan keuangan, kualitas laba akan dipertanyakan. Laba tidak relevan lagi digunakan dalam pengambilan keputusan karena laba yang dilaporkan ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, manajemen laba riil yang dilakukan oleh untuk mencapai target laba dapat mempengaruhi relevansi nilai laba (Fazeli dan Rasouli, 2011). Dengan demikian hipotesis berikutnya adalah

H₂ : Praktek manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan, biaya diskresioner, dan biaya produksi berpengaruh negatif terhadap relevansi nilai laba yang dilaporkan oleh perusahaan.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002-2011. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti *Data stream*, *Reuters Knowledge*, *website BEI*, *Yahoo! Finance*, serta laporan tahunan (*annual report*).

Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan analisis *pooled data*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Dalam melakukan analisis regresi linier berganda juga dilakukan pengujian hipotesis tentang asumsi heteroskedastisitas dan autokolinearitas suku kesalahan random dari model dan menguji tingkat multikolinearitas.

3.2 Model Penelitian

3.2.1 Model Penelitian Hipotesis 1

Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 merupakan replikasi dari model Roychowdhury (2006). Untuk mengetahui hasil pengujian terhadap hipotesis 1a, peneliti menggunakan persamaan berikut.

$$ABN_CFO_i = \alpha + \beta_1(SUSPECT_NI)_i + \beta_2(SIZE_{t-1})_i + \beta_3(MTB_{t-1})_i + \beta_4(ROA)_i + \varepsilon_i$$

..... (3.1)

Hipotesis 1b diuji dengan persamaan berikut.

$$ABN_DISEXP_i = \alpha + \beta_1(SUSPECT_NI)_i + \beta_2(SIZE_{t-1})_i + \beta_3(MTB_{t-1})_i + \beta_4(ROA)_i + \epsilon_i \dots\dots\dots (3.2)$$

Sementara, pengujian terhadap hipotesis 1c menggunakan persamaan berikut

$$ABN_PROD_i = \alpha + \beta_1(SUSPECT_NI)_i + \beta_2(SIZE_{t-1})_i + \beta_3(MTB_{t-1})_i + \beta_4(ROA)_i + \epsilon_i \dots\dots\dots (3.3)$$

3.2.2 Model Penelitian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 mengacu pada model yang digunakan Fazeli dan Rasouli (2011) dengan persamaan berikut.

$$P_i = \alpha + \beta_1(ABN_CFO)_i + \beta_2(ABN_DISEXP)_i + \beta_3(ABN_PROD)_i + \beta_4(SIZE)_i + \beta_5(LEV)_i + \beta_5(MTB)_i \dots\dots\dots (3.4)$$

Keterangan:

- ABN_CFO_i : arus kas kegiatan operasi abnormal pada perusahaan i
- ABN_DISEXP_i: biaya produksi abnormal pada perusahaan i
- ABN_PROD_i : biaya produksi abnormal pada perusahaan i
- SUSPECT_NI_i : variabel indikator dengan nilai 1 untuk perusahaan *suspect* dan nilai 0 untuk yang lain (*rest of the sample*)
- SIZE_i : ukuran perusahaan i
- MTB_i : peluang pertumbuhan perusahaan i
- ROA_i : profitabilitas perusahaan i
- P_i : harga saham pada perusahaan i
- LEV_i : struktur modal perusahaan i



3.3 Operasionalisasi Variabel

3.3.1 Operasionalisasi Variabel Model 1

1. Variabel Dependen

- Arus Kas Kegiatan Operasi Abnormal (ABN_CFO)

Arus kas kegiatan operasi abnormal merupakan nilai *residual* dari model persamaan Roychowdhury (2006) berikut.

$$\frac{CFO_i}{(A_{t-1})_i} = \alpha_0 + \alpha_1 \left(\frac{1}{(A_{t-1})_i} \right) + \beta_1 \left(\frac{S_i}{(A_{t-1})_i} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta S_i}{(A_{t-1})_i} \right) + \epsilon_i \dots\dots\dots (3.5)$$

Keterangan:

CFO_i : arus kas kegiatan operasi pada perusahaan i

(A_{t-1})_i : total aset tahun t-1 pada perusahaan i

S_i : penjualan pada perusahaan i

ΔS_i : selisih antara penjualan tahun t dengan penjualan tahun t-1 pada perusahaan i

- Biaya Diskresioner Abnormal (ABN_DISEXP)

Biaya diskresioner abnormal (ABN_DISEXP) merupakan nilai *residual* dari model persamaan Roychowdhury (2006) berikut.

$$\frac{DISEXP_i}{(A_{t-1})_i} = \alpha_0 + \alpha_1 \left(\frac{1}{(A_{t-1})_i} \right) + \beta_1 \left(\frac{(S_{t-1})_i}{(A_{t-1})_i} \right) + \epsilon_i \dots\dots\dots (3.6)$$

Keterangan:

DISEXP_i : biaya diskresioner pada perusahaan i

(A_{t-1})_i : total aset tahun t-1 pada perusahaan i

(S_{t-1})_i : penjualan tahun t-1 pada perusahaan i

- Biaya Produksi Abnormal (ABN_PROD)



Biaya produksi abnormal (ABN_PROD) merupakan nilai *residual* dari model persamaan Roychowdhury (2006) berikut

$$\frac{PROD_i}{(A_{t-1})_i} = \alpha_0 + \alpha_1 \left(\frac{1}{(A_{t-1})_i} \right) + \beta_1 \left(\frac{S_i}{(A_{t-1})_i} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta S_i}{(A_{t-1})_i} \right) + \beta_3 \left(\frac{(\Delta S_{t-1})_i}{(A_{t-1})_i} \right) + \varepsilon_i \dots (3.7)$$

Keterangan:

PROD_i : biaya produksi pada perusahaan i, dimana PROD_t = COGS_t + ΔINV_t

(A_{t-1})_i : total aset tahun t-1 pada perusahaan i

S_i : penjualan pada perusahaan i

ΔS_i : penjualan tahun t dikurangi penjualan tahun t-1 pada perusahaan i

ΔS_{t-1} : penjualan tahun t-1 dikurangi penjualan tahun t-2 pada perusahaan i

2. Variabel Independen

SUSPECT_NI merupakan variabel *dummy*, nilai 1 untuk perusahaan *suspect* dan nilai 0 untuk yang lainnya. Perusahaan *suspect* merupakan perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba. Menurut Roychowdhury (2006), yang tergolong perusahaan *suspect* adalah perusahaan dengan laba sebelum pos luar biasa yang diskala dengan total aset berada di antara 0 sampai 0,005.

3. Variabel Kontrol

- Ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh terhadap arus kas kegiatan operasi, biaya diskresioner, dan biaya produksi. Perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki kecenderungan lebih rendah dalam melakukan manajemen laba sehingga arus kas kegiatan operasi dan biaya diskresioner tidak mengalami penurunan dan tidak terjadi peningkatan biaya produksi (Lang dan Lundholm, 1993; Cameran, Prencipe, dan Trombetta, 2008).
- Perusahaan-perusahaan dengan peluang pertumbuhan (MTB) yang tinggi cenderung tidak melakukan manajemen laba sehingga tidak terjadi penurunan arus kas kegiatan operasi dan biaya dan peningkatan biaya produksi (Skinner dan Sloan, 2002).

- Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung melakukan manajemen laba sehingga akan berpengaruh terhadap arus kas kegiatan operasi, biaya diskresioner, dan biaya produksi. (Jiraporn, 2006; Rath dan Sun, 2008).

3.3.2 Operasionalisasi Variabel Model 2

1. Variabel Dependen

Pada penelitian ini, relevansi nilai laba diproksi oleh harga saham perusahaan pada akhir bulan ketiga tahun $t+1$, untuk melihat pengaruh manajemen laba riil terhadap harga saham setelah laba dilaporkan.

2. Variabel Independen

Manajemen laba riil dapat dilakukan melalui manipulasi penjualan, biaya diskresioner, dan biaya produksi. Oleh karena itu, manajemen laba riil melalui ketiga indikator ini (ABN_CFO, ABN_DISEXP, ABN_PROD) memiliki pengaruh yang negatif terhadap relevansi nilai laba.

3. Variabel Kontrol

- Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh positif terhadap harga saham karena kualitas laba yang lebih besar pada perusahaan besar akan memberikan keuntungan per saham yang besar sehingga pada saat pengumuman laba harga saham meningkat (Gul *et al.*, 2003).
- Struktur modal dilihat dari *debt ratio* (LEV) yang dimiliki oleh perusahaan. Pada perusahaan yang memiliki lebih banyak utang, setiap peningkatan laba akan dirasakan oleh pemberi pinjaman sebagai suatu keamanan, sebab apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka kreditor akan mendapat prioritas dalam pelunasannya, tetapi tidak demikian untuk pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan yang tinggi tingkat utangnya akan berpengaruh negatif terhadap harga saham (Dhaliwal, Lee, dan Fargher, 1991).

- Perusahaan yang mengalami pertumbuhan (MTB) yang tinggi akan memiliki harga saham yang tinggi karena probabilitas perusahaan untuk mengalami likuidasi usaha akan menurun (Zhang, 2000).

4. Analisis Hasil Penelitian

4.1 Hasil Pemilihan Sampel

Tabel 1 menunjukkan ringkasan pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.1

Ringkasan Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan publik yang terdaftar di BEI pada akhir tahun 2011	458
Perusahaan yang tidak termasuk dalam industri manufaktur	(325)
Perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur	133
Jumlah observasi selama 10 tahun (2002-2011): 133 x 10	1330
Jumlah sampel perusahaan-tahun dengan informasi keuangan tidak lengkap pada periode 2002-2011	(332)
Total sampel penelitian	998

4.2 Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel yang terdapat di Lampiran 1, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata besaran arus kas kegiatan operasi abnormal (ABN_CFO) dalam jutaan rupiah adalah Rp 97.742,95; nilai rata-rata besaran biaya diskresioner abnormal (ABN_DISEXP) dalam jutaan rupiah adalah Rp -89.257,93; dan nilai rata-rata besaran biaya produksi abnormal (ABN_PROD) dalam jutaan rupiah adalah Rp 32.402,53. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap nol, dimana kondisi nol menunjukkan bahwa nilai normal sama dengan nilai aktual atau dengan kata lain tidak ada nilai abnormal yang muncul. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata terdapat perusahaan publik manufaktur di Indonesia yang melakukan manipulasi aktivitas riil melalui ketiga indikator tersebut.

Keseluruhan sampel penelitian memiliki rata-rata total aset (dalam jutaan) sebesar Rp 3.539,866,20 dengan nilai maksimum sebesar Rp 152.113.000 dan nilai minimum sebesar Rp 11.222,87. Sementara nilai pasar dari ekuitas (dalam jutaan) memiliki nilai rata-rata Rp 2.766,95 dengan nilai maksimum sebesar Rp 223.873,80 dan nilai minimum sebesar Rp 3,36. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel penelitian bervariasi dari perusahaan yang berukuran kecil hingga perusahaan yang berukuran besar.

Variabel harga (P) juga memiliki rentang nilai yang sangat tinggi yang mengindikasikan variasi data dalam variabel ini. Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel P memiliki nilai minimum Rp 10,00 dan nilai maksimum Rp 450.000,00. Nilai minimum ini dimiliki oleh Davomas Abadi Tbk, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Multi Bintang Indonesia Tbk. Rendahnya harga saham Davomas Abadi Tbk disebabkan penurunan permintaan kakao olahan dunia akibat krisis keuangan di Eropa. Sementara itu, tingginya harga saham Multi Bintang Indonesia Tbk disebabkan karena adanya peningkatan laba yang cukup signifikan sejak tahun 2008.

Nilai rata-rata *leverage* (LEV) sampel penelitian sebesar 0,27, artinya rasio hutang sampel penelitian sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata kegiatan usaha sampel penelitian didanai sebagian besar dari ekuitas, bukan dari hutang.

Dari variabel *market-to-book value*, baik MTB_{t-1} maupun MTB_t , dapat dilihat juga bahwa rata-rata rasio ini berturut-turut adalah sebesar 2,69 dan 2,72 dengan maksimum sebesar 164,18 dan nilai minimum sebesar 0,04. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan sampel pada tahun 2002-2011 dalam posisi memiliki peluang yang baik untuk bertumbuh karena rata-rata rasio antara *market value of equity* dan *book value of equity* perusahaan bernilai positif.

Return on asset (ROA) memiliki nilai minimum -1,44. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang mengalami kerugian pada periode penelitian, 2002-2011. Variabel SUSPECT_NI yang bernilai 0 sebesar 93,19%, sedangkan yang bernilai 1 sebesar 6,81%. Hal ini berarti bahwa mayoritas sampel dalam penelitian cenderung tidak melakukan manajemen laba riil.

Penyebaran data-data variabel dalam penelitian dapat dilihat dari standar deviasi. Secara umum, standar deviasi dari setiap variabel jauh lebih besar daripada nilai rata-ratanya. Standar deviasi yang tinggi ini menunjukkan penyebaran data-data untuk setiap variabel tinggi.

4.3 Analisis Hasil Pengujian Hipotesis 1

Pengolahan data dilakukan setelah dilakukan uji asumsi klasik dan data bebas dari gejala multikolinieritas, heterokedastisitas dan normalitas data telah tercapai. Hasil regresi dapat dilihat pada lampiran 2. Hasil regresi menunjukkan bahwa manajemen laba riil berpengaruh terhadap arus kas kegiatan operasi, biaya diskresioner, dan biaya produksi. Manajemen laba riil berpengaruh negatif terhadap arus kas kegiatan operasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang diduga manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan memiliki arus kas dari kegiatan operasi yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Roychowdhury (2006). Perusahaan yang melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan menawarkan potongan harga dan memperlunak kredit yang diberikan untuk meningkatkan penjualan. Namun, sebenarnya arus kas kegiatan operasi perusahaan mengalami penurunan.

Manajemen laba riil juga berpengaruh negatif terhadap biaya diskresioner yang berarti perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba riil memiliki biaya diskresioner yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan manajemen riil. Dalam

melakukan manajemen laba riil, perusahaan mengurangi biaya-biaya diskresioner ini untuk mengurangi beban yang dilaporkan dan meningkatkan laba (Roychowdhury, 2006). Oleh karena itu, untuk mencapai target laba, manajemen dapat memperlihatkan biaya diskresioner yang sangat rendah.

Namun, praktek manajemen laba riil memiliki pengaruh positif terhadap biaya produksi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Roychowdhury (2006), perusahaan cenderung melakukan manajemen laba riil dengan menghasilkan produk secara berlebihan (*overproduction*). Tingkat produksi yang tinggi akan membuat biaya tetap tersebar pada jumlah unit yang lebih besar sehingga menghasilkan biaya tetap per unit yang lebih rendah. Selama penurunan biaya tetap per unit tidak diimbangi dengan peningkatan biaya marjinal per unit, biaya total per unit akan menurun. Hal ini akan menyebabkan harga pokok penjualan yang dilaporkan lebih rendah dan perusahaan dapat melaporkan margin operasi yang lebih baik. Akan tetapi, perusahaan akan menanggung *production* dan *holding cost* yang lebih besar atas kelebihan produksi.

Hasil regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap arus kas dari kegiatan operasi dan biaya produksi. Sesuai dengan penelitian Lang dan Lundholm (1993) dan Cameran, Prencipe, dan Trombetta (2008), perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki kecenderungan lebih rendah dalam melakukan manajemen laba. Menurut Kim, Liu, dan Rhee (2003), hal ini disebabkan perusahaan dengan ukuran besar memiliki pengendalian internal yang lebih baik dan auditor internal yang lebih dapat diandalkan dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Selain itu, hampir sebagian besar perusahaan besar diaudit oleh KAP *big 5* dengan auditor yang lebih berpengalaman. Perusahaan besar juga memperhitungkan *reputation cost* ketika melakukan manajemen laba karena perusahaan besar memiliki kredibilitas dalam *business community* dan *social responsibility*. Dan terakhir, perusahaan besar lebih jarang melakukan manajemen laba karena dipantau oleh *financial*

analyst. Ketika perusahaan besar cenderung tidak melakukan manajemen laba, termasuk manajemen laba melalui aktivitas riil, perusahaan tidak akan mengalami penurunan arus kas kegiatan operasi dan peningkatan biaya produksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap arus kas operasi, biaya diskresioner, dan biaya produksi. Perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung melakukan manajemen laba, termasuk manajemen laba riil karena perusahaan ini mengalami keterbatasan finansial dan memiliki fluktuasi laba yang sangat tinggi (Rath dan Sun, 2008). Dengan demikian, perusahaan kecil cenderung memiliki arus kas operasi dan biaya diskresioner yang lebih rendah serta biaya produksi yang lebih tinggi akibat adanya praktek manajemen laba riil.

Sementara, hasil pengujian terhadap variabel MTB memperlihatkan bahwa peluang pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap arus kas kegiatan operasi, tetapi berpengaruh biaya diskresioner dan biaya produksi. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan sampel adalah perusahaan yang sudah mapan atau *mature* sehingga peluang pertumbuhan bukan merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi manajemen laba atau perusahaan yang ingin menunjukkan pertumbuhan tinggi tidak dilakukan melalui manajemen laba (Murwaningsari, 2011). Oleh karena itu, peluang pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap arus kas kegiatan operasi.

Analisis Hasil Pengujian Hipotesis 2

Lampiran 3 menunjukkan pengaruh praktek manajemen laba riil, yang diproksi oleh arus kas operasi abnormal, biaya diskresioner abnormal, dan biaya produksi abnormal, terhadap relevansi nilai laba.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa manajemen laba riil melalui biaya produksi berpengaruh negatif terhadap relevansi nilai laba yang dilaporkan. Akan tetapi, dalam penelitian ini manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan dan biaya diskresioner tidak berpengaruh terhadap relevansi nilai laba. Hal ini dimungkinkan karena manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan dan biaya diskresioner tidak menimbulkan biaya yang lebih tinggi pada periode akuntansi yang berjalan. Tidak seperti manajemen laba riil dengan melakukan *overproduction*, perusahaan harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi pada periode tersebut. Sehingga manajemen riil melalui over production akan menyebabkan reliabilitas laba yang rendah sehingga dapat menurunkan relevansi nilai laba.

Pengujian variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan hasil yang positif signifikan, artinya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap relevansi nilai laba. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gul et al.(2003). Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap harga saham karena kualitas laba yang lebih besar pada perusahaan besar akan memberikan keuntungan per saham yang besar sehingga pada saat pengumuman laba harga saham meningkat.

Variabel struktur modal (LEV) berpengaruh negatif terhadap relevansi nilai laba. Pada perusahaan yang memiliki lebih banyak utang, setiap peningkatan laba akan dirasakan oleh pemberi pinjaman sebagai suatu keamanan, sebab apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka kreditor akan mendapat prioritas dalam pelunasannya, tetapi tidak demikian untuk pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan yang tinggi tingkat utangnya akan berpengaruh negatif terhadap harga saham (Dhaliwal, Lee, dan Fargher, 1991).

Hasil pengujian variabel peluang pertumbuhan memberikan hasil positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham lebih tinggi untuk perusahaan dengan peningkatan laba karena kemungkinan kecil mengalami pemberhentian usaha (Zhang, 2000).

5. Kesimpulan, Keterbatasan, Saran dan Implikasi Penelitian

5.1 Kesimpulan

Hasil temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa praktek manajemen laba riil melalui ketiga indikator tersebut dilakukan oleh perusahaan publik yang bergerak di bidang industri manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh praktek manajemen laba riil terhadap arus kas dari kegiatan operasi, biaya diskresioner, dan biaya produksi. Penelitian ini membuktikan praktek manajemen laba riil berpengaruh negatif terhadap arus kas dari kegiatan operasi perusahaan dan biaya diskresioner dan berpengaruh positif terhadap biaya produksi secara signifikan.

Selain itu, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh praktek manajemen laba riil, yang dapat dilakukan melalui manipulasi penjualan, biaya diskresioner, dan biaya produksi, terhadap relevansi nilai laba. Penelitian ini membuktikan bahwa manajemen laba riil melalui biaya produksi berpengaruh negatif terhadap relevansi nilai laba. Sementara, manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan dan biaya diskresioner tidak berpengaruh terhadap relevansi nilai laba. Hal ini dimungkinkan karena manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan dan biaya diskresioner tidak menimbulkan biaya yang lebih tinggi pada periode akuntansi yang berjalan sehingga tidak akan mempengaruhi kualitas laba yang dihasilkan.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

1. Penelitian ini tidak mengembangkan indikator manipulasi aktivitas riil potensial lain, terutama kegiatan investasi dan pendanaan. Penelitian ini hanya terbatas pada aktivitas operasi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan indikator manipulasi aktivitas riil potensial lain yang tidak dibahas dalam penelitian, seperti pengelolaan biaya kompensasi karyawan dan penundaan atau penyimpanan

pelaporan investasi pada modal untuk menghindari pelaporan biaya depresiasi yang terkait.

2. Penelitian ini tidak mempertimbangkan penggunaan proksi ERC (*Earnings Response Coefficient*) sebagai proksi relevansi nilai laba. Untuk itu, penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan penggunaan ERC (*Earning Response Coefficient*) sebagai proksi dalam mengukur relevansi nilai laba.

5.3 Implikasi Penelitian

5.3.1 Pihak Regulator

Adanya dampak negatif manajemen laba riil yang dilakukan oleh perusahaan terhadap relevansi nilai laba membuat Bapepam-LK sebagai pihak regulator Bursa Efek Indonesia seharusnya membuat peraturan dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan, terutama terhadap pengungkapan pada pos-pos pada laporan arus kas, terutama arus kas kegiatan operasi dan pos-pos pada laporan laba rugi. Selain itu, Bapepam-LK juga dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan praktek manajemen laba ini.

5.3.2 Pihak Investor

Dalam melakukan investasi, investor selalu mempertimbangkan laba yang dilaporkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Dengan demikian, para investor tidak salah dalam menginterpretasikan laba yang dihasilkan dan mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi.

Daftar Referensi

- Atiase, Rowland K. (1985). Predisclosure information, firm capitalization and security price behavior around earnings announcement. *Journal of Accounting Research*, 23(1), 21-36.
- Ball, Ray dan P. Brown. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. *Journal of Accounting Research*, 6(2), 159-178.
- Barth, M., W.H. Beaver, dan W.R. Landsman. (1998). Relative valuation roles of equity book value and net income as a function of financial health. *Journal of Accounting and Economics*, 25(1), 1-34.

- Barton, J. dan Simko, P. (2002). The balance sheet as an earnings management constraint. *Accounting Review*, 77, 1-27.
- Beaver, William H. (1998). *Financial reporting: An accounting revolution, 3rd edition*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Bernard, Victor L. dan T.L. Stober. (1989). The nature and amount of information in cash flows and accruals. *The Accounting Review*, 64, 624-652.
- Brown, P. R. (1999). Earnings management: A subtle (and troublesome) twist to earnings quality. *The Journal of Financial Statement Analysis*, 61-63.
- Bushman, Ravi. (1989). Collection of information about publicly traded firms: theory and evidence. *Journal of Accounting and Economics*, 11, 183-206.
- Cameran, Mara, A. Prencipe, M. Trombetta. (2008). Earnings management, audit tenure and auditor changes: does mandatory auditor rotation improve audit quality? *Working Paper*, Universita Bocconi, Milan, Italy.
- Chaney, Paul K., D.C. Jeter dan C.M. Lewi. (1996). The use of accruals in earnings management: A permanent earnings hypothesis. *Working Paper*. Vanderbilt University.
- Chtourou, Sonda M., J. Bedard, dan L. Courteau. (2001). Corporate governance and earnings management. *Working Paper*. Univ Laval, Quebec City, Canada.
- Collins, Daniel W. dan S.P. Kothari. (1989). An analysis of intemporal and cross-sectional determinants of earnings response coefficient. *Journal of Accounting Research*, 11, 143-182.
- Dechow, P. M. dan D. J. Skinner. (2000). Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. *Accounting Horizons*, 14(2), 235-250.
- Dhaliwal, Dan S., K.J. Lee, dan N.L Fargher. (1991). The association between unexpected earnings and abnormal security returns in the presence of financial leverage. *Contemporary Accounting Research*, 8(1), 20-41.
- Easton, Peter D. dan E. Zmijewski. (1989). Cross-sectional variation in the stock market response to accounting earnings announcement. *Journal of Accounting and Economics*. 11, 117-141.
- Fazeli, Yasin S. dan H. Rasouli. (2011). Real earnings management and the value relevance of earnings. *International Research Journal of Finance and Economics*, 62, 28-37.
- Fitriyani. (2011). Analisis komprehensif pengaruh kompetensi dan independensi akuntan publik terhadap kualitas audit. Disertasi pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia.
- Graham, John R., Harvey, Campbell R., Rajgopal, Shiva. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 40, 3-73.
- Gul, Ferdinand A., Funf, Simon Yu Kit., Jaggi, Bikki. (2009). Earnings quality: Some evidence on the role of auditor tenure and auditors' industry expertise. *Journal of Accounting and Economics*.
- Gunny, Katherine. (2009). The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks. *Working Paper*, University of Colorado.
- Healy, Paul M. dan J.M. Wahlen. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13, 365-383.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Penyajian laporan keuangan. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Jiraporn, Pornsit. (2006). ESOPs and earnings management: An empirical note. *Working Paper*, Great Valley School of Graduate Professional Studies, Pennsylvania State University.
- Kim, Y., C. Liu, dan S. G. Rhee. (2003). The relation of earnings management to firm size. *Working Paper*, University of Hawai'i.
- Murwaningsari, Etty. (2011). Hubungan derivatif keuangan dan *discretionary accruals* sebagai alat manajemen laba serta pengaruhnya terhadap relevansi nilai dari laba dan ekuitas. Disertasi pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia.
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42, 335-370.
- Scott, William R. (2012). *Financial accounting theory, 6th edition*. Boston, Pearson Education.
- Sloan, Richard D. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals about future earnings? *The Accounting Review*. 71(3). 289-315.
- Sun, Land an Rath, Subhrendu. (2008). An empirical analysis of earnings management in Australia. *Working Paper*, Curtin University of Technology, School of Economics and Finance.
- Watts, Ross L dan J.L. Zimmerman. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall Inc. Eaglewood Cliffs. New Jersey, USA.

- Whelan, Catherine dan R. McNamara. (2004). The impact of earnings management on the value relevance of financial statement information. *Social Science Research Network (SSRN)*. <http://www.ssrn.com>, Oktober 2012.
- Xu, Randall Z., Gary K. Taylor, dan Michael T. Dugan. (2007). Review of real earnings management literature. *Journal of Accounting Literature*, 26, 195-228.
- Zang, Amy Y. (2012). Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. *The Accounting Review*, 87, 675-703.
- Zhang, Guochang. (2000). Accounting information, capital investment decision and equity valuation: theory and empirical. *Journal of Accounting Research*, 38(2), 271-295.

Lampiran 1

Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Std. Deviation	Minimum	Maksimum	Skewness
P	4.597,90	400,00	21.951,28	10,00	450.000	12,19
ABN_CFO	97.742,95	-3.910,88	804.672,98	-2.909.569,19	9.556.268,86	5,85
ABN_DISEXP	-89.257,93	-24.502,64	746.660,48	-5.816.001,07	5.813.480,80	-1,90
ABN_PROD	32.402,53	26.591,89	1.449.019,93	-11.063.199,80	21.665.113,24	3,25
MV_{t-1}	2.766,95	244,49	12.276,26	3,36	223.873,80	10,26
MTB_{t-1}	2,69	0,92	8,72	0,04	164,18	10,60
ROA	0,04	0,03	0,12	-1,44	1,52	-0,47
TA	3.539.866,20	706.839,78	10.402.170,17	11.222,87	152.113.000	7,01
LEV	0,27	0,26	0,22	0	0,96	0,43
MTB_t	2,72	0,95	8,10	0,04	164,18	11,42
	Nilai	Persentase		Nilai	Persentase	
SUSPECT_NI	0	93,19%		1	6,81%	

Keterangan:
P = harga saham, ABN_CFO = nilai arus kas kegiatan operasi perusahaan (dalam jutaan rupiah), ABN_DISEXP = nilai biaya diskresioner abnormal (dalam jutaan rupiah), ABN_PROD = nilai biaya produksi abnormal (dalam jutaan rupiah), MV_{t-1} = market value of equity (dalam jutaan rupiah) pada tahun t-1, MTB_{t-1} = peluang pertumbuhan perusahaan pada t-1, ROA = tingkat pengembalian laba atas aset, TA = nilai total aset (dalam jutaan rupiah), LEV = struktur modal, MTB_t = peluang pertumbuhan perusahaan pada tahun t, SUSPECT_NI = nilai 1 untuk perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba riil dan nilai 0 untuk perusahaan lainnya.

Hasil Regresi Model Hipotesis 1

	Hipotesis 1a		Hipotesis 1b		Hipotesis 1c	
Intercept		-0,241534		0,099438		0,301382
		0,000***		0,104		0,002***
SUSPECT_NI	-	-0,030140	-	-0,059612	+	0,076782
		0,005***		0,000***		0,000***
SIZE_{t-1}	+	0,026310	+	0,007671	-	-0,028688
		0,000***		0,318		0,018**
MTB_{t-1}	+	0,001320	+	0,014441	-	-0,015894
		0,538		0,000***		0,006***
ROA	+	0,414243	+	0,345918	-	-0,854043
		0,000***		0,005***		0,000***
N	998		998		998	
R-squared	0,2400		0,1490		0,2853	
F-statistic	32,52		39,59		55,16	
p-Value	0,0000***		0,0000***		0,0000***	

Keterangan:

Variabel Dependen: ABN_CFO = nilai arus kas kegiatan operasi perusahaan; ABN_DISEXP = nilai biaya diskresioner abnormal; ABN_PROD = nilai biaya produksi abnormal. Variabel Independen: SUSPECT_NI = nilai 1 untuk perusahaan yang diduga melakukan manajemen laba riil dan nilai 0 untuk perusahaan lainnya. Variabel Kontrol: SIZE_{t-1} = ukuran perusahaan pada tahun t-1, MTB_{t-1} = peluang pertumbuhan perusahaan pada tahun t-1, ROA = tingkat pengembalian laba atas aset.

*** signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$

** signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$

* signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$



Hasil Regresi Model Hipotesis 2

Variabel	Hipotesis	Koefisien	t-Statistik	p-Value	VIF
Intercept		-4.633,72	-2,62	0,009***	
ABN_CFO	-	-1.534,43	-1,56	0,120	2,05
ABN_DISEXP	-	-63,94	-0,05	0,962	4,45
ABN_PROD	-	-5.079,93	-5,69	0,000***	6,05
SIZE	+	232,72	3,47	0,001***	1,14
LEV	-	-1.484,67	-3,36	0,001***	1,33
MTB	+	203,54	5,03	0,000***	1,14
N	998				
R-squared	0,3092				
F-statistic	35,43				
p-Value	0,0000***				
Keterangan:					
Variabel Dependen: P = harga saham. Variabel Independen: ABN_CFO = nilai arus kas kegiatan operasi perusahaan, ABN_DISEXP= nilai biaya diskresioner abnormal, ABN_PROD = nilai biaya produksi abnormal. Variabel Kontrol: SIZE = ukuran perusahaan, LEV = struktur modal, MTB = peluang pertumbuhan perusahaan.					
*** signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$					
** signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$					
* signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$					

Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Interaktif terhadap Kinerja Pembiayaan: *Knowledge Sharing* sebagai Faktor Mediasi

AKHMAD SAPUTRA BENAWA

YULIANSYAH YULIANSYAH*

LIZA ALVIA

Universitas Lampung

Abstract: *This study attempts to investigate the influence of interactive use of performance measurement systems enable to leverage the financing performance through knowledge sharing. This study is underlying by Resource Based View (RBV) Theory and Knowledge Based View (KBV) Theory.*

Based on a survey of 107 respondents in the banking organization both conventional and syari'a banks by applying SmartPLS 2.0 it was found that there is a direct effect of Interactive Use of Performance Measurement System (PMS) on the enhancement of Financing Performance. However, the indirect effect of Interactive Use of PMS through knowldege sharing as a mediating factors to improve financing performance is weak. Thus, knowledge sharing as mediating factors had no significant effect in improving the financing performance.

This study provides contributions for the banking industry to creates an interactive management control system that provides a competitive advantage products/services differently in order to improve the financing performance of the banking company. Besides that, provides contribution theory adds to the literature in management accounting.

Keywords: *Financing Performance, Interactive Use of PMS, Knowledge Sharing, Resource Based View, Knowledge Based View.*

* Corresponding author: Yully001@mymail.unisa.edu.au

1. Pendahuluan

Sistem pengukuran kinerja interaktif sangat erat kaitannya terhadap sistem pengendalian manajemen tentang prosedur dan proses yang digunakan anggota organisasi untuk merealisasi tujuan individu dan organisasi (de Waal, 2010; Ferreira & Otley, 2009; Otley, 1999; Otley & Berry, 1994; Simons, 2000). Peran sistem pengendalian manajemen (SPM) khususnya sistem pengukuran kinerja (SPK) dalam meningkatkan kinerja pembiayaan dalam industri perbankan sangat diperlukan karena menyangkut peran pengambilan keputusan dan sebagai alat pengawas bagi organisasi (Simons, 2000) serta mengurangi resiko atas kerugian piutang tak tertagih.

Secara umum, penelitian ini bertujuan mengkaji peran sistem pengendalian manajemen (SPM) khususnya pengaruh sistem pengukuran kinerja (SPK) interaktif dalam meningkatkan kinerja pembiayaan pada organisasi perbankan. Lebih khusus lagi, penelitian ini untuk melihat bagaimana hubungan antara sistem kinerja interaktif dan kinerja pembiayaan dapat diterangkan oleh *Knowledge Sharing* bagi karyawan perbankan dalam membuat keputusan pemberian kredit kepada nasabah baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kajian terdahulu dalam bidang management control system menunjukkan hubungan positif antara sistem pengukuran kinerja interaktif dan kinerja organisasi (Bisbe & Otley, 2004; Henri, 2006). Di industri perbankan SPM ini telah dibuktikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kinerja organisasi (Cobb, Helliard, & Innes, 1995; Davis & Albright, 2004; Lau & Tan, 1998) termasuk juga perannya dalam proses manajemen pembiayaan (Danos, Holt, & Imhoff Jr, 1989). Meskipun demikian, bukti penelitian secara empiris mengenai peranan sistem pengukuran kinerja interaktif dalam meningkatkan kinerja pembiayaan masih terbatas. Hal ini menjadikan alasan penulis untuk melakukan penelitian bagaimana peran system pengukuran kinerja interaktif dalam meningkatkan kinerja pembiayaan melalui *knowledge sharing*.

Adapun beberapa permasalahan yang muncul dalam proses pembiayaan yaitu pertama, ketidaktepatan bank dalam mengkaji keputusan untuk menerima maupun menolak usulan pembiayaan (Deakins & Hussain, 1994; Hartvigsen, 1992). Kedua adalah kurangnya kemampuan bank dalam melakukan pengawasan atas pembiayaan yang diberikan (Wei-Shong & Kuo-Chung, 2006). Oleh karena itu, dalam tataran perbankan di Indonesia yang diatur oleh Bank Indonesia mewajibkan perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Dalam rangka untuk mewujudkan hal tersebut maka perusahaan perbankan disarankan untuk menerapkan sistem penilaian kinerja baik secara diagnostik maupun interaktif. Namun, pada penelitian ini lebih menekankan penggunaan pengukuran kinerja interaktif karena pengukuran kinerja interaktif akan menstimulasi pembelajaran mengenai strategi dan meningkatkan konsentrasi top manager (Henri, 2006; Widener, 2007). Selain itu, penggunaan SPK interaktif memiliki karakteristik terhadap diskusi serta komunikasi antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dimana diskusi tersebut otomatis terjadi transfer pengetahuan (*knowledge sharing*). Knowledge sharing inilah yang akan mendorong adanya gagasan maupun strategi baru dalam organisasi. Dengan adanya *Knowledge Sharing* gagasan baru diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembiayaan baik dari segi kuantitatif maupun kualitas pembiayaan itu sendiri.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana perilaku pemberi dana dengan mempertimbangan bahwa: 1) Penelitian yang menjurus ke perilaku pengguna dana dalam mempengaruhi kinerja pembiayaan dengan mengacu pada permasalahan *moral hazard* yang dilakukan pelanggan (Khalil, Rickwood, & Murinde, 2002; Muhammad, 2005). 2) Khan (1995) menyatakan bahwa sebagai perantara keuangan, bank memiliki kekuatan untuk menentukan jenis pembiayaan yang akan diberikan. Untuk itu penelitian ini dilakukan berdasarkan perspektif teori RBV (*Resource Based View*) dimana penggunaan *Knowledge*

Sharing para manager bank dibutuhkan untuk dapat mendukung kemampuan organisasi dengan menciptakan komunikasi yang baik terhadap data yang diperoleh dan terkait proses pembuatan inovasi dalam pengambilan keputusan produk-produk pembiayaan.

Theresia dan Mujilan (2012) yang melakukan penelitian terhadap 141 manager level menengah dan non-manager pada bank komersil umum menemukan bahwa kecenderungan pada tingkat manager memiliki kehati-hatian dalam keterbukaan *mindedness*, *trust*, *Knowledge Sharing*, dan *performace* terhadap non-manager. Padahal untuk menyetujui pemberian keputusan pembiayaan seorang manager harus lebih menjalin komunikasi organisasi yang mengedepankan *Knowledge Sharing* sehingga dalam mengambil keputusan rencana strategi pembiayaan masa depan akan lebih efektif dan efisien dan mengurangi kemungkinan gagal bayar (Hartvigsen, 1992). Theresia dan Mujilan (2012) menemukan bahwa adanya perbedaan tingkat pendidikan yang diperoleh tiap pegawai menjadi masalah dalam penerapan komunikasi informasi khususnya pada perbankan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yang dapat diselesaikan salah satunya dengan meningkatkan *Knowledge Sharing*.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji penggunaan sistem pengukuran kinerja interaktif dapat meningkatkan *Knowledge Sharing* dalam proses pembelajaran yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja pembiayaan. Sehingga judul penelitian ini adalah ***“Pengaruh Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja Inetarktif terhadap Kinerja Pembiayaan: Peran Knowledge sharing sebagai Faktor Mediasi”***.

2. Telaah Literatur dan Perumusan Hipotesis

2.1. Telaah Literatur

2.1.1. Sistem Pengukuran Kinerja Interaktif (*Interactive use of Performance Measurement Systems*)

Manager menggunakan sistem pengukuran kinerja interaktif untuk menerapkan pembelajaran mengenai ketidakpastian strategi (Simons, 2000). Penggunaan pengukuran kinerja ini dapat membimbing manager meningkatkan pembelajaran organisasi melalui dialog dan perdebatan terhadap anggota perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi proses pengembangan strategi perusahaan (Kaplan & Norton, 1996, 2006; Simons, 1990, 1991, 2000). Penggunaan SPK interaktif lebih berfokus pada apa yang terjadi pada masa depan dan memiliki karakteristik adanya diskusi yang aktif dan sering di antara manager. Penggunaan SPK interaktif berfokus pada proses mendorong adanya gagasan maupun strategi baru. Dengan sistem yang interaktif, sistem pengendalian dapat berfungsi dalam proses diskusi, pembelajaran dan pembentukan gagasan baru (Bisbe & Malagueño, 2009; Burchell, Clubb, Hopwood, Hughes, & Nahapiet, 1980; Chenhall, Kallunki, & Silvola, 2011)

2.1.2. *Knowledge Sharing*

Knowledge Sharing diartikan sebagai suatu proses pembelajaran dengan cara membagi pengetahuan dalam hal ini pengetahuan pihak manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan keefektivan dari suatu nilai aktivitas yang dilakukan melalui transfer dan membagi pengetahuan tersebut dalam *scope intern* organisasi (Yang, 2011). *Knowledge Sharing* merupakan elemen penting bagi organisasi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan bersama inovasi perusahaan (Gold, Malhotra, & Segars, 2001; Liao, 2006; Liao & Hu, 2007).

Sistem pengukuran kinerja erat kaitannya dengan *Knowledge Sharing*. Choi, Lee, & Yoo (2010) mengatakan bahwa *Knowledge Sharing* yang baik harus didukung oleh sistem yang mampu menyajikan informasi yang baik pula karena untuk memperoleh keuntungan yang kompetitif organisasi harus mampu meningkatkan performa secara berkelanjutan, salah satunya dengan meningkatkan *Knowledge Sharing* antar anggota di dalamnya.

2.1.3. Kinerja Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank terkait yang pembiayaan perlu melakukan pemantauan dan pengawasan. Pembiayaan yang dijalankan dalam industri perbankan Indonesia berdasarkan cara pembayaran umumnya dijalankan berdasarkan cara perjanjian antara dalam industri perbankan Indonesia umumnya digolongkan dalam dua jenis yaitu pembiayaan berdasarkan kontrak pertukaran/kontrak jual beli dan pembiayaan berdasarkan kontrak bagi hasil (*profit sharing*). Pembiayaan berdasarkan kontrak pertukaran/jual beli, bank akan memberikan pembiayaan dalam bentuk barang atau jasa yang diperlukan nasabah dan selanjutnya, nasabah akan membayar kembali pembiayaan tersebut kepada bank sebesar *return* yang tetap seperti yang dijanjikan di awal perjanjian. Sedangkan pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan dimana penerima dana akan membayar keuntungan kepada bank sesuai dengan keuntungan yang diperoleh (Lewis & Algaoud, 2001).

Salah satu tolak ukur kinerja pembiayaan yang umum digunakan adalah dilihat dari kuantitas dan kualitas pembiayaan itu sendiri. Kajian dalam pembiayaan perbankan menunjukkan peran sistem pengendalian berpengaruh secara tidak langsung dengan kinerja pembiayaan (Beaulieu, 1994; Lawrence et al., 2002; serta Kwok, 2002). Selanjutnya, sikap pembelajaran

organisasi merupakan factor yang diperkirakan mempengaruhi kinerja pembiayaan (Nienhaus, 1983; Kuran, 1995; Lewis dan Algaoud, 2001). Dari kajian pendahuluan juga ditemukan bahwa SPM berpengaruh terhadap pembelajaran organisasi (Chenhall, 2005; Henri, 2006).

2.2. Perumusan Hipotesis

Sebelum menguraikan hipotesis atas masing-masing interaksi, berikut ini kami sajikan *research framework* atas penelitian ini:

===GAMBAR 1 DISINI===

Berdasarkan gambar 1 bahwa secara sederhana diasumsikan bahwa Sistem Pengukuran Kinerja Interaktif dapat meningkatkan *Knowledge Sharing* melalui diskusi serta komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, *Knowledge Sharing* akan meningkatkan pengetahuan anggota organisasi khususnya mengenai pembiayaan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembiayaan. Untuk lebih jelasnya pada bagian berikutnya adalah penjelasan masing-masing hipotesis atas framework penelitian

2.2.1. Pengaruh Penggunaan SPK Interaktif dan *Knowledge Sharing*

Simons (1990, 1994, 1995) menyatakan bahwa penggunaan sistem pengukuran kinerja (SPK) interaktif berperan meningkatkan ide baru. Kelebihan dari penggunaan SPK secara interaktif adalah manager dapat menyampaikan pesan kepada seluruh anggota organisasi agar berkonsentrasi pada berbagai permasalahan strategis dan ketidakpastian lingkungan. Hal ini akan berdampak pada penggunaan SPK interaktif untuk mendukung seluruh tingkatan manajemen agar berfokus pada pengumpulan informasi, melakukan diskusi dan pembahasan. Ketika seluruh anggota organisasi berkonsentrasi pada peluang dan ancaman, akan ada pembelajaran organisasi dalam bentuk *knowledge sharing*, dimana kemudian akan muncul ide atau gagasan baru.

SPK interaktif jika dihubungkan dengan Teori Resource Based View sangat erat kaitannya. Dalam teori tersebut menjelaskan bagaimana dalam rangka menjaga resource perusahaan dapat memberikan keunggulan kinerja perusahaan yang kompetitif dan bertahan lama dibutuhkan pengawasan dan pengukuran kinerja agar penggunaannya agar efektif dan efisien. Agar mampu menciptakan keunggulan dibutuhkan pembelajaran organisasi dalam menciptakan produk-produk yang berbeda dan sulit disanangi oleh kompetitor. Pengawasan secara vertikal yang dilakukan secara interaktif terhadap implementasi strategi, perbaikan maupun merubah strategi guna menghadapi ketidakpastian lingkungan yang dihadapi harus mampu diiringi kemampuan *resources* dalam hal ini pengetahuan SDM perusahaan agar berkontribusi dalam menciptakan keunggulan produk yang bernilai, langka, tak dapat dicontoh dan digantikan. Karena kinerja suatu divisi bisa menjadi tidak efisien dan efektif apabila biaya yang dibutuhkan untuk menciptakan keunggulan produk itu sendiri memakan biaya yang dianggap terlalu besar oleh perusahaan dan tidak layak, serta perusahaan tidak dapat menikmati *competitive advantage* yang maksimal dikarenakan penggunaan *resource* yang ada tidak seluruhnya memberikan kontribusi yang positif bagi pengimplementasian strategi. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa ada hubungan positif antara penggunaan SPK interaktif variabel *Knowledge Sharing*, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H1: Terdapat pengaruh positif antara penggunaan sistem pengukuran kinerja interaktif dan Knowledge Sharing.

2.2.2. Pengaruh *Knowldege Sharing* dan Kinerja Pembiayaan

Beberapa penelitian pendahuluan menemukan bahwa pembelajaran organisasi mampu meningkatkan kinerja organisasi (Bisbe dan Otley, 2004; Yuliansyah et al., 2012). Hubungan positif di antara pembelajaran organisasi dan kinerja dapat dijelaskan melalui resource-based view (Grant, 1991; Wernerfelt, 1994; Spender, 1996). Resource-based view menyatakan

bahwa sumber keunggulan daya-saing perusahaan bersumber dari sumber unik yang dimiliki perusahaan. Pengetahuan merupakan sumber yang sangat berharga bagi organisasi, dan penciptaan keunggulan daya saing sangat dipengaruhi oleh pengetahuan. Selanjutnya, penciptaan pengetahuan akan meningkatkan kemampuan organisasi. Peningkatan kemampuan tersebut akan diikuti dengan peningkatan kinerja perusahaan.

Peneliti memperkirakan bahwa pembelajaran organisasi yang diwakili penggunaan *Knowledge Sharing* akan berpengaruh positif terhadap kuantitas dan kualitas pembiayaan perbankan. Dalam kaitannya dengan kinerja pembiayaan, ada beberapa faktor yang dapat ditingkatkan melalui *Knowledge Sharing*. Beberapa faktor tersebut antara lain: kemampuan bank dalam menilai kelayakan proyek, peningkatan kemampuan dalam melakukan aktivitas pengawasan, peningkatan pemahaman pegawai dan manager bank kepada tujuan bank secara umum, serta mempercepat perubahan visi manager dalam pengembalian hutang nasabah terhadap pinjamannya.

Selanjutnya, meningkatnya kemampuan bank dalam melakukan proses pengawasan kepada pelanggan, menyebabkan kualitas pembiayaan bagi hasil akan meningkat. Meningkatnya kualitas pembiayaan tersebut akan meningkatkan keyakinan bank untuk memberikan pembiayaan dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas pembiayaan. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Knowledge Sharing* diharapkan akan meningkatkan kinerja pembiayaan baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas pembiayaan. Adapun hipotesis selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

H2: Terdapat pengaruh positif antara Knowledge Sharing terhadap kinerja pembiayaan.

2.2.3. Pengaruh SPK Interaktif terhadap Kinerja Pembiayaan

Penggunaan SPK interaktif berfokus kepada proses diskusi antara manager bawahan dan atasan berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan bawahan dan penyimpanan yang ada

(Simons 1990, 1994, 1995). Adanya kesempatan yang dapat dilakukan untuk melakukan proses tawar menawar ini kemungkinan akan meningkatkan pengendalian interaktif dalam mengontrol pihak pembuat kebijakan atas pengajuan pembiayaan nasabah. Misalnya, tawar menawar dengan atasan atas penyimpangan atau kesalahan analisis pemberian pembiayaan yang dilakukannya. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa semakin tinggi penggunaan PK interaktif, akan menghambat ketidakefektivan pembiayaan yang diberikan. Oleh itu, hipotesis yang dapat dirumuskan:

H3: *Terdapat pengaruh positif antara penggunaan sistem pengukuran kinerja secara interaktif terhadap kinerja pembiayaan.*

3. Metode Penelitian

3.1. Sampel Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, kami melakukan survey bagi manager dan non-manager di perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbankan. Adapun kami memilih perusahaan jasa karena perusahaan jasa adalah *unique* dan *interesting*. Dikatakan unik karena karakteristik dari sektor jasa adalah: *Intangible, heterogeneity, insparebility of product and consumption, dan perishability* (Auzair & Langfield-Smith, 2005; Cloninger & Oviatt, 2007; Edvardsson, 2005; Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1985). Sedangkan perusahaan jasa dikatakan menarik karena pertama, produk yang dihasilkan merupakan keseluruhan hasil kinerja, perjanjian, tindakan dan seterusnya dimana keuntungan kompetitif hanya muncul dengan menciptakan *customers satisfication* yang pada akhirnya meningkatkan *customer loyalty*. Kedua, heterogenitas dari perusahaan jasa dalam memberikan servis membuat penelitian di sektor jasa menjadi menarik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pada penelitian ini kami menggunakan metode survey yang dilakukan dengan menyebar kuesioner

kepadamanager level menengah dan non-manager yang bekerja di perusahaan bidang perbankan. Karena keterbatasan waktu dan biaya (*time and money constraint*), perusahaan perbankan yang di survey dalam studi ini adalah *Strategic Business Unit (SBU)* yang berlokasi di Bandar Lampung baik kantor cabang maupun kantor cabang pembantu.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum penulis menyebarkan kuesioner, penulis melakukan beberapa macam studi pendahuluan. Adapun tujuan studi pendahuluan ini yaitu untuk mengurangi kemungkinan permasalahan dalam menjawab pertanyaan atas kuesioner penelitian yang akhirnya akan berdampak terhadap rendahnya tingkat responsi responden (Holbrook, Young Ik, & Johnson, 2006; Morgan, 1990; Urbach & Ahlemann, 2010; Yuen, 2004). Studi pendahuluan pertama adalah masalah tata bahasa kuesioner dan akurasi terjemahan yang bersumber dari kuesioner asli berbahasa Inggris. Oleh karena itu, sangat perlu bagi penulis untuk melakukan terjemahan kuesioner asli ke dalam bahasa Indonesia. Studi pendahuluan pertama kami lakukan untuk meyakinkan bahwa bahasa terjemahan tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakmengertian responden dalam memahami pertanyaan dari kuesioner yang akhirnya akan menimbulkan bias dan rendahnya keinginan responden untuk mengisi kuesioner. Selain itu, studi pendahuluan ini juga dilakukan untuk melihat dan menguji keakurasian terjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

Studi pendahuluan ini melibatkan beberapa akademisi dan praktisi di bidang perbankan yang memiliki kemampuan bilingual lebih baik. Untuk membantu mereka dalam mengevaluasi kuesioner tersebut, penulis membuat *draft* kuesioner hasil terjemahan dan kuesioner asli berbahasa Inggris. Atas studi pendahuluan tersebut, penulis mendapatkan saran terhadap perbaikan kuesioner tersebut. Studi pendahuluan kedua yang kami lakukan adalah bertujuan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas atas kuesioner.

Selanjutnya proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner secara langsung maupun tidak dengan oleh peneliti. Pengumpulan secara langsung dilakukan dengan cara mengirimkan kuisisioner melalui pos dan mendatangi langsung bank-bank yang menjadi objek penelitian. Adapun metode tidak langsung dilakukan dengan cara meminta bantuan menyebarkan kuisisioner melalui kenalan, kerabat, maupun kolega peneliti yang bekerja di perusahaan perbankan. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode pemberian kuesioner kepada karyawan baik manager maupun non-manager yang mengetahui atau menangani secara langsung maupun tidak langsung mengenai proses pembiayaan di perusahaan perbankan tempat mereka bekerja.

3.3. Pengukuran Instrumen

3.3.1. Penggunaan Pengukuran Kinerja Interaktif

Responden ditanya seberapa besar pendapat mereka atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan skala likert 1-7 (jauh dibawah s/d jauh diatas rata-rata). Adapun indikator-indikator pertanyaan SPK interaktif adalah terkait pengukuran kinerja : 1) dalam mengevaluasi keputusan dan rencana, 2) evaluasi saat rapat kerja, 3) interaksi manajemen operasi dengan *top manager*, 4) dalam menghasilkan informasi untuk bahan diskusi aktif, 5) untuk membahas perubahan yang terjadi dalam unit kerja. Kuesioner penggunaan pengukuran kinerja interactive menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Abernethy dan Brownell (1999).

3.3.2. Knowledge Sharing

Knowledge Sharing merupakan proses transfer ilmu, metode, dan pengetahuan antar anggota organisasi untuk menciptakan kinerja tim secara efektif dalam suatu organisasi (Choi et al., 2010). Penggunaan *Knowledge Sharing* diukur menggunakan 1-7 point skala likert

(jauh dibawah s/d jauh diatas rata-rata). Instrumen ini dikembangkan oleh Choi *et al* (2010) dimana variabel yang digunakan adalah *Knowledge Sharing* dengan tiga pertanyaan. Kuesioner penggunaan *Knowledge Sharing* meliputi seberapa besar *sharing* : 1) laporan atau dokumentasi, 2) panduan manual, petunjuk, dan metode kerja, 3) pengalaman dan cara kerja yang dilakukan antar anggota dalam unit kerja pembiayaan.

3.3.3. Kinerja Pembiayaan

Instrumen penelitian ini terdiri dari sepuluh item pertanyaan sebagaimana yang disarankan oleh Wei-Shong & Kuo-Chung (2006). Responden ditanya seberapa besar pendapat mereka atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan skala likert 1-7 (jauh dibawah s/d jauh diatas rata-rata). Untuk mengukur kinerja pembiayaan, penelitian ini diukur menggunakan model tujuan rasional yaitu seberapa maksimal produk pembiayaan yang mampu diberikan bank dilihat melalui jumlah persen pencapaian pembiayaan dibandingkan keseluruhan pembiayaan. Responden diminta menilai jumlah persen pembiayaan cabang bank dimana mereka bekerja dibandingkan dengan rata-rata industri. Pertanyaan terdiri dari satu item dengan tujuh skala Likert.

Selain itu, kinerja pembiayaan dilihat dari proses internal yang dinyatakan dalam kualitas pembiayaan bagi hasil. Pengukuran kualitas pembiayaan bagi hasil berfokus pada kualitas manajer dalam melakukan proses analisis pembiayaan. Ini mengacu pada kualitas manajer dalam melakukan setiap proses: 1) Penyaringan aplikasi permohonan pembiayaan yang meliputi kepastian pengumpulan informasi calon kreditur terkait 4C (*character, capacity, capital, condition*), analisis kelayakan 4C calon kreditur, dan penjelasan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon kreditur. 2) Proses administrasi pembiayaan terkait keakuratan dokumen, persyaratan dokumen telah dipenuhi, operasionalisasi pemberian pembiayaan telah sesuai prosedur, dan adanya dokumentasi pembiayaan yang akan diberikan.

3) Proses setelah pembiayaan diberikan yaitu melakukan tindakan jika terjadi pembayaran tidak sesuai dengan kontrak, mereview secara periodik persyaratan 4C kreditur yang telah dipenuhi, dan menindaklanjuti hasil review 4C.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Demografi Responden

Berdasarkan informasi yang terdapat di tabel 4.2 jumlah responden yang berhasil diperoleh dengan jenis kelamin pria sebanyak 58 orang (54,2%) dan wanita sebanyak 49 orang (45,8%). Usia karyawan berdasarkan hasil survey terbanyak berasal dari golongan usia dibawah 30 tahun yaitu sebanyak 60 orang (56,1%). Selain itu juga, dilihat dari latar belakang pendidikan karyawan terbanyak adalah lulusan sarjana strata satu (S1) yaitu sebanyak 88 orang (82,2%). Dengan temuan ini juga mendukung syarat umum yang biasa diterapkan pada penerimaan karyawan perusahaan di Indonesia adalah minimal lulusan sarjana.

===TABEL 1 DISINI===

Pada analisis deskriptif dijelaskan bahwa terjadi pemecahan terhadap komponen kualitas pembiayaan sehingga analisis lebih lanjut hanya melihat kinerja pembiayaan dari kualitas administrasi pembiayaan (ADMPB) dan sesudah pemberian pembiayaan (SSDHPB). Tabel 2 menunjukkan bahwa bahwa seluruh nilai loading factor setiap indikator terhadap konstruk eksogen maupun endogen memiliki hasil $>0,50$, kecuali pada indikator KUANPB yang merupakan indikator untuk konstruk Kuantitas Pembiayaan. Oleh karena nilai loading factor KUANPB sebesar 0,495 ($< 0,50$), maka indikator KUANPB harus dikeluarkan dari model.

Setelah dilakukan penghitungan kembali dengan PLS algoritma. Nilai loading factor setiap indikator konstruk eksogen dan endogen setelah eliminasi KUANPB, ternyata tidak lagi menunjukkan adanya nilai loading factor yang $< 0,50$ (Lihat Tabel 2).

===TABEL 2 DISINI===

4.2. Pengujian Measurement Model

Pengujian measurement model dilakukan dengan menguji validitas dan reliabilitas.

4.2.1. Uji Validitas

a. *Convergent Validity Test*

Selanjutnya dalam Tabel 3 menjelaskan nilai dari AVE konstruk pengukuran kinerja interaktif (PKI), *Knowledge Sharing* (KS), kualitas pada saat administrasi pemberian pembiayaan (AMDPB), dan kualitas sesudah pemberian pembiayaan (SSDHPB). Dapat dilihat bahwa setiap konstruk (variabel) tersebut memiliki nilai AVE diatas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk tersebut memiliki nilai validitas konvergen yang baik.

===TABEL 3 DISINI===

b. *Discriminant Validity Test*

Validitas diskriminan suatu variabel dapat dilihat dari *square root AVE* (\sqrt{AVE}) variabel yang bersangkutan. Suatu variabel dikatakan memiliki validitas diskriminan jika square root AVE lebih besar dibandingkan korelasi variabel tersebut dengan variabel yang lain (Fornell dan Larcker, 1981). Nilai square root AVE setiap variabel dapat dilihat dari Tabel 4 (angka yang tercetak tebal).

===TABEL 4 DISINI===

Selain itu, *discriminant validity* diukur dengan *cross loading*. Dimana nilai *cross loading* lebih besar dari 0,5 dinyatakan baik.

===TABEL 5 DISINI===

4.2.2. Uji Reliabilitas

Suatu data dikatakan reliabel jika *crombach alpha* dan *composite reability* lebih dari 0,7 (Hulland, 1999). Dari Tabel 6 dapat dilihat setiap konstruk atau variabel laten tersebut memiliki nilai *crombach alpha* dan *composite reliability* diatas 0,7 yang menandakan bahwa *internal consistency* dari antar variabel memiliki reliabilitas yang baik.

===TABEL 6 DISINI===

4.3. Pengukuran Model Struktural

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pengukuran struktural model dilakukan dengan mengukur *Coefficient of determination* (R^2) dan *Path Coefficient* (β). Hal ini untuk melihat dan meyakinkan hubungan antar konstruk adalah kuat. Gambar 2. Menunjukkan hubungan setiap konstruk dari masing masing variabel dijelaskan oleh masing-masing indikator. Dimana terdapat model yang dilakukan eliminasi pada indikator pertanyaan kuantitas pembiayaan. Hal ini disebabkan terdapat korelasi konstruk yang kurang dari 0,5 sehingga setiap variabel tersebut tidak memenuhi kriteria convergent validity.

===GAMBAR 2 DISINI===

a. *Coefficient of determination* (R^2)

Konstruk endogen diuji untuk menguatkan hubungan antara konstruk eksogen dengan mengevaluasi R^2 . Dari tabel 6 terlihat nilai R^2 tiap variabel dependen memiliki nilai diata 0,1 yaitu antara 0,415 sampai 0,596. Dapat dikatakan hubungan antara konstruk eksogen dapat diterima.

===TABEL 7 DISINI===

Hasil analisis data menyajikan bahwa pada konstruk endogen *Knowledge Sharing* memiliki nilai R^2 sebesar 0,415. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk *Knowledge Sharing* yang dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen Sistem Pengukuran Kinerja (SPK) interaktif dan Kinerja Pembiayaan (Kualitas Adm. Pembiayaan) adalah sebesar 41,5% sedangkan sekitar 58,5% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel yang diteliti.

Selanjutnya, konstruk endogen Kinerja Pembiayaan (Kualitas Adm Pembiayaan, ADMPB) memiliki nilai R^2 sebesar 0, 534, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk Kinerja Pembiayaan (Kualitas Adm. Pembiayaan, ADMPB) bagi perusahaan yang dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen SPK interaktif dan *Knowledge Sharing* sebesar 53,4%, sedangkan 46,6% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar dari konstruk yang diteliti.

Selain itu juga, konstruk endogen Kinerja Pembiayaan (Kualitas Sesudah Pembiayaan, SSDHPB) memiliki nilai R^2 sebesar 0, 596, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk Kinerja Pembiayaan (Kualitas Sesudah Pembiayaan, SSDHPB) bagi perusahaan yang dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen SPK interaktif dan *Knowledge Sharing* sebesar 59,6%, sedangkan 40,4% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar dari konstruk yang diteliti.

b. Path Coefficients (β)

Tes *Path Coefficient* (β) digunakan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar konstruk adalah kuat. Dari Tabel 9. terlihat hubungan yang kuat dan signifikan (lebih besar dari 0,1 dan T hitung $>$ T Table pada 1 %) antara Pengukuran Kinerja Interaktif (PKI) terhadap Kinerja Pembiayaan yang dilihat dari kualitas sebelum dan sesudah pemberian pembiayaan yaitu antara 7,83 - 11,317.

===TABEL 8 DISINI===

Selain itu juga, variabel *Knowledge Sharing* memiliki hubungan antar konstruk yang kuat dan signifikan terhadap Kinerja Pembiayaan dilihat dari kualitas sesudah pemberian pembiayaan yaitu sebesar 2,129 (lebih besar dari 0,1 dan T-hitung > T-Table pada 1 %). Sedangkan hubungan antar konstruk *Knowledge Sharing* terhadap Kinerja Pembiayaan dilihat dari kualitas sebelum pemberian pembiayaan adalah lemah karena kurang dari 0,1 dan T-hitung > T-Table pada 10 %.

4.4. Pengujian Hipotesis

4.4.1. Pengaruh SPK Interaktif terhadap Kinerja Pembiayaan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa penggunaan SPK secara interaktif berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan (Hanya dilihat dari kualitas pembiayaan). Temuan ini konsisten dengan penelitian Hidayati (2012). Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan alat statistik bahwa SPK interaktif mampu meningkatkan kinerja pembiayaan ditinjau dari kualitas administrasi ($\beta=0.652$, $t = 8,169$, $p < 0.01$) dan setelah pembiayaan diberikan ($\beta=0.621$, $t = 7,835$, $p < 0.01$).

Penggunaan SPK secara interaktif sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai pertimbangan pemberian pembiayaan, seorang manager harus dapat melakukan diskusi aktif dengan bawahannya karena hal ini menyangkut sistem pengendalian manajemen yang baik terhadap kemungkinan kesalahan pemberian pembiayaan disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, ketika perusahaan mengembangkan strategi pembiayaan yang baru, manajer akan menyampaikan visi dan misi untuk mengkomunikasikan ide dan informasi baru kepada karyawan. Adanya penyampaian visi dan misi tersebut mengakibatkan perusahaan mengembangkan rutinitas yang baru didasarkan pada pengalaman masa lalu.

Di dunia perbankan yang kompetitif saat ini, dengan adanya SPK secara interaktif yang diimplementasikan akan mengarahkan perilaku karyawan sehingga memfasilitasi dalam hal menyajikan produk-produk yang mengedepankan kualitas dalam memberikan pembiayaan. Seorang manajer yang mampu meningkatkan sistem pengenalan manajemen yang baik akan mampu meningkatkan kinerja organisasional (*organizational performance*) secara keseluruhan termasuk kinerja pembiayaan.

4.4.2. Pengaruh SPK Interaktif terhadap Knowledge Sharing

Hipotesis yang diuji dalam bagian ini adalah hipotesis kedua yang menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara SPK interaktif terhadap *Knowledge Sharing* ($\beta=0.644$, $t = 11,317$, $p < 0.01$). Berdasarkan temuan ini berarti meningkatnya SPK interaktif yang dilakukan manajer dalam melakukan pertimbangan pemberian pembiayaan kepada nasabah akan meningkatkan kemampuan manajer tersebut dalam melakukan pembelajaran dalam hal ini melalui *Knowledge Sharing* baik dimasa lalu maupun masa depan. Hal ini konsisten dengan penelitian Simons (1995) dan Henri (2006) yang menemukan terdapat hubungan positif antara *Interactive Control System* dengan *Organizational Learning*.

SPK secara interaktif melibatkan manajer untuk tujuan menciptakan komunikasi dan berbagi informasi, yang dapat merangsang dalam pembelajaran (Simons, 1995). Perusahaan yang menerapkan SPK secara interaktif dapat meringankan tuntutan pengolahan informasi dan memfasilitasi proses transfer ilmu pengetahuan dengan menggunakan arah vertikal di seluruh organisasi (*top manager – middle manager – low manager – karyawan*). SPK interaktif akan mendorong manajer terlibat dalam mengarahkan kepada bawahan mengenai pentingnya mengusulkan dan menerapkan ide-ide baru sehingga implementasi SPK secara interaktif dapat dikatakan sebagai pendorong pembentukan *Knowledge Sharing*.

4.4.3. Pengaruh *Knowledge Sharing* terhadap Kinerja pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel *Knowledge Sharing* berpengaruh signifikan ($\beta=0.208$, $t = 2.129$, $p < 0.005$) terhadap kinerja pembiayaan dilihat dari kualitas sesudah pemberian pembiayaan. Namun, *Knowledge Sharing* berpengaruh lemah ($\beta=0.115$, $t = 0,889$, $p < 0.1$) terhadap kinerja pembiayaan dilihat dari kualitas sebelum pembiayaan. Secara keseluruhan, dapat dikatakan kesimpulannya hipotesis tiga diterima sebagian.

Secara umum temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa untuk memperoleh kemampuan dalam pertimbangan pemberian pembiayaan yang lebih baik dibutuhkan pengetahuan yang lebih baik pula. Melalui *Knowledge Sharing*, kemampuan bank dalam menilai kelayakan proyek dan kemampuan dalam melakukan pemantauan atas pembiayaan yang diberikan meningkat, utamanya meningkatkan keahlian dalam melaksanakan pembiayaan tersebut. Kesan pembelajaran organisasi terhadap kuantitas dan kualitas pembiayaan menunjukkan bahwa perbankan harus lebih berfokus pada aspek pembelajaran untuk meningkatkan kinerja pembiayaan. Hal ini didukung oleh Simons (1995) mengatakan bahwa penggunaan pengukuran kinerja interaktif (*interactive use of management control systems*) sebagai sistem pengendalian manajemen dapat memotivasi anggota organisasi untuk menggalakkan pembelajaran organisasi yang akhirnya akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya.

4.5. Evaluasi Uji Jalur (*Path Analysis*)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tidak langsung variabel sistem pengukuran kinerja interaktif (PKI) terhadap kinerja pembiayaan (ADMPB & SSDHPB) melalui *Knowledge Sharing*. Pengujian dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui hasil pengujian terhadap pengaruh *Knowledge Sharing* terhadap kinerja pembiayaan (kualitas

adm pembiayaan & sesudah pembiayaan). Pengujian pengaruh mediasi dilakukan dengan menggunakan rumus Sobel. Hasil analisis data menunjukkan:

1.) *Pertama* pengaruh *Knowledge Sharing* terhadap kinerja pembiayaan yang dilihat dari kualitas administrasi pembiayaan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,115. Nilai t diperoleh sebesar 0,899. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel (1,96). Hasil ini berarti bahwa *Knowledge Sharing* memiliki pengaruh lemah terhadap kinerja pembiayaan (kualitas adm pembiayaan). Hasil dari kedua pengujian pada tabel 4.8.diringkas sebagai berikut:

$$P_1 = 0,652$$

$$Se_1 = 0,080$$

$$P_2 = 0,115$$

$$Se_2 = 0,128$$

Besarnya koefisien tidak langsung variabel sistem pengukuran kinerja interaktif (PKI) terhadap kualitas administrasi pembiayaan (ADMPB) merupakan perkalian dari pengaruh SPK interaktif (PKI) terhadap variabel *Knowledge Sharing* (KS) dengan *Knowledge Sharing* (KS) terhadap kualitas administrasi pembiayaan (ADMPB), sehingga diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} P_{12} &= P_1 \cdot P_2 \\ &= (0,652) \cdot (0,115) \\ &= 0,075 \end{aligned}$$

Besarnya *standard error* tidak langsung PKI terhadap ADMPB merupakan perkalian dari pengaruh PKI terhadap KS dengan KS terhadap ADMPB, sehingga diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Sab &= \sqrt{P_1^2 S_{e_1}^2 + P_2^2 S_{e_2}^2 + S_{e_1}^2 S_{e_2}^2} \\ &= \sqrt{(0,652)^2 \cdot (0,080)^2 + (0,115)^2 \cdot (0,128)^2 + (0,080)^2 \cdot (0,128)^2} \end{aligned}$$

$$= \sqrt{(3,042 \times 10^{-3})}$$

$$= 0,055$$

Dengan demikian nilai uji t diperoleh sebagai berikut:

$$t = P_{12} / S_{e12} = 0,075/0,005$$

$$= 1,363$$

Nilai t sebesar 1,363 tersebut lebih kecil dari yang berarti bahwa parameter mediasi tersebut tidak signifikan. Maka, dengan demikian model pengaruh tidak langsung dari variabel SPK interaktif (PKI) terhadap kualitas administrasi (ADMPPB) pembiayaan tidak dapat diterima.

2.) *Kedua*, pengaruh *Knowledge Sharing* terhadap kinerja pembiayaan yang dilihat dari kualitas sesudah pembiayaan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,208. Nilai t diperoleh sebesar 2,239. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti bahwa *Knowledge Sharing* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pembiayaan (kualitas sesudah pemberian pembiayaan). Hasil dari kedua pengujian pada tabel 4.7 diringkas sebagai berikut:

$$P_1 = 0,621$$

$$Se_1 = 0,079$$

$$P_2 = 0,208$$

$$Se_2 = 0,098$$

Besarnya koefisien tidak langsung variabel sistem pengukuran kinerja interaktif (PKI) terhadap kualitas administrasi pembiayaan (SSDHPB) merupakan perkalian dari pengaruh SPK interaktif (PKI) terhadap variabel *Knowledge Sharing* (KS) dengan *Knowledge Sharing* (KS) terhadap kualitas sesudah pembiayaan (SSDHPB), sehingga diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 P_{12} &= P_1 \cdot P_2 \\
 &= (0,621) \cdot (0,208) \\
 &= 0,129
 \end{aligned}$$

Besarnya standard error tidak langsung PKI terhadap SSDHPB merupakan perkalian dari pengaruh PKI terhadap KS dengan KS terhadap SSDHPB, sehingga diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Sab &= \sqrt{P_1^2 S_{e_1}^2 + P_2^2 S_{e_2}^2 + S_{e_1}^2 S_{e_2}^2} \\
 &= \sqrt{(0,621)^2 \cdot (0,079)^2 + (0,208)^2 \cdot (0,098)^2 + (0,079)^2 \cdot (0,208)^2} \\
 &= \sqrt{3,092 \times 10^{-3}} \\
 &= 0,56
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, nilai uji-t diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t &= P_{12} / S_{e12} = 0,129 / 0,56 \\
 &= 0,230
 \end{aligned}$$

Nilai t sebesar 0,230 tersebut lebih kecil dari yang berarti bahwa parameter mediasi tersebut tidak signifikan. Maka, dengan demikian model pengaruh tidak langsung dari variabel SPK interaktif (PKI) terhadap kualitas administrasi (SSDHPB) pembiayaan melalui *Knowledge Sharing* (KS) tidak dapat diterima.

Dari kedua hasil analisis data uji jalur (*path analysis*) tersebut diperoleh kesimpulan bahwa hubungan model pengaruh tidak langsung (*indirect*) dari variabel SPK interaktif terhadap kinerja pembiayaan (kualitas administrasi dan sesudah pembiayaan diberikan) melalui *Knowledge Sharing* sebagai faktor mediasi lebih rendah daripada hubungan langsungnya (*direct*).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengujian statistic, secara umum penulis menyimpulkan bahwa SPK secara interaktif dan *Knowledge Sharing* dapat menjelaskan hubungan antar konstruk dengan variabel kinerja pembiayaan. Dengan kata lain, temuan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara SPK interaktif dan kinerja pembiayaan serta hubungan tidak langsung melalui *Knowledge Sharing* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan penelitian. Meskipun hasil penelitian berhasil menjawab pertanyaan penelitian, sifat hubungan tidak langsung (*indirect effect*) antara aspek *Knowledge Sharing* yang dikaji terhadap kinerja pembiayaan, untuk hipotesis tersebut tidak sejalan dengan harapan. Perbedaan harapan dengan hasil penelitian pada peran *Knowledge Sharing* kemungkinan disebabkan perbedaan cara dalam mentransfer ilmu pengetahuan antara karyawan di bidang pembiayaan pada bank konvensional dengan bank syariah. Dimana pada perbankan syariah karyawan lebih mengedepankan keterbukaan pendapat dan kepercayaan dengan tidak mengurangi resiko yang dihadapi.

Meskipun begitu menurut pendapat kami, terdapat peran Teori RBV dan KBV yang terkait dengan peran pengawasan manajemen (SPK interaktif) serta peran pembelajaran organisasi (*Knowledge Sharing*) dalam meningkatkan kinerja pembiayaan, yaitu : dengan adanya sistem pengawasan manajemen akan mendorong pembelajaran organisasi dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan terutama berdampak kepada peningkatan *intellectual capital* perusahaan. Selain itu juga, dapat disimpulkan dalam temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan langsung (*direct effect*) antara SPK interaktif dan kinerja pembiayaan lebih besar daripada hubungan tidak langsung dengan (*indirect effect*) *Knowledge Sharing* sebagai faktor pemediasi.

6. Implikasi Hasil Penelitian

Sebagaimana dinyatakan dalam tujuan umum penelitian. Meskipun hasil penelitian berhasil menjawab pertanyaan penelitian, sifat hubungan langsung antara aspek SPK interaktif yang dikaji dengan *Knowledge Sharing* dan kinerja pembiayaan, untuk beberapa hipotesis tidak sejalan dengan harapan. Perbedaan harapan dengan hasil penelitian pada peran *Knowledge Sharing* terhadap kinerja pembiayaan mungkin disebabkan perbedaan motivasi bagi karyawan dalam perbankan konvensional dengan syariah (Islam).

Bagi perbankan syariah pembelajaran organisasi melalui *Knowledge Sharing* mungkin sangat dibutuhkan karena lebih mengedepankan kerjasama untuk kemufakatan bersama sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan bagi perbankan konvensional yang mengedepankan keuntungan dari bunga pembiayaan berdasarkan kontrak, *Knowledge Sharing* antar anggota terlebih antara *top-middle - low- non manager* kurang berpengaruh signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian SPK interaktif secara keseluruhan sangat baik untuk diterapkan dalam sektor jasa, dikarenakan sektor ini dituntut untuk mengembangkan inovasi, evaluasi, monitoring aktif secara rutin. Penggunaan SPK interaktif dalam perbankan yang diimbangi *Knowledge Sharing* akan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh karena kesan pembelajaran organisasi yang terdapat dalam *Knowledge Sharing* menunjukkan bahwa perbankan harus lebih berfokus pada aspek pembelajaran untuk meningkatkan kinerja pembiayaan khususnya secara kualitas. Oleh itu, program pelatihan yang berhubungan dengan pembiayaan khususnya dan terkait dengan sangat dibutuhkan.

Hasil penelitian ini memberikan informasi, pemikiran dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya, serta memberi informasi bagi Perusahaan Perbankan di Kota Bandar Lampung, khususnya bagi para manajer dalam mengembangkan implementasi SPK secara interaktif dan pembelajaran organisasi melalui *Knowledge Sharing* sehingga dapat menjadi masukan dalam pengembangan kinerja.

7. Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian hanya perbankan di Kota Bandar Lampung yang sifatnya *Strategic Unit Business (SBU)* atau merupakan kantor cabang. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan biaya peneliti (*Time and Budget Constraint*) sehingga data yang diperoleh kurang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya di Indonesia
2. Bila dilihat dari segi jabatan mayoritas kuisioner adalah adalah *non-manager*, sehingga diharapkan penelitian berikutnya mampu menambah jumlah sampel setingan Manager.

8. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Memperluas wilayah penelitian di perbankan kota-kota lainnya, terutama di kota besar seperti Jakarta dimana sebagian besar kantor pusat perbankan berdomisili disana. Sehingga dapat terlihat bagaimana peranan *Knowledge Sharing* ketika menghadapi kompleksitas masalah pembiayaan yang lebih besar dan rumit.
2. Menambah variabel penelitian untuk menguji hubungan kinerja pembiayaan terhadap dimensi atau konstruk lain seperti *reward, market orientation* dan *incentives based*.

References

- Abernethy, M. A., & Brownell, P. 1999. The role of budgets in organizations facing strategic change: an exploratory study. *Accounting, Organizations and Society*, 24(3): 189-204.
- Auzair, S. M., & Langfield-Smith, K. 2005. The effect of service process type, business strategy and life cycle stage on bureaucratic MCS in service organizations. *Management Accounting Research*, 16(4): 399-421.
- Bisbe, J., & Malagueño, R. 2009. The Choice of Interactive Control Systems under Different Innovation Management Modes. *European Accounting Review*, 18(2): 371-405.

- Bisbe, J., & Otley, D. 2004. The effects of the interactive use of management control systems on product innovation. *Accounting, Organizations and Society*, 29(8): 709-737.
- Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J., & Nahapiet, J. 1980. The roles of accounting in organizations and society. *Accounting, Organizations and Society*, 5(1): 5-27.
- Chenhall, R. H. 2005. Integrative strategic performance measurement systems, strategic alignment of manufacturing, learning and strategic outcomes: an exploratory study. *Accounting, Organizations and Society*, 30(5): 395-422.
- Chenhall, R. H., Kallunki, J.-P., & Silvola, H. 2011. Exploring the Relationships between Strategy, Innovation, and Management Control Systems: The Roles of Social Networking, Organic Innovative Culture, and Formal Controls. *Journal of Management Accounting Research*, 23: 99-128.
- Choi, S. Y., Lee, H., & Yoo, Y. 2010. The impact of information technology and transactive memory systems on knowledge sharing, application, and team performance: a field study. *MIS Q.*, 34(4): 855-870.
- Cloninger, P. A., & Oviatt, B. 2007. Service Content and the Internationalization of Young Ventures: An Empirical Test. *Entrepreneurship: Theory & Practice*, 31(2): 233-256.
- Cobb, I., Helliard, C., & Innes, J. 1995. Management accounting change in a bank. *Management Accounting Research*, 6(2): 155-175.
- Danos, P., Holt, D. L., & Imhoff Jr, E. A. 1989. The use of accounting information in bank lending decisions. *Accounting, Organizations and Society*, 14(3): 235-246.
- Davis, S., & Albright, T. 2004. An investigation of the effect of Balanced Scorecard implementation on financial performance. *Management Accounting Research*, 15(2): 135-153.
- de Waal, A. 2010. Performance-driven behavior as the key to improved organizational performance. *Measuring Business Excellence*, 14(1): 79-95.
- Deakins, D., & Hussain, G. 1994. Risk Assessment with Asymmetric Information. *International Journal of Bank Marketing*, 12(1): 24-31.
- Edvardsson, B., Gustafsson, A., and Roos, I. 2005. Service portraits in service research: a critical review. *International journal of service industry management*, 16(1): 107-121.
- Ferreira, A., & Otley, D. 2009. The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis. *Management Accounting Research*, 20(4): 263-282.
- Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. 2001. Knowledge Management: An Organizational Capabilities Perspective. *J. Manage. Inf. Syst.*, 18(1): 185-214.
- Hartvigsen, G. 1992. Limitations of knowledge-based systems for financial analysis in banking. *Expert Systems with Applications*, 4(1): 19-32.
- Henri, J.-F. 2006. Management control systems and strategy: A resource-based perspective. *Accounting, Organizations and Society*, 31(6): 529-558.
- Holbrook, A., Young Ik, C., & Johnson, T. 2006. The impact of question and respondent characteristics on comprehension and mapping difficulties. *Public Opinion Quarterly*, 70(4): 565-595.
- Hidayati, A. 2012. *Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja dan Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah*. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Hulland, J. 1999. Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent. *Strategic Management Journal*, 20(2): 195.

- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. 1996. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. 2006. *Alignment – Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Strategies*. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
- Khalil, A.-F. A., Rickwood, C., & Murinde, V. (Eds.). 2002. *Evidence on agency-contractual problems in mudarabah financing operations by Islamic bank*. London: Edward Elgar.
- Khan, T. 1995. Demand for and supply of mark-up and PLS funds in Islamic Banking: Some alternative explanations. *Islamic Economics Studies*, 3(1): 39-78.
- Lau, C. M., & Tan, J. J. 1998. The impact of budget emphasis, participation and task difficulty on managerial performance: a cross-cultural study of the financial services sector. *Management Accounting Research*, 9(2): 163-183.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. 2001. *Islamic Banking*. London: Edward Elgar.
- Liao, L.-F. 2006. A learning organization perspective on knowledge-sharing behavior and firm innovation. *Human Systems Management*, 25(4): 227-236.
- Liao, S.-H., & Hu, T.-C. 2007. Knowledge transfer and competitive advantage on environmental uncertainty: An empirical study of the Taiwan semiconductor industry. *Technovation*, 27(6-7): 402-411.
- Morgan, F. W. 1990. Judicial Standards for Survey Research: An Update and Guidelines. *The Journal of Marketing*, 54(1): 59-70.
- Muhammad. 2005. Permasalahan agency dalam pembiayaan mudarabah pada bank syariah di Indonesia, *International Seminar on Islamic Economics as a Solution*: 312-337. Medan.
- Otley, D. 1999. Performance management: a framework for management control systems research. *Management Accounting Research*, 10(4): 363-382.
- Otley, D. T., & Berry, A. J. 1994. Case study research in management accounting and control. *Management Accounting Research*, 5(1): 45-65.
- Purbandari, T., & Mujilan. 2012. The Organizational Roles of Knowledge Sharing and Information Technology in the Commercial Banking Sector, *Symposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Simons, R. 1990. The role of management control systems in creating competitive advantage: New perspectives. *Accounting, Organizations and Society*, 15(1-2): 127-143.
- Simons, R. 1991. Strategic Orientation and Top Management Attention to Control Systems. *Strategic Management Journal*, 12(1): 49-62.
- Simons, R. 1995. *Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal*. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
- Simons, R. 2000. *Performance measurement and control systems for implementing strategy*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Urbach, N., & Ahlemann, F. 2010. Structural equation modeling in information systems research using partial least squares. *Journal of information Technology Theory and Application*, 11(2): 5-39.
- Wei-Shong, L. P., & Kuo-Chung, M. A. 2006. The internal performance measures of bank lending: a value-added approach. *Benchmarking: An International Journal*, 13(3): 272-289.
- Widener, S. K. 2007. An empirical analysis of the levers of control framework. *Accounting, Organizations and Society*, 32(7-8): 757-788.



- Yuen, D. C. Y. 2004. Goal characteristics, communication and reward systems, and managerial propensity to create budgetary slack. *Managerial Auditing Journal*, 19(4): 517-532.
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. 1985. Problems and Strategies in Services Marketing. *Journal of Marketing*, 49(2): 33-46.

Appendixes

Tabel 1: Informasi Umum Responden

		N	Cumulative	%	Cumulative (%)
Gender	Men	58	58	54.2	54.2
	Women	49	107	45.8	100
Age	< 35	60	60	56.1	56.1
	36-40	35	95	32.7	88.8
	41-45	10	105	9.3	98.1
	>46	2	107	1.9	100
Education	SMA/Diploma	17	17	15.9	15.9
	S1	88	105	82.2	98.1
	S2/S3	2	107	1.9	100
Jabatan	Manager	32	32	29.9	29.9
	Non-Manager	75	107	70.1	100
Tipe Bank	Konvensional	62	62	57.9	57.9
	Syari'a	45	107	42.1	100

Tabel 2 : Loading Factor Kualitas Pembiayaan

Indikator	Loading Factor	
	Komp. 1	Komp. 2
Proses Sebelum Pembiayaan Diberikan		
KWPB1	0,802	0,27
KWPB2	0,792	0,347
KWPB3	0,838	0,319
Proses Administrasi Pembiayaan		
KWPB4	0,847	0,289
KWPB5	0,837	0,366
KWPB6	0,821	0,382
KWPB7	0,828	0,327
Proses Setelah Pembiayaan Diberikan		
KWPB8	0,504	0,717
KWPB9	0,342	0,888
KWPB10	0,268	0,925

Tabel 3. AVE dan \sqrt{AVE}

	AVE	\sqrt{AVE}
PKI	0,760	0,872
KS	0,837	0,915
AMDPB	0,787	0,887
SSDHPB	0,853	0,923

Tabel 4. Latent Correlation

	PKI	KS	ADMPB	SSDHPB
PKI	0,872			
KS	0,644	0,915		
Kualitas Adm. Pembiayaan : (ADMPB)	0,726	0,535	0,887	
Kualitas Sesudah Pembiayaan : (SSDHPB)	0,756	0,609	0,711	0,923

Tabel 5. Result for Cross Loadings

	PKI	KS	ADMPB	SSDHPB
PKI 1	0,807	0,441	0,480	0,570
PKI 2	0,864	0,575	0,589	0,692
PKI 3	0,903	0,525	0,721	0,654
PKI 4	0,907	0,624	0,691	0,630
PKI 5	0,875	0,621	0,655	0,735
KS 1	0,646	0,925	0,554	0,650
KS 2	0,583	0,935	0,455	0,566
KS 3	0,524	0,883	0,446	0,425
KW PB 1	0,649	0,459	0,848	0,579
KW PB 2	0,689	0,412	0,871	0,632
KW PB 3	0,646	0,506	0,895	0,633
KW PB 4	0,675	0,475	0,894	0,609
KW PB 5	0,649	0,520	0,913	0,666
KW PB 6	0,587	0,462	0,901	0,675
KW PB 7	0,599	0,487	0,888	0,625
KW PB 8	0,713	0,610	0,719	0,891
KW PB 9	0,694	0,541	0,650	0,937
KW PB 10	0,683	0,531	0,595	0,941

Tabel 6. Cronbach Alpha dan Composite reliability

	Cronbach's Alpha	Composite reliability
PKI	0.921	0.941
KS	0.903	0.939
AMDPB	0.955	0.963
SSDHPB	0.931	0.946

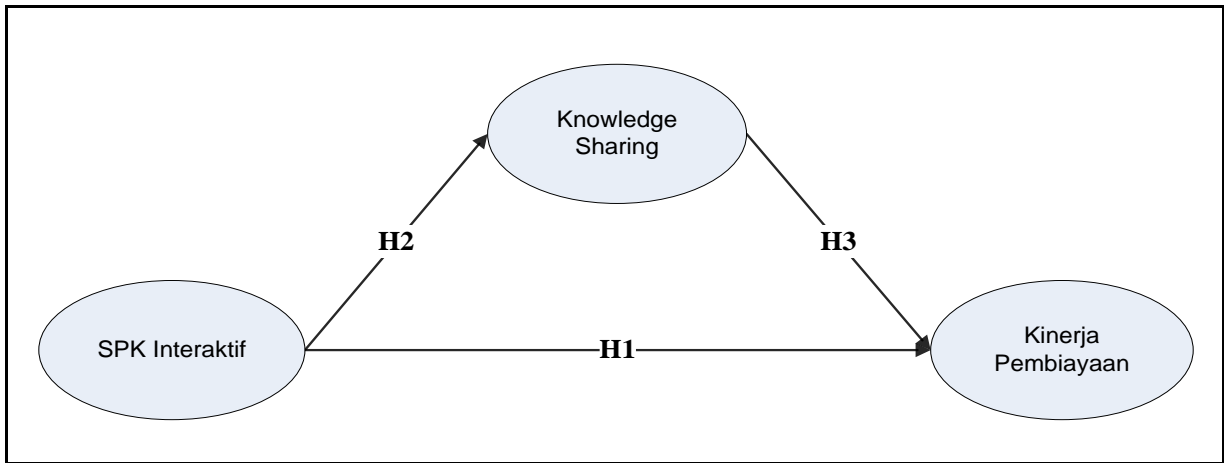
Tabel 7. R Square (R²)

	R ²
PKI	
KS	0,415
SBLMPB	0,534
SSDHPB	0,596

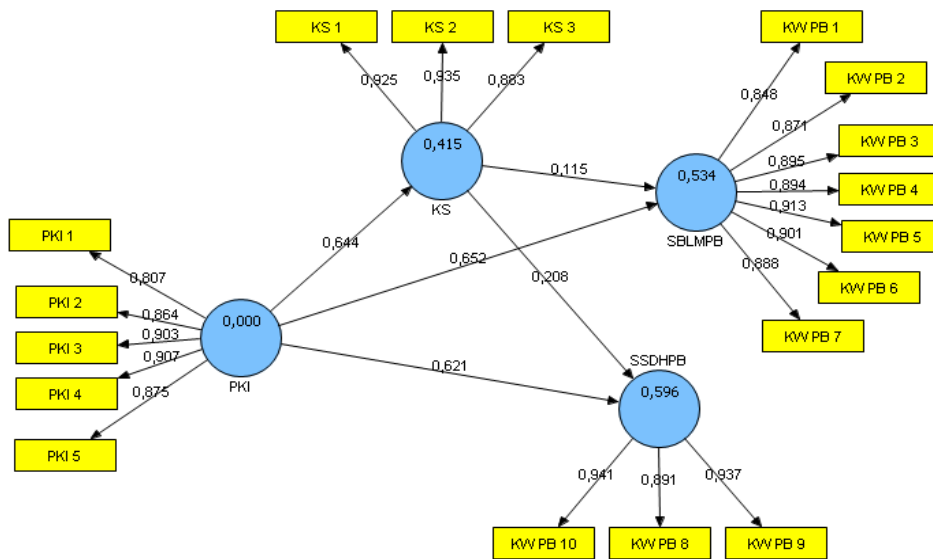
Tabel 8. Result for Inner Weight

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
KS -> ADMPB	0,115	0,135	0,128	0,128	0,899
KS -> SSDHPB	0,208	0,21	0,098	0,098	2,129
PKI -> KS	0,644	0,642	0,057	0,057	11,317
PKI -> ADMPB	0,652	0,641	0,08	0,08	8,169
PKI -> SSDHPB	0,621	0,615	0,079	0,079	7,835

Gambar 1: Research Framewok Hubungan Antara SPK Interactive dan Kinerja Pembiayaan Melalui Knowledge Sharing



Gambar 2. Full Model Structural Partial Least Square (Setelah Eliminasi Indikator)



**Pengaruh *Non Performing Loan* dan *Loan to Deposit Ratio* terhadap
Pengungkapan Risiko Keuangan
(Studi Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di BEI)**

**SITI ZUBAIDAH
FARADILAH ACHMAD*
AHMAD WALUYO JATI**
Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract: *This reaserch aims to examined the influence of Non Performing Loan (NPL) and Loan to Deposit Ratio (LDR) to Financial Risk Disclosure. The sample used was the secondary data from Banking Industry which is listed in Bursa Efek Indonesia (BEI) at 2010-2011. The analysis of the data do with giving score for each item that disclosed on bank's annual report. The analysis for the factors uses multiple regressions with hypotheses testing of statistic F and t test.*

The result of this research can conclude as generally the financial risk disclosure on bank's annual report in Indonesia is still low, none banks that disclose the item with full disclosure. F test result showed that independent variables no significantly influence on the financial risk disclosure. t test result showed that Non Performing Loan (NPL) and Loan to Deposit Ratio (LDR) have no significant effect on the financial risk disclosure on Indonesian Banking Industry

Keywords : *Disclosure, Financial Risk, NPL, LDR.*

* Corresponding author: ddf_4ever@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, kasus bank bermasalah karena praktik perbankan yang tidak sehat telah banyak terjadi. Kasus kredit macet yang menyebabkan likuidasi Bank Summa pada tahun 1992 menjadi salah satu potret kelam industri perbankan di Indonesia (Suhardjanto dan Dewi, 2011). Pada tahun 2008, Bank Indover yang merupakan bank yang sepenuhnya dimiliki BI dan mendapat lisensi untuk aktif di Belanda mengalami masalah likuiditas besar dalam krisis keuangan global pada kuartal keempat 2008 yang berakhir pada kebangkrutannya (Pattikawa, 2011).

Fenomena tersebut merupakan salah satu hal mengkhawatirkan bagi para investor karena risiko yang melekat pada bank juga berarti risiko yang harus ditanggung para investor. Oleh karena itu, pengungkapan risiko dalam laporan keuangan menjadi penting karena dapat menyebabkan berkurangnya *asymetri informasi* yang menyebabkan kerugian bagi stakeholder terutama investor dan nasabah (Suhardjanto dan Dewi, 2011). Pengungkapan risiko merupakan salah satu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang diatur dalam PSAK No. 50 (revisi 2006), yang kemudian diperbarui menjadi PSAK 60 (revisi 2010) yang belum resmi dipublikasikan namun telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Tujuan dari pengungkapan risiko menurut PSAK adalah untuk menyediakan informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas, serta membantu penilaian jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas masa depan yang terkait dengan instrumen keuangan tersebut.

Kewajiban untuk mengungkapkan risiko juga diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-134/BL/2006 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Penjelasan mengenai risiko-risiko serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut merupakan hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Peraturan lain yang mengatur

pengungkapan risiko, khususnya untuk industri perbankan adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum yang mewajibkan bank untuk menginformasikan eksposur risiko yang melekat padanya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin diperhatikannya praktik pengungkapan risiko keuangan di Indonesia.

Penelitian tentang pengungkapan risiko keuangan telah dilakukan di dalam maupun luar negeri. Helbok dan Wagner (2006) melakukan penelitian terhadap pengungkapan risiko operasional pada perbankan dalam laporan keuangan 59 bank komersial di *North America*, Asia, dan Eropa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan dengan profitabilitas lebih rendah mengungkapkan penilaian dan pengelolaan risiko operasional dengan lebih luas.

Di Indonesia, Suhardjanto dan Dewi (2011) melakukan penelitian terhadap pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan risiko keuangan. Penelitian ini menggunakan variabel yang merepresentasikan tata kelola perusahaan yakni ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan jumlah rapat komite audit. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko keuangan sedangkan komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan. Selain itu dari penelitian tersebut, diketahui pula tingkat pengungkapan risiko keuangan pada industri perbankan Indonesia masih rendah yakni sebesar 46,50%.

Walaupun merupakan pengungkapan wajib, pengungkapan risiko keuangan oleh perbankan tidak terlepas dari hal-hal yang memotivasi industri perbankan melakukan pengungkapan tersebut. Pola dan gaya manajemen yang dapat direpresentasikan melalui

Good Corporate Governance serta struktur kepemilikan merupakan faktor-faktor yang telah dibuktikan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko, akan tetapi pengaruh dari segi kinerja operasional bank terhadap pengungkapan risiko keuangan belum banyak diteliti.

Vandamelle (2009) meneliti tentang determinan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko manajemen pada perusahaan non keuangan di Belgia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, tingkat risiko perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan risiko manajemen. Hal ini membuktikan bahwa tingginya risiko perusahaan tidak menjadikan perusahaan enggan mengungkapkan informasi terkait risiko tersebut. Penelitian yang dilakukan Anagnostopoulos dan Skordoulis (2011) menganalisis tentang pengungkapan risiko pada industri perbankan di Yunani. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa profil risiko, ukuran bank, serta profitabilitas tidak berpengaruh terhadap volume pengungkapan risiko bank.

NPL (*Non Performing Loan*) dan LDR (*Loan to Deposito*) termasuk dalam rasio yang menggambarkan kinerja industri perbankan. NPL atau *credit risk ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan (Kasmir, 2011). Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah $\leq 5\%$ dari total portofolio kreditnya. Tingkat risiko kredit dapat menjadi salah satu motivasi bank melakukan pengungkapan risiko keuangan, hal tersebut diungkap oleh Vandemaelle (2009) dalam penelitiannya bahwa manajemen perusahaan merasa perlu mengungkapkan penyebab risiko yang terjadi ketika risiko meningkat.

Jika NPL menunjukkan adanya risiko yang berasal dari luar bank yakni dari debitur, sebaliknya LDR dapat menggambarkan risiko yang ditanggung nasabah karena LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas industri perbankan. LDR

menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi.

Tingkat risiko pada perbankan atau perusahaan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen untuk melakukan pengungkapan serta seberapa luas informasi tentang risiko tersebut yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh rasio NPL dan LDR pada industri perbankan terhadap pengungkapan risiko keuangannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang diangkat yaitu bagaimana pengaruh *non performing loan* (NPL) dan *loan to deposit ratio* (LDR) terhadap pengungkapan risiko keuangan pada Industri Perbankan yang Terdaftar di BEI ?

Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada data yang digunakan yaitu laporan tahunan industri perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2011.

Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh *non performing loan* (NPL) dan *loan to deposit ratio* (LDR) terhadap pengungkapan risiko keuangan pada Industri Perbankan yang Terdaftar di BEI.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

***Agency Theory* (Teori Keagenan)**

Prinsip utama teori keagenan menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan, sehingga masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan

bagi diri sendiri. Jika pihak-pihak tersebut bertindak untuk kepentingannya sendiri, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen.

Literatur akuntansi tentang pengungkapan sendiri seringkali mengacu pada konsep keagenan dengan menyediakan dorongan untuk melakukan pengungkapan wajib maupun sukarela terhadap laporan keuangan. Dorongan ini ditunjukkan pada literatur sebagai alat penggerak yang digunakan untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. *Shareholder* sebagai prinsipal menggunakan informasi akuntansi untuk mengawasi kinerja manajemen yang bertindak sebagai agen (Puri, 2012).

Signalling Theory

Signaling theory merupakan sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk mempertimbangkan dan menentukan apakah para investor akan menanamkan sahamnya atau tidak pada perusahaan yang bersangkutan (Suwardjono, 2005). *Signaling theory* berakar pada teori akuntansi pragmatik yang mengamati pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai yang memperhatikan pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi (Suwardjono, 2005). Menurut Ghozali dan Chariri (2007) teori pragmatik menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan, dimana teori ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologis dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporan. Pendekatan pragmatis dapat dilakukan dengan mengamati reaksi pemakai laporan keuangan, dimana adanya reaksi pemakai laporan keuangan merupakan bukti bahwa laporan keuangan bermanfaat dan berisi informasi yang relevan.

Pengungkapan Risiko Keuangan (*Financial Risk Disclosure*)

a. Pengungkapan

Pengungkapan dalam pelaporan keuangan merupakan penyajian informasi yang diperlukan untuk operasi optimal pasar modal yang efisien. Semua investor memerlukan

informasi untuk mengevaluasi risiko relatif masing-masing perusahaan dalam rangka untuk mendiversifikasi portepel dan kombinasi investasi yang memenuhi preferensi risiko dari setiap individu. Para kreditur dan instansi pemerintah pada umumnya memiliki kemampuan untuk meminta informasi tambahan yang mereka butuhkan.

Tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan yang cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Studi empiris dan reviu literatur telah membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan sebenarnya enggan untuk memperluas pengungkapan keuangan tanpa tekanan dari profesi akuntansi atau pemerintah. Akan tetapi, pengungkapan merupakan hal yang vital bagi pengambilan keputusan optimal para investor dan untuk pasar modal yang stabil. Pengungkapan informasi yang relevan cenderung untuk mencegah kejutan yang mungkin dapat mengubah secara total masa depan perusahaan yang bersangkutan (Hendriksen, 1996).

Berdasarkan sifatnya, pengungkapan terbagi atas :

- 1) Pengungkapan wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi wajib oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu;
- 2) Pengungkapan sukarela (*voluntary*) merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

b. Pengungkapan Risiko Keuangan (*Financial Risk Disclosure*)

Pengungkapan risiko keuangan (*Financial Risk Disclosure*) dalam laporan tahunan bank merupakan *mandatory disclosure*, artinya pengungkapan ini bersifat wajib dilakukan oleh bank yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu. Di Indonesia, praktik pengungkapan risiko keuangan diatur dalam PSAK No. 50, Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-134/BL/2006, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

Surat Edaran Bank Indonesia tersebut mengatur hal-hal mengenai manajemen risiko keuangan meliputi definisi, tujuan dan unsur-unsur penerapan manajemen risiko yakni kebijakan, prosedur, penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta informasi manajemen risiko. Hal-hal mengenai penerapan manajemen risiko tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan pengungkapan risiko keuangan bagi industri perbankan di Indonesia.

Menurut Oorschot (2009), kuantitas pengungkapan risiko keuangan dapat dihitung dengan menggunakan kerangka kuantitas pengungkapan (*disclosure framework quantity*). Kerangka pengungkapan terdiri dari enam kriteria, dimana ada kriteria yang memiliki bobot sama dan ada pula yang berbeda bobotnya. Kriteria tersebut adalah :

- a. Risiko Pasar-Risiko Suku Bunga (*Market Risk-Interest Rate Risk*)
- b. Risiko Pasar-Risiko Nilai Tukar (*Market Risk-Currency Risk*)
- c. Risiko Pasar-Risiko Harga Lain (*Market Risk-Other Price Risk*)
- d. Risiko Kredit (*Credit Risk*)
- e. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)
- f. Pengungkapan Lain (*Other Disclosure*)

Non Performing Loan

Non performing loan (NPL) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian (Sari, 2012). Pada SAK No. 31 (revisi 2009) *non performing loan* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. *Non performing loan* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Loan to Deposit Ratio

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam dunia perbankan terutama diukur dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Besarnya LDR mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, dan sejak akhir tahun 2001 bank dianggap sehat apabila besarnya LDR antara 80% sampai dengan 110% (Nusantara, 2009).

Hipotesis

Pengaruh *non performing loan* dan *loan to deposit ratio* terhadap pengungkapan risiko keuangan

Bank senantiasa dihadapkan kepada berbagai risiko, seperti risiko kredit, termasuk *country and transfer risk*, risiko pasar, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasional (Gandapraja, 2004). Dari berbagai risiko tersebut, risiko yang cukup kritis adalah risiko kredit karena risiko kredit berkaitan langsung dengan salah satu fungsi utama bank yakni menanamkan dana yang dikelolanya dalam bentuk pemberian kredit dan berbagai jenis aset produktif lainnya. Rasio kredit diukur melalui rasio NPL. Semakin tinggi nilai NPL, semakin tinggi pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank, begitu pun sebaliknya.

Penelitian mengenai pengaruh risiko kredit yang dapat diukur dengan rasio NPL terhadap pengungkapan risiko belum ditemukan, akan tetapi terdapat penelitian yang dianggap relevan. Penelitian Vandemaelle (2009) tentang determinan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko manajemen menunjukkan bahwa tingkat risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional. Nurhilal (2011)

meneliti pengaruh risiko litigasi dan risiko reputasi terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa risiko litigasi dan risiko reputasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI. Hal ini dikarenakan, perusahaan yang memiliki nilai risiko tinggi akan berupaya mengungkapkan lebih banyak mengenai penyebab kondisi tersebut terjadi pada perusahaan.

Di sisi lain, LDR (*Loan to Deposit Ratio*) merupakan rasio khusus industri perbankan untuk mengukur tingkat likuiditasnya. Perusahaan yang likuiditasnya baik cenderung lebih berani mengungkapkan informasi lebih banyak. Hal itu berdasarkan pada perusahaan yang likuiditasnya tinggi berarti kondisi keuangannya juga baik, sehingga jika informasi itu diketahui oleh publik maka akan menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus pula (Trisanti, 2012).

Hasil penelitian Johan dan Lekok (2006) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap indeks kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_a : *NPL dan LDR berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan.*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua industri perbankan yang terdaftar di BEI. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- i. Industri perbankan yang menerbitkan laporan tahunan secara rutin.
- ii. Mengungkapkan informasi risiko keuangan pada laporan tahunan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis data dalam penelitian ini yaitu data laporan tahunan selama periode penelitian tahun 2010-2011 yang diperoleh dari website resmi BEI dan atau website resmi masing-masing bank.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan dan observasi yang dilakukan pada saat melakukan *content analysis* terhadap item *financial risk disclosure* dalam laporan tahunan perbankan.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, pengungkapan risiko keuangan dikelompokkan dalam enam komponen yang dikonstruksi Oorschot (2009). Enam komponen tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1 *Financial Risk Disclosure Framework*

Untuk mendeskripsikan praktik pengungkapan risiko keuangan pada laporan tahunan industri perbankan yang menjadi sampel penelitian digunakan teknik *scoring* yakni memberi skor 1 untuk setiap pengungkapan sesuai item pengungkapan dan skor 0 jika tidak mengungkapkan.

Pengungkapan risiko keuangan dapat diukur dengan menjumlahkan skor pengungkapan untuk setiap laporan tahunan. Persamaan yang digunakan untuk menghitung tingkat kuantitas pengungkapan risiko finansial dalam penelitian ini adalah :

$$DSCORE_{by} = \frac{1}{MAX_{by}} \sum_{i=1}^n SCORE_{iBY} \times 100\%$$

$DSORE_{by}$: Skor pengungkapan bank B pada tahun y

MAX_{by} : Nilai maksimum yang mungkin dicapai bank B pada tahun y

$SCORE_{iBY}$: Skor untuk item bank B pada tahun y

i : Item dalam *framework*.

2. Variabel Independen

a. *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

NPL dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$NPL = \frac{\text{kredit kurang lancar} + \text{kredit diragukan} + \text{kredit macet}}{\text{total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

b. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Besarnya LDR menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%.

LDR dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$LDR = \frac{\text{Total kredit}}{\text{Total deposito} + \text{ekuitas}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan:

1. Pengukuran variabel dependen dan independen,

Tahap pertama yang dilakukan adalah menelusuri laporan tahunan industri perbankan sampel yang melakukan pengungkapan risiko keuangan, kemudian untuk setiap pengungkapan sesuai indikator diberi skor 1 atau skor 0 jika tidak mengungkapkan item dalam indikator tersebut. Selanjutnya menjumlahkan item pengungkapan yang dilakukan kemudian menjadikannya dalam bentuk persentase.

Tahap kedua yakni melakukan perhitungan terhadap variabel independen yang dianalisis yaitu *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

2. Analisis Regresi Berganda

Dalam menganalisis penelitian tentang analisis pengaruh *non performing loan terhadap dan loan to deposit ratio terhadap pengungkapan risiko keuangan (Financial Risk Disclosure)* pada industri perbankan yang terdaftar di BEI digunakan regresi linear berganda. Regresi linear berganda ingin menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel independen. Model regresi berganda tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut

$$FRD = a + b_1NPL + b_2LDR + e.....(1)$$

3. Pengujian Hipotesis

- a. Uji Statistik F
- b. Uji Statistik t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Pengungkapan Risiko Keuangan (*Financial Risk Disclosure*)

1. Statistik Deskriptif

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Pengungkapan Risiko Keuangan (FRD)

Tabel 4 menunjukkan bahwa bank yang memiliki nilai pengungkapan terendah adalah PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. pada tahun 2010 dengan nilai sebesar 27,08% dan bank yang memiliki nilai pengungkapan tertinggi adalah PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. dengan nilai sebesar 60,42% serta nilai rata-rata (*mean*) sebesar 43,08%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan risiko keuangan belum sepenuhnya dipatuhi oleh bank, hal ini kemungkinan dikarenakan belum adanya indikator yang jelas tentang pengungkapan risiko keuangan di Indonesia.

2. Uji Statistik F

Untuk mengetahui tingkat signifikan secara simultan antara variabel dependen dengan variabel independen digunakan uji F, sehingga dapat diketahui apakah secara simultan NPL dan LDR berpengaruh atau tidak secara signifikan terhadap pengungkapan risiko keuangan (FRD).

Tabel 4 Hasil Uji Statistik F

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa F hitung sebesar 3,116 lebih kecil dari F tabel sebesar 3,153 dengan tingkat signifikan 5%. Hal ini berarti semua variabel independen secara simultan bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dilihat dari nilai signifikansi 0,052 menunjukkan bahwa secara simultan variabel NPL dan LDR tidak berpengaruh terhadap model dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05.

3. Uji Statistik t

Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial NPL dan LDR berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap pengungkapan risiko keuangan (FRD).

Tabel 5 Hasil Uji Statistik t

Dilihat dari tabel 4.12 bahwa variabel NPL memiliki nilai t hitung sebesar -1,310 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,002 selain itu nilai signifikansi variabel NPL sebesar 0,195 berada jauh di atas taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko.

Nilai t hitung variabel LDR sebesar 1,877 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,002 dan nilai signifikansi LDR pun lebih besar dari 0,05 yakni sebesar 0,065. Jadi dapat disimpulkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa secara parsial, NPL maupun LDR tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel statistik deskriptif, diketahui bahwa pada tahun 2010 tingkat pengungkapan risiko keuangan adalah sebesar 41% kemudian meningkat di tahun 2011 menjadi 45%, sehingga diketahui rata-rata bank di Indonesia melakukan pengungkapan risiko keuangan sebesar 43,08%. Hal ini berarti tingkat pengungkapan risiko keuangan pada industri perbankan di Indonesia masih tergolong rendah dan mengindikasikan peraturan mengenai kewajiban melakukan pengungkapan risiko finansial belum sepenuhnya dipatuhi oleh bank, walaupun telah banyak peraturan mengenai kewajiban melakukan pengungkapan risiko keuangan. Masih rendahnya tingkat pengungkapan risiko keuangan tersebut bukan semata-mata kesalahan manajemen bank, tetapi dapat disebabkan belum adanya indikator yang spesifik mengenai hal-hal apa saja yang harus diungkapkan berkaitan dengan risiko tersebut. Peraturan di Indonesia sampai dengan tahun 2011 yang merupakan tahun pengamatan tertuang dalam SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 hanya mewajibkan dilakukan pengungkapan risiko tanpa adanya item-item yang jelas.

Berdasarkan hasil uji pengaruh NPL dan LDR terhadap pengungkapan risiko keuangan yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,052. Karena pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05, maka dapat diketahui bahwa signifikansi $> 0,05$, sehingga seluruh hipotesis ditolak. Hal ini dapat menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel NPL dan LDR terhadap pengungkapan risiko keuangan pada industri perbankan tahun 2010 dan 2011.

Hasil penelitian yang menyatakan tidak berpengaruhnya NPL terhadap pengungkapan risiko keuangan mendukung penelitian Anagnostopoulos dan Skordoulis (2011) yang menganalisis tentang pengungkapan risiko pada industri perbankan di Yunani. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa profil risiko, ukuran bank, serta profitabilitas tidak berpengaruh terhadap volume pengungkapan risiko bank. Linsley dan Shrivies (2006) juga telah menganalisis pengungkapan risiko pada laporan tahunan perusahaan di Inggris serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan tingkat risiko lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko sedangkan *gearing ratio*, *asset cover*, *qui score*, *book to market value of equity*, dan *beta* (risiko sistematis) tidak terbukti secara signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Akan tetapi, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Vandamaelle (2009) yang menganalisis tentang praktek pengungkapan risiko manajemen pada perusahaan yang *terdaftar* di Belgia, hasilnya menyatakan risiko sistematis berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko manajemen.

Selain itu, hasil penelitian yang menunjukkan tidak berpengaruhnya LDR ,sebagai rasio mengukur likuiditas bank, terhadap pengungkapan risiko keuangan mendukung penelitian Perdana (2011) yang meneliti tentang pengaruh tingkat likuiditas dan ROE terhadap tingkat pengungkapan informasi laporan tahunan pada industri perbankan yang terdaftar di BEJ tahun 2005-2006. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa likuiditas tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan pengungkapan tahunan industri perbankan. Penelitian lain yang juga mendukung hasil penelitian peneliti adalah penelitian Arista (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan *real estate* dan properti di Indonesia yang menyimpulkan hanya variabel porsi saham publik dan set kesempatan investasi (IOS) yang berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan wajib, sedangkan rasio leverage, likuiditas, profitabilitas dan umur perusahaan tidak berpengaruh.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Johan dan Lekok (2006) yang juga meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan informasi laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

Penyebab tidak adanya pengaruh NPL dan LDR terhadap pengungkapan risiko keuangan dapat dihubungkan dengan sifat pengungkapan risiko keuangan yakni merupakan pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib berarti pengungkapan tersebut bersifat memaksa sehingga perusahaan sangat berkepentingan untuk melaksanakannya sebagai komponen pendukung berjalannya usaha yang didirikan. Selain itu, pengungkapan dilakukan pun untuk menghindari bank dari sanksi akibat tidak memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, motivasi utama bank melakukan pengungkapan risiko lebih mengarah pada bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga berada pada tingkat berapa pun nilai NPL dan LDR, perusahaan tetap akan mengungkapkan risiko keuangannya walaupun tingkat pengungkapan dari satu bank dengan bank lain

Oleh karena itu, bagi calon investor pada bank yang tingkat pengungkapannya masih rendah harus lebih teliti lagi dalam menemukan informasi berkaitan dengan risiko keuangan yang selalu melekat pada aktivitas industri perbankan.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kepatuhan bank untuk melakukan pengungkapan risiko keuangan masih tergolong rendah yang dibuktikan dengan nilai rata-rata pengungkapan sebesar 43,08% dan tidak ada satupun bank yang mengungkapkan secara penuh item pengungkapan risiko keuangan. Pengungkapan tertinggi dilakukan oleh PT. Bank Pan Indonesia, Tbk sebesar 60,42% dan sebaliknya, pengungkapan terendah dilakukan oleh PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk sebesar 27,08%. Hal tersebut dapat disebabkan belum adanya indikator yang jelas di Indonesia mengenai item-item apa saja yang harus diungkapkan dalam pengungkapan risiko keuangan.
2. Hasil uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen yakni NPL dan LDR secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan pada tingkat signifikansi 5%.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko keuangan, LDR juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan pada tingkat signifikansi 5%.

KETERBATASAN

1. Periode penelitian yang hanya menggunakan dua tahun pengamatan, sehingga praktik pengungkapan risiko keuangan yang diamati kurang menggambarkan yang sebenarnya.
2. Penelitian hanya menguji pengaruh menggunakan dua variabel independen yakni NPL dan LDR yang keduanya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan risiko keuangan.

3. Penelitian pengungkapan risiko keuangan yang merupakan pengungkapan wajib ini masih menggunakan indikator yang dikonstruksi peneliti luar Indonesia, sehingga perlu disesuaikan lagi dengan keadaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anagnostopoulos, Yiannis and Skordoulis, Rosemary. 2011. *Risk Disclosure Policies: A Cross Sectional Analysis of The Greek Banking Industry*. UK.
- Arista, Febrianto. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan *Real Estate* dan *Property* di Indonesia. Skripsi pada Strata Satu STIE Perbanas. Surabaya.
- Gandapraja, Permadi. 2004. Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ghozali, Imam dan Chariri, Anis. 2007. Teori Akuntansi. UNDIP. Semarang.
- Helbok, Gunther and Christian Wagner. 2006. *Determinant of Operational Risk Reporting in The Banking Industri*. *Journal of Risk*. Austria.
- Hendriksen, Eldon S. 1996. Teori Akuntansi Jilid 2. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. IAI. Jakarta.
- Johan dan Widyawati Lekok. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol. 8. No. 1. Hal 70-91.
- Kasmir. 2011. Analisis Laporan Keuangan. PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-134/BL/2006.
- Linsley, Philip M. and Shrides, Philip J. 2006. *Risk Reporting: A Study of Risk Disclosure in the Annual Reports of UK Companies*. *British Accounting Review*, 38 (4). pp. 387-404.
- Nurhilal, Rahman. 2011. Pengaruh Risiko Litigasi dan Risiko Reputasi Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan. <http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/1338/pengaruh-risiko-litigasi-dan-risiko-reputasi-terhadap-tingkat-pengungkapan-sukarela-laporan-tahunan>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2013.
- Nusantara, Ahmad Buyung. 2009. Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank. Tesis pada Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Semarang.
- Oorschot, Laura van. 2009. *Risk Reporting: An Analysis of the German Banking Industry*. Master Thesis Accounting, Auditing and Control of Erasmus University Rotterdam. Rotterdam.
- Pattikawa, Harry. 2011. Pelajaran Dua Tahun Runtuhnya Bank Indover . *Infobank* No 385 April 2011 Vol.XXXIII Hal 84-85.
- Perdana, Rizky Cipta. 2011. Pengaruh Tingkat Likuiditas dan *Return On Equity* Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Laporan Tahunan. <http://www.fe.unpad.ac.id/karya-ilmiah/index.php/skripsi/detail/1201/pengaruh-tingkat-likuiditas-dan-return-on-equity-terhadap-tingkat-pengungkapan-informasi-laporan-tahunan>. Diakses pada tanggal 4 April 2013.

- Puri, Deasy Ratna. 2012. Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pelaporan Keuangan melalui Internet pada Perusahaan dengan Nilai Kapitalisasi Terbesar di Indonesia Periode Tahun 2012. Skripsi pada Strata Satu Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Sari, Tia Melya. 2012. Pengaruh *Non Performing Loan* Sebagai Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan. Skripsi pada Strata Satu Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Suhardjanto, Djoko dan Aryane Dewi. 2011. Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan : Studi Empiris Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 15 No. 1 Januari 2011 Hal. 105-118.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.
- Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. BPFE. Yogyakarta.
- Trisanti, Leony Lovancy. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela. Skripsi pada Strata Satu Universitas Diponegoro. Semarang.

LAMPIRAN

Tabel 1 *Financial Risk Disclosure Framework*

Kategori	Keterangan	Jumlah Item
1.	<i>Market risk-interest rate risk</i>	11
2.	<i>Market risk-currency risk</i>	11
3.	<i>Market risk-other price risk</i>	11
4.	<i>Credit risk</i>	19
5.	<i>Liquidity risk</i>	6
6.	<i>Other disclosure</i>	1
	JUMLAH	59

Tabel 2 Pengungkapan Risiko Keuangan (*Financial Risk Disclosure*)

No.	Kode	<i>Financial Risk Disclosure (FRD)</i>			
		2010		2011	
1.	AGRO	20	42%	21	44%
2.	BABP	18	38%	19	40%
3.	BACA	14	29%	20	42%
4.	BAEK	20	42%	18	38%
5.	BBCA	22	46%	23	48%
6.	BBKP	27	56%	26	54%
7.	BBNI	18	38%	20	42%
8.	BBNP	13	27%	16	33%
9.	BBRI	21	44%	21	44%
10.	BBTN	21	44%	23	48%

11.	BCIC	16	33%	16	33%
12.	BDMN	22	46%	26	54%
13.	BEKS	16	33%	17	35%
14.	BJBR	21	44%	22	46%
15.	BKSW	17	35%	25	52%
16.	BMRI	25	52%	24	50%
17.	BNBA	15	31%	25	52%
18.	BNGA	23	48%	21	44%
19.	BNII	28	58%	27	56%
20.	BNLI	23	48%	23	48%
21.	BSIM	19	40%	20	42%
22.	BSWD	27	56%	26	54%
23.	BTPN	18	38%	17	35%
24.	BVIC	15	31%	17	35%
25.	INPC	15	31%	21	44%
26.	MAYA	17	35%	20	42%
27.	MCOR	16	33%	18	38%
28.	MEGA	20	42%	24	50%
29.	NISP	22	46%	24	50%
30.	PNBN	29	60%	29	60%
31.	SDRA	14	29%	21	44%
Rata-Rata			41%		45%

Tabel 3 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL	62	,35	40,96	3,5311	5,86340
LDR	62	40,22	108,42	76,5611	13,87396
FRD	62	27,08	60,42	43,0784	8,38272
Valid N (listwise)	62				

Tabel 4 Hasil Uji Statistik F**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	409,505	2	204,753	3,116	,052 ^a
	Residual	3876,960	59	65,711		
	Total	4286,465	61			

a. Predictors: (Constant), LDR, NPL

b. Dependent Variable: FRD

Tabel 5 Hasil Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	Zero-order	Partial
1	(Constant)	33,007	6,036		5,468	,000
	NPL	-,235	,180	-,164	-1,310	,195
	LDR	,142	,076	,236	1,877	,065

Pengaruh *Deferred Tax Expense* dan *Total Accruals* terhadap *Earnings Management* pada Masa Perubahan Tarif PPh Badan Tahun 2008-2010

JULIATI
ARUM KUSUMANINGDYAH ADIATI*
Universitas Sebelas Maret

Abstrak: Penelitian ini menguji apakah *Deferred Tax Expense* memiliki kemampuan yang lebih baik daripada *Total Accruals* dalam mendeteksi *earnings management* di sekitar perubahan tarif PPh badan tahun 2008 – 2010 pada perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia?

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesia Capital Market Directory (ICMD) dan situs BEI yaitu www.idx.co.id. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan logistic regresion dengan variabel dependen “*earnings management*”, variabel-variabel independen yang meliputi *deferred tax expense* dan *total accruals*.

Penelitian mendapatkan bukti empiris sebagai berikut. *Deferred tax expense* dan *total accrual* secara parsial tidak dapat mendeteksi *earnings management* pada perubahan tarif pph badan dalam kurun waktu 2008 – 2010 yangmana ada dua kali perubahan tarif pph badan. Tetapi, secara simultan *deferred tax expense* dan *total accruals* memiliki kemampuan dalam mendeteksi *earnings management* untuk perubahan tahun pajak 2008 ke 2009 dan tidak memiliki kemampuan secara simultan dalam mendeteksi *earnings management* untuk perubahan tarif pph badan dari tahun 2009 ke tahun 2010.

Kata kunci: *Deffered Tax Expenses, Total Accruals, Earnings Management.*

* Corresponding author: adiati_rk@yahoo.com

Pendahuluan

Laba pada perusahaan selalu menjadi fokus utama untuk melihat *performance* suatu perusahaan. Tetapi, ternyata dalam beberapa kasus, laba tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari perusahaan. Praktik *earnings management* merupakan praktik yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan manipulasi laba (Sitorus dan Handayani, 2010:11). *Earnings management* bisa dilakukan oleh perusahaan dengan membuat laba perusahaan menjadi lebih tinggi atau rendah atau hampir sama setiap tahunnya (Setiawati dan Naim, 2001:160), karena memang dalam akuntansi diperkenankan untuk mengakui pendapatan atau biaya secara akrual. Artinya, pendapatan atau biaya tersebut sudah diakui walaupun secara kas belum diterima atau dikeluarkan oleh perusahaan.

Investor, kreditor dan juga Pemerintah merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. *Earnings management* yang dilakukan oleh perusahaan bisa menyajikan informasi laporan keuangan menjadi tidak jujur dan tidak bisa dipercaya (Setiawati dan Naim, 2001: 160). Misalnya, karena kepentingan manajemen untuk memperlihatkan hasil kerja yang bagus pada investor dan kreditor maka perusahaan akan menerapkan prinsip akrual dengan mengakui pendapatan dari piutang-piutang yang masih belum ditagih, dan juga di bagian beban memperkecil beban penyisihan piutang tidak tertagih atau memperkecil biaya depresiasi. Akibatnya laba menjadi lebih besar, padahal bisa jadi pada tahun-tahun berikutnya piutang-piutang yang telah diakui oleh perusahaan tidak dapat ditagih dan menjadikan perusahaan kehilangan pendapatan yang sebenarnya.

Para peneliti telah melakukan kajian terhadap *earnings management* dan menemukan beberapa motivasi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Healy dalam Setiawati dan Naim (2001:160) mengungkapkan bahwa manajemen melakukan *earnings management* untuk memaksimalkan bonus yang bisa mereka terima.

Tetapi, beberapa penelitian mengungkapkan *earnings management* juga bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Adanya perubahan peraturan perpajakan tentu akan direspon perusahaan untuk melakukan *earnings management* guna mendapatkan pajak yang lebih rendah. Seperti yang ditemukan oleh Frankel dan Trezervent dalam Setiawati dan Naim (2001:160) bahwa adanya penurunan tarif pajak dapat memotivasi manajemen untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Temuan tersebut sama dengan penelitian Guenther (1994) di Amerika yang menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak direspon oleh perusahaan untuk dapat mengatur labanya agar menghasilkan jumlah pajak yang kecil, sehingga perusahaan akan memaksimalkan laba ketika tarif pajak kecil dan menunjukkan adanya indikasi manajemen laba disekitar perubahan tarif pajak tersebut (dalam Sitorus dan Handayani, 2010:29; Rahmawati dan Djamaluddin, 2007:5).

Perubahan peraturan perpajakan yang terjadi di Indonesia, bisa menjadi celah bagi perusahaan untuk dapat melakukan penghematan pajak. Perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang terjadi pada Wajib Pajak badan yaitu adanya penurunan tarif selama 2 (dua) tahun berturut-turut, pada tahun 2008 terjadi perubahan tarif PPh badan dari tarif progresif ke tarif tunggal menjadi 28%, yang diberlakukan mulai tahun 2009, kemudian perubahan tarif terjadi lagi pada tahun 2009 terjadi penurunan tarif kembali dari 28% menjadi 25% yang berlaku pada tahun 2010. Manajemen bisa melakukan *tax shifting* yaitu memindahkan pendapatan ke tahun yang memiliki tarif yang lebih rendah (Wijaya dan Martani, 2011:2)

Sitorus dan Handayani (2010:54) dalam penelitiannya mengenai manajemen laba karena adanya perubahan tarif PPh badan yang ada di Indonesia menemukan bukti empiris bahwa tidak terjadi indikasi manajemen laba dengan adanya penurunan tarif PPh badan dari tarif progresif pada tahun 2008 menjadi 28% pada tahun 2009 karena nilai rata-rata *discretionary accruals* yang dijadikan variabel manajemen laba menjadi lebih kecil sesudah terjadinya perubahan tarif pajak. Hasil tersebut berbeda dengan Wijaya dan Martani (2011:19) dalam

penelitiannya yang menyebutkan bahwa perusahaan melakukan tindakan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif PPh badan dari tahun 2008 ke tahun 2009 di Indonesia, baik perusahaan yang mengalami keuntungan maupun perusahaan yang mengalami kerugian karena nilai *discretionary accruals* menjadi meningkat setelah adanya perubahan tarif PPh badan. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa perusahaan yang memperoleh keuntungan melakukan praktik manajemen laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian.

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan membawa dampak bagi *earnings* yang dilaporkan oleh perusahaan. Hal tersebut tercermin dengan disajikannya *current tax expense* dan *deferred tax expense* dalam laporan keuangan rugi laba sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan permanen dan perbedaan temporer antara peraturan akuntansi komersial dan peraturan perpajakan.

Deferred tax expense ternyata dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Kemampuan *Deferred tax expense* dalam mendeteksi adanya *earnings mangement* dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan diluar negeri oleh Philips, et all (2003:30-31). Dalam penelitian tersebut *deffered tax expense* berpengaruh terhadap *earnings mangement* dalam menghindari kerugian dan penurunan laba. Selain fakta mengenai kemampuan *deffered tax expense* tersebut, penelitian mengenai *tax expense* dihubungkan dengan *earnings mangement* juga dilakukan, ternyata *tax expense* bisa digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan *earnings* yang ditargetkan (Dhaliwal, et all, 2003:27), sementara dalam *tax expense* terdapat *deffered tax expense* dan *current tax expense*.

Di Indonesia, Hendrawan, D. Lucas (2007:106) mengemukakan hasil yang berbeda dengan penelitian Philips, et all (2003), dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang *go public* tahun 2004-2006, penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa *deffered tax expense*, *total accruals* dan *delta operating cash flow* secara bersama-sama memiliki

pengaruh dalam mendeteksi adanya *earnings management*, akan tetapi secara parsial *deffered tax expense* tidak memiliki pengaruh terhadap *earnings management* sementara *total accruals* dan *delta operating cash flow* tetap memiliki pengaruh secara parsial. Hasil penelitian tersebut ternyata sesuai dengan Deviana, Birgitta (2009:22) yang memberikan bukti empiris bahwa *deffered tax expense* tidak memiliki kemampuan secara parsial dalam mendeteksi adanya *earnings management* pada saat *seasoned equity offering*, tetapi dapat sebagai pendeteksi jika secara bersama-sama dengan *current tax expense*, sementara *current tax expense* justru mampu mendeteksi *earnings management* pada saat *seasoned equity offerering*. Akan tetapi, penelitian Yulianti (2004:123) serta Amali, Muhammad (2009:79) memberikan hasil yang sama dengan Philips, et all (2003) yang menyebutkan bahwa *deffered tax expense* dapat dijadikan pengukur adanya *earnings management* dalam menghindari kerugian tetapi tidak untuk menghindari penurunan laba. Yulianti (2004:123) menyebutkan bahwa *deffered tax expense* dan *total accrual* memiliki kemampuan dalam mendeteksi manajemen laba dibandingkan dengan *discretionary accrual*. Penelitian tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Subekti Djamaluddin (2007:19) bahwa *deffered tax expense* yang dihasilkan dari selisih antara aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi adanya manajemen laba.

Deffered tax expense merupakan salah satu akun dalam laporan laba rugi keuangan bank yang menunjukkan adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, prinsip akrual yang diterapkan dalam laba akuntansi dan laba fiskal yang berbeda dalam setiap periodenya akan tercermin dari akun tersebut (Yulianti, 2004:4). Penelitian di Indonesia memang masih memberikan hasil yang berbeda sehubungan dengan kemampuan *deffered tax expense* dalam memprediksi *earnings management*. Penelitian (Hendrawan, 2007; Deviana, 2009) menyatakan bahwa *deffered tax expense* tidak memiliki kemampuan dalam mendeteksi *earnings management* secara parsial. Sementara Yulianti (2004) menyatakan bahwa *deffered*

tax expense memiliki kemampuan yang sama dengan total akrual dalam mendeteksi *earnings management* bahkan lebih baik dari *discretionary accrual*.

Total accruals merupakan prediktor yang dapat digunakan dalam beberapa penelitian untuk mendeteksi adanya *earnings management*. Salah satu model yang digunakan adalah total akrual yang dikembangkan oleh Healy seperti yang telah dipakai dalam beberapa penelitian (Yulianti, 2004; Setiawati dan Naim, 2001). Dalam penelitian tersebut total akrual mampu mendeteksi adanya *earnings management* yang terjadi pada perusahaan. Sementara model yang lain yaitu *discretionary accrual* yang dikenal dengan model Jones (1991) seperti yang digunakan dalam beberapa penelitian (Yulianti, 2004; Sitorus dan Handayani, 2010; Wijaya Martani, 2011). Dalam penelitian Yulianti (2004:124) total akrual memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan *discretionary accrual* dalam mendeteksi *earnings mangement* untuk menghindari kerugian.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah *Deferred Tax Expense* dan *Total Accruals* memiliki kemampuan dalam mendeteksi *earnings management* pada masa perubahan tarif PPh badan tahun 2008 – 2010 pada perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia?

Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian Philips, et all. (2003:30-31) merupakan penelitian yang memasukkan elemen *deffered tax expense* untuk mendeteksi manajemen laba, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa beban pajak tangguhan berguna untuk mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk menghindari kerugian dan penurunan laba. Menurut penelitian tersebut *deffered tax expense* merupakan komponen dari beban pajak penghasilan yang merefleksikan efek pajak yang timbul dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Hal utama yang menyebabkan perbedaan temporer tersebut muncul adalah pengakuan pendapatan

dan beban secara *accrual* yang berbeda antara laba akuntansi dan laba fiskal dalam periode yang berbeda (Philips, et all: 2003: 4). Penelitian yang menggunakan standar *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) tersebut kemudian mempunyai argumen bahwa *deffered tax expense* memiliki kemampuan dalam memprediksi manajemen laba disebabkan karena manajemen akan berusaha untuk membuat laba akuntansi yang tanpa harus menaikkan pendapatan yang dikenakan pajak, maka manajemen laba akan diperlukan di sini.

Dhaliwal, et all (2003:27) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa *tax expense* bisa digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan *earnings* yang ditargetkan. Penelitian tersebut mengukur *earning management* dengan menggunakan perbedaan *Effective Tax Rate* (ETR) pada akhir tahun dan estimasi tahunan ETR pada kuartar ketiga, karena pada kuartar ketiga tersebut terdapat *tax planning* yang merupakan antisipasi pada kuartar keempat. Pengujian penelitian tersebut menggunakan *tax expense* yang mana terdapat perbedaan temporer yang berpengaruh terhadap *deferred tax expense* maupun *current tax expense*, tetapi tidak berpengaruh total *tax expense*. Dalam menggunakan *tax expense* untuk menaikkan *earning*, perusahaan harus menurunkan total *tax expense* yang akan mempengaruhi ETR (Dhaliwal, et all: 2003:24)

Penelitian di Indonesia antara lain Yulianti (2004:123-125) menyebutkan bahwa *deffered tax expense* dapat dijadikan pengukur adanya *earnings management* dalam menghindari kerugian secara terpisah maupun bersama-sama begitu juga dengan *total accruals* maupun *discretionary accruals*, tetapi *deffered tax expense* dan *total accruals* memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memprediksi *earnings management* dibandingkan dengan *discretionary accruals* karena memiliki tingkat keyakinan 95% sementara *discretionary accruals* hanya memiliki tingkat keyakinan 90%. Penelitian ini memisahkan antara perusahaan yang berada dalam *small loss firm* dan *small profit firm* dengan menggunakan sampel perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dan membaginya dalam dua kelompok, yaitu kelompok industri

manufaktur dan industri non manufaktur, kelompok industri non manufaktur memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan manajemen laba dibandingkan kelompok industri manufaktur.

Hasil yang sama dengan penelitian Yulianti (2004) juga dikemukakan dalam penelitian Amali, Muhammad (2009) yang mengambil sampel pada perusahaan masuk bursa. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Subekti Djamaluddin (2007:19) dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur tahun 2000 – 2004 menemukan bahwa beban pajak tangguhan yang dihasilkan dari selisih antara aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi adanya manajemen laba, penelitian tersebut juga menguji komponen-komponen dalam perubahan aktiva kewajiban pajak tangguhan serta kewajiban pajak tangguhan. Komponen-komponen tersebut ternyata tidak terbukti secara signifikan dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari laba menurun.

Hendrawan, D. Lucas (2007:106) dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang *list* di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2006 melakukan pengujian secara parsial dan simultan pada *deferred tax expense*, *total accruals* dan *delta operating cash flow* terhadap *earning managements* dan memberikan bukti empiris bahwa secara parsial hanya *total accruals* dan *delta operating cash flow* yang memiliki pengaruh terhadap *earnings management*, sedangkan *deferred tax expense* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *earnings management*, tetapi secara simultan ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan

Pengujian secara empiris pada saat *seasoned equity offering* untuk melihat pengaruh beban pajak tangguhan dan beban pajak kini dilakukan oleh Deviana, Birgitta (2009:21-22) yang memberikan hasil bahwa beban pajak tangguhan dan beban pajak kini memiliki kemampuan untuk memprediksi manajemen laba secara bersama-sama pada saat *seasoned equity offerings*, sedangkan secara parsial hanya beban pajak kini yang mampu mendeteksi manajemen laba pada saat *seasoned equity offering*. Menurut penelitian tersebut pada beban

pajak tangguhan hanya terkandung perbedaan temporer sementara pada beban pajak kini terkandung perbedaan permanen dan perbedaan temporer.

Perubahan tarif pajak bisa menjadi indikasi adanya manajemen laba diungkapkan dalam beberapa penelitian. Sitorus dan Sri Handayani (2010:54) menggunakan variabel *discretionary accruals*, penelitian tersebut melakukan pengujian terhadap variabel tersebut dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur pada tahun 2008 dan tahun 2009. Hasil yang didapatkan bahwa tidak ada indikasi adanya manajemen laba dengan adanya perubahan tarif pajak yang ada di Indonesia pada tahun 2008 ke tahun 2009. Penelitian tersebut tidak sesuai dengan Guenther dalam Sitorus dan Handayani (2010:29) serta Frankel dan Trezervent dalam Setiawati dan Naim (2001:160) yang menyebutkan bahwa perubahan tarif pajak dapat memotivasi manajemen untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Sedangkan Wijaya dan Martani (2011:29) dengan sampel perusahaan manufaktur tahun 2008 dan tahun 2009 dalam penelitiannya menyikapi adanya perubahan tarif pajak di Indonesia menyebutkan bahwa perusahaan melakukan tindakan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia, baik perusahaan yang mengalami keuntungan maupun perusahaan yang mengalami kerugian. Perusahaan yang memperoleh keuntungan melakukan praktik manajemen laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian, hal tersebut dikarenakan perusahaan yang mengalami kerugian dapat dibebaskan dari pembayaran pajak karena adanya aturan kompensasi kerugian.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut maka terbentuk hipotesis yang pertama, yaitu:

H1: *Deferred Tax Expense dan Total accruals memiliki kemampuan secara parsial dalam mendeteksi Earnings Management pada masa perubahan tarif PPh badan tahun 2008 – 2010 pada perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia.*

H2: *Deferred Tax Expense dan Total accruals memiliki kemampuan secara simultan dalam mendeteksi Earnings Management pada masa perubahan tarif PPh badan tahun 2008 – 2010 pada perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia*

Metode Riset

Penelitian ini untuk menguji apakah *deferred tax expense, current tax expense, total accruals* dan *delta operating cash flow* memiliki kemampuan dalam mendeteksi *earnings management* di sekitar tahun terjadinya perubahan tarif PPh badan pada perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia. *Earnings management* yang digunakan sebagai variabel dependen menggunakan *earnings threshold* dalam penelitian Bughstahler dan Dichev (1997).

Penelitian yang menggunakan *earnings threshold* untuk mengukur *earnings management* adalah Philips, et all (2003) dengan menggunakan interval titik tengah yaitu interval 0,01 untuk menghindari penurunan laba dan 0,02 untuk tujuan menghindari kerugian. Sementara penelitian yang dilakukan di Indonesia yang dilakukan oleh Hendrawan (2007) menggunakan interval yang sama dengan seperti yang dilakukan oleh Philips, et all (2003), akan tetapi Yulianti (2004) dan Amali (2009) menggunakan interval 0,06 sementara Rahmawati (2007) menggunakan interval 0,1. Bughstahler dan Dichev (1997) memang tidak menyebutkan interval terbaik untuk menentukan *earnings management*.

Penelitian ini akan mengambil interval 0,03 untuk *earnings management* dengan tujuan untuk menghindari kerugian karena menurut Bughstahler dan Dichev (1997) *earnings management* untuk menghindari kerugian lebih banyak dilakukan oleh perusahaan daripada *earnings management* untuk menghindari penurunan laba. Yulianti (2004:123) juga menyebutkan bahwa di Indonesia *deferred tax expense* hanya bisa digunakan sebagai pengukur *earnings management* untuk menghindari kerugian.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan hipotesis dan akan dilakukan pengujian untuk membuktikan hipotesis tersebut. pengujian hipotesis akan menggunakan *logistic regresion*. Pengujian tersebut telah digunakan oleh Philips, et all (2003), Yulianti (2004), Hendrawan (2007), Rahmawati (2007) dan Amali (2009). *Logistic regresion* digunakan karena variable dependen dari penelitian ini merupakan satu variable non metrik dengan dua kategori (kategori yang melakukan EM dan tidak melakukan EM) (Ghozali, 2006).

Persamaan *logistic regresion* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$EM_{it} = \alpha + \beta_1 DTE_{it} + \beta_2 Acc_{it} + \beta_3 TP + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

EM_{it} : skala pengukuran variable probabilitas perusahaan i melakukan manajemen laba di tahun t.

DTE_{it} : *deferred tax expense* perusahaan i di tahun t

Acc_{it} : total accrual perusahaan i pada tahun t

TP : tarif pajak

ϵ_{it} : *error term*

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah *earnings management* (EM) yang diukur berdasarkan *earnings threshold* untuk menghindari kerugian seperti dalam penelitian dalam penelitian Bughstahler dan Dichev (1997). Dalam penelitian ini, penghitungan nilai EM berdasarkan nilai dari laba bersih (EAT) pada tahun t dibagi dengan *market value of equity* (MVE) pada akhir tahun sebelumnya (Bughstahler dan Dichev, 1997; Philips, et all, 2003)

$EM = 1$, laba bersih perusahaan i pada tahun t dibagi *market value of equity* pada akhir tahun $t-1$, hasilnya ≥ 0 dan $< 0,03$

$EM = 0$, jika perubahan laba bersih perusahaan i pada tahun t dibagi *market value of equity* pada akhir tahun $t-1$, hasilnya diluar rentang $\geq 0,03$ dan < 0

Berdasarkan penghitungan tersebut maka perusahaan yang terindikasi melakukan EM adalah perusahaan yang berada pada kelompok $EM=1$ sedangkan perusahaan yang tidak terindikasi melakukan EM adalah perusahaan yang berada pada kelompok $EM=0$.

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah:

1. *Deferred Tax Expense* (DTE)

DTE merupakan komponen dari beban pajak penghasilan yang terdapat dalam laporan laba rugi perusahaan yang timbul karena adanya perbedaan temporer antara akuntansi dan fiskal. DTE merupakan hasil penghitungan dari saldo akhir *Deffered Tax Asset* (DTA) atau *Deferred Tax Liability* (DTL) dengan saldo awalnya. Variabel DTE dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan DTE pada tahun ini dibagi dengan Total Asset pada periode sebelumnya.

$$DTE_{it} = DTE_{it} / A_{it-1}$$

2. *Total Accruals*

Total accruals dalam penelitian ini diukur berdasarkan model total *accrual* Healy yang digunakan dalam Philips, et all (2003), Yulianti (2004), Hendrawan (2007) dan Amali (2009).

Total accruals ini kemudian di skala dengan total asset tahun sebelumnya sesuai dengan penelitian tersebut, sehingga *total accruals* dirumuskan sebagai berikut:

$$TA_{it} = EBEL_{it} - (CFO_{it} - EIDO_{it}) / A_{it-1}$$

Keterangan:

TA_{it} = *Total accrual* perusahaan i pada tahun t

$EBEL_{it}$ = *Income before extraordinary items* perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = *Cash flow from operation* perusahaan i pada tahun t

$EIDO_{it}$ = *Extraordinary items and discontinued operations* perusahaan i pada tahun t

A_{it} = Total Asset pada tahun t-1

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2010. Penelitian ini mengambil perusahaan manufaktur karena pertama, perusahaan ini selalu diambil sebagai sampel dalam penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini yaitu penelitian Bughstahler dan Dichev (1997), Philips, et all (2003), Yulianti (2004), Bauman, et all (1997), Dhaliwal (2003), Hendrawan (2007). Kedua, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang paling banyak di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibandingkan dengan perusahaan jenis lainnya yang ada di BEI sehingga diharapkan bisa mewakili pengambilan sampel yang ada di BEI.

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis akan menggunakan *logistic regresion*. Pengujian ini tidak membutuhkan asumsi klasik. *Logistic regresion* digunakan karena variabel dependen dari penelitian ini merupakan satu variable non metrik dengan dua kategori (kategori yang melakukan EM dan tidak melakukan EM) (Ghozali, 2006).

Analisis Data dan Pembahasan

Penelitian yang telah dilakukan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dari perusahaan tersebut, penelitian ini mengambil 110 perusahaan untuk dijadikan sampel penelitian yang diamati selama perubahan tarif pajak yaitu tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran manajemen laba yang dikembangkan oleh Burgstahler dan Dichev (1997). Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa *earnings management* dilakukan oleh perusahaan dengan 2 tujuan yaitu untuk menghindari penurunan laba dan untuk menghindari kerugian. Dalam penelitian ini akan menganalisis *earnings management* dengan tujuan untuk menghindari kerugian karena menurut penelitian tersebut, tujuan perusahaan untuk menghindari laba lebih sering dilakukan oleh perusahaan. Untuk tujuan tersebut maka ditentukan perusahaan yang melakukan *earnings mangement* sebagai berikut.

$EM = 1$, jika *net income* dibagi pada tahun t dibagi dengan nilai pasar ekuitas pada tahun $t-1$ hasilnya ≥ 0 dan $< 0,03$

$EM = 0$, jika *net income* dibagi pada tahun t dibagi dengan nilai pasar ekuitas pada tahun $t-1$ hasilnya diluar rentang ≥ 0 dan $< 0,03$

Dari hasil pengolahan data maka hasil yang diperoleh bahwa perusahaan yang melakukan *earnings management* untuk menghindari kerugian pada tahun 2008 sebanyak 22 perusahaan dan perusahaan yang melakukan earnings management pada tahun 2009 sebanyak 9 perusahaan sedangkan pada tahun 2010 terdapat 13 perusahaan.

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *Deferred Tax Expense* memiliki kemampuan secara parsial dalam mendeteksi *Earnings Management* di masa perubahan tarif PPh badan tahun 2008 – 2010 pada perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia ternyata ditolak hal tersebut ditunjukkan dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05 pada

pengujian tahun 2008 – 2010, 2008 – 2009 dan 2009 – 2010. *Deferred tax expense* yang mengandung perbedaan temporer dalam penelitian ini tidak memiliki kemampuan dalam mendeteksi *earnings management* dengan tujuan untuk menghindari kerugian, hasil ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Philips, et all (2003), Yulianti (2005), Rahmawati (2007) dan Amali (2009) tetapi sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hendrawan (2007). Penelitian ini memang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan karena pada masa perubahan tarif PPh Badan. Perbedaan temporer yang terkandung dalam *deferred tax expense* selain mengandung kebijakan akuntansi fiskal dalam melakukan pemilihan metode untuk laporan keuangan fiskal juga mengandung kompensasi kerugian dan dampak pajak karena penurunan tarif pajak penghasilan badan sehingga perbedaan temporer mengandung hal yang tidak bisa diatur oleh perusahaan yang bisa menghasilkan *deferred tax benefit* bagi perusahaan. Hendrawan (2007) mengungkapkan ketidakmampuan *deferred tax expense* dalam mendeteksi *earnings management* dimungkinkan karena peraturan ini baru dimulai tahun 2000 di Indonesia, sehingga perusahaan belum mengambil kebijakan untuk menciptakan transaksi yang bisa mempengaruhi *deferred tax expense*.

Total Accruals juga tidak memiliki kemampuan dalam mendeteksi *Earnings Management* di masa perubahan tarif PPh badan tahun 2008 – 2010 pada perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia, hal tersebut ditunjukkan dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05 pada pengujian tahun 2008 – 2010, 2008 – 2009 dan 2009 – 2010. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Philips, et all (2003), Yulianti (2005), Hendrawan (2007) dan Amali (2009). Tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada masa perubahan tarif pajak yaitu Sitorus (2010) serta Guenther dalam Hendrawan (2007). Sitorus (2010) mendapatkan bahwa perubahan tarif PPh Badan dari 2008 ke 2009 tidak didapatkan bukti adanya *earnings management* dengan melihat *accruals* nya karena rata-rata

accruals lebih tinggi pada tahun 2008 sehingga tidak ada upaya penghematan pajak perusahaan.

Sedangkan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *deferred tax expense* dan *total accruals* secara simultan memiliki kemampuan dalam mendeteksi *earnings management* dengan tujuan untuk menghindari kerugian di masa perubahan tarif PPh badan tahun 2008 – 2010 pada perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia juga ditolak, hasil pengujian menunjukkan nilai 0,096. Tetapi, *deferred tax expense* dan *total accruals* secara simultan memiliki kemampuan dalam mendeteksi *earnings management* untuk menghindari kerugian pada masa perubahan tarif pajak dari tahun 2008 ke tahun 2009, karena berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai 0,052. Sedangkan, untuk perubahan tarif pajak dari tahun 2009 ke tahun 2010, hasil pengujian menunjukkan nilai 0,371 yang berarti melebihi 0,05 sehingga hipotesis tersebut tidak dapat diterima.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa *deferred tax expense* dan *total accrual* secara parsial tidak dapat mendeteksi *earnings management* pada perubahan tarif pph badan dalam kurun waktu 2008 – 2010 yang mana ada dua kali perubahan tarif pph badan. Tetapi, secara simultan *deferred tax expense* dan *total accruals* memiliki kemampuan dalam mendeteksi *earnings management* untuk perubahan tahun pajak 2008 ke 2009 dan tidak memiliki kemampuan secara simultan dalam mendeteksi *earnings management* untuk perubahan tarif pph badan dari tahun 2009 ke tahun 2010.

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris bahwa secara simultan *deferred tax expense* dan *total accruals* memiliki kemampuan dalam mendeteksi *earnings management* pada perubahan tarif pajak pph badan tahun 2008-2009 untuk perusahaan permanufacturan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, studi ini dapat digunakan sebagai

salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya, misalnya dalam pengujian pengaruh *deffered tax expense* dan *total accruals* terhadap *earnings management* untuk sektor industri selain permanufacturan.

Daftar Referensi

- Amali, Muhammad N. 2009. **Analisis Deffered Tax Expense Dalam Mendeteksi Earnings Management Pada Wajib Pajak Emiten Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa**. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9, No. 1, Pebruari: 71-84.
- Burgstahler, D. dan I. Dichev. 1997. *Earnings Management to Avoid Earnings Decrease and Losses*. *Journal of Accounting and Economics* 24: 99-126.
- Chen, L.H., D.S. Dhaliwal dan M.A. Trombley. 2012. *Consistency of Book Tax Difference and The Information Content of Earnings*. *The Journal of The American Taxation Association*. Vol. 34 No. 2. pp: 22-36
- Chung, Dennis Y. 1998. *Income Management in Response to Corporate Tax Rate Reductions: Canadian Evidence*. *The International Tax Journal*. 24, 4. pg: 28.
- Departemen Keuangan, Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.
- _____, Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Dhaliwal, D., C.A. Gleason and L.F. Milss. 2003. *Last Chance Earnings Management: Using the Tax Expense to Meet Analysts' Forecasts*. *Working Paper SSRN*, <http://www.ssrn.com> . Diakses tanggal 14 Desember 2010.
- Ghozali,Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guenther, D.A, E.L. Maydew dan S.E. Nutter. 1996. *Fianancial Reporting, Tax Costs and Book-Tax Conformity*. *Journal of Accounting and Economics* 23: 225 – 248.
- Gujarati, Damodar. 2010. **Dasar-Dasar Ekonometrika**. Buku I, Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat. Terjemahan.
- Harjito, Martono. 2005. **Manajemen Keuangan**, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Harnanto. 2003. **Akuntansi Perpajakan**. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Harahap, Sofyan S. 2001. **Teori Akuntansi**. Edisi Revisi, Cetakan Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendrawan, D. Lucas. 2007. *Analisis Pengaruh Deffered Tax Expense (DTE), Total Accruals (TAcc) dan Delta Operating Cash Flow (Delta CFO) Dalam Memprediksi Earnings Management Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Thesis UNAIR.
- Husnan, Suad. 2006. **Manajemen Keuangan**. Edisi Kelima, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. **Standar Akuntansi Keuangan**. Jakarta: Salemba Empat.
- Lin, B., R. Lu dan T. Zhang. 2012. *Tax Induced Earnings Management in Emenrging Markets. Evidence from China*. *The Journal of The American Taxation Association*. Vol. 34 No. 2. pp: 19-44

- Northcut, D.W. dan C.C. Vines. 1998. *Earnings Management in Response to Political Scrutiny of Effective Tax Rates*. *The Journal of The American Taxation Association*. Vol. 20 No. 2. pp: 22-36
- Perdana, Halim D. 2006. *Analisis Pengaruh Price Earnings Ratio (P/E) dan Market to Book Ratio (P/B) Terhadap Pertumbuhan Earnings (Growth) Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 5 No.1, hal: 1-23.
- Philips, J., M. Pincus, and S. Rego. 2003. *Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expenses*. *Working Paper SSRN*, <http://www.ssrn.com> . Diakses tanggal 14 Desember 2010.
- Rahmawati dan S. Djamaluddin. 2007. **Analisis Perubahan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan untuk Mendeteksi Manajemen Laba**. http://www.uns.ac.id/direktori_sdm diakses tanggal 8 Agustus 2011
- Research Division. 2009. *IDX Fact Book 2009*. *Indonesia Stock Exchange*
- _____. 2010. *IDX Fact Book 2010*. *Indonesia Stock Exchange*
- _____. 2011. *IDX Fact Book 2011*. *Indonesia Stock Exchange*
- Resmi, Siti. 2008. **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Edisi 4: Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Scott, R. W. 1997. *Financial Accounting Theory 2nd Ed.*, Prentice Hall, New Jersey.
- Setiawati, L dan A. Naim. 2001. *Bank health evaluation by Bank Indonesia and earnings management in banking industry*. *Gadjah Mada International Journal of Business*. Volume 3 No 2. May: 159-176.
- Sitorus, R.P. and S. Handayani. 2010. **Indikasi Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun**. EngD thesis, Perpustakaan FE UNDIP. <http://eprints.undip.ac.id/22943/> diakses tanggal 29 Juli 2011
- Subramanyam dan J. Wild. 2010. **Analisis Laporan Keuangan**. Edisi 10: Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. Terjemahan.
- Suwardjono. 2008. **Teori Akuntansi: Perekayasaan Laporan Keuangan**. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Waluyo. 2008. **Akuntansi Pajak**. Jakarta: Salemba Empat.
- Yulianti. 2004. **Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba**. Thesis UI. <http://eprints.lib.ui.ac.id/16156/>. Diakses tanggal 27 Desember 2010.

Analisis *Underpricing* pada Penawaran Saham Perdana: Faktor Determinan dan Konsekuensinya terhadap Persistensi Laba

INDITA AZISIA RISQI

PUJI HARTO*

Universitas Diponegoro

Abstract: *This research aims to analyze the determinant factors of underpricing and its consequences on earnings persistence. Some determinant factors can be divided into underwriter reputation, auditor's reputation, return on equity (ROE) and leverage. It was hypothesized that the population of the study was company undertaken initial public offering (IPO) in Bursa Efek Indonesia (BEI). Samples were taken from those IPO firms in the 2007-2011 period, resulting in 71 companies. Two models of multiple regressions then used to analyze the determinant factors and outcome of the underpricing respectively. The results of this research showed that the underwriter's reputation has negative and significant effect on underpricing. Subsequent analysis showed that the higher extent of underpricing was related with lower earnings persistence. This study has implication to the investors that the reputation of underwriter becoming a crucial factors that give signal to the market about the quality of the firm. It also implies that investor should alert about the deep discount of initial return that could be an indication towards the low quality of accounting earnings.*

Keywords: *IPO Underpricing, Earnings Persistence, Underwriter Reputation, Auditor Reputation, Return on Equity, Leverage Ratio.*

* Corresponding author: puji_to@yahoo.com

1. Pendahuluan

Penawaran saham perdana kepada publik melalui pasar perdana dikenal dengan istilah *Initial Public Offering* (IPO) sebagai salah satu upaya perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan dari masyarakat. Melalui mekanisme IPO perusahaan akan resmi berstatus sebagai perusahaan terbuka. Selanjutnya saham yang dijual kepada publik akan dicatat pada bursa efek dan dapat diperjual belikan pada pasar sekunder.

Penentuan harga saham pada pasar perdana merupakan hal yang krusial sebagai salah satu faktor keberhasilan proses IPO karena berkaitan dengan besarnya dana yang akan diperoleh oleh emiten dan risiko yang ditanggung oleh *underwriter*. Emiten memiliki kepentingan untuk membuka penawaran harga yang tinggi karena menginginkan pemasukan dana semaksimal mungkin. Disisi lain, *underwriter* sebagai penjamin emisi berusaha untuk meminimalisir risiko agar tidak mengalami kerugian akibat tidak terjualnya saham yang ditawarkan. Upaya yang dilakukan *underwriter* untuk mencegah tidak terjualnya saham emiten adalah dengan melakukan negosiasi dengan emiten agar harga saham tersebut tidak terlalu tinggi saat dijual. Penentuan harga sekuritas tersebut dilakukan melalui kesepakatan antara perusahaan emiten dengan *underwriter* (penjamin emisi saham) yang telah ditunjuk oleh perusahaan emiten, sedangkan harga saham pada saham sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Apabila harga saham pada saat IPO lebih rendah dibandingkan dengan harga saham di pasar sekunder pada hari pertama, maka akan terjadi fenomena yang disebut *underpricing*.

Underpricing merupakan fenomena yang menarik karena dialami oleh sebagian besar pasar modal di dunia dan seringkali dijumpai di pasar perdana (Ritter, 1991). Fenomena *underpricing* timbul karena adanya *asymmetric information*, sehingga menimbulkan ketidakpastian *ex-ante* bagi investor. Ketidakpastian *ex-ante* tersebut menimbulkan risiko bagi *underwriter* dan emiten karena berhubungan dengan nilai intrinsik perusahaan. Tingkat

ketidakpastian yang tinggi berpengaruh terhadap penentuan harga saham perdana yang seringkali dibuat lebih rendah daripada harga intrinsik perusahaan.

Fenomena lain adalah adanya penurunan harga saham atau kinerja perusahaan yang telah menerbitkan harga saham dalam jangka panjang (*Longrun underperformance*). Penurunan ini ditandai dengan menurunnya harga saham perusahaan dari waktu ke waktu dibandingkan dengan kinerja pasar secara keseluruhan maupun kinerja industri (Ritter, 1991). *Longrun underperformance* terjadi pada saat kinerja perusahaan saat IPO tidak dapat dipertahankan dan cenderung menurun setelah periode IPO. Bertahannya pendapatan dapat dijelaskan sebagai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan persistensi laba. Penurunan kinerja jangka panjang menunjukkan bahwa persistensi laba dalam laporan keuangan relatif rendah. Penelitian ini akan meneliti hubungan antara *underpricing* dengan *earnings persistence*.

Tujuan investor menggunakan informasi mengenai perusahaan emiten untuk mengetahui tentang kondisi perusahaan pada saat ini dan bagaimana prospek di masa depan. Prospek ini dapat diprediksi dengan menggunakan persistensi laba perusahaan. Dengan persistensi laba yang tinggi maka ketidakpastian di masa depan akan lebih rendah, sehingga *underpricing* dan *earnings persistence* memiliki hubungan negatif. Selain itu penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *underpricing*.

Penelitian ini akan meneliti hubungan antara *underpricing* dengan *earnings persistence*. Tujuan investor menggunakan informasi mengenai perusahaan emiten untuk mengetahui tentang kondisi perusahaan pada saat ini dan bagaimana prospek di masa depan. Prospek ini dapat diprediksi dengan menggunakan persistensi laba perusahaan. Dengan persistensi laba yang tinggi maka ketidakpastian di masa depan akan lebih rendah, sehingga *underpricing* dan *earnings persistence* memiliki hubungan negatif. Selain itu penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *underpricing*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yolana dan Martani (2005) serta Martani, Sinaga dan Syahroza (2012) dengan beberapa modifikasi. Penelitian ini menggunakan periode penelitian yang terbaru, serta penambahan variabel independen dan variabel kontrol. Leverage ditambahkan sebagai variabel independen yang menunjukkan tingkat risiko perusahaan. Sedangkan reputasi auditor dilihat melalui spesialisasi industri sebagai ukuran yang lebih akurat dibanding ranking *big four*. Selain itu variabel kontrol kondisi pasar ditambahkan dalam penelitian ini. Penyajian didalam artikel ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian dua berbicara tentang kajian literature dan pengembangan hipotesis. Bagian ketiga menjelaskan metoda penelitian. Bagian keempat mengungkap hasil penelitian dan pembahasannya. Pada bagian terakhir, akan berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya.

2. Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Fenomena *underpricing* dapat dijelaskan oleh teori sinyal (*signalling theory*). Pada teori sinyal, perusahaan berusaha memberikan sinyal kepada pasar mengenai kualitas mereka. Sinyal dapat berupa informasi yang bersifat finansial maupun non finansial yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Agar sinyal tersebut efektif, maka harus dapat ditanggapi oleh pasar dan di presepsikan baik, serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk (Megginson, 1997). Menurut Allen dan Faulhaber (1989), perusahaan yang berkualitas buruk tidak mudah untuk meniru perusahaan yang berkualitas baik yang melakukan *underpricing*, hal ini disebabkan karena *cash flow* periode berikutnya akan mengungkapkan tipe perusahaan tersebut (baik atau buruk). Pada perusahaan yang buruk, *cash flow* yang tinggi pada periode berikutnya jarang terjadi, akibatnya revisi harga saham juga jarang terjadi. Dengan demikian, biaya untuk melakukan *underpricing* akan semakin besar untuk perusahaan yang buruk.

Menurut Welch (1989), *underpricing* sebagai sinyal disebut *signalling device*, dengan tujuan utamanya adalah memaksimalkan harga penawaran pada penerbitan saham berikutnya. *Signalling cost (underpricing)* akan menjadi penghalang yang sangat berat untuk perusahaan dengan kualitas yang rendah. Implikasi yang telah diuji oleh model Welch adalah perusahaan dengan tingkat *underpricing* yang tinggi akan dengan segera melakukan penerbitan saham untuk berikutnya. Selain itu juga perusahaan yang melakukan *subsequent issues* (penerbitan saham yang berikutnya) akan cenderung memiliki nilai intrinsik yang lebih tinggi.

Sejumlah studi mempelajari bukti-bukti empiris mengenai sinyal *underpricing* pada perusahaan yang melakukan IPO. Salah satu pendekatannya adalah untuk mengetahui kandungan informasi (*information content*) dari sinyal IPO dengan memeriksa apakah ada hubungan antara sinyal dengan nilai pasar pasca IPO saham. Di dalam pasar dimana informasi sangat mudah diperoleh, nilai perusahaan sepenuhnya ditentukan oleh keputusan investasi dan pendanaannya.

Beberapa penelitian empiris yang dilakukan memiliki hasil yang beragam. Martani dan Yolana (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan data dari Bursa Efek Jakarta pada tahun 1994-2001 dengan menggunakan lima variabel yaitu reputasi *underwriter*, rata-rata nilai tukar, ukuran perusahaan, *return on equity*, dan jenis industri. Penelitian ini menemukan bahwa semua variabel memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat *underpricing* kecuali reputasi *underwriter*.

Penelitian Ardiansyah (2002) menggunakan variabel keuangan seperti profitabilitas perusahaan, *financial leverage*, EPS, *proceed*, pertumbuhan laba, *current ratio*, serta variabel non keuangan seperti besaran perusahaan dan kondisi perekonomian. Hanya variabel EPS yang berpengaruh terhadap *initial return* saham *underpricing*. Sedangkan variabel non keuangan berupa kondisi perekonomian memiliki pengaruh terhadap *initial*

return, sedangkan variabel reputasi *underwriter*, reputasi auditor, umur perusahaan, dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap *initial return* saham *underpricing*.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Wardoyo dan Saputra (2008) menggunakan variabel reputasi *underwriter*, reputasi auditor, *financial leverage*, *Return on Asset* (ROA), dan umur perusahaan dalam mempengaruhi *underpricing*. Periode penelitian dilakukan dalam rentang tahun 2003-2007 dengan menggunakan sampel 52 perusahaan yang melakukan IPO. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah reputasi auditor dan ROA berpengaruh terhadap *underpricing*.

Yoga (2009) melakukan penelitian sejenis dengan menggunakan variabel *Return on Asset* (ROA), *leverage*, ukuran perusahaan, harga saham perdana, reputasi *underwriter*, persentase saham yang ditawarkan kepada publik, waktu IPO, dan umur perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan ROA, harga saham, reputasi *underwriter*, berpengaruh negatif terhadap *underpricing*. Disisi lain, tingkat *leverage*, persentase saham dan waktu IPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap *underpricing*. Hasil ini sesuai dengan temuan Sulistio (2005) yang menemukan bahwa tingkat *leverage* dan persentase pemegang saham lama mempengaruhi *initial return* secara signifikan.

Martani (2004) meneliti pengaruh manajemen informasi dan faktor determinan lain terhadap harga saham, *Initial Return*, dan kinerja jangka panjang saham. Manajemen informasi yang digunakan adalah indeks pertumbuhan penjualan sebelum IPO, indeks pertumbuhan sesudah IPO, dan pergantian auditor. Untuk melihat pengaruh hubungan tersebut digunakan data empiris perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Jakarta dari tahun 1989-2000. Penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara *underpricing* dan persistensi laba. Namun, hubungan ini hanya ditemukan dalam tahun pertama setelah IPO. Pada tahun kedua setelah IPO, hubungan ini tidak ditemukan. Hal ini konsisten dengan

penelitian pada jangka panjang *underperformance* di Indonesia yang hanya ditemukan pada periode pertama dari satu tahun setelah IPO.

2.1 Pengaruh reputasi *underwriter* terhadap *underpricing*

Penjamin emisi (*underwriter*) berperan penting dalam proses IPO, salah satunya dalam proses penetapan harga saham perdana. Reputasi *underwriter* diyakini menjadi pertimbangan penting bagi investor untuk membeli saham suatu perusahaan. Reputasi *underwriter* dapat digunakan sebagai sinyal yang baik bagi investor dan dapat mengurangi ketidakpastian *ex-ante* (Beatty, 1989).

Dalam proses IPO, penjamin emisi bertanggung jawab atas saham yang dijual sehingga jika saham tidak terjual penjamin emisi wajib bertanggung jawab dengan cara membelinya. Untuk meminimalisir risiko penjamin emisi menentukan harga IPO dengan cara tawar menawar harga dengan perusahaan emiten. Penjamin emisi (*underwriter*) yang memiliki reputasi tinggi dapat mengurangi konflik yang terjadi dengan menetapkan harga saham perdana sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga akan mengurangi *underpricing*.

Melalui reputasi *underwriter* yang baik, tingkat *underpricing* akan lebih rendah. Menurut Ghazali dan Mudrik Al Mansur (2002), reputasi *underwriter* berpengaruh negatif terhadap *underpricing* dengan tingkat signifikansi 10%. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut.

H₁: *Reputasi underwriter berpengaruh negatif terhadap underpricing.*

2.2 Pengaruh reputasi auditor terhadap *underpricing*

Perusahaan yang melakukan IPO akan memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi baik, karena reputasi auditor berpengaruh pada kredibilitas laporan keuangan ketika perusahaan melakukan *go public*. Pendapat wajar tanpa pengecualian dari

auditor bereputasi baik mempunyai peran sebagai sinyal positif kepada pasar. Dengan adanya sinyal yang positif mengenai reputasi auditor dan reliabilitas informasi keuangan yang ditampilkan, maka diharapkan dapat mengurangi *underpricing*.

Menurut Rochayani dan Setiawan (2004), penggunaan jasa auditor dan penjamin emisi yang bereputasi baik akan memberikan sinyal mengenai nilai perusahaan dan kualitas IPO kepada investor yang potensial dan memberikan jaminan bahwa ramalan laba yang dibuat sesuai dengan aturan-aturan yang semestinya dan bahwa asumsi yang digunakan mempunyai dasar yang rasional terhadap ramalan yang dibuat manajemen. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut

H₂: *Reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap underpricing.*

2.3 Pengaruh profitabilitas terhadap *underpricing*

Tingkat profitabilitas merupakan salah satu sinyal fundamental yang penting bagi keputusan investasi. Ukuran profitabilitas memberikan investor informasi mengenai seberapa besar tingkat pengembalian modal investor dari perusahaan yang berasal dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan memberikan sinyal positif mengenai prospek perusahaan di masa mendatang. Hal ini memungkinkan naiknya harga penawaran saham di pasar sekunder yang disebabkan permintaan akan saham tersebut meningkat. Kemungkinan investor mendapatkan *return* awal yang relatif rendah tetapi dalam jangka panjang setelah memasuki pasar sekunder kemungkinan investor mendapatkan *return* yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya profitabilitas.

Menurut Kim (1999) berdasarkan teori *Signalling* untuk mengatasi penilaian yang rendah terhadap harga saham, maka perusahaan yang berkualitas baik dapat memberikan sinyal kualitas kinerja perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa yang akan datang juga lebih tinggi. Sinyal

profitabilitas yang tinggi diharapkan dapat memiliki harga tawar terhadap tingkat underpricing yang lebih rendah. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Return on Equity (ROE) berpengaruh negatif terhadap underpricing.*

2.4 Pengaruh tingkat leverage terhadap underpricing

Tingkat *leverage* menggambarkan risiko yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aset. Menurut penelitian yang dilakukan Kim *et al.*, (1995) bahwa tingkat *leverage* berkorelasi positif dengan *initial return*. Secara umum, sebagian besar perusahaan di Indonesia masih mengandalkan pinjaman bank sebagai sumber pendanaan utama perusahaan. Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka semakin tinggi perusahaan mengalami risiko financial distress yang berujung pada risiko kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, tingkat hutang yang tinggi mencerminkan sinyal yang kurang bagus bagi pasar.

Tingkat *leverage* perusahaan yang tinggi menggambarkan risiko perusahaan yang tinggi pula sehingga investor dalam melakukan keputusan investasi akan menghindari penilaian harga saham perdana yang terlalu tinggi yang menyebabkan *underpricing*. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Tingkat leverage berpengaruh positif terhadap underpricing.*

2.5 Pengaruh underpricing terhadap Earnings Persistence

Earnings persistence adalah laba yang dapat digunakan sebagai indikator *future earnings*, dengan kata lain persistensi laba yaitu kemampuan laba suatu perusahaan untuk bertahan di masa depan. Persistensi laba merupakan salah satu komponen dari nilai prediksi laba dalam menentukan kualitas laba. Kualitas laba adalah laba yang mencerminkan keberlanjutan untuk

masa depan. Jika perusahaan memiliki persistensi laba yang tinggi maka ketidakpastian di masa depan akan rendah sehingga tingkat *underpricing* rendah. Ketidakpastian muncul karena adanya asimetri informasi sehingga investor tidak yakin mengenai kinerja perusahaan di masa depan sehingga semakin besar pula terjadinya *underpricing*. Tingkat *underpricing* yang tinggi menunjukkan tingkat ketidakpastian yang tinggi dan berakibat pada tingkat persistensi laba yang semakin rendah.

Frankel & Litov (2009) menyatakan bahwa proksi ketidakpastian *ex-ante* dapat dilihat dari persistensi laba yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan memiliki persistensi yang tinggi maka prediksi laba masa mendatang menjadi lebih smooth. Hal ini berguna untuk mengurangi *volatilitas* laba di masa depan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₅: *Underpricing berpengaruh negatif terhadap earnings persistence perusahaan.*

3. Metode Penelitian

3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi dua model analisis dengan masing-masing model memiliki variabel dependen yaitu *underpricing* dan *earning persistence*. Definisi operasional dari *underpricing* yaitu harga penawaran perdana yang dinilai lebih rendah dibanding kinerja fundamental perusahaan. *Underpricing* diukur dengan menggunakan rumus *initial return* saham yaitu selisih harga penutupan hari pertama perdagangan saham di pasar sekunder dikurangi dengan dengan harga penawaran perdana dibagi dengan harga penawaran perdana. Ormula untuk *initial return* adalah sebagai berikut:

$$IR = \frac{P_{t1} - P_{t0}}{P_{t0}} \times 100 \%$$

Ket :

IR= *return* awal

P_0 = Harga penawaran perdana (*offering price*)

P_1 = Harga penutupan (*closing price*) pada hari pertama perusahaan tercatat di pasar sekunder

Variabel persistensi laba menggambarkan konsistensi laba dalam memprediksi laba di masa mendatang. Tingkat persistensi laba tersebut merefleksikan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan laba yang diperoleh pada saat ini sampai satu periode di masa depan. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan nilai koefisien dari model regresi laba operasional tahun lalu dengan laba tahun sekarang dengan rumus:

$$E_{it} = \beta_0 + \beta_1 E_{t-1} + \varepsilon$$

Ket :

β = koefisien regresi

ε = residual error

E_{t-1} = Pendapatan operasional perusahaan 1 tahun sebelum tahun t

E_t = Pendapatan operasional perusahaan tahun t

Variabel independen penelitian ini terdiri dari reputasi underwriter, reputasi auditor, tingkat profitabilitas dan tingkat leverage. Reputasi *underwriter* dihitung menggunakan variabel *dummy*, dengan nilai 1 untuk penjamin emisi yang masuk *top 10* dalam *20 most active brokerage house monthly* berdasarkan total frekuensi perdagangan dan nilai 0 untuk penjamin emisi yang tidak masuk *top 10*.

Variabel reputasi auditor menggunakan variabel *dummy*, diukur melalui spesialisasi industri dimana skala 1 untuk $>15\%$ dan skala 0 untuk $< 15\%$. *Return on Equity*

(ROE) merupakan ukuran tingkat profitabilitas perusahaan dengan pengukuran rasio antara laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Tingkat *leverage* menggunakan rasio yang mengindikasikan jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan, pengukuran dengan membandingkan total hutang dengan total aset.

Variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahaan, jenis industri dan kondisi pasar. Ukuran perusahaan merupakan proksi dari tingkat ketidakpastian saham. Hal ini dapat dilihat perusahaan yang berskala besar cenderung lebih dikenal masyarakat sehingga informasi prospek perusahaan emiten lebih mudah diperoleh oleh investor, sehingga tingkat ketidakpastian yang akan dihadapi di masa depan oleh calon investor mengenai perusahaan emiten dapat diperkecil apabila informasi yang diperoleh banyak (Ardiansyah, 2004). Variabel ukuran perusahaan pada diperoleh dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan.

Umur perusahaan emiten menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan dan bersaing sehingga merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan modal. Perusahaan yang telah lama berdiri bisa didefinisikan sebagai perusahaan yang sudah tahan uji sehingga kadar risikonya relatif rendah (Suyatmin, 2006). Umur perusahaan diukur berdasarkan jumlah tahun, dihitung sejak berdirinya perusahaan sampai dengan melakukan IPO.

Jenis industri diukur dengan mengelompokkan perusahaan emiten menjadi perusahaan sektor keuangan dan sektor non keuangan. Pengukuran variabel ini dengan menggunakan variabel *dummy* dengan penentuan jenis industri menggunakan skala 1 untuk sektor keuangan dan 0 untuk sektor non keuangan. Hal ini disebabkan adanya regulasi yang mengharuskan perusahaan sektor keuangan mengungkapkan laporan kondisi perusahaannya pada masyarakat secara periodik, sehingga masalah *asymmetric information* dan

ketidakpatian lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan sektor non-keuangan (Alli, Yau dan Yung, 1994).

Market condition merupakan karakteristik pasar pada tahun dimana perusahaan melakukan IPO. Kondisi pasar yang bergairah (*hot market*) ditandai dengan frekuensi perusahaan yang melakukan IPO relatif tinggi dibandingkan dengan kondisi pasar yang leasu (*cold market*). Variabel ini diukur berdasarkan perbandingan jumlah perusahaan yang melakukan IPO tiap tahun dengan rata-rata jumlah IPO seluruh perusahaan dalam lima tahun penelitian. Jika pada tahun tersebut jumlah perusahaan yang melakukan IPO melebihi rata-rata IPO tahun pengamatan, maka masuk kategori *hot market* diberi skala 1. Sebaliknya, skala 0 diberikan untuk *cold market*.

3.2 Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini populasi meliputi perusahaan yang *go public* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan penawaran saham perdana (IPO). Sementara sampelnya adalah perusahaan yang melakukan IPO selama periode 2007 sampai 2011 dan masih *listing* di BEI setelah IPO. Sampel yang digunakan dipilih dengan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria antara lain perusahaan *go public* yang melakukan IPO selama periode 2007-2011, perusahaan tersebut mengalami *underpricing*, dan tersedia data yang diperlukan untuk penelitian ini.

3.3 Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan persamaan berikut ini :

Model1:

$$UND_i = \alpha + \beta_1 UDW_i + \beta_2 AUD_i + \beta_3 ROE_i + \beta_4 LEV_i + \beta_5 AGE_i + \beta_6 SIZ_i + \beta_7 IND_i + \beta_8 MARKET_i + \varepsilon$$

Model 2:

$$PL_{it} = \alpha + \beta_1 UND_{it} + \beta_2 AGE + \beta_3 IND_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 MARKET_{it} + \varepsilon$$

Keterangan :

α = konstan

β = koefisien regresi

ε = residual error

UND_i = tingkat *underpricing* di perusahaan i

UDW_i = reputasi *underwriter* di perusahaan i

AUD_i = reputasi auditor, 1 jika auditor adalah spesialis di industri, 0 jika tidak

SIZ_i = ukuran perusahaan di perusahaan i

AGE_i = umur perusahaan di perusahaan i

ROE_i = *Return on Equity* di perusahaan i

LEV_i = Tingkat *leverage* di perusahaan i

IND_i = Jenis industri di perusahaan I, 1 jika industri keuangan, 0 jika industri

yang lain

$MARKET_i$ = *Market condition* di perusahaan i, 1 menunjukkan *hot market* dan 0 *cold market*

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi perusahaan-perusahaan yang listing di BEI dengan mengambil sampel perusahaan yang melakukan penawaran perdana antara tahun 2007-2011. Identifikasi awal terhadap perusahaan yang melakukan penawaran perdana memperoleh 100 perusahaan selama periode pengamatan. Selanjutnya, sebanyak 29

perusahaan harus dikeluarkan dari sampel karena mengalami *overpricing*, sehingga total terdapat 71 perusahaan yang menjadi sampel akhir penelitian. Pada model 2 sampel perusahaan berkurang menjadi 64 dikarenakan terdapat 7 perusahaan yang datanya tidak lengkap atau tidak memenuhi kriteria pengujian. Secara ringkas urutan seleksi sampel dapat dilihat pada tabel 1.

----- Tabel 1 -----

Profil deskripsi variable penelitian berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel 2.

----- Tabel 2 -----

Data penelitian sebagaimana diringkas pada tabel 2 tersebut menunjukkan bentuk statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang berbentuk skala interval atau rasio maupun *dummy* variabel. Variabel *underpricing* adalah selisih harga saham yang ditawarkan oleh *underwriter* pada perdagangan saham perdana di BEI dengan harga saham perdana di pasar sekunder menunjukkan nilai rata-rata pada model 1 sebesar 0,3715 atau 37,15%. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel mengalami *underpricing* sebesar 37,15% dari harga saham yang ditawarkan. Dengan kata lain estimasi perusahaan oleh perusahaan itu sendiri dinilai lebih rendah dibanding dengan estimasi perusahaan oleh investor. Tingkat *underpricing* terendah adalah sebesar 0,02 dan tertinggi mencapai 1,75. Pada model 2 nilai rata-rata sebesar -1,4490 atau -44,90%. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel mengalami *underpricing* sebesar -144,90% dari harga saham yang ditawarkan. Dengan kata lain estimasi perusahaan oleh perusahaan itu sendiri

dinilai lebih rendah dibanding dengan estimasi perusahaan oleh investor. Tingkat *underpricing* terendah adalah sebesar -3,91 dan tertinggi mencapai 0,56.

Ukuran perusahaan (SIZE) dalam hal ini diukur dengan total aset. Rata-rata total aset dari perusahaan-perusahaan sampel setelah dilakukan transformasi logaritma natural adalah sebesar 28,2535 dengan nilai $\ln(\text{total asset})$ terkecil sebesar 21 dan nilai $\ln(\text{total asset})$ terbesar adalah sebesar 34. Variabel keuangan berupa profitabilitas sebelum IPO yang diukur dengan menggunakan ROE menunjukkan rata-rata sebesar 0,1058 atau 10,58%. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel sebelum IPO mampu mendapatkan laba bersih hingga 10,58% dari ekuitas perusahaan. Nilai ROE terendah adalah sebesar -0,20 atau -20% dan ROE tertinggi adalah sebesar 0,77 atau 77%.

Umur perusahaan (AGE) yang melakukan IPO menunjukkan pengalaman perusahaan pada produk dan pasar. Rata-rata umur perusahaan yang melakukan IPO menunjukkan nilai rata-rata sebesar 16,7324. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel sudah berdiri selama 16,27 tahun sebelum melakukan penjualan saham mereka kepada publik di BEI. Umur terkecil adalah 1 tahun sedangkan umur perusahaan terbanyak adalah 76 tahun.

Variabel keuangan lain berupa *leverage* (LEV) sebelum IPO menunjukkan rata-rata sebesar 0,4559. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel sebelum IPO memiliki hutang hingga sebesar 45,59% dibanding ekuitas perusahaan. Nilai LEV terendah adalah sebesar 0,11 dan *Leverage* tertinggi adalah sebesar 0,92. Variabel *earnings persistence* yang merupakan nilai dari koefisien regresi dari rasio antara laba bersih dari perusahaan pada tahun saat IPO menunjukkan nilai rata-rata sebesar 16,5581. Meskipun demikian nilai minimum yang memiliki tanda negatif yaitu sebesar sebesar 13,60 sedangkan nilai maksimum mencapai 19,07.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa nilai *R Square* MODEL 1 sebesar 0,27. Hal ini berarti bahwa variabel dependen yaitu pengungkapan *underpricing* dipengaruhi oleh variabel reputasi *underwriter*, reputasi auditor, *return on equity*, tingkat *leverage* sebesar 27%. Nilai F hitung sebesar 2,92 dengan probabilitas 0,08 yang lebih kecil dari 0,05, Nilai *R Square* MODEL 2 sebesar 0,24. Hal ini berarti bahwa variabel dependen yaitu pengungkapan *earning persistence* dipengaruhi oleh variabel *underpricing* sebesar 24%. Nilai F hitung sebesar 3,74 dengan probabilitas 0,005 yang lebih kecil dari 0,05

----- Tabel 3 -----

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa reputasi *underwriter*, reputasi auditor, *return on equity*, tingkat *leverage* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel *underpricing* (UND) dan *underpricing* berpengaruh terhadap variabel persistensi laba. Hasil pengujian hipotesis pertama pada model 1 menunjukkan nilai *sig* sebesar 0,003, dimana nilai signifikan tersebut berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel reputasi *underwriter* (UDW) berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *underpricing*. Nilai beta *unstandardized coefficients* diperoleh sebesar -0,803. Hasil ini konsisten dengan penelitian Caster dan Manaster (1990), Sandhiaji (2004), Rosyati dan Sabeni (2002) yang menemukan bahwa reputasi *underwriter* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *underpricing*. Hal ini menunjukkan bahwa *underwriter* yang bereputasi tinggi lebih berani menentukan harga yang tinggi atas konsekuensi dari kualitas penjaminannya sehingga tingkat *underpricing* rendah. Dalam hal ini *underwriter* memiliki informasi yang lengkap tentang pasar sehingga investor menggunakan *underwriter* sebagai salah satu pertimbangan dalam berinvestasi di pasar modal.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa reputasi auditor (AUD) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *underpricing* dengan nilai *sig* sebesar 0,944 yang berada jauh di atas 0,05 dan nilai beta *unstandardized coefficients* sebesar 0,024. Hasil ini konsisten dengan penelitian penelitian Sulistio (2005) dan Rosyati dan Sabeni (2002) bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh pada tingkat *underpricing*. Temuan ini memberikan bukti bahwa investor kurang mempertimbangkan reputasi auditor dalam penilaian perusahaan emiten yang melakukan IPO. Hal ini mungkin terjadi karena lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil laporan auditor, walaupun emiten telah menggunakan jasa auditor yang bereputasi tinggi.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan *return on equity* (ROE) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *underpricing* dengan nilai *sig* sebesar 0,096 yang berada jauh di atas 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *return on equity* hanya mendapat dukungan secara lemah pada tingkat kepercayaan 0,10. Hasil ini berbeda dengan Yolana dan Martani (2005) yang menunjukkan bahwa ROE berpengaruh signifikan positif terhadap *underpricing*.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa tingkat *leverage* (LEV) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *underpricing*. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyatmi dan Sujadi (2006) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat *underpricing*. Tidak berpengaruhnya tingkat *leverage* terhadap *underpricing* dikarenakan investor lebih melihat faktor-faktor lain di luar perusahaan seperti krisis global pada tahun 2008 yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap US Dolar melambung tinggi. Perekonomian yang tidak stabil ini membuat perusahaan yang mempunyai pinjaman dalam US Dollar seperti Adaro Energy Tbk, Trada Maritime Tbk, dan Elnusa Tbk akan berusaha menutup pinjamannya

dengan dana IPO dimana hal tersebut berpengaruh terhadap penilaian investor dalam keputusan investasinya.

Hasil pengujian pada model 2 menunjukkan hasil *underpricing* (UND) berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Martani, *et al.* (2012) yang menemukan *underpricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba. Terkait dengan kinerja operasi setelah IPO menurut Jain dan Kini (1994), kinerja operasi yang baik dari sebelum IPO dapat membawa penilaian optimis dari pasar yang didasarkan pada ekspektasi pada pertumbuhan pendapatan di masa depan meningkat. Persistensi laba satu tahun setelah IPO dapat menunjukkan kemampuan emiten untuk menunjukkan kinerja yang baik dan menjaga kepercayaan investor setidaknya pada periode pertama setelah investasi dilakukan. Semakin tinggi tingkat *underpricing* menandakan adanya *asymmetry information* menimbulkan ketidakpastian, sehingga investor tidak yakin terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Ketidakpastian tersebut menurunkan nilai perusahaan dari sudut pandang investor, proksi dari ketidakpastian di masa depan dapat dilihat dari persistensi laba perusahaan.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen reputasi *underwriter*, reputasi auditor, *return on equity*, dan tingkat *leverage* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel *underpricing* (UND) dan tingkat *underpricing* berpengaruh terhadap variabel persistensi laba. Hasil pengujian hipotesis pada model 1 menunjukkan bahwa variabel reputasi *underwriter* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *underpricing*. Sedangkan variabel reputasi auditor, *return on equity*, dan tingkat *leverage* tidak menunjukkan pengaruh terhadap tingkat *underpricing*.

Pada model 2 tingkat *underpricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap persistensi laba. Dengan demikian dapat disimpulkan informasi non akuntansi yang berpengaruh signifikan terhadap *underpricing* adalah reputasi *underwriter* dan *underpricing* dapat memprediksi persistensi laba satu tahun setelah IPO, hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menjaga persistensi laba pada periode awal setelah IPO bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, Periode penelitian dan jumlah sampel relatif kecil untuk meneliti pengaruh *underpricing* terhadap persistensi laba sehingga kurang dapat digeneralisasi. *Kedua*, Penelitian ini hanya mencari pengaruh reputasi *underwriter*, reputasi auditor, *return on equity*, dan tingkat *leverage* terhadap *underpricing*. Sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi *underpricing* tersebut.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya sebaiknya Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak agar hasil yang didapat lebih *reliabel* dan dapat digunakan sebagai dasar analisis oleh pengguna informasi. *Kedua*, Penelitian mengenai pengaruh *underpricing* terhadap *earnings persistence* lebih baik dilakukan dalam jangka waktu yang lama karena persistensi laba umumnya lebih akurat jika dihitung dalam periode pengamatan yang panjang (lebih dari 1 tahun) sehingga pengaruh terhadap *underpricing* juga dapat dipelajari lebih baik.

Daftar Pustaka

- Aini, Shoviyah Nur. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Underpricing* Saham Pada Perusahaan IPO Di BEI Periode 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol 2 No. 2.
- Allen, Franklin, dan Faulhaber, G.. 1989. Signalling by Underpricing in IPO Market. *Journal of Financial Economics*.
- Ardiansyah, Misnen. 2003. Pengaruh Variabel Keuangan Terhadap Return Awal dan Return 15 hari Setelah IPO serta Moderasi Besaran Perusahaan Terhadap Hubungan antara Variabel keuangan dengan Return Awal dan Return 15 Hari Setelah IPO di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 7, No 2, Mei. Hal 125-153.
- Beatty, R., Ritter, J., 1986. Investment banking, reputation, and the underpricing of initial public offerings. *Journal of Financial Economics* 15, 213–232.

- Carter, Richard dan Steve Manaster. 1990. Initial Public Offering and Underwriter Reputation. *Journal of Finance*. Vol XIV, No 4, September.
- Frankel & Litov. 2009. Earnings Persistence. *Journal of Accounting and Economics*, vol. 47, pp.182-190.
- Ghozali dan Mudrik Al Mansur. 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Underpricing* di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 4 No.1 74-88.
- Grinblatt, M., Hwang, C., 1989. Signaling and the pricing of unseasoned new issue. *Journal of Finance* 44, 393-420.
- Handayani, Sri Retno. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Underpricing Pada Penawaran Umum Perdana Studi Kasus Pada perusahaan keuangan yang Go Public di Bursa Efeke Jakarta Tahun 2000-2006*. Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Jain, Bharat A., dan Kini. 1994. The Post-Issue Operating Performance of Initial Public Operating Firms. *Journal of Finance* XLIX (5): 1699- 1726.
- Karsana, Yussef widya, 2009. Analisis Kinerja Saham Emiten Dalam Periode Satu Tahun Setelah Penawaran Perdana, *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol 9 No 3,33-56
- Leland, H., Pyle, D. 1977. Informational asymmetries, financial structure, and financial intermediation. *Journal of Finance* 32, 371-387.
- Loughran, T., Ritter, J., 2002. Why don't issuers get upset about leaving money on the table in IPOs? *Review of Financial Studies* 15, C413-C443.
- Loughran, T., Ritter, J., Rydquist, K., 1994. Initial public offerings: international insights. *Pacific-Basin Finance Journal* 2, 165-199.
- Martani, Dwi dan Yolana, Chastina. 2005. *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Fenomena Underpricing Pada Penawaran Saham Perdana di BEJ Tahun 1994-2001*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo. Indonesia, pp. 538-553.
- Martani, Sinaga & Syahroza. 2012. Analysis on Factors Affecting IPO Underpricing and their Effects on Earnings Persistence. *World Review of Business Research* Vol.2 No.2 March 2012. Pp. 1-5.
- Meggingson, W.L, 1997. *Corporate Finance Theory*, Addison-westley Inc., United Stated.
- Michaelly, Rony and W. Shaw. 1995. Does the Choice of Auditor Convey Quality an IPO. *Financial Management*. Vol. 24, No. 4.
- Penman, Stephen & Zhang, Xiao, 2002. Accounting Conservatism Quality of Earnings and Stock Return. *The Accounting Review*, vol. 77, pp. 237-264.
- Ritter, Jay R. 1991. The Long-run, Performance of Initial Public Offerings. *Journal of Finance*. Vol 46. hal.3-27
- Rochayanti, Wati dan Setiawan, Doddy. 2004. *Jurnal Pasar Modal*, Vol. 111, No. 2.
- Rosyati dan Sabeni, Arifin. 2002. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta (Tahun 1997-2000)*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi V, 286-297.
- Sandhiaji, Bram Nugroho. 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing pada Penawaran Umum Perdana (IPO) Periode Tahun 1996-2002*. Tesis Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Su, Dongwei. 2004. Leverage, insider ownership, and the underpricing of IPOs in China. *International Financial Markets, Institution and Money* 14 (2004) 37-54.

- Sulistio, Helen. 2005. “ *Pengaruh Informasi Akuntansi Dan Studi Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering*”. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.
- Sunarto. 2009. Peran Persistensi Laba Terhadap Hubungan Antara Keagresifan Laba Dan Biaya Ekuitas. *Kajian Akuntansi*. Mei, Vol 2 No 1 , Hal 22-38, ISSN: 1979-4886.
- Suyatmin dan Sujadi. 2006. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing pada Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Jakarta. *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol10 No. 1. Hal 11-32.
- Wardoyo, Paulus & Saputra, Rono Indra. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempunyai Tingkat *Underpricing* Pada Perusahaan Yang Melakukan IPO (*Initial Public Offering*) Periode 2003-2007 di Bursa Efek Indonesia. *Solusi* Vol 7 No. 3 Juli 2008.
- Welch, I., 1989. Seasoned offerings, imitation costs and the underpricing of initial public offerings. *Journal of Finance* 44, 421–449.
- Yoga. 2010. Hubungan Teori Signalling Dengan Underpricing Saham Pada Penawaran Perdana (IPO) DI Bursa Efek Jakarta. *Eksplanasi*, Vol. 5 No. 1, Maret.

Lampiran 1

Tabel 1
Ringkasan Perolehan Data Sampel Penelitian

Condition	Total
Perusahaan yang IPO yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011	100
Sampel yang dikeluarkan karena <i>overpricing</i>	<u>(29)</u>
Jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian model 1	71
Sampel yang dikeluarkan karena data tidak lengkap	<u>(7)</u>
Jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian model 2	64

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2013

Lampiran 2

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Model 1:					
10	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
UND	71	.02	1.75	.3715	.35868
AGE	71	1.00	76.00	16.7324	13.07119
LEV	71	.11	.92	.4559	.21651
ROE	71	-.20	.77	.1058	.11687
SIZ	71	21.00	34.00	28.2535	1.99799
Model 2					
	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Persistensi Laba	64	13.60	19.07	16.5581	1.21748
UND	64	-3.91	.56	-1.4490	1.01894
AGE	64	1.00	76.00	16.8906	13.43074
SIZ	64	21.00	34.00	28.2969	2.03680

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Lampiran 3

Tabel 3
Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Model 1				Model 2			
Variabel	<i>Beta Coefficients</i>	t-stat	Sig.	Variabel	<i>Beta Coefficients</i>	t-stat	Sig.
UDW	-0,803	-3,088	0,003***	UND	-0,310		0,034**
AUD	0,024	0,071	0,944	AGE	0,004		0,696
ROE	-1,679	-1,689	0,096*	IND	0,410		0,395
LEV	0,686	0,999	0,321	SIZE	0,212		0,006**
AGE	0,013	1,338	0,186	MARKET	0,014		0,967
IND	-0,572	-1,187	0,240				
SIZE	-0,150	-2,410	0,019**				
MARKET	0,189	0,696	0,489				
Adj-R Square			0,180	Adj-R Square			0,179
F statistik			2,924	F statistik			3,740
Sig-F			0,008***	Sig-F			0,005***

* sig pada 10%; ** sig pada 5%; *** sig pada 1%
Sumber : Data Sekunder Diolah, 2013

**Pengaruh Konvergensi *International Financial Reporting Standards*
terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi:
Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI**

SITI SUPRIHATIN
ELOK TRESNANINGSIH*
Universitas Indonesia

Abstract: *This study investigates whether the convergence of the International Financial Reporting Standards (IFRS) increase the value relevance of accounting information for firm listed on Indonesia Stock Exchange. This study covers a periods of pre-IFRS convergence and post-IFRS convergence during 2006-2011. We tested the value relevance of book value of equity and earnings in pre- and post- IFRS convergence. We find that on the beginning stage of IFRS convergence, earnings become more value-relevant whereas the book value of equity does not. Meanwhile, on the advance stage of IFRS convergence, we find book value of equity and earnings more value -relevant.*

Keywords: *Value Relevance, Book Vale of Equity, Earnings, Accounting Information, Pre IFRS, Post-IFRS.*

* Corresponding author: elokti@yahoo.com

1. Pendahuluan

Pada tahun 2008, Indonesia mulai melaksanakan konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) terhadap Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Konvergensi ini dilakukan secara bertahap dengan target tahap pertama penerapan IFRS dapat diselesaikan pada tahun 2012. Penerapan IFRS di Indonesia ini lebih lambat dibandingkan negara-negara di Uni Eropa yang telah mengharuskan perusahaan untuk menerapkan IFRS secara penuh mulai 1 Januari 2005. Sementara itu, Australia telah menerapkan IFRS secara lebih awal lagi yaitu pada tahun 2002.

Konvergensi IFRS di Indonesia mulai dilakukan pada tahun 2008 dengan berlaku efektifnya 3 PSAK berbasis IAS pada tahun 2008. Selanjutnya disusul dengan 1 PSAK berbasis IAS yang berlaku efektif pada tahun 2009. Pada tahun 2010 terdapat 3 PSAK dan 1 ISAK berbasis IAS/IFRS dan 5 Pencabutan PSAK yang efektif berlaku, selanjutnya tahun 2011 terdapat 15 PSAK dan 6 ISAK berbasis IFRS yang berlaku efektif. Pada tahun 2012 sebagai tahun terakhir tahap pertama konvergensi IFRS, terdapat 15 PSAK dan 4 ISAK berbasis IFRS yang efektif.

Konvergensi IFRS merupakan komitmen dari IAI yang telah bergabung dengan *International Federation of Accountants* (IFAC), dimana salah satu konsekuensinya adalah mengkonvergensi PSAK dengan IFRS/IAS. Konvergensi PSAK kedalam IFRS akan meningkatkan fungsi pasar modal global dengan menyediakan informasi yang lebih dapat diperbandingkan dan berkualitas tinggi kepada investor (Barth, 2008). Selain itu IFRS menjanjikan tersedianya informasi keuangan yang lebih akurat, komprehensif dan tepat waktu dibandingkan standar akuntansi nasional yang banyak dipengaruhi oleh hukum negara, politik dan perpajakan dinegara tersebut (Ball, 2006).

Penerapan IFRS diklaim akan memberi manfaat bagi peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini telah mendorong dilakukannya penelitian-penelitian untuk menguji secara

empiris apakah penerapan IFRS telah meningkatkan kemampuan informasi akuntansi dalam mengestimasi harga saham, yang dikenal dengan studi relevansi nilai (*value relevance*). Kargin (2013) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan relevansi nilai adalah kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk menangkap dan menyimpulkan nilai perusahaan. Nilai relevansi dapat diukur dengan mengestimasi hubungan statistik antara informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai saham di pasar (Kargin, 2013).

Berbagai penelitian tentang nilai relevansi dari informasi laporan keuangan, menggunakan model Ohlson (1995) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara harga pasar saham dengan nilai buku ekuitas dan laba (Iatridis dan Rouvolis, 2010; Chalmers et al., 2011; Khanagha, 2011). Namun, penelitian-penelitian tersebut menemukan hasil yang beragam. Iatridis dan Rouvolis (2010) dengan menggunakan sampel perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Yunani menemukan bahwa pada periode setelah adopsi IFRS terdapat peningkatan relevansi nilai dari nilai buku ekuitas dan laba terhadap harga saham. Sementara Kargin (2013) dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Istanbul Stock Exchange pada tahun 1998-2011 menemukan bahwa relevansi nilai dari nilai buku ekuitas mengalami peningkatan setelah penerapan IFRS, namun peningkatan tidak dapat diamati terhadap relevansi nilai atas laba.

Hasil yang berbeda ditemukan oleh Chalmers et al., (2011). Dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Australian Securities Exchange selama tahun 1990-2008, Chalmers et al., (2011) menemukan bahwa laba menjadi lebih memiliki relevansi nilai setelah penerapan IFRS, sementara relevansi nilai dari nilai buku ekuitas tidak ditemukan meningkat pada periode setelah penerapan IFRS. Khanagha (2011) melakukan penelitian relevansi nilai dari informasi akuntansi sebelum dan sesudah periode implementasi IFRS pada perusahaan yang tercatat di pasar saham Uni Emirat Arab. Hasil penelitian Khanagha (2011)

menunjukkan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi mengalami penurunan setelah periode penerapan IFRS, hal ini berarti bahwa perubahan standar lokal menjadi IFRS di Uni Emirat Arab tidak membawa perbaikan dalam relevansi nilai informasi akuntansi.

Hasil yang berbeda ditemukan Hung dan Subramayam (2007) yang menemukan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kenaikan nilai relevansi dari nilai buku ekuitas dan laba pada perusahaan di Jerman pada tahun pertama perusahaan mengadopsi IAS/IFRS pada tahun 1998-2002. Hasil ini serupa dengan Callao et al. (2007) yang dengan sampel perusahaan yang terdaftar di IBEX 35 (35 saham paling likuid di Madrid Stock Exchange), menemukan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam jangka pendek, namun diharapkan akan terjadi perubahan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Penelitian tentang relevansi nilai di Indonesia antara lain dilakukan oleh Agusti dan Rahman (2011) yang menemukan adanya relevansi nilai dari laba dan nilai buku ekuitas pada sampel perusahaan terdaftar di BEI pada periode tahun 2007-2009.

Penelitian ini bermaksud memeriksa apakah terdapat peningkatan relevansi nilai dari nilai buku ekuitas dan laba yang disajikan dalam laporan keuangan, setelah dilakukannya konvergensi IFRS di Indonesia. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena menggunakan dua macam pengujian relevansi nilai, yaitu *Incremental association studies* dan *Relative association studies*. *Incremental association studies* menguji apakah angka akuntansi dapat membantu menjelaskan nilai atau *return* sedangkan *Relative association studies* membandingkan asosiasi antara nilai pasar saham dengan angka akuntansi, yang biasanya diukur dengan besarnya koefisien determinasi atau *R-squared* (Holthausen dan Watts, 2001). Selain itu, karena konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap, maka penelitian ini akan melakukan pengujian relevansi nilai pada setiap tahapan konvergensi IFRS di Indonesia.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna dalam membuat keputusan ekonomi dan bisnis. Informasi dalam laporan keuangan memiliki relevansi nilai jika informasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk memprediksi nilai pasar perusahaan (Kargin, 2013). Relevansi nilai merupakan atribut dari kualitas laporan keuangan (Francis et al., 2002). Hal ini sesuai dengan karakteristik konseptual dari laporan keuangan yaitu relevan dan *reliable*. Dari sudut pandang investor, informasi adalah relevan jika informasi tersebut berkontribusi terhadap keputusan investasinya dan informasi adalah *reliable* jika informasi tersebut tepat menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Oleh karenanya, laporan keuangan yang berkualitas merupakan unsur penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengalokasian sumber daya (Francis et al., 2002).

Konvergensi atau adopsi IFRS dimaksudkan untuk meningkatkan informasi laporan keuangan sehingga lebih dapat diperbandingkan dan berkualitas lebih baik (Barth, 2008) dan juga lebih akurat, komprehensif serta tepat waktu (Ball, 2006). Oleh karenanya, dapat diharapkan penerapan IFRS akan meningkatkan relevansi dan *reliability* dari Laporan Keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuannya dalam mengestimasi nilai pasar perusahaan. Laporan keuangan yang lebih relevan dan *reliable* juga akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan investasi.

Adanya peningkatan relevansi nilai dari informasi akuntansi setelah penerapan IFRS ditemukan pada sebagian besar penelitian yang dilakukan di berbagai negara, antara lain Inggris (Iatridis, 2010), Australia (Chalmers et al., 2011), Turkey (Kargin, 2013). Oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas dapat diduga bahwa relevansi nilai, yang merupakan hubungan antara nilai buku ekuitas dan laba bersih dengan harga saham akan meningkat pada periode setelah penerapan IFRS.

Memperhatikan bahwa Indonesia menganut konvergensi IFRS yang berarti melakukan penerapan IFRS secara bertahap, maka peningkatan relevansi nilai diduga juga akan bertahap mengikuti tahapan penerapan IFRS. Periode awal penerapan IFRS yaitu pada tahun 2008-2009, hanya terdapat 4 PSAK berbasis IAS yang berlaku efektif dan pada periode tahap selanjutnya, yaitu tahun 2010-2011, terdapat 18 PSAK dan 7 ISAK berbasis IFRS yang berlaku efektif. Oleh karenanya, dapat diduga bahwa relevansi nilai dari nilai buku ekuitas dan laba bersih akan meningkat pada periode awal penerapan IFRS dibandingkan dengan periode sebelum penerapan IFRS dan akan lebih meningkat lagi pada periode tahap lanjut penerapan IFRS. Peningkatan relevansi nilai pada periode penerapan IFRS akan ditunjukkan dengan adanya hubungan yang lebih kuat antara nilai buku ekuitas dan laba bersih dengan harga saham pada periode setelah penerapan IFRS. Untuk itu, dihipotesiskan bahwa :

- H1A** : *Secara rata-rata, relevansi nilai dari nilai buku ekuitas terhadap harga saham lebih kuat pada tahap awal penerapan IFRS dibandingkan sebelum penerapan IFRS.*
- H1B** : *Secara rata-rata, relevansi nilai dari laba terhadap harga saham lebih kuat pada tahap awal penerapan IFRS dibandingkan sebelum penerapan IFRS.*
- H2A** : *Secara rata-rata, relevansi nilai dari nilai buku ekuitas terhadap harga saham lebih kuat pada tahap lanjut penerapan IFRS dibandingkan pada tahap awal penerapan IFRS.*
- H2B** : *Secara rata-rata, relevansi nilai dari laba terhadap harga saham lebih kuat pada tahap lanjut penerapan IFRS dibandingkan pada tahap awal penerapan IFRS.*

Adanya peningkatan relevansi nilai dari informasi laporan keuangan juga akan ditunjukkan dari meningkatnya kemampuan variasi nilai buku ekuitas dan variasi laba bersih dalam menjelaskan variasi dari harga saham. Untuk itu dihipotesiskan bahwa:

- H3A** : *Secara rata-rata, kemampuan variasi nilai buku ekuitas dalam menjelaskan variasi harga saham lebih besar pada tahap awal penerapan IFRS dibandingkan sebelum penerapan IFRS.*
- H3B** : *Secara rata-rata, kemampuan variasi nilai buku ekuitas dalam menjelaskan variasi harga saham lebih besar pada tahap lanjut penerapan IFRS dibandingkan pada tahap awal penerapan IFRS.*
- H4A** : *Secara rata-rata, kemampuan variasi nilai laba dalam menjelaskan variasi harga saham lebih besar pada tahap awal penerapan IFRS dibandingkan sebelum penerapan IFRS.*
- H4B** : *Secara rata-rata, kemampuan variasi nilai laba dalam menjelaskan variasi harga saham lebih besar pada tahap lanjut penerapan IFRS dibandingkan pada tahap awal penerapan IFRS.*

3. Metodologi Penelitian

3.1. Pemilihan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2006 hingga 2011, diluar perusahaan yang bergerak dalam industri keuangan, properti, *real estate* dan konstruksi, yaitu berjumlah 444 perusahaan per tahun. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel sejumlah 107

perusahaan per tahun yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pada tabel 1 di belakang disajikan rincian proses pemilihan sampel.

3.2. Periode Penelitian

Periode penelitian ini adalah dari tahun 2006 hingga tahun 2011. Pemilihan periode ini dilakukan untuk dapat mencakup 3 tahap penerapan IFRS, yaitu tahun 2006-2007 sebagai tahap sebelum penerapan IFRS (PRE-IFRS), tahun 2008-2009 sebagai tahap awal penerapan IFRS (POST-IFRS1) yang ditandai dengan masih sedikitnya PSAK berbasis IFRS yang berlaku efektif dan tahun 2010-2011 sebagai tahap lanjut penerapan IFRS (POST-IFRS2) yang ditandai dengan semakin banyaknya PSAK berbasis IFRS yang berlaku efektif. Untuk itu, sampel penelitian akan dikelompokkan menjadi kelompok sampel PRE-IFRS, POST-IFRS1 dan POST-IFRS. Untuk setiap tahun penelitian digunakan sampel perusahaan yang sama.

3.3. Model Penelitian

Untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan beberapa model regresi sebagai berikut :

3.3.1. Model Penelitian (1) dan Model Penelitian (2)

Model (1) dan model (2), masing-masing digunakan untuk menguji hipotesis H1A dan H1B serta hipotesis H2A dan H2B bahwa penerapan IFRS akan memperkuat hubungan antara harga saham dengan nilai buku ekuitas dan laba perusahaan. Mengikuti Kargin (2013) yang menggunakan model Ohlson (1995) dalam model penelitian ini digunakan variabel *dummy* tahapan penerapan IFRS. Model penelitian ini akan diuji secara statistik menggunakan panel data regresi seimbang.

Adapun model penelitian yang digunakan adalah :

$$\text{Model 1 : } P_{it+3m} = \alpha_0 + \beta_1\text{POST1} + \beta_2\text{BVPS}_{it} + \beta_3\text{EPS}_{it} + \beta_4\text{POST1}*\text{BVPS}_{it} + \beta_5\text{POST1}*\text{EPS} + \varepsilon_{it} \quad (3.1)$$

$$\text{Model 2 : } P_{it+3m} = \alpha_0 + \beta_1\text{POST2} + \beta_2\text{BVPS}_{it} + \beta_3\text{EPS}_{it} + \beta_4\text{POST2}*\text{BVPS}_{it} + \beta_5\text{POST2}*\text{EPS} + \varepsilon_{it} \quad (3.2)$$

Dimana:

- P_{it+3m} = harga pasar per saham perusahaan i tiga bulan setelah akhir tahun t
- BVPS_{it} = nilai buku ekuitas per saham perusahaan i akhir tahun t
- EPS_{it} = laba per saham perusahaan i pada tahun t
- POST1 = *dummy* tahap awal penerapan IFRS (POST-IFRS1); bernilai 1 jika POST-IFRS1 dan bernilai 0 jika PRE-IFRS
- $\text{POST1}*\text{BVPS}_{it}$ = moderasi dari *dummy* tahap awal penerapan IFRS dikalikan nilai buku ekuitas per saham perusahaan i pada akhir tahun t
- $\text{POST1}*\text{EPS}_{it}$ = moderasi dari *dummy* tahap awal penerapan IFRS dikalikan laba per saham perusahaan i pada tahun t
- POST2 = *dummy* tahap lanjut penerapan IFRS (POST_IFRS2); bernilai 1 jika POST-IFRS2 dan bernilai 0 jika POST-IFRS1
- $\text{POST2}*\text{BVPS}_{it}$ = moderasi dari *dummy* tahap lanjut penerapan IFRS dikalikan nilai buku ekuitas per saham perusahaan i pada akhir tahun t
- $\text{POST2}*\text{EPS}_{it}$ = moderasi dari *dummy* tahap lanjut penerapan IFRS dikalikan laba per saham perusahaan i pada tahun t

3.3.2. Model Penelitian (3)

Model (3) digunakan untuk menguji hipotesis H3A dan H3B bahwa terdapat peningkatan kemampuan variasi nilai laba dalam menjelaskan variasi harga saham pada tahap-tahap setelah penerapan IFRS. Model (3) ini mengikuti Karunarathne dan Rajapakse (2010) yang menggunakan model regresi *univariate* dengan harga saham sebagai variabel dependen dan nilai buku ekuitas sebagai variabel independen. Koefisien determinasi atau *R-squared* dari model ini digunakan sebagai ukuran relevansi nilai (Houlthausen dan Watts, 2001). Model (3) akan digunakan pada masing-masing tahap penerapan IFRS, yaitu tahap PRE-IFRS (model 3A), tahap POST-IFRS1 (model 3B) dan tahap POST-IFRS2 (model 3C). Model penelitian yang digunakan adalah :

$$\text{Model 3A: } P_{preit+3m} = \alpha_0 + \beta_1 BVPS_{preit} + \varepsilon_{it} \quad (3.3)$$

$$\text{Model 3B: } P_{post1it+3m} = \alpha_0 + \beta_1 BVPS_{post1it} + \varepsilon_{it} \quad (3.4)$$

$$\text{Model 3C: } P_{post2it+3m} = \alpha_0 + \beta_1 BVPS_{post2it} + \varepsilon_{it} \quad (3.5)$$

Dimana :

$P_{preit+3m}$ = harga pasar per saham PRE-IFRS perusahaan i tiga bulan setelah akhir tahun t

$BVPS_{preit}$ = nilai buku ekuitas per saham PRE-IFRS perusahaan i pada akhir tahun t

$P_{post1it+3m}$ = harga pasar per saham POST-IFRS1 perusahaan i tiga bulan setelah akhir tahun t

$BVPS_{post1it}$ = nilai buku per saham POST-IFRS1 perusahaan i pada akhir tahun t

$P_{post2it+m3}$ = harga pasar per saham POST-IFRS2 perusahaan i tiga bulan setelah akhir tahun t

$BVPS_{post2it}$ = nilai buku per saham POST-IFRS2 perusahaan i pada akhir tahun t

3.3.3. Model Penelitian (4)

Model (4) digunakan untuk menguji hipotesis H4A dan H4B bahwa terdapat peningkatan kemampuan variasi laba dalam menjelaskan variasi harga saham pada tahap-tahap setelah penerapan IFRS. Model (4) ini mengikuti Karunaratne dan Rajapakse (2010) yang menggunakan model regresi *univariate* dengan harga saham sebagai variabel dependen dan laba sebagai variabel independen. Koefisien determinasi atau *R-squared* dari model ini digunakan sebagai ukuran relevansi nilai (Houlthausen dan Watts, 2001). Model akan digunakan pada masing-masing tahap penerapan IFRS, yaitu tahap PRE-IFRS (model 4A), tahap POST-IFRS1 (model 4B) dan tahap POST-IFRS2 (model 4C). Model penelitian yang digunakan adalah :

$$\text{Model 4A: } P_{preit+3m} = \alpha_0 + \beta_1 EPS_{preit} + \varepsilon_{it} \quad (3.6)$$

$$\text{Model 4B: } P_{post1it+3m} = \alpha_0 + \beta_1 EPS_{post1it} + \varepsilon_{it} \quad (3.7)$$

$$\text{Model 4C: } P_{post2it+3m} = \alpha_0 + \beta_1 EPS_{post2it} + \varepsilon_{it} \quad (3.8)$$

Dimana :

$P_{preit+3m}$ = harga pasar per saham PRE-IFRS perusahaan i tiga bulan setelah akhir tahun t

EPS_{preit} = laba per saham PRE-IFRS perusahaan i pada tahun t

$P_{post1it+3m}$ = harga pasar per saham POST-IFRS1 perusahaan i tiga bulan setelah akhir tahun t

$EPS_{post1it}$ = laba per saham POST-IFRS1 perusahaan i pada tahun t

$P_{post2it+m3}$ = harga pasar per saham POST-IFRS2 perusahaan i tiga bulan setelah akhir tahun t

$EPS_{post2it}$ = laba per saham POST-IFRS2 perusahaan i pada tahun t

3.4. Operasionalisasi Variabel

3.4.1. Harga Pasar Saham (P)

Harga pasar saham (P) merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Harga saham merepresentasikan penilaian investor dan informasi yang relevan terkait dengan perusahaan (Houlthasen dan Watts, 2001). Harga pasar saham diukur dengan harga per lembar saham perusahaan *i* tiga bulan pada 31 Maret tahun *t*+1. Hal ini untuk merefleksikan harga pasar saham setelah laporan keuangan hasil audit diterbitkan (Karunaratne dan Rajapakse, 2010).

3.4.2 Nilai Buku Ekuitas (BVPS)

Variabel nilai buku ekuitas (BVPS) diukur dengan nilai buku ekuitas per saham. Data untuk variabel nilai buku ekuitas per saham (BVPS) perusahaan seluruhnya diperoleh dari laporan kinerja akhir tahun perusahaan per tanggal 31 Desember yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$BVPS = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

3.4.3. Laba (EPS)

Variabel laba (EPS) diukur dengan laba bersih per saham yang diperoleh dari laporan kinerja akhir tahun perusahaan per tanggal 31 Desember. Perhitungan EPS diperoleh dengan cara sebagai berikut:

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

3.4.4. *Dummy* Tahap Awal Penerapan IFRS (POST 1)

Tahap awal penerapan IFRS (POST1) merupakan variabel *dummy* yang bernilai 1 pada periode penerapan awal IFRS (POST-IFRS1) dan bernilai 0 pada periode sebelum penerapan IFRS (PRE-IFRS).

Variabel $POST1 * BVPS$ merupakan variabel moderasi yang menunjukkan pengaruh tahap awal penerapan IFRS terhadap hubungan nilai buku ekuitas dengan harga saham. Diestimasi penerapan IFRS pada tahap awal akan memperkuat hubungan antara nilai buku ekuitas dengan harga saham dibandingkan dengan sebelum penerapan IFRS, sehingga koefisien variabel $POST1 * BVPS$ diekspektasi bernilai positif dan signifikan.

Variabel $POST1 * EPS$ merupakan variabel moderasi yang menunjukkan pengaruh tahap awal penerapan IFRS terhadap hubungan laba dengan harga saham. Diestimasi penerapan IFRS pada tahap awal akan memperkuat hubungan antara nilai buku ekuitas dengan harga saham dibandingkan dengan sebelum penerapan IFRS, sehingga koefisien variabel $POST1 * EPS$ diekspektasi bernilai positif dan signifikan.

3.4.4. *Dummy* Tahap Lanjut Penerapan IFRS (POST2)

Tahap lanjut penerapan IFRS (POST2) merupakan variabel *dummy* yang bernilai 1 pada periode tahap lanjut penerapan IFRS (POST-IFRS2) dan bernilai 0 pada periode tahap awal penerapan IFRS (POST-IFRS1).

Variabel $POST2 * BVPS$ merupakan variabel moderasi yang menunjukkan pengaruh tahap lanjut penerapan IFRS terhadap hubungan nilai buku ekuitas dengan harga saham. Diestimasi penerapan IFRS pada tahap lanjut akan lebih memperkuat hubungan antara nilai buku ekuitas dengan harga saham dibandingkan dengan tahap penerapan awal IFRS, sehingga koefisien variabel $POST2 * BVPS$ diekspektasi bernilai positif dan signifikan.

Variabel $POST2 * EPS$ merupakan variabel moderasi yang menunjukkan pengaruh tahap lanjut penerapan IFRS terhadap hubungan laba dengan harga saham. Diestimasi

penerapan IFRS pada tahap lanjut akan lebih memperkuat hubungan antara nilai buku ekuitas dengan harga saham dibandingkan dengan penerapan awal IFRS, sehingga koefisien variabel $POST2*EPS$ diekspektasi bernilai positif dan signifikan.

4. Analisis Hasil Penelitian

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian disajikan untuk masing-masing tahap penerapan IFRS adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 2 dibelakang. Dalam tabel 2, rata-rata PRICE pada tahap PRE-IFRS adalah 3.560,39 dengan variasi nilai minimum 39,00 dan nilai maksimum 59.000,00. PRICE pada tahap POST-IFRS1 memiliki rata-rata yang lebih tinggi yaitu sebesar 5.046,93 dengan nilai simpangan baku yang lebih lebar, yaitu nilai minimum 50,00 dan nilai maksimum 162.500,00. Pada tahap POST-IFRS2 nilai rata-rata PRICE adalah 11.314,02 dengan simpangan baku yang sangat lebar, yaitu dengan nilai minimum 54,00 dan nilai maksimum 450.000,00. Peningkatan nilai rata-rata dan nilai maksimum PRICE pada tahap POST-IFRS1 dan POST-IFRS2 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan harga saham yang cukup signifikan pada periode tersebut dengan besarnya peningkatan harga saham tidak merata bagi semua perusahaan.

Dalam tabel 2, terlihat nilai buku ekuitas (BVPS) pada tahap PRE-IFRS memiliki rata-rata 1.458,73 dengan nilai minimum 20,75 dan nilai maksimum 28.628,44 yang menunjukkan variasi BVPS yang besar. Pada tahap POST-IFRS1, nilai rata-rata BVPS adalah 1.956,36 dengan nilai minimum 32,07 dan nilai maksimum 36.858,77 serta standar deviasi sebesar 4.859,29 yang menunjukkan simpangan baku yang bervariasi. Nilai rata-rata BVPS pada tahap POST-IFRS2 adalah 2.481,05, sedangkan nilai minimum adalah 37,92 dan nilai maksimum 36.074,53. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai buku ekuitas pada seluruh

perusahaan pada tahap POST-IFRS1 dan POST-IFRS2 mengalami pertumbuhan dengan besaran yang tidak merata.

Nilai EPS dalam tabel 2, menunjukkan bahwa pada tahap PRE-IFRS memiliki rata-rata 375,30 dengan variasi simpangan baku yang lebar, yaitu nilai minimum 0,12 dan nilai maksimum 5.095,00. EPS pada tahap POST-IFRS1 memiliki rata-rata yang lebih tinggi yaitu sebesar 667,69 dengan nilai variasi simpangan baku yang lebar, yaitu nilai minimum 0,39 dan nilai maksimum 16.158,00. Pada tahap POST-IFRS2 nilai rata-rata EPS adalah 907,96 dengan variasi simpangan baku yang sangat lebar, yaitu nilai minimum 1,63 dan nilai maksimum 24.080,80. Hasil statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa laba per saham pada seluruh perusahaan pada tahap POST-IFRS1 dan POST-IFRS2 mengalami pertumbuhan yang cukup besar, namun besarnya pertumbuhan tidak cukup merata bagi semua perusahaan.

4.2. Hasil Pengujian Empiris

4.2.1. Analisis Model (1) dan Model (2): Penerapan IFRS Memoderasi Nilai Relevansi

Model (1) dan model (2) digunakan untuk menguji hipotesis apakah penerapan IFRS memperkuat relevansi nilai dari nilai buku ekuitas dan nilai laba secara bersama-sama terhadap harga pasar saham. Sesuai dengan hipotesis, model (1) akan digunakan untuk menguji pengaruh IFRS pada tahap awal penerapan IFRS (POST-IFRS1) dan model (2) akan digunakan untuk menguji pengaruh IFRS pada tahap lanjut penerapan IFRS (POST-IFRS2). Hasil pengujian dengan model (1) dan model (2) disajikan pada tabel 3.

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa pada model (1), variabel moderasi POST*BVPS berkoefisien negatif dan tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS pada tahap awal tidak mempengaruhi hubungan antara nilai buku ekuitas (BVPS) harga saham (P). Dengan demikian hipotesis 1A yang menduga bahwa tahap awal penerapan IFRS akan memperkuat relevansi nilai dari nilai buku ekuitas ditolak. Hasil penelitian ini serupa dengan

hasil penelitian Chalmers, Clinch dan Godfrey (2011) serta Callao et al. (2007) yang menemukan bahwa perubahan ke IFRS tidak berpengaruh terhadap relevansi nilai dari nilai buku. Penjelasan lebih lanjut atas tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan atas penerapan IFRS pada tahap awal terhadap relevansi nilai dari nilai buku ekuitas, mungkin lebih dikarenakan pada tahap awal penerapan hanya terdapat sedikit sekali PSAK baru berdasarkan IFRS yang diterbitkan, sehingga dampaknya terhadap kualitas nilai buku ekuitas dipandang oleh investor belum berarti.

Model (1) dalam tabel 3, memperlihatkan bahwa variabel moderasi $POST*EPS$ berkoefisien positif dan signifikan pada $alpha$ 1%. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS pada tahap awal memperkuat hubungan antara laba (EPS) dengan harga saham (P). Dengan demikian hipotesis 1B yang menduga bahwa tahap awal penerapan IFRS akan meningkatkan hubungan antara laba dan harga saham, tidak dapat ditolak. Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian Iatridis dan Rouvolis (2010) di Inggris dan Chalmers, Clinch dan Godfrey (2011) di Australia. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS pada tahap awal, meskipun masih terbatas, dipandang oleh investor telah meningkatkan relevansi nilai dari laba.

Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa untuk model (2), variabel moderasi $POST*BVPS$ berkoefisien positif dan signifikan pada $alpha$ 1%. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS pada tahap lanjut telah memperkuat hubungan antara nilai buku (BVPS) dengan harga saham (P) dibandingkan dengan penerapan awal IFRS. Dengan demikian hipotesis 2A tidak dapat ditolak. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Iatridis dan Rouvolis (2010) di Inggris dan Kargin (2011) di Turki .

Model (2) pada tabel 3 menunjukkan bahwa variabel moderasi $POST*EPS$ berkoefisien positif dan signifikan pada $alpha$ 1%. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS pada tahap lanjut telah memperkuat hubungan antara laba (EPS) dengan harga saham

(P) dibandingkan dengan tahap penerapan awal IFRS. Dengan demikian hipotesis 2B tidak dapat ditolak. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Iatridis dan Rouvolis (2010) di Inggris dan Chalmers, Clinch dan Godfrey (2011) di Australia. Kedua hasil penelitian ini menemukan bahwa pada tahap lanjut penerapan PSAK, dimana telah banyak PSAK berbasis IFRS yang berlaku efektif, dipandang oleh investor telah lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga meningkatkan relevansi nilai dari nilai buku ekuitas dan laba dibandingkan dengan pada tahap awal penerapan IFRS.

4.2.2. Analisis Model (3): Pengaruh Penerapan IFRS terhadap Kemampuan Variasi Nilai Buku Ekuitas dalam Menjelaskan Variasi Harga Saham

Model (3) digunakan untuk menguji apakah penerapan IFRS meningkatkan kemampuan variasi nilai buku ekuitas dalam menjelaskan variasi harga saham. Sesuai dengan hipotesis, model (3) akan digunakan untuk 3 pengujian, yaitu untuk menguji pengaruh kemampuan variasi nilai buku ekuitas terhadap variasi harga saham pada tahap PRE-IFRS (model 3A), POST-IFRS1 (model 3B) dan POST-IFRS2 (model 3C). Hasil pengujian dengan model 3A, 3B dan 3C disajikan pada tabel 4.

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa seluruh model untuk tahap PRE-IFRS, POST-IFRS1 dan POST-IFRS2 memiliki Prob. (*F-stat*) yang signifikan pada *alpha* 1%, yang berarti model *fit*. Dalam tabel 4, tampak bahwa *R-squared* pada model 3A bernilai 0,4772. Ini berarti bahwa pada tahap PRE-IFRS variasi nilai buku ekuitas mampu menjelaskan sebesar 47,72% variasi harga saham. Pada model 3B, *R-squared* bernilai 0,4273, yang berarti pada tahap POST-IFRS1 variasi nilai buku ekuitas mampu menjelaskan 42,73% variasi nilai saham. Hasil tersebut menunjukkan pada tahap awal penerapan IFRS terdapat sedikit penurunan kemampuan variasi nilai buku ekuitas terhadap variasi nilai saham menjadi 42,73% dibandingkan pada tahap PRE-IFRS sebesar 47,72%. Dengan demikian Hipotesis 3A

ditolak. Hasil ini konsisten dengan pengujian hipotesis 1A pada model (1) yang juga tidak menemukan adanya relevansi nilai yang lebih kuat antara harga saham dan nilai buku pada tahap awal penerapan IFRS. Hal ini mungkin disebabkan masih sangat terbatasnya PSAK berdasarkan IFRS yang efektif berlaku pada tahap awal penerapan IFRS, sehingga investor tidak mengekspektasi adanya peningkatan kualitas angka akuntansi dari nilai buku ekuitas.

R-squared pada model 3C dalam tabel 4 adalah sebesar 0,5857. Hal ini berarti pada tahap lanjut penerapan IFRS (POST-IFRS2), variasi nilai buku ekuitas mampu menjelaskan 58,57% variasi nilai saham. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan nilai buku ekuitas dalam menjelaskan variasi harga saham pada tahap lanjut penerapan IFRS dibandingkan dengan pada tahap awal penerapan IFRS. Dengan demikian Hipotesis 3B tidak dapat ditolak. Hasil ini konsisten dengan temuan pada model (2) bahwa terdapat peningkatan relevansi nilai dari nilai buku ekuitas pada tahap lanjut penerapan IFRS dibandingkan tahap awal penerapan IFRS. Kedua hasil ini dapat menunjukkan bahwa penerapan IFRS pada tahap lanjut mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas nilai buku ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan.

4.2.3. Analisis Model (4): Pengaruh Penerapan IFRS terhadap Kemampuan variasi Laba dalam Menjelaskan variasi Harga saham

Model (4) digunakan untuk menguji apakah penerapan IFRS meningkatkan kemampuan variasi laba dalam menjelaskan variasi harga saham. Sesuai dengan hipotesis, model (4) akan digunakan untuk 3 pengujian, yaitu untuk menguji pengaruh kemampuan menjelaskan variasi laba terhadap variasi harga saham pada tahap PRE-IFRS (model 4A), POST-IFRS1 (model 4B) dan POST-IFRS2 (model 4C). Hasil pengujian model 4A, 4B dan 4C disajikan pada tabel 5.

Dari tabel 5, terlihat bahwa Prob (*F-stat*) dari seluruh model 4A, 4B dan 4C adalah signifikan pada *alpha* 1%. Hal ini menunjukkan model-model tersebut adalah *fit*. Dalam tabel 5 juga terlihat bahwa *R-squared* pada model 4A bernilai 0,6937 yang berarti pada tahap PRE-IFRS variasi nilai laba mampu menjelaskan variasi harga saham sebesar 69,37%. Pada model 4B, *R-squared* bernilai 0,8154 yang berarti pada tahap POST-IFRS1 variasi laba mampu menjelaskan 81,54% variasi nilai saham. Hasil *R-squared* model 4A dan 4B ini menunjukkan pada tahap awal penerapan IFRS terdapat peningkatan kemampuan variasi laba dalam menjelaskan variasi nilai saham dibandingkan pada tahap sebelum penerapan IFRS. Dengan demikian, hipotesa 4A tidak dapat ditolak. Hasil ini konsisten dengan temuan pada model (1) bahwa penerapan IFRS pada tahap awal telah memperkuat hubungan antara laba dengan harga saham.

Selanjutnya, dari tabel 5 terlihat bahwa *R-squared* pada model 4C adalah sebesar 0,8970 yang berarti pada tahap POST-IFRS2, variasi nilai laba mampu menjelaskan 89,70% variasi nilai saham. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan variasi nilai laba dalam menjelaskan variasi harga saham pada tahap lanjut penerapan IFRS dibandingkan dengan pada tahap awal penerapan IFRS. Dengan demikian Hipotesis 4B tidak dapat ditolak. Hasil ini konsisten dengan pengujian hipotesis 2B yang menemukan bahwa tahap lanjut penerapan IFRS memperkuat relevansi nilai laba terhadap harga saham.

5. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh dari penerapan IFRS terhadap relevansi nilai dari nilai buku ekuitas dan laba terhadap harga saham. Dari hasil pengujian empiris diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan IFRS pada tahap awal tidak terbukti meningkatkan relevansi nilai dari nilai buku ekuitas terhadap harga saham dibandingkan dengan sebelum penerapan IFRS.

Hal ini mungkin disebabkan masih sangat terbatasnya PSAK berbasis IAS/IFRS yang berlaku efektif dalam periode ini, sehingga investor belum beranggapan ada peningkatan kualitas angka nilai buku ekuitas dalam laporan keuangan.

2. Penerapan IFRS pada tahap awal terbukti meningkatkan relevansi laba terhadap harga saham dibandingkan dengan tahap sebelum penerapan IFRS. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pada tahap awal PSAK berbasis IAS/IFRS yang diberlakukan masih sangat terbatas, namun investor telah beranggapan ada peningkatan kualitas laba yang disajikan dalam laporan keuangan.
3. Penerapan IFRS pada tahap lanjut terbukti meningkatkan relevansi nilai buku ekuitas dan laba terhadap harga saham. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberlakuan lebih banyak PSAK berbasis IFRS telah diduga oleh investor sebagai adanya peningkatan kualitas laporan keuangan, khususnya kualitas angka nilai buku ekuitas dan angka laba.

Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa IFRS terbukti secara empiris telah mampu menyediakan informasi yang lebih dapat diperbandingkan dan berkualitas tinggi kepada investor sebagaimana disampaikan Barth (2008).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih didasarkan pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling* dengan salah satu kriteria ketersediaan data. Oleh karenanya, ada kemungkinan sampel tidak mewakili populasinya sehingga generalisasi kesimpulan perlu dilakukan secara hati-hati. Dalam penelitian berikutnya, sebaiknya dapat digunakan pemilihan sampel secara lebih acak agar temuan dapat digeneralisasi.

Keterbatasan kedua adalah penelitian ini tidak mencakup periode tahun 2012 yang merupakan tahun terakhir konvergensi tahap pertama di Indonesia. Hal ini disebabkan pada waktu penelitian ini dimulai masih belum banyak laporan keuangan tahun 2012 yang tersedia

untuk diakses oleh publik. Oleh karenanya, dalam penelitian berikutnya sebaiknya mencakup seluruh tahapan konvergensi IFRS tahap pertama di Indonesia, termasuk tahun 2012.

Terakhir adalah keterbatasan dalam pembagian tahap-tahap konvergensi IFRS. Dalam penelitian ini, pembagian tahap-tahap konvergensi dilakukan tanpa memperhatikan dampak dari PSAK berbasis IFRS yang diberlakukan terhadap nilai buku ekuitas dan laba dan tanpa memperhatikan adanya PSAK yang berbasis IAS, yang mungkin berbeda dengan IFRS. Untuk itu, dalam penelitian selanjutnya pembagian tahap-tahap konvergensi hendaknya mempertimbangkan hal-hal tersebut.

Daftar Referensi

- Agusti, Rosalita Rachma., & Rahman, Aulia Fuad. (2011). Relevansi Nilai Laba dan Nilai Buku: Peranan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Dewan Komisaris Independen. *Symposium Nasional Akuntansi XIV*, Aceh.
- Ball, R. (2006). International Financial reporting Standards (IFRS): Pros and Cons for Investors. *Accounting and Business Research*, 36 (special Issue), pp 5-27.
- Barth, M.E. (2008). Global Financing Reporting : Implication For US Academics. *The Accounting Review*, 83, pp 1159-1179.
- Callao, S., Jarne, J. I., & Laínez, J. A. (2007). Adoption of IFRS in Spain: Effect on the Comparability and Relevance of Financial Reporting. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 16, 148-178.
- Chalmers, Keryn., Clinch, Greg., dan Gofrey, Jane M. (2011). Changes In Value Relevance Of Accounting Information Upon IFRS Adoption : Evidence From Australia. *Australian Journal of Management*, 36, pp. 151-173.
- Francis, J., Schipper, K., & Vincent, L. 2002. *Expanded disclosures and the increased usefulness of earnings announcements*. *Accounting Review*, 77(3), 515-546.
- Holthausen, Robert W., dan Watts, Ross L. (2001). The Relevance of The Value Relevance Literature For Financial Accounting Standard Setting. *Journal of Accounting & Economics*, 31, pp. 3-75.
- Hung, M., dan Subramanyam, K (2007). Financial Statement Effects Of Adopting International Accounting Standards: The Case Of Germany. *Review of Accounting Studies*, 12, pp 623-657.
- Iatridis, G., dan Rouvolis, S. (2010). The Post-Adoption Effects of the Implementation of International Financial Reporting Standards in Greece. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 19, 55-65.
- Khanagha, J. B. (2011). Value Relevance of Accounting Information in the United Arab Emirates. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 1(2), 33-45.
- Karunaratne, et al. (2010). The Value Relevance Of Financial Statements Information: With Special Reference To The Listed Companies In Colombo Stock Exchange.

- Kargin, Sibel. (2013). The Impact Of IFRS On The Value Relevance Of Accounting Information: Evidence From Turkish Firms. *International Journal Of Economics and Finance*, 5, pp. 71-80.
- Ohlson, J.A. (1995). Earnings, Book Values. And Dividends In Equity Valuation. *Contemporary Accounting Research*, 11, pp661-687.

Lampiran

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah Per tahun
1	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006 hingga 2011.	444
2.	Perusahaan yang bergerak dalam industri keuangan, properti, real estate dan konstruksi.	(123)
3.	Perusahaan yang datanya tidak lengkap.	(109)
4.	Perusahaan yang memiliki nilai buku ekuitas per saham atau laba per saham negative	(105)
Jumlah Perusahaan yang Digunakan		107

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Model Penelitian

Variabel	Statistik Deskriptif	PRE-IFRS	POST-IFRS1	POST-IFRS2
P	Minimum	39,00	50,00	54,00
	Maximum	59.000,00	162.500,00	450.000,00
	Mean	3.560,39	5.046,93	11.314,02
	Std. Deviation	9.355,63	17.424,27	41.854,16
BVPS	Minimum	20,75	32,07	37,92
	Maximum	28.628,44	36.858,77	36.074,53
	Mean	1.458,73	1.956,36	2.481,05
	Std. Deviation	3.613,49	4.859,29	5744,59
EPS	Minimum	0,12	0,39	1,63
	Maximum	5.095,00	16.158,00	24.080,80
	Mean	375,30	667,69	907,96
	Std. Deviation	870,90	2.118,40	2.756,80

Tabel 3. Hasil Regresi Model (1) dan Model (2)

Variabel	Expected Sign	Model (1) PRE-POST1IFRS			Model (2) POST1-POST2IFRS		
		Coefficient ^b	z-stat ^b	Prob ^b	Coefficient ^b	z-stat ^b	Prob ^b
POST	+	-281,01	-0,61	0,2725	-2448,22	-2,91	0.002*
BVPS	+	-1,23	-2,50	0,006*	2,69	4,19	0.000*
EPS	+	2,92	3,88	0,000*	7,53	9,92	0.000*
POST*BVPS	+	-0,06	-0,29	0,388	0,69	2,84	0.002*
POST*EPS	+	2,45	3,78	0,000*	4,16	5,71	0.000*
R-squared ^a		0,5218			0,7459		
Wald chi-square ^b		3963,28			6582,15		
Prob (chi-square) ^b		0,0000			0,0000		
No. Observation		428			428		
*signifikan pada <i>alpha</i> 1%, **signifikan pada <i>alpha</i> 5%, ***signifikan pada <i>alpha</i> 10%							
^a diuji pada metode regresi untuk model <i>Fixed Effect</i>							
^b diuji pada metode regresi yang dimodifikasi dengan metode GLS untuk model <i>Fixed Effect</i>							

Tabel 4. Hasil Regresi Model (3)

Variabel	Expected Sign	Model 3A			Model 3B			Model 3C		
		Coeff.	t-sat	Prob	Coeff.	t-sat	Prob	Coeff.	t-sat	Prob
BVPS	+	1,79	3,53	0,000*	2,34	4,38	0,000*	5,58	4,45	0,000*
R-squared		0,4772			0,4273			0,5857		
F-statistic		12,46			19,18			19,79		
Prob (F-stat)		0,0000			0,0000			0,0000		
No. observation		214			214			214		
*signifikan pada <i>alpha</i> 1%, **signifikan pada <i>alpha</i> 5%, ***signifikan pada <i>alpha</i> 10%										
Diuji dengan metode regresi <i>cross-sectional</i>										

Tabel 5. Hasil Regresi Model (4)

Variabel	Expected Sign	Model 4A			Model 4B			Model 4C		
		Coeff.	t-sat	Prob	Coeff.	t-sat	Prob	Coeff.	t-sat	Prob
EPS	+	8,95	6,19	0,000*	7,43	6,10	0,000*	14,37	8,74	0,000*
R-squared		0,6937			0,8154			0,8970		
F-statistic		38,32			37,21			76,43		
Prob (F-stat)		0,0000			0,0000			0,0000		
No. observation		214			214			214		
*signifikan pada <i>alpha</i> 1%, **signifikan pada <i>alpha</i> 5%, ***signifikan pada <i>alpha</i> 10% Diuji dengan metode regresi <i>cross-sectional</i>										

Pengaruh Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan terhadap Keputusan Reklasifikasi Aset Keuangan pada Perusahaan Perbankan *Go Public* pada Bursa Efek Indonesia

SUCI HANDINI*

SPARTA

STIE Indonesia Banking School

Abstract: *This study aims to determine wheter the firm's decision to reclassify their financial assets is affected by earnings management and firm's performance. This research also aims to determine wheter the earnings management practices are difference before and after the implementation of (2006) amendment of PSAK No.55.*

This study applies purposive sampling method and hypothese testing by partial Wald test. The results show that: (1) Earnings management have possitive significance effect on reclassification probabilities; (2) Firm's performance doesn't have negative significance effect on reclassification probabilities; (3) Earnings management moderated by the implementation of (2006) amendment of PSAK No.55 have negative significance effect on reclassification probabilities.

Keywords : *Earnings Management, Financial Assets Reclassification, Firm's Performance, PSAK No.55 (2006 Amendment).*

* Corresponding author: suci.handini@gmail.com

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan *output* dari akuntansi keuangan yang dibuat oleh manajemen untuk memberikan informasi keuangan bagi para *stakeholders* baik internal maupun eksternal dalam rangka pengambilan keputusan. Menurut Scott (2012: 21), asimetri informasi dapat terjadi apabila beberapa pihak, seperti manajer perusahaan dan pihak-pihak internal perusahaan, lebih mengetahui kondisi perusahaan saat ini dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor dan pihak-pihak eksternal lainnya. Agar para penggunanya dapat mengambil keputusan secara baik dan tepat, maka laporan keuangan harus benar-benar dapat diandalkan sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen sebagai pembuat laporan keuangan dan para pengguna laporan keuangannya.

Suatu laporan keuangan dibuat dengan mengacu pada suatu standar akuntansi. Di Indonesia, penyusunan laporan keuangan dibuat dengan mengacu pada standar akuntansi yang terdiri dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Syariah, Standar Akuntansi Pemerintahan. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), dalam peraturan nomor VIII.G.7, mengharuskan perusahaan-perusahaan *go public* untuk menyusun laporan keuangannya berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Awalnya SAK yang digunakan merujuk pada US-GAAP (*United States Generally Accepted Accounting Principles*). US-GAAP merupakan perangkat standar yang digunakan sebagai acuan oleh banyak negara. Namun, seiring berkembangnya pemikiran mengenai harmonisasi akuntansi internasional maka IASB (*International Accounting Standards Board*) menyusun satu standar IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dengan harapan suatu laporan keuangan akan lebih relevan, lebih dapat diandalkan dan lebih mudah untuk dibandingkan. IFRS yang menggunakan konsep *fair value accounting* juga diharapkan dapat meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Namun ternyata penggunaan *fair value accounting* menimbulkan permasalahan baru dalam penerapannya. Masalah tersebut antara lain adalah penggunaan input tingkat tiga. Input tingkat tiga merupakan input yang tidak dapat diobservasi dan digunakan ketika aset atau kewajiban tidak diperdagangkan di pasar aktif atau ketika substitusi perdagangannya tidak dapat diidentifikasi. Hal ini dinilai kurang objektif karena menggunakan estimasi manajer sendiri untuk melakukan penilaian. Estimasi nilai wajar yang tidak diperoleh dari harga pasarnya kurang dapat diandalkan (Subramanyam dan Wild, 2010: 121-123). Hal tersebut dikhawatirkan akan rentan terhadap manipulasi. Selain itu, volatilitas *earnings* juga menjadi isu penting dalam penggunaan *fair value accounting*.

Indonesia turut menanggapi tujuan harmonisasi akuntansi internasional tersebut dengan mengkonvergensi IFRS ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Salah satu PSAK hasil konvergensi tersebut adalah PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang merupakan adopsi IAS 39 (Revisi 2005). Pada 30 Desember 2008, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI mengeluarkan surat pengumuman No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008 yang menyatakan perubahan tanggal efektif pemberlakuan PSAK 50 (Revisi 2006) yang diatur dalam paragraf 95 dan PSAK 55 (Revisi 2006) yang diatur dalam paragraf 107, dari periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009 kemudian diubah menjadi untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Selanjutnya, kembali dilakukan beberapa revisi untuk PSAK 55 pada tahun 2011 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2012. Revisi tersebut mengadopsi ketentuan IAS 39 per 1 Januari 2009.

Ada beberapa perbedaan dalam PSAK No. 55 (Revisi 1999) adopsi US GAAP, PSAK No. 55 (Revisi 2006) adopsi IAS 39 (Revisi 2005), dan PSAK No.55 (Revisi 2011) adopsi IAS (Revisi 2009). Perbedaan tersebut antara lain meliputi *derecognition*, pengukuran awal,

fair value option, reklasifikasi, instrumen derivatif, dan penurunan nilai instrumen keuangan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 2007). PSAK 55 (Revisi 2006) ini juga berkaitan erat dengan PSAK 50 (Revisi 2006) tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui dampak IFRS terhadap kualitas akuntansi, antara lain Tendelo *et al.* (2005) dan Barth *et al.* (2006) yang menemukan adanya hubungan positif antara adopsi IFRS dengan *earnings management* yang lebih rendah. Pada PSAK No.50 (1998), tidak adanya larangan untuk melakukan klasifikasi ulang instrumen keuangan yang sebelumnya telah direklasifikasi sangat memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Terkait dengan krisis global pada tahun 2008 nilai pasar SUN saat itu banyak yang tidak aktif diperdagangkan, kemudian Bank Indonesia mengeluarkan surat No.10/177/DpG/DPNP tanggal 9 Oktober 2008 perihal Penetapan Nilai Wajar dan Reklasifikasi Surat Utang Negara (SUN)[†]. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan reklasifikasi atas SUN yang dimiliki melalui proses *switching*. IASB mencatat bahwa dengan memperbolehkan suatu entitas untuk melakukan reklasifikasi akan mendorong mereka untuk melakukan manajemen laba guna menghindari *future fair value gains/losses* pada aset yang direklasifikasi (IASB, 2008, BC104B, p. 10, dalam Quagli *et al.* : 2010). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ketentuan mengenai reklasifikasi aset keuangan yang diatur dalam PSAK 55 (Revisi 2006) merupakan suatu langkah untuk meningkatkan kualitas akuntansi. Namun, tingginya ketidakpastian dalam *fair value concept* menyebabkan perlunya kehati-hatian untuk mengklasifikasikan suatu aset keuangan ke dalam *Available For Sale* (AFS) dan *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL).

Ketentuan reklasifikasi yang lebih diperketat dari sebelumnya ini diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba pada perusahaan. Namun, sehubungan dengan

[†] Laporan Keuangan Tahunan Bank Mandiri (Lampiran 5/63), Desember 2010.

penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006), bank diberikan kesempatan untuk meninjau ulang klasifikasi aset keuangan dan dapat mereklasifikasi tanpa terkena sanksi atau *tainting rule*. Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk melakukan manajemen laba melalui kesempatan peninjauan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Quagli dan Ricciardi (2010) yang menemukan hubungan probabilitas reklasifikasi dengan kebijakan manajemen laba. Sturk dan Evertsson (2010) juga menemukan indikasi penggunaan reklasifikasi untuk meningkatkan *profit* oleh manajemen untuk kepentingan mereka sendiri. Beberapa penelitian terdahulu (Fiechter, 2010; Sturk dan Evertsson, 2010; Quagli dan Ricciardi, 2010) juga menemukan hubungan penggunaan reklasifikasi dengan peningkatan kinerja perusahaan yang terlihat dari rasio-rasio keuangan seperti ROA dan ROE.

Seiring perkembangannya yang semakin pesat, industri perbankan saat ini memiliki produk dan jasa yang semakin kompleks pula. Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melakukan kegiatan *traditional banking* dan *trading* memiliki instrumen keuangan yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Oleh sebab itu, pengaruh perubahan standar tersebut akan lebih besar dirasakan dampaknya oleh sektor perbankan. Atas dasar pemaparan di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan Terhadap Keputusan Reklasifikasi Aset Keuangan pada Perusahaan Perbankan *Go Public* pada Bursa Efek Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah probabilitas reklasifikasi jika perusahaan sampel menggunakannya dalam kebijakan manajemen laba?
2. Apakah kinerja perusahaan berpengaruh signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi?
3. Bagaimanakah pengaruh kebijakan manajemen laba setelah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) terhadap probabilitas reklasifikasi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengungkapkan probabilitas reklasifikasi jika perusahaan sampel menggunakannya dalam kebijakan manajemen laba.
2. Mengungkapkan pengaruh kinerja perusahaan sampel terhadap probabilitas reklasifikasi.
3. Mengungkapkan pengaruh manajemen laba setelah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) terhadap probabilitas reklasifikasi.

II. Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori akuntansi positif yang dibangun untuk menjelaskan praktik dan standar akuntansi. Teori agensi adalah teori deskriptif yang didalamnya membantu menjelaskan perbedaan dalam praktik akuntansi (Schroeder *et al.*, 2011:124). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan agensi sebagai hubungan antara dua pihak dimana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak sebagai representatif pihak lainnya (*principal*). Hubungan ini dapat terjadi dikarenakan ketidakmampuan pemilik untuk mengelola perusahaannya, sehingga memerlukan orang lain yang memiliki kemampuan agar dapat menjadi representasi pemilik dalam mengelola perusahaan.

Hubungan agensi akan menimbulkan *cost* bagi *principals*. Johnson dan Meckling (1976) mendefinisikannya sebagai jumlah dari (1) pengeluaran untuk pengawasan oleh *principal*, (2) pengeluaran penjaminan oleh agen, (3) residual *loss* yang timbul akibat adanya perbedaan tindakan oleh agen dengan keinginan *principal* (Schroeder *et al.*, 2011:124). Lambert (2001) dalam Sunarto (2009) menyatakan bahwa dalam kesepakatan antara pemilik dan agen diharapkan dapat memaksimalkan utilitas pemilik (*principal*), dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen (*agent*) untuk menerima *reward*. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko konflik kepentingan diantara kedua pihak.

2.2. Instrumen Keuangan

Pada PSAK 50 (1998) paragraf enam, instrumen keuangan diistilahkan sebagai “efek” yang memiliki definisi: Efek (security) adalah surat berharga. Instrumen keuangan menurut PSAK 50 (revisi 2006) paragraf tujuh adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Dari definisi menurut PSAK 50 (revisi 2006) di atas, instrumen keuangan mencakup aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. PSAK No.55 (Revisi 2006) membagi instrumen keuangan menjadi empat kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL-*Fair Value Through Profit or Loss*);
- Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (HTM-*Held to Maturity*), adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo;
- Pinjaman yang diberikan dan piutang (LAR-*Loans and Receivables*), adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif;
- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS-*Available For Sale*), adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai AFS.

2.3. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi atau transfer dalam instrumen keuangan adalah suatu proses memindahkan instrumen keuangan dari satu kategori ke dalam kategori lainnya. Ketentuan reklasifikasi aset keuangan berdasarkan PSAK No.55 (Revisi 2006) adalah sebagai berikut:

- Reklasifikasi aset keuangan dari HTM menjadi AFS dengan alasan adanya perubahan tujuan dan perubahan kemampuan untuk menahan aset tersebut sampai dengan jatuh tempo diperbolehkan.
- Reklasifikasi aset keuangan dari AFS menjadi HTM diperbolehkan dengan kriteria perusahaan menunjukkan tujuan dan kemampuannya untuk *hold* aset tersebut.

Ketentuan tersebut juga ditambah dengan *tainting rule* yang menyebutkan bahwa suatu entitas tidak boleh melakukan klasifikasi aset keuangan sebagai investasi HTM jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya telah menjual atau mereklasifikasi investasi HTM dalam jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo.

2.4. Manajemen Laba

Manajemen laba didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh *corporate officers* untuk mempengaruhi pelaporan laba jangka pendek (Schroeder *et al.*, 2011: 155). Schipper (1989) dalam Subramanyan dan Wild (2010:131) mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. Sedangkan Scott (2011: 423) menyatakan “*Earnings management is the choice by a manager of accounting policies, or real actions, affecting earnings so as to achieve specific reported earnings objective*”.

Arthur Levitt (1998) dalam Schroeder *et al.* (2011: 156-157) menyebutkan lima teknik manajemen laba yang mengancam integritas pelaporan keuangan, yaitu *taking a bath*, *creative acquisition accounting*, “*Cookie Jar*” *reserves*, *abusing the materiality concept*, *improper revenue recognition*. Dalam kaitannya dengan teori agensi, motivasi manajemen akrual dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu *opportunistic* dan *signaling* (Beaver, 2002). Motivasi *opportunistic* terkait dengan kompensasi yang akan diterima oleh manajemen atau *agent*, sedangkan motivasi *signaling* berhubungan dengan kemakmuran para

pemegang saham atau *principals* (Sunarto, 2009). Scott (2011: 426-435) menjelaskan ada berbagai motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba. Hal tersebut antara lain adalah tujuan bonus (*bonus purposes*), kontrak utang jangka panjang (*debt contracting motivations*), untuk memenuhi harapan para investor dan menjaga reputasi (*to meet investor's earnings expectations and maintain reputation*), dan penawaran saham perdana (*initial public offering*).

2.5. Kinerja Perusahaan

Kondisi dan kinerja perusahaan dapat tercermin dari laporan keuangan perusahaan. Laporan Laba Rugi mengukur kinerja perusahaan pada tanggal neraca (Subramanyam dan Wild, 2010: 24). Indikator kinerja perusahaan yang umum digunakan adalah analisis rasio, terutama rasio-rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Analisis rasio-rasio profitabilitas tersebut salah-satunya adalah tingkat pengembalian aset (*Return On Asset-ROA*). ROA merupakan tingkat pengembalian atas aset, dimana rasio ini menentukan jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan dengan menghubungkan pendapatan bersih dengan total aset (Keown *et.al.*, 2008: 80). Sedangkan perhitungan ROA menurut Subramanyam & Wild (2010:44) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Net income} + \text{interest expenses} \times (1 - \text{tax rate})}{\text{average total assets}}$$

2.6. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait dengan penelitian ini. Di tahun 2010, **Quagli dan Ricciardi** meneliti hubungan manajemen modal dan manajemen laba dengan adopsi IAS 39 Amandemen Oktober 2008. Dalam penelitian ini, digunakan 71 *Bank Holding Companies* yang *listed* di *European Stock Market*. Periode sampel yang diteliti dimulai dari tahun 1989 atau tahun terdahulu sampai dengan tahun 2007. Penelitian ini

memfokuskan kepada institusi perbankan karena menurut Quagli dan Ricciardi, bank lebih mungkin mempunyai ketertarikan dalam melakukan reklasifikasi karena aktivitasnya yang terkait investasi dan komersial. Jurnal ini memuat 6 variabel independen dan 2 variabel *dependent*. Pengujian dilakukan dengan mengembangkan beberapa kerangka hipotesis yang memiliki hasil antara lain, adanya hubungan probabilitas untuk mereklasifikasi asset keuangan dengan kebijakan manajemen laba masa lalu, serta adanya kemungkinan penggunaan reklasifikasi untuk menghindari kinerja yang buruk pada tahun 2008 yang berhubungan positif dengan dimensi perusahaan.

Fiechter (2010) menganalisis mengenai dampak reklasifikasi aset terhadap laporan keuangan bank-bank di Eropa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh amandemen IAS 39 oleh IASB sebagai tanggapan atas krisis keuangan 2008 yang memperbolehkan entitas untuk mereklasifikasi aset keuangan non derivatif kategori *Trading* dan *Available for Sale*. Penelitian ini dilakukan dengan sampel 219 *European Banks* dengan periode penelitian dari bulan Juli hingga Desember 2008. Dari penelitian ini ditemukan hampir satu per tiga bank mengambil manfaat yang sangat besar dari peluang reklasifikasi yang ada. Bank-bank yang melakukan reklasifikasi menghindari dampak substansi atas kerugian *fair value*. Hal itu terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan ROA, ROE dan *book value equity* serta ketentuan kecukupan modal. Maka dampaknya, amandemen IAS 39 hanya akan digunakan sebagai *treatment* jangka pendek untuk memperbaiki dampak atas kondisi pasar yang tidak biasa, bukan untuk perubahan berkelanjutan standar akuntansi untuk instrumen keuangan.

Sturk & Evertsson (2010) mencari tahu apakah bank-bank di negara-negara Eropa Timur dan Atlantik Utara (*Nordic*) melakukan reklasifikasi instrumen keuangan pada laporan keuangan tahun 2008 dan 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 71 *European Banks* sebagai sampel dengan periode penelitian dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa 47% sampel melakukan reklasifikasi instrumen keuangan pada tahun 2008 dan 12% sampel melakukan reklasifikasi instrumen keuangan di tahun 2009. Terjadi peningkatan laba bersih dan ROE meningkat secara signifikan pada bank-bank yang melakukan reklasifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peluang reklasifikasi yang diberikan sebagian besar digunakan oleh bank untuk meningkatkan *net income* dan ROE. Indikasi lainnya adalah penggunaan reklasifikasi untuk meningkatkan *profit* oleh manajemen untuk kepentingan mereka sendiri.

Kholmy & Ernstberger (2010) melalui penelitiannya mencoba menganalisa determinan dan konsekuensi penggunaan opsi reklasifikasi instrumen keuangan dari kategori *fair value* menjadi kategori yang diukur *at cost* atau *amortized cost*. Dalam penelitian ini digunakan 101 bank dari 15 negara-negara Eropa sebagai sampel. Periode penelitian ini adalah dari tahun 2007 hingga tahun 2008. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa penggunaan opsi reklasifikasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang diteliti, antara lain ukuran bank, profitabilitas, ulasan analis, dan tradisi hukum pada suatu negara. Mereka juga menemukan bukti bahwa bank-bank menggunakan opsi ini untuk menghadapi *spread bid-ask* yang lebih tinggi setelah mengungkapkan keputusannya untuk melakukan reklasifikasi.

Anggraita (2012) meneliti dampak penerapan PSAK No.50 dan 55 (Revisi 2006) terhadap manajemen laba di perbankan. Penelitian dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 36 bank dengan periode pengamatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Variabel penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen (komponen diskresioner CKPN), dan enam variabel dependen (penerapan PSAK 50/55, kualitas *corporate governance*, auditor spesialis industri, struktur kepemilikan, serta variabel kontrol pertumbuhan dan ukuran bank). Secara keseluruhan hasil penelitian ini menemukan adanya penurunan praktik manajemen laba di perbankan setelah penerapan PSAK No.50 dan 55 (Revisi 2006). Hal tersebut diduga karena

penghitungan CKPN yang harus berdasarkan data histori *default* kredit bank selama tiga sampai lima tahun sebelumnya, sehingga sulit untuk melakukan manajemen laba.

2.7. Rerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

a. Agensi Teori, Probabilitas Reklasifikasi, Manajemen Laba, dan Kinerja Perusahaan

Dalam model agensi yang memisahkan fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, menurut Lambert (2001) dalam Sunarto (2009), dalam kesepakatan antara pemilik dan agen diharapkan dapat memaksimalkan utilitas pemilik (*principal*), dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen (*agent*) untuk menerima *reward*. Kedua manfaat tersebut didasarkan pada kinerja perusahaan. Menurut Penman (2003), kinerja perusahaan tersebut umumnya diukur dengan ukuran kinerja profitabilitas. Hal tersebut dapat diukur melalui penyajian laporan keuangan perusahaan oleh manajemen kepada pemilik. Konflik kepentingan yang ada antara manajemen dan pemilik perusahaan inilah yang dapat menjadi motivasi bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan dapat sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat memenuhi kepentingan kedua pihak. Reklasifikasi aset keuangan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya manajemen laba guna menghindari kerugian di masa yang akan datang, sehingga akan mempengaruhi pelaporan keuangan dan kinerja perusahaan agar menjadi lebih baik.

b. Manajemen Laba dan Probabilitas Reklasifikasi

IASB mencatat bahwa dengan memperbolehkan suatu entitas untuk melakukan reklasifikasi akan mendorong mereka untuk melakukan manajemen laba guna menghindari *future fair value gains/losses* pada aset yang direklasifikasi (IASB, 2008, BC104B, p. 10, dalam Quagli & Ricciardi : 2010). Guo & Matovu dalam penelitiannya menemukan adanya penerapan opsi reklasifikasi oleh bank-bank sampel yang digunakan untuk mengambil

manfaat terhadap efek profit yang positif. Quagli & Ricciardi (2010) memiliki hasil penelitian yang menunjukkan signal manajemen laba akrual yang sangat signifikan dengan efek marginal terbesar, hal ini menunjukkan hubungan manajemen laba dan reklasifikasi pada bank-bank sampel yang diteliti.

c. Kinerja Perusahaan dan Probabilitas Reklasifikasi

Hubungan antara kedua variabel ini dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu. Fiechter (2010) menemukan adanya dampak yang positif penggunaan peluang reklasifikasi aset keuangan menurut IAS 39 amandemen 2008 dengan indikator kunci keuangan dari satu per tiga sampel yang ia teliti. Indikator kunci keuangan yang digunakan dalam penelitian itu antara lain adalah ROA, ROE, *leverage*, *tier 1*, dan *capital adequacy*. Menurut Kholmy dan Ernstberger (2010), bank dengan profitabilitas dan kinerja pasar modal yang buruk memiliki kecenderungan untuk melakukan reklasifikasi aset. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Quagli dan Ricciardi (2010) yang menemukan bukti penggunaan reklasifikasi guna menghindari kinerja yang buruk pada tahun amandemen IAS 39.

d. Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK No.55 (Revisi 2006)

Ketentuan reklasifikasi aset keuangan yang lebih diperketat dari sebelumnya dalam PSAK No.55 (Revisi 2006) memberikan ruang yang lebih sempit bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Penelitian terkait manajemen laba sebelum dan sesudah implementasi PSAK No.55 (Revisi 2006) telah dilakukan oleh Anggraita (2012). Dalam penelitiannya ditemukan adanya penurunan praktik manajemen laba di perbankan melalui Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) setelah penerapan PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006).

e. Ukuran Perusahaan dan Probabilitas Reklasifikasi

Penelitian-penelitian sebelumnya (Kholmy dan Ernstberger, 2010; Quagli dan Ricciardi, 2010; Sturk dan Evertsson, 2010) mengidentifikasi variabel-variabel yang

cenderung mempengaruhi pilihan reklasifikasi, dan salah satu variabel tersebut adalah ukuran perusahaan. Sturk dan Evertsson (2010), menemukan tendensi pada bank-bank sampel yang lebih besar dan kurang *profitable* untuk menggunakan reklasifikasi instrumen keuangan untuk lingkup yang lebih luas. Kholmy dan Ernstberger (2010) berargumentasi bahwa bank yang lebih besar lebih memiliki keinginan untuk melakukan reklasifikasi dikarenakan tingginya tekanan pasar saham yang mereka rasakan bila dibandingkan dengan bank-bank yang lebih kecil.

f. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1a : *Income smoothing berpengaruh positif terhadap probabilitas reklasifikasi.*

H1b : *Manajemen laba berpengaruh positif terhadap probabilitas reklasifikasi.*

H2 : *Kinerja perusahaan berpengaruh negatif terhadap probabilitas reklasifikasi.*

H3 : *Manajemen laba setelah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) berpengaruh negatif terhadap probabilitas reklasifikasi.*

III. Metode Penelitian

3.1. Data dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan perbankan *go public* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berupa laporan tahunan yang diperoleh dari situs www.idx.co.id, perpustakaan elektronik BEI, dan situs bank terkait. Agar lebih representatif, maka pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Semua bank umum yang terdaftar pada BEI dari tahun 2008 hingga 2011. Pemilihan periode pengamatan disesuaikan dengan *cut-off* penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) pada 1 Januari 2010.
- b. Bank Umum mempublikasikan laporan keuangannya selama periode pengamatan.
- c. Bank Umum telah menerapkan PSAK No.55 (Revisi 2006) per 1 Januari 2010.

3.2. Model Penelitian

Analisis regresi logistik biner dilakukan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independennya (Ghozali, 2009:71). Pada penelitian ini variabel dependen bersifat *dicotamus* yaitu variabel *dummy* dengan dua kemungkinan keputusan, yaitu melakukan reklasifikasi atau tidak melakukan reklasifikasi, untuk itu digunakan model regresi logistik biner. Model ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis (1), (2) dan (3). Model tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LOGIT RECLASS}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \text{IS}_{i,t} + \beta_2 \text{EM}_{i,t} + \beta_3 \text{ROA}_{i,t} + \beta_4 \text{POST}_{i,t} + \beta_5 \text{POST_EM}_{i,t} \\ & + \beta_6 \text{SIZE}_{i,t} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

dimana,

$$\text{LOGIT RECLASS} = E(y) = \ln(\text{odds}) = \ln \left(\frac{P_i(Y_i = 1/X_i)}{1 - P_i(Y_i = 1/X_i)} \right)$$

$$P_i(Y_i = 1/X_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 \text{IS}_{i,t} + \beta_2 \text{EM}_{i,t} + \beta_3 \text{ROA}_{i,t} + \beta_4 \text{POST}_{i,t} + \beta_5 \text{POST_EM}_{i,t} + \beta_6 \text{SIZE}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 \text{IS}_{i,t} + \beta_2 \text{EM}_{i,t} + \beta_3 \text{ROA}_{i,t} + \beta_4 \text{POST}_{i,t} + \beta_5 \text{POST_EM}_{i,t} + \beta_6 \text{SIZE}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}}}$$

Keterangan:

RECLASS	: Probabilitas $y = 1$
IS	: <i>Income smoothing</i> ($1 = \text{Smoother}$)
EM	: Manajemen laba
ROA	: Kinerja perusahaan
POST	: PSAK No.55 (Revisi 2006)
POST_EM	: Manajemen laba setelah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006)

SIZE	: Ukuran perusahaan
ε	: <i>Error</i>
β	: Koefisien regresi
i	: Perusahaan sampel
t	: Tahun penelitian

3.3. Operasionalisasi Variabel

a. Variabel Terikat

Reklasifikasi aset keuangan (RECLASS) merupakan proksi untuk transfer dalam instrumen keuangan, yaitu suatu proses memindahkan instrumen keuangan dari satu kategori ke dalam kategori lainnya. RECLASS diukur dengan variabel *dummy* yang dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

0: Jika sampel tidak melakukan reklasifikasi aset keuangan

1: Jika sampel melakukan reklasifikasi aset keuangan

b. Variabel Bebas

- *Income smoothing* (IS)

IS merupakan proksi untuk strategi manajemen laba yang digunakan manajer dengan meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya (Subramanyam & Wild, 2010: 132). Indeks *income smoothing* dihitung dengan membagi koefisien variasi perubahan *net income* dengan koefisien variasi perubahan *interest income*. Menurut Eckel (1981) dalam Quagli dan Ricciardi (2010), rasio ini merupakan indeks *income smoothing*.

$$IS = CV\Delta Ni \div CV\Delta Ii$$

Variabel ini diukur menggunakan variabel *dummy*, dengan kriteria satu (1) jika perusahaan diklasifikasikan sebagai *smoother* (koefisien variasi kurang dari satu (<

1)), dan nol (0) untuk perusahaan *non-smoother* jika koefisien variasi sama dengan atau lebih dari satu (≥ 1) (Sunarto, 2009).

- Manajemen laba (EM)

Perhitungan manajemen laba ini diadopsi dari jurnal Quagli dan Ricciardi (2010). Variabel ini diperoleh dari koefisien korelasi antara perubahan *operating accruals* dan perubahan dalam *net cash flows – operating activities*. Hubungan yang negatif mengindikasikan manajemen laba yang lebih tinggi.

$$EM = \rho (\Delta ACCR, \Delta CFO)$$

dimana,

$$ACCR = Cash\ flows - Operating\ activities\ from\ operating\ income$$

Variabel IS dan EM sama-sama digunakan untuk mengukur manajemen laba, dimana IS fokus pada akrual, sementara EM juga menangkap perilaku manajemen laba real[‡].

- Kinerja perusahaan (ROA)

Indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio *Return On Assets* (ROA). Variabel ini menggunakan nilai ROA yang dilaporkan perusahaan.

- PSAK No.55 (Revisi 2006) (POST)

Variabel POST merupakan variabel kontrol penelitian, ini digunakan sebagai proksi penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan nilai satu (1) untuk periode setelah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) dan nilai nol (0) untuk sebaliknya.

- Manajemen laba setelah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) (POST_EM)

Variabel ini merupakan proksi dari kebijakan manajemen laba perusahaan setelah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006). Variabel ini diukur dengan cara mengalikan variabel POST dengan variabel EM (POST x EM).

[‡] Hasil konfirmasi melalui *e-mail* kepada Prof. Alberto Quagli (quaglia@economia.unige.it), 4 Maret 2012 atas jurnal The IAS 39-October 2008 Amendment as Another Opportunity of Earnings Management: an Analysis of European Banking Industry (2010)

- Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini. Variabel ini diprosikan dengan SIZE yang merupakan nilai logaritma natural dari total aset.

3.4. Langkah-langkah Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji parsial wald atau uji wald. Pengujian secara parsial dilakukan untuk melihat hubungan parsial masing-masing parameter variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan tingkat sinifikansi *alpha* sebesar 0.01 (1%), 0.05 (5%), dan 0.1 (10%).

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H01a: *Income Smoothing tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi.*

Ha1a: *Income Smoothing secara signifikan berpengaruh positif terhadap probabilitas reklasifikasi.*

H01b: *Manajemen laba tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi.*

Ha1b: *Manajemen laba secara signifikan berpengaruh positif terhadap probabilitas reklasifikasi.*

H02 : *Kinerja perusahaan tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi.*

Ha2 : *Kinerja perusahaan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap probabilitas reklasifikasi.*

H03 : *Manajemen laba setelah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi.*

Ha3 : *Manajemen laba setelah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap probabilitas reklasifikasi.*

Penerimaan dan penolakan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

a. Metode *P-value*

Jika $p\text{-value (Sig.)} > \alpha$, maka H_0 tidak dapat ditolak.

Jika $p\text{-value (Sig.)} \leq \alpha$, maka H_0 ditolak.

b. Metode nilai statistik wald

Jika nilai statistik Wald \leq Chi-Square tabel, maka H_0 tidak dapat ditolak

Jika nilai statistik Wald $>$ Chi-Square tabel, maka H_0 ditolak

IV. Analisis Data

4.1. Statistik Deskriptif

Dari Tabel 4.1. (Lampiran 2) dapat dilihat bahwa terdapat 93 pengamatan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel penelitian. Sebesar 16.1% (15 dari total 93 pengamatan) bank melakukan reklasifikasi aset keuangan, sehingga terlihat perbedaan yang cukup besar bila dibandingkan dengan jumlah bank yang tidak melakukan reklasifikasi aset keuangan. Sementara itu, sebesar 37.6% (35 dari total 93 pengamatan) bank merupakan bank dengan kategori *smoother* atau perata laba dan sisanya sebesar 62.4% termasuk kategori *non-smoother*.

Berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi pada Tabel 4.3. (Lampiran 3) dapat dilihat bahwa sebaran data dalam penelitian ini tidak terlalu besar. Tabel 4.4. dan Tabel 4.5. memperlihatkan perbandingan rata-rata variabel antara pengamatan yang termasuk kategori melakukan reklasifikasi aset keuangan dengan pengamatan yang tidak melakukan reklasifikasi aset keuangan. Rata-rata nilai EM untuk kategori *Reclass* lebih rendah daripada kategori *Non-Reclass*, hal tersebut berarti bahwa manajemen laba pada bank yang melakukan reklasifikasi cenderung lebih besar secara rata-rata dibandingkan dengan

bank yang tidak melakukan reklasifikasi. Selain itu, ROA bank dengan kategori *Reclass* secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan kategori *Non-Reclass*.

4.2. Uji Kelayakan Model Regresi Logistik (*Goodness of Fit Test*)

Nilai *Classification Plot* sebesar 93.5% (mendekati 1) dan hasil uji kecocokan model menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menunjukkan nilai signifikansi *Chi-Square* di atas 5%, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi logistic *fit* terhadap data. *Cox and Snell R-Square* dan *Nagelkerke R-Square* digunakan untuk uji validitas model regresi logistik dengan nilai masing-masing sebesar 39.1% dan 66.7%. Hal tersebut berarti bahwa variasi probabilitas reklasifikasi mampu dijelaskan oleh keseluruhan variabel bebas sebesar 66.7%, sisanya sebesar 33.3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

V. Pembahasan

5.1. Manajemen Laba dan Probabilitas Reklasifikasi

Hasil regresi menunjukkan koefisien regresi *Income Smoothing* (IS) dan koefisien regresi manajemen laba (EM) bernilai positif (sesuai prediksi). Nilai signifikansi (*p-value*) IS lebih kecil dari nilai *alpha* 0.01, maka hipotesis penelitian 1a (H1a) tidak dapat ditolak. Sementara itu, nilai signifikansi (*p-value*) EM lebih kecil dari nilai *alpha* 0.1, maka hipotesis penelitian 1b (H1b) tidak dapat ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan bank untuk melakukan reklasifikasi atau tidak melakukan reklasifikasi atas aset keuangan salah satunya didasari oleh kebijakan manajemen laba perusahaan tersebut. Menurut IASB, kebutuhan menghindari *future fair value gains/losses* mendorong suatu entitas untuk melakukan manajemen laba melalui opsi reklasifikasi (IASB, 2008, BC104B, p. 10, dalam Quagli *et al.* : 2010). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Quagli dan Ricciardi (2010) yang menyatakan hubungan yang signifikan antara manajemen laba dan probabilitas reklasifikasi pada bank-bank sampel yang diteliti.

5.2. Kinerja Perusahaan dan Probabilitas Reklasifikasi

Hasil regresi menunjukkan koefisien regresi ROA bernilai positif (tidak sesuai prediksi), tetapi nilai signifikansi (*p-value*) ROA lebih kecil dari *alpha* 0.01. Oleh karena itu, maka hipotesis penelitian kedua (H2) ditolak. Hasil ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu (Fiechter, 2010; Kholmy dan Ernstberger, 2010; Quagli dan Ricciardi, 2010). Tidak ditemukannya hubungan yang signifikan antara kinerja dan probabilitas reklasifikasi dalam penelitian ini dimungkinkan karena keterbatasan peneliti yang belum bisa mengeluarkan efek reklasifikasi dari nilai ROA. Nilai ROA yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai ROA yang dilaporkan oleh perusahaan sampel, atau dengan kata lain ROA setelah efek reklasifikasi. Fiechter (2010) menyebutkan bahwa reklasifikasi memiliki dampak yang positif terhadap rasio keuangan, hal ini konsisten dengan hasil statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa ROA bank dengan kategori *Reclass* secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan kategori *Non-Reclass*.

5.3. Manajemen Laba Setelah Penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) dan Probabilitas Reklasifikasi

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai koefisien regresi POST_EM yang bernilai negatif (sesuai prediksi). Nilai signifikansi (*p-value*) POST_EM lebih kecil dari *alpha* 0.05, maka hipotesis penelitian ketiga (H3) tidak dapat ditolak. Hal ini berarti bahwa kebijakan manajemen laba bank yang dimoderasi penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) menurunkan probabilitas reklasifikasi aset keuangan. Tabel 4.3. (Lampiran 3) juga memperlihatkan bahwa rata-rata manajemen laba yang dimoderasi penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) atau POST_EM memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan EM. Ini berarti bahwa kebijakan reklasifikasi yang diperketat dalam penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) dapat menurunkan praktik manajemen laba pada bank-bank yang diteliti. Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraita (2012) yang menemukan

adanya penurunan praktik manajemen laba di perbankan melalui Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) setelah penerapan PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006).

5.4. Ukuran Perusahaan dan Probabilitas Reklasifikasi

Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai yang positif (sesuai prediksi) dengan nilai signifikansi SIZE lebih kecil dari α 0.05. Ukuran perusahaan yang merupakan variabel kontrol pada penelitian ini memiliki hubungan positif secara signifikan terhadap keputusan bank untuk melakukan reklasifikasi atau tidak melakukan reklasifikasi aset keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Kholmy dan Ernstberger, 2010; Quagli dan Ricciardi, 2010; Sturk dan Evertsson, 2010) yang menemukan kecenderungan variabel ukuran perusahaan dalam mempengaruhi pilihan reklasifikasi.

VI. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Pada dasarnya penelitian ini ingin mengungkapkan pengaruh kebijakan manajemen laba baik sebelum maupun sesudah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) dan kinerja perusahaan terhadap keputusan bank untuk melakukan reklasifikasi atau tidak melakukan reklasifikasi aset keuangan. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa manajemen laba secara signifikan berpengaruh positif terhadap probabilitas reklasifikasi. Manajemen laba yang dimoderasi Penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap probabilitas reklasifikasi. Penelitian ini juga menemukan adanya penurunan manajemen laba secara rata-rata setelah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006). Sementara itu, tidak ditemukan adanya hubungan yang negatif secara signifikan antara kinerja perusahaan dengan probabilitas reklasifikasi.

Bank-bank sampel harus berhati-hati dalam mengklasifikasikan suatu aset keuangan, terutama dalam kategori FVTPL dan AFS dikarenakan tingginya volatilitas dalam penggunaan nilai wajar pada instrumen keuangan. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan kebijakan manajemen laba dapat menurunkan kualitas laba sehingga laba menjadi kabur (Sunarto, 2009). Pengungkapan reklasifikasi dapat menjadi satu upaya monitoring untuk mendeteksi perilaku manajemen laba, informasi tersebut juga dapat menjadi tolak ukur bagi pihak-pihak terkait untuk menilai kualitas laba perusahaan perbankan.

Keterbatasan penelitian ini antara lain sampel penelitian yang masih terbatas pada bank umum yang *go public* pada BEI, untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti seluruh bank umum dengan periode pengamatan yang lebih diperpanjang. Selain itu, penelitian ini juga belum dapat mengeluarkan efek reklasifikasi aset keuangan dari nilai ROA. Menurut Quagli dan Ricciardi (2010), efek reklasifikasi aset keuangan dapat dikeluarkan dari nilai ROA dengan cara mengidentifikasi nilai *avoided income loss* dan *avoided capital loss*. Terkait dengan hal tersebut, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk meneliti jenis reklasifikasi aset keuangan secara lebih spesifik.

Daftar Referensi

- Anderson, David R., Sweeney, Dennis J., & Williams, Thomas A. (...) Statistics For Business And Economics 10e. Thomson-South Western. Ohio, USA.
- Anggraita, Viska. (2012). Dampak Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap Manajemen Laba Diperbankan: Peran Mekanisme Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Kualitas Audit. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Badan Pengawas Pasar Modal. (2000). Peraturan Nomor VIII.G.7. Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta.
- Bank Mandiri. (2010). Laporan Keuangan Tahunan Bank Mandiri.
- Barth, Mary E., Landsman, Wayne R., & Williams, Christopher. (2006). Accounting Quality: International Accounting Standards and US GAAP. Singapore Management University, School of Accountancy. Singapore.

- Beaver, W. H. (2002). Perspective on Recent Capital Market Research. *Accounting Review* , 77.2:453. Gale Education, Religion and Humanities Lite Package.
- Bischof, J., Brüggemann, U., & Daske, H. (2011). Fair Value Reclassifications of Financial Assets During The Financial Crisis. Diakses pada <http://ssrn.com/abstract=1628843>.
- Corolina dan Juniarti. (2005). Analisa Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Perataan Laba (*Income Smoothing*) pada Perusahaan-perusahaan *Go Public*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.7 No.2:148-162-Universitas Kristen Petra.
- Dewan SAK IAI (2008). Surat No.1705/DSAK/IAI/12/2008 tentang Pengumuman Perubahan Tanggal Efektif PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006). Diakses pada <http://www.iaiglobal.or.id>.
- Dewan SAK IAI. (2012). Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (Cetakan Pertama). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Fiechter, P., 2010. Reclassification of financial assets under IAS 39: impact on European banks' financial statements. Working Paper, University of Zurich.
- Fiechter, P., 2011. The effects of the fair value option under IAS 39 on the volatility of bank earnings. *Journal of International Accounting Research* 10 (1), 85-108.
- Ghozali, I. (2009). Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics* (4th Edition ed.). New York, United States of America: Mc Graw Hill.
- Guo, Q., & Matovu, M. (n.d.). The Impact of Accounting Regulatory Change on Banks: A Study on the Reclassification of Financial Assets.
- Healy, Paul M., Wahlen, James M. (1999). A Review Of The Earnings Management Literature and It's Implications for Standard Setting. *Accounting Horizon*:365-383.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006). Jakarta: Buletin Teknis IAI No.4.
- Institut Akuntan Indonesia. (2007). Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (Salemba Empat).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1967). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, V.3, No.4, pp.305-360.
- Keown, A. J., Martin, J. D., Petty, J. W., & Scott Jr, D. F. (2008). *Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan* (10 ed., Vol. 1). (M. P. Widodo, Trans.) PT. Indeks.
- Kholmy, K., & Ernstberger, J. (2010). Reclassification of Financial Instruments In the Financial Crisis: Empirical Evidence from European Banking Sector. Working Paper, Ruhr-University Bochum.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2011). *Intermediate Accounting (IFRS ed., Vol. 1)*. USA: Wiley.
- Lifschutz, Shilo. (n.d.). The Effect of SFAS 115 On Earnings Management In The Banking Industry. *The Journal of Applied Business Research* Vol.18, No.4.
- Martani, Dwi. Blog Staff Universitas Indonesia. Diakses pada Mei, 2012, melalui <http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/03/PSAK-50-dan-55-overview.pdf>.
- Penman, S.H. (2003). *Financial Statement Analysis and Security Valuation*. Second Editon: McGraw Hill.



- Quagli, A., & Ricciardi, M. (2010). The IAS 39-October 2008 Amandement as Another Opportunity of Earnings Management: an Analysis of European Banking Industry. Working Paper, University of Genoa.
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2011). Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases (10 ed.). USA: Wiley.
- Scott, W. R. (2012). Financial Accounting Theory (6 ed.). Toronto, Canada: Pearson.
- Sekaran, Uma. (2010). Research Methods for Business, 5th edition. Jakarta: Salemba Empat.
- Sturk, M., Evertsson, V., & Marina. (2010, June). Reclassification of Financial Instruments In the Nordic Banks Financial Statements of 2008 and 2009. Thesis of Business Administration .
- Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2010). Analisis Laporan Keuangan (Financial Statement Analysis) (10 ed., Vol. 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Sunarto. (2009, Februari). Teori Keagenan dan Manajemen Laba. Kajian Akuntansi , 13-28.
- Tandelo, B. V., & Vanstraelen, A. (2005). Earnings Management Under German GAAP versus IFRS. European Accounting Review, 14(1):155-180.

Lampiran 1.

Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Jenis Variabel	Nama Variabel	Pengukuran
Variabel Terikat	Reklasifikasi Aset Keuangan (RECLASS)	Variabel <i>dummy</i> dengan nilai 1 untuk bank yang melakukan reklasifikasi, dan 0 sebaliknya
Variabel Bebas	Income Smoothing (IS)	Variabel <i>dummy</i> , dengan kriteria 1 jika perusahaan diklasifikasikan sebagai perata laba (Indeks <i>income smoothing</i> <1), dan 0 sebaliknya.
	Manajemen Laba (EM)	Koefisien korelasi perubahan <i>operating accruals</i> dan perubahan dalam <i>net cash flows</i> dikurangi <i>operating activities</i> .
Variabel Kontrol	Kinerja Perusahaan (ROA)	Nilai ROA yang dilaporkan perusahaan
	Manajemen Laba Setelah Penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) (POST_EM)	Variabel POST dikalikan dengan variabel EM.
	Ukuran Perusahaan (SIZE)	Logaritma natural total aset
	PSAK No.55 (Revisi 2006) (POST)	Variabel <i>dummy</i> dengan nilai 1 untuk periode setelah penerapan PSAK No.55 (revisi 2006), dan 0 sebaliknya

Lampiran 2.

Tabel 4.1.
Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah bank yang terdaftar di BEI hingga tahun 2011	32
Periode pengamatan	4
Jumlah pengamatan awal	128
Laporan keuangan tidak lengkap	(30)
<i>Outliers</i>	(5)
Jumlah pengamatan setelah <i>outliers</i>	93

Sumber: Data diolah

Lampiran 3.

Tabel 4.2.
Frekuensi Variabel RECLASS dan IS

	Frequency	Percent
Reclass	15	16.1
Non Reclass	78	83.9
Total	93	100.0

	Frequency	Percent
Smoother	35	37.6
Non Smoother	58	62.4
Total	93	100.0

Sumber: *Output SPSS*, diolah kembali

Tabel 4.3.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EM	93	-1.00	.94	-.0600	.53398
ROA	93	-52.09	4.93	.9888	6.01799
POST_EM	93	.00	20.13	9.4311	8.70004
SIZE	93	14.12	20.13	17.0729	1.74880
Valid N (listwise)	93				

Sumber: *Output SPSS*, diolah kembali

Tabel 4.4.
Statistik Deskriptif (Kategori RECLASS)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EM	15	-.67	.94	-.0487	.53833
ROA	15	-52.09	4.93	2.7853	1.00644
POST_EM	15	.00	19.92	6.1425	9.08148
SIZE	15	14.27	19.92	18.6887	1.46011
Valid N (listwise)	15				

Sumber: *Output SPSS*, diolah kembali

Tabel 4.5.
Statistik Deskriptif (Kategori NON-RECLASS)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EM	78	-1.00	.92	-.0622	.53398
ROA	78	-52.09	4.93	.6433	6.50673
POST_EM	78	.00	20.13	10.0635	8.53982
SIZE	78	14.12	20.13	16.7622	1.63097
Valid N (listwise)	78				

Sumber: *Output SPSS*, diolah kembali

Lampiran 4.

Tabel 4.5.
Classification Plot

Observed		Predicted		
		RECLASS		Percentage Correct
		NON-RECLASS	RECLASS	
RECLASS	NON-RECLASS	76	2	97.4
	RECLASS	4	11	73.3
Overall Percentage				93.5

Sumber: *Output SPSS*, diolah kembali

Tabel 4.6.
Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	5.821	8	.667

Sumber: *Output SPSS*, diolah kembali

Tabel 4.7.
Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	36.017	.391	.667

Sumber: *Output SPSS*, diolah kembali

Lampiran 5.

Tabel 4.8.
Hasil Estimasi Model Penelitian

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
IS	3.251	1.094	8.828	1	.003*	25.828
EM	1.712	1.016	2.840	1	.092***	5.538
ROA	1.678	.644	6.795	1	.009*	5.354
Step 1 ^a POST	36.230	16.718	4.696	1	.030**	542627112
POST_EM	-2.161	.944	5.238	1	.022**	0
SIZE	2.100	.826	6.459	1	.011**	.115
Constant	-43.545	15.829	7.568	1	.006	8.164
						.000

a. Variable(s) entered on step 1: IS, EM, ROA, POST, POST_EM, SIZE.

*) Signifikan pada level 1%

**) Signifikan pada level 5%

***) Signifikan pada level 10%

Sumber: *Output* SPSS, diolah kembali

Study Komparasi Praktik *IFRS Disclosure Compliance* di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia

ISNA YULIANTI
AGUNG NUR PROBOHUDONO*
Universitas Sebelas Maret

Abstract: *The aim of this study is to determine the level of the disclosure of IFRS compliance and the factors affecting it through the corporate governance (CG), size, board independence, and country as the independent variable as well as profitability, leverage, and the types of auditors as the control variable. The companies used as the research analysed Indonesia, Malaysian, Singaporean, and Australian property services and real estate company as research sample.*

The measurement of IFRS compliance disclosure in this study uses IFRS disclosure index checklist initiative by Deloitte in 2012 by using the items in IFRS 7 which amounts to 96 items. The research sample used in this study are 40 companies of property and real estate from four different countries, those are: Indonesia, Malaysia, Singapore, and Australia which are listed on the Stock Exchange of each country in the year of 2009-2011. Total of 120 firm year annual reports are analysed in this research.

The average of IFRS compliance is 47.925 percent, and increase every year from 2009 to 2011. The results of descriptive analysis indicated that the level of the IFRS disclosure compliance in property services companies and real estate in these four countries are in the low level. As the purposes of this study, the results of multiple regression test show that corporate governance and board independent statistically influenced the level of IFRS disclosure. Whereas, the control variables independent auditors' type also affect the level of IFRS disclosure compliance.

Keywords: *IFRS, Disclosure, Property and Real Estate Companies, Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia.*

* Corresponding author: mustdownnow@gmail.com

I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan International Financial Reporting Standard (IFRS) yang dapat diukur melalui *corporate governance* (CG) perusahaan, *size*, *board independent*, dan *country* pada perusahaan property dan real estate di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia.

IFRS adalah satu set standar akuntansi internasional untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk berkomunikasi, dan stakeholder untuk membandingkan informasi keuangan perusahaan di seluruh dunia (Patro dan Gupta 2012). Standar ini dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Tujuannya adalah untuk membuat perbandingan internasional semudah mungkin. Menurut sebuah laporan dari PricewaterCoopers (2011a), hingga September 2011, lebih dari 100 negara mengizinkan atau mengharuskan penggunaan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan (Coe dan Delaney 2012).

IFRS memiliki potensi untuk memfasilitasi perbandingan lintas batas serta meningkatkan transparansi pelaporan, juga memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami hasil keuangan entitas global (Horton et al 2008). Soderstrom dan Sun (2007) mengatakan bahwa perbedaan lintas negara dalam kualitas akuntansi akan tetap mengikuti adopsi IFRS karena kualitas akuntansi adalah fungsi dari pengaturan kelembagaan secara keseluruhan perusahaan, termasuk dalam sistem hukum dan politik dari negara dimana perusahaan berada. Selain itu dengan adanya standar internasional yaitu IFRS, juga bisa dapat untuk meningkatkan perbandingan pelaporan keuangan internasional yang lebih berkualitas. Menurut Gamayumi (2009), untuk memastikan bahwa laporan keuangan intern perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi yang berkualitas tinggi dapat dilihat melalui:

1. Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan
2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS
3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna

Pengungkapan adalah bagian penting dari praktek pelaporan perusahaan (Adina dan Ion 2008). Informasi merupakan jantung dari pasar modal yang harus berfungsi dengan baik. Informasi ini harus dapat diandalkan, diperbandingkan, dimengerti, dan pelaporan perusahaan berkualitas tinggi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan efisiensi pasar. Gibbins, Richardson dan Waterhouse (1992) juga berpendapat bahwa organisasi dapat mengungkapkan informasi untuk mendukung efisiensi pertukaran dan produksi, tetapi mereka juga mengungkapkan informasi untuk membangun kepatuhan mereka dengan nilai-nilai sosial yang tercermin dalam peraturan dan norma-norma informal.

Penelitian yang dilakukan Miihkanen (2008) yang meneliti apakah perusahaan berperilaku lebih mirip dengan pengungkapan voluntary atau mandatory ketika perusahaan yang diteliti mengikuti rekomendasi pengungkapan Center for Economic and Social Rights (CESR) untuk transisi IFRS. Hasil dari penelitian tersebut adalah Insentif pengungkapan murni untuk manajer dan factor CG perusahaan terbukti berdampak pada pengungkapan yang direkomendasikan. Size, prospek pertumbuhan, dan board independent berhubungan positif dengan pengungkapan, sedangkan leverage dan pengungkapan berhubungan negative.

Hodgdon, Tondkar, Harless, dan Adhikari (2008) meneliti mengenai hubungan antara analisis kesalahan perkiraan laba dengan kepatuhan terhadap pengungkapan IFRS. Penelitian tersebut menggunakan sampel 89 perusahaan di 13 negara pada periode 1999-2000. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesalahan perkiraan berhubungan negative dengan

kepatuhan IFRS. Kepatuhan pengungkapan IFRS juga mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kemampuan analisis keuangan untuk memberikan perkiraan yang lebih akurat.

Penelitian lain dilakukan Houque, Monem, dan Zijl (2012) yang meneliti hubungan kualitas pemerintahan di berbagai negara terhadap pemilihan auditor dan juga interaksinya terhadap adopsi IFRS di negara tersebut. Penelitian tersebut menggunakan sampel 142.193 perusahaan di 46 negara berbeda di seluruh dunia periode 1998-2007. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan di setiap negara memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan auditor big 4 pada perusahaan, ditambah dengan keputusan adopsi IFRS di setiap negara tersebut.

Di Indonesia juga terdapat beberapa penelitian mengenai pengungkapan IFRS, diantaranya penelitian dari Utami, Suhardjanto, dan Hartoko (2012), serta dari Prawinandi, Suhardjanto, dan Triatmoko (2012). Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pengaruh struktur *Corporate Governance* terhadap pengungkapan wajib IFRS.

Motivasi dari penelitian ini adalah mendapatkan pengetahuan terhadap kepatuhan pengungkapan IFRS pada perusahaan property dan real estate di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia serta faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

II. Rerangka Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

A. Kepatuhan Pengungkapan IFRS (Variabel Dependen)

Pengungkapan akuntansi dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan serta asumsi, estimasi, dan ketidakpastian. Seperti yang dikemukakan oleh Kieso *et al* (2007) bahwa salah satu prinsip dalam *conceptual framework of financial reporting* adalah *full disclosure*, yaitu pengungkapan lengkap semua informasi

yang relevan. Dalam menentukan informasi apa yang harus dilaporkan, perusahaan mengikuti praktek umum dalam memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna informasi. Pengungkapan informasi-informasi perusahaan dapat dilihat dari berbagai media, salah satunya dari *annual report* perusahaan. *Annual report* dapat menjadi salah satu sumber yang paling penting untuk mendapatkan pengungkapan informasi perusahaan (Chau dan Gray 2010).

Menurut Suhardjanto dan Miranti (2009), terdapat dua sifat pengungkapan yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan atau standar (*required/regulated/mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang. Sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan (Adina dan Ion, 2008).

Pengungkapan dan transparansi informasi perusahaan diharapkan dapat mengatasi setiap permasalahan seperti yang diungkapkan dalam teori agensi yang lebih dikenal sebagai *Asymmetric Information*, yaitu informasi yang tidak sama antara principal dan agen (Jensen dan Meckling 1976). Healy dan Palepu (2001) berasumsi bahwa agen memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, terutama didorong oleh kepentingan diri agen rasional tentang reputasi dan remunerasi mereka. Selain itu pengungkapan juga dapat mengurangi biaya keagenan dengan meminimalkan kapasitas manajer untuk menyesuaikan pengungkapan data (Marshall dan Weetman 2002).

Pengungkapan voluntary perusahaan serta faktor-faktor penentunya telah menjadi hal yang menarik bagi para peneliti akuntansi sejak tahun 1970-an (Chau dan Gray 2010). Sampai saat ini penelitian mengenai pengungkapan semakin bertambah banyak, ditambah dengan keluarnya standar baru yang disebut IFRS yang mengharuskan setiap perusahaan

untuk mengungkapkan informasi-informasinya yang dibutuhkan oleh para pengguna informasi tersebut.

B. Corporate Governance (Variabel Independen)

Corporate governance merupakan faktor yang membawa kualitas yang lebih tinggi untuk kinerja perusahaan dan terutama informasi yang disampaikan oleh manajemen (Khodadadi *et al* 2010). Dalam penelitiannya di China, Gao dan Kling (2012) menemukan bahwa peningkatan tata kelola internal menyebabkan kepatuhan yang lebih tinggi dengan persyaratan pengungkapan. Lingkungan pemerintah eksternal, diukur dengan tingkat pengembangan kelembagaan yang memiliki efek positif pada kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan pengungkapan. “Transparansi” adalah aspek lain yang banyak peneliti tekankan sebagai elemen kunci dari “good” *corporate governance* (Taylor 2000).

Dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI 2002) menerangkan mengenai empat unsur penting dalam *corporate governance* menurut OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), yaitu:

1. *Fairness* (Keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. *Transparency* (Transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam *Two Tiers System*)

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penerapan corporate governance yang baik akan meningkatkan penerapan perusahaan terhadap pengungkapan informasi perusahaan sesuai dengan IFRS.

H₁ : Corporate governance berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

C. Karakteristik Perusahaan (Variabel Independen)

Para peneliti menemukan bahwa tingkat pengungkapan dipengaruhi oleh faktor budaya dalam suatu negara (Jaggi dan Low 2000) dan beberapa karakteristik spesifik perusahaan seperti ukuran, industry, status listing, profitabilitas, dan auditor. Karakteristik perusahaan dapat menjadi petunjuk dan prediktor kualitas pengungkapan (Lang dan Lundholm 1993). Setiap perusahaan memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda antara satu entitas dengan entitas lainnya. Karakteristik yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini meliputi: *Country*, *Size*, dan *Board Independent*.

Country

Country menjadi salah satu faktor pengaruh pengungkapan informasi perusahaan, terutama untuk penelitian yang melibatkan berbagai negara untuk diperbandingkan. Pemilihan negara dengan tanggal adopsi IFRS yang sama dan fitur lingkungan yang sebanding menjadi bagian penting karena ini akan mengurangi pengaruh variabel eksternal yang tidak terkendali pada temuan penelitian IFRS (Ruland *et al* 2007), selain itu faktor perbedaan negara dapat dihubungkan dengan perubahan kebijakan akuntansi setiap negara

yang dianalisis dalam mandatory adopsi IFRS (Leopold dan Omar 2012). Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Country berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Size

Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai proksi untuk volatilitas aset perusahaan, karena perusahaan-perusahaan kecil cenderung untuk beroperasi dalam industry atau area bisnis yang relatif lebih *volatile* (Chung *et al* 2002). Cowen *et al* (1987) juga mengatakan bahwa Perusahaan yang lebih besar akan berada dalam tekanan yang lebih besar pula pada pengungkapan aktivitas mereka untuk melegitimasi bisnis. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar juga memiliki aktivitas yang lebih banyak, pengaruh kepada masyarakat yang lebih besar, pemegang saham yang peduli terhadap program perusahaan, serta laporan tahunan yang lebih efisien dalam pengkomunikasian informasi kepada *stakeholder*.

Penelitian sebelumnya (Probohudono *et al* 2013) mengadopsi ukuran perusahaan sebagai faktor potensial yang menjelaskan hubungan positif antara pengungkapan resiko. Selain itu Mihkinen (2008) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan yang direkomendasikan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₃ : Size berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Board Independent

Penelitian yang dilakukan Cheng dan Courtenay (2006) mengungkapkan bahwa dewan dengan proporsi independen yang lebih besar, direktur non-eksekutif (proksi untuk efektivitas dewan monitoring) secara positif dan signifikan berhubungan dengan tingginya tingkat pengungkapan sukarela. Serupa dengan penelitian yang dilakukan Mihkinen (2008) yang

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Board Independent dengan pengungkapan perusahaan.

H₄ :Board independent berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

III. Metode Penelitian

A. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa efek di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia pada periode 2009 sampai 2011. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 40 perusahaan di sektor jasa property dan real estate, sehingga total sampel yang diambil adalah sebesar 120 annual report perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan adalah perusahaan di sektor jasa property dan real estate yang menerbitkan *annual report* dan menyampaikan data secara lengkap sesuai dengan informasi yang dibutuhkan serta menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa pengantar.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari *annual report* perusahaan jasa property dan real estate yang terdaftar di bursa efek setiap negara tahun 2009 sampai 2011. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari situs <http://www.idx.co.id>, <http://bursamalaysia.com>, <http://www.sgx.com>, dan <http://www.asx.com.au>.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen (*IFRS Disclosure Compliance/ Tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS*)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS oleh perusahaan. Item pengungkapan diidentifikasi berdasarkan *IFRS Presentation and Disclosure Checklist* dari Deloitte (www.iasplus.com). *Checklist* tersebut telah digunakan pada penelitian sebelumnya, misalnya Utami *et al.* (2012) yang juga menggunakan *checklist* dari Deloitte untuk diterapkan dalam pengukuran tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Pengungkapan IFRS diukur dengan menggunakan teknik *scoring*, yaitu jika item tersebut diungkapkan dalam perusahaan diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan diberi skor 0. Dalam penelitian ini IFRS yang digunakan untuk pengukuran pengungkapan yaitu menggunakan IFRS 7 mengenai pengungkapan *Financial Instruments* yang berjumlah 97 item.

2. Variabel Independen

a. *Corporate Governance*

Corporate governance diukur dengan menggunakan teknik *scoring*, dimana kami mengadopsi item *Corporate Governance Score* (CGS) milik Taylor *et al.* (2010). Dalam *Corporate Governance Score* ini terdapat 13 berbeda yang memiliki bobot yang sama. Perusahaan akan mendapat skor CGS jika *corporate governance* perusahaan memenuhi item yang terdapat di CGS. Rincian CGS dapat dilihat pada tabel 1 di lembar lampiran.

(Insert Tabel 1)

b. Country

Penelitian ini variabel *country* diukur dengan menggunakan pengukuran kategorikal yang di dalamnya terdapat empat kategori yang berbeda yaitu: 1 = Indonesia, 2 = Malaysia, 3 = Singapura, dan 4 = Australia.

c. Size

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan positif antara tingkat kepatuhan pengungkapan dengan ukuran perusahaan. Kanto dan Schadewitz (1997) menemukan bahwa pengungkapan sukarela berhubungan dengan ukuran perusahaan. Miihkinen (2008) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan perusahaan.

d. Board Independent

Struktur perusahaan pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu *one-tier system* dan *two-tier system*. Sistem *one-tier* digambarkan sebagai sebuah struktur dimana hanya ada pimpinan tanpa adanya pemisahan tersendiri untuk fungsi pengawasan; jikapun ada, tidak ada batasan yang jelas antara keduanya. Sedangkan untuk konsep *two-tier* terdapat badan pengawas yang mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin (wikipedia 2013).

Chen dan Jaggi (2000) menemukan bahwa ada hubungan positif antara proporsi direktur independen pada dewan perusahaan di perusahaan Hong Kong dan kelengkapan pada pengungkapan perusahaan. Cheng dan Courtenay (2006) menyatakan bahwa dewan dengan proporsi independen yang lebih besar, direktur non-eksekutif

(proksi untuk efektivitas dewan monitoring) secara positif dan signifikan berhubungan dengan tingginya tingkat pengungkapan sukarela.

3. Variabel Kontrol

a. Profitabilitas

Pengungkapan informasi profitabilitas perusahaan untuk menunjukkan kontribusi mereka terhadap masyarakat (Haniffa dan Cooke 2010). Namun tidak seperti *size*, hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan perusahaan menunjukkan hasil yang inkonsisten pada penelitian-penelitian terdahulu (Mangos dan Lewis 1995). Menurut Haniffa dan Cooke (2005) sebuah penjelasan yang mungkin untuk hubungan positif antara pengungkapan perusahaan dan profitabilitas adalah bahwa manajemen memiliki kebebasan dan fleksibilitas untuk melakukan dan mengungkapkan program tanggung jawab sosial yang lebih luas kepada para pemegang saham.

b. Leverage

Menurut Utami *et al* (2012), *Leverage* merupakan pengukur besarnya aktiva yang di biayai dengan utang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2012) mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara leverage dengan tingkat pengungkapan mandatory IFRS. Selain itu penelitian yang juga dilakukan oleh Miihkinen (2008) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negative antara leverage keuangan dengan pengungkapan perusahaan. Dampak negatif leverage keuangan memberikan bukti bahwa perusahaan dengan leverage tinggi mungkin memiliki insentif untuk menghindari pengungkapan public dengan lebih mengandalkan pembiayaan utang.

c. Auditor

Pada umumnya terdapat dua tipe dari independensi auditor, aktual dan independen. Independensi dianggap sebagai atribut penting dari auditor eksternal (Law 2008), hal ini dikarenakan untuk menjaga kepercayaan dari para pemakai laporan yang nantinya akan digunakan untuk membuat keputusan. Menurut Houqe *et al* (2012), jika Big 4 dapat mewakili audit yang berkualitas tinggi maka diharapkan dapat untuk melihat peningkatan pangsa pasar untuk auditor big 4 yang diikuti dengan setelah pengadopsian IFRS di negara dengan kualitas pemerintahan yang kuat.

Perusahaan-perusahaan akuntansi dan audit diklasifikasikan menjadi dua kelompok: perusahaan besar dan kecil (Mutawaa 2010). Perusahaan audit besar adalah empat perusahaan jasa akuntansi internasional dan profesional yang biasa disebut sebagai Big 4. Sementara perusahaan audit kecil adalah mereka yang beroperasi di dalam negeri. Empat firma ini diantaranya, Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, dan KPMG. Variabel ini diukur melalui penggunaan jasa audit big 4 di setiap perusahaan. Kami melakukan indeks disetiap perusahaan yaitu: 1 jika perusahaan tersebut menggunakan jasa big 4 dan 0 jika perusahaan tersebut tidak menggunakan jasa big 4 (non-big 4).

Analisi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari statistic deskriptif dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS *release* 19. Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$\text{IFRS} = b_0 + b_1 \text{CG}_1 + b_2 \text{COUNT}_2 + b_3 \text{SIZE}_3 + b_4 \text{BINDP}_4 + b_5 \text{PROF}_5 + b_6 \text{LEV}_6 + b_7 \text{AINDP}_7$$

IFRS menunjukkan tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS, CG menunjukkan jumlah dari pengungkapan corporate governance perusahaan, COUNT menunjukkan *country cluster*, SIZE menunjukkan ukuran perusahaan, BINDP menunjukkan proporsi *board independent*, PROF menunjukkan profitabilitas, LEV menunjukkan Leverage, AINDP menunjukkan auditor independen, dan b menunjukkan koefisien regresi.

IV. Hasil dan Pembahasan

Deskriptif Data

(Insert Tabel 2)

Tabel 2 menguraikan ringkasan hasil dari statistik deskriptif dari tahun 2009-2011. Setiap tahun mewakili 40 perusahaan, selama periode 3 tahun dengan jumlah sampel sebanyak 120 laporan tahunan.

Nilai indeks pengungkapan IFRS dari keempat negara yang tergambar di tabel 2, Singapura adalah negara yang memiliki nilai indeks pengungkapan IFRS yang paling tinggi. Lain halnya dengan Indonesia yang selama 3 tahun berturut-turut selalu lebih rendah dari Malaysia, Singapura, dan Australia. Indonesia sendiri dilihat dari tahun 2009 ke 2010 terjadi peningkatan nilai sebesar 3,9%, namun terjadi sedikit penurunan di tahun 2011 sebesar 0,30%. Berbeda dengan di negara Malaysia yang terjadi penurunan di tahun 2010 sebesar 0,30% dan peningkatan di tahun 2011 sebesar 4%. Singapura hampir sama dengan Malaysia yang meningkat di tahun 2010 namun mengalami penurunan di tahun 2011. Dari keempat negara yang paling baik ditunjukkan oleh Australia yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, di tahun 2010 sebesar 1,4% dan 0,65% di tahun 2011.

Sedangkan jika dilihat dari nilai rata-rata indeks IFRS keseluruhan dari waktu ke waktu adalah 47,925 persen, dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan:

1. 46,77 persen pada tahun 2009
2. 48,17 persen pada tahun 2010, dan
3. 48,82 persen pada tahun 2011.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS pada perusahaan jasa property dan real estate di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia adalah masih dalam level rendah (100% sebagai patokan level compliance yang tinggi).

(Insert Tabel 3)

Tabel 3 menggambarkan presentase setiap item dari IFRS 7 yang diterapkan oleh semua perusahaan sampel di tahun 2009-2011. Hasil menunjukkan bahwa di tahun 2009 pengungkapan yang dilakukan semua perusahaan sampel sebesar 48.72%. peningkatan terjadi ditahun 2010 dan 2011 yang masing-masing sebesar 50.18% dan 50.86%.

(Insert Tabel 4)

Statistik deskriptif variabel independent menghasilkan rata-rata rasio *corporate governance* sebesar 0,527 yang ditandai dengan kenaikan di setiap tahunnya dalam periode 2009-2011. Size perusahaan juga mengalami kenaikan selama 3 tahun dan menghasilkan rata-rata sebesar 8,815%. Peningkatan juga terjadi pada variabel *board independent* terutama di tahun 2010, namun lantas mengalami penurunan di tahun berikutnya sebesar 0,019%. Hasil rata-rata dari *board independent* yakni sebesar 0,487. Variabel *leverage* menghasilkan rasio sebesar 0,401 dan profitabilitas sebesar 0,535.

Pengujian Hipotesis

(Insert Tabel 5)

Tabel 5 menunjukkan bahwa dalam periode tiga tahun (2009-2011) nilai *Adjusted R Square* (*Adjusted R₂*) sebesar 0.336. berdasarkan nilai *Adjusted* tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 33.6% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel control, sedangkan sisanya sebanyak 66.4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Nilai F hitung sebesar 9.589 dengan probabilitas 0.000 (*p-value* 0.050). Karena signifikansi lebih kecil dari 0.050, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel *corporate governance*, *country*, *size*, *board independent*, *leverage*, profitabilitas, dan tipe auditor independen mempengaruhi variabel IFRS. Hasil regresi ini menunjukkan tingkatan yang baik karena dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan pengungkapan IFRS.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa *corporate governance*, *country*, *size*, *board independent*, dan *leverage* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS, sedangkan profitabilitas dan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. *Corporate governance* (CG) memiliki *p-value* sebesar 0.025 pada tingkat signifikansi 0.050 dan koefisien positif sebesar 0.175 menunjukkan bahwa *corporate governance* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan IFRS. Hasil uji regresi ini sesuai dengan hipotesis sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama diterima. Menurut Cadbury Report (1992), prinsip utama dari *Good Corporate Governance* adalah: keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas. Sedangkan menurut *Organization for Economic Corporation and Development* atau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*),

transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*responsibility*) (Arifin 2005). Oleh karena itu, dengan adanya *corporate governance* serta penerapan *good corporate governance*, transparansi informasi suatu perusahaan akan diberlakukan secara baik oleh suatu perusahaan sehingga akan meningkatkan tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Country memiliki *p-value* sebesar 0.010 dengan tingkat signifikansi 0.050 dan koefisien sebesar 0.039 menunjukkan bahwa variabel *country* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan IFRS. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima karena sesuai. Hal tersebut bisa disebabkan oleh perubahan keadaan suatu wilayah yang dapat berdampak pada perusahaan-perusahaan di dalamnya. Perubahan itu bisa berasal dari perubahan di bidang ekonomi, politik, teknologi, dan lain-lain.

Size perusahaan memiliki *p-value* sebesar 0.017, berada di bawah 0.050. nilai ini menunjukkan bahwa *size* perusahaan ikut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. Hal ini sesuai dengan hipotesis ketiga sehingga hipotesis ketiga diterima. Penelitian yang dilakukan oleh Mutawaa (2010) yang juga memiliki hasil yang signifikan pada *size* perusahaan terhadap pengungkapan. Melalui hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar perusahaan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Board Independent memiliki *p-value* sebesar 0.007 dengan tingkat signifikansi 0.050 dan koefisien sebesar -0.204 menunjukkan bahwa *board independent* berpengaruh yang negatif terhadap kepatuhan pengungkapan IFRS. Hasil ini sesuai dengan hipotesis sehingga hipotesis keempat diterima. Menurut Fama dan Jensen (1983) bahwa dewan tersusun dari proporsi yang lebih tinggi dari independen, direksi luar (direksi yang tidak terlibat dalam operasi langsung dari perusahaan) memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan direksi. Direksi independen memiliki insentif untuk menjalankan pengendalian keputusan mereka untuk mempertahankan *reputational capital*. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya

proporsi *board independent* yang besar akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan IFRS, yang dikarenakan adanya monitoring yang kuat dari dewan direksi independen sehingga transparansi perusahaan dapat dijalankan.

Leverage sebagai variabel kontrol memiliki *p-value* sebesar 0.021 yang berada di bawah nilai signifikansi 0.050. Nilai ini menunjukkan bahwa leverage juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Profitabilitas juga diambil sebagai variabel control, memiliki *p-value* 0.130 yang berada jauh diatas nilai signifikansi 0.050. Nilai tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2012) serta penelitian Al-Mutawaa dan Hewaidy (2010) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan IFRS.

Tipe auditor independen sebagai variabel kontrol memiliki *p-value* sebesar 0.095 dengan tingkat signifikansi 0.050 dan koefisien sebesar -0.047 yang menunjukkan bahwa tipe auditor independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IFRS. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Utami *et al* (2012) yang juga menemukan bahwa tipe auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan IFRS. Hal ini bisa disebabkan oleh subjektivitas dan tingkat independensi dari seorang auditor itu sendiri. Tingkat pengungkapan IFRS yang rendah tidak akan terdeteksi jika auditor secara individual memiliki integritas rendah sekalipun auditor tersebut berasal dari KAP *Big 4* (Utami 2012).

V. Kesimpulan dan Keterbatasan Penelitian

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks IFRS pada perusahaan property dan real estate di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia dari waktu ke waktu adalah sebesar 47,925%, dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berikut adalah rincian perbandingan tiap tahun:
 - a. Tahun 2009, nilai rata-rata indeks IFRS sebesar 46,77%
 - b. Tahun 2010, nilai rata-rata indeks IFRS sebesar 48,17%, dan
 - c. Tahun 2011, nilai rata-rata indeks IFRS sebesar 48,82%.
2. Menurut perbandingan di empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia, Singapura adalah negara yang memiliki nilai indeks kepatuhan pengungkapan IFRS yang paling tinggi. Sedangkan Indonesia adalah negara yang memiliki indeks kepatuhan pengungkapan IFRS yang paling rendah selama tiga tahun berturut-turut pada tahun sampel penelitian.
3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel yang terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS adalah *corporate governance*, *country*, *size*, dan *board independent* sebagai variabel independen dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Sedangkan variabel lainnya yaitu profitabilitas dan tipe auditor tidak mempengaruhi adanya kepatuhan pengungkapan IFRS perusahaan.

Implikasi

Penelitian ini menunjukkan adanya variasi tingkat pengungkapan IFRS dari waktu ke waktu, dan membandingkan empat negara. Temuan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi bagi perusahaan property dan real estate agar dapat lebih mengungkapkan informasinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal mengenai pengungkapan dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan atas standar pelaporan baru.

VI. Daftar Pustaka

- Adina, P. dan Ion, P. 2008. Aspect Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure.
- Al-Mutawaa, A. dan Hewaidy, A.M. 2010. Disclosure Level and Compliance with IFRS: An Empirical Investigation of Kuwaiti Companies. *The International Business and Economics Research Journal Vol.9 No.5*.
- Arifin. 2005. Peran Akuntans Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia.
- Bayerlein, L. dan Farooque, O.A. 2012. Influence of A Mandatory IFRS Adoption on Accounting Practice Evidence From Australia, Hong Kong and The United Kingdom. *Asian Review of Accounting Vol.20 No.2 pp. 93-118*.
- Chau, G dan Gray, S.J. 2010. Family Ownership, Board Independence and Voluntary Disclosure: Evidence from Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation Vol. 19 pp. 93-109*.
- Chen, C.J.P., dan B. Jaggi. 2000. Association Between Independent Non-Executive Directors, Family Control and Financial Disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy 19 (4-5):285-310*.
- Cheng, E.C.M. dan Courtenay, S.M. 2006. Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary Disclosure. *The International Journal of Accounting Vol.41 pp. 262-289*.
- Chung, R., Firth, M., dan Kim, J.B. 2002. Institutional Monitoring and Opportunistic Earnings Management. *Journal of Corporate Finance Vol.8 pp. 29-48*.
- Coe, M. dan Delaney, J. 2013. Trabeck Prepares for IFRS: An IFRS Case Study. *Journal of Accounting Education 31 53-67*.
- Cowen, S.S., Ferreri, L.B., dan Parker, L.D. 1987. The Impact of Corporate Characteristics on Social Responsibility Disclosure: A Typology and Frequency-Based Analysis. *Accounting Organizations and Society, Vol. 12, No. 2, pp. 111-122*.

- Deloitte Touche Tohmatsu. 2012. *International Financial Reporting Standards. Presentation and Disclosure Checklist 2012*. www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2012/ifrs-compliance-presentation-and-disclosure-checklist-2012. 31 Mei 2013.
- FCGI. 2002. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) Jilid II.
- Gamayumi, R.R. 2009. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju Internasional Financial Reporting Standards. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 14 No.2*.
- Gao, Lei dan Kling, Gerhard. 2012. The Impact of Corporate Governance and External Audit on Compliance to Mandatory Disclosure Requirements in China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation Vol.21 pp. 17-31*.
- Gibbins, M., Richardson, A. dan Waterhouse, J. 1992. The Management of Financial Disclosure: Theory and Perspectives. Research monograph no. 20. Vancouver: The Canadian Certified General Accountants Research Foundation.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. 2010. *Basic Econometrics*. Eleventh Edition. New York: Mc. Graw-Hill.
- Haniffa, R.M. dan T.E. Cooke. 2005. The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy Vol. 24 pp. 391-430*.
- Healy P.M., Palepu K.G. 2001. Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and The Capital Markets: A Review of The Empirical Disclosure Literature. *Journal of Accounting and Economics Vol.31 pp. 405-440*.
- Hodgon, C., Tondkar, R.H., Harless, D.W., dan Adhikari, A. 2008. Compliance with IFRS Disclosure Requirements and Individual Analysts' Forecast Errors. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation Vol.17 pp. 1-13*.
- Horton, Joanne., Serafeim, G. dan Serafeim, I. 2008. Does Mandatory IFRS Adoption Improve The Information Environment .
- Houge, M.N., Monem, R.M., dan Zijl, T.V. 2012. Government Quality, Auditor Choice and Adoption of IFRS: A Cross Country Analysis. *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting Vol. 28 pp. 307-316*.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Komisaris>. Komisaris. Diakses 6 Juni 2013.
- Jaggi, Bikki dan Low, P.Y. 2000. Impact of Culture, Market Forces, and Legal System on Financial Disclosures. *The International Journal of Accounting Vol.35 No.4 pp.495-519*.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finanvial Economics Vol. 3 No. 4 pp. 305-360*.
- Kanto, A.J dan Schadewitz, H.J. 1997. A Multidimensional Model for The Disclosure Policy of A Firm. *Scand. J. Mgmt. Vol. 3, No.3, pp. 229-249*.
- Khodadadi, V., Khazami, S. dan Aflatooni, A. 2010. The Effect of Corporate Governance Structure on The Extent of Voluntary Disclosure in Iran. *Business Intelligence Journal Vol.3 No.2*.
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J., dan Warfield, T.D. 2011. Intermediate Accounting IFRS Edition Vol.1. USA: John Wiley & Sons.
- Lang, M. dan Lundholm, R. 1993. Cross-Sectional Determinants of Analyst Ratings of Corporate Disclosures. *Journal of Accounting Research, Vol. 31, No.2*.



- Latridis, G.E. 2011. Voluntary IFRS Disclosures: Evidence From The Transition From UK GAAP to IFRSs. *Managerial Auditing journal Vol. 27 No. 6 pp. 573-597.*
- Law, Philip. 2008. An Empirical Comparison Of Non-Big 4 and Big 4 Auditors' Perceptions of Auditor Independence. *Managerial Auditing Journal Vol. 23 No. 9 pp. 917-934.*
- Mangos, N.C. dan Lewis, N.R. 1995. A Socio-Economic Paradigm for Analysing Managers' Accounting Choice Behaviour. *Accounting, Auditing & Accountability Journal Vol.8 No.1 pp.38-62.*
- Marshall, A.P. dan Weetman, P. 2002. Information Asymmetry in Disclosure of Foreign Exchange Risk Management: Can Regulation Be Effective. *Journal of Economics & Business Vol.54 pp.31-53.*
- Miihkinen, A. 2008. Efficiency of Authoritative Disclosure Recommendations Evidence From IFRS Transition Disclosure in Finland. *Journal of Financial Regulation and Compliance Vol. 16 No. 4 pp. 384-413.*
- Patro, A. dan Gupta, V.K. 2012. Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Accounting Curriculum in India-An Empirical Study. *Procedia Economics and Finance Vol.2 pp.227-236.*
- Prawinandi, W., Suhardjanto, D. dan Triatmoko, H. 2012. Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.*
- Probohudono, A.N., Tower, G. dan Rusmin, R. 2013. Risk Disclosure During The Global Financial Crisis. *Social Responsibility Journal Vol. 9 No. 1 pp. 124-136.*
- Ruland, W., Shon, J. dan Zhou, P. 2007. Effective Controls for Research In International Accounting. *Journal of Accounting and Public Policy Vol.26 pp.96-116.*
- Soderstrom, N.S. dan Sun, K.J. 2007. IFRS Adoption and Accounting Quality: A Review
- Suhardjanto, D. dan Miranti, L. 2009. Indonesian Environmental Reporting Index dan Karakteristik Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 13.*
- Taylor, D.W. 2000. Facts, Myths and Monsters: Understanding the Principles of Good Governance. *The International Journal of Public Sector Management Vol.13 No.2 pp.108-124.*
- Taylor, G., Tower, G., dan Neilson. 2010. Corporate Communication of Financial Risk. *Accounting & Finance Journal Vol.50 pp.417-446.*
- Utami, W.D., Suhardjanto, D. dan Hartoko, S. 2012. Investigasi Dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governnace. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.*

VII. Lampiran

Tabel 1
Item Corporate Governance Score (CGS)

No Item	Deskripsi Item Corporate Governance
CG1	Apakah ketua dewan direksi (di Indonesia disebut dewan Komisaris) independen?
CG2	Apakah peran presiden/ketua dan CEO dilakukan oleh orang yang berbeda?
CG3	Apakah dewan direksi sebagian besar (> 70 Persen) terdiri dari direksi independen?
CG4	Apakah komite nominasi memiliki kebijakan untuk pengangkatan direksi?
CG5	Apakah dewan mengadopsi kode etik formal yang berkaitan dengan perilaku pribadi direksi dan eksekutif utama yang berkaitan dengan transaksi orang dalam, kerahasiaan, konflik kepentingan dan pemanfaatan peluang perusahaan (property, informasi, posisi)?
CG6	Apakah perusahaan memiliki rencana formal, kebijakan atau prosedur dalam hal pembayaran remunerasi <i>equity based</i> kepada direksi dan eksekutif utama?
CG7	Apakah perusahaan memiliki kebijakan remunerasi yang menguraikan hubungan antara remunerasi yang dibayarkan kepada direksi dan eksekutif utama dan kinerja perusahaan?
CG8	Apakah komite audit memiliki setidaknya satu anggota yang memiliki keahlian keuangan (yaitu seorang akuntan yang berkualitas atau ahli keuangan lain dengan pengalaman mengenai akuntansi dan keuangan)?
CG9	Apakah dewan menaerakan suatu kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi formal yang berkaitan dengan pengawasan dan manajemen risiko dan pengendalian internal?
CG10	Apakah CEO/ CFO menyatakan bahwa manajemen risiko perusahaan, kepatuhan internal, dan sistem control beroperasi dengan efektif f]dan efisien?
CG11	Apakah perusahaan memiliki piagam komite audit?
CG12	Apakah perusahaan memiliki tulisan formal mengenai kebijakan pengungkapan selanjutnya?
CG13	Apakah perusahaan memiliki komite keuangan, piagam atau kebijakan?

Sumber: Jurnal “*Corporate Communication of Financial Risk*” oleh Grantley Taylor, Greg Tower, dan John Neilson (Hal: 11).

Tabel 2
Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan Pengungkapan IFRS

	2009	2010	2011	Pooled
Indonesia	37.5000	41.4000	41.1000	40.000
Malaysia	41.9000	41.6000	45.6000	43.033
Singapura	58.2000	60.1000	57.7000	58.667
Australia	49.5000	49.6000	50.9000	50.000
Total	46.7750	48.1750	48.8250	47.925

Tabel 3

Presentase Indeks Pengungkapan IFRS

	IFRS Disclosure Index	Jumlah Item	Disclosure			
			2009	2010	2011	Pooled
	IFRS 7:6	2 item	90%	97.5%	92.5%	93.33%
	Signifikansi instrumen keuangan atas posisi keuangan dan kinerja					
	IFRS 7:7	1 item	100%	100%	98%	99.33%
	Laporan posisi keuangan					
	IFRS 7:8	13 item	43.46%	39.81%	44.03%	42.43%
	Collateral					
	IFRS 7:15	4 item	41.25%	45.62%	48.75%	45.21%
	Laporan laba rugi komprehensif					
	IFRS 7:20	9 item	46.67%	46.67%	46.67%	46.67%
	Pengungkapan lainnya					
	IFRS 7:21	2 item	90%	90%	86.25%	88.75%
	Fair value					
	IFRS 7:25	1 item	62.5%	63%	65%	63.5%
	IFRS 7:27	17 item	42.65%	42.65%	44.56%	43.29%
	IFRS 7:28	1 item	15%	15%	15%	15%
	Pengungkapan nilai wajar yang tidak diperlukan					
	IFRS 7:29	3 item	30.84%	30.83%	29.17%	30.28%
	IFRS 7:30	1 item	22.5%	23%	28%	24.5%
	Risiko					
	IFRS 7:31	1 item	35%	35%	30%	33.33%
	IFRS 7:33	3 item	89.17%	89.17%	86.67%	88.33%
	IFRS 7:34	6 item	55%	55%	56.67%	55.56%
	IFRS 7:35	1 item	52.5%	53%	55%	53.5%
	Risiko kredit					
	IFRS 7:36	3 item	65.83%	65.83%	61.67%	64.44%
	IFRS 7:37	2 item	47.5%	47.5%	47.5%	47.5%
	IFRS 7:38	1 item	67.5%	68%	68%	67.83%
	Risiko likuiditas					
	IFRS 7:39	15 item	51.83%	51.83%	52.67%	52.11%
	Risiko Pasar					
	IFRS 7:40	3 item	45%	45%	40.83%	43.61%
	IFRS 7:41	1 item	40%	40%	40%	40%
	IFRS 7:42	1 item	40%	68%	55%	54.33%
	Transfer aset keuangan					
	IFRS 7:42A	2 item	33.75%	45%	47.5%	42.08%
	IFRS 7:42D	1 item	25%	63%	65%	51%

	IFRS 7:42E	1 item	20%	63%	70%	51%
	Adopsi amandemen ke standar sebelum tanggal efektif					
	IFRS 7:44	1 item	20%	25%	18%	21%
	Total	96 item	48.72%	50.18%	50.86%	49.92%

Tabel 4

Statistik Deskriptif Perbandingan Tiap Variabel

Variabel	2009 n = 40	2010 n = 40	2011 n = 40	Pooled n = 120
CG (H1)	0.511	0.534	0.535	0.527
Size (H3)	8.730	8.825	8.891	8.815
Board Independent (H4)	0.490	0.495	0.476	0.487
Leverage (CV)	0.427	0.389	0.386	0.401
Profitabilitas (CV)	1.515	0.040	0.050	0.535
Auditor Independen (CV)	1.300	1.300	1.325	1.308

Tabel 5

Hasil Pengujian Regresi Berganda

	2009			2010			2011			Pooled		
Adjusted R ²	.286			.199			.294			.336		
Durbin Watson	1.469			1.027			1.512			.634		
F statistic	3.228			2.381			3.326			9.589		
Significance	.011			.044			.009			.000		
n	40			40			40			120		
	Coeff	T Stat	P-value	Coeff	T Stat	P-value	Coeff	T Stat	P-value	Coeff	T Stat	P-value
(constan)	23.356	.917	.366	8.751	.378	.708	13.142	.655	.517	.239	2.278	.025*
Corporate Governance	10.299	.769	.448	16.905	1.099	.280	26.794	1.926	.063	.175	2.269	.025*
Country	5.901	2.234	.033*	3.090	1.039	.307	1.897	.766	.449	.039	2.628	.010*
Size	1.517	.577	.568	3.776	1.609	.117	2.869	1.434	.161	.029	2.430	.017*
Board Independent	-23.616	-1.712	.097	-20.040	-1.515	.140	-13.514	-.996	.327	-.204	-2.724	.007*
Leverage	-14.013	-1.428	.163	-12.650	-1.083	.287	-18.616	-1.639	.111	-.139	-2.336	.021*
Profitability	-3.11	-1.415	.167	26.466	.482	.633	-26.498	-.619	.541	-.003	-1.524	.130
Auditor	6.301	1.162	.254	2.402	.466	.644	4.565	1.049	.302	-.047	-1.683	.095

*Secara statistik signifikan pada tingkat 5%

Current Asset Tunneling Through Related Party Transaction: Empirical Evidence in Indonesia

RATNA CANDRA SARI*
Universitas Negeri Yogyakarta

ZAKI BARIDWAN
Universitas Gadjah Mada

Abstract: *This study focuses on the expropriation of non-controlling shareholders through tunneling activity. Current study in tunneling still found obstacles in measurement because it is difficult to prove, although tunneling activity going on in business practices. The objective of this research is to test tunneling hypothesis and develop tunneling valuation model. This study defines tunneling as related party transactions that are used to tunnel out of public companies's resource for the benefit of the controlling shareholder. This study focuses on current asset tunneling. This study found that from the perspective of the being-tunneled companies, receivables to related parties negatively affect the company's profit margin. Company which announced related party transaction which indicated tunneling obtain negative abnormal return during the announcement of the related party transaction. Based on the assessment method of tunneling, Companies with concentrated ownership have a tendency to do tunneling transactions, compared to firms with dispersed ownership. Being-tunneled companies have lower performance than that are not.*

Keywords: *Tunneling, Current Asset Tunneling, Related Party Transaction.*

* Corresponding author: chan_sari@yahoo.com

Introduction

This study focuses on the expropriation[†] of noncontrolling shareholders through tunneling activity. Johnson et al. (2000a) defines tunneling as a transfer of resources out of the company for the benefit of controlling shareholders.

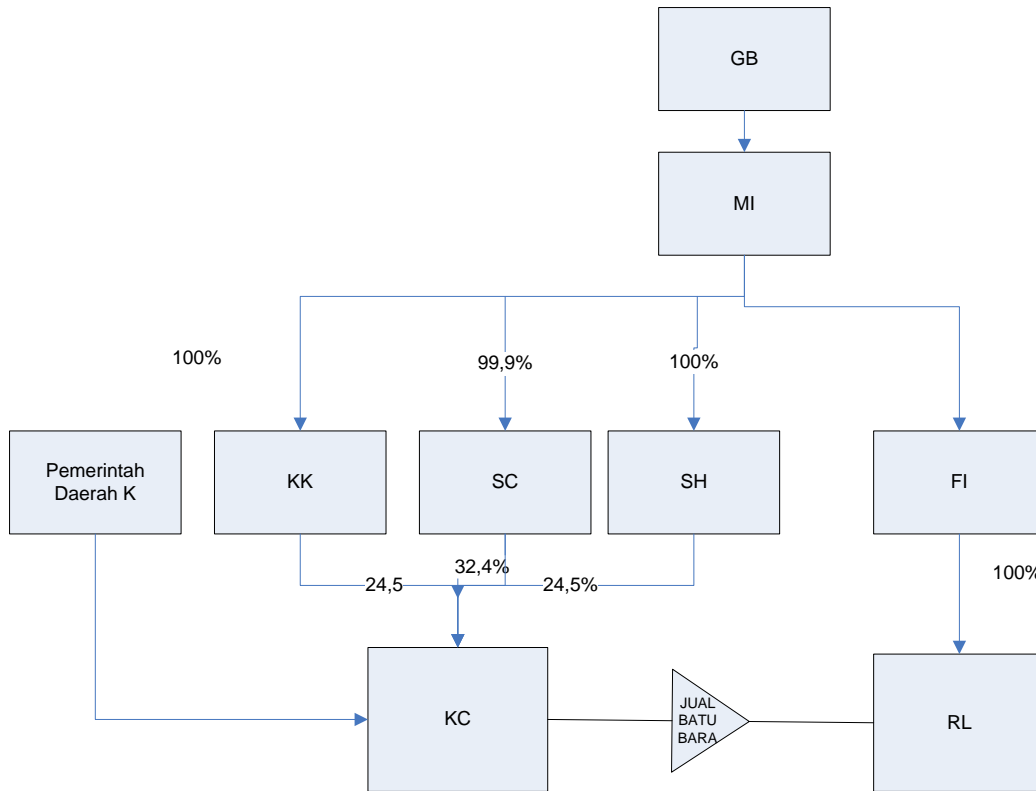
Current study in tunneling finds obstacles in tunneling measurement because it is difficult to prove, although tunneling activity going on in business practices. Jian and Wong (2003), Cheung et al. (2009b) , Aharony et al. (2009) find that tunneling activity can be conducted through related party transactions[‡]. Almost all public companies in Indonesia perform related party transactions (Ratna, 2013). Indonesia is a developing country with characteristics such as low level of investor protection, low level of law enforcement and group structure. these characteristics lead to related party transactions will benefit the group members and at the end will destroy value of the firm (Khanna and Palepu, 2000).

The following is an tunneling illustration that uses related party transactions that result in a decrease in the company's financial performance. Public companies in Indonesia, namely MI[§] indicated perform tunneling activity in the form of coal price manipulation by KC. KC using a special purpose company that is RL in Cayman Island to transfer profits. Here is the structure of corporate ownership:

[†] Expropriation is the use of controls to maximize their own welfare than the distribution of wealth from another party (Claessens et al. 2000b)

[‡] Related party transaction is a transfer of resources, services or obligations between the reporting entity with related parties, regardless of whether a price is charged (PSAK 7,2010).

[§] Code for ethical purpose



KC and the RL is a subsidiary of PT MI. GB is the ultimate owner of PT MI. KC does not sell coal directly to potential buyers, but sell it through RL. Coal sold to RL under reasonable prices, this led KC earnings decline. Then, RL coal reselling at market price, thereby increasing profits RL. KC is being-tunneled company. Government-K, KC non-controlling shareholder is harmed by the transaction, while the controlling shareholder (GB) as a whole is benefited, the loss in KC can be covered by profits from RL. These transactions are classified as cash flow tunneling because (1) the transaction lead a transfer of resources out of firms in the form of liquid assets, (2) the transaction is beneficial controlling shareholder at the expense of non-controlling shareholders. Cash flow tunneling transaction is also as tax avoidance because it is a way to tunnel profits from Indonesia to Cayman Island which is a tax heaven country. Motivation controlling shareholders to transfer profits from KC to RL because of cash flow rights in RL is greater than cash flow rights in KC.

Almost all public companies in Indonesia perform related party transactions (Ratna, 2013). Indonesia has low level of law enforcement and group structure, it will lead to related party transactions will benefit group members and at the end will destroy value of the firm (Khanna and Palepu, 2000). Poor law enforcement and the culture of corruption in Indonesia makes tunnelling cases are not touched by the law. If not prevented, tunnelling causes loss by reducing state tax revenues, causing the migration of resources from Indonesia to tax haven countries, lowering the investment climate, and reducing investor confidence.

To date, unfortunately, research on expropriation is mainly focused on tunneling activity in countries with high level of corporate governance and developed countries ((Bae et al., 2001; Facio and Stollin, 2006; Cheung et al., 2006; Cheung et al., 2009a). However, none of them has taken in developing countries into very close consideration. This research project is therefore dedicated to investigate the issue on tunneling activity in country with low level of corporate governance and emergent economy. Indonesia is a very interesting laboratory for this research, since the problems with governance, such as related part lending or crony capitalism. It is one of the institutional problems behind the 1997 Asian crisis.

The first issue in this study is related to the tunneling hypothesis and the implications for the company's financial performance. Accordingly, this study defines the tunneling hypothesis as related party transactions that are used to tunnel out of public companies' resource for the benefit of the controlling shareholder.

Related party transactions that are used for tunneling will cause the company's performance decline. Testing the influence of related party transactions on the company's performance is expected to provide a direct measure of tunneling due to measure the company's actions/activities which led to the transfer of resources out of the company for the benefit of the controlling shareholder.

In this study, tunneling is divided based on resources being tunneled** into three categories: current asset tunneling, fixed asset tunneling and equity tunneling. Current asset tunneling is a transaction that transfers cash or current assets out of company to the related party. Fixed asset tunneling move the long-term assets (tangible/intangible) from (to) the company to (from) the related party. Equity tunneling is increased ownership of the controlling shareholder at the expense of noncontrolling sharehoder, but does not change the company's productive assets. Categorization is important because each category has a different effect on the company's financial ratios. This study focused on current asset tunneling.

The second research issues is to develop cash flow tunneling prediction model. Currently there is no model to predict which firms are likely to be the object of tunneling or not based on the characteristics of the company. The absence of predictive models resulting in high risks faced especially by non-controlling shareholders, because empirical evidence showed that being-tunneled company will be impaired.

Theoretical Framework and Hypothesis Development

Johnson et al. (2000a) define tunneling as transfer of assets and profits out of the company for the benefit of controlling shareholders. Johnson et al. (2000a) divide tunneling into two types:

1. Controlling shareholder can move resources from the company to its interests through self-dealing transaction, the transaction either illegal/fraud, sale of assets through contracts such as transfer pricing that benefit the controlling shareholder, excessive executive compensation, loan guarantees, expropriation on the occasion of the company, etc..

** Atasanov et al. (2008) divide tunneling into 3 chategories: cash flow , asset and equity tunneling.

2. Controlling shareholder can increase their ownership in the company without giving/transfer of assets through a dilutive share issues, minority freeze-outs, insider trading, creeping acquisitions and other transactions that harm noncontrolling shareholders.

Company conduct related party transactions for three motives: First, the transaction relates is used to minimize transaction costs (Cook, 1977 and Fisman and Khanna, 1998). The transaction is categorized as a related party transaction for economic goals. Second, related party transaction can be used to manipulate earnings (Jian and Wong, 2003; Aharony et al, 2009). Third, the related party transaction is used for the purpose of tunneling (Cheung et al., 2009a; Cheung et al., 2009b; Cheung et al., 2006). The second and third transactions are for opportunist goal.

As a developing country, Indonesia has characteristics such as low level of investor protection, low level of law enforcement and group structure. these characteristics lead to related party transactions will benefit the group members and at the end will destroy value of the firm (Khanna and Palepu, 2000). Lack of information and regulations regarding related party transactions cause difficulties for users of financial statements to assess whether the transactions relate done for economic or opportunistic purpose.

Some studies indicate that related party transaction is used to tunneling. Jian and Wong (2003) found that the company uses receivables to related party as a tunnel to transfer resources out of the company. Cheung et al. (2009b) find empirical evidence that the sale and purchase of assets to related party are used to perform tunneling. Asset tunneling through the sales of assets to related party at a lower price than the price at an independent party transactions and the purchase of the assets from related party at higher prices compared with in independent transactions.

Companies that conduct related party transaction which indicated tunneling has values decreased at the announcement of the transaction (Cheung et al., 2006 and Cheung et al., 2009a). Related party transaction which indicated as current asset tunneling is receivables to related party (Cheung et al., 2006; Cheung et al., 2009a).

Jian and Wong (2003) states that there are two ways to do tunneling. First, the company provides a high accounts receivable or long credit periods to the related party when selling the product. Second, the company providing the loan to related party (in the financial statements included in other receivables post). Loans to controlling shareholders and affiliates is one way for controlling shareholders to transfer resources to their interests.

Jian and Wong (2003) find empirical evidence that when firms have high free cash flow, they will tunnel the excess of such resources for the benefit of controlling shareholders through the provision of credit. Aharony et al. (2009) provide empirical evidence on tunneling activities in China through a credit transaction to related party after the IPO. Receivables to related party can also be understood as a put option, related parties can exercise such option by not paying their loan in the bad state (Atanasov, 2008).

As a developing country, Indonesia has low level of investor protection. It will cause that related party transactions will benefit group members and at the end will destroy value of the firm (Khanna and Palepu, 2000). Jian and Wong (2003) and Aharony et al. (2009) find empirical evidence that companies that have excess resources will transfer resource for the benefit of controlling shareholders through related party receivables. Receivables to related party can also be understood as a put option, related parties can exercise such option by not paying their loan in the bad state (Atanasov, 2008). We predict that receivables to related party as a tunnel to transfer resource for the benefit controlling shareholders. If the credit to related party is used for tunneling, the company will provide a larger credit than received credit from the related parties. In addition, the company will provide credit terms to related

party at lower interest rates than market rates. Provision of credit under the interest rate will decrease in net earnings.

H1a: *From being-tunnelled company perspective, accounts receivable to related party negatively effect on the company's performance.*

H1b: *From being-tunneled company perspective, there are negative abnormal return during the announcement of the account receivables to related party transaction.*

In concentrated ownership structure, the controlling shareholder can control the company's resources for personal gain at the expense of the interests of non-controlling shareholders. Shleifer and Vishny (1997) suggest that controlling shareholders are more interested in using its control to obtain private benefits. Controlling shareholders can implement policies that benefit them at the expense of minority shareholders (La Porta et al. 2000b). The controlling shareholder can effectively determine the manager's decision. Controlling shareholders can adopt policies that benefit themselves, including contractual policies to related party. For example, the entity selling the goods to subsidiaries at cost, may not be sold with such requirements to other parties, entities also can making loans without interest to the related party. So we hypothesized that being-tunneled firms have more concentrated ownership than firms that are not .The proposed hypothesis is:

Hypothesis 2a: *There are differences in company's structure between the being-tunneled companies and that are not.*

Bertrand et al., (2002) found that being-tunneled companies experience decreased performance, while the tunneling company will increase performance. Jian and Wong (2003) states that when a company has excess financial resources, the controlling shareholder will move resources or tunneling of resources to their interests rather than distribute dividends.

Therefore, we predicts that being-tunneled firms has lower performance than firms that are not.

Hypothesis 2b: There are differences in company's performance between being-tunneled companies and that are not.

Research Method

The population in this study were all public companies listed on the Indonesia Stock Exchange except banking company. Observation period began in 2008 to 2010. Sample selection using purposive sampling method, the method of sample selection with some specific criteria. The criteria are intended is as follows:

1. Companies that do related party transaction because the transaction has a chance as a channel for tunneling.
2. Listed companies are active at the Indonesia Stock Exchange consistently from year 2008-2010.
3. The Company has a full financial report for the period of observation.
4. Companies with profits close to zero were excluded from the sample because the company can be used to related party transactions to manipulate earnings (increase profits). The focus of this study was related party transactions that are used to perform tunneling, so that companies with profits close to zero were excluded from the sample.
5. The Company is not engaged in the financial industry.

To test hypotesis 1b,2a and 2b, data obtained from the affiliate transaction and conflict of interest disclosure earned from BAPEPAM and LK. The report includes details on affiliate and conflicts of interest transactions such as objects of the transaction, the transaction value, transaction date, announcement date, a description of the relationship.

While data from the financial statements do not disclose about the announcement date of the transaction.

Measurement of Variables:

1. Measurement of account receivables to related party

Variabel account receivables to related party	Measurement
Account receivables/TA	$\frac{\text{Account receivable to related party}}{\text{total asset}}$
Net Account receivables/TA	$\frac{\text{Account receivables} - \text{account payables on related party}}{\text{total asset}}$
Change Account receivables/TA	$\frac{\text{Account receivables}(t) - \text{Account receivables}(t - 1) \text{ on related party}}{\text{total asset}}$
Account receivables/SA	$\frac{\text{Account receivables to related party}}{\text{total sales}}$
Net Account receivables/SA	$\frac{\text{Account receivables} - \text{account payables on related party}}{\text{total sales}}$
Change Account receivables/SA	$\frac{\text{Account receivables}(t) - \text{Account receivables}(t - 1) \text{ on related party}}{\text{total asset}}$

Variables net receivables are measured from the difference between accounts receivable with account payable. Cheung et al (2009) classifies accounts receivable to related party as tunneling while account payable on related party as propping. Net Receivables measure how likely companies do tunneling than propping. Net receivables positively show account receivables greater than account payable, so the company has a high propensity to tunneling than propping.

2. Measurement of ownership variables

Ownership of public companies can be classified into two general categories: dispersed ownership and concentrated ownership. Companies with dispersed ownership is a company

that does not have a controlling shareholder. Companies with concentrated ownership is a company that has a controlling shareholder on the boundary separating certain control rights.

3. Measurement of abnormal return

Abnormal return is the difference between actual returns and expected returns, the formula of abnormal returns following :

$$AbnReturn = R_{i,t} - E(R_{i,t})$$

Return expectations using the mean-adjusted model:

$$E(R_{i,t}) = \frac{\sum_{t=1}^{t=100} R_{ij}}{T}$$

Empirical Model

the following equations to test hypothesis 1:

$$MLB = \alpha_{11} + \alpha_{12}TPB + \alpha_{13} KI + \alpha_{14} JI + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

GM: gross margin

RPT: receivables to related party

IP: industry performance

IT: industry type

To test Hypothesis 1b, we measure abnormal return around announcement of related party transaction. Return expectations using the mean-adjusted model:

$$E(R_{i,t}) = \frac{\sum_{t=1}^{t=100} R_{ij}}{T}$$

To test Hypothesis 2a and 2b, we conduct two stages steps. The first stage, Valuation method for identification of related party transactions which tunneling and which are not.

Related party transactions are categorized as tunneling if have the following characteristics:



1. Negative abnormal return during the announcement of the related party transaction.
2. Related party transaction are classified as tunneling category based on the classification of Cheung et al. (2006) and Cheung et al. (2009b).
3. There is overlapping the owner. Overlapping owner is similarities controlling owner between the company and related party. Goranova (2007) found that the overlapping owner will transfer resources from the company's low cash flow right into the company's high cash flow rights.
4. There are similarities the directors and commissioners between the company and the related party. The similarity of key management personnel provide the opportunity of using power to regulate the financial policies and operations, so as to obtain benefits from such activities.
5. There are family relationships that may affect or be affected. Company policy can be influenced by family.
6. These transactions are not considered by the Office of Appraisal Services.

The second step, the prediction model tunneling is using Multiple Discriminant Analysis (MDA) to predict group membership. The Purpose of the prediction model is to predicts correctly the company which conducting tunneling transaction and not by the independent variables. This analysis requires a comparison sample of the companies that do not conduct related party transaction which not indicated tunneling (non tunneling). Because the majority of companies in Indonesia do relate to the transaction, then the non-tunneling company must meet all the following conditions:

Table 1: Criteria of Comparison Sample (Non Tunneling)

No	Criteria of Comparison Sample (Non Tunneling)
1	Ratio of related party sales less than 0.00014. This value is below the average of all related party sales transactions in Indonesia by 0.1218
2	Ratio of the related party purchase is less than 0.000124. This value is below the average of all related party purchase in Indonesia 0.6790
3	The ratio of related party accounts receivable less than 0.000124. This value is below the average related party accounts receivable to all public companies in Indonesia 0.2475
4	Net Income positive. Tunneling aims to transfer resources, so companies with NI positif will have the opportunity to perform tunneling than companies with negative NI.

Analysis of MDA is used to predict the being-tunneled companies and not. The equation used is as follows

$$D = \beta_1 KM + \beta_2 KID + \beta_3 KIA + \beta_4 KP + \beta_5 KN + \beta_6 KK + \beta_7 ROA + \beta_8 PM + \beta_9 GM + \beta_{10} PER + \beta_{11} OPRM \dots (2)$$

Result

Hypothesis 1a predicted that from the perspective of the being-tunneled companies, receivables from related parties negatively affect the performance of the company. This hypothesis is supported if the coefficient α_{12} estimation equation 1 negative and significant. The estimation results of equation 1 for all measurement indicate that the negative and significant coefficient α_{32} .



Table 2

Hypothesis Testing Results

$$MLB = \alpha_{11} + \alpha_{12}TPB + \alpha_{13} KI + \alpha_{14} JI + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Independen Variable	Predictio n	α_{32}	α_{33}	α_{34}	F	R ²	N	Hypothes is
Account receivables /TA	α_{12} negatif	-0.826***	33.484**	-4.368**	12.256** *	4.6%	694	supported
Net Account receivables /TA	α_{12} negatif	-0.943***	33.493**	-4.377**	11.701** *	4.4%	694	supported
Change Account receivables /TA	α_{12} negatif	-0.047*	32.787**	-4.442**	4.364***	1.4%	694	supported
Account receivables /SA	α_{12} negatif	-0.127***	33.376**	-4.640**	13.032** *	5%	694	supported
Net Account receivables /SA	α_{12} negatif	-0.149***	33.643**	-4.624**	12.905** *	4.9%	694	supported
Change Account receivables /SA	α_{12} negatif	-0.060***	34.065**	-4.405**	8.833***	3.3%	694	supported

*** significant at alpha 1%

** significant at alpha 5%

*signifikan pada alpha 1%

In the first measurement that is related receivables/total assets, the coefficient α_{12} (-0.826) was negative and significant at 1% alpha. In the second measurement that is net-receivables of related party transaction. Net-receivables is difference between receivables to related party and debt from related party of related debt. Receivables from related parties are indicated as tunneling while the debt from related party transaction are indicated propping (Cheung et al, 2009). Net receivables measures how likely the company doing tunneling than



propping. Positive net receivables- demonstrate that companies have a higher tendency than do tunneling propping. The test results showed that the coefficient of the variable net receivable α_{32} negative and significant at 1% alpha.

In the third measurement that is changes receivables to related party, α_{12} negative and significant coefficient on alpha 1%. The test results show that firms in period t gives receivables greater than the previous period (t-1) will decrease the company's net profit margin.

Empirical evidence, as shown in Table 1, hypothesis 1a supported that from the perspective of the being-tunneled companies, receivables to related parties negatively affect the company's net profit margin.

Testing hypothesis 1b show that companies which announce receivables to related party obtain the abnormal return (AR) negative at the time of announcement of the transaction to the period of the window (-3, +3).

Tabel 3
Cumulative abnormal return at the time of announcement of receivables to related party 2009-2010

Transaction	Mean Adjusted, (-3,+3)
<i>CASH FLOW TUNNELING :</i>	
1 Elimination of related party receivables	-0,00669
2 Account receivables to related party	-0,06755
3 Warranty account receivables	-0,01284

On average, during the window period (-3, +3), the company indicated that the transaction cash flow tunneling obtain mean adjusted return negative. Elimination of related party receivables obtain mean adjusted abnormal return of -0.66%, Account receivables to related party gain -6.7% and warranty account receivables from related party obtain -1.2%.

Based on the valuation of tunneling methods in this study, the following are examples of transactions are indicated as tunneling. In the case of tunneling, the researchers used the

code for ethical reason. Although the valuation method was built based on theoretical studies and discussions with regulatory authorities and academicians, researchers do not make confirmation with the company. Therefore, the researchers used a code for ethical reasons. A public company in Indonesia, namely PT ED through PT DD conduct transactions with PT MM. Family GQ as controlling shareholder of PT ED and PT MM. Figure 2 show the nature of the related party transactions of PT ED / DD with PT MM.

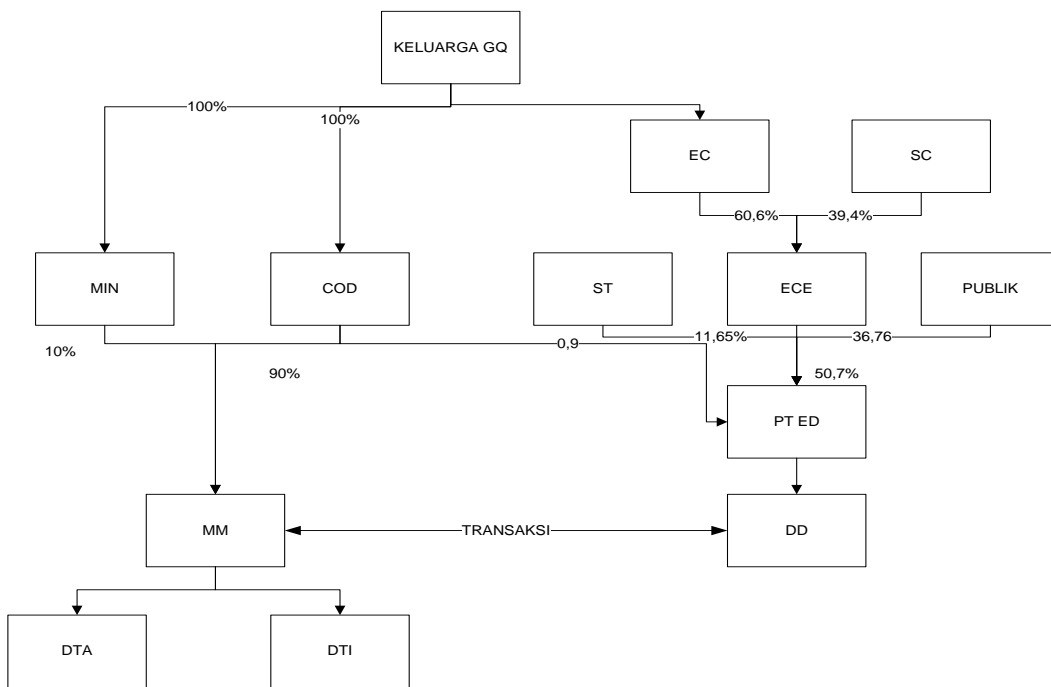


Figure 2. Ownership Structure PT ED

PT ED and PT MM and also have the same Commissioners and Directors. The commissioners and directors held by family members of the controlling shareholder.

On June 26, 2009, through its subsidiary PT ED, DD, has signed a purchase agreement with the MM to take over 99.9% of DTA and 99.9% of the DTI. PT ED also pay off the entire debt of DTA and the DTI to MM. Total transaction and subrogation agreed amount of U.S. \$ 886,013. Amount of US \$75,122 used to buy shares DTA and the DTI and US\$ 810,891 used for debt repayment DTA and the DTI to MM.

GQ has a family of total cash flow rights in MM at 100% while the total cash flow rights in PT ED by 50.7%. Cash flow rights of controlling shareholders is greater in MM than in a public company (PT ED). The difference in cash flow rights is an incentive for companies to tunnel resources from the low company's cash flow right (PT ED Tbk) to the high company's cash flow rights (MM). The tunneling are classified as cash flow tunneling. PT ED and MM/ DTI / DTA are related because both parties have jointly controlled entity and that share a common key management personnel. PT ED issue of U.S. \$ 810,891 cash for debt repayment DTA and the DTI. In addition, PT ED issue of US \$75,122 cash to buy the DTI although the DTI enterprises that have a net loss (Rp5.257.128.705,) and the DTA, which had a net loss worth (Rp734.908.351).

Transaction of PT ED is indicated as tunneling. Indicators used are:

1. There is a negative abnormal return during the announcement of the transaction (-0.01079). This shows the company and minority shareholders suffered losses as a result of the transaction.
2. Included in the category of transaction tunneling under study Cheung et al. (2009a).
3. There are overlapping owner. The company and related party is owned by the same owner of the family of GQ.
4. There are common key management personnel.

Provision and elimination of accounts receivable also can be used for tunneling transaction. The following is an illustrative case indicated as cash flow tunneling. PT AI (Public company) give affiliate receivables to INC. INC is owned by PT AI by 50%. Financial statements INC are not consolidated on Financial Statement of PT AI. PT AI and the INC also have the same key management personnel. Chairman and president of the INC

is a director at PT AI. President director of the INC was a director at PT AI. Commissioner of the INC is also a commissioner of PT AI.

PT AI provides interest-free receivables, unsecured and unspecified payment period. Receivables awarded since 2005. On 11 November 2010 the company announced the elimination of these receivables. At date of the announcement, the company experienced a negative CAR of -0.06%. Based on the assessment method of tunneling, the transaction is indicated as tunneling by the indicator:

1. There is a negative abnormal return during the announcement of the transaction by -0.006689.
2. PT AI INC has the same commissioners and directors.
3. There are resources out from company. Cheung et al. (2006) classify the transaction of account receivable to related party as a tunneling transaction.

The next step is to create predictive models of companies that do tunneling and are not based on firm characteristics. MDA Analysis using equation 1 is used to predict being-tunneled company or not.

Table 4
MDA Analysis

$$D = \beta_1 KM + \beta_2 KID + \beta_3 KIA + \beta_4 KP + \beta_5 KK + \beta_6 KK + \beta_7 ROA + \beta_8 MLB + \beta_9 MLK + \beta_{10} PER + \beta_{11} MOPR \dots(1)$$

Independent Variables	
Manajemen Ownership (KM)	1,146
Domestic Institutional Ownership (KID)	1,153
Foreign Institutional Domestic (KIA)	0,955
Public Ownership (KP)	0,000
Ownership Classification (KK)	12,011***
Return On Asset (ROA)	1,320
Net Profit Margin (MLB)	8,089**
Gross Margin (MLK)	20,0447***
Price Earnings Ratio	2,130
Operating Margin (MO)	5,482**
Wilks' Lambda	0,697*
Classification result	75,2%

***Nilai F signicant at alpha 1%

**Nilai F signicant at alpha 5%

*Nilai F signicant at alpha 10%

In general, ownership structure variables had no significant effect on the possibility of tunneling transactions by company. This is consistent with Cheung et al. (2009a) that the ownership structure variables can not explain the possibility of corporate conduct the value destroy related party transactions.

Ownership classification variables significant at alpha 1% that is able to distinguish being-tunneled companies and that are not. Companies with concentrated ownership have a tendency to make transactions tunneling, compared to firms with dispersed ownership. Profitability ratios that use the components of operating income (gross margin and operating margin) and net income (Profit margin and PER) have a significant effect. It means be able to

distinguish between being-tunneled companies and that are not. This is consistent with research Bertrand et al. (2002) that the being-tunneled companies experience decreasing profitability, while the tunneling company experience increasing profitability.

Conclusion, Implication and Limitation

Empirical findings of this study have important theory implications, accounting implication, policies implication, and practices implication. Implications of the theory deals with the expropriation phenomenon through contractual policy with other companies, whereas past research has focused on expropriation through operations policy. Expropriation can occur through the related party transactions. With significant control and influence that is owned, controlling shareholders have the power to set corporate policy to obtain benefits from the related party transaction. Controlling shareholder can influence the pricing policy, amount and type of related party transactions. This study found empirical evidence that related party transaction can be used as a tunnel to transfer resources out of the company to the controlling's interests at the expense of minority shareholders. Being-tunneled companies decreased the financial performance and market performance. These results are consistent with the phenomenon of expropriation of minority shareholders through contractual policies. Companies with concentrated ownership have a tendency to do tunneling transactions, compared to firms with dispersed ownership. Being-tunneled companies have lower performance than that are not.

Accounting implications related to the quality of disclosure of related party transaction. Disclosures of related party transactions set forth in PSAK No. 7 of 2010. The quality of disclosure is important as a basis for decision making by users of financial statements. However, based on the results of data analysis, the disclosure of related party transactions in the financial statements are very limited.

Practice implications related to the development of predictive models to predict companies which had a tendency to do tunneling and which are not. Model predictions are expected to assist investors in anticipation of the risk of tunneling that may occur through related party transaction.

Limitations and Suggestions

Formation model consists of two stages. The first phase of building the model and the second phase of model testing. This study is limited to building a predictive model of tunneling, testing the model predictions can not be done because the affiliate transaction data obtained from Bapepam-LK from 2009 to 2011. Data in 2009 and 2010 are used to build the model, the data used to test the model 2011. But at the time the study was made, in 2011 the company's financial statements have not been published, so that further research is expected to test the model that has been established in this study.

The research data was taken prior to the effective date of the application of PSAK 7 2010. Further research can be done using the data of financial statements in 2011, to know the differences to the quality of related party disclosure before and after implementation of PSAK in 2010.

References

- Aharony, Joseph., Jiwei Wang and Hongqi Yuan. 2009. Tunneling as an Incentive for Earnings Management during the IPO Process in China. *Journal Accounting Public Policy*, 10: 1-25
- Atanasov, Vladimir., Bernard Black and Conrad S. Ciccotelo. 2008. Unbundling Measuring Tunneling. *Finance Working Paper*. European Corporate Governance Institute.
- Bae, Kee Hong, Jun Koo Kang and Jin Mo Kim. 2002. Tunneling or value added? Evidence from mergers by Korean business groups. *Journal of Finance*, 57: 2695-2740.
- Baek, J.S., J.K. Kang and K.S. Park. 2004. Corporate Governance and Firm Value: Evidence from The Korean Financial Crisis. *Journal of Financial Economics*, 71: 265-313.
- Baker, Richard E., Vadean C. Lembke and Thomas E. King. 2006. *Advance Financial Accounting*. McGraw-Hill.

- Bertrand, Marianne, Paras Mehta and Sendhil Mullainathan. 2002. Ferreting out Tunneling: An application to Indian business groups. *Quarterly Journal of Economics*, 117:121-48.
- Bradley, M., G.A. Jarrel and E.H. Kim. 1984. On The Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence. *Journal of Finance*, 39: 857-878.
- Brickley, James A., Ronald C. Lease and Clifford W. Smith, Jr. 1988. Ownership Structure and Voting on Antitakeover Amendments. *Journal of Financial Economics*, 20: 267-291.
- Brockman, Paul and Dennis Y. Chung. 2003. Investor protection and firm liquidity. *Journal of Finance*, 58: 921-938.
- Chen, Charles and Jaggi. 1998. The Association Between Independent Not Executive Directors, Family Control and Financial Disclosure. Working Paper. Departement of Accountancy, City University of Hongkong.
- Cheung, Yan Leung., P. Raghavendra Rau and Aris Stouraitis. 2006. Tunneling, Propping and Expropriation: evidence from connected party transaction in Hongkong. *Journal of Financial Economics*, 82: 343-386.
- Cheung, Yan Leung., Lihua Jing, Tong Lu, P. Raghavendra Rau and Aris Stouraitis. 2009a. Tunneling and Propping up: An analysis of related party transaction by Chinese listed company. *Pacific Basin Finance Journal*, 17: 372-393.
- Cheung, Yan-Leung., Yuehua Qi, P. Raghavendra Rau and Aris Stouraitis. 2009b. Buy high, sell low: How listed firm price asset transfer in related party transaction. *Journal of Banking and Finance*, 33: 914-924.
- Chung, K.S., & Wong-Boren, A. (2000). Corporate Governance and Finance in East Asia: A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines and Thailand. Vo.2, Asian Development Bank.
- Claessens, Stijn., Siemon Djankov and Larry Lang. 2000a. The separation of ownership and control in East Asian Corporations. *Journal of Financial Economics*, 58: 81-112.
- Claessens, Stijn, Siemon Djankov, Joseph Fan and Larry Lang. 2000b. Expropriation of Minority Shareholders: Evidence from East Asia. *Policy Research Working Paper*. The World Bank.
- Claessens, Stijn., Joseph P.H. Fan and Larry Lang. 2002a. The Benefit and Costs of Group Affiliation: Evidence from East Asia. *Working Paper*, Hongkong University of Science & Technology and Chinese University of Hongkong.
- Claessens, Stijn., Siemon Djankov, Joseph P.H. Fan and Larry Lang. 2002b. Distengaling the incentive and entrenchment effect of large shareholding. *Journal of Finance*, 57: 2741-2771.
- Claessens, Stijn and Joseph P.H. Fan. 2003. Corporate governance in Asia: a survey. *Working Paper*. Universiteit van Amsterdam – Finance Group and Hong Kong University of Science and Technology.
- Collins, D.W., E.L. Maydew and I.S. Weiss. 1997. Changes In The Value-Relevance of Earnings and Book Values Over The Past Forty Years. *Journal of Accounting and Economics*, 24: 39-67.
- Cook, Karen S. 1977. Exchange and Power in Networks of Interorganizational Relations. *Sociological Quarterly*, 18: 62-82
- Desai, Mihir, I.J. Alexander Dyck and Luigi Zingales, 2007, Theft and Taxes, *Journal of Financial Economics*, forthcoming, at <http://ssrn.com>.
- Djankov, Simeon., Rafael La Portal, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer. 2008. The law and economics of self-dealing. *Journal of Financial Economics*, 88, 430-465.
- Eisenhardt, K. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1):57-74
- Faccio, Mara and David Stolin. 2006. Expropriation vs Proportional Sharing in Corporate Acquisition. *Journal of Business*, 79: 1414-1444



- Faccio, Mara., Larry Lang and Leslie Young. 2001. Dividends and Expropriation. *American Economic Review*, 91: 54-78.
- Fama, E. And M. Jensen. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26: 301-326.
- Fan, Joseph P.H. and Vidhan K. Goyal. 2002. On The Patterns and Wealth Effects of Vertical Mergers. *Working Paper*. Hongkong University of Science & Technology.
- Fisman, Raymond and Tarun Khanna. 1998. Facilitating Development: The Role of Bussiness Groups. *Workings Paper*. Columbia Business School and Havard University.
- Gilson, Ronald J. and Jeffrey N. Gordon. 2003. Controlling Controlling Shareholders. *Columbia Law School Working Paper* No. 228.
- Goranova, Maria. 2007. On The Both Side of The Deal: How Does Overlapping Institutional Ownership Affect Merger and Acquisition. Dissertation. Sofia University.
- Gunarsih, Tri. 2002. Struktur Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan: Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Strategi Diversifikasi terhadap kinerja Perusahaan. Disertasi Doktor UGM Yogyakarta.
- Hapsoro, Dody. 2006. Mekanisme Corporate Governance, Transparansi dan Konsekuensi Ekonomik: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia. Disertasi Doktor UGM Yogyakarta.
- Henry, D., H. Timmons and S. Rosenbush. 2002. Who else is hiding debt, moving financial obligations into off-book vehichles is now a common ploy. *Business Week*, January 28: 44-45
- http://www.gatra.com/2007-09-05/versi_cetak.php?id=107452, diunduh 5 September 2007.
- <http://en.hukumonline.com/pages/lt4cc7fee3d6c95/bakrie-s-tax-troubles-the-kaltim-prima-coal-case>, diunduh 27Oktober2010.
- International Accounting Standards Committee. 2008. International Accounting Standard No.24 Related Party Disclosure
- Ikatan akuntan Indonesia. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.
- Jensen, Michael C. 1986. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. *American Economic Review*, 76: 323-329.
- Jensen, Michael C. dan W.H Meckling. 1976. Theory of the Firm. Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3: 305-360.
- Jian, Ming and T.J Wong. 2003. Earnings Management and Tunneling through Related Party Transactions: Evidence from Chinese Corporate Groups. *Unpublished working paper*. University of science and technology, Hongkong.
- Johnson, Simon., Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer. 2000a. Tunneling. *The American Economic Review*, 90:22-27.
- Johnson, Simon., Peter Boone, Alasdair Breach dan Eric Friedman.2000b.Corporate Governance in the Asian Financial Crisis. *Journal of Financial Economics*, 58: 141-186.
- Jones, J., 1991. Earnings Management during Impor Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, 29(2): 193-228.
- Keputusan BAPEPAM No 412/BL/2009 tentang Transaksi Afialiasi dan Benturan Kepentingan Tertentu.
- Khanna, Tarun dan Krishna Palepu. 1997. Why Focused Strategy May be Wrong in Emerging Markets. *Havard Business Review*, 75(4): 41-51.



- Khanna, Tarun, and Krishna Palepu, 2000. Is Group Membership Profitable in Emerging Markets? An Analysis of Diversified Indian Business Groups. *Journal of Finance*, LV: 867-891.
- King, B.F. 1966. Market and Industry Factor in Stock Price Behaviour. *Journal of Bussiness*, 39: 139-189.
- KPMG. 2010. KPMG's Corporate Tax Survey.
- La Porta, R., Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. 1998. Law and Finance. *Journal of Political Economy*, 106 (December): 1113-1155.
- La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes and Andrei Shleifer. 1999. Corporate Ownership Around the World. *Journal of Finance*, 54(2): 471-517.
- La Porta, R., Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. 2000a. Agency Problems and Dividend Policies around the World. *Journal of Finance* ,55: 1-33.
- La Porta, R., Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. 2000b. Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics* 58, 3-27.
- La Porta, R., Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. 2002. Investor Protection and Corporate Valuation. *Journal of Finance* 57, 1147-1170.
- Lemmon, Michael L., and Karl V. Lins. 2003. Ownership Structure, Corporate Governance and Firm Value: Evidence From The East Asian Financial Crisis. *Journal of Finance*, 58: 1445-1468.
- Mitton, T., 2002. A Cross-Firm Analysis The Impact of Corporate Governance on The East Asian Financial Crisis. *Journal of Financial Economics*, 64: 215-241
- Na'im, Ainun. 2006. Special Purpose Vehicle Institution: Their Business and Accounting Implications. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 8(1): 1-19
- Nenova, T., 2000. The Value of Corporate Votes and Control Benefits: A Cross-Country Analysis. *Unpublished Working Paper*. Havard University.
- Ohlson, J.A., 1995. Earnings, book values, and dividends in equity valuation. *Contemporary Accounting Research* 11, 661-687
- Shin, H., and Y.S. Park. 1999. Financing Constraint and Internal Capital Market: Evidence from Korean Chaebols. *Journal of Corporate Finance*, 5: 169-194.
- Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny. 1994. Politicians and Firms. *Quarterly Journal of Economics*, 109: 995-1025.
- Shleifer, Andrei dan Robert W. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, 52(2): 737-783

The Effect of Non-Recurring Item Transactions on the Ability of Firms to Smooth Income: the Case of Indonesian Listed Firms

THERESIA TRISANTI*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta

Abstract. *This paper examines one of the prevalent examples of creative accounting, which is the income smoothing. Income smoothing is defined as a deliberate dampening of fluctuations about some level of earnings considered to be normal for the firm (Atik, 2009). In this study, income-smoothing practices of Indonesian listed companies are detected through empirical tests using non-recurring item transactions as income smoothing instrument. Income smoothing is accepted as motivation of non-recurring item transactions. The data used are the financial reports of each sample company, which obtained through DataStream from 2006 - 2010. Sample firms are classified as smoothers and non-smoothers using Moses (1987) smoothing behavior index. Results show that possible motivation of non-recurring items transactions are income smoothing practices. Logistic regression result show that independent variables such as profitability, debt financing have positive significant influence to income smoothing practices but company size have negative significant.*

Keywords: *Company Size, Debt Financing, Income Smoothing Practices, Non-Recurring Item Transactions, Profitability.*

* Author can be contacted at: thtrisant@gmail.com

A. Introduction

Recently, public has witnessed a number of well-known financial accounting scandals involving large companies in developed countries such as: Enron (2001), Parmalat (2003) Bernard L. Madoff Investment Securities (2008) and Bear Stearns (2008). Beside scandals in developed countries which have sophisticated capital markets and regulations, similar cases were also happened in developing countries with emerging capital markets. For example, Indonesia has also experienced the similar cases, PT Bumi Resources (2008), PT Semen Cibinong (2008) and PT Bank Century (2009). The weaknesses or lapses in accounting practices of these companies have been identified as one of the some financial issues which led to those scandals. Basically generally accepted accounting principles (GAAP) offer some flexibility in preparing the financial statements and give the financial managers some freedom to select among accounting policies and alternatives (Chong, 2008). Some accounting manipulation practices used the flexibility in financial reporting to alter the financial results of the firm. For example, management can misrepresent the timing, amount, or intent of transactions and events related to revenues or expenses without being involved in fraud or falsification of the records (Defond and Park, 1997). Management can also take advantage of generally accepted accounting principles (GAAP) to select from various methods when computing earnings and other financial measures which could lead to lower quality financial information. This discretionary room allows management to report the desired profit, achieving its goals at the interest of other parties. As a result, phrases such as earnings management, creative accounting, income smoothing, and the big bath accounting have emerged.

One form of creative accounting is the income smoothing (IS) practice in which company's management takes steps to reduce and store earnings during the good years and defer them for use during the business-downturn years or vice versa or in other words income

smoothing is deliberate dampening of fluctuations about some level of earnings considered to be normal for the firm (Atik, 2009; Stolovy and Bartov, 2004; Eckel, 1981). Therefore smoothing of reported income may be defined as the intentional dampening or fluctuations about some level of income that is currently considered to be normal for a firm. In this sense smoothing represents an attempt on the part of firm's management to reduce abnormal variations in income (Beidleman, 1973). Previous studies show that income smoothing practices are fairly common phenomenon. It has been detected in varying degrees across different samples. Atik (2009) has referred to income smoothing practice as one of the common abuses in financial reporting that users should be wary of and he has described it as a manipulation of financial information. Hence, the concern about income smoothing practices need for appropriate research. This paper examines one of the prevalent income smoothing instruments, which is the non-recurring items transaction. Heflin et al. (2002) indicate the nonrecurring items such as the frequency of material write-downs and write-offs have been increasing rapidly since in 1995.

Given the above explanation, there are two objectives of this paper are as follows:

1. To verify the effect of non-recurring items to the income smoothing practice among Indonesian public listed company.
2. To identify company specific factors, such as: firm size, profitability and debt financing to the incidence of income smoothing practices by Indonesia listed companies.

B. Literature Review

Albrecht and Richardson (1990) introduced the concept of income smoothing when he proposed that it was logical and rational for managers to attempt to smooth income by using certain accounting devices. He suggested several reasons for income smoothing. First,

through the judicious 'juggling' of income and expense items over a period of years, management can reduce a company's overall tax liability. Second, a smooth income stream can enhance investor confidence because stable earnings support a stable dividend policy, which is desirable. Third, income smoothing can enhance the relations between managers and workers because a sharp increase in reported profits may lead to demands for higher wages. Fourth, smooth income streams can have a psychological impact on the economy in those cyclical upswings and downswings can be countered and waves of optimism and pessimism moderated.

Furthermore, there are two different types of smoothed income streams: those that are naturally smoothed and those that are intentionally smoothed by management (Eckel, 1981). From this diagram, intentionally smoothed income is further classified into two types of smoothing, artificial smoothing and real smoothing. All these types of smoothing could be generally described as follow; a naturally smoothed income stream occurs when a firm's income generating process inherently produces a smoothed stream of reported income. For example, one would expect the income generating process of public utilities to be such that income streams would be naturally smoothed (Atik, 2009; Eckel, 1981). A broad perspective of income smoothing behavior is diagrammatically presented in Figure 1.

An intentionally smoothed income stream can be the result of real smoothing or artificial smoothing. Real smoothing involves decisions that affect cash flows and dissipate firm value. Examples include changing the timing of investments and providing promotional discounts or vendor financing to risky customers to pump up sales toward the end of the quarter (Atik, 2009). Meanwhile, artificial smoothing represents accounting manipulations taken by management using flexibility in the accounting standards to alter the reported number. These manipulations do not represent underlying economic events or affect cash flows, but shift costs and/or revenues from one period to another (Dempsey et al., 1993). For

example, a firm could increase or decrease reported income simply by changing its actuarial assumptions concerning pension costs. Previous studies have investigated IS instrument such as dividend income, pension costs, investment tax credit, depreciation and fixed charges, accounting policies changes and reserves and provisions. Research publications provide examples of a broader IS strategy that involves another instrument: timing for nonrecurring items transactions as a smoothing instrument. Some researches indicate the nonrecurring items such as the frequency of material write-downs and write-offs have been increasing rapidly since in 1995 (Gu and Chen, 2004; Stefanescu, 2009).

According to Indonesian Generally Adopted Principles (PSAK) number 25, paragraph 15, non-recurring items is an abnormal or infrequent gains or losses are reported in the company's annual report. They are rare events or activities that are not part of the company's normal business operations. Examples of nonrecurring items include losses due to fire or theft, the write-off of a company division, the acquisition of another company, or the one-time sale of a large piece of property, and discontinued operations. All those items are typically non-recurring items in the company's income statements. The increasing non-recurring item transactions make the importance of the treatment accorded non-recurring adjustments to income. In the majority of cases, current practice requires that nonrecurring adjustments be classified in the operating section of the income statement at their pre-tax value. In particular, it is hypothesized that the current practice of classifying items of non-recurring nature into the operating section of the income statement decreases the predictive ability of income before extraordinary items. Since most adjustments are of a non-recurring nature, it can be hypothesized that they distort income and income per share figures for users of financial statements whose principal interest is in their predictive ability (Abdullah et al., 2002). Research by Black et al. (2000) explained that nonrecurring items occur with at least two possible explanations:

- i) Multiple occurrences of nonrecurring items indicate that companies are in financial difficulty, or they indicate companies whose managers have engaged repeated attempts at earning management or IS.
- ii) They also find that companies with multiple occurrences of nonrecurring items are four times more likely to eventually file for bankruptcy or liquidation than other companies.

Accordingly nonrecurring items are the product of managers' exercise of choice and judgment in determining the timing of the transaction, the amount of its financial impact, and the period of reporting. There also is a managers' discretion in deciding when the gain or loss is to be reported, whether the gain or loss is to be recognized at the point of sale; or whether they are to be recognized upon the receipt of cash or a claim to cash; or whether they are to be recognized upon the completion of some other critical event. Thus, they can be conveniently classified as non-recurring items for the purposes of smoothing income (Barnea et al., 1976). According to Moses (1997) the smoothing instruments are the variables used by managers in attempting to smooth particular accounting figures. Therefore, an accounting practice or measurement rule must possess certain properties before it may be used as a manipulative smoothing instrument, for this research the observations on the notes of financial statements refer to the non-recurring item transactions. Abdullah et al. (2002) stated the identification of the nature of nonrecurring items reported by each company is a difficult exercise due to the fact that most companies reported more than one nature of nonrecurring items in a particular year. By going through the annual reports, the nature of the nonrecurring items will be subsequently classified into eight major categories, as shown in Table 1.

C. Hypothesis Developments

As explain in the review literature section, for this paper the non-recurring item was selected as a smoothing device for several reasons. Manipulation of nonrecurring item adjustments is one of the most readily discernible of a wide variety of stratagems and practices available for smoothing reported profit. Nonrecurring items are the product of managers' exercise of choice and judgment in determining the timing of the transaction, the amount of its financial impact, and the period of reporting. Company managements also have a considerable scope, for example, to smooth reported profit figures by nonrecurring item transactions such as sales/disposal of long term investments, sales/disposal of property, plant and equipment, the write off assets to recoverable amount (Cameron and Stephen, 1991; Beattie et al., 1994). Accordingly the hypothesis for this paper is stated as follows:

H₁: *There is a significant relationship between the non-recurring item transactions and the level of income smoothing practices by Indonesian listed firms*

Previous studies conclude that a high proportion of companies smooth their income when their profitability is relatively low. Atik (2009) provide evidence that companies with declining profitability tend to smooth their income. Presumably, fluctuations in income streams have a more severe impact on low profitability companies; hence, they have a stronger motivation to smooth income. Given these findings, it is hypothesized that companies with lower profitability tend to smooth their income more than companies with higher profitability. In this paper, profitability is measured by the ratio of profit before interest and tax to total assets minus current liabilities (Mansor and Achmad, 2009). Accordingly, the hypothesis is formulated as follows:

H₂: *There is a significant relationship between profitability and the level of income smoothing practices by Indonesian listed firms*

The debt equity hypothesis maintains that the higher the firms' debt, which is equivalent to the close (i.e. 'tighter') the firms is to the constraints in the debt covenants and the greater the probability of a covenant violation and of incurrance of technical default cost, the more likely managers are to use accounting methods that increase income. Ashari et al. (1994) and Atik (2009) suggest that the issuance of debts provides an incentive for a firm to smooth its reported income. They will do this to loosen the binds of any debt covenants that are expressed in terms of accounting-based numbers. The objective of this process is to minimize the costs associated with agency relationship and thus maximize the shareholders and the bondholders' wealth. Therefore, a positive association between income-smoothing behavior and total long-term debt to total assets ratio (TD/TA) is expected. Like the other hypotheses of this paper, this hypothesis implies the expected direction of the association between debt financing and IS practices; the relevant hypothesis is as follows:

H₃: *There is a significant relationship between debt financing and the level of income smoothing practices by Indonesian listed firms*

Previous studies find that company size has an effect on income smoothing behavior. For examples Habib (2002) and conclude that small companies smooth income significantly more than large companies. One explanation is that smaller companies are likely to be subject to less public scrutiny than larger companies, therefore small companies are expected to smooth income more than large companies. In other words, larger companies are likely to receive more attention from analysts and investors and thus more is known about them. Consequently, there is little additional value for a smoothed income signal and, accordingly, larger companies have less incentive to smooth income (Mansor and Achmad, 2009; Habib, 2002). In this paper, the company size is measured by total assets (after taking logarithms). Thus, the hypothesis tested in the paper can be summarized as follows:

H4: *There is a significant relationship between company size and the level of income smoothing practices by Indonesian listed firms*

D. Research Methodology

According to Moses (1987) smoothing was measured as the degree to which an accounting change shifts income toward expected earnings (EE). For each sample firm the earnings number that would have been reported had the firm not doing non-recurring item was determined and termed pre-change earnings (PE). A measure of smoothing behavior (SB) was calculated by comparing the deviations of pre change and reported earnings (RE) from expectations. Therefore PE, RE, and EE are all un-deflated measures and consequently dependent on firm sales was used here as a deflator (Moses, 1987). Based on this model income smoothing is measured as the degree to which an accounting change shifts income toward expected earnings (EE). The calculation of pre-change earnings (PE) is the earnings number that would have been reported if the firm not doing non-recurring item transactions.

$$SB = \frac{|PE - EE| - |RE - EE|}{SALES}$$

Where:

SB = the smoothing behavior,

PE = the pre-change earnings,

EE = the expected earnings,

RE = the reported earnings.

A measure of smoothing behavior is calculated by comparing the deviations of pre-change and reported earnings from expectations. Since PE, RE, and EE are all un-deflated

measures and consequently dependent on sales are used here as a deflator. A simple random walk model (SRWM), predicting earnings in any year as equal to reported earnings in the previous year, is used for the tests in this paper. It is because the expected earnings depend solely on the most currently observed earnings. In this model, it is assumed that the management making non-recurring item transactions to keep the current year's earnings level at least equal to the last year. Smoother and non-smoother firms are distinguished by the sign of the amount that is generated by the application of the above formula. Positive values of SB mean the analyzed firm is an income smoother (Atik, 2009; Moses, 1987; Mohamad, 2001). Diagrammatically the statistical model above can be described as in Figure 2 and 3.

The hypotheses (H2 up to H4) are to investigate the association between company specific variables to IS practices. This association was modeled using the logistic regression. Using this model, the dependent variable only contains two categories: the income smoothing status of companies, which 1 is for smoothers and 0 for non-smoothers. The logistic regression determines the impact of multiple independent variables presented simultaneously to predict membership of one or other of the two dependent variable categories (smoothing and non-smoothing) and the independent variables are either interval or nominally measured (McClave et al., 2011; O'Connell, 2005).

The logistic regression model can be expressed as follows:

$$\text{Logit}(\pi_i) = \ln [\pi_i/1-\pi_i] = \alpha + \beta_1 \text{PRT}_i + \beta_2 \text{DEBT}_i + \beta_3 \text{SIZE}_i$$

Where:

- $i=1, \dots, n$,
- π_i = the probabilities values of i^{th} firm smooth its income
- PRT= Profitability

- DEBT= Debt Financing
- SIZE= Size

E. Sample Used in the Research

The population of interest selected for this paper comprised firms listed on the Indonesia Stock Exchange and the DataStream database were used for the period of 2006 up to 2010. The year 2006 is taken as the initial year as the paper has employed a five year time series data collections. Refer to Stolowy and Bartov (2004) the term smoothing implies adjustments to income smoothing in two or more consecutive periods and it required analysis of data for at least four periods. The results of some studies suggest that an increase in the time period tends to reduce errors of misclassification of firms as smoothers and non-smoothers, therefore this study has employed a five year time series data collections.

F. Data Analysis and Discussion

The first research objective is to examine the effect of the IS instruments; non-recurring items to the IS practices. The final sample consisted of 156 firms for the period of 2006 - 2010. All the selected listed firms in this study had 5 years complete financial report and the independent variables data are available. Therefore, the data used for this study was panel data and were analyzed using quantitative method to facilitate statistical hypothesis testing. Table 2 shows the number of firms doing nonrecurring items to smooth their income. It also presents the number of firms categorized as smoother and non-smoother based on smoothing behavior index using the simple random walk model (SRWM) to estimate the expected earnings. The observation on the notes of the financial reports and auditor reports of the firms were made to find out the consistency of the selection of accounting methods. These observations were made on financial reports to determine the tendency of using non-recurring

item transactions. After going through the annual audit reports, the nature of the non-recurring item transactions was subsequently classified into six major categories according to their types as shown in Table 2

As seen in Table 2 for non-recurring transactions, managers mostly preferred to sold or disposal of property, plant and equipment and second to sell or disposal of long term investments. The third most prevalent non-recurring item transactions type is discontinues operation. From the sample of firms doing non-recurring item transactions selected in this stage, the researcher calculated an "expected" earnings number that the firms would use to smooth their income. Expected earnings are used as a reference point from which measures of the deviation of actual earnings can be developed. Positive values of smoothing behavior (SB) mean that the analyzed firm is an income smoother (Moses, 1987). By using a smoothing behavior index, firms were categorized as smoothers and non-smoothers. Table 3 shows the number of smoother and non-smoother firms that were determined according to simple random walk model (SRWM) model.

As presented in the Table 3, in the first year (2006) there were 33 (67%) of the sample firms had positive SB values and therefore were classified as income smoothers. In the second year (2006) there are 27 firms (66%) of the sample firms had positive values of SB and they were classified as smoothers from the total of 41 firms. In the last years, on the last year in 2009 there were 9 firms (35%) out of 26 firms had positive SB values. This findings concluded that the highest percentage of using non-recurring item transactions (67%) in 2006, and the lowest of non-recurring item transactions (35%) in 2009 and also assert that Indonesian listed firms tend to use non-recurring item transactions as income smoothing instrument to smooth their income figure.

The second research objectives are to investigate the association between company specific variables to IS practices. This association was modeled using the logistic regression.

Using this model, the dependent variable only contains two categories: the income smoothing status of companies, which 1 is for smoothers and 0 for non-smoothers. The logistic regression determines the impact of multiple independent variables presented simultaneously to predict membership of one or other of the two dependent variable categories (smoothing and non-smoothing) (Elliot and Woodward, 2007).

Appendix 1 shows the logistic regression output with the logistic regression model which is as follows:

$$\text{Logit}(p_i) = \ln [p_i/1-p_i] = \alpha + \beta_1 \text{SIZE}_i + \beta_2 \text{DEBT}_i + \beta_3 \text{PRT}_i$$

From these outputs, the estimated logistic regression equation in 2006 can be determined as follows:

$$\text{Logit}(p_i) = 9.718 - 0.658 * \text{SIZE} + 1.191 * \text{DEBT} - 2.429 * \text{PRT}$$

Similarly, the logistic regression for other period can be determined by replacing the β_i in the model with the related number in the column B of Appendix 1. The result of Appendix 1 shows the model Chi-square which tests the joint null hypotheses that all slope coefficients are zero proves to be statistically significant at the 1% level for all five periods. This implies that the three model's predictors are able to predict the IS practices. The Nagelkerke R-square was 0.742 in 2006, 0.787 in the 2006, and was 0.792 in 2009. It means that on the average the model's predictors could explain 77.4% in the variation of the smoothing practices. This percentage indicates a moderately strong relationship of 77.4% between the predictors and the prediction (O'Connell, 2005).

To test the reliability of the estimated model, the study used the Hosmer and Lemeshow (H-L) goodness-of-fit test in testing the difference between the model's predicted

values and the observed values. If the H-L goodness-of-fit test is greater than 0.05, as wanted for well-fitting model, then one fails to reject the null hypothesis that there is no difference between the observed and model-predicted value (O'Connell, 2005). This implies that the model's estimates fit the data at an acceptable level. This means that well-fitting models show non-significance on the H-L goodness of fit test. This desirable outcome of non-significance indicates that the model prediction does not significantly differ from the observed. With these in mind, the p-value of 0.656 in the 2007, which is computed from the Chi-square distribution with 8 degrees of freedom, is not statistically significant and, therefore, the used model was quite a good fit. The same findings occurred for the period after the introduction of CG Codes and for the period after the convergence to IFRS, which means that the used model is quite a good fit respectively.

The $\text{Exp}(B)$ value in Appendix 1 indicates the increase or decrease in predicted probabilities if the corresponding predictor is increased by one unit. If the value of $\text{Exp}(B)$ exceeds 1 then the predicted probability of occurrence increases, conversely if $\text{Exp}(B)$ value is less than 1, any increase in the corresponding predictor leads to the decrease of the predicted probability (O'Connell, 2005). For example, the $\text{Exp}(B)$ value associated with DEBT in the 2008. Hence, when DEBT is raised by one unit the predicted probability of occurrence is 1.823 times large.

- **Factor Affecting IS Practices**

Income smoothing behavior was hypothesized to be associated with several factors. As presented previously, the three (3) alternate hypotheses correspond to the variables such of: company size, profitability and total debt. Those variables were treated as independent variables in the logistic regression model and each of these hypotheses will be discussed in the following subsections.

- **Firm Size and IS Practices**

As shown in H2, this study hypothesized that there is a significant relationship between the IS practices and the company size. Previous studies found that the company size had an effect on income smoothing behavior (Atik, 2009; Mansor and Achmad, 2009; Nuryanah et al., 2011). In this study, the firm size is measured by total assets, after taking logarithm. Logarithm is used for reduce wide-ranging quantities to smaller scopes (O'Connel, 2005). Appendix 1 shows that firm size did not significantly affect to IS practices since at $\alpha=0.1$, $p= 0.755$. These findings lead to the following interpretation, if companies entered into the worst financial situation that affected large and small companies; so management faced the same problems that the company performance was down turn. Therefore managers had to maintain their performance with respect to some market expectations, such as the market income expectation, management (agent) selects optimal accounting procedures for maximizing its benefits, this situation had led managers to engage in income smoothing practices. Therefore, this was the reason why firm size had no significant relationship to IS practices.

- **Profitability and IS Practices**

Presumably, fluctuations in income streams have a more severe impact on low profitability companies; hence, they have a stronger motivation to smooth income figure. Therefore, this study hypothesized that H3: There is a significant relationship between the IS practices and the profitability of the company. Appendix 1 shows the effect of profitability factor to income smoothing and there is significant relationship in all three periods. This study concludes that the incidence of IS practices is greater in a less profitable company. Research by Nuryanah et al. (2011) indicate that, when the company is in a good condition with high profit, managers will report the profit as it is to gain the positive impression from

the stockholders. In turn, the financial crisis caused listed companies to experience financial insolvency and therefore the income smoothing practice was highly considered by managers if the company were in a less profitable or in a loss position in order to reduce the significant decrease of profit or to reduce the amount of losses. Another explanation is that the manager's motivation to manage income comes from the management's responsibility to achieve targeted profit. Ironically, it often happens that the companies themselves who create this pressure to meet the profit target and the market's expectations. Consequently, their managements have incentives to manage earnings to achieve a smooth and growing earnings stream in order to achieve targeted (Craig and Walsh, 1989).

- **Debt Financing and IS Practices**

As seen in H4, this study hypothesized that there is a significant relationship between the IS practices and the total debt of the company. The previous literature suggests that leveraged firms engage in IS practices to avoid debt covenant defaults, and firm managers that have defaulted on debt contracts may choose to manage company income to avoid heavy costs resulting from covenant violation (Defond and Park, 1997). Appendix 1 shows a significant relation ($\alpha=0.05$) between IS practices and debt financing. This finding imply that in the current global economy, companies that have high leverage may be at risk of bankruptcy if they are unable to make payments on their external debt financing and they may also be unable to find new lenders in the future. If a company wishes to take out a new loan, lenders will scrutinize several measures of whether the company is borrowing too much and will demand that it keeps its debt within reasonable boundaries, because that high debt reliance encourages managers to overcome debt covenant through IS practices (Ashari et al, 1994; Tseng and Lai, 2007).

G. Conclusion, Limitation and Suggestions

The research objective is to investigate the use of non-recurring item transactions as smoothing instrument for smoothing company income. The findings show that the highest percentage of using non-recurring item transactions make non-recurring item transactions make (64%) in 2006, and the lowest of non-recurring item transactions (55%) in 2008. These findings also assert that Indonesian listed firms tend to use non-recurring item transactions make non-recurring item transactions make as income smoothing instrument to smooth their income. The two independent variables such as profitability and debt financing have positive significant influence to IS practices.

The limitation this paper that only focused on publicly listed companies in Indonesia, as an emerging capital market. Therefore, the findings reported in this paper might not be generalizable to other firms in other countries with different economic and business settings. The suggestions for future research that future research can develop and combine a better IS practice model. It can develop a particular model for each industry, maybe with different industry characteristics, such as the influence of some other IS instruments to company income that might produce different and new IS models.

References

- Abdullah, S.N., K.N.I.K., Ismail and N. Lode. 2002. Disclosure of Extraordinary Items and Income Smoothing Behavior in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 21:57–75.
- Albrecht, W.D. and F.M. Richardson. 1990. Income Smoothing by Economic Sector. *Journal of Business Finance and Accounting*, 17: 713-731.
- Ashari, N., H.C. Koh, S.L.Tan., W.H. and Wong. 1994. Factors Affecting Income Smoothing Among Listed Companies in Singapore. *Accounting and Business Research*, 24: 291- 301.
- Atik, A. 2009. Detecting Income Smoothing Behaviors of Turkish Listed Companies Through Empirical Tests Using Discretionary Accounting Changes. *Critical Perspectives on Accounting*, 20: 591–613
- Barnea, A., J. Ronen, and S. Sadan. 1976. Classificatory Smoothing of Income with Extraordinary Items. *The Accounting Review*, Jan: 111- 121.

- Beattie, V., S. Brown, D. Ewers, B. John, S. Manson, D. Thomas, and M. Turner. 1994. Extraordinary Items and Income Smoothing: A Positive Accounting Approach. *Journal of Business Finance and Accounting*, 21(6): 791-811
- Black, E.L., T. A. Carnes, and V. J. Richardson. 2000. The Value Relevance of Multiple Occurrences of Nonrecurring Items. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 15 (4): 391- 411
- Cameron, A.B. and L. Stephens. 1991. The Treatment of Non-Recurring Item in the Income Statement and Their Consistency- With FASB Concept Statements. *ABACUS*, 27 (2): 81- 96
- Chong, G. 2008. Is The Income Smoothing Ethical? *The Journal of Corporate Accounting and Finance*, Nov/Dec: 41- 44.
- Craig, R. and P. Walsh, 1989. Adjustments for Extraordinary Items in Smoothing Reported Profits of Listed Australian Companies: Some Empirical Evidence. *Journal of Business Finance and Accounting*, 16(2): 229-245.
- DeFond, M.L. and C.W. Park, 1997. Smoothing Income in Anticipation of Future Earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 23:115-39.
- Dempsey, S. J., H. G. Hunt, and N. W. Schroeder. 1993. Earnings Management and Corporate Ownership Structure: An Examination Of Extraordinary Items Reporting. *Journal of Business Finance and Accounting*, 20 (4): 479-500.
- Eckel, N. 1981. The Income Smoothing Hypothesis Revisited. *Abacus*, 17(1): 28-40.
- Elliot, A., and W. Woodward. 2007. *Statistical Analysis Quick Reference Guidebook*. Thousand Oaks: Sage.
- Gu, Z. and T. Chen. 2004. Analysts' Treatment of Nonrecurring Items in Street Earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 38 (1-3): 129 -145
- Habib, A. 2005. Firm Specific Determinants of Income Smoothing in Bangladesh: An Empirical Evaluation. *Advances in International Accounting*, 18: 53-71
- Heflin, F., S. S. Kwon, and J. J. Wild. 2002. Accounting Choice: Variation in Managerial Opportunism. *Journal of Business Finance and Accounting*, 29 (7): 1028- 1078.
- Mansor, N. and C. A. Achmad. 2009. Board Independence, Ownership Structure, Audit Quality and Income Smoothing Activities: A Study on Malaysian Market. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 5, (11):1-13
- McClave, J.T., P.G. Benson, and T. Sincich. 2011. *Statistic for Business and Economics*. Boston MA: Pearson Education Publication.
- Mohamad, N. R. B. (2001). *Income smoothing practices among listed firms in Malaysia*. Unpublished master's thesis, Graduate School Studies, University Putra Malaysia.
- Moses, O. D. 1987. Income Smoothing and Incentives: Empirical Test Using Accounting Changes. *Accounting Review*, 62 (2): 358-377
- Nuryanah, S., M. Sardar, and N. Islam. 2011. Corporate Governance and Performance: Evidence from an Emerging Market. *Malaysian Accounting Review*, 10 (1), 17-42
- O'Connell, A. A. (2005). *Logistic Regression Models for Ordinal Response Variables*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Stefanescu, M. (2009). The Effect of SFAS 144 on Managers' Income Smoothing Behavior. *WP*, available at: <http://dhanna.cox.smu.edu/SMUWeb/workshop/W20052006>. Accessed on 21, December 2012
- Stolowy, H. and G. Bartov. 2004. Accounts Manipulation: A Literature Review and Proposed Conceptual Framework. *Review Accounting and Finance*, 3(1): 1- 62

Tseng, L. J. and C.W. Lai. 2007. The Relationship between Income Smoothing and Company Profitability: An Empirical Study. *International Journal of Management*, 24 (4): 727- 823.



Appendix

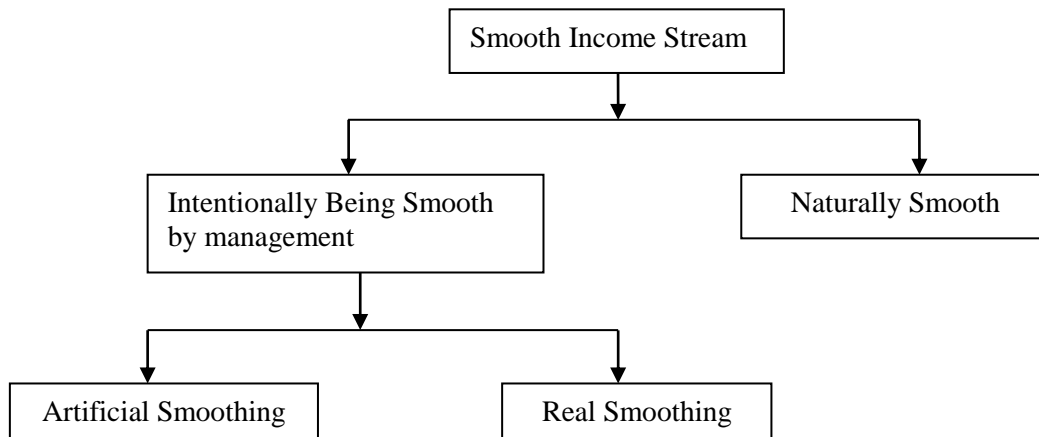


Figure 1. A Broad Perspective of Income Smoothing
 Source: Eckel (1981), p. 29

Table 1: Nature of Nonrecurring Items

No.	Description
1	Sales/disposal of long term investments
2	Sales/disposal of property, plant and equipment
3	Goodwill written off
4	The write off assets to recoverable amount
5	Discontinues operation
6	Extraordinary Income in associated companies
7	Expenses related to listing and issue of securities
8	A restructuring of the activities of an enterprise and the reversal of any provision for the costs of restructuring

Source: Adapted and revised from Abdullah et al. (2002) and PSAK 25 (paragraph17)

Table 2 Firms Doing Nonrecurring Item by Period

No.	Description	2006	2007	2008	2009	2010
1	Sales/disposal of long term investments	10	8	11	7	6
2	Sales/disposal of property, plant and equipment	13	14	12	13	10
3	Goodwill written off	1	-	-	-	-
4	The write off assets to recoverable amount	10	10	6	7	5
5	Discontinues operation	8	7	8	2	4
6	Expenses related to listing and issue of securities	6	2	3	1	1
	Total firms doing non-recurring items	48	41	40	30	26

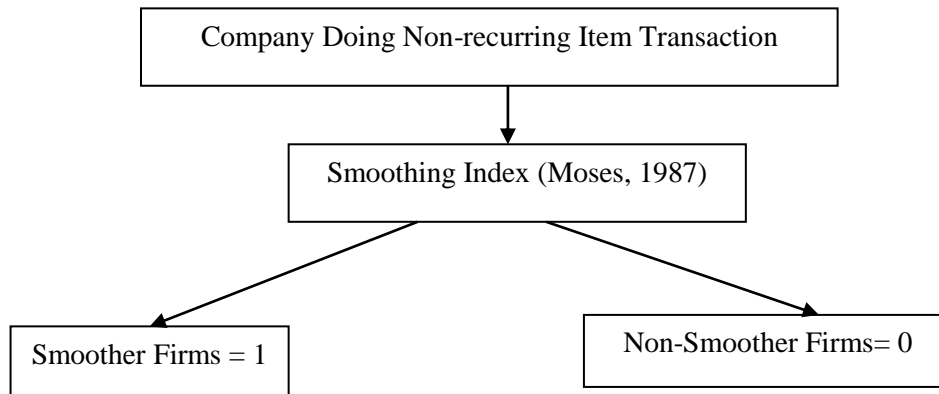


Figure 2: Selecting Smoothing and Non-Smoothing Company Using Moses Index (1987)

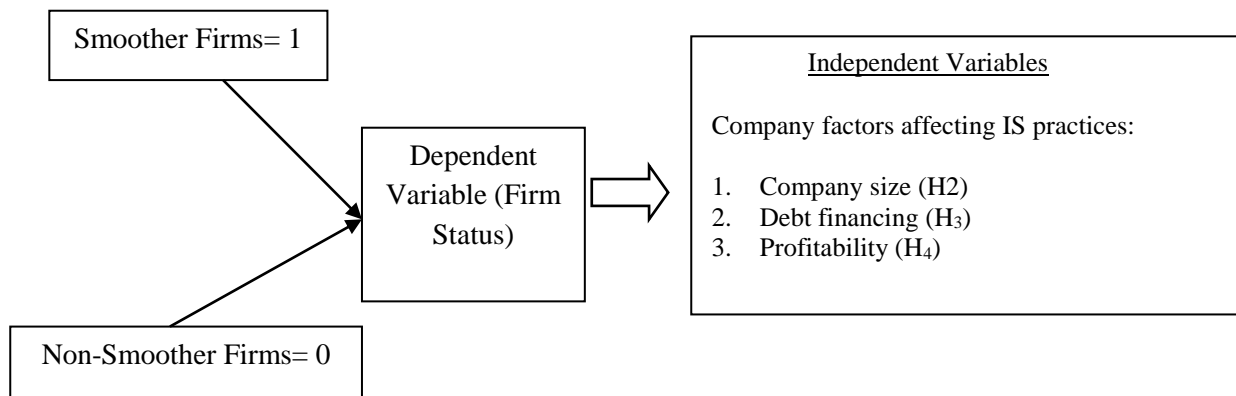


Figure 3: Diagram of the Logistic Regression Test

Table 3: Percentage (%) of Smoother and Non-smoother Firms According to SRWM Model

Year	Total Firms Doing Non-Recurring Transactions	Categorized as Non-Smoother Firms	%	Categorized as Smoother Firms	%
2006	49	16	33%	33	67%
2007	41	14	34%	27	66%
2008	41	16	39%	25	61%
2009	30	14	47%	16	53%
2010	26	14	54%	12	46%

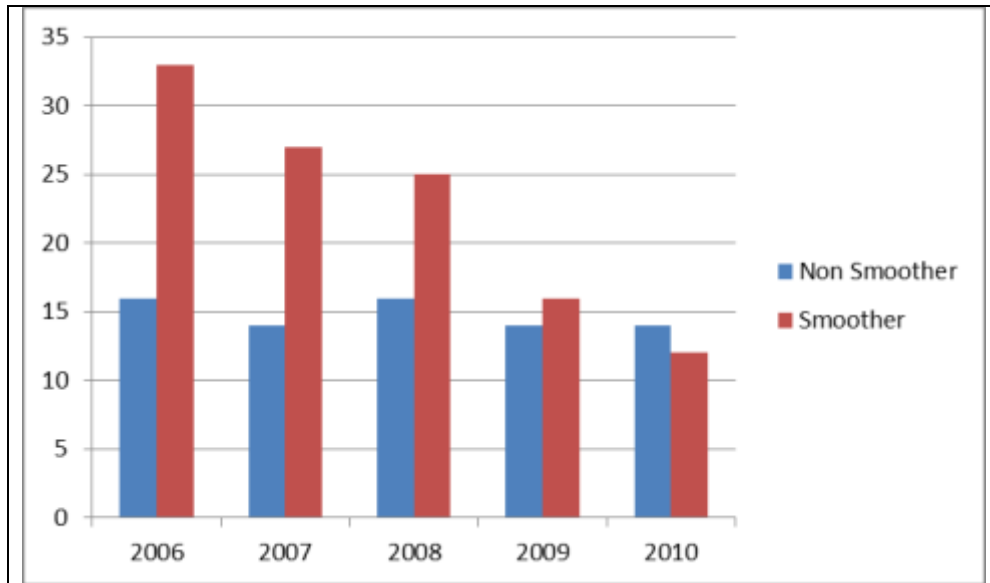


Figure 4: Smoother and Non-smoother Firms According to SRWM Model

Tabel 4: Logistic Regression Analysis Output

Variables	2006						2007						2008					
	B	S.E.	Wald	df.	Sig.	Exp(B)	B	S.E.	Wald	df.	Sig.	Exp(B)	B	S.E.	Wald	df.	Sig.	Exp(B)
Company Size (SIZE)	-1.324	0.550	3.097	1	0.755	0.2656	-1.088	0.561	2.097	1	0.205	0.2866	-1.902	0.161	3.201	1	0.405	0.2039
Debt Financing (DEBT)	11.420	0.707	5.850	1	0.026**	8.093	12.823	0.997	2.850	1	0.029**	6.093	11.204	0.127	5.810	1	0.019**	4.2393
Profitability (PRT)	-11.095	0.296	4.613	1	0.014**	0.068	-9.033	0.126	4.613	1	0.024**	0.968	-9.801	0.809	4.013	1	0.044**	3.2968
-2 Log-likelihood Value	46.106						67.003						59.966					
Omnibus Test (Model Chi square)	24.325 (df=3) (p>0.000)						43.520 (df=3) (p>0.000)						23.325 (df=3) (p>0.000)					
Hosmer and Lemeshow (Goodness of fit test)	5.507 (df=8) (p>0.656)						6.027 (df=8) (p>0.306)						8.601 (df=8) (p>0.750)					
Cox and Snell R Square	0.599						0.669						0.502					
Nagelkerke R Square	0.753						0.802						0.702					

Tabel 5: Logistic Regression Analysis Output

Variables	2009						2010					
	B	S.E.	Wald	df.	Sig.	Exp(B)	B	S.E.	Wald	df.	Sig.	Exp(B)
Company Size (SIZE)	-1.144	0.661	2.102	1	0.355	0.8066	-2.123	0.160	3.327	1	0.305	0.2676
Debt Financing (DEBT)	10.903	0.897	4.202	1	0.059*	6.0193	12.003	0.067	5.503	1	0.063*	8.2093
Profitability (PRT)	-12.093	0.726	6.835	1	0.084*	0.9168	-9.733	0.029	4.013	1	0.054*	0.2608
-2 Log-likelihood Value	56.126						50.006					
Omnibus Test (Model Chi square)	22.205 (df=3) (p>0.000)						33.020 (df=3) (p>0.000)					
Hosmer and Lemeshow (Goodness of fit test)	6.720 (df=8) (p>0.436)						8.017 (df=8) (p>0.230)					
Cox and Snell R Square	0.661						0.769					
Nagelkerke R Square	0.802						0.942					

Facing the Challenges of e-Government in Indonesia: Demographic Inequalities

ARIEF RAHMAN*

Universitas Islam Indonesia

Abstract: *E-government readiness in Indonesia showed no improvement from year to year, indicating that the implementation of e-government is encountering serious problems. Despite the lack of empirical evidence, it is indicated that one of them is digital inequalities or also known by the term of digital divide. This research paper aims to investigate the impact of demographic inequalities, represented by gender, age, and place of residence, on e-government use in Indonesia. In doing so, a structural equation model was proposed based on literature review and examined through a survey research. Data were collected from a survey of 237 e-government users in Indonesia. The study took place in Sleman and Tulungagung regencies. The PLS (Partial Least Square) method was applied by using SmartPLS to estimate the research model. Smith-Satterwait test was employed to examine the moderating effect. The results show that digital inequalities, particularly age and place of residence, are significant problems in Indonesia, which should be resolved in order to improve the usage of e-government. The research is significant for scholars to give an empirical evidence of digital inequalities and its impact on e-government use, especially in Indonesia. For the local governments, this research may contribute to policy making in improving the e-government readiness.*

Keywords: *Digital Divide, e-Government, Demographic, Digital Inequality, Indonesia.*

* Author can be contacted at: arief.rahman@uii.ac.id

Introduction

The e-government initiative can be traced back to the paradigm of New Public Management or Reinventing Government. In the reinventing Government or New Public Management paradigm, Osborne and Gaebler (1992) proposed that citizens should be regarded and treated as customers, suggesting that the delivery of government services should be redesigned with a customer focus. The paradigm also emphasizes the principles of "catalytic government" and "community-ownership." Public officials are challenged to think about how to empower citizens to take ownership of community problems. The approach urges officials to partner with citizen groups and non-profit organizations to identify solutions and deliver public services effectively.

A major obstacle to the reinventing government reform is the burden of transaction costs imposed on public officials and citizens. Government officials may find citizen engagement time consuming and costly. Given the time pressure they already face in the daily operation of government, networking with citizens and proactively soliciting public input seem an unnecessary and unwanted burden. Citizens also may be reluctant to participate in the decision-making process of the government. Attending meetings, writing formal feedback, and responding to surveys about public services may require a time commitment that many citizens are not willing to give regularly.

In addressing those challenges, information and communication technology (ICT) has played an increasingly important role in public administration (Heeks, 1999). The introduction of the Internet and the World Wide Web marked a new stage in information technology usage by shifting the focus of governance to its external relationship with citizens (Seneviratne, 1999). Technology certainly plays an important role in fostering the change through what so-called e-government system.

Despite the benefits offered by e-government system, some barriers hurdle the implementation of the system. Applying e-government system is not simply transferring the system from one country to another-mostly from developed to developing country as additional efforts are needed in implementing e-government system in a developing country (Schuppan, 2009). Specific barriers associated with the e-government initialization process are many, including issues of citizen privacy and security, inadequately skilled citizens and government employees, and the tendency for e-government to replicate traditional government (Marche and McNiven, 2003). Finally there is the issue digital inequality or digital divide in society, which is still a huge one, although the empirical evidence on its impact on e-government systems use is currently lacking. As the primary stakeholder in e-government systems, citizens play a substantial role in e-government success (Davison et al., 2005).

E-Government in Indonesia has been established since 2001 through Presidential Directive No. 6/2001 (Harijadi and Satriya, 2000; Haryono and Widiwardono, 2010). The objectives of e-government in Indonesia are to improve democratic process, enhance accountability and transparency, and enable the transformation towards an information society (Furuholt and Wahid, 2008). Currently, there are approximately 450 websites managed by local governments throughout Indonesia (Wahid, 2008). Local government in Indonesia has implemented some forms of e-government systems, most of which are in the form of the electronic systems used for its internal processes (G2G - Government to Government). Moreover, many local governments, departments and government agencies have produced websites in order to interact with their stakeholders (G2C - Government to Citizens and G2B - Government to Businesses).

The implementation of e-government in Indonesia is facing some challenges (Harijadi, 2004), which include: lack of financial resources, low quality of human resources, low ICT penetration and lack of regulation and culture. Furthermore, a study by Hwang and Syamsuddin reveals some other main obstacles to the development of e-government in Indonesia, particularly at the local government level, where there exists technical difficulties, the digital divide, and the absence of willingness to use e-government systems by citizens and government employees alike (Hwang and Syamsudin, 2008). According to the survey of e-government readiness by the United Nations, Indonesia's ranks and e-government indices reflect an unsuccessful implementation of e-government in the country in comparison to other countries (illustrated in Table 1).

Norris (2001) believes that the digital divide reflects social inequality. Therefore, to understand the digital inequalities, the issue requires contextualising. In developing countries like Indonesia, where most social and cultural aspects are unequal, the perspective taken on the digital divide requires expansion. In order to obtain a comprehensive understanding of the issue, this research examines the digital inequalities from the perspectives of access to information and communication technology (ICT), capability in using the ICT, personal innovativeness toward ICT, and the moderation roles of demographic characteristics, which are represented by gender, age, and place of residence.

Hence, this paper aims to answer the main research question, which is: *Do demographic factors moderate the relationship between the digital divide and e-government system use in Indonesian local government?* This paper is divided into six sections, in following manner: introduction; theoretical framework and hypothesis development; research method; research findings; and finally, implications, which is written in integration with limitations and suggestions for future research directions.

Theoretical Framework and Hypothesis Development

Differential behavioural patterns in fields such as sociology, marketing, psychology have been associated with socio-economic inequality. Demographic characteristics instigate a synergy of social and economic forces from infrastructure to individuals and resources in the surrounding environment (Borstein and Bradley, 2003). As a consequence, these inequalities have been interpreted as internal and external resources, or constraints, that together, shape experiences and opportunities, living and working conditions, place in society, and even ways in which the world is viewed (Williams, 1990).

In the field of information systems, the influence of socio-economic inequality on system acceptance has also been explored and investigated. As a matter of fact, research into the digital inequality has been dominated by studies on socio-economic inequalities, such as gender (eg. Venkatesh and Morris, 2000; Agarwal et al., 2009; Schleife 2010; Wei et al. 2010); age (eg. Agarwal et al., 2009; Hargittai, 2006; Schleife, 2010; Morris and Venkatesh, 2000); residential place (eg. Mossberger et al., 2006; Mariscal, 2005; Kuk, 2002; Stern et al., 2009). In assessing the effect of demographic factors, this research uses framework of digital divide by Rahman and Quaddus (2012); Rahman, et al. (2012).

A. Digital Divide Framework

Initially, digital divide was defined as the inequality between those who had access to ICT and those who had not (De Haan, 2004; DiMaggio et al., 2001), and there is large body of research in digital divide focuses only in term of access to ICT and demographic factors. As a consequence, this narrow understanding then leads the policy makers to uncomprehensive policy in resolving the issue of digital divide. In order to get a better

understanding, Dewan and Riggins (2005) and Wei et al. (2010) suggested more comprehensive models.

Based on the extensive literature review and a field study, Rahman and Quaddus (2012) argue that there are three factors of digital divide determining e-government use, namely the access to ICT, ICT self-efficacy, and innovativeness toward a new ICT. The framework extends those previous models in digital divide by Dewan and Riggins (2005) and Wei et al. (2010). The framework suggests that access to ICT (ACCE), ICT self-efficacy (CSE) and innovativeness toward new ICT (INNO) influence e-government use (USE) (see Figure 1). Furthermore, the access to ICT determines the ICT self-efficacy, and in turn the ICT self-efficacy influences innovativeness in ICT.

Since the framework offers a more comprehensive understanding on digital divide, this research uses the framework to assess the moderating effect of gender, age and residential place.

B. Gender

Gender is potentially critical to our understanding of user acceptance because it plays an important role in determining how users make decisions about using new technology (Venkatesh and Morris, 2000). From a psychological stand point, Bem and Allen (1974) found that gender difference influences decision making processes through the differences in schematic processing by men and women. Bem (1981) argues that men and women encode and process information using different socially constructed cognitive structures, which in turn, help determine and direct an individual's perception. As a result, individuals tend to make decisions, which reflect biases inherent in the individual's perceptions.

In the studies on technology adoption, it has been found that women typically show a higher level of computer anxiety (Rosen and Maguire, 1990; Igarria and Chakrabarti, 1990) and lower computer aptitude (Fetler, 1985). As a consequence, gender difference plays significant role as a moderating variable in internet use (Agarwal et al., 2009; Schleife, 2010), technology use (Venkatesh and Morris, 2000), and computer self-efficacy (Wei et al., 2010).

C. Age

There is large body of research on socio-cognitive changes among individuals based on age. In the area of psychology, a great deal of research focuses on understanding the differences in abilities, traits, or performance outcomes (eg. Rhodes, 1983; Czaja and Sharit, 1993; Sharit and Czaja, 1994; Myers and Conner, 1992). Age affects influencing attitudes caused by a number of factors, including social role (psychosocial) changes and biological changes (Rhodes, 1983). Furthermore, Rhodes (1983p. 329) explains that psychosocial aging consists of “systematic changes in personality, needs, expectations, and behaviour as well as performance in a sequence of socially prescribed roles and accumulation of experiences”. Biological ageing is characterised by changes in anatomical as well as psychological states that naturally occur with age, such as changes in sensorimotor performance, visual acuity, reaction time and so on.

Confirming the studies in psychology, a study by Czaja and Sharit (1993) shows that age has an impact on the performance of computer-based tasks. By examining the effect of age on the use of technology in the workplace directly and indirectly as a moderator variable, the results indicated that in the short-term, age acts as a moderating role instead of acting as an independent variable. Bucy (2000) suggests that age, together with income, education, and

family structure are important determinants of internet use. His research indicated that older respondents are disadvantaged in terms of Internet use.

D. Place of Residence

Disparity in access to and use of computers and the Internet is based on geographical factors as well. Studies by Newburger (2001) and Mills and Whitacre (2003) concluded that an access and use gap existed in the USA between metropolitan and non-metropolitan areas. Similar research into the differences in internet use in rural and urban areas were conducted by Hindman (2000), Nicholas (2003), and Schleife (2010). The rural geographical disadvantage has not yet been eliminated by the existence of the Internet. Nicholas (2003) and Schleife (2010) concluded that the patterns of development exacerbated rural disadvantage. Unlike the residents in cities or metropolitan areas, residents in rural or non-metropolitan regions do not have the same variety of learning and observation possibilities (e.g., free public internet access and internet cafés). Moreover, rural areas also have lower income levels and less financial resources compared to cities due to higher rural unemployment rates. This further decreases the possibilities of adopting the internet for people living in these regions (Schleife, 2010).

Based on the discussion above, the following hypotheses are posited:

Hypothesis 1 *Gender has a moderating effect on the relationship between the Digital Divide and e-Government Use.*

Hypothesis 2 *Age group has a moderating effect on the relationship between the Digital Divide and e-Government Use.*

Hypothesis 3 *Place of residence has a moderating effect on the relationship between the Digital Divide and e-Government Use.*

Research Method

For this study, data of users was obtained from both local governments, Tulungagung and Sleman regencies. Following formal inquiry and procedure in both regencies, researcher could obtain data of users within year of 2010 until the mid of 2012 in Sleman regency, while in Tulungagung regency the data was the users within year of 2011 until midyear of 2012. Based on the lists provided by both regencies, the total e-government users are 668 persons. Considering the number of population, hence researcher conducted personally administered survey in the data collection. Personally administered survey refers to face-to-face survey with the respondents (Frazer and Lawley, 2000).

As a result, 354 copies of questionnaires were distributed, of which 251 were retrieved. A review then was undertaken to seek out errors in the form of invalid data, including missing values or incomplete responses and finally 237 responses were usable in this research. Therefore the effective response rate in this study is 35.5%.

To answer the research question, this research applied multi-group analysis by using Smith-Satterthwait (S-S) test with a pooled error term across groups. The analysis was conducted using the Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using software of SmartPLS version 2.0.M3. PLS-SEM is used based on the consideration of small sample size in this research and the research design applied in this current study, which is exploratory research (Hair et al., 2012). SEM itself is “...a method for representing, estimating, and testing a theoretical network of mostly linear relations between variables...” (Rigdon, 1998). Two-stage procedures were undertaken in the PLS analysis; measurement model assessment and structural model assessment.

Research Findings

The analysis involving all of the samples shows that all of the factors: access to ICT, ICT self-efficacy and innovativeness toward new ICT, significantly influence e-government use (see Figure 2). The relationships between access to ICT and ICT self-efficacy as well as the ICT self-efficacy and innovativeness toward new ICT are also significant. The R^2 of the framework is 0.518, means that the model explained 51.8% of the variance in the e-government use.

Before proceeding with the analyses of moderating effect, the characteristics of the respondents were examined, as shown in Table 2. This describes the characteristics of the respondents based on gender, age group, and place of residence. As shown in the table, the majority of the respondents were males (N = 184), belonging to the age group '40 years old and below' (N = 169), and living in the city area or living within a radius of 10 kms or less from the city centre (N = 168).

Assessment of the measurement model was carried out to ensure the reliability and validity of the measurements. The assessment covered three parts, being (1) item reliability, (2) internal consistency, and (3) discriminant validity. In this stage, the assessment was conducted for two categories: the whole sample (N = 237), and groups of the sample based on the groups of gender, age, and place of residence.

Table 3 presents the measurement analysis for the whole sample (N = 237). Item reliability was examined based on the item's loading along with its respective construct. As suggested by Gefen, Straub, and Boudreau (2000), the minimum value for the item loading was 0.7. Hence, all items satisfied the requirements. In terms of internal consistency, all constructs exceed 0.60, hence they were sufficient, as suggested by Bagozzi and Yi (1988). The values of average variance extracted (AVE) from the constructs were also above the

threshold, which was 0.50 (Fornell and Larcker, 1981). The results demonstrate that the measurement model for all respondents ($N = 237$) was sufficient.

The assessments of the measurement model for each group sample, namely gender, age, and place of residence, are shown in Table 4 and 5. The results also demonstrate that all measurements were valid and reliable in terms of the level of item and the construct. Having achieved effective results, the next stage undertaken was the analysis of the structural model to examine the moderating effect of the socioeconomic factors.

In assessing the structural model, the data was also divided into two categories, which were full-sample and multi-group based on the groups. PLS analysis using the bootstrap procedure was employed to obtain the path coefficients, standard errors and t-values to determine the statistical significance. Figure 2 presents the results of the assessment of the structural model for the full sample of respondents ($N = 237$). The assessment of the structural model based on the groups was conducted. In addition to the assessment of the models for each group of respondents, this research also employed the Smith-Satterwait test to examine the moderating effect. The Smith-Satterwait test was chosen because the samples are not normally distributed and the variances of the group are not equal (Moore and Chang, 2006; Hsieh et al., 2008). Table 6 presents the results of the t-statistics to determine the significant effects of gender, age, and residential place.

Conclusion, Implication, and Limitation

In terms of gender, contrary to expectations, the findings of the multi-group PLS analyses failed to support these as moderating variables, since no significant differences were found between the groups regarding the influence of the digital divide on e-government use. Therefore, hypotheses H1, was rejected. Despite the above findings, it is noteworthy that

earlier studies presented some contradictory results on the effects of gender on e-government use. Some studies did not find gender differences in the use of, and attitudes towards, e-government systems (Reddick, 2005; van Dijk et al., 2008; Colesca and Dobrica, 2008; Belanger and Carter, 2009; Taipale, 2013).

On the other hand, the results confirmed the moderating effects of age and place of residence in the impact of digital inequalities on e-government use. The inequalities were found in developing countries (Mariscal, 2005; Akca et al., 2007) and developed countries (Mossberger et al., 2006; Schleife, 2010; Hindman, 2000). This situation was related to the issues of “market efficiency gaps” and the “access gap” as suggested by the World Bank (Mariscal, 2005). The market efficiency gap refers to the differences between the levels of ICT infrastructure and service penetration that can be reached under current conditions, and the level one would expect under optimal market conditions. Furthermore, the access gap refers to situations where a gap between urban and rural areas continues to exist, even under efficient market conditions, where a proportion of the population cannot afford to pay market prices. Since rural areas tend to lag economically behind urban areas due to industrial and labour markets being concentrated in urban areas (Malecki, 2003), people in rural areas tend to lag behind in term of access to ICT.

Referring to the multi-group analysis, the results of this study indicate that younger and older age groups have different behavioural patterns. Morris and Venkatesh (2000) argue that those in younger age groups are much more likely to have been exposed to ICT at a relatively early age. In contrast, older individuals are much less likely to have ICT experience due to the completion of their education prior to the introduction of the personal computer. Hence, opportunities for older people to interact with ICT have been very limited. Younger people in general have more experience in making judgements about technology. As a

consequence, older people tend to be less confident in their ability to utilise ICT and show less willingness to try new ICT. Similar conclusions were also drawn by Czaja and Sharit (1993) and Hill, Beynon-Davies, and Williams (2008).

The results of the multi-group analysis and the demographic factors of e-government system users (Table 2), imply that gaps undeniably exist. E-government users in Indonesia are dominated by males, young people, and city dwellers. The characteristics of users are in line with findings from previous research into ICT users. Studies across the globe on the digital divide have long been documenting the gaps in developing countries (Schuppan, 2009; Akca et al., 2007; Warschauer, 2003; Hwang and Syamsuddin, 2008) and developed countries (Mossberger et al., 2006; Stern et al., 2009; Schleife, 2010; Ono, 2006), with similar results. Even in the US, one of the most developed countries in the world, NTIA (2000) reported that groups of rural poor, ethnic minorities, and female head-of-households are the most disadvantaged groups in terms of ICT access.

Scholars in ICT4D (Information and Communication Technology for Development) such as Heeks (2009), Steyn (2011), and Johanson (2011) posit that ICTs nowadays have become more and more important as economic, social and political life becomes increasingly digital. Hence, the issue of the digital divide requires further understanding and ultimate resolution. Otherwise, those who are in disadvantaged groups living without ICTs will be increasingly excluded. Warren (2007) argues that non ICT-users will suffer many disadvantages when offline services from government, corporations and individuals are reduced as a result of increasing dependence on the internet. The use of online services is increasing rapidly as service providers take advantage of lowering costs and strive to improve the quality of their services (making them quicker, more interactive, and more flexible).

Social gaps lead to a digital divide, which lead to deeper inequalities, and create a vicious digital cycle (Warren, 2007).

With the implications of the findings on the moderating effects of the socioeconomic factors, the current research suggests that in resolving the digital divide, policy makers must understand the complexity and dynamics of the issue, and incorporate the behavioural patterns of different demographic groups (Hsieh et al., 2008), rather than implementing single generic policies that treat every individual as the same. Additional funds could be spent on the group alignment approach in order to understand the behavioural patterns of each group. This approach is believed by some to lead to a more effective outcome (Hsieh et al., 2009). Policies such as tax exemption for projects by corporations that bring ICT to low-income people through their CSR (Corporate Social Responsibility) and “E-rates” to subsidise Internet use and ICT for public schools and libraries, might be implemented by Indonesia. These strategies have effectively boosted the connectivity rate in the US (DiMaggio et al., 2001), Free Internet access in public places, which has been provided by some local governments in Indonesia, is a proven strategy in assisting disadvantaged people to access the Internet. In addition to access to ICT, the government might increase the awareness of the existence, and moreover the benefits of e-government services for disadvantaged groups.

This research hopes to pioneer an advance in the theoretical account of the digital inequalities. The study goes beyond previous studies on the digital divide and comprehensively describes how the access to ICT influences the ICT self-efficacy, which in turn impacts upon the innovativeness in ICT. This account aims to contribute to the more advanced explanations of the digital inequalities as socio-economic phenomenon.

The results of this research have important practical implications, particularly in relation to improving e-government use or e-government readiness. Lack of use and access to

e-government systems can have a flow-on effect, causing wider inequalities in society (Jorgansen and Cable, 2002; Warren, 2007). The e-Government Readiness Survey shows that the development of e-government systems in Indonesia has not only not been progressing, it may be regressing. Indonesia needs strategic and integrative policies to improve their e-government systems. This research provides a more comprehensive understanding of the issue of the digital divide as the basis for a new integrative policy to close the gap.

The demographic characteristics of those who actually used the e-government system in this study were: male, aged 30-40, residing in the city area. Most of the previous research into the digital divide found similar demographic characteristics for the Internet users. However, in order to expand the numbers of e-government users, the government could improve its customer base by paying more attention to other groups of people. By considering such factors as gender, socioeconomic status and place of residence it should be possible to increase the number of e-government users.

The results of multi-group analyses show that place of residence has the strongest moderating effect, compared to other demographic measures. Hence, special policies are needed to narrow the digital divide between rural and urban residents. Learning from the experiences of other countries, local governments in Indonesia should provide free public Internet and ICT access in rural areas. In addition, the government should develop the e-government services based on the needs of its citizens, including those disadvantage groups of citizens (those of lower socioeconomic status, older age, female gender, and reside in rural areas). A comprehensive analysis of needs assessment is thus needed before planning and developing e-government systems.

However, this research has limitation in regard with the actual use of the e-government system. The sample of users was limited to users of G2C (Government to

Citizens) e-government systems provided by local governments. Users of other types of e-government systems as well as those of central government may have different views on e-government usage and the digital divide. Therefore, there is still a need to investigate and compare the perceptions of users of other e-government systems.

This study collected data from the users of e-government systems provided by local governments. Although the justification for the choice of these particular users is valid, future research might interview and survey other significant respondents. In addition, the use of multiple respondents would widen applicability.

Finally, in addition to researching the impact of the digital divide on e-government system success, the core of this model is applicable in other contexts, especially those that are influenced by the digital divide. Beyond the scope of e-government systems, the conceptual model could be applied to other systems such as e-commerce.

References

- Agarwal, R., A. Animesh, and K. Prasad. 2009. Social interactions and the digital divide: Explaining variations in internet use. *Information Systems Research* 20 (2): 277-294.
- Akca, H., M. Sayili, and K. Esengun. 2007. Challenge of rural people to reduce digital divide in the globalized world: Theory and practice. *Government Information Quarterly* 24: 404-413.
- Bagozzi, R. P., and Y. Yi. 1988. On the evaluation of structural equation models. *Journal of the Academy of Marketing Science* 16 (1): 74-94.
- Belanger, F., and L. Carter. 2009. The impact of the digital divide on e-government use. *Communications of the ACM* 52 (4): 132-135.
- Bem, D. J., and A. Allen. 1974. On predicting some of the people some of the time: The search for cross-situational consistencies in behavior. *Psychological Review* 81 (6): 506-520.
- Bem, S. L. 1981. The BSRI and gender schema theory: A reply to Spence and Helmreich. *Psychological Review* 88 (4): 369-371.
- Borstein, M. H., and R. H. Bradley. 2003. *Socioeconomic Status, Parenting, and Child Development*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bucy, E. P. 2000. Social access to the internet. *The Harvard International Journal of Press/Politics* 5 (1): 50-61.
- Colesca, S. E., and L. Dobrica. 2008. Adoption and use of e-government services: The case of Romania. *Journal of Applied Research and Technology* 6 (3): 204-217.
- Czaja, S. J., and J. Sharit. 1993. Age differences in the performance of computer-based work. *Psychology and Aging* 8 (1): 59-67.
- Davison, R. M., C. Wagner, and L. C. Ma. 2005. From government to e-government: A transition model. *Information, Technology and People* 18 (3): 280-299.
- De Haan, J. 2004. A multifaced dynamic model of the digital divide. *IT Society* 1 (7): 66-88.

- Dewan, S., and F. J. Riggins. 2005. The Digital Divide: Current and Future Research Directions. *Journal of the Association for Information Systems* 6 (12): 298-337.
- DiMaggio, P., E. Hargittai, C. Celeste, and S. Shafer. 2001. *From Unequal Access to Differentiated Use: A Literature Review and Agenda for Research on Digital Inequality*. Russel Sage Foundation.
- DiMaggio, P., E. Hargittai, W. Neuman, and J. Robinson. 2001. Social Implication of the Internet. *Annual Review of Sociology* 27 (1): 307-336.
- Fetler, M. 1985. Sex differences on the California Statewide assessment of computer literacy. *Sex Roles* 13 (3/4): 181-191.
- Frazer, L., and M. Lawley. 2000. *Questionnaire Design & Administration*. Brisbane, Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Furuholt, B., and F. Wahid. 2008. *41st Hawaii International Conference on System Sciences E-Government Challenges and the Role of Political Leadership in Indonesia: the Case of Sragen*. Hawaii: IEEE
- Hair, J. F., M. Sarstedt, C. M. Ringle, and J. A. Mena. 2012. An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. *Journal of the Academy of Marketing Science* 40 (4): 414-433.
- Hargittai, E. 2006. Hurdles to Information Seeking: Spelling and Typographical Mistakes During Users' Online Behavior. *Journal of the Association for Information Systems* 7 (1): 52-67.
- Harijadi, D. A. 2004. Developing e-Government: The Case of Indonesia. In *29th Meeting APEC Telecommunication and Information Working Group*. Hong Kong, China. UNPAN.
- Harijadi, D. A., and E. Satriya. 2000. Indonesia's Roadmap to e-Government: Opportunities and Challenges. In *APEC High-Level Symposium on e-Government*. Seoul, Korea. UN APCICT-ESCAP.
- Haryono, T., and Y. K. Widiwardono. 2010. *Current Status and Issues of e-Government in Indonesia*. <http://www.aseansec.org/13757.htm> (accessed September 7, 2010).
- Heeks, R. 1999. Reinventing government in the information age. In *Reinventing Government in the Information Age. International Practice in IT-Enabled Public Sector Reform*, ed. R. Heeks, 9-21. London: Routledge.
- , 2009. The ICT4D 2.0 Manifesto: Where Next for ICTs and International Development. In *Development Informatics, Working Paper Series*. Manchester, UK. Development Informatics Group, Institute for Development Policy and Management.
- Hill, R., P. Beynon-Davies, and M. D. Williams. 2008. Older people and internet engagement: Acknowledging social moderators of internet adoption, access and use. *Information Technology & People* 21 (3): 244-266.
- Hindman, D. B. 2000. The rural-urban digital divide. *Journalism and Mass Communication Quarterly* 77 (3): 549-560.
- Hsieh, J. P.-A., A. Rai, and M. Keil. 2008. Understanding Digital Inequality: Comparing Continued Use Behavioral Models of Socio-Economically Advantage and Disadvantage. *MIS Quarterly* 32 (1): 97-126.
- , 2009. Addressing Digital Inequality for the Socioeconomically Disadvantaged Through Government Initiatives: Forms of Capital That Affect ICT Utilization. *Information Systems Research Article in Adv.*: 1-24.
- Hwang, J., and I. Syamsuddin. 2008. Failure of e-government implementation: A case study of South Sulawesi. In *3rd International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology*. IEEE Computer Society.
- Hwang, J., and I. Syamsudin. 2008. *The Third International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology, Failure of e-government implementation: A case study of South Sulawesi*. Busan: IEEE Computer Society
- Igbaria, M., and A. Chakrabarti. 1990. Computer anxiety and attitudes towards microcomputer use. *Behaviour & Information Technology* 9 (3): 229-241.
- Johanson, G. 2011. Delineating the meaning and value of development informatics. In *ICTs and Sustainable Solutions for the Digital Divide*, ed. J. Steyn and G. Johanson, 1-18. Hershey, Pennsylvania: IGI Global.
- Jorgansen, D. J., and S. Cable. 2002. Facing the challenges of e-government: A case study of the city of Corpus Christi, Texas. *Advanced Management Journal* 67 (3): 1-7.

- Kuk, G. 2002. The Digital Divide and the Quality of Electronic Service Delivery in Local Government in the United Kingdom *Government Information Quarterly* 20 (353-363):
- Malecki, E. J. 2003. Digital development in rural areas: Potentials and pitfalls. *Journal of Rural Studies* 19 (2): 201-214.
- Marche, S., and J. D. McNiven. 2003. E-Government and e-Governance: The future isn't what it used to be. *Canadian Journal of Administrative Sciences* 20 (1): 74-86.
- Mariscal, J. 2005. Digital Divide in a Developing Country *Telecommunications Policy* 29: 409-428.
- Mills, B. F., and B. E. Whitacre. 2003. Understanding the non-metropolitan-metropolitan digital divide. *Growth and Change* 34 (2): 219-243.
- Moores, T. T., and J. C.-J. Chang. 2006. Ethical decision making in software piracy: Initial development and test of a four-component model. *MIS Quarterly* 30 (1): 167-180.
- Morris, M. G., and V. Venkatesh. 2000. Age differences in technology adoption decisions: Implications for a changing work force. *Personnel Psychology* 53 (2): 375-403.
- Mossberger, K., C. J. Tolbert, and M. Gilbert. 2006. Race, Place and Information technology. *Urban Affairs Review* 41 (5): 583-620.
- Myers, C., and M. Conner. 1992. Age differences in skill acquisition and transfer in an implicit learning paradigm. *Applied Cognitive Psychology* 6 (5): 429-442.
- Newburger, E. C. 2001. *Home Computers and Internet Use in the United States: August 2000*. Washington DC: U.S. Census Bureau.
- Nicholas, K. 2003. Geo-policy barriers and rural internet access: The regulatory role in constructing the digital divide. *The Information Society* 19 (4): 287-295.
- Norris, P. 2001. *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press.
- NTIA. 2000. Falling through the Net.
- Ono, H. 2006. Digital inequality in East Asia: Evidence from Japan, South Korea, and Singapore. In *Asian Economic Panel*. Keio University, Tokyo, Japan. The Earth Institute at Columbia University and the Massachusetts Institute of Technology.
- Osborne, D., and T. Gaebler. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Pub. Co.
- Rahman, A., and M. Quaddus. 2012. *Australasian Conference on Information Systems, Qualitative investigation of digital divide in Indonesia: Toward a comprehensive framework*. Geelong, Victoria, Australia: Deakin University. <http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30049100/rahman-qualitativeinvestigation-2012.pdf> (accessed 21 January 2013).
- Rahman, A., M. Quaddus, and J. Galbreath. 2012. *Conf-IRM, The impacts of digital divide on e-government usage: A qualitative research*. Vienna, Austria. <http://aisel.aisnet.org/confirm2012/75> (accessed 12 October 2012).
- Reddick, C. G. 2005. Citizen interaction with e-government: From the streets to servers? *Government Information Quarterly* 22 (1): 38-57.
- Rhodes, S. R. 1983. Age-related differences in work attitudes and behavior: A review and conceptual analysis. *Psychological Bulletin* 93 (2): 328-367.
- Rigdon, E. E. 1998. Structural Equation Modeling. In *Modern Methods for Business Research*, ed. G. A. Marcoulides, 251-294. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publisher.
- Rosen, L. D., and P. Maguire. 1990. Myths and realities of computerphobia: A meta-analysis. *Anxiety Research: An International Journal* 3 (3): 175-191.
- Schleife, K. 2010. What Really Matters: regional versus Individual Determinants of the Digital Divide in Germany. *Research Policy* 39: 173-185.
- Schuppan, T. 2009. E-Government in developing countries: Experiences from sub-saharan Africa. *Government Information Quarterly* 26: 118-127.
- Seneviratne, S. J. 1999. Information technology and organizational change in the public sector. In *Information Technology and Computer Applications in Public Administration: Issues and Trends*, ed. G. D. Garson, 41-61. Hershey, PA.: Idea Group Publishing.
- Sharit, J., and S. J. Czaja. 1994. Ageing, computer-based task performance, and stress: Issues and challenges. *Ergonomics* 37 (4): 559-577.

- Stern, M. J., A. E. Adams, and S. Elsassser. 2009. Digital Inequality and Place: The Effects of Technological Diffusion on Internet Proficiency and Usage Across Rural, Suburban and Urban Counties. *Sociological Inquiry* 79 (4): 391-417.
- Steyn, J. 2011. Paradigm shift required for ICT4D. In *ICTs and Sustainable Solutions for the Digital Divide*, ed. J. Steyn and G. Johanson, 19-44. Hershey, Pennsylvania: IGI Global.
- Taipale, S. 2013. The use of e-government services and the Internet; The role of socio-demographic, economic and geographical predictors. *Telecommunications Policy* 37 (4-5): 413-422.
- UN. 2005. *Global E-Government Readiness Report 2005: From E-Government to E-Inclusion*. New York: United Nations.
- , 2008. *E-Government Survey 2008: From E-Government to Connected Government*. New York: United Nations.
- , 2010. *E-Government Survey 2010: Leveraging e-Government at a Time of Financial and Economic Crisis*. New York: United Nations.
- , 2012. *E-Government Survey 2012: e-Government for the People*. New York: United Nations.
- van Dijk, J. A. G. M., O. Peters, and W. Ebbers. 2008. Explaining the acceptance and use of government Internet services: A multivariate analysis of 2006 survey data in the Netherlands. *Government Information Quarterly* 25 (3): 379-399.
- Venkatesh, V., and M. G. Morris. 2000. Why don't men ever stop ask for direction? Gender, social influence and their role in technology acceptance and usage behavior *MIS Quarterly* 24 (1): 115-139.
- Wahid, F. 2008. Evaluating Focus and Quality of Indonesian e-Government Websites. In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informatika*. Yogyakarta. Islamic University of Indonesia.
- Warren, M. 2007. The digital vicious cycle: Links between social disadvantage and digital exclusion in rural areas. *Telecommunications Policy* 31: 374-388.
- Warschauer, M. 2003. Dissecting the "digital divide": A case study in Egypt. *The Information Society* 19 (4): 297-304.
- Wei, K.-K., H.-H. Teo, H. C. Chan, and B. C. Tan. 2010. Conceptualizing and Testing a Social Cognitive Model of the Digital Divide. *Information Systems Research Article in Adv.*: 1-21.
- Williams, D. R. 1990. Socioeconomic differentials in health: A review and redirection. *Social Psychology Quarterly* 53 (2): 81-99.

Appendix

Table 1: United Nations survey on e-government readiness (Selected Countries and Region)

Countries	2005*		2008**		2010***		2012****	
	Rank	Index	Rank	Index	Rank	Index	Rank	Index
Indonesia	96	0.382	106	0.411	109	0.403	97	0.495
Australia	6	0.868	8	0.811	8	0.786	12	0.839
USA	1	0.906	4	0.864	2	0.851	5	0.869
Malaysia	43	0.571	34	0.606	32	0.610	40	0.670
Thailand	46	0.552	64	0.503	76	0.465	92	0.509
Vietnam	105	0.364	91	0.456	90	0.445	83	0.522
South Eastern Asia Average		0.439		0.429		0.425		0.479
World Average		0.427		0.451		0.441		0.488

Source:

*(UN 2005); **(UN 2008); ***(UN 2010); **** (UN 2012)

Figure 1. Research Model

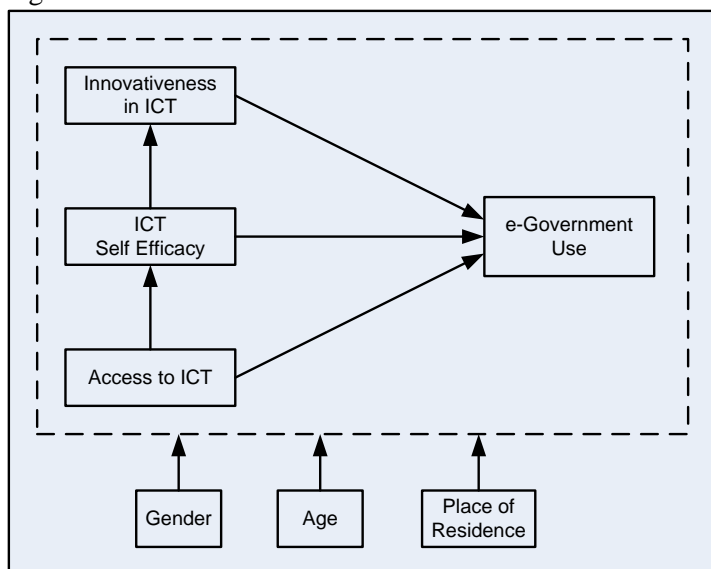


Table 2: Summary of demographic and economic characteristics of respondents

Characteristics	Total	Percentage
Gender		
Male	184	78%
Female	53	22%
Age		
Younger (40 years old and below)	169	71%
Older (above 41 years old)	68	29%
Place of residence		
Urban (10 kms and lesser from city centre)	168	71%
Rural (further than 10 kms from city centre)	69	29%

Table 3: Measurement model analysis (All samples = 237)

Construct	Item	Item Loading	Internal Consistency	AVE
Access	ACCE_1	0.752	0.915	0.731
	ACCE_2	0.820		
	ACCE_3	0.907		
	ACCE_4	0.930		
Self-Efficacy	CSE_1	0.886	0.967	0.856
	CSE_2	0.934		
	CSE_3	0.928		
	CSE_4	0.941		
	CSE_5	0.934		
Innovativeness	INNO_1	0.910	0.927	0.761
	INNO_2	0.759		
	INNO_3	0.904		
	INNO_4	0.906		
e-Govt Use	USE_1	0.911	0.876	0.703
	USE_2	0.778		
	USE_3	0.821		

Figure 2. The structural model of all samples (N = 237)

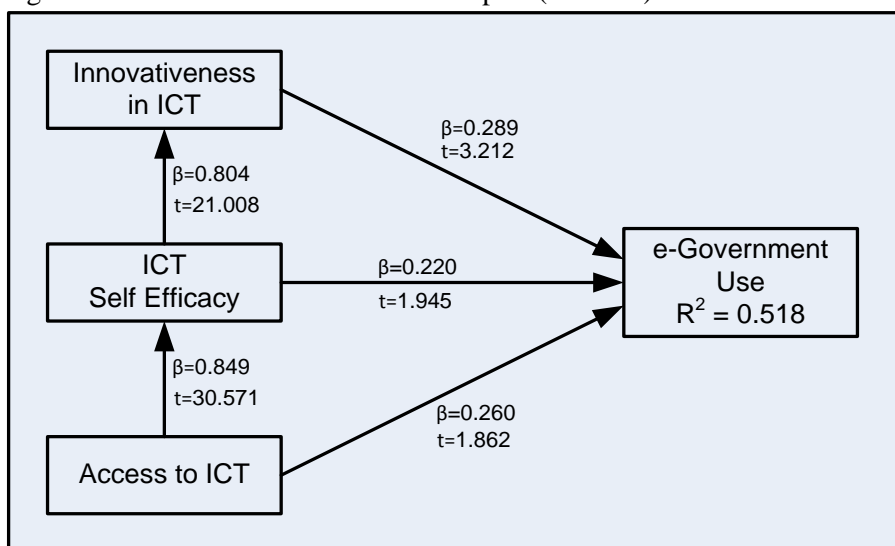


Table 4: Item loading based on each variable

Item	Gender		Age Group		Residence	
	Male	Female	Younger	Older	Urban	Rural
ACCE_1	0.755	0.759	0.785	0.675	0.765	0.872
ACCE_2	0.801	0.889	0.785	0.908	0.744	0.961
ACCE_3	0.898	0.945	0.893	0.962	0.933	0.973
ACCE_4	0.919	0.969	0.919	0.964	0.942	0.977
CSE_1	0.881	0.887	0.881	0.900	0.831	0.961
CSE_2	0.918	0.982	0.930	0.948	0.886	0.988
CSE_3	0.935	0.916	0.934	0.941	0.943	0.977
CSE_4	0.944	0.965	0.943	0.964	0.923	0.982
CSE_5	0.922	0.960	0.925	0.959	0.900	0.982
INNO_1	0.891	0.932	0.907	0.933	0.921	0.932
INNO_2	0.654	0.879	0.742	0.929	0.723	0.961
INNO_3	0.884	0.930	0.899	0.924	0.861	0.977
INNO_4	0.907	0.857	0.915	0.890	0.879	0.975
USE_1	0.898	0.918	0.912	0.912	0.927	0.882
USE_2	0.792	0.867	0.795	0.712	0.808	0.847
USE_3	0.791	0.825	0.816	0.835	0.768	0.864

Table 5: Internal consistency and AVE based on each variable

Construct	Gender		Age Group				Residence					
	Male		Female		Younger		Older		Urban		Rural	
	IC	AVE	IC	AVE	IC	AVE	IC	AVE	IC	AVE	IC	AVE
ACCE	0.909	0.716	0.941	0.800	0.910	0.718	0.934	0.784	0.709	0.563	0.972	0.896
CSE	0.965	0.847	0.976	0.889	0.966	0.851	0.976	0.889	0.954	0.806	0.991	0.957
INNO	0.905	0.707	0.945	0.810	0.910	0.720	0.956	0.845	0.882	0.659	0.980	0.925
USE	0.868	0.687	0.904	0.758	0.880	0.710	0.863	0.679	0.874	0.700	0.899	0.747

Table 6: Results of pooled error term t-test by subgroup

Path Relation	Male		Female		t-value	Younger		Older		t-value	Urban		Rural		t-value
	β	SE	β	SE		β	SE	β	SE		β	SE	β	SE	
ACCE - USE	0.386	0.141	0.123	0.096	1.540	0.400	0.182	-0.041	0.116	2.049	0.844	0.0597	-0.617	0.106	12.001
CSE - USE	0.274	0.114	0.073	0.120	1.213	0.238	0.139	0.281	0.124	0.231	-0.106	0.0834	0.590	0.100	5.348
INNO - USE	0.086	0.101	0.576	0.097	3.506	0.136	0.091	0.546	0.100	3.043	0.093	0.0554	0.848	0.098	6.701
ACCE - CSE	0.842	0.026	0.859	0.065	0.243	0.782	0.037	0.896	0.015	2.874	0.758	0.0456	0.908	0.013	3.158
CSE - INNO	0.805	0.036	0.785	0.018	0.495	0.749	0.057	0.832	0.027	1.313	0.654	0.0528	0.918	0.015	4.805

**Manajemen Laba Akrual dan Manajemen Laba Riil dalam Aktivitas
Tax Shelter**
**(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Memperoleh Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Periode 2001-2010)**

IRA GERALDINA*

STIE Indonesia Banking School

Abstract: *This study aims to examine the relationship between accrual and real earnings management with tax shelter by using Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar as a proxy to measure the tax shelter. By using samples of companies that received Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar in manufacturers industry who are listed in Indonesia Stock Exchange period 2001-2010, the study found that the company uses real earnings management via abnormal discretionary expenses than accrual earnings management when involved with tax shelter activities. Contribution of this study is, first, using Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar to identify aggressive tax avoidance firms. Second, divide the sample groups based on the median value of the amount of tax finalty to differentiate aggressive tax avoidance firms and non-aggressive tax avoidance firms. Third, provide empirical evidence regarding the nature of the use of accrual earnings management and real earnings management, whether complementary or substitutes in explaining the possibility of companies involved in the tax shelter activity.*

Keywords: *Tax Shelter, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Tax Finalty, Accrual Earnings Management, Real Earnings Management.*

Acknowledgement:

Paper ini merupakan tugas akhir mata kuliah Seminar Doktorat Perpajakan dan Sistem Informasi pada Program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

* Author can be contacted at: geraldina.ira@gmail.com

1. Pendahuluan

Aktivitas *tax shelter* diklaim merupakan salah satu bentuk biaya keagenan karena aktivitas tersebut dapat mendorong inefisiensi organisasi yang diakibatkan oleh beragam masalah insentif perusahaan (manajer) melakukan *tax shelter* (Shackelford & Shevlin, 2001).

Menurut Hanlon & Heitzman (2010), penelitian yang membahas mengenai *tax shelter* mewaspadaikan dua hal, pertama, potensi bias sampel penelitian (*potential selection bias*). Peneliti harus jelas mendefinisikan perusahaan yang teridentifikasi melakukan *tax shelter*, apakah perusahaan yang sudah dinyatakan memiliki ketetapan hukum melakukan *tax shelter* atau terungkap melakukan *tax shelter* karena transaksi tertentu. Kedua, masalah endogenitas dalam kegiatan *tax shelter*. Perusahaan yang menghindari pajak tidak harus terlibat dalam aktivitas *tax shelter* dan perusahaan yang dengan cara apapun berusaha tidak menghindari pajak bisa jadi terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Hal ini memberikan tantangan bagi penelitian pada area *tax shelter*, untuk dapat mengidentifikasi dengan jelas definisi dan identitas perusahaan yang melakukan *tax shelter*.

Frank *et al.*, (2009) dan Wilson (2009) menggunakan model Graham & Tucker (2006) untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas *tax shelter* dan menemukan hubungan yang positif antara kegiatan *tax shelter* dengan agresivitas pelaporan keuangan. Begitu pula Kim *et al.*, (2011) mengikuti Wilson (2009) untuk mengukur penghindaran pajak ekstrim, yaitu perusahaan yang terindikasi melakukan *tax shelter*.

Hanlon & Joel (2009) menggunakan informasi publik yang mengabarkan keterlibatan perusahaan dalam aktivitas *tax shelter* untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat aktivitas *tax shelter*. Samingun (2012) menggunakan Surat Ketentuan Pajak (SKP) yang dikeluarkan regulator perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan manajemen laba untuk tujuan pajak. Samingun (2012)

menggunakan proksi sanksi pajak yaitu koreksi bersih pajak terutang plus sanksi pajak akibat dikeluarkannya SKP tersebut yang diperhitungkan pada rekonsiliasi fiskal untuk mengukur manajemen laba untuk tujuan pajak. Koreksi bersih yang dimaksud adalah hasil penjumlahan dari pokok pajak yang masih terutang dan sanksi pajak yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan selisih antara nilai restitusi (pengembalian) pajak yang diajukan perusahaan dengan jumlah restitusi yang diterima perusahaan (Samingun: hal. 137, 2012).

Penelitian Samingun (2012) menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang didalamnya terdapat koreksi fiskal baik untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan manajemen pajak. Penelitian ini mengembangkan penelitian Samingun (2012) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk mengidentifikasi perusahaan yang teridentifikasi melakukan aktivitas *tax shelter*. Selain itu, jika pada penelitian Samingun (2012) menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk PPh Badan saja, maka pada penelitian ini menggunakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena keduanya mempengaruhi beban (hutang) pajak perusahaan. Penelitian ini hanya menguji sub topik pada penelitian Penelitian Samingun (2012) yaitu hubungan sanksi pajak dengan metode manajemen laba perusahaan (akrual dan riil).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji hubungan manajemen laba dengan sanksi pajak kurang bayar sebagai proksi untuk mengukur *tax shelter*. Kontribusi penelitian ini adalah, pertama, mengembangkan penelitian Samingun (2012) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mengidentifikasi perusahaan yang khusus teridentifikasi melakukan upaya penghindaran pajak. Kedua, membagi kelompok sampel berdasarkan nilai median besaran sanksi pajak SKPKB untuk memisahkan antara perusahaan yang agresif melakukan upaya

penghindaran pajak (*aggressive tax avoidance firms*) dan *non-aggressive tax avoidance firms*. Perusahaan yang dikategorikan sebagai *aggressive tax avoidance* diidentifikasi sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas *tax shelter*. Ketiga, memberikan bukti empiris mengenai sifat penggunaan manajemen laba akrual dan manajemen laba riil, apakah bersifat komplementer atau substitusi dalam menjelaskan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter*.

Sistematika penulisan paper berikutnya adalah sebagai berikut: teori dan pengembangan hipotesis akan disampaikan pada sub pokok bahasan kedua, desain penelitian (metodologi penelitian) akan disampaikan pada sub pokok bahasan ketiga, analisis data sekaligus hasil penelitian akan disampaikan pada sub pokok bahasan keempat, dan kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya disampaikan pada sub pokok bahasan kelima.

2. Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 *Tax shelter* dalam Perspektif Teori Keagenan

Hubungan keagenan antara manajer dan pemegang saham dapat menimbulkan masalah keagenan yaitu konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham yang masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan ingin memaksimalkan nilai utilitas dari kepentingannya tersebut. Untuk mengatasi konflik tersebut dibutuhkan biaya keagenan yang cukup mahal agar dapat mengurangi *moral hazard* dan asimetri informasi, sehingga manajer dapat sedekat mungkin melakukan aktivitas yang sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).

Aktivitas penghindaran pajak pada satu sisi dapat menguntungkan pemegang saham apabila aktivitas tersebut hanya bersifat *tax favored* (Desai & Dharmapala, 2011). Pada sisi

lain, manajemen pajak akan merugikan pemegang saham apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif (*tax shelter*) karena perusahaan akan menanggung kerugian di masa depan berupa sanksi pajak yang seharusnya dapat dihindari perusahaan (Hanlon & Joel, 2009).

Tax shelter merupakan salah satu kontinum dalam penelitian penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jika secara umum, penghindaran pajak didefinisikan sebagai untuk mengurangi pajak eksplisit, maka *tax shelter* diidentikan dengan upaya pengurangan pajak secara agresif yang mengarah pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Pada penelitian ini, *tax shelter* didefinisikan sebagai upaya penghindaran pajak untuk mengurangi pajak secara agresif dan tidak bertanggung jawab (Huseynov & Bonnie, 2012). *Tax shelter* diidentifikasi dengan perusahaan yang memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) setelah dilaksanakannya pemeriksaan oleh regulator pajak.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, sanksi pajak timbul setelah fiskus melakukan pemeriksaan pajak atas laporan pajak terutang yang diklaim perusahaan lewat SPT Tahunannya. Setelah pemeriksaan pajak dilakukan, fiskus atas nama Direktorat Jendral Perpajakan setempat akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak diantaranya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Perusahaan dapat melakukan proses keberatan dan banding apabila tidak puas dengan Surat Ketetapan Pajak yang diperolehnya. SKP tersebut berisi jumlah pokok pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan beserta sanksinya (Samingun, 2012). Begitupula dengan proses keberatan dan banding, akan menimbulkan sanksi pajak dan biaya lain yang akan ditanggung perusahaan yang akan merugikan pemegang saham, terutama untuk kasus SKPKB. Oleh karena itu, pemegang saham sebaiknya memperhatikan manajemen pajak perusahaan yang dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham.

2.2 Hubungan Manajemen Laba dan *Tax shelter*

Wilson (2009) yang menemukan terdapat hubungan yang positif signifikan antara *book tax differences* dengan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Investor akan menginterpretasikan *book tax differences* (BTD) yang semakin besar dan positif sebagai “*red flag*” atas kualitas laba yang rendah karena akan mengurangi peristensi laba di masa depan (Hanlon, 2005).

Kualitas laba yang rendah dapat disebabkan oleh kualitas akrual dalam pelaporan keuangan perusahaan. Semakin agresif penggunaan akrual, semakin rendah kualitas laba perusahaan. Sebagaimana diakui Shevlin (2007), penelitian Frank *et al.*, (2009) yang saat itu masih bersifat *working papers*, berhasil membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara pelaporan pajak yang agresif dengan pelaporan keuangan yang agresif. Penelitian Frank *et al.*, (2009) mendefinisikan pelaporan keuangan yang agresif sebagai upaya manajemen laba yang meningkatkan laba (*upward earning management*), sedangkan pelaporan pajak yang agresif didefinisikan sebagai upaya untuk memanipulasi pajak terutang melalui perencanaan pajak yang bisa mengandung unsur penggelapan pajak. Dalam unsur manajemen laba yang agresif mengandung unsur akrual diskresioner yang syarat dengan ketidakpastian yang akan berdampak pada semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba kena pajak. Oleh karena itu, semakin agresif pelaporan akuntansi perusahaan, semakin agresif pelaporan pajaknya.

Jika penelitian Frank *et al.*, (2009) menggunakan perbedaan laba akuntansi dan pajak diskresioner untuk mengukur pelaporan pajak yang agresif, maka penelitian Samingun (2012) menggunakan sanksi pajak untuk mengukur manajemen laba untuk tujuan pajak. Hasil penelitian Samingun (2012) menunjukkan bahwa pelaporan akuntansi yang agresif lewat akrual tidak berhubungan positif signifikan dengan sanksi pajak, namun berhubungan signifikan dengan pelaporan akuntansi yang agresif lewat aktivitas riil. Implikasi penelitian

ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih metode manajemen laba riil dibandingkan akrual untuk keperluan manajemen laba pajak.

Manajemen laba untuk tujuan pajak pada penelitian Samingun (2012) bersifat umum, belum menguji manajemen laba untuk tujuan pajak yang bersifat *tax shelter*. Penelitian ini melanjutkan penelitian Samingun (2012) dengan menguji hubungan antara metode manajemen laba perusahaan (akrual dan riil) dengan *tax shelter*.

Pada umumnya, pelaporan akuntansi yang agresif berhubungan positif dengan pelaporan pajak yang agresif (*tax shelter*). Semakin tinggi diskresi manajer terhadap akrual, maka semakin agresif pelaporan keuangan perusahaan dan semakin agresif pelaporan pajaknya. Selain aktivitas akrual, perusahaan menggunakan metode manajemen laba riil dalam pelaporan pajaknya (Samingun, 2012). Hasil penelitian Samingun (2012) bahkan menunjukkan jenis aktivitas riil yang mempengaruhi manajemen laba untuk keperluan pajak masih beragam. Arus kas abnormal berhubungan negatif signifikan, sedangkan abnormal biaya berhubungan positif signifikan terhadap sanksi pajak. Sehingga belum jelas apakah manajemen laba akrual dan manajemen laba riil ini bersifat substitusi atau komplementer dalam menjelaskan manajemen laba untuk keperluan pajak.

Berdasarkan argumentasi di atas, dirumuskan hipotesis sbb:

H1: *Diskresi manajemen laba akrual meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas tax shelter.*

H2: *Perusahaan menggunakan manajemen laba riil dalam aktivitas tax shelter.*

3. Metode Penelitian

3.1 Data dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan publikasi yang diperoleh dari Pusat Data Ekonomi dan Bisnis FEUI. Teknik pengambilan sampel pada

penelitian ini mengikuti penelitian Samingun (2012) dengan mengubah identifikasi perusahaan yang terindikasi terlibat dalam *aktivitas tax shelter*. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2001-2010. Sampel final yang diperoleh berdasarkan metode *purposive sampling* adalah 109 pengamatan (*firm years*) setelah mengeluarkan outlier (lihat lampiran 2). Berikut kriteria pemilihan sampel:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia kecuali perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok dan terindikasi memperoleh sanksi pajak pada penelitian Samingun (2012). Hal ini dilakukan semata-mata untuk memudahkan identifikasi awal mengingat terdapat keterbatasan waktu.
2. Berdasarkan identifikasi sampel awal pada penelitian Samingun (2012), periode pengamatan kemudian diperpanjang menjadi tahun 2001-2010.
3. Mengidentifikasi perusahaan yang memperoleh SKPKB, karena sampel penelitian Samingun (2012) merupakan perusahaan yang memperoleh SKP baik yang kurang bayar (SKPKB) maupun lebih bayar (SKPLB).
4. Menyampaikan laporan keuangan lengkap beserta pengungkapan mengenai SKPKB, status hukum, dan jumlah sanksi (pokok plus denda kurang bayar) yang menjadi ketetapan pajak regulator.
5. Berbeda dengan Samingun (2012), periode pengamatan adalah periode dimana perusahaan menyetujui ketetapan regulator mengenai kurang bayar baik pajak penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik menerima tanpa keberatan, setelah keberatan, ataupun setelah proses banding.
6. Apabila perusahaan menerima SKPKB dan mengajukan keberatan dan kemudian banding, selama belum ada ketetapan pajak dari regulator mengenai permohonannya,

walaupun perusahaan sudah membayar sebagian atau seluruh sanksi pajak SKPKB, maka perusahaan tersebut dikeluarkan dalam sampel.

7. Apabila regulator pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan keberatan atau banding perusahaan, maka jumlah sanksi pajak yang diakui pada penelitian ini adalah pajak terutang plus denda yang dikabulkan regulator baik sebagian atau seluruhnya.

3.2 Model Penelitian

Berikut model penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian sekaligus menguji hipotesis 1 dan 2. Model penelitian 3.1 di bawah ini diadaptasi dari model Samingun (2012) dengan penyesuaian pada variabel terikatnya. Variabel terikat pada model Samingun (2012) adalah manajemen laba untuk tujuan pajak perusahaan (EMT) yang diukur dengan nilai sanksi pajak bersih setelah memperhitungkan kompensasi lebih bayar dan denda pajak. Penelitian ini menggunakan variabel kemungkinan terlibat dalam aktivitas tax shelter (TS) yang diukur dengan nilai saksi pajak kurang bayar beserta dendanya.

$$\frac{TS_i}{1-TS_i} = \beta_0 + \beta_1 DA_i + \beta_2 AbnCFO_i + \beta_3 AbnPROD_i + \beta_4 AbnDISEXP_i + \beta_5 LnSIZE + \epsilon_i \dots \dots (3.1)$$

Dimana:

- TS_i** : Perusahaan yang terindikasi melakukan aktivitas *tax shelter* yang diukur dengan nilai sanksi pajak kurang bayar plus denda pada tahun t diskalakan dengan penjualan tahun t . Apabila nilai sanksi pajak perusahaan i di atas nilai mediannya, maka dikategorikan sebagai perusahaan yang terindikasi melakukan tax shelter dan diberi nilai 1, jika tidak dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak terindikasi melakukan *tax shelter* dan diberi nilai 0.
- DA_i** : *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t
- $AbnCFO_i$** : *Abnormal cash flow from operation* perusahaan i pada tahun t
- $AbnPROD_i$** : *Abnormal production cost* perusahaan i pada tahun t
- $AbnDISEXP_i$** : *Abnormal discretionary expenses* perusahaan i pada tahun t



$\ln SIZE$: Logaritma natural dari total aset perusahaan i pada tahun t

ε_i : Error

Tanda koefisien untuk masing-masing variabel diprediksi: DA adalah positif (+), sedangkan keempat variabel lainnya tidak ditentukan arah prediksi tanda koefisiennya. Model tersebut akan diestimasi dengan pendekatan regresi logistik.

3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemungkinan melakukan aktivitas *tax shelter* (TS) atau perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif. Untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas *tax shelter* digunakan informasi resmi dari regulator perpajakan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) baik untuk pajak penghasilan badan maupun untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). SKPKB yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak tersebut diantaranya memuat jumlah pajak terutang beserta denda (jika ada) yang pada penelitian ini disebut sebagai sanksi pajak.

Untuk menghindari bias sampel dalam aktivitas *tax shelter* sebagaimana yang disampaikan (Hanlon & Heitzman, 2010), maka sampel akan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak secara agresif (*tax shelter firms*) dan perusahaan yang tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak secara agresif (*non-tax shelter firms*). Sampel dikategorikan sebagai *tax shelter firms* jika nilai sanksi pajaknya di atas nilai median sanksi pajak, sedangkan dikategorikan sebagai *non-tax shelter firms* jika nilai sanksi pajaknya di dibawah nilai mediannya. Variabel ini (TS) kemudian akan diukur dengan variabel dummy, diberi nilai 1 untuk *tax shelter firms* dan 0 untuk *non-tax shelter firms*.

Variabel bebas pada penelitian ini adalah manajemen laba akrual yang diproksikan dengan *discretionary accrual (DA)* dan manajemen laba riil yang diproksikan dengan

abnormal cash flow from operation (AbnCFO), abnormal production cost (AbnPROD), dan abnormal discretionary expenses (AbnDISEXP).

Sebagaimana dalam (Samingun, 2012), manajemen laba akrual menggunakan *Modified Jones Model* (Dechow *et al.*, 1995), sedangkan manajemen laba riil menggunakan model Roychowdhury (2006). Variabel *discretionary accrual (DA)* diperoleh dari nilai residual hasil estimasi *Modified Jones Model*. Kedua model dipaparkan di bawah ini.

$$TACC_{it} = \alpha + \beta_1(\Delta Sales_{it} - \Delta AR_{it}) + \beta_2 PPE_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

dimana :

- $TACC_{it}$: Total akrual perusahaan *i* pada tahun *t*, yaitu selisih antara laba sebelum pos luar biasa dan operasi yang dihentikan dengan arus kas operasi
 - $\Delta Sales_{it}$: Perubahan pendapatan perusahaan *i* tahun *t* dengan *t-1*
 - ΔAR_{it} : Perubahan piutang dagang perusahaan *i* tahun *t* dengan *t-1*
 - PPE_{it} : Nilai buku aset tetap kotor perusahaan *i* tahun *t*
 - ϵ_{it} : *error terms* = residual model = *discretionary accruals*, disingkat DA
- Semua variabel di atas diskalakan dengan total aset tahun *t-1*

Abnormal CFO diperoleh dengan terlebih dahulu mengestimasi model sbb:

$$CFO_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \beta_1(S_t/A_{t-1}) + \beta_2(\Delta S_t/A_{t-1}) + \epsilon_t \quad (3.3)$$

CFO_t adalah arus kas operasi pada periode *t*, A_{t-1} adalah total aset pada periode *t-1*, S_t adalah penjualan pada periode *t*, ΔS_t adalah selisih penjualan pada periode *t* dan *t-1*. Koefisien hasil estimasi digunakan untuk menghitung normal CFO. Selisih antara *actual* CFO dengan normal CFO merupakan *abnormal* CFO.

Abnormal production cost (AbnPROD) diperoleh dengan terlebih dahulu mengestimasi model sbb:

$$PROD_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \beta_1(S_t/A_{t-1}) + \beta_2(\Delta S_t/A_{t-1}) + \beta_3(\Delta S_{t-1}/A_{t-1}) + \epsilon_t \dots \dots \dots (3.4)$$



$PROD_t$ adalah biaya produksi pada periode t, A_{t-1} adalah total aset pada periode t-1, S_t adalah penjualan pada periode t, ΔS_t adalah selisih penjualan pada periode t dan t-1, adalah selisih penjualan pada periode t dan ΔS_{t-1} adalah selisih penjualan pada periode t-1 dan t-2. Koefisien hasil estimasi digunakan untuk menghitung normal PROD. Selisih antara *actual* PROD dengan normal PROD merupakan *abnormal* PROD (AbnProd).

Abnormal discretionary expenses (AbnDISEXP) diperoleh dengan terlebih dahulu mengestimasi model sbb:

$$DIEXP_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \beta_1(S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.5)$$

$DIEXP_t$ adalah *discretionary expenses* pada periode t, A_{t-1} adalah total aset pada periode t-1, S_{t-1} adalah penjualan pada periode t-1. Koefisien hasil estimasi digunakan untuk menghitung normal DISEXP. Selisih antara *actual* DISEXP dengan normal DISEXP merupakan *abnormal* DISEXP (AbnDISEXP). *Discretionary expenses* terdiri atas beban riset dan pengembangan, beban penjualan, serta beban administrasi dan umum.

Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan (LnSIZE) untuk mengontrol dampak perbedaan ukuran perusahaan terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Variabel ini diukur dengan logaritma natural total aset perusahaan pada tahun t.

4. Analisis Data dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif dan Uji Korelasi Antar Variabel

Tabel 4.1 (lampiran 3) menunjukkan terdapat 109 pengamatan yang lolos prosedur pemilihan sampel. Lima puluh satu persen (55 dari 109 pengamatan) merupakan *tax shelter firms* yaitu perusahaan yang terindikasi terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak secara agresif. Berdasarkan nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi dapat dikatakan sebaran data relatif kecil yang menunjukkan karakteristik data yang cukup mendekati distribusi



normal. Nilai mean variabel DA, AbnPROD, AbnDISEXP berturut-turut bernilai -.01473415, -.00794890, dan -.01037704 yang mengindikasikan perusahaan melakukan manajemen laba akrual diskresioner dan manajemen laba riil lewat biaya produksi abnormal, dan beban diskresioner abnormal untuk menurunkan laba (*income decreasing*). Sedangkan nilai mean AbnCFO bernilai 00482259 yang mengindikasikan perusahaan melakukan manajemen laba riil lewat arus kas operasi abnormal untuk menaikkan laba (*income increasing*).

Tabel 4.2 (lampiran 4) menunjukkan korelasi antar variabel yang memberikan gambaran indikasi awal hubungan antar variabel penelitian. Variabel DA berkorelasi negatif signifikan dengan AbnCFO yang menunjukkan manajemen laba akrual bersifat reversal. Jika perusahaan mengakui beban atau pendapatan secara akrual pada periode berjalan, maka akan mengurangi arus kas pada periode tersebut dan sebagian dari nilai akrual tersebut akan terealisasi pada periode berikutnya. Namun kedua variabel tersebut tidak berkorelasi signifikan terhadap kemungkinan perusahaan terlibat aktivitas *tax shelter*.

Hanya variabel ABNDISEXP dan LnSIZE yang berkorelasi positif signifikan terhadap kemungkinan perusahaan terlibat aktivitas *tax shelter*. Hal ini mengindikasikan perusahaan menggunakan manajemen laba riil lewat beban diskresioner abnormal dalam aktivitas *tax shelter*.

4.2 Hasil Uji Normalitas dan Uji Kecocokan Model

Model penelitian diestimasi dengan menggunakan regresi logistik. Hasil uji normalitas menunjukkan model ini terbebas dari masalah asumsi normalitas. Analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)* bernilai 0.237 dan tidak signifikan. Hasil uji kecocokan model dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*, diperoleh nilai signifikansi *Chi-Square* di atas 5%, dengan kata lain model telah cocok dengan data. Uji validitas model dilihat dari nilai *Cox dan Snell R.Square* dan nilai *Nagelkerke R. Square*. Berdasarkan hasil estimasi, nilai *Cox dan Snell R.Square* dan nilai *Nagelkerke R. Square*

masing-masing sebesar 20.5% dan 27.3%. Sehingga disimpulkan variabilitas variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 27.3%

4.3 Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

4.3.1 Manajemen Laba Akrual dan Kemungkinan Perusahaan Melakukan *Tax Shelter*

Tabel 4.3 di bawah ini menunjukkan hasil estimasi model penelitian. Hasil estimasi model penelitian diperoleh koefisien β_1 yang merupakan koefisien regresi akrual diskresioner (*DA*) bernilai positif (sesuai prediksi), tetapi tidak signifikan. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak mendukung hipotesis penelitian 1 (*H1*) yang menyatakan bahwa diskresi manajemen laba akrual meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter*.

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Model Penelitian

$\frac{TS_i}{1-TS_i} = -10.290 + 1.734 DA_i - 2.615 AbcCFO_i + 0.374 AbnPROD_i + 4.418 AbnDISEXP_i + 0.770 LnSIZE_i$					
Variabel	Prediksi Arah	B	S.E.	Wald	Sig.
DA	+	1.734	2.183	.631	.427
AbcCFO	?	-2.615	2.677	.954	.329
AbnPROD	?	.374	1.090	.118	.731
AbnDISEXP	?	4.418	1.978	4.989	.026*
LnSIZE	?	.770	.234	10.810	.001**
Constant		-10.290	3.158	10.615	.001
<p>Variabel terikat adalah kemungkinan perusahaan melakukan tax shelter secara agresif (TS) yang diukur dengan variabel dummy, diberi nilai 1 jika nilai sanksi pajak di atas nilai median dan 0 jika sebaliknya.</p> <p>Variabel bebas terdiri atas manajemen laba akrual yang diproksikan dengan <i>discretionary accrual (DA)</i> dan manajemen laba riil yang diproksikan dengan <i>abnormal cash flow from operation (AbnCFO)</i>, <i>abnormal production cost (AbnPROD)</i>, dan <i>abnormal discretionary expenses (AbnDISEXP)</i>. Sedangkan LnSIZE adalah variabel control yang diukur dengan logaritma naturan total aset.</p> <p>*) signifikan pada level 5%, pengujian dua sisi; **) signifikan pada level 1%, pengujian dua sisi</p> <p>Nilai signifikansi <i>Chi-Square Hosmer and Lemeshow's Test</i> nilai signifikansi <i>Chi-Square</i> (6.700) di atas 5% (0.569)</p> <p>Nilai <i>Cox dan Snell R.Square</i> 20.5%; Nilai <i>Negelkerke R. Square</i> 27.3%.</p>					

Sumber: Output SPSS, data diolah

Hasil penelitian serupa dengan penelitian Samingun (2012), nilai koefisien akrual diskresioner (DA) bernilai positif tidak signifikan. Dengan kata lain dapat disampaikan bahwa baik perusahaan tidak menggunakan manajemen laba akrual baik untuk kepentingan manajemen laba pajak (EMT) maupun aktivitas *tax shelter*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan terdapat hubungan yang positif signifikan antara agresivitas pelaporan akuntansi (akrual) dengan pelaporan pajak yang agresif atau *tax shelter* (Frank *et al.*, 2009; Wilson, 2009).

Hal ini kemungkinan terjadi karena beberapa hal. Pertama, terdapat perbedaan karakteristik manajemen laba akrual pada sampel penelitian ini dan penelitian Frank *et al.*, (2009). Secara umum, rata-rata perusahaan pada penelitian Frank *et al.*, (2009) menggunakan manajemen laba akrual yang meningkatkan laba (*upward earning management*), terlihat pada nilai mean DFIN (akrual diskresioner) sebesar 0,01 (positif). Rata-rata perusahaan penelitian ini menggunakan manajemen laba akrual yang menurunkan laba (*downward earning management*) dan terlihat pada nilai mean DA (akrual diskresioner) sebesar -.014 (negatif). Sehingga argumentasi bahwa perusahaan dapat melakukan pelaporan keuangan yang agresif (*upward earning management*) dan pelaporan pajak yang agresif dalam waktu bersamaan tidak didukung oleh data pada penelitian ini (Frank *et al.*, 2009; Wilson, 2009). Kedua, model penelitian yang digunakan penelitian Frank *et al.*, (2009) dan Wilson (2009) belum memasukkan aktivitas manajemen laba riil (abnormal) dalam mungkin mempengaruhi keterlibatan perusahaan dalam aktivitas *tax shelter*.

4.3.2 Manajemen Laba Riil dan Kemungkinan Perusahaan Melakukan *Tax Shelter*

Hasil estimasi model penelitian diperoleh koefisien β_2 yang merupakan koefisien regresi arus kas operasi diskresioner abnormal (*AbnCFO*) bernilai negatif, tetapi tidak signifikan. Koefisien β_3 yang merupakan koefisien regresi biaya produksi diskresioner abnormal (*AbnPROD*) bernilai positif, tetapi tidak signifikan. Sedangkan koefisien β_4 yang

merupakan koefisien regresi beban diskresioner abnormal (*AbnDISEXP*) bernilai positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan manajemen laba riil lewat beban diskresioner abnormal (*AbnDISEXP*) dalam aktivitas *tax shelter*. Semakin besar beban diskresioner abnormal, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Dengan demikian hipotesis penelitian kedua (H2) yang menyatakan bahwa perusahaan menggunakan manajemen laba riil mempengaruhi pilihan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter* tidak dapat ditolak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Samingun (2012). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan manajemen laba riil lewat beban diskresioner abnormal (*AbnDISEXP*) baik untuk keperluan manajemen pajak secara umum (EMT) maupun dalam manajemen pajak agresif (*tax shelter*).

Dari ketiga jenis manajemen laba riil, hanya beban diskresioner abnormal (*AbnDISEXP*) yang berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan perusahaan terlibat aktivitas *tax shelter*. Hal ini kemungkinan disebabkan jenis manajemen laba ini lebih mudah dilakukan dibandingkan kedua jenis manajemen laba lainnya (arus kas abnormal dan biaya produksi diskresioner abnormal). Komponen beban diskresioner abnormal terdiri atas biaya riset dan pengembangan, beban penjualan, serta beban administrasi dan umum. Kemungkinan besar perusahaan melakukan diskresi aktivitas penjualan serta beban administrasi dan umum, mengingat tidak satupun dari sampel pada penelitian ini memiliki biaya riset dan pengembangan.

Selain itu, hasil uji korelasi menunjukkan bahwa hanya variabel beban diskresioner abnormal (*AbnDISEXP*) yang berkorelasi signifikan dengan kedua jenis manajemen laba riil yang lain, yaitu berkorelasi positif signifikan dengan *AbnCFO* dan berkorelasi negatif signifikan dengan *AbnPROD* (lihat tabel 4.2). Dengan kata lain, diskresi manajer terhadap pengaturan beban penjualan serta administrasi dan umum yang dilakukan untuk tujuan *tax*

shelter berkaitan erat dengan manajemen laba riil lainnya seperti diskresi mengenai pengaturan arus kas dan beban produksi.

Selain variabel *AbnDISEXP*, variabel kontrol (*SIZE*) berhubungan positif signifikan terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *tax shelter*. Dengan demikian, semakin besar perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax shelter*. Pada satu sisi, hasil penelitian ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat dibutuhkan biaya yang besar jika perusahaan terlibat pada aktiitas *tax shelter*. Sehingga perusahaan besar relatif memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Namun, pada sisi lain, perusahaan yang lebih besar cenderung menjadi perhatian publik dan regulator. Sehingga harus berupaya lebih keras jika terlibat dalam aktivitas *tax shelter*.

4.4 Pengujian Tambahan

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa hanya variabel manajemen laba riil yang digunakan perusahaan dalam aktivitas *tax shelter*, sedangkan manajemen laba akrual tidak. Untuk memastikan validitas temuan di atas, maka dilakukan pengujian tambahan dengan menguji kemungkinan manajemen laba akrual dilakukan bersamaan dengan manajemen laba riil (tidak bersifat independen). Oleh karena itu, variabel manajemen laba akrual akan diinteraksikan dengan ketiga variabel manajemen laba riil. Jika hasilnya signifikan, maka perusahaan menggunakan manajemen laba akrual sebagai komplementer atau substitusi manajemen laba riil. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Tambahan

Variabel	Model DA*AbnCFO		Model DA*AbnPROD		Model DA*AbnDISEXP	
	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.
DA	2.272	.322	-.029	.988	-.045	.981
AbnCFO	-.847	.753	-.343	.883	.322	.883
AbnPROD	-1.038	.234	-.684	.430	-.485	.559
AbnDISEXP	1.759	.226	.891	.539	.431	.754
DA_AbnCFO	22.109	.207				
DA*AbnPROD			3.144	.549		
DA*AbnDISEXP					7.858	.523
LnSIZE	.776	.001**	.710	.001**	.647	.002**
Constant	-10.304	.001	-9.550	.001	-8.724	.002
-2 Log likelihood	133.271		141.206		145.152	
Cox & Snell R Square	19.5%		14.6%		12.6%	
Nagelkerke R Square	26%		19.5%		16.8%	
<p>Variabel terikat adalah kemungkinan perusahaan melakukan tax shelter secara agresif (TS) yang diukur dengan variabel dummy, diberi nilai 1 jika nilai sanksi pajak di atas nilai median dan 0 jika sebaliknya.</p> <p>Variabel bebas terdiri atas manajemen laba akrual yang diprosikan dengan <i>discretionary accrual (DA)</i> dan manajemen laba riil yang diprosikan dengan <i>abnormal cash flow from operation (AbnCFO)</i>, <i>abnormal production cost (AbnPROD)</i>, dan <i>abnormal discretionary expenses (AbnDISEXP)</i>. <i>DA*AbnCFO</i> adalah variabel interaksi antara <i>discretionary accrual</i> dan <i>abnormal cash flow from operation</i>, <i>DA*AbnPROD</i> adalah variabel interaksi antara <i>discretionary accrual</i> dengan <i>abnormal production cost</i>, dan <i>DA*AbnDISEXP</i> adalah variabel interaksi antara <i>discretionary accrual</i> dengan <i>abnormal discretionary expenses</i>. Sedangkan LnSIZE adalah variabel control yang diukur dengan logaritma natural total aset.</p> <p>*) signifikan pada level 5%, pengujian dua sisi; **) signifikan pada level 1%, pengujian dua sisi</p>						

Sumber: Output SPSS, diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel manajemen laba akrual dan manajemen laba riil tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Variabel beban diskresioner abnormal (AbnDISEXP) yang signifikan positif berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter* pada model utama penelitian, menjadi tidak signifikan walaupun tanda koefisien tetap positif.

Begitu pula dengan variabel interaksi antara variabel interaksi antara *discretionary accrual* dan *abnormal cash flow from operation (DA*AbnCFO)*, variabel interaksi antara *discretionary accrual* dengan *abnormal production cost (DA*AbnPROD)*, dan variabel interaksi antara *discretionary accrual* dengan *abnormal discretionary expenses (DA*AbnDISEXP)* tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan perusahaan

terlibat dalam aktivitas *tax shelter*. Selain itu, berdasarkan nilai *Cox & Snell R Square* dan nilai *Nagelkerke R Square* dari ketiga model tambahan di atas dibawah model utama penelitian yang masing-masing sebesar 20.5% dan 27.3%. Hal ini memberikan indikasi bahwa model utama lebih baik dalam menjelaskan hubungan antara manajemen laba riil dan manajemen laba akrual terhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas *tax shelter*.

Dengan demikian, pengujian tambahan ini memperkuat temuan pada pengujian awal (model utama) bahwa perusahaan tidak menggunakan manajemen laba akrual dalam kemungkinan terlibat aktivitas *tax shelter*. Perusahaan tidak menggunakan manajemen laba akrual untuk melengkapi atau mensubstitusi manajemen laba riil, karena perusahaan hanya menggunakan manajemen laba riil lewat beban diskresioner abnormal dalam kemungkinan terlibat aktivitas *tax shelter*.

Bukti empiris ini sekaligus menindaklanjuti penelitian Samingun (2012) yang belum melakukan pengujian mengenai sifat penggunaan manajemen laba akrual dan manajemen laba riil dalam aktivitas manajemen pajak secara umum, maupun *tax shelter* secara khusus.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Penelitian Berikutnya

Penelitian ini menjelaskan hubungan antara manajemen laba akrual dan manajemen laba riil dengan kemungkinan perusahaan melakukan *tax shelter*. Perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang terindikasi melakukan *tax shelter* (penghindaran pajak yang agresif) apabila nilai sanksi pajak SKPKB di atas nilai median.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan *tax shelter* menggunakan manajemen laba riil lewat beban diskresioner abnormal, tetapi tidak menggunakan manajemen laba akrual. Semakin besar manajemen laba beban diskresioner

abnormal, semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan *tax shelter*. Temuan empiris ini diperkuat dengan hasil pengujian tambahan yang menunjukkan tidak ditemukan bukti empiris terhadap kemungkinan digunakannya manajemen laba akrual untuk melengkapi atau mensubstitusi penggunaan manajemen laba riil dalam kegiatan *tax shelter*.

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini, yaitu pertama, *self selection bias* karena tidak mempertimbangkan perusahaan yang tidak menerima SKPKB sebagai sampel kontrol. Sehingga hasilnya dapat berbeda jika memasukkan sampel perusahaan yang tidak menerima SKPKB. Kedua, tidak mempertimbangkan variabel kontrol lain selain ukuran perusahaan. Ketiga, proksi yang digunakan untuk mengidentifikasi *tax shelter firms* memiliki interpretasi yang mungkin tidak sama dengan proksi *tax shelter* lainnya. Sehingga, interpretasi hasil penelitian ini kurang dapat digeneralisasi dengan setting penelitian lain.

Penelitian ini memberi banyak ruang untuk penelitian lanjutan dengan memperhatikan beberapa keterbatasan di atas, seperti mempertimbangkan perusahaan yang tidak menerima SKPKB sebagai sampel control penelitian, menambahkan variabel control lainnya seperti leverage, perusahaan yang merugi, dll.

Daftar Pustaka

- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 70 No. 2, 193-225.
- Desai, A. M., & Dharmapala, D. (2011). *Corporate tax avoidance and firm value*. USA: Working Papers.
- Frank, M. M., Lynch, J. L., & Rego, O. S. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 467-496.
- Graham, R. J., & Tucker, L. A. (2006). Tax shelters and corporate debt policy. *Journal of Financial Economics* 81, 563-594.
- Hanlon, M. (2005). The persistence and pricing of earnings, accruals, and cash flows when firms have large book tax differences. *The Accounting Review*, 137-166.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics* 50, 127-178.

- Hanlon, M., & Joel, S. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics* 93 , 126-141.
- Huseynov, F., & Bonnie, K. K. (2012). Tax Avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance* 18 , 804-827.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior; Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* , 305-360.
- Kim, B. J., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. *Journal of Financial Economics* 100 , 639-662.
- Roychowdhury, S. (2006). Earning management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics* 42 , 335-370.
- Samingun. (2012). *Manajemen laba untuk tujuan pajak: Determinan, metode, dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Shackelford, D. A., & Shevlin, T. (2001). Empirical tax research in accounting. *Journal of Accounting and Economics* 31 , 321-387.
- Shevlin, T. (2007). The future of tax research: From an accounting professor's perspective. *The Journal of the American Taxation Association* , 87.
- Wilson, J. R. (2009). An Examination of corporate tax shelter participants. *The Accounting Review* , 969-999.

Lampiran 1 Daftar Sampel Awal

NO.	KODE	NAMA PERUSAHAAN	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jumlah
1	ADES	Ades Waters Indonesia Tbk										1	1
2	AKRA	AKR Corporation Tbk									1		1
3	APLI	Asiaplast Industries Tbk		1									1
4	ARGO	Argo Pantes Tbk										1	1
5	ASGR	Astra Graphia Tbk		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6	ASII	Astra International Tbk	1			1		1		1			4
7	BATA	Sepatu Bata Tbk					1	1	1				3
8	BRNA	Berlina Tbk		1		1	1				1		4
9	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk					1						1
10	CLPI	Colorpak Indonesia Tbk				1	1	1					3
11	DLTA	Delta Djakarta Tbk				1	1	1		1			4
12	ESTI	Ever Shine Textile Industry Tbk			1	1	1	1	1	1		1	7
13	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk										1	1
14	FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk								1	1		2
15	FPNI	Fatrapolindo Nusa Industri Tbk	1					1	1				3
16	HEXA	Hexindo Adiperkasa Tbk				1		1				1	3
17	IGAR	Kageo Igar Jaya Tbk (Igarjaya)					1						1
18	IKAI	Intikeramik Alamasri Industri Tbk	1	1	1	1							4
19	IMAS	Indomobil Sukses Internasional Tbk						1					1
20	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk							1				1
21	KBLI	GT Kabel Indonesia Tbk	1										1
22	KBLM	Kabelindo Murni Tbk				1							1



23	KONI	Perdana Bangun Pusaka Tbk			1					1	1		3
24	LMPI	Langgeng Makmur Industry Tbk				1	1		1		1	1	5
25	MDRN	Modern Photo Film Company Tbk		1	1	1	1	1	1			1	7
26	MLIA	Mulia Industrindo Tbk	1		1	1	1	1	1				6
27	MLPL	Multipolar Corporation Tbk					1						1
28	MTDL	Metrodata Electronics Tbk					1	1	1				3
29	MYOR	Mayora Indah Tbk	1	1									2
30	NIPS	Nipress Tbk					1						1
31	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk				1		1	1				3
32	RDTX	Roda Vivatex Tbk										1	1
33	SAIP	Surabaya Agung Industry Pulp Tbk	1	1		1			1		1	1	6
34	SIPD	Sierad Produce Tbk		1									1
35	SMAR	SMART Tbk		1									1
36	SPMA	Suparma Tbk									1	1	2
37	SQMI	Sanex Qianjiang Motor International Tbk					1	1					2
38	SRSN	Indo Acidatama Tbk (d/h Sarasa Nugraha Tbk)				1	1			1		1	4
39	SUBA	Suba Indah Tbk					1						1
40	TIRA	Tira Austenite Tbk	1	1		1	1				1	1	6
41	TURI	Tunas Ridean Tbk							1	1			2
42	ULTJ	Ultra Jaya Milk Tbk						1		1			2
		Jumlah Sampel Awal											116

Sumber: Data diolah

Lampiran 2 Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan yang terindikasi melakukan manajemen laba pada penelitian Samingun (2012)	54
Jumlah tahun pengamatan dari 2001-2010	10
Total pengamatan awal	540
Pengamatan yang tidak menyampaikan laporan keuangan selama periode pengamatan	188
Pengamatan yang melaporkan dan data pajak tersedia	352
Pengamatan yang tidak menerima SKPKB	210
Pengamatan yang menerima SKPKB	142
Pengamatan yang menerima SKPKB tetapi belum menerima keputusan SKPKB (mengajukan keberatan atau banding)	26
Jumlah pengamatan yang memenuhi kriteria	116
Outlier	7
Sampel Akhir	109

Sumber: Data diolah

Lampiran 3 Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TS	109	0	1	.51	.502
DA	109	-.313354	.441794	-.01473415	.119647159
AbnCFO	109	-.251577	.289713	.00482259	.101289178
AbnPROD	109	-.867982	.909020	-.00794890	.232937263
AbnDISEXP	109	-.289036	.376049	-.01037704	.133142957
LnSIZE	109	10.888515	18.206745	13.59221953	1.266548715
Valid N (listwise)	109				

Sumber: Output SPSS, diolah kembali

Lampiran 4 Tabel 4.2 Korelasi Pearson Antar Variabel

Prob_TS	DA	AbnCFO	AbnPROD
1			
.011	1		
-.141	-.413**	1	
.013	.138	-.265**	1
.200*	-.158	.294**	-.351**
.377**	-.209*	-.158	.058

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Praktik Manajemen Laba dalam Mengantisipasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan pada Tahun 2009 dan 2010

ALI YUS ISMAN
ELIA MUSTIKASARI*
Universitas Airlangga

Abstract: *This study investigates whether earnings of Indonesian public corporations are managed in the years prior to corporate income tax rate reductions or not. The 2008 Income Tax Bill lowered the corporate income tax rate in two stages; from 30% to 28% in 2009 and from 28% to 25% from 2010 onwards. These changes provided incentive to maximize firm's value by minimizing tax through earnings management. This study emphasizes on how firms' tax planning aggressiveness on the tax rate reductions phases influences earnings management behavior.*

In this study, earnings management was measured using discretionary accruals method. The data used in this study was collected from companies listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) from 2006 to 2010; specifically in manufacturing, mining, and wholesale trading industries. The analytical methods used were paired sample t-test to determine the significance of earnings management and OLS regression to determine the influence of firms' tax planning aggressiveness.

The overall result provided evidence that earnings management behavior surrounding tax rate reductions influenced by firms' tax planning aggressiveness and the tax rate reductions phases. The analysis of discretionary accruals suggested that firms managed their earnings in 2008 for tax purposes, but the 2009 result was insignificant; proving that public corporations in Indonesia focused their tax-minimizing effort in 2008. The overall regression analysis result showed that firms' tax planning aggressiveness influences earnings management decisions. Ultimately, the result showed that aggressive tax-planning firms practiced negative earnings management in 2008, but not in 2009.

Keywords: *Corporate Income Tax Rate Reduction, Discretionary Accruals, Earnings Management, Tax Planning Aggressiveness.*

* Corresponding author: lia_tito@yahoo.co.id

I. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah informasi kinerja keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang sangat dibutuhkan pihak intern maupun ekstern dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang dilampirkan di Surat Pemberitahuan (SPT) yang terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Neraca. Laporan Laba Rugi fiskal ini dijadikan dasar dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terutang tahun pajak tertentu. Mengingat betapa krusialnya peran informasi laba bagi suatu perusahaan, manajemen seringkali melakukan berbagai upaya untuk mempengaruhi informasi laba untuk tujuan tertentu yang sering disebut dengan manajemen laba.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 2008) disahkan pada bulan September 2008. Perubahan UU PPh 2008 berpotensi memberikan insentif bagi wajib pajak badan untuk melakukan manajemen laba negatif dengan meminimalkan tingkat laba kena pajak perusahaan. Dalam UU PPh 2008 tersebut, tarif pajak badan mengalami penurunan dari tarif progresif dengan tarif tertinggi 30% menjadi tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009 dan sebesar 25% mulai tahun pajak 2010 dan seterusnya. Penurunan tarif ini memberikan peluang dan insentif bagi manajer untuk menyusun strategi manajemen laba perusahaan.

Penurunan tarif pajak secara bertahap selama 2 tahun pajak tersebut serupa dengan kondisi yang terjadi *Tax Reform Act 1986 (TRA86)* yang terjadi di Amerika Serikat (Guenther,1994) dan Yin dan Chen, 2004). Perubahan tarif pajak terjadi pada 2 tahun berturut-turut, mendorong manajer perlu menentukan periode yang digunakan untuk melakukan manajemen laba. Apakah perusahaan akan meminimalkan laba pada tahun buku 2008 untuk menghemat pajak sebesar 2% ataukah pada tahun buku 2009 untuk menghemat

3%, atau justru akan berusaha memaksimalkan manfaat dengan melakukan *negative accruals* pada kedua tahun tersebut pajak sekaligus.

Penelitian Guenther (1994) dan Yin dan Cheng (2004) menggunakan pendekatan *discretionary accruals*. Konteks kedua penelitian tersebut yaitu *Tax Reform Act 1986* (TRA86) yang menurunkan tarif pajak penghasilan badan di Amerika Serikat secara bertahap dalam dua tahun sangat relevan dengan situasi di Indonesia dengan berlakunya UU PPh 2008. Guenther (1994) memperoleh bukti bahwa dalam mengantisipasi penurunan tarif pajak, perusahaan-perusahaan di Amerika melakukan manajemen laba negatif pada tahun-tahun sebelum terjadinya penurunan tarif pajak. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Yin dan Cheng (2004) dengan menambahkan variabel keagresifan perencanaan pajak perusahaan sebagai variabel independen insentif pajak yang diduga berpengaruh terhadap manajemen laba dan membandingkan perilaku manajemen laba antara perusahaan laba dan perusahaan yang merugi. Temuan penelitian tersebut adalah TRA86 memberikan insentif bagi perusahaan laba di Amerika untuk meminimalkan pajak, akan tetapi tidak memberikan insentif bagi perusahaan yang merugi.

Di lain pihak, Wulandari dkk. (2004), Prasetio dan Nursanto (2004), dan Pranoto (2006) meneliti tentang pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2001 terhadap kebijakan akrual perusahaan manufaktur di Indonesia. Prasetio dan Nursanto tidak menemukan bukti bahwa perubahan tarif pajak menyebabkan perusahaan meminimalkan laba. Sedangkan hasil penelitian Wulandari dkk. dan Pranoto berhasil memperoleh bukti bahwa perusahaan di Indonesia melakukan manajemen laba negatif untuk meminimalkan laba pada tahun sebelum terjadinya perubahan tarif pajak penghasilan. Selain itu penelitian Alim (2009) menemukan, bahwa terdapat *discretionary accruals* negatif signifikan di tahun 2008. Penelitian yang dilakukan Subagyo dan Oktavia (2010) dan Wijaya dan Martani (2011)

memperoleh bukti bahwa perusahaan laba melakukan manajemen laba karena penurunan tarif pajak sedangkan perusahaan merugi tidak.

Fokus pengamatan penelitian ini adalah praktik manajemen laba dengan obyek penelitian perusahaan masuk bursa yang memperoleh laba saja karena perusahaan merugi menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia tidak terutang pajak penghasilan pada tahun buku tersebut sehingga penurunan tarif pajak bukan merupakan faktor pertimbangan manajemen pada periode tersebut. Pemilihan obyek penelitian ini berbeda dengan Yin dan Cheng (2004), Subagyo dan Oktavia (2010), dan Wijaya dan Martani (2011), yang menggunakan perusahaan baik yang memperoleh laba positif maupun negatif atau merugi.

Sesuai dengan Guenther (1994), penelitian ini menggunakan periode observasi lebih satu tahun sesudah tahun pengamatan utama. Efek penurunan tarif pajak penghasilan diamati pada tahun 2008 dan 2009. Dengan demikian periode penelitian total adalah antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) dan Wijaya dan Martani (2011) hanya menggunakan data pada tahun observasi utama saja, yaitu tahun 2008 dan 2009. Penggunaan tahun penelitian yang lebih panjang dilakukan sehingga dapat diketahui dengan lebih komprehensif kecenderungan praktik manajemen laba perusahaan di Indonesia ketika terdapat insentif pajak maupun ketika tidak.

Tujuan penelitian ini adalah menguji apakah perusahaan-perusahaan masuk bursa di Indonesia melakukan manajemen laba dalam mengantisipasi penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2009 dan 2010 dengan menggunakan variabel independen keagresifan perencanaan pajak. Variabel tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan berbagai insentif pajak termasuk penurunan tarif. Mengingat penurunan tarif pajak penghasilan di Indonesia terjadi secara bertahap dalam dua tahun dan besar penurunannya tidak sama, maka perlu diselidiki praktik manajemen laba atas

laba perusahaan pada tahun 2008 untuk mengantisipasi penurunan tarif tahun 2009 dan laba pada tahun 2009 untuk penurunan tarif tahun 2010. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan masuk bursa di Indonesia melakukan manajemen laba di tahun 2008 dalam mengantisipasi penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan di tahun 2009?
2. Apakah perusahaan masuk bursa di Indonesia melakukan manajemen laba di tahun 2009 dalam mengantisipasi penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan di tahun 2010?
3. Apakah manajemen laba yang dilakukan perusahaan masuk bursa di Indonesia lebih tinggi pada tahun 2009 jika dibandingkan tahun 2008?
4. Apakah tingkat keagresifan perencanaan pajak perusahaan masuk bursa di Indonesia berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?

2. Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis

Manajemen laba seperti yang dijelaskan oleh Scott (2009), merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer, atau tindakan yang mempengaruhi laba, agar mencapai tujuan-tujuan tertentu atas laba yang dilaporkan. Menurut Healy dan Wahlen (1999) terdapat tiga insentif atau motivasi utama yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu motivasi pasar modal, motivasi kontraktual, dan motivasi regulasi. Perilaku manajer menurut Watts dan Zimmerman (1990) dan Riahi-Belkaoui (2001) dapat dijelaskan oleh teori akuntansi positif yang memprediksi bahwa tindakan oportunistik manajer dilandasi tiga hipotesis, yaitu hipotesis *bonus plan*, *debt covenant*, dan *political costs*.

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 (UU PPh 2008) yang mulai berlaku per 1 Januari 2009 memberikan insentif berupa potensi penghematan pajak bagi perusahaan di Indonesia untuk melakukan manajemen laba, dimana tarif sebelumnya

berupa tarif progresif maksimal 30% menjadi tarif tunggal sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% mulai tahun 2010 dan seterusnya.

Penelitian Guenther (1994) menyelidiki apakah terjadi manajemen laba pada perusahaan di Amerika Serikat dalam menanggapi perubahan tarif pajak penghasilan. Guenther menduga bahwa perusahaan-perusahaan di AS akan melakukan manajemen laba negatif pada tahun-tahun sebelum terjadinya penurunan tarif pajak. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan *current discretionary accruals*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba negatif pada tahun sebelum terjadinya penurunan tarif pajak penghasilan. Penelitian dengan metode serupa dilakukan oleh Yamashita dan Otagawa (2007) di Jepang dan Adhikari *et al.* (2005) di Malaysia.

Yin dan Cheng (2004) mengembangkan penelitian Guenther dengan menguji pengaruh insentif pajak terhadap manajemen laba menggunakan variabel keagresifan perencanaan pajak perusahaan terhadap manajemen laba. Variabel keagresifan perencanaan pajak rumusan Lopez *et al.* (1998) yang digunakan menjelaskan kemampuan perusahaan dalam melakukan menghemat beban pajak. Dengan demikian, variabel tersebut dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk memanfaatkan penurunan tarif pajak. Pengembangan selanjutnya dilakukan dengan membandingkan perilaku perusahaan yang memperoleh laba dengan perusahaan yang menderita rugi usaha. Penelitian ini memandang manajemen laba merupakan bagian dari perencanaan pajak yang efektif sehingga perilaku perusahaan laba dan merugi diprediksi berbeda. Dengan demikian manajemen laba untuk meminimalkan pajak penghasilan layak dilakukan hanya jika manfaat keseluruhan dari insentif pajak dan insentif non-pajak menguntungkan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menderita rugi usaha merupakan perencanaan pajak yang kurang oportunistik karena tidak melakukan penghematan pajak dengan pertimbangan faktor non-pajak.

Sedangkan perusahaan laba terbukti merupakan perencana pajak yang lebih oportunis sehingga cenderung melakukan manajemen laba untuk memanfaatkan insentif pajak.

Wulandari dkk. (2004) dan Prasetio dan Nursanto (2004), dan Pranoto (2006) melakukan penelitian manajemen laba dalam konteks Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 di Indonesia. Penelitian Pranoto (2006) menggunakan metode Guenther (1994). Sedangkan Wulandari dkk. (2004) dan Prasetio dan Nursanto (2004) melakukan analisis *discretionary accruals* menggunakan uji beda. Kemudian terkait penurunan tarif pajak penghasilan badan tahun 2009 akibat UU PPh 2008, Alim (2009), Subagyo dan Oktavia (2010), dan Wijaya dan Martani (2011) melakukan penelitian serupa. Penelitian Alim (2009) mengacu pada Guenther (1994), sedangkan Subagyo dan Oktavia (2010) dan Wijaya dan Martani (2011) mendasarkan penelitian mereka pada Yin dan Cheng (2004) dengan memperbandingkan perilaku perusahaan laba dan merugi.

Penelitian-penelitian berikut masing-masing mengamati pengaruh dari faktor non-pajak atas manajemen laba. Alim (2009) dan Adhikari *et al.* (2005) memasukkan variabel ukuran perusahaan dan tingkat hutang. Guenther (1994), Lopez *et al.* (1998), Pranoto (2006), Yamashita dan Otagawa (2007) menggunakan ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen, dan tingkat hutang. Sedangkan Yin dan Cheng (2004) menambahkan variabel *earnings pressure* dalam penelitiannya.

Manajemen Laba atas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak penghasilan (PPh) badan di Indonesia mengalami perubahan sistem dan penurunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh 2008) yang disahkan pada bulan September. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2008, wajib pajak badan membayar pajak penghasilan pasal dengan sistem tarif progresif maksimal 30%. Kondisi ini berubah mulai 1 Januari 2009 dimana tarif PPh badan berubah menjadi tarif tunggal 28%. Per 1 Januari 2010, tarif pajak penghasilan badan berubah menjadi 25% yang berlaku seterusnya.

Akibat dua kali penurunan tarif PPh badan tersebut, wajib pajak badan berpotensi memperoleh manfaat penurunan beban pajak atas laba usaha perusahaan.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia mendapatkan kesempatan melakukan penghematan PPh akibat penurunan tarif pajak. Semenjak disahkan UU PPh 2008, perusahaan memiliki waktu selama 3 bulan untuk melakukan perencanaan pajak dalam rangka mengantisipasi penurunan tarif PPh tahap pertama. Sedangkan untuk penurunan tarif yang menjadi 25% pada tahun 2010, perusahaan memiliki waktu sepanjang tahun 2009. Manajemen perusahaan dalam hal ini dihadapi pada dua pilihan, yaitu untuk memanfaatkan penurunan tarif dari 30% menjadi 28% pada tahun 2008 ataukah memfokuskan perhatian pada laba tahun 2009. Apabila perusahaan menunda hingga tahun 2009 untuk menghemat pajak lebih besar di tahun 2010, maka manfaat penurunan tarif yang diperoleh dapat mencapai 3% dari penghasilan kena pajak akibat penurunan tarif menjadi sebesar 25%.

Guenther (1994) memprediksi bahwa untuk mengantisipasi penurunan tarif pajak, perusahaan akan melakukan kebijakan akrual yang menurunkan laba pada tahun sebelum berlakunya tarif yang lebih rendah. Hasil uji empiris menunjukkan bahwa terdapat *discretionary accruals* negatif yang signifikan pada tahun sebelum penurunan tarif pajak. Yin dan Cheng (2004) mengemukakan bahwa penurunan tarif pajak menyediakan insentif pajak bagi perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Tujuan pemilihan metode tersebut adalah untuk menunda laba dan meminimalkan beban pajak pada saat sebelum penerapan penurunan tarif pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung untuk menggunakan *discretionary accruals* negatif untuk memanfaatkan insentif pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Perusahaan memiliki discretionary accruals negatif pada tahun 2008 untuk mengantisipasi penurunan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2009.*

H2: *Perusahaan memiliki discretionary accruals negatif pada tahun 2009 untuk mengantisipasi penurunan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2010.*

Mengingat penurunan tarif PPh badan tahun 2009 dan 2010 terjadi secara bertahap maka perlu diteliti penurunan tarif pajak pada tahun berapakah yang lebih mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan manajemen laba. Dikarenakan penurunan tarif PPh badan tahun 2010 yang lebih besar dibandingkan tahun 2009, maka diperkirakan perusahaan akan cenderung memilih penurunan tarif tahun 2010. Berikut adalah hipotesis penelitian:

H3: *Tingkat discretionary accruals negatif perusahaan pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan tingkat discretionary accruals negatif pada tahun 2008.*

Insentif Manajemen Laba Pajak dan Praktik Manajemen Laba

Manajemen laba yang dengan motivasi pajak dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan laba perusahaan. Dalam mengantisipasi penurunan tarif PPh badan tahun 2009 dan 2010, perusahaan secara garis besar perlu melakukan penggeseran (*shifting*) laba kena pajak pada tahun sebelum terjadinya penurunan ke tahun terjadinya penurunan. Dengan melakukan penggeseran laba, perusahaan melakukan manipulasi kebijakan akrual untuk meminimalkan laba pada tahun dimana tarif PPh lebih tinggi. Tindakan memanipulasi kebijakan akrual untuk tujuan meminimalkan laba merupakan salah satu pola praktik manajemen laba. Dalam hal manajemen laba dilakukan akibat adanya insentif pajak, maka tindakan tersebut termasuk dalam lingkup perencanaan pajak.

Lopez *et al.* (1998) dan Yin dan Cheng (2004) menjelaskan bahwa ketika terdapat peluang untuk menghemat pajak, perusahaan terbatas oleh kemampuan mereka untuk meminimalkan biaya pajak. Perusahaan yang secara agresif melakukan perencanaan pajak cenderung lebih mampu untuk memanfaatkan celah peraturan pajak untuk meminimalkan

pajak. Dengan demikian dalam penelitian tersebut insentif pajak diwujudkan dengan variabel independen keagresifan perencanaan pajak. Hipotesis atas pengaruh variabel keagresifan perencanaan pajak dirumuskan sebagai berikut.

H4a: *Keagresifan perencanaan pajak perusahaan berpengaruh terhadap tingkat discretionary accruals perusahaan pada tahun 2008 sampai dengan 2010.*

H4b: *Keagresifan perencanaan pajak perusahaan berpengaruh terhadap tingkat discretionary accruals perusahaan pada tahun 2008 dimana terjadi penurunan tarif pajak penghasilan badan.*

H4c: *Keagresifan perencanaan pajak perusahaan berpengaruh terhadap tingkat discretionary accruals perusahaan 2009 dimana terjadi penurunan tarif pajak penghasilan badan.*

3. Metode Penelitian

Data dan Sampel Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dilengkapi dengan data dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Periode penelitian adalah tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Tahun-tahun tersebut merupakan periode fokus pengamatan manajemen laba, karena merupakan periode sebelum terjadinya penurunan dua tahap tarif pajak penghasilan.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan non-ritel, yaitu perusahaan pertambangan, manufaktur, dan perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2008 dan 2010. Jenis industri tersebut dipilih dengan pertimbangan karakteristik akrual yang memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan manajemen laba melalui kebijakan *discretionary accruals*. Konsisten dengan penelitian Guenther (1994) dan Yin dan

Cheng (2004) penelitian ini tidak menggunakan data perusahaan bank dan lembaga keuangan, perusahaan utilitas, dan perusahaan transportasi karena industri-industri tersebut diatur secara ketat sehingga sulit untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan utilitas menurut Nicholson dan Snyder (2007) terdiri dari perusahaan penyedia listrik, gas, bahan bakar minyak, air, sanitasi, dan telekomunikasi. Demikian pula perusahaan yang jenis usahanya dikenakan pajak penghasilan final seperti jasa konstruksi, persewaan tanah dan atau bangunan termasuk pusat perbelanjaan atau apartemen, real estat, ataupun perusahaan transportasi laut.

Sampel diambil dengan *purposive sampling* dengan pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Berikut ini adalah kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini.

- a. Perusahaan konsisten listing dan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dalam periode penelitian tersebut.
- b. Perusahaan yang pada periode 2008 dan 2009 selalu memperoleh laba fiskal positif dan membayar pajak penghasilan badan atas laba kena pajak.
- c. Perusahaan yang dalam periode observasi tidak memiliki kompensasi kerugian dalam perhitungan pajak penghasilan sehingga mempengaruhi pembayaran pajak penghasilan.
- d. Menggunakan tahun buku sesuai dengan tahun kalender dan tidak melakukan pergantian tahun buku pada periode observasi. Perusahaan yang melakukan penggabungan usaha (*merger*) atau pemecahan usaha (*spin-off*) dalam periode observasi juga dikecualikan dalam pemilihan sampel.
- e. Data-data untuk variabel yang digunakan tersedia dengan lengkap dalam laporan keuangan auditan perusahaan tersebut.

Sampel yang diperoleh melalui kriteria-kriteria pemilihan total sejumlah 68 perusahaan dalam tiga tahun periode. Sehingga total sampel penelitian adalah 204 tahun perusahaan. Tahapan pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 1.

Definisi Variabel

1. *Discretionary accruals* (DA)

Manajemen laba sebagai variabel dependen diproksikan dengan *discretionary accruals*.

Model yang digunakan mengikuti Dechow *et al.* (1995), yaitu model Jones yang dimodifikasi.

a. Menghitung total akrual

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \dots\dots\dots (1)$$

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it} \dots\dots\dots (2)$$

- TA_{it} : Total Akrual
- NI_{it} : Laba usaha perusahaan sebelum pajak
- CFO_{it} : Arus kas dari operasi perusahaan
- NDA_{it} : *Nondiscretionary accruals*
- DA_{it} : *Discretionary accruals*

b. Menghitung akrual normal atau *nondiscretionary accruals* dengan regresi OLS untuk mengetahui nilai koefisien α₁, α₂, dan α₃.

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$NDA_{it} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) \quad (4)$$

- ΔREV_{it} : Perubahan pendapatan
- ΔREC_{it} : Perubahan piutang
- PPE_{it} : Aktiva tetap (*property, plant, and equipment*)
- A_{it-1} : *lagged total assets*

c. Menghitung akrual abnormal atau *discretionary accruals*

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - \{ \alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) \} \quad (5)$$



2. Keagresifan perencanaan pajak (TAXPLAN)

Kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan insentif pajak dioperasionalkan dengan variabel TAXPLAN yang merupakan modifikasi dari model yang digunakan Lopez *et al.* (1998) dan Yin dan Cheng (2004) dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Variabel keagresifan perencanaan pajak ini berfungsi sebagai variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap manajemen laba. Perhitungan ini menggunakan data keuangan mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 selama tiga tahun. Variabel ini mengukur kemampuan perencanaan pajak perusahaan selama periode tersebut sebelum perubahan tarif pajak penghasilan pada tahun 2009 dengan tarif tertinggi sebesar 30%.

$$TAXPLAN = \frac{\sum_{2006}^{2008} [PTI * 30\% - \text{Current portion of total tax expense}] \div 3}{Ending Assets_{2008}}$$

TAXPLAN : keagresifan perencanaan pajak

PTI : laba sebelum pajak

Current Portion of total tax expense : pajak penghasilan total – pajak tangguhan

3. Variabel kontrol

Ukuran perusahaan (SIZE), dioperasionalkan dengan menggunakan nilai logaritma natural atas total aset perusahaan dengan persamaan sebagai berikut.

$$LNAT_{it} = \ln(\text{total assets})$$

Tingkat hutang (DEBT), dihitung dari nilai kewajiban jangka panjang total perusahaan dibagi dengan nilai total aset perusahaan pada awal tahun.

$$DEBT_{it} = \frac{\text{long - term liabilities}}{\text{beginning total assets}}$$

Kepemilikan manajemen (MGTOWN), dioperasionalkan dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajer, direktur, dan pejabat lain dalam perusahaan terhadap total

saham beredar. Sedangkan *earnings pressure* (EPRESS), diukur dengan persamaan sebagai berikut.

$$EPRESS_{it} = \frac{(current\ year's\ earnings\ before\ discretionary\ accruals - last\ year's\ earnings)}{beginning\ total\ assets}$$

Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan tiga tahap analisis yaitu menguji H1 dan H2 menggunakan uji t, menguji H3 dengan uji beda, dan menguji H4 dengan analisis regresi OLS. Pengujian H1 dan H2 dengan uji t dilakukan dengan terlebih dahulu mengestimasi nilai *discretionary accrual* (DA) setiap sampel untuk setiap tahunnya. Setelah nilai DA diketahui, maka nilai *mean* untuk setiap tahun penelitian diuji signifikansinya terhadap nol. Dalam melakukan pengujian terhadap H3, digunakan data nilai *mean* DA tahun 2008 dan 2009. Melalui uji beda dapat diketahui apakah terdapat beda signifikan antara DA tahun 2008 dan DA tahun 2009. H4 diuji dengan regresi OLS. Berikut persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

$$DA_{it} = a + b_1TAXPLAN_{it} + b_2YD_{2008} * TAXPLAN_{it} + b_3YD_{2009} * TAXPLAN_{it} + c_1EPRESS_{it} + c_2DEBT_{it} + c_3SIZE_{it} + c_4MGTOWN_{it} + \epsilon_{it}$$

- DA_{it} : *discretionary accruals*
- TAXPLAN : keagresifan perencanaan pajak
- YD₂₀₀₈ : 1 jika tahun 2008, 0 jika bukan
- YD₂₀₀₉ : 1 jika tahun 2009, 0 jika bukan
- SIZE : ukuran perusahaan
- DEBT : tingkat hutang perusahaan
- MGTOWN : tingkat kepemilikan manajer
- EPRESS : tekanan laba

4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dari 204 observasi pada perusahaan sampel penelitian dari tahun 2008 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel 2.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dengan menggunakan metode grafik histogram diketahui bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Uji normalitas yang kedua yang menggunakan P-plot, terlihat bahwa data yang diwakili oleh titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Penyebaran mengikuti arah garis diagonal berarti bahwa residual terdistribusi normal.

Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Nilai VIF juga menunjukkan hal yang serupa, dimana tidak terdapat variabel yang memiliki nilai VIF yang lebih besar atau sama dengan 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Dalam mendeteksi autokorelasi dalam uji DW, dilakukan perbandingan nilai DW dengan nilai tabel yang menggunakan signifikansi 1%, jumlah sampel ($N=204$), dan jumlah variabel independen ($K=7$). Nilai tabel DW diperoleh nilai d_l sebesar 1,603 dan nilai d_u sebesar 1,746. Nilai DW dari hasil output dari SPSS diperoleh sebesar 1,891. Karena nilai DW berada diantara nilai d_u dan $4-d_u$, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan analisis *scatterplot*. Penyebaran titik variabel DA pada *scatterplot* (lihat lampiran) terlihat menyebar secara acak tanpa ada pola tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadi gejala homoskedastisitas variabel dependen penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian DA Tahun 2008 dan 2009

Untuk menguji signifikansi praktik manajemen laba yang diprosikan dengan variabel DA pada tahun 2008 dan 2009 dilakukan uji statistik-t. Pada pengujian pertama dengan sampel 68 perusahaan, DA 2008 dan 2009 ternyata tidak signifikan. Kondisi tersebut disebabkan karena terdapat *outlier* yang terlalu berbeda dengan nilai DA yang lain. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan terapi *box plot* untuk mengidentifikasi outlier dan mengeluarkannya dari pengujian. Terapi ini menghasilkan 5 *outlier* DA 2008. Pengujian hipotesis H1 setelah terapi *box plot* pada DA 2008 dilakukan dengan total sampel 63 perusahaan. Nilai *mean* DA 2008 pada pengujian ini adalah (0,0389) dengan standar deviasi sebesar 0,1017. Hasil pengujian seperti pada tabel 5 menunjukkan nilai DA 2008 terbukti signifikan negatif dibawah 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis H1 diterima.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba fiskal di Indonesia terbukti melakukan manajemen laba dengan pola minimalisasi laba pada tahun 2008. Praktik manajemen laba negatif tersebut dilandasi motivasi untuk menghemat pajak pada tahun sebelum penurunan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2009. Temuan ini mendukung temuan Guenther (1994), Wijaya dan Martani (2011), Alim (2009), Yamashita dan Otogawa (2007), dan Yin dan Cheng (2004). Pada kelima penelitian tersebut, ditemukan bukti bahwa perusahaan melakukan manajemen laba negatif pada tahun sebelum penurunan tarif pajak penghasilan tahap pertama.

Berikutnya untuk pengujian hipotesis H2, terdapat 65 sampel variabel DA 2009 setelah terapi *box plot*. *Mean* DA 2009 pengujian ini bernilai (0,0032) dengan standar deviasi sebesar 0,0688. Terapi *box plot* untuk mengeliminasi outlier pada DA 2009 tetap menghasilkan signifikansi yang jauh lebih besar dari 0,05 sehingga H2 ditolak seperti terlihat pada tabel 5. Kesimpulan dari pengujian hipotesis ini adalah perusahaan masuk bursa dengan

laba fiskal di Indonesia tidak melakukan manajemen laba negatif pada tahun 2009. Terlihat bahwa perusahaan di Indonesia memfokuskan melakukan manajemen laba untuk menghemat pajak pada tahun 2008 dengan memanfaatkan penurunan tarif pajak penghasilan tahap pertama dan tidak pada penurunan tarif pajak tahap kedua. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Guenther (1994), Yin dan Cheng (2004), Yamashita dan Otagawa (2007), dan Wijaya dan Martani (2011).

Teori yang bisa menjelaskan perbedaan hasil tersebut diungkapkan oleh Scott (2009) yang menjelaskan bahwa apabila manajer melakukan penggeseran akrual, maka akrual tersebut akan berbalik pada periode berikutnya (*accruals reverse*). Pada kondisi penelitian ini, perusahaan di Indonesia melakukan penggeseran akrual dari tahun 2008 ke tahun 2009 yang mengakibatkan kelebihan akrual pada tahun 2009 tersebut. Dengan demikian walaupun perusahaan melakukan manajemen laba negatif pada tahun 2009, tetap nilainya dampaknya tidak signifikan karena telah terbebani oleh akrual hasil penggeseran dari tahun 2008.

Hasil Uji Beda DA Tahun 2008 dan 2009

Analisis uji beda dalam penelitian ini dilakukan untuk membandingkan variabel DA tahun 2008 dengan DA tahun 2009. Sampel pengujian ini berjumlah 62 perusahaan, yang diperoleh setelah proses eliminasi outlier melalui terapi *box plot*. Pada tabel 6 dapat dilihat hasil uji beda atas DA 2008 dan DA 2009. Nilai *mean* DA 2008 dalam pengujian ini adalah (0,0372) dan nilai *mean* DA 2009 sebesar (0,0017). Nilai signifikansi yang diperoleh dari pengujian sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara nilai DA tahun 2008 dan nilai DA tahun 2009. Mengingat nilai *mean* DA 2008 lebih tinggi dari nilai *mean* DA 2009, maka dalam pengujian ini hipotesis H3 diterima Artinya, terdapat perbedaan antara tingkat manajemen laba negatif yang dilakukan perusahaan di Indonesia pada tahun 2008 dengan tahun 2009. Perusahaan di Indonesia

melakukan manajemen laba negatif atas motivasi pajak lebih tinggi pada tahun 2008 daripada tahun 2009. Situasi tersebut konsisten dengan kesimpulan hipotesis H1 yang diterima dan H2 yang ditolak. Konsisten dengan pembahasan H2, penjelasan hasil analisis ini adalah akrual yang berbalik di tahun 2009 sehingga menyebabkan tingkat manajemen laba tidak signifikan.

Hasil Analisis Regresi

Pengujian *goodness of fit* dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai aktual. Pengukuran ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu koefisien determinasi, uji signifikansi F, dan uji signifikansi t. Tabel 7 memuat hasil perhitungan koefisien determinasi penelitian ini.

Nilai R^2 model regresi ini sebesar 3,1%. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 8 diperoleh nilai F hitung sebesar 1,939 dengan tingkat signifikansi 0,065. Nilai F model regresi menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjadi penjelas variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0,10.

Pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen dapat diketahui dengan melakukan uji t. Berdasarkan hasil pengujian dengan analisis regresi berganda diperoleh hasil seperti pada tabel 9.

Hasil analisis menunjukkan variabel TAXPLAN berpengaruh signifikan terlihat dari probabilitas signifikansi sebesar 0,027 ($\alpha=0,05$) dan variabel YD2008*TAXPLAN dengan probabilitas signifikansi 0,065 ($\alpha=0,10$). Sedangkan untuk variabel kontrol hanya variabel EPRESS saja yang signifikan, dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,016 ($\alpha=0,05$). Variabel independen YD2009*TAXPLAN dengan probabilitas signifikansi 0,159 ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap DA.

Hasil Uji Pengaruh TAXPLAN terhadap DA

Hipotesis H4 dilakukan pengujian untuk melihat pengaruh keagresifan perencanaan pajak (TAXPLAN) terhadap tingkat manajemen laba (DA). Dalam pengujian hipotesis model regresi ini terdapat tiga variabel, yaitu TAXPLAN secara keseluruhan tahun observasi (H4a), YD2008*TAXPLAN untuk tahun pengamatan 2008 (H4b), dan YD2009*TAXPLAN untuk tahun pengamatan 2009 (H4c). Pengujian hipotesis ini hasil analisis regresi seperti yang dirangkum pada tabel 9. Berdasarkan nilai signifikansi dalam table 9 dapat disimpulkan hipotesis H4a dan H4b diterima, sedangkan hipotesis H4c ditolak.

Variabel TAXPLAN secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba dengan tingkat signifikansi 0,027. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba, maka tingkat manajemen laba positif akan semakin tinggi. Hasil ini tidak mendukung kesimpulan penelitian terdahulu yang meliputi Yin dan Cheng (2004), Wijaya dan Martani (2011) dan Subagyo dan Oktavia (2010).

Teori yang dapat menjelaskan hal tersebut dikemukakan oleh Scholes *et al.* (2009, 2) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak yang efektif harus merupakan satu kesatuan dengan perencanaan strategis keseluruhan perusahaan. Pada periode observasi 2008-2010 secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan di Indonesia menilai bahwa tidak mendapatkan cukup insentif untuk melakukan manajemen laba untu menghemat pajak. Perusahaan yang perencana pajak yang agresif dapat lebih memilih strategi pajak yang lebih patuh untuk menghindari timbulnya biaya non pajak yang dapat lebih besar daripada penghematan pajak yang diperoleh yang dapat timbul apabila melakukan manajemen laba negatif pada periode 2008-2010. Biaya non pajak yang dapat timbul tersebut antara lain bisa berupa kelebihan bayar pajak penghasilan dan atau pemeriksaan pajak.

Hasil yang berbeda diperoleh dari regresi variabel YD2008*TAXPLAN dan YD2009*TAXPLAN terhadap DA. Pada kedua tahun tersebut secara riil terdapat insentif

untuk melakukan manajemen laba negatif untuk menghemat pajak yaitu penurunan tarif pajak penghasilan pada tahun berikutnya. Dampak insentif tersebut terlihat pada sifat pengaruh kedua variabel tersebut terhadap manajemen laba yang negatif. Namun terdapat perbedaan tingkat signifikansi dimana TAXPLAN pada tahun 2008 terbukti berpengaruh signifikan sebesar 0,065 sedangkan TAXPLAN di tahun 2009 berpengaruh tidak signifikan (0,159).

Dari hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa perusahaan perencana pajak yang agresif melakukan manajemen laba negatif pada tahun 2008 untuk menghemat pajak dengan motivasi pajak. Dengan demikian semakin tinggi dan positif nilai TAXPLAN, maka nilai DA negatif akan semakin tinggi. Temuan ini mendukung hasil penelitian Yin dan Cheng (2004) dan Wijaya dan Martani (2011) yang memperoleh bukti bahwa variabel TAXPLAN khusus di tahun sebelum penurunan tarif pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

Teori motivasi pajak untuk melakukan manajemen laba yang diungkapkan Scott (2009,405) dapat menjelaskan hasil analisis tersebut. Perusahaan apabila dihadapkan dengan insentif untuk menghemat pajak, cenderung akan memilih untuk meminimalkan beban pajak apabila secara keseluruhan akan meningkatkan *value* atau nilai perusahaan. Pandangan tersebut juga konsisten dengan pendapat Scholes *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa strategi perencanaan pajak perusahaan harus merupakan bagian dari strategi korporat yang integral untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Melihat kedua pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2008 perusahaan masuk bursa di Indonesia menilai bahwa penurunan tarif pajak penghasilan di tahun 2009 memberikan insentif yang cukup untuk melakukan manajemen laba negatif di tahun 2008 untuk meminimalkan beban pajak.

Kondisi tersebut tampaknya tidak berlanjut pada tahun 2009, karena dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel $YD2009 * TAXPLAN$ berpengaruh negatif namun tidak

signifikan terhadap manajemen laba. Terdapat dua kemungkinan penjelasan atas temuan tersebut. Pertama, telah terjadi prinsip akrual berbalik. Akrual yang digeser dari tahun 2008 ke 2009 menyebabkan nilai DA negatif di tahun 2009 menjadi tidak signifikan sehingga menyebabkan pengaruh keagresifan perencanaan pajak menjadi tidak signifikan terhadap manajemen laba di tahun 2009. Kedua, berhubungan dengan kemampuan perencanaan pajak perusahaan di Indonesia yang diproksikan dalam variabel TAXPLAN. Dapat dilihat dalam tabel 2, bahwa nilai *mean* variabel TAXPLAN untuk perusahaan sampel penelitian bernilai (0,0013). Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan di Indonesia memiliki kemampuan perencanaan pajak yang lemah atau tidak optimal. Karena kemampuan perencanaan pajak yang lemah tersebut sangat mungkin perusahaan hanya melihat penghematan jangka pendek di tahun 2008 sebesar kurang dari 2%. Sedangkan penghematan jangka panjang yang lebih besar yakni sebesar 3% menjadi terabaikan atau terkorbakan karena sudah berlaku prinsip akrual berbalik.

Hasil Uji Variabel Kontrol terhadap DA

Hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 9, menjelaskan bahwa hanya variabel *earnings pressure* (EPRESS) yang secara signifikan memperkuat terhadap manajemen laba. Hasil analisis atas variabel EPRESS mendukung hasil penelitian Yin dan Cheng (2004) dan Wijaya dan Martani (2011) yang membuktikan bahwa *earnings pressure* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Nilai *mean* variabel EPRESS (tabel 2) yakni sebesar 0,0121 dapat menjelaskan hasil tersebut. Nilai positif variabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki *earnings pressure* yang rendah sehingga leluasa untuk melakukan manajemen laba negatif. Hasil yang bertentangan diperoleh Subagyo dan Oktavia (2010), yang berkesimpulan bahwa EPRESS berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Kesimpulan:

1. Perusahaan masuk bursa di Indonesia ditemukan melakukan manajemen laba negatif pada tahun 2008 dalam merespon penurunan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2009. Hasil ini mendukung temuan penelitian Guenther (1994) dan Yin dan Cheng (2004). Sedangkan pada tahun 2009 tidak terdapat indikasi bahwa perusahaan masuk bursa di Indonesia melakukan manajemen laba untuk mengantisipasi penurunan tarif tahun 2010. Konsisten dengan kedua hasil tersebut, dugaan bahwa praktik manajemen laba dengan motivasi pajak pada tahun 2009 lebih tinggi dari tahun 2008 tidak terbukti.
2. Pada tahun 2008, yakni sebelum penurunan tarif pajak tahap pertama, keagresifan perencanaan pajak terbukti mempengaruhi tingkat manajemen laba. Hasil tersebut mendukung dengan temuan penelitian Lopez *et al.* (1998) dan Yin dan Cheng (2004). Hasil berbeda diperoleh pada data tahun 2009, dimana tidak ditemukan bukti pengaruh keagresifan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Kondisi ini konsisten dengan hipotesis 3, bahwa tidak terdapat bukti bahwa perusahaan melakukan manajemen laba pada tahun 2009 untuk memanfaatkan penurunan tarif pajak tahap kedua.

Keterbatasan Penelitian

1. Penambahan jenis variabel kontrol dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki model penelitian, namun perlu memperhatikan relevansi dan operasionalisasinya.
2. Penggunaan *discretionary accruals* dalam mengestimasi manajemen laba rentan atas kesalahan klasifikasi akrual (Gomez *et al.*, 2000). Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode alternatif dalam mengamati manajemen laba pada penelitian terkait tarif pajak penghasilan.

Daftar Referensi

- Adhikari, A., C. Derashid., dan Hao Z. 2005. *Earnings management to Influence Tax Policy: Evidence from Large Malaysian Firms*. Journal of International Financial Management and Accounting. (16:2, 2005): 142-163.
- Alim, Setiadi. 2009. *Manajemen Laba Dengan Motivasi Pajak Pada Badan Usaha Manufaktur di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. (Vol. 13 No. 3 September 2009): 444-461.
- Bursa Efek Indonesia. 2011. *IDX Fact Book 2011*. Jakarta: Research Division – Indonesia Stock Exchange.
- Bursa Efek Indonesia. www.idx.com
- Dechow, P.M., R.G. Sloan, dan A.P. Sweeney. 1995. *Detecting Earnings Management*. The Accounting Review. (Vol 70, No. 2 April 1995): 193-225.
- ECFIN. 2011. *Indonesia Capital Market Directories 2011*. Jakarta: Institute for Economic and Financial Research.
- Gomez, X.G., M, Okumura, dan M. Kunimura. 2000. *Discretionary Accrual Models and the Accounting Process*. Kobe Economic & Business Review. (October 2000).
- Guenther, D.A. 1994. *Earnings Management in Response to Corporate Tax Rate Changes: Evidence from the 1986 Tax Reform Act*. The Accounting Review. (Vol. 69 No. 1 January 1994): 230-243.
- Healy, P.M., dan J.M. Wahlen. 1999. *A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting*. Accounting Horizon. (Vol. 13 No. 4): 365-383.
- Lopez, T.J., P.R. Reiger, dan T. Lee. 1998. *Identifying Tax-Induced Earnings Management Around TRA 86 as a Function of Prior Tax-Aggressive Behavior*. The Journal of the American Taxation Association. (Vol. 20, No. 2 Fall 1998): 37-56.
- Nicholson, W. dan C. Snyder. 2007. *Theory and Application of Intermediate Microeconomics – Tenth Edition*. Canada: Thomson South-Western.
- Pranoto, Siswo. 2006. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, dan Tingkat Kepemilikan terhadap Manajemen Laba Pada Saat Sebelum dan Sesudah Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2000*. Tesis. Universitas Airlangga Surabaya.
- Prasetio, J.E. dan A. Nursanto. *Kebijakan Akrua Untuk Meminimalkan Pajak Pada Perusahaan Go Public di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Dian Ekonomi). (Vol. X No. 1 Maret 2004): 92-108.
- Scott, W.R. 2009. *Financial Accounting Theory – Fifth Edition*. Toronto: Pearson Education Canada.
- Subagyo dan Oktavia. 2010. *Manajemen Laba Sebagai Respon atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. (2010).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Watts, R.L. dan J.L. Zimmerman. 1990. *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*. The Accounting Review. (Vol 65, No.1 January 1990): 131-156.
- Wijaya, M. dan D. Martani. 2011. *Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008*. Simposium Nasional Akuntansi XIV. (2011).

- Wulandari, D., Kumalahadi, dan J.E. Prasetyo. 2004. *Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-Undang Perpajakan 2000 pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VII. (2004).
- Yamashita, H. dan K. Otagawa. 2007. *Do Japanese Firms Manage Earnings in Response to Tax Rate Reduction in the Late 1990s?*.
- Yin, Q.J. dan C.S.A. Cheng. 2004. *Earnings Management of Profit and Loss Firms in Response to Tax rate Reductions*. Review of Accounting and Finance. (Volume 3 Number 1 2004): 67-92.

Lampiran-Lampiran

Tabel 1
Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan populasi penelitian	232
Perusahaan yang tidak konsisten listing tahun 2006 – 2010	(51)
Perusahaan dengan Rugi Fiskal 2008 dan atau 2009	(80)
Perusahaan dengan kompensasi kerugian 2008 dan atau 2009	(21)
Perusahaan dengan data yang tidak lengkap	(11)
Perusahaan yang melakukan perubahan periode akuntansi	(1)
Perusahaan sampel penelitian	68

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA	204	(0,3829)	1,2123	(0,00000012)	0,1446
TAXPLAN	204	(0,0233)	0,0325	(0,0013)	0,0091
SIZE	204	24,85	32,36	27,82	1,5852
DEBT	204	0,0030	0,7011	0,1227	0,1274
MGTOWN	204	0	0,2561	0,2074	0,0595
EPRESS	204	(1,4500)	0,3000	0,0121	0,1261

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
TAXPLAN	0,317	3,154	Tidak ada
YD2008*TAXPLAN	0,502	1,994	Tidak ada
YD2009*TAXPLAN	0,500	2,000	Tidak ada
SIZE	0,757	1,320	Tidak ada
DEBT	0,948	1,055	Tidak ada
MGTOWN	0,891	1,123	Tidak ada
EPRESS	0,968	1,033	Tidak ada

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 4
Hasil Uji Durbin Watson

N	K	DW	Du	DI	4-du	Kesimpulan
7	204	1,891	1,746	1,603	2,254	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis H1 dan H2

Variabel	T	Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
DA 2008	(3,036)	0,004	H1 diterima
DA 2009	(0,371)	0,712	H2 ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis H3

Mean DA 2008 dan DA 2009	t	Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
(0,035459)	(2,359)	0,022	H3 ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 7
Koefisien Determinasi

R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error of the Estimate
0,254	0,065	0,031	0,1423609

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 8
Uji Signifikansi (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
Regression	0,275	7	0,039	1,939	0,065
Residual	3,972	196	0,020		
Total	4,247	203			

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Tabel 9
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Variabel	B	t hitung	Sig.	Keterangan
TAXPLAN	4,323	2,224	0,027	Signifikan ($\alpha=0,05$)
YD2008*TAXPLAN	(4,941)	(1,859)	0,065	Signifikan ($\alpha=0,10$)
YD2009*TAXPLAN	(3,766)	(1,415)	0,159	Tidak signifikan
SIZE	(0,010)	(1,329)	0,185	Tidak signifikan
DEBT	0,013	0,165	0,869	Tidak signifikan
MGTOWN	(0,130)	(0,733)	0,465	Tidak signifikan
EPRESS	(0,196)	(2,437)	0,016	Signifikan ($\alpha=0,05$)

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Penggunaan Derivatif Keuangan sebagai Sarana Penghindaran Pajak

OKTAVIA*

Universitas Kristen Krida Wacana

DWI MARTANI

Universitas Indonesia

Abstract: *The purpose of this study was to investigate whether the derivatives can be used as a means of tax avoidance. When testing firms do not separate between derivatives users who have high levels of disclosure of derivative transactions is high (high disclosure user) with a low (low disclosure user), the use of derivatives is not significantly associated with tax avoidance. However, when firms users of derivatives are grouped into derivative users who have high levels of disclosure of derivative transactions (high disclosure user) with derivatives users who have low levels of disclosure of derivative transactions (low disclosure/off-balance-sheet user), this study found that firms that user derivatives with low level disclosure of derivative transactions, has tax avoidance behavior more aggressive because the effective tax rate (ETR and Current GAAP ETR) of the firms is lower than other firms. This study also examines the net fair value of derivatives on the level of tax avoidance. Results of this test indicate that the net fair value of derivatives is positively related to the level of tax avoidance. This finding again indicates that tax avoidance is a result of the use of derivatives.*

Keywords: *Tax Avoidance, Financial Derivative, Disclosure Level, Tax Aggressiveness.*

* Corresponding author: oktavia@ukrida.ac.id

1. Pendahuluan

Penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak PSAK No. 55 (1999) diimplementasikan (Murwaningsari, 2011). Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah perusahaan pengguna derivatif keuangan maupun peningkatan volume transaksi derivatif keuangan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini. Terkait dengan perpajakan, peraturan pajak di Indonesia atas transaksi derivatif ini masih sangat lemah dan seringkali diperdebatkan. Sebagai contoh adalah perdebatan mengenai apakah rugi derivatif untuk tujuan spekulasi dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang hingga sekarang ini masih belum jelas kepastian hukumnya.

Menurut Darussalam dan Septriadi (2009), sudah saatnya Pemerintah Indonesia menjaga penerimaan pajak dari kerugian derivatif untuk tujuan spekulasi yang tidak ada kaitannya dengan usaha, dengan cara mengadopsi peraturan pajak atas transaksi derivatif yang lebih baik dari negara lainnya. Lemahnya peraturan pajak atas transaksi derivatif ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang bisa merugikan pendapatan negara.

Berbicara mengenai penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan sangat erat kaitannya dengan praktik manajemen laba. Menurut Barton (2001), serta Pincus & Rajgopal (2002), penggunaan derivatif keuangan merupakan salah satu bentuk dari praktik manajemen laba. Dengan menampilkan kinerja perusahaan yang terbaik, manajer akan dihargai oleh para pemegang saham, sehingga kompensasi yang akan diterima oleh manajer tersebut meningkat (Smith dan Stulz, 1985; Gaver *et al.*, 1995; Balsam, 1998; Barton, 2001; Pincus dan Rajgopal, 2002). Selain dapat dipergunakan sebagai alat manajemen laba, derivatif keuangan juga bisa dipergunakan sebagai sarana penghindaran pajak (Donohoe, 2012; Raskolnikov, 2011).

Studi mengenai penggunaan derivatif keuangan sebagai alat manajemen laba telah berkembang pesat, tetapi sayangnya, studi mengenai penggunaan derivatif sebagai sarana penghindaran pajak masih sangat langka, padahal penggunaan derivatif juga diduga dapat mengurangi pajak perusahaan. Penelitian Donohoe (2012) yang menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat, merupakan salah satu studi yang menguji dan membuktikan bahwa derivatif keuangan bisa dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak. Namun demikian, meskipun Donohoe (2012) berhasil membuktikan bahwa derivatif keuangan dapat digunakan sebagai alat penghindaran pajak, namun hasil penelitiannya belum tentu bisa digeneralisasi pada konteks negara lainnya yang memiliki karakteristik pajak yang berbeda.

Di Indonesia, belum ada satu pun penelitian yang menguji hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah derivatif keuangan dapat dijadikan sarana penghindaran pajak oleh perusahaan publik di Indonesia. Kontribusi dari penelitian ini adalah: (i) penelitian pertama di Indonesia yang mengaitkan hubungan antara penggunaan derivatif dengan penghindaran pajak; dan (ii) penelitian ini mengelompokkan perusahaan pengguna derivatif menjadi 2 (dua) sub kategori, yaitu: perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah (*low disclosure user*) dan perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure user*). Pengelompokkan ini tidak dilakukan pada penelitian Donohoe (2012), padahal pengelompokkan ini perlu dilakukan karena motif dari kedua kategori perusahaan tersebut kemungkinan besar sangat berbeda. Perusahaan yang menyembunyikan transaksi derivatifnya perlu lebih diperhatikan karena memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif.

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Perlakuan pajak atas transaksi derivatif di Indonesia

Pada awalnya pajak atas transaksi derivatif ini tidak diatur dalam aturan setingkat undang-undang, namun diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Surat Direktur Jenderal Pajak. Namun seiring dengan perkembangan penggunaan derivatif serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, maka pajak atas transaksi derivatif statusnya menjadi “sedikit lebih jelas” dengan dikenakannya pajak bersifat final (sesuai dengan pasal 4 ayat 2) atas penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, maka selanjutnya Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa. Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur bahwa atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan dibursa, dikenai PPh Final sebesar 2,5 persen dari margin awal.

Penerbitan PP Nomor 17 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa ini menuai pertentangan dari Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (Agustian, 2009) dengan mengajukan uji material ke Mahkamah Agung atas PP tersebut. Menurut mereka, PP ini sangat merugikan karena membebankan pajak penghasilan yang sangat besar, yakni 2,5 persen dari margin awal.

Di samping itu, Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia juga menilai bahwa dasar pengenaan pajak penghasilan dari margin awal adalah tidak tepat secara hukum karena margin hanyalah jaminan untuk bertransaksi dan bukan merupakan obyek dari pajak penghasilan (Agustian, 2009). Lebih lanjut, mereka

berargumen pembebanan tarif PPh Final sebesar 2,5 persen dari margin awal sangat diskriminatif dan berpotensi mematikan industri Berjangka ini.

Mahkamah Agung kemudian memberikan putusan dengan nomor 22 P/HUM/2009 yang menyatakan mengabulkan hak uji materiil pemohon, sehingga dengan adanya putusan ini, maka diterbitkan PP Nomor 31 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 2009 dicabut dan tidak berlaku lagi (Agustian, 2009). Dengan demikian, hingga detik ini kepastian hukum perpajakan atas transaksi derivatif masih belum jelas, terlebih lagi untuk transaksi derivatif tanpa melalui Bursa (Over the Counter/OTC) yang lebih banyak mendominasi. Transaksi derivatif tanpa melalui Bursa (OTC) ini justru lebih berbahaya dibandingkan transaksi derivatif melalui bursa, karena transaksi derivatif OTC ini cenderung disembunyikan oleh perusahaan (*off-balance-sheet*).

2.2. Penelitian terdahulu yang relevan

Menurut Donohoe (2012), strategi pengurangan pajak dengan menggunakan derivatif dikarenakan: (1) karakteristik fundamental dari derivatif; (2) sifat dari transaksi derivatif; (3) sistem perpajakan yang masih lemah atas transaksi derivatif; serta (4) aspek kognitif dari transaksi derivatif tersebut (*complexity* dan *understandability*). Penelitian ini menekankan pada aspek sistem perpajakan yang lemah atas transaksi derivatif sebagai penyebab bisa digunakannya derivatif keuangan sebagai sarana penghindaran pajak, karena persoalan ini sangat sesuai dengan yang dialami oleh sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem perpajakan yang lemah atas transaksi derivatif meliputi inkonsistensi, asimetri, dan ketidakpastian dalam sistem pelaporan pajak (Weisbach 2005). Inkonsistensi timbul karena ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan pajak atas transaksi derivatif ini, sehingga menimbulkan celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif (Donohoe, 2012). Perlakuan asimetri timbul karena adanya perbedaan perlakuan pajak untuk

transaksi derivatif yang sama namun memiliki tujuan yang berbeda, misalnya tujuan lindung nilai versus tujuan spekulasi. Terakhir, adalah masalah ketidakpastian hukum dari aturan pajak atas transaksi derivatif yang memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Studi yang dilakukan oleh Donohoe (2012) merupakan studi pertama yang menguji dampak penggunaan derivatif, yang diprosikan dengan nilai nosional derivatif dan nilai wajar transaksi derivatif, terhadap tingkat penghindaran pajak, dengan menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat. Donohoe (2012) menemukan bahwa penghindaran pajak merupakan determinan dan hasil dari penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Donohoe (2012) ini belum tentu bisa digeneralisasi di Indonesia karena sistem perpajakan dan lingkungan pengungkapan di Indonesia sangat jauh berbeda dengan Amerika Serikat.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian Donohoe (2012), namun model penelitian yang digunakan pada penelitian ini berbeda dengan yang digunakan oleh Donohoe. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan tingkat pengungkapan dari transaksi derivatif, dengan cara mengelompokkan perusahaan pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan rendah (*low disclosure user*) dan tinggi (*high disclosure level*).

2.3. Pengembangan hipotesis

Berdasarkan temuan penelitian Donohoe (2012) di Amerika Serikat, maka penelitian ini juga akan menguji apakah derivatif keuangan bisa digunakan sebagai sarana penghindaran pajak. Karena Donohoe (2012) menemukan bahwa penggunaan derivatif bisa digunakan untuk menghindari pajak, maka penelitian ini menduga bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan derivatif. Berdasarkan dugaan tersebut, maka dikembangkanlah hipotesis penelitian berikut ini.

H1: *Tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan derivatif (**matched sample**).*

Jika dikaitkan dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif, ada perusahaan pengguna derivatif yang cenderung menyembunyikan transaksi derivatifnya dan ada perusahaan pengguna derivatif yang secara eksplisit mengungkapkan transaksi derivatifnya secara lengkap dan jelas. Dengan demikian timbul dugaan bahwa perusahaan pengguna derivatif yang cenderung menyembunyikan informasi mengenai transaksi derivatifnya, memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih agresif daripada perusahaan yang secara eksplisit mengungkapkan informasi mengenai transaksi derivatifnya.

Oleh karena adanya perbedaan tingkat pengungkapan transaksi derivatif oleh perusahaan pengguna derivatif, maka penelitian ini mengelompokkan perusahaan pengguna derivatif menjadi 2 (dua) sub kategori, yaitu: perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah (*low disclosure user*) dan perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure user*). Berdasarkan uraian di atas, maka dikembangkan hipotesis penelitian berikut ini.

H2: *Tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan yang memiliki tingkat pengungkapan derivatif yang rendah (*low disclosure user/off-balance-sheet*) lebih tinggi dibandingkan perusahaan pengguna derivatif keuangan yang memiliki tingkat pengungkapan derivatif yang tinggi (*high disclosure user*).*

Perusahaan yang menggunakan transaksi derivatif serta mengungkapkan nilai wajar, jumlah nosional, maupun keuntungan/kerugian dari transaksi derivatif yang dilakukannya pada catatan atas laporan keuangannya dikategorikan sebagai *high disclosure user*. Perusahaan dikategorikan sebagai sampel *low disclosure user (off-balance-sheet)* jika

perusahaan tidak mengungkapkan atau hanya mengungkapkan salah satu dari ketiga komponen nilai yang berkaitan dengan transaksi derivatifnya, yaitu: (i) nilai wajar atas transaksi derivatif; (ii) jumlah nosional derivatif; dan (iii) keuntungan/kerugian atas transaksi derivatif yang dilakukannya.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan menggunakan *net fair value of derivative instrument* sebagai proksi dari tingkat penggunaan derivatif. Sejalan dengan temuan Donohoe (2012), maka penelitian ini mengembangkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: *Tingkat penggunaan derivatif keuangan berhubungan positif dengan tingkat penghindaran pajak.*

3. Metode Penelitian

3.1. Data dan Sampel

Data yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pada penelitian ini meliputi periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Periode ini dipilih karena tahun 2009 merupakan tahun awal diefektifkannya tarif pajak penghasilan Badan tunggal di Indonesia. Periode sebelum tahun 2009 tidak diobservasi dalam penelitian ini untuk menghindari bias yang dikarenakan adanya perbedaan tarif pajak penghasilan pada periode tersebut.

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan publik non keuangan di Indonesia. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan beberapa kriteria tertentu. Berikut adalah kriteria sampel pada penelitian ini:

- a. Perusahaan bergerak di sektor industri non keuangan, dan selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 perusahaan tidak pernah mengalami kerugian. Perusahaan ini dikeluarkan karena dapat mengakibatkan kerancuan pada hasil penelitian.

- b. Perusahaan yang terindikasi melakukan transaksi derivatif nilai tukar mata uang asing dan suku bunga dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 merupakan **sampel utama** pada penelitian ini. Kata kunci untuk menentukan apakah perusahaan terindikasi menggunakan derivatif atau tidak, disajikan pada bagian lampiran 1.
- c. Perusahaan tidak terindikasi melakukan transaksi derivatif dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 akan digunakan sebagai ***matched sample***.
- d. Mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tahapan pemilihan sampel utama pada penelitian ini dijelaskan pada tabel 1. Selanjutnya, sampel utama tersebut akan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu sampel ***low disclosure user (off-balance-sheet)*** dan sampel ***high disclosure user***. Perusahaan yang terindikasi melakukan transaksi derivatif serta mengungkapkan nilai wajar, jumlah nosional, maupun keuntungan/kerugian dari transaksi derivatif yang dilakukannya pada catatan atas laporan keuangannya dikategorikan sebagai ***high disclosure user***. Selanjutnya, perusahaan dikategorikan sebagai sampel ***low disclosure user (off-balance-sheet)*** jika perusahaan tidak mengungkapkan atau hanya mengungkapkan salah satu dari ketiga komponen nilai yang berkaitan dengan transaksi derivatifnya, yaitu: (i) nilai wajar atas transaksi derivatif; (ii) jumlah nosional derivatif; dan (iii) keuntungan/kerugian atas transaksi derivatif yang dilakukannya.

Tabel 1. Deskripsi Sampel Utama

Keterangan	Jumlah
Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2012	466
Perusahaan publik yang bergerak di sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank	(72)
Perusahaan publik yang bergerak di sektor non keuangan (di luar perbankan dan lembaga keuangan bukan bank)	394
Perusahaan tidak terindikasi melakukan transaksi derivatif	(337)
Perusahaan terindikasi melakukan transaksi derivative	57
Perusahaan terindikasi melakukan transaksi derivatif namun memiliki kerugian pada rentang waktu 2009 -2012	(14)
Perusahaan yang digunakan sebagai sampel utama	43
Jumlah observasi selama 4 tahun (2009 – 2012): 43 x 4	172
Perusahaan pengguna derivatif keuangan yang tidak ditemukan laporan keuangannya pada periode 2009 – 2012	(10)
Outlier	(9)
Sampel utama final	153
Sampel low disclosure user (off-balance-sheet) = 74 firm-year	
Sampel high disclosure user = 79 firm-year	
153 firm-year	

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa sampel utama pada penelitian ini berjumlah 153 *firm-year*. Dari 153 *firm-year* tersebut, sebanyak 74 *firm-year* adalah *low disclosure user (off-balance-sheet)* dan 79 *firm-year* adalah *high disclosure user*. Selanjutnya untuk sampel *matched*, digunakan kriteria-kriteria berikut ini:

- Perusahaan bergerak di sub sektor yang sama dengan perusahaan yang menjadi sampel utama pada penelitian ini.
- Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.
- Mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian

Deskripsi dari *matched sample* pada penelitian ini disajikan pada tabel 2. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa *matched sampel* final yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 144 *firm-year*.

Tabel 2. Deskripsi *Matched Sample*

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang digunakan sebagai <i>matched sampel</i> (jumlahnya sama dengan sampel utama sebelum perusahaan yang tidak ditemukan laporan keuangannya dan outlier dikeluarkan)	43
Jumlah observasi selama 4 tahun (2009 – 2012): 43 x 4	172
Perusahaan <i>matched sample</i> yang tidak ditemukan laporan keuangannya pada periode 2009 – 2012	(7)
Outlier	(21)
<i>Matched sample</i> final	144

3.2. Model penelitian

Hipotesis H1 pada penelitian ini diuji menggunakan model regresi sebagai berikut:

$$\text{TAXVAR}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{USER}_{it} + \alpha_2 \text{SIZE}_{it} + \alpha_4 \text{ROA}_{it} + \alpha_5 \text{DTA}_{it} + \alpha_6 \text{CAPINT}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots(1)$$

Sebelum melakukan pengujian hipotesis H2, penelitian ini terlebih dahulu akan melakukan uji Bonferroni untuk menguji perbedaan rata-rata tingkat penghindaran pajak antara perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan sebagai *high disclosure user* dengan perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan sebagai *low disclosure user* maupun dengan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif (*matched sample*).

Selanjutnya, model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis H2 pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{TAXVAR}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{DISCLOSE}_{it} + \alpha_2 \text{SIZE}_{it} + \alpha_4 \text{ROA}_{it} + \alpha_5 \text{DTA}_{it} + \alpha_6 \text{CAPINT}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots(2)$$

Terakhir, untuk menguji hipotesis H3 pada penelitian digunakan model berikut ini.

$$\text{TAXVAR}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{FVDER}_{it} + \alpha_2 \text{SIZE}_{it} + \alpha_4 \text{ROA}_{it} + \alpha_5 \text{DTA}_{it} + \alpha_6 \text{CAPINT}_{it} + \varepsilon_{it} \dots(3)$$

Keterangan:

TAXVAR = Penghindaran pajak

USER = Dummy user (1 untuk perusahaan penggunaan derivatif keuangan dan 0 untuk perusahaan yang tidak menggunakan derivatif).

DISCLOSE = Dummy tingkat pengungkapan (1 untuk *low disclosure user/off-balance-sheet* dan 0 untuk *high disclosure user*)

FVDER = *Net fair value of derivative*

SIZE = Ukuran perusahaan

ROA = *Return on asset*

DTA = *Debt to total asset*

CAPINT = *Capital intensity*

3.3. Definisi Variabel

Definisi dari variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

a. Penghindaran Pajak (TAXVAR)

Variabel ini diukur menggunakan 3 (tiga) ukuran yaitu GETR (GAAP ETR), CETR (Current ETR), dan ETR_DIFF (ETR differential), sedangkan khusus untuk menguji hipotesis H3 digunakan 2 (dua) ukuran penghindaran pajak, yaitu: ABS_BTD dan ABS_ETRDIFF. GETR dihitung dengan menggunakan rasio total beban pajak penghasilan terhadap *pre-tax income*. CETR dihitung dengan menggunakan rasio beban pajak penghasilan kini terhadap *pre-tax income*. ETR_DIFF merupakan selisih antara tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia (28% untuk tahun 2009, dan 25% untuk tahun 2010-2012) dengan GAAP ETR. ABS_BTD adalah nilai *absolute* dari *book-tax difference* (selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal), dan ABS_ETRDIFF adalah nilai *absolute* dari ETR *differential*.

b. USER

Variabel ini merupakan variabel dummy yang diberi nilai 1 untuk perusahaan pengguna derivatif keuangan, dan diberi nilai 0 untuk perusahaan yang tidak menggunakan derivatif.

c. DISCLOSE

Variabel DISCLOSE merupakan variabel dummy yang diberi nilai 1 untuk perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan *low disclosure user (off-balance-sheet)*, dan diberi nilai 0 untuk perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan sebagai *high disclosure user*. Perusahaan yang terindikasi melakukan transaksi derivatif serta mengungkapkan nilai wajar, jumlah nosional, maupun keuntungan/kerugian dari transaksi derivatif yang dilakukannya pada catatan atas laporan keuangannya dikategorikan sebagai *high disclosure user*. Perusahaan dikategorikan sebagai sampel *low disclosure user (off-balance-sheet)* jika perusahaan tidak mengungkapkan atau hanya mengungkapkan salah satu dari ketiga komponen nilai yang berkaitan dengan transaksi derivatif, yaitu: (i) nilai wajar atas transaksi derivatif; (ii) jumlah nosional derivatif; (iii) keuntungan/kerugian atas transaksi derivatif yang dilakukannya.

d. FVDER

Variabel ini merupakan nilai absolute dari *net fair value of derivative instrument* yang *dideflate* dengan *lagged total aset*. Variabel ini juga digunakan pada penelitian Donohoe (2012).

e. Ukuran perusahaan (SIZE)

Variabel ini diukur dengan menggunakan logaritma natural aset. Beberapa peneliti berpendapat bahwa perusahaan besar cenderung menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis, karena kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan bertambahnya beban pajak perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1978; Healy, 1985; Moses, 1987; Ashari et al., 1994; Scott, 2009). Hal ini sejalan dengan *political cost hypothesis* yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986).

f. Profitabilitas perusahaan (ROA)

Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio *Return on Asses* (ROA), yang dihitung dengan menggunakan rasio laba bersih terhadap total aset.

g. Tingkat leverage (DTA)

Variabel *leverage* pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio total utang terhadap total aset (total aset).

h. Capital Intensity (CAPINT)

Variabel ini dihitung menggunakan rasio *net property, plants, and equitment* terhadap *lagged total asset*. Ukuran ini banyak digunakan sebagai variabel control dalam studi-studi mengenai determinan ETR (Derashid dan Zhang, 2003; Gupta dan Newberry, 1997; dan lain-lain).

4. Hasil

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 3 menunjukkan statistik deskriptif dari data penelitian. Panel A di tabel 3 menunjukkan deskriptif statistik dari data seluruh perusahaan pengguna derivatif, sedangkan Panel A1 dan Panel A2 menunjukkan deskriptif statistik dari data pengguna derivatif setelah dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *high disclosure user* dan *low disclosure user*. Diketahui bahwa rata-rata GETR (GAAP ETR) dan CETR (Current ETR) dari perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan sebagai *low disclosure user* lebih rendah dibandingkan rata-rata GETR dan CETR dari perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan sebagai *high disclosure user*.

Di samping itu, terlihat pula bahwa rata-rata ETR_DIFF (ETR *differential*) dari perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan sebagai *low disclosure user* lebih besar daripada perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan sebagai *high disclosure user*.

Temuan ini memberikan indikasi awal bahwa perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah memiliki perilaku penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi.

Jika rata-rata GETR, CETR, maupun ETR_DIFF dari *low disclosure user* dibandingkan dengan rata-rata GETR, CETR, maupun ETR_DIFF dari *matched sample* (Panel C Tabel 3), maka ditemukan pula bukti bahwa tingkat penghindaran pajak dari perusahaan pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan derivatif yang rendah lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa perilaku penghindaran pajak dari perusahaan pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan derivatif yang rendah, cenderung lebih agresif dibandingkan perusahaan lainnya.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Panel A. Perusahaan pengguna derivatif (n = 153)					
Variabel	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Std. Dev
GETR	0.2664	0.2544	1.8665	-2.8646	0.3188
CETR	0.2945	0.2468	1.8648	0.0100	0.2188
ETR_DIFF	-0.0090	-0.0018	3.1146	-1.6165	0.3182
SIZE	15.9552	16.0084	19.0210	13.1036	1.3247
ROA	0.1076	0.0812	0.4172	-0.0044	0.0987
DTA	0.5021	0.5023	0.8940	0.1374	0.1575
CAPINT	0.3866	0.3506	0.9510	0.0464	0.2247
Panel A1. Perusahaan penggunaan derivatif - high disclosure (n = 79)					
Variabel	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Std. Dev
GETR	0.3176	0.2543	1.8665	0.1212	0.2291
CETR	0.3228	0.2434	1.8648	0.0100	0.2769
ETR_DIFF	-0.0592	-0.0017	0.1492	-1.6165	0.2298
SIZE	15.9280	15.5357	19.0210	13.5604	1.4572
ROA	0.1127	0.0855	0.4066	-0.0044	0.1046
DTA	0.5696	0.5701	0.8940	0.1374	0.1481
CAPINT	0.4080	0.3698	0.9510	0.0464	0.2264
Panel A2. Perusahaan penggunaan derivatif - low disclosure off-balance-sheet (n = 74)					
Variabel	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Std. Dev
GETR	0.2118	0.2566	0.6442	-2.8646	0.3869
CETR	0.2642	0.2484	0.7982	0.0695	0.1263
ETR_DIFF	0.0447	-0.0047	3.1146	-0.3942	0.3857
SIZE	15.9842	16.1883	18.5284	13.1036	1.1762
ROA	0.1021	0.0770	0.4172	0.0075	0.0923
DTA	0.4300	0.4396	0.7115	0.1746	0.1342
CAPINT	0.3638	0.3103	0.8775	0.0596	0.2221
Panel C. Matched sample (n = 144)					
Variabel	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Std. Dev
GETR	0.2911	0.2576	1.4566	0.0953	0.1669
CETR	0.2704	0.2570	1.1761	0.0013	0.1292
ETR_DIFF	-0.0338	-0.0005	0.1547	-1.2066	0.1663
SIZE	14.6884	14.8749	17.5414	11.1571	1.3858
ROA	0.1036	0.0914	0.4662	-0.0018	0.0824
DTA	0.4482	0.4440	0.8660	0.0050	0.2023
CAPINT	0.4961	0.3840	1.2769	0.0365	0.6283

4.2. Uji asumsi regresi

Uji asumsi regresi pada penelitian ini diawali dengan uji multikolinearitas untuk masing-masing model regresi. Hasil uji multikolinearitas untuk masing-masing model ditampilkan pada tabel 4. Hasilnya menunjukkan bahwa semua nilai tolerance adalah

lebih besar dari 0.1 dan Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas pada model yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model (1) Dependent variabel: GETR; CETR; ETR_DIFF			Model (2) Dependent variabel: GETR; CETR; ETR_DIFF			Model (3) Dependent variabel: ABS_BTD dan ABS_ETRDIF		
Variabel	Tolerance	VIF	Variabel	Tolerance	VIF	Variabel	Tolerance	VIF
USER	0.7900	1.2660	DISCLOSE	0.7820	1.2780	FVDER	0.9070	1.1020
SIZE	0.8140	1.2290	SIZE	0.9690	1.0320	SIZE	0.9540	1.0480
ROA	0.9020	1.1090	ROA	0.9560	1.0460	ROA	0.9560	1.0450
DTA	0.8670	1.1540	DTA	0.7690	1.3000	DTA	0.9170	1.0900
CAPINT	0.9500	1.0530	CAPINT	0.9650	1.0360	CAPINT	0.9890	1.0120

Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini. Uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan uji White yang telah tersedia pada program Eviews. Karena program Eviews yang digunakan pada penelitian ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, maka model regresi yang memiliki masalah heteroskedastisitas tersebut dapat diatasi masalah heteroskedastisitasnya. Dengan demikian seluruh hasil estimasi dari model dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Di samping melakukan uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas, penelitian ini juga melakukan uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji kemungkinan terjadinya autokorelasi. Menurut Winarno (2009), apabila nilai Durbin Watson (DW) berada di antara 1,54 dan 2,46, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. Oleh karena nilai Durbin Watson (DW) pada semua hasil estimasi model penelitian berada di antara angka 1,54 dan 2,46, maka disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

4.3. Pengujian Hipotesis H1

Hipotesis H1 pada penelitian ini menyatakan bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan derivatif keuangan (*matched sample*). Hasil pengujian dari hipotesis H1 ini disajikan pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Pengujian Hipotesis H1 (Tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan derivatif (*matched sample*)).

Variable	Dependent Variable: CETR			Dependent Variable: GETR			Dependent Variable: ETR_DIFF		
	Coefficient	t-stat	Prob.	Coefficient	t-stat	Prob.	Coefficient	t-stat	Prob.
USER	0.0404	1.5473	0.1229	0.0080	0.2404	0.8102	-0.0068	-0.2049	0.8378
SIZE	-0.0076	-1.0576	0.2911	-0.0231	-2.1119	0.0355**	0.0219	2.0038	0.0460**
ROA	-0.4825	-3.1223	0.0020*	-0.3331	-1.9533	0.0517	0.3264	1.9170	0.0562***
DTA	-0.0667	-0.7521	0.4526	0.0291	0.3350	0.7379	-0.0241	-0.2774	0.7816
CAPINT	0.0103	0.2674	0.7894	0.0331	1.0254	0.3060	-0.0355	-1.1023	0.2712
C	0.4572	3.3511	0.0009*	0.6354	3.8344	0.0002*	-0.3607	-2.1796	0.0301**
	Adjusted R-squared	0.0484		Adjusted R-squared	0.0232		Adjusted R-squared	0.0213	
	F-statistic	4.0096		F-statistic	2.4036		F-statistic	2.2900	
	Prob (F-stat)	0.0016*		Prob (F-stat)	0.0371**		Prob (F-stat)	0.0460**	

*) Signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$

**) Signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$

***) Signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$

Dari tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel USER tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara tingkat penghindaran pajak dari perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat penghindaran pajak dari perusahaan yang tidak menggunakan derivatif. Dengan demikian hipotesis H1 tidak terbukti. Namun, perlu diperhatikan bahwa temuan yang tidak signifikan ini bisa saja disebabkan karena perusahaan pengguna derivatif belum dikelompokkan antara perusahaan pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan derivatif yang tinggi (*high disclosure user*) dengan perusahaan pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan derivatif yang rendah (*low disclosure user*). Pengelompokkan ini perlu dilakukan karena motif penggunaan derivatif antara kedua kelompok perusahaan kemungkinan besar berbeda.

Transaksi derivatif yang tidak secara eksplisit diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan menyembunyikan transaksi derivatif tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa perusahaan ini kemungkinan besar melakukan manajemen laba dan penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan lainnya. Untuk memperkuat dugaan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak yang agresif, maka sebagai langkah pengujian awal, penelitian ini melakukan pengujian perbedaan rata-rata GAAP ETR, Current ETR, dan ETR differential dari perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan *high disclosure user* dengan perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan sebagai *low disclosure user* maupun dengan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif (*matched sample*).

Hasil pengujian beda rata-rata dengan menggunakan *Bonferroni-test* disajikan pada tabel 6. Dari tabel 6 tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata GAAP ETR dari perusahaan pengguna derivatif yang *low disclosure*, lebih rendah signifikan dibandingkan perusahaan yang *high disclosure*. Di samping itu, diketahui pula bahwa rata-rata GAAP ETR dari perusahaan pengguna derivatif yang *low disclosure* juga lebih rendah signifikan dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif.

Dari tabel 6 diketahui pula bahwa ketika penghindaran pajak diukur menggunakan Current ETR, tidak ditemukan perbedaan rata-rata yang signifikan antara pengguna derivatif yang *low disclosure* dengan pengguna derivatif yang *high disclosure* maupun dengan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif. Namun ketika penghindaran pajak diukur menggunakan ETR differential, ditemukan bahwa rata-rata ETR_DIFF dari perusahaan pengguna derivatif yang *low disclosure* lebih tinggi signifikan daripada perusahaan yang *high disclosure* dan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif. Temuan penelitian yang ditunjukkan pada tabel 6 membuktikan hipotesis H2.

Tabel 6. Uji beda rata-rata GAAP ETR, Current ETR, dan ETR differential

TAXVAR	Perusahaan pengguna derivatif		Perusahaan bukan pengguna derivatif (Matched sample)
	High disclosure user	Low disclosure user	
GAAP ETR (GETR)	Mean = 0.3176 n = 79	Mean = 0.2118 n = 74	Mean = 0.2911 N = 144
Current ETR (CETR)	Mean = 0.3228 n = 79	Mean = 0.2642 n = 74	Mean = 0.2704 N = 144
ETR differential (ETR_DIFF)	Mean = -0.0592 n = 79	Mean = 0.0447 n = 74	Mean = -0.0338 N = 144
Bonferroni t-statistic			
Keterangan	Mean Difference	Error	P-value
GETR high disclosure user versus GETR low disclosure user	0.1058	0.0411	0.032*
GETR high disclosure user versus GETR matched sample	0.0265	0.0356	1.000
GETR low disclosure user versus GETR matched sample	-0.0793	0.0364	0.090**
CETR high disclosure user versus CETR low disclosure user	0.0586	0.0291	0.135
CETR high disclosure user versus CETR matched sample	0.0524	0.0252	0.115
CETR low disclosure user versus CETR matched sample	-0.0061	0.0257	1.000
ETR_DIFF high disclosure user versus ETR_DIFF low disclosure level	-0.1039	0.0410	0.036*
ETR_DIFF high disclosure user versus ETR_DIFF matched sample	-0.0254	0.0355	1.000
ETR_DIFF low disclosure user versus ETR_DIFF matched sample	0.0785	0.0363	0.094**
*) Signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$			
**) Signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$			

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa perusahaan pengguna derivatif yang memiliki tidak pengungkapan transaksi derivatif yang rendah, cenderung memiliki perilaku penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan lainnya. Temuan ini juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang dilakukan oleh perusahaan, ketika menguji apakah perusahaan pengguna derivatif memiliki tingkat penghindaran pajak yang agresif.

4.4. Pengujian Hipotesis H2

Untuk memperkuat bukti yang ditemukan di tabel 6, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis H2, yaitu apakah tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan yang memiliki tingkat pengungkapan derivatif yang rendah (*low*

disclosure user/off-balance-sheet) lebih tinggi dibandingkan perusahaan pengguna derivatif keuangan yang memiliki tingkat pengungkapan derivatif yang tinggi (*high disclosure user*).

Hasil pengujian hipotesis H2 disajikan pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Pengujian Hipotesis H2 (tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan yang memiliki tingkat pengungkapan derivatif yang rendah (*low disclosure user/off-balance-sheet*) lebih tinggi dibandingkan perusahaan pengguna derivatif keuangan yang memiliki tingkat pengungkapan derivatif yang tinggi (*high disclosure user*)).

Variable	Dependent Variable: CETR			Dependent Variable: GETR			Dependent Variable: ETR_DIFF		
	Coefficient	t-stat	Prob.	Coefficient	t-stat	Prob.	Coefficient	t-stat	Prob.
DISCLOSE	-0.1007	-1.6975	0.0917	-0.1630	-2.8462	0.0051	0.1628	2.8482	0.0050
SIZE	-0.0050	-0.4272	0.6698	-0.0094	-0.4851	0.6283	0.0083	0.4284	0.6690
ROA	-0.5771	-2.6835	0.0081	-0.3004	-1.1412	0.2557	0.3004	1.1433	0.2548
DTA	-0.2052	-0.8673	0.3872	-0.3590	-1.9531	0.0527	0.3712	2.0231	0.0449
CAPINT	-0.1729	-2.3532	0.0199	-0.1002	-0.8714	0.3850	0.0981	0.8542	0.3944
C	0.6543	2.1664	0.0319	0.7473	2.3527	0.0200	-0.4771	-1.5050	0.1345
	Adjusted R-squared	0.1059		Adjusted R-squared	0.0354		Adjusted R-squared	0.0355	
	F-statistic	4.6016		F-statistic	2.1169		F-statistic	2.1180	
	Prob (F-stat)	0.0006		Prob (F-stat)	0.0666		Prob (F-stat)	0.0664	

Pada tabel 7 di atas, diketahui bahwa ketika variabel dependen yang digunakan adalah GAAP ETR dan Current ETR, maka koefisien dari variabel DISCLOSE adalah negatif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa rata-rata GAAP ETR dan Current ETR dari perusahaan pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah (*low disclosure user*), lebih rendah signifikan dibandingkan perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure user*). Di samping itu, terlihat pula dari tabel 7 bahwa koefisien dari variabel DISCLOSE terhadap ETR differential adalah positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis H2 pada penelitian ini terbukti. Temuan-temuan di atas, sekali lagi memperkuat dugaan bahwa perusahaan yang menyembunyikan transaksi derivatifnya, cenderung memiliki perilaku penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan lainnya.

4.5. Pengujian Hipotesis H3

Hipotesis H3 menyatakan bahwa tingkat penggunaan derivatif keuangan berhubungan positif dengan tingkat penghindaran pajak. Hasil dari pengujian hipotesis ini disajikan pada Tabel 8. Dari tabel tersebut, ditunjukkan bahwa variabel FVDER memiliki koefisien yang positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat penggunaan derivatif keuangan, maka semakin besar pula perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Dengan demikian, hipotesis H3 pada penelitian ini terbukti.

Dependent Variable: ABS_BT D				Dependent Variable: ABS_ETRDIFF			
Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
FVDER	0.4847	1.9026	0.0599	FVDER	1.7516	2.0397	0.0439
SIZE	0.0081	3.0287	0.0031	SIZE	-0.0014	-0.1248	0.9009
ROA	-0.0499	-1.3477	0.1807	ROA	-0.6771	-2.9003	0.0045
DTA	-0.0104	-0.4507	0.6532	DTA	-0.2766	-1.2710	0.2066
CAPINT	-0.0240	-1.5485	0.1245	CAPINT	-0.1314	-2.2776	0.0248
C	-0.0771	-1.7519	0.0827	C	0.3787	1.2172	0.2263
Adjusted R-squared	0.1098			Adjusted R-squared	0.1552		
F-statistic	3.6882			F-statistic	5.0038		
Prob(F-statistic)	0.0041			Prob(F-statistic)	0.0004		

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah derivatif dapat dipergunakan sebagai sarana penghindaran pajak. Hasil yang ditemukan oleh penelitian ini menunjukkan bahwa ketika pengujian yang dilakukan tidak memisahkan antara perusahaan pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure user*) dengan yang rendah (*low disclosure user*), penggunaan derivatif tidak berhubungan signifikan dengan penghindaran pajak.

Namun, ketika perusahaan pengguna derivatif dikelompokkan menjadi pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure user*) dengan pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah (*low disclosure/off-balance-sheet user*), ditemukan bahwa perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah (*low disclosure/off-balance-sheet user*) memiliki perilaku penghindaran pajak yang lebih agresif karena *effective tax rate* (GAAP ETR dan Current ETR) dari perusahaan ini lebih rendah dibandingkan perusahaan lainnya. Di samping itu, Penelitian ini juga menguji *net fair value of derivative* terhadap tingkat penghindaran pajak. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa *net fair value of derivative* berhubungan positif dengan tingkat penghindaran pajak. Temuan ini kembali mengindikasikan bahwa penghindaran pajak merupakan hasil dari penggunaan derivatif.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya mempertimbangkan tingkat pengungkapan transaksi derivatif ketika menginvestigasi apakah perusahaan pengguna derivatif memiliki perilaku pajak yang lebih agresif. Regulator pajak harus mempertimbangkan tingkat pengungkapan transaksi derivatif dalam catatan atas laporan keuangan ketika mendeteksi apakah terjadi tindakan penghindaran pajak yang agresif pada perusahaan pengguna derivatif. Perusahaan pengguna derivatif yang cenderung menyembunyikan transaksi derivatifnya mungkin perlu lebih diperhatikan karena mereka cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan lainnya. Bagi penelitian selanjutnya, tingkat pengungkapan transaksi derivatif dari perusahaan pengguna derivatif harus selalu diperhatikan ketika melakukan pengujian terhadap perusahaan ini.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah sampel perusahaan pengguna derivatif yang relatif sedikit. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian,

tidak hanya dari perusahaan yang bergerak di sektor industri non keuangan saja, tetapi juga meneliti perusahaan pengguna derivatif yang bergerak di sektor industri keuangan. Di samping itu, penelitian selanjutnya disarankan pula mempertimbangkan dampak dari penerapan PSAK 50 dan 55 revisi terbaru yang mengacu kepada IAS 32 dan 39, karena PSAK tersebut dianggap dapat meningkatkan *value relevance* dan transparansi dari laporan keuangan, sehingga tingkat pengungkapan transaksi derivatif juga akan lebih baik lagi dengan diterapkan PSAK 50 dan 55 revisi terbaru ini.

Daftar Referensi

- Agustian, Widi. 2009. "Asosiasi Perdagangan Berjangka Minta PP 17 Dicabut". Artikel Okezone – Economy, Kamis, 16 Juli 2009.
- Barton, Jan, 2001. "Does the use of financial derivatives affect earnings management decisions? ". *The Accounting Review* 76, Hal 1–26.
- Darussalam, dan Danny Septriadi, 2009. "Rugi Derivatif untuk Tujuan Spekulatif: Deductible or Not?". Artikel online di www.ortax.org. Tanggal 14 Mei 2009.
- Desai, M. and D. Dharmapala. 2006. "Corporate tax avoidance and high powered incentives". *Journal of Financial Economics* 79: 145-179.
- Donohoe, M. 2012. "Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance: An Empirical Examination of New Users". *Working paper, University of Illinois at Urbana-Champaign*.
- Donohoe, M. 2012. "Financial derivatives in corporate tax avoidance: Outcomes and Determinants". *Working paper, University of Illinois at Urbana-Champaign*.
- Donohoe, M. 2012. "Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance: Why, How, and Who?". *Working paper, University of Illinois at Urbana-Champaign*.
- Dyreng, S.D., M. Hanlon, and E. Maydew. 2008. "Long-run corporate tax avoidance". *The Accounting Review* 83(1): 61-82.
- Gaver, J. J., K. M. Gaver, dan J. R. Austin. 1995. "Additional evidence on bonus plans and income management". *Journal of Accounting and Economics* 19, Hal 3-28.
- Derashid, Chek dan Hao Zhang. 2003. "Effective tax rates and the "industrial policy" hypothesis: evidence from Malaysia". *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation* 12 (2003) 45–62.
- Gupta, Sanjay, dan Kaye Newberry. 1997. "Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rate: Evidence from longitudinal data". *Journal of Accounting and Public Policy* (16), 1-34.
- Murwaningsari, Ety. 2011. "Hubungan derivatif keuangan dan *discretionary accrual* sebagai alat manajemen laba serta pengaruh terhadap relevansi nilai dari laba dan ekuitas". *Disertasi Doktorat, Program Pascasarjana Ilmu akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.



Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa

Petersen, M.A., dan S. R. Thiagarajan. 2000. "Risk measurement and hedging: with and without derivatives". *Financial Management* 29, Hal 5–30.

Pincus, Morton, and Shivaram Rajgopal. 2002. "The Interaction Between Accrual Management and Hedging: Evidence From Oil and Gas Firms". *The Accounting Review* Vol. 77 No. 1, Hal 127 – 160.

Raskolnikov, A. 2011. Statement before the Joint Hearing of the U.S. House Committee on Ways and Means and U.S. Senate Committee on Finance. "Tax Reform and the Tax Treatment of Financial Products" (December 6).

Smith, C. W., dan R. M. Stulz. 1985. "The determinants of firms' hedging policies". *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 20, Hal 391-405.

Subramanyam, K. R. 1996. "The pricing of discretionary accruals". *Journal of Accounting and Economics*, Hal 249-281.

Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Weisbach, D.A. 2005. Problems with the taxation of financial instruments. Teaching Notes. University of Chicago Law School.

Wilson, R. 2009. An examination of corporate tax shelter participants. *The Accounting Review* 84(3): 969-999.

Zhang, H. 2009. Effect of derivative accounting rules on corporate risk-management behavior. *Journal of Accounting and Economics* 47(3): 244-264.

Lampiran 1. Searching keyword

- Sehubungan dengan saldo kewajiban dalam mata uang asing, Perusahaan telah melakukan beberapa kontrak derivatif dengan pihak lain untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing
- Derivative
- Nosional/notional
- Swap
- Forward
- Futures
- Option
- Fair value Hedge
- Effective portion
- Ineffective portion
- Risk management
- Call Option
- Put Option
- LIBOR
- SIBOR
- Perusahaan mendapat fasilitas *cross currency swap* sebesar Rp/USD..... dari yang dapat digunakan sebagai perlindungan atas risiko fluktuasi mata uang.
- Perusahaan melakukan transaksi swap valuta asing untuk tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang berasal dari hutang jangka panjang Perusahaan dalam mata uang asing

Lampiran 2. Output Eviews

Uji Beda (Bonferonni test)

NON USER = 1

HIGH DISCLOSURE USER = 2

LOW DISCLOSURE USE = 3

Descriptives

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
GETR	1.0000	144	.291090	.1669347	.0139112	.263591	.318588	.0953	1.4566
	2.0000	79	.317567	.2291139	.0257773	.266248	.368886	.1212	1.8665
	3.0000	74	.211803	.3868861	.0449746	.122168	.301437	-2.8646	.6442
	Total	297	.278377	.2565280	.0148853	.249083	.307672	-2.8646	1.8665
CETR	1.0000	144	.270366	.1291560	.0107630	.249091	.291641	.0013	1.1761
	2.0000	79	.322799	.2768752	.0311509	.260782	.384815	.0100	1.8648
	3.0000	74	.264197	.1262746	.0146791	.234942	.293453	.0695	.7982
	Total	297	.282776	.1810551	.0105059	.262100	.303451	.0013	1.8648
ETRDIF	1.0000	144	-.033798	.1662620	.0138552	-.061185	-.006411	-1.2066	.1547
	2.0000	79	-.059213	.2297723	.0258514	-.110679	-.007746	-1.6165	.1492
	3.0000	74	.044684	.3856648	.0448326	-.044667	.134035	-.3942	3.1146
	Total	297	-.021004	.2559232	.0148502	-.050229	.008222	-1.6165	3.1146

Multiple Comparisons

Bonferroni

Dependent Variable	(I) USER	(J) USER	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	90% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
GETR	1.0000	2.0000	-.0264775	.0355985	1.000	-.102590	.049635
		3.0000	.0792869*	.0363668	.090	.001531	.157043
	2.0000	1.0000	.0264775	.0355985	1.000	-.049635	.102590
		3.0000	.1057644*	.0411330	.032	.017818	.193711
	3.0000	1.0000	-.0792869*	.0363668	.090	-.157043	-.001531
		2.0000	-.1057644*	.0411330	.032	-.193711	-.017818
CETR	1.0000	2.0000	-.0524328	.0252061	.115	-.106326	.001460
		3.0000	.0061687	.0257501	1.000	-.048887	.061225
	2.0000	1.0000	.0524328	.0252061	.115	-.001460	.106326
		3.0000	.0586014	.0291249	.135	-.003670	.120873
	3.0000	1.0000	-.0061687	.0257501	1.000	-.061225	.048887
		2.0000	-.0586014	.0291249	.135	-.120873	.003670
ETRDIF	1.0000	2.0000	.0254147	.0355259	1.000	-.050543	.101373
		3.0000	-.0784817*	.0362927	.094	-.156079	-.000884
	2.0000	1.0000	-.0254147	.0355259	1.000	-.101373	.050543
		3.0000	-.1038964*	.0410492	.036	-.191663	-.016129
	3.0000	1.0000	.0784817*	.0362927	.094	.000884	.156079
		2.0000	.1038964*	.0410492	.036	.016129	.191663

*. The mean difference is significant at the 0.10 level.



Output Pengujian Hipotesis H1

Dependent Variable: CETR

Method: Least Squares

Date: 05/19/13 Time: 19:32

Sample: 1 297

Included observations: 297

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
USER	0.040389	0.026102	1.547318	0.1229
SIZE	-0.007629	0.007213	-1.057641	0.2911
ROA	-0.482462	0.154520	-3.122322	0.0020
DTA	-0.066654	0.088619	-0.752142	0.4526
CAPINT	0.010302	0.038528	0.267392	0.7894
C	0.457158	0.136420	3.351114	0.0009
R-squared	0.064453	Mean dependent var		0.282776
Adjusted R-squared	0.048378	S.D. dependent var		0.181055
S.E. of regression	0.176621	Akaike info criterion		-0.609623
Sum squared resid	9.077761	Schwarz criterion		-0.535003
Log likelihood	96.52909	Hannan-Quinn criter.		-0.579750
F-statistic	4.009599	Durbin-Watson stat		1.929959
Prob(F-statistic)	0.001559			

Dependent Variable: GETR

Method: Least Squares

Date: 05/19/13 Time: 19:33

Sample: 1 297

Included observations: 297

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
USER	0.007963	0.033125	0.240385	0.8102
SIZE	-0.023099	0.010938	-2.111899	0.0355
ROA	-0.333093	0.170526	-1.953323	0.0517
DTA	0.029077	0.086807	0.334958	0.7379
CAPINT	0.033081	0.032263	1.025373	0.3060
C	0.635441	0.165720	3.834420	0.0002
R-squared	0.039661	Mean dependent var		0.278377
Adjusted R-squared	0.023161	S.D. dependent var		0.256528
S.E. of regression	0.253540	Akaike info criterion		0.113404
Sum squared resid	18.70621	Schwarz criterion		0.188025
Log likelihood	-10.84056	Hannan-Quinn criter.		0.143278
F-statistic	2.403618	Durbin-Watson stat		1.856113
Prob(F-statistic)	0.037092			

Dependent Variable: ETR_DIFF

Method: Least Squares

Date: 05/19/13 Time: 19:34

Sample: 1 297

Included observations: 297

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
USER	-0.006777	0.033077	-0.204886	0.8378
SIZE	0.021886	0.010922	2.003827	0.0460
ROA	0.326426	0.170284	1.916955	0.0562
DTA	-0.024050	0.086683	-0.277443	0.7816
CAPINT	-0.035514	0.032217	-1.102339	0.2712
C	-0.360685	0.165485	-2.179567	0.0301
R-squared	0.037858	Mean dependent var	-0.021004	
Adjusted R-squared	0.021326	S.D. dependent var	0.255923	
S.E. of regression	0.253180	Akaike info criterion	0.110559	
Sum squared resid	18.65307	Schwarz criterion	0.185180	
Log likelihood	-10.41808	Hannan-Quinn criter.	0.140433	
F-statistic	2.290022	Durbin-Watson stat	1.857122	
Prob(F-statistic)	0.045956			

Output Pengujian Hipotesis H2

Dependent Variable: CETR

Method: Least Squares

Date: 05/18/13 Time: 15:46

Sample: 1 153

Included observations: 153

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DISCLOSE	-0.100734	0.059342	-1.697510	0.0917
SIZE	-0.004961	0.011612	-0.427234	0.6698
ROA	-0.577096	0.215052	-2.683526	0.0081
DTA	-0.205170	0.236556	-0.867321	0.3872
CAPINT	-0.172941	0.073493	-2.353166	0.0199
C	0.654272	0.302014	2.166362	0.0319
R-squared	0.135336	Mean dependent var	0.294456	
Adjusted R-squared	0.105926	S.D. dependent var	0.218769	
S.E. of regression	0.206858	Akaike info criterion	-0.275143	
Sum squared resid	6.290162	Schwarz criterion	-0.156302	
Log likelihood	27.04842	Hannan-Quinn criter.	-0.226868	
F-statistic	4.601642	Durbin-Watson stat	1.780228	
Prob(F-statistic)	0.000626			

Dependent Variable: GETR
 Method: Least Squares
 Date: 05/18/13 Time: 15:44
 Sample: 1 153
 Included observations: 153

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DISCLOSE	-0.162978	0.057262	-2.846206	0.0051
SIZE	-0.009446	0.019473	-0.485083	0.6283
ROA	-0.300391	0.263233	-1.141160	0.2557
DTA	-0.359024	0.183821	-1.953116	0.0527
CAPINT	-0.100238	0.115036	-0.871366	0.3850
C	0.747276	0.317631	2.352650	0.0200
R-squared	0.067166	Mean dependent var		0.266413
Adjusted R-squared	0.035437	S.D. dependent var		0.318803
S.E. of regression	0.313103	Akaike info criterion		0.553859
Sum squared resid	14.41096	Schwarz criterion		0.672700
Log likelihood	-36.37024	Hannan-Quinn criter.		0.602134
F-statistic	2.116869	Durbin-Watson stat		1.732031
Prob(F-statistic)	0.066560			

Dependent Variable: ETR_DIFF
 Method: Least Squares
 Date: 05/18/13 Time: 15:49
 Sample: 1 153
 Included observations: 153

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DISCLOSE	0.162771	0.057149	2.848197	0.0050
SIZE	0.008326	0.019435	0.428397	0.6690
ROA	0.300369	0.262714	1.143331	0.2548
DTA	0.371150	0.183459	2.023073	0.0449
CAPINT	0.098074	0.114809	0.854238	0.3944
C	-0.477099	0.317005	-1.505019	0.1345
R-squared	0.067201	Mean dependent var		-0.008962
Adjusted R-squared	0.035473	S.D. dependent var		0.318181
S.E. of regression	0.312486	Akaike info criterion		0.549913
Sum squared resid	14.35419	Schwarz criterion		0.668753
Log likelihood	-36.06832	Hannan-Quinn criter.		0.598188
F-statistic	2.118047	Durbin-Watson stat		1.733685
Prob(F-statistic)	0.066420			

Output Pengujian Hipotesis H3

Dependent Variable: ABS_BT
 Method: Least Squares
 Date: 05/18/13 Time: 16:22
 Sample: 1 110
 Included observations: 110

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FVDER	0.484682	0.254749	1.902583	0.0599
SIZE	0.008117	0.002680	3.028680	0.0031
ROA	-0.049863	0.037000	-1.347655	0.1807
DTA	-0.010379	0.023030	-0.450680	0.6532
CAPINT	-0.024049	0.015530	-1.548541	0.1245
C	-0.077059	0.043986	-1.751894	0.0827
R-squared	0.150611	Mean dependent var		0.035510
Adjusted R-squared	0.109775	S.D. dependent var		0.039746
S.E. of regression	0.037501	Akaike info criterion		-3.675915
Sum squared resid	0.146255	Schwarz criterion		-3.528616
Log likelihood	208.1753	Hannan-Quinn criter.		-3.616170
F-statistic	3.688188	Durbin-Watson stat		1.571744
Prob(F-statistic)	0.004106			

Dependent Variable: ABS_ETRDIFF

Method: Least Squares
 Date: 05/18/13 Time: 16:25
 Sample: 1 110
 Included observations: 110
 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FVDER	1.751606	0.858747	2.039722	0.0439
SIZE	-0.001427	0.011428	-0.124828	0.9009
ROA	-0.677103	0.233459	-2.900305	0.0045
DTA	-0.276568	0.217594	-1.271025	0.2066
CAPINT	-0.131392	0.057688	-2.277614	0.0248
C	0.378657	0.311097	1.217166	0.2263
R-squared	0.193917	Mean dependent var		0.094719
Adjusted R-squared	0.155163	S.D. dependent var		0.186675
S.E. of regression	0.171582	Akaike info criterion		-0.634508
Sum squared resid	3.061804	Schwarz criterion		-0.487209
Log likelihood	40.89794	Hannan-Quinn criter.		-0.574763
F-statistic	5.003803	Durbin-Watson stat		1.580568
Prob(F-statistic)	0.000379			



Lampiran 3. Daftar Perusahaan Sampel

Sampel Utama			Sampel Matched (perusahaan tidak menggunakan		
No.	Kode	Sub-sektor	No.	Kode	Sub-Sektor
1	MNCN	Advertising, Printing & Media	1	SCMA	Advertising, Printing & Media
2	PGAS	Energi	2	LAPD	Energi
3	PLIN	Hotel & Pariwisata	3	PJAA	Hotel & Pariwisata
4	BMTR	Investasi	4	PLAS	Investasi
5	BRMS	Investasi	5	POOL	Investasi
6	ASGR	Jasa Komputer & perangkat lainnya	6	MTDL	Jasa Komputer & perangkat lainnya
7	KBLI	Kabel	7	JECC	Kabel
8	UNIC	Kimia	8	EKAD	Kimia
9	UNVR	Kosmetik & keperluan rumah tangga	9	TCID	Kosmetik & keperluan rumah tangga
10	MLBI	Makanan & minuman	10	DLTA	Makanan & minuman
11	ASII	Otomotif & komponen	11	GJTL	Otomotif & komponen
12	AUTO	Otomotif & komponen	12	INDS	Otomotif & komponen
13	BRAM	Otomotif & komponen	13	LPIN	Otomotif & komponen
14	IMAS	Otomotif & komponen	14	MASA	Otomotif & komponen
15	SMSM	Otomotif & komponen	15	NIPS	Otomotif & komponen
16	JPFA	Pakan ternak	16	MAIN	Pakan ternak
17	HEXA	Perdagangan besar barang produksi	17	CPIN	Pakan ternak
18	INTA	Perdagangan besar barang produksi	18	AKRA	Perdagangan besar barang produksi
19	LTLS	Perdagangan besar barang produksi	19	EPMT	Perdagangan besar barang produksi
20	TURI	Perdagangan besar barang produksi	20	TMPI	Perdagangan besar barang produksi
21	UNTR	Perdagangan besar barang produksi	21	HERO	Perdagangan Eceran
22	MAPI	Perdagangan Eceran	22	RALS	Perdagangan Eceran
23	MPPA	Perdagangan Eceran	23	SONA	Perdagangan Eceran
24	SMAR	Perkebunan	24	AALI	Perkebunan
25	TBLA	Perkebunan	25	LSIP	Perkebunan
26	ADRO	Pertambangan	26	SGRO	Perkebunan
27	ANTM	Pertambangan	27	INCO	Pertambangan
28	BUMI	Pertambangan	28	KKGI	Pertambangan
29	BYAN	Pertambangan	29	PTRO	Pertambangan
30	ITMG	Pertambangan	30	TINS	Pertambangan
31	MEDC	Pertambangan	31	ELSA	Pertambangan
32	DART	Property & Real Estate	32	ASRI	Property & Real Estate
33	ELTY	Property & Real Estate	33	CTRA	Property & Real Estate
34	LPKR	Property & Real Estate	34	PWON	Property & Real Estate
35	FASW	Pulp & kertas	35	TKIM	Pulp & kertas
36	HMSP	Rokok	36	GGRM	Rokok
37	INDR	Tekstil & garment	37	RDTX	Tekstil & garment
38	EXCL	Telekomunikasi	38	TOWR	Telekomunikasi
39	ISAT	Telekomunikasi	39	INVS	Telekomunikasi
40	TLKM	Telekomunikasi	40	TBIG	Telekomunikasi
41	GIAA	Transportasi	41	RAJA	Transportasi
42	RIGS	Transportasi	42	WEHA	Transportasi
43	SMDR	Transportasi	43	WINS	Transportasi



**Determinan Variasi *Effective Tax Rates* (Etrs) Perusahaan
dan Reformasi Pajak:
Studi terhadap Perusahaan yang Terdaftar di Bei Periode 2008-2009**

DEWI KARTIKA SARI*

Universitas Indonesia

Abstract: *This study examines the determinants of the variability in corporate effective tax rates (ETRs) in Indonesia spanning the taxation reform. Previous studies have found that there is an association between firm size, capital structure, corporate investment decision and corporate ETRs. In this study political connection (Adhikari et al., 2006) is added as a complement of the firm size and corporate ETRs association explanation. Our results indicate that capital structure (leverage), capital-intensity, and inventory-intensity have an association with the variability of corporate ETRs in Indonesia. The opposite sign of estimated coefficient regression of capital-intensity variable might be because there is a capital lease asset in the fixed asset component. This study failed to find the association between firm size, R&D intensity, political connection, tax reform, and ETRs.*

Keywords: *Effective Tax Rates, Tax Reform.*

* Author can be contacted at: dewi.kartika@gmail.com

1. Pendahuluan

Perusahaan selaku subjek pajak, wajib menyerahkan sebagian penghasilannya kepada pemerintah (dalam bentuk pajak) sebesar persentase tarif tertentu. Kadangkala tarif pajak penghasilan yang ditetapkan pemerintah, tidak sama dengan tarif pajak efektif (*effective tax rates* – ETRs) yang ditanggung perusahaan. Bisa saja ETRs yang ditanggung perusahaan lebih besar atau lebih kecil dari tarif pajak penghasilan yang ditetapkan pemerintah.

Tarif pajak efektif (*effective tax rates* – ETRs) sering dipakai oleh para pembuat keputusan dan kelompok-kelompok yang berkepentingan sebagai alat untuk menilai kelayakan suatu sistem pajak yang terkait dengan perusahaan (badan). Penggunaan ETRs sebagai alat penilaian dianggap sangat berguna karena melalui ETRs maka pihak yang berkepentingan dapat melihat efek dari berbagai insentif pajak dan tarif pajak perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997; Richardson dan Lanis, 2007).

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan pada perusahaan di negara maju seperti Amerika (Gupta dan Newberry, 1997), dan negara berkembang seperti Australia (Richardson dan Lanis, 2007), serta Malaysia (Adhikari et al., 2006) diketahui bahwa variabel-variabel penentu besaran ETRs antara lain adalah ukuran perusahaan (*firm-size*), struktur modal (*leverage*), dan keputusan investasi perusahaan (*capital-intensity*, *inventory intensity*, dan *R&D intensity*). Di Indonesia penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Soepriyanto (2008). Namun hasil dari seluruh penelitian masih menunjukkan arah maupun besaran hubungan yang beragam. Contohnya untuk variabel ukuran perusahaan, Zimmerman (1983) menemukan adanya hubungan yang positif antara ukuran perusahaan dengan ETRs. Sebaliknya Siegfried (1972) dan Porcano (1986) menemukan hubungan yang negatif antara ukuran perusahaan dan ETRs, sedangkan hasil temuan Gupta dan Newberry (1997) menunjukkan bahwa berdasarkan pengujian atas data tahun yang panjang, ukuran perusahaan tidak terbukti berhubungan dengan ETRs. Richardson dan Lanis (2007) di Australia berusaha

menguji pernyataan Gupta dan Newberry (1997), dan ternyata hasilnya menunjukkan bantahan atas pernyataan Gupta dan Newberry (1997). Dengan data yang panjang dan menggunakan perusahaan-perusahaan di Australia sebagai sampel, Richardson dan Lanis (2007) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan yang negatif dengan ETRs. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di negara berkembang lainnya seperti Malaysia, Korea, Taiwan, dan Thailand (Adhikari et al. 2006; Kim & Limpaphayom, 1998) yang menunjukkan bahwa hubungan antara ETRs dan ukuran perusahaan menunjukkan arah yang negatif. Namun berbeda dengan hasil penelitian di negara berkembang lainnya, hasil penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Soepriyanto (2008) tidak menemukan adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan ETRs.

Tidak ditemukannya hasil yang signifikan antara hubungan ETRs dan ukuran perusahaan, bisa jadi dikarenakan berbedanya proses penetapan perundang-undangan di Indonesia dengan negara lain. Di Indonesia, proses perumusan kebijakan dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Departemen Keuangan) bekerjasama dengan para tim ahlinya, yang kemudian hasil atau usulan kebijakan tersebut diajukan ke Presiden dan DPR untuk mendapatkan persetujuan. Proses politik tawar-menawar dilakukan saat usulan kebijakan diajukan ke DPR (avr, 2007). DPR yang terdiri dari berbagai fraksi politik tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda, keputusan yang disampaikan partai bisa saja merupakan cerminan kepentingan perusahaan yang mendukung partai tersebut. Penelitian di Malaysia (Adhikari et al., 2006) memberikan bukti bahwa ada hubungan antara hubungan politik (*political connection*) dengan ETRs. Oleh karenanya dalam penelitian ini, sebagai pelengkap dalam menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan ETRs, hubungan politik akan dimasukkan sebagai salah satu determinan variasi ETRs perusahaan.

Bukti di Amerika telah menunjukkan bahwa besaran ETRs tiap perusahaan untuk waktu yang berbeda besarnya juga akan berbeda, hal ini menunjukkan sistem pajak yang

ada belum layak, oleh karenanya hal ini menjadi justifikasi adanya reformasi pajak (Shevlin & Porter, 1992). Penelitian mengenai hubungan ETRs dengan reformasi pajak masih sedikit, khususnya penelitian di luar Amerika. Hal ini mungkin dikarenakan jarang terjadinya reformasi pajak.

Reformasi pajak di Indonesia berawal pada tahun 1983, saat sistem perpajakan berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Selanjutnya pemerintah terus melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam peraturan perpajakannya (DJP, 2008; Nasution, 2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, merupakan reformasi kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah (Nasution, 2009). Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini dapat mempengaruhi determinan dari ETRs. Antara lain yaitu perubahan tarif pajak penghasilan untuk badan, yang sebelumnya tarif progresif menjadi tarif tunggal; penurunan tarif bagi perusahaan yang masuk bursa; serta pengakuan sumbangan sebagai pengurang pajak yang dibayarkan.

Dari tinjauan literatur yang dilakukan, sampai saat ini belum ada penelitian di Indonesia yang melihat hubungan antara determinan variasi ETRs perusahaan dengan reformasi pajak. Adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan kesempatan untuk melakukan *event study* terkait dengan hubungan determinan variasi ETRs perusahaan dan reformasi pajak.

Oleh karenanya penelitian ini ingin menguji determinan penyebab bervariasinya ETRs perusahaan, serta melihat bagaimana pengaruh reformasi pajak terhadap ETRs.

2. Kerangka Teoretis Dan Perumusan Hipotesis

2.1. *Effective Tax Rates* (ETRs)

Dari Janssen dan Buijink (2000) diketahui bahwa penelitian mengenai determinan ETRs dengan menggunakan data perusahaan dilakukan pertama kali oleh Stickney dan

McGee (1982). Sebelumnya, penelitian mengenai variasi ETRs dilakukan dengan menggunakan data rata-rata tertimbang industri. Penelitian yang dilakukan oleh Callihan (1994) memberikan studi literatur mengenai kajian ETRs sampai dengan tahun 1994.

Callihan (1994) menjelaskan bahwa ada dua jenis penelitian mengenai ETRs, yaitu penelitian mengenai *marginal* ETRs dan penelitian mengenai *average* ETRs. *Marginal* ETRs digunakan untuk menguji efek perpajakan atas keputusan suatu investasi. *Marginal* ETRs juga dapat digunakan untuk level perusahaan, namun tentunya dalam hal ini perusahaan dianggap sebagai suatu kumpulan proyek investasi, sehingga *marginal* ETRs tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan *average* ETRs tepat digunakan untuk mengukur besaran pajak yang ditanggung perusahaan. *Average* ETRs mencerminkan tingkat pajak yang dibayarkan atas laba perusahaan. Karena penelitian ini fokus pada determinan dari variasi pajak yang ditanggung perusahaan, maka penelitian ini menggunakan *average* ETRs. Lebih lanjut yang dimaksud ETRs dalam penelitian ini adalah *average* ETRs.

ETRs adalah rasio antara beban pajak (*tax expense - T*) dengan laba buku akuntansi (*accounting income - I*) perusahaan. Sedangkan, *tax expense (T)* adalah penghasilan kena pajak (*taxable income - TI*) dikalikan dengan tarif pajak (*t*): $T=TI*t$. Wilkie (1988) dalam Gupta dan Newberry (1997) memperkenalkan istilah preferensi pajak (*tax preferences - TP*), sebagai notasi untuk perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal (perhitungan laba menurut pajak): $TP=I-TI$. Preferensi pajak mencakup perbedaan temporer dan permanen antara laba akuntansi dan laba fiskal. Bila memasukan *TP* dalam *TI* maka *ETR* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$ETR = [(I - TP)/I] * t$$

Dalam berbagai literatur, notasi *tax preferences* diganti dengan *deferred tax expense* (beban pajak tangguhan). Karena *deferred tax expense* merupakan implikasi dari preferensi manajemen perusahaan terhadap kebijakan akuntansi tertentu yang menyebabkan suatu

perbedaan temporer antara laba buku akuntansi dengan laba fiskal. Stickney dan McGee (1982), serta Omer et al. (1993) dalam mengukur ETRs menggunakan *adjusted income tax expense* (besaran *income tax expense* dikurangi dengan *deferred tax expense*) sebagai pembilang. PSAK Nomor 46 mewajibkan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menyajikan nilai *deferred tax expense* yang ditanggungnya (IAI, 2009). Oleh karenanya sebagai notasi pembilang ETRs, penelitian ini menggunakan *adjusted income tax expense*.

Untuk komponen penyebut ETRs terdapat tiga jenis pengukuran, yaitu: (1) *Taxable Income*, (2) *Book Income*, dan (3) *Cash flow from operations*. Gupta dan Newberry (1997) berpendapat bahwa bila ingin melihat efek dari adanya *tax incentives*, maka penggunaan *taxable income* sebagai komponen penyebut ETRs tidak tepat. Hal ini dikarenakan *taxable income* sudah mengeluarkan perbedaan-perbedaan antara perhitungan pajak dengan perhitungan buku akuntansi, sehingga efek dari adanya *tax incentives* tidak akan terlihat. Oleh karenanya banyak penelitian lebih memilih menggunakan *book income* sebagai penyebut dalam pengukuran ETRs (lihat Richardson dan Lanis (2007), serta Gupta dan Newberry, (1997)). Sebagai alternatif dari penggunaan *book income*, pengukuran ETRs juga bisa menggunakan *cash flow from operations* sebagai penyebut. Penggunaan *cash flow from operations* dianggap dapat mengontrol adanya kemungkinan timbulnya suatu perbedaan yang sistematis dalam pemilihan metode akuntansi (Zimmerman, 1983).

2.2. ETRs dan Ukuran Perusahaan

Saat ini terdapat dua teori yang sama kuatnya mengenai hubungan ETRs dengan ukuran perusahaan, yaitu *political cost theory* dan *political power theory* (Richardson dan Lanis, 2007). Dalam *political cost theory*, semakin besar perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan menjadi sasaran dari keputusan regulator dalam rangka proses transfer kekayaan (Watts & Zimmerman, 1986). Karena pajak merupakan bagian dari biaya

politik yang ditanggung perusahaan, maka teori ini menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar pula ETRs yang dimilikinya (Zimmerman, 1983). Sedangkan dalam *political power theory*, Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETRs yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar dianggap memiliki sumber daya untuk memanipulasi proses politik yang terjadi, atau menggunakan sumber daya yang ada untuk membuat perencanaan pajak yang baik, serta menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan *tax savings*.

Di Amerika, hasil penelitian mengenai hubungan ETRs dengan ukuran perusahaan menunjukkan hasil yang inkonklusif. Sementara Zimmerman (1983) menemukan hubungan positif antara ETRs dan ukuran perusahaan, Porcano (1986) dalam Richardson dan Lanis (2007) menemukan hubungan yang negatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan Gupta dan Newberry (1997) terhadap 655 perusahaan di Amerika (untuk kurun waktu 8 tahun) menemukan hasil yang tidak konsisten, sehingga Gupta dan Newberry (1997) mengusulkan bahwa efek ukuran perusahaan (*firm-size effects*) bisa saja terjadi karena adanya spesifikasi sampel, karena hasilnya untuk periode yang panjang tidak konsisten.

Dalam penelitian yang dilakukan di luar Amerika, ternyata kebanyakan hubungan antara ETRs dan ukuran perusahaan menunjukkan arah yang negatif. Hal ini bisa dilihat dalam penelitian Richardson dan Lanis (2007), serta Tran (1998) dalam Richardson dan Lanis (2007) yang melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan di Australia, Adhikari et al. (2006), dan Derashid dan Zhang (2003) yang meneliti pada perusahaan-perusahaan di Malaysia, serta penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Limpaphayom (1998) yang meneliti perusahaan-perusahaan di Korea, Malaysia, Taiwan, dan Thailand. Berbeda dengan penemuan di Asia Tenggara lainnya, penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Soepriyanto (2008) tidak menemukan adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan ETRs.

Mengacu kepada hasil penelitian di Asia Tenggara yang kebanyakan menunjukkan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan ETRs, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H₁ : *Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETRs.*

2.3. ETRs dan Struktur Modal Perusahaan

Struktur modal perusahaan terdiri dari liabilitas dan ekuitas (Ross, 2002). Keputusan struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi ETRs karena peraturan perpajakan biasanya membedakan perlakuan pajak terhadap keputusan struktur modal perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997). Sebagai contoh, perusahaan yang struktur modalnya lebih besar bersumber dari liabilitas (*leverage*) daripada ekuitas, maka nilai ETRs akan lebih rendah dibandingkan perusahaan yang struktur modalnya lebih banyak bersumber dari ekuitas. Hal ini dikarenakan beban bunga liabilitas dapat mengurangi pajak, sedangkan pembayaran dividen tidak dapat mengurangi.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), Adhikari et al. (2006), Derashid dan Zhang (2003), Gupta dan Newberry (1997), serta Soepriyanto (2008) menemukan bahwa hubungan antara ETRs dan *leverage* bersifat negatif. Sehingga untuk memprediksi hubungan antara ETRs dengan *leverage*, digunakan format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H₂ : *Leverage perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETRs.*

2.4. ETRs dan Keputusan Investasi Perusahaan

Keputusan investasi perusahaan juga mempengaruhi ETRs. Karena peraturan pajak biasanya mengizinkan pembayar pajak untuk menyusutkan aset tetap yang dimilikinya dengan periode yang lebih pendek daripada umur ekonomisnya. Sehingga perusahaan yang

jenis investasinya lebih banyak pada asset tetap (*capital-intensity*), contohnya perusahaan manufaktur, diharapkan untuk memiliki ETRs yang lebih rendah (Richardson dan Lanis, 2007). Sedangkan untuk perusahaan yang lebih banyak berinvestasi pada persediaan (*inventory-intensity*), contohnya perusahaan ritel, berlaku keadaan sebaliknya, ETRs diharapkan menunjukkan nilai yang lebih tinggi (Zimmerman, 1983). Hasil temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), Adhikari et al. (2006), Derashid dan Zhang (2003), serta Gupta dan Newberry (1997).

Untuk perusahaan dengan aktivitas R&D yang tinggi, karena biaya R&D dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan, maka perusahaan dengan *R&D-intensity* diprediksi memiliki ETRs yang rendah (Gupta & Newberry, 1997).

Dari penjelasan di atas, maka kami menggunakan format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H₃ : Capital-intensity berpengaruh negatif terhadap ETRs.

H₄ : Inventory-intensity berpengaruh positif terhadap ETRs.

H₅ : *R&D intensity berpengaruh negatif terhadap ETRs.*

2.5. ETRs dan Hubungan Politik (*Political Connection*)

Rajan dan Zingales (1998, 2003) dalam Adhikari et al. (2006) menyatakan bahwa perbedaan sistem ekonomi kapitalis negara maju di Barat (contohnya Amerika) dengan sistem ekonomi kapitalis negara berkembang (contohnya di Asia Tenggara) adalah adanya keputusan ekonomi berdasarkan pasar (*market-based capitalisms*) yang dianut negara maju, dan keputusan ekonomi berdasarkan hubungan (*relationship-based capitalisms* atau kroni) yang dianut oleh negara berkembang. Istilah *relationship-based capitalisms* mengusulkan bahwa hubungan politik (*political connection*) bisa jadi merupakan pelengkap dalam menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan ETRs pada negara berkembang

Dengan adanya hubungan politik, pemerintah cenderung akan memberikan fasilitas kepada perusahaan tertentu. Dukungan pemerintah ini dapat berbentuk subsidi eksplisit maupun implisit. Contoh dukungan ini bisa berupa pengurangan pajak tertentu, atau pembebasan pajak berupa *government bailouts* (Jayasankaran, 1999), yang kesemuanya dapat menurunkan ETRs perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhikari et al. (2006) pada perusahaan-perusahaan di Malaysia menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik membayar pajak dengan tarif efektif yang signifikan lebih rendah daripada perusahaan lainnya.

Melihat bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto (2008) atas perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak menunjukkan adanya hubungan antara ETRs dengan ukuran perusahaan, maka penelitian ini mencoba mengajukan faktor hubungan politik sebagai pelengkap dalam menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan ETRs. Berikut hipotesis alternatif mengenai hubungan antara ETRs dengan hubungan politik (*political connection*).

H₆ : *Hubungan politik (political connection) berpengaruh negatif terhadap ETRs.*

2.6. ETRs dan Reformasi Pajak

Menurut website yang disponsori oleh KPP Balikpapan, yang dimaksud dengan reformasi pajak adalah suatu perubahan yang sifatnya mendasar dalam bidang perpajakan ("Pemerintah"). Diawali pada tahun 1983, reformasi perpajakan di Indonesia ditandai dengan berubahnya sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment* (pemberian keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar). Reformasi perpajakan sebagai penyempurna dari perubahan sistem perpajakan di tahun 1983, telah dilakukan sebanyak empat kali. Yaitu reformasi perpajakan tahun 1994 dan 1997 (Bawazier dan Kadir, 2009), reformasi administrasi perpajakan tahun 2003 (Purnomo, 2009),

serta reformasi perpajakan tahun 2008 (Nasution, 2009). Dalam penelitian ini hanya menyoroti pengaruh reformasi perpajakan tahun 2008 terhadap determinan variasi ETRs perusahaan. Oleh karena itu untuk selanjutnya yang dimaksud dengan reformasi pajak adalah reformasi perpajakan tahun 2008.

Reformasi perpajakan tahun 2008 ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang ini terdapat banyak perubahan yang substansial. Perubahan yang terkait dengan perusahaan antara lain adalah (1) perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk badan, yang sebelumnya berupa tarif progresif (sesuai dengan rentang penghasilan) dengan tarif maksimal sebesar 30%, sekarang berubah menjadi tarif tunggal dan diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009 dan menjadi 25% pada tahun 2010, (2) Adanya keringanan bagi perusahaan yang masuk bursa, berupa penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal (dengan syarat paling sedikit 40% sahamnya dimiliki oleh masyarakat dan syarat lainnya). Sehingga pada tahun 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (*go public*) sebesar 23% dan tahun 2010 menjadi 20%. Dengan tarif ini diharapkan perusahaan yang masuk bursa akan mempunyai daya saing yang lebih tinggi (DJP, 2008).

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis alternatif mengenai hubungan antara ETRs dengan reformasi pajak adalah sebagai berikut:

H₇ : *Reformasi pajak berpengaruh negatif terhadap ETRs.*

3. Metodologi Riset

3.1. Model Empiris dan Variabel Penelitian

Tujuan dari model empiris yang akan dijabarkan berikut adalah untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Dimana dalam tiap model empiris tersebut, seluruh variabel independen yang diduga mempengaruhi variabel

dependen dimasukkan secara bersama-sama untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah model empiris yang diuji:

$$ETR_i = \alpha_0 + \alpha_1 SIZE_i + \alpha_2 LEV_i + \alpha_3 CINT_i + \alpha_4 INVINT_i + \alpha_5 RDINT_i + \alpha_6 POLCON_i + \alpha_7 ROA_i + \alpha_8 TREF_i + \varepsilon_i$$

ETR_i merupakan tarif pajak efektif perusahaan (badan) untuk perusahaan i ; $SIZE_i$ adalah proksi untuk ukuran perusahaan i ; LEV_i menggambarkan struktur modal (*leverage*) untuk perusahaan i ; $CINT_i$ menggambarkan *capital-intensity* untuk perusahaan i ; $INVINT_i$ menggambarkan *inventory-intensity* untuk perusahaan i ; $RDINT_i$ menggambarkan R&D *intensity* untuk perusahaan i ; $POLCON_i$ menunjukkan *political connection* untuk perusahaan i ; ROA_i menggambarkan operasional untuk perusahaan i ; $TREF_i$ merupakan variable *dummy* dimana perusahaan i akan diberi nilai 1 jika observasi dilakukan pada periode setelah adanya reformasi pajak, dan 0 jika sebaliknya.

3.2. Variabel Dependen (ETRs)

Dalam penelitian ini ETRs akan diukur dengan membagi nilai *adjusted income tax expense* (besaran *income tax expense* dikurangi *deferred tax expense*), dengan nilai laba buku perusahaan sebelum beban bunga dan beban pajak (Gupta dan Newberry, 1997).

3.3. Variabel Independen

Sesuai metode penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), variabel spesifik perusahaan diproksikan oleh ukuran perusahaan, struktur modal (pendanaan) dan bauran asset (keputusan investasi perusahaan). Ukuran perusahaan ($SIZE$) diukur dengan natural logaritma dari nilai total aset (pada nilai bukunya). *Financial leverage* (LEV) sebagai proksi dari struktur modal perusahaan, diukur dengan membagi nilai utang jangka panjang dengan nilai total aset (keduanya pada nilai buku). Sedangkan sebagai proksi dari bauran

asset perusahaan digunakan tiga variabel, yaitu: *capital intensity (CINT)*, *inventory intensity (INVINT)* dan *R&D intensity (RDINT)*. *CINT* diukur dengan membagi nilai bersih aset tetap dengan nilai total aset (keduanya pada nilai buku). *INVINT* diukur dengan membagi nilai persediaan dengan nilai total aset (keduanya juga pada nilai buku). Dan terakhir, *RDINT* diukur dengan membagi pengeluaran R&D (beban R&D) dengan nilai aset bersih.

Penelitian yang dilakukan oleh Adhikari et al. (2006) mengusulkan penggunaan *political connection* sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi bervariasinya ETRs. Menurut Adhikari et al. (2006) *political connection* dapat diproksikan oleh dua variabel, yaitu (1) persentase kepemilikan pemerintah dalam perusahaan, dan (2) adanya hubungan antara direksi atau pemegang saham utama perusahaan dengan pemimpin yang berkuasa. Karena data untuk mengukur hubungan antara direksi atau pemegang saham utama perusahaan dengan pemimpin yang berkuasa sulit didapat, maka penelitian ini hanya menggunakan persentase kepemilikan pemerintah dalam perusahaan sebagai proksi dari *political connection*. Persentase kepemilikan pemerintah dalam perusahaan diukur dengan variabel *dummy* (1 jika dimiliki pemerintah, dan 0 jika sebaliknya).

3.4. Variabel Kontrol

Untuk memastikan bahwa bervariasinya ETRs hanya disebabkan oleh variabel independen yang diuji, bukan karena perubahan dalam hasil operasi perusahaan maka penelitian ini menjadikan *Return on Assets (ROA)* sebagai salah satu variabel kontrol. *ROA* diukur dengan membagi *pre-tax income* dengan total aset. Berdasarkan pernyataan Wilkie (1988) dalam Gupta dan Newberry (1997), peningkatan *ROA* akan menyebabkan meningkatnya nilai ETRs, hal ini mengindikasikan *ROA* berhubungan positif dengan ETRs.

3.5. Variabel Reformasi Pajak

Untuk melihat efek dari adanya reformasi pajak terhadap ETRs penelitian ini menggunakan variabel periode *dummy* reformasi pajak (*TREF*). Variabel *TREF* akan diberi nilai 1 jika observasi dilakukan untuk periode setelah adanya reformasi pajak, dan 0 jika sebaliknya.

3.6. Sampel dan Data

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan yang ada dalam delapan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2008-2009. Sektor industri yang dimaksud adalah sektor industri manufaktur, ritel, pertanian, kehutanan dan perikanan, pakan ternak, pertambangan dan jasa pertambangan, konstruksi, telekomunikasi, dan jasa transportasi.

Data yang diambil berasal dari laporan keuangan interim (semester) perusahaan, yaitu laporan keuangan per tanggal 31 Juni 2008 dan 31 Juni 2009. Alasan diambilnya data laporan keuangan interim dikarenakan reformasi pajak (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008) baru diberlakukan efektif mulai tanggal 1 Januari 2009.

Dari data yang ada akan dianalisis bila perusahaan termasuk dalam kategori di bawah ini, maka perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari sampel. Berikut kategori yang dimaksud:

- a. Perusahaan yang dalam struktur modalnya terdapat kepemilikan perusahaan asing lebih atau sama dengan 50% dari total modal saham perusahaan. Hal ini untuk menghindari keputusan pendanaan maupun investasi perusahaan yang dipengaruhi oleh peraturan pajak negara asal perusahaan induk.
- b. Perusahaan dengan data yang tidak lengkap, atau perusahaan yang pada tahun dimaksud tidak melakukan aktivitas.

- c. Perusahaan dengan nilai laba yang negatif atau memiliki tagihan restitusi pajak, karena hal ini akan mengakibatkan nilai ETRs terdistorsi (Richardson dan Lanis, 2007).
- d. Perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian, karena nilai ETRs perusahaan tersebut akan sulit diinterpretasikan (Richardson dan Lanis, 2007)
- e. Perusahaan dengan nilai ETRs lebih dari satu, karena hal ini akan membuat masalah dalam estimasi model (Gupta dan Newberry, 1997).

3.7. Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis

Data akan diolah dengan bantuan program Eviews dan model akan diestimasi dengan menggunakan regresi OLS. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis akan dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal, tidak terjadi multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

4. Analisis Hasil Penelitian

4.1. Gambaran Umum Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdapat dalam delapan jenis industri, yaitu industri manufaktur, ritel, pertanian dan kehutanan, pakan ternak, pertambangan dan jasa pertambangan, konstruksi, telekomunikasi, dan jasa transportasi. Total perusahaan dalam delapan jenis industri tersebut berjumlah 234 perusahaan. Detil nama perusahaan dalam masing-masing jenis industri didapat dari ICMD 2008, sedangkan data keuangan perusahaan didapat dari *website* BEI, www.idx.co.id per tanggal 21 Nopember 2009.

Karena Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (momentum dari reformasi pajak) baru efektif diberlakukan tanggal 1 Januari 2009, maka data yang dipakai dalam penelitian ini

berasal dari laporan keuangan interim (semester) perusahaan. Sehingga observasi penelitian hanya dilakukan untuk dua periode, yaitu laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2008 dan 30 Juni 2009.

Dengan masa observasi tersebut dan berdasarkan seleksi pemilihan sampel yang dilakukan, maka pengamatan dalam penelitian ini total berjumlah 66 pengamatan (33 perusahaan selama dua periode). Detil pemilihan sampel yang dilakukan dapat dilihat dalam Tabel 1.

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Suatu statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sederhana mengenai data dan hasil dari penelitian yang dilakukan (Agung, 2001). Dari Tabel 2 panel A, terlihat bahwa penyebaran ETRs perusahaan sampel sebelum adanya reformasi pajak memiliki mean sebesar 0,24, sedangkan setelah adanya reformasi pajak turun menjadi 0,22. Hal ini menunjukkan indikasi awal bahwa adanya reformasi pajak menurunkan ETRs perusahaan.

Dari deskripsi pengelompokan ETRs terlihat bahwa sebelum adanya reformasi pajak, 82% ETRs perusahaan berada dalam lapisan kelompok pajak teratas, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel yang ada dalam penelitian ini kebanyakan merupakan perusahaan besar. Banyaknya perusahaan yang memiliki ETRs di lapisan kelompok pajak teratas juga membuktikan bahwa keputusan pemerintah untuk merubah tarif pajak dari sebelumnya berbentuk progresif menjadi satu tarif (28%) adalah tepat.

Dari Tabel 2 panel B terlihat bahwa nilai *SIZE* menunjukkan ukuran perusahaan dalam sampel bersifat relatif homogen, yaitu perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Untuk nilai *LEV* terlihat bahwa komposisi modal perusahaan beragam, dari yang paling kecil 0,00 sampai yang terbesar 0,37, dengan nilai rata-rata 0,08. Sedangkan untuk komposisi keputusan investasi, terlihat bahwa keputusan investasi perusahaan beragam tergantung dari

jenis industrinya, karena dari nilai min. dan maks. atas *CINT* terlihat adanya variasi yang sangat lebar, yaitu nilai min. sebesar 0,01 dan nilai maks sebesar 0,73. Begitu juga dengan nilai *INVINT* dimana nilai min. menunjukkan nilai sebesar 0,01 dan nilai maks. sebesar 0,56. Dari Tabel 2 panel B juga terlihat bahwa sangat sedikit sekali perusahaan yang mengeluarkan biaya R&D (mean = 0,00). Sedangkan nilai mean (median) dari *ROA* menunjukkan nilai 0,07 (0,06), hal ini berarti tiap 1 rupiah aset yang digunakan perusahaan rata-rata akan menghasilkan laba sebelum pajak dan beban bunga sebesar 7 rupiah.

Variabel *POLCON* merupakan variabel *dummy*, dimana perusahaan yang dalam struktur modalnya terdapat kepemilikan pemerintah maka akan mendapat nilai 1 (0 jika sebaliknya). Dari hasil analisis data diketahui bahwa dari 234 perusahaan populasi, ada 12 perusahaan yang dalam struktur modalnya terdapat kepemilikan pemerintah, namun hanya 3 perusahaan yang masuk dalam kriteria sampel.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Multikolinieritas

Dengan menggunakan *pair-wise correlation*, hubungan antara variabel yang diuji tidak ada yang lebih dari 0,5. Nilai *VIF (TOL)* variabel bebas yang diuji juga kebanyakan nilainya di bawah nilai 2 (mendekati nilai 1). Sehingga disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinieritas (lihat Tabel 3).

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Dengan menggunakan uji *White*, hasil pengujian awal model empiris menunjukkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas (nilai *probability* lebih kecil dari $\alpha = 5\%$). Namun masalah ini telah dapat diatasi dengan metode *WLS (Weighted Least Square)* dengan menjadikan akar dari *ROA* sebagai pembagi persamaan regresi. Setelah melakukan tindakan ini maka nilai *probability* uji *White* berubah menjadi lebih besar dari $\alpha = 5\%$.

4.3.3. Uji Normalitas

Untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal, maka penelitian ini melakukan uji normalitas. Karena pengujian dalam penelitian ini menggunakan *software* EViews, maka uji normalitas dilakukan dengan melakukan uji Jarque-Bera.

Dari Winarno (2009) diketahui bahwa suatu data dinyatakan berdistribusi normal jika memiliki nilai koefisien Jarque Bera lebih kecil dari 2, dan nilai *probability* lebih besar dari 5%. Karena hasil uji Jarque Bera dalam penelitian ini menunjukkan koefisien Jarque Bera sebesar 0,749 (*prob.* 0,688), maka dapat disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.4. Uji Hipotesis

Hasil regresi model empiris dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut, model regresi yang digunakan dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} ETRs_i = & 0,331 - 0,011 SIZE_i - 0,199 LEV_i + 0,152 CINT_i + 0,134 INVINT_i \\ & + 1,749 RDINT_i + 0,020 POLCON_i + 0,149 ROA_i - 0,022 TREF_i + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Dalam Tabel 3 diketahui bahwa nilai *F-statistic* persamaan di atas memiliki *Prob(F-statistic)* sebesar 0,002, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang diuji secara bersama-sama signifikan ($\alpha = 1\%$) mempengaruhi variabel terikat (ETRs). Besaran *adjusted R-squared* menunjukkan nilai 0,874, artinya besaran ETRs dapat dijelaskan oleh *SIZE*, *LEV*, *CINT*, *INVINT*, *RDINT*, *POLCON*, *ROA*, dan *TREF* sebesar 87,4%. Sisanya sebanyak 12,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Untuk tiap variabel independen yang diuji, Tabel 3 menunjukkan bahwa hanya variabel *LEV*, *CINT*, dan *INVINT* yang memiliki koefisien estimasi regresi yang signifikan. Hasil koefisien estimasi regresi untuk variabel *SIZE* dengan nilai -0,011 (*prob.* 0,411), menunjukkan bahwa di Indonesia ukuran perusahaan tidak mempengaruhi bervariasinya ETRs perusahaan, dengan demikian dugaan hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETRs tidak terbukti (ditolak). Hal ini menunjukkan dukungan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto (2008).

Koefisien estimasi regresi untuk variabel *LEV* dengan nilai -0,199 (*prob.* 0,019) menunjukkan bahwa variabel *LEV* memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan ETRs. Dengan demikian dugaan hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan *leverage* perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETRs terbukti (diterima).

Sedangkan untuk variabel yang memproksikan keputusan investasi perusahaan (*CINT*, *INVINT* & *RDINT*), terlihat bahwa koefisien estimasi regresi untuk variabel *CINT* memiliki nilai 0,152 (*prob.* 0,006), variabel *INVINT* memiliki nilai 0,134 (*prob.* 0,049), dan variabel *RDINT* memiliki nilai 1,749 (*prob.* 0,745). Walau koefisien estimasi regresi variabel *CINT* menunjukkan hasil yang signifikan ($\alpha = 1\%$) namun arahnya bertolak belakang dengan dugaan awal yang dinyatakan dalam hipotesis 3 (H_3), dimana *capital-intensity* diduga berpengaruh negatif terhadap ETRs, dengan demikian maka dugaan H_3 tidak terbukti (ditolak). Nilai koefisien estimasi regresi variabel *INVINT* yang menunjukkan nilai positif dan signifikan menunjukkan dukungan terhadap dugaan hipotesis 4 (H_4) yang menyatakan bahwa *inventory-intensity* berpengaruh positif terhadap ETRs. Sedangkan untuk variabel *RDINT* terlihat bahwa koefisien estimasi regresi tidak menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga tidak mampu memberi dukungan kepada hipotesis 5 (H_5) yang diajukan, dimana *R&D intensity* diharapkan memiliki pengaruh negatif terhadap ETRs.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa variabel *POLCON* memiliki koefisien estimasi regresi sebesar 0,020 (*prob.* 0,503). Nilai koefisien estimasi regresi yang positif dan tidak signifikan ini menunjukkan bahwa ETRs perusahaan di Indonesia tidak dipengaruhi oleh *political connection*, sehingga dugaan hipotesis 6 (H_6) tidak terbukti (ditolak). Untuk variabel *TREF*, koefisien estimasi regresi menunjukkan nilai -0,022 (*prob.* 0,113). Hal ini menunjukkan bahwa adanya reformasi pajak tidak mempengaruhi bervariasinya ETRs, sehingga dugaan

hipotesis 7 (H_7) tidak terbukti (ditolak). Sedangkan untuk variabel *ROA*, nilai koefisien estimasi regresi yang menunjukkan nilai 0,149 (*prob.* 0,047) menunjukkan bahwa arah koefisien variabel sesuai dengan prediksi awal, dimana hubungan antara *ROA* dengan ETRs diharapkan positif.

4.4. Analisis hubungan antara ETRs dan Ukuran Perusahaan

Nilai koefisien estimasi regresi variabel *SIZE* yang menunjukkan nilai positif namun tidak signifikan, mengindikasikan bahwa penelitian ini tidak mampu memberikan bukti adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan ETRs. Alasan yang mungkin dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi adalah karena ukuran perusahaan di dalam sampel relatif homogen (mayoritas merupakan perusahaan besar), sehingga dengan tidak adanya variasi ukuran perusahaan dalam sampel maka akan sulit untuk mengukur pengaruh ukuran perusahaan terhadap ETRs.

4.5. Analisis hubungan antara ETRs dan Struktur Modal Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *LEV* memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan ETRs, sehingga memberikan dukungan terhadap H_2 yang diajukan dalam penelitian ini (*leverage* perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETRs). Hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di luar Indonesia (Richardson & Lanis, 2007; Adhikari et al., 2006; Derashid & Zhang, 2003; serta Gupta & Newberry, 1997), namun berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia (Soepriyanto, 2008).

Dalam penelitiannya, Soepriyanto (2008) menemukan bahwa *leverage* bukan merupakan faktor yang mempengaruhi variasi ETRs perusahaan di Indonesia. Alasan yang mungkin dapat menjelaskan perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian Soepriyanto (2008) adalah karena adanya perbedaan jumlah sampel dan masa observasi yang digunakan dalam masing-masing penelitian. Penelitian Soepriyanto (2008) dilakukan dengan

menggunakan 80 perusahaan, dengan masa observasi selama lima periode (total 400 perusahaan tahun), sehingga sangat besar kemungkinan hasil pengujian yang didapat berbeda dengan hasil pengujian penelitian ini. Alasan mengapa penelitian ini tidak bisa mendapatkan jumlah perusahaan sebanyak perusahaan yang ada dalam sampel penelitian Soepriyanto (2008), dikarenakan adanya perbedaan restriksi dalam pemilihan sampel. Dalam penelitian ini perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan asing, memiliki nilai ETRs lebih dari satu, memiliki restitusi pajak, serta memiliki kompensasi rugi fiskal akan dikeluarkan dari sampel. Seluruh pembatasan ini tidak terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto (2008).

4.6. Analisis hubungan antara ETRs dan Keputusan Investasi Perusahaan

Terkait dengan hubungan antara ETRs dan keputusan investasi perusahaan, penelitian ini menemukan bukti yang beragam. Dalam hipotesisnya, penelitian ini menduga hubungan antara *capital-intensity* dengan ETRs bersifat negatif, namun ternyata hasil pengujian menunjukkan hasil yang berlawanan (hubungan antara *capital-intensity* dengan ETRs terlihat bersifat positif dan signifikan). Hal ini bertolak belakang dengan seluruh hasil penelitian-penelitian sebelumnya (baik di Indonesia maupun di luar negeri). Alasan yang mungkin dapat menjelaskan hal ini adalah adanya aset sewa pembiayaan (*capital lease asset*) yang dimiliki perusahaan. Dalam peraturan pajak (UU. No. 36, Tahun 2008), beban penyusutan atas aset sewa guna usaha tidak bisa menjadi pengurang penghasilan kena laba (*non-deductable expense*), sehingga bagi perusahaan yang dalam aset tetapnya terdapat aset sewa pembiayaan maka besaran ETRs yang ditanggungnya akan lebih besar daripada perusahaan yang tidak memiliki aset sewa pembiayaan. Dari analisis data yang dilakukan diketahui bahwa 15 dari 33 perusahaan sampel (45,5%), memiliki aset sewa guna usaha. Namun besaran total aset sewa pembiayaan yang dimaksud hanya 5,98% dari total aset tetap perusahaan sampel. Oleh karenanya diduga masih ada penjelasan lain yang bisa menjelaskan mengapa hubungan

antara *capital-intensity* dengan ETRs bersifat positif, namun belum mampu diidentifikasi dalam penelitian ini.

Koefisien estimasi regresi variabel *INVINT* menunjukkan nilai yang positif dan signifikan, sehingga sesuai dengan dugaan hipotesis 4 (H_4) yang menyatakan bahwa *inventory-intensity* berpengaruh positif terhadap ETRs. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya (seperti Soepriyanto, 2008; Richardson dan Lanis, 2007; Adhikari et al., 2006; Derashid dan Zhang, 2003; serta Gupta dan Newberry, 1997).

Untuk variabel *RDINT*, hasil pengujian menunjukkan nilai t statistik yang tidak signifikan, sehingga sulit untuk diinterpretasikan. Hasil yang tidak signifikan ini mungkin disebabkan karena perusahaan yang mengeluarkan biaya riset dan pengembangan hanya ada sedikit (dari total 33 perusahaan sampel, hanya ada 4 perusahaan yang mengeluarkan biaya riset dan pengembangan).

4.7. Analisis hubungan antara ETRs dan Hubungan Politik (*Political Connection*).

Nilai *probability* dari t statistik variabel *POLCON* (*political connection*) menunjukkan hasil yang tidak signifikan ($\alpha > 5\%$) dengan arah yang positif. Sehingga bisa dikatakan adanya hubungan politik tidak mempengaruhi bervariasinya ETRs perusahaan di Indonesia. Alasan yang mungkin menjelaskan keadaan ini adalah karena perusahaan yang dalam struktur modalnya terdapat kepemilikan pemerintah hanya ada sedikit (dari 33 perusahaan sampel hanya ada 3 perusahaan).

Sedangkan untuk arah koefisien yang tidak sesuai dengan prediksi (diprediksikan variabel *POLCON* memiliki arah yang negatif, namun ternyata hasil regresi menunjukkan nilai yang positif), mungkin dikarenakan perusahaan yang memiliki hubungan politik merupakan perusahaan yang jenis usahanya menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk melakukan manajemen dalam perpajakan.

4.8. Analisis hubungan antara ETRs dan Reformasi Pajak.

Koefisien estimasi regresi variabel *TREF* yang menunjukkan nilai yang negatif namun tidak signifikan, mengindikasikan bahwa adanya reformasi pajak tidak mempengaruhi bervariasinya ETRs perusahaan di Indonesia. Karena perubahan yang ada dalam reformasi pajak ini sifatnya *mandatory*, maka tidak cukup bukti yang memberikan perbedaan ETRs antar perusahaan.

Terkait dengan arah koefisien yang negatif, hasil regresi variabel *TREF* memberikan dukungan terhadap hasil analisis deskriptif. Dimana hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata ETRs setelah adanya reformasi pajak (tahun 2009) lebih kecil daripada ETRs sebelum adanya reformasi pajak (tahun 2008).

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

5.1. Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja determinan penyebab bervariasinya ETRs perusahaan di Indonesia, serta melihat bagaimana pengaruh reformasi pajak terhadap ETRs. Pengujian dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang ada dalam delapan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2008 – 2009, yang memenuhi kriteria sampel. Sektor industri yang dimaksud adalah sektor industri manufaktur, ritel, pertanian, kehutanan dan perikanan, pakan ternak, pertambangan dan jasa pertambangan, konstruksi, telekomunikasi, dan jasa transportasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terkait dengan determinan ETRs yang telah dilakukan di Indonesia (Soepriyanto, 2008), dalam penelitian ini ditambahkan variabel *political connection (POLCON)* yang merupakan proksi dari adanya hubungan politik antara perusahaan dengan pemerintah. Serta ditambahkan variabel *RDINT* dan *TREF* yang merupakan proksi dari *R&D intensity* dan reformasi pajak. Model

yang diajukan dalam penelitian ini terbukti memiliki kemampuan menjelaskan determinan dari ETRs lebih baik dari penelitian sebelumnya (*adjusted R-squared* = 87,4%, penelitian sebelumnya (Sopriyanto, 2008) hanya memiliki *adjusted R-squared* sebesar 7,1%).

Setelah melakukan kontrol terhadap *ROA*, hasil uji regresi menunjukkan bahwa penelitian ini dapat memberikan bukti atas H_2 dan H_4 , yaitu *leverage* berhubungan negatif dengan ETRs dan *inventory-intensity* memiliki hubungan yang positif dengan ETRs. Sedangkan untuk hipotesa lainnya (H_1 , H_3 , H_5 , H_6 dan H_7), yang masing-masing menyatakan bahwa ukuran perusahaan, *capital-intensity*, *R&D intensity*, hubungan politik, serta reformasi pajak berpengaruh negatif terhadap ETRs, penelitian ini belum memiliki cukup bukti untuk mendukung dugaan awal.

Untuk variabel *CAPINT* dimana di awal diduga memiliki pengaruh negatif, ternyata justru memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ETRs. Dugaan awal hal ini dikarenakan adanya aset sewa pembiayaan yang dimiliki perusahaan sampel. Karena dalam peraturan pajak pengakuan beban penyusutan atas aktiva sewa guna usaha dilarang sebagai pengurang penghasilan pajak, maka adanya aktiva sewa guna usaha (aset sewa pembiayaan) dalam komponen aset tetap perusahaan akan menyebabkan semakin besarnya ETRs perusahaan.

5.2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa *leverage*, *capital-intensity* dan *inventory-intensity* secara signifikan memiliki pengaruh terhadap bervariasinya ETRs perusahaan di Indonesia. Adanya hubungan positif antara *capital-intensity* dengan ETRs, sebaiknya disikapi perusahaan dengan berhati-hati dalam memutuskan cara perolehan aset tetap. Karena jika aset tetap yang dimiliki banyak berasal dari aktivitas sewa, maka ETRs yang ditanggung perusahaan akan semakin besar.

Sedangkan implikasi bagi aparaturnya pajak, dengan hasil yang ditemukan penelitian ini maka sebaiknya aparaturnya pajak semakin memperhatikan komponen yang ada dalam laporan keuangan Wajib Pajak. Hal ini guna memastikan bahwa aktivitas sewa yang dilakukan perusahaan diklasifikasikan secara benar (apakah masuk dalam kategori sewa operasi, atau sewa pembiayaan). Kesalahan klasifikasi yang tidak teridentifikasi akan menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini. Pertama, reformasi pajak yang diuji dalam penelitian ini bersifat *mandatory*, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antar perusahaan yang diuji. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan ada atau tidak adanya kepemilikan pemerintah dalam struktur kepemilikan perusahaan sebagai indikator ada atau tidak adanya hubungan politik, sehingga diduga tidak dapat mencerminkan kebijakan perusahaan dalam mengatur ETRs yang dimilikinya. Ketiga, pengukuran variabel ETRs hanya dilakukan dengan satu cara, tidak dilakukan pengujian jika denominator komponen ETRs diubah menjadi *cash flow from operation*. Tidak digunakannya alternatif pengukuran ini dikarenakan banyak perusahaan sampel yang memiliki *cash flow from operation* yang negatif, dikhawatirkan jika alternatif pengukuran ini digunakan maka tujuan penelitian tidak akan terpenuhi. Keempat, sedikitnya perusahaan yang memenuhi kriteria sampel, serta kurang panjangnya waktu observasi. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan determinan ETRs rata-rata menggunakan banyak perusahaan sampel dengan masa observasi lebih dari dua tahun. Dan yang terakhir, penelitian ini belum mampu memberikan alasan yang menjelaskan secara detail mengapa *capital-intensity* berhubungan positif dengan ETRs.

5.4. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Dengan berbagai keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat direkomendasikan beberapa hal berikut. Pertama, untuk melihat efek dari adanya reformasi pajak, maka sebaiknya gunakan momentum reformasi pajak yang isinya lebih substansial memberikan pengaruh kepada akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Kedua, menggunakan data perusahaan yang memberikan donasi kepada partai politik untuk mengukur hubungan politik yang dimiliki perusahaan. Ketiga, untuk memastikan keamatan hubungan antara ETRs dengan variabel independen yang diuji, maka sebaiknya dilakukan *robustness check* dengan menggunakan alternatif pengukuran ETRs. Keempat, menggunakan jumlah perusahaan yang lebih banyak dan masa observasi yang lebih panjang. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan keterangan yang lebih akurat mengenai faktor-faktor penentu dari bervariasinya ETRs perusahaan di Indonesia, sebaiknya dalam proses penelitian dilakukan juga suatu proses *interview* yang mendalam kepada narasumber yang berkompeten.

Daftar Referensi

- Adhikari, A., Derashid, C., dan Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25, 574-595.
- Agung, I Gusti Ngurah (2001). *Statistika, Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Apa sih sasaran reformasi perpajakan?
<http://kppbalikpapan.tripod.com/kantorpelayananpajakbalikpapan/reformasipajak.htm>
- Bawazier, F. dan Kadir, M. Ali. (2009). Kebijakan dalam “Tax Reform 1994” dan “Tax Reform 1997”. Dalam Abimanyu, A. & Megantara, A. (Ed.). *Era baru kebijakan fiskal. Pemikiran, konsep dan implementasi* (pp. 151-180). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Callihan, D. (1994). Corporate effective tax rates: a synthesis of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 13, 1-43.
- Derashid, C., dan Zhang, H., (2003). Effective tax rates and the industry policy hypothesis: evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 12, 45-62.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak – DJP (22 Juli 2008). *Siaran Pers RUU PPh*. 21 Juli 2008.
http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=7026:Siaran%20Pers%20RUU%20PPh&catid=89:pressrelease&Itemid=174
- Gupta, S., dan Newberry, K. (1997). Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16 (1), 1-34.
- Janssen, B., dan Buijink, W. (2000). Determinants of the Variability of Corporate Effective Tax Rates (ETRs): Evidence for the Netherlands. *MARC Working Paper MARC-WP/3/2000-08*.
- Jayasankaran, S. (1999). Merger by decree. *Far Eastern Economic Review* (September).

- Kim, A., Limpaphayom, P. (1998). Taxes and firm size in Pacific-Basin emerging economies. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 7 (1), 47-68.
- Nasution, D. (2009). Substansi Perubahan UU Perpajakan 2008. Dalam Abimanyu, A. & Megantara, A. (Ed.). *Era baru kebijakan fiskal. Pemikiran, konsep dan implementasi* (pp. 197-238). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Omer, T., Molloy, K., dan Ziebart, D., (1993). An investigation of the firm size-effective tax rate relation in the 1980s. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 8 (2), 167-182.
- Pemerintah Ajukan 28 Rumusan Baru RUU PPh. (avr). 20 September 2007.
<http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=738>
- Porcano, T. (1986). Corporate tax rates: progressive, proportional, or regressive, *The Journal of the American Tax Association*, 7 (2), 17-31.
- Purnomo, H. (2009). Reformasi Administrasi Perpajakan Tahun 2003. Dalam Abimanyu, A. & Megantara, A. (Ed.). *Era baru kebijakan fiskal. Pemikiran, konsep dan implementasi* (pp. 181-196). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Rajan, R., dan Zingales, L. (1998). Which capitalism? Lesson from the East Asian crisis. *Journal of Applied Corporate finance*, 11, 40-48.
- Rajan, R., dan Zingales, L. (2003). Saving Capitalism from the Capitalists. *Crown Business*. New York.
- Richardson, G., dan Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26 (2007), 689-704.
- Ross, A. Stephen, (2002). *Corporate Finance*. New York: McGraw Hill.
- Siegfried, J. (1972). The relationships between economic structure and the effect of political influence: empirical evidence from the federal corporation income tax program. *Ph.D. dissertation*. University of Wisconsin.
- Shevlin, T., dan Porter, S. (1992). The corporate tax comeback in 1987: some further evidence. *The Journal of the American Tax Association*, 14 (1), 58-79.
- Soepriyanto, G. (2008, Nopember). Faktor-faktor yang mempengaruhi variasi tarif pajak efektif perusahaan: Studi terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2002-2006. Artikel dipresentasikan di The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop, Depok, Indonesia.
- Standar Akuntansi Keuangan. (2009). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Stickney, C., dan McGee, V. (1982). Effective corporate tax rates: the effect of size, capital intensity, leverage, and other factors. *Journal of Accounting and Public Policy*, 1 (2), 125-152.
- Watts, R., dan Zimmerman, J. (1986). *Towards a Positive Theory of Accounting*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Wilkie (1988). Corporate average effective tax rates and inferences about relative taxes. *Journal of the American Taxation Association*, 10, 1, 75-88.
- Winarno, Wing Wahyu. (2009). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Zimmerman, J. (1983). Taxes and firm size. *Journal of Accounting and Economics*, 5 (2), 119-149.

Lampiran

Tabel 1 Tabel Pemilihan Sampel Penelitian

Sampel awal		
<u>Sektor Industri</u>		<u>Jumlah perusahaan</u>
1. Manufaktur		151
2. Ritel		23
3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		10
4. Pakan Ternak		6
5. Pertambangan dan Jasa Pertambangan		16
6. Konstruksi		9
7. Telekomunikasi		6
8. Jasa Transportasi		<u>13</u>
	Total	234
Dikurangi kriteria sampel		
a. Dimiliki perusahaan asing		38
b. Data tidak lengkap		75
c. Memiliki nilai laba negatif atau ada restitusi pajak		53
d. Ada kompensasi rugi fiskal		26
e. Nilai ETRs > 1		<u>9</u>
	Sampel final	<u>33</u>

Sumber: Data diolah

Tabel 2 Statistik Deskriptif untuk ETRs dan Variabel Independen

<u>Panel A: Effective Tax Rates (ETRs)</u>	Reformasi Pajak				
	Sesudah	Sebelum			
Distribusi (dalam %)					
Mean	0,22	0,24			
Standar Deviasi (<i>standard deviation</i>)	0,10	0,11			
Nilai tengah (<i>median</i>)	0,25	0,29			
Frekuensi (% dalam n)					
ETRs kurang dari 10%		18%			
ETRs antara 10% dan 15%		0%			
ETRs antara 16% dan 30%		61%			
ETRs di bawah atau sama dengan 28%	73%				
ETRs di atas tarif pajak statutory	27%	21%			
Panel B: Variabel Independen					
	Mean	Median	Min	Maks.	Std. Dev.
N = 33 perusahaan, 66 observasi					
Variabel					
SIZE	12,08	11,95	10,80	13,40	0,70
LEV	0,08	0,01	0,00	0,37	0,11
CINT	0,28	0,26	0,01	0,73	0,19
INVINT	0,20	0,17	0,00	0,56	0,13
RDINT	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
POLCON	0,09	0,00	0,00	1,00	0,29
ROA	0,07	0,06	0,00	0,37	0,07
TREF	0,50	0,50	0,00	1,00	0,50

Sumber: Data diolah

Tabel 3 Hasil Regresi Model Empiris

$$ETR_i = \alpha_0 + \alpha_1 SIZE_i + \alpha_2 LEV_i + \alpha_3 CINT_i + \alpha_4 INVINT_i + \alpha_5 RDINT_i + \alpha_6 POLCON_i + \alpha_7 ROA_i + \alpha_8 TREF_i + \varepsilon_i$$

Variabel	Prediksi Arah	Koefisien	t-statistic	Prob.	TOL	VIF
C		0,331	2.247170	0.0285		
SIZE _i	(-)	-0,011	-0.828521	0.4108	,578	1,729
LEV _i	(-)	-0,199	-2.394719	0.0199	,469	2,130
CINT _{it}	(-)	0,152	2.864354	0.0058	,674	1,483
INVINT _i	(+)	0,134	2.010032	0.0492	,533	1,875
RDINT _i	(-)	1,749	0.326613	0.7452	,846	1,182
POLCON _i	(-)	0,020	0.673880	0.5031	,672	1,489
ROA _t	(+)	0,149	2.025964	0.0475	,916	1,092
TREF _i	(-)	-0,022	-1.608256	0.1133	,967	1,034
Adjusted R-squared : 0,874						
F-statistic : 3,687						
Prob(F-statistic) : 0,002						
ETR _i = Effective Tax Rates; SIZE _i = ukuran perusahaan; LEV _i = Leverage; CINT _i = Capital Intensity; INVINT _i = Inventory Intensity; RDINT _i = R&D Intensity; POLCON _i = Political Connection; ROA _i = Return on Asset; TREF _i = Tax Reform.						

Sumber: Hasil olah Eviews 4 dan SPSS 11,5 (VIF dan TOL).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) : Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY

ANIK FATUN NAJAHNINGRUM*

SUKARDI IKHSAN

MAYLIA PRAMONO SARI

Universitas Negeri Semarang

Abstract: *Fraud is a intentionally fault which could harming many people. In government sector, fraud is harming for public. This research is aimed to explore the perceptions of employees in government agencies about factors that impact fraud such as rule enforcement, the effectiveness of internal control, information asymmetry, distributive justice, procedural justice, organizational commitment and organizational ethical culture. The research samples were 111 employess who working in finance department of DIY government service. The sampling technique using purposive sampling. This research uses the questionnaires to collect the data. Data analysis in this research using a model full analysis structural equation modelling (SEM) with a smart PLS2.0. The findings of the research showed that there is a negative effect beetwen rule enforcement with fraud, there is a negative effect between the effectiveness of internal control with fraud, there is a positive effect between information asymmetry with fraud, there is a negative effect between distributive justice with fraud, there is negative effect between procedural justice with fraud, there is negative effect between organizational commitment with fraud and there is no effect between organizational ethical culture with fraud. The advice given in this research to government service in DIY that is expected to be more transparent to the public and provide rewards who working well. Head of DIY government service expected to provide tough sanctions againts any violation of rules and conduct employee rotation once every 5 times. All employees on the DIY government services expected to increase commitment to organization and also runs the prevailing ethical norms.*

Keywords : *Fraud, Perception, Employee, Government Sector, Structural Equation Modelling.*

* Corresponding author: anikfatunnajahningrum@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan (*fraud*) merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. *Statement of Auditing Standart* dalam Norbarani (2012) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit.

Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dan juga bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam entitas pemerintah sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik sehingga angka yang tercantum di laporan keuangan harus menunjukkan angka yang sebenarnya.

Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi paling bersih dari korupsi nomor 2 setelah Bangka Belitung dengan nilai korupsi sebesar Rp 4 miliar. Berdasarkan data dari *infokorupsi.com* terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di Yogyakarta yang menunjukkan nilai yang sangat berlawanan dengan data yang diungkap Fitra. Kasus tersebut antara lain kasus yang terjadi di Provinsi DIY sendiri, Bantul, Sleman, Gunungkidul, dan Kulonprogo. Kasus yang terjadi di Provinsi DIY antara lain kasus korupsi dana rekonstruksi pasca gempa senilai Rp 6,4 miliar dan yang terbaru kasus bus trans jogja yang ditaksir merugikan negara senilai Rp 12,5 miliar. Kasus yang terjadi di Bantul antara lain kasus pengadaan buku ajar senilai Rp 250 juta, kasus pembelian Bantul radio senilai 1,7 miliar dan kasus penjualan tanah kas Desa Bangunharjo senilai Rp 8 miliar. Kasus korupsi yang terjadi di Sleman adalah kasus korupsi hibah KONI Sleman senilai Rp 1 miliar dan korupsi buku ajar senilai Rp 12,1 miliar. Kasus korupsi yang terjadi di Kulonprogo adalah kasus korupsi APBD senilai Rp 12,1 miliar. Sementara kasus korupsi yang terjadi di Gunungkidul adalah

kasus korupsi dana tunjangan anggota DPR dan kasus duplikasi anggaran asuransi PNS masing-masing sebesar Rp 2,8 miliar dan Rp 1,7 miliar.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, total semua kasus korupsi yang terjadi di Yogyakarta adalah senilai Rp 58,55 miliar. Belum lagi, menurut *infokorupsi.com* ada beberapa kasus dugaan korupsi yang belum dilimpahkan ke PN. Contoh kasus dugaan korupsi adalah kasus *markup* dana perjalanan dinas dan kasus halte bus transjogja.

Motivasi seseorang melakukan kecurangan atau *fraud* relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan *fraud* adalah *Fraud Triangle Theory*. *Fraud triangle* terdiri atas tiga komponen yaitu *opportunity* (kesempatan), *pressure* (tekanan), dan *rationalization* (rasionalisasi).

Kesempatan atau *opportunity* merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkup entitas pemerintahan antara lain penegakan peraturan, keefektifan sistem pengendalian internal, dan asimetri informasi.

Dalam rangka mengendalikan perilaku anggota organisasi agar proses operasional organisasi berjalan secara efektif dan efisien, dibuatlah peraturan organisasi. Peraturan tersebut harus dipatuhi oleh semua pegawai. Biasanya, pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenai sanksi, tujuannya agar di masa mendatang pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi, baik oleh pegawai yang melakukan pelanggaran sebelumnya maupun pegawai yang belum pernah melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah kecurangan. Jika dalam organisasi penegakan peraturan atas pelanggaran dinilai baik, hal tersebut dapat memperkecil kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan.

Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan (Suprajadi, 2009). Untuk meminimalisir peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan maka diperlukan pengendalian internal yang baik.

Asimetri informasi merupakan keadaan dimana pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak luar perusahaan (*stakeholder*). Jika keadaan tersebut terjadi, maka akan membuka peluang bagi pihak dalam perusahaan untuk melakukan kecurangan.

Menurut Salam (2005) dalam Kurniawati (2012), tekanan (*pressure*) yaitu insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku *gambling*, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Tekanan merupakan faktor yang berasal dari kondisi individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan dari dalam diri seseorang tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat bekerja. Salah satu, faktor lingkungan yang dapat menyebabkan tekanan pada seorang pegawai adalah mengenai keadilan organisasional dalam perusahaan. Keadilan tersebut berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapatkan *reward* berupa gaji atau kompensasi lain atas pekerjaannya (keadilan distributif) dan bagaimana prosedur berkaitan dengan *reward* yang tersebut (keadilan prosedural).

Menurut Skousen (2009) dalam Norbarani (2012) rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak kecurangan, rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Budaya organisasi dan komitmen organisasi merupakan faktor yang diduga dijadikan alasan pembenaran mengapa pegawai melakukan kecurangan.

Robbins dan Judge (2007) dalam Kurniawan (2011) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, pegawai tersebut cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang bisa saja menghambat tercapainya tujuan organisasi.

Menurut Robbins (2006) budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang lain. Untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan diperlukan budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat akan memicu karyawan untuk berfikir, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Sehingga, semakin kuat budaya etis organisasi, semakin sedikit kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh karyawan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas mengenai pengaruh penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Persepsi

Menurut Ikhsan dan Ishak (2005:57) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, obyek serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar

persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Pada kenyataannya, masing-masing orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain. Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti.

Menurut Robbins (2005) dalam Sukanto (2007), apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif. Persepsi berhubungan dengan sikap. Sikap adalah sebuah pernyataan evaluasi baik positif maupun negatif mengenai obyek, orang atau peristiwa.

Kecenderungan kecurangan (*fraud*)

Menurut Boynton (1996) kecurangan atau *fraud* adalah penipuan yang direncanakan misalnya salah saji, menyembunyikan, atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga merugikan pihak lain. *Statement on Auditing Standards No. 99* mendefinisikan *fraud* sebagai “*an intentional act that result in a material misstatement in financial statements tahtare the subject o an audit*. Sedangkan menurut *Black’s Law Dictionary* dalam Kurniawati (2012), *fraud* didefinisikan sebagai ”Mencakup semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang dapat diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu”.

Penegakan Peraturan

Menurut Huda (2012) peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk mengatur pola tingkah laku. Jadi, dapat peraturan merupakan ikatan, aturan yang harus dipatuhi seluruh

anggota organisasi selama proses operasional sehingga proses tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Jenis-jenis peraturan menurut Huda (2012) antara lain :

1. Peraturan *otoritarian*

Dalam peraturan *otoritarian*, peraturan dibuat sangat ketat dan rinci. Orang yang berada dalam lingkungan peraturan ini diminta mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku di tempat itu. Apabila gagal menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, akan menerima sanksi atau hukuman berat. Sebaliknya bila berhasil memenuhi peraturan, kurang mendapat penghargaan atau hal itu sudah dianggap menjadi kewajiban.

2. Peraturan *permisif*

Dalam peraturan ini seseorang dibiarkan bertindak menurut keinginannya. Kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai keinginan yang diambilnya itu. Seseorang yang berbuat sesuatu, dan ternyata membawa akibat melanggar norma atau aturan yang berlaku, tidak diberi sanksi atau hukuman.

3. Peraturan Demokrasi

Pendekatan peraturan demokratis dilakukan dengan memberi penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu memahami mengapa diharapkan mematuhi dan menaati peraturan yang ada. Peraturan jenis ini menekankan aspek edukatif bukan aspek hukuman.

Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut COSO dalam Rahayu dan Suhayati (2009) pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen

dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dan efektivitas dan efisiensi operasi.

Keadilan Distributif

Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Tujuan distribusi ini adalah kesejahteraan sehingga yang didistribusikan biasanya berhubungan dengan sumber daya, ganjaran atau keuntungan (Deutsch, 1998 dalam Supardi, 2008). Selanjutnya menurut Supardi (2008) keadilan distributif merupakan sebuah persepsi tentang nilai-nilai yang diterima oleh pegawai berdasarkan penerimaan suatu keadaan atau barang yang mampu mempengaruhi individu. Keadilan distributif pada dasarnya dapat tercapai bila penerimaan dan masukan antara dua orang sebanding. Jikalau dari perbandingan proporsi yang diterima dirinya lebih besar, maka ada kemungkinan bahwa hal itu lebih ditoleransi atau tidak dikatakan tidak adil, dibanding bila proporsi yang diterimanya lebih rendah dari yang semestinya.

Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural merupakan pertimbangan yang dibuat oleh karyawan mengenai keadilan yang dipersepsikan mengenai proses yang dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya (Ivancevich, 2006), Menurut Faturachman (2002) bentuk prosedur dan proses akan spesifik sesuai dengan substansinya. Di dalam suatu kelompok, organisasi ataupun lembaga kemasyarakatan bisa ditemukan berbagai

prosedur. Meskipun demikian, ada komponen dalam aturan yang universal pada prosedur, demikian juga halnya keadilan prosedural.

Komitmen Organisasi

Menurut Oktaviani (2012) komitmen organisasi adalah individu yang memiliki keinginan untuk berbuat etis terhadap organisasinya dengan tujuan agar terciptanya tujuan yang diinginkan tidak lain semata-mata untuk kepentingan organisasi tersebut. Menurut Mathis (2001) komitmen organisasi adalah tingkat kepercayaan dan penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap mental individu berkaitan dengan tingkat kelojalannya terhadap organisasi tempat individu tersebut berkerja.

Budaya Etis Organisasi

Menurut Ivancevich *et al.*, (2006) Budaya organisasi merupakan sebuah konsep yang penting, sebagai perspektif untuk memahami perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Menurut Schein dalam Menurut Ivancevich *et al.*, (2006), definisi budaya organisasi adalah suatu pola dari asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu saat belajar menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integritas internal yang telah berjalan cukup baik untuk dianggap valid dan oleh karena itu, untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk berpersepsi, berpikir, dan berperasaan sehubungan dengan masalah yang dihadapinya.

Menurut Robbin (1996) dalam Ikhsan dan Ishak (2005), budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu, sehingga persepsi

tersebut menjadi suatu sistem dan makna bersama di antara para anggotanya. Perilaku etis harus menjadi budaya dalam organisasi yang berarti harus merupakan perilaku sehari-hari semua anggota organisasi baik dalam sikap, tingkah laku anggota maupun dalam keputusan manajemen/organisasi. Menurut Schein (1992) dalam Zulkarnain (2013) budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan mempersatukan anggota-anggota organisasi.

Berdasarkan definisi mengenai budaya organisasi, dapat diambil kesimpulan bahwa budaya organisasi adalah suatu pola yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang tidak tertulis agar dapat dipatuhi oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Menurut Nordiawan (2006) sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, seharusnya organisasi sektor publik mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Proses pertanggungjawaban tersebut haruslah dilakukan secara transparan, karena hal tersebut berkaitan dengan kepentingan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu saja kegiatan operasional harus bebas dari tindakan kecurangan dalam bentuk apapun. Maka, semua kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk meminimalisir pelanggaran atas peraturan yang berlaku, maka harus ada penegakan peraturan yang tegas dalam lingkungan organisasi tersebut.

Dalam suatu instansi, apabila penegakan peraturan kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran peraturan yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang, salah satunya dengan melakukan kecurangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tegas, penegakan peraturan dalam suatu instansi, maka

kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi juga akan semakin rendah. Artinya, penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

H1 : Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Tujuan dari pengendalian internal adalah agar kegiatan operasional perusahaan berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut Kusumastuti (2012) sistem pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen cenderung melakukan tindakan menyimpang untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Salah satu contoh tindakan menyimpang yaitu kecenderungan melakukan kecurangan.

Penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi, dengan sistem pengendalian internal yang baik, akan meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pegawai.

H2 : Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) .

Pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Asimetri informasi merupakan kondisi dimana pihak dalam atau pengelola perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar atau pihak pemakai informasi selain pengelola. Dalam lingkup entitas perusahaan, yang menjadi pihak pengguna informasi merupakan masyarakat. Karena pihak Dinas Pemerintah merupakan pihak

pengelola dana APBN yang sebagian besar berasal dari masyarakat. Jika kondisi tersebut terjadi, maka akan membuka peluang bagi pihak yang mengelola keuangan untuk melakukan kecurangan. Pertanggungjawaban SKPD kepada masyarakat disajikan dalam bentuk laporan realisasi APBD. Jika masyarakat tidak mengetahui transaksi ekonomi apa saja yang mempengaruhi laporan tersebut secara detail, kemungkinan penyaji laporan akan memanipulasi laporan tersebut dengan tujuan kepentingan pribadi, misalnya agar kinerjanya terlihat baik.

Penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan demikian, semakin tinggi asimetri yang terjadi antara pihak pengelola dan pihak pengguna laporan keuangan, kecenderungan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) akan semakin tinggi.

H3 : Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).

Pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Persepsi mengenai keadilan distributif merupakan persepsi mengenai kesesuaian gaji atau kompensasi lain yang diterima oleh pegawai dibandingkan dengan apa yang telah diberikan kepada organisasi. Persepsi mengenai keadilan ini dibandingkan dengan orang lain yang setara. Jika seseorang mempersepsikan bahwa terdapat ketidakadilan mengenai gaji atau kompensasi yang seharusnya didapatkan maka akan mendorong orang tersebut melakukan kecurangan. Akan terjadi tekanan dalam dirinya berkaitan dengan ketidakadilan yang dipersepsikan sehingga mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan.

H4 : Keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).

Pengaruh keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Keadilan Prosedural berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai prosedur dalam pemberian gaji atau kompensasi lainnya kepada pegawai. Menurut Thibaut & Walker (1975) dalam Kadaruddin dkk (2012) keadilan prosedural mengacu pada kesetaraan prosedur. Teori dan penelitian telah menetapkan bahwa prosedur dinilai sebagai adil jika mereka diimplementasikan konsisten, tanpa kepentingan pribadi, berdasarkan informasi yang akurat, dengan kesempatan untuk memperbaiki keputusan itu, dengan kepentingan semua pihak diwakili, dan mengikuti moral dan etika standar. Ketika seseorang mempersepsikan bahwa prosedur pemberian gaji atau kompensasi lainnya dilakukan secara tidak adil, akan timbul tekanan dalam dirinya. Secara perasaan, akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pegawai tersebut sehingga akan menyebabkan pegawai tersebut melakukan apa saja karena dirinya merasa tertekan termasuk dengan melakukan kecurangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi keadilan prosedural pada suatu instansi dapat meminimalisir terjadinya tindak kecurangan (*fraud*).

H5 : Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)

Pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Menurut Kurniawan (2011) komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi.

Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi berarti telah memahami bahwa ketika bekerja, tujuannya adalah kepentingan organisasi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kecurangan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan

pegawai untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian, komitmen organisasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan yang dilakukan pegawai. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, maka akan menekan terjadinya tindakan kecurangan pada organisasi tersebut.

H6 : Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).

Pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Budaya merupakan nilai-nilai yang dianut dalam suatu kelompok atau organisasi. Iklim budaya yang baik akan menciptakan perilaku yang baik pula kepada setiap orang yang berada dalam lingkungan organisasi tersebut. Jika dalam suatu perusahaan kecurangan merupakan hal yang wajar atau biasa terjadi. Setiap orang dalam perusahaan tersebut akan cenderung melakukan kecurangan karena pegawai tersebut merasionalisasi tindakan tersebut sebagai tindakan yang biasa atau wajar terjadi. Dalam kondisi organisasi pemerintahan yang kebanyakan pegawainya melakukan kecurangan dan hal tersebut dianggap wajar. Pegawai yang lain juga akan melakukan kecurangan dikarenakan pembenaran akan hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam organisasi tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika dalam suatu instansi telah ditanamkan nilai-nilai bahwa suatu kecurangan merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan banyak pihak, maka pegawai cenderung tidak akan melakukan kecurangan.

Penelitian Pristiyanti (2012) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecurangan di sektor pemerintahan. Dengan demikian, semakin baik iklim budaya etis yang dapat diciptakan dalam lingkungan perusahaan akan meminimalisir kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan pegawai.

H7 : Budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).

Kerangka Pemikiran Teoritis

Insert Gambar 1 here

METODE RISET

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner berisi tentang persepsi pegawai mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan alat analisis *Smart PLS 2.0*.

Populasi & Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai negeri sipil yang bekerja pada Dinas Pemda se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* karena proses pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan ciri-ciri tertentu yaitu pegawai dinas provinsi DIY yang bekerja di bagian keuangan saja.

Insert Gambar 2&3 here

Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode angket. Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya

mengenai suatu pernyataan, dengan skala penilaian dari 1 sampai dengan 5. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan kuesioner adaptasi dan kuesioner yang dibangun sendiri. Kuesioner yang dibangun sendiri perlu diuji kevalidan dan reliabilitasnya terlebih dahulu melalui uji *pilot (pilot study)*. Uji *pilot* dilakukan untuk menguji kelayakan kuesioner yang telah dirancang dalam kondisi sebenarnya, yaitu sesuai dengan kondisi di lapangan.

Insert Table 4 s/d 10 here

Pengukuran Variabel

Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Pengukuran variabel ini memiliki 9 item pertanyaan yang dikembangkan dari jenis-jenis kecurangan menurut *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)* dalam Rudianto (2012). Skala likert 1-5 digunakan untuk mengukur respon dari responden.

Penegakan Peraturan

Instrumen yang digunakan untuk mengukur penegakan terdiri dari empat item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Zulkarnain (2013). Respons dari responden diukur dengan skala Likert 1 – 5

Keefektifan Pengendalian Internal

Instrumen yang digunakan untuk mengukur keefektifan pengendalian internal terdiri dari lima item pertanyaan yang dikembangkan dari PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Respons dari responden diukur dengan skala Likert 1 – 5

Asimetri Informasi

Instrumen yang digunakan untuk mengukur asimetri informasi terdiri dari enam item pertanyaan yang dikembangkan oleh Dunk (1993) dalam Wilopo (2006). Respons dari responden diukur dengan skala Likert 1 – 5

Keadilan Distributif

Pengukuran variabel ini menggunakan 4 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Colquitt (2001) dalam Pristiyanti (2012) .Skala Likert 1 – 5 digunakan untuk mengukur respons dari responden.

Keadilan Prosedural

Pengukuran menggunakan 7 item-item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Colquitt (2001) dalam Pristiyanti (2012). Skala Likert 1–5 digunakan untuk mengukur respons dari responden

Komitmen Organisasi

Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Luthans (2006) dalam Pristiyanti (2012) berupa 8 item pertanyaan. Skala Likert 1–5

Budaya Etis Organisasi

Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Robins (2008) berupa 5 item pertanyaan. Skala Likert 1 – 5 digunakan untuk mengukur respons dari responden.

Insert Table 11 here

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Data demografi responde terdiri dari data mengenai umur, masa kerja, jabatan,dan pendidikan terakhir yang diperoleh dari kuesioner penelitian

Insert Table 12 & 13 here

Deskripsi Variabel

Insert Table 14 & 21 here

Analisis dan Hasil Penelitian

Uji *Outer Model* atau *Measurement Model*

Berdasarkan hasil pengujian *outer loading* dapat diketahui bahwa nilai *loading factor* untuk indikator variabel reflektif memiliki nilai di atas 0,50 sehingga tidak ada indikator variabel reflektif dalam penelitian ini yang perlu di drop atau dihapus.

Insert Table 22 here

Konstruk dalam penelitian ini memiliki nilai *composite reliability* dan *cornbarch alpha* di atas 0,70 sehingga semua konstruk dalam penelitian ini *reliable*.

Insert Table 23 & 24 here

Berdasarkan output PLS, dapat diketahui bahwa semua nilai *average variance extracted* (AVE) untuk masing-masing konstruk adalah lebih dari 0,50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian memiliki *discriminant validity* yang baik.

Insert Table 25 here

Uji *inner model*

Berdasarkan tabel *R-square* dapat diketahui bahwa nilai *R-square* kecenderungan kecurangan (*fraud*) (KK) sebesar 0,94. Nilai *R-square* sebesar 0,949 memiliki arti bahwa variabilitas konstruk kecenderungan kecurangan (*fraud*) dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk penegakan peraturan (PP), keefektifan pengendalian internal (KPI), asimetri informasi (AI), keadilan distributif (KD), keadilan prosedural (KP), komitmen organisasi (KO) dan budaya etis organisasi (BEO) sebesar 94,9% sementara 5,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Insert Table 26 here

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *path coefficient* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai *t-statistic*. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian kemudian membandingkan nilai *t-statistic* dengan nilai t-tabel. Jika nilai t-statistic lebih besar dari nilai t-tabel, maka hipotesis diterima, begitu juga sebaliknya. Nilai t-tabel untuk df (*degree of freedom*) sebesar 103 pada α 0,05 adalah 1,983. Berikut ini merupakan output estimasi untuk pengujian model struktural.

Insert Table 27 & Gambar 2 here

Penegakan peraturan (PP) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nilai koefisien parameter untuk variabel penegakan peraturan yaitu sebesar -0,204 dan nilai t-statistik nya sebesar 2,810 atau lebih besar dibandingkan nilai t-tabel sebesar 1,983 (signifikan pada p 0,05). Dengan demikian H1 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Artinya penegakan peraturan dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dengan kata lain, semakin tinggi penegakan peraturan dalam suatu instansi, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam instansi tersebut. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

Menurut Alpinista (2013), tidak ada organisasi yang terbebas dari *fraud* (kecurangan) karena pada dasarnya permasalahan ini bersumber dan bermuara pada masalah manusia, “*the*

man behind the gun". Apapun aturan dan prosedur yang diciptakan, sangat dipengaruhi oleh manusia yang memegang kuasa untuk menjalankannya. Tegak atau tidaknya peraturan yang diterapkan oleh instansi tergantung kepada pejabat yang berwenang mengenai hal tersebut. Jika pejabat tidak tegas dalam menangani masalah penegakan peraturan, maka pegawai akan dengan mudah untuk melakukan pelanggaran peraturan, salah satunya kecurangan (*fraud*) tersebut. Jadi, lemahnya penegakan peraturan dalam suatu instansi, akan membuka peluang bagi pegawai yang bekerja dalam instansi tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan.

Keefektifan pengendalian internal (KPI) berpengaruh negatif kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nilai koefisien parameter untuk variabel keefektifan pengendalian internal yaitu sebesar -0,169 dan nilai t-statistiknya sebesar 2,134 atau lebih besar dibandingkan nilai t-tabel sebesar 1,983 (signifikan pada $p < 0,05$). Dengan demikian H2 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Artinya sistem pengendalian internal yang efektif dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hal ini sesuai dengan penelitian Thoyibatun (2009) yang menyatakan bahwa semakin sesuai sistem pengendalian internal dengan tujuannya, semakin sederhana deteksi *fraud* yang perlu dilakukan. Artinya jika sistem pengendalian internal dalam instansi sudah berjalan efektif, maka kemungkinan kecurangan (*fraud*) yang terjadi juga akan semakin kecil. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Wilopo (2006) yang menemukan bahwa semakin efektif suatu pengendalian internal pada suatu entitas, maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud*. Dengan adanya sistem pengendalian yang efektif, maka kegiatan operasional juga dapat berjalan secara efektif dan juga efisien sehingga kemungkinan adanya

penyimpangan dalam proses operasional instansi juga dapat diminimalisir. Dengan demikian, semakin efektif sistem pengendalian yang diterapkan dalam suatu entitas, maka semakin rendah kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi.

Asimetri informasi (AI) berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nilai koefisien parameter untuk variabel asimetri informasi yaitu sebesar 0,315 dan nilai *t-statistik* nya sebesar 5,760 atau lebih besar dibandingkan nilai *t-tabel* sebesar 1,983 (signifikan pada $p < 0,05$). Dengan demikian H3 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Artinya asimetri informasi membuka peluang terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hal ini sesuai dengan penelitian Wilopo (2006) yang memperoleh hasil bahwa dengan adanya asimetri informasi yang tinggi akan memperbesar kecenderungan kecurangan (*fraud*). Menurut Kusumastuti (2012), pengelola organisasi lebih banyak mengetahui informasi internal dibandingkan dengan pihak pengguna laporan keuangan, dalam hal ini adalah masyarakat. Laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak, namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal. Pengelola laporan keuangan tentu mengetahui laporan keuangan yang sebenarnya dikarenakan pengelola keuangan terlibat langsung dengan kegiatan organisasi, sementara pihak eksternal organisasi memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan pengelola. Karena kondisi tersebut, pengelola tentu akan lebih leluasa atau berkesempatan untuk memnipulasi laporan keuangan yang disajikan dikarenakan ketidaktahuan pengguna eksternal tentang angka dari laporan keuangan yang sebenarnya. Namun jika dalam suatu organisasi diberlakukan transparansi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasional organisasi dan berpengaruh

terhadap aporan keuangan, hal tersebut tentu tidak akan terjadi. Terlebih pada organisasi di sektor pemerintahan, yang wajib bertanggungjawab pada kepentingan masyarakat sebagai *stakeholder* nya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi akan meningkatkan peluang terjadinya kecurangan (*fraud*).

Keadilan distributif (KD) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nilai koefisien parameter untuk variabel keadilan distributif yaitu sebesar -0,138 dan nilai *t*-statistik nya sebesar 3,454 atau lebih besar dibandingkan nilai *t*-tabel sebesar 1,983 (signifikan pada $p < 0,05$). Dengan demikian H_4 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Artinya keadilan distributif dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rae & Subramaniam (2006) serta Puspitadewi & Irwandi (2012) yang menemukan bahwa keadilan organisasional berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang dimoderasi oleh keefektifan pengendalian internal. Menurut Gilliland (1993) dalam Herman (2013) persepsi karyawan tentang ketidakseimbangan antara masukan (pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, pengalaman, kerajinan maupun kegigihan dan kerja keras) yang mereka terima (gaji, perlakuan ataupun pengakuan) akan menghasilkan emosi negatif yang memotivasi karyawan untuk mengubah perilaku, sikap dan keputusannya bahkan lebih parah lagi mereka akan berusaha untuk memaksimalkan *utilitas* nya dengan bertink yang menguntungkan dirinya dan merugikan perusahaan seperti melakukan kecurangan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakadilan yang berkaitan dengan pemberian gaji dan kompensasi lainnya terhadap pegawai akan menimbulkan tekanan dalam diri pegawai tersebut untuk melakukan tindakan

menyimpang seperti kecurangan (*fraud*). Artinya, semakin adil keadilan distributif maka akan semakin rendah kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Keadilan prosedural (KP) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nilai koefisien parameter untuk variabel keadilan prosedural yaitu sebesar -0,154 dan nilai t-statistik nya sebesar 3,411 atau lebih besar dibandingkan nilai t-tabel sebesar 1,983 (signifikan pada p 0,05). Dengan demikian H5 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Artinya keadilan prosedural dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rae & Subramaniam (2006) dan Puspitadewi & Irwandi (2012) yang menemukan bahwa keadilan organisasional berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal ini juga didukung oleh pendapat Pristiyani (2012) yang menyatakan bahwa individu tidak hanya melakukan evaluasi terhadap alokasi atau distribusi *outcomes*, namun juga mengevaluasi terhadap keadilan prosedur untuk menentukan alokasi tersebut. Dalam sektor pemerintahan bukan hanya gaji yang adil saja yang harus dievaluasi, melainkan prosedur penggajian yang adil juga dapat berpengaruh terhadap tindakan pegawai dalam melakukan suatu penyimpangan, yang dalam hal ini adalah *fraud*. Tindakan menyimpang tersebut berasal dari tekanan dalam diri pegawai dikarenakan persepsi bahwa terjadi ketidakadilan dalam dirinya. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa semakin adil keadilan prosedural dalam suatu instansi, maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi.

Komitmen organisasi (KO) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nilai koefisien parameter untuk variabel komitmen organisasi yaitu sebesar $-0,108$ dan nilai *t*-statistik nya sebesar $2,286$ atau lebih besar dibandingkan nilai *t*-tabel sebesar $1,983$ (signifikan pada $p < 0,05$). Dengan demikian H_6 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Artinya komitmen organisasi yang tinggi dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012) yang menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal ini didukung oleh pendapat Wilopo (2006) bahwa upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dilakukan dengan memperbaiki moral dari pengelolaan perusahaan yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap instansi berarti pegawai juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap instansi. Dengan demikian, pegawai akan cenderung bekerja dengan baik untuk kemajuan instansi tersebut. Sebaliknya, jika komitmen terhadap organisasi rendah, maka pegawai cenderung akan bekerja kurang baik, dan akan merasionalisasikan hal tersebut sebagai hal yang wajar dikarenakan kurangnya komitmen terhadap organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi akan semakin rendah kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi.

Budaya etis organisasi (BEO) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)

Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa budaya etis organisasi (BEO) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai *t*-statistik sebesar 0,791, nilai tersebut dibawah 1,983 yang meruakan nilai *t*-*statistic* sehingga H_7 ditolak. Artinya budaya etis organisasi tidak dapat meminimlisir terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Zulkarnain (2013) yang menemukan bahwa budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2013) juga menyimpulkan hasil yang sama. Menurut Faisal (2013) terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari rangsangan atau pengaruh faktor lingkungan. Sedangkan faktor internal berasal dari faktor individu. Perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor eksternal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan organisasi saja tetapi juga faktor lingkungan di luar organisasi. Menurut Putranto (2011) Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku individu yang berasal dari lingkungan antara lain pengaruh keluarga, pengaruh niai, moral dan agama, pengalaman hidup serta pengaruh teman. Individu akan cenderung berperilaku mencontoh perilaku orang tuanya atau keluarga dekat atau berperilaku seperti yang disuruh keluarganya. Selain itu pengalaman juga akan memepengaruhi perilaku seseorang, pengalaman merupakan proses yang normal dalam kehidupan seseorang, bisa pengalaman baik atau buruk sehingga dari pengalaman tersebut dapat membentuk perilaku seseorang.

Di samping faktor eksternal di luar lingkungan organisasi yang mempengaruhi perilaku individu, faktor internal juga sangat berpangaruh terhadap perilaku individu tersebut. Salah satu contoh faktor internal tersebut adalah faktor moral individu itu sendiri. Walaupun budaya organisasi pada instansi sudah etis , namun apabila moral dari pegawai instansi

kurang etis, bukan tidak mungkin dapat terjadi kecurangan (*fraud*) dalam instansi tersebut. Selanjutnya menurut Welton (1994) dalam Puspasari dan Suwardi (2012), individu memiliki pandangan sendiri mengenai versi yang benar menurutnya. Sehingga tergantung pada moral yang dimiliki oleh pegawai yang menentukan apakah perbuatan menyimpang seperti melakukan kecurangan merupakan versi hal yang benar atau yang salah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Penegakan peraturan termasuk dalam kategori tegak. Rata-rata terendah ditunjukkan oleh indikator PP2 karena menurut persepsi responden, pejabat kurang tanggap dalam menegakkan peraturan. Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Keefektifan pengendalian internal termasuk dalam kategori efektif. Rata-rata terendah ditunjukkan oleh indikator KPI5, karena menurut persepsi responden kebijakan yang berkaitan dengan pemantauan kegiatan operasional responden masih kurang. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Asimetri informasi termasuk dalam kategori rendah. Rata-rata tertinggi ditunjukkan oleh indikator AI4 dan AI5 dikarenakan hanya pihak pengelola laporan keuangan yang benar-benar mengerti secara detail mengenai angka dan lika-liku pembuatan laporan keuangan..Keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Rata-rata terendah ditunjukkan oleh indikator KD3 karena persepsi mengenai ketidaksesuaian kinerja dan gaji atau kompensasi yang diberikan.. Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Rata-rata terendah ditunjukkan oleh indikator KP6 karena semua prosedur mengenai penggajian ditetapkan dengan sistem *topdown* sehingga bawahan tidak dapat terlibat dalam menentukan sistem

penggajian. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Rata-rata terendah ditunjukkan oleh indikator KO7 dikarenakan komitmen yang kurang dari pegawai sehingga pegawai akan lebih senang jika bergabung dengan instansi lainnya. Budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Rata-rata terendah ditunjukkan oleh indikator BEO5 yang menunjukkan bahwa menurut persepsi pegawai, masalah perlindungan etika kurang ditekankan dalam instansi.

Implikasi dan Saran

Temuan empirik dalam penelitian ini bahwa hal penyebab kecurangan dikarenakan kesempatan atau *opportunity* merupakan penyebab yang paling bisa dikendalikan oleh organisasi. Untuk itu instansi dinas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas untuk setiap pelanggaran peraturan oleh semua lapisan pegawai baik atasan maupun bawahan seperti dilakukannya pemotongan gaji. Diharapkan dinas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan rotasi pegawai setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir tindak kecurangan (*fraud*). Bagi instansi dinas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan dengan membuka ruang publik. Diharapkan selanjutnya bagi dinas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan keadilan mengenai kompensasi dengan memberikan bonus berupa cuti kerja kepada pegawai yang kinerjanya baik. Diharapkan bagi dinas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk lebih melibatkan seluruh pegawai instansi dalam memutuskan prosedur yang akan digunakan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan khususnya pembagian kompensasi kepada pegawai. Bagi pegawai dinas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan untuk meningkatkan komitmen terhadap instansi. Memahami bahwa pegawai bekerja bukan hanya untuk kepentingan pribadinya tetapi juga untuk kepentingan publik atau masyarakat. Diharapkan

bagi dinas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan seminar mengenai budaya etis organisasi sehingga dapat diaplikasikan pada instansi nya masing-masing pada saat bekerja karena budaya organisasi merupakan norma yang dianut tetapi tidak tertulis. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel intervening seperti perilaku tidak etis dalam penelitian. Dikarenakan awal dari perilaku kecurangan adalah dari perilaku yang tidak etis Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan metode experimental 2x2 agar hasil dari penelitian lebih valid.

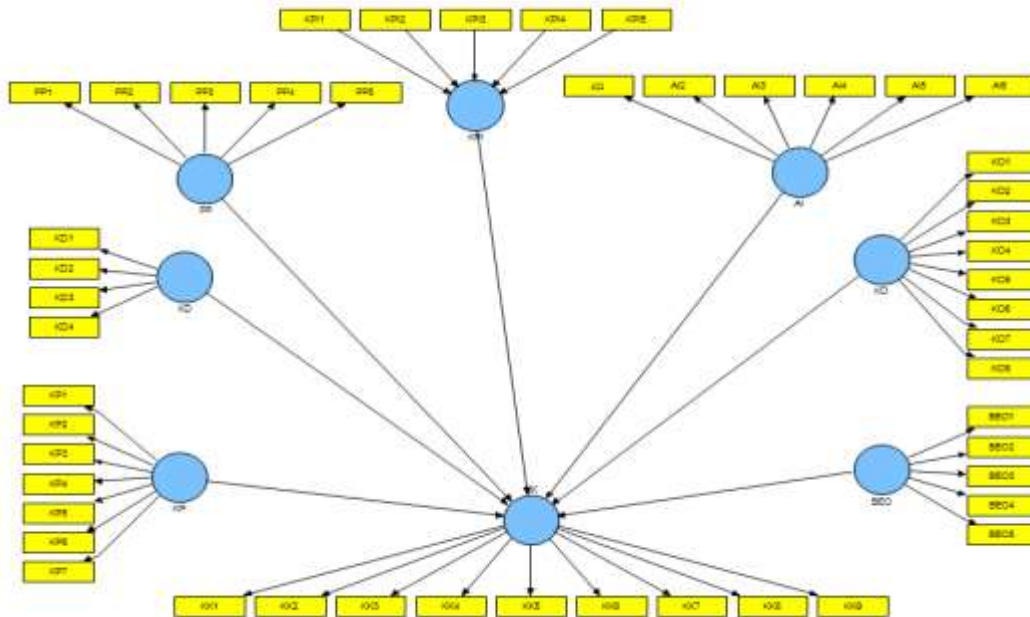
DAFTAR REFERENSI

- Alpinista, Elly. 2013. "Peran dan Tanggungjawab Internal Auditor dalam Masalah Kecurangan." http://alpinistaelly.blogspot.com/2013/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x_5.html diunduh tanggal 5 Mei 2013
- Boynton, William A and Kell, Walter G. 1996. "Modern Auditing Sixth Edition". New York : John Willey and Sons
- Detik.news.2012. "Ini Dia Peringkat Provinsi Terkorup di Indonesia versi Fitra" <http://news.detik.com/read/2012/10/01/053204/2047460/10/ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di-indonesia-versi-fitra>. Diunduh tanggal 12 Januari 2013
- Faisal, Muhammad. 2013. "Analisis *Fraud* di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus" *Accounting Analysis Journal AAJ1(3)(2013)*
- Faturochman. 2002. "Keadilan Perspektif Psikologi". Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM dengan Pustaka Pelajar
- Huda, Mohammad Choirul. 2011. "Peran Peraturan Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MAN Malang II Batu". *Skripsi*. Malang : UIN Malang
- Ikhsan, Arfan & Muhammad Ishak. 2005. "Akuntansi Keperilakuan". Jakarta: Salemba Empat.
- Ivancevich *et al.* 2006. "Perilaku dan Manajemen Organisasi". Jakarta : Erlangga.
- Kadaruddin dkk. 2012. "Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Keadilan Interaksional terhadap Kepuasan Pegawai Pajak Kota Makassar"
- Kurniawan, Ardeno. 2012. "Audit Internal, Nilai Tambah Bagi Organisasi". Yogyakarta : BPFE UGM
- Kurniawan, Muhammad Rizki Nur. 2011. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Organisasi Publik", *Skripsi*. Semarang : Fakultas Ekonomi UNDIP
- Kusumastuti, Nur Ratri. 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening". *Skripsi*: Semarang: UNDIP
- Mathis, Robert & John H. Jackson. 2001. "Manajemen Sumber Daya Manusia" Jakarta : Salemba Empat
- Mulyadi. 2002. "Auditing". Jakarta : Salemba Empat



- Norbarani, Listiana. 2012. "Pendeteksian Kecurangan laporan Keuangan dengan Analisis *Fraud Triangle* yang Diadopsi dalam SAS No.99". *Skripsi*.Semarang : Fakultas Ekonomi UNDIP
- Oktaviani, Nur ayu candry.2011. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Keinginan sosial terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja maajerial. *Skripsi*.Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Pristiyanti, Ika Ruly.2012."Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan." *Skripsi*. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES.
- Puspasari, Novita & Suwardi, Eko.2012."Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen pada Konteks Pemerintah Daerah". *Jurnal*.Yogyakarta : FEB UGM.
- Puspitadewi dkk. 2012."Hubungan Keadilan Organisasional dan Kecurangan Pegawai dengan Moderating Kualitas Pengendalian Internal." *The Indonesian Accounting Review Volume 2 no. 2 pages 159-172*.
- Putranto, Harvi. 2011."Lingkungan Organisasi dan Budaya Organisasi". *Artikel*.Jakarta : Universitas Mercubuana
- Rae, Kirsty and nava Subramaniam.2008."Quality of Internal Control Procedures Antecedents and Moderating Effect on Organizational Justice and Employee Fraud." *manajerial Auditing Journal vol. 23 no. 2, 2008 pp 104-124*
- Robins, P Stephen.2006. "Perilaku Organisasi Edisi 10". *Prentice Hall Pearson Educational International,PT Ideks*. Jakarta: Gramedia
- Rudianto.2012."Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) se-Kota Semarang. *Skripsi*.Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES
- Sukanto, Eman.2007."Perbandingan Persepsi antara Kelompok Auditor Internal, Akuntan Publik, dan Auditor Pemerintah terhadap Penugasan Audit Kecurangan (*Fraud Audit*) dan Profil Auditor Kecurangan (*Fraud Auditor*). *Thesis*:Semarang:UNDIP
- Supardi.2008."Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural, Serta Produktifitas Kerja Pegawai Hotel Berbintang di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Optimal vol. 6 no. 1 Oktober : 19-40*
- Suprajadi, Lusy.2009."Teori Kecurangan, Fraud Awareness dan Metodologi untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan" *JurnalBina Ekonomi vol. 12, nomor 2, Agustus 2009*
- Thoyibatun, Siti. 2009."Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan volume 16 nomor 2 :245-260*.
- Wilopo.2006."Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia." *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Zulkarnain, Rifqi Mirza.2013."Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* pada Dinas Kota Surakarta". *Accounting Analysis Journal AAJI(3)(2013)*

LAMPIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Keterangan :

○ = konstruk laten

□ = indikator

PP = Penegakan Peraturan

KPI = Keefektifan Pengendalian Internal

AI = Asimetri Informasi

KD = Keadilan Distributif

KP = Keadilan Prosedural

KO = Komitmen Organisasi

BEO = Budaya Etis Organisasi

Tabel 3. Sampel Penelitian

No	Nama Dinas	Jumlah Sampel
1.	Dinas Pertanian	15
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	9
3.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12
4.	Dinas Kebudayaan	7
5.	Dinas Pariwisata	7
6.	Dinas Sosial	15
7.	Dinas Kesehatan	15
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9
9.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral	8
10.	Dinas Perhubungan ,Komunikasi, dan Informatika	10
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi , dan Usaha Kecil Menengah	11
12.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)	10
Jumlah		128

Sumber :
Bkd.Jogj
aprov.go
.id

**Tabel 4. UJI INSTRUMEN (OUTER MODEL)
Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ((O/STERR))
AI1 <- AI	0,701350	0,711485	0,078021	0,078021	8,989277
AI2 <- AI	0,698884	0,666788	0,048526	0,048526	14,402168
AI3 <- AI	0,670329	0,660183	0,085129	0,085129	7,874236
AI4 <- AI	0,841515	0,855164	0,020376	0,020376	41,300343
AI5 <- AI	0,810137	0,794319	0,061412	0,061412	13,191880
AI6 <- AI	0,835872	0,815905	0,054671	0,054671	15,289039
BEO1 <- BEO	0,840668	0,825737	0,042538	0,042538	19,762568
BEO2 <- BEO	0,613113	0,586493	0,086253	0,086253	7,108315
BEO3 <- BEO	0,689878	0,684012	0,073146	0,073146	9,431551
BEO4 <- BEO	0,717510	0,708100	0,058194	0,058194	12,329573
BEO5 <- BEO	0,666291	0,671083	0,051446	0,051446	12,951308
KD1 <- KD	0,848517	0,845324	0,031683	0,031683	26,781227
KD2 <- KD	0,947262	0,943031	0,013587	0,013587	69,717511
KD3 <- KD	0,892982	0,887894	0,032989	0,032989	27,069453
KD4 <- KD	0,735585	0,725392	0,094813	0,094813	7,758291
KK1 <- KK	0,836157	0,840373	0,014194	0,014194	58,908447
KK2 <- KK	0,923425	0,926069	0,009572	0,009572	96,471723
KK3 <- KK	0,728424	0,718720	0,064292	0,064292	11,329875

KK4 <- KK	0,936379	0,938790	0,011563	0,011563	80,977955
KK5 <- KK	0,785622	0,783365	0,044421	0,044421	17,685692
KK6 <- KK	0,785042	0,771695	0,049494	0,049494	15,861403
KK7 <- KK	0,839262	0,842735	0,020733	0,020733	40,479795
KK8 <- KK	0,915226	0,917096	0,015263	0,015263	59,962758
KK9 <- KK	0,852744	0,855318	0,015947	0,015947	53,474609
KO1 <- KO	0,828962	0,830500	0,020935	0,020935	39,597052
KO2 <- KO	0,807404	0,799605	0,020168	0,020168	40,033388
KO3 <- KO	0,866554	0,869050	0,012797	0,012797	67,713063
KO4 <- KO	0,795145	0,788597	0,019120	0,019120	41,587475
KO5 <- KO	0,802296	0,801239	0,032307	0,032307	24,833848
KO6 <- KO	0,714848	0,708528	0,029598	0,029598	24,151644
KO7 <- KO	0,791892	0,783930	0,037289	0,037289	21,236579
KO8 <- KO	0,802340	0,802950	0,023836	0,023836	33,660539
KP1 <- KP	0,697136	0,666604	0,092025	0,092025	7,575476
KP2 <- KP	0,837034	0,824191	0,030296	0,030296	27,628871
KP3 <- KP	0,957496	0,947756	0,018677	0,018677	51,265527
KP4 <- KP	0,974823	0,967552	0,016637	0,016637	58,595048
KP5 <- KP	0,913429	0,905841	0,015692	0,015692	58,208758
KP6 <- KP	0,866750	0,864234	0,014691	0,014691	58,997127
KP7 <- KP	0,953227	0,949762	0,013816	0,013816	68,994216
KPI1 -> KPI	0,611701	0,600625	0,062797	0,062797	9,740969
KPI2 -> KPI	0,402321	0,404201	0,082544	0,082544	4,874022
KPI3 -> KPI	-0,424527	-0,409675	0,052895	0,052895	8,025837
KPI4 -> KPI	0,100355	0,090223	0,094673	0,094673	1,060013
KPI5 -> KPI	0,457286	0,469152	0,089476	0,089476	5,110678
PP1 <- PP	0,934889	0,933300	0,015470	0,015470	60,431898
PP2 <- PP	0,909265	0,903300	0,022907	0,022907	39,694444
PP3 <- PP	0,882648	0,879276	0,033382	0,033382	26,440782
PP4 <- PP	0,790869	0,789698	0,049681	0,049681	15,918928
PP5 <- PP	0,903264	0,906530	0,033713	0,033713	26,792830

Tabel 5. Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
AI1 <- AI	0,222869	0,233481	0,076996	0,076996	2,894542
AI2 <- AI	0,130819	0,107721	0,029322	0,029322	4,461466
AI3 <- AI	0,196426	0,196945	0,061432	0,061432	3,197461
AI4 <- AI	0,387311	0,406981	0,065850	0,065850	5,881702
AI5 <- AI	0,151414	0,139182	0,045403	0,045403	3,334904
AI6 <- AI	0,205772	0,193868	0,029331	0,029331	7,015568
BEO1 <- BEO	0,389270	0,377365	0,051229	0,051229	7,598567
BEO2 <- BEO	0,266069	0,247545	0,050988	0,050988	5,218307
BEO3 <- BEO	0,195137	0,210472	0,048577	0,048577	4,017058
BEO4 <- BEO	0,284272	0,294762	0,051050	0,051050	5,568530
BEO5 <- BEO	0,256697	0,263727	0,068918	0,068918	3,724663
KD1 <- KD	0,358180	0,356979	0,071055	0,071055	5,040887
KD2 <- KD	0,383044	0,379655	0,024657	0,024657	15,534665
KD3 <- KD	0,280983	0,283954	0,017821	0,017821	15,766563
KD4 <- KD	0,111915	0,106279	0,097648	0,097648	1,146109
KK1 <- KK	0,125609	0,126503	0,006581	0,006581	19,087234
KK2 <- KK	0,159353	0,158029	0,008624	0,008624	18,478427
KK3 <- KK	0,101899	0,100552	0,011073	0,011073	9,202315
KK4 <- KK	0,136152	0,137821	0,004627	0,004627	29,426617
KK5 <- KK	0,136523	0,135442	0,004085	0,004085	33,420226
KK6 <- KK	0,134627	0,131119	0,004694	0,004694	28,679047
KK7 <- KK	0,117669	0,119146	0,003574	0,003574	32,925827
KK8 <- KK	0,129508	0,131148	0,005066	0,005066	25,562379
KK9 <- KK	0,135888	0,136364	0,008757	0,008757	15,516771
KO1 <- KO	0,166684	0,168592	0,006052	0,006052	27,544114
KO2 <- KO	0,198719	0,198412	0,007000	0,007000	28,386738
KO3 <- KO	0,152092	0,154580	0,006262	0,006262	24,287978
KO4 <- KO	0,178090	0,177940	0,005836	0,005836	30,516870
KO5 <- KO	0,131601	0,132043	0,011363	0,011363	11,581680
KO6 <- KO	0,138189	0,138980	0,010099	0,010099	13,683817
KO7 <- KO	0,132705	0,130353	0,011132	0,011132	11,920948
KO8 <- KO	0,147718	0,148423	0,008843	0,008843	16,704289
KP1 <- KP	-0,012410	-0,050006	0,098528	0,098528	0,125955
KP2 <- KP	0,125993	0,116139	0,036046	0,036046	3,495354
KP3 <- KP	0,175267	0,175537	0,018262	0,018262	9,597543
KP4 <- KP	0,228324	0,241743	0,034339	0,034339	6,649187
KP5 <- KP	0,158806	0,155105	0,021077	0,021077	7,534684

KP6 <- KP	0,227086	0,247522	0,031809	0,031809	7,139070
KP7 <- KP	0,179300	0,183328	0,014894	0,014894	12,038626
KPI1 -> KPI	0,400714	0,372684	0,109498	0,109498	3,659542
KPI2 -> KPI	0,162779	0,182282	0,104941	0,104941	1,551152
KPI3 -> KPI	-0,824965	-0,830602	0,092751	0,092751	8,894360
KPI4 -> KPI	-0,180824	-0,164861	0,045232	0,045232	3,997714
KPI5 -> KPI	0,781394	0,789755	0,058731	0,058731	13,304621
PP1 <- PP	0,410893	0,397883	0,035929	0,035929	11,436283
PP2 <- PP	0,167598	0,166989	0,028449	0,028449	5,891176
PP3 <- PP	0,238174	0,239536	0,055485	0,055485	4,292619
PP4 <- PP	0,165457	0,171397	0,041426	0,041426	3,994068
PP5 <- PP	0,135498	0,142170	0,030054	0,030054	4,508436

Tabel 6. Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
AI	0,861866
BEO	0,754686
KD	0,888050
KK	0,949964
KO	0,920825
KP	0,957421
KPI	
PP	0,93558

Tabel 7. Composite Reliability

	Composite Reliability
AI	0,892319
BEO	0,833664
KD	0,918232
KK	0,957932
KO	0,935078
KP	0,963599
KPI	
PP	0,947691

Tabel 8. DISCRIMINANT VALIDITY

	AI	BEO	KD	KK	KO	KP	KPI	PP
AI1	0,701350	0,400080	-0,058985	0,287527	-0,403811	-0,354582	0,237410	0,234560
AI2	0,698884	-0,011381	-0,219491	0,168772	-0,291008	-0,283155	0,211355	0,211038
AI3	0,670329	0,019252	0,087943	0,253413	-0,221020	-0,305319	0,248802	0,340957
AI4	0,841515	0,184556	-0,038120	0,499676	-0,375359	-0,186135	0,453078	0,182660
AI5	0,810137	-0,140335	-0,137894	0,195342	-0,394856	-0,154650	0,271925	0,086478
AI6	0,835872	-0,006828	-0,419157	0,265469	-0,347094	-0,029867	0,372665	0,340828
BEO1	0,143427	0,840668	0,169153	0,407743	-0,208237	-0,076948	0,476442	0,494659
BEO2	-0,064040	0,613113	0,012540	0,278696	-0,103340	-0,062459	0,253635	0,397722
BEO3	-0,094959	0,689878	0,012090	0,204397	-0,080408	0,106437	0,401585	0,451731
BEO4	0,120965	0,717510	0,214850	0,297762	-0,148617	-0,071729	0,514501	0,456597
BEO5	0,333606	0,666291	0,054515	0,268878	-0,304167	0,014709	0,371786	0,440749
KD1	-0,016568	0,030436	0,848517	-0,382324	0,268784	-0,254538	-0,342745	-0,361089
KD2	-0,191776	0,286575	0,947262	-0,408864	0,475988	0,065694	-0,192347	-0,138782
KD3	-0,136524	0,085340	0,892982	-0,299923	0,234918	-0,049898	-0,247302	-0,367125
KD4	-0,256663	0,017515	0,735585	-0,119459	0,104966	0,011589	0,064000	-0,498738
KK1	0,170672	0,309517	-0,430689	0,836157	-0,736953	-0,077953	0,665040	0,038023
KK2	0,342058	0,412957	-0,435241	0,923425	-0,901717	-0,433115	0,715791	0,409392
KK3	0,291785	0,486753	0,112070	0,728424	-0,467955	-0,027632	0,748623	0,202788
KK4	0,417182	0,420882	-0,463597	0,936379	-0,705899	-0,167501	0,698804	0,440691
KK5	0,476396	0,370273	-0,467878	0,785622	-0,635707	-0,061458	0,826503	0,457667
KK6	0,424539	0,495017	-0,292541	0,785042	-0,650713	-0,260230	0,781107	0,460084
KK7	0,247926	0,401834	-0,244783	0,839262	-0,621383	-0,080469	0,614503	0,315597
KK8	0,440756	0,211379	-0,300463	0,915226	-0,772127	-0,381951	0,608466	0,205705
KK9	0,314553	0,169152	-0,331626	0,852744	-0,891952	-0,580543	0,516853	0,116190
KO1	-0,217103	-0,346120	0,147401	-0,714642	0,828962	0,494214	-0,712443	-0,081640
KO2	-0,274483	-0,354129	0,265814	-0,851987	0,807404	0,419344	-0,693862	-0,231030
KO3	-0,393745	-0,053603	0,207266	-0,652080	0,866554	0,460124	-0,487368	0,005241
KO4	-0,424931	-0,141515	0,476931	-0,763545	0,795145	0,512592	-0,565042	-0,208357
KO5	-0,275771	-0,107614	0,206050	-0,564228	0,802296	0,555779	-0,339896	0,163849
KO6	-0,547028	-0,183030	0,563688	-0,592471	0,714848	0,081328	-0,513983	-0,330402
KO7	-0,371718	0,020712	0,335992	-0,568961	0,791892	0,189858	-0,576518	0,206226
KO8	-0,409986	-0,314435	0,087334	-0,633329	0,802340	0,077244	-0,647692	-0,115433
KP1	-0,267806	0,423330	-0,127025	0,017060	0,331973	0,697136	0,201174	0,284677
KP2	0,022014	-0,119015	-0,145194	-0,173201	0,186181	0,837034	-0,032929	-0,080948
KP3	-0,374900	0,025477	-0,020229	-0,240937	0,469541	0,957496	-0,134384	-0,003145
KP4	-0,374982	-0,082588	-0,145923	-0,313875	0,462755	0,974823	-0,110923	-0,077683
KP5	-0,222607	-0,093347	-0,001184	-0,218309	0,395647	0,913429	-0,062479	-0,059531
KP6	-0,177737	0,013037	0,003870	-0,312172	0,512808	0,866750	-0,093175	0,100387

KP7	-0,316529	0,022787	-0,144113	-0,246481	0,342386	0,953227	0,042981	-0,030800
KPI1	0,373183	0,108006	-0,402661	0,494475	-0,508158	-0,179896	0,611701	0,249786
KPI2	0,296380	0,431258	-0,048750	0,325221	-0,199104	0,019073	0,402321	0,639600
KPI3	-0,109633	0,170437	0,144252	-0,343172	0,511756	0,475757	-0,424527	0,315269
KPI4	0,327180	-0,366304	-0,237110	0,081122	-0,207817	0,182920	0,100355	-0,139261
KPI5	0,247898	0,683263	-0,017085	0,369655	-0,126301	0,531926	0,457286	0,479645
PP1	0,381190	0,537833	-0,355117	0,486761	-0,258671	-0,251854	0,337796	0,934889
PP2	0,293135	0,675206	-0,051142	0,198544	0,065383	0,038289	0,244464	0,909265
PP3	0,190535	0,542540	-0,444763	0,282151	-0,220755	-0,063340	0,311211	0,882648
PP4	0,098541	0,558616	-0,248288	0,196008	0,116134	0,253757	0,318407	0,790869
PP5	0,246400	0,543641	-0,294970	0,160517	0,140860	0,339277	0,276891	0,903264

Tabel 9. AVE & Akar AVE

	AVE	Akar AVE
AI	0,582137	0,761
BEO	0,503465	0,707
KD	0,738947	0,854
KK	0,717993	0,846
KO	0,643472	0,801
KP	0,792565	0,899
KPI		
PP	0,784241	0,885

Tabel 10. Latent Variable Correlations

	AI	BEO	KD	KK	KO	KP	KPI	PP
AI	1,000000							
BEO	0,140286	1,000000						
KD	-0,146479	0,146612	1,000000					
KK	0,413670	0,426425	-0,391195	1,000000				
KO	-0,448070	-0,244574	0,356352	-0,848765	1,000000			
KP	-0,277694	-0,042417	-0,078729	-0,285679	0,447963	1,000000		
KPI	0,422771	0,573007	-0,258766	0,808363	-0,719329	-0,078898	1,000000	
PP	0,300830	0,629463	-0,341467	0,354665	-0,109607	-0,024199	0,344093	1,000000

Tabel 11. Penjelasan Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Indikator	Pertanyaan Nomor
1.	Penegakan Peraturan (Zulkarnain, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan terhadap hukum 2. Proses Penegakan hukum 3. Peraturan Organisasi 4. Disiplin Kerja 5. Tanggung Jawab 	1,2,3,4,5
2.	Keefektifan Pengendalian Internal (PP n0. 80 tahun 2008 tentang SPIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern 	6,7,8,9,10
3.	Asimetri Informasi (Wilopo,2006)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi dimana manajemen memiliki informasi yang lebih baik atas aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan 2. Situasi dimana manajemen lebih mengenal hubungan <i>input-output</i> dalam bagian yang menjadi tanggungjawabnya dibanding pihak luar perusahaan 3. Situasi dimana manajemen lebih mengetahui potensi kinerja yang menjadi tanggung jawab dibanding pihak luar perusahaan. 4. Situasi dimana manajemen lebih mengenal teknis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dibanding pihak luar perusahaan 5. Situasi dimana manajemen lebih mengetahui pengaruh eksternal dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya dibanding pihak luar perusahaan. 6. Situasi dimana manajemen lebih mengerti apa yang dapat dicapai dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya dibanding pihak luar perusahaan. 	11, 12, 13 14,15,16
6.	Keadilan Distributif (Colquitt,2001 dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi menggambarkan usaha yang dilakukan 2. Kompensasi menggambarkan apa yang diberikan 	17.18.19,20

	Priatiyanti, 2012)	kepada perusahaan 3. Kompensasi sesuai dengan kinerja	
7.	Keadilan Prosedural (Colquitt,2001 dalam Pristiyantim 2012)	1. Prosedur kompensasi mengekspresikan pandangan dan perasaan 2. Penetapan prosedur kompensasi melibatkan karyawan / prosedur kompensasi diaplikasikan secara konsisten 3. Prosedur kompensasi tidak mengandung kepentingan tertentu 4. Prosedur kompensasi didasarkan pada informasi yang akurat 5. Prosedur kompensasi memungkinkan pemberian masukan dan koreksi 6. Prosedur kompensasi sesuai dengan etika dan moral	21,22, 23 24,25,26,27
6.	Komitmen Organisasi oleh Luthans (2006) dalam Pristiyanti (2012)	1. bekerja melalui target 2. membanggakan organisasi kepada orang lain 3. menerima semua tugas 4. kesamaan nilai 5. bangga menjadi bagian dari organisasi 6. organisasi merupakan inspirasi 7. gembira memilih bekerja pada organisasi 8. peduli pada nasib organisasi	28,29,30 31,32,33 34,35
7.	Budaya Etis Organisasi (Robins, 2008 dalam Pristiyanti, 2012)	1. Model peran yang <i>visible</i> 2. Komunikasi harapan-harapan etis 3. Pelatihan etis 4. Hukuman bagi tindakan etis 5. Mekanisme perlindungan etika	36,37,38 39,40
8.	Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Tuannakota, 2007)	1. kecurangan laporan keuangan, 2. penyalahgunaan aset 3. korupsi	41,42,43 45,46,47 48,49,50

Tabel 12. Deskriptif Responden

Keterangan	Total	Presentase
1. Umur responden		
a. 21-30 tahun	2	1,80%
b. 31-40 tahun	12	10,81%
c. 41-50 tahun	47	42,34%
d. > 50 tahun	50	45,05%
	111	100%
2. Jabatan :		
a. Kasubbag	17	15,32%
b. Staf Pengelola keuangan	94	84,68%
	111	100%
3. Masa kerja		
a. 1-10 tahun	11	9,91%
b. 11-20 tahun	17	15,31%
c. 21-30 tahun	73	65,77%
d. > 31 tahun	10	9,01%
	111	100%
4. Pendidikan terakhir		
a. SLTP/ sederajat	2	1,80%
b. SLTA/ sederajat	60	54,05%
c. D2	1	0,90%
d. D3	9	8,10%
e. S1	32	28,83%
f. S2	7	6,31%
	111	100%

Tabel 13. Data Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	128	100%
Kuesioner yang tidak kembali	10	7,8%
Kuesioner yang kembali	118	92,1%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	7	5,5 %
Kuesioner yang memenuhi syarat	111	86,7%

Tabel 14. Deskriptif Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Modus	Sum	Std. Deviation
KK	111	9	39	17,189	18	18	1908	6,418
KK1	111	1	4	2,018	2	2	224	0,963
KK2	111	1	4	2,036	2	2	226	0,830
KK3	111	1	5	2,063	2	2	229	0,856
KK4	111	1	5	2,009	2	2	223	0,968
KK5	111	1	4	1,811	2	2	201	0,804
KK6	111	1	4	1,793	2	2	199	0,662
KK7	111	1	5	1,937	2	2	215	0,823
KK8	111	1	5	1,865	2	2	207	0,769
KK9	111	1	5	1,658	1	1	184	0,847

Tabel 15. Deskriptif Penegakan Peraturan

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Modus	Sum	Std. Deviation
PP	111	5	25	20,432	21	22	2268	4,124
PP1	111	1	5	4,216	4	4	468	0,938
PP2	111	1	5	3,919	4	4	435	0,896
PP3	111	1	5	4,153	4	4	461	0,926
PP4	111	1	5	4,054	4	4	450	0,999
PP5	111	1	5	4,090	4	4	454	0,890

Tabel 16. Deskriptif Keefektifan Pengendalian Intern

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Modus	Sum	Std. Deviation
KPI	111	6	25	20,081	20	24	2229	3,773
KPI1	111	1	5	4,072	4	4	452	0,794
KPI2	111	1	5	4,018	4	4	446	0,874
KPI3	111	1	5	4,036	4	4	448	0,863
KPI4	111	1	5	3,991	4	4	443	0,929
KPI5	111	1	5	3,964	4	4	440	0,830

Tabel 17. Deskriptif Asimetri Informasi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Modus	Sum	Std. Deviation
AI	111	6	29	12,730	14	7	1.413	4,598
AI1	111	1	5	2,090	2	2	232	0,804
AI2	111	1	5	2,126	2	2	236	0,843
AI3	111	1	5	2,009	2	2	223	0,889
AI4	111	1	5	2,189	2	2	243	0,977
AI5	111	1	5	2,126	2	2	236	0,926
AI6	111	1	5	2,189	2	2	243	0,910

Tabel 18. Deskriptif Keadilan Distributif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Modus	Sum	Std. Deviation
KD	111	5	20	15,261	16	16	1694	3,221
KD1	111	1	5	3,811	4	4	423	0,889
KD2	111	1	5	3,811	4	4	423	0,900
KD3	111	1	5	3,784	4	4	420	0,888
KD4	111	1	5	3,856	4	4	428	0,913

Tabel 19. Deskriptif Keadilan Prosdural

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Modus	Sum	Std. Deviation
KP	111	8	35	27,468	28	27	3049	5,113
KP1	111	1	5	3,874	4	4	430	0,885
KP2	111	1	5	3,946	4	4	438	0,862
KP3	111	1	5	3,964	4	4	440	0,863
KP4	111	1	5	4,018	4	4	446	0,809
KP5	111	1	5	4,054	4	4	450	0,784
KP6	111	1	5	3,712	4	4	412	0,878
KP7	111	1	5	3,901	4	4	433	0,831

Tabel 20. Deskriptif Komitmen Organisasional

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Modus	Sum	Std. Deviation
KO	111	9	40	31,919	32	32	3543	6,113
KO1	111	1	5	3,991	4	4	443	0,919
KO2	111	1	5	4,009	4	4	445	0,919
KO3	111	1	5	3,901	4	4	433	0,924
KO4	111	1	5	4,000	4	4	444	0,820
KO5	111	1	5	4,117	4	4	457	0,817
KO6	111	1	5	3,964	4	4	440	0,894
KO7	111	1	5	3,847	4	4	427	1,072
KO8	111	1	5	4,090	4	4	454	0,859

Tabel 21. Deskriptif Budaya Etis Organisasi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Modus	Sum	Std. Deviation
BEO	111	5	25	19,441	20	20	2158	3,495
BEO1	111	1	5	4,027	4	4	447	0,858
BEO2	111	1	5	3,955	4	4	439	0,767
BEO3	111	1	5	3,694	4	4	410	0,902
BEO4	111	1	5	4,036	4	4	448	0,863
BEO5	111	1	5	3,730	4	4	414	0,873

Tabel 22. Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STERR)	Standard Error (STERR)
AI1 <- AI	0,829988	0,825640	0,031778	26,118355	0,031778
AI2 <- AI	0,768661	0,761979	0,038896	19,761950	0,038896
AI3 <- AI	0,885546	0,881054	0,025831	34,282090	0,025831
AI4 <- AI	0,861289	0,857217	0,033131	25,996264	0,033131
AI5 <- AI	0,908160	0,905551	0,016121	56,332814	0,016121
AI6 <- AI	0,893388	0,890933	0,021918	40,759612	0,021918
BEO1 <- BEO	0,715942	0,703214	0,077004	9,297428	0,077004
BEO2 <- BEO	0,864990	0,858293	0,037314	23,181626	0,037314
BEO3 <- BEO	0,807618	0,808210	0,046511	17,364009	0,046511
BEO4 <- BEO	0,897344	0,900087	0,019495	46,029225	0,019495
BEO5 <- BEO	0,811016	0,806986	0,053287	15,219773	0,053287
KD1 <- KD	0,851039	0,841972	0,036094	23,578146	0,036094
KD2 <- KD	0,909154	0,907196	0,015882	57,243183	0,015882
KD3 <- KD	0,924843	0,924730	0,018456	50,109850	0,018456
KD4 <- KD	0,903183	0,899425	0,022803	39,608497	0,022803
KK1 <- KK	0,827396	0,825801	0,028234	29,304649	0,028234
KK2 <- KK	0,811328	0,806456	0,042080	19,280495	0,042080
KK3 <- KK	0,881135	0,881429	0,037572	23,451982	0,037572
KK4 <- KK	0,867038	0,867954	0,029375	29,516658	0,029375
KK5 <- KK	0,897950	0,896752	0,024491	36,664538	0,024491
KK6 <- KK	0,866860	0,861004	0,032006	27,084551	0,032006
KK7 <- KK	0,852449	0,848050	0,030050	28,368013	0,030050
KK8 <- KK	0,852002	0,843363	0,044305	19,230255	0,044305
KK9 <- KK	0,826181	0,822880	0,043404	19,034632	0,043404
KO1 <- KO	0,826361	0,825978	0,035949	22,987066	0,035949
KO2 <- KO	0,824901	0,819321	0,033927	24,314007	0,033927
KO3 <- KO	0,809021	0,807500	0,043159	18,745037	0,043159
KO4 <- KO	0,898187	0,895147	0,024939	36,015195	0,024939
KO5 <- KO	0,861381	0,853703	0,040662	21,183919	0,040662
KO6 <- KO	0,832177	0,829865	0,038494	21,618424	0,038494
KO7 <- KO	0,832483	0,832121	0,029767	27,967025	0,029767
KO8 <- KO	0,894673	0,892461	0,027796	32,187596	0,027796
KP1 <- KP	0,836606	0,830230	0,033761	24,779879	0,033761
KP2 <- KP	0,832661	0,824419	0,033843	24,603843	0,033843
KP3 <- KP	0,878658	0,872782	0,024610	35,702779	0,024610
KP4 <- KP	0,884821	0,876852	0,027376	32,320869	0,027376
KP5 <- KP	0,904212	0,903088	0,022901	39,483536	0,022901

KP6 <- KP	0,855967	0,847827	0,025746	33,246063	0,025746
KP7 <- KP	0,866560	0,858644	0,032277	26,847455	0,032277
KPI1 -> KPI	0,825471	0,809358	0,048718	16,943868	0,048718
KPI2 -> KPI	0,911177	0,905814	0,026145	34,851252	0,026145
KPI3 -> KPI	0,913125	0,908183	0,027651	33,023345	0,027651
KPI4 -> KPI	0,848462	0,845323	0,049649	17,089361	0,049649
KPI5 -> KPI	0,880208	0,872596	0,039690	22,176966	0,039690
PP1 <- PP	0,876064	0,868939	0,032602	26,871605	0,032602
PP2 <- PP	0,887359	0,889399	0,019152	46,333372	0,019152
PP3 <- PP	0,915572	0,914470	0,021664	42,262487	0,021664
PP4 <- PP	0,864999	0,858546	0,038082	22,714080	0,038082
PP5 <- PP	0,893683	0,889247	0,026835	33,302635	0,026835

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STERR))	Standard Error (STERR)
AI1 <- AI	0,185966	0,186841	0,007709	24,124413	0,007709
AI2 <- AI	0,172718	0,172278	0,008872	19,467348	0,008872
AI3 <- AI	0,203326	0,204057	0,006768	30,041749	0,006768
AI4 <- AI	0,196624	0,197982	0,008745	22,483572	0,008745
AI5 <- AI	0,204525	0,205658	0,008137	25,133758	0,008137
AI6 <- AI	0,198953	0,200481	0,006927	28,721056	0,006927
BEO1 <- BEO	0,202735	0,200957	0,020759	9,766198	0,020759
BEO2 <- BEO	0,269867	0,268540	0,022442	12,024867	0,022442
BEO3 <- BEO	0,223398	0,224719	0,022935	9,740553	0,022935
BEO4 <- BEO	0,293706	0,296897	0,024212	12,130837	0,024212
BEO5 <- BEO	0,218794	0,220534	0,019176	11,410020	0,019176
KD1 <- KD	0,264515	0,262506	0,019350	13,670188	0,019350
KD2 <- KD	0,296006	0,299711	0,014655	20,198586	0,014655
KD3 <- KD	0,276782	0,279349	0,012807	21,611267	0,012807
KD4 <- KD	0,276570	0,276366	0,016586	16,674523	0,016586
KK1 <- KK	0,128979	0,129201	0,006245	20,654301	0,006245
KK2 <- KK	0,121862	0,122327	0,005564	21,901951	0,005564
KK3 <- KK	0,133305	0,134342	0,005463	24,401318	0,005463
KK4 <- KK	0,133207	0,134175	0,005452	24,434177	0,005452
KK5 <- KK	0,136313	0,137114	0,005148	26,478823	0,005148
KK6 <- KK	0,131818	0,131734	0,006919	19,051511	0,006919
KK7 <- KK	0,134100	0,134109	0,006234	21,510403	0,006234
KK8 <- KK	0,126988	0,126983	0,005243	24,221344	0,005243
KK9 <- KK	0,123797	0,124320	0,004964	24,938285	0,004964
KO1 <- KO	0,134702	0,134778	0,008875	15,177313	0,008875
KO2 <- KO	0,152680	0,153335	0,008972	17,016941	0,008972
KO3 <- KO	0,136548	0,137528	0,010555	12,936851	0,010555
KO4 <- KO	0,154499	0,155405	0,010701	14,437791	0,010701
KO5 <- KO	0,142161	0,140645	0,009486	14,986643	0,009486
KO6 <- KO	0,149669	0,150595	0,010499	14,255412	0,010499
KO7 <- KO	0,148984	0,148930	0,009145	16,291406	0,009145
KO8 <- KO	0,159242	0,161131	0,009141	17,420113	0,009141
KP1 <- KP	0,163558	0,164395	0,009523	17,175765	0,009523
KP2 <- KP	0,159712	0,160665	0,008053	19,833277	0,008053
KP3 <- KP	0,178897	0,182389	0,009436	18,959901	0,009436
KP4 <- KP	0,168519	0,168847	0,008040	20,959736	0,008040
KP5 <- KP	0,167415	0,170405	0,008964	18,675583	0,008964



KP6 <- KP	0,162644	0,162283	0,007262	22,396384	0,007262
KP7 <- KP	0,153809	0,154024	0,008494	18,107341	0,008494
KPI1 -> KPI	0,209230	0,196561	0,060380	3,465242	0,060380
KPI2 -> KPI	0,342172	0,333345	0,078250	4,372804	0,078250
KPI3 -> KPI	0,252585	0,262035	0,067498	3,742085	0,067498
KPI4 -> KPI	0,178119	0,202018	0,069149	2,575866	0,069149
KPI5 -> KPI	0,151941	0,140702	0,069941	2,172413	0,069941
PP1 <- PP	0,209840	0,207245	0,014528	14,443845	0,014528
PP2 <- PP	0,242444	0,247400	0,014725	16,464582	0,014725
PP3 <- PP	0,223700	0,224735	0,007328	30,524932	0,007328
PP4 <- PP	0,227780	0,228940	0,012281	18,547156	0,012281
PP5 <- PP	0,222886	0,222612	0,009923	22,461722	0,009923

Tabel 23. Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
AI	0,928297
BEO	0,878418
KD	0,919168
KK	0,953454
KO	0,943944
KP	0,944269
KPI	
PP	0,932681

Tabel 24. Composite Reliability

	Composite Reliability
AI	0,944006
BEO	0,911781
KD	0,943011
KK	0,960359
KO	0,953377
KP	0,954492
KPI	
PP	0,948926

Tabel 25. Cross Loadings (Discriminant Validity)

	AI	BEO	KD	KK	KO	KP	KPI	PP
AI1	0,829988	-0,568484	-0,497787	0,753485	-0,623183	-0,639530	-0,725608	-0,598757
AI2	0,768661	-0,449090	-0,442156	0,699808	-0,537619	-0,627515	-0,706501	-0,583551
AI3	0,885546	-0,677239	-0,480234	0,823822	-0,633141	-0,663962	-0,787129	-0,661075
AI4	0,861289	-0,590610	-0,493430	0,796670	-0,658142	-0,681250	-0,750951	-0,660051
AI5	0,908160	-0,639629	-0,532019	0,828681	-0,705827	-0,688158	-0,775516	-0,650635
AI6	0,893388	-0,589247	-0,499107	0,806105	-0,680652	-0,619536	-0,756784	-0,625582
BEO1	-0,481015	0,715942	0,352631	-0,503678	0,401755	0,494522	0,451631	0,449142
BEO2	-0,621111	0,864990	0,505821	-0,670464	0,471910	0,612154	0,672349	0,548226
BEO3	-0,509034	0,807618	0,511062	-0,555016	0,435919	0,501169	0,456069	0,461816
BEO4	-0,670444	0,897344	0,540069	-0,729689	0,623244	0,666776	0,681271	0,640094
BEO5	-0,500009	0,811016	0,436201	-0,543576	0,441299	0,476984	0,462968	0,380263
KD1	-0,487567	0,540857	0,851039	-0,569653	0,449806	0,623429	0,486372	0,321204
KD2	-0,561317	0,544704	0,909154	-0,637470	0,477920	0,638180	0,555400	0,348741
KD3	-0,497092	0,510058	0,924843	-0,596070	0,444211	0,573974	0,509987	0,344238
KD4	-0,502610	0,472756	0,903183	-0,595614	0,435218	0,597677	0,499581	0,315564
KK1	0,748182	-0,622907	-0,581840	0,827396	-0,678135	-0,739334	-0,775378	-0,714892
KK2	0,762045	-0,666161	-0,591418	0,811328	-0,569908	-0,660141	-0,687735	-0,651867
KK3	0,771309	-0,669322	-0,642803	0,881135	-0,716517	-0,775410	-0,804464	-0,690352
KK4	0,793599	-0,579347	-0,681155	0,867038	-0,736338	-0,728720	-0,803618	-0,670241
KK5	0,832178	-0,603285	-0,508151	0,897950	-0,774438	-0,735450	-0,849046	-0,751844
KK6	0,823262	-0,684106	-0,538865	0,866860	-0,725945	-0,742473	-0,777457	-0,672712
KK7	0,793046	-0,637692	-0,518334	0,852449	-0,743995	-0,736175	-0,804737	-0,783936
KK8	0,743352	-0,702420	-0,613554	0,852002	-0,628726	-0,722732	-0,760776	-0,676485
KK9	0,762576	-0,526973	-0,467083	0,826181	-0,678163	-0,638053	-0,776651	-0,703911
KO1	-0,594701	0,420853	0,380760	-0,630701	0,826361	0,471937	0,591149	0,631828
KO2	-0,681123	0,507269	0,402193	-0,714880	0,824901	0,578793	0,661029	0,664359
KO3	-0,609644	0,442604	0,354585	-0,639346	0,809021	0,522925	0,565801	0,597539
KO4	-0,677517	0,541107	0,474830	-0,723397	0,898187	0,648120	0,646529	0,625166
KO5	-0,570408	0,476733	0,446665	-0,665627	0,861381	0,493091	0,602948	0,599684
KO6	-0,624174	0,559185	0,477318	-0,700780	0,832177	0,610546	0,666462	0,614085
KO7	-0,636473	0,558026	0,373346	-0,697575	0,832483	0,595508	0,671885	0,606603
KO8	-0,661312	0,458490	0,494404	-0,745606	0,894673	0,623134	0,694079	0,626098
KP1	-0,624616	0,601816	0,591848	-0,723371	0,516055	0,836606	0,663252	0,520628
KP2	-0,683419	0,523537	0,516549	-0,706361	0,623132	0,832661	0,689972	0,550655
KP3	-0,691830	0,651897	0,614757	-0,791209	0,614412	0,878658	0,710244	0,621209
KP4	-0,677849	0,557372	0,613119	-0,745311	0,574109	0,884821	0,703834	0,493767
KP5	-0,668933	0,596093	0,538444	-0,740426	0,592674	0,904212	0,678545	0,539425
KP6	-0,649776	0,614636	0,592413	-0,719328	0,609769	0,855967	0,651318	0,520344
KP7	-0,606528	0,554294	0,642866	-0,680253	0,545601	0,866560	0,644109	0,508258
KPI1	-0,706956	0,586696	0,524683	-0,756952	0,588116	0,657346	0,825471	0,671299
KPI2	-0,798940	0,579310	0,471472	-0,835545	0,721854	0,712326	0,911177	0,764879
KPI3	-0,822735	0,626690	0,523582	-0,837331	0,688011	0,736752	0,913125	0,722511
KPI4	-0,734628	0,551829	0,478048	-0,778035	0,615010	0,635581	0,848462	0,669229
KPI5	-0,749554	0,649714	0,552033	-0,807147	0,660901	0,673770	0,880208	0,725630
PP1	-0,590149	0,520958	0,326484	-0,678220	0,600657	0,558631	0,654801	0,876064

PP2	-0,703387	0,590090	0,407658	-0,783597	0,665070	0,627874	0,766081	0,887359
PP3	-0,638567	0,551415	0,276670	-0,723014	0,653546	0,492976	0,728820	0,915572
PP4	-0,680046	0,496649	0,377511	-0,736201	0,684339	0,515615	0,722868	0,864999
PP5	-0,635976	0,558640	0,249109	-0,720383	0,639786	0,553564	0,732659	0,893683

AVE

	AVE	AKAR AVE
AI	0,738105	0,859
BEO	0,675200	0,821
KD	0,805476	0,987
KK	0,729323	0,853
KO	0,719069	0,847
KP	0,749913	0,865
KPI		
PP	0,788012	0,887

Latent Variable Correlations

	AI	BEO	KD	KK	KO	KP	KPI	PP
AI	1,000000							
BEO	-0,685166	1,000000						
KD	-0,571714	0,576225	1,000000					
KK	0,915004	-0,740284	-0,669087	1,000000				
KO	-0,746665	0,585790	0,503765	-0,815341	1,000000			
KP	-0,760269	0,677615	0,677976	-0,843854	0,672908	1,000000		
KPI	-0,873840	0,676279	0,572378	-0,916995	0,753793	0,782949	1,000000	
PP	-0,733867	0,613373	0,370747	-0,822289	0,731960	0,620554	0,814126	1,000000

Tabel 26. Pengujian Model Struktural (Inner Model)

R Square

	R Square
AI	
BEO	
KD	
KK	0,949135
KO	
KP	
KPI	
PP	

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
AI -> KK	0,315390	0,306772	0,054750	0,054750	5,760586
BEO -> KK	-0,038850	-0,041065	0,049066	0,049066	0,791788
KD -> KK	-0,134525	-0,138592	0,038937	0,038937	3,454972
KO -> KK	-0,108364	-0,116962	0,047397	0,047397	2,286280
KP -> KK	-0,154261	-0,149184	0,045213	0,045213	3,411900
KPI -> KK	-0,169513	-0,191084	0,079420	0,079420	2,134384
PP -> KK	-0,204080	-0,178763	0,072602	0,072602	2,810955

Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Kasus di Pemerintah Kota Surakarta)

TITIK SETYANINGSIH*

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract: *Government Accounting Standard (Government Regulation No. 71 year 2010) used full accrual accounting and should be well implemented at 2014. Government employee and parliament have to understand it. The present study aims at providing local government employee and local parliament's understandability to accrual system based on Government Regulation No. 71 year 2010.*

This study used Case Study Research (CSR) approach. A single case study approach was chosen because data from one government Surakarta was enough to achieve the research objective. The research objective was to find out problems of implementation Government Accounting Standard. Therefore, descriptive practice-oriented research was conducted. Data were gathered through questionnaire and semi-structured interview with officials and parliament in local government Surakarta.

The finding shows that level of understandability to accrual system based on Government Accounting Standards 2010 both local government's employee and local parliament, is still low. Understandability is associated with commitment, legal action, and available budget for training and socialization.

The limitation of this study is data collection from other user of local government reporting could not be conducted. In addition, this study is not supported real observation about participant's activities.

However, this study raises two interesting problems to think about implementation of Government Accounting Standards 2010: simplification in accounting language and active role of college. Thereby, the Government Accounting Standards 2010 could be well implemented.

Keywords: *Government Accounting Standard, Accrual Accounting, Local Government, Parliament, Descriptive Practice-Oriented Research.*

* Author can be contacted at: titiks_dream@yahoo.co.id

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah telah disempurnakan dengan PP No 71 Tahun 2010. Secara konseptual kebijakan tersebut diambil dalam kerangka proses penguatan *public sector governance* di Indonesia. Standar tersebut tidak berdiri sendiri tetapi juga disokong oleh peraturan lain seperti Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan Negara.

Perubahan yang sangat mendasar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru dibandingkan dengan SAP (2005) adalah diterapkannya SAP *full accrual basis* yakni mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Pemerintah, melalui implementasi standar akuntansi berbasis akrual, kualitas penyajian informasi keuangan organisasi pemerintah dapat ditingkatkan. Kualitas laporan keuangan yang baik bermanfaat untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang disediakan, manajemen dan pengendalian aset negara, perencanaan, penyusunan program dan anggaran. Informasi keuangan sektor publik yang berkualitas akan mengurangi kesenjangan informasi (*information asymmetric*) antara pemerintah dengan masyarakat dan *stakeholder* lain atas penggunaan dan alokasi keuangan negara. Standar akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan relevansi, netralitas, ketepatan waktu, kelengkapan dan komparabilitas laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola sektor publik yang lebih baik (Halim dan Kusufi, 2012).

Terdapat pandangan yang skeptis atas penerapan standar akuntansi berbasis akrual berdasar amanat PP No 71 Tahun 2010 yang paling lambat harus diterapkan tahun 2014 oleh seluruh entitas pelaporan, yaitu bagaimana pemerintah daerah menyikapi dan menyiapkan diri untuk melaksanakan SAP tersebut. Pelaksanaan SAP sebelumnya (PP 24 Tahun 2005) selama kurun waktu 2005-2009, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini terlihat dari sangat sedikitnya laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada semester kedua tahun 2010 BPK memeriksa 499 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009 dan memberikan opini WTP atas 15 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 330 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 48 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 106 entitas (www.ksap.org/berita).

Beberapa kendala yang menyebabkan pertanggungjawaban keuangan yang diwujudkan dalam LKPD dinyatakan kurang wajar yaitu kurangnya komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, lemahnya organisasi pengelola keuangan daerah, dan masalah disiplin anggaran. Dalam kondisi penerapan SAP 2005 (basis kas menuju akrual) belum dapat berjalan baik, akuntansi berbasis akrual harus mulai dilaksanakan sejak pertanggungjawaban APBN/APBD tahun 2010 (Rasono, 2011).

Reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia bermula dari upaya pemerintah Indonesia sendiri. Standar akuntansi pemerintahan didukung oleh pemerintah melalui Departemen Keuangan. Respon masyarakat dan partisipasi anggota dewan atas draf standar yang diedarkan minim (Harun, 2009). Oleh karena itu kajian untuk mengetahui respon pemahaman staf pemerintah, parlemen, dan pihak-pihak lain akan manfaat akuntansi akrual

terhadap fungsinya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan masih diperlukan (Yamamoto dalam Harun 2009).

Perlu disadari bahwa jika dalam kenyataannya anggota DPR/DPRD menunjukkan adanya tingkat kualitas dan kemampuan yang berkebalikan dengan kualifikasi ideal sebagai anggota legislatif, maka kemungkinan yang terjadi adalah adanya dominasi oleh pemerintah daerah karena ketidakmampuan memahami dan memainkan perannya sebagaimana mestinya (Murni, 2004). Jika hal ini terjadi, maka anggota DPR/DPRD tidak dapat lagi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah secara efektif.

Menurut PP 71 Tahun 2010 pelaporan keuangan menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran serta indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD. Kedua indikasi tersebut erat kaitannya dengan fungsi serta tugas dan wewenang anggota DPRD. Anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan yang optimal atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah jika anggota DPRD meningkatkan pemahaman mereka mengenai informasi keuangan yang disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (Harun, 2009).

Di Indonesia studi akuntansi sektor publik telah dilakukan oleh beberapa peneliti (Soepomo dalam Harun (2008), Robinson dan Harun 2005, Marwata dan Alam 2006, Harun 2007, Harun 2008, Wijaya 2010). Namun dari beberapa penelitian, hanya Harun (2008) yang mengevaluasi kapasitas suatu pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi berbasis kas menuju akrual melalui perspektif partisipan (pemerintah) terhadap isu SAP 2005. Temuan Harun (2008) adalah instansi-instansi pemerintah belum mampu sama sekali mengadopsi SAP 2005 tanpa bekerja sama dengan pihak luar. Selain itu, Harun (2008) juga mengemukakan faktor penghambat SAP 2005 yaitu aspek kerumitan teknis penyusunan

laporan keuangan daerah, kurangnya pengalaman partisipan, dan latar belakang pendidikan staf yang tidak sesuai.

Strategi penerapan basis akrual di daerah yang dilakukan pemerintah adalah dengan sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang dari pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan *skill* pelaksana, membangun *awareness*, dan mengajak keterlibatan semua pihak. (medinamultimitra.com).

Penelitian ini merupakan studi awal yang mengeksplorasi tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini berusaha melibatkan peran anggota dewan dengan mengkaji respon pemahaman anggota dewan terhadap SAP 2010 yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Selain sebagai bahan masukan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyerap input berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi basis akrual, penelitian ini juga penting dilakukan karena proses penerapan basis akrual secara penuh di Indonesia dapat berjalan lebih cepat jika usaha pemerintah daerah didukung oleh salah satu pengguna yaitu anggota DPRD. Harapannya adalah penerapan basis akrual secara penuh di Indonesia dapat memenuhi target waktu yang ditetapkan yaitu minimal pada tahun 2014.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD terhadap standar akuntansi berbasis akrual.

II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berpikir

2.1 Reformasi Sektor Publik

Reformasi sektor publik ditandai dengan kehadiran *New Public Management (NPM)*. *NPM* mengadopsi teknik pengelolaan sektor swasta ke dalam sektor publik (Christiaens, J., Reyniers, B., dan Rolle, C 2010; Lapsley, I., Mussari, R., dan Paulsson, G. 2009; Hood, 1995). Carnegie dan West (2005) menyatakan adopsi model keuangan sektor swasta ke dalam sektor publik dimotivasi oleh adanya akuntabilitas pada sektor tersebut. Barton (2009) memandang perlunya suatu bentuk pemerintahan yang lebih ramping (*Small Government*) melalui privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah, aktivitas *outsourcing*, dan membatasi manfaat kesejahteraan (*Curtailing Welfare Benefits*). *Small Government* perlu bekerja seperti layaknya dunia bisnis (swasta) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Christensen (2002) menyatakan bahwa hal yang paling relevan dari pembaharuan sektor publik di *New South Wales (NSW)* adalah peningkatan akuntabilitas, perampingan organisasi sektor publik dari sisi fungsional, pengendalian aset, serta penekanan pada produktivitas dan ekonomi. Menurut Carlin (2005) harapan reformasi sektor publik adalah peningkatan pelayanan kepada warga negara melalui perolehan barang publik dengan harga yang sangat terjangkau.

Darrin dan Lewis (2005) memandang perlunya evaluasi *economic cost and benefits* yang disebut dengan istilah *Value For Money (VFM)*. Konsep *VFM* dalam akuntansi menjadi komponen yang menentukan apakah proyek akan dilaksanakan atau tidak (Khadaroo 2007). Akuntabilitas publik digunakan untuk menjelaskan kepada siapa akun-akun akan dipertanggungjawabkan (Istemi dan Khadaroo 2008).

Di Indonesia, pengalaman reformasi sektor publik meliputi desentralisasi fungsi-fungsi ekonomi dan politik pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan pelayanan publik, restrukturisasi perusahaan-perusahaan milik

negara hingga pembenahan sistem akuntansi pemerintahan. Hal terakhir dilakukan dengan pengklasifikasian catatan aset negara, perbaikan sistem anggaran, serta pertanggungjawaban pembelanjaan negara mengikuti praktik akuntansi dunia usaha (Harun, 2009).

2.2 Sistem Akuntansi Akrua

Menurut Guthrie (1998) definisi sistem akuntansi akrual adalah suatu metode pencatatan transaksi atas peristiwa dan pengakuan biaya (beban) berdasarkan periode terjadinya peristiwa atau transaksi tersebut, sedangkan metode *single entry* atau *cash basis*, pencatatan dan pengakuan peristiwa atau kejadian dilakukan saat pembayaran. Sistem akrual mencatat biaya depresiasi suatu aset dibebankan ke periode waktu selama suatu aset tersebut digunakan berdasarkan biaya harga pembelian aset. Sistem akuntansi berbasis kas mencatat biaya pengadaan aset tersebut dibebankan ke periode saat dilakukan pembayaran atas harga aset.

Isu tentang pentingnya waktu (*timing*) dalam pengakuan (*recognition*) suatu transaksi atau peristiwa ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam sistem akrual. Adopsi akuntansi akrual mengarahkan pelaksanaan program dan aktifitas suatu agen sektor publik untuk senantiasa mempertimbangkan prinsip dan pengukuran transaksi, peristiwa serta kinerja aktifitas organisasi pemerintah berdasarkan substansi operasional daripada fokus pada kapan dan berapa penerimaan dan pembelanjaan kas yang dilakukan pemerintah.

Angka-angka akuntansi berdasarkan sistem akrual dianggap lebih informatif bagi pimpinan sektor publik dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki, peningkatan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Situasi seperti ini mendorong aspek relevansi, netralitas, ketepatan waktu, kelengkapan dan komparabilitas kinerja keuangan suatu agen sektor publik menjadi perhatian para pimpinan organisasi pemerintah (Halim dan Kusufi, 2012).

Di sektor publik Australia, penerapan sistem akrual dilakukan dengan desentralisasi tanggungjawab pada level paling bawah sebuah organisasi pemerintahan, penempatan seorang manager yang akuntabel, reklasifikasi sektor publik sebagai bisnis komersial, dan redefinisi warga menjadi pelanggan (Parker dan Guthrie, 1993). Menurut Carlin (2005) akuntansi akrual sektor publik dapat menerapkan “*full cost*” untuk seluruh aktivitas, mewujudkan efisiensi, mengalokasikan sumber daya yang tepat sasaran, serta meningkatkan kinerja.

Sektor publik Italia mengalami perubahan sistem akuntansi dari tradisional (berbasis *cash and obligations*) ke adopsi *accrual accounting*. Perubahan ini mereformasi akuntansi sektor publik menjadi lebih transparan dalam penggunaan sumber daya milik publik, fokus pada kasus skandal keuangan dan korupsi serta meningkatkan akuntabilitas (Caccia dan Steccolini 2006).

Perubahan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia dilakukan sejak kehadiran SAP PP No 24 Tahun 2005. SAP 2005 ini mengubah penggunaan sistem pencatatan tunggal (*single entry*) dengan dasar pencatatan atas *cash basis*, menjadi sistem ganda (*double entry*) dengan dasar pencatatan atas kas modifikasian (*modified cash basis*) yang mengarah pada basis akrual. Pada tahun 2010 KSAP telah menerbitkan SAP berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP No 71 Tahun 2010. Menurut PP No 71 Tahun 2010 basis kas digunakan untuk menyusun pelaporan pelaksanaan anggaran (LRA dan laporan perubahan SAL) dan basis akrual digunakan untuk menyusun pelaporan finansial (neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas). Tabel 1 menyajikan perbandingan isi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan berdasarkan PP No 24 Tahun 2005 dan PP No 71 Tahun 2010.

2.3 Anggota DPRD sebagai Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP 71 tahun 2010 terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yaitu masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan pemerintah. Menurut Steward dalam Harun (2009), ada tiga faktor yang menyebabkan laporan suatu pemerintahan dapat efektif berfungsi sebagai akuntabilitas sektor publik: (1) laporan tersebut disajikan sederhana tanpa mengurangi makna kelengkapan dan keakuratan suatu informasi, (2) laporan harus berdasarkan standar akuntansi yang diterima umum, (3) adanya kegairahan masyarakat, minimal melalui wakil-wakilnya di DPR/DPRD membaca, memahami, menanyakan hal-hal penting yang membutuhkan klarifikasi dan jawaban dari pihak pemerintah.

Anggota DPRD perlu mendorong pemerintah daerah menyediakan laporan keuangan yang bermutu dalam arti dapat dipahami, transparan, serta menyajikan keadaan yang sebenarnya. Anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan yang optimal atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah jika anggota DPRD meningkatkan pemahaman mereka mengenai informasi keuangan yang disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (Harun, 2009).

2.4 Penelitian Terdahulu

Soepomo dalam Harun (2008) menyatakan ada tiga kendala yang dihadapi dalam reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia: sistem hukum, terlalu besarnya wilayah cakupan pemerintahan Indonesia, serta masih kurangnya staf pemerintahan yang cakap. Marwata dan Alam (2006) mengemukakan bahwa lingkungan institusional akuntansi sektor publik Indonesia sangat kompleks dan birokrasi memegang kekuasaan tertinggi yang

mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, akibatnya perubahan kebijakan akuntansi tidak dapat dijelaskan dengan model keputusan yang rasional.

Studi yang dilakukan Robinson dan Harun (2005), menemukan masalah reformasi akuntansi akrual di Indonesia yaitu masalah hukum, staf pemerintah yang kurang berkualitas, dan belum adanya lembaga independen yang menyusun standar akuntansi sektor publik. Menurut Harun (2007) sulitnya penerapan akuntansi akrual di Indonesia disebabkan oleh pengembangan sistem akuntansi pemerintahan yang masih bersifat sentralistis serta sistem pencatatan dan inventarisasi aset pemerintah sebagai dasar penyusunan neraca awal masih jauh dari memadai.

Temuan Harun (2008) adalah instansi pemerintah belum mampu sama sekali mengadopsi SAP 2005 tanpa bekerja sama dengan pihak luar. Selain itu, Harun (2008) juga mengemukakan faktor penghambat SAP 2005: aspek kerumitan teknis penyusunan laporan keuangan daerah, kurangnya pengalaman partisipan, dan latar belakang pendidikan staf yang tidak sesuai.

Wijaya (2010) menyatakan bahwa pengenalan akuntansi akrual di Indonesia belum sepenuhnya dipahami karena adanya kelemahan SAP 2005. Meskipun SAP tersebut sudah diperbaharui dengan SAP 2010, usaha investigasi yang lebih mendalam tentang implementasi akuntansi akrual di Indonesia tetap diperlukan.

Berbagai penelitian di atas ternyata belum sepenuhnya memberikan solusi penerapan basis akrual yang efektif di Indonesia. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan pelatihan agar penerapan basis akrual secara penuh bisa dilakukan pada tahun 2014, namun langkah pemerintah belum cukup jika hanya bertumpu pada usaha pemerintah daerah sendiri. Oleh sebab itu, usaha pemerintah ini harus didukung oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama pihak pengguna laporan keuangan daerah, salah satunya adalah anggota dewan.

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 1 menjelaskan SAP 2010 merupakan standar yang berlaku untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). SAP ini harus dipahami oleh aparatur pemerintah daerah karena tingkat pemahaman SAP 2010 oleh aparatur pemerintah daerah akan berkontribusi menghasilkan LKPD yang berkualitas dan relevan untuk pengambilan keputusan. Pemahaman anggota DPRD terhadap SAP berkontribusi mendorong entitas pelaporan (pemerintah daerah) menyediakan LKPD yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan yang optimal atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah jika anggota DPRD meningkatkan pemahaman mereka mengenai informasi keuangan yang disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

III. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada usaha memahami bagaimana sesuatu terjadi. Menurut Sekaran (2010) kelebihan metode kualitatif adalah kemampuan menganalisa lingkungan secara natural. Metode ini digunakan supaya peneliti memahami bagaimana pemerintah daerah menyiapkan diri dalam implementasi SAP 2010, dan bagaimana proses ini didukung oleh anggota DPRD.

Cresswell (2010) menjelaskan ada lima tipe penelitian kualitatif yaitu studi fenomenologi, studi etnografi, *grounded theory qualitative research*, studi biografi, dan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan salah satu tipe penelitian kualitatif yang berbeda dengan tipe penelitian yang lain dalam hal analisis yang intensif atas kasus yang diteliti dan penjelasan suatu unit atau sistem yang dibatasi ruang dan waktu.

Studi kasus dipilih dalam penelitian ini dengan maksud hasil studi dapat mempengaruhi kebijakan penerapan SAP 2010 yang saat ini sedang berjalan. Penelitian ini bersifat *single case* karena data yang diperoleh berasal dari satu pemerintahan Kota Surakarta. Data tersebut telah cukup untuk menjawab tujuan penelitian.

Bukti studi kasus diperoleh dari berbagai sumber yaitu dokumen, catatan, kuesioner, wawancara, observasi, *physical artifacts* yang merupakan karakteristik studi kasus (Gillham, 2000). Bukti yang dimaksud dalam studi kasus diabstraksi dan digabung untuk memberikan jawaban yang memungkinkan atas perumusan masalah (Hancock dan Bob, 2006).

3.2 Tujuan Penelitian (*Research Objective*)

Menurut Dul dan Tony (2008) terdapat 2 (dua) jenis penelitian: *theory-oriented research* dan *practice-oriented research*. *Theory-oriented research* bertujuan memberi kontribusi pada perkembangan teori, sedangkan *practice-oriented research* bertujuan memberi kontribusi pengetahuan pada praktisi untuk mencari solusi atau mengklarifikasi masalah yang teridentifikasi secara praktis. Dul dan Tony (2008) menyatakan bahwa *theory-oriented research* dibagi menjadi 2 (dua) tujuan: mencari bukti empiris untuk menformulasikan proposisi baru (*theory-building research*) dan menguji proposisi (*theory-testing research*). *Practice-oriented research* dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian. Pertama, jika praktisi dapat dengan tepat menemukan hubungan antar aspek praktis maka dapat dibangun suatu hipotesis; penelitian untuk maksud tersebut merupakan *hypothesis building practice-oriented research*. Kedua, jika hipotesis tersedia dan diasumsikan dengan hasil percobaan bahwa hasil pengujian hipotesis dapat menyediakan temuan bagi praktisi untuk pengambilan keputusan; penelitian untuk maksud itu disebut *hypothesis-testing practice-oriented research*. Ketiga, apabila suatu penelitian tidak ada hipotesis yang perlu

dicari maupun diuji, maka penelitian semacam ini disebut *descriptive practice-oriented research* (Dul dan Tony, 2008).

Penelitian ini adalah riset berorientasi praktik (*practice-oriented research*) karena bertujuan memberi kontribusi pengalaman untuk mencari solusi atau mengklarifikasi masalah penerapan SAP 2010 melalui pemahaman SAP 2010 oleh aparatur pemerintah Kota Surakarta dan anggota DPRD Kota Surakarta. Penelitian dilakukan tanpa perlu menemukan dan menguji hipotesis, dengan pertimbangan penentuan hipotesis akan membatasi penelitian, padahal penulis bermaksud mengeksplorasi pemahaman dan kendala penerapan SAP 2010.

3.3 Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Aparatur pemerintah kota Surakarta yang bertanggungjawab dalam bidang penyusunan laporan keuangan di dinas pemerintahan kota Surakarta menjadi partisipan penelitian untuk memperoleh data tingkat pemahaman aparatur pemerintah kota Surakarta terhadap standar akuntansi berbasis akrual (SAP 2010). Pemahaman anggota DPRD kota Surakarta terhadap standar akuntansi berbasis akrual diperoleh dengan melibatkan anggota DPRD komisi III dan anggota badan anggaran.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara langsung (semi-terstruktur). Wawancara langsung dilakukan untuk mengurangi kekurangpahaman partisipan atas pertanyaan yang disiapkan. Data tambahan juga didapatkan dari dokumen pendukung.

Modifikasi desain kuesioner yang dilakukan penulis berdasarkan penelitian Harun (2008) didasarkan pernyataan SAP 2010 yang terdiri dari pemahaman umum, pemahaman struktur, pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan SAP tersebut. Pemahaman struktur SAP 2010 diturunkan dari kerangka konseptual SAP 2010 meliputi penyajian informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan entitas pelaporan. Tahap pelaksanaan dan faktor penghambat pelaksanaan SAP 2010 masih mengacu Harun (2008). Penelitian ini

berusaha melibatkan peran anggota DPRD kota Surakarta yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, oleh karena itu kuesioner diturunkan dari kerangka konseptual SAP 2010.

Skala Likert digunakan untuk menunjukkan 1 (sangat setuju), 2 (setuju), 4 (tidak setuju) dan 5 (sangat tidak setuju). Skala 3 (netral atau tidak menjawab) dihilangkan untuk menghindari bias penelitian.

3.4 Analisis Data

Data ditabulasi dan dianalisis dengan *general descriptive analysis*. Analisis data seperti ini pernah dilakukan oleh Harun (2008). Hasil kuesioner dinyatakan dalam *score* (*quantitative data*). Interpretasi atas *score* untuk menjawab rumusan masalah didasarkan catatan pernyataan partisipan melalui wawancara semi-terstruktur (*qualitative data*).

Data kualitatif dianalisis dengan mereduksi data: mengkode dan mengkategorikan data (Sekaran:2010). Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan dan menelusur tema (Prastowo, 2012). Pernyataan partisipan yang diperoleh dari wawancara semi-terstruktur direduksi dengan menggolongkan dalam suatu tema tertentu. Pernyataan partisipan tentang SAP 2010 digolongkan dalam tema pemahaman umum, pemahaman struktur, pelaksanaan dan faktor penghambat pelaksanaan SAP 2010. Reduksi data semacam ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3.5 Keabsahan dan Keandalan Data (*Validity and Reliability*)

Keabsahan data (*Validity*) adalah proses bagaimana mengukur apa yang ingin kita ukur. Keandalan data (*Reliability*) adalah bagaimana hasil penelitian jika dilakukan oleh peneliti lain memberikan hasil yang sama (Sekaran, 2010). Keabsahan dan keandalan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data kuantitatif yang berasal dari kuesioner dengan data kualitatif yang berasal dari wawancara semi-terstruktur (pernyataan partisipan).
2. Membandingkan data dengan dokumen pendukung yang ditemukan selama melakukan penelitian.
3. Mengkaitkan teori untuk menginterpretasi dan menjelaskan data.
4. Mengkaitkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang relevan untuk menginterpretasi dan menjelaskan data.

IV. Temuan

4.3.1 Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta terhadap SAP

Tingkat pemahaman aparatur pemerintah kota Surakarta terhadap SAP ditunjukkan pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan 75% aparatur yang mewakili masing-masing instansi belum memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan SAP 2010. Para partisipan dalam jumlah yang hampir sama, tidak mengerti struktur informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Informasi tersebut konsisten dengan jawaban mereka dalam hal kemampuan analisis yang sangat rendah atas unsur laporan keuangan (33%). Hasil ini didukung dengan wawancara berikut:

“Sepengetahuan Saya, basis akrual hanya cocok untuk diterapkan dalam perusahaan komersial, mengapa hal ini seolah dipaksakan dalam akuntansi pemerintahan? yang penting dalam pekerjaan Saya adalah kemampuan untuk bisa

mempertanggungjawabkan anggaran untuk kemudian membuat pelaporan yang diminta atasan; dan yang terpenting lagi adalah Saya tidak menggunakan uang negara.” P6

Namun hal yang menarik dalam laporan ini adalah mereka paham sepenuhnya konsekuensi yang mereka hadapi jika tidak menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP.

Berdasarkan tabel 2, sebanyak 12 partisipan aparatur pemerintah kota Surakarta, 9 orang (75%) diantara mereka belum memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan SAP 2010, ini berarti hanya 3 partisipan yang memiliki pengetahuan memadai tentang SAP. Partisipan P6 bahkan menyatakan bahwa basis akrual hanya cocok untuk perusahaan (sektor komersial). Menurut partisipan P6 basis akrual seolah dipaksakan dalam akuntansi pemerintahan.

Pemahaman aparatur pemerintah kota Surakarta terhadap struktur SAP 2010 ditunjukkan tabel 3. Tabel 3 menunjukkan struktur SAP 2010 hanya dipahami oleh 4 partisipan (33%). Basis akrual dilaksanakan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas (67%). Hasil ini didukung pernyataan P1 yang mengemukakan bahwa Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan SAP 2010 terutama pada lampiran II yaitu Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual untuk kemudian secara bertahap menuju akrual penuh. Pendapatan dan beban akrual belum bisa dilaksanakan karena belum adanya peraturan walikota yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan. Peraturan Walikota No 17 Tahun 2011 telah menjadikan PP No. 71 tahun 2010 sebagai dasar hukum, tetapi muatan kebijakan akuntansi di dalamnya masih mengacu pada PP No 24 Tahun 2005.

Dokumen Kebijakan Akuntansi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memuat bentuk laporan keuangan pemerintah Kota Surakarta yang dikonversi dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke PP No 24 Tahun 2005. Hal ini mengakibatkan pemahaman SAP 2010

dianggap kurang perlu dipahami karena partisipan tidak mengerti kelebihan SAP 2010 daripada SAP 2005.

Pelaksanaan penerapan standar akuntansi berbasis akrual di instansi pemerintahan kota Surakarta dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan tabel 4 partisipan menyatakan bahwa instansi mereka telah mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri (67%), sehingga tidak perlu bekerjasama dengan pihak luar. Laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu, walaupun SAP 2010 masih memerlukan kerumitan teknis penyusunan (75%). Temuan ini berbeda dengan temuan Harun (2008) yang menyatakan bahwa instansi memerlukan bantuan pihak luar dalam pelaksanaan SAP, tetapi konsisten dengan pernyataan Harun (2008) dalam hal kerumitan teknis penyusunan.

Tabel 5 menunjukkan faktor penghambat pelaksanaan SAP 2010 antara lain fasilitas yang minim dan keterbatasan sumber daya manusia (pendidikan staf yang tidak sesuai dan kurangnya pengalaman). Faktor penghambat pelaksanaan SAP masih konsisten dengan penelitian Harun (2008). Berdasarkan tabel 5 partisipan juga menyatakan kurangnya sosialisasi sistem baru sebagai faktor penghambat pelaksanaan SAP (83%). Ketiadaan anggaran mengakibatkan tidak adanya insentif bagi pelaksanaan SAP yang baik. Partisipan tidak dapat memahami basis akrual hanya dengan satu sampai dua tahap pelatihan melainkan membutuhkan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk mencapai pemahaman SAP 2010 yang lebih komprehensif. Ketersediaan anggaran pelatihan dan sosialisasi dimungkinkan dengan komitmen pimpinan dalam setiap instansi pemerintahan kota Surakarta yang menyadari perlunya memahami SAP 2010 secara pribadi maupun organisasi.

Menurut Belkaoui (2006) teori akuntansi ada dua: teori akuntansi deskriptif (*descriptive accounting theory*) dan teori akuntansi normatif (*normative accounting theory*). Teori akuntansi deskriptif berusaha menjustifikasi apa yang terjadi dengan mengodifikasikan praktik-praktik akuntansi. Sebaliknya, teori akuntansi normatif (*normative accounting theory*)

berusaha menjustifikasi apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang terjadi. Hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini berusaha menjustifikasi praktik akuntansi yang dianggap berguna (*descriptive accounting theory*), dan berusaha menjustifikasi praktik akuntansi yang seharusnya dipergunakan (*normative accounting theory*).

Praktik akuntansi yang dianggap berguna itu adalah pemerintah kota Surakarta melaksanakan SAP 2010 terutama pada lampiran II yaitu Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual untuk kemudian secara bertahap akan melaksanakan basis akrual secara penuh. Praktik akuntansi yang seharusnya digunakan adalah pendapatan dan beban akrual seharusnya bisa diakui dan disajikan di LO dengan memberikan penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan catatan didukung oleh payung hukum peraturan teknis pelaksanaan SAP 2010.

4.2.2 Tingkat Pemahaman Anggota DPRD Kota Surakarta terhadap SAP

Pemahaman SAP 2010 hanya dipahami 20% anggota dewan walaupun mereka memiliki pengetahuan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi tersebut konsisten dengan jawaban mereka dalam hal kemampuan analisis yang sangat rendah atas unsur laporan keuangan (Tabel 6).

Hasil ini didukung dengan pernyataan partisipan D3 yang menyatakan pemahaman SAP 2010 dianggap belum begitu perlu karena secara teknis pelaksanaan SAP 2010 belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta.

Pemahaman anggota DPRD kota Surakarta terhadap struktur isi SAP 2010 seperti disajikan tabel 7. Berdasarkan tabel 7 diperoleh informasi bahwa anggota dewan mayoritas (80%) tidak memahami basis akrual tetapi mereka dapat memahami indikasi bahwa sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran. Hasil ini sesuai pernyataan D3 yang mengemukakan bahwa pemahaman indikasi ketaatan anggaran dilakukan melalui terserap tidaknya anggaran pemerintah kota Surakarta. Partisipan D5 juga menyatakan bahwa sumber

daya yang digunakan oleh pemerintah kota Surakarta telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pemahaman basis akrual ditujukan pada akun utang, oleh karena itu sinkronisasi anggaran dilimitkan supaya pemerintah kota Surakarta tidak terbebani dengan utang (penerimaan diusahakan sama dengan pengeluaran).

Faktor penghambat pemahaman standar akuntansi berbasis akrual oleh anggota dewan sebagaimana ditunjukkan tabel 8. Anggota dewan mengakui bahwa pendidikan anggota dewan tidak berlatarbelakang akuntansi (70%) dan anggota dewan kurang berpengalaman tentang akuntansi pemerintahan (90%). Hal ini mengakibatkan anggota dewan D4 menyatakan bahasa SAP 2010 dianggap terlalu ‘tinggi’ untuk diterapkan pada level praktis.

Hasil ini mendukung pendapat Steward dalam Harun (2009) yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah sesuai standar yang berlaku seharusnya disajikan sederhana tanpa mengurangi keakuratan dan kelengkapan informasi di dalamnya. Apabila laporan keuangan pemerintah bisa disajikan sederhana berarti laporan tersebut mudah dipahami dari sisi pengguna. Standar yang berlaku untuk menyusun laporan tersebut seharusnya mudah untuk dipahami, oleh sebab itu penyederhanaan bahasa akuntansi dalam standar akuntansi pemerintahan yang berlaku masih diperlukan.

Tabel 8 juga menunjukkan adanya pelatihan akuntansi pemerintahan dan adanya komitmen pimpinan dewan yang mendukung pemahaman SAP. Hasil ini sesuai dengan pernyataan D2 yang menyatakan pimpinan dewan menghendaki komitmen pribadi anggotanya untuk memahami SAP 2010 karena setiap komisi telah diberikan pedoman SAP 2010 sebelum tembusan laporan keuangan pemerintah daerah diterima oleh anggota dewan. Ketidakhahaman anggota dewan disebabkan kurangnya sosialisasi SAP yang berlaku. Partisipan D1 mendukung hal ini dengan mengemukakan adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan anggaran bimbingan teknis standar akuntansi berbasis akrual belum tersedia. Selain itu, pimpinan dewan mengharapkan peran perguruan tinggi untuk menjadi bagian

proses penerapan SAP 2010 ini. Berdasarkan pernyataan partisipan D6 diperoleh informasi bahwa anggota dewan menerima secara terbuka pendekatan *accrual basis*, dengan syarat pendekatan yang dimaksud harus dalam kerangka menciptakan *good governance*, lebih transparan dan memperkecil ruang gerak kolusi, korupsi dan nepotisme.

Menurut Belkaoui (2006) teori dana adalah teori yang memberikan pembatasan terkait dengan penggunaan sumber daya (dana). Penggunaan dana dibatasi dengan adanya komitmen antara pemberi dana dan organisasi yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

Hasil analisis dan pembahasan pemahaman anggota dewan terhadap SAP 2010 ini mendukung teori dana tersebut. Pemahaman SAP 2010 memungkinkan anggota dewan memahami indikasi bahwa sumber daya telah diperoleh dan digunakan oleh pemerintah daerah sesuai batas anggaran yang ditetapkan (komitmen antara legislatif dan eksekutif). Komitmen yang terjadi diaplikasikan dengan pemahaman yang benar tentang fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD serta didukung tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai (termasuk pemahaman SAP 2010).

Pemahaman anggota dewan terhadap SAP menunjukkan kualitas anggota dewan. Penelitian ini mendukung pendapat Murni (2004) yang menyatakan bahwa anggota DPR/DPRD harus dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan yang ideal sebagai anggota, supaya anggota dewan dapat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara efektif.

Temuan penelitian ini juga sesuai dengan amanat UU No 27 tahun 2009 pasal 343 dan 344 yang mengamanatkan bahwa anggota DPR/DPRD harus melakukan fungsi pengawasan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota serta mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban itu adalah LKPD yang disusun sesuai SAP yang berlaku.

V. Kesimpulan, Rekomendasi, dan Keterbatasan

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bersifat eksploratif dan suatu studi kasus tunggal yang berorientasi pada praktik. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris berupa pemahaman aparatur pemerintah Kota Surakarta dan anggota DPRD Kota Surakarta terhadap standar akuntansi berbasis akrual.

Hasil penelitian yang pertama, tingkat pemahaman aparatur pemerintah kota Surakarta terhadap SAP 2010 ternyata masih rendah. Kedua, aparatur pemerintah kota Surakarta telah mampu bekerja secara mandiri dalam melaksanakan SAP ini, namun partisipan menyatakan masih adanya kerumitan teknis penyusunan pelaporan. Ketiga, faktor penghambat pelaksanaan SAP berupa fasilitas yang minim, pendidikan staf yang tidak sesuai, kurangnya pengalaman, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya insentif bagi pelaksanaan SAP yang baik, bermuara pada rendahnya komitmen pimpinan sehingga mengakibatkan kurang dipertimbangkannya anggaran yang cukup untuk pelatihan dan sosialisasi. Keempat, belum adanya payung hukum berupa peraturan walikota yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan SAP 2010.

Pemahaman anggota dewan terhadap SAP 2010 juga masih rendah dikarenakan belum dirasakannya sosialisasi standar akuntansi berbasis akrual, tidak tersedianya anggaran, serta kurangnya komitmen pribadi anggota dewan untuk memahami SAP ini. Hal lain yang perlu dikaji adalah diperlukan peran aktif perguruan tinggi untuk mendukung proses pemahaman SAP 2010.

5.2 Rekomendasi

Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi atas implementasi standar akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar implementasi SAP 2010 dapat terlaksana dengan baik yaitu:

1. diperlukan komitmen pribadi dan organisasi untuk memahami SAP 2010,
2. tersedianya anggaran yang memadai untuk pelatihan dan sosialisasi yang terus berkelanjutan sehingga tercapai pemahaman SAP 2010 yang komprehensif,
3. penyederhanaan bahasa akuntansi SAP 2010 supaya SAP ini mudah dipahami dari sisi penyaji dan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah,
4. payung hukum berupa peraturan pemerintah daerah yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan SAP 2010,
5. proses penerapan SAP 2010 harus dilakukan dalam rangka menciptakan *good governance*, lebih transparan, serta memperkecil ruang gerak korupsi, kolusi dan nepotisme,
6. diharapkan adanya peran aktif perguruan tinggi untuk membantu mempercepat proses penerapan SAP 2010.

5.3 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah yang pertama, data penelitian ini secara empiris diperoleh dari hasil kuesioner yang diikuti dengan wawancara semi-terstruktur dengan partisipan aparatur pemerintah kota Surakarta yang bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan dan anggota DPRD kota Surakarta, namun data atau informasi yang diperoleh belum melibatkan pihak lain yang berkepentingan terutama dari pengguna laporan keuangan yang lain seperti auditor internal, anggota BPKP dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kedua, hasil kuesioner yang menjadi sumber analisis dan pembahasan

penelitian tidak berasal dari bukti riil berupa pemantauan langsung (*observation*) aktivitas obyek penelitian. Beberapa keterbatasan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam mendesain riset dengan topik yang sama di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Barton, A. 2009. 'The Use and Abuse of Accounting in Public Sector Financial Management Reform Program in Australia', *Abacus* (vol.45, no.2), pp.221-249.
- Belkaoui, Ahmed R. 2006. *Teori Akuntansi* (terjemahan *Accounting Theory 5th ed*). Buku 1, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (2011) tentang Kebijakan Akuntansi.
- Caccia dan Steccolini. 2006. 'Accounting Change in Italian Local Governments: What's Beyond Managerial Fashion?', *Critical Perspectives on Accounting* (vol.17), pp. 154–174.
- Carlin, T. 2005. 'Debating the Impact of Accrual Accounting and Reporting in Public Sector', *Financial Accountability & Management* (vol. 21, No.3), pp.309-336.
- Carnegie dan West. 2005. 'Making Accounting Accountable in the Public Sector', *Critical Perspective on Accounting* (vol.16), pp.905-928.
- Christensen, M. 2002. "Accrual Accounting in Public Sector: the Case of NSW Government." *Accounting History* (vol.2 no.2), pp.93-124.
- Christiaens, J., Reyniers, B., dan Rolle, C. 2010. Impact of IPSAS on Reforming Governmental Financial Information Systems: A Comparative Study. *International Review of Administrative Science*. Vol. 76, No. 3, pp 537-554.
- Cresswell John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan dari *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darrin Grimsey 1, dan Mervyn K. Lewis. 2005. "Are Public Private Partnerships Value For Money? Evaluating Alternative Approaches and Comparing Academic and Practitioner Views, *Accounting Forum* 29, pp 345–378.
- Dul, Jan dan Tony Hak. 2008. *Case Study Methodology in Business Research* Published by Elsevier Ltd. USA.
- Gilham, Bill. 2000. *Case Study Research Methods* First Edition, British Library.
- Guthrie, J. 1998. Application of Accrual Accounting in the Australian Public Sector – Rhetoric or Reality? *Financial Accountability & Management*. Vol. 14, No. 1, pp.1-19.
- Halim, Abdul dan Kusufi Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hancock, Dawson R dan Bob Algozzine. 2006. *Doing Case Study Research : a Practical Guide for Beginning Researchers*. Teachers College, Columbia University, New York.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



- Harun. 2008. Evaluasi Empiris Terhadap Kapasitas Suatu Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol 8, No. 2, Agustus 2008 pp 113-122.
- Harun. 2007. A Note on Obstacles to Public Sector Accounting Reform in Indonesian, *Bulletin of Indonesian Economics Studies (BIES)*, 43(3) pp 361-71.
- Hood, C. 1995. The “New Public Management” in The 1980s: Variations on A Theme. *Accounting, Organizations, and Society*, Vol. 20, No. 2/3, pp 93-109.
- Istemi Demiraq dan Iqbal Khadaroo. 2008. ‘Accountability and Value For Money in Privat Finance Initiative Contracts, *Financial Accountability & Management*, 24(4) pp 1-24.
- Khadaroo, I. 2007. “The Actual Evaluation of School PFI Bids for Value For Money in the UK Public Sector,” *Critical Perspectives on Accounting* (Article in Press) pp 1-25.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. BPK: Opini LKPD Membaik Dibanding Dua Tahun Lalu (2011) diakses 3 Januari 2012 <http://www.ksap.org/berita>
- Lapsley, I., Mussari, R., dan Paulsson, G. 2009. On the Adoption of Accrual Accounting in the Public Sector: A Self Evident and Problematic Reform. *European Accounting Review*. Vol. 18, No. 4, pp. 719-723.
- Marwata dan Alam, M. 2006. The Interaction Amongst Reform Drivers in Governmental Accounting Changes. *Journal of Accounting and Organizational Change*. Vol. 2, No. 2, pp. 144-163.
- Medina Consulting: Strategi Penerapan Basis Akrual Secara Penuh di Indonesia diakses 3 Januari 2012. <http://medinamultimitra.com/akuntansi/19-strategi-penerapan-basis-akrual-secara-penuh-di-indonesia>
- Murni, Sri. 2004. Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.4, No. 1, Pebruari 2004 pp. 81-93.
- Parker dan Guthrie. 1993. ‘The Australian Public Sector in the 1990s: New Accountability Regimes in Motion’, *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation* (vol.2, No.1), pp.59-81.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cetakan II, Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Walikota Surakarta No. 17 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta.
- Rasono. 2011. Seminar Akuntabilitas Sektor Publik: Peluang dan tantangan.
- Robinson, P., dan Harun. 2005. Implementing Accrual Regime in The Context Indonesian Public Sector Accounting Reform (A Case Study). Simposium Riset Ekonomi II, Surabaya 23-24 November 2005, pp. 1-25.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. *Research Method for Business, A Skill Building Approach*. Fifth Edition, New York, John Willey&Son Inc.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Wijaya F Ibrahim. 2010. The Adoption of IPSASs in Developing Countries: A Case Study of Indonesia. Tesis tidak dipublikasikan. School of Economics and Commerce, Birmingham University (UK).

LAMPIRAN

Tabel 1
Perbandingan isi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
antara PP No 24 Tahun 2005 dengan PP No 71 Tahun 2010

PSAP No	PP No 24 Tahun 2005	PP No 71 Tahun 2010
01	Penyajian Laporan Keuangan	Penyajian Laporan Keuangan
02	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
03	Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas
04	Catatan atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan
05	Akuntansi Persediaan	Akuntansi Persediaan
06	Akuntansi Investasi	Akuntansi Investasi
07	Akuntansi Aset Tetap	Akuntansi Aset Tetap
08	Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan	Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
09	Akuntansi Kewajiban	Akuntansi Kewajiban
10	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
11	Laporan Keuangan Konsolidasian	Laporan Keuangan Konsolidasian
12		Laporan Operasional Lampiran II: SAP Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran III: Proses Penyusunan SAP Berbasis Akrual

Sumber: PP No 24/ 2005 dan PP No 71/2010

Tabel 2
Hasil Studi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta
terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Pemahaman Umum SAP 2010)

No	Pernyataan	Dari 12 partisipan	
		Setuju	Tidak setuju
1	Saya memiliki pengetahuan memadai tentang tujuan SAP 2010.	3 (25%)	9 (75%)
2	Saya memiliki analisa yang baik atas Laporan Operasional, Neraca, LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK	4 (33%)	8 (67%)
3	Saya paham sepenuhnya konsekuensi tidak tersusunnya Laporan Keuangan instansi sesuai SAP 2010	12 (100%)	

Sumber: data primer diolah

Tabel 3
 Hasil Studi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta
 terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrua (Pemahaman struktur SAP 2010)

No	Pernyataan	Dari 12 partisipan	
		Setuju	Tidak setuju
1	Saya paham SAP 2010 berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial.	4 (33%)	8 (67%)
2	Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.	7 (58%)	5 (42%)
3	Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.	8 (67%)	4 (33%)
4	Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.	8 (67%)	4 (33%)
5	Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.	7 (58%)	5 (42%)
6	Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.	4 (33%)	8 (67%)
7	Saya paham aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan akun-akun yang dimaksud telah dicatat sesuai ketentuan SAP 2010.	8 (67%)	4 (33%)
8	Saya paham bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan pendapatan yang dimaksud telah diakui sesuai ketentuan dalam SAP 2010.	3 (25%)	9 (75%)
9	Saya paham bahwa beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan, dan beban yang dimaksud telah diakui sesuai ketentuan SAP 2010.	2 (17%)	10 (83%)
10	Saya paham laporan operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program/kegiatan pelayanan, dan juga memprediksi pendapatan sehingga bisa mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.	2 (17%)	10(83%)

Sumber: data primer diolah

Tabel 4
 Hasil Studi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta
 terhadap Standar Akuntansi Berbasis AkruaI (Pelaksanaan SAP 2010)

No	Pernyataan	Dari 12 partisipan	
		Setuju	Tidak setuju
1	Instansi telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP 2010 tanpa bantuan pihak luar.	8 (67%)	4 (33%)
2	Instansi telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP 2010 dengan kerjasama dengan pihak luar.	4 (33%)	8 (67%)
3	Secara rutin laporan keuangan daerah disajikan tepat waktu	12 (100%)	
4	SAP 2010 memerlukan kerumitan teknis penyusunan	9 (75%)	3 (25%)
5	Belum pernah ada teguran keterlambatan laporan keuangan	10 (83%)	2 (17%)

Sumber: data primer diolah

Tabel 5
 Hasil Studi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Surakarta
 terhadap Standar Akuntansi Berbasis AkruaI (Faktor Penghambat SAP 2010)

No	Pernyataan	Dari 12 partisipan	
		Setuju	Tidak setuju
1	Pendidikan staf yang tidak sesuai	10 (83%)	2 (17%)
2	Kurangnya pengalaman	11 (92%)	1 (8%)
3	Fasilitas yang minim	12 (100%)	
4	Sistem yang sulit dipahami	9 (75%)	3 (25%)
5	Rendahnya komitmen pimpinan	9 (75%)	3 (25%)
6	Kurangnya sosialisasi sistem yang baru	10 (83%)	2 (17%)
7	Tidak adanya insentif bagi pelaksanaan SAP 2010 yang baik.	9 (75%)	3 (25%)

Sumber: data primer diolah

Tabel 6
Hasil Studi Tingkat Pemahaman Anggota DPRD Kota Surakarta
terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrua (Pemahaman Umum SAP 2010)

No	Pernyataan	Dari 10 partisipan	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Saya memiliki pengetahuan memadai tentang tujuan SAP 2010.	2 (20%)	8 (80%)
2	Saya memiliki pengetahuan atas laporan keuangan pemerintah daerah	7 (70%)	3 (30%)
3	Saya memiliki analisa yang baik atas Laporan Operasional, Neraca, LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK	3 (30%)	7 (70%)

Sumber: data primer diolah

Tabel 7
Hasil Studi Tingkat Pemahaman Anggota DPRD Kota Surakarta
terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrua (Pemahaman Struktur isi SAP 2010)

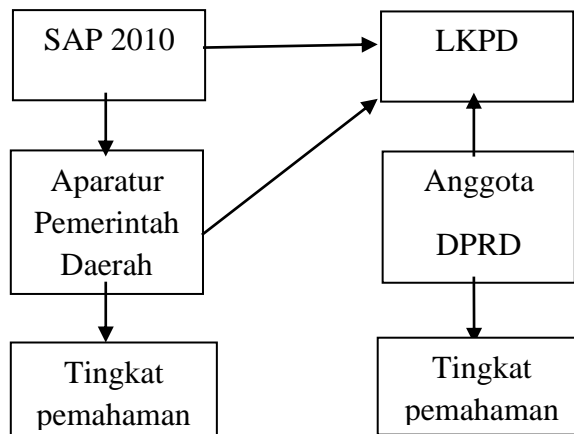
No	Pernyataan	Dari 10 partisipan	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Saya paham SAP 2010 berbasis akrua untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial.	2 (20%)	8 (80%)
2	Saya paham adanya indikasi bahwa sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.	7 (70%)	3 (30%)
3	Saya paham adanya indikasi bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.	6 (60%)	4 (40%)
4	Saya paham laporan operasional menyajikan informasi beban akrua yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program/kegiatan pelayanan, dan juga memprediksi pendapatan sehingga bisa mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.	3 (30%)	7 (70%)
5	Saya memahami pelaporan pemerintah daerah sesuai SAP telah sesuai dengan kebutuhan pengguna	8 (80%)	2 (20%)
6	Saya memahami pelaporan pemerintah daerah sesuai SAP relevan untuk penyusunan RAPBD	8 (80%)	2 (20%)

Sumber: data primer diolah

Tabel 8
 Hasil Studi Tingkat Pemahaman Anggota DPRD Kota Surakarta
 terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Faktor Penghambat SAP 2010)

No	Pernyataan	Dari 10 partisipan	
		Setuju	Tidak setuju
1	Pendidikan anggota DPRD tidak berlatarbelakang akuntansi	7 (70%)	3 (30%)
2	Anggota DPRD kurang berpengalaman tentang akuntansi pemerintahan	9 (90%)	1 (10%)
3	Tidak ada pelatihan akuntansi pemerintahan	3 (30%)	7 (70%)
4	Rendahnya komitmen pimpinan dewan	2 (20%)	8 (80%)
5	Kurangnya sosialisasi sistem yang baru	9 (90%)	1 (10%)

Sumber: data primer diolah



Gambar 1
 Kerangka Berpikir

Daftar Partisipan

Daftar Partisipan Aparatur Pemerintah Kota Surakarta yang mengisi kuesioner

Kode	Initial	Mewakili instansi	Jabatan
P1	SH	DPPKA	Kepala Seksi
P2	W	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran
P3	CN	Dinas Pengelolaan Pasar	Kasubbag Keuangan
P4	ES	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kasubbag Keuangan
P5	HK	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Bendahara Pengeluaran
P6	BS	Bappeda	Kasubbag Keuangan
P7	PR	Dinas Pekerjaan Umum	Kasubbag Keuangan
P8	AY	Dinas Koperasi dan UMKM	Kasubbag Keuangan
P9	SD	Dinas Pertanian	Kasubbag Keuangan
P10	D	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Bendahara Pengeluaran
P11	R	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bendahara Pengeluaran
P12	A	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Bendahara Pengeluaran

n=12

Daftar Partisipan Anggota DPRD Kota Surakarta yang mengisi kuesioner

Kode	Initial	Mewakili	Jabatan
D2	MR	Badan Anggaran	Wakil Ketua DPRD
D3	HM	Badan Anggaran	Ketua Komisi I
D4	RW	Badan Anggaran	Anggota Komisi IV
D5	K	Komisi III	Ketua Komisi III
D6	AA	Komisi III	Anggota Komisi III
D7	JS	Badan Anggaran	Anggota Komisi II
D8	AG	Badan Anggaran	Anggota Komisi IV
D9	P	Komisi III	Anggota Komisi III
D10	W	Komisi III	Anggota Komisi III
D11	A	Komisi III	Anggota Komisi III

n=10

Daftar Partisipan Aparatur Pemerintah Kota Surakarta yang memberikan pernyataan wawancara

Kode	Initial	Mewakili instansi	Jabatan	Bulan
P1	SH	DPPKA	Kepala Seksi	Juni 2012
P2	W	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran	Juni 2012
P3	CN	Dinas Pengelolaan Pasar	Kasubbag Keuangan	Juni 2012
P4	ES	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kasubbag Keuangan	Juli 2012
P5	HK	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Bendahara Pengeluaran	Juli 2012
P6	BS	Bappeda	Kasubbag Keuangan	Juli 2012
P7	PR	Dinas Pekerjaan Umum	Kasubbag Keuangan	Juli 2012
P8	AY	Dinas Koperasi dan UMKM	Kasubbag Keuangan	Juli 2012

Daftar Partisipan Anggota DPRD Kota Surakarta yang memberikan pernyataan wawancara

Kode	Initial	Mewakili	Jabatan	Bulan
D1	YS	Badan Anggaran	Ketua DPRD	Juli 2012
D2	MR	Badan Anggaran	Wakil Ketua DPRD	Juni 2012
D3	HM	Badan Anggaran	Ketua Komisi I	Juni 2012
D4	RW	Badan Anggaran	Anggota Komisi IV	Juli 2012
D5	K	Komisi III	Ketua Komisi III	Juli 2012
D6	AA	Komisi III	Anggota Komisi III	Juli 2012

Pola Partisipan

Pola Partisipan Aparatur Pemerintah Kota Surakarta												
Partisipan	P1	P2	P3	P4	P5	P7	P8	P9	P10	P11	P12	
Kuesioner	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	<i>n=12</i>
Wawancara	Y+	Y	Y	Y	Y	Y+	Y	N	N	N	N	

Keterangan

Kuesioner

Y = menjawab kuesioner

Wawancara

Y = memberi pernyataan

Y+ = memberi pernyataan dengan penjelasan pendukung

N = tidak memberi pernyataan



Pola Partisipan Anggota DPRD Kota Surakarta												
Partisipan	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	P10	D11	
Kuesioner	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	<i>n=10</i>
Wawancara	Y	Y	Y+	Y+	Y	Y+	N	N	N	N	N	

Keterangan

Kuesioner

N = tidak menjawab kuesioner

Y = menjawab kuesioner

Wawancara

Y = memberi pernyataan

Y+ = memberi pernyataan dengan penjelasan pendukung

N = tidak memberi pernyataan

Daftar Dokumen

Daftar Dokumen		
Kode	Tahun	Judul
d-PK01	2011	Peraturan Walikota Surakarta No 17 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta
d-PK02	2011	Kebijakan Akuntansi Inspektorat Kota Surakarta
d-PK03	2011	Kebijakan Akuntansi BPKP Perwakilan Provinsi Jateng

Lampiran Wawancara dengan DPRD Kota Surakarta (D)
Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrua

Kategori	D	Pernyataan Anggota DPRD Kota Surakarta
Pemahaman Umum SAP 2010		Memang komitmen untuk memahami standar akuntansi berbasis akrual
	D2	dikembalikan pada komitmen pribadi untuk punya kemauan untuk belajar, karena yang diharapkan oleh pimpinan adalah bahwa. setiap pribadi anggota dewan tidak tergantung pada pimpinan dewan
	D3	Saya tidak selalu harus memahami apa yang dimaksud dengan basis akrual, yang penting daya serap anggaran termasuk dalam kategori bagus, sangat bagus, lumayan, atau kurang bagus. Saya akan mempelajarinya nanti setelah basis yang dimaksud dilaksanakan
	D4	Menurut Saya, bahasa akuntansi dalam SAP 2010 ini terlalu 'tinggi' untuk level praktis
Pemahaman Struktur SAP 2010		Secara program sudah bagus, tapi secara teknis harus ada perbaikan oleh pemerintah kota. Salah satunya melalui transparansi dengan membuka akses informasi public
	D4	atas program yang berjalan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya Bagaimana nanti kalau basis akrual diterapkan? sedangkan dengan basis kas saja masih banyak persoalan yang harus dibenahi
	D3	Sinkronisasi anggaran dilimitkan sehingga tidak terbebani dengan utang sebagaimana keinginan Walikota yang menginginkan zero deficit artinya diusahakan penerimaan sama dengan pengeluaran
	D5	Sumber daya digunakan sesuai anggaran karena sudah sesuai dengan LRA
Faktor Penghambat	D1	Sejauh ini belum ada bimbingan teknis yang mengarah ke basis akrual, bagaimana lagi anggarannya tidak ada
	D6	Sejauh ini sosialisasi belum dirasakan.

Pendekatan accrual basis saya dukung dengan syarat harus dalam kerangka menciptakan *good governance*, lebih transparan dan memperkecil ruang gerak kolusi, korupsi dan nepotisme

Saat ini kita mencoba agar anggaran seefisien mungkin, akan lebih baik jika UNS selaku D1 perguruan tinggi yang dianggap tahu hal ini menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi bekerjasama dengan kementerian dalam negeri, lalu mengundang anggota dewan.

Lampiran Wawancara dengan Aparatur Pemerintah Kota Surakarta (P)
Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrua

Kategori	P	Pernyataan Aparatur Pemerintah Kota Surakarta
Pemahaman Umum SAP 2010	P1	Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan SAP 2010 terutama pada lampiran II yaitu Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrua untuk kemudian secara bertahap akan melaksanakan basis akrua secara penuh.
	P2	Saya tidak mengetahui kalau ada SAP 2010. Saya juga tidak memahami apa yang dimaksud standar akuntansi berbasis akrua.
	P3	Secara pribadi tidak tahu apa yang dimaksud dengan basis akrua.
	P4	Secara normative ikut aturan yang sudah ada. Tidak memahami SAP 2010. Mengikuti kebiasaan pendahulu.
	P5	Memang dalam diklat pernah dijelaskan basis akrua, tapi setelah diklat Saya tetap saja tidak memahami apa yang dimaksud dengan basis akrua itu
	P6	Sepengetahuan Saya, basis akrua hanya cocok untuk diterapkan dalam perusahaan komersial, mengapa hal ini seolah dipaksakan dalam akuntansi pemerintahan? Tidak semua yang dianut di perusahaan bisa diterapkan.
	P7	Software keuangan sudah sangat terbantu dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan). Akuntansi berbasis akrua hanya dilaksanakan untuk asset, kewajiban dan ekuitas. Dengan catatan untuk asset perolehannya bukan hanya berdasar harga perolehan yang tercantum namun seluruh pembiayaan termasuk di dalamnya honor panitia. Secara umum masih mengacu pada PP No 24 tahun 2005. Beban seperti depresiasi dan penghapusan gedung masih belum diberlakukan.
	P8	Secara umum masih Kas menuju akrua, untuk kemudian secara bertahap basis akrua secara penuh pada tahun 2014. Saya berusaha bertanya ke DPPKA dan mendownload PP No 71 Tahun 2010.

Pemahaman Struktur SAP	<p>Saya tidak melihat kelebihan SAP 2010 dibanding 2005. Terkait dengan beban akrual belum bisa dilakukan karena belum adanya peraturan walikota yang terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan.</p>
	<p>P1</p> <hr/> <p>P3 Masih berbasis kas menuju akrual dimana pendapatan diakui pada saat diterima Bendahara di RKUD untuk seluruh transaksi SKPD.</p>
Pelaksanaan SAP	<p>P1 Sebagaimana pelaksanaan PP 24 tahun 2005 pelatihan SDM sudah dimulai sejak 2006, namun karena hasilnya belum memuaskan maka pelatihan SDM ini diulang secara intensif di tahun 2007 dengan bekerjasama dengan BPKP. Hal ini juga dipermudah dengan komputerisasi keuangan daerah. Secara kemandirian instansi sudah mulai bisa mandiri, diharapkan ini nanti juga akan terjadi pada penerapan SAP 2010.</p> <hr/> <p>P8 Saya secara pribadi masih sering berkonsultasi dengan rekan kerja di DPPKA terutama P1, selain itu juga berkonsultasi dengan BPKP.</p>
Faktor Penghambat	<p>P1 Hambatan yang paling utama tetap pada kesiapan SDM. Oleh karena itu pelatihan SDM dilakukan secara bertahap. Meskipun demikian pemahaman secara internal dilakukan dengan <i>upgrading</i> seluruh staf DPPKA dalam hal pengelolaan aset dan keuangan. Hambatan lain keinginan <i>upgrading</i> tersebut justru dikarenakan anggaran yang terbatas. Anggaran pelatihan ini hanya 2 kali setahun, padahal seharusnya lebih dari itu. Memang Kota Surakarta meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sebagai <i>reward</i>-nya mendapat insentif dari pemerintah pusat, namun insentif kepada aparatur sama sekali tidak ada</p> <hr/> <p>P2 Keterbatasan sumber daya manusia dipastikan ada, bahkan bidan atau perawat sudah biasa merangkap sebagai pengelola keuangan</p> <hr/> <p>P7 Bekerja di bidang akuntansi dan keuangan harus punya komitmen tinggi untuk belajar. Sulitnya regenerasi di instansi ini adalah banyaknya staf dengan pendidikan yang tidak sesuai. Secara kuantitas tenaga sudah banyak dan cukup namun tidak kompeten. Walaupun sudah tidak kompeten, yang justru disayangkan adalah keengganan untuk belajar. Belum adanya <i>executive summary</i> supaya pelaporan praktis dan memberi pemahaman yang sama</p>

Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam Pencapaian *Good University Governance (GUG)* pada Perguruan Tinggi Se-Jawa yang Berstatus Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)

NOVIANA DYAH PUSPITARINI

Alumnus Universitas Negeri Semarang (UNNES)

SUKIRMAN

INDAH ANISYKURLILLAH*

Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Abstract: *The changes of university status from non Financial Management Pattern of Public Service Institution into Financial Management Pattern of Public Service Institution is expected to encourage the university to have batter management. The university will be easier to achieve Good University Governance (GUG) due to flexibility of financial management and the obligation to establish Internal Audit Unit. However, the initial survey showed that 43 illegal accounts were found in Ministry of Educational and Cultural taken from seven state universities and a Board of Educational and Cultural. It made the Ministry of Educational and Cultural become a ministry which got a disclaimer audit opinion from Financial Audit Board in 2010. Therefore, the purpose of this research is to determine the role of Internal Audit Unit in achieving Good University Governance (GUG) in higher education in Java.*

Population of this research is all of universities in Java with the Status of Financial Management Pattern of Public Service Institution as many as 31 universities. Convinience sampling is Sampling Tehnique that was used. The methods of data analysis were descriptive analysis and inferensial analysis using Partial Least Square (PLS).

The results showed that Brawijaya University had the best role of Internal Audit Unit and in achieving Good University Governance with the percentage for the role of Internal Audit Unit was 93,43% and the percentage for achieving Good University Governance was 92,26%. The t-statistics for the role of Internal Audit Unit was 17,078, with the significancy was $p=5\%$ and the value of R-square was 90,0%.

The conclusion of this research is the role of Internal Audit Unit gives positive effect to achieve Good University Governance (GUG). The suggestion are firstly for the university should improve the quality of Internal Audit Unit because it has a very important role in achieving Good University Governanc. Secondly for the next researchers to study the other variables such as control environment, audit risk, etc as the dependent or moderating variables.

Keywords : *Financial Management Patern of Public Service Agency, Good University Governance, Internal Audit Unit, Partial Least Square*

*Corresponding author: indah.anis@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberadaan perguruan tinggi dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang sangat besar. Wijatno (2009:126) menyatakan bahwa pada dasarnya pendidikan tinggi yang pada praktiknya dijalankan oleh institusi perguruan tinggi dimaksudkan untuk dapat menjadi komunitas kaum intelektual suatu bangsa. Komunitas intelektual ini kemudian diharapkan mampu mencetuskan pemikiran dan inovasi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa itu. Untuk itu diperlukan konsep penyelenggaraan institusi perguruan tinggi yang dianggap cukup ideal yang dikenal dengan *Good University Governance (GUG)*. *Good University Governance (GUG)* sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata pemerintahan yang lebih umum, yaitu *Good Governance* (Sudarmanto, 2011:2)

Menurut Wijatno (2009:370) terdapat lima prinsip *Good University Governance (GUG)* yaitu, (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) responsibilitas, (4) independensi, dan (5) keadilan. Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya *fraud* serta meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Mayoritas perguruan tinggi yang ada dalam penelitian ini merupakan satker yang bernaung di bawah Kemendikbud yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif. Selain perguruan tinggi, Kemendikbud juga membawahi satker yang lain. Baik atau tidaknya kualitas kinerja Kemendikbud yang salah satunya dapat dilihat dari opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kemendikbud tergantung dari kualitas kinerja tiap satker yang bernaung di bawahnya.

Hasil opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kemendikbud tahun 2010 adalah *Disclaimer*. Hasil opini tersebut menunjukkan ada kemerosotan akuntabilitas dibandingkan dengan opini audit BPK tahun 2009 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang menjadi sebab dikeluarkannya opini audit ini adalah Kemendiknas dinilai tidak memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan Standart

Akuntansi Pemerintahan (SAP), penyajian laporan keuangan kurang lengkap, tidak patuh terhadap undang-undang, serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang masih lemah (Metrotvnews.com, Laporan Keuangan Kemenkes dan Kemendiknas Bermasalah. http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/05/31/53248/Laporan_Keuangan-Kemenkes-dan-Kemendiknas-Bermasalah).

Hasil opini audit BPK atas laporan keuangan Kemendikbud tahun 2010 yang menghasilkan opini *Disclaimer* bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kualitas kinerja dari Kemendikbud, melainkan karena satker-satker dibawahnya termasuk perguruan tinggi. Selanjutnya dijelaskan lagi bahwa sumber dari kemerosotan akuntabilitas yang paling besar adalah pada lembaga di bawah Kemendikbud yang memiliki PNBPN terbesar yaitu perguruan tinggi. Hal-hal yang menjadi penyebabnya antara lain laporan keuangan perguruan tinggi BLU yang berbasis SAK belum dikonversikan menjadi laporan keuangan berbasis SAP. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 43 rekening liar milik Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp 26,44 miliar. Rekening tersebut berasal dari penelusuran BPK sejak 2009 hingga 2010. Hasil temuan BPK menunjukkan rekening tak berizin tersebut berasal dari tujuh perguruan tinggi di tanah air dan satu Dinas Pendidikan Nasional dengan posisi saldo tercatat hingga 31 Desember 2010 (Kontak Banten, BPK Temukan 43 Rekening Liar di Kemendiknas. <http://kontakbanten.blogspot.com/2011/07/bpk-temukan-43-rekening-liar-di.html>).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia masih belum optimal. *Good University Governance (GUG)* muncul sebagai suatu sistem nilai yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perguruan tinggi apalagi dengan perubahan status perguruan tinggi menjadi pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Perubahan status ini tentunya memberikan tantangan baru dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 pasal 35 ayat 1 dijelaskan bahwa pemeriksaan intern BLU dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLU. Pasal ini menegaskan bahwa salah satu konsekuensi dari perubahan status menjadi BLU adalah adanya kewajiban untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern yang salah satunya dengan membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI). Menurut Panggabean (2011), pengendalian intern merupakan sebuah sistem sedangkan pengawasan intern adalah organ atau unit yang menjalankannya. Satuan Pengawasan Intern (SPI) diharapkan membantu pimpinan unit kerja dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya *Good University Governance (GUG)*.

Perubahan status dari satker biasa menjadi satker dengan pola PK-BLU bagi beberapa perguruan tinggi relatif masih baru. Status BLU pada PTN, mayoritas diberikan pada tahun 2009 yaitu sebanyak 25 perguruan tinggi. Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan PK-BLU, perguruan tinggi yang pertama kali mendapatkan status PK-BLU adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan KMK 301/KMK.05/2007 pada tanggal 2 Juli 2007, dilanjutkan dengan pemberian status PK-BLU di 13 perguruan tinggi pada tahun 2008, 25 perguruan tinggi pada tahun 2009, 6 perguruan tinggi pada tahun 2010 serta 7 perguruan tinggi pada tahun 2011.

Dibandingkan dengan satuan kerja non perguruan tinggi yang pertama kali mendapatkan status PK-BLU yaitu RS. Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 2005, umur pemberian status PK-BLU bagi perguruan tinggi relatif masih sangat baru. Karena hal inilah

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam apakah semua perguruan tinggi yang berstatus PK-BLU sudah mampu menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah benar-benar membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI), serta memaksimalkan peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam upaya mewujudkan *Good University Governance (GUG)*.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) berpengaruh positif dalam pencapaian *Good University Governance (GUG)*. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana peran SPI dalam pencapaian *Good University Governance (GUG)*.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yaitu (1) bagi perguruan tinggi agar melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) di institusi masing-masing, (2) bagi Inspektorat di Berbagai Kementerian agar memberikan informasi terkait dengan satker-satker perguruan tinggi mana saja yang belum mematuhi UU nomor 23 tahun 2005 tentang pola PK BLU.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Tata Laksana (*Stewardship Theory*)

Stewardship theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Implikasi teori *Stewardship* dalam penelitian ini adalah *steward* (dalam hal ini adalah manajemen perguruan tinggi) akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan prinsipal (masyarakat dan pemerintah). Mereka akan membuat keputusan sebijak mungkin sebab menurut *steward*, memberikan pelayanan yang maksimal kepada prinsipal merupakan pilihan yang bijak untuk mencapai tujuan organisasi.

Good University Governance (GUG)

Menurut Wijatno (2009:126), secara sederhana *Good University Governance (GUG)* dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep “*good governance*” dalam sistem dan proses *governance* pada institusi perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum. *Good University Governance* merupakan suatu konsep yang menerapkan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang perlu diterapkan oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas.

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Satuan pengawasan intern atau yang sering disebut dengan audit intern merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawaban dengan cara menyediakan analisis, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah (Sitompul, 2008:18).

Mulyadi (2002:29) menyatakan bahwa Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Dalam melaksanakan perannya, SPI harus berpedoman pada standar profesi audit intern. Menurut Tugiman (1997:16), standart profesi audit intern meliputi independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan audit intern, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta manajemen bagian audit intern.

Badan Layanan Umum (BLU)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Good University Governance (GUG) merupakan langkah yang dapat menunjang pencapaian kualitas suatu perguruan tinggi. Menurut Wijatno (2009:119), pencapaian *Good University Governance (GUG)* dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan. Pada prakteknya, keseluruhannya prinsip tersebut harus diterapkan untuk mewujudkan suatu tata kelola universitas yang baik.

Dengan perubahan status perguruan tinggi menjadi PK-BLU sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005, perguruan tinggi yang berstatus PK-BLU berkewajiban membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI). Peran SPI diukur melalui lima indikator yang diambil dari standar profesi audit intern. Ke lima indikator tersebut adalah independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan audit intern, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta manajemen bagian audit intern.

Dengan digunakannya standar profesi audit intern dalam mengukur peran SPI, diharapkan tata kelola universitas yang baik atau GUG dapat dicapai. Sehingga perguruan tinggi yang berstatus PK-BLU akan lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin baik peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka *Good University Governance* (GUG) akan semakin cepat terwujud.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah “Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) berpengaruh positif dalam pencapaian *Good University Governance* (GUG)”.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perguruan tinggi yang berstatus pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) di Pulau Jawa dengan jumlah 31 perguruan tinggi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah berdasarkan kemudahan (*Convenience sampling*) yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang bersedia memberikannya

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari penyebaran kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 155 responden yang terdiri dari ketua, sekretaris dan 3 orang anggota pada 31 SPI perguruan tinggi berstatus PK BLU se-Jawa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengirim kuesioner melalui pos kepada alamat SPI perguruan tinggi BLU yang dituju.

Teknik Analisis Data

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran demografi responden. Gambaran demografi ini meliputi umur, jenis kelamin, jenjang pendidikan, lama masa kerja, jabatan dalam SPI, pengalaman mengikuti pendidikan profesi audit intern, serta jumlah auditor dalam SPI. Selain itu, analisis statistik deskriptif ini untuk mendiskripsikan variabel-variabel penelitian yaitu peran SPI dan pencapaian GUG.

Pengukuran antar variabel dalam penelitian ini menggunakan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan metode alternatif *Partial Least Square* (PLS).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sejumlah 155 kuesioner, dari keseluruhan kuesioner yang telah dibagikan, sebanyak 48 kuesioner atau 31% telah kembali dan sisanya yaitu 107 kuesioner atau 69% tidak dikembalikan oleh responden sehingga kuesioner yang dapat diolah hanya sebanyak 48 kuesioner atau 31%. Dari 48 responden, 34 responden laki-laki dan 14 responden perempuan dengan mayoritas responden berumur antara 41-50 tahun. Mayoritas responden telah bekerja di unit SPI selama 1-2 tahun dan memiliki pendidikan terakhir S2. Dari 48 responden, 9 responden menjabat sebagai ketua, 7 responden sebagai sekretaris dan sisanya adalah anggota.

Dilihat dari pernah atau tidaknya mengikuti pendidikan profesi audit intern, sebanyak 22 responden menyatakan pernah mengikuti dan sisanya menyatakan belum pernah. Pendidikan profesi audit intern yang pernah diikuti antara lain pelatihan audit tingkat dasar, pelatihan audit tingkat madya, pelatihan audit tingkat lanjut, pelatihan audit kinerja, pelatihan audit pengadaan barang dan jasa, pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), pelatihan audit sistem informasi, serta pelatihan *risk based audit* oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).

Mayoritas responden menyatakan bahwa peran SPI pada tiap perguruan tinggi masuk dalam kategori sangat baik yaitu sebanyak 32 responden atau 66,67%, sedangkan sisanya yaitu 16 responden atau 33,33% menyatakan masuk dalam kategori baik. Peran SPI pada 11 perguruan tinggi yang berstatus PK-BLU sudah optimal. Dari olah data yang dilakukan, terdapat dua SPI perguruan tinggi yang masuk dalam klasifikasi baik yaitu Akademi Teknik dan Keselamatan Surabaya serta Politeknik Kesehatan Surakarta, sedangkan untuk sisanya masuk dalam klasifikasi sangat baik. SPI perguruan tinggi berstatus PK-BLU yang menjalankan peran paling optimal adalah Universitas Brawijaya Malang dengan persentase sebesar 93,43%.

Dilihat dari variabel GUG, sebanyak 31 responden atau 64,58% responden menyatakan bahwa pencapaian GUG pada perguruan tinggi berstatus PK-BLU masuk pada kategori sangat baik serta sisanya 17 responden atau 35,42% menyatakan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa GUG telah dicapai oleh tiap satker BLU. Pencapaian GUG pada mayoritas perguruan tinggi berstatus PK-BLU masuk dalam kategori sangat baik. Pencapaian GUG yang paling optimal dicapai oleh Universitas Brawijaya Malang, yaitu dengan persentase sebesar 92,96%.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel dengan multidimensi yaitu variabel yang diukur dengan beberapa indikator dan indikator tersebut masih memiliki banyak cabang berupa butir soal. Kasus seperti ini dapat diselesaikan oleh *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan permodelan yang disebut *Second Order Confirmatory Factor Analysis*. Adapun hasil dari pengujian menggunakan *Partial Least Square* (PLS) adalah sebagai berikut :

a. Uji *Outer Model*

Hasil uji *outer model* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu nilai *outer* dari butir soal ke indikator serta dari indikator ke variabel atau konstraknya.

1. Hasil Uji *Outer* dari Butir Soal ke Indikator

Hasil uji *outer model* dari butir soal ke indikator pembentuk konstruk Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Berdasarkan Gambar 1, dari keseluruhan soal SPI terdapat dua pertanyaan yang memiliki nilai *convergent validity* rendah yaitu PKP 4 dan PKP 6 sebab memiliki nilai *factor loading* di bawah 0.50. Dikarenakan permodelan yang dipakai adalah reflektif maka butir soal yang memiliki nilai *convergent validity* rendah harus *didrop* dan dilakukan pengujian ulang (*recalculate*) untuk mendapatkan model yang lebih baik. Setelah dilakukan pengujian ulang, keseluruhan soal telah memenuhi syarat yaitu memiliki nilai *factor loading* di atas 0,50. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian *outer model* dari soal ke indikator pembentuk konstruk GUG.

Hasil uji *outer model* dari butir soal ke indikator pembentuk konstruk GUG.

Berdasarkan Gambar 2, keseluruhan soal memiliki nilai *factor loading* di atas 0,50, hal ini berarti keseluruhan soal memiliki nilai *convergent validity* tinggi. Langkah selanjutnya adalah melihat nilai *composite reliability* dan *cronbachs alpha* guna mengukur reliabilitas. Pada Tabel 2 dan 3 dapat dilihat bahwa masing-masing *second order* maupun *first order* konstruk memiliki nilai *cronbachs Alpha* di atas 0,70 dan *composite reliability* cukup tinggi yaitu di atas 0,80 dan menunjukkan bahwa reliabilitasnya sangat baik. Namun indikator independensi memiliki nilai 0.529 atau kurang dari 0.70 sehingga dianggap kurang *fit* untuk mengukur konstruk SPI.

2. Hasil Uji *Outer Model* dari Indikator ke Konstruk

Oleh karena konstruk pada permodelan ini dibangun dengan indikator formatif maka untuk validitas indikatornya tidak dilihat dari *convergent validity* yang ditunjukkan oleh nilai *factor loading* masing-masing indikator, melainkan melihat nilai *t-statistics* dari masing-masing indikator.

a) Hasil uji *outer model* dari indikator ke konstruk SPI

Berdasarkan Tabel 4, konstruk SPI dipengaruhi oleh lima indikator yaitu independensi (IND), kemampuan profesional (KP), lingkup pekerjaan (LP), pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (PKP), dan yang terakhir manajemen bagian audit intern (MBAI) yang masing-masing indikator memiliki nilai t-statistik 10,385, 17,910, 16,154, 15,614 dan 14,228. Kelima indikator yang membentuk konstruk SPI merupakan indikator yang valid sebab memiliki nilai t-statistik di atas 1,679 ($p = 0,05$ *one tailed*).

b) Hasil uji *outer model* dari indikator ke konstruk GUG

Berdasarkan Tabel 5, konstruk GUG dipengaruhi oleh lima indikator yaitu transparansi (TR), responsibilitas (RES), akuntabilitas (AKT), independensi (INDEN), dan adil (ADL) dimana masing-masing indikator tersebut memiliki nilai t-statistik sebesar 16,608, 15,432, 21,938, 12,708, serta 11,260. Kelima indikator yang membentuk konstruk GUG merupakan indikator yang valid sebab memiliki nilai t-statistik di atas 1,679 ($p = 0,05$ *one tailed*).

3. Uji *Inner Model* atau Model Struktural

Uji *inner model* dilakukan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2008). Berdasarkan Gambar 3, Satuan Pengawasan Intern (SPI) berpengaruh positif dalam pencapaian *Good University*

Governance (GUG) dengan koefisien estimasi sebesar 0,949 yang bermakna bahwa keeratan hubungan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dengan *Good University Governance* (GUG) sebesar 0,949. Adapun nilai *t-statistics* yang dihasilkan adalah sebesar 17,078 yang signifikan pada $p = 5\%$. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang mengatakan bahwa peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) berpengaruh positif dalam pencapaian *Good University Governance* (GUG) dapat diterima.

Setelah diketahui bahwa antara variabel laten independen dan dependen memiliki pengaruh, maka langkah selanjutnya adalah menilai besarnya pengaruh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam pencapaian *Good University Governance* (GUG) yang dilihat dari nilai *R-Square* (Tabel 6). Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam pencapaian *Good University Governance* (GUG) menghasilkan nilai *R-Square* sebesar 0,900 yang artinya bahwa variabel SPI mampu menjelaskan variabel GUG sebesar 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% dijelaskan oleh variabel lain.

Pembahasan

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) berpengaruh positif dalam pencapaian *Good University Governance* (GUG) adalah diterima. Hal ini tercermin dari nilai *t-statistic* sebesar 17,078 yang signifikan pada nilai $p=5\%$, dengan besaran pengaruh yang diberikan sebesar 90%. Hasil ini bermakna bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian *Good University Governance* (GUG) adalah peran Satuan Pengawasan Intern (SPI). Oleh karena itu pihak Kementerian teknis serta manajemen perguruan tinggi perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan unit ini mengingat perannya yang begitu besar dalam pencapaian *Good University Governance* (GUG).

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diperoleh hasil bahwa dari 11 perguruan tinggi berstatus PK-BLU se-Jawa, peran SPI dari 9 perguruan tinggi masuk dalam kategori sangat baik, sedangkan sisanya masuk dalam kategori baik. Unit SPI Universitas Brawijaya Malang mendapat presentase tertinggi sebesar 93,43%. Ditinjau dari independensinya, SPI di masing-masing perguruan tinggi telah mandiri dan terpisah dari kegiatan-kegiatan yang diperiksanya. Unit SPI bertanggung jawab langsung kepada Rektor atau Direktur sehingga dalam pelaksanaan audit, unit SPI memiliki independensi yang tinggi dan bertindak secara obyektif.

Ditinjau dari kemampuan profesional, auditor yang berada di unit SPI telah memiliki kemampuan profesional yang baik. Kemampuan profesional ini meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan. Ditinjau dari lingkup pekerjaan audit intern, unit SPI telah melakukan pemeriksaan yang meliputi pengujian terhadap keandalan informasi, kesesuaian dengan kebijaksanaan, prosedur dan peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap harta serta penggunaan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien yang akan mendukung tercapainya tata kelola universitas yang baik.

Peran SPI juga ditinjau dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Unit SPI di tiap perguruan tinggi sudah mampu melaksanakan kegiatan pemeriksaan secara baik, yang meliputi perencanaan, pengujian dan pengevaluasian, penyampaian hasil pemeriksaan, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa telah dilakukan tindakan yang tepat terhadap temuan audit yang telah dilaporkan. Ditinjau dari manajemen bagian audit intern, ketua SPI telah mampu mengelola unit SPI secara baik, meliputi memberikan arahan tentang prosedur dan kebijakan yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh auditor di unit SPI dan mengikutsertakan auditornya dalam pendidikan profesi audit berkelanjutan.

Peran SPI yang baik akan mempercepat tercapainya *Good University Governance*. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dari jawaban responden tentang pencapaian *Good University Governance* dapat dilihat bahwa sebanyak 8 perguruan tinggi masuk dalam kategori sangat baik dan sisanya masuk dalam kategori baik. Pencapaian *Good University Governance* yang dimaksud di sini meliputi lima hal, yang pertama adalah transparansi. Ditinjau dari segi transparansi, perguruan tinggi berstatus PK-BLU telah menerapkan prinsip keterbukaan di berbagai bidang, seperti di bidang keuangan, sistem dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, sistem dan prosedur akuntansi, pelaporan keuangan dan informasi-informasi penting lainnya kepada pemangku kepentingan secara memadai, akurat dan tepat waktu.

Ditinjau dari segi akuntabilitas, perguruan tinggi berstatus PK-BLU telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas (secara tertulis). Dilihat dari segi responsibilitas, setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi telah bertanggungjawab atas segala tindakannya sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan peran dan tanggungjawabnya, perguruan tinggi berstatus PK-BLU telah bebas dari segala bentuk benturan yang berpotensi muncul. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen. Hal ini menunjukkan bahwa independensi di dalam perguruan tinggi tersebut sudah terlaksana secara baik.

Prinsip *Good University Governance* yang terakhir adalah ditinjau dari segi keadilan. Perguruan tinggi berstatus PK-BLU telah memberikan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan yang terkait seperti dosen, karyawan maupun mahasiswa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good University Governance* pada perguruan tinggi berstatus PK-BLU yang menjadi obyek dalam penelitian ini sudah tercapai secara baik. Berdasarkan pengolahan data deskriptif yang telah dilakukan, Universitas Brawijaya Malang dapat melaksanakan pengelolaan yang baik di satkernya

secara maksimal dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian *Good University Governance* yaitu mencapai 92,96%.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman (2011), yang mengemukakan bahwa auditor intern memiliki peran yang cukup besar dalam upaya pencapaian *Good University Governance* dalam suatu institusi pendidikan. *Good University Governance* merupakan konsep pengelolaan yang dapat menunjang keberlangsungan usaha perguruan tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Satuan Pengawasan Intern (SPI) berpengaruh positif dalam pencapaian *Good University Governance (GUG)*. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima. *Output PLS* mengindikasikan bahwa secara statistik variabel SPI mampu menjelaskan variabel GUG sebesar 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% dijelaskan oleh variabel lain. Jadi semakin baik peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) maka semakin baik pula pencapaian *Good University Governance (GUG)*.

Saran

1. Mengingat pentingnya peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam pencapaian *Good University Governance (GUG)*, maka peran SPI di tiap-tiap perguruan tinggi perlu ditingkatkan, baik dalam hal independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan audit intern, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan serta manajemen bagian audit intern. Peningkatan kualitas SPI ini salah satunya dengan aktif mengikuti pelatihan audit intern.
2. Pencapaian *Good University Governance (GUG)* tidak semata-mata hanya dipengaruhi oleh peran Satuan Pengawasan Intern (SPI), sehingga penelitian

selanjutnya dapat menambah variabel lain sebagai variabel independen maupun variabel moderating seperti contohnya adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

3. Penelitian ini hanya sebatas meneliti peran SPI pada perguruan tinggi yang berstatus PK-BLU, penelitian selanjutnya dapat diperluas pada instansi dan perguruan tinggi yang belum berstatus PK-BLU namun sudah memiliki SPI.
4. Penelitian selanjutnya dapat memperluas responden dengan tidak hanya auditor SPI saja melainkan pada pihak-pihak mengetahui tugas, wewenang dan peran pengawasan intern seperti Dekan, Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Umum, Kepala Bagian, Kasubbag Akuntansi dan Keuangan, Kepala Biro, Kepala UPT, Ketua Lembaga serta Ketua Badan di lingkungan perguruan tinggi tersebut.

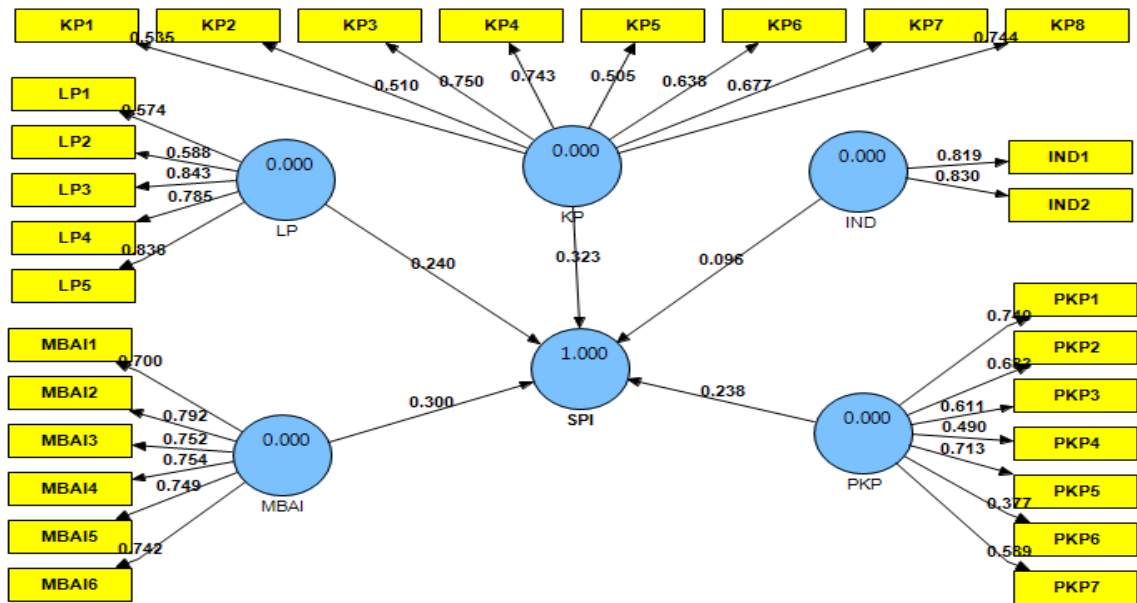
Daftar Pustaka

- Direktorat Pembinaan PK-BLU.2011. *Satker yang telah ditetapkan untuk menerapkan PK BLU Per 14 Desember 2011*. http://pkblu.perbendaharaan.go.id/blu_tetap.php. (18 Desember 2011).
- Ghozali, Imam. 2008. *Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Kontak Banten. 2011. *BPK Temukan 43 Rekening Liar di Kemendiknas*. <http://kontak-banten.blogspot.com/2011/07/bpk-temukan-43-rekening-liar-di.html>. (20 November 2011).
- Metrotvnews.com. 2011. *Laporan Keuangan Kemenkes dan Kemendiknas Bermasalah*.<http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/05/31/53248/Laporan-Kuangan-Kemenkes-dan-Kemendiknas-Bermasalah>. (20 November 2011).
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Panggabean, Maralus. 2011. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Satuan Pengawasan Intern (SPI)*. Makalah Disajikan Dalam Rapat Koordinasi Satuan Pengawasan Intern (SPI), Inspektorat IV-Ijten Kemdikbud Jakarta : 7-9 November 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)*.2005. Jakarta : Lembaga Negara Republik Indonesia.
- Sudarmanto, Gunawan.2011. *Good University Governance: "Pemahaman Pengertian dan Bagaimana Seharusnya Implikasi dalam Penyelenggaraan Perguruan Tinggi"*.Bandung : ITB.
- Sukirman.2011. *Peran Internal Audit dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance di Unnes*. Dalam Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 4. Hal. 64-71.
- Tugiman, Hiro.1997. *Standar Profesional Audit Internal*.Yogyakarta : Kanisius.

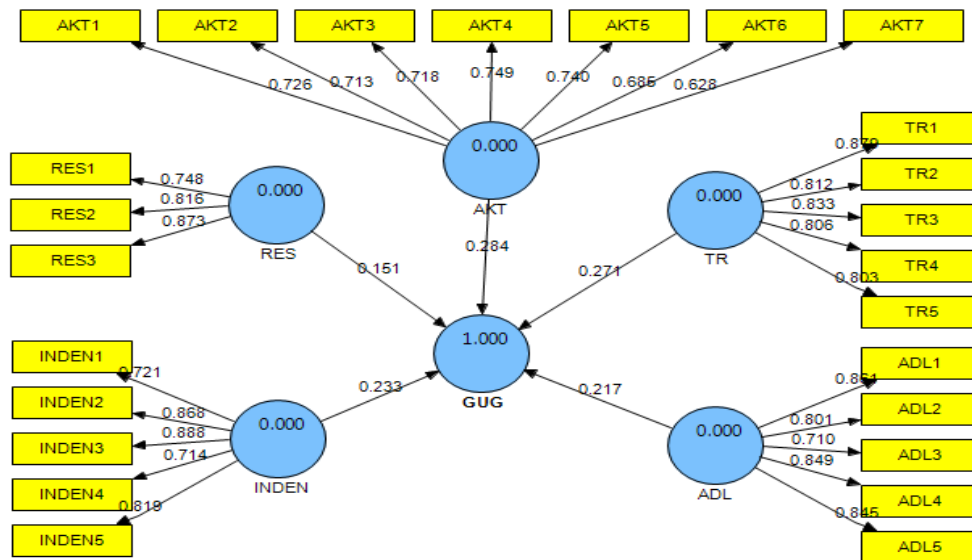
Wijatno, Serian. 2009. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan*. Jakarta : Salemba Empat.

Lampiran

Gambar 1 Hasil uji *outer model* dari butir soal ke indikator pembentuk konstruk SPI

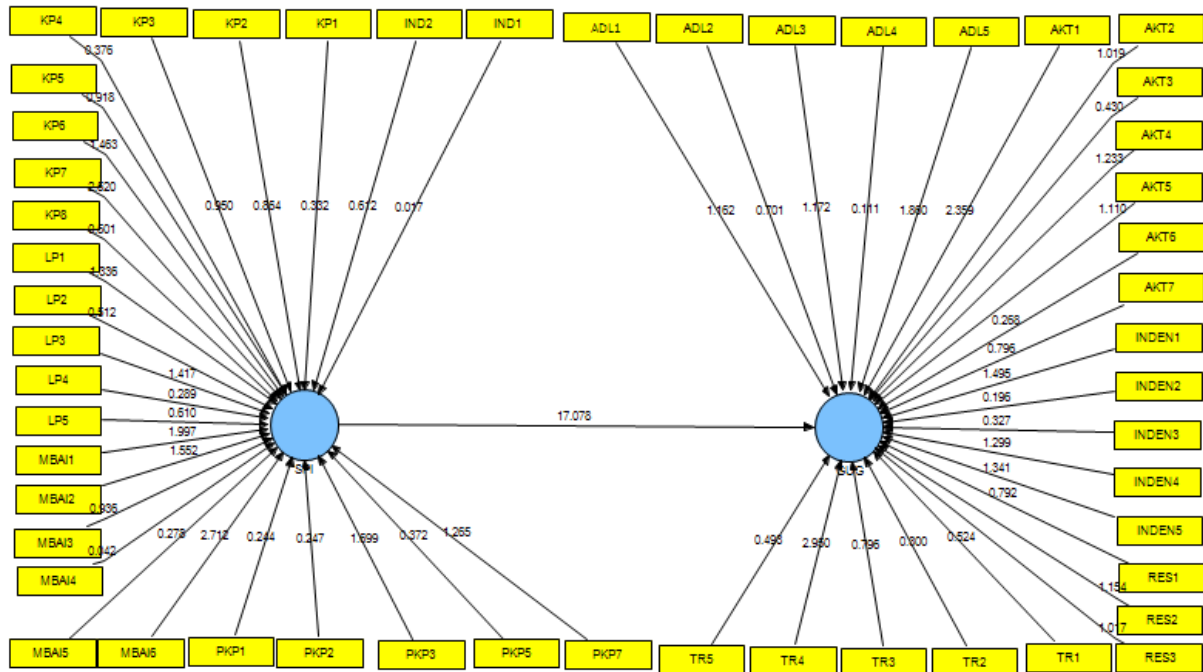


Gambar 2 Hasil pengujian *outer model* dari soal ke indikator pembentuk konstruk



GUG

Gambar 3 Inner Model



Tabel 1
Profil Perguruan Tinggi se Jawa Berstatus PK-BLU
Beserta Total Pengembalian Kuesioner

No.	Perguruan Tinggi	Kementerian yang Menaungi	Status Perolehan BLU	Total Pengembalian Kuesioner
1.	Universitas Brawijaya Malang	Kementerian Pendidikan Nasional	Penuh 17 Desember 2008	5
2.	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya	Kementerian Perhubungan	Penuh 23 Maret 2011	5
3.	Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya	Kementerian Pendidikan Nasional	Penuh 17 Desember 2008	5
4.	Politeknik Kesehatan Surakarta	Kementerian Kesehatan	Penuh 15 Agustus 2011	4
5.	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Kementerian Pendidikan Nasional	Penuh 17 Desember 2009	4
6.	Universitas Negeri Semarang	Kementerian Pendidikan Nasional	Penuh 17 Desember 2008	4
7.	Politeknik Kesehatan Semarang	Kementerian Kesehatan	Penuh 28 Desember 2009	5
8.	Universitas Negeri Yogyakarta	Kementerian Pendidikan Nasional	Penuh 21 April 2009	4
9.	Politeknik Kesehatan Jakarta III	Kementerian Kesehatan	Penuh 17 Desember 2009	3
10.	IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	Kementerian Agama	Penuh 12 Februari 2010	4
11.	Universitas Terbuka	Kementerian Pendidikan Nasional	Penuh 15 Agustus 2011	5
Jumlah				48

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Tabel 2
Nilai Cronbachs Alpha

SPI		GUG	
	<i>Cronbachs Alpha</i>		<i>Cronbachs Alpha</i>
IND	0.529	TR	0.884
KP	0.794	AKT	0.835
LP	0.777	RES	0.743
PKP	0.720	INDEN	0.863
MBAI	0.843	ADL	0.875
SPI	0.923	GUG	0.950

Sumber : *Output* PLS, 2012

Tabel 3
Nilai Composite Reliability

SPI		GUG	
	<i>Composite Reliability</i>		<i>Composite Reliability</i>
IND	0.809	TR	0.915
KP	0.848	AKT	0.876
LP	0.851	RES	0.854
PKP	0.818	INDEN	0.901
MBAI	0.884	ADL	0.908
SPI	0.931	GUG	0.954

Sumber : *Output PLS, 2012*

Tabel 4
Hasil Uji Outer Model dari Indikator ke Konstruk SPI

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standart Deviation</i>	<i>Standart Error</i>	<i>T Statistics</i>	Keterangan
IND -> SPI	0,099	0.097	0.010	0.010	10,385	Valid
KP -> SPI	0.333	0.333	0.019	0.019	17,910	Valid
LP -> SPI	0.243	0.239	0.015	0.015	16,154	Valid
PKP -> SPI	0.216	0.214	0.014	0.014	15,614	Valid
MBAI -> SPI	0.309	0.310	0.022	0.022	14,228	Valid

Sumber : *Output PLS, 2012*

Tabel 5
Hasil Uji Outer Model dari Indikator ke Konstruk GUG

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standart Deviation</i>	<i>Standart Error</i>	<i>T Statistics</i>	Keterangan
TR -> GUG	0.271	0,272	0.016	0.016	16,608	Valid
RES -> GUG	0.151	0,153	0.010	0.010	15,432	Valid
AKT -> GUG	0.284	0,281	0.013	0.013	21,938	Valid
INDEN-> GUG	0.233	0,238	0.018	0.018	12,708	Valid
ADL -> GUG	0.217	0,213	0.019	0.019	11,260	Valid

Sumber : *Output PLS, 2012*

Tabel 6
Nilai *R-square*

	<i>R-Square</i>
GUG (Y)	0,900
SPI (X)	-

Sumber : *Output* PLS, 2012

Pengaruh Pengetahuan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya APBD dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating

YENNY ZELVIANA PRAYOGA

TARJO*

ERFAN MUHAMMAD

Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilakukan di Madura, dengan alasan baru dua kabupaten yang LKPD-nya mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Dalam penelitian ini menggunakan dua kelompok populasi yaitu seluruh anggota DPRD Se-Madura serta masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Akademisi, Mahasiswa, dan Media Masa di Madura.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sehingga, diperoleh sampel sebanyak 96 untuk dewan yang membidangi komisi keuangan dan badan anggaran. Sedangkan, untuk sampel masyarakat juga diperoleh 96 sampel yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan merupakan data primer, yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Pengujian hipotesis pertama menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana. Sedangkan, pengujian hipotesis kedua, ketiga dan keempat menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan pendekatan uji residual.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Kedua, akuntabilitas publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien negatif. Ketiga, partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Dan keempat, transparansi kebijakan publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif.

Kata kunci: Pengetahuan tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah, APBD, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik.

* Corresponding author: tarjo2005@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengawasan keuangan daerah yang di maksud dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 dan PP No. 56 tahun 2005 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pengawasan keuangan daerah yaitu kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Pengawasan APBD merupakan tugas dari DPRD, namun masyarakat juga perlu mengawasi keuangan daerah untuk memastikan tidak ada penyelewengan anggaran oleh pejabat di pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diatur dalam Kepres No. 74 Tahun 2001. Pengawasan ini dimaksudkan agar pemerintah tetap konsisten mengelola keuangan daerah sebagaimana yang telah disepakati dalam perda APBD (Samsul, 2006: 74). Dewan dan masyarakat harus mempunyai pengetahuan yang memadai terkait dengan anggaran untuk mengawasi keuangan daerah, supaya dalam melaksanakan tugasnya dapat mendeteksi apabila terjadi kecurangan dalam penggunaan keuangan daerah khususnya APBD.

Peneliti bermaksud menguji pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD. Hasil penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007), Coryanata (2007), Werimon, dkk (2007), Amrullah (2009), Octavia (2009), Pramita dan Andriyani (2010), Utomo (2011), dan Widyaningsih dan Pujirahayu (2012),

menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD. Namun, sebagian besar hasil penelitian belum menjelaskan secara rinci pengaruh tersebut positif atau negatif. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya hanya menggunakan sampel anggota dewan, padahal dengan munculnya otonomi daerah menuntut adanya partisipasi masyarakat. Baru dalam penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007) yang menggunakan sampel anggota dewan dan masyarakat.

Peneliti juga memasukkan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel *moderating*. Ketiga variabel tersebut akan diuji apakah akan memberikan pengaruh (memperkuat atau memperlemah) terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah khususnya APBD. Alasan peneliti memasukkan ketiga variabel tersebut menjadi variabel *moderating* karena dalam penelitian sebelumnya hasilnya tidak konsisten. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007). Perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada unit analisis data dan sampel yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di Madura, dengan alasan baru dua kabupaten yang LKPD-nya mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Jadi, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari dewan dan juga masyarakat supaya semua LKPD di Madura mendapat opini WTP.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD?
2. Apakah pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan akuntabilitas publik sebagai variabel *moderating*?

3. Apakah pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel *moderating*?
4. Apakah pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan transparansi kebijakan publik sebagai variabel *moderating*?

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan yang berkaitan dengan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu, pada umumnya dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2004: 61). Dewan dan masyarakat perlu mengetahui bagaimana tahapan anggaran, sehingga dapat mengawasi penggunaan anggaran daerah sesuai dengan alurnya. Siklus anggaran menurut Mardiasmo (2004: 70) yaitu: (1) tahap persiapan anggaran (*preparation*), (2) tahap ratifikasi (*ratification*), (3) tahap implementasi (*implementation*), dan (4) tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting dan evaluation*). Sebelum ditetapkan anggaran harus memenuhi prinsip-prinsip dari anggaran sektor publik (Mardiasmo, 2004: 67), meliputi: Otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, *nondiscretionary appropriation*, periodik, akurat, jelas, dan diketahui publik.

2. Pengetahuan Tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pola pikir dewan terkait dengan anggaran, dari pengertiannya, bagaimana anggaran digunakan dan dipertanggungjawabkan serta cara memecahkan suatu masalah terkait dengan anggaran. Menurut Widodo (2001) dalam penelitian Octavia (2009) menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan persepsi dewan tentang anggaran yang diperoleh dari pengetahuan, pendidikan,

pelatihan, dan pengalaman yang pernah ditempuh serta cara mendeteksi adanya pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Selain dewan, masyarakat juga harus memiliki pengetahuan tentang anggaran karena dalam mekanisme pengawasan dewan memerlukan informasi dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan (Samsul, 2006: 75). Melalui *public hearing* yang mengundang kelompok masyarakat baik individu maupun institusi, dewan mendapat masukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan adanya pengetahuan terhadap anggaran yang memadai dari masyarakat akan mendukung pelaksanaan tugas dewan menjadi lebih baik.

3. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004, adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang dalam segala bentuk berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah memiliki dua ruang lingkup, yaitu keuangan daerah yang dikelola langsung yaitu APBD, dan keuangan daerah yang dipisahkan yaitu BUMD (Halim, 2004: 20). Keuangan daerah harus disajikan secara transparan dan terdapat akuntabilitas publik, supaya masyarakat dapat mengakses dan mengetahui penggunaan keuangan daerah. Sehingga, masyarakat percaya terhadap kinerja pemerintah daerah.

4. Konsep APBD

APBD berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 dan PP No. 56 tahun 2005 yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rancangan tahunan daerah yang telah ditetapkan sudah memuat tentang

kegiatan dalam satu tahun dan jumlah anggaran tiap kegiatan juga telah ditetapkan. Sehingga, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD. APBD merupakan arah yang dijadikan tolak ukur tercapainya tujuan pembangunan daerah, namun tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ada kejadian mendesak dan harus diadakan kegiatan diluar konteks yang telah ditetapkan dalam APBD, namun hal tersebut harus dikonfirmasi terlebih dahulu pada dewan dan harus transparan kepada masyarakat.

5. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah khususnya APBD ini dimaksudkan supaya pemerintah tetap konsisten mengelola keuangan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perda tentang APBD. Pengawasan APBD merupakan tugas dewan, namun pada Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat. Pengawasan terhadap APBD pada dasarnya dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme yang melibatkan masyarakat (Samsul, 2006: 75), yaitu:

1. Mekanisme rapat kerja komisi dengan pemerintah.
2. Kegiatan kunjungan kerja, anggota dewan dapat mengadakan dialog dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan proyek yang sedang berjalan dan pelaksanaan APBD.
3. Rapat dengar pendapat umum (*public hearing*), yaitu mekanisme pengawasan dengan mengundang pihak ketiga atau kelompok masyarakat baik individu maupun institusi untuk memberikan pendapat terkait dengan pelaksanaan APBD.

4. Mekanisme pengaduan, baik secara langsung maupun melalui surat. Melalui pengaduan ini dewan dapat memperoleh berbagai keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan fungsi pengawasannya.

6. Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2004: 20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dewan dan masyarakat perlu memahami pentingnya akuntabilitas publik supaya dapat mengawasi keuangan daerah secara maksimal. Pengawasan dewan yang diiringi dengan pengawasan dari masyarakat akan lebih efektif dan membuat masyarakat lebih percaya pada kinerja pemerintah daerah. Agar terjalin kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat, maka dari pihak masyarakat sendiri harus lebih aktif dalam proses pembangunan dan ikut serta dalam pengawasi jalannya pemerintahan, supaya akuntabilitas publik dapat tercapai.

7. Partisipasi Masyarakat

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 pasal 8 juga menjelaskan tentang adanya partisipasi masyarakat sebagai berikut: (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. (2) Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan Negara. Untuk mengaktifkan peran serta dari masyarakat perlu diadakan sosialisasi terkait dengan pentingnya pengawasan keuangan daerah yang ditunjang dengan adanya pasrtisipasi

masyarakat. Peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah, partisipasi masyarakat juga diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan (Coryanata, 2007).

8. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi merupakan akses dan kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang publis tentang penyelenggaraan pemerintahan seperti, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai dalam pemerintahan. Masyarakat dituntut aktif mengakses informasi terkait dengan praktik pemerintahan, supaya dalam mengawasi jalannya pemerintahan masyarakat punya bekal. Dalam Undang-Undang No. 56 tahun 2005 menyatakan bahwa transparansi merupakan kebijakan khusus dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah, dan merupakan variabel terpenting dalam menentukan keberhasilan anggaran menuju konsep pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan meningkatnya transparansi kebijakan publik diharapkan dapat memperkuat pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD.

Rerangka Penelitian: Lampiran Gambar 1.

9. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya APBD

Pengetahuan tentang anggaran perlu dimiliki oleh dewan dan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah, untuk memudahkan dalam mendeteksi apabila terjadi penyalahgunaan anggaran. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Coryanata (2007), Amrullah (2009), Octavia (2009), dan Widyaningsih dan Pujirahayu

(2012) dalam menguji pengaruh pengetahuan dewan pada pengawasan keuangan daerah mendapatkan hasil berpengaruh signifikan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007), Werimon, dkk (2007), Pramita dan Andriyani (2010), dan Utomo (2011) yaitu berpengaruh positif signifikan. Peneliti berharap dengan tingginya pengetahuan tentang anggaran akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan paparan tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: *Pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD*

2. Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya APBD Dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Moderating

Pengawasan dewan yang diiringi dengan pengawasan dari masyarakat akan lebih efektif dan membuat masyarakat lebih percaya pada kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Coryanata (2007), Pramita dan Andriyani (2010), dan Utomo (2011) berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran pada pengawasan keuangan daerah mendapatkan hasil positif signifikan. Namun dalam penelitian yang dilakukan Sopanah dan Wahyudi (2007) mendapatkan hasil sebaliknya yaitu akuntabilitas publik berpengaruh negatif signifikan. Dalam penelitian Widyaningsih dan Pujirahayu (2012) menunjukkan hasil, akuntabilitas tidak berpengaruh. Peneliti berharap dengan meningkatnya akuntabilitas publik maka pengawasan terhadap anggaran juga akan meningkat. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: *Pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan akuntabilitas publik sebagai variabel moderating.*

3. Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya APBD Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating

Peran masyarakat dalam pemerintahan sangat perlu sebagai media pertukaran informasi yang efektif, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan. Hasil penelitian Coryanata (2007), Pramita dan Andriyani (2010), dan Utomo (2011) terkait dengan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran pada pengawasan keuangan daerah mendapatkan hasil berpengaruh signifikan, sedangkan hasil penelitian Werimon, dkk (2007) menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu berpengaruh negatif signifikan. Hasil penelitian Amrullah (2009) menunjukkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian tersebut, didukung hasil penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007) dengan sampel masyarakat juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat diharapkan pengawasan keuangan daerah juga akan meningkat. Berdasarkan paparan tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: *Pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating.*

4. Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya APBD Dengan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating

Dalam melakukan pengawasan keuangan daerah khususnya pengawasan APBD diperlukan adanya transparansi kebijakan publik supaya masyarakat akan lebih mudah dalam ikut serta dalam pengawasan, karena sudah ada informasi yang di publis oleh pemerintah. Hasil penelitian Coryanata (2007), Utomo (2011) menyatakan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah khususnya APBD. Namun, hasil penelitian sebelumnya secara dominan menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan, yaitu hasil penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007), Werimon, dkk (2007), Amrullah (2009), Octavia (2009), Pramita dan Andriyani (2010). Dengan tidak adanya transparansi kebijakan publik pastinya menjadi problema dalam pemerintahan, dimana masyarakat merasa pemerintah daerah masih belum melaksanakan kinerjanya dengan baik. Dengan meningkatnya transparansi kebijakan publik, diharapkan pengawasan keuangan daerah juga akan meningkat. Berdasarkan paparan tersebut hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: *Pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating.*

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Sumber datanya diperoleh dari data primer berupa kuesioner dan data sekunder yang berasal dari buku, media masa, dan

jurnal penelitian yang terkait. Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data primer dari responden adalah dengan cara survei, yaitu cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Daftar pertanyaan (kuesioner) yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kuesioner penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007) serta kuesioner penelitian Pramita dan Andryani (2010), yang kemudian peneliti kembangkan lagi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah penelitian serta mengacu pada teori yang terkait.

2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan dua kelompok populasi yaitu seluruh anggota DPRD Se-Madura serta masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Akademisi, Mahasiswa, dan Media Masa di Madura. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Untuk sampel dewan akan diambil anggota dewan dengan kriteria sebagai berikut, yaitu: (1) Bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan atau Sumenep, (2) Dewan yang membidangi Komisi Keuangan dan Bagian Anggaran, dan (3) Mengetahui proses penganggaran dari penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Sesuai kriteria, peneliti hanya menyebarkan kuesioner pada dewan yang membidangi Komisi Keuangan dan Bagian Anggaran, karena komisi keuangan sangat erat hubungannya dengan anggaran (Coryanata, 2007).

Peneliti akan menyebarkan sebanyak 114 kuesioner pada anggota dewan, karena jumlah anggota dewan yang membidangi Komisi Keuangan dan Badan Anggaran Se-Madura adalah sebanyak 114 anggota dewan. Sedangkan, untuk sampel masyarakat juga akan disebarkan sebanyak 114 kuesioner. Alasan peneliti hanya menyebarkan 114 kuesioner untuk sampel

masyarakat, karena sampel masyarakat jumlahnya tidak bisa diidentifikasi. Selain itu, supaya jumlah sampel masyarakat dapat dibandingkan dengan jumlah sampel dewan. Sehingga, dapat di uji perbedaan fungsi pengawasan keuangan daerah khususnya APBD menurut sampel dewan dan sampel masyarakat (Sopannah dan Wahyudi, 2007). Rincian total sampel anggota dewan terdapat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Total Sampel Anggota Dewan

Daerah	Komisi Keuangan	Badan Anggaran
Bangkalan	10	18
Sampang	10	18
Pamekasan	10	18
Sumenep	11	19
Jumlah	41	73
Total Sampel = 41 + 73 = 114		

Sumber: Data diolah 2013

Sampel masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu: (1) Bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan atau Sumenep, (2) Mengetahui proses penganggaran dari penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, (3) Usia minimal 20 tahun, dan (4) Pendidikan terakhir minimal SLTA atau sederajat. Dalam pemilihan sampel masyarakat dilakukan dengan penyaringan yang ketat dan dipilih responden yang dapat dipercaya, sehingga data yang didapat akan valid dan tidak bias.

3. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini melibatkan 5 variabel yang terdiri dari: Satu variabel dependen dalam penelitian yaitu: pengawasan keuangan daerah khususnya APBD. Satu variabel independen dalam penelitian yaitu: pengetahuan tentang anggaran. Dan, tiga variabel *moderating* dalam penelitian yaitu: akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan model skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan. Adapun jawaban yang disediakan dimulai dari skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju), 2 (TS=Tidak Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 4 (S=Setuju), dan 5 (SS=Sangat Setuju).

4. Uji Kualitas Data

Untuk mengetahui kualitas data yang telah terkumpul maka perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Kedua pengujian ini menggunakan bantuan program *SPSS for window release 16.00*. Suatu pertanyaan dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel atau dengan melihat korelasi dengan nilai signifikan kurang dari 0,05. Sedangkan, uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung *Cronbach Alpha*, untuk menguji kelayakan terhadap konsisten seluruh skala yang digunakan. Menurut Cooper (2000) dalam Wijaya (2009: 217) suatu variabel atau konstruk dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* \geq 0,60.

5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan ada tiga yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Komolgorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data. Apabila probabilitas $>$ 0,05 maka distribusi data dinyatakan normal

dan apabila probabilitas $< 0,05$ maka distribusi data dinyatakan tidak normal. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat angka *Collinearity Statistics* yang ditunjukkan oleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 , maka variabel bebas yang ada memiliki masalah multikolinieritas. Dalam pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas. Jika, probabilitas signifikansi variabel independen $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut (Ghozali, 2007: 109).

6. Uji Hipotesis

Hipotesis pertama dalam penelitian ini diuji dengan pendekatan *Analisis Regresi Linier Sederhana*. Sedangkan, untuk menguji hipotesis kedua, ketiga dan keempat menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan pendekatan interaksi yaitu analisis regresi yang mengandung bentuk interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi (Jogiyanto, 2007: 143). Namun, jika diuji hasilnya menimbulkan multikolonieritas yang sangat tinggi. Maka, untuk mengatasinya digunakan uji residual (Ghozali, 2007: 171). Dengan menggunakan uji residual hipotesis dapat diterima, jika hasilnya signifikan dan koefisien parameternya negatif. Adapun, persamaan regresi untuk menguji hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pertama (H1)

$$Y = a + b_1X_1 + e \dots\dots\dots(3.1)$$

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis kedua, ketiga, dan keempat apabila menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan pendekatan uji interaksi adalah sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis kedua (H2)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2 + e \dots\dots\dots(3.2)$$

2. Pengujian hipotesis ketiga (H3)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_3 + b_3X_1X_3 + e \dots\dots\dots(3.3)$$

3. Pengujian hipotesis keempat (H4)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_4 + b_3X_1X_4 + e \dots\dots\dots(3.4)$$

- Dimana: Y = Pengawasan keuangan daerah khususnya APBD
 a = Konstanta
 X1 = Pengetahuan tentang anggaran
 X2 = Akuntabilitas publik
 X1X2 = Interaksi antara X1 dan X2
 X1X3 = Interaksi antara X1 dan X3
 X1X4 = Interaksi antara X1 dan X4
 b1b2b3 = Koefisien regresi

Apabila menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan pendekatan uji residual, maka persamaan regresi adalah sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis kedua (H2)

$$AP = a + b_1PTA + e \dots\dots\dots(3.5)$$

$$|e| \text{ (DEV1)} = a + b_1 PKD \dots\dots\dots(3.6)$$

2. Pengujian hipotesis ketiga (H3)

$$PM = a + b_2PTA + e \dots\dots\dots(3.7)$$

$$|e| \text{ (DEV2)} = a + b_2 PKD \dots\dots\dots(3.8)$$

3. Pengujian hipotesis keempat (H4)

$$TKP = a + b_3PTA + e \dots\dots\dots(3.9)$$

$$|e| \text{ (DEV3)} = a + b_3 PKD \dots\dots\dots(3.10)$$

- Dimana: PKD = Pengawasan keuangan daerah (APBD)
 a = Konstanta



b_1, b_2, b_3	= Koefisien regresi
e	= Error
PTA	= Pengetahuan tentang anggaran
AP	= Akuntabilitas publik
$ e $ (DEV1)	= Nilai deviasi antara PTA dan AP
PM	= Partisipasi Masyarakat
$ e $ (DEV2)	= Nilai deviasi antara PTA dan PM
TKP	= Transparansi kebijakan publik
$ e $ (DEV3)	= Nilai deviasi antara PTA dan TKP

Selain pengujian hipotesis diatas, penulis juga akan menguji perbedaan fungsi pengawasan keuangan daerah menurut sampel dewan dan sampel masyarakat menggunakan *Chow Test*. Adapun langkah-langkahnya adalah, sebagai berikut:

1. Lakukan regresi observasi total (sampel dewan dijumlah dengan sampel masyarakat) dan dapatkan nilai *Restricted residual sum of squares* atau RSS_r dengan $df = (n_1 + n_2 - k)$ dimana k adalah jumlah parameter yang diestimasi dalam hal ini adalah 2.
2. Lakukan regresi sampel dewan, dan dapatkan nilai RSS_1 dengan $df = (n_1 - k)$.
3. Lakukan regresi sampel masyarakat, dan dapatkan nilai RSS_2 dengan $df = (n_2 - k)$.
4. Jumlahkan nilai RSS_1 dan RSS_2 untuk mendapatkan apa yang disebut *unrestricted residual sum of squares* (RSS_{ur}) dengan $df = (n_1 + n_2 - 2k)$.
5. Hitunglah nilai F test dengan rumus:

$$F = \frac{(RSS_r - RSS_{ur})/k}{(RSS_{ur})/(n_1 + n_2 - 2k)}$$
6. Jika nilai F hitung $>$ F tabel, maka terdapat perbedaan fungsi pengawasan keuangan daerah menurut sampel dewan dan sampel masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan di 4 (empat) Kabupaten Se-Madura, meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Untuk responden dewan disebarakan sebanyak 114 kuesioner pada Komisi Keuangan dan Badan Anggaran. Sedangkan responden masyarakat terdiri dari LSM, Ormas, Media Masa, Akademisi, Mahasiswa, dan Aparatur di Kecamatan juga disebarakan sebanyak 114 kuesioner. Seluruh kuesioner disebarakan kepada responden yang telah memenuhi kriteria. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan 13 Februari 2013. Hasil pengisian kuesioner oleh dewan yang dapat diolah ada 96 kuesioner, dan masyarakat juga sebanyak 96 kuesioner. Jadi, total kuesioner keseluruhan yang dapat diolah adalah sebanyak 192 kuesioner.

Distribusi Kuesioner: Lampiran Tabel 1.

Deskripsi Profil Responden: Lampiran Tabel 2.

2. Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 192, sehingga besarnya df adalah $192 - 2 = 190$ dengan α 0,05 maka nilai r tabel = 0,142. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa ada beberapa item pertanyaan yang tidak valid sehingga harus dilakukan pengujian hingga beberapa putaran, jika r hitung < r tabel maka harus dieliminasi. Pada pengujian variabel pengetahuan tentang anggaran (PTA) hanya 5 item pertanyaan yang valid yaitu X1.1, X1.2, X1.7, X1.8, dan X1.10. Untuk pengujian variabel akuntabilitas publik (AP) semua item valid yaitu 8 pertanyaan. Hasil pengujian validitas variabel partisipasi masyarakat (PM) menunjukkan 10 item pertanyaan valid, yaitu X3.1, X3.3, X3.4, X3.5, X3.6, X3.7, X3.8, X3.9, X3.10 dan X3.12. Pengujian validitas variabel transparansi kebijakan publik (TKP) menunjukkan 6 item pertanyaan valid, yaitu X4.3, X4.4, X4.5, X4.6, X4.7, dan X4.8. Dan,

variabel pengawasan keuangan daerah (PKD) menunjukkan 6 item pertanyaan valid, yaitu Y.1, Y3, Y.6, Y.10, Y.11, dan Y.12 karena nilai r hitung $>$ r tabel. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan menghitung *cronbach alpha*. Semua variabel dinyatakan reliabel karena memberikan nilai *cronbach alpha* $\geq 0,60$. Jadi, masing-masing variabel sudah dapat dikatakan handal sehingga dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Hasil Uji Reliabilitas: Lampiran Tabel 3.

3. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,911 dan nilai signifikansi sebesar 0,377 (nilai $P = 0,377 > 0,05$). Hal tersebut menunjukkan hasil residual dari persamaan regresi telah berdistribusikan normal, dan memberikan gambaran bahwa sebaran data tidak menunjukkan penyimpangan dari kurva normalnya. Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama melalui uji interaksi, hasilnya menunjukkan variabel bebas yang ada memiliki masalah multikolinieritas. Untuk itu dilakukan tahap kedua, yaitu *Treatment* dengan cara melakukan transformasi logaritma. Namun, tahap kedua juga menunjukkan masalah multikolinieritas. Maka peneliti menguji hipotesis kedua, ketiga, dan keempat menggunakan MRA (*Moderated Regression Analysis*) dengan uji residual yang sebelumnya menggunakan uji interaksi.

Hasil Uji Multikolinieritas Tahap Pertama: Lampiran Tabel 4.

Hasil Uji Multikolinieritas Tahap Kedua: Lampiran Tabel 5.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini melalui *uji Glejser*. Setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan bahwa, semua variabel menunjukkan tingkat signifikan lebih dari 0,05. Dengan demikian, model regresi ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Dengan kata lain, model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi pengawasan keuangan daerah khususnya APBD berdasarkan variabel-variabel yang ada.

Hasil Uji Glejser: Lampiran Tabel 6.

4. Uji Hipotesis

1. Hasil Pengujian dan Pembahasan Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya APBD

Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan pendekatan *Analisis Regresi Linier Sederhana* dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Uji Hipotesis Pertama

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig.	Ket
Konstanta	19,876			
X1 (PTA)	0,359	8.782	0,000	Signifikan
	R = 0,537		Adj. R ² = 0,285	

Sumber: Data diolah 2013.

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan nilai t hitung sebesar 8.782 dengan t tabel sebesar 1,972 ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$), dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 dengan batas 0,05 ($\text{probabilitas} < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan, bahwa hipotesis pertama **diterima** yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Nilai *adjusted R²* sebesar 0,285 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 28,5%, sedangkan sisanya sebesar 71,5% dijelaskan oleh faktor lain.

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah untuk sampel dewan. Dilihat dari nilai t hitung sebesar 6,777 dengan t tabel sebesar 1,985 ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$), dan nilai

signifikansinya sebesar 0,000 dengan batas 0,05 (probabilitas < 0,05). Nilai *adjusted R²* sebesar 0,321 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 32,1%, sedangkan sisanya sebesar 67,9% dijelaskan oleh faktor lain. Tabel perbandingan hasil uji dari responden dewan dan responden masyarakat, sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil Uji Hipotesis Pertama

Perbandingan Antara Responden Dewan dan Responden Masyarakat

Responden	Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig.	Ket
Dewan	Konstanta	19,860			
	X1 (PTA)	0,383	6,777	0,000	Signifikan
		R = 0,573	Adj. R ² = 0,321		
Masyarakat	Konstanta	19,912			
	X1 (PTA)	0,334	5,733	0,000	Signifikan
		R = 0,509	Adj. R ² = 0,251		

Sumber: Data diolah 2013

Pada sampel masyarakat juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari nilai t hitung sebesar 5,733 dengan t tabel sebesar 1,985 ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan nilai significansinya sebesar 0,000 dengan batas 0,05 (probabilitas < 0,05). Nilai *adjusted R²* sebesar 0,251 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 25,1%, sedangkan sisanya sebesar 74,9% dijelaskan oleh faktor lain.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan kesesuaian jawaban dari responden dan juga latar belakang pendidikan yang cukup baik

dari responden. Selain itu juga dilihat dari tingginya tingkat keikutsertaan responden dewan maupun responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam kegiatan pelatihan-pelatihan keuangan daerah. Sehingga, jawaban responden tidak bias dan hasil penelitian ini bisa konsisten dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Hasil Pengujian dan Pembahasan Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya APBD dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel *Moderating*

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini, menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan pendekatan uji residual. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Uji Hipotesis Kedua Dengan Uji Residual

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig.	Ket
Konstanta	4,298			
Y (PKD)	-0,061	-1,141	0,255	Tidak Signifikan
	R = 0,082		Adj. R ² = 0,002	

Sumber: Data diolah 2013

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat tingkat signifikansinya sebesar $0,255 > 0,05$ dengan koefisien parameternya negatif sebesar $-0,061$. Maka, akuntabilitas publik tidak terbukti menjadi variabel moderating. Jadi, hipotesis kedua dalam penelitian ini **ditolak**. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien negatif. Dilhat dari nilai *Adjusted R Square* yang sangat kecil sebesar 0,2%, menyebabkan variabel independen yang diuji tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 4.14 pada sampel dewan menunjukkan tingkat signifikansi sebesar $0,346 > 0,05$ dengan koefisien parameternya negatif sebesar $-0,045$. Maka, partisipasi masyarakat tidak terbukti menjadi variabel *moderating*. Jadi untuk sampel dewan, akuntabilitas publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah Khususnya APBD dengan koefisien negatif. Dilihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar $0,1\%$ yang sangat kecil menyebabkan variabel independen yang diuji tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tabel perbandingan hasil uji hipotesis kedua, sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Hipotesis Kedua Dengan Uji Residual

Perbandingan Antara Responden Dewan dan Responden Masyarakat

Responden	Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig.	Ket
Dewan	Konstanta	3,320			
	Y (PKD)	-0,045	-0,948	0,346	Tidak Signifikan
	R = 0,097		Adj. R ² = - 0,001		
Masyarakat	Konstanta	4,467			
	Y (PKD)	-0,053	-0,702	0,484	Tidak Signifikan
	R = 0,072		Adj. R ² = -0,005		

Sumber: Data diolah 2013

Pengujian pada sampel masyarakat menunjukkan tingkat signifikansi sebesar $0,484 > 0,05$ dengan koefisien parameternya negatif sebesar $-0,053$. Maka, akuntabilitas publik tidak terbukti menjadi variabel *moderating*. Jadi untuk sampel masyarakat, akuntabilitas publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien negatif. Dilihat dari nilai *Adjusted R*

Square yang sangat kecil sebesar 0,5%, menyebabkan variabel independen yang diuji tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis kedua ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007) untuk sampel dewan dan sampel masyarakat, namun sama-sama menunjukkan hubungan negatif. Hasil pengujian untuk sampel dewan konsisten dengan hasil penelitian Widyaningsih (2012), yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak memperkuat pengaruh hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah khususnya APBD. Namun, hasil penelitian menurut sampel dewan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Coryanata (2007), Pramita dan Andriyani (2010), dan Utomo (2011) yaitu berpengaruh signifikan positif.

Hasil yang tidak konsistennya ini, dikarenakan lokasi dan kondisi yang berbeda. Selain itu, dilihat dari hasil jawaban responden yang berbeda-beda. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel yang diteliti tidak mampu menjelaskan hasil penelitian. Selain itu, data yang diperoleh dari lapangan tidak mampu menjelaskan teori yang telah dipaparkan oleh peneliti. Tidak diterimanya hipotesis kedua ini menurut penulis dikarenakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari LKPD-nya yang mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) baru dua kabupaten Se-Madura.

3. Hasil Pengujian dan Pembahasan Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya APBD dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel *Moderating*

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini, menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan uji residual. Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat tingkat signifikansinya sebesar $0,321 > 0,05$ dengan koefisien parameternya positif sebesar 0,096.

Maka, partisipasi masyarakat tidak terbukti menjadi variabel *moderating*. Jadi, hipotesis ketiga dalam penelitian ini **ditolak**. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Nilai *Adjusted R Square* yang sangat kecil sebesar 0%, menyebabkan variabel independen yang diuji tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis ketiga dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Hipotesis Ketiga Dengan Uji Residual

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig.	Ket
Konstanta	4,951			
Y (PKD)	0,096	0,994	0,321	Tidak Signifikan
	R = 0,072		Adj. R ² = 0,000	

Sumber: Data diolah 2013

Berdasarkan Tabel 4.16 untuk sampel dewan menunjukkan tingkat signifikansinya sebesar $1,000 > 0,05$ dengan koefisien parameternya negatif sebesar -4,338. Maka, partisipasi masyarakat tidak terbukti menjadi variabel *moderating*. Jadi untuk sampel dewan, partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien negatif. Dilihat dari nilai *Adjusted R Square* yang sangat kecil sebesar 1,1%, menyebabkan variabel independen yang diuji tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tabel perbandingan hasil uji hipotesis ketiga, sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Hipotesis Ketiga Dengan Uji Residual

Perbandingan Antara Responden Dewan dan Responden Masyarakat

Responden	Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig.	Ket
Dewan	Konstanta	3,239			
	Y (PKD)	-4,338	0,000	1,000	Tidak Signifikan
	R = 0,000		Adj. R ² = - 0,011		
Masyarakat	Konstanta	5,106			
	Y (PKD)	0,021	0,143	0,887	Tidak Signifikan
	R = 0,015		Adj. R ² = -0,010		

Sumber: Data diolah 2013

Pengujian pada sampel masyarakat menunjukkan tingkat signifikansinya sebesar 0,887 > 0,05 dengan koefisien parameternya positif sebesar 0,021. Maka, partisipasi masyarakat tidak terbukti menjadi variabel moderating. Jadi untuk sampel masyarakat, partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Dilihat dari nilai *Adjusted R Square* yang sangat kecil sebesar 1%, menyebabkan variabel independen yang diuji tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis ketiga ini konsisten dengan hasil penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007) untuk sampel masyarakat, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dan pengawasan APBD, namun menunjukkan hubungan berbeda. Tetapi untuk sampel dewan menunjukkan hasil dan hubungan yang berbeda. Hasil pengujian untuk sampel dewan ini konsisten dengan hasil penelitian Amrullah (2009), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan. Dan tidak

konsisten dengan hasil penelitian Coryanata (2007), Pramita dan Andriyani (2010), dan Utomo (2011) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif. Juga tidak konsisten dengan hasil penelitian Werimon, dkk (2007) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, namun menunjukkan hubungan sama.

Hasil yang tidak konsisiten ini, dikarenakan lokasi dan kondisi yang berbeda. Selain itu, ada item pertanyaan yang tidak valid sehingga dieliminasi. Tidak diterimanya hipotesis ketiga ini, dikarenakan rendahnya keikutsertaan masyarakat pada proses pemerintahan daerah misalnya pada proses penyusunan dan pengawasan anggaran. Untuk itu perlu adanya sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat. Supaya dalam pengawasan keuangan daerah, dewan lebih mudah mengawasi proyek-proyek pembangunan karena akan mendapat informasi dari masyarakat. Sehingga, fungsi pengawasan yang ada juga akan lebih meningkatkan.

4. Hasil Pengujian dan Pembahasan Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Khususnya APBD Dengan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel *Moderating*

Pengujian hipotesis keempat penelitian ini, menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan uji residual dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Hipotesis Keempat Dengan Uji Residual

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig.	Ket
Konstanta	2,621			
Y (PKD)	0,053	0,908	0,365	Tidak Signifikan
	R = 0,066		Adj. R ² = 0,000	

Sumber: Data diolah 2013

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan tingkat signifikansinya sebesar $0,365 > 0,05$ dengan koefisien parameternya positif sebesar 0,053. Maka, transparansi kebijakan publik tidak terbukti sebagai variabel *moderating*. Jadi, hipotesis keempat dalam penelitian ini **ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan, transparansi kebijakan publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Dilihat dari nilai *Adjusted R Square* yang sangat kecil sebesar 0%, menyebabkan variabel independen yang diuji tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 4.18 dibawah ini untuk sampel dewan tingkat signifikansinya sebesar $0,679 > 0,05$ dengan koefisien parameternya negatif sebesar -0,036. Maka, transparansi kebijakan publik tidak terbukti menjadi variabel *moderating*. Jadi untuk sampel dewan, transparansi kebijakan publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien negatif. Dilihat dari nilai *Adjusted R Square* yang sangat kecil sebesar 0,9%, menyebabkan variabel independen yang diuji tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8

Hasil Uji Hipotesis Keempat Dengan Uji Residual

Perbandingan Antara Responden Dewan dan Responden Masyarakat

Responden	Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig.	Ket
Dewan	Konstanta	4,103			
	Y (PKD)	-0,036	-0,415	0,679	Tidak Signifikan
	R = 0,043		Adj. R ² = -0,009		
Masyarakat	Konstanta	3,688			
	Y (PKD)	-0,016	-0,209	0,835	Tidak Signifikan
	R = 0,022		Adj. R ² = -0,010		

Sumber: Data diolah 2013

Untuk sampel masyarakat menunjukkan tingkat signifikansinya sebesar $0,835 > 0,05$ dengan koefisien parameternya negatif sebesar $-0,016$. Maka, transparansi kebijakan publik tidak terbukti menjadi variabel *moderating*. Jadi untuk sampel masyarakat, transparansi kebijakan publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien negatif. Dilihat dari nilai *Adjusted R Square* yang sangat kecil sebesar 1%, menyebabkan variabel independen yang diuji tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis keempat ini konsisten dengan hasil penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007) untuk sampel dewan, yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dan pengawasan APBD, dengan hubungan negatif. Begitupula untuk sampel masyarakat, hasilnya juga konsisten dengan penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007) namun menunjukkan hubungan yang berbeda. Hasil pengujian untuk sampel dewan juga konsisten

dengan hasil penelitian Werimon, dkk (2007) serta Pramita dan Andriyani (2010), yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan, namun menunjukkan hubungan berbeda. Dan, juga konsisten dengan hasil penelitian Amrullah (2009) dan Octavia (2009). Hasil penelitian untuk sampel dewan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Coryanata (2007) dan Utomo (2011), yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan dengan hubungan positif.

Tidak diterimanya hipotesis keempat ini menurut penulis dikarenakan kurang aktifnya masyarakat dalam mengakses informasi terkait dengan anggaran daerah. Selain itu, dari pihak pemerintah daerah juga belum sepenuhnya terbuka pada masyarakat terkait dengan anggaran daerahnya. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa mendapatkan informasi tentang anggaran tersebut. Hal itu yang menyebabkan transparansi kebijakan publik belum bisa memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD.

5. Pengujian *Chow Test*

Selain pengujian hipotesis diatas, penulis juga akan menguji perbedaan fungsi pengawasan keuangan daerah menurut sampel dewan dan sampel masyarakat. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka fungsi pengawasan keuangan daerah berbeda secara signifikan antara kelompok sampel dewan dan sampel masyarakat. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Chow Test

Pengujian	Rumus	Hasil
Pertama	$(RSSr - RSSur)/k$ $(RSSur)/(n1 + n2 - 2k)$	2,501
Kedua		50,279
Ketiga		29,826
Keempat		3,124

Sumber: Data diolah 2013

Keterangan:

F tabel dengan tingkat sigfikansi 5%, n (188), df (2) = 3,040

$RSSr_1 = 1229,115$ dan $RSSur_1 = 1197,262$

$RSSr_2 = 953,571$ dan $RSSur_2 = 621,269$

$RSSr_3 = 3043,824$ dan $RSSur_3 = 2310,655$

$RSSr_4 = 1115,194$ dan $RSSur_4 = 1079,325$

Pada pengujian pertama di dapat F hitung < F tabel ($2,501 < 3,040$). Jadi, fungsi pengawasan keuangan daerah sama secara signifikan antara kelompok sampel dewan dan sampel masyarakat. Kesamaan ini menurut penulis dikarenakan adanya persepsi yang sama antara sampel dewan dan sampel masyarakat dalam memahami variabel pengetahuan tentang anggaran. Pada pengujian kedua di dapat F hitung > F tabel ($50,279 > 3,040$). Jadi, fungsi pengawasan keuangan daerah berbeda secara signifikan antara kelompok sampel dewan dan sampel masyarakat. Perbedaan ini menurut penulis dikarenakan adanya persepsi yang berbeda antara sampel dewan dan sampel masyarakat dalam memahami variabel pengetahuan tentang anggaran yang di moderasi oleh akuntabilitas publik.

Pada pengujian ketiga di dapat F hitung $>$ F tabel ($29,826 > 3,040$). Jadi, fungsi pengawasan keuangan daerah berbeda secara signifikan antara kelompok sampel dewan dan sampel masyarakat. Perbedaan ini menurut penulis dikarenakan adanya persepsi yang berbeda antara sampel dewan dan sampel masyarakat dalam memahami variabel pengetahuan tentang anggaran yang di moderasi oleh partisipasi masyarakat. Pada pengujian keempat di dapat F hitung $>$ F tabel ($3,124 > 3,040$). Jadi, fungsi pengawasan keuangan daerah berbeda secara signifikan antara kelompok sampel dewan dan sampel masyarakat. Perbedaan ini menurut penulis dikarenakan adanya persepsi yang berbeda antara sampel dewan dan sampel masyarakat dalam memahami variabel pengetahuan tentang anggaran yang di moderasi oleh transparansi kebijakan publik.

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis data pada bab 4, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Hal ini berarti, semakin tinggi pengetahuan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah juga akan meningkat.
2. Akuntabilitas publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien negatif. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum maksimal. Dapat dilihat dari LKPD-nya yang mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) baru dua kabupaten Se-Madura..

3. Partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Hal ini dikarenakan rendahnya keikutsertaan masyarakat pada proses pemerintahan daerah misalnya pada proses penyusunan dan pengawasan anggaran. Untuk itu perlu adanya sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat. Supaya dalam pengawasan keuangan daerah, dewan lebih mudah mengawasi proyek-proyek pembangunan karena akan mendapat informasi dari masyarakat. Sehingga, fungsi pengawasan yang ada juga akan lebih meningkatkan.
4. Transparansi kebijakan publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah khususnya APBD dengan koefisien positif. Hal ini dikarenakan kurang aktifnya masyarakat dalam mengakses informasi terkait dengan anggaran daerah. Selain itu, dari pihak pemerintah daerah juga belum sepenuhnya terbuka pada masyarakat terkait dengan anggaran daerahnya. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa mendapatkan informasi tentang anggaran tersebut.

2. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperbaiki oleh peneliti selanjutnya yaitu, dalam penelitian ini menggunakan metode survei berupa kuesioner, yang sebagian ditinggal ditempat responden. Sehingga, dalam pengisian kuesioner peneliti tidak mengawasi secara langsung yang mengakibatkan adanya item pertanyaan yang tidak valid. Dari keterbatasan tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya selain menggunakan metode survey berupa kuesioner juga dikombinasikan dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Dengan demikian, peneliti dapat mengawasi pengisian kuesioner secara langsung sehingga memberikan informasi yang mendekati

keadaan yang sebenarnya. Selain itu, hasil dari wawancara akan dapat mendukung hasil kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

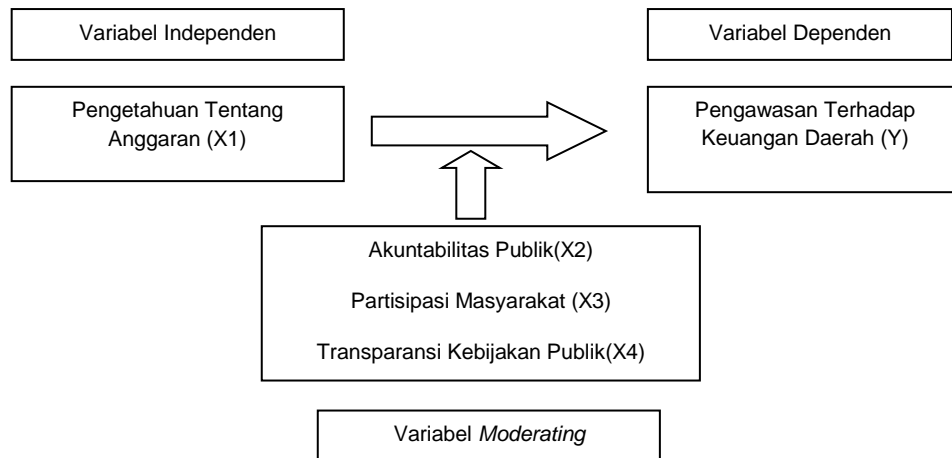
- Amrullah, Ahmad Fauzi. 2009. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Kasus Di Kabuoaten Lumajang). *Skripsi*. FE Universitas Trunojoyo Madura.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- _____. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai *Pemoderating* Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Ghozali, Imam. 2007 dan 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004 dan 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Peneitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jogiyanto. 2007. *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Krina, P. Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Octavia, Novie Triana. 2009. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Pamekasan). *Skripsi*. FE Universitas Trunojoyo Madura.
- Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- Peraturan pemerintah RI No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Se-Karesidenan Kedu). *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Purwoketo.
- Samsul, Inosentius. 2006. *Perda Sebagai Dasar Penganggaran dan Pengawasan DPRD dalam Buku Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Sekretariat Nasional ADEKSI: Subur Printing.
- Sebastian, 2012. *DPR Kantongi Rapor Merah di 2012*. Jakarta: Kompas.com, diakses 30 Desember 2012.
- Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: IKAPI.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*. Bandung: ALFABETA.
- Tarmidji, A. Zaini. 1992. *Fungsi Kontrol DPRD Dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: ANGKASA.
- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Peyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Utomo, Hari. 2011. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD), (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Dan DPRD Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. FE Universitas Diponegoro Semarang.



- Werimon, Simson, Ghozali, Imam dan Nazir, Mohamad. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Widyaningsih, Aristanti dan Pujirahayu, Imaniar. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel *Moderating*. *Media Riset Akuntansi*, Vol. 2, No. 1.
- Wijaya, Tony. 2009. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya
- Yuwono, Soni, Indrajaya, Tengku Agus dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Banyumedia.

Lampiran-Lampiran

Lampiran Gambar 1. Rerangka Penelitian



Lampiran Tabel 1. Distribusi Kuesioner

No	Kuesioner	Responden Dewan		Responden Masyarakat	
		Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
1	Jumlah Kuesioner yang disebarkan	114	100%	114	100%
2	Jumlah Kuesioner yang kembali	96	84%	105	92%
3	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	18	16%	9	8%
4	Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	0	0%	3	3%
5	Jumlah kuesioner yang dikeluarkan	0	0%	6	5%
6	Jumlah Kuesioner yang diolah	96	84%	96	84%

Lampiran Tabel 2. Deskripsi Profil Responden

No	Keterangan	Responden Dewan		Responden Masyarakat	
		Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
1	DAERAH				
	a. Bangkalan	22	22,92%	26	27,08%
	b. Sampang	24	25,00%	28	29,17%
	c. Pamekasan	24	25,00%	17	17,71%
	d. Sumenep	26	27,08%	25	26,04%
2	Jenis Kelamin				
	a. Laki-laki	93	96,88%	68	70,83%
	b. Perempuan	3	3,12%	28	29,17%
3	Usia				
	a. 20-30 tahun	12	12,50%	45	46,88%
	b. 31-40 tahun	33	34,37%	29	30,21%
	c. 41-50 tahun	39	40,63%	19	19,79%
	d. \geq 50 tahun	12	12,50%	3	3,12%
4	Pendidikan Terakhir				
	a. SMA/SMK	11	11,46%	9	9,38%
	b. D1/D2/D3	1	1,04%	3	3,12%
	c. S1	72	75,00%	51	53,13%
	d. S2	12	12,50%	32	33,33%
	e. S3	0	0,00%	1	1,04%
5	Lama Menjadi Anggota DPRD				
	a. 1 Periode	65	67,71%		
	b. 2 Periode	24	25,00%		
	c. \geq 2 Periode	7	7,29%		
6	Komisi				
	a. Komisi Keuangan	38	39,58%		
	b. Badan Anggaran	58	60,42%		
7	Pengalaman Politik/Organisasi				
	a. \leq 2 Tahun	0	0,00%	10	10,42%
	b. 2-5 Tahun	24	25,00%	42	43,75%
	c. \geq 5 Tahun	72	75,00%	44	45,83%
8	Keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah				
	a. Belum Pernah	7	7,29%	39	40,63%
	b. 1 Kali	10	10,42%	18	18,75%
	c. 2/3 Kali	16	16,67%	26	27,08%
	d. 4 Kali atau Lebih	63	65,62%	13	13,54%
9	Responden Masyarakat				
	a. LSM			15	15,62%
	b. Akademisi			19	19,80%
	c. Ormas			15	15,62%
	d. Mahasiswa			10	10,42%
	e. Media Masa			22	22,92%
	f. Kecamatan			15	15,62%

Lampiran Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Pertanyaan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Ket
1	X1	5	0,826	0,60	Reliabel
	X2	8	0,698	0,60	Reliabel
	X3	10	0,890	0,60	Reliabel
	X4	6	0,788	0,60	Reliabel
	Y	6	0,706	0,60	Reliabel

Lampiran Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Tahap Pertama

Uji Hipotesis	Variabel	VIF	Hasil Keputusan
Kedua	X1 (PTA)	106,960	Terjadi Multikolinieritas
	X2 (AP)	17,689	Terjadi Multikolinieritas
	X1X2	117,601	Terjadi Multikolinieritas
Ketiga	X1 (PTA)	16,884	Terjadi Multikolinieritas
	X3 (PM)	13,739	Terjadi Multikolinieritas
	X1X3	28,496	Terjadi Multikolinieritas
Keempat	X1 (PTA)	15,462	Terjadi Multikolinieritas
	X4 (TKP)	18,064	Terjadi Multikolinieritas
	X1X4	32,678	Terjadi Multikolinieritas

Lampiran Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Tahap Kedua

Uji Hipotesis	Variabel	VIF	Hasil Keputusan
Kedua	X1 (PTA)	1,210	Tidak Terjadi Multikolinieritas
	X2 (AP)	111,927	Terjadi Multikolinieritas
	X1X2	1,260	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Ketiga	X1 (PTA)	194,759	Terjadi Multikolinieritas
	X3 (PM)	82,113	Terjadi Multikolinieritas
	X1X3	266,020	Terjadi Multikolinieritas
Keempat	X1 (PTA)	104,870	Terjadi Multikolinieritas
	X4 (TKP)	105,130	Terjadi Multikolinieritas
	X1X4	209,649	Terjadi Multikolinieritas

Lampiran Tabel 6. Hasil Uji Glejser

Uji Hipotesis	Variabel	Sig.	Keterangan
Kedua	Konstanta	0,466	-
	X1	0,148	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
	X2	0,164	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
	Moderat 1	0,086	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Ketiga	Konstanta	0,459	-
	X1	0,717	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
	X3	0,353	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
	Moderat 2	0,296	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Keempat	Konstanta	0,314	-
	X1	0,945	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
	X4	0,468	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
	Moderat 3	0,438	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

**Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

HERMIN ARIFIANTI*

PAYAMTA

SUTARYO

Universitas Sebelas Maret

Abstract: *This study discusses about the accountability of local governments in Indonesia. This study aims to examine the effect of financial investigation from Supreme Audit Institution in Indonesia - BPK RI (audit findings of internal control weakness, audit findings of noncompliance with regulations, and follow up recommendations), oversight from parliament, and supervision public with the local government's performance in Indonesia. This study uses multiple regression method to 197 districts/municipalities as a sample selected by purposive sampling method.*

This study provides evidence that the result of investigation by BPK about audit findings of internal control weakness and audit findings of noncompliance with regulations have significant negative effect on local government's performance, and follow up recommendations have significant positive effect on local government's performance. While for oversight by legislature does not significant effect on the performance of local government and public supervision have significant positive effect. In other words, the implementation of external monitoring is more influential than internal monitoring in local government Indonesia.

Keywords: *Monitoring Mechanism, the Local Government's Performance, Audit Findings, Follow Up Recommendations, Oversight by Legislature, Public Supervision.*

* Corresponding author: hademeanz3@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Transformasi sistem pemerintahan dari sentralistik ke dalam desentralistik mengubah hubungan antara rakyat Indonesia dan negara. Otonomi daerah memberikan porsi kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerahnya (Bennet, 2010). Hubungan hak dan kewajiban daerah yang berupa hubungan antara penggunaan sumber daya (input) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara efisien dan efektif (Purnomo, 2008). Sebagai daerah otonom, daerah diberi hak, wewenang, sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pada proses pendelegasian wewenang terdapat hubungan antara masyarakat/*principal* dengan pemerintah daerah/*agent*, legislatif/*principal* dengan pemerintah daerah/*agent*, dan juga antara masyarakat/*principal* dengan legislatif/*agent*. Adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing peran, mengakibatkan adanya konflik yang disebut sebagai *agency conflict*.

Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu dengan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya melalui suatu proses yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, dan memenuhi tujuan pelayanan publik (efektif) (Widyananda, 2008). *Good governance* diperlukan untuk dapat meminimalkan adanya *agency conflict*. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah (Rahmanurrasjid, 2008). Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia karena perbaikan akuntabilitas kinerja dapat berdampak pada upaya terciptanya *good governance* (Pambelum dan Urip, 2008). Akuntabilitas oleh pemerintahan di Indonesia mulai diberikan perhatian khusus. Hal ini berarti bahwa pemerintahan di Indonesia tidak lagi memperhatikan masalah-masalah input

dan output saja, tetapi telah memasuki tahapan yang berorientasi pada proses dan kinerja. Dengan kata lain, proses dan kinerja telah menjadi sebuah tuntutan masyarakat (Ishak, 2009).

Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda, baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan daerah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, menjelaskan bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan keuangan negara yang dilakukan pemerintah daerah. Auditor (BPK) sebagai pihak ketiga yang independen diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* melalui laporan keuangan.

Mengacu pada UU No 32 Tahun 2004, partisipan pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, lembaga bupati atau walikota, dan DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif yang berperan sebagai mitra kerja eksekutif daerah mempunyai tiga fungsi secara khusus yaitu fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam fungsi pengawasan, DPRD dapat dianggap setara dengan *board* dalam

governance berdasarkan konsep keagenan. Selain itu, juga terdapat pengawasan masyarakat (Waskat) sebagai *social control*. Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi.

Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan dan mengelola urusan daerah akan memperlihatkan performa (kinerja) daerah. Dalam menjalankan urusan tersebut, pemerintah daerah tidak menjadi satu-satunya pelaku. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah saja, melainkan perlu ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma *good governance* yang mengedepankan keterpaduan antara pemerintah (*state*), swasta (*private*), dan masyarakat (*society*) sebagai suatu sistem (LAN, 2007). Oleh karena itu, kinerja daerah tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai suatu sistem penyelenggaraan otonomi daerah.

Penelitian ini mengulas mengenai akuntabilitas pemerintah daerah terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipandang dari hasil pemeriksaan oleh BPK, seperti kelemahan sistem pengendalian intern; ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit, serta dari DPRD dan masyarakat yang digunakan sebagai pengawasan untuk mengetahui apakah otonomi daerah telah membuahkan capaian sesuai dengan yang diharapkan atau justru kontraproduktif dengan apa yang telah direncanakan.

B. TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Agency Theory

Mengacu pada teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak, yang muncul ketika satu orang atau lebih

sebagai pemilik (*principal*) untuk mempekerjakan orang lain (*agent*) agar dapat memberikan suatu jasa kepada *principal* dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Dalam lingkup pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat beberapa hubungan keagenan, yaitu antara masyarakat dan pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD, dan DPRD dan pemerintah daerah (Nuraeni, 2012). Hubungan tersebut seperti hubungan antara *principal* dan *agent*. *Principal* memberikan wewenang pengaturan kepada *agent*, dan memberikan sumber daya kepada *agent* (dalam bentuk pajak dan lain-lain) (Pabelum dan Urip, 2008). Hubungan rakyat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah daerah (*agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat.

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tugas dan wewenang kepala daerah yaitu memberikan laporan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah. Bentuk laporan pertanggungjawaban yang lebih rinci dijelaskan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat. Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD. Kinerja merupakan hasil/keluaran dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau disebut sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB).

3. Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BPK sesuai dengan fungsinya yaitu memeriksa, menguji, dan menilai dalam penggunaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR untuk pengelolaan keuangan negara, dan kepada DPRD untuk pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menghasilkan temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta tindak lanjut rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

a. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern seharusnya bertumpu pada penguatan sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan, penetapan prosedur dan reviu pada seluruh tahapan. Sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja (Sarita, 2012). Partisipasi pimpinan dalam penyusunan anggaran, dan adanya kejelasan sasaran anggaran yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja dengan adanya sistem pengendalian dan pengawasan intern yang efektif. Pelaksanaan evaluasi anggaran dan umpan balik yang diperoleh diharapkan menjadi bahan penilaian terhadap keefektifan sistem pengendalian intern, sehingga semakin efektif sistem pengendalian intern, maka semakin meningkat pula kinerjanya (Ramandei, 2009).

Penelitian Shodiq (2001) serta Boritz dan Jee (2007) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak adanya dukungan terhadap pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan. Perusahaan yang menghadapi ketidakpastian lingkungan yang tinggi dan menghadapi berbagai faktor kontijensi, yang cenderung melakukan perubahan secara perlahan menyesuaikan terhadap faktor-faktor kontijensi tersebut, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi terlebih jika harus dilakukan penataan ulang

terhadap subsistem organisasional. Apabila penataan ulang tersebut sampai berlarut-larut, maka tujuan pencapaian kinerja yang tinggi tidak akan tercapai dengan baik. Penelitian juga menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kelemahan pengendalian intern akan memiliki kinerja keuangan yang lebih lemah karena pengeluaran banyak dibutuhkan untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern dan gangguan operasional. Kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Kasus kelemahan SPI yang lain meliputi pejabat yang bertanggungjawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan yang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Dengan adanya temuan kelemahan sistem pengendalian intern, maka pemerintah daerah seharusnya akan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan sistem tersebut, agar dapat menciptakan sistem terintegrasi yang efisien dan mudah mencapai tujuan. Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

H_{1a}: Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang.

b. Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

Menurut pandangan Choi (2011) akuntansi memiliki kaitan dengan hukum. Terdapat beberapa elemen lingkungan yang dapat mempengaruhi akuntansi yaitu sistem akuntansi, sumber pendanaan, perpajakan, hubungan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, hukum dan perkembangan akuntansi. Temuan kerugian negara/daerah sebagai akibat perbuatan

melawan hukum baik sengaja maupun lalai karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat berupa pemborosan dan kebocoran dana hingga korupsi. Hal tersebut menjelaskan bahwa kinerja pemerintahan daerah rendah, disebabkan karena tidak adanya upaya optimalisasi pengelolaan dana publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Tobirin (2008) menjelaskan bahwa selama ini penilaian kinerja aparat birokrasi tidak berbasis kinerja, tetapi hanya berbasis pada kepatuhan semata. Meskipun beberapa praktik kepatuhan dapat membatasi kinerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi. Kepatuhan yang baik yang merupakan bagian dari manajemen yang baik, sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Vago, 2008). Penelitian Zirman dan Rozi (2010) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kepatuhan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Semakin banyak temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut, yang merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam EKPPD rendah, sehingga pengelolaan keuangan tersebut kurang baik yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan pemeriksaan, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah (Mustikarini dan Debby, 2012). Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

H_{1b}: Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang.

c. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa yang relevan berdasarkan temuan pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Setiap temuan pemeriksaan dapat memiliki satu atau lebih rekomendasi. Rekomendasi dapat meminimalisasi akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk ditindaklanjuti terutama berkaitan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah yang diaudit. Selain itu, tindak lanjut dilakukan agar temuan-temuan hasil pemeriksaan tidak terjadi secara berulang-ulang (Widiatmoko, 2012).

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pejabat wajib memberikan alasan yang sah, dan kemudian apabila tanpa adanya alasan yang sah, maka BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Tindak lanjut atas temuan audit berdasarkan rekomendasi merupakan suatu upaya *continuous improvement* atas kinerja entitas yang diperiksa. Bagi lembaga

pemeriksaan, tindak lanjut merupakan suatu evaluasi tentang kualitas hasil pemeriksaan. Manfaat dari suatu pemeriksaan hanya dapat dirasakan, apabila hasil temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti. Tanpa tindak lanjut dari parlemen, eksekutif, instansi yang diperiksa dan aparat yang diberi wewenang melakukan investigasi, pemeriksaan menjadi tidak efektif dan akuntabilitas hanya akan menjadi mimpi belaka (Dwiputrianti, 2008).

Keefektifan suatu pemeriksanan dan penilaian tersebut tidak hanya tergantung oleh perencanaan yang baik tetapi juga ditentukan oleh adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang diajukan oleh auditor internal (Sali, 2010). Dalam hal ini dibutuhkan adanya hubungan yang baik antara auditor dengan pihak manajemen. Auditor dituntut untuk dapat memberikan suatu rekomendasi yang realistis serta tepat guna terhadap pihak manajemen serta pihak manajemen juga harus dapat merealisasikan rekomendasi yang diberikan auditor dengan tepat, sesuai dengan yang menjadi rekomendasi sebelumnya. Dalam penelitian Dwiputrianti (2011), tindak lanjut dari hasil temuan dan rekomendasi dari pemeriksaan masih relatif rendah. Beberapa instansi mengatakan bahwa tindak lanjut dari kasus korupsi atau pelanggaran tidak bisa dalam waktu singkat ditindaklanjuti dan membutuhkan waktu untuk diproses lebih dalam lagi.

Dalam mengupayakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit agar dapat segera ditindak lanjuti diperlukan langkah-langkah yang dapat memacu manajemen untuk segera dapat menyelesaikan tindak lanjut temuan audit tersebut. Dengan memasukan faktor penyelesaian tindak lanjut sebagai salah satu faktor non finansial ke dalam penilaian kinerja manajemen, diharapkan dapat menjawab kendala terhadap tidak terselesaikannya tindak lanjut temuan audit, sehingga dapat meningkatkan nilai

kinerja secara keseluruhan (Hartono, 2006). Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

H_{1c}: Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang.

4. Fungsi Pengawasan DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien atau bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik.

Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan aktivitas sebagai kontribusi untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien (Kartiwa, 2006).

Anggota DPRD yang sekaligus menjadi anggota partai politik tertentu semestinya dapat menjadi bagian dari sistem yang mengkritisi kinerja eksekutif. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran kepala daerah kepada DPRD yang berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap hasil kerja selama satu tahun anggaran dan sebagai laporan kemajuan pelaksanaan tugas (progress

report), maka laporan tersebut merupakan alat untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun-tahun berikutnya. DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, diharapkan benar-benar dapat memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan publik, dan harus mampu mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati dalam proses legislasi dan penganggaran (Muhi, 2011). Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

H₂: Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang.

5. Pengawasan Masyarakat dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi dengan cara pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpang atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD atau berupa penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah. Informasi dan pendapat tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait (Cahyat, 2004).

Pengawasan masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Salah satu indikator kualitas pendidikan masyarakat adalah indeks pembangunan manusia

(IPM). Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya manusia berkualitas maka wilayah ini akan jauh lebih berkembang dibanding wilayah lainnya (Amaliah, 2004). Penelitian Manasan, Gonzalez, dan Gaffud (1999), Ranis, Stewart dan Ramirez (2000) menyatakan bahwa daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

H₃: *Pengawasan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang.*

C. METODE PENELITIAN

1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia Tahun 2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria dan hasil pengambilan sampel penelitian tersaji dalam Tabel 1 berikut ini.

INSERT TABEL 1

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Sumber data terdiri dari hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011 yang dipublikasi dalam SK Mendagri Nomor 120-2818 Tahun 2013, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2010 yang dipublikasi melalui *website* Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Badan Pemeriksa Keuangan, komposisi anggota DPRD yang mendukung pemilihan kepala daerah dipublikasikan melalui *website* Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010 yang dipublikasi melalui *website* Badan Pusat Statistik.

3. Variabel dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan variabel independen yang terdiri dari; hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK yang terdiri dari kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan tindak lanjut temuan pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi, serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, dan pengawasan masyarakat. Selain itu juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran daerah dan tipe daerah. Variabel dan pengukurannya secara lengkap dapat disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

INSERT TABEL 2

Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan oleh Kemendagri. Penelitian yang dilakukan Lee (2008) membahas indikator dan informasi kinerja yang menggunakan laporan tahunan sebagai sarana pengawasan untuk manajemen intern dan akuntabilitas ekstern. Penelitian ini menggunakan definisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini berasal dari Laporan Hasil Pemeringkatan Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2011. Variabel independen dalam penelitian ini seperti yang digunakan pada penelitian Manasan, Gonzalez, dan Gaffud (1999), Vafeas (2000), Hartono (2006), Johnson et al. (2008), dan Mustikarini dan

Debby (2012) yaitu hasil pemeriksaan oleh BPK yang berupa temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern, temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi. Selain itu juga menggunakan komposisi dewan di daerah yang mendukung dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2010 dan indeks pembangunan manusia tahun 2010, sebagai sarana pengawasan dari DPRD dan masyarakat.

4. Model Penelitian

Metode pengujian yang dilakukan menggunakan uji regresi berganda dengan formula sebagai berikut.

$$KPPD_{it} = \alpha - \beta_1 KSPIPD_{it-1} - \beta_2 KPDKPU_{it-1} + \beta_3 TLTPSR_{it-1} + \beta_4 FPDPRD_{it-1} + \beta_5 WASKAT_{it-1} + \beta_6 SIZELG_{it-1} + \beta_7 TYPELG_{it-1} + \varepsilon_i$$

keterangan:

$KPPD_{it}$: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah i tahun t
$KSPIPD_{it-1}$: Kelemahan SPI pada pemerintah daerah i pada tahun $t-1$
$KPDKPU_{it-1}$: Ketidakpatuhan Peraturan pada pemerintah daerah i tahun $t-1$
$TLTPSR_{it-1}$: Tindak Lanjut Rekomendasi pemerintah daerah i tahun $t-1$
$FPDPRD_{it-1}$: Komposisi DPRD pada daerah i pada tahun $t-1$
$WASKAT_{it-1}$: Pengawasan masyarakat pada pemerintah daerah i tahun $t-1$
$SIZELG_{it-1}$: Ukuran aset pemerintah daerah i tahun $t-1$
$TYPELG_{it-1}$: Tipe pemerintahan daerah (kabupaten/kota) pada tahun $t-1$
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_7$: Koefisien regresi
ε_i	: <i>Standard error</i>

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi yang dimaksud meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Selengkapnya deskripsi data dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.

INSERT TABEL 3

2. Asumsi Klasik

Asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas telah terpenuhi dan tersaji dalam Tabel 4.

INSERT TABEL 4

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test* seperti pada Tabel 4, yang menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov (K-S) Z* untuk sampel penelitian 197 sebesar 1,379 dan probabilitasnya sebesar 0,045 yang nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Karena hasil penelitian menunjukkan tidak normal, maka dilakukan identifikasi dan membuang data *outlier*. Akhirnya diperoleh sampel akhir sebanyak 187 dan data terdistribusi dengan normal karena nilai signifikansinya menjadi 0,609 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov (K-S) Z* sebesar 0,761.

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM Test) karena dalam penelitian ini menggunakan sampel besar yaitu diatas 100. Dalam Tabel 4

uji autokorelasi menunjukkan koefisien parameter untuk residual memberikan probabilitas sebesar 0,683 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya masalah autokorelasi.

Hasil uji Park untuk menguji adanya heteroskedastisitas dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak ada yang signifikan secara statistik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Hasil uji VIF dan Tolerance dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance di atas 10% dan nilai VIF di bawah 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini terbebas dari multikolonieritas atau tidak ada korelasi antar variabel bebas.

3. Pengujian Hipotesis

Hasil analisis data dengan menggunakan model regresi berganda dalam penelitian ini dapat disajikan dalam Tabel 5 berikut ini.

INSERT TABEL 5

Nilai *adjusted* R^2 digunakan untuk melihat seberapa besar variasi dari nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel-variabel independennya. Nilai *adjusted* R^2 pada Tabel 5 sebesar 0,250; berarti hanya 25% variasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dijelaskan oleh pengawasan pihak ekstern yang berupa hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan masyarakat, serta pengawasan intern yang dilakukan oleh DPRD, sedangkan 75% variasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel independen dalam penelitian ini. Nilai F value pada Tabel 5 sebesar 9,873 dengan

signifikansi 0,000, artinya bahwa model regresi tersebut layak (*fit*) untuk digunakan dalam pengujian dan secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen.

Variabel kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah (KSPIP) dengan nilai probabilitas 0,021 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 5%, sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya, yaitu kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shodiq (2001), Imas (2009), Mawanda (2011), Muraleetharan (2011), Lego (2012), Suyono dan Hariyanto (2012), serta Sarita (2012) yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif, maka kinerja yang dihasilkan akan semakin tinggi. Pada penelitian Aikins (2011) dan Johnson et al.(2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan audit dan efektivitas pengendalian intern dengan kinerja keuangan. Dengan laporan audit yang mempertimbangkan keakuratan dan keandalan informasi keuangan, sehingga dapat memungkinkan untuk memperbaiki kekurangan atas pengendalian intern. Auditor membantu entitas untuk bertanggungjawab kepada masyarakat melalui peningkatan pengendalian intern yang efisien dan kinerja keuangan. Pelaksanaan sistem pengendalian intern bertumpu pada penguatan sistem pengendalian yang sudah terbangun dan dilaksanakan oleh seluruh aktor dalam organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, penyiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan, penetapan prosedur dan reviu pada seluruh tahapan pembangunan. Sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja (Sarita, 2012). Partisipasi pimpinan dalam penyusunan anggaran, dan adanya kejelasan sasaran anggaran yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja dengan adanya sistem pengendalian dan pengawasan intern yang efektif.

Pelaksanaan evaluasi anggaran dan umpan balik yang diperoleh diharapkan menjadi bahan penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern, sehingga semakin efektif sistem pengendalian intern maka semakin meningkat pula kinerjanya (Ramandei, 2009).

Variabel ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan (KPKPU) dengan nilai probabilitas 0,051 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 10%, sehingga hipotesis kedua diterima. Penelitian ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya, yaitu ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin banyak temuan audit, maka pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersebut juga kurang baik, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap buruknya kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan pemeriksaan, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah (Mustikarini dan debby, 2008). Dalam penelitian Zirman dan Rozi (2010) juga menyatakan bahwa ketidakpatuhan pada peraturan perundangan juga memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian serupa juga dihasilkan dalam penelitian Riantiarno (2011). Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ditentukan langsung oleh ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Meskipun beberapa praktik kepatuhan dapat membatasi kinerja organisasi, tetapi praktik kepatuhan yang baik akan selalu mendukung fungsi efisien dan efektif dari suatu organisasi, sehingga dengan kepatuhan yang baik yang merupakan bagian dari manajemen yang baik, sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Vago, 2008).

Variabel tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi (TLTPSR) dengan nilai probabilitas 0,003 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 1%, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis

sebelumnya, yaitu tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada penelitian Lucky dalam Sali (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara tindak lanjut rekomendasi manajemen audit terhadap kinerja. Penelitian Hartono (2006), menunjukkan adanya peningkatan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan audit dari tahun ke tahun. Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mendefinisikan proses manajemen kinerja yang mampu memperbaiki dan mengembangkan kinerja maupun kompetensi aparat pemerintah, baik sebagai individu maupun sebagai tim untuk meningkatkan efektivitas institusi secara keseluruhan.

Variabel fungsi pengawasan DPRD (FPDPRD) dengan nilai probabilitas 0,122 yang lebih besar dari tingkat kesalahan 10%, sehingga hipotesis keempat ditolak. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau kurang efektif. Pengawasan yang dilakukan belum memberikan umpan balik yang substansial untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau melakukan koreksi perbaikan. Akibat DPRD yang belum bekerja secara profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pihak eksekutif berjalan tanpa pengawasan yang berarti dan hasil pengawasan kurang memberikan manfaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan kata lain bahwa anggota DPRD terpilih belum optimal melakukan kinerja pengawasan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nafchuka (2003), Kahar (2005), Mahuse (2010), dan Santoso (2012). Penyebab belum optimalnya fungsi pengawasan oleh DPRD yaitu karena sistem partai yang terpusat membuat anggota DPRD menjadi lebih memperjuangkan kepentingan partai/golongan/kelompoknya sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Hal ini sangat masuk akal mengingat mereka adalah anggota/kader partai yang berkewajiban memperjuangkan

kepentingan partainya. Karena itu, dalam pengambilan keputusan mereka tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan kelompok.

Variabel pengawasan masyarakat (WASKAT) dengan nilai probabilitas 0,006 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 1%, sehingga hipotesis kelima diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Manasan, Gonzalez, dan Gaffud (1999), Ranis, Stewart, dan Ramirez (2000), serta Amaliah (2004) yang menyatakan bahwa variabel pembangunan manusia sangat mempengaruhi kinerja. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya, ketika kualitas pembangunan manusia baik maka kinerja juga akan meningkat. Sumber daya manusia (SDM) merupakan motor penggerak tumbuhnya perekonomian suatu wilayah. Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka wilayah ini akan jauh lebih berkembang dibanding daerah lainnya. Ini terjadi karena penduduk di daerah tersebut akan lebih mudah dalam mengadopsi berbagai informasi maupun teknologi yang ada. Penduduk di daerah tersebut akan menjadi lebih produktif dalam mengelola sumber-sumber potensial yang dapat mendorong pertumbuhan daerahnya. Pengawasan masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pengaduan atas dugaan terjadinya penyimpang atau penyalahgunaan kewenangan. Partisipasi masyarakat sangat penting karena pada dasarnya bentuk kebijakan otonomi dan desentralisasi harus tetap mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Jika partisipasi rakyat di daerah tinggi maka proses terciptanya otonomi dan desentralisasi akan terlaksana dengan lancar dan baik. Dengan demikian, adanya partisipasi masyarakat akan meningkatkan pengawasan jalannya pemerintahan daerah.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan ekstern yang dilakukan oleh masyarakat dan hasil pemeriksaan oleh BPK terkait kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai sarana perbaikan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang. Sementara itu, fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh DPRD tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan datang. Hal ini mengindikasikan bahwa anggota dewan masih lebih mementingkan partainya daripada kinerja daerahnya.

2. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai keterbatasan seperti berikut.

- a. Penelitian ini menggunakan sumber data dari *website* pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengumpulan data karakteristik DPRD yang beberapa non aktif, tidak dapat diakses atau tidak mempublikasikan data DPRD.
- b. Pengawasan masyarakat dalam penelitian ini hanya menggunakan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang tidak secara langsung menunjukkan aktivitas pengawasan masyarakat pada pemerintah daerah.
- c. Pengawasan DPRD dalam penelitian ini hanya menggunakan komposisi dewan sebagai karakteristik DPRD.

3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan di atas, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut ini.

- a. Menggunakan sumber data lain seperti dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pengumpulan data karakteristik DPRD, sehingga diperoleh jumlah sampel yang lebih besar.
- b. Menambahkan indikator partisipasi masyarakat dalam proses politik atau dalam pemilihan umum, pengaduan masyarakat, atau aktivitas demonstrasi, sehingga dapat memperkuat aktivitas pengawasan masyarakat pada pemerintah daerah.
- c. Menambahkan indikator dalam pengawasan DPRD seperti pengalaman kerja dewan, latar belakang pendidikan dewan, ukuran dewan, struktur kepemimpinan dewan maupun agenda pengawasan dewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikins, S. K. 2011. An Examination of Government Internal Audits' Role in Improving Financial Performance. *Public Finance and Management* 11 (4): 306-337.
- Amaliah, I. 2004. Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Ekonomi Dati II di Jawa Barat, 1999-2003. *Jurnal Mimbar Dikti* 22 (2): 213-233.
- Bennet, R. 2010. Decentralizing Authority After Suharto: Indonesia's Big Bang, 1998-2010. *Innovations for Successful Societies*. Princeton University: 1-11.
- Boritz, E., dan Jee H. L. 2007. *Control Weaknesses, IT Governance and Firm Performance*. Paper. University of Waterloo.
- BPK. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2010*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010*. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010*. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Cahyat, A. 2004. *Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan*. Paper. Center for International Forestry Research.
- Choi, F. D. S., dan Gary K. M. 2011. *International Accounting*. Seventh Edition. Prentice Hall.
- Dwiputrianti, S. 2008. Efektivitas Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan dalam Mewujudkan Reformasi Transparansi Fiskal dan Akuntabilitas Sektor Publik (2001-2008) di Indonesia. *Jurnal Imu Administrasi* 5 (4): 338-355.



- , 2011. *Effectiveness of Public Sector Audit Reports in Indonesia (Preceding and Following Audit Reform)*. Dissertation. The Australian National University.
- Hartono, T. 2006. *Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit sebagai Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang (Studi Kasus pada Bank BTN)*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Imas, P. 2009. Hubungan Struktur Sistem Pengendalian Manajemen dan Proses Sistem Pengendalian Manajemen dengan Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO). *Fokus Ekonomi* 4 (1): 27-43.
- Ishak, M. 2009. Kebijakan Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah. *Inovasi Media Litbang Provinsi Sumatera Utara* 6 (3): 143-151.
- Jensen, M dan W. Meckling. 1976. Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*: 1-77.
- Johnson, L. E., Lowensohn S., Reck J. S. dan P. Davies. 2012. Management Letter Comments: Their Determinants and Their Association with financial Reporting Quality in Local Government. *Journal Accounting Public Policy* 31: 575-592.
- Kahar, Y. 2005. *Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Padang Panjang*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Kartiwa, H. A., 2006. *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "good governance"*. Paper. Universitas Padjajaran.
- Keputusan Mendagri Nomor 120-2818 Tahun 2013 tentang *Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011*.
- LAN. 2007. *Kajian Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Daerah*. Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-LAN Jakarta.
- Lee, J. 2008. Preparing Performance Information in The Public Sector: an Australian Perspective. *Journal Financial Accountability and Management* 24 (2): 117-149.
- Lego, W. 2012. Internal Control System Implementation to Officer Performance with Dysfunctional Behavior as Moderating Variable. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 10 (1): 30-39.
- Mahuse, L., T. T. A. Lolo, dan S. Suhab. 2010. *The Implementation of the Monitoring Function of People's Representative Council in the Development of Merauke Regency*. Paper. Universitas Hasanuddin.
- Manasan, R. G., E. T. Gonzalez, dan R. B. Gaffud. 1999. Indicators of Good Governance: Developing an Index of Governance Quality at LGU Level. *Journal of Phillippine Development* 48 (26): 149-212.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah* 1 (4): 1-14.
- Mawanda, S. P. 2011. *Effects of Internal Control Systems on Financial Performance in an Institution of Higher Learning in Uganda A Case of Uganda Marytrs University*. Dissertation. Uganda Martyrs University.
- Muhi, A. H. 2011. *Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Paper. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Muraleetharan, P. 2011. *Internal Control and Impact of Financial Performance of The Organizations (Special Reference Public and Private Organizations in Jaffna District)*. Paper. University of Jaffna.
- Mustikarini, W. A., dan Debby F. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Nafchuka, A. G. 2003. *Pembangunan Komunikasi Politik Antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Nuraeni. 2012. *The Impact of Local Governments Characteristics Toward Their Audit Quality for Financial Reports of 2008-2009*. 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding. Indonesia.
- Pambelum, Y. J., dan Urip S. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis* 4 (1): 14-33.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.



- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pernendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang *Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Purnomo, K. 2008. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jalan Baru Menuju Terwujudnya Good Governance. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* 2 (7): 105-116.
- Rahmanurrasjid, A. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Ranis, G., F. Steward, dan A. Ramirez. 2000. Economic Growth and Human Development. *World Development* 28 (2): 197-219.
- Ramandei, P. 2009. *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Riantiarno, R. dan N. Azlina. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Pekbis Jurnal* 3 (3): 560-568.
- Sali, A. K. 2010. *Tindakan Rekomendasi Auditor Internal Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Melalui Pendekatan Balanced Scorecard Pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Santoso, M. A. 2011. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. *Jurnal Hukum* 4 (15): 604-620.
- Sarita, P. D. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan SPBU Yogyakarta (Studi Kasus Pada SPBU Anak Cabang Perusahaan RB.Group). *Jurnal Nominal* 1 (1): 1-22.
- Shodiq, M. J. 2001. *Pengaruh Sistem Kontrol terhadap Kinerja Keuangan: Uji Fit Versus Uji Internal Consistency*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Suyono, E. dan E. Hariyanto. 2012. Relationship between Internal Control, Internal Audit, and Organization Commitment with Good Governance: Indonesian Case. *China-USA Business Review* 11 (9): 1237-1245.
- Tobirin. 2008. Penerapan Etika Moralitas dan Budaya Malu Dalam Mewujudkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* 2: 16-21.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Vago. 2008. *Compliance-Does it Restrict Performance?* Australasian Police Audit Conference. Auditor General Victoria.
- Vafeas, N., 2000. Board Structure and the Informativeness of Earnings. *Journal of Accounting and Public Policy* 19 (2): 139-160.
- Widiatmoko, A. 2012. *Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK*. Warta BPK. Jakarta.
- Widyananda, H. 2008. *Revitalisasi Peran Internal Auditor Pemerintah untuk Penegakan Good Governance di Indonesia*. Publikasi, Seminar, Makalah dan Sambutan BPK RI Nomor: 3/PUB/VI/12/2008. Universitas Padjajaran.
- Zirman, E. D., dan R. M. Rozi. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi* 18 (1): 1-12.



LAMPIRAN

Tabel 1
Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pemerintah daerah di Indonesia per tahun 2011	530
2.	Pemerintah provinsi di Indonesia per tahun 2011	(33)
3.	Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia per tahun 2011	497
4.	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak mempunyai skor indeks kinerja tahun 2011 yang dipublikasikan oleh Kemendagri	(42)
5.	Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki LKPD tahun 2010, tetapi datanya tidak lengkap	(2)
6.	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak mempunyai indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2010 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik	(1)
7.	Pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai <i>website</i> , tetapi tidak dapat diakses, non aktif, tidak mempublikasikan atau tidak lengkap menginformasikan data DPRD	(255)
8.	Jumlah sampel penelitian	197

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 2
Variabel Penelitian

No.	Variabel	Jenis Variabel	Akronim	Definisi Operasional
1.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	dependen	KPPD	Skor indeks yang dipublikasikan oleh Kemendagri
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	independen	KSPIP	Jumlah kasus temuan kelemahan SPI dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah
3.	Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Perundang-Undangan	independen	KPDKPU	Jumlah temuan ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan yang mengakibatkan kerugian daerah dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah
4.	Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan sesuai dengan Rekomendasi	independen	TLTPSR	Jumlah tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah
5.	Fungsi Pengawasan DPRD	independen	FPDPRD	Jumlah komposisi anggota DPRD yang mendukung pemilihan kepala daerah yang dipublikasikan melalui website Pemerintah Kabupaten/Kota
6.	Pengawasan Masyarakat	independen	WASKAT	Indeks Pembangunan Manusia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik
7.	Ukuran Daerah	kontrol	SIZELG	Ln total aset pemerintah daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah
8.	Tipe Daerah	kontrol	TYPELG	Variabel dummy yang diukur dengan angka 1 untuk kota dan 0 untuk kabupaten

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.
KPPD	187	1,78	3,14	2,6091	0,2776
KSPIPD	187	0,00	1,00	0,66	0,476
KPDKPU	187	0,00	0,28	0,0127	0,0305
TLTPSR	187	0,00	1,00	0,5148	0,2790
FPDPRD	187	0,00	0,82	0,3948	0,1887
WASKAT	187	60,16	79,09	71,9756	3,3503
SIZELG	187	26,40	29,89	28,1249	0,5632
TYPELG	187	0,00	1,00	0,2139	0,4111
Valid N (listwise)	187				

Keterangan:

KPPD = kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; KSPIPD = kelemahan SPI; KPDKPU = ketidakpatuhan terhadap peraturan; TLTPSR = tindak lanjut sesuai rekomendasi; FPDPRD = fungsi pengawasan DPRD; WASKAT = pengawasan masyarakat; SIZELG = ukuran daerah; TYPE LG = tipe daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 4
Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji	N	K-S Z	Tolerance	VIF	Sig.
Normalitas	197	1,379			0,045
Normalitas	187	0,761			0,609
Autokorelasi	187				0,683
Heteroskedastisitas	187				
- KSPIPD					0,818
- KPDKPU					0,750
- TLTPSR					0,965
- FPDPRD					0,155
- WASKAT					0,656
- SIZELG					0,149
- TYPELG					0,860
Multikolinieritas	187				
- KSPIPD			0,936	1,069	
- KPDKPU			0,895	1,118	
- TLTPSR			0,884	1,131	
- FPDPRD			0,960	1,042	
- WASKAT			0,578	1,730	
- SIZELG			0,831	1,203	
- TYPELG			0,636	1,572	

Keterangan:

KSPIPD = kelemahan SPI; KPDKPU = ketidakpatuhan terhadap peraturan; TLTPSR = tindak lanjut sesuai rekomendasi; FPDPRD = fungsi pengawasan DPRD; WASKAT = pengawasan masyarakat; SIZELG = ukuran daerah; TYPE LG = tipe daerah; N = jumlah sampel; K-S Z = Kolmogorov-Smirnov Z; VIF = Variance Inflation Factor

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis

	Expt	B	t-value	Sig.
Constant		-1,834	-1,961*	0,051
KSPIPD	-	-0,089	-2,331**	0,021
KPDKPU	-	-1,200	-1,969*	0,051
TLTPSR	+	0,204	3,035***	0,003
FPDPRD	+	0,148	1,555	0,122
WASKAT	+	0,019	2,795***	0,006
R ²			0,279	
Adj. R ²			0,250	
F-value			9,873	
Asymp sig.			0,000	

Keterangan:

KSPIPD = kelemahan SPI; KPDKPU = ketidakpatuhan terhadap peraturan; TLTPSR = tindak lanjut sesuai rekomendasi; FPDPRD = fungsi pengawasan DPRD; WASKAT = pengawasan masyarakat;

****signifikan pada level 1%*

***signifikan pada level 5%*

**signifikan pada level 10%*

Sumber: Data sekunder yang diolah

Pengungkapan Informasi Non-keuangan tentang Pelayanan Publik melalui Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia

DWI MARTANI
DIAN NASTITI*
PANGGAH TRI WICAKSONO
Universitas Indonesia

Abstract: *This paper aims to contribute to Indonesian country-level analysis of non-financial disclosures in the public sector by assessing non-financial disclosures determinants in Indonesian municipals' websites. Beginning with a content analysis of the websites of 434 Indonesian local government which data is gathered using a checklist developed based on the government regulation no.38/2007 on the segregation of duties between central and local government, this study continues with a regression analysis to determine the impact of educational level, municipals' wealth, size and financial independence to the level of the municipals' non-financial disclosures on their websites. The content analysis shows that only less than 10% municipals disclose information about women and community empowerment programs, anti-corruption programs and environmental related issues, while more than 50% disclose information about geographical area, the areas' potentials and tourism attractiveness. Observation on the independent variables reveals that educational level, municipals' weath and size significantly affect the degree of non-financial information disclosures in the municipals' website. Based on the findings, this paper concludes with two policy recommendations. Firstly, the central government needs to establish recommendations and law to generate similar level of non-financial disclosures in the municipals' websites. Lastly, it seems necessary that in developing the recommendations, the central government needs to pay more attention to the information which is lacking of disclosures such as women and community empowerment, anti-corruption programs and environmental issues.*

Keywords: *Non-Financial Disclosures, Municipals' Website, Public Sector Accountability, Transparency.*

* Corresponding author: dian_nastiti@yahoo.com

1. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya UU no. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan diberikannya wewenang yang lebih luas kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia, maka pengelolaan Pemerintah Daerah menjadi semakin penting dalam kehidupan masyarakat. Seperti kata pepatah “*with great power comes great responsibility*” bertambahnya wewenang memunculkan tanggung jawab tambahan. Masyarakat sebagai *stakeholder* terpenting pemerintah daerah semakin ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengatur daerahnya dan sejauh mana pemerintah daerah yang telah mereka pilih benar-benar melaksanakan tugas dan amanat yang telah diberikan kepada mereka secara bertanggungjawab. Di sisi lain, calon investor, wisatawan, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya juga memerlukan informasi tentang daerah dan pengelolaannya untuk mengambil keputusan. Seluruh pihak-pihak yang berkepentingan ini, dalam konteks *stakeholder theory* memerlukan informasi yang berbeda, sehingga Pemerintah Daerah, seiring dengan bertambahnya *stakeholder* diharapkan mampu memberikan semakin banyak informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak sebagai bentuk akuntabilitasnya (Roberts, 1992).

Selain karena desakan *stakeholder*, Pemerintah Daerah-pun sebenarnya memiliki kebutuhan yang sama untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mendapatkan legitimasi sebagai pemimpin sekaligus pengelola aset dan kekayaan daerah. Hal ini seperti rumusan Teori Legitimasi (*Legitimacy theory*) yang berpendapat bahwa organisasi harus berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang secara sosial dapat diterima masyarakat agar mendapatkan legitimasi untuk memimpin (Richardson, 1997). Legitimasi untuk melanjutkan kepemimpinan akan didapatkan jika Pemerintah Daerah memenuhi kontrak-kontrak sosial yang berlaku termasuk janji-janji yang dibuat selama Pemilihan Umum (Pilkada). Agar masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Pemda-nya, penyebaran informasi tentang aktivitas pelayanan dan pertanggungjawaban Pemda menjadi suatu keharusan.

Salah satu media yang sangat mudah digunakan untuk penyebarluasan informasi kegiatan Pemda ini adalah melalui website resmi Pemerintah Daerah. Melalui Inpres no. 3 tahun 2003, Presiden telah mengeluarkan instruksi mengenai strategi dan kebijakan tentang *e-government*. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga telah mengeluarkan Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah dan *Blueprint* implementasi aplikasi *e-government* Pemerintah Daerah di Indonesia. Pengaturan lebih lanjut dilakukan melalui Peraturan Menkominfo no 26 tahun 2006 tentang penggunaan nama domain go.id untuk situs web resmi pemerintah pusat dan daerah.

Dengan adanya aturan dan dukungan pemerintah pusat untuk mengembangkan website Pemda dan meningkatnya kebutuhan publik akan transparansi, sudah seharusnya Pemerintah Daerah semakin sering menggunakan website resmi-nya sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi kepada publik. Dengan asumsi itulah, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana Pemda di Indonesia menggunakan website untuk menyebarluaskan informasi mengenai pelayanan yang telah dilakukannya. Penelitian ini hanya berfokus pada informasi yang bersifat non-keuangan yang selama ini belum banyak dilakukan peneliti terdahulu dan akan mengelaborasi hubungan variabel-variabel yang diduga mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi tentang pelayanan Pemerintah Daerah di Indonesia.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Pengungkapan Informasi kepada Publik

Undang-undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa hak untuk mendapatkan informasi publik adalah hak asasi warga negara yang wajib dilindungi Undang-undang dan badan publik wajib menerapkan sistem informasi yang baik agar dapat menyampaikan informasi publik secara akurat baik melalui media elektronik dan

non-elektronik. Undang-undang ini mendorong badan publik termasuk pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan informasi yang wajar diketahui publik. Pengungkapan informasi kepada publik ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas publik yang secara esensial berarti kewajiban untuk menjelaskan dan menjustifikasi tugas (Bovens, 2007). Dalam rangka menjalankan akuntabilitas publik ini lah kemudian dibutuhkan adanya transparansi yakni tingkat dimana warga negara, media dan pasar modal dapat mendapatkan informasi mengenai strategi, aktivitas dan hasil dari aktivitas tersebut (Alt, et.al., 2006). Dalam pengertian yang lebih ringkas, Piotrowski & Bertelli (2010) berpendapat transparansi adalah adanya akses terhadap informasi Pemerintah daerah oleh masyarakat. Akses terhadap informasi ini dapat dilakukan melalui media apapun, namun untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, pengungkapan atau transparansi pemerintah daerah diidentifikasi sebagai keberadaan informasi tersebut dalam website resmi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

2.2. Penelitian Pendahuluan dan Pengembangan Hipotesis

Dalam literatur pengungkapan informasi kepada publik, kebanyakan penelitian terdahulu berfokus pada pengungkapan informasi finansial (*fiscal transparency*), misalnya yang telah dilakukan oleh Laswad et.al. (2005), Alt, et.al. (2006), dan Piotrowsky & Bertelli (2010). Dalam penelitian tersebut tingkat pengungkapan informasi keuangan diukur dalam bentuk pengungkapan secara menyeluruh informasi tentang anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam hal ini hubungan antara masyarakat dan pemerintah digambarkan seperti hubungan *principal* dan *agent* dalam *agency theory*, dimana pengungkapan informasi keuangan oleh Pemerintah Daerah tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya daerah-nya.

Meskipun pengungkapan informasi keuangan adalah hal yang sangat penting, informasi lain tentang pengelolaan daerah juga tidak kalah pentingnya. Di Indonesia, Sulistiyo, et.al (2008) meneliti informasi apa saja yang telah disajikan Pemda dan menemukan banyak informasi yang diperlukan oleh stakeholder belum disajikan dalam website Pemda. Website Pemda di Indonesia (dengan sampel 90 website) sebagian besar hanya menyajikan informasi yang diwajibkan oleh Kemkominfo yakni: Selayang Pandang, Pemda, Geografi, Peta Wilayah dan Sumber Daya, Perda dan Buku Tamu. Informasi lainnya terkait data statistik belum diungkapkan. Dalam penelitian di Spanyol, Garcia-Sanchez et.al. (2013) meneliti tentang pengungkapan informasi terkait kegiatan sosial dan pengelolaan lingkungan daerah. Penelitian ini menemukan hubungan positif antara jumlah penduduk dan tingkat pengungkapan informasi sosial dan lingkungan, sedangkan persaingan politik memiliki hubungan sebaliknya.

Sampai saat ini, di Indonesia belum ada aturan jelas tentang apa saja yang harus diungkapkan oleh Pemerintah Daerah di website resmi-nya. Aturan resmi yang ada hanyalah ketentuan Kemkominfo tentang informasi minimal yang harus ada dan anjuran informasi yang sebaiknya disediakan dalam website Pemda yang tertuang dalam *Blueprint e-government* Pemerintah Indonesia. Informasi lain yang ingin diungkapkan oleh Pemda bersifat sukarela (*voluntary disclosures*) dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah masing-masing. Dengan masih sedikitnya penelitian tentang pengungkapan informasi di website Pemda di Indonesia ini, penelitian ini akan mengisi *research gap* dalam hal pengungkapan informasi non-keuangan di website Pemda di Indonesia, khususnya informasi mengenai pelayanan publik terkait urusan wajib pemerintah daerah.

Hipotesis dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan analisis atas faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan dalam website Pemda, berdasarkan penelitian terdahulu yakni:

2.2.1 Tingkat Pendidikan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hameed (2005) dan Piotrowski dan Ryzin (2007), kondisi sosial ekonomi suatu populasi memiliki hubungan positif dengan transparansi. Variabel terkait kondisi sosial ekonomi tersebut antara lain tingkat pendidikan, jumlah layanan jasa Pemda dan ketenagakerjaan. Dalam risetnya di Spanyol, Gandia (2007) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat transparansi keuangan pemerintah daerah. Seiring dengan Gandia, Tolbert et al. (2008) menemukan korelasi antara tingkat pendidikan masyarakat dengan permintaan terhadap informasi kepada pejabat publik. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dianggap dapat membuat masyarakat menjadi lebih kritis dan meminta informasi yang lebih banyak kepada Pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, hipotesis pertama dirumuskan sebagai:

H1: Terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda.

2.2.2. Jumlah Penduduk

Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu stakeholder terpenting Pemerintah Daerah, oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi juga semakin besar. Riset pendahuluan tentang transparansi keuangan di pemerintah daerah di New Jersey telah mengungkapkan hubungan positif antara jumlah penduduk dengan pengungkapan informasi keuangan (Piotrowski & Bertelli, 2010). Sementara itu dalam hubungannya dengan transparansi di bidang informasi sosial dan lingkungan di website pemerintah daerah di Spanyol, jumlah penduduk juga menunjukkan relasi yang sama (Garcia-Sanchez, 2013).

H2: Terdapat hubungan positif antara jumlah penduduk suatu daerah dengan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda.

2.2.3. Kemampuan Keuangan Daerah

Dalam hal transparansi informasi keuangan, Alt, et.al.(2006) dalam penelitiannya di Amerika Serikat menemukan bahwa kemampuan keuangan daerah dan partai dapat memberikan insentif bagi politisi untuk meningkatkan tingkat transparansi sehingga meningkatkan elektabilitasnya di periode selanjutnya. Sementara itu dalam hubungannya dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan, Garcia-Sanchez et al. (2013) menyebutkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh sektor publik berhubungan erat dengan tingkat kemampuan sumber daya pemerintah, terutama dalam hal dukungan ekonomi dan keuangan. Kabupaten/kota dengan kondisi keuangan yang lebih baik dapat membangun infrastruktur IT yang lebih baik sehingga dapat memberikan informasi yang lebih banyak kepada masyarakat (Caba Perez, et.al.,2009). Oleh karena itu hipotesis ketiga dirumuskan sebagai:

H3: Terdapat hubungan positif antara kekayaan pemerintah daerah dengan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda.

2.2.4. Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah adalah kemampuan daerah menghasilkan pendapatan asli daerah yang sebagian besar berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah. Faktor ini dirumuskan dari *stakeholder theory* yang berpendapat bahwa Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah didapatnya dari masyarakat yakni Pajak dan Retribusi Daerah. Sehingga semakin besar Pajak dan Retribusi Daerah didapatkan oleh pemerintah daerah (proporsional dari total pendapatannya) maka semakin besar tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan penggunaan dari dana tersebut.

Sementara itu dalam *content analysis* penelitian ini didapatkan fakta bahwa informasi yang terbanyak diungkapkan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah informasi pariwisata. Adalah wajar untuk daerah yang mendapatkan PAD besar dari Pajak terkait kegiatan pariwisata, maka Pemda-nya akan memberikan informasi non finansial yang cukup banyak di website-nya untuk menarik wisatawan berkunjung. Sehingga dalam penelitian ini, hipotesis keempat dirumuskan sebagai:

H4: Terdapat hubungan positif antara tingkat kemandirian daerah dengan tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini diawali dengan melakukan *content-analysis* seluruh website kabupaten dan kota di Indonesia yang dapat diakses dalam kurun waktu Mei-Juni 2013. Data pengungkapan non-keuangan dikumpulkan dengan menggunakan checklist yang dikembangkan berdasarkan PP no. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil dari checklist tersebut kemudian dianalisis untuk menyajikan informasi non keuangan apa saja yang paling banyak ditampilkan oleh Pemerintah Daerah di website-nya.

Setelah dianalisis secara kualitatif, berdasarkan dugaan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka tingkat pengungkapan informasi non-keuangan ini akan dianalisis dengan regresi untuk melihat signifikansi pengaruh dari kondisi sosial ekonomi yakni tingkat pendidikan, jumlah penduduk, kekayaan daerah dan kemandirian di tiap kabupaten/kota.

3.1. Model Penelitian

Model Penelitian ini mengadaptasi beberapa model penelitian pendahuluan dengan beberapa perubahan dalam pengukuran variabel dependen maupun independen yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan data di Indonesia. Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{DISCL} = \beta_0 + \beta_1\text{EDU} + \beta_2\text{SIZE} + \beta_3\text{WEALTH} + \beta_4\text{PAD} + \varepsilon$$

Keterangan:

DISCL	: Pengungkapan
EDU	: Tingkat Pendidikan
SIZE	: Jumlah Penduduk
WEALTH	: Kemampuan Keuangan Daerah
PAD	: Tingkat Kemandirian

3.2. Operasionalisasi Variabel

3.2.1. Variabel Dependen: Tingkat Pengungkapan Informasi non-keuangan (Disclosure)

Variabel *disclosure* menjelaskan tingkat pengungkapan non-keuangan yang dilakukan oleh Pemda dalam hal pelayanan publik. Variabel ini diukur dengan jumlah skor checklist yang dinilai dengan angka 1 (ada) dan 0 (tidak ada) untuk setiap item checklist, sesuai dengan metode pengukuran tingkat pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dalam penelitian Garcia-Sanchez et al. (2013). Perbedaan variabel ini dengan penelitian di Spanyol adalah checklist dalam penelitian ini dikembangkan sesuai dengan PP no 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan wajib dan pilihan pemerintah pusat dan daerah. Checklist dibuat untuk menangkap seluruh urusan yang wajib dikerjakan dan urusan pilihan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Skor maksimal dalam checklist tersebut adalah 116 yang terbagi dalam tiga kelompok yakni informasi, berita dan link ke dinas terkait sesuai dengan urusan yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah.

3.2.2. Variabel Independen

a. Tingkat Pendidikan

Penelitian ini akan menggunakan tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu Pemda untuk mengukur variabel *tingkat pendidikan (level of education)*. Tingkat pendidikan akan diukur dengan rata-rata lama sekolah dari penduduk suatu Pemda. Sumber data adalah hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional dari Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2011.

b. Jumlah Penduduk (*Size of Municipality*)

Penelitian Piotrowski dan Bertelli (2010) menemukan bahwa jumlah penduduk yang semakin besar akan meningkatkan permintaan terhadap transparansi publik, begitu juga dengan Garcia-Sanchez et al. (2013). Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan jumlah penduduk sebagai proksi untuk variabel *size of municipality*.

c. Kemampuan Keuangan Daerah (*Budgetary Capacity*)

Kemampuan keuangan Pemerintah daerah ini diproksikan dengan rasio antara jumlah belanja (setelah dikurangi belanja pegawai) dibagi dengan jumlah penduduk (per kapita). Belanja Pegawai dikeluarkan dari total APBD karena sudah terikat penggunaannya. APBD diluar belanja pegawai ini kemudian dibagi dengan jumlah penduduk dengan asumsi jika jumlah penduduk lebih banyak, maka makin banyak penduduk yang harus dilayani sehingga mengurangi kapasitas anggaran yang dapat digunakan untuk belanja di bidang sistem informasi atau belanja pembangunan lainnya.

d. Tingkat Kemandirian

Variabel *Tingkat Kemandirian* diproksikan dengan rasio antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan yang diterima oleh Pemda.

Tabel 1. Ikhtisar Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Pengukuran
1	Tingkat Pengungkapan (Disclosure) (DISCL)	Skor Checklist Pelayanan pada Website Pemda
2	Tingkat pendidikan (level of education) (EDU)	Rata-Rata Lama Sekolah
3	Size of Municipality (SIZE)	Jumlah Penduduk
4	Kemampuan Keuangan Daerah (Budgetary Capacity) (WEALTH)	(Total Belanja Dikurangi Belanja Pegawai) Per Kapita
5	Tingkat Kemandirian (PAD)	Total Pendapatan Asli Daerah Per Total Pendapatan

4. Hasil Penelitian

4.1. Content Analysis

Hasil penghitungan skor *checklist* terkait informasi non-keuangan atas pelayanan pada website Pemda menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memperoleh nilai tertinggi yaitu 90 dari 116 item atau sekitar 77,59% dari total item. Dari 10 hasil *checklist* terbaik, Pemda yang mengungkapkan informasi di website dengan skor paling tinggi masih terpusat di kabupaten/kota yang terletak di Pulau Jawa. Dari 10 website dengan tingkat pengungkapan terbaik, 6 Pemda terletak di Pulau Jawa, 3 Pemda di Pulau Sumatera, dan 1 Pemda di Pulau Kalimantan. Di sisi lain, 13 website Pemda yang memiliki skor *checklist* terendah (di luar skor *checklist* dengan nilai 0) semuanya terletak di luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera (lihat table 5 dan 6, lampiran 1). Hasil skor *checklist* ini menunjukkan bahwa masih terdapat

kesenjangan antar Pemda di Indonesia dalam hal pengungkapan pelayanan dalam website, terutama antara Pemda di Pulau Jawa dengan Pemda di luar Pulau Jawa.

Selain itu, *checklist* pengungkapan website Pemda menunjukkan bahwa informasi yang paling banyak diungkapkan dalam website Pemda adalah informasi terkait geografi, visi dan misi Pemda, informasi objek wisata yang ada di kabupaten/kota tersebut, serta pembagian wilayah administrasi. Informasi-informasi ini diungkapkan oleh lebih dari 50% Pemda atau lebih dari 245 dari 291 Pemda. Sementara itu, informasi yang paling sedikit diungkapkan adalah informasi tentang program anti korupsi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, indikator pembangunan, dan lingkungan hidup. Informasi-informasi ini hanya diungkapkan oleh kurang dari 10% Pemda (lihat table 7, lampiran 1).

Jika dibandingkan dengan konten yang dianjurkan dalam *blueprint* terkait *e-government* dari Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, website Pemda di Indonesia masih banyak yang belum mengungkapkan informasi sesuai dengan *blueprint* tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Pemda yang memberikan pengungkapan informasi terkait fungsi sistem pemerintahan dalam website.

Berdasarkan hasil analisis konten terhadap *checklist* website Pemda, informasi umum seperti geografis dan objek wisata sudah cukup banyak diungkapkan oleh rata-rata Pemda di Indonesia, dimana lebih dari 50% Pemda sudah menyajikan informasi ini dalam website. Namun demikian, hanya sekitar 30% sampai 50% yang mengungkapkan informasi fungsi pemerintahan, misalnya informasi terkait kependudukan, kesehatan, pendidikan, perhubungan / transportasi, pekerjaan umum, peraturan daerah, dan potensi daerah.

Sementara itu, informasi seperti lingkungan hidup, yang juga menjadi informasi yang dianjurkan dalam *blueprint* sistem aplikasi *e-government* tersebut, hanya diungkapkan oleh kurang dari 10% Pemda. Informasi lain seperti ketenagakerjaan, sosial, dan industri kecil dan menengah hanya disajikan dalam 10% sampai 30% website Pemda di Indonesia.

Selain mengungkapkan informasi umum dalam websitenya, Pemda juga menyajikan berita-berita lokal yang ada di kabupaten/kota tersebut. Berdasarkan hasil checklist atas website Pemda, berita yang paling banyak diungkapkan adalah berita tentang kepegawaian. Berita ini mencakup berita terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil dan mutasi pegawai. Selanjutnya, website Pemda juga banyak yang mengungkapkan berita tentang pendidikan, pekerjaan umum, serta social (lihat table 8, lampiran 1).

Karena tidak semua informasi dapat disajikan dalam website Pemda, seperti rincian kegiatan per masing-masing urusan, maka Pemda harus dapat mencantumkan link ke dinas dan atau badan terkait. Dari daftar link yang harus dicantumkan dalam website Pemda, link ke LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) merupakan link yang paling banyak dicantumkan dalam website Pemda. Lebih dari 50% Pemda menyajikan link ini karena terdapat kewajiban bagi Pemda untuk menyajikan informasi LPSE. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 yang mensyaratkan pemilihan penyedia barang dan lain-lain melalui pelelangan umum diumumkan minimal di website dan portal pengadaan nasional melalui LPSE. Selain link ke LPSE, masih sedikit yang mengungkapkan link-link ke dinas dan lembaga lainnya. Link ke dinas dan lembaga lainnya hanya dicantumkan oleh kurang dari 30% Pemda dari 491 Pemda kabupaten/kota di Indonesia (lihat table 9, lampiran 1).

4.2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Minimum	Maximum	Standar Deviasi
DISCL	27,73041	3	90	16,65819
EDU	7,900947	2,101627	12,20037	1,505078
SIZE	508784,2	15790	4857612	579527,5
WEALTH	2075587	282548	7,06e+07	4180561
PAD	0,0725057	0,0018794	0,6824881	0,0675222

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa variasi pada data variabel-variabel yang diuji, baik dependen dan independen, masih cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai standar deviasi masing-masing variabel dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.

Nilai rata-rata dari variabel *disclosure* adalah 27,73041. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Pemda hanya mengungkapkan 27-28 dari 116 item informasi terkait pelayanan di website Pemda. Variabel *tingkat pendidikan (level of education)* yang diukur dengan rata-rata lama sekolah memiliki rata-rata 7,900947 tahun. Artinya, rata-rata masyarakat di Indonesia hanya bersekolah selama 7-8 tahun atau hanya sampai di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Sementara itu, nilai rata-rata dari variabel *size of municipality* adalah 508.784,2 yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk di masing-masing Pemda di Indonesia. Variabel *kemampuan keuangan daerah (budgetary capacity)*, yang diukur dengan total belanja (setelah dikurangi belanja pegawai) per kapita, memiliki rata-rata 2.075.587. Nilai rata-rata

variable *tingkat kemandirian*, yang diukur dengan rasio total pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan adalah 0,0725057, yang menunjukkan rata-rata Pemda di Indonesia hanya memiliki 7,25% PAD dari total pendapatannya.

4.3. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Hipotesis	Uji Hipotesis	Signifikansi
Tingkat pendidikan (Level of Education) (EDU)	+	+	Signifikan
Size of the Public (SIZE)	+	+	Signifikan
Kemampuan Keuangan Daerah (Budgetary Capacity) (WEALTH)	+	+	Signifikan
Tingkat Kemandirian (PAD)	+	+	Tidak Signifikan

a. Tingkat pendidikan (level of education)

Hasil uji hipotesis atas variable *tingkat pendidikan (level of education)* menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan pelayanan Pemda dalam website-nya. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, yang menjadi proksi dari *tingkat pendidikan*. maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan Pemda dalam website. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tolbert et al. (2008). Pemda yang penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka akan semakin terdorong dan memiliki keinginan untuk melaporkan kegiatannya ke masyarakat.

b. Jumlah Penduduk (*Size of the Public*)

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis, ukuran dari Pemda memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Pemda dalam website. Artinya, Pemda dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemda dengan jumlah penduduk lebih sedikit. Penelitian ini mendukung penelitian Piotrowski dan Bertelli (2010) yang menemukan bahwa semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat publik akan semakin besar. Hal inilah yang kemudian akan mendorong Pemda untuk mengungkapkan pelayanan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Garcia-Sanchez et al. (2013) yang dilakukan terhadap pemerintah daerah di Spanyol.

c. Kemampuan Keuangan Daerah (*Budgetary Capacity*)

Dalam penelitian ini, variable Kemampuan Keuangan Daerah (*Budgetary Capacity*) diproksikan dengan belanja per kapita, dimana nilai belanja adalah total belanja dikurangi dengan belanja pegawai. Hasil uji hipotesis atas variabel ini menunjukkan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah suatu Pemda memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Pemda dalam website. Artinya, semakin tinggi kapasitas anggaran Pemda yang digunakan selain untuk belanja pegawai, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan pelayanan Pemda dalam website.

Penelitian ini mendukung penelitian Caba Perez, et.al. (2009) yang menemukan bahwa pemerintah dengan anggaran yang lebih baik akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam meningkatkan kualitas sistem informasi dan menggunakan sumber daya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dorongan untuk memberikan pelayanan

publik yang lebih tinggi ini juga akan mempengaruhi pemerintah untuk mengungkapkan kegiatan pelayanan publiknya.

d. Tingkat Kemandirian

Penelitian ini tidak dapat menemukan pengaruh yang signifikan dari *Tingkat Kemandirian* terhadap tingkat pengungkapan Pemda dalam website. Hal ini menunjukkan bahwa porsi PAD atas total pendapatan Pemda, yang menjadi proksi atas variabel *Tingkat Kemandirian*, tidak secara signifikan mempengaruhi pengungkapan pelayanan Pemda dalam website. Hal ini dapat terjadi karena pemilihan variabel atau penggunaan proksi yang kurang tepat. Mengingat informasi pariwisata termasuk informasi yang paling banyak diungkapkan berdasarkan hasil *content analysis*, penggunaan variabel Pariwisata dengan proksi PAD khusus terkait pariwisata (Pajak Hotel dan Restoran misalnya), mungkin dapat memberikan pengaruh kepada pengungkapan informasi dengan signifikan.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

5.1. Kesimpulan

Meningkatnya kewenangan Pemerintah Daerah membuat tuntutan akan transparansi informasi baik keuangan maupun non-keuangan kepada publik semakin besar. Penelitian ini menilai tingkat pengungkapan informasi non-keuangan tentang pelayanan publik berdasarkan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia melalui website resmi mereka, dengan periode pengamatan website berlangsung pada kurun waktu bulan Mei - Juni 2013.

Dari hasil analisis data ditemukan bahwa banyak Pemda yang belum melakukan pengungkapan informasi terkait pelayanan (informasi non-keuangan) sesuai dengan anjuran

Pemerintah Pusat melalui *Blue Print e-government* yang dibuat oleh Kementerian Telekomunikasi dan Infomatika. Kebanyakan Pemda yang memiliki skor pengungkapan tinggi berada di Jawa dan Sumatera, sedangkan Pemda dengan tingkat pengungkapan rendah umumnya adalah Pemda di luar daerah Jawa, Sumatera dan Bali. Dalam hal ini, aksesibilitas internet dan infrastruktur telekomunikasi juga kemungkinan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

Dari jenis informasi yang diungkapkan, informasi geografis dan objek wisata adalah yang paling banyak diungkapkan (lebih dari 50%), informasi pemerintahan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, perhubungan, transportasi, pekerjaan umum, Peraturan Daerah dan Potensi Daerah hanya diungkapkan oleh sekitar 30-50% Pemda, sementara isu lingkungan hidup yang juga dianjurkan dalam blueprint sistem aplikasi *e-government* Pemerintah Indonesia - Kemkominfo hanya diungkapkan oleh kurang dari 10%. Informasi lain yang belum ada di *blueprint* sistem aplikasi *e-government* Kemkominfo namun termasuk urusan wajib dan kami masukkan ke dalam checklist yakni: program anti korupsi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan indikator pembangunan juga hanya diungkapkan kurang dari 10% Pemda di Indonesia.

Dengan regresi ditemukan bahwa variabel tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan kekayaan pemerintah daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi pelayanan publik di Indonesia, sedangkan variabel tingkat kemandirian memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan.

5.2. Implikasi

Masih sedikitnya Pemda yang melakukan pengungkapan informasi non-keuangan bahkan informasi yang dianjurkan oleh Kemkominfo menunjukkan masih rendahnya motivasi Pemda untuk berusaha menyediakan informasi kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, menindaklanjuti hasil penelitian ini, perlu dibuat standarisasi pengungkapan non-keuangan yang sama untuk setiap daerah di tingkat nasional, agar masyarakat dimanapun tempatnya mampu mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerahnya dengan baik.

Kedua, rendahnya pengungkapan informasi tentang program anti korupsi, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, program sosial dan lingkungan menunjukkan masih rendahnya keberpihakan pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi dan pemberdayaan masyarakat serta rendahnya kesadaran pemerintah daerah dalam hal-hal sosial dan lingkungan. Hal ini perlu menjadi perhatian penting Pemerintah Pusat agar memantau tata kelola pemerintah daerah demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih, berpihak kepada masyarakat dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Terakhir, dengan adanya hubungan positif antara kekayaan daerah dan tingkat pengungkapan maka dukungan Pemerintah Pusat dalam bentuk finansial juga diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk memberikan lebih banyak informasi non-keuangan kepada publiknya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini salah satunya adalah adanya website pemerintah daerah yang dalam masa pengamatan di sekitar bulan Mei-Juni tidak dapat diakses atau *under*

construction sehingga nilai website nol. Website yang nilai-nya nol ini saat ini tidak dimasukkan dalam analisis. Penelitian ini menggunakan keseluruhan populasi, dimana diharapkan model dapat dijelaskan dengan baik. Namun dari nilai Adjusted R square yakni 27,01%, menunjukkan masih banyak peluang digunakannya variabel lain untuk menjelaskan variasi tingkat pengungkapan pemerintah daerah di website. Variabel lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yang belum digunakan misalnya adalah persaingan politik dan kekuatan politik pemerintah daerah (Alt, et.al. 2006 dan Garcia-Sanchez, et.al, 2013).

Untuk Penelitian selanjutnya, kami menyarankan periode pengamatan website yang lebih panjang dan bisa dilakukan lebih dari 2 kali di kesempatan yang berbeda untuk menghindari masalah aksesibilitas website. Website Pemda di Papua misalnya, seringkali sulit diakses, sehingga perlu beberapa kali pengecekan untuk memastikan seluruh checklist telah terobservasi dengan lengkap. Tentu jika memungkinkan penambahan variabel independen seperti tingkat aksesibilitas internet, infrastruktur telekomunikasi, tingkat persaingan politik dan kekuatan politik bisa jadi dapat menjelaskan variasi tingkat pengungkapan informasi non-keuangan Pemda di Indonesia dengan lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Alt, J.E., Lessen, D.D. & Rose, Shana. 2006. The Cause of Fiscal Transparency: Evidence from the U.S. States. *IMF: Staff Papers*, Vol. 53, Special Issue, International Monetary Fund.
- Bovens, M. 2007. Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*. 13(4), 447-448.
- Caba Perez, C., & Rodriguez Bolivar, M.P. & Lopez Hernandez, A.M. 2008. E-government process and incentives for online public financial information. *Online information Review*, 32(3), 379-400.
- Gandia, J.L. (2008). Determinants of web site information by Spanish city councils. *Online Information Review* 32(1), 35-57.
- Gracia-Sanchez, I.M., Frias-Aceitune, J.V. & Rodriguez-Dominguez, L. 2013. Determinants of Corporate Social Disclosure in Spanish Local Governments. *Journal of Cleaner Production*, 39 (2013), 60-72.
- Hameed, F., 2005. Fiscal Transparency and Economic Outcomes. *IMF Working Paper: International Monetary Fund*, Washington.
- Kementerian Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2003. *Blueprint Sistem Aplikasi E-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah*.
- Laswad, F., Fisher, R. & Oyelere, P. 2005. Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24 (2), 101-121.



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Piotrowsky, S.J., & Bertelli, A. 2010. *Measuring Municipal Transparency*. 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland, April.
- Piotrowsky, S.J., & Ryzin, G.G. van. 2007. Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government. *The American Review of Public Administration*, 37, 306-323.
- Richardson, A.J., 1997. Accounting as a Legitimizing Institution, *Accounting Organizations and Society* 12, 341-355.
- Roberts, R.W., 1992. Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: and application of stakeholder theory. *Accounting Organization and Society* 17, 595-612.
- Sulistiyo, D.K., Negara, H.P. & Firdaus, Y. 2008. *Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Semnas Informatika UPN Veteran Yogyakarta. Mei.
- Tolbert, C.J., Mossberger, K., McNeal, R., 2008. Institutions, Policy and E-government in the American States, *Public Administration Review* 68, 549-563.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lampiran 1**Tabel 4. Ikhtisar Pemilihan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah Website Pemda
1	Total Seluruh Website Pemda (Kabupaten/Kota dan Provinsi)	524
2	Website Pemda Provinsi	(33)
3	Website Pemda Kabupaten/Kota	491
4	Pemda Kabupaten/Kota yang Website-nya Tidak Tersedia	(45)
5	Website Pemda yang Tidak Dapat Diakses	(12)
6	Website Pemda yang Dapat Diakses (Sampel)	434

Tabel 5. Website dengan Skor Checklist Tertinggi

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	Skor Checklist
1	Kabupaten Bantul	DI Yogyakarta	90
2	Kota Malang	Jawa Timur	89
3	Kabupaten Malang	Jawa Timur	87
4	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	83
5	Kota Batam	Kepulauan Riau	78
6	Kabupaten Pakpak Bharat	Sumatera Utara	77
7	Kabupaten Sleman	DI Yogyakarta	77
8	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	74
9	Kota Pekanbaru	Riau	72
10	Kabupaten Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	72

Tabel 6. Website dengan Skor Checklist Terendah

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	Skor Checklist
1	Kabupaten Dompu	Nusa Tenggara Barat	3
2	Kabupaten Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	3
3	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	3
4	Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat	3
5	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	3
6	Kabupaten Malinau	Kalimantan Timur	3
7	Kabupaten Kutai Timur	Kalimantan Timur	3
8	Kota Bontang	Kalimantan Timur	3
9	Kabupaten Minahasa Utara	Sulawesi Utara	3
10	Kabupaten Halmahera Selatan	Maluku Utara	3
11	Kabupaten Mimika	Papua	3
12	Kabupaten Yalimo	Papua	3
13	Kabupaten Deiyai	Papua	3

Tabel 7. Ringkasan Pengungkapan terkait Informasi

No	Lebih Dari 50% Pemda	30% - 50% Pemda	Kurang dari 10% Pemda
1	Geografis	Potensi Daerah	Program Anti Korupsi
2	Visi dan Misi Pemerintah Daerah	Kepemimpinan / Kepala Daerah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Objek Wisata	Kependudukan	Keluarga Berencana
4	Pembagian Wilayah Administrasi	Peraturan Daerah	Pemberdayaan Masyarakat
5		Kesehatan	Indikator Pembangunan
6		Pendidikan	Lingkungan Hidup
7		Perhubungan	
8		Pekerjaan Umum	
9		Ketahanan Pangan / Pertanian	

Tabel 8. Ringkasan Pengungkapan terkait Berita (Pengungkapan Terbanyak sampai Terendah)

No	Konten Berita	Jumlah Pemda yang Mengungkapkan	% Pemda
1	Kepegawaian	314	63,95
2	Pendidikan	306	62,32
3	Pekerjaan Umum	284	57,84
4	Sosial	271	55,19
5	Kesbang / Linmas	270	54,99
6	Kebudayaan dan Pariwisata	266	54,18
7	Kepemudaan dan Olahraga	262	53,36
8	Kesehatan	249	50,71
9	Lingkungan Hidup	225	45,82
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	203	41,34
11	Ketenagakerjaan	190	38,70

Tabel 9. Ringkasan Pengungkapan terkait Ketersediaan Link Website Dinas

No	Lebih Dari 50% Pemda	30% - 50% Pemda	Kurang dari 10% Pemda
1	LPSE (e-Procurement)	-	Penataan Ruang
2			Koperasi / UKM
3			Pemberdayaan Masyarakat
4			Sosial
5			Kearsipan dan Perpustakaan
6			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7			Keluarga Berencana

Lampiran 2**Statistik Deskriptif****. summarize discl edu size wealth pad**

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
discl	434	27.73041	16.65819	3	90
edu	434	7.900947	1.505078	2.101627	12.20037
size	434	508784.2	579527.5	15790	4857612
wealth	434	2075587	4180561	282548	7.06e+07
pad	434	.0725057	.0675222	.0018794	.6824881

Uji Multikolinearitas**. corr discl edu size wealth pad**

(obs=434)

	discl	edu	size	wealth	pad
discl	1.0000				
edu	0.2060	1.0000			
size	0.4872	0.0659	1.0000		
wealth	-0.2085	-0.1235	-0.4810	1.0000	
pad	0.3001	0.4333	0.4485	-0.1482	1.0000

Kesimpulan: Tidak terdapat korelasi yang kuat antar variabel independen

Uji Heteroskedastisitas**. regress discl edu size wealth pad**

Source	SS	df	MS	Number of obs =	434
Model	32448.5712	4	8112.1428	F(4, 429) =	39.68
Residual	87706.8873	429	204.444959	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.2701
				Adj R-squared =	0.2632
Total	120155.459	433	277.495285	Root MSE =	14.298

	discl	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
edu		1.948721	.5200191	3.75	0.000	.9266189 2.970823
size		8.246428	.8869543	9.30	0.000	6.503111 9.989745
wealth		2.15e-07	1.91e-07	1.13	0.261	-1.60e-07 5.90e-07
pad		2.139397	12.917	0.17	0.869	-23.24908 27.52788
_cons		-92.51794	12.45743	-7.43	0.000	-117.0031 -68.03275

. hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of discl

chi2(1) = 16.94

Prob > chi2 = 0.0000

Kesimpulan: Terdapat heteroskedastisitas, akan diatasi dengan uji Robust

Uji Autokorelasi

`. regress discl edu size wealth pad`

Source	SS	df	MS			
Model	32448.5712	4	8112.1428	Number of obs =	434	
Residual	87706.8873	429	204.444959	F(4, 429) =	39.68	
Total	120155.459	433	277.495285	Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.2701	
				Adj R-squared =	0.2632	
				Root MSE =	14.298	

discl	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
edu	1.948721	.5200191	3.75	0.000	.9266189	2.970823
size	8.246428	.8869543	9.30	0.000	6.503111	9.989745
wealth	2.15e-07	1.91e-07	1.13	0.261	-1.60e-07	5.90e-07
pad	2.139397	12.917	0.17	0.869	-23.24908	27.52788
_cons	-92.51794	12.45743	-7.43	0.000	-117.0031	-68.03275

`. dwstat`
 Durbin-Watson d-statistic(5, 434) = 1.917395
Kesimpulan: Tidak terdapat autokorelasi

Uji Hipotesis (Regresi Setelah Uji Robust)

`. regress discl edu size wealth pad, robust`

Linear regression

discl	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
edu	1.948721	.4803188	4.06	0.000	1.00465	2.892792
size	8.246428	.9357956	8.81	0.000	6.407113	10.08574
wealth	2.15e-07	1.04e-07	2.06	0.040	1.03e-08	4.19e-07
pad	2.139397	12.9986	0.16	0.869	-23.40947	27.68827
_cons	-92.51794	12.40414	-7.46	0.000	-116.8984	-68.13749

Variabel	Hipotesis	Uji Hipotesis	Signifikansi
Level of Economic Development (EDU)	+	+	Signifikan
Size of the Public (SIZE)	+	+	Signifikan
Budgetary Capacity (WEALTH)	+	+	Signifikan
Kemandirian Pemda (PAD)	+	+	Tidak Signifikan

Variabel	Pengukuran Data
Disclosure (DISCL)	Skor Checklist Website Pemda
Level of Economic Development (EDU)	Rata-Rata Lama Sekolah
Size of the Public (SIZE)	Ln Jumlah Penduduk
Budgetary Capacity (WEALTH)	(Total Belanja Dikurangi Belanja Pegawai) Dibagi Jumlah Penduduk
Kemandirian Pemda (PAD)	Total Pendapatan Asli Daerah Dibagi Total Pendapatan



Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi dan Kepemilikan Pemerintah terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan

DESI HANDAYANI*

Politeknik Caltex Riau

ANDREAS

RUHUL FITRIOS

Universitas Riau

Abstract: *Taxes are a burden to the taxpayers, so they would try to streamline and reduce the burden through various ways. This study was aimed at examining the effect of managerial skills, investment opportunity set, and government ownership on the corporate effective tax rate. This study was tested to companies other than the service sector, finance and financial institutions listed at the Indonesia Stock Exchange from 2009 to 2011. The population consisted of 265 companies, and the sample comprised of 168 companies with 504 firm years which were selected through purposive sampling method. The test results of a multiple linear regression analysis using eviews6 showed there was a significant effect of the managerial skills, investment opportunities, and government ownership on the corporate effective tax rate. The negative coefficient value of managerial skills showed that the higher managerial skills were, the lower the corporate effective tax rate would be. The positive coefficient value of the investment opportunities and the government ownership indicated that the greater the investment opportunities and government ownership were, the greater the corporate effective tax rate would be.*

Keywords : *Effective Tax Rate, Managerial Skills, Investment Opportunity Set, Government Ownership.*

* Corresponding author: ci_e@yahoo.com

1. Pendahuluan

Beban pajak dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak. Tarif pajak yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh Undang-undang (UU). Tarif yang ditetapkan UU ini dikenal dengan istilah Statutory Tax Rate (STR). Dalam prakteknya ditemukan wajib pajak yang justru membayar beban pajaknya lebih rendah dari yang seharusnya jika dihitung dengan menggunakan STR. Beban pajak lebih rendah ini diketahui dari besaran tarif pajak efektif perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan tarif yang mencerminkan beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh wajib pajak. ETR dihitung dari jumlah pajak penghasilan terutang dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak (PWC 2011). Semakin kecil tarif pajak efektif perusahaan menunjukkan semakin kecil beban pajak yang ditanggung perusahaan.

STR setiap perusahaan akan selalu sama. Di Indonesia STR atas Pajak Penghasilan (PPH) badan adalah sebesar 25% yang berlaku sejak tahun 2010. Namun ETR setiap perusahaan akan berbeda-beda. Tingginya STR akan membuat wajib pajak melakukan berbagai upaya untuk menurunkan beban pajak yang harus mereka bayar. Upaya menurunkan beban ini dilakukan dengan mengelola pajak perusahaan. Salah satu bentuk manajemen pajak adalah berupa perencanaan pajak. Perusahaan berusaha memaksimalkan perencanaan pajaknya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meminimalkan beban pajaknya. ETR yang semakin rendah menunjukkan semakin maksimal perusahaan mengelola perencanaan pajaknya.

ETR yang berbeda-beda antar perusahaan (cross section) bahkan berbeda-beda antar periode dalam satu perusahaan (time series) dapat digunakan untuk melihat daya saing antar perusahaan (Ruba'i 2009). Sementara STR tidak dapat digunakan untuk menilai daya saing antar perusahaan (Hasset dan Mathur 2011).

Berdasarkan hasil penelitian, variasi ETR dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor karakteristik perusahaan seperti ukuran, *leverage*, *return on asset*, *asset mix*, aktivitas luar negeri dan *multinational company* (Stickney dan McGee 1982; Zimmerman 1983; Newberry dan Gupta 1997; Richardson dan Lanis 2007; Noor, Mastuki dan Bardai 2008; Ruba'i 2009; Wibowo 2012). Namun selain faktor-faktor tersebut, Ruba'i (2009) menemukan bahwa kecakapan manajerial dan set kesempatan investasi berpengaruh terhadap ETR pada perusahaan manufaktur. Wibowo (2012) menemukan bahwa kepemilikan publik juga berpengaruh terhadap ETR pada tujuh sektor perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif tersebut maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah : apakah kecakapan manajerial, set kesempatan investasi dan kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kecakapan manajerial, set kesempatan investasi dan kepemilikan pemerintah terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Agar hasil tidak bias maka digunakan variabel kontrol berupa karakteristik-karakteristik perusahaan yang telah diujikan oleh para peneliti sebelumnya terhadap ETR yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, ROA, *capital intensity*, *inventory intensity* dan *multinational company*. Penelitian akan difokuskan pada perusahaan selain sektor jasa, bank dan lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2011.

2. Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Tarif Pajak Efektif

Besarnya beban pajak dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku adalah berdasarkan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam aturan perpajakan. Tarif pajak yang ditetapkan dalam

aturan perpajakan ini dikenal dengan Statutory Tax Rate (STR). Sedangkan tarif pajak efektif (ETR) merupakan tarif pajak yang tidak ditetapkan dalam aturan perpajakan. PriceWaterhouseCoopers (PWC 2011) merumuskan tarif pajak efektif sebagai total pajak penghasilan terutang dibagi dengan penghasilan sebelum pajak. Total pajak penghasilan terutang merupakan beban pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan. Jika diformulasikan maka ETR dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak Terutang}}{\text{Penghasilan sebelum pajak}}$$

Nicodeme (2001) mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang besar antara STR dan ETR. STR tidak mencerminkan beban pajak perusahaan dengan sempurna. Sedangkan ETR akan memperlihatkan insentif pajak dari pemerintah. ETR juga dapat digunakan untuk membandingkan perbedaan perlakuan pajak antar perusahaan dan antar negara.

ETR dapat membantu wajib pajak untuk mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya kita bayarkan untuk pajak. GAO (2008) menyatakan bahwa rata-rata tarif pajak efektif yang diukur dari pajak penghasilan yang dibayar dibagi dengan penghasilan sebelum pajak, sangat berguna untuk mengukur beban pajak yang sebenarnya.

Beban pajak perusahaan berbeda-beda secara *cross section* maupun *time series*. Sehingga ETR pun akan berbeda-beda secara *cross section* dan *time series* (Damodaran t.t). Variasi ETR akan menimbulkan kompetisi pajak antar perusahaan. Sebab perbedaan ETR antar perusahaan menjadi salah satu alat untuk membandingkan daya saing antar perusahaan. Sehingga perusahaan akan melakukan berbagai strategi kompetisi pajak.

Strategi meminimalkan beban pajak dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan faktor-faktor karakteristik perusahaan termasuk insentif pajak. Perusahaan yang mendapatkan insentif pajak tentu akan memanfaatkan keuntungan tersebut sehingga beban pajaknya kecil. ETR dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat insentif yang diberikan pemerintah (Nicodeme 2011). STR yang besarnya selalu tetap dan sama tidak dapat menunjukkan adanya

insentif ini karena STR tidak memperhitungkan luas dasar pengenaan pajak (Hasset dan Mathur 2011).

Perusahaan besar cenderung memiliki beban pajak atau ETR tinggi karena cenderung mendapatkan insentif pajak lebih sedikit dari perusahaan kecil (Sansing1998; Holland 1998; Desai 2003) dalam Noor, Mastuki dan Bardai (2008). Namun Hanlon (2003) dalam Noor, Mastuki dan Bardai (2008) berpendapat ukuran perusahaan berkorelasi negatif dengan tarif pajak efektif karena perusahaan besar memiliki kekuatan politik untuk mendapatkan insentif pajak.

Pemberian insentif pada industri tertentu menyebabkan variasi ETR yang akan menimbulkan isu ketidaklayakan dan ketidaknetralan dalam sistem perpajakan (Gupta dan Newberry 1997; Nicodeme 2001; Buijink et al 2002; Janssen, 2005) dalam Noor, Mastuki dan Bardai (2008). Variasi ETR dapat digunakan untuk melihat dampak dari kebijakan yang dibuat. Sehingga dengan melihat kepada nilai ETR akan diketahui apakah terdapat kelemahan dalam penegakan aturan (Damodaran t.t).

2.2 Kecakapan Manajerial dan Tarif Pajak Efektif

Manajer merupakan agen di dalam perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan fungsi manajemen dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Agar bisa melaksanakan peran tersebut, manajer dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian atau kecakapan manajerial. Kecakapan manajerial merupakan suatu keterampilan atau karakteristik personal yang membantu tercapainya kinerja yang tinggi dalam tugas manajemen (Djuitaningsih dan Rahman 2011). Kecakapan manjerial merupakan kemampuan manajer dalam mencapai efisiensi perusahaan (Demerjian et al 2012). Manajer yang cakap dapat mengambil keputusan dan membuat strategi bisnis yang bernilai tambah

bagi perusahaan (Isnugrahadi dan Kusuma 2009). Bertrand dan Schoar (2002) mengatakan bahwa manajer memberikan pengaruh yang luas atas keputusan perusahaan.

Salah satu kunci sukses dalam perusahaan adalah manajer yang mampu mendesign proses bisnis yang efisien dan keputusan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Manajer merupakan orang yang melakukan perencanaan dalam perusahaan. Manajer mempengaruhi pilihan-pilihan dan keputusan dalam perusahaan (Bertrand dan Schoar 2002). Dalam melaksanakan fungsi manajemen, manajer harus memiliki skill sehingga manajer mampu melakukan efisiensi dan efektifitas yang akan berdampak pada laba yang tinggi secara berkelanjutan (Staniec 2010). Kecakapan manajerial sangat mempengaruhi kualitas laba (Demerjian et al 2012).

Salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh manajer adalah kegiatan perencanaan. Perencanaan dan kebijakan pajak perusahaan termasuk dalam perencanaan dan kebijakan bisnis yang dibuat manajer. Perencanaan bisnis atau strategi bisnis yang dibuat perusahaan harus sejalan dengan strategi perencanaan pajak perusahaan (Higgins, Omer dan Philips 2012). Manajer atau eksekutif perusahaan adalah orang yang sangat berperan dalam aktivitas perencanaan pajak perusahaan (Dyrenge, Hanlon dan Maydew 2009). Semakin tinggi kecakapan manajerial maka akan semakin tinggi tarif pajak efektif perusahaan (Ruba'i 2009). Namun menurut Halperin dan Sansing (2005) tarif pajak efektif tidak bisa dijadikan alat penilaian yang efektif atas kinerja manajer. Sebab perubahan pada beban pajak yang ditanggung perusahaan akibat tindakan manajer berbeda dengan perubahan beban pajak akibat tindakan pemilik.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan dugaan sementara (**H₁**) *kecakapan manajerial berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.*

2.3 *Investmen Opportunity Set (IOS)*

Set Kesempatan Investasi (IOS) merupakan pilihan investasi yang dimiliki perusahaan dimasa yang akan datang. IOS pertama kali diperkenalkan oleh Myers pada tahun 1976. Konsep IOS beranjak dari pemikiran bahwa perusahaan yang tumbuh adalah perusahaan yang memiliki peluang atau kesempatan investasi yang menguntungkan di masa yang akan datang. Perusahaan merupakan gabungan antara aset ditempatkan dengan nilai sekarang kesempatan bertumbuh dalam bentuk investasi masa datang (Myers 1976). Perusahaan yang memiliki IOS tinggi ini cenderung untuk tidak menggunakan pendanaan dari pihak ketiga dalam bentuk utang. Perusahaan tersebut lebih memilih untuk menggunakan pendanaan internal sehingga keuntungan dari investasi yang diperoleh akan lebih memaksimalkan nilai pemegang saham.

Menurut Gaver dan Gaver (1993) dalam Faisal (2004) bahwa opsi investasi di masa datang tidak hanya didapat melalui proyek-proyek riset dan pengembangan, tapi juga kemampuan perusahaan memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Perusahaan besar biasanya memiliki pilihan investasi yang lebih banyak dibanding perusahaan kecil karena perusahaan besar biasanya mendominasi pasar sehingga mereka memiliki keunggulan kompetitif.

Menurut Myers (1976) perusahaan dengan IOS tinggi cenderung untuk mengoptimalkan investasinya dan sedikit menggunakan utang. Dengan kecilnya nilai utang, maka beban bunga pinjaman juga akan terpengaruh sehingga perusahaan melewatkan kesempatan untuk menghemat pajak melalui beban bunga. Beban bunga pinjaman merupakan salah satu pengurang penghasilan kena pajak. Gaver dan Gaver (1993) dalam Ruba'i (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan IOS tinggi biasanya adalah perusahaan besar dan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi. Semakin tinggi IOS perusahaan maka akan semakin tinggi beban pajak perusahaan yang diukur dari ETR (Ruba'i 2009). Berdasarkan

uraian tersebut maka dirumuskan dugaan sementara (H_2) *IOS berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.*

2.4 Kepemilikan Pemerintah

Pengendalian kepemilikan pada perusahaan diperoleh secara langsung dengan memperoleh hak mayoritas (lebih dari 50%) atas saham berhak suara (Beams, Brozovsky dan Shoulders 2002:71). Kepemilikan pemerintah berarti pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas atas saham berhak suara. Perusahaan yang berada di bawah kepemilikan pemerintah dikenal dengan BUMN.

Pemerintah merupakan penyelenggara kegiatan negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah membutuhkan pendapatan yang salah satu sumber pendapatan negara adalah melalui pajak. Sehingga pemerintah membuat kebijakan dan peraturan perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan mengamankan pendapatan negara.

Ketika pemerintah sebagai pemilik perusahaan, pemerintah akan memiliki kepentingan atas perusahaan tersebut berupa kepentingan untuk mendapatkan pengembalian investasi. Hal tersebut sangat terkait dengan kinerja perusahaan. Salah satunya dengan melihat laba perusahaan. Salah satu cara meningkatkan laba perusahaan adalah dengan menekan beban. Beban pajak merupakan salah satu yang dapat diminimalkan. Namun ketika usaha untuk meminimalkan beban pajak dalam perusahaan BUMN dilaksanakan maka akan bertolak belakang dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kegiatan negara. Hal ini akan menimbulkan suatu konflik pada pemerintah sebagai pemilik perusahaan dan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Dari segi aplikasi manajemen, kondisi BUMN sering lebih menyerupai tata laksana pemerintahan (Priambodo 2004). Banyak kegiatan di BUMN dilaksanakan demi mematuhi

aturan dan ketentuan dengan prosedur berkepanjangan, tidak efisien dan bahkan tanpa target. Pada dasarnya BUMN juga rentan dengan penyimpangan. Kondisi ini menjadi sebuah dilema bagi perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, antara misi mengoptimalkan layanan publik dan misi menjadi organisasi yang *profitable*, berbenturan dengan kultural dan struktural yang cukup rumit (Priambodo 2004).

Kepemilikan pemerintah atas perusahaan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas tata kelola perusahaan (Borisova et al 2012). Ditemukan dampak negatif kepemilikan pemerintah atas nilai perusahaan di China (Tian dan Estrin 2005). Namun kepemilikan pemerintah juga membawa dampak kinerja yang lebih baik pada perusahaan setelah adanya kontrol pemerintah pada karakteristik tertentu di Malaysia (Razak, Ahmad dan Aliahmed 2007).

Wibowo (2012) menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Semakin tinggi kepemilikan publik maka akan semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Sementara Wu et al (2012) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan di China yang dikontrol oleh pemerintah memiliki beban pajak (ETR) lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang dikontrol oleh swasta. Kondisi Indonesia dan China sangat jauh berbeda di mana Indonesia adalah negara demokrasi sedangkan China menganut sistem sosialis yang semua di bawah kendali pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan dugaan sementara (**H₃**) *kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.*

3. Metode Riset

3.1 Data dan Sampel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross section*. Penelitian ini mengambil perusahaan-perusahaan selain sektor jasa, bank dan lembaga keuangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2009-2011. Data diambil melalui web BEI dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) berupa data-data kuantitatif yang terdapat dalam laporan keuangan. Jumlah populasi diperoleh sebesar 265 perusahaan. Penarikan sampel menggunakan *purposive sampling methode* dengan kriteria sebagai berikut: perusahaan tidak delisting dalam rentang tahun 2009-2011, tidak bergerak dalam bidang jasa, selalu mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap, tahun buku berakhir 31 Desember, dan tidak memiliki laba sebelum bunga dan pajak negatif (rugi). Penarikan sampel dan jumlah sampel yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 1 di lampiran.

3.2 Pengukuran dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Dependen adalah Tarif Pajak Efektif (ETR) yang diukur dengan rumus

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{beban pajak kini}}{\text{penghasilan sebelum pajak}}$$

Perusahaan yang memiliki beban pajak negatif yang mengakibatkan tarif pajak efektif bernilai negatif akan diberi nilai 0 (nol) dan perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif di atas 100% akan diberi nilai 100 (Newberry dan Gupta 1997; Buijink et al 2002 dalam Noor, Mastuki dan Bardai 2008; dan Ruba'i 2009).

Variabel Indenden terdiri dari :

1. Kecakapan manajerial yang diukur dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). DEA merupakan pendekatan untuk mengevaluasi kinerja (efisiensi) seperangkat entitas yang disebut sebagai *Decision Making Units* (DMUs) dengan cara mengubah banyak *input* menjadi banyak *output*.

Input yang digunakan adalah *Cost of Good Sold* (COGS), *Selling, General and Administration Expense* (SG&A), *Plant, Property and Equipment* (PPE). Sedangkan

output yang digunakan adalah penjualan. Penggunaan input dan output ini mengacu pada peneliti-peneliti sebelumnya (Demerjian et 2012 dan Ruba'i 2009). DMU mencapai efisiensi penuh ketika bernilai 1 atau 100% (Baltagi 2005). Skor DEA atau perbandingan *output* terhadap *input* untuk setiap unit dinyatakan dinyatakan dalam nilai 0-1 atau 0% - 100% (Wulansari 2010).

2. Mengacu kepada Adam dan Goyal (2007) maka proksi IOS diukur menggunakan *Market to Book Asset Ratio*, dengan rumus :

$$\frac{\text{asset} - \text{total ekuitas} + (\text{lembar saham beredar} \times \text{harga penutupan saham})}{\text{total asset}}$$

3. Kepemilikan Pemerintah diukur dengan menggunakan *dummy* variabel. Kepemilikan mayoritas jika pemerintah memiliki saham atas perusahaan >50%. Jika pemilikan pemerintah atas sebuah perusahaan >50%, maka ditandai dengan angka 1. Sedangkan jika pemilikan pemerintah atas saham perusahaan $\leq 50\%$ maka diberi tanda 0.

Variabel Kontrol terdiri dari :

1. Ukuran perusahaan = $\ln(\text{total asset})$
2. *Leverage* menggunakan *debt ratio* = $\frac{\text{total liabilities}}{\text{total assets}}$
3. Return on Asset (ROA) = $\frac{\text{Net Income} + \text{Interest Expense}}{\text{Average Total Assets}}$
4. Capital Intensity = $\frac{\text{Asset Tetap}}{\text{Total Asset}}$
5. Inventory Intensity = $\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Asset}}$
6. Multinational company dengan *dummy* variabel, nilai 1 jika memiliki asset di luar negeri dan 0 (nol) jika tidak memiliki asset di luar negeri.

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dua arah dengan nilai $n = 504$ dan $k = 9$ dan signifikansi 5%. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5%.

4. Analisis Data dan Pembahasan

Data diolah menggunakan regresi linier berganda dengan model sebagai berikut :

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 MA_{it} + \beta_2 IOS_{it} + \beta_3 GOV_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 LEV_{it} + \beta_6 ROA_{it} + \beta_7 CAPIN_{it} + \beta_8 INVIN_{it} + \beta_9 MULTI_{it} + e$$

ETR_{it} = Tarif Pajak Efektif perusahaan i pada periode t

MA_{it} = Kecakapan manajerial perusahaan i pada periode t

IOS_{it} = Set Kesempatan Investasi perusahaan i pada periode t

GOV_{it} = Kepemilikan pemerintah di perusahaan i pada periode t

$SIZE_{it}$ = Ukuran perusahaan i pada periode t

ROA_{it} = Return on Asset perusahaan i pada periode t

$CAPIN_{it}$ = Capital Intensity perusahaan i pada periode t

$INVIN_{it}$ = Inventory Intensity perusahaan i pada periode t

$MULTI_{it}$ = Aktivitas luar negeri perusahaan i pada periode t

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3,\dots,n}$ = Koefisien variabel 1,2,3.....n

e = Error

Berdasarkan hasil pengukuran atas variabel tarif pajak efektif perusahaan, diketahui rata-rata tarif pajak efektif per sektor sebagaimana yang disajikan pada tabel 2 di lampiran.

ETR tertinggi pada tahun 2009 adalah pada sektor konstruksi yaitu sebesar 45%, tahun 2010 pada sektor Apparel and Other Textile Product sebesar 27% dan tahun 2011 ETR tertinggi pada sektor konstruksi sebesar 41%. Salah satu penyebab tingginya ETR pada sektor konstruksi karena adanya unsur pajak penghasilan final. Selain itu adanya perubahan peraturan atas PPh perusahaan konstruksi pada tahun 2008 dan 2009 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 51 tahun 2008 dan diubah dengan PP No 40 Tahun 2009. Perubahan peraturan ini mengakibatkan adanya penyesuaian-penyesuaian transaksi yang dilakukan perusahaan konstruksi dan berakibat pada beban pajak mereka.

Sedangkan tingginya ETR tahun 2010 pada sektor *Apparel and Other Textile Product* karena industry tekstil di Indonesia masih sangat tergantung pada impor bahan baku dari luar negeri, investasi dan nilai tukar rupiah (Hermawan 2011). Tingginya impor akan meningkatkan beban pajak impor perusahaan.

ETR terendah tahun 2009 dan 2011 ada pada sektor *Paper and Allied Product* sebesar 21% dan 19%, dan tahun 2010 pada sektor *Food and Beverages* sebesar 20%. Perusahaan-perusahaan pada sektor ini merupakan perusahaan manufaktur yang memanfaatkan peralatan teknologi. Tingginya investasi dalam bentuk aktiva tetap dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak melalui biaya penyusutan aktiva tetap. Selain pada aktiva tetap, tingginya biaya riset dan pengembangan juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak.

Jika dirata-ratakan, maka rata-rata ETR seluruh sektor tahun 2009 sebesar 27%, tahun 2010 sebesar 26% dan tahun 2011 sebesar 25%. Rata-rata ETR tahun 2009 dan 2011 lebih rendah dari STR yang berlaku saat itu. Sedangkan ETR tahun 2010 masih lebih tinggi 1% dari STR tahun 2010. Hal ini karena adanya penyesuaian perubahan tarif dari 28% menjadi 25%. Penurunan rata-rata ETR dari tahun 2009-2011 mengikuti pergerakan penurunan STR.

Trend ETR perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat juga dikelompokkan berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh Newberry dan Gupta (1997). Mereka mengelompokkan ETR atas tiga kategori, yaitu ETR rendah yang bernilai $< 10\%$, ETR normal antara 10% sampai batas atas STR, dan ETR tinggi di atas STR. Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Newberry dan Gupta (1997) maka penyebaran ETR atas perusahaan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 di lampiran.

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa pada tahun 2009 ETR tersebar pada level normal yaitu antara range 10% sampai batas tertinggi STR 2009 yaitu 28% . Tahun 2009 merupakan tahun pertama penerapan tarif proporsional untuk PPh badan di Indonesia. Sebelumnya Indonesia menggunakan tarif progresif untuk PPh badan. Tahun 2010 ETR paling banyak tersebar pada level *high* yaitu di atas STR 2010. Pada tahun 2010 terjadi perubahan STR dari tahun 2009 yaitu dari 28% menjadi 25% . Tahun 2011 ETR terbanyak tersebar pada level normal yaitu range 10% sampai batas STR 2011 yaitu 25% .

Penyebaran ETR berdasarkan klasifikasi dari Newberry dan Gupta (1997) ini menunjukkan bahwa kecenderungan perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki beban pajak dalam batas normal dan high. Gencarnya reformasi pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam enam tahun terakhir telah merubah aturan-aturan dan sistem perpajakan Indonesia. Sehingga pada beberapa sektor mereka mendapatkan manfaat dari reformasi tersebut dan pada beberapa sektor yang lain justru mengalami pengetatan dalam peraturan pajak.

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif data disajikan pada tabel 4 di lampiran. Berdasarkan table 4 diketahui nilai ETR terendah adalah $0,00$ dan tertinggi $0,8074$. Nilai $0,00$ karena ada beberapa perusahaan sampel yang memiliki beban pajak negatif. Rata-rata ETR dari 168 perusahaan dan 504 *firm years* adalah $0,2623$ atau $26,23\%$. Rata-rata ETR ini lebih rendah

dari STR 2009 yang berada pada tarif 28%. Sedangkan jika dibandingkan dengan STR yang berlaku sejak 2010 yaitu 25%, rata-rata ETR ini lebih tinggi. Reformasi pajak yang sedang gencarnya dilakukan oleh Dirjen Pajak sejak enam tahun terakhir telah merubah aturan-aturan perpajakan sehingga nilai ETR perusahaan secara rata-rata juga akan terpengaruh. Standar deviasi untuk ETR sebesar 0,1382. Santoso (2010:182) mengatakan bahwa semakin besar standar deviasi menunjukkan data semakin bervariasi.

Kecakapan manajerial (MA) yang diukur adalah kemampuan manajer dalam mengelola perusahaan secara efisien dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Berdasarkan tabel 4, nilai efisiensi atau DEA terendah 60,85, nilai tertinggi 100 dan nilai rata-rata DEA berada pada 97,008. Jauhnya range antara nilai tertinggi dan terendah menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan tingkat efisiensi antar perusahaan. Ada perusahaan yang sangat efisien (memperoleh nilai 100) dan ada yang sangat rendah tingkat efisiensinya (nilai 60,85). Namun nilai rata-rata sebesar 97,008 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel memiliki kecakapan manajerial yang tinggi yang ditunjukkan dengan nilai efisiensi atau DEA yang mendekati 100. Nilai rata-rata jauh berada di atas nilai Standar deviasi sebesar 7,9880. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki efisiensi yang tinggi.

Berdasarkan nilai rata-rata kecakapan manajerial yang tinggi dan rata-rata ETR, dapat dibuat kesimpulan awal bahwa tingkat efisiensi yang tinggi yang dilaksanakan oleh manajer pada perusahaan sampel masih belum maksimal karena nilai rata-rata ETR yang diperoleh masih masih berada pada tarif 26%. Nilai ini masih tinggi dari STR yang berlaku sejak 2010 sampai sekarang yaitu 25%. Kemungkinan efisiensi bisnis yang dilakukan belum sebanding dengan usaha untuk mengefisienkan beban pajak. Seandainya efisiensi bisnis diseimbangkan dengan efisiensi pajak, kemungkinan rata-rata ETR bisa lebih rendah lagi.

Nilai IOS terendah sebesar 0,4720 dan tertinggi 14,333. Besarnya range antara nilai terendah dan tertinggi ini dapat dinyatakan bahwa terdapat kesenjangan antar perusahaan sampel terkait kesempatan investasi yang mereka miliki. Berdasarkan tabel 4 rata-rata IOS sebesar 1,6477 dan standar deviasi sebesar 1,5826. Nilai rata-rata yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai tertingginya serta standar deviasi yang cukup tinggi menunjukkan bahwa umumnya kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan sampel masih rendah.

Kepemilikan pemerintah (GOV) berdasarkan frekuensi pada tabel 4, dari 504 *firm years* hanya 27 *firm years* yang berada di bawah kepemilikan pemerintah. Berarti sebagian besar perusahaan pada sektor selain jasa, keuangan dan lembaga keuangan merupakan perusahaan yang dikelola oleh swasta.

Deskriptif statistik untuk variabel kontrol seperti yang terdapat pada tabel 4. Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai maksimum 31.3772 dan minimum 11.9415. Nilai rata-rata size 24,5488 dan standar deviasi sebesar 5,2581. Ukuran perusahaan dinilai dari total asset yang dilogaritmakan. Jika di-antilog-kan maka nilai rata-rata tersebut sekitar 5 triliun rupiah. Standar deviasi cukup rendah menandakan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki jumlah aset besar.

Leverage (LEV) memiliki nilai tertinggi 0,9036 dan nilai terendah 0,0594. Rata-rata leverage 0,4436 dan standar deviasi 0,1895. Berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi, sebagian besar perusahaan sampel memiliki nilai utang yang cukup besar namun dapat dijamin dengan nilai asset yang juga memadai.

ROA tertinggi 0,6008 dan terendah 0,0000002. Sedangkan rata-rata ROA 0,1126 dan standar deviasi 0,0918. Berdasarkan nilai statistik tersebut, sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel memiliki tingkat profitabilitas tinggi. Kinerja perusahaan dalam memanfaatkan asset cukup baik.

Asset mix berupa *Capital Intensity* (CAPIN) memiliki nilai tertinggi 0,7565 dan terendah 0,0026. Nilai rata-rata CAPIN 0,2631 dan standar deviasi sebesar 0,1838. *Inventory intensity* (INVIN) tertinggi adalah 0,7419 dan terendah 0,00. Rata-rata INVIN 0,2124 dan standar deviasi 0,1423. INVIN memiliki nilai 0,00 karena terdapat perusahaan dalam sampel yang memiliki persediaan 0 (nol). *Multinational company* (MULTI) berupa *variable dummy* dimana nilai tertinggi adalah 1 dan terendah adalah 0. Dari nilai frekuensi, hanya 144 *firm years* dari 504 *firm years* yang merupakan perusahaan multinasional.

4.2 Pengujian Variabel Kontrol

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis atas variabel independen terhadap variabel dependen, terlebih dahulu dilakukan pengujian pengaruh variabel kontrol terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dua arah dengan jumlah $n = 504$ dan $k=6$, signifikansi 5%. Berdasarkan pengujian dua arah diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,964. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5 nilai t hitung dan signifikansi untuk SIZE, LEVERAGE, ROA, CAPIN dan MULTI menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan, leverage, ROA, capital intensity dan multinasional company terhadap ETR. Sedangkan INVIN tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap ETR. Hasil uji variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

Ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi 0.0219 (Richardson and Lanis 2007; Noor, Mastuki, dan Bardai 2008; Ruba'i 2009). Leverage (LEV) berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi 0.0007 (Richardson and Lanis 2007; Noor, Mastuki, dan Bardai 2008; Ruba'i 2009; Wibowo 2012). ROA berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi 0.000 (Noor, Mastuki dan Bardai 2008). *Capital Intensity* (CAPIN) berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi 0.0358 (Richardson and Lanis 2007; Noor, Mastuki, dan

Bardai 2008; Ruba'i 2009; Wibowo 2012). Sedangkan *Multinational company* (MULTI) juga berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan signifikansi 0.0000 (GAO 2008; Noor, Mastuki dan Bardai 2008; Ruba'i 2009).

Inventory Intensity (INVIN) memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif (Richardson and Lanis 2007) namun pengaruhnya tidak memberikan bukti yang signifikan terhadap variasi dalam tarif pajak efektif (Noor, Mastuki dan Bardai 2008). Nilai t hitung 1.0203 lebih kecil dari nilai t tabel 1,964. Signifikansi *inventory intensity* adalah 0.3083, lebih tinggi dari batas signifikansi 0.05. Sehingga dinyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan antara *inventory intensity* terhadap ETR. Tidak terdapatnya pengaruh *inventory intensity* terhadap ETR kemungkinan karena *inventory* tidak mempengaruhi pajak secara langsung seperti halnya pada asset tetap yang berpengaruh lewat penyusutannya. Pengelolaan *inventory* lebih cenderung mempengaruhi harga pokok secara langsung.

4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil seperti tabel 6. Uji t dilakukan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dua arah dan tingkat signifikansi 5%. Dengan jumlah $n=504$ dan $k= 9$, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1.964.

Nilai koefisien pada persamaan regresi menunjukkan bahwa kecakapan manajerial (MA), *leverage* (LEV), ROA dan *capital intensity* (CAPIN) memiliki hubungan negatif atau berbanding terbalik terhadap tarif pajak efektif (ETR). Set kesempatan investasi (IOS), kepemilikan pemerintah (GOV), ukuran perusahaan (SIZE) dan perusahaan multinasional (MULTI) menunjukkan hubungan positif atau berbanding lurus terhadap ETR. Sedangkan

inventory intensity (INVIN) menunjukkan hubungan positif terhadap ETR dan secara statistik tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap ETR.

Uji F dan nilai koefisien determinasi digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dengan tingkat signifikansi 5%, $n=504$ dan $k=9$, maka diperoleh nilai F tabel sebesar 1.898. Hasil uji F dan koefisien determinasi disajikan pada tabel 7 di lampiran.

Berdasarkan tabel 7 nilai F hitung sebesar 5.660 dan signifikansi 0.0000. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yang bernilai 1.8984 dan signifikansi lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh variabel independen (MA, IOS dan GOV) terhadap variabel dependen (ETR).

Nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0.7528 yang berarti bahwa pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dependen sebesar 75.28%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian ini. Sedangkan nilai adjusted R^2 sebesar 0.6198 yang berarti bahwa jika terdapat penambahan satu variabel lain, maka pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 61.98%.

4.4 Pengaruh Kecakapan Manajerial Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan

Berdasarkan tabel 6, nilai koefisien kecakapan manajerial bernilai negatif sebesar -0.005 dengan t hitung -8.231 dan signifikansi 0.000. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 1,964. Nilai koefisien negatif menunjukkan hubungan variabel berbanding terbalik. Apabila terjadi peningkatan kecakapan manajerial maka akan menurunkan tarif pajak efektif sebesar 0.005. Sedangkan signifikansi jauh lebih kecil dari 5% sehingga dapat dikatakan kecakapan manajerial berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Dengan demikian hipotesis H_1 diterima. Semakin tinggi kecakapan manajerial maka akan semakin rendah ETR perusahaan.

Manajer menggunakan kecakapan manajerialnya untuk membuat perencanaan-perencanaan guna meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu upaya peningkatan nilai perusahaan adalah dengan menekan beban pajak. Pajak yang dibayar oleh perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba, sehingga perusahaan akan berusaha melakukan berbagai cara untuk melakukan penghematan pajak melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang efektif dapat terjadi karena manajer mampu mempertimbangkan dengan lebih baik konsekuensi pajak atas keputusan yang diambil (Scholes 2002 dalam Ruba'i 2009).

Manajer yang cakap mampu merencanakan dan membuat strategi bisnis yang akan menguntungkan perusahaan, termasuk kebijakan dan strategi pajak perusahaan. Manajemen yang cakap mampu melakukan estimasi dampak dari keputusan yang diambil dengan lebih baik (Demerjian, Lev, McVay 2011). Semakin ahli dan cakap manajer maka akan semakin menguntungkan kebijakan dan strategi yang dibuat bagi perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ruba'i (2009) yang juga menemukan bahwa semakin tinggi kecakapan manajerial maka akan semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya tentang peran manajer dalam perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan oleh Dyreng, Hanlon dan Maydew (2009).

Namun meskipun terdapat pengaruh negatif antara kecakapan manajerial terhadap ETR berdasarkan hasil penelitian ini, perlu juga dicermati bahwa dari pergerakan rata-rata ETR menunjukkan penurunan yang wajar karena mengikuti penurunan STR. Sehingga meskipun kecakapan manajerial dari hasil statistik pada perusahaan sampel menunjukkan efisiensi yang tinggi, tapi kecakapan khusus terhadap pengelolaan pajak perlu ditingkatkan lagi. Sebab ETR masih berada pada sekitar tingkat STR.

Reformasi perpajakan di Indonesia sampai saat ini masih berlangsung. Masih terjadi perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan mengikuti perkembangan kondisi perekonomian. Manajer dapat mengambil peluang-peluang yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan perpajakan untuk mengelola beban pajak perusahaan sehingga mencapai titik minimal.

4.5 Pengaruh Set Kesempatan Investasi Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan

Berdasarkan tabel 6, nilai koefisien IOS bernilai positif sebesar 0.006 dengan t hitung 2.094 dan signifikansi 0.037. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan variabel berbanding lurus. Setiap peningkatan pertumbuhan perusahaan maka akan menaikkan tarif pajak efektif sebesar 0.006. Sedangkan signifikansi lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat dikatakan set kesempatan investasi berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis H_2 diterima. Semakin tinggi IOS maka akan semakin tinggi ETR perusahaan.

Berdasarkan data statistik pada nilai IOS, perusahaan yang jadi sampel rata-rata memiliki pilihan investasi yang tinggi. Jika dilihat ukuran perusahaan, sebagian besar perusahaan sampel memiliki total asset tinggi. Total asset tinggi mewakili ukuran perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar mendapatkan perhatian atau pengawasan lebih dari pemerintah. Sehingga jika dilihat nilai rata-rata ETR kenyataannya juga relatif tinggi. Nilai ETR masih berkisar STR, menunjukkan bahwa masih tinggi beban pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Perusahaan yang bertumbuh menurut Bankman (1994) dalam Ruba'i (2009) lebih mementingkan angka-angka akuntansi yang bagus daripada melakukan penghematan pajak. Perusahaan dengan kesempatan investasi tinggi biasanya merupakan perusahaan besar

(Gaver&Gaver 1993 dalam Rubai 2009) yang tentu lebih stabil dalam keuangan sehingga lebih memanfaatkan peluang investasi. Semakin besar keuntungan investasi maka akan semakin meningkat pendapatan dan meningkat pajak perusahaan. Selain itu, perusahaan besar sesuai dengan *political cost theory* biasanya mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih dari pemerintah terutama terkait pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ruba'i (2009) yang menemukan bahwa semakin besar set kesempatan investasi perusahaan maka akan semakin besar tarif pajak efektif perusahaan.

Pemerintah Indonesia saat ini berusaha untuk membentuk iklim investasi yang positif terutama bagi investor asing. Pemerintah mulai membuat kebijakan-kebijakan insentif untuk menarik minat investor asing. Sedangkan kebijakan insentif untuk perusahaan lokal juga mulai digencarkan. Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang ujungnya juga untuk meningkatkan pendapatan bagi negara. Insentif membuka peluang-peluang investasi. Insentif pada satu jenis pajak, sebenarnya diikuti dengan pendapatan negara dari aliran lain. Namun perlu jadi perhatian bagi pemerintah, apakah kebijakan insentif yang diberikan sudah tepat.

ETR bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk memantau apakah kebijakan insentif yang diberikan sudah tepat, apakah terdapat penyimpangan dalam peraturan dan apakah terdapat perbedaan perlakuan antar perusahaan (Nicodeme 2001). Sehingga pemerintah juga dapat menjadikan nilai ETR sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan insentif untuk meningkatkan peluang investasi.

4.6 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan

Berdasarkan tabel 6, nilai koefisien GOV bernilai positif sebesar 0.117 dengan t hitung 4.648 dan signifikansi 0.000. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan variabel berbanding lurus. Setiap peningkatan jumlah atau

persentase kepemilikan pemerintah di perusahaan maka akan menaikkan tarif pajak efektif sebesar 0.117. Sedangkan signifikansi jauh lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat dikatakan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis H_3 diterima. Semakin tinggi kepemilikan pemerintah maka akan semakin tinggi ETR perusahaan.

Hasil ini seiring dengan hasil penelitian Wibowo (2012), dimana semakin tinggi kepemilikan publik maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Wu et al (2012) atas perusahaan di China. Wu justru menemukan adanya korelasi negatif antara perusahaan yang dikontrol oleh pemerintah terhadap ETR ketika perusahaan bukan merupakan subjek perlakuan pajak khusus. Korelasi negatif menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan pemerintah maka akan semakin kecil ETR. Perbedaan dengan hasil penelitian Wu ini kemungkinan karena sistem di China yang bersifat sosialis, di mana segala sesuatunya dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan Indonesia merupakan negara demokrasi.

Terdapat dua peran pemerintah ketika bertindak sebagai pemilik perusahaan, yaitu sebagai pelaksana kegiatan sosial pembangunan dan sebagai pemilik yang menjalankan usaha komersial dengan keinginan untuk memperoleh keuntungan. Dual fungsi ini akan mempengaruhi kondisi organisasi dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah atau yang dikenal dengan perusahaan BUMN. Menurut Priambodo (2004), dari segi aplikasi manajemen, kondisi BUMN sering lebih menyerupai tata laksana pemerintahan. Banyak kegiatan di BUMN dilaksanakan demi mematuhi aturan dan ketentuan dengan prosedur berkepanjangan, tidak efisien dan bahkan tanpa target. Pada dasarnya BUMN juga rentan dengan penyimpangan. Menurut Priambodo (2004), kondisi ini menjadi sebuah dilema bagi perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, antara misi mengoptimalkan layanan publik dan

misi menjadi organisasi yang *profitable*, berbenturan dengan kultural dan struktural yang cukup rumit.

Menurut Ahmad Damiri (Syarif 2012), merupakan Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), masih terdapat kesan proses birokrasi yang lebih panjang dalam pengambilan keputusan di perusahaan BUMN dibandingkan dengan perusahaan swasta. Sehingga menurutnya perlu perbaikan sistem birokrasi dalam operasional BUMN yang dapat mendorong kinerja, profesionalisme dan pertumbuhan yang lebih baik.

Berdasarkan data statistik, tidak banyak perusahaan dalam sampel penelitian ini yang merupakan perusahaan BUMN. Namun hasil uji hipotesis menunjukkan justru kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR.

Berdasarkan informasi-informasi yang dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa kondisi perusahaan yang dikelola oleh pemerintah ini menjadi sangat bertolak belakang dengan kondisi perusahaan yang dikelola oleh swasta atau publik. Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini dan juga penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2012), perusahaan dengan kepemilikan pemerintah tinggi akan cenderung mengalami beban pajak yang tinggi. Hal ini bisa jadi akibat adanya benturan kepentingan dan aplikasi manajemen yang menyerupai tata laksana pemerintahan serta proses birokrasi di BUMN yang lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan swasta. Kemungkinan lain, perusahaan-perusahaan BUMN lebih fokus untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak untuk pemberian pelayanan pada masyarakat. Penyebab pengaruh positif ini perlu penelitian lebih lanjut sehingga tidak menilai BUMN secara negatif.

5. Simpulan, Keterbatasan dan Implikasi

5.1 Simpulan

1. Semakin tinggi tingkat kecakapan manajerial maka akan semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini karena adanya kecenderungan perusahaan sebagai wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak. Sehingga manajer menggunakan keahlian atau kecakapan manajerialnya untuk melakukan perencanaan pajak.
2. Semakin tinggi tingkat kesempatan investasi perusahaan, maka akan semakin tinggi tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini karena perusahaan yang memiliki peluang investasi tinggi lebih cenderung untuk menggunakan pendanaan internal sehingga melewatkan kesempatannya untuk menghemat pajak melalui beban bunga pinjaman. Selain itu perusahaan yang memiliki kesempatan investasi tinggi cenderung perusahaan besar yang biasanya mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih dari pemerintah.
3. Semakin tinggi tingkat kepemilikan pemerintah pada perusahaan maka akan semakin tinggi tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini karena adanya dual fungsi dari perusahaan yang dimiliki pemerintah sebagai agen yang mengoptimalkan layanan publik dan sebagai perusahaan profitable. Kondisi ini menjadi dilema bagi perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah sehingga akan mempengaruhi tata laksana dan organisasi perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini tidak menguji perusahaan sektor jasa, bank dan lembaga keuangan. Tidak digunakannya perusahaan sektor ini karena alasan adanya penggunaan unsure harga pokok. Sedangkan dalam laporan keuangan perusahaan sektor jasa, bank dan lembaga keuangan tidak mencantumkan harga pokok. Ada baiknya penelitian selanjutnya memasukkan perusahaan sektor jasa, keuangan dan lembaga keuangan dan menyesuaikan

alat ukurnya untuk sektor tersebut. Sebab perusahaan sektor ini merupakan sektor yang cukup dominan di BEI dan peran mereka dalam menambah pemasukan kas ke negara dari pajak juga besar. Selain itu dari sisi kepemilikan pemerintah, perusahaan sektor jasa, keuangan dan lembaga keuangan yang listing di BEI banyak yang merupakan perusahaan BUMN atau BUMD.

2. Pengujian pada penelitian ini dilakukan tidak membedakan perusahaan berdasarkan skala ekonomi. Ada baiknya juga penelitian selanjutnya mengelompokkan pengujian berdasarkan skala ekonomi perusahaan. Pengujian terpisah berdasarkan skala akan lebih memperjelas pengaruh setiap variabel penelitian terhadap tarif pajak efektif. Perusahaan yang listing di BEI dikelompokkan berdasarkan papan pengembang dan papan utama. Pengelompokan ini bisa dijadikan salah satu acuan skala perusahaan.
3. Masih ada faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan tarif pajak efektif perusahaan yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti faktor insentif dari pemerintah, transaksi perusahaan afiliasi, aktivitas perusahaan di luar negeri dan lain-lain. Biasanya transaksi afiliasi dan aktivitas luar negeri dijadikan oleh wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan lain-lain.

5.3 Implikasi Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan bagi dirjen pajak untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak serta acuan dalam membuat peraturan atau kebijakan perpajakan yang dapat mengakomodir berbagai kondisi atau kriteria wajib pajak. Sehingga kemungkinan negara mengalami kerugian dapat diminimalisir.
2. Bagi wajib pajak sendiri hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk penghematan pajak. Wajib pajak mulai

mempertimbangkan untuk memaksimalkan pemanfaatan faktor-faktor yang dapat menghemat pajak yang mereka miliki.

Daftar Referensi

- Adam, Tim dan Vidhan K. Goyal. 2007. *The Investment Opportunity Set and Its Proxy Variables*. The University of Oregon and The Hong Kong University of Science and Technology. Working Paper.
- Beams, Floyd A., John A Brozovsky, dan Craig D Shoulders. 2002. *Akuntansi Lanjutan*. Edisi Tujuh. Jilid 1. Penterjemah : Kaharudin. Jakarta : PT Prenhallindo.
- Bertrand, Marianne and Antoinette Schoar. 2002. *Managing With Style : the Effect of Managers on Firm Policies*. MIT Sloan School of Management. Working Paper 4280-02. <http://ssrn.com/abstract=376880>
- Borisova et al. 2012. *Government Ownership and Corporate Governance : Evidence from The EU*. <http://ssrn.com/abstract=1533854>
- Damodaran, Aswath. (t.t). *More on Effective Tax Rate*. Stern School of Business at New York University. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/taxrate.htm diunduh tanggal 11 September 2012 pukul 2:36 PM.
- Demerjian, Peter, et al. 2012. *Managerial Ability and Earnings Quality*. <http://ssrn.com/abstract=1650309>
- Deviana SP, Birgita. 2009. *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini dalam Deteksi Manajemen Laba Pada Saat Seasoned Equity Offerings*. Universitas Diponegoro.
- Djuitaningsih, Tita dan Aulia Rahman. 2011. *Pengaruh Kecakapan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Media Riset Akuntansi. Vol. 1. No.2 Agustus 2011.
- Dyrend, Scott D, Michelle Hanlon, and Edward L Maydew. 2009. *The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance*. <http://ssrn.com/abstract=1158060>
- Government Accountability Office. 2008. *U.S Multinational Corporations : Effective Tax Rate are Correlated with Where Income Is Reported*. *United States Government Accountability Office*. Report to The Committee on Finance, U.S Senate.
- Halperin, Robert and Richard Sansing. 2005. *Is The Effective Tax Rate an Effective Performance Measure?* www.ssrn.com
- Hassett, Kevin A dan Aparna Mathur. 2011. *Report Card on Effective Corporate Tax Rates. United States Gets an F*. American Enterprise Institute.
- Higgins, Danielle M., Thomas C Omer, dan John D Phillips. 2012. *Tax Avoidance Versus Aggressiveness : The Influence of a Firm's Business Strategy*. <http://ssrn.com/abstract=1727592>
- Hermawan, Iwan. 2011. *Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi Terhadap Perkembangan Industri Textile dan Produk Textile Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol 13. No. 4. May 2011. Diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/71131536/IwanHermawan> tanggal 3 Juni 2013 pukul 10.49 wib.
- Isnugrahadi, Indra dan Indra Wijaya Kusuma. 2009. *Pengaruh Kecakapan Manajerial Terhadap Managemen Laba dengan Kualitas Auditor sebagai Variabel Pemoderasi*. Palembang : Simposium Nasional Akuntansi XII.



- Myers, Stewart C. 1976. *Determinants of Corporate Borrowing*. Sloan School of Management. Massachusetts Institute of Technology. WP 875-76. September 1976.
- Newberry, Kaye dan Sanjay Gupta. 1997. *Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates : Evidence from Longitudinal Data*. Journal of Accounting and Public Policy, vol 16, issue 1, pages 1-34.
- Nicodeme, Gaetan. 2001. *Computing Effective Corporate Tax Rates : Comparisons and Results*. Economic Papers No 153 and MPRA Paper No. 3808.
- Noor, Rohaya Md., Nor'Azam Mastuki, dan Barjoyai Bardai. 2008. *Corporate Effective Tax Rate : A Study on Malaysian Public Listed Companies*. Malaysian Accounting Review, 7, 1.
- Priambodo, Dibyo Soemantri. 2004. *Perjalanan Panjang dan Berliku : refleksi BUMN, 1993-2003 : Sebuah Catatan Tentang Peristiwa, Pandangan, dan Renungan dalam Satu Dasawarsa*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Price Water House Cooper. 2011. *Global Effective Tax Rates*. Price Water House Cooper.
- Razak, Nazrul Hisyam Ab., Rubi Ahmad dan Huson Joher Aliahmed. 2007. *Government Ownership and Performance : Analysis of Listed Companies in Malaysia*. <http://ssrn.com/abstract=1252072>
- Richardson, Grant and Roman Lanis. 2007. *Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rate and Tax Reform : Evidence from Australia*. Journal of Accounting and Public Policy 26 (2007) – 689-704.
- Ruba'i, Ahmad. 2009. *Pengaruh Kecakapan Manajerial dan Set Kesempatan Investasi (IOS) Terhadap Tarif Pajak Efektif*. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Staniec, Iwona. 2010. *Features and Skills That Determinate The Work of Risk Managers*. Philippines : 2010 International Conference on Economics, Business and Management. IPEER vol. 2.
- Stickney, Clyde P dan Victor E. McGee. 1982. *Effective Corporate Tax Rates The Effect of Size, Capital Intensity, Leverage, and Other Factors*. Journal of Accounting and Public Policy, vol 1, issue 2, pages 125-152.
- Syarif A. 2012. *Birokrasi BUMN Tentukan Kadar Profesionalisme*. <http://www.antarajawabarat.com/lihat/berita/38345/lihat/kategori/86/Peristiwa>. Diunduh tanggal 12 April 2013 pukul 16.14 Wib.
- Tian, Lihui dan Saul Estrin. 2005. *Retained State Shareholding in Chinese PLCs : Does Government Ownership Reduce Corporate Value?* Discussion Paper Series The Institute for The Study of Labor (IZA) DP No. 1493.
- Wibowo, Adi. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif (Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Wulansari, Retno RR. 2010. *Pengukuran Efisiensi Relatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wu, Liansheng, et al. 2012. *State Ownership, Tax Status, and Size Effect of Effective Tax Rate in China*. Accounting and Business Research, Vol. 42, Issue 2, 2012.
- Zimmerman, Jerold L. 1983. *Taxes and Firm Size*. Journal of Accounting and Economics, Vol. 5.



Lampiran

Tabel 1 : Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan terdaftar selain sektor jasa dan keuangan akhir tahun 2008	265
2	Perusahaan delisting dalam rentang tahun 2009-2011	12
3	Bergerak dalam bidang jasa	2
4	Tidak publikasi laporan keuangan (Laporan Keuangan tidak lengkap)	5
5	Tahun buku tidak berakhir 31 Desember (Perubahan tahun buku dalam rentang 2009-2011)	3
6	Perusahaan rugi	75
	Total Sampel Perusahaan	168
	Data Pooled (3 x 168)	504

Tabel 2 Rata-rata Tarif Pajak Efektif per Sektor

No	Sektor	Rata- rata ETR (%)		
		Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Agriculture, Forestry and Fishing	27	23	22
2	Animal Feed & Husbandry	25	24	27
3	Mining and Mining Services	29	27	36
4	Constructions	45	33	41
	Manufacturing :			
5	Food and Beverages	22	20	24
6	Tobacco Manufactures	29	26	26
7	Textile Mill Products	7	5	7
8	Apparel and Other Textile Products	23	37	29
9	Paper and Allied Products	21	30	19
10	Chemical and Allied Products	27	23	27
11	Adhesive	33	26	28
12	Plastics and Glass Products	22	28	27
13	Cement	26	24	26
14	Metal and Allied Products	26	22	21
15	Fabricated Metal	28	32	28
16	Stone, Clay, Glass and Concrete Products	30	28	26
17	Cables	24	31	25
18	Electronic and Office Equipment	24	21	28
19	Automotive and Allied Products	27	27	25
20	Photographic Equipment	28	29	23
21	Pharmaceuticals	34	30	27
22	Consumer Goods	28	24	26
23	Wholesale and Retail Trade	28	27	24
24	Real Estate and Property	27	23	22
	Rata-rata seluruh sektor	27	26	25

Sumber : data olahan excel

Tabel 3 : Penyebaran ETR

ETR Range	2009	2010	2011
Low	13.69%	10.12%	4.76%
Normal	45.24%	44.05%	51.79%
High	41.07%	45.83%	43.45%

Sumber : data olahan excel

Tabel 4 : Statistik Deskriptif

	N	Terendah	Tertinggi	Rata-rata	Standar Deviasi	Frekuensi
ETR	504	0,00	0,8074	0,2623	0,1382	
MA	504	60,85	100	97,0085	7,9880	
IOS	504	0,4720	14,3332	1,6477	1,5826	
GOV	504	0	1			27
SIZE	504	11,9415	31,3772	24,5488	5,2581	
LEV	504	0,0594	0,9036	0,4436	0,1895	
ROA	504	0,0000002	0,6008	0,1126	0,0918	
CAPIN	504	0,0026	0,7565	0,2631	0,1838	
INVIN	504	0,00	0,7419	0,2124	0,1423	
MULTI	504	0	1			144

Sumber : data olah eviews

Tabel 5 : Hasil Analisis Regresi Variabel Kontrol

Dependent Variable: ETR?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)				
Date: 05/31/13 Time: 12:12				
Sample: 2009 2011				
Included observations: 3				
Cross-sections included: 168				
Total pool (balanced) observations: 504				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Cross sections without valid observations dropped				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.299187	0.014429	20.73491	0.0000
SIZE?	0.001159	0.000503	2.302309	0.0219
LEV?	-0.069070	0.020205	-3.418365	0.0007
ROA?	-0.251693	0.045827	-5.492215	0.0000
CAPIN?	-0.043828	0.020790	-2.108115	0.0358
INVIN?	-0.028083	0.027523	-1.020335	0.3083
MULTI?	0.044840	0.009477	4.731275	0.0000

Sumber : data olahan eviews

Tabel 6 : Hasil Analisis Regresi

Dependent Variable: ETR?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)				
Date: 03/11/13 Time: 09:40				
Sample: 2009 2011				
Included observations: 3				
Cross-sections included: 168				
Total pool (balanced) observations: 504				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Cross sections without valid observations dropped				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.785558	0.067021	11.72102	0.0000
MA?	-0.005438	0.000661	-8.231043	0.0000
IOS?	0.006532	0.003118	2.094678	0.0370
GOV?	0.117407	0.025257	4.648533	0.0000
SIZE?	0.001858	0.000600	3.097463	0.0021
LEV?	-0.058457	0.019598	-2.982795	0.0031
ROA?	-0.287350	0.058678	-4.897076	0.0000
CAPIN?	-0.083615	0.023814	-3.511253	0.0005
INVIN?	0.048912	0.030240	1.617449	0.1067
MULTI?	0.043732	0.010030	4.359936	0.0000

Sumber : data olah eviews

Tabel 7 : Weighted Statistics

R-squared	0.752872	Mean dependent var	0.462485
Adjusted R-squared	0.619862	S.D. dependent var	0.386180
S.E. of regression	0.104292	Sum squared resid	3.556704
F-statistic	5.660247	Durbin-Watson stat	2.990474
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data olah eviews

**Pengaruh Informasi Keuangan Organisasi, Pengungkapan Sukarela,
Ukuran Organisasi, Serta Kesadaran Sosial terhadap Kontribusi Donatur
pada Organisasi Non-Profit
(Studi pada Panti Asuhan di Kabupaten Banyumas)**

CAECILIA CINDY PUSPITA DIAH ROSINTA*

YUSRIATI NUR FARIDA

UMI PRATIWI

Universitas Jenderal Soedirman

Abstract: *By previous studies about donors contributions on not-for-profit (NFP) organizations, it is clearly showed that donors is the main resource of funding for NFP. Important for NFP to have better understanding toward the factors of why donors give the contribution. This research determine four factors which are considered as the important factors based on previous studies. The objectives of this study is to investigate whether the financial information, voluntary disclosure, organizational size, and social awareness influence donors contributions toward NFP organizations.*

The study used the amount of 103 donors as samples based on donation card of 8 orphanages in Banyumas Regency. The analysis for this research used Multiple Linear Regression Method. Through this study, it is found that financial information and social awareness significantly influence donors contribution toward NFP organizations, while voluntary disclosure and organizational size are not influence the contributions. Finally, through this research we hope it can help the organizations and donors to build stronger relationship that will impact to stronger sustainable organization's income.

Keywords : *Financial Information, Voluntary Disclosure, Organizational Size, Social Awareness, Donors, Contribution, Donation, Not-For-Profit Organizations.*

* Corresponding author: caeciliacindy@yahoo.com

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Riset

Organisasi non-profit termasuk ke dalam sektor publik yang dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2010:2). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa organisasi non-profit bergerak dalam bidang sosial. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, organisasi non-profit memerlukan dana yang umumnya diperoleh dari kegiatan usaha dana maupun donasi. Bagi sebagian besar organisasi non-profit di Indonesia, kontribusi/sumbangan merupakan sumber utama pendapatan (Yessie, 2011). Kontribusi/sumbangan diberikan oleh pihak yang disebut donatur.

Donatur dilandasi oleh suatu motivasi dalam memberikan kontribusinya. Secara umum, motivasi donatur dikelompokkan menjadi dua yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Menurut Sojka (1986) motivasi donatur dalam memberikan donasi antara lain adalah karena perilaku sosial/status sosial, kesadaran sosial, kepedulian akan kepentingan orang lain, ajaran keagamaan, hingga kepuasan pribadi. Faktor-faktor tersebut diketahui sebagai motivasi internal donatur. Selain Sojka (1986), penelitian Linda M.Parson (2007) menunjukkan kontribusi donatur terhadap organisasi non-profit dipengaruhi oleh informasi keuangan dan pengungkapan sukarela. Sedangkan Marudas dan Jacob (2007) menemukan bahwa ukuran organisasi dapat mempengaruhi pertimbangan donatur untuk berkontribusi. Informasi keuangan, pengungkapan sukarela, serta ukuran organisasi merupakan motivasi eksternal donatur.

Informasi keuangan merupakan informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-

pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan (Belkaoui, 2000). Informasi ini dapat diketahui melalui laporan keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Parson (2007) dan Zainon (2011), diperoleh hasil bahwa informasi keuangan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan donasi karena informasi keuangan ini menjadi jaminan bagi donatur atas penggunaan donasi yang telah diberikannya.

Selain informasi keuangan, pengungkapan sukarela menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kontribusi donatur. Pengungkapan sukarela yang diteliti merupakan pengungkapan atas hasil kinerja dan prestasi organisasi yang dibuat oleh manajemen. Penelitian Parson (2007) menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela atas kinerja pengelola dianggap penting oleh donatur dalam pengambilan keputusan donasi karena donatur mendapat jaminan atas usaha dan prestasi yang diraih organisasi melalui pemanfaatan donasi yang telah diberikan.

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kontribusi donatur adalah ukuran organisasi (Marudas dan Jacobs, 2007). Ukuran organisasi merupakan pembahasan mengenai besar kecilnya suatu organisasi serta apa dan bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan organisasi tersebut. Ukuran organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek seperti total aset, total pendapatan, maupun jumlah anggota organisasi. Hasil penelitian yang dilakukan Marudas dan Jacob (2007) menunjukkan hasil bahwa ukuran organisasi yang berdasarkan total aset berpengaruh terhadap kontribusi donatur. Total aset menjadi gambaran bagi donatur atas kondisi organisasi.

Faktor lain yang mempengaruhi keinginan berdonasi adalah adanya kesadaran sosial dari individu donatur/*self-awareness* (Sojka (1986), Tambunan (2009)). Kesadaran sosial dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang tindakannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesadaran sosial

melandasi kontribusi donatur terhadap organisasi karena menyadari perannya di dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, organisasi non-profit yang dipilih adalah panti asuhan swasta yang tersebar di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2010, terdapat 8 panti asuhan swasta di Kabupaten Banyumas. Panti asuhan menjadi ujung tombak bagi kelangsungan hidup anak-anak yang kurang mampu serta tidak memiliki orang tua sehingga keberadaannya menjadi pilar penting bagi suatu daerah karena telah membantu memberikan akses pendidikan serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Penelitian ini penting untuk dilakukan di Kabupaten Banyumas mengingat perkembangan Kabupaten Banyumas yang sangat pesat dalam bidang ekonomi sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakatnya. Sebab, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kebutuhan sektor publik (Mardiasmo, 2010:3).

B. Rumusan Masalah

Apakah informasi keuangan, pengungkapan sukarela, ukuran organisasi, serta kesadaran sosial secara parsial akan mempengaruhi kontribusi donatur (donasi) terhadap panti asuhan.

C. Tujuan Riset

Menguji secara empiris pengaruh informasi keuangan, pengungkapan sukarela, ukuran organisasi, serta kesadaran sosial secara parsial terhadap kontribusi donatur (donasi) pada panti asuhan.

II. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

A. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan salah satu pandangan baru tentang cara mengelola organisasi serta personel-personel yang terkait di dalamnya melalui

konsep kebersamaan (*collectivity*), kemitraan, pemberdayaan (*empowerment*), saling percaya, dan pelayanan antara *steward* dengan prinsipal (Pasoloran dan Rahman, 2001). Melalui definisi tersebut di atas, teori *stewardship* mengarah pada perilaku sesuai kepentingan bersama dan pelaksanaannya didasarkan pada asas kepercayaan yang dilandasi motivasi misalnya kesempatan untuk berkembang, berprestasi, berafiliasi, dan aktualisasi diri (Pasoloran dan Rahman, 2001).

B. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow

Teori hierarki kebutuhan diungkapkan oleh Abraham Maslow (1954) dalam Sule dan Saefullah (2005), di mana Maslow membagi kebutuhan individu ke dalam lima tingkatan kebutuhan. Kelima tingkatan kebutuhan itu adalah :

- a. Kebutuhan fisik/*physical needs*
- b. Kebutuhan keamanan/*safety and security needs*
- c. Kebutuhan sosial/*social needs*
- d. Kebutuhan penghargaan/*esteem needs*
- e. Kebutuhan aktualisasi diri/*self-actualization needs*.

C. Organisasi non-Profit (Panti Asuhan)

Organisasi non-profit yang dipilih oleh peneliti pada penelitian ini adalah panti asuhan swasta yang sebagian besar sumber dananya berasal dari kontribusi donatur. Definisi panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan

yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.

D. Informasi Keuangan

Informasi keuangan merupakan hasil pengolahan data-data yang berupa data penggunaan maupun pengelolaan uang dalam suatu lingkup bidang tertentu. Dalam hal ini adalah penggunaan dan pengelolaan uang organisasi diwujudkan dalam laporan keuangan. Informasi keuangan yang disediakan oleh organisasi non-profit, diatur dalam PSAK No.45 Revisi 2011 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis pada umumnya. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba (PSAK 45).

E. Pengungkapan Sukarela

Selain informasi keuangan, laporan pengungkapan kinerja dan pencapaian prestasi (*Service Effort and Accomplishment*) perlu diberikan kepada donatur. Laporan ini tentu berbeda dengan laporan keuangan yang memberikan informasi tentang penggunaan dana organisasi. Laporan kinerja dan pencapaian prestasi ini lebih menekankan pada bagaimana pengelola mengatur aktivitas dan sumber daya panti asuhan serta kegiatan atau prestasi apa saja yang telah dicapai oleh panti asuhan yang merupakan hasil kinerja pengelola. Financial Accounting Standards Board (FASB) mengatur pengungkapan kinerja dan pencapaian prestasi organisasi sebagai opsi (Parson, 2007). Artinya panti asuhan dapat memilih untuk mengungkapkannya

maupun tidak. Dari uraian di atas, maka pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan kinerja dan pencapaian prestasi melalui suatu laporan tersendiri yang secara sukarela dikeluarkan oleh panti asuhan dan tidak diwajibkan oleh peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan nilai organisasi di mata donatur.

F. Ukuran Organisasi

Ukuran organisasi merupakan pembahasan mengenai besar atau kecilnya organisasi. Banyak hal yang dapat mendefinisikan ukuran organisasi mulai dari ruang lingkup organisasi, jumlah anggota, hingga jumlah aset suatu organisasi. Total aset digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan organisasi (Marudas dan Jacob, 2007). Total aset adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang secara sederhana terdiri dari kas, persediaan, piutang, serta bangunan (Reeve, 2004). Total aset dapat diketahui melalui neraca yang secara periodik diukur oleh organisasi.

G. Kesadaran Sosial

Menurut Abreu (2010), kesadaran sosial merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja dan sukarela yang didasari oleh nilai-nilai di dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Kesadaran sosial dapat meliputi tindakan-tindakan berikut ini : bantuan, pemberian, kepekaan, simpati, kerjasama, maupun donasi (Penner et al., 2005 dalam Abreu, 2010). Pada dasarnya, kesadaran sosial merupakan peran individu dalam usaha untuk membantu orang lain untuk memberikan perubahan sosial yang bermanfaat (Sojka, 1986). Tumbuhnya kesadaran sosial karena sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain/makhluk lainnya. Ketika seseorang memiliki kesadaran sosial, dia akan berpikir bahwa kepentingannya akan sejalan dengan kepentingan sosial (Sojka, 1986).

H. Kontribusi Donatur

Kontribusi adalah transfer kas atau aktiva lain tanpa syarat kepada organisasi atau suatu penyelesaian/pembatalan hutang-hutangnya, tidak secara timbal balik oleh organisasi lain yang tidak bertindak sebagai pemilik (Yessie, 2011). Dari pengertian tersebut, kontribusi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. transfer dilakukan tanpa syarat
- b. transfer ke atau dari suatu entitas yang bertindak bukan sebagai pemilik
- c. transfer dilakukan sukarela
- d. transfer tidak timbal balik

I. Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis

a. Pengaruh Informasi Keuangan terhadap Kontribusi Donatur

Donatur menggunakan dana pribadinya dalam memberikan donasi maka donatur memiliki hak untuk mengetahui bagaimana donasi tersebut digunakan. Di sisi lain donatur sendiri pun ingin mengetahui bagaimana donasi tersebut dapat memberikan kemajuan bagi organisasi. Oleh karena itu, informasi keuangan yang tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, maupun Laporan Arus Kas menjadi sumber informasi yang relevan bagi donatur. Seperti hasil penelitian sebelumnya oleh Parsons (2007) dan Zainon (2011) yang memperoleh hasil bahwa informasi keuangan berpengaruh terhadap kontribusi donatur. oleh karena itu, semakin dalam informasi keuangan yang diberikan oleh organisasi kepada donatur, semakin tinggi/rendah pula keinginan donatur untuk berkontribusi kepada organisasi non-profit tersebut. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Informasi keuangan berpengaruh terhadap kontribusi donatur.

b. Pengaruh Pengungkapan Sukarela terhadap Kontribusi Donatur

Pengungkapan sukarela laporan prestasi dan jasa organisasi atau laporan kinerja manajemen penting untuk diketahui oleh donatur. Penelitian sebelumnya oleh Parsons (2007) menemukan bahwa informasi non-keuangan yang diungkapkan oleh organisasi dalam laporan prestasi dan jasa organisasi, dianggap penting oleh donatur dalam mengambil keputusan donasi. Donatur menilai kinerja pengelola melalui laporan tersebut sebagai bentuk jaminan atas dana yang telah didonasikan. Berdasarkan uraian di atas maka semakin luas informasi kinerja manajemen diberikan kepada donatur, semakin tinggi pula keinginan donatur untuk berkontribusi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kontribusi donatur.

c. Pengaruh Ukuran Organisasi terhadap Kontribusi Donatur

Dalam penelitian sebelumnya, ukuran organisasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kontribusi donatur (Marudas, Jacobs, 2007). Ukuran organisasi yang diteliti merupakan total aset organisasi. Total aset dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu organisasi. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa donatur cenderung mengukur kinerja organisasi melalui aset yang dimiliki karena dianggap mampu mencerminkan bagaimana organisasi mengelola dana yang akan diberikannya. Sehingga besar kecilnya aset yang dimiliki organisasi mempengaruhi tinggi rendahnya keinginan donatur untuk memberikan donasi. Dalam penelitian ini, ukuran organisasi diukur berdasarkan persepsi responden dengan memperkirakan total aset organisasi. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Ukuran organisasi berpengaruh terhadap kontribusi donatur.

d. Pengaruh Kesadaran Sosial terhadap Kontribusi Donatur

Kesadaran sosial merupakan perilaku sukarela dan disengaja yang didasari oleh nilai-nilai dalam masyarakat dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain (Abreu, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Sojka (1986) menemukan bahwa motivasi donatur dalam memberikan donasi terbagi ke dalam beberapa kategori yaitu perilaku sosial/status sosial, kesadaran sosial, kepedulian akan kepentingan orang lain, dan kepuasan pribadi. Sheldon (2005) menemukan bahwa kesadaran sosial mendasari seseorang untuk berpartisipasi dalam lingkungannya. Sedangkan Tambunan (2009) menunjukkan bahwa kesadaran sosial berpengaruh efektif terhadap donasi pada organisasi non-profit. Donatur dengan kesadaran sosial yang tinggi cenderung memiliki tindakan lebih banyak untuk mengekspresikan kesadaran sosial tersebut yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk donasi. Semakin besar kesadaran sosial seseorang maka semakin besar pula keinginan untuk memberikan donasi pada organisasi non-profit. Maka dari uraian tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₄: Kesadaran sosial berpengaruh terhadap kontribusi donatur.

III. Metode Riset

A. Seleksi dan Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey menggunakan instrumen kuesioner. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh donatur yang pernah mendonasikan dana pada panti asuhan di Kabupaten Banyumas tahun 2011-2012 berdasarkan buku tamu panti asuhan tercatat

sebanyak 103 donatur. Sampel diambil dengan metode *Total Sampling* (Sensus). Metode penentuan sampel ini merupakan metode penetapan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 103 sampel.

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada donatur panti asuhan di Kabupaten Banyumas secara langsung. Dilakukan secara langsung dengan tujuan supaya pemahaman responden terhadap isi kuesioner lebih baik, sehingga diharapkan data akan lebih valid.

B. Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

1). Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen/bebas (Supriyanto, 2009:88). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kontribusi donatur.

Kontribusi (donasi) adalah sebuah pemberian secara fisik oleh perorangan atau badan hukum (Yessie, 2011). Pengukuran kontribusi donatur menggunakan indikator-indikator yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya oleh Parson (2007). Pengukuran dilakukan melalui 4 item pernyataan dengan indikator sebagai berikut :

- a. Keputusan memberikan donasi,
- b. Penambahan jumlah donasi,
- c. Keinginan untuk memberikan donasi kembali pada periode selanjutnya.

2). Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel dependen/terikat (Supriyanto, 2009:88). Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah informasi keuangan, pengungkapan sukarela, ukuran organisasi, dan kesadaran sosial.

a. Informasi Keuangan (X_1)

Pengukuran informasi keuangan menggunakan indikator yang telah digunakan sebelumnya oleh Zainon et.al (2011) di mana indikator tersebut dianggap penting dan cukup penting oleh donatur. Pengukuran indikator dilakukan melalui 19 item pernyataan. Skala pengukuran menggunakan skala Likert 1-5. Indikator-indikator tersebut adalah:

- a. Laporan Posisi Keuangan,
- b. Laporan Aktivitas,
- c. Laporan Arus Kas.

b. Pengungkapan Sukarela (X_2)

Pengungkapan sukarela mengungkapkan bagaimana kinerja manajemen. Menurut Parson (2007) dalam penelitiannya, pengungkapan sukarela diukur dari efektifitas kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pengukuran ini dapat dilihat dari laporan kinerja yang diterima. Dalam penelitian ini digunakan indikator pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zainon et.al (2011) yang dia kategorikan sebagai informasi non-keuangan yang berkaitan dengan kinerja manajemen. Pengukuran dilakukan melalui 12 item pernyataan dengan menggunakan skala Likert 1-5. Indikator-indikator yang digunakan terdapat pada Laporan Kinerja Manajemen.

c. Ukuran Organisasi (X_3)

Menurut Marudas dan Jacobs (2007) ukuran organisasi dapat direpresentasikan oleh total aset, karena total aset dapat menjadi tolok ukur kesejahteraan organisasi. Total aset merupakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Berdasarkan penelitian Jacob dan Marudas (2007)

tersebut, peneliti menggunakan total aset sebagai ukuran organisasi yang diukur melalui 2 item pernyataan menggunakan skala Likert 1-5. Indikator yang digunakan adalah persepsi responden dengan memperkirakan total aset organisasi.

d. Kesadaran Sosial (X_4)

Kesadaran sosial mempengaruhi motivasi individu dalam berpartisipasi di lingkungannya (Sheldon, 2005). Kesadaran sosial merupakan perilaku sengaja dan sukarela yang dilakukan atas dasar nilai-nilai di dalam masyarakat untuk memberikan manfaat kepada orang lain (Abreu, 2010). Pengukuran dilakukan melalui 7 item pernyataan dengan indikator-indikator yang digunakan oleh Sheldon (2005) sebagai berikut :

- a. Pengalaman pribadi,
- b. Pengalaman orang lain,
- c. Pandangan diri sendiri,
- d. Pandangan orang lain/ajaran agama.

e. Skala Pengukuran

Indikator dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert (*Likert's Scale*). Skala Likert adalah skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial (Supriyanto, 2009:99). Menurut Sekaran (2006:31) skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan suatu pernyataan pada skala 5 titik dengan susunan sebagai berikut :

- a. Jawaban sangat tidak setuju diberikan skor 1
- b. Jawaban tidak setuju diberikan skor 2
- c. Jawaban cukup setuju diberikan skor 3

- d. Jawaban setuju diberikan skor 4
- e. Jawaban sangat setuju diberikan skor 5

C. Metode Analisis Data

1. Pengujian Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner dengan melihat korelasi skor masing-masing item pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya (Ghozali, 2009). Penelitian ini menggunakan statistik Product Moment untuk uji validitas. Kriteria pengujian validitas butir kuesioner adalah :

Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka kuesioner valid.

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka butir kuesioner tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu menguji konsistensi data yang dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian berperilaku memiliki keandalan sebagai alat ukur. Untuk menguji reliabilitas kuesioner digunakan *Cronbach Alpha*. Instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila nilai koefisien *Cronbach Alpha* yang diperoleh $>0,60$ (Ghozali, 2009).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov. Jika nilai *asymptotic sig (two tailed) > alpha* ($\alpha = 0.05$) maka nilai residual memenuhi asumsi klasik atau berdistribusi normal (Ghozali, 2009).

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Alat statistik dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 , maka tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah apabila tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam penelitian ini digunakan *Glesjer test*. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Jika Sig $\alpha < 0.05$, maka terdapat gejala heterokedastisitas, dan sebaliknya (Ghozali, 2009).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen (informasi keuangan, pengungkapan sukarela, ukuran organisasi, letak posisi organisasi) terhadap variabel dependen (kontribusi donatur) (Suliyanto, 2011). Model regresi dalam penelitian ini secara matematis adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = kontribusi donatur

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi informasi keuangan

X_1 = variabel informasi keuangan

X_2 = variabel pengungkapan sukarela

X_3 = variabel ukuran organisasi

X_4 = variabel letak posisi organisasi

e = nilai residual

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Kelayakan Model (*Goodness of fit test*)

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian ketepatan model (*Goodness of fit*) terlebih dahulu dengan menggunakan uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} dengan $df : (k-1), (n-k)$. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig \alpha < 0.05$ maka model persamaan regresi yang terbentuk masuk kriteria cocok atau fit (Suliyanto, 2011).

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terganggunya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terganggunya. Dalam penggunaan metode analisis regresi berganda, diperlukan penghitungan koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*Adjusted R²*). Koefisien determinasi yang telah disesuaikan berarti koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan unsur jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan sehingga dapat mengurangi unsur bias jika terjadi penambahan variabel (Suliyanto, 2011).

c. Pengujian Hipotesis 1-4

Untuk melakukan pengujian terhadap variabel informasi keuangan, pengungkapan sukarela, ukuran organisasi, serta kesadaran sosial secara parsial terhadap kontribusi donatur digunakan uji t. Pengujian secara parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependennya tanpa memperhitungkan pengaruh dari variabel independen lainnya. Langkah pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Perumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$; Informasi keuangan, pengungkapan sukarela, ukuran organisasi, serta kesadaran sosial secara parsial tidak berpengaruh terhadap kontribusi donatur.

$H_a : \beta_1 \neq 0$; Informasi keuangan, pengungkapan sukarela, ukuran organisasi, serta kesadaran sosial secara parsial berpengaruh terhadap kontribusi donatur.

2. Kriteria Pengujian

Level of significance (α) = 0.05 ; *degree of freedom* = (n-k).

H_0 diterima jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $Sig. > \alpha$

H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $Sig \leq \alpha$

IV. Analisis Data dan Pembahasan

A. Analisis Data Riset

1. Analisis Deskriptif Jawaban Responden

a. Variabel Informasi Keuangan

Variabel informasi keuangan diukur dengan menggunakan 19 item pertanyaan dengan skoring menggunakan skala *Likert* 1 sampai 5. Tabel distribusi jawaban responden dapat dilihat pada lampiran (Tabel 1).

Hasil dari tabel tanggapan responden menunjukkan bahwa persepsi rata-rata responden atas informasi keuangan berada pada tingkat “cukup setuju” yaitu sebanyak 33,24%. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan donasi terhadap organisasi yang memberikan informasi keuangan berupa aset, hutang, dana donasi, hingga efektivitas penggunaan dana kepada responden.

b. Variabel Pengungkapan Sukarela

Variabel pengungkapan sukarela diukur menggunakan 12 item pertanyaan dengan skoring menggunakan skala *Likert* 1 sampai 5. Tabel distribusi tanggapan responden dapat dilihat pada lampiran (Tabel 2).

Hasil dari tanggapan responden menunjukkan bahwa persepsi rata-rata responden atas pengungkapan sukarela berada pada tingkat “tidak setuju” yaitu sebanyak 35,08%. Hal ini mengindikasikan bahwa responden tidak memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan donasi terhadap organisasi yang memberikan pengungkapan sukarela berupa informasi kinerja dan prestasi organisasi kepada responden.

c. Variabel Ukuran Organisasi

Variabel ukuran organisasi diukur dengan menggunakan 2 item pertanyaan dengan skoring menggunakan skala *Likert* 1 sampai 5. Tabel distribusi tanggapan responden dapat dilihat pada lampiran (Tabel 3).

Hasil dari tanggapan responden menunjukkan bahwa persepsi rata-rata responden atas ukuran organisasi berada pada tingkat “tidak setuju” yaitu sebanyak 32,90%. Hal ini mengindikasikan bahwa responden tidak memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan donasi terhadap organisasi berapapun ukuran organisasi tersebut dinilai dari asetnya.

d. Variabel Kesadaran Sosial

Variabel kesadaran sosial diukur dengan menggunakan 7 item pernyataan dengan skoring menggunakan skala *Likert* 1 sampai 5. Tabel distribusi tanggapan responden dapat dilihat pada lampiran (Tabel 4).

Hasil dari tabel tanggapan responden di atas menunjukkan bahwa persepsi rata-rata responden atas kesadaran sosial berada pada tingkat “setuju” yaitu sebanyak 46,99% diikuti dengan respon “sangat setuju” pada persentase 24,81%. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan donasi terhadap organisasi atas dasar kesadaran sosial yang mereka miliki.

2. Analisis Data

Sebelum dilakukan pengujian asumsi klasik dan regresi, item pernyataan dalam kuesioner telah melalui tahap uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas (lihat lampiran) tersebut diketahui bahwa item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner seluruhnya valid dan reliabel (Tabel 5-10). Maka selanjutnya data dapat diolah dengan Uji Asumsi Klasik.

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan *software SPSS 18.0 for Windows* diperoleh *output* uji normalitas yang ringkasannya seperti tertera pada tabel 11.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai *sig. (2-tailed)* Kolmogorov-Smirnov setiap variabel lebih besar dari nilai α yaitu 0,05. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik analisis regresi.

2) Uji Multikolinearitas

Alat statistik yang dipergunakan untuk pengujian multikolinearitas pada penelitian ini adalah *variance inflation factor* (VIF). Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan *software SPSS 18.0 for Windows* diperoleh *output* uji multikolinearitas yang ringkasannya seperti tertera pada tabel 12 berikut ini.

Berdasarkan hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan bantuan *software SPSS 18.0 for Windows* diketahui nilai tolerance masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel bebas dalam model regresi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel independennya terhadap nilai absolut residunya.

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan bantuan *software SPSS 18.0 for Windows* diperoleh *output* uji heteroskedastisitas yang ringkasannya tertera dalam tabel 13.

Berdasarkan ringkasan hasil uji Glejser tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel yang diuji sebesar 0,987; 0,598; 0,055; dan 0,705 lebih besar dari nilai α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

1) Persamaan Regresi

Pengujian signifikansi pengaruh variabel informasi keuangan, pengungkapan sukarela, ukuran organisasi, dan kesadaran sosial terhadap variabel kontribusi donatur dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan bantuan *software SPSS 18.0 for Windows*, diperoleh hasil perhitungan seperti tertera pada Tabel 14.

Dari hasil pengujian regresi dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 8,044 - 0,063X_1 + 0,064X_2 - 0,349X_3 + 0,436X_4$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal, sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar 8,044 memiliki arti yaitu apabila informasi keuangan, pengungkapan sukarela, ukuran organisasi, dan kesadaran sosial tidak mengalami perubahan atau konstan atau bernilai nol, maka kontribusi donatur panti asuhan di Kabupaten Banyumas sebesar 8,044 satuan.

- b) Koefisien regresi X_1 sebesar -0,063 memiliki arti secara fungsional yaitu jika informasi keuangan meningkat sebesar satu satuan, maka akan dapat menurunkan kontribusi donatur sebesar 0,063 satuan dengan menganggap variabel lain tetap (*ceteris paribus*).
- c) Koefisien regresi X_2 sebesar 0,064 memiliki arti secara fungsional yaitu jika pengungkapan sukarela meningkat sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kontribusi donatur sebesar 0,064 satuan dengan menganggap variabel lain tetap (*ceteris paribus*).
- d) Koefisien regresi X_3 sebesar -0,349 memiliki arti secara fungsional yaitu jika ukuran organisasi meningkat sebesar satu satuan, maka akan menurunkan kontribusi donatur sebesar 0,349 satuan dengan menganggap variabel lain tetap (*ceteris paribus*).
- e) Koefisien regresi X_4 sebesar 0,436 memiliki arti secara fungsional yaitu jika kesadaran sosial meningkat sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kontribusi donatur sebesar 0,436 satuan dengan menganggap variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

2) Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit test*)

Berdasarkan tingkat kepercayaan (α) = 0,05 dan *degree of freedom* (df) = $(k - 1)$, $(n - k)$ diketahui nilai F_{tabel} sebesar 2,88. Ringkasan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 22 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 8,514. Tabel Uji F dari hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($8,514 > 2,88$). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa model regresi yang terbentuk telah sesuai atau cocok dengan data (*goodness of fit*).

3) Uji *Adjusted R Square*

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan bantuan *software SPSS 18.0 for Windows* pada Tabel 14, diperoleh nilai koefisien *Adjusted R Square* sebesar 0,448. Nilai *Adjusted R Square* tersebut menunjukkan bahwa 44,8% variabel kontribusi donatur dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel yang digunakan dalam model yaitu informasi keuangan, pengungkapan sukarela, ukuran organisasi, dan kesadaran sosial, sedangkan 55,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

4) Pengujian Hipotesis Penelitian

a) Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 14, diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel informasi keuangan sebesar -2,072 lebih kecil daripada nilai $-t_{tabel}$ dan t_{tabel} sebesar 1,6909 dan nilai sig. t adalah 0,046 lebih kecil daripada nilai $\alpha = 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa variabel informasi keuangan berpengaruh terhadap kontribusi donatur pada panti asuhan di Kabupaten Banyumas, **diterima**.

b) Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 14, diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel pengungkapan sukarela sebesar 1,304 lebih kecil daripada nilai t_{tabel} dan lebih besar daripada $-t_{tabel}$ yaitu sebesar 1,6909 serta nilai sig. t adalah 0,201 lebih besar daripada nilai $\alpha = 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan bahwa variabel pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kontribusi donatur pada panti asuhan di Kabupaten Banyumas, **ditolak**.

c) Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 14, diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel ukuran organisasi sebesar -1,784 lebih kecil daripada nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1,6909. Namun nilai sig. t adalah 0,084 lebih besar daripada nilai $\alpha = 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa variabel ukuran organisasi berpengaruh terhadap kontribusi donatur pada panti asuhan di Kabupaten Banyumas, **ditolak**.

d) Hipotesis 4

Berdasarkan tabel 14, diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel kesadaran sosial sebesar 4,182 lebih besar daripada t_{tabel} yaitu sebesar 1,6909 dan nilai sig. t adalah 0,000 lebih kecil daripada nilai $\alpha = 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 yang menyatakan bahwa variabel kesadaran sosial berpengaruh terhadap kontribusi donatur pada panti asuhan di Kabupaten Banyumas, **diterima**.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa informasi keuangan memiliki pengaruh terhadap kontribusi donatur pada panti asuhan di Kabupaten Banyumas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya informasi keuangan serta luasnya informasi keuangan yang diterima oleh donatur akan mendorong kontribusi donatur terhadap panti asuhan. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa koefisien informasi keuangan memiliki arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas informasi yang diterima oleh donatur, maka keinginan donatur untuk berdonasi akan semakin menurun.

Informasi keuangan terkandung dalam laporan keuangan yang dapat dilaporkan oleh organisasi non-profit secara periodik. Informasi keuangan yang

diteliti dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga bagian berdasarkan letaknya pada laporan keuangan yaitu informasi keuangan yang terdapat pada Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Aktivitas (PSAK No.45, 2011). Informasi keuangan dapat mencerminkan bagaimana pengelola mempergunakan dana donasi yang telah diterimanya.

Dalam teori *stewardship* dinyatakan bahwa dalam organisasi non-profit terdapat hubungan kemitraan, pemberdayaan, pelayanan, serta saling percaya antara *steward* dengan prinsipal (Pasoloran dan Rahman, 2001). Hubungan ini berlaku dalam segala hal yang menyangkut dengan organisasi termasuk informasi keuangan organisasi. Di Kabupaten Banyumas, donatur tidak mengharapkan adanya informasi keuangan yang terlalu luas yang diberikan oleh panti asuhan. Donatur menyadari pemberian informasi keuangan secara umum sudah cukup mewakili bagaimana pengelola mengelola donasi mereka, karena pada dasarnya hubungan donatur dan panti asuhan telah dilandasi rasa saling percaya dan pelayanan sehingga sepenuhnya menyerahkan pengelolaan dana terhadap pengelola. Informasi keuangan secara umum yang cukup diberikan kepada donatur merupakan informasi yang tercantum pada Laporan Arus Kas, yaitu berupa informasi pemasukan dan pengeluaran dana.

Penginformasian keuangan yang terlalu luas, misalnya mencantumkan informasi aset dan hutang, dapat mengindikasikan bahwa donasi yang diberikan oleh donatur telah dikelola dengan baik dan kondisi keuangan panti asuhan semakin membaik sehingga pengelola berani untuk mengungkapkan kondisi keuangan organisasinya secara luas. Atas keadaan demikian, donatur memiliki kecenderungan untuk mengurangi donasi terhadap panti asuhan yang bersangkutan dan atau mengalihkan donasinya kepada panti asuhan lain yang tidak memberikan informasi keuangan secara luas kepada mereka. Hal ini dilandasi oleh kecenderungan bahwa

organisasi yang belum secara luas mengungkapkan kondisi keuangannya dianggap masih membutuhkan donasi untuk mendorong pertumbuhan organisasi. Sehingga keluasan informasi keuangan menjadi indikator bagi donatur dalam menilai kondisi keuangan panti asuhan yang pada akhirnya akan mempengaruhi mereka dalam berdonasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Parsons (2007) yang menyatakan bahwa informasi keuangan berpengaruh terhadap kontribusi donatur pada organisasi non-profit di Amerika. Hasil ini juga sama dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Zainon (2011) bahwa donatur mengharapkan adanya informasi keuangan yang dikeluarkan oleh organisasi.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap kontribusi donatur pada panti asuhan di Kabupaten Banyumas. Artinya, ada atau tidaknya informasi kinerja dan prestasi serta kegiatan yang disampaikan oleh pengelola tidak akan mempengaruhi kontribusi donatur pada panti asuhan tersebut. Pengungkapan sukarela berupa laporan kinerja, laporan prestasi organisasi, serta laporan aktivitas yang dilakukan oleh pengelola panti asuhan yang dapat dilaporkan ataupun tidak dilaporkan kepada donatur selaku prinsipal.

Teori motivasi Maslow menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan sosial dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan sosial mendasari seseorang untuk terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan kepada lingkungan di sekitarnya dan teori aktualisasi diri mendasari seseorang untuk menjalankan fungsi sebaik-baiknya sebagai anggota masyarakat dengan memberikan kontribusi terbaiknya (Sule dan Saefullah, 2005). Atas dasar motivasi ini, donatur tidak mengharapkan adanya laporan kinerja ataupun laporan aktivitas yang dilakukan oleh

panti asuhan. Donatur menyadari fungsi dirinya di dalam masyarakat, serta fungsi panti asuhan bagi masyarakat sehingga dengan sukarela memberikan donasinya tanpa mengharapkan informasi kinerja apapun dari pengelola.

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang juga dilakukan oleh Parsons (2007) yang menyatakan bahwa meskipun pengungkapan sukarela dianggap sebagai informasi yang penting untuk diketahui donatur, namun tidak berpengaruh terhadap kontribusi donatur. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Zainon (2011) yang menyatakan bahwa pengungkapan sukarela mempengaruhi donasi pada organisasi non-profit.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran organisasi yang didasarkan pada total aset tidak berpengaruh terhadap kontribusi donatur. Total aset meliputi seluruh kekayaan yang dimiliki oleh organisasi. Donatur memiliki persepsinya masing-masing terkait dengan aset yang dikategorikan sebagai aset besar dan aset kecil sehingga penelitian ini tidak mendefinisikan secara kuantitatif mengenai aset besar dan kecil.

Di Kabupaten Banyumas, donatur tidak menggunakan ukuran organisasi sebagai pertimbangan dalam memberikan donasi. Ukuran organisasi dianggap tidak mencerminkan bagaimana donasi dipergunakan. Hal ini dilandasi oleh paradigma dan kultur masyarakat Indonesia yang menyebutkan bahwa memberi tanpa membedakan siapa yang diberi. Sehingga besar atau kecilnya aset yang dimiliki organisasi bukan faktor yang dipertimbangkan oleh donatur.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa total aset tidak berpengaruh terhadap kontribusi berarti berapapun jumlah aset yang dimiliki oleh organisasi tidak mendasari donatur dalam berkontribusi. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marudas dan Jacob (2007) yang menyatakan bahwa total aset

berpengaruh terhadap kontribusi donatur. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang masyarakat terhadap donasi dan organisasi antara masyarakat Banyumas dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian Marudas dan Jacob.

Hal lain yang dibuktikan oleh penelitian ini adalah bahwa kesadaran sosial berpengaruh terhadap kontribusi donatur. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau rendah kesadaran sosial donatur, maka akan semakin tinggi atau rendah pula kontribusinya. Kesadaran sosial dalam penelitian ini berupa rasa empati, simpati, serta pengaruh dari ajaran agama dan perilaku sesama. Kesadaran sosial mempengaruhi motivasi individu dalam berpartisipasi di lingkungannya (Sheldon, 2005).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori motivasi Maslow. Donatur memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Kebutuhan sosial (*social needs*) memotivasi individu untuk terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan kepada lingkungan di sekitarnya. Salah satunya dengan berusaha memberikan manfaat sebaik-baiknya di dalam masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian donasi kepada panti asuhan.

Donatur di Kabupaten Banyumas memiliki tingkat kesadaran sosial yang cukup tinggi dilihat dari hasil kuesioner yang diberikan. Kesadaran yang tinggi ini mendorong donatur untuk memberikan kontribusi yang semakin tinggi pula, konsisten dengan hasil regresi yang menunjukkan arah pengaruh variabel kesadaran sosial adalah positif. Kesadaran sosial yang tinggi ini dilandasi oleh kehidupan religius masyarakat Banyumas yang tinggi pula. Ajaran agama bagi masyarakat Banyumas sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari sehingga pemberian donasi pun dipengaruhi oleh adanya ajaran agama tersebut.

Selain ajaran agama, adanya norma sosial dan kondisi sosial masyarakat yang beragam serta kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat memicu empati dan simpati donatur. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sojka (1986) dan Tambunan (2009) yang menyatakan bahwa kesadaran sosial berpengaruh efektif terhadap donasi pada organisasi non-profit.

V. Simpulan, Keterbatasan, dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa informasi keuangan dan kesadaran sosial mempengaruhi kontribusi donatur pada organisasi non-profit di Kabupaten Banyumas sedangkan pengungkapan sukarela dan ukuran organisasi tidak berpengaruh terhadap kontribusi donatur. Pengaruh informasi keuangan dapat dilihat dari keluasan informasi yang diberikan kepada donatur. Semakin luas atau sempit informasi yang diberikan akan semakin mengurangi atau menambah kontribusi donatur. Di sisi lain, kesadaran sosial yang semakin tinggi atau rendah akan meningkatkan atau menurunkan kontribusi donatur.

Keterbatasan penelitian ini adalah belum adanya pengkategorian antara donatur individu dan donatur institusional. Adanya pengkategorian dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait topik yang diteliti karena adanya perbedaan karakteristik dari donatur-donatur tersebut. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel baru dan memperluas lingkup penelitian sehingga lebih dapat digeneralisasikan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi panti asuhan dan organisasi non-profit lainnya dalam meningkatkan pendapatan organisasi. Laporan Arus Kas dianggap sudah cukup mewakili kebutuhan donatur akan informasi keuangan sehingga Laporan Arus Kas yang baik dapat meningkatkan

kontribusi donatur. Di sisi lain akan dapat meningkatkan nilai organisasi di mata donatur. Selain itu, panti asuhan dan organisasi non-profit lainnya dapat meningkatkan kesadaran sosial donatur melalui brosur atau pamflet yang menggambarkan kondisi panti asuhan sesungguhnya dan peran penting donatur bagi panti asuhan.

DAFTAR REFERENSI

- Abreu, Maria Magdalena. 2010. *An Analysis of Donor Motivations*. Makalah disampaikan dalam Global Management Conference. Bali, April-May 2010.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi*. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 2012. *Database Panti Asuhan di Indonesia*. 2012. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2009. *Ekonometrika : Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marudas, Nicholas P, Fred A. Jacobs. *Impact of Organizational Size Measures on Relationship Between Organizational Inefficiency and Donations*. Journal of Management and Marketing Research.
- Parsons, Linda M. *The Impact of Financial Information and Voluntary Disclosures on Contributions to Not-For-Profit Organizations*. Behavioral Research in Accounting. Volume 19, 2007. pp. 179-196.
- Pasoloran, Oktavianus, Firdaus Abdul Rahman. *Teori Stewardship : Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol.3 No.2, Agustus 2001.419-432
- PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Revisi 2011)*. Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Jakarta.
- Reeve, Warren. 2004. *Accounting*. Edisi 21. South-Western.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Bussiness 1*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2006. *Research Methods for Bussiness 2*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Sheldon, Kennon M. *The Social Awareness Inventory : Development and Applications*. UMC Phychol Sci. Juni 2005. P.01
- Sojka, Jane R. Ziegler. *Understanding Donor Behavior : A Classification Paradigm*. Advances in Consumer Research. Volume 13, 1986. pp. 240-245.
- Sule, Ernie Tisnawati, Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Prenada Media Group. Jakarta
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Supriyanto. 2009. *Metodologi Riset Bisnis*. PT Indeks. Jakarta.



- Tambunan, Anastasia Octavia. 2009. *Analisis Pengaruh Marketing Appeals, Accountability, dan Self Awareness terhadap Keinginan Berdonasi (Studi Pemasaran terhadap Organisasi Charity)*. Tesis Magister Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia Jakarta. (Dipublikasikan)
- Yessie, Afly. 2011. *Akuntansi Untuk Organisasi Kesehatan (Rumah Sakit)*. Universitas Mercu Buana.
- Zainon, Saunah, et.al. *Instituional Donor's Expectation of Information from The Non-Profit Organizations (NPOs) Reporting : A Pilot Survey*. International NGO Journal. Volume 6(8), 2011. pp. 170-180.

Lampiran

Tabel 1. Tanggapan responden atas variabel informasi keuangan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	5	71	9,83%
Setuju	4	172	23,82%
Cukup Setuju	3	240	33,24%
Tidak Setuju	2	150	20,78%
Sangat Tidak Setuju	1	89	12,33%
Total		722	100%

Tabel 2. Tanggapan responden atas variabel pengungkapan sukarela

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	5	29	6,36%
Setuju	4	81	17,76%
Cukup Setuju	3	100	21,93%
Tidak Setuju	2	160	35,08%
Sangat Tidak Setuju	1	86	18,86%
Total		456	100%

Tabel 3. Tanggapan responden atas variabel ukuran organisasi

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	5	7	9,21%
Setuju	4	19	25%
Cukup Setuju	3	22	28,95%
Tidak Setuju	2	25	32,90%
Sangat Tidak Setuju	1	3	3,95%
Total		76	100%

Tabel 4. Tanggapan responden atas variabel kesadaran sosial

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	5	66	24,81%
Setuju	4	125	46,99%
Cukup Setuju	3	45	16,92%
Tidak Setuju	2	24	9,02%
Sangat Tidak Setuju	1	6	2,26%
Total	40	266	100%

Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas Kuesioner Variabel Informasi Keuangan (X₁)

Item	r _{hitung}	r _{tabel} (Tingkat Kepercayaan 95 %)	Keterangan
01	0,375	0,320	Valid
02	0,366	0,320	Valid
03	0,729	0,320	Valid
04	0,690	0,320	Valid
05	0,796	0,320	Valid
06	0,709	0,320	Valid
07	0,856	0,320	Valid
08	0,826	0,320	Valid
09	0,783	0,320	Valid
10	0,784	0,320	Valid
11	0,768	0,320	Valid
12	0,746	0,320	Valid
13	0,631	0,320	Valid
14	0,729	0,320	Valid
15	0,742	0,320	Valid
16	0,830	0,320	Valid
17	0,830	0,320	Valid
18	0,884	0,320	Valid
19	0,901	0,320	Valid

Tabel 6. Hasil Pengujian Validitas Kuesioner Variabel Pengungkapan Sukarela (X₂)

Item	r _{hitung}	r _{tabel} (Tingkat Kepercayaan 95 %)	Keterangan
01	0,646	0,320	Valid
02	0,755	0,320	Valid
03	0,535	0,320	Valid
04	0,920	0,320	Valid
05	0,915	0,320	Valid
06	0,918	0,320	Valid
07	0,930	0,320	Valid
08	0,908	0,320	Valid
09	0,754	0,320	Valid
10	0,671	0,320	Valid
11	0,740	0,320	Valid
12	0,769	0,320	Valid

Tabel 7. Hasil Pengujian Validitas Kuesioner Variabel Ukuran Organisasi (X_3)

Item	r_{hitung}	r_{tabel} (Tingkat Kepercayaan 95%)	Keterangan
01	0,807	0,320	Valid
02	0,778	0,320	Valid

Tabel 8. Hasil Pengujian Validitas Hasil Kuesioner Variabel Kesadaran Sosial (X_4)

Item	r_{hitung}	r_{tabel} (Tingkat Kepercayaan 95 %)	Keterangan
01	0,570	0,320	Valid
02	0,716	0,320	Valid
03	0,388	0,320	Valid
04	0,443	0,320	Valid
05	0,526	0,320	Valid
06	0,593	0,320	Valid
07	0,571	0,320	Valid

Tabel 9. Hasil Pengujian Validitas Hasil Kuesioner Variabel Kontribusi Donatur (Y)

Item	r_{hitung}	r_{tabel} (Tingkat Kepercayaan 95 %)	Keterangan
01	0,829	0,320	Valid
02	0,635	0,320	Valid
03	0,861	0,320	Valid
04	0,913	0,320	Valid

Tabel 10. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	r_{tabel}	Keterangan
Informasi Keuangan (X_1)	0,953	0,60	Reliabel
Pengungkapan Sukarela (X_2)	0,944	0,60	Reliabel
Ukuran Organisasi (X_2)	0,904	0,60	Reliabel
Kesadaran Sosial (X_4)	0,624	0,60	Reliabel
Kontribusi Donatur (Y)	0,827	0,60	Reliabel

Tabel 11. Hasil Pengujian Normalitas

No	Keterangan	Signifikansi
1	Informasi Keuangan	0,057
2	Pengungkapan Sukarela	0,180
3	Ukuran Organisasi	0,086
4	Kesadaran Sosial	0,074
5	Kontribusi Donatur	0,194

Tabel 12. Hasil Pengujian Multikolinearitas

No	Keterangan	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Informasi Keuangan	0,359	2,785	Tidak ada multikolinearitas
2	Pengungkapan Sukarela	0,210	4,751	Tidak ada multikolinearitas
3	Ukuran Organisasi	0,314	3,188	Tidak ada multikolinearitas
4	Kesadaran Sosial	0,782	1,279	Tidak ada multikolinearitas

Tabel 13. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

No	Keterangan	Nilai signifikansi	Nilai α	Keterangan
1	Informasi Keuangan	0,987	0,05	Tidak ada heterokedastisitas
2	Pengungkapan Sukarela	0,598	0,05	Tidak ada heterokedastisitas
3	Ukuran Organisasi	0,055	0,05	Tidak ada heterokedastisitas
4	Kesadaran Sosial	0,705	0,05	Tidak ada heterokedastisitas

Tabel 14. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisiensi	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.t
Konstanta	8,044	2,670		0,012
Informasi Keuangan	-0,063	-2,072	1,6909	0,046
Pengungkapan Sukarela	0,064	1,304	1,6909	0,201
Ukuran Organisasi	-0,349	-1,784	1,6909	0,084
Kesadaran Sosial	0,436	4,182	1,6909	0,012

$$R^2 = 0,508$$

$$adjusted R^2 = 0,448$$

$$F_{tabel} = 2,88$$

$$F_{hitung} = 8,514$$

$$F_{sig} = 0,000$$

Akuntansi Forensik : Perlukah Ada dalam Kurikulum Jurusan Akuntansi di Universitas Tadulako? (Sebuah Pendekatan Analisis Wacana)

**JIANTARI
SUGIANTO***
Universitas Tadulako

Abstract: *A qualitative research that aims to determine whether or not a forensic accounting course in the accounting curriculum especially in the Faculty of Accounting Departement of Economis, University Tadulako. The research method used is a qualitative method of discourse analysis approach. Collection and analysis of data is done through a process of observation, study documentation, as well as interviews with a purposive and snowball select information that is considered important and relevant related problems in this study. The results showed that all three groups of informations, between academics, students, and practitioners provide a different perception. They further emphasize that forensic accounting does not have to be a special course, but enough to be introduced implicitly into the accounting and auditing courses. The conclusion from this study is that education is the key to a student to be a problem solver in the community and the Departement of Accounting Faculty of Economics, University of Tadulako which is a branch of education as a land of integrity that supports the effectiveness of forensic accounting curriculum itself. Students can study forensic accounting through teaching and learning process in college at least they had the perception and forensic accounting provisions regarding the future, it can help them be able to do such a small thing to understand the self and to prevent others from committing acts of fraud and corruption*

Kata Kunci : *Curriculum, Forensic Accounting, Fraud, Perception.*

* Corresponding author: sugiantosyam@yahoo.co.id

1. PENDAHULUAN

Maraknya kasus kejahatan di lingkungan sektor publik (pemerintahan) membuat aksi pemberantasan terhadap kejahatan *kleptokrat* ini mulai banyak dilakukan. Salah satu cara yang digunakan untuk memberantas kejahatan ini adalah pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan yang menangani tindak korupsi dan audit. Sayangnya, lembaga-lembaga dan audit yang digunakan selama ini tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera pada para pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena lemahnya hukum di Indonesia, sistem pengendalian intern yang kurang efektif, dan kurangnya peran akuntan publik dalam menyikapi kecurangan (Kurniawati, 2011).

Baik penanganan kasus korupsi maupun upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini di Indonesia belum menunjukkan hasil yang optimal dengan persepsi bahwa korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi. Dalam hal ini korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dibutuhkan suatu upaya pemberantasan baik dari perspektif tindakan dan pencegahan maupun perspektif bidang keilmuan seperti Akuntansi Forensik.

Akuntansi forensik merupakan sebuah gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum yang bertujuan untuk membuktikan adanya tindakan *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh pihak independen (Tiaz, 2009). Namun masalahnya adalah bahwa bidang ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari pihak perguruan tinggi. Tidak seperti audit laporan keuangan, akuntansi forensik jarang ditemukan dalam kurikulum perkuliahan. Hanya sedikit perguruan tinggi yang menyediakan mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan akuntansi forensik. Topik tentang *fraud* kebanyakan disampaikan pada mata kuliah audit internal.

Dibeberapa institusi pendidikan di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akuntansi telah memasukkan akuntansi forensik dalam kurikulum pendidikan mereka.

Institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan akuntansi menjadi media untuk penyampaian informasi dan pembelajaran mengenai hal yang terkait dengan akuntansi forensik dan profesi akuntan forensik bagi mahasiswa. Jika mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai akuntansi forensik selama di bangku kuliah maka seharusnya mahasiswa akan memiliki persepsi bahwa akuntansi forensik bersifat unik dan membutuhkan keahlian yang unik juga serta pilihan akan profesi akuntan forensik terbuka luas (Akbar, 2012).

Disisi lain, Mahasiswa akuntansi dituntut untuk kritis terhadap kehidupan bernegara khususnya kasus-kasus *fraud* yang semakin berkembang. Untuk menyelesaikan kasus *fraud*, diperlukan sebuah alat untuk menemukan bukti-bukti andal, salah satunya adalah akuntansi forensik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah perlu atau tidaknya mata kuliah akuntansi forensik masuk ke dalam kurikulum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako?

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Forensik Sebagai Disiplin Ilmu Akuntansi Pada Masalah Hukum

Menurut *D. Larry Crumbley*, editor in chief dari *Journal of Forensic Accounting* dalam Tuanakotta (2010 : 5) menulis :

“Secara sederhana dapat dikatakan, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Artinya akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif”.

Definisi *Crumbley* tersebut memberikan pemahaman bahwa akuntansi forensik dari suatu proses hukum yang penyelesaiannya dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan.

Keunikan dari akuntansi forensik ini sendiri adalah metode ini memiliki kerangka berpikir yang berbeda dari audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan lebih berprosedur dan kurang efektif dalam mendeteksi kecurangan sedangkan akuntansi forensik lebih efektif digunakan dalam mendeteksi kecurangan karena dari prosesnya metode ini terkadang lebih mengandalkan intuisi dan deduktif.

Dalam Tuanakotta (2010 : 4) akuntansi forensik didefinisikan sebagai penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Akuntansi forensik merupakan disiplin ilmu yang baru, namun disiplin dan profesi forensik yang kita ketahui masih terbatas dalam bidang kedokteran. Adapun disiplin ilmu lain yang juga memberikan perhatian lebih pada bidang forensik dengan tujuan penegakan hukum. Pernyataan David Owen, *Hidden Evidence* dalam Tuanakotta (2010 : 6) bahwa disiplin ilmu tersebut antara lain *Forensic Anthropologis, Forensic Chemis, Forensic Dentist, Forensic Document Investigator, Forensic Entomologist, Forensic Geologist, Forensic Pathologis, Forensic Photofrapher, Forensic Psychiatrist/Psychologist dan Forensic Serologist*. Perhatian disiplin ilmu tersebut dapat menyelesaikan banyak permasalahan yang terkait dengan hukum.

Dengan demikian, akuntan forensik bisa didefinisikan sebagai tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Karena sifat dasar dari akuntansi forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari akuntansi forensik adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (*litigation support*) di pengadilan.

2.2. Kompetensi Akuntan Forensik Sebagai Expert Witness Di Pengadilan

Akuntan Forensik digunakan di sektor publik maupun privat, akan tetapi penggunaan akuntan forensik di sektor publik lebih menonjol dibandingkan di sektor privat. Hal tersebut

disebabkan karena penyelesaian sengketa di sektor privat cenderung diselesaikan di luar pengadilan. Akuntan Forensik memiliki ciri-ciri yang sama dengan akuntan dan auditor, yaitu harus tunduk pada kode etik profesinya. Sikap independen, objektif, dan skeptis juga harus dimiliki oleh akuntan forensik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja seorang auditor forensik dalam mengungkapkan kecurangan yang ada diperlukan kompetensi-kompetensi khusus. Kompetensi yang dimiliki seorang auditor forensik ini penting untuk meningkatkan keyakinan masyarakat akan sebuah laporan keuangan yang handal dan relevan, terutama dari pihak-pihak yang berkepentingan (*shareholder*). Pihak-pihak yang berkepentingan yang dimaksud disini meliputi Pemerintah, Manajemen Perusahaan, dan Investor (Pemasok).

Menurut Lembaga Akuntan Forensik Indonesia (LAFI) yang dikutip oleh Tuanakotta dalam Akbar (2012), akuntan forensik harus memiliki suatu perasaan mendalam tentang etika dan perilaku etik profesional, dan mampu membuat laporan yang kuat dan menyakinkan baik dalam bentuk tulisan maupun verbal sebagai saksi ahli di persidangan pengadilan atau proses persidangan hukum lainnya. Setiap saat, seorang akuntan forensik harus mampu membawa suatu pola pikir profesional yang skeptis yang tetap dipertahankan, dan karena itu dapat menyakinkan bahwa informasi yang dia kerjakan akan selalu akurat dan obyektif.

Seorang praktisi Edward J. McMillan dalam Tuanakotta (2010 : 90) mengenai pemberian jasa forensik berupa penampilan ahli (*expert witness*) di pengadilan negara-negara Anglo Saxon begitu lazim, sehingga ia menulis :

”Secara teknis, ”akuntansi forensik” berarti menyiapkan seorang akuntan menjadi saksi ahli dalam litigasi, sebagai bagian dari tim penuntut umum atau pembela dalam perkara yang berkenaan dengan fraud. Namun, dalam perkembangan selanjutnya istilah ”akuntansi forensik” bermakna sama dengan prosedur akuntansi investigatif”

Dengan kata lain masalah yang timbul dalam penggunaan akuntan forensik sebagai ahli di persidangan, khususnya dalam tindak pidana korupsi, adalah kompetensi dan independensi. Masalah kompetensi dan independensi sering dipertanyakan tim pembela atau pengacara terhadap akuntan forensik yang membantu tim pembela (pengacara).

Dan perlu kita ketahui bahwa hingga saat ini belum ada sertifikat legal untuk audit forensik dalam lingkungan publik sehingga terlihat bahwa ilmu audit forensik dalam penerapannya di Indonesia hanya digunakan untuk deteksi dan investigasi *fraud*, deteksi kerugian keuangan, serta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Sementara itu, penggunaan ilmu audit forensik dalam mendeteksi risiko *fraud* dan uji tuntas dalam perusahaan swasta belum dipraktikkan di Indonesia (<http://panjikeris.wordpress.com>, 2012).

2.3. *Pemeriksa Fraud Bersertifikat "Certified Fraud Examiners" (CFE)*

Certified Fraud Examiners yang disingkat CFE merupakan sertifikat yang diberikan oleh sebuah lembaga yang bernama *Association of Certified Fraud Examiners* atau disingkat ACFE. ACFE merupakan organisasi anti-*fraud* dan sebagai penyedia utama pendidikan dan pelatihan anti-*fraud* terbesar di dunia (<http://acfe.com>, 2013). Di Indonesia, cabang ACFE disebut ACFE Indonesia *Chapter* yang dibentuk pada tahun 2002 dan berkantor di Jakarta.

Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE mendefinisikan CFE sebagai seorang pemimpin dalam komunitas anti-*fraud* yang dikenal sebagai spesialis dalam mencegah dan memberantas *fraud*. Sertifikasi CFE hanya dilakukan oleh ACFE *Head Quarter*, bukan *chapter* yang ada di Indonesia, negara lain, ataupun organisasi lain selain ACFE. Untuk memegang CFE, peserta harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persyaratan akademis, persyaratan karakter, dan persyaratan profesional. Sertifikasi CFE tidak hanya bisa diikuti oleh sarjana akuntansi tetapi juga bisa diikuti oleh sarjana ilmu lain yang tertarik pada dunia anti-*fraud*.

Dalam situs ACFE, *The Board of Regents* menetapkan bidang-bidang yang berhubungan dengan *fraud* yaitu (1) akuntansi dan auditing, (2) kriminologi dan sosiologi, (3) investigasi *fraud*, (4) *loss prevention*, dan (5) hukum. Materi yang diujikan dalam sertifikasi pun berkisar antara lima bidang tersebut. Calon peserta sertifikasi CFE harus menjadi anggota ACFE dan melalui beberapa proses sebelum mengikuti sertifikasi, tahap pertama yaitu pendaftaran, tahap kedua yaitu bimbingan pengerjaan soal setelah mendapat bahan dan materi ujian, tahap ketiga yaitu pelaksanaan ujian, kemudian diakhiri dengan tahap keempat yaitu pengiriman pengumuman kelulusan (Tias, 2012)

2.4. Pandangan Masalah "Kecurangan" Dalam Dunia Akuntansi dan Hukum

Menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Purwadarminta, kecurangan berarti : tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil dan keculasan (Karni, 2000 : 49). Didalam buku *Black's Law Dictionary* susunan Garner yang dikutip oleh Tunggal (2001 : 2) di jelaskan satu definisi hukum dari kecurangan, yaitu :

"Berbagai macam alat yang dengan lihai dipakai dan dipergunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan terhadap orang lain, dengan cara bujukan palsu atau dengan menutupi kebenaran, dan meliputi semua cara-cara mendadak, tipu daya (*trick*), kelicikan (*cunning*), mengelabui (*dissembling*), dan setiap cara tidak jujur, sehingga pihak orang lain bisa ditipu, dicurangi atau ditipu (*cheated*)"

Sedangkan menurut Silverstone dan Sheetz (2004) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai sebuah aktivitas yang mengambil lokasi dibidang sosial dan memiliki konsekuensi yang besar untuk perekonomian, perusahaan, dan individu-individu. Perbedaan kecurangan (*fraud*) dan kekeliruan (*error*) adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadi salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.

Oleh karena itu apabila terjadi peristiwa dimana terdapat kesalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan kesalahan penerapan prinsip akuntansi yang disengaja maka peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sebuah tindakan kecurangan. Kecurangan dapat terjadi apabila terdapat motif, kesempatan, dan pembenaran. Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi berasal dari ketiga elemen ini.

Dalam lingkungan bisnis, fraud mempunyai arti yang lebih khusus yakni adanya ketidakjujuran atau salah saji yang disengaja mengenai aset-aset perusahaan atau manipulasi data keuangan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Istilah fraud sering dikenal dengan istilah *white collar crime defalcation, embezzlement, dan irregularities* (Hall dalam Rustiana, 2008). Bagi auditor, fraud dibedakan menjadi dua yakni *employee fraud* dan *management fraud* karena memiliki implikasi yang berbeda.

2.5. Peranan dan Potensi Mahasiswa Akuntansi Dalam Strategi Penyelesaian Fraud dan Korupsi di Indonesia

Mahasiswa merupakan *agent* perubahan dalam masyarakat, mahasiswa merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus memberikan contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Tias (2012) dijelaskan bahwa mahasiswa memiliki tiga fungsi yaitu : (1) *Agent of Change* untuk membawa perubahan yang lebih positif kepada masyarakat sekitar, (2) *Social Control* untuk mengawasi tingkah laku masyarakat sekitar agar tidak menyimpang, dan (3) *Iron Stock* untuk meregerasi pemimpin negara.

Mahasiswa sangat berperan dalam pembangunan dan perubahan negara menuju lebih baik. Semangat dan idealisme yang tinggi dalam mencapai cita-cita dan mencapai keadilan. Mahasiswa merupakan elemen masyarakat yang unik, mahasiswa sudah menjadi fitrahnya adalah pemuda yang gelisah ketika melihat sesuatu yang salah dihadapannya yang dengan nilai tersebut mampu mengubah tatanan bangsa dan masyarakat. Dalam tinta sejarah bangsa ini mahasiswa terbukti berperan besar dalam pendobrakan masa atau orde yang berkuasa.

Pemerintah terus mengupayakan Indonesia untuk lepas dari permasalahan *fraud*. Lembaga-lembaga keuangan maupun non keuangan didirikan untuk mengawasi keuangan negara dan lembaga-lembaga milik negara untuk meminimalisasi terjadinya *fraud*. Belajar dari pengalaman Hongkong yang pernah mengalami banyak kasus korupsi, namun dengan ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) Hongkong bisa bangkit kembali. ICAC merupakan organisasi yang berdedikasi dalam bidang pemberantasan korupsi sama halnya dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia.

Sebagaimana Hongkong dengan ICAC-nya, Indonesia pun bisa mengadopsi strategi ICAC untuk digunakan di KPK dalam upaya memerangi korupsi dengan cara mengembangkan pendekatan tiga pilar yaitu preventif, investigatif, dan educatif (<http://www.bpkp.go.id>, 2011). Mahasiswa akuntansi sebagai bagian dari masyarakat yang dirugikan juga harus ikut membantu dalam proses penegakan hukum, pencegahan, dan pendidikan *fraud* di Indonesia. Proses penegakan hukum *fraud* di Indonesia tentu memerlukan sebuah bukti handal yang diperoleh dari akuntansi forensik. Mahasiswa perlu menafsirkan dan memahami akuntansi forensik melalui beberapa media seperti buku, penelitian orang lain, media massa, dan lain-lain.

2.6. Akuntansi Forensik : “Gerbang Baru” Dalam Kurikulum Jurusan Akuntansi

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer oleh Peter dan Yenny (1991 : 802), kurikulum diartikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah bidang khusus. Dalam konteks pendidikan Islam (Tarbiyah Al Islamiyah) dalam bahasa Arab “*Manhaj*” dan “*Nahyun*” mengartikan kurikulum sebagai jalan untuk sesuatu cara yang dilakukan seseorang, agar segera dapat mencapai tujuan tertentu (<http://www.majalahpendidikan.com>, 2011). berarti jalan yang dilalui oleh pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai.

Kurikulum perguruan tinggi mengacu pada keputusan Mendiknas nomor 232/U/2000 pasal 11 ayat 1 dan nomor 045/U/2002 pasal 6 ayat 2 yang mengamatkan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi berbasis kompetensi untuk setiap program studi oleh kalangan perguruan tinggi yang bersangkutan (bukan oleh pemerintah). Berdasarkan Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 1 ayat 7-11 dan pasal 8 ayat 1 kurikulum inti program sarjana terdiri atas : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keahlian dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).

Setelah mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi 2011 beberapa mata kuliah berubah dan ditiadakan karena penyusunan kurikulum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako didasarkan pada hasil evaluasi diri yang dilakukan secara internal, hasil analisis terhadap berbagai perubahan lingkungan eksternal dan acuan kurikulum pendidikan ekonomi secara nasional dan muatan lokal sesuai kompetensi. Terkait dengan visi dan misinya, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako menjadikan program studi yang unggul, sesuai kebutuhan pengguna, menjadi pusat pengembangan ilmu akuntansi, dan mempersiapkan lulusan profesional, berkarakter, dan berkompetensi dalam disiplin ilmu akuntansi diharapkan selaras dengan proses pembelajaran dengan perspektif pemecahan masalah di masyarakat sehingga mahasiswa akuntansi dituntut untuk menghadapi tantangan kemajuan perkembangan global dengan pencapaian kualifikasi dan penguasaan kompetensi yang dimiliki.

Perlu kita ketahui bahwa akuntansi forensik adalah terapan ilmu baru profesi akuntan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa untuk memecahkan persoalan akuntansi dibidang *fraud*. Namun dalam perkembangannya, akuntansi forensik saat ini kurang diminati dan masih jauh dari harapan secara ilmu ekonomi “belum ada pasarnya” sehingga mahasiswa akuntansi belum tentu mengerti sepenuhnya tentang akuntansi forensik. Dalam penelitian ini,

peneliti memfokuskan perancangan kurikulum akuntansi forensik untuk strata satu (S1) karena peneliti melihat tuntutan dunia kerja secara global.

Mengutip Penasehat Bidang Keuangan Negara Tim Blue Print Komisi Yudisial RI, Leonardus Nugroho seusai Seminar *Forensic Accounting* di Universitas Widyatama Bandung (12/4) dalam situs Pikiran Rakyat (2010) mengungkapkan :

“Akuntansi forensik perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan akuntansi di tingkat perguruan tinggi. Dengan begitu kalangan akademisi bisa lebih tanggap terhadap kasus-kasus kecurangan laporan keuangan yang kerap terjadi sebagai indikasi korupsi di negara ini”.

Melihat hal diatas bahwa mahasiswa akuntansi merupakan tiga pilar dalam masyarakat sehingga kurikulum pendidikan tinggi saat ini seharusnya relevan dengan kehidupan nyata yang penuh dengan masalah, kendala, dan tantangan. Pendidikan harus membekali mahasiswa untuk mampu mengatasi semua itu dalam artian setelah lulus nanti mahasiswa tidak hanya membawa pulang nilai dan ijazah tapi bagaimana mahasiswa menjadi *problem solver* dimasyarakat.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Paradigma Penelitian

Bogdan dan Taylor (1992 : 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan (Hadjar dalam Basrowi dan Sukidin, 2002 : 2).

Peneliti memandang bahwa akuntansi forensik yang menjadi suatu bidang pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako adalah sesuatu yang unik untuk digali dan dikaji oleh peneliti. Seperti yang dikatakan dalam Basrowi dan Sukidin (2002 : 2) bahwa setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks. Disini peneliti ingin mencoba mengetahui kerelevanan dari akuntansi forensik ini sebagai kurikulum baru khususnya di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako secara mendalam dan bermakna.

3.2. Analisis Wacana Sebagai Metode Penelitian

Istilah ‘wacana’ menurut Marahimin yang dikutip oleh Arifin *et al* dalam Basrowi dan Sukidin (2002 : 229) merupakan kemampuan untuk maju menurut urutan yang teratur dan semestinya serta merupakan komunikasi buah pikiran, baik lisan maupun tulisan yang resmi dan teratur. Fokus dari analisis wacana adalah setiap bentuk tertulis atau bahasa lisan, seperti percakapan atau artikel koran. Topik utama yang menjadi pokok dalam analisis wacana adalah struktur sosial yang mendasarinya, yang dapat diasumsikan atau dimainkan dalam percakapan atau teks.

Menurut Arifin *et al* (2000), analisis wacana dibutuhkan karena masalah kebahasaan tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan linguistik, tetapi memerlukan pertimbangan-pertimbangan non-linguistik, misalnya konteks percakapan, tindak tutur, prinsip interpretasi lokal, prinsip analogi, dan sebagainya. Kedua, karena kebutuhan akan

hadirnya kajian. Dengan demikian, peneliti tidak membatasinya pada kajian atas teks namun secara lisan peneliti mencoba mencari tahu apa, mengapa, dan bagaimana orang berpikir pentingnya kurikulum pendidikan akuntansi forensik di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik gabungan antara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Peneliti menggunakan teknik tersebut karena penelitian ini hanya akan memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena penelitian sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang dapat mendukung jalannya penelitian ini.

3.4. Teknik Analisis Data

Dikatakan dalam Sugiyono (2009 : 87) teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif belum ada polanya yang jelas. Meskipun tidak ada langkah dan aturan baku untuk mengerjakan proses analisis kualitatif, namun reduksi data dan interpretasi data adalah hal yang lazim dilakukan (Meity, 2012). Kegiatan analisis data dalam penelitian ini, akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder yang berupa hasil wawancara, pengamatan, serta catatan lapangan hasil data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data itu, kemudian penulis susun hingga membentuk laporan yang sistematis dan dijabarkan dalam bentuk deskripsi kemudian dianalisis kembali. Selanjutnya, ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar dan tepat.

4. POTRET JURUSAN AKUNTANSI SEBAGAI SITUS PENELITIAN

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi bernaung pada nama universitas terbesar yang ada di Sulawesi Tengah yaitu “Tadulako” yang berarti pemimpin yang memiliki sifat keutamaan. Untuk mendapatkan statusnya yang berawal dari swasta sampai perguruan tinggi negeri tidaklah mudah harus melalui beberapa tahapan berawal dari dari status swasta dan cabang dari Universitas Hasanuddin serta IKIP Ujung Pandang pada tahun 1963-1981 dan kemudian menjadi status perguruan tinggi negeri yang berdiri sendiri. Tahun 1981 sesuai dengan keputusan presiden RI nomor 36 tanggal 14 agustus 1981 dengan nama Universitas Tadulako memiliki 5 (lima) fakultas termasuk diantaranya adalah Fakultas Ekonomi.

Program studi Jurusan Akuntansi khususnya Strata-1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako terbentuk berdasarkan keputusan direktur jenderal pendidikan tinggi no. 197/DIKTI/KEP/2000 tanggal 22 Juni 2000. Hal tersebut menjadi tolok dasar didirikannya Jurusan Akuntansi dan menjadi yang “terfavorit” di Fakultas Ekonomi sampai saat ini. Selain itu untuk menjadi media penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas peserta didik dalam mengemban tiga tugas pokok perguruan tinggi melalui proses pembelajaran sehingga dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan profesional terhadap pengelolaan organisasi maupun lembaga pemerintah serta dunia usaha.

Dengan menunjukkan komitmennya yaitu mengembangkan institusi dan kualitas lulusannya dan meningkatkan kompetensi profesionalisme staf akademik serta melakukan perbaikan berkelanjutan atas dasar pembangunan budaya organisasi, dengan demikian dapat menjadi patokan guna mengelola institusi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan pembangunan khususnya di tengah masyarakat Sulawesi Tengah.

5. TEMUAN PENELITIAN

5.1. Mengenal dan Memahami Lebih Dekat “Akuntansi Forensik”

Crumbley (Tuanakotta, 2010 : 5) menyimpulkan bahwa akuntansi forensik tidak identik harus berurusan dengan akuntansi yang sesuai dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) namun beliau mempertegas ukurannya bukan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*), melainkan apa yang menurut justifikasi atau ketentuan perundang-undangan adalah akurat. Hal senada juga didukung dalam sebuah website berbahasa inggris “*How Forensic Accounting Works*” (Shanna Freeman) yang dilansir oleh *howstuffworks.com* (2013) bahwa *Forensic just means relating to the application of scientific knowledge to a legal problem or usable in a court of law*. Bisa dikatakan bahwa akuntansi forensik adalah sebuah “pisau” di pengadilan untuk mengungkapkan *background criminal scene* secara mendalam dengan keahlian khusus.

Peneliti mencoba mewawancarai seorang mahasiswi akuntansi (informan HA) mengenai pemahamannya akan akuntansi forensik :

HA : “Kalau menurut saya *sih* akuntansi forensik *itu* merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan-kejahatan dibidang akuntansi melalui penugasan khusus secara menyeluruh dan mendalam, jadi pendek kata *dia* lebih ke bagaimana akuntansi digunakan untuk menyelidiki suatu kasus tentang transaksi akuntansi dan yang pernah saya dengar bahwa *dia* juga dipadu dengan teknik audit investigasi”

Akuntansi forensik hanyalah sebuah bidang khusus dalam arena yang lebih luas dari akuntansi seperti biasanya. Tunakotta (2010 : 2) juga menjelaskan bahwa akuntansi forensik merupakan suatu super spesialisasi bagi seorang akuntan. Auditor adalah akuntan yang berspesialisasi dalam audit atas laporan keuangan sesuai GAAP sementara akuntan forensik

adalah auditor yang lebih khusus lagi spesialisasinya, yakni pada *fraud* yang lebih luas baik *fraud* secara akuntansi (ACFE) maupun *fraud* secara hukum (undang-undang). Hal senada juga diungkapkan oleh seorang akademisi akuntansi (informan MA) seperti berikut ini :

MA : “Akuntansi forensik berkenaan dengan sebuah ilmu akuntansi, dalam *artian* bahwa ilmu akuntansinya luas, mencakup bidang keuangan, sektor publik, dan terutamanya hukum. Tidak cukup memahami proses transaksi keuangan saja tapi lebih banyak memahami mengenai pengungkapan bukti di pengadilan nantinya. Dan yang lebih penting sebenarnya kita beranjak dari sebuah pengalaman dan pemahaman seorang auditor”.

dari ungkapan diatas jelaslah dapat disimpulkan jika seorang akuntan forensik ini adalah seorang yang bermultitalenta. Kemampuan dan keahliannya mencakup seluruh *science*, melalui *e-mailnya* seorang praktisi di Kupang yang saya wawancarai secara tidak langsung menyatakan bahwa seorang akuntan forensik memang adalah seorang akuntan namun perlu dibekali dengan teknik audit, ilmu hukum, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan pemanfaatan keuangan negara maupun keuangan daerah seperti ilmu teknik sipil, komputer dan mesin.

Tak dapat dipungkiri jika akuntan forensik ini bekerja sesuai insting mereka, orang yang cukup berani, dan memiliki tingkat kecerdasan diatas rata-rata, sehingga muncul sebuah kata bijak “untuk menangkal suatu kejahatan, kita setidaknya harus sepintar penjahat yang dihadapi (*think of thief*)”. Hemat kata, mereka dapat dikatakan seorang detektif (*spionase*) atau seorang *whistleblowing* dalam bidang akuntansi selain hukum yang dapat mendeteksi dan mengungkapkan adanya tindak kecurangan atau tidak.

5.2. Akuntansi Forensik : Perlu Atau Tidak Perlu Di Jurusan Akuntansi Universitas Tadulako “Sebuah Kontradiksi”

Tidak seperti audit keuangan dan audit operasional yang sudah lama diterima secara umum. Akuntansi forensik adalah disiplin yang relatif baru dan muncul pada abad ke-20. Sama halnya dalam kurikulum perkuliahan, saat ini jarang ditemukan akuntansi forensik sebagai mata kuliah hanya audit laporan keuangan yang menjadi mata ajar inti disetiap perguruan tinggi namun topik tentang kecurangan kebanyakan dapat kita temukan pada mata ajar audit internal.

Peneliti menemukan di beberapa perguruan tinggi khususnya di Indonesia telah memasukkan akuntansi forensik ke dalam kurikulum jurusan akuntansi mereka, selain itu banyaknya penelitian-penelitian mengenai hal ini yang telah dilakukan menganggap bahwa begitu pentingnya akuntansi forensik masuk ke dalam kurikulum jurusan akuntansi. Pengakuan seorang praktisi (informan PL) yang sempat peneliti wawancarai juga mengatakan:

PL : “Hal yang menarik! Menurut saya akuntansi forensik sangat penting dan perlu menjadi sebuah mata kuliah dalam kurikulum jurusan akuntansi, selain itu adalah sebuah tuntutan akademis, juga banyak memberikan manfaat menjadi sebuah ilmu yang harus diketahui, mahasiswa menjadi sadar secara karakter bahwa *fraud* adalah sesuatu yang dapat merusak dirinya sendiri dan juga negaranya”.

Namun hal ini menjadi kontradiksi bagi praktisi lainnya (informan WR) yang sempat juga berdiskusi dengan peneliti dan berkata :

WR : “Sebenarnya akuntansi forensik itu tidak perlu menjadi sebuah mata kuliah sebab menurut saya akuntansi forensik itu termasuk kategori keahlian yang

harus bersertifikat, namun dasar-dasarnya mungkin bisa diterapkan pada kurikulum”.

Melihat ungkapan praktisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal ini bukannya tidak perlu akuntansi forensik menjadi sebuah mata kuliah praktisi lebih menekankan pada dasar-dasar akuntansi forensik yang perlu untuk diketahui dan bisa diterapkan pada kurikulum. Praktisi berpikir tidak perlu lebih mendalam sebab terkait keahlian dan kemampuan bidang ini cukup signifikan, seorang akuntan forensik harus bersertifikat selain itu ada prosedur dan standar khusus yang menaunginya.

Di satu sisi, akademisi dan mahasiswa di Jurusan Akuntansi Universitas Tadulako khususnya program studi strata-1 (S1) melihat akuntansi forensik sebagai ilmu akuntansi baru yang memang perlu secara substansi menjadi sebuah mata kuliah. Hal ini berkenaan dengan apa yang diungkapkan oleh salah seorang akademisi akuntansi (informan SL) sebagai berikut:

SL : “Menurut saya, akuntansi forensik itu perlu. Karena kita melihat dari segi tuntutan akademis sebab ini jurusan akuntansi. selain itu era globalisasi yang menuntut adanya akuntabilitas dan keterbukaan pihak pemerintah maupun korporat dalam rangka mewujudkan praktik yang *good governance* jadi secara jangka panjang nantinya akuntansi forensik ini akan dibutuhkan”.

Ungkapan diatas menggambarkan bahwa akuntansi forensik sangat diperlukan dengan melihat tuntutan akademis jurusan akuntansi dan tuntutan di era globalisasi saat ini. Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan perkembangan peran akuntan forensik dimasa depan akan lebih pesat karena kebutuhan untuk kontrol internal yang kuat dalam memenuhi tuntutan

pemerintah atas pelaporan keuangan yang akurat sehingga nantinya karir sebagai akuntan forensik sangat dibutuhkan dan memiliki peranan penting.

Di pihak mahasiswa tak lain ada juga yang menilai akuntansi forensik sedikit lebih sulit menjadi sebuah mata kuliah dibanding dengan subyek-subyek akuntansi pada umumnya. Di satu sisi mereka menganggap akuntansi forensik berfokus pada sebuah keprofesian dan harus mendalam. Mereka juga berpikir bahwa tuntutan “kualitas” di bidang ini adalah kunci utama membentuk keahlian seorang akuntan forensik. Seorang mahasiswa akuntansi (informan PR) yang peneliti wawancarai melalui sebuah jejaring sosial (*facebook*) berkata :

PR : “Menurut saya belum perlu akuntansi forensik masuk dijurusannya *kita*, karena akuntansi forensik itu menitikberatkan pada profesi, kita sebagai mahasiswa S1 masih *bingung-bingung* dengan namanya audit, *masa* harus dipersulit lagi dengan adanya akuntansi forensik, kalau memang mahasiswa tertarik dengan akuntansi forensik *kan* bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang fokus pada akuntansi forensik”

persepsi tersebut senada dengan yang dilontarkan oleh seorang alumni mahasiswa akuntansi Universitas Tadulako (informan ES) yang juga sementara ini mengambil magister (S2) akuntansi forensiknya di sebuah perguruan tinggi negeri di Semarang, peneliti berdiskusi secara mendalam melalui akun *facebook*-nya :

ES : “Untuk level S1 saya rasa tidak perlu menjadi sebuah mata kuliah yang perlu dimasukkan, tapi dikenalkan *saja*, karena kualitas S1 itu beda *sama* S2 atau profesi, ketika mahasiswa sudah merasa cukup di S1 *nanti* mereka tidak mau belajar, hanya sebatas S1 *saja* padahal di PPA *sama* S2 itu banyak ilmu baru yang perlu diketahui jadi S2 tetap bisa menjaga gengsinya *sama* S1”.

Penjelasannya pun juga berlanjut melalui *Blackberry Messenger* dan mengkritisi :

ES : “Kalau saya pribadi akuntansi forensik dan audit investigatif itu, hanya sekedar pengenalan di S1 tidak perlu menjadi kurikulum, cukup wacana kecil. Soalnya itu sulit.. karena pemahaman tentang audit saja belum tentu cukup, terus nanti sudah dipaksakan belajar forensik.. cukup berat, dan forensik adalah pengembangan general audit digabungkan dengan aspek hukum.. apa mampu efektif kalau di S1 semua diajarkan? Menurut saya tidak efektif, praktik audit saja belum tentu dikuasai semua teman-teman S1.. kesiapan di Untad juga belum bisa, memang mereka *tau* akuntansi forensik, tapi apa bisa mendalam?”.

Melalui beberapa konstruk persepsi diatas, secara tidak langsung tutur dan sikap mereka menggambarkan penekanan akuntansi forensik sebagai keahlian profesi yang harus ditempuh pada jalur magister dan bukan sebagai mata kuliah pada strata satu. ‘Gengsi’-nya bahwa kualitas bidang ilmu S2 berbeda dengan S1, “apakah harus S1 sederajat dengan S2, lebih etis jika S2 lebih tinggi dari S1”. Alasannya begitu banyak ilmu baru yang belum diketahui dan perlu lebih mendalam di S2 dengan kata lain mereka lebih menyarankan saat ini S1 belum bisa mengkonfirmasi bidang ini sebagai mata kuliah hanya sebatas pada pengenalan saja dan tidak perlu untuk dipermantap, pikirnya sukar bagi mereka dan juga pengetahuan mengenai audit yang masih kurang jelas membuat mereka semakin sulit untuk beradaptasi dengan ilmu baru ini.

Sementara itu, penekanan atas kualitas akademis khususnya Jurusan Akuntansi Universitas Tadulako juga mendapatkan perhatian yang serius dikalangan mahasiswa (informan FB) :

FB : “Karena sekiranya perkembangan teknologi/transaksi memerlukan yang namanya “akuntansi forensik” tapi untuk sekarang masih perlu dipertimbangkan lagi setidaknya sampai jurusan akuntansi punya akreditasi “A”.

hal ini mengharapkan Jurusan Akuntansi Universitas Tadulako menjadi *land of integrity* yang mendukung efektivitas mata kuliah akuntansi forensik, berintelektual, bersifat kritis, dan berintegritas dalam menghadapi tuntutan kemajuan perkembangan global.

5.3. Akuntansi Forensik : Karir Sebuah Jalan Menantang

Mahasiswa hari ini tidak seperti yang kita katakan sekarang “menunggu dan kemudian diberi” mereka akan selalu mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang dapat memotivasi mereka untuk mencapai yang lebih besar, unik, menarik, dan berbeda. Mahasiswa sekarang ini lebih tertarik pada program baru yang dibentuk oleh sistem pendidikan yang dapat memberikan mereka kesempatan untuk menggali potensi mereka dan mempelajari sesuatu yang baru setiap saat. Berbagai karir yang perlu diketahui dan diperkenalkan lebih memungkinkan mahasiswa untuk lebih kreatif dan inovatif.

Secara psikologis, daya keingintahuan dan ketertarikan mahasiswa akan sesuatu lebih besar dapat dikatakan rasa penasarannya begitu tinggi untuk mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana sebuah subyek itu, bukan hanya atas dasar teori maupun konsep yang terukir di dalam sebuah buku-buku tua. Seperti halnya pada akuntansi forensik, bidang ini dapat memberikan ruang kepada mahasiswa akuntansi untuk masuk mendalami sebuah masalah, memecahkan segala sesuatu menurut cara mereka, mereka dapat memilih profesi *high-profile* seperti akuntan forensik.

Seorang akuntan forensik layaknya seperti seorang detektif swasta dan konsultan, namun perbedaannya area fokus akuntan forensik hanya pada masalah keuangan tujuannya secara teknis mengalahkan kejahatan kerah putih dan mengetahui solusi yang berhubungan dengan kasus pidana oleh karena itu akuntan forensik menjadi pekerjaan yang menarik. Secara mendalam, akuntansi forensik perlu untuk meneliti dan menyelidiki seluruh situasi melampaui statistik umum, menuntut pendekatan holistik dan perlu menganalisis situasi seperti detektif.

Kita berpikir memang seorang akuntan forensik itu sebagian besar memiliki gelar sarjana akuntansi dan memiliki kualifikasi akademik tambahan di bidang penegakan hukum dan peradilan pidana. Kita tidak dapat membayangkan pekerjaan ini begitu sangat menantang dibanding dengan profesi lainnya. Namun kita bisa melihat hanya karena pekerjaan ini sangat berpengaruh, apapun pekerjaannya menjadi seorang akuntan yang berspesialisasi forensik adalah sebuah pilihan hidup. Kita juga perlu mengingat bahwa pemerintah mempekerjakan akuntan forensik untuk mengungkapkan sejauh mana penipuan dan penyimpangan akuntansi lainnya yang dilakukan oleh “si kerah putih” yang dapat berdampak sistemik bagi negaranya.

5.4. Masa Depan Akuntansi Forensik

Di Indonesia, Ibarat akuntansi forensik saat ini bagaikan bayi yang baru lahir, tingginya tingkat kompleksitas dan integrasi di era global ekonomi bisnis dan munculnya kecenderungan penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun sengketa bisnis di pengadilan sehingga permintaan wawasan khusus investigasi akuntansi forensik akan meningkat dan makin dibutuhkan oleh semua pihak.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, untuk saat ini lembaga penegak hukum belum banyak menggunakan jasa akuntan forensik dan lebih mengandalkan kemampuan internal atau sesama lembaga pemerintahan seperti kerjasama kepolisian dengan PPATK (Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Hal ini disebabkan oleh kurangnya penyedia jasa akuntan forensik di Indonesia. Dengan sedikitnya penyedia jasa akuntan forensik menyebabkan pula harga yang dipatok para akuntan spesial ini sangat tinggi (<http://accountingarea.blogspot.com>, 2012).

Dalam perkembangan global sekarang ini bidang penyelidikan akuntansi forensik di seluruh dunia memiliki tantangan yang lebih canggih untuk menangani dan menyelesaikan dengan peralatan yang canggih pula. Seorang akuntan forensik dikenal dengan kecerdasan intelektual dan tanggung jawabnya terhadap profesi yang dijalannya. Sebuah perjalanan karir yang tak berhenti hanya sesaat dan sampai disitu saja, akuntan forensik jeli untuk melihat situasi yang dianggap kritis terutama dalam hal mencari pengalaman yang akan membuat mereka menjadi praktisi yang memiliki kemampuan profesional tidak hanya fokus pada karir tetapi juga dengan pengetahuan bahwa mereka memberi kontribusi yang lebih bagi integritas dan kekuatan pasar di mana semua negara bergantung.

6. AKHIR DARI PENELITIAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa peluang akuntansi forensik menjadi sebuah mata kuliah belum mendapatkan tempat yang serius di mata akademisi maupun mahasiswa. Hal ini juga menjadi sebuah kontradiksi sebagian berpersepsi perlu untuk menjadi mata kuliah, di lain pihak ada yang berpendapat belum bisa, penting untuk diketahui namun hanya sebatas pada pengenalan saja. Mereka lebih menyarankan akuntansi forensik diselipkan pada mata kuliah akuntansi atau auditing tidak harus menjadi sebuah mata kuliah khusus.

Namun diatas dari semuanya, pendidikan merupakan kunci utama seorang pelajar menjadi *problem solver* di tengah masyarakat dan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Tadulako yang merupakan cabang dari pendidikan tersebut sebagai *land of integrity* yang mendukung efektivitas kurikulum akuntansi forensik itu sendiri. Mahasiswa akuntansi dapat mempelajari akuntansi forensik melalui proses belajar mengajar di bangku kuliah setidaknya mereka punya persepsi dan bekal mengenai akuntansi forensik kedepannya, itu dapat membantu mereka mampu melakukan hal yang kecil seperti memahami sampai pada mencegah dirinya sendiri dan orang lain agar tidak melakukan tindak kecurangan maupun korupsi.

6.2 Saran

Mata kuliah akuntansi forensik masih sedikit dijumpai di beberapa perguruan tinggi di Indonesia khususnya di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, akuntansi forensik belum begitu populer di mata akademisi dan mahasiswa. Tidak seperti pada mata kuliah audit umum yang harus ditempuh oleh mahasiswa akuntansi sehingga beberapa mahasiswa akuntansi belum memahami akuntansi forensik dengan baik seperti audit umum.

Disisi lain tuntutan substansi Jurusan Akuntansi mengharuskan mahasiswa untuk memahami akuntansi forensik ini meskipun hanya pada tahap pemahaman sebagai langkah awal dalam memberantas *fraud*. Peneliti berharap agar mata kuliah akuntansi forensik dapat menjadi mata kuliah wajib atau pilihan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako sehingga sejak dini mahasiswa akuntansi dapat memahami proses pencarian bukti handal dalam menyelesaikan kasus *fraud*. Disini Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako sebagai *land of integrity* dan cabang dari pendidikan itu harus lebih memperhatikan ketersediaan kurikulum akuntansi forensik melihat pentingnya akuntansi forensik dalam menyelesaikan kasus *fraud* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 2012. *Persepsi Mahasiswa dan Praktisi Akuntansi Terhadap Profesi Akuntan Forensik (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Hassanuddin, Auditor BPK, dan Auditor BPKP)*. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1957> (di download tanggal 19 November 2012).
- Arifin et al. 2000. *Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Depdiknas, Dikti, Direktorat P4M. Jakarta
- Baswori dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Cetakan Pertama. Insan Cendekia. Surabaya
- Bogdan dan Taylor. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif : Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Di terjemahkan oleh Arief Furchan. Usaha Nasional. Surabaya.
- <http://m.pikiran-rakyat.com/node/111021> (diakses tanggal 20 Februari 2013 jam 16.17 WITA)
- <http://panjikeris.wordpress.com/2012/04/24/audit-forensik/> (diakses tanggal 01 Mei 2013 jam 19.00 WITA)
- <http://accountingarea.blogspot.com> (diakses tanggal 02 Juni 2013 jam 17.00 WITA)
- Karni, Soejono. 2000. *Auditing : Audit Khusus Audit Forensik Dalam Praktik*. Lembaga Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000. *Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*. Meteri Pendidikan Nasional. Jakarta (di download tanggal 21 Januari 2013)
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 045/U/2002. *Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*. Menteri Pendidikan Nasional. Jakarta (di download tanggal 21 Januari 2013)
- Kurniawati, Bernadeta Anggreni Dian. 2011. *Peran Auditor Forensik dalam Memberantas White Collar Crime di Indonesia*. <http://nenygory.wordpress.com> (di download tanggal 24 September 2012)
- Meity. 2012. *Akuntabilitas LSM, Milik Donor atau Publik? (Studi Analisis Wacana Studi pada Kantor Eksekutif WALHI Sulawesi Tengah)*. Skripsi. Universitas Tadulako
- Peter dan Yenny. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Edisi Pertama. Modern English Press. Jakarta
- Rustiana. 2008. Kemampuan Auditor Untuk Mendeteksi Kekeliruan Dalam Pengauditan Siklus Pendapatan : Studi Lab Eksperimen. *Laporan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- Silverstone dan Sheetz. 2004. *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Expert*. John Wiley and Sons, Inc., Hoboken. New Jersey
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Tiaz, F.W. 2012. Perlukah Mahasiswa Strata Satu Akuntansi di Indonesia Memiliki Persepsi Audit Forensik? *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1, No. 1.*, <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/316> (di download tanggal 12 November 2012)
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Tunggal, Amin Widjaja. 2001. *Audit Kecurangan (Suatu Pengantar)*. Harvarindo. Jakarta
- www.bpkp.go.id



www.howstuffworks.com

www.majalahpendidikan.com



Pengakuan Dosa [Sopir] A[ng]ku[n]tan* Pendidik: Studi Solipsismish

ACHDIAR REDY SETIAWAN[†]
Universitas Trunojoyo Madura

ARI KAMAYANTI
AJI DEDI MULAWARMAN
Universitas Brawijaya Malang

Abstract: *The mishap in accounting education is often blamed on the philosophy, education system, learning process, and even accounting students. This research explicates that the key to mending accounting education should be triggered by accounting lecturers. Through solipsismish study, we explore our 'sins' as accounting lecturers with 'kejar setor'/targetting experience-based reflectivity of public transportation driver as metaphor, backed by empirical study of a semester. The hectic schedule of teaching and other activities, not only as lecturers, have given heart-felt impact to students learning process and their attitude. It is urged that accounting lecturers should awaken their consciousness to realize that this profession is not the same as "sopir angkot" who are concerned on fulfilling schedules, teaching materials and fee. A concrete solution referring to the Perhimpunan Indonesia's agenda proposed in 1925 is needed, which ends in the confirmation of national ideology with some notes.*

Keywords: *Accounting Lecturers, Public Transportation Driver, Solipsismish Study, Accounting Education, Consciousness, Perhimpunan Indonesia.*

* Derrida menjelaskan tentang *differance* (Al Fayyadl 2005), yaitu suatu konsep di mana jarak antara kata dapat memberikan ruang untuk penafsiran yang berbeda. Penggunaan kurung tutup dan buka dalam judul ini erupaya memberikan ruang tafsiran bagi pembaca untuk melihat arti yang berbeda dari akuntan pendidik

[†] Corresponding author: achdiar.redy17@gmail.com

Awal Kegalauan Hati [Sopir] A[ng]ku[n]tan Pendidik

Di suatu siang di akhir semester, kami “bertiga” berkumpul di sebuah ruangan dan saling mencurahkan kegalauan hati tentang apa yang telah kami lakukan selama satu semester ini. Terdapat beberapa fenomena serupa yang kami alami, seperti kemalasan mahasiswa dan tidak serius mengerjakan tugas, datang terlambat, hingga sikap kurang ber’budi’ baik. Kami seringkali menggelengkan kepala terheran-heran membaca *sms* ‘gaul’ yang ditujukan pada kami. Tak jarang kami melihat bahwa ini adalah kesalahan mahasiswa; hasil pola asuh serta moda pergaulan moderen.

Seorang bijak pernah mengatakan bahwa saat kita menunjuk seseorang dengan satu jari atas kesalahan mereka, maka sebenarnya kita menunjuk kesalahan diri kita dengan tiga jari lainnya. Ya. Mahasiswa saat ini adalah generasi-X[‡], yaitu mahasiswa-mahasiswa dengan *free will* serta sikap egaliter mereka. Apakah ini justifikasi atas perilaku demikian? Sebenarnya, kami sebagai pendidik mau tidak mau memiliki andil dalam proses pendidikan akuntansi serta hasil akhir lulusan[§]. Menolak fakta tersebut sama saja dengan melepaskan tanggung jawab serta mengakui keterpisahan dan jarak antara mahasiswa dan pendidik sebagai suatu kelindanan sistem, yang bisa jadi merupakan salah satu penyumbang dari fenomena sikap mahasiswa akuntansi dan pendidikan akuntansi saat ini.

Riset ini adalah suatu upaya mengidentifikasi tiga jari yang mengarah pada kami sebagai akuntan pendidik. Riset ini bertujuan mengeksplorasi ‘dosa-dosa’ kami. Upaya penyadaran bahwa akuntan pendidik memerlukan kesadaran untuk merubah diri telah disarankan oleh beberapa periset (Mulawarman 2008, Triyuwono 2010, Ludigdo dan Mulawarman 2010, Setiawan dan Kamayanti 2012, Kamayanti 2012a;2012b), namun riset ini

[‡] Temuan Cermignano *et al* (1998, p 134) menjelaskan bahwa mahasiswa akuntansi sekarang adalah mahasiswa generasi X yang seringkali memiliki persepsi bahwa akuntansi “membosankan”. Dalam hal ini, kesalahan pendidikan akuntansi dibebankan pada mahasiswa.

[§] Tri Pusat Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, salah satu anggota Perhimpunan Indonesia, adalah alam-keluarga, alam-perguruan dan alam pergerakan-pemuda (Soerjaningrat 1967, p 70). Oleh karena itu, guru/dosen turut bertanggung jawab atas pendidikan kita.

merupakan penjelasan bagaimana kesadaran tersebut seringkali ‘tergantikan’ oleh berbagai kepentingan.

Kesadaran yang serta merta muncul di siang itu adalah dampak dari betapa lelah dan terengah-engahnya kami; dalam mengikuti jadwal serta materi yang harus kami selesaikan selama satu semester. Menjelang akhir semester, sepucuk surat dari bagian pengajaran mengingatkan bahwa kami harus segera mengejar ketinggalan jumlah sesi mengajar apabila masih kurang dari yang dipersyaratkan. Di saat itu pula kami merasa harus mengejar ‘setoran’ layaknya sopir angkutan. Ini menggelitik kami untuk mengambil sopir angkutan sebagai metafora dalam riset ini untuk menggambarkan tugas kami sebagai akuntan pendidik. Adakah kesamaannya atautkah perasaan kami hanya ilusi semata?

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka rumusan masalah riset ini adalah bagaimana kesalahan kami sebagai akuntan pendidik digunakan untuk menjelaskan praktik pendidikan akuntansi saat ini kami alami, dan bisa jadi merefleksikan praktik pendidikan akuntansi yang terjadi secara umum. Harapan kami, riset ini bisa memberikan masukan refleksi subyektif pada pendidik dan pendidikan akuntansi kita.

Studi Solipsismish: Refleksivitas Dosa dan Penggunaan Data Subyektif

Solipsisme yang digagas Bishop Berkeley (1685-1753) mengambil pandangan ontologis bahwa dunia tidak memiliki keterpisahan dengan apa yang kita pikirkan. Burrell dan Morgan (1979, p 239) menjelaskan bahwa “*ontologically, it has no existence beyond the sensations which he perceives his mind and body*”. Senada dengan hal tersebut, riset ini dipicu oleh suatu rasa bersalah mendalam serta kesedihan atas peran kami dalam pendidikan akuntansi. Rasa (*sensations*), dalam hal ini rasa berdosa, menjadi bahan baku terbesar dalam koleksi, pengolahan, analisis hingga penyajian data riset ini.

Pengakuan dosa/*rasa/sensations* menjadikan solipsisme metode yang paling sesuai karena sebagaimana dijelaskan Hamrick (2003, p 12-44), “*if Solipsism is to be equated with*

sins, then it must explain all particular sinful act... solipsism is sin, but is sin the real problem?" Tujuan solipsisme adalah meyakinkan bahwa subyektifitas kami adalah iman yang tidak perlu obyektifikasi, sebagaimana dilanjutkan oleh Hamrick (2003, p 51), *"we must receive neither our religion nor our ideas in general solely by means of logical examination or by reason. For it is as clear as one can ever expect something to be that reason is fallible guide"*.

Berkaitan dengan subyektivitas yang melekat erat pada solipsisme, sehingga sebagaimana dinyatakan Burrell dan Morgan (1979, p 239-240) bahwa 'bahaya besar' solipsisme adalah *"entering an entirely individualistic and subectivist view of reality in which no meaningful discourse is possible"*, maka kami mengambil bukti empiris untuk melakukan kontra-kritik terhadap solipsisme, berupa tugas mahasiswa, aktivitas mahasiswa di jejaring sosial (Twitter), observasi dan interaksi sesama akuntan pendidik, di samping bukti empiris terkuat dalam solipsisme, yaitu perasaan kami. Berdasarkan deviasi itu, tentu kami tidak bisa mengklaim bahwa metode yang kami gunakan adalah solipsisme murni. Untuk alasan tersebut, maka kami menyebutnya sebagai metode *solipsismish*** . Subyektifitas tetap berperan namun subyektivitas kami didukung bukti empiris yang tidak sepenuhnya hasil subyektivitas kami.

Bukti empiris riset diambil di beberapa institusi pendidikan baik negeri (dua institusi) maupun swasta (satu institusi). Dapat diargumentasikan bahwa penyebutan nama institusi sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena yang kami olah adalah data berbasis subyektifitas sebagai peneliti yaitu rasa 'dosa'. Interaksi dengan mahasiswa yang diobservasipun beragam, mulai dari S1, S2 dan S3. Data diambil dalam satu rentang semester genap 2012/2013.

** Dalam *grammar* atau tata bahasa, penggunaan *ish* dilakukan untuk menjelaskan sesuatu yang serupa tetapi tidak sama. Misalnya kita bisa menyatakan 'kemerahan' dengan *reddish*, atau 'keabu-abuan' dengan *greyish*. Oleh karena itu metode *solipsismish* menjelaskan bahwa metode yang kami gunakan memang serupa dengan solipsisme namun tidak sepenuhnya mengambil ciri-ciri solipsisme.

Tenggelamnya Kesadaran dalam Kesibukan: Fenomena ‘Kejar Setor’

Kami mendapatkan jadwal mengajar yang lumayan padat semester ini. Bisa dibayangkan, rata-rata tujuh kelas dengan masing-masing tiga SKS. Artinya, seratus lima puluh menit dikali tujuh yaitu tujuhbelas setengah jam setiap minggu. Belum lagi kesibukan lain kami mengelola kegiatan di luar mengajar. Akibatnya kami mengidentifikasi berbagai dampak atas kesadaran yang terdominasi kesibukan seperti layaknya sopir angkutan umum: menyalip seenaknya, berhenti mendadak, serta mencari tambahan di luar setoran.

Menyalip seenaknya: “Saya hendak meng[h]ajar dulu ya...”

Kalimat “saya menghajar dulu” bukan “mengajar” merupakan kesadaran bawah sadar akuntan pendidik tentang kekuatan dan otoritasnya dalam kelas. Gurauan ini bukan lagi gurauan baru di kalangan akuntan pendidik.

Rasa kuasa atau otoritas dosen digunakan saat kami tidak memiliki waktu memadai dalam penyiapan bahan materi pembelajaran yang akan disampaikan di kelas. Jujur, pada saat “kurang persiapan”, kami menggunakan “jam terbang” dalam penyampaian materi, agak keluar dari poin-poin materi seharusnya. Bahkan untuk mata kuliah yang dalam metode pembelajarannya diisi diskusi kelompok di awal sesi kelas, kami “baru” memanfaatkan kesempatan mahasiswa berdiskusi itu untuk membaca materi pada hari itu.

Pada saat-saat “kurang persiapan”, untuk mata kuliah lain yang tidak memasukkan metode diskusi (dosen menjadi pemandu utama sesi perkuliahan) inilah yang sering menyusahkan. Materi-materi yang akan disampaikan kadangkala baru dibaca 5-10 menit sebelum memasuki kelas, selebihnya, ilmu “improvisasi” dipergunakan. Senjata pamungkasnya adalah kemampuan bersilat lidah yang inheren lewat asahan “jam terbang” dengan materi-materi yang sebelumnya pernah dipelajari (dan juga dipraktikkan).

Pada mata kuliah di kelas S2 pun mengalami ‘ketidakberuntungan’ serupa. Dalam rangka meng-*update* materi kami menggunakan beberapa artikel baru yang amat ingin kami

baca sebelum sesi, namun tentu saja belum sempat kami lakukan. Sedih rasanya saat kami harus masuk ke sebuah kelas dan baru dapat membaca artikel yang akan didiskusikan bersama saat mahasiswa yang ditunjuk mempresentasikan artikel tersebut. Namun apa lacur, kami benar-benar merasa telah memberikan seluruh waktu kami untuk mempersiapkan banyak hal, dan itupun belum cukup. Belum lagi tumpukan skripsi, tesis dan disertasi yang harus kami baca.

Keterbatasan waktu akhirnya melegitimasi guyonan lain yang sering muncul “dosen adalah separuh dewa separuh manusia”. Berdasarkan kekuasaan tersebut, kami menentukan nasib mahasiswa mendapatkan nilai A, B, atau C, seringkali tanpa pengetahuan memadai (menggunakan beberapa hasil pekerjaan mahasiswa, bukan dari tumpukan tugas yang terkumpul selama satu semester) untuk menjustifikasi nilai tersebut. Menghajar dan bukannya mengajar; serta menyalip seenaknya; itulah rasa yang muncul.

Berhenti mendadak: “Kita akhiri lebih awal tidak apa ya...”

Jangan salah! Kami memiliki idealisme! Selalu pada awal semester, kami memiliki mimpi-mimpi indah bagaimana seharusnya perkuliahan dilakukan, namun dengan beranjaknya waktu kesadaran ini tergantikan kesibukan lain. Semenjak perkuliahan pertama, waktu pun bergulir. Minggu ke minggu pun berlalu tanpa terasa. Idealisme di awal pertemuan kemudian diuji konsistensi “ketaatan” terhadap rencana pembelajaran yang telah ditabalkan dalam dokumen kesepakatan kontrak perkuliahan.

Dalam 3-4 minggu awal semua berlangsung sempurna. Segala materi pembelajaran berbasis pedoman di kontrak perkuliahan yang disepakati berhasil disiapkan dan terealisasi sesuai idealisme. “Gangguan dan godaan” mulai muncul saat menginjak bulan ke-2 perkuliahan. Ada SK pimpinan kampus yang ditujukan kepada kami untuk menjadi panitia kegiatan tertentu. Tidak hanya 1, namun lebih dari 2, pada saat tidak berselang jauh.

Pelaksanaan tugas pimpinan kampuspun harus mulai dijalankan. Rapat-rapat mulai dihelat. Celaknya, waktu untuk pelaksanaan persiapan-persiapan kegiatan seringkali berbarengan dengan jadwal jam mengajar. Sulitnya mencari waktu pengganti jika harus “mengosongkan” kelas menjadikan kami meminta permakluman dari mahasiswa tentang kondisi yang ada. Bentuknya, kami tetap masuk kelas, walaupun tidak penuh. Waktu normal untuk setiap mata kuliah (3 SKS) adalah 2,5 jam yang biasanya selalu kami isi penuh tidak lagi sanggup terpenuhi. Semenjak hadirnya kegiatan-kegiatan kedinasan kampus yang bersamaan waktunya tersebut, rata-rata kami hanya dapat mengisi kelas sekitar 1-1,5 jam saja.

Dengan kesadaran penuh, sebenarnya kami juga seringkali meminta mahasiswa mencari jadwal pengganti sebagai pengganti kekurangan jam mengajar tersebut. Namun seringkali pula, yang meluncur dari bibir para peserta kelas adalah :

“... tidak usah Bapak/Ibu, kami tidak apa-apa *kok* tidak penuh 2,5 jam. Kami ikhlas *kok*, Pak/Bu...”

Jikalau pun mahasiswa dan kami ingin mengganti kuliah, jam tersedia adalah jam di luar kewajaran (jam malam), yang secara logis menjadi tidak efektif karena sesi malam adalah sesi ‘lelah’ setelah sekian jam seharian berkulat di kampus. Tidak ada ruang tersedia untuk mengganti jadwal di waktu efektif merupakan indikasi betapa sebenarnya seluruh kapasitas fasilitas kampus telah dimanfaatkan secara optimal.

Deretan kalimat serupa itu pun terlontar hampir di semua kelas yang tidak mampu kami isi *full*. Biasanya berhias senyuman lepas tanpa beban. Tidak kalah kocaknya, jawaban celetukan kami pun bernada guyon:

“Dasar mahasiswa. *Yaaa* begini ini. Saya juga pernah jadi mahasiswa *sih*. Bahagia ya kalau dosennya *gak* masuk atau *gak* lama-lama kuliahnya.”

Kampus kami memiliki peraturan akademik, bahwa untuk dapat dilaksanakan UAS, sebuah mata kuliah harus memenuhi minimal 12 kali pertemuan (6x sebelum UTS dan 6x sebelum

UAS) dari maksimum 14 kali tatap muka. Sampai dengan menjelang UTS, pertemuan seluruh kelas kami, secara absensi lengkap 7x pertemuan. Artinya, kami dapat memenuhi seluruh jadwal pertemuan, walau dengan catatan di atas tadi: untuk pertemuan ke 5, 6 dan 7 sudah mulai tidak *full* 2,5 jam.

Ya. Fenomena ini sedihnya sering sekali kami alami. Entah ada rapat atau seminar yang harus kami hadiri, sehingga kami ‘terpaksa’ meninggalkan kelas lebih awal. Pernah di suatu sore, jam ke 2 yang seharusnya berakhir jam 12 tepat, kami ditelepon menghadiri rapat penting. Di ujung sana terdengar suara “...sudahlah tidak perlu sampai jam dua belas, *kasih* saja mahasiswa tugas, mereka juga senang *aja kok*”. Di saat seperti ini ‘berhenti seenaknya’-pun mendapatkan legitimasi dari atasan.

Mencari tambahan di luar setoran: “Dosen: *kerjaan sak dos, bayaran sak sen*”

Gurauan ini adalah gurauan yang juga tidak asing bagi akuntan pendidik. Apa rasa yang ditimbulkan dari gurauan mendarah daging ini? Salah satu dampaknya adalah munculnya fenomena dosen “proyekan”. Gaji *sak sen* (satu sen) untuk pekerjaan yang sangat banyak. Bisa dibayangkan jika satu kelas terdiri dari 30-an mahasiswa, mungkinkah komitmen mengerjakan evaluasi individu tercapai?

Gurauan di atas juga menimbulkan suatu perilaku fatal yang dekat dengan keserakahan. Kami jadi teringat kata-kata Michael Douglas di film *Wall Street* “*greed is good*”. Jangan-jangan kami telah terjebak dalam moda keserakahan yang sama, atau mungkin dengan beda bungkus; beda legitimasi; bahwa bagaimanapun, kampus tetap nomor satu.

Di siang lain, kami berpapasan dengan dosen lain yang juga hendak mengajar. Kami saling mencocokkan jumlah pertemuan mengajar, ternyata beliau juga masih belum menyelesaikan jumlah pertemuan seharusnya. Dengan senyum menyeringai beliau berceletuk santai, “...biasalah...*mroyek*”.

Gangguan lebih “berat” muncul pada fase pasca UTS yang berawal dari komunikasi telpon:

“*Gimana kabarnya? Sibuk apa sekarang? Kalau longgar, ada *kerjaan* ini. (lalu detail pekerjaannya diceritakan). Bisa ya? Kami tunggu jawabannya segera ya...*”

Di fase inilah kegamangan mulai berkecamuk. Satu sisi, terdapat kesadaran atas tanggung jawab besar pada mahasiswa untuk memberikan ilmu dan pengetahuan yang komprehensif, serta penanaman nilai yang juga membutuhkan energi besar untuk menyebarkannya. Sisi lain, tawaran pekerjaan di luar kampus ini senyatanya juga merupakan pengejawantahan aspek teoritis akuntansi. Berbagai implementasi akuntansi di dunia praktik akan memberikan perspektif lebih luas bagi kami dalam memberikan materi ke mahasiswa, dibanding bila hanya sekadar menyampaikan teori. Jikapun ada faktor tambahan materi atas jasa, itu bukanlah variabel utama. Tidak bisa dipungkiri, kami mendapatkan tambahan penghasilan dari pekerjaan-pekerjaan itu. Namun, prinsip hidup kami telah mengajarkan bahwa uang bukanlah segala-galanya. Uang bukanlah penentu utama. Pengalaman hidup telah membuktikan bahwa kami bukanlah manusia ambisius untuk mencari tambahan penghasilan di luar sana. Pekerjaan-pekerjaan yang datang selama ini, mayoritas (untuk tidak mengatakan seluruhnya) serupa tawaran kesempatan-kesempatan untuk terlibat. Ya, kesempatan. Kesempatan mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang terkuasai. Dan fakta menyiratkan, di mayoritas pekerjaan itu, kami tidak menempatkan perolehan materi sebagai variabel utama.

Sebenarnya, jiwa sebagai pendidik lebih kuat menancap di dalam sanubari. Kelas adalah salah satu tempat membahagiakan dalam hidup kami karena bisa bertukar ilmu dan kesadaran. Memandangi wajah-wajah peserta didik penuh antusiasme adalah kebahagiaan yang tak dapat tergantikan dengan tumpukan uang segunung. Lebih-lebih jika itu menyangkut penanaman kesadaran (batin-spiritual). Ada semacam kepuasan batin jika ajakan

kebersamaan memegang nilai kebaikan disambut dengan tangan terbuka dan senyuman tulus peserta didik.

Pada titik inilah dilema etis menyeruak. Bagaimana menyambut tawaran pekerjaan yang akan menambah pengalaman Akuntansi di dunia praktis, namun pada saat yang sama, hak mahasiswa untuk menerima pembelajaran terbaik tidak menjadi aspek perifer. Manajemen waktu adalah kuncinya. Tapi, sekali lagi ini terlalu teknis, karena manajemen waktu bukan nilai itu sendiri. Waktu adalah masalah “kecelakaan” kesadaran bila kami mencoba menyejajarkan idealisme dengan “proyek”.

Semenjak hadirnya pekerjaan-pekerjaan di luar kampus, tak terelakkan lagi, kualitas proses belajar mengajar di seluruh kelas kami tidak sama dengan idealisme awal. Secara kuantitas, kami tetap dapat memenuhi jadwal minimal mengajar, yaitu 6 kali pertemuan pasca UTS (total 13x pertemuan sampai dengan UAS). Artinya, kami hanya kurang 1x jam mengajar untuk semua kelas. Itupun salah satunya karena ada kendala hari libur (tanggal merah) pada hari di mana jadwal kelas seharusnya berlangsung.

Dengan demikian, secara absensi perkuliahan, kami dapat memenuhi aturan akademik. Mahasiswa tidak menjadi “korban” akibat ketiadaan dosen. Namun secara kualitas, jujur kami merasakan bahwa perkuliahan tidak optimal. Kami tidak memiliki waktu lebih lama untuk memperdalam materi, menciptakan varian-varian baru metode pembelajaran. Pada fase ini, jurus improvisasi menjadi lebih sering diperagakan. Berbekal “jam terbang” tinggi menghadapi kerumunan kelas, kami mengisi kelas sekadar memenuhi target materi yang harus tersampaikan di lembar kontrak perkuliahan.

Kami juga kurang bisa memperhatikan perkembangan anak didik di kelas. Kebiasaan kami selepas sesi kelas, biasanya kami menerima kunjungan mahasiswa secara intens di ruangan dan/atau di rumah. Diskusi materi perkuliahan dan nilai-nilai kehidupan menjadi topik hangat di sela keputulan kopi panas dan aneka camilan. Desakan banyak pekerjaan di

semester ini menjadi penghalang rutinitas jalinan kemanusiaan tersebut. Kami tidak cukup banyak waktu untuk melayani perbincangan santai di luar kelas pada semester ini.

Sejatinya, ketika memperhatikan hasil ujian tengah semester (UTS) yang kurang memuaskan ekspektasi kami, telah terbersit beberapa rencana untuk memberikan tambahan perhatian pada anak didik. Tambahan perhatian berupa alokasi waktu untuk memberikan banyak latihan soal sudah ada di kepala. Juga pemberian ruang diskusi yang lebih luas di luar sesi perkuliahan. Apa daya, rencana tinggal rencana. Terbenam di antara tumpukan pekerjaan lain yang menyita waktu dan pemikiran.

Dampak pada Kesadaran Akuntan Pendidik (Bukan Sopir Angkutan Umum) pada Mahasiswa dan Agenda Konkrit ke Depan

Jika kami memang benar-benar berada di kelas baik secara fisik, hati dan jiwa, maka mahasiswa dapat menangkap semangat dan nilai dengan utuh. Mereka lebih membutuhkan ‘nilai/values’ dibandingkan materi, walau dalam hal ini kami sama sekali tidak menafikkan materi belajar sama sekali. *Values* tidak bisa ditransfer dengan mentalitas sopir angkutan umum, di mana pendidik hanya ‘hadir’ untuk memenuhi kejar setor materi, dengan legitimasi tanda tangan untuk memenuhi presensi kehadiran. *Values* hanya akan dapat ditangkap jika pendidik melakukan proses belajar dengan cinta: cinta akan kebenaran, keberpihakan atas rakyat yang terjajah dan kesadaran keberadaan akan dan keinginan untuk menjadi abdi Tuhan secara utuh.

Kesungguhan dan kehadiran utuh kami selalu tinggi di awal semester. Memasuki kelas di pertemuan awal dengan segenap *ghirah* yang ada melahirkan euforia. Pertemuan awal^{††} ini benar-benar disiapkan untuk menumbuhkan impresi kuat di memori kognisi dan

^{††} Sependek ingatan yang ada, semenjak “kecelakaan sejarah” ditugaskan Tuhan untuk menjadi akuntan pendidik, kami tidak pernah melewatkan sesi pertemuan di Minggu I perkuliahan ini. Agenda-agenda lain selalu kami nomer sekian-kan demi fokus pada pertemuan I. Kami selalu datang tepat waktu untuk masuk dan keluar kelas-nya khusus untuk fase awal ini.

hati mahasiswa. Impresi di awal pertemuan sekaligus menjadi penanda keseriusan dan kesungguhan proses belajar-mengajar.

Adagium “tak kenal maka tak sayang” kami gunakan di awal tatap muka, sebagai bentuk perkenalan diri. Sebagai pusat perhatian di kelas, dosen perlu membuka “jati dirinya” kepada peserta didik sebagai dasar pemahaman tentang karakter dasar pengajarnya. Perkenalan ini berlanjut menjadi ajang mengenal satu per satu anggota kelas, perkenalan dua arah.

Menit berikutnya di pertemuan awal biasanya akan kami isi dengan mendiskusikan tentang dunia akuntansi senyatanya^{††}. Sebagai mahasiswa akuntansi tingkat awal, penggalian pemahaman dan ekspektasi mereka terhadap dunia akuntansi perlu kami dapatkan. Profesi akuntan, sebagaimana banyak dipahami awam, adalah profesi bergengsi penuh dengan prestise. Gelimang materi adalah sesuatu yang lekat dan identik dengan profesi akuntan. Bisa jadi, pilihan logis mahasiswa memilih menempuh perkuliahan di program studi Akuntansi banyak ditentukan salah satunya oleh “strata” profesi akuntan di mata masyarakat yang menempati kategori “menjanjikan” sebagai “sandaran hidup” masa depan.

Perspektif yang hidup dalam alam pikir mahasiswa tentang dunia akuntansi yang menyembul dalam diskusi biasanya sejalan dengan pandangan awam. Terdapat ekspektasi tinggi di benak mahasiswa tentang masa depannya sebagai manusia. Salah satu ukuran kesuksesan seseorang: “materi”, terkandung dalam rahim profesi akuntansi. Jika kelak mereka mentas dari kampus, ada harapan perbaikan taraf hidup diri dan keluarga berbekal pengetahuan dan keterampilan akuntansi yang berhasil direngkuh.

Bayangan tentang semua “keindahan” profesi akuntansi sejurus kemudian coba kami elaborasikan dengan pengalaman praktis sebagai akuntan. Sebagai seseorang yang lebih

^{††} Apapun mata kuliahnya, jika diberi kelas di jurusan Akuntansi, terutama di semester-semester awal, kami akan selalu mendiskusikan tentang topik ini. Bahkan di kelas-kelas semester atas yang tidak pernah kami masuki sebagai pengajar, kami juga tidak melupakan kesempatan membincang seputar pemahaman dunia akuntansi di mata mahasiswa.

dahulu berkecimpung menggeluti dunia praksis akuntansi, *share* pengalaman kepada calon akuntan penting dilakukan. Sebagai tambahan sekaligus penyeimbang informasi. Bahwa dunia akuntansi memang benar “menjanjikan” gemerlap keindahan duniawi, namun pada saat yang sama juga “menyediakan” peluang untuk “menabrak” nilai hakiki yang kita yakini sebagai kebenaran.

Berbagai pengalaman kami (dan juga kolega) bergelut dengan seputar ke-akuntansi-an terpaparkan. Pengalaman-pengalaman batin spiritual yang mengiringi tugas kesejarahan juga menjadi bagian tak terpisahkan. Tujuannya tidak lain adalah berbagi kesadaran. Sasaran tidak hanya kesadaran kognitif rasional *an sich*, namun lebih substansial adalah kesadaran batin sipritual, bahwa Akuntan(si) adalah persimpangan: menuju jalan “kebahagiaan” (karena iming-iming duniawi) atau “kesengsaraan” (karena seringkali harus berjibaku dengan nir-nilai). Jalan ke “surga” atau “neraka”, menuju “putih atau “hitam”. Sebuah pilihan yang jika direnungkan mendalam bisa jadi akan lebih banyak menyediakan potensi menuju “neraka”, menuju “hitam” dari pada sebaliknya.

Dalam realitas penuh dilema yang terpampang inilah, kami berusaha membuka mata mahasiswa tentang pentingnya “nilai” untuk digenggam dan dipeluk erat. Nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran, sebagai penyelamat kehidupan, penting untuk terus digelorakan. Bangku kuliah tidak hanya ranah menanamkan ilmu dan pengetahuan (akuntansi), namun yang tidak kalah penting (bahkan jauh lebih penting) adalah indoktrinasi nilai-nilai kebaikan hidup yang konsisten dan persisten. Kami selalu berapi-api di kelas ketika tiba pada urusan “nilai” ini. Mengingatkan calon-calon akuntan ini tentang banyaknya ruang “abu-abu” (bahkan seringkali mengarah kepada “hitam”) dalam dunia akuntansi. Kalimat penting di akhir sesi adalah idealisme tidak dapat digadaikan hanya untuk kepentingan dunia dan menegasikan ukhrowi.

Setelah sesi perkenalan diri dan akuntansi kelar, musyawarah draf kontrak perkuliahan menempati urutan berikutnya pertemuan awal ini. Draf yang dirancang sang dosen adalah media pencangkokan efektif pula tentang relasi saling pengertian antara dosen-mahasiswa dalam proses belajar-mengajar. Dimulai dengan pengudaran gambaran umum, tujuan dan target mata kuliah. Metode pembelajaran yang akan digunakan pun dimintakan kesepakatan. *Last but not least*, penanaman tentang pengarusutamaan “nilai” kembali menjadi titik tekan krusial^{§§}. Iklim dan aura positif yang berporos pada nilai universal kebaikan menjadi pegangan kesepakatan bersama.

Sesi tatap muka pertama (juga pertemuan-pertemuan berikutnya) ini lalu akan diisi dengan permunjatan bersama kepada Tuhan, Sang Maha Segala. Hal ini bertindak pula sebagai “pagar” yang akan melingkupi segala niatan akan proses belajar satu semester ke depan. Permohonan agar selalu dilimpahkan ilmu yang barokah dan manfaat, bagi diri dan lingkungan.

Sebenarnya tidak pula hanya pada awal semester. Di saat-saat tertentu, di mana kami merasa tidak terhimpit oleh beban pekerjaan lain, kami merasa bisa secara utuh melakukan transfer nilai dan materi. Kami dapat berkilah, di samping dosa-dosa, tetap ada kebaikan-kebaikan terjadi saat kami dapat secara utuh berada di dalam kelas. Dampak nyatanya dapat dibaca melalui gejala dunia maya, salah satunya adalah media sosial Twitter melalui kicauan (*twit*). Kicauan dapat diinterpretasikan sebagai pembentukan realita yang diyakini

^{§§} Rancangan draf kontrak perkuliahan selalu memasukkan pentingnya nilai-nilai kebaikan ini dalam proses pembelajaran. Nilai akhir (angka/huruf kuantitatif sebagai ukuran penilaian) hanyalah hasil akhir yang tidak terlalu penting diperbincangkan. Jauh lebih substansial untuk didiskusikan adalah proses menuju nilai akhir. Kami selalu mewanti-wanti tentang hukum alam sebuah proses: proses yang “baik” akan berbuah ”nilai (akhir) baik”. Jika nilai (angka/huruf akhir) baik yang diinginkan, maka prosesnya juga harus selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Hal ini dapat diartikan pula sebagai penanaman optimisme dan kepercayaan diri peserta didik. Bahwa kemampuan kognisi dalam menyerap materi perkuliahan bukanlah satu-satunya aspek penilaian. Kemampuan intelektual mahasiswa seringkali *given*. Ketika otak tidak begitu memadai, kami seringkali berpesan: “... *Saya orang yang lebih menghargai proses yang baik, cara mencapai ‘nilai’ yang baik. Kemampuan menguasai materi bukanlah segala-galanya... Saya lebih menghargai mahasiswa yang mendapatkan nilai 50 tapi jujur mengerjakan sendiri daripada dapat 100 tetapi hasil mencontek dan berbuat curang ...*”

kebenarannya, baik oleh pengicau maupun pengikutnya^{***}. Temuan menarik kicauan (Gambar 1) didapatkan dari laman mahasiswa yang kami asuh, yang merefleksikan terjadinya transfer *values*:

Gambar 1. Laman Twitter



Sumber: www.twitter.com

Tentu saja kita tidak bisa saja berhenti dalam kesadaran seperti ini, pengetahuan bahwa idealisme kami selalu dapat ter'kompromi'kan dengan kepentingan-kepentingan selain pengajaran. Perlu suatu agenda konkrit perubahan atas kondisi ini. Kami kemudian teringat gagasan Perhimpunan Indonesia (PI) tahun 1925 tentang langkah-langkah revolusi. PI bermula dari sebuah organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda bernama *Indische Vereeniging* yang terbentuk saat pemuda-pemuda Indonesia belajar di negara tersebut. Pergerakan PI menjadi revolusioner saat Mohammad Hatta turut aktif sebagai organisatoris. Agenda PI terdiri dari tiga langkah (Ingleson 1983), pertama, melakukan penyadaran agar mahasiswa Indonesia memiliki rasa sebagai orang Indonesia dan mengembangkan komitmen yang bulat kepada Indonesia yang bersatu dan merdeka. Kedua, gambaran tentang gambaran Indonesia yang diciptakan oleh pemerintah Belanda perlu dihapuskan. PI harus membuka mata rakyat Belanda tentang watak opresif pemerintah kolonial dan meyakinkan rakyat

*** Twitter adalah suatu jejaring sosial yang memungkinkan anggotanya untuk saling mengikuti status orang lain saat ia 'berkicau'. Jika pengikut yang bersangkutan berjumlah sekian orang, maka sekian orang itu pulalah yang dapat membaca 'kicauan' tersebut. Bahkan pengikut dan men'*twit*' ulang kicauan ke pengikut yang lain.

tentang kebenaran kaum nasionalis. Ketiga, perlu dikembangkan suatu ideologi yang kuat dan bebas dari pembatasan-pembatasan Islam dan komunisme. Kami tidak sepenuhnya menyetujui poin ketiga ini, walau kami memahami lahirnya agenda ketiga dikarenakan pertentangan yang hebat antara Syarekat Islam (SI) dan Komunis saat itu. Perlu digarisbawahi bahwa bagi kami, kata kunci yang penting pada poin ketiga adalah bahwa kebebasan itu tidak boleh tidak terbatas.

Pengakuan dosa kami sebenarnya merupakan cerminan dari bentuk ketidaktepatan struktur model pendidikan yang megarah pada komodifikasi pendidikan. Komodifikasi merupakan bentuk kebebasan (baca: pasar bebas dalam pendidikan) yang mulai kehilangan batas-batas nilai yang dianutnya. Jumlah kelas yang sekian banyak membebani serta kurikulum yang padat merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan pasar, bukan kepentingan ‘nilai’.

Agenda pertama tentang penyadaran bahwa kita adalah manusia Indonesia yang sebaiknya bertindak atas nama kepentingan Indonesia, telah sering terlontar dalam kajian pendidikan akuntansi kritis (Triyuwono 2010, Mulawarman 2008, Mulawarman dan Ludigdo 2010, Kamayanti 2012a, 2012b). Agenda kedua belum sepenuhnya terlaksana, walau dalam hal diskursus akademik, publikasi tulisan hasil penelitian pendidikan akuntansi kritis juga telah dilakukan. Tentu saja gaung agenda kedua akan sulit terdengar, apabila IAI-KAPd tetap bersikukuh untuk mengadopsi Standar Pendidikan Akuntansi Indonesia (SPAI) sesuai permintaan IFAC. Bagaimana mungkin kita dapat meyakinkan jati diri kita (sebagai bangsa berdikari) apabila pendidikan Indonesia masih ‘mengekor’ pendidikan Barat?

Agenda ketiga membutuhkan energi lebih besar. Bisa jadi agenda ketiga PI yang hendak menghilangkan pembatasan antara agama dengan ilmu mengakibatkan ‘kemunduran’ yang saat ini kita alami. Kebebasan yang benar-benar bebas bisa jadi membentuk paham liberal sehigga memurukkan pendidikan akuntansi dalam jejaring kapitalis, karena saat

agama dan Tuhan jauh dari akuntansi, maka faham materialis dapat dengan mudah masuk. Agenda ketiga PI bisa jadi memang kemudian hari (saat ini) memecah pemikiran ekonomi di Indonesia menjadi tiga, yaitu ekonomi liberal, kerakyatan dan ‘abu-abu’^{†††}.

Pendidikan akuntansi ber-“ideologi” atau ber-“nilai” kebaikan asasi (apalagi dan sekaligus Berketuhanan) bisa jadi masih jauh panggang dari api. Rekonstruksi pendidikan akuntansi berbasis Pancasila, misalnya, hanya menjadi pemanis saja, apalagi bila kita berharap sebagai akuntansi berbasis beragama (tentu saja bila kita masih percaya agama adalah kemestian sejarah sekaligus kedirian lintas jaman). Gairah untuk membangun ideologi memang ada, namun tidak cukup besar untuk melakukan rekonstruksi utuh. Ujung-ujungnya, kita kembali pada model semula yaitu menjadi *follower* setia yang semakin kehilangan jati diri. Kami merasa bahwa pendidikan akuntansi Indonesia harus segera memiliki tiga agenda ala PI tahun 1925 dengan “perbaikan” substansial atas konsep bebas yang tidak tak terbatas, agar kami dan pendidik-pendidik akuntansi lain tidak semakin terpuruk dalam ‘dosa’.

Refleksi Sementara

Riset ini menunjukkan hasil yang satir. Dapatkah kita menertawakan diri sesekali dan menyalahkan diri kita sendiri atas pendidikan akuntansi Indonesia? Bisakah kita beranjak dari mentalitas sopir angkutan umum menuju mentalitas *the true* akuntan pendidik? Atau mungkin, dan jangan-jangan, konsep pendidikan dengan jam yang ketat, materi yang padat serta jumlah pertemuan menjadi pagar yang kaku dan bahkan mendorong terjadinya mentalitas sopir angkutan umum? *Toh* jelas terbukti secara empiris bahwa pendidikan

^{†††} Tiga cabang pemikiran ekonomi tersebut terdiri dari Ekonomi Liberal Indonesia ala Soemitro Djojohadikoesoemo dan Mafia Berkeley, Ekonomi kerakyatan ala Hatta yang kemudian diterjemahkan di era orde baru oleh Mubyarto, Sri Tua Arif, Sri Edi Swasono, dll., sedangkan Ekonomi ‘abu-abu’ adalah era di mana kebijakan tidak jelas berorientasi ke mana, seperti era reformasi saat ini. Suara kebenaran hati bernurani ke-Indonesia-an yang mungkin datang terlambat dapat dijelaskan melalui pemikiran Soedjatmoko (dalam Tuhulele 1988) yang muncul di akhir hidupnya, yaitu bahwa membangun peradaban maupun membangun Indonesia tidak cukup dengan kebebasan karena hanya agamalah yang bisa menjadi solusi.

akuntansi jika ber'hati' mampu mentransfer nilai/value yang justru dibutuhkan untuk membentuk karakter tidak hanya peserta didik namun juga akuntan pendidik?

Pada akhirnya, harus kami akui, dalam kesadaran penuh bahwa apa yang kami lakukan dalam mendidik anak bangsa ini adalah kondisi nir-ideal. Inilah pengakuan dosa kami selaku akuntan pendidik yang ditugaskan negara untuk mengabdikan dan mengkhidmatkan diri kepada calon-calon pemimpin bangsa di kampus. Walau secara formal prosedural, kami 'dianggap' berhasil memenuhi kewajiban mengajar di kelas-kelas perkuliahan, kami merasakan ada ketidakpuasan yang mengiringi pencapaian peng guguran kewajiban formal tersebut.

Di akhir perkuliahan, permohonan maaf sudah terlontarkan kepada seluruh mahasiswa di kelas, bahwa kami, dosen yang *dhoif* ini, tidak dapat memberikan yang terbaik. Kepada Allah SWT sebagai pemutus takdir sebagai pendidik, juga tak kurang-kurang memohon ampun. Semoga ada jalan untuk keluar dari belitan dilema etis di masa-masa mendatang melalui tiga agenda penyadaran tentang hakikat manusia Indonesia pada akuntan pendidik kita, penyadaran kepada dunia internasional tentang hakikat manusia Indonesia serta penegakan ideologi nasionalisme (bila ini masih penting, apalagi agama?).

Bagi kami, pandangan mendasar Jensen dan Meckling (1994) bahwa pusat kemanusiaan yang menjadi dasar pemikiran akuntansi dan akuntan pendidik adalah pragmatisme dan *self-interest*, tidak mungkin menjadi salah satu solusi. Hal ini karena seperti dijelaskan oleh William James (1842-1910), pencetus filsafat pragmatisme, kebenaran pragmatisme selalu diukur dari kepercayaan atas kebenaran hanya bila kebenaran itu berguna. Bagi kami, yang terpenting sebagai akuntan pendidik seperti diwahyukan dalam Al Baqarah ayat 2 "*al haqqu mirrobbiq*", pandangan kebenaran menurut kami bukan karena pragmatisme sempit seperti itu, tapi kebenaran adalah apa saja yang datang dari Tuhan, baik berguna atau tidak sekarang ini dalam kehidupan praktis.

Terlepas dari permohonan maaf kami yang selalu kami ulang pada setiap akhir semester, teringat suatu hadist Rasulullah SAW (HR. Thabrani): “Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar dan bukan dosa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus-menerus.” *Ah...jangan-jangan...?* Atau (seperti ditegaskan “Babe” pemenang *Stand-Up Comedy Indonesia 3*) *Ah... sudahlah...?*

Hidup ini diakhiri kematian
 Sekaligus dapat menembus kematian
 Hidup ialah kreativitas dan semangat
 Maka bila kau benar-benar hidup
 Hiduplah penuh kreativitas dan gairah
 Jelajahi seluruh alam semesta
 Tumpas hingga tuntas segala yang nista
 Lalu ciptakan dunia baru
 Sebagai penjelmaan imajinasimu
 Bagi yang bebas
 Sungguh membosankan
 Untuk hidup di dunia orang lain
 Mereka yang tak mampu mencipta
 Tidak berharga di mata kita
 Sederajat dengan yang tidak bertuhan
 Sederajat dengan yang tidak berpengalaman
 Ia tak sempat turut menikmati keindahan
 Ia tak sempat turut menikmati buah dari pohon kehidupan
 Wahai manusia yang berakal
 Jangan jadikan dirimu majal!
 Asah dirimu setajam pedang
 Tentukan sendiri arah hidup yang hendak kau jelang

(Iqbal 1997)

Wallahu a'lam bi as shawaab

Daftar Pustaka

- Al Fayyadl, M. 2005. *Derrida*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Burrel, G dan G Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the sociology of Corporate Life*. Ashgate Publishing Company. USA.

- Cermignano, GP., JM Hargadon and DA McMullen. 1998. "The "Games" Accounting Professors Play: communicating with Generation X". *Advances in Accounting Education*. Vol 1. p 133-146.
- Hamrick, MB 2003. Solipsistic Sin. *Tesis tidak dipublikasikan*. University of Tennessee at Chattanooga Philosophy and Religion. USA.
- Ingleson, J. 1983. *Jalan ke Pengasingan: Pererakan Nasionalis Indonesia 1927-1934*. LP3ES. Jakarta.
- Iqbal, MA. 1997. *Javid Nama: Kitab Keabadian*. Terjemahan. Panji Mas. Jakarta.
- Jensen, MC dan WH Meckling. 1994, 'The Nature of Man', *Journal of Applied Corporate Finance*. Summer, vol 7, no 2. pp. 4-19.
- Kamayanti, A. 2012a. *Liberating Accounting Education: through Beauty and Beyond*. LAMBERT Publishing Company. Germany.
- Kamayanti, A. 2012b. Developing Conscious Accounting Educators: a Theatrical Perspective. *Tesis tidak dipublikasikan*. Universitas Brawijaya Malang.
- Mulawarman AD. 2008. "Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta: Lepas dari Hegemoni Korporasi Menuju Pendidikan yang Memberdayakan dan Konsepsi Pembelajaran yang Melampaui". *Ekuitas*. Vol 12, No. 2.p 142-158.
- Mulawarman, AD. and U Ludigdo. 2010. Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi: Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi Berbasis Integrasi IESQ. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 2 (2)
- Setiawan, AR dan A Kamayanti. 2012. Mendobrak Reproduksi Dominasi Maskulinitas dalam Pendidikan Akuntansi: Internaliasasi Pancasila dalam Pembelajaran Fraud Accounting. *Proceeding Konferensi Nasional Pendidikan Akuntansi Indonesia*. 18-20 April.
- Soerjaningrat, S. 1967. *Bagian Kedua: Kebudajaan*. Jogjakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Tuhuleley, S. 1988. *Permasalahan Abad XXI: Sebuah Agenda (kumpulan karangan)*. LP3M. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Triuwono, I. 2010. "Mata Ketiga: Sé Laén, Sang Pembebas Sistem Pendidikan Tinggi Akuntansi". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 1 (1).p 1-18.

Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Learning Tipe Make A Match Tournamen dalam Meningkatkan Kemampuan Soft Skill Mahasiswa

(Penelitian Tindakan Kelas pada Mata Kuliah Manajemen Keuangan di Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia)

IMAS PURNAMASARI*
Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract: *The research was carried out in accounting education major in Universitas Pendidikan Indonesia. The problems discussed in this study is the lack of ability of the students soft skill. There are many factors, one of which is a model of learning, particularly cooperative learning models make a match trounament type. Soft skills are the results obtained through the process of teaching and learning. Based on this, the researcher conducted a study titled "Implementation of Cooperative Learning Model Make A Match tournament type in improving the soft skill of students" the study was conducted to determine whether cooperative learning model with make a match tournament type can improve the soft skill of students on financial management subject in accounting education major. This research is a classroom action research (CAR). The object in this study are the student class A of 2010 which consists of 50 students. Classroom Action research conducted in two cycles. The Data collected with observation tools. The analysis is conducted by looking at the difference of the results before any action and after the action in cycle I. Then check the difference from the first cycle and second cycle. The student soft skill before any action is only 31%. In cycle one become 62% and 77% in cycle two. the results of this study proved that the cooperative learning with make a match tournament type can improve soft skill of the students. This proved that the hypothesis proposed in the study is received.*

Keywords: *Cooperative Learning, Make A Match Tournament, Soft Skill.*

* Author can be contacted at: imaspurna@yahoo.com

PENDAHULUAN

Seiring dengan tujuan pembentukan manusia yang berkualitas, perguruan tinggi sebagai lembaga formal mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membawa jalannya proses pendidikan yang baik dan bermutu. Perguruan tinggi merupakan miniatur kehidupan masyarakat yang kompleks dan menjadi wahana bagi peserta didik untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari. Oleh sebab itu proses perkuliahan harus ditangani dengan baik sehingga menghasilkan *output* yang berkualitas.

Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan keterampilan teknis (*hard skills*), tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain (*soft skills*). Pendidikan *soft skills* bertumpu pada pembinaan mentalitas agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan.

Dunia kerja percaya bahwa sumber daya manusia yang unggul adalah mereka yang tidak hanya memiliki kemahiran *hard skill* saja, tetapi juga piawai dalam aspek *soft skill*nya. Dunia pendidikan pun mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh *hard skill* dan sisanya 80% oleh *soft skill*.

Jika berkaca pada realita, pendidikan *soft skill* tentu menjadi kebutuhan urgen dalam dunia pendidikan. Namun untuk mengubah kurikulum juga bukan hal yang mudah. Pendidik seharusnya memberikan muatan-muatan *soft skill* pada proses pembelajarannya. Proses pendidikan merupakan perubahan pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor) dan sikap (afektif) seseorang, maka pendidikan seharusnya menghasilkan output dengan kemampuan yang proporsional antara *hard skills* dan *soft skills*. Selain karena kurikulum yang memiliki muatan *soft skills* yang rendah dibanding muatan *hard skills*,

ketidakseimbangan antara *soft skills* dengan *hard skills* juga dapat disebabkan oleh proses pembelajaran yang menekankan pada perolehan nilai hasil ujian saja.

Setiap orang termasuk peserta didik sudah memiliki *soft skills* walaupun berbeda-beda. *Soft skills* ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik atau bernilai (diterapkan dalam kehidupan sehari-hari) melalui proses pembelajaran. Pendidikan *soft skills* tidak seharusnya melalui satu mata pelajaran khusus, melainkan diintegrasikan melalui mata kuliah yang sudah ada atau dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Salah satunya adalah pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah mahasiswa yang heterogen sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim, et al. (2000), yaitu: “Hasil belajar akademik, Penerimaan terhadap perbedaan individu, dan Pengembangan keterampilan sosial”.

Hasil observasi selama proses perkuliahan berlangsung, diketahui bahwa kemampuan *soft skill* mahasiswa dilihat dari keaktifan dan kerjasama mahasiswa khususnya dalam mata kuliah manajemen keuangan dinilai masih kurang. Mahasiswa masih belum berani dalam mengajukan atau menjawab pertanyaan dari dosen, kurang aktif, dan lemahnya kemampuan bekerjasama. Munculnya permasalahan tersebut salah satunya tidak bisa dipisahkan dari peran dosen secara langsung sebagai pendidik.

Dari permasalahan tersebut, maka perlu dicari jalan keluarnya melalui sebuah perubahan dalam proses pembelajaran. Penelitian ini mencoba menerapkan satu model pembelajaran yaitu menerapkan model pembelajaran *kooperatif dengan menggabungkan dua tipe yaitu tipe Make A Match dan tipe Tames Games Tournament (TGT)*). Proses pembelajaran

yang mengkombinasikan dua tipe dari model pembelajaran kooperatif learning yaitu Make A Match dan Team Games Tournamen. Maka dari gabungan dua tipe tersebut dinamakan model kooperatif learning Make A Match Tournamen. Dengan penerapan model ini diharapkan kemampuan soft skill mahasiswa meningkat.

Dari latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini mengambil judul penelitian yaitu Implementasi Model Pembelajaran Tipe Make A Match Tournamen dalam meningkatkan Soft Skill Mahasiswa (Pada Mata Kuliah Manajemen Keuangan di Program Studi Pendidikan Akuntansi UPI). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah Terdapat Peningkatan kemampuan soft skill Mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Keuangan setelah diberikan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match Tournament”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Apakah Terdapat Peningkatan kemampuan soft skill Mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Keuangan setelah diberikan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match Tournament. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi bagi para dosen dan pendidik pada umumnya untuk membekali peserta didik dengan kemampuan soft skill yang nantinya sangat bermanfaat dalam dunia kerja dan kehidupannya di masyarakat.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pembelajaran Kooperatif Tipe *Make A Match*

Model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* atau teknik mencari pasangan yaitu teknik yang dikembangkan oleh Larana Curran (1994). “Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia”.

Langkah-langkah penerapan pembelajaran tipe *make a match* ini adalah:

1. Guru menyiapkan beberapa kartu soal yang berisi beberapa konsep atau topik yang mungkin cocok untuk sesi *review* (persiapan menjelang tes atau ujian) sejumlah $\frac{1}{2}$ dari jumlah siswa di kelas. Kemudian membuat kartu jawaban dari soal tersebut.
2. Kartu dikocok dan dibagikan kepada para siswa
3. Setiap siswa akan mendapatkan kartu soal atau kartu jawaban.
4. Setiap siswa harus mencari pasangan dari kartu soal atau kartu jawaban yang mereka pegang (jika memegang kartu soal, maka siswa harus mencari kartu jawabannya, begitu pula sebaliknya).
5. Siswa yang berpasangan dengan benar (sesuai antara soal dengan jawabannya), maka siswa tersebut akan mendapatkan nilai.

Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament

Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model Teams Games Tournament (TGT) memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. (Dimiyati dan Mundjiono,2006)

Teams games tournament (TGT) pada mulanya dikembangkan oleh Davied Devries dan Keith Edward, ini merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. Dalam model ini kelas terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3 sampai dengan 5 siswa yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya, kemudian siswa akan bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecilnya.

Pembelajaran dalam Teams games tournament (TGT) hampir sama seperti STAD dalam setiap hal kecuali satu, sebagai ganti kuis dan sistem skor perbaikan individu, TGT menggunakan turnamen permainan akademik. Dalam turnamen itu siswa bertanding mewakili timnya dengan anggota tim lain. Nur & Wikandari (2000) menjelaskan bahwa:

Teams games tournament TGT telah digunakan dalam berbagai macam mata pelajaran, dan paling cocok digunakan untuk mengajar tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan tajam dengan satu jawaban benar, Ada lima komponen utama dalam TGT, yaitu: 1) Penyajian kelas, 2) Kelompok (team) 3) Game, 4) Turnamen dan 5) Penghargaan kelompok.

Konsep Soft Skill

Konsep tentang *soft skill* sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep yang selama ini dikenal dengan istilah kecerdasan emosional (*emotional intelligence*). *Soft skill* sendiri diartikan sebagai kemampuan diluar kemampuan teknis dan akademis, yang lebih mengutamakan kemampuan intra dan interpersonal.

Soft Skill merupakan bagian keterampilan dari seseorang yang lebih bersifat pada “kehalusan” atau sensitifitas perasaan seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Dikarenakan *soft skill* lebih mengarah kepada ketrampilan psikologis maka dampak yang diakibatkan lebih tidak kasat mata namun tetap bisa dirasakan. Akibat yang bisa dirasakan adalah perilaku sopan, disiplin, keteguhan hati, kemampuan kerja sama, membantu orang lain. Pengembangan *soft skill* yang dimiliki oleh setiap orang tidak sama sehingga mengakibatkan tingkatan *soft skill* yang dimiliki oleh setiap orang juga tidak sama. Hal ini dikarenakan proses pengembangan *soft skill* berjalan linier dengan proses kehidupan seseorang. Proses pengembangan *soft skill* yang lebih berdimensi abstrak membuatnya tidak dapat dipelajari dalam institusi formal. Keberadaan institusi formal seperti sekolah lebih

cenderung hanya sebagai media yang paling kondusif untuk mengasah keahlian *soft skill* seseorang. Hal ini dikarenakan *soft skill* dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dan bagaimana seseorang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya.

Secara garis besar *soft skill* bisa digolongkan ke dalam dua kategori : intrapersonal dan interpersonal skill. Interpersonal skill mencakup : *self awareness (self confident, self assessment, trait & preference, emotional awareness)* dan *self skill (improvement, self control, trust, worthiness, time/source management, proactivity, conscience)*. Sedangkan interpersonal skill mencakup *social awareness (political awareness, developing others, leveraging diversity, service orientation, empathy dan social skill (leadership, influence, communication, conflict management, cooperation, team work, synergy)*

Kemampuan *Soft skill* dipelajari dalam kehidupan sosial melalui interaksi sosial. Namun seorang tenaga pengajar tidak bisa begitu saja menyerah, kemampuan soft skill bisa diasah juga pada saat proses pembelajaran dikelas, karena kelas juga merupakan miniatur masyarakat. Dengan kata lain, *soft skill* bisa pelajari melalui proses pengasahan *soft skill*, baik dari melihat maupun melakukan sesuatu.

Soft skill yang diberikan kepada para siswa dapat diintegrasikan dengan materi pembelajaran. Menurut Saillah (2007) “materi *soft skill* yang perlu dikembangkan kepada para siswa, tidak lain adalah penanaman sikap jujur, keaktifan, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, menghargai orang lain dan komitmen”. *Soft skill* yang perlu diasah dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori yaitu: keterampilan komunikasi lisan dan tulisan (*communication skills*), keterampilan berorganisasi (*organizational skills*), kepemimpinan (*leadership*), kemampuan berpikir kreatif dan logis (*logic and creative*), ketahanan menghadapi tekanan (*effort*), kerja sama tim dan interpersonal (*group skills*) dan etika kerja (*ethics*). Adapun yang akan dijadikan indikator soft skill dalam penelitian ini yaitu keaktifan dan kerjasama. Dengan indikator keaktifan dilihat dari keberanian mengajukan pertanyaan,

kemampuan memberikan jawaban, dan menanggapi orang lain. Sedangkan untuk kerjasama dilihat dari indikator Keikutsertaan melaksanakan tugas kelompok, keikutsertaan memecahkan masalah, dan kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok.

Hipotesis

Terdapat Peningkatan kemampuan soft skill Mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Keuangan setelah diberikan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match Tournament.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (*Classroom action research*). Menurut (Wijaya dan Dedi, 2012: 9) mendefinisikan “penelitian tindakan adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan cara (1) merencanakan, (2) melaksanakan, (3) merefleksi tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat”. Menurut Sukanto (2000:5) “Tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah demi perbaikan dan atau peningkatan praktek pembelajaran secara berkesinambungan, yang pada dasarnya melekat pada terlaksananya misi profesional pendidikan yang diemban oleh guru”.

Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa angkatan 2010 semester 7 kelas A pada mata kuliah manajemen keuangan di Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan (*participant observation*) yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai unjuk

aktivitas belajar mahasiswa selama pengembangan tindakan dalam perkuliahan Manajemen Keuangan berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match Tournament*).

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk siklus, masing-masing siklus terdiri dari beberapa komponen, yaitu tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan monitoring, refleksi, evaluasi dan revisi dan kesimpulan hasil. Prosedur penelitian tindakan yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada langkah-langkah penelitian yang diilustrasikan dalam siklus seperti terlihat pada gambar 1. (Lihat lampiran 1)

Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah refleksi awal yang dilakukan peneliti sendiri untuk mengidentifikasi permasalahan. Adapun permasalahan yang sangat mendasar pada perkuliahan manajemen keuangan adalah kemampuan soft skill yang dilihat dari keaktifan dan kerjasama mahasiswa. Selanjutnya peneliti merumuskan permasalahan secara operasional, baik permasalahan dari mahasiswa maupun permasalahan dari peneliti sendiri.

Tahap Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan alternatif upaya peningkatan proses dan hasil perkuliahan manajemen Keuangan dengan mencoba melakukan perbaikan proses perkuliahan di kelas dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match Tournament*.
2. Menyusun rancangan tindakan yang dilaksanakan. Dalam hal ini rancangan tindakan yang dilaksanakan adalah strategi pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match Tournament*. Pada tahap ini, dilakukan persiapan pelaksanaan pembelajaran kooperatif yakni meliputi:

- a. Penentuan pembatasan materi yang akan diberikan.
- b. Pembentukan kelompok pembelajaran berdasarkan prinsip kooperatif tipe *Make A Match Tournament*.
- c. Membuat skenario perkuliahan dengan model pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match Tournament*.
- d. Menyiapkan media yang akan digunakan pada saat penelitian tindakan kelas.

Pelaksanaan Tindakan

Pada kegiatan di lapangan langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match Tournament* didesain sebagai berikut:

Ada lima tahapan dalam model pembelajaran kooperatif tipe *Make A Match Tournament*, yaitu:

1. Penyajian kelas

Pada awal pembelajaran dosen menyampaikan materi dalam penyajian kelas dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, diskusi yang dipimpin dosen. Pada saat penyajian kelas mahasiswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang diberikan dosen, karena akan membantu mahasiswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game karena skor game akan menentukan skor kelompok. Game akan menghasilkan pemenang dan itu akan tercipta jika setiap anggota kelompoknya memiliki kemampuan soft skill yang tinggi disamping kemampuan hard skillnya.

2. Kelompok (team)

Kelompok terdiri atas sepuluh orang mahasiswa. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game.

3. Game

Game terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat mahasiswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Mahasiswa memilih kartu pertanyaan dan membacakannya, kemudian mahasiswa yang lain menjawab pertanyaan. Mahasiswa yang menjawab benar pertanyaan itu akan mendapatkan skor.

4. Turnamen

Setelah melakukan kerja kelompok dari tiap-tiap kelompok ditandingkan. Setiap anggota kelompok harus dapat mempertanggungjawabkan kelompoknya. Setiap mahasiswa secara bergiliran maju ke depan untuk mencari pasangan atas pertanyaan yang diajukan yang paling cepat dan benar mendapat 1 poin yang akan dikumpulkan untuk menilai siapa atau kelompok mana yang menang saat diadakan turnamen.

5. Penghargaan kelompok (team recognise)

Dosen kemudian mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing team akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan.

Pelaksanaan tindakan dilakukan dalam bentuk siklus. Tiap siklus dengan materi yang berbeda. Pada setiap akhir siklus dilakukan evaluasi terhadap kemampuan soft skill mahasiswa dengan cara mengamati saat proses perkuliahan berlangsung dilihat dari keaktifan dan kerjasama tiap kelompok setelah menggunakan pembelajaran kooperatif dengan tipe *Make A Match Tournament*.

Pengamatan/observasi

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Pengamatan selama pelaksanaan pembelajaran terhadap tiap kelompok mahasiswa fokus pada kemampuan soft skill mahasiswa yaitu: Pengamatan tentang keaktifan dan kerjasama mahasiswa.

Refleksi dan Evaluasi

Pada tahap refleksi dilakukan terhadap dua hal yaitu keaktifan dan kerjasama mahasiswa sebagai indikator dari kemampuan soft skill melalui observasi selama kegiatan perkuliahan dalam mata kuliah manajemen keuangan berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, akan diperoleh temuan tingkat keaktifan dan kerjasama mahasiswa setelah di berikan tindakan model pembelajaran kooperatif dengan tipe *Make A match Tournament*. Kemudian permasalahan yang muncul di lapangan dapat dijadikan sebagai dasar melakukan perencanaan ulang untuk penyempurnaan, merevisi rancangan yang akan dilaksanakan pada tindakan selanjutnya agar mencapai hasil yang optimal.

Kriteria Keberhasilan Tindakan

Kriteria merupakan patokan untuk menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Dalam penelitian ini indikator yang dicapai, dapat dilihat dari pencapaian poin-poin yang tertera dalam keaktifan dan kerjasama. Pada bagian keaktifan indikator keberhasilan terlihat jika siswa dapat: mengajukan pertanyaan, memberi jawaban/pendapat, menanggapi pendapat orang lain. Adapun indikator pada bagian kerjasama yaitu: keikutsertaan melaksanakan tugas kelompok, keikutsertaan memecahkan masalah, kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok. Keberhasilan tindakan jika ketercapaian indikator yang digunakan minimal mencapai 70%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian Pada Siklus I

Siklus 1 dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan dengan materi tentang Sekuritas derivatif. Dalam pertemuan ini, kegiatan pembelajaran lebih diorientasikan pada keaktifan dan kerjasama mahasiswa dalam belajar sebagai indikator dari kemampuan soft skill mahasiswa. Pelaksanaan tindakan merupakan penerapan rancangan yang telah dibuat. Selama

pelaksanaan tindakan, peneliti melaksanakan observasi dengan mencatat apa saja yang diamati saat proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan poin-poin yang telah termuat dalam lembar observasi.

Pada pertemuan pertama pelaksanaan model pembelajaran yang dipilih adalah model kooperatif tipe make a math tournament. Dosen membuka pelajaran dengan menggunakan apersepsi sesuai dengan bahan inti dengan tujuan agar mendapat respon dari siswa. Materi yang disajikan pada pertemuan pertama tentang sekuritas derivatif. Sebelum dosen menyampaikan tujuan pembelajaran, terlebih dahulu menjelaskan kepada mahasiswa tentang model pembelajaran yang akan diterapkan. Kemudian menyampaikan tata cara mahasiswa melakukan kegiatan dalam pembelajaran tersebut.

Agar mahasiswa tertarik dengan model pembelajaran yang dilaksanakan, dosen menyampaikan makna dari penerapan model pembelajaran kooperatif make a math tournament. Selanjutnya dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami mengenai model pembelajaran yang akan dilaksanakan.

Pada kegiatan inti, dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas dan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa. Dosen membagi mahasiswa menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 10 mahasiswa dengan kemampuan akademik yang heterogen. Setelah itu, dosen membagikan tugas kepada masing-masing kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berpasangan kemudian membuat 5 pertanyaan dan jawabannya dalam kartu yang sudah disediakan. Setiap pasangan dalam masing-masing kelompok membuat satu pertanyaan dan satu jawabannya, dan dipersilakan untuk saling diskusi agar pertanyaan tidak sama. Dosen memberikan waktu 20 menit kepada mahasiswa untuk bekerja secara berkelompok. Sebelum membuat pertanyaan mahasiswa diperbolehkan

saling bertukar pendapat, saling bertanya, dan saling memberikan jawaban untuk lebih memahami materi, karena nanti akan diadakan sesi tanya jawab antar kelompok.

Setelah selesai kartu jawaban disimpan di kursi yang sudah disediakan didepan kelompok masing-masing. Setelah selesai setiap kelompok bergiliran untuk mengajukan pertanyaan, dan yang boleh menjawab adalah empat kelompok lainnya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Kelompok yang paling cepat mengangkat tangan mendapat giliran pertama untuk menjawab. Jika pertanyaan tidak terjawab oleh kelompok yang pertama maka dilempar pada kelompok berikutnya. Jika pertanyaan terjawab dengan benar maka kelompok yang memegang kartu jawaban (kelompok penanya) dipersilahkan maju dan memberikan kartu jawaban pada kelompok yang menjawab benar. Begitu seterusnya bergiliran sampai semua kelompok kebagian untuk mengajukan pertanyaan.

Selanjutnya dosen bersama mahasiswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung, merangkum materi pelajaran dan dosen memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswa. Beberapa mahasiswa menanyakan jawaban kartu soal yang tidak terjawab oleh mahasiswa. Pertanyaan dari mahasiswa dilempar lagi ke mahasiswa lain untuk menjawab. Jika tidak ada yang bisa menjawab atau jawabannya kurang tepat baru dosen menjelaskan secara klasikal. Setelah beberapa pertanyaan mahasiswa selesai dijelaskan, kemudian dosen menutup pelajaran dengan mengucapkan salam penutup.

Hasil Tindakan siklus 1

Pengamatan terhadap Keaktifan mahasiswa

Pada siklus I, mahasiswa terlihat cemas dan agak bingung karena belum terbiasa dengan model pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen. Beberapa mahasiswa cenderung bermain dan ngobrol dengan temannya pada saat diskusi berlangsung. Di samping itu, pada saat mulai melaksanakan diskusi kelompok, masih ada beberapa mahasiswa yang duduk

santai dan bekerja sendiri. Mahasiswa baru fokus setelah mendapat arahan dan peringatan dari dosen.

Hasil pengamatan terhadap keaktifan mahasiswa pada siklus I menunjukkan hasil yang bervariasi. Secara umum, mahasiswa sudah menunjukkan keaktifan seperti kegiatan bertanya, menjawab, memberikan tanggapan dan diskusi antar mahasiswa. Hanya saja keaktifan dan kerja sama mahasiswa belum merata jadi yang terlihat aktif masih tertumpu pada beberapa mahasiswa.

Pengamatan terhadap Kerjasama Siswa

Hasil pengamatan terhadap kerjasama mahasiswa pada siklus I menunjukkan hasil yang bervariasi sama halnya dengan keaktifan mahasiswa. Selain itu, dari aspek pengamatan menunjukkan belum tampak adanya aktivitas kerjasama mahasiswa yang saling mendukung diantara anggota kelompok. Dari hasil pengamatan kerjasama antara mahasiswa sudah terlihat, namun masih banyak mahasiswa yang asyik ngobrol dan bermain-main pada saat proses diskusi kelompok berlangsung. Dalam kegiatan kelompok, belum ada kekompakan dan kerjasama dalam mendiskusikan materi yang diberikan dosen, walaupun sudah nampak mahasiswa menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya namun masih berjalan sendiri-sendiri.

Refleksi dan Evaluasi Siklus 1

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match tournamen dalam meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa belum optimal, karena mahasiswa yang aktif dan melakukan kerjasama belum menyeluruh masih tertumpu pada beberapa mahasiswa saja. Dengan melihat pengamatan pada siklus I, maka diperlukan upaya perbaikan yang maksimal di Siklus II. Upaya perbaikan untuk meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa dengan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, aktif, menantang, kompetitif, tercipta kerjasama yang baik, dan menyenangkan.

Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Pada Siklus II

Pada siklus II masih dipilih model pembelajaran kooperatif tipe *make a match tournament*. Pembelajaran tindakan pada siklus II ini akan dilaksanakan pada materi Pasar Modal Indonesia. Pelaksanaan siklus II ini didasari hasil refleksi pada siklus sebelumnya yang menunjukkan belum tercapainya target atau standar minimal yang telah ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan yaitu 70% mahasiswa dalam keaktifan dan kerjasama.

Pembelajaran pada siklus II lebih difokuskan pada pemahaman mahasiswa mengenai Pasar Modal Indonesia. Dosen memulai pelajaran dengan melakukan apersepsi. Apersepsi dilakukan untuk menarik motivasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat kepada mahasiswa tentang materi yang akan diajarkan. Dosen memberikan penjelasan mengenai skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mahasiswa memperhatikan dan menyimak penyampaian materi dari dosen. Mahasiswa dibagi dalam 5 kelompok yang masing-masing beranggotakan 10 orang. Dosen memberikan waktu 20 menit kepada setiap kelompok untuk membahas dan saling bertanya mengenai materi yang diberikan dosen, dan materi yang ditemukan mahasiswa dari tugas yang diberikan sebelumnya.

Setelah itu dosen mempersilahkan setiap kelompok untuk berdiri berbaris ke belakang. Di hadapan barisan tiap-tiap kelompok ada kursi yang di atasnya sudah tersedia kartu soal dan kartu jawaban. Setiap mahasiswa dari tiap kelompok maju ke depan untuk mencari jawaban yang benar dan ditempelkan di white board. Jika anggota pertama sudah menemukan jawaban dan menempelkannya maka langsung pindah posisi yang tadinya berdiri paling depan menjadi berdiri paling belakang, dan begitu seterusnya sampai ada satu kelompok yang berhasil menempel kartu soal dan kartu jawaban sampai no 10, maka *make a match tournament* harus berhenti. Semua mahasiswa kembali berdiri dibarisan kelompoknya. Kemudian dosen memeriksa kartu soal dan jawabannya apakah mahasiswa benar atau tidak

dalam memasangkannya. Jika kartu soal dan kartu jawaban dipasangkan dengan benar maka mendapat angka 1 poin kemudian diurut berdasarkan poin perolehan dan ditentukan kelompok mana yang menjadi juara satu sampai seterusnya.

Pada bagian penutup dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Setelah tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, kemudian dosen memotivasi mahasiswa untuk lebih giat dalam proses pembelajaran dan menyelesaikan tugasnya pada pertemuan berikutnya.

Hasil Tindakan pada Siklus II

Pengamatan terhadap Keaktifan Mahasiswa

Pada siklus II mahasiswa tampak lebih antusias dibanding sebelumnya. Mereka juga terlihat lebih aktif dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan soft skill mahasiswa cenderung mengalami kenaikan dibanding sebelumnya. Dari pengamatan, tampak bahwa mahasiswa terlibat lebih aktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dosen. Pada siklus II tidak terlihat mahasiswa yang duduk santai atau ngorol dengan teman lainnya. Bahkan, dalam kegiatan pembelajaran, gangguan yang ditimbulkan oleh mahasiswa dapat dikatakan minim. Kenyataan ini lebih dikarenakan oleh tanggungjawab mahasiswa dalam melakukan diskusi kelompok.

Dari hasil pengamatan terhadap keaktifan mahasiswa, secara umum mahasiswa tampak lebih aktif mengikuti pembelajaran dibandingkan pada siklus I. Pada keaktifan memberikan ide/pendapat antar siswa dalam kelompoknya masing-masing terlihat mulai menunjukkan hasil. Mereka terlihat aktif dalam mengemukakan gagasan masing-masing terkait dengan permasalahan yang diberikan.

Pada siklus II, sebagian besar mahasiswa telah mampu menerima pendapat orang lain dalam aktifitas pembelajaran. Keberterimaan terhadap pendapat orang lain terlihat pada

konteks belajar kelompok. Antar mahasiswa, baik pada saat mendiskusikan permasalahan maupun saat mempresentasikan hasil diskusi terlihat antusias mendengarkan. Tidak ada saling hujat pendapat ataupun merendahkan pendapat satu sama lain. Justru sebaliknya, kekurangan yang ada dari masing-masing kelompok mampu dilengkapi dengan jawaban ataupun tanggapan yang dikemukakan oleh mahasiswa lainnya. Terlihat di sini bahwa aktifitas pembelajaran terlihat lebih hidup dan bermakna. Mahasiswa di samping belajar manajemen keuangan, disatu sisi telah belajar untuk menghormati orang lain, bekerjasama dan bermasyarakat..

Di samping itu pada siklus II mahasiswa juga telah mampu menanggapi pendapat orang lain dengan sopan. Setiap jawaban yang muncul, baik dalam kelompok masing-masing maupun kelompok besar, dapat ditanggapi secara arif dengan dipandu oleh dosen. Dalam hal ini, mahasiswa juga diajarkan untuk dapat mengendalikan emosi dan egoisme dalam berhadapan dengan orang lain.

Dari sisi pelaksanaan tugas, dari hasil pengamatan, para mahasiswa telah mampu melaksanakan tugas yang diberikan pada masing-masing kelompok. Dari pengamatan, terlihat bahwa mahasiswa sangat antusias untuk mengerjakan tugas. Berbagai pendapat yang muncul pada setiap anggota kelompok, menunjukkan bahwa mereka serius dengan tugas yang dihadapi. Memang sesekali terlihat ada beberapa mahasiswa yang menanggapi secara sepintas, akan tetapi secara keseluruhan mereka boleh dikatakan aktif memecahkan permasalahan.

Pengamatan terhadap Kerjasama Mahasiswa

Mahasiswa juga telah menunjukkan jiwa saling bantu. Mereka mampu menunjukkan kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok. Setiap permasalahan sulit yang diberikan oleh dosen, berusaha dipecahkan bersama-sama. Dosen dalam hal ini telah

berusaha memberikan cara-cara praktis untuk memberikan solusi atas kesulitan permasalahan soal.

Dengan model dan teknik ini, kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam proses pembelajaran akan dapat teratasi dengan baik. Munculnya pola dan budaya diskusi akan membuat ruang dan wacana mahasiswa untuk saling menggali kemampuan dan kepandaian masing-masing sehingga dapat ditularkan pada mahasiswa lain yang mempunyai kesulitan belajar. Kegiatan diskusi semacam ini juga menumbuhkan jiwa kepedulian yang tinggi akan kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Terutama bagi mereka yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata akan terbantu dengan adanya pola diskusi ini.

Evaluasi dan Refleksi Pada siklus II

Pelaksanaan siklus II difokuskan agar mahasiswa dapat memahami tentang Pasar Modal Indonesia. Kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran menggunakan *make a machth tournamet* pada siklus II dikatakan berjalan dengan optimal. Kenyataan ini terlihat pada keaktifan dan kerjasama mahasiswa sebagai indikator kemampuan soft skill dalam mengikuti pembelajaran.

Secara keseluruhan, kemampuan soft skill mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada siklus II terlihat meningkat (lihat lampiran 3). Kemampuan soft skill mahasiswa dengan indikator keaktifan dan kerjasama dalam pembelajaran dapat lebih berkembang dibandingkan dengan tindakan pada siklus I.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Model pembelajaran kooperatif tipe *make a machth tournament* memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk berperan aktif untuk lebih mendalami materi perkuliahan dengan berdiskusi dan kerjasama. Kerjasama mahasiswa lebih terlihat pada saat dosen memberikan evaluasi dengan cara memberikan tantangan kepada seluruh mahasiswa untuk

bersaing mencari jawaban yang cepat dan tepat pada setiap pertanyaan yang diajukan. Hal tersebut untuk meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa yang dilihat dari indikator keaktifan dan kerjasama. Dari pengamatan peneliti selama melakukan tindakan kelas mahasiswa tidak pasif menerima pelajaran searah dari dosen tetapi secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar.

Model pembelajaran kooperatif tipe make a math tournament yang digunakan pada kelas eksperimen memberikan pengaruh, sehingga model ini efektif digunakan pada mata kuliah manajemen keuangan. Tetapi peneliti tidak bisa membuat generalisasi bahwa model ini efektif untuk semua pokok bahasan materi dalam mata kuliah manajemen keuangan, tetapi harus melihat karakteristik dari materi. Setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a math tournament ternyata mahasiswa merasa tertarik karena bagi mereka pembelajarannya menyenangkan. Disamping menyenangkan dengan adanya proses perkuliahan seperti ini menjadi semakin termotivasi untuk bersaing diantara kelompok kerja sehingga membawa mahasiswa untuk aktif bertanya dan bekerja secara bersama-sama.

Mata kuliah manajemen keuangan pokok bahasan sekuritas derivatif dan pasar modal indonesia dirasa oleh mahasiswa sangat menyenangkan, karena materi berupa teori yang biasanya disampaikan secara monoton. Sementara dengan penerapan model kooperatif tipe make a math tournament membuat mahasiswa aktif, mau bekerjasama, pada akhirnya kemampuan soft skill mahasiswa meningkat, dan mahasiswa mengharapkan adanya penerapan model pembelajaran lain yang bisa membuat proses perkuliahan menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Model pembelajaran kooperatif tipe make a math tournament yaitu model pembelajaran yang menyenangkan bagi para mahasiswa, serta adanya peran tutor teman sebaya, sehingga mahasiswa merasa nyaman untuk menanyakan hal yang tidak dipahami kepada teman sekelompoknya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Jarolimek dan Parker

(1993) dalam Isjoni (2010:36), bahwa keunggulan yang diperoleh dalam pembelajaran kooperatif adalah: saling ketergantungan yang positif, adanya pengakuan dalam respon perbedaan individu, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan, terjadinya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru, dan memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman yang menyenangkan.

Keberhasilan proses belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a math tournament dapat dilihat dari peningkatan kemampuan soft skill mahasiswa setelah dilakukan tindakan kelas. Apabila kemampuan soft skill mahasiswa sesudah pemberian tindakan lebih baik daripada kemampuan soft skill mahasiswa sebelum pemberian tindakan maka dapat dikatakan proses pembelajaran sudah berhasil, namun bila sebaliknya, kemampuan soft skill mahasiswa sesudah pemberian tindakan lebih buruk daripada kemampuan soft skill mahasiswa sebelumnya pemberian tindakan maka dapat dikatakan belum berhasil.

Perbedaan peningkatan kemampuan soft skill mahasiswa sebelum dan sesudah diberi tindakan dapat terlihat dari keaktifan dan kerjasama mahasiswa dari hasil observasi. Sebelum adanya perlakuan, kemampuan soft skill mahasiswa sekitar 31%. Sementara setelah adanya tindakan pada siklus I yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe make a math tournament kemampuan soft skill mahasiswa meningkat menjadi sebanyak 62%. Dari data juga terlihat adanya peningkatan yang cukup menggembirakan karena setelah dilakukan tindakan lagi pada siklus II kemampuan soft skill mahasiswa meningkat yang tadinya dari siklus I sebesar 62% pada siklus II meningkat menjadi 77%.

Berdasarkan hipotesis tindakan yang diajukan “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Math Tournaement dapat meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa”, dinyatakan hipotesis diterima. Sehingga hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk

berpendapat bahwa model pembelajaran kooperatif tipe make a math tournament dapat meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil observasi tampak bahwa kemampuan soft skill mahasiswa setelah diberikan tindakan meningkat dari setiap siklusnya. Hasil refleksi dan evaluasi menunjukkan indikator keberhasilan mahasiswa sudah terpenuhi dari seluruh indikator yang diajukan. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a math tournament dapat meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa. Dari hasil analisis dan refleksi terhadap setiap siklus, diperoleh pengetahuan bahwa untuk meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa perlu didukung oleh beberapa aspek diantaranya model dan metode yang tepat.

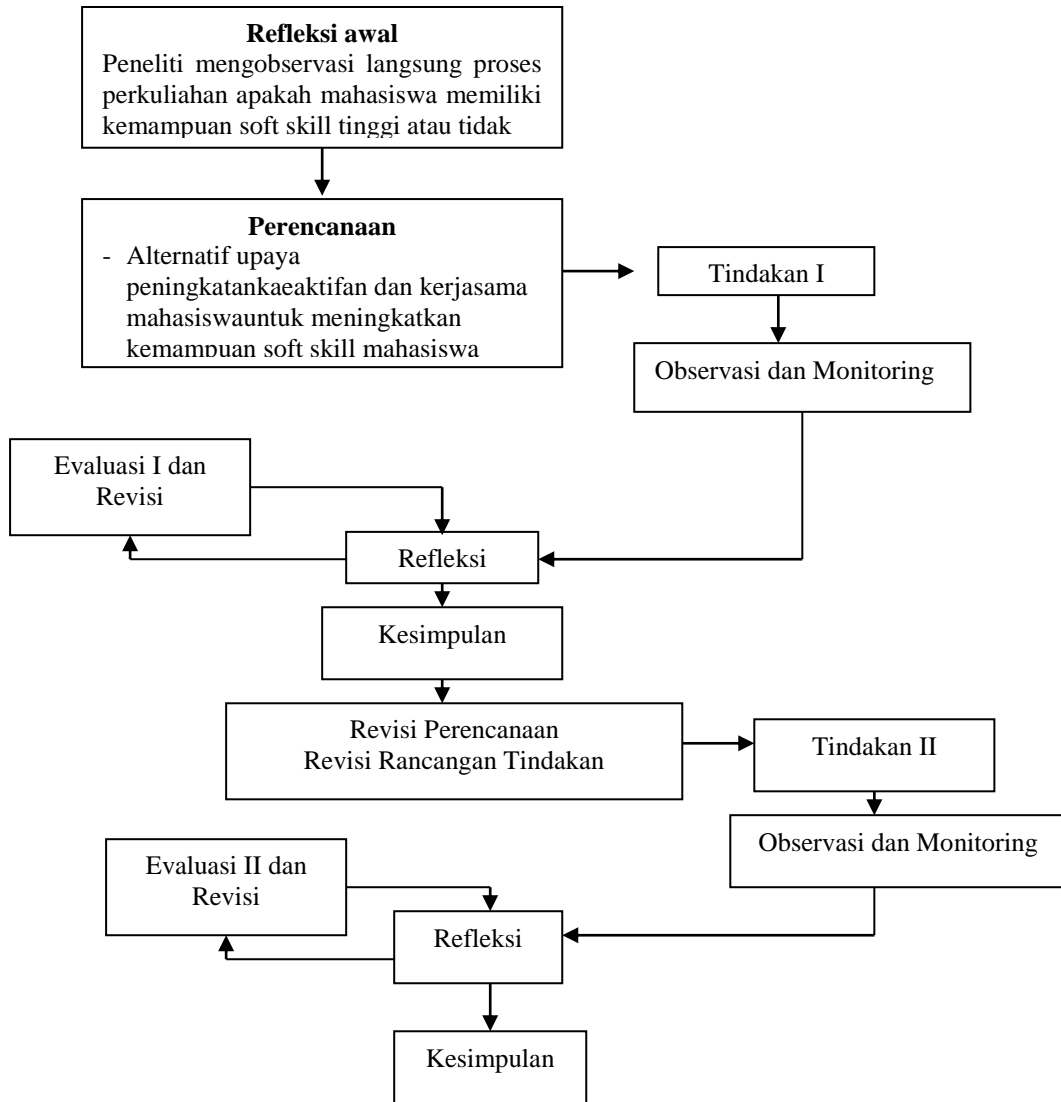
Saran

Dari hasil penemuan di lapangan diharapkan dosen atau para pendidik mencoba menerapkan model pembelajaran kooperatif learning tipe make a math dalam proses pembelajarannya. Mengembangkan model-model pembelajaran selain model yang sekarang diterapkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan efektif sehingga kualitas pembelajaran meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa. Menumbuhkan motivasi dalam diri dosen untuk menerapkan model pembelajaran yang variatif dan menghilangkan anggapan bahwa menerapkan suatu model pembelajaran sulit dan merepotkan. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran yang lain dan bisa menemukan model mana yang paling sesuai dengan karakteristik materi manajemen keuangan, karena belum tentu semua model pembelajaran cocok untuk semua materi manajemen keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Suprijono. (2011). *Cooperative Learning:Teori & Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anita Lie. (2005). *Cooperative Learning, Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas*. Jakarta: Grasindo
- Anita Lie. (2008). *Cooperative Learning*. Jakarta: Grasindo
- Benny A. Pribadi. (2010). *Model Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Dian Rakyat
- Dimiyati dan Mudjiono (2009) *Belajar dan Pembelajaran*:Jakarta:Rineka Cipta
- Ibrahim, *et al.* (2002). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung : Jurusan Kurikulum Teknologi Pendidikan FIP UPI
- Isjoni.(2011). *Cooperative Learning, Efektifitas Pembelajaran Kelompok*. Bandung : Alfabeta.
- Johnson D.W., R.T. Johnson, and E. Holubec. (2010). *Colaborative Learning*. Bandung: Nusa Media.
- Larana Curran (1994). *Teknik Mengembangkan Mencari Pasangan (Make A Match)*
- M Kardi dan Nur. (2000). *Pengajaran Langsung*. Surabaya: University Press
- Nur, M. dan Wikandari. (2000). *Pengajaran Berpusat kepada Siswa dan Pendekatan Konatruktivis d dalam Pengajaran*. Surabaya: PSMS Program Pascasarjana Unesa
- Rochiati Wiriaatmaja(2008) *Metode Penelitian Tindakan Kelas Untuk meningkatkan kinerja Guru dan Dosen*.Bandung:ROSDA
- Slavin, R.E. (2009). *Cooperative Learning*. Bandung: Nusa Media.
- Suharsimi Arikunto. 2000). *Penelitian Tindakan Kelas*:Jakarta:Rineka Cipta
- Trianto. (2007). *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Wahab, A.A. (2008). *Metode dan Model-Model Mengajar*. Bandung : AlfaBeta.
- Wijaya dan Dedi.(2012) *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas*.Jakarta:PT.Indeks

Lampiran 1



Gambar: 1
Prosedur Penelitian Tindakan
Sumber Kemmis (Widihastrini, 1999)

Lampiran 2

**LEMBAR PEDOMAN PENILAIAN KEMAMPUAN SOFT SKILL MAHASISWA
DEMGAN INDIKATOR KEAKTIFAN DAN KERJASAMA MAHASISWA
DENGAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF
TIPE MAKE A MACTH TOURNAMENT**

Nama Universitas :
 Program Studi :
 Mata Kuliah :
 Pokok Bahasan :
 Siklus :
 Hari/Tanggal :

Catatan :

- A. Mengajukan pertanyaan
- B. Memberikan jawaban
- C. Menanggapi pendapat orang lain
- D. Keikutsertaan melaksanakan tugas kelompok
- E. Keikutsertaan dalam memecahkan masalah
- F. Kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok

No	Nama Siswa	Keaktifan				Kerjasama				Jumlah Skor
		A	B	C	Skor	D	E	F	Skor	

Lampiran 3
DATA HASIL OBSERVASI KEMAMPUAN SOFT SKILL MAHASISWA
DENGAN INDIKATOR KEAKTIFAN DAN KERJASAMA MAHASISWA
DENGAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF
TIPE MAKE A MACTH TOURNAMENT

Nama Universitas : Universita Pendidikan Indonesia (UPI)
 Program Studi : Pendidikan Akuntansi
 Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
 Pokok Bahasan : : Sekuritas Derivatif, Pasar modal Indonesia
 Siklus : 1 dan 2
 Hari/Tanggal : Selasa 5 Maret 2013 dan Selasa 21 Mei 2013

Catatan :

- A. Mengajukan pertanyaan
- B. Memberikan jawaban
- C. Menanggapi pendapat orang lain
- D. Keikutsertaan melaksanakan tugas kelompok
- E. Keikutsertaan dalam memecahkan masalah
- F. Kepedulian terhadap kesulitan sesama anggota kelompok

Tahapan	Keaktifan				Kerjasama				Total Skor
	A	B	C	Skor	D	E	F	Skor	
Sebelum PTK	15	20	13	16%	18	17	10	15%	31%
SIKLUS I	32	34	26	30,67%	32	44	18	31'33%	62%
SIKLUS II	40	45	32	39%	40	50	24	38%	77%

Lampiran 4
DOKUMENTASI PTK PADA MATA KULIAH MANAJEMEN KEUANGAN DENGAN
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF LEARNING
TIFE MAKE A MACTH TOURNAMENT

DOKUMENTASI PELAKSANAAN SIKLUS 1



Lampiran 5
DOKUMENTASI PTK PADA MATA KULIAH MANAJEMEN KEUANGAN DENGAN
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF LEARNING
TIFE MAKE A MACTH TOURNAMENT

DOKUMENTASI PELAKSANAAN SIKLUS 2



Studi atas Penerapan Metoda Konvensional dan Metoda Berbasis Matematika dalam Pembelajaran Akuntansi Pengantar terhadap Pemahaman Siswa

PIGO NAULI

YULIANSYAH

DWIYANA NURUL FAJAR

Universitas Lampung

Abstract: *The objective of this study are (1) to compare students comprehension in Accounting Principle learning process using two different method; mathematics-based method and conventional method, (2) to find an empirical evidence whether an alternatives mathematics-based method is eligible to be implemented in accounting learning.*

This study is a quasi-experimental research with non-equivalent control group design. The subject of this research is high school student. The participant in total 60 students comes from BPK Penabur Senior High School as a control group, and Perintis 2 Senior High School Bandarlampung as an experiment group.

The independent t-test result shows that student learning achievement using mathematics-based method is statistically equal with conventional method in both competencies; debit or credit positioning and transaction analyzing. The equality of learning achievement in both group shows that mathematics-based method is eligible to be implemented in accounting learning process. The independent t-test result shows that student learning achievement using mathematics-based method is statistically equal with conventional method in both competencies; debit or credit positioning and transaction analyzing. The equality of learning achievement in both group shows that mathematics-based method is eligible to be implemented in accounting learning process.

Keywords: *Accounting Principles, Conventional Based Method, Mathematics Based Method, Learning Achievement.*

PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan salah satu ilmu terapan yang dipergunakan dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu jurusan akuntansi dipandang sebagai jurusan yang dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja baik pada level SMK maupun perguruan tinggi. Untuk menjamin keberhasilan pembelajaran akuntansi, terdapat berbagai faktor yang berpengaruh seperti metoda pembelajaran yang digunakan, kurikulum, alat pembelajaran dan sebagainya. Penelitian ini akan memfokuskan pada faktor metoda pembelajaran sebagai salah satu elemen penting dalam proses belajar mengajar.

Pemerhati akuntansi dari berbagai negara di dunia telah memberikan perhatian dan evaluasi mengenai proses pembelajaran akuntansi diantaranya adalah Diller (2004) mengungkapkan bahwa kurikulum akuntansi yang lama cenderung menekankan pada aspek penghapalan dan mekanisme pencatatan saja, sehingga tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai lingkungan akuntansi yang sesungguhnya. Selain itu, Sangster *et al.* (2007) menyoroti tentang pembelajaran akuntansi yang tidak mampu mendorong mahasiswa untuk menghubungkan proses pembelajaran dengan praktik riil di lapangan. Di dukung pula oleh penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran akuntansi tidak mampu menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai dalam dunia praktik (Patten *et al.* 1990; Pincus, 1997). Berbagai temuan di atas mengerucut pada satu kesimpulan bahwa diperlukan perubahan dalam disain, metoda, dan kurikulum pembelajaran akuntansi untuk mengatasi permasalahan di atas (Saudagaran, 1996; Rankin *et al.* 2003).

Kesulitan dalam memahami akuntansi di kalangan pelajar terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara rasionalitas akuntansi yang ditawarkan oleh pengajar dengan rasionalitas pelajar. Konsep dasar akuntansi yang digambarkan melalui persamaan dasar akuntansi konvensional sulit diterima secara logika, terutama bagi mereka yang belum

memiliki pemahaman mengenai akuntansi. Untuk itu, diperlukan metoda pembelajaran baru untuk menggantikan metoda konvensional yang selama ini dianggap hanya menceritakan hal-hal yang diatur dalam standar (Warsono, 2010; 10).

Pernyataan di atas sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang dapat mengkonfirmasi gagasan tersebut. Penelitian sebelumnya tentang metoda pembelajaran akuntansi berbasis matematika telah dilakukan oleh Nauli (2011) dengan cara membandingkan prestasi kelompok mahasiswa yang menggunakan metoda konvensional dengan kelompok mahasiswa yang menggunakan metoda berbasis matematika. Penelitian sebelumnya menggunakan metoda eksperimental kuasi. Hasil penelitian menunjukkan fakta menarik, metoda akuntansi berbasis matematika terbukti dapat memberikan peningkatan yang signifikan terhadap prestasi mahasiswa dibandingkan metoda akuntansi konvensional. Akan tetapi, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah pada tingkat universitas, hasil penelitian tidak dapat di-generalisir dikarenakan setiap perguruan tinggi memiliki standar pengajaran serta kualitas input yang berbeda. Dalam penelitian sebelumnya, subjek penelitian adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta yang merupakan universitas favorit dengan kualitas mahasiswa terbaik di Indonesia, bisa jadi hasil penelitian akan berbeda jika membandingkan dengan universitas non favorit. Sedangkan keterbatasan untuk dapat di-generalisir pada level SMA/SMK dikarenakan karakteristik pengajaran yang berbeda antara siswa dengan mahasiswa. Sistem pengajaran di level SMA/SMK mengedepankan pada pembangunan pemahaman siswa melalui pendekatan yang mudah namun tetap terperinci, sebaliknya sistem pengajaran di level mahasiswa mengedepankan kemandirian melalui *self-learning*. Standar pengajaran yang berbeda inilah yang membuat hasil penelitian tidak dapat di-generalisir.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengembangkan penelitian Nauli (2011) pada level SMA/SMK. Penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi dan membuktikan secara empiris bahwa metoda pembelajaran akuntansi berbasis matematika dapat diterapkan pada berbagi level khususnya SMA/SMK. Dalam penelitian ini, dikembangkan metoda pembelajaran matematika yang berbasis IT dengan penggunaan aplikasi *Adobe Flashplayer Presentation*. Pembelajaran berbasis IT dipilih karenamenurut Allen & Seaman (2006)

“...to enhance student learning experiences instructors must create interactive learning enviroments that support multimedia presentation...”.

Penelitian ini menggunakan metoda penelitian eksperimen. Peneliti ingin menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat yang terjadi dalam *treatment group* dan membandingkan hasil perlakuan dengan *control group* secara ketat (Nazir, 2003;73). Jenis penelitian eksperimen sengaja dipilih untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi dan memanipulasi variabel serta objek penelitian.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis yakni dapat menghubungkan ilmu matematika dengan ilmu akuntansi yang belum pernah mendapat perhatian serius sebelumnya atau disebut *Novel Study*, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan akuntansi pendidikan.

Manfaat praktis yaitu, temuan ini memberikan manfaat bagi tenaga pendidik tingkat SMA/SMK se-Indonesia bahwa terdapat metoda alternatif yang bisa digunakan selain meode konvensional dalam meningkatkan prestasi siswa didik pada pembelajaran akuntansi yaitu metoda berbasis matematika.

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Pembelajaran adalah proses yang melibatkan interaksi manusia baik terhadap dirinya sendirinya ataupun terhadap orang lain, oleh karena itu beberapa teori tentang pembelajaran sangat erat hubungannya dengan ilmu psikologi. Teori belajar yang dihasilkan melalui perspektif psikologi salah satunya adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme dikembangkan oleh Piaget pada pertengahan abad 20 (Sanjaya,2009:123). Konstruktivisme sangat berpengaruh di bidang pendidikan, dan telah memunculkan metoda dan strategi mengajar baru (Muijs & Reynolds, 2011:95). Innes (2004:1) mengungkapkan bahwa *“Constructivist views of learning include a range of theories that share the general perspective that knowledge is constructed by learners rather than transmitted to learners”*.

Konstruktivisme meyakini proses belajar mencakup proses pengetahuan yang lebih mendalam ketimbang menghafalkan materi (Brown & Campione,1996).

Pendekatan konstruktivisme dirasa lebih tepat dalam pembelajaran akuntansi, mengingat ilmu akuntansi bukan hanya mengandalkan penerapan prinsip dasar, tetapi juga membangun logika berfikir siswa untuk dapat menerjemahkan dan merekam realita transaksi bisnis kedalam bahasa akuntansi mulai dari penjurnalan hingga penyusunan laporan keuangan.

Penelitian selama ini telah mengungkapkan bahwa penerapan metoda konvensional dalam pembelajaran akuntansi lebih mengandalkan pada proses penghapalan sehingga kemampuan mahasiswa tidak berkembang dalam menganalisis berbagai macam transaksi (Ingram 1998; Diller 2004). Di sisi lain, Sangster *et al.* (2007) juga menyoroti tentang pembelajaran akuntansi metoda konvensional yang tidak mampu mendorong mahasiswa untuk menghubungkan proses pembelajaran dengan praktik riil di lapangan. Fakta tersebut sangat disayangkan, sehingga peneliti meyakini bahwa diperlukan adanya pengembangan metoda

pembelajaran akuntansi terbaru yang berlandaskan teori konstruktivisme. Salah satu metoda yang dapat dijadikan alternatif adalah metoda pembelajaran akuntansi berbasis matematika.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat tema-tema yang sangat diperdebatkan dalam pembelajaran akuntansi. Semua perdebatan tersebut mengarah pada satu kesimpulan bahwa pembelajaran akuntansi saat ini perlu dievaluasi. Alasannya, karena sejauh ini belum dapat ditemukan metoda pembelajaran akuntansi yang secara akademis dianggap efektif. Warsono (2009) mengungkapkan bahwa metoda yang diterapkan tidak tepat sehingga menyebabkan siswa tidak mampu menguasai secara benar, kemudian materi akuntansi yang diajarkan tidak mudah dipahami oleh rasionalitas siswa karena adanya ketidaksesuaian antara rasionalitas akuntansi yang ditawarkan oleh tenaga pendidik dengan rasionalitas pelajar (Warsono, 2010: 8).

Menurut Suwardjono (2002) akuntansi bukan suatu pelajaran yang sulit tetapi juga bukan pelajaran yang cepat tangkas. Akuntansi merupakan pelajaran yang menuntut penalaran dan pemahamannya. Karena menuntut penalaran, maka akuntansi berkaitan erat dengan rasionalitas dan cara berfikir seseorang. Siswa SMK kelas X yang baru mempelajari akuntansi cenderung berfikir lebih kritis terhadap materi akuntansi yang diberikan. Orang yang berfikir kritis secara tidak sadar akan menolak materi yang disajikan tanpa nalar. Seperti kita ketahui, materi akuntansi lebih didasarkan pada peraturan yang berlaku secara umum bukan berdasarkan pada penalaran yang dapat diterima oleh akal pelajar. Oleh karena itu, sebagian besar pelajar mengalami kesulitan dalam menerima rasionalitas akuntansi. Rasionalisasi atau penalaran yang dimaksud adalah bagaimana siswa mampu memahami mekanisme debit dan kredit secara tepat dalam menganalisis transaksi dan mencatat ke dalam jurnal. Kesulitan tersebut pada akhirnya berdampak pada ketidakmampuan siswa dalam menguasai materi akuntansi pengantar.

Pemahaman mengenai debit dan kredit merupakan hal yang penting dalam mempelajari akuntansi, pemahaman ini dapat dicapai melalui pengenalan terhadap persamaan dasar akuntansi. Buku literatur yang digunakan dalam pembelajaran akuntansi untuk tingkat SMK kebanyakan tidak menjabarkan darimana persamaan akuntansi itu berasal, melainkan langsung memberikan model persamaan dasar akuntansi dan memberikan contoh aplikasinya terhadap pencatatan transaksi keuangan. Hal ini dikhawatirkan akan membuat para siswa hanya menghafal tanpa mengetahui prinsip akuntansi yang digambarkan dalam persamaan dasar. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan prinsip dasar pencatatan akuntansi yaitu *double entry bookkeeping* atau yang dikenal dengan model pembukuan berpasangan. Prinsip yang dimaksud adalah jika kita memasukan entri di debit maka kita juga harus memasukan entri di sisi kredit sebagai penyeimbangnya. Dalam menjelaskan prinsip ini, pengajar dituntut untuk dapat memberikan penalaran yang tepat, sehingga siswa dapat memahami prinsip tersebut sebagai konsep dan bukan hanya sebagai peraturan yang harus dipatuhi tanpa alasan yang jelas. Apabila pengajar hanya memperkenalkan model persamaan dasar akuntansi dan kemudian langsung mendemonstrasikan pengaruh transaksi terhadap persamaan tersebut, dikhawatirkan siswa akan menghafal akibat dari setiap transaksi terhadap persamaan dasar tanpa memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada ketiga elemen persamaan tersebut (aset, utang dan ekuitas).

2.1 Dekripsi Variabel

2.1.1 Metoda Pembelajaran

Metoda adalah seperangkat langkah yang tersusun secara sistematis. Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar sebagai bahan kajian (Poedjiadi, 2005:75). Metoda pembelajaran berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat

digunakan untuk keefektifan pencapaian tujuan (Morrison *et al*, 2004:67). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metoda pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Metoda Pembelajaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah metoda pembelajaran akuntansi konvensional dan metoda pembelajaran akuntansi berbasis matematika.

2.1.2 Pemahaman

Pemahaman diartikan dengan apresiasi, ingatan, keindahan, kesadaran, kognisi, pengetahuan, pengertian, signifikasi, wawasan, interpretasi, konstruksi, pembacaan, penafsiran, penangkapan, dan resensi (Endarmoko,2006). Sedangkan menurut Peter dkk (2002) Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap arti dan informasi yang diterima, selain itu pemahaman dimaknai dengan proses, perbuatan, atau cara memahami, atau memahamkan. Dapat diartikan bahwa pemahaman adalah mencoba menangkap makna sedalam-dalamnya dan dengan tepat mengenai apa yang ingin disampaikan oleh orang lain (*understanding*).

Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian adalah bahwa peneliti ingin mengukur dan membandingkan tingkat perbedaan pemahaman siswa melalui rata-rata nilai yang diperoleh.

2.2 Metoda pembelajaran akuntansi konvensional

Sebagian buku teks akuntansi yang digunakan di tingkat SMK merumuskan persamaan dasar akuntansi sebagai “Aset = Utang + Ekuitas”. Argumen yang mendasari persamaan diatas adalah bahwa aset merupakan sumberdaya (*resources*) perusahaan sedangkan utang dan ekuitas merupakan sumber pendanaan (*source of fund*) atas aset tersebut. Sebagian buku teks akuntansi lainnya menggunakan persamaan akuntansi ekstensi yang merupakan perluasan

dari persamaan sebelumnya yaitu “Aset = Utang + Ekuitas + Pendapatan – Biaya – Distribusi Pemilik ”. Argumen yang mendasari persamaan tersebut adalah bahwa aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sedangkan utang dan ekuitas adalah sumber pendanaan atas aset tersebut. Pendapatan dan Biaya adalah bagian dari ekuitas, dimana pendapatan menambah ekuitas sedangkan biaya dan distribusi pemilik mengurangi ekuitas. Rasionalitas konvensional persamaan akuntansi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Persamaan 1

$$\underbrace{\text{Aset}}_{\text{Sumber daya}} = \underbrace{\text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}}_{\text{Sumber pendanaan}}$$

Persamaan 2 (perluasan dari persamaan 1)

$$\underbrace{\text{Aset}}_{\text{Sumber daya}} = \underbrace{\text{Kewajiban} + \text{Ekuitas} + \text{Pendapatan} - \text{Biaya} - \text{Distribusi Pemilik}}_{\text{Sumber Pendanaan}}$$

Konsep persamaan akuntansi konvensional tidak membenarkan elemen biaya yang berada pada sisi kanan persamaan akuntansi dipindah ke sisi kiri, sebagai alasannya adalah bahwa berdasarkan pada prinsip kesatuan usaha atau entitas maka persamaan akuntansi merupakan persamaan khusus bukan persamaan matematika (Suwardjono, 2002). Prinsip kesatuan usaha yang dimaksud adalah bahwa perusahaan dianggap sebagai badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dananya dalam perusahaan tersebut (Nauli, 2011).

Dengan sudut pandang prinsip kesatuan usaha, maka secara konseptual ekuitas merupakan kewajiban perusahaan terhadap pemilik. Sehingga dampaknya adalah ketika perusahaan menyerahkan barang atau jasa, maka akan ada aliran kas (aset) yang masuk kepada perusahaan. Kas masuk itulah yang disebut dengan pendapatan. Tambahan aset inilah yang nanti akan dikembalikan kepada pemilik kalau perusahaan tidak diteruskan atau dilikuidasi (Suwardjono, 2002) dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan menambah ekuitas. Penalaran inipun berlaku untuk konsep biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa biaya mengurangi ekuitas. Berdasarkan uraian ini, maka persamaan dasar akuntansi tidak dapat dibolak-balik secara sembarangan karena pendapatan dan biaya merupakan komponen dari ekuitas.

2.3 Kesulitan dalam memahami rasionalisasi persamaan akuntansi konvensional

Persamaan dasar akuntansi metoda konvensional seringkali menimbulkan kesulitan di kalangan siswa, karena logika akuntansi sulit untuk diterima secara nalar. Dapat kita lihat pada ilustrasi soal berikut ini; pada tanggal 30 Januari perusahaan membayar biaya listrik bulan januari sebesar Rp.500.000, perubahan dalam persamaan akuntansi akan menjadi

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Aset} & = & \text{Utang} & + & \text{Ekuitas} & + & \text{Pendapatan} & - & \text{Biaya} & - & \text{Dis.Pemilik} \\ \hline \downarrow & & & & & & & & \downarrow & & \\ \text{Kas berkurang Rp.500.000} & & & & & & & & \text{Biaya Listrik Rp.500.000} & & \end{array}$$

Analisis transaksi diatas adalah, pembayaran biaya listrik menunjukkan adanya uang kas yang keluar atau berkurang, pengurangan uang kas akan dicatat sebagai penurunan nilai aset. Sedangkan untuk biaya listrik yang muncul menunjukkan penambahan terhadap elemen biaya, namun karena elemen biaya mengurangi ekuitas maka terjadinya biaya dicatat sebagai penurunan nilai biaya. Dengan cara berpikir seperti itu maka persamaan akuntansi tetap

terjaga. Jika persamaan dasar akuntansi konvensional ini yang dipakai, maka siswa yang baru belajar akuntansi akan sulit dalam melakukan penalaran atas proses konversi dari penambahan biaya menjadi pengurangan biaya setiap kali melakukan transaksi biaya, sehingga beresiko tinggi menyebabkan kesalahan (Warsono, 2010; Philips *et al.* 2009). Kesulitan dalam merasionalisasi persamaan tersebut memicu siswa untuk menghafal setiap terjadi transaksi biaya.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh pakar akuntansi menghasilkan usulan untuk melakukan perubahan terhadap metoda pembelajaran konvensional yang selama ini digunakan. Springer and Borthick (2004) mengungkapkan bahwa pembelajaran akuntansi yang menitikberatkan pada aspek hapalan dapat menyebabkan mahasiswa tidak mampu mengembangkan kompetensi yang sebenarnya dibutuhkan akuntansi. Diller (2004) juga mengungkapkan hal serupa bahwa kurikulum akuntansi yang lama cenderung menekankan pada aspek penghapalan dan mekanisme pencatatan saja, sehingga tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai lingkungan akuntansi yang sesungguhnya. Kritikan dan masukan dari pakar ini sebaiknya direspon dengan baik untuk kemajuan pengembangan pembelajaran akuntansi kedepan. Salah satu metoda pembelajaran yang menarik untuk dikaji dan dikembangkan yang diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah-masalah tersebut adalah pendekatan pembelajaran akuntansi berbasis matematika.

2.4 Metoda Pembelajaran Akuntansi Berbasis Matematika

Akuntansi berbasis matematika bukanlah konsep baru dalam pembelajaran akuntansi, karena akuntansi pertama kali disusun berdasarkan logika matematika sederhana yang dikodifikasi oleh seorang professor matematika, Luca Pacioli, dalam bukunya *Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita*. Akuntansi berlandas pada persamaan dasar akuntansi (PDA) yang terdiri dari tiga elemen, yaitu: aset, utang, dan ekuitas. Rasionalisasi

persamaan dasar akuntansi dapat dijelaskan dalam perspektif matematika dimana aset dan biaya mencerminkan jenis-jenis penggunaan dana (*use of fund*) berada di sisi kiri persamaan, sedangkan utang dan ekuitas mencerminkan sumber perolehan dana atau *source of fund* berada pada sisi kanan persamaan (Warsono, 2010:64). Perbedaan yang terdapat dalam perspektif matematika adalah bahwa elemen biaya dan distribusi pemilik tidak dipandang sebagai bagian dari ekuitas, melainkan merupakan elemen yang berdiri sendiri sebagai salah satu bentuk aktifitas penggunaan dana.

Rasionalitas persamaan akuntansi berbasis matematika dapat digambarkan sebagai berikut:

Persamaan 3 (Modifikasi dari persamaan 2 pada metoda konvensional)



$$\underbrace{\text{Aset} + \text{Biaya} + \text{Distribusi Pemilik}}_{\text{Penggunaan dana}} = \underbrace{\text{Kewajiban} + \text{Ekuitas} + \text{Pendapatan}}_{\text{Sumber Perolehan dana}}$$

Use of fund
Source of fund

Persamaan 3 tersebut adalah persamaan dasar berbasis matematika. Alasan utama mengapa elemen biaya dan distribusi pemilik dapat dipindahkan ke sisi kiri persamaan tersebut adalah bahwa elemen pendapatan dan biaya tidak dapat dipaksakan sebagai bagian dari elemen ekuitas (Warsono, 2010: 72). Pemindahan elemen biaya ke sisi kiri persamaan juga dibenarkan dalam kaidah persamaan matematika, karena tanda “negatif” di depan elemen biaya berubah menjadi tanda “positif” setelah menyeberangi tanda samadengan. Melalui pendekatan persamaan dasar akuntansi berbasis matematika rasionalitas siswa akan terbangun dengan sendirinya. Siswa dengan mudah memahami secara logis dalam menganalisis setiap transaksi yang terjadi sehingga mampu menempatkan akun-akun di debit dan kredit secara tepat. Pendekatan matematika ini dapat digunakan untuk menjawab soal

transaksi sebelumnya, yaitu pada tanggal 30 Januari perusahaan membayar biaya listrik bulan januari sebesar Rp.500.000. Perubahan di dalam persamaan dasar akuntansi akan menjadi seperti berikut:

$$\text{Aset} + \text{Distribusi pemilik} + \text{Biaya} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas} + \text{Pendapatan}$$

 Kas berkurang Rp.500.000	 Biaya bertambah Rp.500.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analisis transaksi diatas adalah, saat perusahaan membayar biaya listrik mencerminkan aktifitas penggunaan dana (*use of fund*) dimana uang kas secara tunai berkurang sebesar Rp.500.000 dan biaya listrik yang muncul mencerminkan penambahan aktifitas penggunaan dana pada elemen biaya, sehingga kemunculan biaya listrik dicatat sebagai kenaikan nilai biaya. Menurut peneliti, argumen ini lebih mudah untuk diterima oleh nalar siswa, namun untuk memperkuat pernyataan tersebut perlu dilakukan pengujian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Desain Eksperimen

Penelitian ini merupakan eksperimen lapangan dengan pendekatan kuasi-eksperimen. Pendekatan ini dipilih karena di dalam kondisi lapangan terkadang sulit untuk menerapkan kontrol yang cukup atas variabel luar atau perlakuan eksperimen seperti yang terdapat pada desain eksperimen sejati (Cooper and Schindler, 2006). Desain penelitian yang digunakan adalah desain kelompok kontrol tak-ekuivalen. Desain ini merupakan desain yang sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial karena suatu populasi terkadang sulit untuk dirandomisasi. Sedangkan menurut Campbell and Stanley (1963) desain ini muncul karena

“for psychological reason it is difficult to give up knowing for sure that the experimental and control group were equal before the differential experimental treatment”.

Desain ini digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc} R_1 & X & O_1 \\ R_2 & & O_2 \end{array}$$

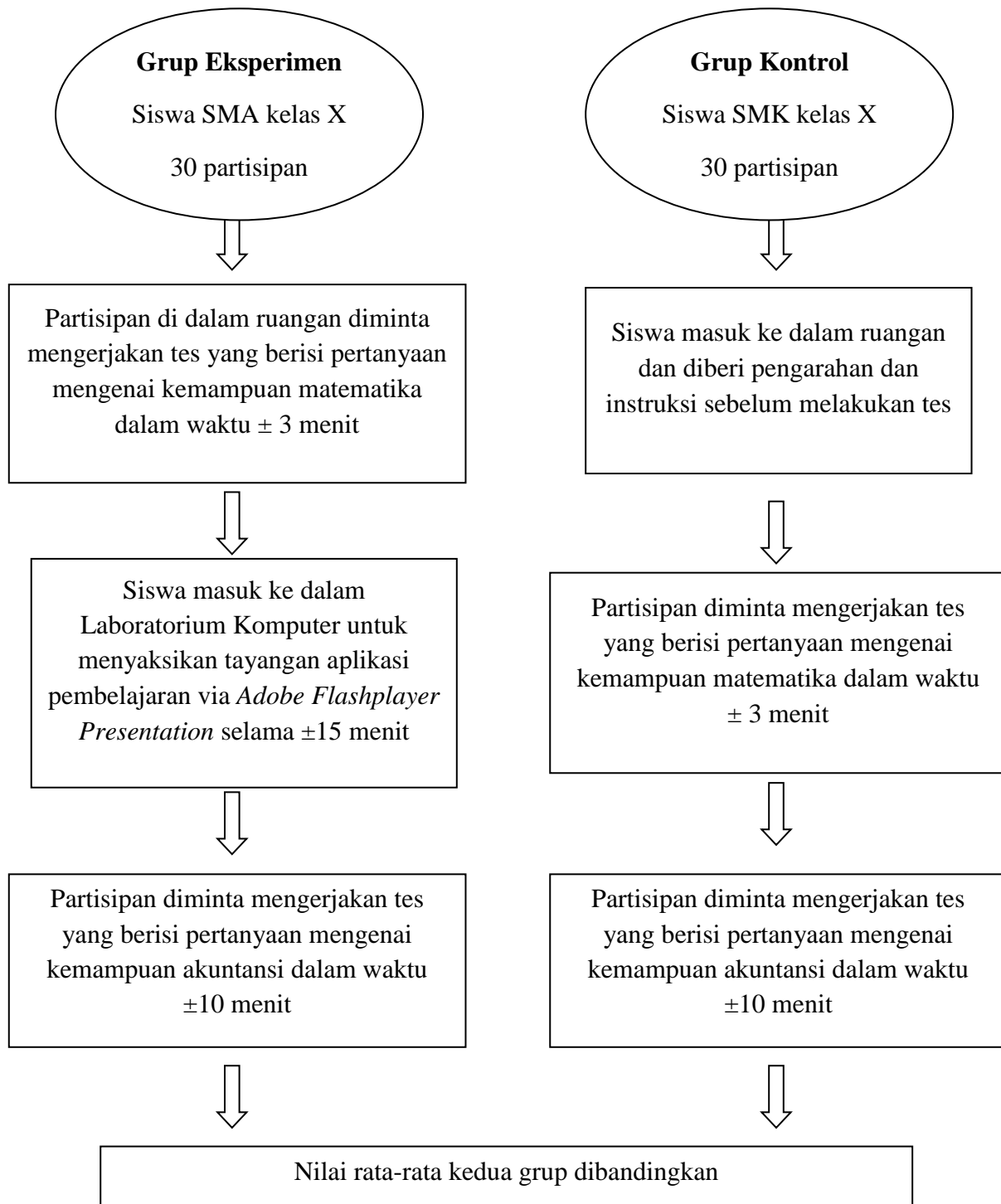
R mengindikasikan subyek penelitian yang ditempatkan secara tidak acak atau non-random ke dalam grup (Marczyk, 2005). Untuk mengukur tingkat ekuivalensi antara kedua grup dilakukan dengan membandingkan hasil uji awal kesepadanan grup, jika observasi uji awal sama diantara kedua kelompok maka terdapat lebih banyak alasan untuk mempercayai bahwa validitas internal dari eksperimen adalah baik (Cooper and Schindler, 2006). Berdasarkan kriteria tertentu, subjek di tempatkan sebagai grup eksperimen (R_1) dan grup kontrol (R_2). X menunjukkan kemunculan stimulus eksperimental (*treatment*) ke dalam grup, yaitu pembelajaran akuntansi pengantar dengan metoda berbasis matematika yang hanya diberikan kepada grup eksperimen. O mengidentifikasi pengukuran atau aktivitas observasi, dimana O_1 merupakan hasil pengukuran grup eksperimen dan O_2 merupakan hasil pengukuran grup kontrol. Efek eksperimental diukur dengan perbedaan antara O_1 dan O_2 .

Grup eksperimen (R_1) adalah siswa SMA kelas X di Bandar Lampung yang terpilih sebagai sampel, dengan kriteria Sekolah Menengah Atas kategori non-favorit. Peneliti juga memilih siswa yang berada pada kategori rata-rata sebagai subjek penelitian. Kriteria ini dimaksudkan untuk menghindari kecerdasan siswa yang terlalu tinggi serta untuk memastikan bahwa tayangan aplikasi pembelajaran akuntansi yang diberikan memang mudah dimengerti pada berbagai level siswa. Grup eksperimen akan diberi perlakuan khusus dengan menerapkan metoda berbasis matematika dalam mengajarkan persamaan dasar akuntansi, melalui

tayangan aplikasi pembelajaran *Adobe flashplayer presentation*. Proses pembelajaran akan dilakukan selama ± 15 menit.

Grup Kontrol (R_2) adalah siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Bandar Lampung, khususnya yang memiliki jurusan akuntansi. Grup kontrol adalah sekelompok siswa SMK jurusan akuntansi yang telah mendapatkan pengetahuan sebelumnya mengenai persamaan dasar akuntansi, melalui metoda pembelajaran akuntansi konvensional yang selama ini diterapkan. Langkah eksperimen dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Langkah Eksperimen



Metoda pembelajaran yang digunakan merupakan variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yakni metoda konvensional dan metoda berbasis matematika. Pemahaman siswa adalah variabel dependen. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana variabel metoda pembelajaran memberikan perbedaan terhadap variabel pemahaman

siswa. Variabel dependen (pemahaman siswa) diukur dengan teknik tes. Teknik tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau grup (Suharsimi, 2006:150). Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam tes diadaptasi dan dimodifikasi dari buku Akuntansi Pengantar untuk SMK yaitu *Modul Akuntansi 1A untuk SMK dan MAK KTSP 2008* (Dwi Harti, 2011) dengan total 15 pertanyaan. Untuk mengetahui kemampuan matematika yang dimiliki, peserta diminta menjawab 40 pertanyaan mengenai logika matematika dasar dalam waktu 3 menit.

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel yang dianggap dapat mempengaruhi hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Adanya pengaruh variabel selain variabel independen dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pengukuran (*error measurement*), oleh karena itu variabel ini perlu dikendalikan (Ghozali, 2008:10).

Variabel kontrol yang ditetapkan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kemampuan matematika partisipan, dilihat dari nilai rapor semester terakhir untuk mata pelajaran matematika dan hasil tes kemampuan matematika sederhana
- b. Jenis Kelamin

Variabel kontrol sengaja ditetapkan untuk memastikan bahwa hasil pemahaman siswa dalam pembelajaran akuntansi pengantar disebabkan semata-mata karena faktor metoda pembelajaran yang digunakan.

Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis, dengan membandingkan perbedaan rata-rata dari dua grup. Pengujian hipotesis menggunakan uji *independent group t-test*. Model ini dipilih karena peneliti mengambil sampel dua grup yang independen dan tidak berhubungan satu sama lain (Levin and Rubin, 2000; 496). Selanjutnya untuk mengukur variabel kontrol yang diperkirakan akan menyebabkan *error*

measurement, peneliti menggunakan *Analysis of Covariance* (ANCOVA). ANCOVA memungkinkan peneliti menghilangkan bagian dari *dependent variabel-variabel error variance* yang dapat diprediksi dari pengetahuan tentang variabel *covariate* sehingga dapat meningkatkan *power*, dan menyesuaikan variabel dependen agar terbebas dari pengaruh linear yang disebabkan oleh variabel kovariat/kontrol, yang pada akhirnya dapat meminimalisir bias dalam penelitian (Ghozali, 2008).

Manipulation Check

Manipulation Check adalah proses dimana pengamat memastikan bahwa partisipan telah masuk ke dalam perlakuan yang di inginkan (Campbell and Stanley ,1963:35). *Manipulation Check* dilakukan untuk menguji logis tidaknya suatu pertanyaan atau instruksi dalam eksperimen. Hasilnya dapat digunakan untuk menegaskan bahwa partisipan memahami tugas-tugas yang diberikan sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan berhasil. Dalam penelitian ini *Manipulation Check* dilakukan melalui pertanyaan yang akan diberikan ditengah tayangan video *adobe flashplayer*, pertanyaan tersebut adalah; Apakah Rumus Persamaan dasar Akuntansi? selanjutnya partisipan diharuskan menjawab pertanyaan tersebut dengan cara mengetikkan rumus persamaan dasar akuntansi yang telah ditayangkan dari slide sebelumnya. Jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut merupakan *password* untuk melanjutkan tayangan video *flashplayer*. Apabila jawaban salah, maka partisipan akan diberi kesempatan untuk mencoba lagi, ataupun mengulang tayangan sebelumnya agar bisa menjawab pertanyaan.

Populasi dan Sampel

Populasi subyek penelitian adalah siswa SMA kelas X di Bandar Lampung. Sampel diambil untuk menjadi subyek eksperimen. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan penetapan kriteria sebagai berikut;

1. Grup kontrol adalah siswa yang sedang mempelajari akuntansi pengantar dengan metoda konvensional, yakni siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan akuntansi kelas X. Peneliti memilih sekolah yang tergolong favorit untuk memastikan siswa yang terpilih menjadi partisipan adalah siswa yang memiliki pengetahuan cukup mengenai akuntansi pengantar.

2. Grup Eksperimen adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X yang belum pernah mempelajari akuntansi sebelumnya. Peneliti memilih sekolah yang non-favorit untuk menjadi partisipan grup eksperimen. Alasannya adalah, peneliti ingin memastikan bahwa aplikasi pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang dibuat benar-benar mudah dimengerti oleh seluruh kalangan siswa, mulai dari siswa yang berkemampuan dibawah rata-rata hingga siswa yang berkemampuan di atas atas rata-rata.

Kriteria penentuan sekolah favorit dan non-favorit didasarkan pada hasil akreditasi Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Propinsi Lampung. Sekolah yang dikategorikan favorit adalah yang mendapat akreditasi A atau B, sedangkan sekolah dengan kategori non-favorit adalah yang terakreditasi C ataupun tidak terakreditasi (TT).

Data hasil akreditasi tahun 2012 menunjukkan bahwa SMK BPK Penabur mendapat predikat B dengan nilai akreditasi 83, sedangkan SMA Perintis 2 Bandar Lampung masuk kedalam kategori sekolah Tidak Terakreditasi (TT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X (sepuluh) jurusan akuntansi SMK BPK Penabur Bandar Lampung sebanyak 30 siswa, sebagai partisipan grup kontrol. Sedangkan partisipan yang digunakan sebagai grup eksperimen adalah siswa kelas X (sepuluh) SMA Perintis 2 Bandar Lampung sebanyak 30 siswa. Karakteristik partisipan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik partisipan berdasarkan jenis kelamin

No	Keterangan	Grup Kontrol SMK BPK Penabur	Grup Eksperimen SMA Perintis 2	Jumlah	%
1	Jenis Kelamin				
	Laki-laki	13	11	24	40
	Perempuan	17	19	36	60
	Total	30	30	60	100

Sumber : Data yang diolah, 2013

Pelaksanaan Eksperimen

Penelitian terhadap grup kontrol dilakukan pada hari Jumat, 5 April 2013 bertempat di SMK BPK Penabur pukul 08.30-09.00 WIB. Sebanyak 30 siswa diminta untuk mengikuti penelitian dengan cara mengerjakan soal yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, peneliti dibantu oleh dua tenaga pengajar untuk mengarahkan serta mengondisikan partisipan agar penelitian dapat berjalan lancar dan sesuai harapan.

Teknis kegiatan diawali dengan mengisi bagian A yaitu daftar pertanyaan yang berisi data demografi partisipan, kemudian mengerjakan bagian B berisi tes kemampuan matematika yang terdiri dari 40 soal matematika sederhana dalam waktu 3 menit. Selanjutnya partisipan mengerjakan bagian C berisi tes kemampuan akuntansi sebanyak 16 soal dalam waktu 10 menit. Tes kemampuan akuntansi dibagi menjadi beberapa bagian seperti berikut;

1. Bagian C-1 berisi 6 pertanyaan berkaitan dengan kemampuan menempatkan akun pada sisi debet atau kredit.
2. Bagian C-2 berisi 5 pertanyaan mengenai penggolongan transaksi kedalam aktifitas penggunaan dana atau aktifitas perolehan dana.
3. Bagian C-3 berisi 5 pertanyaan mengenai kemampuan menganalisis transaksi dan menempatkan pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi.

Penelitian terhadap grup eksperimen dilakukan pada tanggal 11 April 2013 yang berlokasi di dua tempat yakni SMA Perintis 2 Bandar Lampung dan warung internet dungeon Jl. Chairil Anwar No 11 Bandar Lampung, pukul 10.00-12.00 WIB. Penelitian terhadap grup eksperimen memerlukan lokasi yang memiliki kelengkapan media seperti komputer dan *headphone* karena perlakuan yang diberikan adalah menyaksikan tayangan video pembelajaran akuntansi melalui aplikasi *adobe flashplayer*. Namun, fasilitas yang ada pada SMA Perintis 2 Bandar Lampung kurang memadai sehingga eksperimen tidak dapat dilakukan di laboratorium sekolah. Oleh karena itu, peneliti menggunakan warung internet dungeon yang berlokasi tidak jauh dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung (± 100 meter) untuk dijadikan lokasi eksperimen. Peneliti menggunakan ruangan *basement* yang berisikan 15 unit komputer lengkap dengan *headphone*. Oleh karena sampel yang dibutuhkan adalah 30 siswa, maka eksperimen dibagi menjadi dua sesi.

Grup eksperimen terdiri dari 20 orang siswa kelas X-2 dan 10 orang siswa kelas X-1. Teknis kegiatan diawali dengan meminta 15 orang siswa sesi pertama untuk mengisi daftar pertanyaan bagian A mengenai data partisipan dan dilanjutkan dengan tes kemampuan matematika selama 3 menit, kegiatan ini dilakukan di ruang kelas SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Kemudian partisipan dibawa menuju lokasi eksperimen yaitu warung internet dungeon dengan menggunakan angkutan umum yang telah disewa oleh peneliti. Setibanya di ruangan eksperimen, partisipan diminta untuk menyaksikan tayangan pembelajaran selama

15-20 menit, selanjutnya partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan bagian C mengenai kemampuan akuntansi dalam waktu 10 menit. Setelah selesai, partisipan sesi pertama dikembalikan ke sekolah dan dilanjutkan dengan eksperimen pada peserta sesi kedua. Untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam menyaksikan dan memperhatikan tayangan, peneliti memberikan *reward* sebesar Rp20.000 apabila partisipan dapat menjawab pertanyaan yang ada di tengah-tengah tayangan (*Manipulation Check*), kemudian untuk meningkatkan kesungguhan siswa dalam menjawab soal, peneliti memberikan *reward* Rp2.000 untuk setiap jawaban yang benar. Pemberian *reward* dilakukan dengan pandangan bahwa manusia sebagai makhluk homo ekonomikus, yaitu bahwa seseorang akan berupaya mengubah strategi atau pandangan untuk memperoleh nilai manfaat ekonomi yang lebih dari suatu keadaan atau situasi (Pradiptyo *et al.* 2011). Pada saat pelaksanaan eksperimen seluruh siswa pada sesi pertama dan kedua dapat menjawab pertanyaan *Manipulation Check*.

Deskripsi Kemampuan Awal Partisipan

Penelitian ini menetapkan beberapa variabel yang diduga mempengaruhi *causal effect* yaitu: kemampuan matematika, dan jenis kelamin. Cara yang digunakan untuk mengendalikan efek dari variabel kontrol adalah dengan teknik padanan sepasang (*pair-matching*). *Pair-matching* dilakukan dengan cara masing-masing item di grup eksperimen dipadankan dengan item di grup kontrol (Hartono, 2008) dan menyertakan variabel-variabel tersebut dalam uji statistik sehingga *causal effect* antara metoda pembelajaran dan prestasi belajar dapat diukur secara tepat apakah disebabkan oleh hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen ataukah ada faktor lain yang mempengaruhinya. Untuk menguji kesepadaan antara dua grup partisipan, dilakukan uji *independent sample-test* terhadap dua grup sampel yang tidak berhubungan. Hasil pengujian statistik dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Uji Kesepadanan Kemampuan Matematika berdasarkan Nilai Rapor

Kriteria	Grup Kontrol		Grup Eksperimen		Signifikansi (2-tailed)
	N	Rata-rata	N	Rata-rata	
Nilai Rapor	30	68,17	30	74,53	.000

Sumber : Data diolah SPSS 16.0

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui *level signifikansi* untuk kemampuan matematika yang diukur dengan nilai rapor adalah 0,000 ($<0,05$) sehingga keputusan uji yang diambil adalah menolak H_0 ($H_0 : \mu_1 = \mu_2$). Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan rata-rata nilai rapor antara grup eksperimen dan grup kontrol. Ketentuan penetapan nilai rapor pada setiap sekolah tergantung pada nilai Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) yang ditetapkan melalui kebijakan kepala sekolah dan dewan guru pada sekolah yang bersangkutan (Dewan Pembinaan SMA, 2011). Karena alasan di atas, peneliti berasumsi bahwa perbedaan rata-rata nilai rapor antara kedua grup kurang tepat apabila dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kemampuan matematika salah satu grup adalah lebih baik dibandingkan grup lain. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengujian kembali untuk mengukur kemampuan matematika dari masing-masing grup. Pengujian dilakukan dengan menjawab pertanyaan matematika sederhana sebanyak 40 soal selama 3 menit.

Hasil pengujian statistik dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Uji Kesepadanan Kemampuan Matematika berdasarkan Hasil Tes

Kriteria	Grup Kontrol		Grup Eksperimen		Signifikansi (2-tailed)
	N	Rata-rata	N	Rata-rata	
Hasil Tes	30	13,90	30	12,37	.153

Sumber : Data diolah SPSS 16.0

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui *level signifikansi* untuk kemampuan matematika yang diukur dengan nilai tes kemampuan matematika adalah 0,153 ($>0,05$) sehingga keputusan uji yang diambil adalah menerima H_0 ($H_0 : \mu_1 = \mu_2$). Hasil ini berarti bahwa secara statistik tidak

terdapat perbedaan rata-rata hasil tes antara grup eksperimen dan grup kontrol. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kemampuan matematika kedua grup adalah sepadan.

Analisis Hasil Pengujian

Pengujian H_1 menggunakan *Two independent sample t-test* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Hasil *Two independent sample t-test* untuk Kemampuan Penempatan Akun di sisi Debet atau Kredit

Metoda Pembelajaran	Group Statistic			t-test for Equality of Means		
	N	Mean	Std.Dev	t	Sig.(2-tailed)	Mean Diff.
Konvensional	30	3,97	1,189	-.987	.328	-.333
Matematika	30	4,30	1,418			

Sumber : Data diolah SPSS 16.0

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa nilai rata-rata grup kontrol yang menggunakan metoda konvensional adalah 3,97. Sedangkan nilai rata-rata grup eksperimen yang menggunakan metoda berbasis matematika adalah 4,30.

Hasil uji memberikan gambaran bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata grup yang menggunakan metoda konvensional dengan grup yang menggunakan metoda berbasis matematika dalam pembelajaran akuntansi. Walaupun secara statistik tidak ditemukan cukup bukti untuk mendukung hipotesis yang diajukan oleh peneliti, namun jika membandingkan secara langsung nilai rata-rata antara kedua grup pada tabel 4.4 (kolom *mean difference*), jelas terlihat bahwa terdapat rata-rata sebesar 0,333 antara kedua grup. Rata-rata nilai grup yang menggunakan metoda berbasis matematika lebih tinggi dibandingkan nilai grup yang menggunakan metoda konvensional dalam kompetensi penempatan akun pada sisi debet atau kredit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metoda matematika lebih baik dalam menjelaskan konsep debet dan kredit dibandingkan metoda konvensional meskipun tidak secara signifikan.

Pengujian H_1 menggunakan *Two independent sample t-test* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil *Two independent sample t-test* untuk Kemampuan Analisis Transaksi dan Identifikasi Pengaruhnya terhadap Persamaan Dasar Akuntansi

Metoda Pembelajaran	Group Statistic			t-test for Equality of Means		
	N	Mean	Std.Dev	t	Sig.(2-tailed)	Mean Diff.
Konvensional	30	1,87	1,358	1,009	.317	.333
Matematika	30	1,53	1,196			

Sumber : Data diolah SPSS 16.0

Hasil yang hampir sama juga terlihat dalam pengujian statistik untuk hipotesis yang ditawarkan dalam penelitian mengenai kemampuan siswa dalam mengidentifikasi pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nilai signifikansi 1.009 ($p > 0,05$) menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan signifikan pada nilai rata-rata kedua grup. Namun hasil yang sedikit berbeda tampak pada kolom means kedua grup, dimana nilai rata-rata metoda konvensional lebih tinggi dibandingkam metoda matematika walaupun tidak secara signifikan. Hal ini menunjukkan keadaan yang juga tidak mendukung hipotesis yang ditawarkan bahkan bertolak belakang. Peneliti berasumsi bahwa hal tersebut terjadi karena alasan berikut:

1. Di dalam mempelajari materi analisis transaksi diperlukan waktu tatap muka minimal 1x 45 menit, karena materi ini mengharuskan siswa untuk terlebih dahulu memahami karakteristik transaksi dengan mengerjakan soal latihan secara langsung dan berulang. Sedangkan pada saat pelaksanaan eksperimen, peserta hanya memiliki waktu ± 15 menit untuk menyaksikan tayangan simulasi pengerjaan soal analisis transaksi dan identifikasi pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi, sehingga pemahaman yang didapat oleh siswa tidak secara mendalam.
2. Penurunan konsentrasi siswa yang terjadi saat pelaksanaan eksperimen. Sesi pertama pelaksanaan eksperimen dimulai pada pukul 10.00 WIB, sedangkan untuk sesi kedua

eksperimen dimulai pada pukul 11.00 WIB. Penundaan selama ± 10 menit terjadi pada sesi kedua dikarenakan daya listrik warnet mengalami penurunan yang membuat seluruh komputer tidak dapat dihidupkan. Hal ini menyebabkan antusiasme partisipan sedikit menurun. Kondisi ini terbukti pada saat pemberian instruksi oleh tim eksperimenter, sebagian peserta kurang fokus dan kurang memahami instruksi.

Kejadian ini merupakan ancaman bagi validitas internal eksperimen, yaitu pengaruh *maturation*. Pengaruh *maturation* adalah pengaruh yang terjadi karena faktor perubahan kematangan biologis ataupun psikologis dalam rentang waktu pelaksanaan eksperimen (Campbell & Stanley, 1963:5). Peneliti mencoba mengeliminir pengaruh tersebut dengan mempersingkat waktu pelaksanaan eksperimen dalam waktu 30 menit dan tidak terdapat jeda yang panjang pada masing-masing tahapan. Namun, penundaan yang terjadi di lapangan tidak dapat dikendalikan oleh peneliti sehingga menyebabkan psikologis siswa berubah ditandai dengan menurunnya antusiasme siswa dalam melaksanakan eksperimen. Peneliti menduga hal ini telah memberikan pengaruh pada pelaksanaan eksperimen sesi kedua, yang menyebabkan nilai rata-rata siswa lebih rendah dibandingkan pada kelompok siswa sesi pertama.

c. *Analysis of Covariance* (ANCOVA)

Variabel kontrol yang ditetapkan oleh peneliti antara lain jenis kelamin, nilai rapor matematika semester terakhir, serta nilai tes kemampuan matematika sederhana. Untuk dapat melihat secara keseluruhan pengaruh variabel kontrol terhadap *causal effect* antara metoda pembelajaran dan prestasi belajar, peneliti menampilkan hasil perhitungan statistik ANCOVA sebagai berikut:

Tabel 4.6 Levene's Test of Equality of Error Variances

F	Df1	Df2	Sig.
.659	1	58	.454

Hasil uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 0,659 dan probabilitas 0,454 ($p > 0,05$) yang berarti hipotesis null diterima dimana varians kedua grup adalah sama (sesuai dengan asumsi ANCOVA).

Tabel 4.7 Hasil uji Test of Between-Subject Effect

Dependent variabel : Total_Skor

Source	Type Sum of Square	Df	Means Square	F	Sig
Corrected Model	1178.581 ^a	4	294.645	1.400	.246
Intercept	272.637	1	272.637	1.295	.205
Metoda	651.887	1	651.887	3.096	.084
Jenis Kelamin	110.721	1	110.721	.526	.471
Nilai Rapor	44.809	1	44.809	.213	.646
Tes Matematika	138.210	1	138.210	.656	.421
Error	11579.232	55	210.531		
Total	233281.250	60			
Corrected Total	12757.812	59			

a. R Squared = .092 (Adjusted R Squared = .026)

Sumber : Data diolah SPSS 16.0

Hasil pengujian ANCOVA bahwa ketiga variabel kontrol yang ditetapkan yaitu jenis kelamin, nilai rapor, dan tes matematika tidak berpengaruh signifikan terhadap total skor. Hasil ini terlihat pada nilai signifikansi dari ketiga variabel yang lebih besar dari 0,05, dimana jenis kelamin memiliki nilai signifikansi 0,471 sedangkan nilai rapor dan tes matematika masing-masing memiliki nilai signifikansi 0,646 dan 0,421. Jadi dapat disimpulkan bahwa total skor yang didapat dalam penelitian hanya dipengaruhi oleh penggunaan metoda pembelajaran sebagai variabel independen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis hasil pengujian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kemampuan siswa dalam menempatkan akun pada sisi debit ataupun kredit akan lebih baik jika menggunakan metoda berbasis matematika dibandingkan menggunakan metoda pembelajaran konvensional tidak dapat didukung. Hal ini dikarenakan tidak terdapat bukti statistik yang cukup dalam penelitian untuk menolak hipotesis null.

Hipotesis selanjutnya yang dibangun dalam penelitian menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam menganalisis transaksi kemudian mengidentifikasi pengaruhnya pada persamaan dasar akuntansi akan lebih baik jika menggunakan metoda pembelajaran berbasis matematika dibandingkan metoda pembelajaran konvensional juga tidak didukung secara statistik. Hasil uji merujuk pada keputusan yang sama bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kedua grup.

Meskipun hipotesis tidak didukung, namun nilai rata-rata kedua grup yang tidak berbeda secara signifikan membuktikan bahwa metoda pembelajaran matematika masih dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pembelajaran akuntansi. Pernyataan tersebut didukung oleh fakta bahwa kemampuan siswa kelas X SMA perintis 2 Bandar Lampung yang belum pernah mendapat pembelajaran akuntansi, dan hanya mendapatkan pengajaran selama ± 15 menit melalui *tayangan Adobe Flashplayer presentation* dapat disejajarkan dengan kemampuan siswa kelas X jurusan akuntansi SMK BPK Penabur yang telah mempelajari akuntansi pengantar selama ± 1 tahun. Namun untuk lebih memastikan hal tersebut, tentunya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi keefektifan metoda alternatif ini.

Keterbatasan dalam Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, beberapa keterbatasan yang telah teridentifikasi antara lain:

1. Perbedaan lokasi eksperimen. Pelaksanaan eksperimen pada dua lokasi yang berbeda antara kedua grup dapat memberikan perbedaan kenyamanan serta konsentrasi yang selanjutnya akan mempengaruhi jawaban partisipan. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria penelitian eksperimen yang mengharuskan peneliti untuk menyediakan situasi dan kondisi yang sama antara kedua grup sebagai salah satu cara untuk mempertahankan ekuivalensi kelompok.
2. Penyampaian materi pembelajaran yang hanya dilakukan secara singkat dengan menggunakan aplikasi *Adobe Flashplayer Presentation* menjadi kurang tepat ketika peneliti ingin mengukur pemahaman tingkat mendalam seperti kemampuan untuk menganalisis transaksi.
3. Di dalam penelitian ini peneliti kurang tepat dalam mengambil sampel yang sesuai dengan kriteria desai eksperimen. Sampel seharusnya diambil dari satu populasi, namun di dalam penelitian ini digunakan dua populasi yaitu siswa SMA dan siswa SMK. Hal tersebut menimbulkan bias terhadap hasil penelitian.

Saran

Dengan berbagai keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti berharap bahwa penelitian lebih lanjut mengenai metode pembelajaran alternatif akuntansi berbasis dapat terus dilakukan untuk memperbaiki penelitian ini. Beberapa saran bagi penelitian selanjutnya antara lain:

1. Eksperimen harus dilaksanakan pada lokasi yang sama agar tidak menimbulkan perbedaan psikologis partisipan pada masing-masing grup. Penggunaan satu lokasi eksperimen juga dapat memungkinkan peneliti untuk mengendalikan dengan baik berbagai aspek yang dapat mempengaruhi psikologi partisipan terutama dalam hal konsentrasi.
2. Pemberian materi dengan cara tatap muka dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama akan lebih baik untuk diterapkan karena siswa dapat memahami secara lebih mendalam mengenai konsep dasar akuntansi pengantar terutama dalam hal analisis transaksi.
3. Sampel harus diambil dari satu populasi yang sama, seperti membandingkan dua kelompok siswa SMA atau membandingkan dua kelompok siswa SMK. Hal ini diperlukan untuk memperkuat validitas eksperimen sehingga hasil penelitian menjadi lebih reliabel.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Saikhul M. 2011. *Penelitian Kuantitatif dalam Teknologi Pembelajaran. Jurnal Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*

Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Propinsi Lampung. Hasil Akreditasi. April 2012. Badan Akreditasi Nasional. April 2013. <http://www.ban-sm.or.id/provinsi/lampung/akreditasi>

Brown, AL and Campione . 1996. Relationships of goal orientation, metacognitive activity, and practice strategies with learning outcomes and transfer. *Journal of Applied Psychology* Vol 83(2), Apr 1998, 218-233.

Campbell, D. and J. Stanley. 1963. *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research*, Boston, MA: Houghton Mifflin Company.

Cooper, D and P. S. Schindler. 2011. *Business Research Methods*, 11th Edition. McGraw-Hill

Dewan Pembinaan SMA. 2010. *Juknis Penetapan Nilai KKM di SMA*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta

- Diller-Haas, A. 2004. Time to Change Introductory Accounting. *The CPA Journal* Vol. LXXIV, No. 4: 453-470
- Dimiyati dan Mudjiono. 2002. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dwi Harti. 2011. *Modul Akuntansi IA untuk SMK dan MAK*. Jakarta: Erlangga
- Endarmoko,Eko. 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama
- Ghozali, Imam. 2008. *Desain Penelitian Eksperimental : Teori Konsep dan Analisis Data dengan SPSS 16.0*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hartono, J. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah kaprah dan Pengalaman Pengalaman*. Yogyakarta : BPFPE.
- Hartono, J. 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta :Penerbit Andi.
- Ingram, R. W. 1998. A Note on Teaching Debits And Credits In Elementary Accounting. *Issues in Accounting Education* Vol. 13, No. 2: 411–415.
- Innes, Robert B. 2004. *Reconstructing undergraduate education: using learning science to design effective courses*. Lawrence Earlbaum Associates Publisher
- Iskandarsyah, Donny, dan Imam Ghozali. 2012. *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PRESTASI MAHASISWA DALAM MEMPELAJARI MATAKULIAH AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH (Studi empiris pada mahasiswa Jurusan Akuntansi Reguler di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro tahun angkatan 2009 dan 2010)*. Disertasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unversitas Diponegoro, 2012.
- Levin, R and Rubin, D. 2000.*Statistic for Management*. Prentice Hall
- Marczyk, G.R. 2005. *Essentials of Research Design and Methodology*, Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
- Morrison, Gary R., Steven M. Ross, and Jerrold E. Kemp. (2004). *Design effective instruction, (4th Ed.)*. New York: John Wiley and Sons
- Muijs, Daniel and Reynolds, David. 2011. *Effective teaching: evidence and practice. Third edition*.London, GB : Sage
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nauli,Pigo. 2011. Perbandingan Metoda Pembelajaran Akuntansi Pengantar antara Metoda Konvensional dan Metoda Berbasis Matematika terhadap Prestasi dan Kepuasan Belajar. *Simposium Nasional Akuntansi 14*. Aceh

- Patten, R.J. and D.Z. Williams. 1990. There's Trouble-Right Here in Our Accounting Programs: The Challenge to Accounting Educators. *Issues in Accounting Education*. Vol.5, No.2:175-179.
- Philips, F. and L. Carter-Squire. 2009. An Eksperiment Examining the Effects of Transaction Scope and Accounting Equation Emphasis on Student Learning to Journalize.
- Pincus, K. V. 1997. Is Teaching Debits And Credits Essential In Elementary Accounting? *Issues in Accounting Education* Vol. 12, No. 2: 575–579.
- Poedjiadi, Anna. 2005. *Sains Teknologi Masyarakat: Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai*. Jakarta : Rosda
- Pradiptyo, R, B. Sasmitasiwi and G. A. sahadewo. 2011. Evidence of Homo Economicus? Finding From Experiment on Evaluatory Prisoners' Dilemma Game. SSRN.
- Rankin, M., M. Silvester, M. Valley, and Wyatt. 2003. An Analysis of the implication of diversity for students' first level accounting performance. *Accounting and Finance* Vol. 43: 365-393
- Rukmini Sri. 1998. *Psikologi Umum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Salim, Peter dan Salim, Yenni. 2002. *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*. Jakarta. Modern English Press.
- Sangster, A., G. N. Stoner and P. A. McCarthy. 2007. Lessons for the Classroom From Luca Pacioli. *Issues in Accounting Education* Vol. 22, No.3: 447-457
- Sanjaya, Wina. 2009. *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Prenada Media Group
- Saudagaran, S. M. 1996. The First Course in Accounting: An Innovative Approach, *Issues in Accounting Education* Vol. 11, No. 1: 83–94.
- Springer, C. W. and A. F. Borthick. 2004. Business Simulation To Stage Critical Thinking in Introductory Accounting: Rationale, Design, and Implementation. *Issues in Accounting Education* Vol. 19, No. 3: 277–303
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Suwardjono. 2002. *Akuntansi Pengantar Bagian 1 Proses Penciptaan Data Pendekatan sistem*. Yogyakarta: BPFE.
- Tulus. 2004. *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. Jakarta : Grasindo.
- Utami, Aprilia Dewi, Robiatul Auliyah, dan Nurul Herawati. 2010. Tafsir Ujian Komprehensif Menurut Civitas Akademik Universitas Trunojoyo. Simposium Nasional Akuntansi 13. Purwokerto

Warsono-Bin-Hardono, S, A. Darmawan, dan M. A. Ridho. 2009. *Akuntansi Pengantar I Berbasis Matematika siklus Akuntansi di Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur*. Asgard Chapter.

Warsono-bin-Hardono, S, A. Darmawan, dan M. A. Ridho. 2009. Using Mathematics To Teach Accounting Principles. *American Accounting Association San Antonio Texas, USA dan Asian Academic Accounting Association Conference*. Istanbul, Turkey.

Warsono-bin-Hardono, S. 2010. *Reformasi Akuntansi; Membongkar Bounded Rationality Pengembangan Akuntansi*. Asgard Chapter.